WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 312 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 2023
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 312 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2023

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA
2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang disusun terkadang merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya, namun ada beberapa yang baru atau sifatnya inovatif.

Setelah melalui proses pelaksanaan kegiatan selama satu semester tahun 2023, dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kerangka ekonomi daerah seperti pada tabel 1.1 berikut maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja satu tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KOTA YOGYAKARTA

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		PAGU ANGGARAN		SELISIH	KETERANGAN
		MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**233,940,061,668**	**235,693,560,366**	**1,753,498,698**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**68,660,000**	**49,619,800**	**(19,040,200)**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	11,461,400	3,745,000	**(7,716,400)**	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	7,760,800	7,760,800	-	
Koordinasi dan PenyusunaN Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	2 dokumen	2 dokumen	7,760,800	6,025,750	**(1,735,050)**	

	SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	7,760,800	5,160,000	**(2,600,800)**	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	7,760,800	4,592,500	**(3,168,300)**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 laporan	2,738,000	2,030,000	**(708,000)**	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 laporan	23,417,400	20,305,750	**(3,111,650)**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**227,472,917,400**	**229,121,606,400**	**1,648,689,000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2230 Orang/bulan	2297 orang/bulan	227,246,977,400	228,897,351,400	**1,650,374,000**	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	11,060,000	11,060,000	-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5,280,000	5,600,000	**320,000**	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10,800,000	10,500,000	**(300,000)**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	3,400,000	3,000,000	**(400,000)**	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,360,000	**360,000**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	191,400,000	190,055,000	**(1,345,000)**	
Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	680,000	**(320,000)**	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**22,500,000**	**22,500,000**	-	

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,750,000	3,750,000	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,750,000	3,750,000	-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	3,750,000	3,750,000	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	3,750,000	3,750,000	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	3,750,000	3,750,000	-	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 laporan	3,750,000	3,750,000	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3,750,000	3,750,000	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	3,750,000	3,750,000	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,057,914,494	1,074,405,684	**16,491,190**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 paket	36 paket	80,095,250	74,723,850	**(5,371,400)**	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	60 paket	241,666,094	234,649,084	**(7,017,010)**	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 paket	36 paket	69,333,950	77,985,050	**8,651,100**	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 paket	2 paket	43,259,200	62,587,700	**19,328,500**	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	25,760,000	26,660,000	**900,000**	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83 laporan	83 laporan	597,800,000	597,800,000	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				548,681,305	548,681,305	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	100 unit	548,681,305	548,681,305	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,149,295,700	1,169,153,908	**19,858,208**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	5 Laporan	131,111,000	130,061,000	**(1,050,000)**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	5 Laporan	55,200,000	55,200,000	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	5 Laporan	962,984,700	983,892,908	**20,908,208**	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,616,342,769	3,703,843,269	**87,500,500**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 unit	75 unit	217,732,500	289,233,500	**71,501,000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	236,782,000	259,522,000	**22,740,000**	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	225 unit	225 unit	368,940,000	378,940,000	**10,000,000**	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	2,792,888,269	2,776,147,769	**(16,740,500)**	
						-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				220,084,347,152	232,342,372,619	**12,258,025,467**	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				172,044,757,401	191,701,945,119	**19,657,187,718**	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				87,295,074,502	96,727,345,941	**9,432,271,439**	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 ruang	125,136,004	100,721,004	**(24,415,000)**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	1 Ruang	1 ruang	262,614,500	111,066,000	**(151,548,500)**	pergeseran untuk pengadaan mebel

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	3 unit	3 unit	412,465,475	406,101,868	**(6,363,607)**	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	6 ruang	6 ruang	1,339,552,000	1,070,668,861	**(268,883,139)**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	4 ruang	441,340,000	301,823,000	**(139,517,000)**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	2 ruang	121,204,040	72,876,000	**(48,328,040)**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	1 ruang	124,567,000	79,186,000	**(45,381,000)**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	13 Unit	13 unit	3,682,467,000	3,671,196,829	**(11,270,171)**	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1119 Paket	1045 paket	1,512,150,000	2,013,085,000	**500,935,000**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5600 Peserta Didik	5093 Peserta Didik	5,781,687,000	9,091,718,000	**3,310,031,000**	JPD full untuk 2 semester, anggaran murni baru di anggarkan 1 semester
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	384,123,001	384,123,001	-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	90,900,000	90,900,000	-	

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	95 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	320,998,750	320,998,750	-	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	1,481,513,500	1,111,726,500	**(369,787,000)**	Efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	308,332,000	281,940,000	**(26,392,000)**	Efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	1,023,837,284	808,220,000	**(215,617,284)**	penyesuaian kebutuhan anggaran, ada kejuaraan yang th ini tidak dilaksanakan (LKMMS) dan beberapa kegiatan msh online
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (UPT Unit Layanan Disabilitas Resource Centre)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	156 orang	156 orang	4,456,059,000	4,456,059,000	-	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	165 Satuan Pendidikan	165 satuan Pendidikan	306,279,248	306,279,248	-	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	165 Satuan Pendidikan	165 satuan Pendidikan	38,994,542,000	38,994,542,000	-	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	19809 Orang	31080 orang	24,510,533,200	31,542,272,750	**7,031,739,550**	Anggaran Bosda ful untuk 1 tahun dari 800.000 menjadi 1.000.000 untuk SD

	Sekolah Dasar						
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	1 Ruang	1 ruang	225,078,000	154,644,000	**(70,434,000)**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 ruang	269,909,000	166,020,000	**(103,889,000)**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	8 konten digital	8 konten digital	1,119,786,500	1,191,178,130	**71,391,630**	Kegiatan grebek sinau di Perubahan menambah 2 kali
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				61,233,166,150	69,448,035,565	**8,214,869,415**	
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 unit	3 ruang	1,658,961,400	1,534,646,780	**(124,314,620)**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	2 unit	695,920,375	695,920,375	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 unit	820,287,000	816,581,450	**(3,705,550)**	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	680 Paket	556 paket	815,780,000	937,280,000	**121,500,000**	pergeseran untuk pengadaan mebel
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5992 Peserta Didik	5992 peserta didik	8,603,250,000	11,902,250,000	**3,299,000,000**	JPD full untuk 2 semester, anggaran murni baru di anggarkan 1 semester
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	83 Paket	72 paket	721,140,000	720,390,000	**(750,000)**	

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	111 Paket	101 paket	1,873,220,000	1,870,860,000	**(2,360,000)**	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	24024 Peserta Didik	24024 Peserta Didik	368,790,000	348,448,368	**(20,341,632)**	Efisiensi sewa Software untuk latihan asesmen sesuai realisasi
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	65 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	250,483,000	250,483,000	-	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	1,184,275,375	962,875,375	**(221,400,000)**	ada beberapa kegiatan lomba diselenggarakan secara online
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	59 Satuan Pendidikan	59 satuan pendidikan	118,679,000	94,199,000	**(24,480,000)**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,776,060,000	2,035,587,791	**259,527,791**	silpa BOSN dan BOSDA 1.750.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,591,200,000	1,905,024,073	**313,824,073**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,347,840,000	1,522,192,860	**174,352,860**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,111,500,000	1,256,835,892	**145,335,892**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	2,173,860,000	2,451,227,141	**277,367,141**	

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,591,200,000	1,798,200,338	**207,000,338**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,357,200,000	1,532,700,000	**175,500,000**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	2,227,680,000	2,540,408,516	**312,728,516**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,539,720,000	1,749,680,019	**209,960,019**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,678,440,000	1,890,003,237	**211,563,237**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,067,700,000	1,193,822,675	**126,122,675**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,296,360,000	1,462,560,424	**166,200,424**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,006,340,000	1,152,653,974	**146,313,974**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,058,340,000	1,181,670,437	**123,330,437**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	2,337,660,000	2,668,342,760	**330,682,760**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	1,579,500,000	1,908,711,080	**329,211,080**	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	41 Satuan Pendidikan	41 satuan pendidikan	13,196,980,000	13,196,980,000	-	

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5154 Orang	5245 orang	6,184,800,000	7,867,500,000	**1,682,700,000**	Anggaran Bosda ful untuk 1 tahun dari 1.000.000 menjadi 1.750.000 untuk SMP
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini				17,782,891,000	19,326,937,863	**1,544,046,863**	
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 unit	649,100,000	581,753,863	**(67,346,137)**	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	763 Peserta Didik	1053 Peserta Didik	1,196,600,000	1,683,500,000	**486,900,000**	JPD full untuk 2 semester, anggaran murni baru di anggarkan 1 semester
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan perga PAUD yang tersedia	9 unit	18 paket	152,380,000	152,380,000	-	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16232 Peserta Didik	16232 peserta didik	2,813,060,000	2,517,385,000	**(295,675,000)**	Insentif Pendidik PAUD yang berhak menerima
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	224 Satuan Pendidikan	224 satuan pendidikan	3,292,745,000	4,712,913,000	**1,420,168,000**	BOSDA TK/RA swasta yang semula @12.500.00 menjadi @ 20.000.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	691 Satuan Pendidikan	691 satuan pendidikan	8,779,006,000	8,779,006,000	-	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	900 Orang	900 orang	900,000,000	900,000,000	-	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Non Formal/Kesetaraan				5,733,625,750	6,199,625,750	**466,000,000**	

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	955,000,000	1,460,500,000	**505,500,000**	JPD full untuk 2 semester, anggaran murni baru di anggarkan 1 semester
Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1803 Peserta Didik	1803 peserta didik	960,065,750	920,565,750	**(39,500,000)**	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	120 orang	433,350,000	433,350,000	-	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	16 satuan pendidikan	2,339,190,000	2,339,190,000	-	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	251 Orang	251 orang	1,046,020,000	1,046,020,000	-	
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN				48,039,589,750	40,640,427,500	**(7,399,162,250)**	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				48,039,589,750	40,640,427,500	**(7,399,162,250)**	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8 Dokumen	8 dokumen	22,641,718,750	19,160,510,750	**(3,481,208,000)**	151 PTT per juli diangkat sebagai PPPK

Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Laporan	3 laporan	25,397,871,000	21,479,916,750	**(3,917,954,250)**	penyesuaian penerima insentif untuk PTT/TKTT dan 6 dari naban guru diangkat sebagai PPPK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**21,850,543,086**	**22,297,443,021**	**446,899,935**	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				**3,424,347,800**	**3,505,552,800**	**81,205,000**	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				**3,028,349,680**	**3,118,579,680**	**90,230,000**	
Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	25 orang	113,830,000	111,830,000	**(2,000,000)**	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4315 Orang	4315 orang	232,100,000	232,100,000	-	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	19860 Orang	19860 orang	616,764,680	710,844,680	**94,080,000**	**LBB s.d tingkat propinsi dan publikasi kegiatan di media cetak dan elektronik,rencana narsum Pk sekda**
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	45815 Orang	45815 orang	563,610,000	561,760,000	**(1,850,000)**	**keg Gelar Pelajar tambah 1kl, mengakomodir kegiatan hakordia (hari anti korupsi sedunia)**
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	46 Orang	46 orang	1,502,045,000	1,502,045,000	-	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**395,998,120**	**386,973,120**	**(9,025,000)**	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	3 Dokumen	395,998,120	386,973,120	**(9,025,000)**	

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				**18,147,260,286**	**18,512,955,221**	**365,694,935**	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**526,063,580**	**526,063,580**	-	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	12 unit	526,063,580	526,063,580	-	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1,459,203,690**	**1,160,378,000**	**(298,825,690)**	
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 dokumen	636,496,000	697,628,000	**61,132,000**	**Kegiatan dari POR Propinsi, di sebelumnya blm ada,th kmrn mandiri th ini tersentral di propinsi,anggaran dr kemenpora**
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 Orang	300 orang	822,707,690	462,750,000	**(359,957,690)**	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				**3,037,253,500**	**3,303,860,000**	**266,606,500**	

Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	300 orang	1,724,436,000	1,587,997,000	**(136,439,000)**	**ada cabor yang kuotanya tidak terpenuhi sehingga anggaran sisa**
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	219 Orang	219 orang	1,244,045,500	1,649,491,000	**405,445,500**	**Try Out SPOM dilaksanakan di ragunan , bentuk evaluasi dari pelatihan anggaran ditanggung bersama dari peserta msg2 daerah**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 dokumen	68,772,000	66,372,000	**(2,400,000)**	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				**10,396,952,750**	**10,870,931,750**	**473,979,000**	
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1 Dokumen	7,103,000	7,103,000	-	
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	2 Organisasi	10,389,849,750	10,863,828,750	**473,979,000**	**Kegiatan KONI yaitu Walikota Cup**
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				**2,727,786,766**	**2,651,721,891**	**(76,064,875)**	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 dokumen	1,149,480,000	1,107,740,000	**(41,740,000)**	

Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 laporan	297,444,720	297,444,845	**125**	
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	8 unit	1,034,434,046	1,000,109,046	**(34,325,000)**	
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	1 dokumen	246,428,000	246,428,000	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				**278,935,000**	**278,935,000**	-	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				**278,935,000**	**278,935,000**	-	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	2 Organisasi	278,935,000	278,935,000	-	
TOTAL ANGGARAN				**475,874,951,906**	**490,333,376,006**	**14,458,424,100**	

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib dan bidang pemuda dan olahraga.
b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
c. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, sehingga target indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai maksud/tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2023

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan;
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan;
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	2.28 nilai
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	1.98 nilai
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.43 nilai
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.10 nilai
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpasrtisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Angka Partisipasi Kasar SD	98.79%
		Angka Partisipasi Murni SD	98.37%
		Angka Partisipasi Kasar SMP	97.11 nilai
		Angka Partisipasi Murni SMP	90.24 nilai
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.66%
3	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	96%
4	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar /Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%**	**114,08 %**	**0,00**	**99,97 %**	**0,00**	**111,98 %**	**0,00**	**111.98%**	**0,00**	**99.97%**	**40.524.266.695,00**	**89.27%**	**0,00%**					**Bidang SMP**	
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%**	**106,34 %**	**0,00**	**99,99 %**	**0,00**	**105,96 %**	**0,00**	**105.96**	**0,00**	**99.99**	**0,00**	**94,37%**	**0,00%**					**Bidang SD**	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	**Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B / Jumlah Satuan PAUD x100%**	**93,60 %**	**0,00**	**78,00 lembaga**	**0,00**	**90,90 %**	**0,00**	**90.9**	**0,00**	**78 lembaga**	**0,00**	**85,81%**	**0,00%**					**Bidang Dikmas PAUD**	
			Persentase Kelulusan warga belajar	**Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%**	**93,35 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**93,20 %**	**0,00**	**93.2**	**0,00**	**100**	**0,00**	**107,30%**	**0,00%**					**Bidang Dikmas PAUD**	
			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	**(jumlah sekolah dasar yang terakreditasi / jumlah total sekolah dasar) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**92,12 %**	**0,00**	**98,78 %**	**0,00**	**98.78**	**0,00**	**92.12**	**0,00**	**93,26%**	**0,00%**					**Bidang SD**	
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	**(jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi / jumlah total sekolah menengah pertama) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**77,19 %**	**0,00**	**98,30 %**	**0,00**	**98.3**	**0,00**	**77.19**	**0,00**	**78,52%**	**0,00%**					**Bidang SMP**	

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																							
		1	Penambahan Ruang Kelas Baru				0,00		0,00		101.646.004,00	62,01%	63.030.502,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang		0 Ruang		0 Ruang		1 Ruang		62,01%		0,40%		0,65%								
		2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00		0,00		169.235.500,00	82,38%	139.422.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah perpustakaan sekolah yang		0 Ruang		0 Ruang		1 Ruang		82,38%		2,00%		2,43%								
		3	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		0,00		412.465.475,00	50,76%	209.387.048,00	0,00%	440.000,00	0,00%	0,21%								
				Jumlah SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun		0 Unit		0 Unit		3 Unit		50,76%		0,40%		0,79%								
		4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				0,00		0,00		1.244.836.000,00	62,49%	777.876.000,00	0,00%	1.220.000,00	0,00%	0,16%								
				Jumlah Ruang Kelas yang		0 Ruang		0 Ruang		6 Ruang		62,49%		0,20%		0,32%								
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		0,00		390.886.000,00	58,62%	229.118.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		0 Ruang		0 Ruang		4 Ruang		58,62%		0,00%		0,00%								
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		0,00		100.112.040,00	63,83%	63.898.240,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		0 Ruang		0 Ruang		2 Ruang		63,83%		0,00%		0,00%								
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0,00		0,00		81.086.000,00	76,38%	61.933.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang		0 Ruang		1 Ruang		76,38%		0,00%		0,00%								
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		0,00		3.682.467.000,00	13,80%	504.750.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		13 Unit		13,80%		0,00%		0,00%								
		9	Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		0,00		2.013.085.000,00	0,58%	11.700.000,00	0,00%	10.200.000,00	0,00%	87,18%								
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		0 Unit		0 Unit		1.045 Unit		0,00%		0,72%		0,00%								
		10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah				0,00		0,00		5.781.687.000,00	84,98%	4.768.522.000,00	0,00%	3.063.002.000,00	0,00%	64,23%								
				Jumlah peserta didik SD yang		0 orang		0 orang		5.600 orang		0,00%		83,98%		0,00%								
		11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt Layanan				0,00		0,00		90.900.000,00	100,00%	90.900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		45,00%		45,00%								
		12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				0,00		0,00		384.123.001,00	5,47%	21.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa		0 Paket		0 Paket		3 Paket		0,00%		2,74%		0,00%								
		13	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				0,00		0,00		1.481.513.500,00	63,22%	931.052.500,00	0,00%	353.962.553,00	0,00%	38,02%								
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		167 Satuan Pendidikan		0,00%		54,31%		0,00%								
		14	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang				0,00		0,00		320.998.750,00	65,00%	203.528.000,00	0,00%	129.194.000,00	0,00%	63,48%								
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		92 Satuan Pendidikan		65,00%		55,00%		84,62%								
		15	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				0,00		0,00		308.332.000,00	67,38%	206.554.000,00	0,00%	16.240.000,00	0,00%	7,86%								
				Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		167 Satuan Pendidikan		0,00%		5,32%		0,00%								
		16	Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa				0,00		0,00		1.023.837.284,00	35,27%	362.880.000,00	0,00%	156.980.000,00	0,00%	43,26%								
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non		0 Peserta Didik		0 Peserta Didik		1.500 Peserta Didik		0,00%		30,12%		0,00%								
		17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah				0,00		0,00		4.456.059.000,00	51,00%	2.234.240.000,00	0,00%	1.429.824.000,00	0,00%	64,00%								
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada		0 Orang		0 Orang		156 Orang		51,00%		43,00%		84,31%								
		18	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0,00		0,00		306.279.248,00	32,24%	98.748.000,00	0,00%	31.383.000,00	0,00%	31,78%								
				Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan		0 Satuan pendidikan		0 Satuan pendidikan		165 Satuan pendidikan		32,24%		10,25%		31,79%								
		19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0,00		0,00		38.994.542.000,0	18,85%	7.348.962.312,00	0,00%	8.386.368.161,00	0,00%	114,12%								
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola		0 Satuan		0 Satuan		165 Satuan		18,85%		21,51%		114,11%								
		20	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam		0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	19.809 Orang	24.510.533.200,0	47,50%	11.460.837.000,0	0,00%	8.659.267.822,00	0,00%	75,56%								
												47,50%		38,50%		81,05%								

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																							
		21	Pembangunan Laboratorium				0,00		0,00		1.537.061.400,00	54,23%	841.334.606,00	0,00%	1.532.000,00	0,00%	0,18%								
				Jumlah Ruang Laboratorium Yang		0 ruang		0 ruang		3 ruang		0,00%		10,00%		0,00%									
		22	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		0,00		695.920.375,00	95,00%	661.421.415,00	0,00%	200.000,00	0,00%	0,03%								
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun		0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		10,00%		0,00%									
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		0,00		820.287.000,00	21,34%	175.118.600,00	0,00%	1.331.000,00	0,00%	0,76%								
				Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Yang Telah		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		12,00%		0,00%									
		24	Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		0,00		937.680.000,00	100,00%	815.780.000,00	0,00%	6.799.298,00	0,00%	0,83%								
				Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia		0 paket		0 paket		556 paket		0,00%		10,00%		0,00%									
		25	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				0,00		0,00		721.140.000,00	1,20%	7.840.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah		0 paket		0 paket		72 paket		0,00%		5,00%		0,00%									
		26	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah				0,00		0,00		8.603.250.000,00	97,12%	7.387.250.000,00	0,00%	5.468.125.000,00	0,00%	74,02%								
				Jumlah peserta didik SMP yang		0 orang		0 orang		5.992 orang		0,00%		96,12%		0,00%									
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				0,00		0,00		1.873.220.000,00	88,46%	1.664.020.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa		0 paket		0 paket		101 paket		0,00%		5,00%		0,00%									
		28	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				0,00		0,00		368.790.000,00	100,00%	368.790.000,00	0,00%	204.551.368,00	0,00%	55,47%								
				Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian		0 peserta didik		0 peserta didik		24.024 peserta didik		0,00%		100,00%		0,00%									
		29	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		250.483.000,00	32,75%	58.763.000,00	0,00%	15.972.000,00	0,00%	27,18%								
				Jumlah satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan		0 sekolah		0 sekolah		65 sekolah		0,00%		22,49%		0,00%									
		30	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa				0,00		0,00		1.184.275.375,00	49,62%	561.982.375,00	0,00%	117.977.000,00	0,00%	20,99%								
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non		0 peserta didik		0 peserta didik		750 peserta didik		0,00%		36,32%		0,00%									
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0,00		0,00		118.679.000,00	49,00%	57.386.000,00	0,00%	29.261.000,00	0,00%	50,99%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		0 sekolah		0 sekolah		59 sekolah		49,00%		40,00%		81,63%									
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		13.196.980.000,0	25,00%	3.299.245.000,00	0,00%	1.652.078.208,00	0,00%	50,07%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 sekolah		0 sekolah		41 sekolah		25,00%		15,00%		60,00%									
		33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp				0,00		0,00		1.776.060.000,00	69,51%	1.150.000.056,00	0,00%	509.657.347,00	0,00%	44,32%								
				Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1		0 Siswa		0 Siswa		788 Siswa		0,00%		59,81%		0,00%									
		34	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2				0,00		0,00		1.591.200.000,00	53,00%	846.806.125,00	0,00%	228.488.605,00	0,00%	26,98%								
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Siswa		0 Siswa		671 Siswa		53,00%		41,00%		77,36%									
		35	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3				0,00		0,00		1.347.840.000,00	57,00%	745.657.486,00	0,00%	519.262.431,00	0,00%	69,64%								
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		47,00%		0,00%									
		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp				0,00		0,00		1.111.500.000,00	62,00%	664.845.000,00	0,00%	367.268.562,00	0,00%	55,24%								
				Jumlah siswa yang terlayani KBM di		0 Siswa		0 Siswa		492 Siswa		0,00%		48,00%		0,00%									
		37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5				0,00		0,00		2.173.860.000,00	53,00%	1.140.400.000,00	0,00%	386.264.739,00	0,00%	33,87%								
				Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP N 5		0 Siswa		0 Siswa		913 Siswa		0,00%		60,24%		0,00%									
		38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6				0,00		0,00		1.591.200.000,00	53,00%	832.900.000,00	0,00%	508.473.544,00	0,00%	61,05%								
				Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar SMP N 6 YK		0 Siswa		0 Siswa		700 Siswa		0,00%		46,00%		0,00%									
		39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7				0,00		0,00		1.357.200.000,00	59,00%	811.156.388,00	0,00%	454.994.167,00	0,00%	56,09%								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Mengelola dana BOS		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		50,00%		0,00%									
		40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8				0,00		0,00		2.227.680.000,00	55,74%	1.187.312.000,00	0,00%	806.827.117,00	0,00%	67,95%								
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di SMP 8		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		45,96%		0,00%									
		41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9				0,00		0,00		1.539.720.000,00	64,25%	978.876.466,00	0,00%	503.522.519,00	0,00%	51,44%								
				Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9		0 Siswa		0 Siswa		605 Siswa		0,00%		53,62%		0,00%									
		42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10				0,00		0,00		1.678.440.000,00	64,46%	1.006.028.000,00	0,00%	382.178.537,00	0,00%	37,99%								
				Jumlah Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Menengah Pertama Smp		0 Siswa		0 Siswa		533 Siswa		0,00%		54,70%		0,00%									
		43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11				0,00		0,00		1.067.700.000,00	49,98%	487.777.000,00	0,00%	302.967.790,00	0,00%	62,11%								
				Jumlah Sekolah Menengan Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 persen		0 persen		100 persen		0,00%		41,65%		0,00%									
		44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12				0,00		0,00		1.296.360.000,00	64,00%	825.898.760,00	0,00%	331.083.195,00	0,00%	40,09%								
				Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMPN 12		0 Siswa		0 Siswa		483 Siswa		0,00%		70,00%		0,00%									
		45	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp				0,00		0,00		1.006.340.000,00	72,00%	711.583.550,00	0,00%	321.632.326,00	0,00%	45,20%								
				Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan		0 Siswa		0 Siswa		399 Siswa		0,00%		62,00%		0,00%									
		46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp				0,00		0,00		1.058.340.000,00	54,00%	562.580.000,00	0,00%	328.620.406,00	0,00%	58,41%								
				Jumlah siswa yang terlayani di SMP		0 siswa		0 siswa		395 siswa		0,00%		42,27%		0,00%									
		47	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp				0,00		0,00		2.337.660.000,00	69,00%	1.511.101.800,00	0,00%	790.782.427,00	0,00%	52,33%								
				Jumlah siswa yang terlayani KBM di		0 peserta		0 peserta didik		989 peserta		0,00%		64,35%		0,00%									
		48	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16				0,00		0,00		1.579.500.000,00	64,00%	1.002.054.000,00	0,00%	265.302.397,00	0,00%	26,48%								
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di SMP 16		0 siswa		0 siswa		711 siswa		0,00%		49,00%		0,00%									
		49	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		6.184.800.000,00	14,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah		0 Orang		0 Orang		5.154 Orang		14,00%		12,00%		85,71%									

		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																							
		50	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi		0 unit	0,00	0 unit	0,00	4 unit	649.100.000,00	56,35%	365.700.000,00	0,00% 20,36%	126.000,00	0,00% 0,00%	0,03%								
		51	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan	Jumlah peserta didik PAUD yang		0 orang	0,00	0 orang	0,00	763 orang	1.196.600.000,00	100,00% 100,00%	1.196.600.000,00	0,00% 100,00%	818.100.000,00	0,00% 100,00%	68,37%								
		52	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD		0 paket	0,00	0 paket	0,00	18 paket	152.380.000,00	100,00% 100,00%	152.380.000,00	0,00% 100,00%	10.938.820,00	0,00% 100,00%	7,18%								
		53	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta didik PAUD yang		0 Peserta	0,00	0 Peserta didik	0,00	16.232	2.813.060.000,00	28,03% 28,03%	787.808.000,00	0,00% 26,39%	661.642.000,00	0,00% 94,15%	83,99%								
		54	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan		0 Satuan Pendidikan	0,00	0 Satuan Pendidikan	0,00	224 Satuan Pendidikan	3.292.745.000,00	10,77% 0,00%	334.297.000,00	0,00% 9,46%	130.906.000,00	0,00% 0,00%	39,16%								
		55	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana		0 Satuan	0,00	0 Satuan	0,00	691 Satuan	8.779.006.000,00	8,03% 8,03%	704.972.500,00	0,00% 7,97%	67.166.500,00	0,00% 99,25%	9,53%								
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																							
		56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt	Jumlah peserta didik non formal/kesetaraan yang menerima		0 orang	0,00	0 orang	0,00	250 orang	955.000.000,00	100,00% 100,00%	955.000.000,00	0,00% 100,00%	728.700.000,00	0,00% 100,00%	76,30%								
		57	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan		0 Peserta Didik	0,00	0 Peserta Didik	0,00	1.483 Peserta Didik	960.065.750,00	60,00% 60,00%	572.500.750,00	0,00% 52,00%	30.705.000,00	0,00% 86,67%	5,36%								
		58	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan		0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	120 Orang	433.350.000,00	42,90% 42,90%	184.820.000,00	0,00% 34,60%	142.500.000,00	0,00% 80,65%	77,10%								
		59	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan	0,00	0 Satuan Pendidikan	0,00	16 Satuan Pendidikan	2.339.190.000,00	18,75% 18,75%	427.378.500,00	0,00% 18,75%	140.394.143,00	0,00% 100,00%	32,85%								
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																							
		60	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam		0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	900 Orang	900.000.000,00	82,00% 82,00%	690.000.000,00	0,00% 75,00%	506.557.815,00	0,00% 91,46%	73,41%								
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																							
		61	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Penglolaan Dana		0 peserta didik	0,00	0 peserta didik	0,00	251 peserta didik	1.046.020.000,00	52,91% 0,00%	505.211.248,00	0,00% 38,96%	309.821.668,00	0,00% 0,00%	61,33%								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																							
		62	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar		0 ruang	0,00	0 ruang	0,00	1 ruang	154.644.000,00	72,67% 0,00%	112.376.500,00	0,00% -0,06%	0,00	0,00% 0,00%	0,00%								
		63	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah direhabilitasi sedang/berat		0 Ruang	0,00	0 Ruang	0,00	2 Ruang	166.020.000,00	81,25% 0,00%	134.892.000,00	0,00% 0,00%	0,00	0,00% 0,00%	0,00%								
		64	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten Digital	0,00	0 Konten Digital	0,00	8 Konten Digital	1.119.786.500,00	57,19% 0,00%	640.545.000,00	0,00% 32,49%	233.474.230,00	0,00% 0,00%	36,45%								
										Rata-rata capaian kinerja						**0,00%**	**34,85%**							
										Predikat kinerja						**Sangat**	**Sangat**							

		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**jumlah guru sesuai kualifikasi dibagi jumlah guru kali 100%**	**97,30 %**	**0,00**	**93,68 %**	**0,00**	**97,15 %**	**0,00**	**97.15%**	**0,00**	**93.68%**	**13.205.465.000,00**	**96.43%**	**0,00%**					**Bidang PTK Dasinfo**	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																				
		1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	22.641.718.750,0	42,50%	9.528.098.750,00	0,00%	7.091.198.000,00	0,00%	74,42%						
											42,50%		33,00%		77,65%							
		2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	3 Laporan	25.397.871.000,0	36,11%	9.171.404.800,00	0,00%	6.114.267.000,00	0,00%	66,67%						
											36,11%		33,39%		92,47%							
		Rata-rata capaian kinerja													**0,00%**	**70,55%**						
		Predikat kinerja													**Sangat**	**Sedang**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan**	**(jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif dibagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dikali 100%) + (jumlah pemuda (16-30 th) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial**	**67,32 %**	**0,00**	**50,39 %**	**0,00**	**58,17 %**	**0,00**	**58.17%**	**0,00**	**50.39%**	**408.883.000,00**	**86.62%**	**0,00%**					**Bidang Pemuda dan Olahraga**	
		PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																				
		1 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang		0 orang	0,00	0 orang	0,00	25 orang	113.830.000,00	100,00%	113.830.000,00	0,00%	93.810.000,00	0,00%	82,41%						
											100,00%		99,50%		99,50%							
		2 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh		0 orang	0,00	0 orang	0,00	4.315 orang	232.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		3 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh		0 orang	0,00	0 orang	0,00	19.860 orang	616.764.680,00	37,00%	205.906.000,00	0,00%	106.218.000,00	0,00%	51,59%						
											37,00%		30,00%		81,08%							
		4 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,		0 orang	0,00	0 orang	0,00	45.815 orang	563.610.000,00	35,00%	152.580.000,00	0,00%	25.150.000,00	0,00%	16,48%						
											35,00%		22,00%		62,86%							
		5 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera		0 orang	0,00	0 orang	0,00	46 orang	1.502.045.000,00	20,19%	265.355.000,00	0,00%	118.600.000,00	0,00%	44,69%						
											0,00%		12,46%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		6 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	395.998.120,00	76,19%	301.746.500,00	0,00%	65.105.000,00	0,00%	21,58%						
											76,19%		71,26%		93,53%							
		Rata-rata capaian kinerja													**0,00%**	**36,13%**						
		Predikat kinerja													**Sangat**	**Sangat**						

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**rerata persentase perolehan medali tingkat nasional/internasional, persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif, persentase perolehan medali tingkat**	**83,20 %**	**0,00**	**82,72 %**	**0,00**	**83,00 %**	**0,00**	**83.00%**	**0,00**	**82.72%**	**9.601.493.000,00**	**99.66%**	**0,00%**					**Bidang Pemuda dan Olahraga**	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																					
		1 KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	12 Unit	526.063.580,00	100,00%	526.063.580,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	7 bulan	636.496.000,00	30,00%	138.360.000,00	0,00%	64.385.000,00	0,00%	46,53%							
		3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	6 bulan	822.707.690,00	91,00%	745.137.690,00	0,00%	450.000,00	0,00%	0,06%							
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																					
		4 Seleksi Atlet Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah		0	0,00	0	0,00	5	1.724.436.000,00	100,00%	1.724.436.000,00	0,00%	1.519.360.000,00	0,00%	88,11%							
		5 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah		0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	12 bulan	1.244.045.500,00	49,98%	464.972.000,00	0,00%	170.298.000,00	0,00%	36,63%							
		6 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	68.772.000,00	55,00%	37.776.000,00	0,00%	20.664.000,00	0,00%	54,70%							
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																					
		7 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	7.103.000,00	100,00%	7.103.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		8 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		0 Organisasi	0,00	0 Organisasi	0,00	2 Organisasi	10.389.849.750,0	88,70%	9.152.710.750,00	0,00%	7.477.876.000,00	0,00%	81,70%							
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																					
		9 PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan	Pembinaan Dan Pengembangan		0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	12 bulan	1.149.480.000,00	49,98%	421.640.000,00	0,00%	318.840.000,00	0,00%	75,62%							
		10 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	297.444.720,00	52,90%	157.385.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		11 PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	8 Unit	1.034.434.046,00	39,95%	412.902.640,00	0,00%	4.320.000,00	0,00%	1,05%							
		12 Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan	Pembinaan Dan Pengembangan		0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	12 bulan	246.428.000,00	49,98%	41.800.000,00	0,00%	25.300.000,00	0,00%	60,53%							
									Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**37,08%**						
									Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**	**(Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) / Lembaga kepramukaan yang**	**95,00 %**	**0,00**	**90,32 %**	**0,00**	**95,00 %**	**0,00**	**95%**	**0,00**	**90.32%**	**23.511.500,00**	**95%**	**0,00%**					**Bidang Pemuda dan Olahraga**	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																					
		1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat		0 Organisasi	0,00	0 Organisasi	0,00	2 Organisasi	278.935.000,00	34,41%	96.052.500,00	0,00%	23.511.500,00	0,00%	24,48%							
									Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**24,48%**						
									Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**						

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**78.303.017.751,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		0 Dokuem	0,00	0 Dokuem	0,00	4 Dokuem	11.461.400,00	85,00%	9.715.000,00	0,00%	1.715.000,00	0,00%	17,65%						
											85,00%		77,00%		90,59%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		0 Dokuem	0,00	0 Dokuem	0,00	2 Dokuem	7.760.800,00	76,00%	5.795.000,00	0,00%	3.765.000,00	0,00%	64,97%						
											76,00%		75,00%		98,68%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		0 Dokuem	0,00	0 Dokuem	0,00	2 Dokuem	7.760.800,00	54,00%	4.060.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											54,00%		27,00%		50,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		0 Dokuem	0,00	0 Dokuem	0,00	2 Dokuem	7.760.800,00	58,00%	4.060.000,00	0,00%	3.430.000,00	0,00%	84,48%						
											58,00%		57,00%		98,28%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		0 Dokuem	0,00	0 Dokuem	0,00	2 Dokuem	7.760.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	2.738.000,00	40,00%	1.015.000,00	0,00%	1.015.000,00	0,00%	100,00%						
											40,00%		40,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	23.417.400,00	50,00%	11.600.000,00	0,00%	6.985.000,00	0,00%	60,22%						
											50,00%		42,00%		84,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan		0 Orang/Bulan	0,00	0 Orang/Bulan	0,00	2.230	227.246.977.400,	63,00%	137.801.230.804,	0,00%	76.356.225.940,00	0,00%	55,41%						
											63,00%		50,00%		79,37%							
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	11.060.000,00	52,00%	5.530.000,00	0,00%	4.944.000,00	0,00%	89,40%						
											52,00%		51,00%		98,08%							
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	5.280.000,00	35,00%	1.760.000,00	0,00%	1.080.000,00	0,00%	61,36%						
											35,00%		27,00%		77,14%							
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	10.800.000,00	35,00%	3.600.000,00	0,00%	2.096.000,00	0,00%	58,22%						
											35,00%		27,00%		77,14%							
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Ahkir		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.400.000,00	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											7,00%		6,00%		85,71%							
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.000.000,00	67,00%	2.000.000,00	0,00%	520.000,00	0,00%	26,00%						
											67,00%		36,00%		53,73%							
		14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	191.400.000,00	50,00%	92.665.000,00	0,00%	58.741.000,00	0,00%	63,39%						
											50,00%		42,00%		84,00%							
		15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Milik		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.750.000,00	50,00%	1.740.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											50,00%		40,00%		80,00%							
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.750.000,00	80,00%	2.610.000,00	0,00%	500.000,00	0,00%	19,16%						
											80,00%		70,00%		87,50%							
		18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	3.750.000,00	40,00%	1.140.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											40,00%		35,00%		87,50%							
		19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	3.750.000,00	70,00%	2.010.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											70,00%		60,00%		85,71%							
		20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	3.750.000,00	30,00%	1.140.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											30,00%		25,00%		83,33%							
		21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.750.000,00	40,00%	870.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											40,00%		40,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		22 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.750.000,00	45,00%	870.000,00	0,00%	300.000,00	0,00%	34,48%						
											45,00%		40,00%		88,89%							

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	36 Paket	80.095.250,00	83,00%	64.597.250,00	80,00%	0,00%	42.311.600,00	0,00% 96,39%	65,50%									
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	60 Paket	241.666.094,00	95,00%	221.716.094,00	90,00%	0,00%	21.638.450,00	0,00% 94,74%	9,76%									
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	36 Paket	69.333.950,00	100,00%	69.333.950,00	100,00%	0,00%	40.006.050,00	0,00% 100,00%	57,70%									
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	43.259.200,00	67,00%	29.008.700,00	37,00%	0,00%	6.950.000,00	0,00% 55,22%	23,96%									
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan Yang		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	25.760.000,00	92,00%	23.600.000,00	84,00%	0,00%	1.350.000,00	0,00% 91,30%	5,72%									
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	83 Laporan	597.800.000,00	45,00%	246.080.000,00	35,00%	0,00%	219.364.736,00	0,00% 77,78%	89,14%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																											
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	100 Unit	548.681.305,00	100,00% 0,00%	548.236.505,00	121,18%	0,00%	0,00	0,00% 0,00%	0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	5 Laporan	131.111.000,00	50,00% 50,00%	59.943.000,00	35,00%	0,00%	15.292.000,00	0,00% 70,00%	25,51%									
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	5 Laporan	55.200.000,00	55,00% 55,00%	27.600.000,00	45,00%	0,00%	19.134.608,00	0,00% 81,82%	69,33%									
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	962.984.700,00	49,95% 0,00%	401.218.000,00	54,67%	0,00%	291.098.420,00	0,00% 0,00%	72,55%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknyaeliharaan dan Pajak		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	75 Unit	217.732.500,00	55,00%	109.864.300,00	45,00%	0,00%	49.157.077,00	0,00% 81,82%	44,74%									
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	13 Unit	236.782.000,00	60,00% 60,00%	136.356.500,00	55,00%	0,00%	38.666.250,00	0,00% 91,67%	28,36%									
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	225 Unit	368.940.000,00	60,00% 60,00%	212.440.000,00	55,00%	0,00%	88.538.620,00	0,00% 91,67%	41,68%									
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	3 Unit	2.792.888.269,00	47,95% 0,00%	1.179.676.875,00	47,26%	0,00%	1.028.193.000,00	0,00% 0,00%	87,16%									
										Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**37,66%**								
										Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**								
										Total anggaran dari seluruh program		**0,00**		**0,00**		**142.066.636.946,00**									
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**0,00%**	**0%**								
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat**	**Sangat**								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: ketercapaian indikator dan sub kegiatan baik fisik maupun keuangan didukung dengan ketersediaan data ,meskipun masih menggunakan capaian tahun sebelumnya, dan adanya komitmen dan konsistensi dari semua PPTK untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan waktu yang ditentukan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: dengan adanya komitmen dan konsistensi dari PPTK, namun masih ada kendala dalam menyelesaikan kegiatan di masing masing sub kegiatan, yang dipengaruhi baik dari external maupun internal.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023 Yogyakart 2023

Disusun oleh Dievaluasi oleh

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUDI SANTOSA ASRORI, SE., M.Si. Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197009151994031009 NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD seperti pada tabel berikut:

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							392,747,370,519	406,833,294,070	409,734,366,018							400,602,320,989	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	222,428,823,804	233,940,061,668	235,693,560,366							A Nilai	226,877,400,279	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen		0 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	68,660,000	68,660,000	49,619,800							16 dokumen	70,033,200	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11,461,400	11,461,400	3,745,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	4 Dokumen	11,690,628	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,760,800	7,760,800	7,760,800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2 Dokumen	7,916,016	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,760,800	7,760,800	6,025,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2 Dokumen	7,916,016	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,760,800	7,760,800	5,160,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2 Dokumen	7,916,016	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,760,800	7,760,800	4,592,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2 Dokumen	7,916,016	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2,738,000	2,738,000	2,030,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	12 Laporan	2,792,760	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	23,417,400	23,417,400	20,305,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	23,885,748	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan		0 laporan	7 laporan	7 laporan	**218,305,416,600**	**227,472,917,400**	**229,121,606,400**						7 laporan	**222,671,524,932**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2230 Orang/bulan	2297 Orang/bulan	218,099,351,000	227,246,977,400	228,897,351,400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2297 Orang/bulan	222,461,338,020	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	11,060,000	11,060,000	11,060,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	11,281,200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,280,000	5,280,000	5,600,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	5,385,600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,800,000	10,800,000	10,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	11,016,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,400,000	3,400,000	3,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	3,468,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,360,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3,060,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	171,525,600	191,400,000	190,055,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	12 Laporan	174,956,112	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	680,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	1,020,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	**22,500,000**	**22,500,000**	**22,500,000**						1 laporan	**22,950,000**	
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3,825,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3,825,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	3,825,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	3,825,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	3,825,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3,825,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	**3,750,000**	**3,750,000**	**3,750,000**						1 laporan	**3,825,000**	
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3,825,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
					Administrasi	Jumlah laporan																	

1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	**1,179,151,120**	**1,057,914,494**	**1,074,405,684**						1 laporan	**1,202,734,142**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	66,459,120	80,095,250	74,723,850	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	36 Paket	67,788,302	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	179,787,510	241,666,094	234,649,084	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	60 Paket	183,383,260	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	54,768,300	69,333,950	77,985,050	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	36 Paket	55,863,666	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	64,776,190	43,259,200	62,587,700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2 Paket	66,071,714	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	25,760,000	25,760,000	26,660,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2 Dokumen	26,275,200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan	83 Laporan	787,600,000	597,800,000	597,800,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	83 Laporan	803,352,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	12 jenis		0 jenis	12 jenis	12 jenis	**409,076,800**	**548,681,305**	**548,681,305**						12 jenis	**417,258,336**	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	409,076,800	548,681,305	548,681,305	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	100 Unit	417,258,336	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	**555,417,240**	**1,149,295,700**	**1,169,153,908**						1 laporan	**566,525,585**	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	71,767,240	131,111,000	130,061,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	5 Laporan	73,202,585	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	9,000,000	55,200,000	55,200,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	5 Laporan	9,180,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	474,650,000	962,984,700	983,892,908	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	5 Laporan	484,143,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 jenis		0 jenis	5 jenis	5 jenis	**1,884,852,044**	**3,616,342,769**	**3,703,843,269**						5 jenis	**1,922,549,084**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				75 Unit	75 Unit	236,340,000	217,732,500	289,233,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	75 Unit	241,066,800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	223,861,120	236,782,000	259,522,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	13 Unit	228,338,342	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				225 Unit	225 Unit	325,000,000	368,940,000	378,940,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	225 Unit	331,500,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1,099,650,924	2,792,888,269	2,776,147,769	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	3 Unit	1,121,643,942	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

						SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP																	
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99,00 % 99,50 % 98,64 % 100 % 114,08 % 106,34 % 93,35 % 100,00 % 100 % 93,6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**124,228,767,327**	**124,853,642,652**	**133,400,378,152**							98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**126,713,345,734**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 konten digital 164 Satuan Pendidikan 164 Satuan Pendidikan 1500 peserta		0 konten digital 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 0 peserta	7 konten digital 164 Satuan Pendidikan 164 Satuan Pendidikan 1500 peserta	7 konten digital 164 Satuan Pendidikan 164 Satuan Pendidikan 1500 peserta	**78,491,752,398**	**76,645,429,752**	**82,767,670,191**							7 konten digital 164 Satuan Pendidikan 164 Satuan Pendidikan 1500 peserta	**80,061,590,506**	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	0	125,136,004	100,721,004	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Ruang	0	Dinas Pendidika Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	262,614,500	111,066,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Ruang	0	Dinas Pendidika Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Sarana									Kota	DAK Fisik-						

1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	0	412,465,475	406,101,868	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Unit	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	0	1,339,552,000	1,070,668,861	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	0	441,340,000	301,823,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	121,204,040	72,876,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			masyarakat	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	124,567,000	79,186,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	910,505,000	3,682,467,000	3,671,196,829	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	13 Unit	928,715,100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1045 Paket	1045 Paket	614,300,000	1,512,150,000	2,013,085,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1045 Paket	626,586,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	1,773,830,000	384,123,001	384,123,001	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Paket	1,809,306,600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	1,506,005,400	1,481,513,500	1,111,726,500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	167 Satuan Pendidikan	1,536,125,508	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	82,637,000	308,332,000	281,940,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	167 Satuan Pendidikan	84,289,740	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	1,205,442,120	1,023,837,284	808,220,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1500 Peserta Didik	1,229,554,022	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				165 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	275,283,248	306,279,248	306,279,248	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	165 Satuan Pendidikan	280,788,913	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Sekolah Dasar									Kota	DAK Non		Peningkatan				Dinas Pendidikan

1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	yang Mengelola Dana BOS				106 Satuan Pendidikan	106 Satuan Pendidikan	40,286,177,840	38,994,542,000	38,994,542,000	Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Fisik-BOS Reguler		Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	106 Satuan Pendidikan	41,091,901,397	Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				19809 Orang	19809 Orang	30,454,759,280	24,510,533,200	31,542,272,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	19809 Orang	31,063,854,466	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	225,078,000	154,644,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	269,909,000	166,020,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				8 Konten Digital	8 Konten Digital	1,382,812,510	1,119,786,500	1,191,178,130	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	8 Konten Digital	1,410,468,760	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Satuan																

1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna "Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP" Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4 Satuan Pendidikan 59 Satuan Pendidikan 900 peserta		0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 0 peserta	4 Satuan Pendidikan 59 Satuan Pendidikan 750 peserta	4 Satuan Pendidikan 59 Satuan Pendidikan 750 peserta	**22,952,184,454**	**27,889,316,150**	**29,296,164,348**							4 Satuan Pendidikan 59 Satuan Pendidikan 750 peserta	**23,411,228,143**	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	0	1,658,961,400	1,534,646,780	Kota Yogyakarta Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	0	695,920,375	695,920,375	Kota Yogyakarta Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Unit	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	686,823,134	820,287,000	816,581,450	Kota Yogyakarta Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Unit	700,559,597	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				556 Paket	556 Paket	0	815,780,000	937,280,000	Kota Yogyakarta Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	556 Paket	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				72 Paket	72 Paket	0	721,140,000	720,390,000	Kota Yogyakarta Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	72 Paket	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				101 Paket	101 Paket	829,700,000	1,873,220,000	1,870,860,000	Kota Yogyakarta Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	101 Paket	846,294,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				24024 Peserta Didik	24024 Peserta Didik	558,790,000	368,790,000	348,448,368	Kota Yogyakarta Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	24024 Peserta Didik	569,965,800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
					Penyiapan dan	Jumlah Satuan																		

1	01	02	2.02	37	Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				66 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	250,483,000	250,483,000	250,483,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	66 Satuan Pendidikan	255,492,660	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	1,018,579,200	1,184,275,375	962,875,375	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	750 Peserta Didik	1,038,950,784	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	147,349,120	118,679,000	94,199,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	59 Satuan Pendidikan	12,114,345,302	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	11,729,460,000	13,196,980,000	13,196,980,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	41 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				5154 Orang	5245 Orang	7,731,000,000	6,184,800,000	7,867,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	5245 Orang	7,885,620,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
						Jumlah Peserta Didik																

1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna	16774 siswa 6 Satuan Pendidikan		0 siswa 0 Satuan Pendidikan	16774 siswa 3 Satuan Pendidikan	16774 siswa 3 Satuan Pendidikan	**18,888,287,200**	**16,586,291,000**	**17,643,437,863**						16774 siswa 3 Satuan Pendidikan	**19,266,052,944**	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	86,200,000	649,100,000	581,753,863	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Unit	87,924,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				18 Paket	18 Paket	0	152,380,000	152,380,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	18 Paket	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				16232 Peserta Didik	16232 Peserta Didik	2,804,345,240	2,813,060,000	2,517,385,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	16232 Peserta Didik	2,860,432,145	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				224 Satuan Pendidikan	224 Satuan Pendidikan	4,808,250,120	3,292,745,000	4,712,913,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	224 Satuan Pendidikan	4,904,415,122	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				691 Satuan Pendidikan	691 Satuan Pendidikan	10,289,491,840	8,779,006,000	8,779,006,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	691 Satuan Pendidikan	10,495,281,677	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				900 Orang	900 Orang	900,000,000	900,000,000	900,000,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	900 Orang	918,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan belajar Masyarakat	1483 peserta didik		0 peserta didik	1483 peserta didik	1483 peserta didik	**3,896,543,275**	**3,732,605,750**	**3,693,105,750**						1483 peserta didik	**3,974,474,141**	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1803 Peserta Didik	1803 Peserta Didik	1,077,583,275	960,065,750	920,565,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1803 Peserta Didik	1,099,134,941	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	120 Orang	438,060,000	433,350,000	433,350,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	120 Orang	446,821,200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	2,380,900,000	2,339,190,000	2,339,190,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	16 Satuan Pendidikan	2,428,518,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru sesuai kualifikasi	97,30 %		0 %	97,15 %	97,15 %	**46,089,779,388**	**48,039,589,750**	**40,640,427,500**						97,15 %	**47,011,574,976**	

1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan sesuai standar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Kompensasi untuk peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan	1 dokumen 6442 orang		0 dokumen 0 orang	1 dokumen 6442 orang	1 dokumen 6442 orang	**46,089,779,388**	**48,039,589,750**	**40,640,427,500**						1 dokumen 6442 orang	**47,011,574,976**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				8 Dokumen	8 Dokumen	20,482,613,960	22,641,718,750	19,160,510,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pendidik dan tenaga pendidik	8 Dokumen	20,892,266,239	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	3 Laporan	25,607,165,428	25,397,871,000	21,479,916,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pendidik dan tenaga pendidik	3 Laporan	26,119,308,737	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**20,486,586,352**	**21,850,543,086**	**22,297,443,021**							**30,047,491,887**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	67,32 %		0 %		58,17 %	**3,503,635,040**	**3,424,347,800**	**3,505,552,800**						58,17 %	**12,896,319,408**	
2	19	02	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota	20000 orang		0 orang	19850 orang	19850 orang	**3,153,474,920**	**3,028,349,680**	**3,118,579,680**						19850 orang	**9,324,686,184**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	25 Orang	105,295,000	113,830,000	111,830,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	25 Orang	107,400,900	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				4315 Orang	4315 Orang	232,100,000	232,100,000	232,100,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	4315 Orang	236,742,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

					Wira Usaha Pemuda																	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				19860 Orang	19860 Orang	665,374,920	616,764,680	710,844,680	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	19860 Orang	6,786,824,184	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				45815 Orang	45815 Orang	603,660,000	563,610,000	561,760,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	45815 Orang	615,733,200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				46 Orang	46 Orang	1,547,045,000	1,502,045,000	1,502,045,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	46 Orang	1,577,985,900	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**350,160,120**	**395,998,120**	**386,973,120**						1 dokumen	**3,571,633,224**	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				3 Dokumen	3 Dokumen	350,160,120	395,998,120	386,973,120	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Dokumen	3,571,633,224	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase kapasitas daya saing keolahragaan	83,20 %		0 %		83,00 %	**16,682,951,312**	**18,147,260,286**	**18,512,955,221**						83,00 %	**16,845,172,479**	
					Pembinaan dan Pengembangan																	

2	**19**	**03**	2.01		**Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit		0 Unit	8 Unit	8 Unit	**480,000,000**	**526,063,580**	**526,063,580**						8 Unit	**484,896,000**	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				12 Unit	12 Unit	480,000,000	526,063,580	526,063,580	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat kota yogyakarta	12 Unit	484,896,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	450 orang		0 orang	300 orang	300 orang	**1,559,707,386**	**1,459,203,690**	**1,160,378,000**						300 orang	**1,590,717,934**	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	460,164,000	636,496,000	697,628,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan siswa	5 Dokumen	469,367,280	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				300 Orang	300 Orang	1,099,543,386	822,707,690	462,750,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan siswa	300 Orang	1,121,350,654	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	650 orang		0 orang	500 orang	500 orang	**3,119,058,480**	**3,037,253,500**	**3,303,860,000**						500 orang	**3,181,439,650**	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				300 Orang	300 Orang	2,579,608,240	1,724,436,000	1,587,997,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat dan siswa	300 Orang	2,631,200,405	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				219 Orang	219 Orang	478,628,000	1,244,045,500	1,649,491,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan siswa	219 Orang	488,200,560	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	60,822,240	68,772,000	66,372,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan siswa	1 Dokumen	62,038,685	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**7,625,273,000**	**10,396,952,750**	**10,870,931,750**						1 dokumen	**7,775,003,000**	
					Standardisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan									Kota Yogyakarta	PENDAPATAN	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan				Dinas Pendidikan

					Keolahragaan	Standardisasi Organisasi Keolahragaan										Danurejan, Tegalpanggung	(PAD)	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia				Olahraga
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	7,500,000,000	10,389,849,750	10,863,828,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Organisasi	7,650,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**3,898,912,446**	**2,727,786,766**	**2,651,721,891**						2 dokumen	**3,813,115,895**	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,196,740,000	1,149,480,000	1,107,740,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Dokumen	1,056,900,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	297,444,720	297,444,845	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Laporan	306,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	8 Unit	2,249,802,446	1,034,434,046	1,000,109,046	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	8 Unit	2,294,798,495	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	1 Dokumen	152,370,000	246,428,000	246,428,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Dokumen	155,417,400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	95 %		0 %	95 %	95 %	**300,000,000**	**278,935,000**	**278,935,000**						95 %	**306,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi**	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2 organisasi		0 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	**300,000,000**	**278,935,000**	**278,935,000**						2 organisasi	**306,000,000**	

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,030,300,000**	**1,046,020,000**	**1,046,020,000**						98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,050,906,000**	
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan	251 peserta didik			0 peserta didik	251 peserta didik	251 peserta didik	**1,030,300,000**	**1,046,020,000**	**1,046,020,000**						251 peserta didik	**1,050,906,000**	
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					251 Orang	251 Orang	1,030,300,000	1,046,020,000	1,046,020,000	Kota Yogyakarta Danurejan Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	251 Orang	1,050,906,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,917,120,000**	**1,776,060,000**	**2,035,587,791**							**1,955,462,400**	
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,917,120,000**	**1,776,060,000**	**2,035,587,791**						98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,955,462,400**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1	788 peserta didik			0 peserta didik	788 peserta didik	788 peserta didik	**1,917,120,000**	**1,776,060,000**	**2,035,587,791**						788 peserta didik	**1,955,462,400**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,917,120,000	1,776,060,000	2,035,587,791	Kota Yogyakarta Danurejan Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1,955,462,400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,572,420,000**	**1,591,200,000**	**1,905,024,073**							**1,603,868,400**	
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP																	

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,572,420,000**	**1,591,200,000**	**1,905,024,073**							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,603,868,400**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2	671 peserta didik		0 peserta didik	671 peserta didik	671 peserta didik	**1,572,420,000**	**1,591,200,000**	**1,905,024,073**							671 peserta didik	**1,603,868,400**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,572,420,000	1,591,200,000	1,905,024,073	Kota Yogyakarta Danurejan Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1,603,868,400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,400,400,000**	**1,347,840,000**	**1,522,192,860**							**1,428,408,000**		
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,400,400,000**	**1,347,840,000**	**1,522,192,860**							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,428,408,000**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3	597 peserta didik		0 peserta didik	597 peserta didik	597 peserta didik	**1,400,400,000**	**1,347,840,000**	**1,522,192,860**							597 peserta didik	**1,428,408,000**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,400,400,000	1,347,840,000	1,522,192,860	Kota Yogyakarta Danurejan Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1,428,408,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,156,980,000**	**1,111,500,000**	**1,256,835,892**							**1,180,119,600**		
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP																	

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,156,980,000**	**1,111,500,000**	**1,256,835,892**							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,180,119,600**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4	492 peserta didik		0 peserta didik	492 peserta didik	492 peserta didik	**1,156,980,000**	**1,111,500,000**	**1,256,835,892**							492 peserta didik	**1,180,119,600**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,156,980,000	1,111,500,000	1,256,835,892	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1,180,119,600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**2,139,840,000**	**2,173,860,000**	**2,451,227,141**							**2,182,636,800**	
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**2,139,840,000**	**2,173,860,000**	**2,451,227,141**							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**2,182,636,800**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5	913 peserta didik		0 peserta didik	913 peserta didik	913 peserta didik	**2,139,840,000**	**2,173,860,000**	**2,451,227,141**							913 peserta didik	**2,182,636,800**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2,139,840,000	2,173,860,000	2,451,227,141	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	2,182,636,800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,642,560,000**	**1,591,200,000**	**1,798,200,338**							**1,642,560,000**	
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP																	

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Perzentase Keluluxan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,642,560,000**	**1,591,200,000**	**1,798,200,338**							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,642,560,000**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6	700 peserta didik			0 peserta didik	700 peserta didik	700 peserta didik	**1,642,560,000**	**1,591,200,000**	**1,798,200,338**							700 peserta didik	**1,642,560,000**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,642,560,000	1,591,200,000	1,798,200,338	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1,642,560,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,422,600,000**	**1,357,200,000**	**1,532,700,000**								**1,451,052,000**	
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Perzentase Keluluxan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,422,600,000**	**1,357,200,000**	**1,532,700,000**							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,451,052,000**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 7	606 peserta didik			0 peserta didik	606 peserta didik	606 peserta didik	**1,422,600,000**	**1,357,200,000**	**1,532,700,000**							606 peserta didik	**1,451,052,000**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,422,600,000	1,357,200,000	1,532,700,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1,451,052,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**2,317,920,000**	**2,227,680,000**	**2,540,408,516**								**2,364,278,400**	
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP																		

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99,00 % 99,50 % 98,64 % 100 % 114,08 % 106,34 % 93,35 % 100,00 % 100 % 93,6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**2.317.920.000**	**2.227.680.000**	**2.540.408.516**						98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**2.364.278.400**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	952 peserta didik		0 peserta didik	952 peserta didik	952 peserta didik	**2.317.920.000**	**2.227.680.000**	**2.540.408.516**						952 peserta didik	**2.364.278.400**	
1	01	02	2.02	.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.317.920.000	2.227.680.000	2.540.408.516	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	2.364.278.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.419.120.000**	**1.539.720.000**	**1.749.680.019**							**1.447.502.400**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99,00 % 99,50 % 98,64 % 100 % 114,08 % 106,34 % 93,35 % 100,00 % 100 % 93,6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**1.419.120.000**	**1.539.720.000**	**1.749.680.019**						98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**1.447.502.400**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	605 peserta didik		0 peserta didik	605 peserta didik	605 peserta didik	**1.419.120.000**	**1.539.720.000**	**1.749.680.019**						605 peserta didik	**1.447.502.400**	
1	01	02	2.02	.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.419.120.000	1.539.720.000	1.749.680.019	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.447.502.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.251.780.000**	**1.678.440.000**	**1.890.003.237**							**1.276.815.600**	
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar																	

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Keluluxan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,251,780,000**	**1,678,440,000**	**1,890,003,237**						98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,276,815,600**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10	533 peserta didik		0 peserta didik	533 peserta didik	533 peserta didik	**1,251,780,000**	**1,678,440,000**	**1,890,003,237**						533 peserta didik	**1,276,815,600**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.251.780.000	1.678.440.000	1.890.003.237	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.276.815.600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**925,320,000**	**1,067,700,000**	**1,193,822,675**							**943,826,400**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Keluluxan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**925,320,000**	**1,067,700,000**	**1,193,822,675**						98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**943,826,400**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11	393 peserta didik		0 peserta didik	393 peserta didik	393 peserta didik	**925,320,000**	**1,067,700,000**	**1,193,822,675**						393 peserta didik	**943,826,400**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	925.320.000	1.067.700.000	1.193.822.675	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	943.826.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,141,620,000**	**1,296,360,000**	**1,462,560,424**							**1,164,452,400**	
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP																	

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 99.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	 111.98 % 105.96 % 99.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 99.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,141,620,000**	**1,296,360,000**	**1,462,560,424**						98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 99.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,164,452,400**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP12	483 peserta didik			0 peserta didik	483 peserta didik	483 peserta didik	**1,141,620,000**	**1,296,360,000**	**1,462,560,424**						483 peserta didik	**1,164,452,400**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.141.620.000	1.296.360.000	1.462.560.424	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.164.452.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,005,220,000**	**1,006,340,000**	**1,152,653,974**							**1,025,324,400**	
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 106.34 % 99.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	 111.98 % 105.96 % 99.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 99.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,005,220,000**	**1,006,340,000**	**1,152,653,974**						98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 99.20 % 98.78 % 98.30 % 90.9 %	**1,025,324,400**	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13	399 peserta didik			0 peserta didik	399 peserta didik	399 peserta didik	**1,005,220,000**	**1,006,340,000**	**1,152,653,974**						399 peserta didik	**1,025,324,400**	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.005.220.000	1.006.340.000	1.152.653.974	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.025.324.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**928,860,000**	**1,058,340,000**	**1,181,670,437**							**947,437,200**	
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP																	

1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 108.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.50 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.50 % 90.9 %	928,860,000	1,058,340,000	1,181,670,437							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.50 % 90.9 %	947,437,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1-9	395 peserta didik			0 peserta didik	395 peserta didik	395 peserta didik	928,860,000	1,058,340,000	1,181,670,437								395 peserta didik	947,437,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	928,860,000	1,058,340,000	1,181,670,437	Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	947,437,200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2,402,130,000	2,337,660,000	2,668,342,760								2,450,172,600		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 108.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.50 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.50 % 90.9 %	2,402,130,000	2,337,660,000	2,668,342,760							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 98.50 % 90.9 %	2,450,172,600	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1-9	889 peserta didik			0 peserta didik	889 peserta didik	889 peserta didik	2,402,130,000	2,337,660,000	2,668,342,760								889 peserta didik	2,450,172,600	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2,402,130,000	2,337,660,000	2,668,342,760	Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	2,450,172,600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,669,440,000	1,579,500,000	1,908,711,080								1,702,828,800		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99.00 % 99.50 % 98.64 % 100 % 114.08 % 108.34 % 93.35 % 100.00 % 100 % 93.6 %			0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 99.30 % 90.9 %	98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 99.30 % 90.9 %	1,669,440,000	1,579,500,000	1,908,711,080							98.79 % 99 % 98.37 % 90.24 % 111.98 % 105.96 % 93.20 % 98.78 % 99.30 % 90.9 %	1,702,828,800	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1-8	711 peserta didik			0 peserta didik	711 peserta didik	711 peserta didik	1,669,440,000	1,579,500,000	1,908,711,080								711 peserta didik	1,702,828,800	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,669,440,000	1,579,500,000	1,908,711,080	Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1,702,828,800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							17,528,587,240	16,536,537,000	24,137,968,000								17,879,158,985		
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP																			

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99,00 % 99,50 % 98,64 % 100 % 114,08 % 106,34 % 93,35 % 100,00 % 100 % 93,6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**17,528,587,240**	**16,536,537,000**	**24,137,968,000**						98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**17,879,158,985**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil	5600 peserta didik		0 peserta didik	5600 peserta didik	5600 peserta didik	**5,983,737,240**	**5,781,687,000**	**9,091,718,000**						5600 peserta didik	**6,103,411,985**	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5600 Peserta Didik	4203 Peserta Didik	5,983,737,240	5,781,687,000	9,091,718,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	4203 Peserta Didik	6,103,411,985	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	5992 peserta didik		0 peserta didik	5992 peserta didik	5992 peserta didik	**9,297,250,000**	**8,603,250,000**	**11,902,250,000**						5992 peserta didik	**9,483,195,000**	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5992 Peserta Didik	5093 Peserta Didik	9,297,250,000	8,603,250,000	11,902,250,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	5093 Peserta Didik	9,483,195,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil	763 peserta didik		0 peserta didik	763 peserta didik	763 peserta didik	**1,247,600,000**	**1,196,600,000**	**1,683,500,000**						763 peserta didik	**1,272,552,000**	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				763 Peserta Didik	1053 Peserta Didik	1,247,600,000	1,196,600,000	1,683,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1053 Peserta Didik	1,272,552,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil	250 peserta didik		0 peserta didik	250 peserta didik	250 peserta didik	**1,000,000,000**	**955,000,000**	**1,460,500,000**						250 peserta didik	**1,020,000,000**	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				250 Peserta Didik	368 Peserta Didik	1,000,000,000	955,000,000	1,460,500,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	368 Peserta Didik	1,020,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**3,917,507,750**	**4,867,957,750**	**4,867,957,750**							**3,995,857,905**	
						Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP																

1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	99,00 % 99,50 % 98,64 % 100 % 114,08 % 106,34 % 93,35 % 100,00 % 100 % 93,6 %		0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**3,917,507,750**	**4,867,957,750**	**4,867,957,750**							98,79 % 99 % 98,37 % 90,24 % 111,98 % 105,96 % 93,20 % 98,78 % 98,30 % 90,9 %	**3,995,857,905**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar	92 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	**3,917,507,750**	**4,867,957,750**	**4,867,957,750**							92 Satuan Pendidikan	**3,995,857,905**	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	111,300,000	90,900,000	90,900,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Paket	113,526,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	371,498,750	320,998,750	320,998,750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	92 Satuan Pendidikan	378,928,725	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				156 Orang	156 Orang	3,434,709,000	4,456,059,000	4,456,059,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	156 Orang	3,503,403,180	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
									TOTAL			**460,023,681,861**	**475,874,951,906**	**490,333,376,006**							**478,342,481,166**	

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah yang bersifat mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2023

DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan. Di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Yogyakarta di Bidang Kesehatan. Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan mempunyai kewajibab menyusun Rencana Kerja bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Perubahan rencana Kerja Dinas kesehatan kota Yogyakarta yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun sebagai tindak lanjut dari Rencana kerja Tahun 2023. Proses Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
6. Undang–Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Ijin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Disusunnya dokumen Perubahan renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah pedoman rencana Kerja bagi seluruh personil Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan selama tahun 2023 untuk menggantikan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogayakarta tahun 2023 yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Dinas kesehatan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2023;
b. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan 2023;
c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;
d. Untuk memastikan bahwa DPA 2023 Dinas Kesehatan telah disusun berdasar Rencana Kerja SKPD 2023;
e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan kesehatan perlu fokus pada penanganan permasalahan kesehatan yang spesifik

dan sangat mendasar. Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Tahun 2023 perlu dilakukan melalui relokasi (Refocusing) anggaran didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
2. Adanya pergeseran Kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

A. Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2023 telah mencakup keseluruhan rencana kerja yang ada di Dinas Kesehatan, 18 Puskesmas, UPT PSC 119 YES, UPT Laboratorium Kesehatan. Perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2023 mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan serta mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Pada perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2023, identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang pada BAB III dokumen ini. Secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Internal
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Eksternal
    a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    b. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan
    c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
    d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Identifikasi jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Internal terdiri dari 9 kegiatan dan 51 sub kegiatan
2. Program Eksternal terdiri dari 13 kegiatan dan 425 sub kegiatan

Rumusan pemilihan kegiatan dan sub kegiatan mendasarkan pada pemetaan nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dan mempertimbangkan juga pada aspek sumber pendanaannya.

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas Sumberdaya manusia. Adapun Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pengukuran Kinerja dilakukan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana strategis maupun rencana Kerja Dinas

Kesehatan Kota Yogyakarta yang kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan ini dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan II tahun 2032. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja dan realisasi target Renja 2023 pada akhir triwulan II. Hasil pengukuran kinerja indikator program selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1: Hasil Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

MONITORING EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2023									
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)**	**TARGET 2023**		**REALISASI TW-3**				**KET**
			AKHIR TAHUN	**TW-2**	**ABSOLUT (PEMBI-LANG)**	**ABSOLUT (PENYE BUT)**	**HASIL (%)**	**% THD TARGET TW-2**	
2	Derajat Kesehatan Meningkat	Jumlah Kematian Ibu	8	8	0	8	200.00%	200.00%	
		Angka Kematian Bayi	10,78	10.78	3.14	10.78	170.87%	184.15%	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7.97	7.97	5.3	7.97	133.50%	133.25%	
		Prevalensi Stunting	12	12	12	12	100.00%	100.00%	

Sumber: Hasil Monev TW II (desk timbal balik), 2023

Bahwa Jumlah Kematian Ibu (spesifik pada ibu hamil) sampai dengan triwulan II tidak melebihi target yang ditetapkan pada awal rencana kerja Dinas Kesehatan.

Angka Kematian Bayi sampai dengan triwulan II tidak melebihi target yang ditetapkan pada awal rencana kerja Dinas Kesehatan.

Pencapaian target Balita Gizi Buruk dan Kurang sampai dengan triwulan II sesuai yang diharapkan yaitu kurang dari target yang ditetapkan pada awal rencana kerja Dinas Kesehatan.

Prevalensi Stunting sampai dengan triwulan II sama dengan target yang ditetapkan pada awal rencana kerja Dinas Kesehatan, beberapa upaya agar di masa pandemi ini tidak terus terjadi perburukan pada balita di wilayah kerja yang Dinas Kesehatan terus dilakukan, sehingga harapannya, pada akhir yang rencana kerja Dinas Kesehatan terjadi penurunan terhadap prevalensi stunting. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan adanya PMT Stunting pada lokus stunting Tahun 2023.

Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat, masih terus diupayakan meskipun harus berstrategi untuk memberikan pelayanan intervensi pada keluarga yang belum memenuhi 12 indikator keluarga sehat.

Selain hasil evaluasi pencapaian sasaran, berikut disampaikan hasil evaluasi pencapaian indikator program Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023:

Tabel 2.2 : Hasil Evaluasi Pencapaian Indikator Program Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Program PD	Indikator Program PD	Realisasi	TARGET 2023		REALISASI TW II			
			2022	AKHIR TAHUN	TW-2	ABSOLUT (PEMBILANG)	ABSOLUT (PENYEBUT)	HASIL (%)	% TERHADAP TARGET TW II
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	50%	1216	2225	54,65%	109,30%
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	50%	1218	2225	54,74%	109,48%
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	99,20%	50%	1211	2187	55,37%	111,64%
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	88%	77,23%	39%	5603	10379	53,98%	139,85%
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	54%	0%	0	56833	0,00%	0%
		Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	82%	50%	18367	34954	52,55%	105,09%
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	96,53%	89%	50%	296,25	323,25	88,16%	176,32%

		Persentase kemantren yang melaksanakan Germas		100%	0%	0	14	0,00%	0%
		Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	84,44%	80%	0%	0	0	0%	0%
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	100%	98%	98%	45	45	100	102,04%
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	99,41%	95%	95%	1800	18	100	105,26%
		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100,00%	90%	90%	41	47	98,00%	109%
		Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	87%	76%	50%	31468	72198	43,59%	87%
		Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	87,50%	73%	21.053	27.418	76,79%	106%
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	87,50%	73%	9.984	13.031	76,62%	106%
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	87,50%	50%	819	1064	76,97%	154%
		Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	5803	5803	100,00%	100%
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	4.735	4.735	100,00%	100%

		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	100%	100%	100%	39	39	100,00%	100%
		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	3	3	100,00%	100%
		Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	100%	100%	100%	433	433	100,00%	100%
		Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	1351	1351	100,00%	100%
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	105,23%	100%	100% dari target UHC 95%	413953	412589	100,33%	105,61%
		Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	94,44%	86,84%	87%	35	36	97,22%	112%
		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	41,60%	41%	41%	33396	76636	43,58%	106%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	82,75	80	80	745,13	900	82,79%	103,49%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	83,62	80	80	83,62	83,62	83,62%	104,53%
		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas		61%	61%	1351	18	75,06	123,04
		Nilai pemenuhan kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan		46%	46%			65,92%	143%
	03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tenaga kesehatan melaksanakan Praktik sesuai standar	100,00%	95,00%	50%	7200	7062	101,95%	204%

		Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan		3,6	2	7252	7139,75	3,2	159,85%
	04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100,00%	90%	53%	16	18	88,89%	168%
		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	100,00%	80%	67%	732	740	98,92%	148%
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	100,00%	90%	50%	9	14	64,29%	129%
	05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	84,44%	80%	0%	0	36	0,00%	0%
	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A	A			A	A

Sumber: Hasil Monev TW II (desk timbal balik), 2023

C. Sumber-sumber Anggaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Pada pelaksanaan anggaran di dinas Kesehatan, sumber anggaran yang tertuang antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah
    a. APBD
    b. BLUD
2. Dana Alokasi Khusus Fisik
    a. Bidang Kesehatan
    b. Bidang Kefarmasian
3. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
    a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten/Kota
    b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
    c. Dukungan Akreditasi Puskesmas

d. Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah
e. Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan

4. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

D. Evaluasi Anggaran Dinas Kesehatan

Hasil Pengukuran pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3: Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Puskesmas	221.738.160	15.366.000	6,93
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.094.742.524	0	0,00
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	1.939.001.110	1.857.367.310	95,79
4	Pengadaan ObatVaksin	3.555.243.247	668.765.582	18,81
5	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.909.882.200	762.864.526	15,54
6	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	65.000.000	64.961.085	99,94
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	32.000.000	31.566.000	98,64
8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	796.600.000	22.009.968	2,76
9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	135.000.000	0	0,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I	56.250.000	19.800.000	35,20
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	47.620.000	5.680.000	11,93
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede Ii	18.000.000	7.480.000	41,56
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan	39.478.000	19.097.000	48,37
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	35.810.000	13.590.000	37,95
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan Ii	39.890.000	10.175.000	25,51
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan	51.840.000	14.520.000	28,01
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton	33.760.000	12.300.000	36,43
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman	48.278.000	22.012.000	45,59
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan	34.630.000	13.880.000	40,08
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen	49.872.000	18.336.000	36,77

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis	33.720.000	19.720.000	58,48
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron	75.015.000	3.930.000	5,24
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo	53.165.000	15.930.000	29,96
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.862.000	59.662.000	59,15
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I	52.748.000	14.858.900	28,17
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I	67.820.000	23.288.000	34,34
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan	50.530.000	19.241.000	38,08
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I	63.550.000	25.055.000	39,43
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.340.000	0	0,00
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.080.000	0	0,00
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Wirobrajan	21.830.000	8.060.000	36,92
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Ngampilan	26.160.000	8.480.000	32,42
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kraton	61.370.000	12.246.000	19,95
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondomanan	20.540.000	4.420.000	21,52
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan Ii	10.080.000	0	0,00
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	50.370.000	1.110.000	2,20
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Pakualaman	47.350.000	10.450.000	22,07
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede Ii	16.460.000	4.290.000	26,06
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	19.100.000	11.800.000	61,78
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	288.378.480	38.663.000	13,41
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo I	12.260.000	4.120.000	33,61
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mergangsan	22.830.000	5.015.000	21,97
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede I	19.880.000	2.880.000	14,49
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman I	31.670.000	10.470.000	33,06
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Tegalrejo	22.200.000	5.500.000	24,77
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mantrijeron	84.000.000	14.100.000	16,79
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Jetis	1.200.000	310.000	25,83
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gedongtengen	30.870.000	6.980.000	22,61
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton	20.000.000	0	0,00
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan	33.300.000	0	0,00
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan	7.700.000	0	0,00
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan Ii	15.050.000	0	0,00
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Jetis	13.200.000	0	0,00

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantrijeron	19.600.000	0	0,00
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalrejo	25.200.000	0	0,00
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gedongtengen	12.600.000	0	0,00
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede I	15.750.000	0	0,00
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan	25.200.000	0	0,00
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I	39.000.000	900.000	2,31
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	141.015.000	122.991.950	87,22
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman I	19.500.000	0	0,00
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	38.500.000	5.250.000	13,64
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede Ii	6.300.000	0	0,00
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman	9.450.000	0	0,00
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	19.950.000	5.250.000	26,32
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I	26.600.000	1.400.000	5,26
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan	22.750.000	0	0,00
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Tegalrejo	1.175.000	0	0,00
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mantrijeron	2.350.000	0	0,00
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kotagede I	7.314.000	606.000	8,29
71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gedongtengen	7.250.000	3.636.000	50,15
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Wirobrajan	17.625.000	0	0,00
73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Ngampilan	13.461.000	815.000	6,05
74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kraton	14.514.500	1.006.000	6,93
75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Jetis	2.625.000	0	0,00
76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan Ii	37.675.000	7.557.500	20,06
77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	2.820.000	0	0,00
78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Pakualaman	6.876.000	2.270.000	33,01
79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kotagede Ii	4.839.000	1.077.000	22,26
80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondomanan	6.150.000	975.000	15,85
81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan I	15.218.000	1.925.000	12,65
82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo I	5.140.000	2.330.000	45,33
83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mergangsan	12.520.000	3.920.000	31,31
84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	14.875.000	1.785.000	12,00
85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman I	14.640.000	6.080.000	41,53

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	176.275.500	46.317.000	26,28
87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.165.000	0	0,00
88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman I	59.708.500	27.574.000	46,18
89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Jetis	25.730.000	7.040.000	27,36
90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mantrijeron	4.508.000	4.388.000	97,34
91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Tegalrejo	8.420.000	2.105.000	25,00
92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan Ii	16.508.500	7.538.500	45,66
93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	5.505.000	0	0,00
94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede Ii	12.079.000	12.079.000	100,00
95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Pakualaman	9.060.000	3.880.000	42,83
96	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	22.950.000	0	0,00
97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan I	14.449.000	3.440.000	23,81
98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondomanan	28.485.000	4.895.000	17,18
99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kraton	9.140.000	800.000	8,75
100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Ngampilan	28.885.000	3.150.000	10,91
101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Wirobrajan	37.400.000	17.970.000	48,05
102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gedongtengen	17.445.000	0	0,00
103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede I	40.996.000	12.686.000	30,94
104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mergangsan	36.460.000	7.465.000	20,47
105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo I	2.680.000	0	0,00
106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.120.000	5.730.000	56,62
107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	462.333.800	9.776.880	2,11
108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Ngampilan	18.900.000	4.650.000	24,60
109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mantrijeron	12.000.000	2.000.000	16,67
110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede I	7.600.000	0	0,00
111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman I	10.000.000	1.300.000	13,00
112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	8.700.000	3.600.000	41,38
113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Pakualaman	12.100.000	1.000.000	8,26
114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kraton	10.800.000	3.600.000	33,33
115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondomanan	19.200.000	9.600.000	50,00

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gedongtengen	6.000.000	2.500.000	41,67
117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo I	9.800.000	4.000.000	40,82
118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mergangsan	9.000.000	3.500.000	38,89
119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede Ii	10.000.000	5.000.000	50,00
120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	1.500.000	0	0,00
121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan I	4.600.000	1.400.000	30,43
122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Wirobrajan	16.000.000	6.000.000	37,50
123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Tegalrejo	8.800.000	2.200.000	25,00
124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Jetis	10.500.000	3.000.000	28,57
125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	78.490.000	49.809.990	63,46
126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan Ii	7.200.000	2.400.000	33,33
127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo	2.000.000	1.200.000	60,00
128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan	3.500.000	1.500.000	42,86
129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	3.000.000	1.000.000	33,33
130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.085.570.000	40.380.000	1,94
131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis	7.200.000	2.850.000	39,58
132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii	7.200.000	3.000.000	41,67
133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman	1.700.000	300.000	17,65
134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	3.000.000	1.250.000	41,67
135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii	6.000.000	3.000.000	50,00
136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	2.000.000	500.000	25,00
137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton	10.560.000	3.325.000	31,49
138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan	1.800.000	700.000	38,89
139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	2.700.000	600.000	22,22
140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen	1.500.000	400.000	26,67
141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan	10.000.000	700.000	7,00
142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron	3.000.000	1.000.000	33,33
143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan	3.000.000	2.300.000	76,67
144	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I	3.750.000	0	0,00

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I	900.000	0	0,00
146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton	1.000.000	200.000	20,00
147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gedongtengen	20.000.000	1.400.000	7,00
148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan	600.000	600.000	100,00
149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondomanan	10.650.000	0	0,00
150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan Ii	550.000	300.000	54,55
151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	1.200.000	0	0,00
152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan I	2.400.000	600.000	25,00
153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	2.000.000	0	0,00
154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	128.232.000	14.170.000	11,05
155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan	500.000	200.000	40,00
156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kraton	400.000	200.000	50,00
157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Tegalrejo	500.000	0	0,00
158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Kotagede Ii	1.200.000	0	0,00
159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Kotagede I	500.000	0	0,00
160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Gondomanan	500.000	0	0,00
161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan	68.520.000	17.915.000	26,15
162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman	56.078.000	14.477.000	25,82
163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede Ii	67.742.000	12.266.000	18,11
164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	61.398.000	6.812.000	11,09
165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan Ii	42.473.000	22.957.500	54,05
166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan	53.480.000	18.005.000	33,67
167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I	90.881.000	36.475.000	40,13
168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan	51.995.500	13.038.500	25,08
169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I	52.556.000	21.668.000	41,23
170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	296.919.500	14.850.000	5,00
171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I	106.660.000	22.050.000	20,67

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	68.622.500	14.170.000	20,65
173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantrijeron	48.312.500	11.232.000	23,25
174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis	68.265.000	26.265.000	38,48
175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I	60.587.500	14.732.900	24,32
176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo	62.342.500	18.682.500	29,97
177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton	84.910.000	40.514.800	47,71
178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan	38.120.000	23.010.000	60,36
179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen	79.471.000	24.690.000	31,07
180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	38.365.000	7.703.000	20,08
181	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede I	750.000	0	0,00
182	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Ngampilan	900.000	0	0,00
183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	250.000	250.000	100,00
184	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede Ii	3.000.000	0	0,00
185	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Pakualaman	1.400.000	350.000	25,00
186	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gedongtengen	1.600.000	800.000	50,00
187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondomanan	1.000.000	0	0,00
188	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mantrijeron	600.000	0	0,00
189	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	17.640.000	5.620.000	31,86
190	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman I	500.000	0	0,00
191	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Jetis	800.000	0	0,00
192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mergangsan	2.410.000	0	0,00
193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan	4.200.000	600.000	14,29
194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan	4.200.000	0	0,00
195	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede Ii	8.511.600	1.100.000	12,92
196	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	8.511.600	0	0,00
197	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan Ii	13.320.100	1.600.000	12,01
198	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman	4.200.000	0	0,00
199	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan	8.511.600	700.000	8,22
200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I	4.200.000	1.500.000	35,71
201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.208.141.640	71.401.999	5,91
202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen	4.200.000	2.500.000	59,52
203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalrejo	7.000.000	0	0,00

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron	4.200.000	0	0,00
205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis	4.200.000	1.200.000	28,57
206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I	4.200.000	0	0,00
207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	8.511.600	700.000	8,22
208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I	4.200.000	0	0,00
209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton	4.700.000	100.000	2,13
210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan	4.200.000	0	0,00
211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I	4.200.000	0	0,00
212	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	67.263.500	34.586.000	51,42
213	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	37.769.000	3.145.000	8,33
214	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	31.241.500	0	0,00
215	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	42.348.000	10.923.000	25,79
216	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	43.563.000	11.355.000	26,07
217	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	73.588.000	23.199.600	31,53
218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	86.845.000	23.880.000	27,50
219	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Jetis	78.810.000	33.600.000	42,63
220	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron	38.662.500	0	0,00
221	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo	40.822.500	3.510.000	8,60
222	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	86.009.000	9.240.000	10,74
223	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	669.065.512	203.991.000	30,49
224	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	73.097.500	11.650.000	15,94
225	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan	45.912.500	3.130.000	6,82
226	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	59.625.000	9.900.000	16,60
227	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii	62.384.000	7.698.500	12,34
228	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	41.173.000	0	0,00
229	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii	108.867.500	17.215.000	15,81
230	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	67.739.500	33.156.500	48,95
231	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	7.600.000	2.800.000	36,84
232	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	1.000.000	400.000	40,00
233	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	5.500.000	1.600.000	29,09
234	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	5.100.000	2.000.000	39,22
235	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	9.200.000	5.250.000	57,07
236	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	2.000.000	0	0,00
237	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii	18.200.000	3.750.000	20,60

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
238	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.394.000	76.133.000	53,09
239	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	1.400.000	100.000	7,14
240	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo	3.000.000	0	0,00
241	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	3.400.000	1.200.000	35,29
242	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan	4.900.000	500.000	10,20
243	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	10.200.000	4.000.000	39,22
244	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	1.100.000	200.000	18,18
245	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii	24.300.000	2.400.000	9,88
246	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	2.700.000	600.000	22,22
247	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron	2.200.000	550.000	25,00
248	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis	1.200.000	0	0,00
249	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	7.400.000	2.000.000	27,03
250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	86.082.000	7.940.000	9,22
251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kotagede Ii	5.885.000	1.600.000	27,19
252	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondokusuman I	3.050.000	1.200.000	39,34
253	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Mergangsan	8.755.000	3.100.000	35,41
254	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Tegalrejo	500.000	0	0,00
255	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kraton	9.776.000	0	0,00
256	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gedongtengen	2.366.000	1.000.000	42,27
257	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Ngampilan	4.600.000	3.150.000	68,48
258	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Pakualaman	190.000	0	0,00
259	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Danurejan I	2.469.000	0	0,00
260	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kotagede I	1.862.000	0	0,00
261	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondomanan	2.040.000	0	0,00
262	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Mantrijeron	2.570.000	0	0,00
263	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Wirobrajan	4.880.000	1.000.000	20,49
264	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Danurejan Ii	4.800.000	1.300.000	27,08
265	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	800.000	100.000	12,50
266	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Jetis	3.300.000	1.000.000	30,30
267	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Umbulharjo I	46.000	0	0,00
268	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	7.450.000	0	0,00
269	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	807.385.720	179.183.720	22,19
270	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I	32.550.000	6.050.000	18,59
271	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis	18.540.000	10.550.000	56,90

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
272	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron	57.210.000	4.500.000	7,87
273	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan	26.000.000	4.830.000	18,58
274	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I	81.910.000	25.980.000	31,72
275	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	950.584.620	247.525.000	26,04
276	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen	22.950.000	4.900.000	21,35
277	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I	19.900.000	3.800.000	19,10
278	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan	37.469.000	10.359.000	27,65
279	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	37.064.000	10.750.000	29,00
280	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan I	37.780.000	2.600.000	6,88
281	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondomanan	37.250.000	5.930.000	15,92
282	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede Ii	31.450.000	9.950.000	31,64
283	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman	52.820.000	13.840.000	26,20
284	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan	70.770.000	6.425.000	9,08
285	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	54.350.000	6.970.000	12,82
286	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan Ii	38.164.000	15.164.000	39,73
287	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton	41.950.000	19.075.000	45,47
288	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalrejo	55.170.000	11.350.000	20,57
289	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43.552.782.926	17.689.983.534	40,62
290	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gondokusuman I	600.000	250.000	41,67
291	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Jetis	8.200.000	2.600.000	31,71
292	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Tegalrejo	500.000	0	0,00
293	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Danurejan I	300.000	0	0,00
294	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Kotagede Ii	3.600.000	600.000	16,67
295	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Ngampilan	1.800.000	750.000	41,67
296	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Pakualaman	600.000	0	0,00
297	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Danurejan Ii	5.000.000	300.000	6,00
298	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Kotagede I	2.000.000	800.000	40,00

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
299	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Mergangsan	4.500.000	600.000	13,33
300	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Wirobrajan	5.000.000	500.000	10,00
301	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gedongtengen	500.000	0	0,00
302	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gondomanan	1.200.000	300.000	25,00
303	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Mantrijeron	600.000	100.000	16,67
304	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	750.000	150.000	20,00
305	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	151.350.000	2.346.000	1,55
306	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	359.379.442	83.638.568	23,27
307	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede Ii	318.450.000	95.276.813	29,92
308	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan	338.283.953	82.211.220	24,30
309	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo	198.612.592	41.701.000	21,00
310	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I	347.311.921	96.961.543	27,92
311	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mergangsan	111.200.000	15.349.007	13,80
312	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I	319.836.000	74.110.940	23,17
313	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan	286.116.540	96.025.725	33,56
314	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I	106.412.057	27.085.000	25,45
315	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen	428.215.723	132.670.261	30,98
316	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron	395.253.520	118.628.800	30,01
317	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis	113.788.999	10.280.000	9,03
318	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	292.065.740	73.077.676	25,02
319	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman	284.395.000	70.564.755	24,81
320	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I	348.901.928	92.878.685	26,62
321	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton	255.861.936	78.592.464	30,72
322	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan Ii	357.776.716	130.234.560	36,40
323	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan	98.808.330	11.595.918	11,74
324	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	528.855.509	355.965.118	67,31
325	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	883.851.067	366.479.138	41,46
326	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	49.250.000	0	0,00
327	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	698.400.000	0	0,00
328	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan I	50.000	0	0,00
329	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kraton	500.000	0	0,00

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
330	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondomanan	1.500.000	0	0,00
331	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo I	600.000	0	0,00
332	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan Ii	300.000	0	0,00
333	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede Ii	1.400.000	0	0,00
334	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Ngampilan	100.000	0	0,00
335	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Pakualaman	300.000	0	0,00
336	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gedongtengen	700.000	0	0,00
337	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede I	2.000.000	0	0,00
338	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mergangsan	400.000	200.000	50,00
339	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Wirobrajan	500.000	0	0,00
340	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman I	300.000	0	0,00
341	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	2.100.000	0	0,00
342	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mantrijeron	300.000	0	0,00
343	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	900.000	0	0,00
344	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	52.533.575	8.580.000	16,33
345	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	171.482.000	62.526.250	36,46
346	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I	900.000	0	0,00
347	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan	6.000.000	1.800.000	30,00
348	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan	1.500.000	500.000	33,33
349	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen	1.500.000	800.000	53,33
350	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii	6.300.000	3.000.000	47,62
351	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo	2.000.000	1.200.000	60,00
352	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I	6.000.000	500.000	8,33
353	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	12.000.000	2.400.000	20,00

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
354	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron	4.500.000	1.500.000	33,33
355	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	3.000.000	1.250.000	41,67
356	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	3.000.000	200.000	6,67
357	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan	5.000.000	1.000.000	20,00
358	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan	1.000.000	400.000	40,00
359	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	1.300.000	300.000	23,08
360	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	104.320.000	8.770.000	8,41
361	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii	6.000.000	3.000.000	50,00
362	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	10.385.000	3.560.000	34,28
363	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kotagede I	2.000.000	1.000.000	50,00
364	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Umbulharjo I	12.000.000	4.800.000	40,00
365	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Danurejan Ii	450.000	150.000	33,33
366	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Gondomanan	1.200.000	200.000	16,67
367	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Ngampilan	1.200.000	500.000	41,67
368	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	5.000.000	3.310.000	66,20
369	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kotagede Ii	150.000	0	0,00
370	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Gedongtengen	500.000	200.000	40,00
371	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Mantrijeron	150.000	0	0,00
372	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kraton	500.000	100.000	20,00
373	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	4.500.000	1.500.000	33,33
374	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	79.704.620	29.108.450	36,52
375	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	48.694.000	11.807.000	24,25
376	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	519.824.000	16.370.000	3,15
377	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	165.944.000	62.577.500	37,71
378	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.365.000	2.860.000	23,13
379	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede I	502.782.000	215.180.000	42,80
380	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kraton	403.098.000	215.420.000	53,44
381	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gedongtengen	531.372.000	218.155.000	41,06
382	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Tegalrejo	581.496.000	242.290.000	41,67
383	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Wirobrajan	571.128.000	237.970.000	41,67

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
384	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	413.840.000	183.440.000	44,33
385	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mantrijeron	395.659.000	174.012.000	43,98
386	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	100.992.000	50.496.000	50,00
387	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan Ii	372.168.000	155.070.000	41,67
388	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Pakualaman	412.084.000	167.910.000	40,75
389	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Jetis	610.064.000	254.165.000	41,66
390	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Ngampilan	479.462.000	229.390.000	47,84
391	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	855.012.000	427.506.000	50,00
392	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan I	312.132.000	130.055.000	41,67
393	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	402.539.000	163.168.000	40,53
394	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede Ii	312.756.000	130.315.000	41,67
395	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman I	439.632.000	196.440.000	44,68
396	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondomanan	403.120.000	201.560.000	50,00
397	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mergangsan	496.562.000	206.479.000	41,58
398	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo I	589.623.000	248.200.000	42,09
399	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	203.741.000	43.492.000	21,35
400	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.625.258.000	322.460.000	19,84
401	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatandan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6.560.000	1.219.000	18,58
402	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100.952.320	26.265.000	26,02
403	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	133.370.000	20.370.000	15,27
404	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	125.268.000	35.624.500	28,44

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
405	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	574.681.000	201.695.000	35,10
406	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Jetis	12.900.000	1.920.000	14,88
407	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mergangsan	22.140.000	1.650.000	7,45
408	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Tegalrejo	39.660.000	5.280.000	13,31
409	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	9.270.000	5.190.000	55,99
410	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan Ii	16.650.000	6.870.000	41,26
411	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman I	10.170.000	0	0,00
412	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kraton	22.470.000	10.320.000	45,93
413	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Pakualaman	8.850.000	2.400.000	27,12
414	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gedongtengen	14.250.000	0	0,00
415	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede Ii	8.280.000	2.160.000	26,09
416	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondomanan	27.480.000	13.800.000	50,22
417	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron	35.130.000	2.700.000	7,69
418	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Ngampilan	7.560.000	1.980.000	26,19
419	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan I	8.490.000	0	0,00
420	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede I	11.790.000	3.990.000	33,84
421	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	28.530.000	5.040.000	17,67
422	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo I	10.830.000	1.950.000	18,01
423	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Wirobrajan	19.560.000	7.650.000	39,11
424	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.055.500	23.445.000	49,82
425	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.953.750	4.493.750	90,71
426	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.953.750	0	0,00
427	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.553.750	3.057.750	55,06

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
428	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.553.750	0	0,00
429	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.261.500	18.237.500	46,45
430	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.617.000	1.241.000	3,21
431	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	117.053.961.350	62.420.765.985	53,33
432	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.856.000	40.440.000	39,32
433	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.220.000	805.000	25,00
434	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	59.571.000	24.620.000	41,33
435	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.670.000	1.670.000	100,00
436	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.919.000	24.150.400	36,64
437	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.220.000	805.000	25,00
438	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.760.000	1.380.000	50,00
439	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20.500.000	10.250.000	50,00
440	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.280.000	990.000	11,96
441	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.760.000	0	0,00
442	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	20.500.000	0	0,00
443	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.584.900	25.633.650	76,32
444	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.498.175	13.145.000	6,62
445	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.779.606	13.875.000	26,29
446	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.631.250	9.472.250	7,60
447	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	636.000	14,13
448	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	562.731.000	173.146.554	30,77
449	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	548.843.000	175.300.000	31,94
450	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.012.500	1.006.500	33,41
451	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	13.800.000	2.410.523	17,47
452	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	928.624.000	256.137.000	27,58
453	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	473.087.591	66.767.886	14,11
454	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.180.000	3.090.000	11,80
455	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.021.356	197.100.000	35,83
456	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.562.000	44.571.840	27,59
457	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I	776.392.760	353.004.864	45,47
458	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron	1.831.885.000	816.122.307	44,55
459	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	639.510.851	175.249.098	27,40
460	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I	2.565.973.800	1.386.670.515	54,04
461	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan	1.655.561.000	731.057.650	44,16
462	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii	624.906.339	334.491.400	53,53
463	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton	1.008.754.901	430.579.376	42,68

No	Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
464	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I	1.344.968.000	624.211.433	46,41
465	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	1.104.534.250	480.803.163	43,53
466	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan	797.017.688	451.707.571	56,67
467	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen	1.171.088.370	452.013.110	38,60
468	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii	950.616.361	418.036.639	43,98
469	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan	803.735.080	411.611.816	51,21
470	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman	587.063.000	261.009.945	44,46
471	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I	1.314.300.000	552.552.768	42,04
472	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis	1.960.525.000	974.687.871	49,72
473	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan	1.387.800.500	584.863.417	42,14
474	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo	2.827.119.000	1.118.867.339	39,58
		238.276.374.555	104.954.920.005	44,05

TABEL 2.4
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Jumlah kematian ibu	8 orang
		Angka Kematian Bayi	10.78
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7.97 %
		Prevalensi Stunting	12 %
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 Poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam**	**Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam = (Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**81.303.930.607,00**	**100% %**	**51.484.197.239,00**	**100% %**	**26.034.815.535,00**	**100%**	**56,68%**						
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**Jumlah balita yang melakukan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dibagi sasaran balita yang akan dipenuhi dikali 100%**	**77,00 %**	**0,00**	**88,00 %**	**0,00**	**77,23 %**	**0,00**	**39%**	**0,00**	**54%**	**0,00**	**138,46%**	**0,00%**						
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	**Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir = (Jumlah bayi bari lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam**	**99,50 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**99,20 %**	**0,00**	**50%**	**0,00**	**55.37%**	**0,00**	**110,74%**	**0,00%**						

				kurun waktu satu tahun)x 100%																		
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50%	0,00	54.74%	0,00	109,48%	0,00%						
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidimiologi dibagi jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dikali 100 %	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%						
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah keluarga sehat dibandingkan dengan jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarannya berkisar antara 0 – 1	0,44 skala 0-1	0,00	0,42 skala 0-1	0,00	0,41 skala 0-1	0,00	0.41	0,00	0.44	0,00	107,32%	0,00%						
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama sesuai standar	81,50 skala 1-100	0,00	82,75 skala 1-100	0,00	80,00 skala 1-100	0,00	80	0,00	82.79	0,00	103,49%	0,00%						
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	81,50 skala 0-100	0,00	83,62 skala 0-100	0,00	80,00 skala 0-100	0,00	80	0,00	83.62	0,00	104,53%	0,00%						
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium	61,00	0,00	65,92	0,00	46,00	0,00	46	0,00	65.92	0,00	143,30%	0,00%						

				Kesehatan																		
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas.	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas	64,00 %	0,00		0,00	61,00 %	0,00	61	0,00	75	0,00	122,95%	0,00%						
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%	60,00 %	0,00	100,00 %	0,00	54,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%						
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun, dibagi sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 % Catatan: Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan dan Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50%	0,00	54.65%	0,00	109,30%	0,00%						

				berikutnya.																		
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan di puskesmas dibagi Jumlah Jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%						
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan	Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota dibagi jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang wajib dilakukan monitoring dikali 100%	98,00 %	0,00	100,00 %	0,00	98,00 %	0,00	98%	0,00	100%	0,00	102,04%	0,00%						
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%						
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Persentase penduduk yang mempunyai JKN = (Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN / Jumlah semua Penduduk Kota Yk) x 100%	100,00 % dari UHC	0,00	105,23 %	0,00	100,00 % dari UHC	0,00	100% dari 95 UHC	0,00	100.33%	0,00	100,33%	0,00%						
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Rata-rata capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dan % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik dari 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta	95,00 %	0,00	99,41 %	0,00	95,00 %	0,00	95%	0,00	100%	0,00	105,26%	0,00%						

			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memenuhi persyaratan standar usaha dibagi jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ada di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	90,00 %	0,00	100,00 %	0,00	90,00 %	0,00	90%	0,00	98%	0,00	108,89%	0,00%						
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama ditambah Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei akreditasi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	89,47 %	0,00	83,33 %	0,00	86,84 %	0,00	87%	0,00	97.22%	0,00	111,75%	0,00%						
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	92,00 %	0,00	96,53 %	0,00	89,00 %	0,00	50%	0,00	88.16%	0,00	176,32%	0,00%						
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100%	82,50 %	0,00	100,00 %	0,00	82,20 %	0,00	50%	0,00	52.55%	0,00	105,10%	0,00%						
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang	95,00 %	0,00	100,00 %	0,00	87,50 %	0,00	50 %	0,00	76.97%	0,00	153,94%	0,00%						

			mendapatkan pelayanan kesehatan	mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi dikalikan 100%																		
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibagi jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100 %	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%						
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	95,00 %	0,00	100,00 %	0,00	87,5 %	0,00	73%	0,00	76.62%	0,00	104,96%	0,00%						
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	95,00 %	0,00	100,00 %	0,00	87,5 %	0,00	73%	0,00	76.79%	0,00	105,19%	0,00%						
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dibagi jumlah orang terduga TB dikalikan 100 %	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%						

			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini penyakit tidak menular dibagi jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang akan dipenuhi dikalikan 100 %**	**80,00 %**	**0,00**	**87,00 %**	**0,00**	**76,00 %**	**0,00**	**50 %**	**0,00**	**43.53%**	**0,00**	**87,06%**	**0,00%**						
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun.	**Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. dibagi jumlah kemantren di Kota Yogyakarta dikalikan 100%**	**100,00 %**	**0,00**		**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
			Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	**((Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan) : 3) x 100**	**83,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**80,00 %**	**0,00**	**80%**	**0,00**	**82.79%**	**0,00**	**103,49%**	**0,00%**					**dr. Abdul Latief**	
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	**(Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal dibagi Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%**	**81,00 %**	**0,00**	**83,03 %**	**0,00**	**80,25 %**	**0,00**	**50%**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**dr. Ira Rachmasari**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								**15.749.207.241,00**		**10.513.150.677,00**		**3.422.900.471,00**		**32.56%**						
		1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		135.000.000,00	100,00%	135.000.000,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00%						
			Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta faskes yang lain		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		50,00%		50,00%							

		2	Pengembangan Puskesmas				0,00		0,00		221.738.160,00	93,00%	205.562.160,00	20,00%	15.366.000,00	21,51%	7,48%						
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		0 unit		0 unit		18 unit		93,00%		20,00%		21,51%							
		3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		4.094.742.524,00	57,98%	1.800.501.000,00	65,39%	0,00	112,78%	0,00%						
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0 puskesmas		0 puskesmas		18 puskesmas		0,00%		65,39%		0,00%							
		4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		1.939.001.110,00	100,00%	1.939.001.110,00	100,00%	1.857.367.310,00	100,00%	95,79%						
				Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pengadaan ObatVaksin				0,00		0,00		3.555.243.247,00	61,95%	1.946.204.207,00	62,24%	668.765.582,00	100,47%	34,36%						
				Ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		62,24%		0,00%							
		6	Pengadaan Bahan Habis Pakai				0,00		0,00		4.909.882.200,00	90,77%	4.359.882.200,00	63,69%	762.864.526,00	70,17%	17,50%						
				Pengadaan Bahan Habis Pakai		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00%		63,69%		0,00%							
		7	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		65.000.000,00	100,00%	65.000.000,00	100,00%	64.961.085,00	100,00%	99,94%						
				Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		32.000.000,00	100,00%	32.000.000,00	100,00%	31.566.000,00	100,00%	98,64%						
				Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0 unit		0 unit		24 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		796.600.000,00	8,49%	30.000.000,00	8,49%	22.009.968,00	100,00%	73,37%						
				Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan		0 Puskesmas		0 Puskesmas		18 Puskesmas		0,00%		8,49%		0,00%							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									**64.906.500.746,00**		**40.528.319.942,00**		**22.554.629.614,00**		**55.65%**						
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				0,00		0,00		100.862.000,00	77,19%	77.431.000,00	77,19%	59.662.000,00	100,00%	77,05%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.236 Orang		77,19%		77,19%		100,00%							
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		56.250.000,00	51,02%	28.700.000,00	50,00%	19.800.000,00	98,00%	68,99%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		52 Orang		51,02%		50,00%		98,00%							
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		39.890.000,00	51,27%	20.225.000,00	51,27%	10.175.000,00	100,00%	50,31%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		53 Orang		51,27%		51,27%		100,00%							
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		49.872.000,00	48,50%	24.136.000,00	48,50%	18.336.000,00	100,00%	75,97%						
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		78 orang		48,50%		48,50%		100,00%							

		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I			0,00		0,00		52.748.000,00	59,36%	28.674.000,00	59,00%	14.858.900,00	99,39%	51,82%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		178 orang		59,36%		59,00%		99,39%							
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman Ii			0,00		0,00		47.620.000,00	45,43%	21.400.000,00	45,00%	5.680.000,00	99,05%	26,54%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		48 orang		45,43%		45,00%		99,05%							
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan			0,00		0,00		51.840.000,00	32,24%	16.700.000,00	32,24%	14.520.000,00	100,00%	86,95%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		63 Orang		32,24%		32,24%		100,00%							
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis			0,00		0,00		33.720.000,00	61,00%	20.420.000,00	57,00%	19.720.000,00	93,44%	96,57%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		151 orang		61,00%		57,00%		93,44%							
		18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I			0,00		0,00		67.820.000,00	50,00%	33.910.000,00	50,00%	23.288.000,00	100,00%	68,68%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		177 Orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede Ii			0,00		0,00		18.000.000,00	56,65%	10.120.000,00	55,00%	7.480.000,00	97,09%	73,91%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		146 orang		56,65%		55,00%		97,09%							
		20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		33.760.000,00	42,00%	14.180.000,00	42,00%	12.300.000,00	100,00%	86,74%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		101 orang		42,00%		42,00%		100,00%							
		21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		75.015.000,00	49,88%	28.915.000,00	40,85%	3.930.000,00	81,90%	13,59%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		251 Orang		49,88%		40,85%		81,90%							
		22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		50.530.000,00	48,88%	24.697.000,00	48,88%	19.241.000,00	100,00%	77,91%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		174 orang		48,88%		48,88%		100,00%							
		23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		39.478.000,00	55,83%	22.039.000,00	55,83%	19.097.000,00	100,00%	86,65%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		88 Orang		55,83%		55,83%		100,00%							
		24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		48.278.000,00	57,38%	27.704.000,00	57,38%	22.012.000,00	100,00%	79,45%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		49 orang		57,38%		57,38%		100,00%							
		25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		53.165.000,00	48,98%	25.080.000,00	48,89%	15.930.000,00	99,82%	63,52%							
				n Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		245 orang		48,98%		48,89%		99,82%							
		26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		63.550.000,00	45,67%	29.025.000,00	45,67%	25.055.000,00	100,00%	86,32%							
				jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		537 Orang		45,67%		45,67%		100,00%							

		27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		35.810.000,00	50,00%	17.838.000,00	50,00%	13.590.000,00	100,00%	76,19%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		87 Orang		50,00%		69,00%		138,00%							
		28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		34.630.000,00	47,82%	16.560.000,00	47,82%	13.880.000,00	100,00%	83,82%							
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		151 orang		47,82%		47,82%		100,00%							
		29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00		0,00		6.340.000,00	100,00%	6.340.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.236 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00		0,00		14.080.000,00	51,82%	7.252.500,00	51,82%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.200 Orang		51,82%		51,82%		100,00%							
		31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Wirobrajan			0,00		0,00		21.830.000,00	40,86%	8.920.000,00	40,86%	8.060.000,00	100,00%	90,36%							
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		962 orang		40,86%		40,86%		100,00%							
		32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo Ii			0,00		0,00		50.370.000,00	45,00%	21.870.000,00	45,00%	1.110.000,00	100,00%	5,08%							
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		795 Orang		45,00%		45,00%		100,00%							
		33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo I			0,00		0,00		12.260.000,00	96,25%	11.800.000,00	96,25%	4.120.000,00	100,00%	34,92%							
				jumlah balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		2.047 Orang		0,00%		75,98%		0,00%							
		34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Tegalrejo			0,00		0,00		22.200.000,00	37,60%	8.325.000,00	37,60%	5.500.000,00	100,00%	66,07%							
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.109 orang		37,60%		37,60%		100,00%							
		35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Ngampilan			0,00		0,00		26.160.000,00	80,96%	21.180.000,00	77,00%	8.480.000,00	95,11%	40,04%							
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		654 Orang		80,96%		77,00%		95,11%							
		36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Pakualaman			0,00		0,00		47.350.000,00	49,31%	23.350.000,00	49,31%	10.450.000,00	100,00%	44,75%							
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		40 orang		49,31%		49,31%		100,00%							
		37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mergangsan			0,00		0,00		22.830.000,00	60,40%	13.790.000,00	60,40%	5.015.000,00	100,00%	36,37%							
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		542 orang		60,40%		60,40%		100,00%							
		38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mantrijeron			0,00		0,00		84.000.000,00	62,63%	52.500.000,00	54,65%	14.100.000,00	87,26%	26,86%							
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.112 orang		62,63%		54,65%		87,26%							
		39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kraton			0,00		0,00		61.370.000,00	48,95%	30.040.000,00	45,92%	12.246.000,00	93,81%	40,77%							
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		598 orang		48,95%		45,92%		93,81%							

		40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		16.460.000,00	73,98%	12.020.000,00	64,00%	4.290.000,00	86,51%	35,69%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		567 orang		73,98%		64,00%		86,51%							
		41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		19.880.000,00	41,05%	8.160.000,00	41,05%	2.880.000,00	100,00%	35,29%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		975 Orang		41,05%		41,05%		100,00%							
		42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	310.000,00	100,00%	51,67%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 balita		0 balita		795 balita		50,00%		50,00%		100,00%							
		43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		20.540.000,00	36,73%	7.540.000,00	24,47%	4.420.000,00	66,62%	58,62%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		562 Orang		36,73%		24,47%		66,62%							
		44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		19.100.000,00	86,39%	16.500.000,00	61,17%	11.800.000,00	70,81%	71,52%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		345 orang		86,39%		61,17%		70,81%							
		45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		31.670.000,00	90,00%	28.420.000,00	70,00%	10.470.000,00	77,78%	36,84%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		905 orang		90,00%		70,00%		77,78%							
		46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		30.870.000,00	42,92%	13.260.000,00	42,92%	6.980.000,00	100,00%	52,64%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		657 orang		42,92%		42,92%		100,00%							
		47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		10.080.000,00	33,33%	3.360.000,00	16,67%	0,00	50,02%	0,00%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		337 Orang		33,33%		16,67%		50,02%							
		48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				0,00		0,00		288.378.480,00	56,88%	163.572.025,00	51,88%	38.663.000,00	91,21%	23,64%						
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		10.250 Orang		56,88%		51,88%		91,21%							
		49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				0,00		0,00		141.015.000,00	99,60%	140.440.000,00	99,60%	122.991.950,00	100,00%	87,58%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		29.700 Orang		99,60%		99,60%		100,00%							
		50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		26.600.000,00	5,26%	1.400.000,00	5,26%	1.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.300 Orang		5,26%		5,26%		100,00%							
		51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		15.050.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.787 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		52	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		12.600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

			Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		350 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		19.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		4.578 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		22.750.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		960 Orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		13.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar		0 orang		0 orang		1.677 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		15.750.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar		0 Orang		0 Orang		3.785 Orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		38.500.000,00	36,36%	14.000.000,00	36,36%	5.250.000,00	100,00%	37,50%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		5.797 orang		36,36%		36,36%		100,00%								
		58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		6.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.100 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		20.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.830 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		19.600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.686 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		25.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		2.056 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		9.450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		900 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		63	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		33.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

			Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		3.223 Orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		25.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		986 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		39.000.000,00	2,31%	900.000,00	2,31%	900.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		6.888 Orang		2,31%		2,31%		100,00%								
		66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		19.950.000,00	50,00%	9.800.000,00	50,00%	5.250.000,00	100,00%	53,57%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		4.040 Orang		50,00%		50,00%		100,00%								
		67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		7.700.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		3.700 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		17.625.000,00	15,43%	2.720.000,00	15,43%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		5.622 orang		15,43%		15,43%		100,00%								
		69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		2.820.000,00	36,00%	1.010.000,00	36,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		7.029 Orang		36,00%		36,00%		100,00%								
		70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		5.140.000,00	67,80%	3.485.000,00	67,80%	2.330.000,00	100,00%	66,86%							
				jumlah penduduk usia produktif yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		8.681 Orang		67,80%		67,80%		100,00%								
		71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		1.175.000,00	68,05%	799.000,00	68,05%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		3.631 orang		68,05%		68,05%		100,00%								
		72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		13.461.000,00	29,83%	4.015.000,00	29,83%	815.000,00	100,00%	20,30%							
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		4.972 Orang		29,83%		29,83%		100,00%								
		73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		6.876.000,00	33,33%	2.292.000,00	33,33%	2.270.000,00	100,00%	99,04%							
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		3.568 orang		33,33%		33,33%		100,00%								
		74	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		12.520.000,00	41,61%	5.210.000,00	41,61%	3.920.000,00	100,00%	75,24%							

			Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		6.405 orang		41,61%		41,61%		100,00%							
		75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		2.350.000,00	50,00%	1.150.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		7.132 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		14.514.500,00	20,65%	2.897.000,00	14,79%	1.006.000,00	71,62%	34,73%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		4.249 orang		20,65%		14,79%		71,62%							
		77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		4.839.000,00	32,00%	1.529.000,00	32,00%	1.077.000,00	100,00%	70,44%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		3.425 orang		32,00%		32,00%		100,00%							
		78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		14.875.000,00	44,67%	6.645.000,00	44,00%	1.785.000,00	98,50%	26,86%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		2.318 orang		44,67%		44,00%		98,50%							
		79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		7.314.000,00	40,22%	2.942.000,00	8,29%	606.000,00	20,61%	20,60%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar		0 Orang		0 Orang		3.488 Orang		40,22%		8,29%		20,61%							
		80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		2.625.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar		0 orang		0 orang		5.221 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		6.150.000,00	47,73%	2.725.000,00	43,63%	975.000,00	91,41%	35,78%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.886 Orang		47,73%		43,63%		91,41%							
		82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		14.640.000,00	84,23%	11.600.000,00	80,00%	6.080.000,00	94,98%	52,41%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		4.679 orang		84,23%		80,00%		94,98%							
		83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		7.250.000,00	66,67%	4.248.500,00	62,40%	3.636.000,00	93,60%	85,58%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		4.423 orang		66,67%		62,40%		93,60%							
		84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		37.675.000,00	32,69%	12.295.000,00	20,09%	7.557.500,00	61,46%	61,47%						
				Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		3.209 Orang		32,69%		20,09%		61,46%							
		85	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		15.218.000,00	25,30%	3.850.000,00	25,30%	1.925.000,00	100,00%	50,00%						

			Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		3.200 Orang		25,30%		25,30%		100,00%								
		86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				0,00		0,00		176.275.500,00	42,49%	73.859.750,00	40,00%	46.317.000,00	94,14%	62,71%							
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.887 Orang		42,49%		40,90%		96,26%								
		87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				0,00		0,00		18.165.000,00	86,84%	15.515.000,00	86,84%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		19.000 Orang		86,84%		86,84%		100,00%								
		88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		16.508.500,00	74,98%	10.988.500,00	74,98%	7.538.500,00	100,00%	68,60%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.100 Orang		74,98%		74,98%		100,00%								
		89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		14.449.000,00	52,38%	7.569.000,00	52,38%	3.440.000,00	100,00%	45,45%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		743 Orang		52,38%		52,38%		100,00%								
		90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		17.445.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.508 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		59.708.500,00	65,00%	35.629.000,00	65,00%	27.574.000,00	100,00%	77,39%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		2.425 orang		65,00%		65,00%		100,00%								
		92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		5.505.000,00	100,00%	5.505.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		858 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		28.485.000,00	33,33%	9.495.000,00	33,33%	4.895.000,00	100,00%	51,55%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.496 Orang		33,33%		33,33%		100,00%								
		94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		40.996.000,00	50,37%	20.648.000,00	50,37%	12.686.000,00	100,00%	61,44%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar		0 Orang		0 Orang		2.306 Orang		50,37%		50,37%		100,00%								
		95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		25.730.000,00	50,00%	12.545.000,00	46,00%	7.040.000,00	92,00%	56,12%							
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar		0 orang		0 orang		1.881 orang		50,00%		46,00%		92,00%								
		96	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		12.079.000,00	100,00%	12.079.000,00	100,00%	12.079.000,00	100,00%	100,00%							

			Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.116 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		9.140.000,00	45,45%	1.000.000,00	45,45%	800.000,00	100,00%	80,00%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.826 orang		45,45%		45,45%		100,00%							
		98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		36.460.000,00	60,19%	21.945.000,00	51,10%	7.465.000,00	84,90%	34,02%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		1.108 orang		60,19%		51,10%		84,90%							
		99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		4.508.000,00	100,00%	4.508.000,00	100,00%	4.388.000,00	100,00%	97,34%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		3.361 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		9.060.000,00	50,00%	4.530.000,00	50,00%	3.880.000,00	100,00%	85,65%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		938 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		28.885.000,00	89,09%	25.735.000,00	10,91%	3.150.000,00	12,25%	12,24%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.488 Orang		89,09%		10,91%		12,25%							
		102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		2.680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		3.460 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		8.420.000,00	75,30%	6.315.000,00	75,30%	2.105.000,00	100,00%	33,33%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		2.081 orang		75,30%		75,30%		100,00%							
		104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		22.950.000,00	23,00%	5.100.000,00	23,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		2.850 Orang		23,00%		23,00%		100,00%							
		105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		37.400.000,00	73,37%	27.440.000,00	65,56%	17.970.000,00	89,36%	65,49%						
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		2.717 orang		73,37%		65,56%		89,36%							
		106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				0,00		0,00		10.120.000,00	63,00%	5.975.000,00	63,00%	5.730.000,00	100,00%	95,90%						
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		28.699 Orang		63,00%		74,00%		117,46%							
		107	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		462.333.800,00	98,00%	452.108.800,00	80,00%	9.776.880,00	81,63%	2,16%						

			Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		13.594 Orang		98,00%		80,00%		81,63%							
		108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		8.700.000,00	55,00%	4.500.000,00	55,00%	3.600.000,00	100,00%	80,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		62 Orang		55,00%		55,00%		100,00%							
		109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		9.800.000,00	48,98%	4.800.000,00	48,98%	4.000.000,00	100,00%	83,33%							
				jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		0 orang		0 orang		95 orang		48,98%		48,98%		100,00%							
		110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		16.000.000,00	50,00%	8.000.000,00	50,00%	6.000.000,00	100,00%	75,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		26 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		18.900.000,00	50,00%	9.450.000,00	40,00%	4.650.000,00	80,00%	49,21%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		48 Orang		50,00%		40,00%		80,00%							
		112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		12.100.000,00	45,45%	5.500.000,00	45,45%	1.000.000,00	100,00%	18,18%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		31 orang		45,45%		45,45%		100,00%							
		113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		9.000.000,00	50,00%	4.500.000,00	50,00%	3.500.000,00	100,00%	77,78%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		95 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		8.800.000,00	50,72%	4.400.000,00	50,72%	2.200.000,00	100,00%	50,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		69 orang		50,72%		50,72%		100,00%							
		115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		12.000.000,00	50,00%	6.000.000,00	41,67%	2.000.000,00	83,34%	33,33%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		90 orang		50,00%		41,67%		83,34%							
		116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		10.800.000,00	66,67%	7.200.000,00	66,67%	3.600.000,00	100,00%	50,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		516 orang		66,67%		66,67%		100,00%							

		117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		10.000.000,00	50,57%	5.000.000,00	50,57%	5.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		32 orang		50,57%		50,57%		100,00%							
		118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		10.500.000,00	40,00%	4.200.000,00	36,00%	3.000.000,00	90,00%	71,43%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan GangguanJiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		65 orang		40,00%		36,00%		90,00%							
		119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		7.600.000,00	100,00%	7.600.000,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan GangguanJiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		51 Orang		100,00%		20,00%		20,00%							
		120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		19.200.000,00	50,00%	9.600.000,00	50,00%	9.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		38 Orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		0 orang		0 orang		9 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				0,00		0,00		78.490.000,00	75,00%	56.655.000,00	70,00%	49.809.990,00	93,33%	87,92%						
				Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		909 Orang		75,00%		70,00%		93,33%							
		123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		10.000.000,00	55,00%	4.400.000,00	45,00%	1.300.000,00	81,82%	29,55%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		43 orang		55,00%		45,00%		81,82%							
		124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		6.000.000,00	50,00%	3.000.000,00	50,00%	2.500.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan GangguanJiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		49 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		4.600.000,00	56,52%	2.600.000,00	41,00%	1.400.000,00	72,54%	53,85%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		25 Orang		56,52%		41,00%		72,54%							
		126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		7.200.000,00	50,00%	3.600.000,00	50,00%	2.400.000,00	100,00%	66,67%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		30 Orang		50,00%		50,00%		100,00%							

		127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		3.000.000,00	53,33%	1.600.000,00	50,00%	1.000.000,00	93,76%	62,50%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		15 Orang		53,33%		50,00%		93,76%							
		128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		6.000.000,00	60,00%	3.600.000,00	60,00%	3.000.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		191 Orang		60,00%		60,00%		100,00%							
		129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		1.500.000,00	53,33%	800.000,00	53,33%	400.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan SesuaiStandar		0 orang		0 orang		306 orang		53,33%		53,33%		100,00%							
		130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		3.750.000,00	69,00%	2.250.000,00	45,00%	0,00	65,22%	0,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		74 orang		69,00%		45,00%		65,22%							
		131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				0,00		0,00		2.085.570.000,00	98,81%	2.060.720.000,00	45,00%	40.380.000,00	45,54%	1,96%						
				Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang		0 orang		6.120 orang		98,81%		45,00%		45,54%							
		132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		2.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		195 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		10.000.000,00	50,00%	5.000.000,00	25,00%	700.000,00	50,00%	14,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		378 Orang		50,00%		25,00%		50,00%							
		134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan SesuaiStandar		0 Orang		0 Orang		340 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		7.200.000,00	49,98%	3.000.000,00	46,00%	2.850.000,00	92,04%	95,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan SesuaiStandar		0 orang		0 orang		414 orang		49,98%		46,00%		92,04%							
		136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		7.200.000,00	50,25%	3.600.000,00	50,25%	3.000.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		189 orang		50,25%		50,25%		100,00%							
		137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		10.560.000,00	50,00%	5.280.000,00	50,00%	3.325.000,00	100,00%	62,97%						
				Jumlag Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		35 orang		50,00%		50,00%		100,00%							

		138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%	66,67%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		347 orang		50,00%		50,00%		100,00%								
		139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	60,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		190 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		1.700.000,00	41,18%	700.000,00	41,18%	300.000,00	100,00%	42,86%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		167 orang		41,18%		41,18%		100,00%								
		141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		1.800.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%	700.000,00	100,00%	77,78%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		576 orang		50,00%		50,00%		100,00%								
		142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	92,00%	2.300.000,00	92,00%	76,67%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		289 Orang		100,00%		92,00%		92,00%								
		143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		3.500.000,00	42,86%	1.500.000,00	42,86%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		442 orang		42,86%		42,86%		100,00%								
		144	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	1.250.000,00	100,00%	83,33%						
				jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		701 orang		50,00%		50,00%		100,00%								
		145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		2.700.000,00	55,00%	1.400.000,00	55,00%	600.000,00	100,00%	42,86%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		394 Orang		55,00%		55,00%		100,00%								
		146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		2.000.000,00	56,00%	1.100.000,00	56,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		175 Orang		56,00%		56,00%		100,00%								
		147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		1.000.000,00	40,00%	400.000,00	40,00%	200.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yag Mendapatkan Pelayanan Sosial Standar		0 orang		0 orang		35 orang		40,00%		40,00%		100,00%								
		148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		10.650.000,00	70,43%	7.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		85 Orang		70,43%		0,00%		0,00%								

		149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		1.200.000,00	33,33%	400.000,00	33,33%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		10 orang		33,33%		33,33%		100,00%							
		150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				0,00		0,00		128.232.000,00	84,00%	106.866.000,00	70,00%	14.170.000,00	83,33%	13,26%						
				Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang		0 orang		9.630 orang		84,00%		70,00%		83,33%							
		151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		20.000.000,00	60,00%	12.000.000,00	60,00%	1.400.000,00	100,00%	11,67%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		333 orang		60,00%		60,00%		100,00%							
		152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		550.000,00	90,91%	500.000,00	63,64%	300.000,00	70,00%	60,00%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		0 Orang		0 Orang		159 Orang		90,91%		63,64%		70,00%							
		153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		2.400.000,00	58,33%	1.400.000,00	55,00%	600.000,00	94,29%	42,86%						
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		12 Orang		58,33%		55,00%		94,29%							
		154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		400.000,00	50,00%	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		68.520.000,00	44,34%	30.385.000,00	43,97%	17.915.000,00	99,17%	58,96%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		44,34%		43,97%		99,17%							
		157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		90.881.000,00	54,43%	49.470.000,00	54,43%	36.475.000,00	100,00%	73,73%						
				jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sesuai standar		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		54,43%		54,43%		100,00%							
		158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		68.622.500,00	50,00%	31.970.500,00	50,00%	14.170.000,00	100,00%	44,32%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		62.342.500,00	48,58%	30.057.500,00	48,58%	18.682.500,00	100,00%	62,16%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		48,58%		48,58%		100,00%							
		160	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		56.078.000,00	44,65%	25.039.000,00	42,51%	14.477.000,00	95,21%	57,82%						

			Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		44,65%		42,51%		95,21%								
		161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		51.995.500,00	48,05%	25.074.500,00	48,05%	13.038.500,00	100,00%	52,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		48,05%		48,05%		100,00%								
		162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		48.312.500,00	62,50%	23.807.500,00	57,00%	11.232.000,00	91,20%	47,18%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		62,50%		57,00%		91,20%								
		163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		84.910.000,00	50,04%	41.325.000,00	50,04%	40.514.800,00	100,00%	98,04%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,04%		50,04%		100,00%								
		164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		67.742.000,00	49,00%	32.870.000,00	30,00%	12.266.000,00	61,22%	37,32%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		10 dokumen		49,00%		30,00%		61,22%								
		165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		52.556.000,00	50,00%	26.278.000,00	50,00%	21.668.000,00	100,00%	82,46%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		68.265.000,00	52,00%	34.785.000,00	47,00%	26.265.000,00	90,38%	75,51%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		52,00%		47,00%		90,38%								
		167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		38.120.000,00	72,22%	24.940.000,00	68,07%	23.010.000,00	94,25%	92,26%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		72,22%		68,07%		94,25%								
		168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		61.398.000,00	56,01%	33.862.000,00	56,00%	6.812.000,00	99,98%	20,12%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		56,01%		56,00%		99,98%								
		169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0,00		0,00		296.919.500,00	65,00%	190.413.000,00	64,20%	14.850.000,00	98,77%	7,80%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		65,00%		64,20%		98,77%								
		170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		60.587.500,00	67,00%	37.978.750,00	60,00%	14.732.900,00	89,55%	38,79%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		67,00%		60,00%		89,55%								
		171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		79.471.000,00	48,39%	37.371.000,00	48,39%	24.690.000,00	100,00%	66,07%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		48,39%		48,39%		100,00%								
		172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		42.473.000,00	70,31%	27.333.500,00	68,22%	22.957.500,00	97,03%	83,99%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		70,31%		68,22%		97,03%								
		173	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		106.660.000,00	50,42%	53.780.000,00	50,00%	22.050.000,00	99,17%	41,00%							

			Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyrakat		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		50,42%		50,00%		99,17%								
		174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		1.600.000,00	50,00%	800.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		500.000,00	50,00%	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		50,00%		0,00%		0,00%								
		176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0,00		0,00		38.365.000,00	66,67%	15.753.500,00	50,00%	7.703.000,00	75,00%	48,90%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		66,67%		50,00%		75,00%								
		177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
		179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		800.000,00	50,00%	400.000,00	25,00%	0,00	50,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		50,00%		25,00%		50,00%								
		180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		750.000,00	100,00%	750.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
		181	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		3.000.000,00	50,23%	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		50,23%		0,00%		0,00%								
		182	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		2.410.000,00	68,05%	1.640.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		68,05%		0,00%		0,00%								
		184	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
		185	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		1.400.000,00	50,00%	700.000,00	50,00%	350.000,00	100,00%	50,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								

		186	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		17.640.000,00	55,00%	9.370.000,00	55,00%	5.620.000,00	100,00%	59,98%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%								
		187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		8.511.600,00	55,11%	4.605.800,00	55,00%	700.000,00	99,80%	15,20%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		11 Dokumen		55,11%		55,00%		99,80%								
		188	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		4.200.000,00	19,05%	800.000,00	19,05%	600.000,00	100,00%	75,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		19,05%		19,05%		100,00%								
		189	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	8,97%	0,00	8,97%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		8,97%		8,97%								
		190	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		7.000.000,00	43,00%	3.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		43,00%		0,00%		0,00%								
		191	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		4.200.000,00	71,43%	3.000.000,00	50,00%	0,00	70,00%	0,00%							
				jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		71,43%		50,00%		70,00%								
		192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		4.200.000,00	71,43%	3.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		71,43%		0,00%		0,00%								
		193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		8.511.600,00	8,22%	700.000,00	8,22%	700.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		8,22%		8,22%		100,00%								
		194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		4.200.000,00	28,57%	1.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		28,57%		0,00%		0,00%								
		195	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		4.700.000,00	36,17%	1.700.000,00	26,60%	100.000,00	73,54%	5,88%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		36,17%		26,60%		73,54%								
		196	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		8.511.600,00	57,00%	4.805.800,00	25,00%	1.100.000,00	43,86%	22,89%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		57,00%		25,00%		43,86%								
		197	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		4.200.000,00	85,71%	3.600.000,00	35,71%	1.500.000,00	41,66%	41,67%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		85,71%		35,71%		41,66%								
		198	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		4.200.000,00	46,00%	1.912.500,00	42,00%	1.200.000,00	91,30%	62,75%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		46,00%		42,00%		91,30%								
		199	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		50,00%		50,00%								
		200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		8.511.600,00	49,78%	4.237.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		49,78%		0,00%		0,00%								
		201	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		1.208.141.640,00	56,32%	578.409.640,00	17,31%	71.401.999,00	30,74%	12,34%							

			Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		0,00%		17,31%		0,00%								
		202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		4.200.000,00	50,00%	2.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		0,00%		0,00%								
		203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	15,00%	0,00	15,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		15,00%		15,00%								
		204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		13.320.100,00	62,84%	8.174.400,00	20,27%	1.600.000,00	32,26%	19,57%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		62,84%		20,27%		32,26%								
		205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		4.200.000,00	71,43%	3.000.000,00	71,43%	2.500.000,00	100,00%	83,33%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		71,43%		71,43%		100,00%								
		206	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		86.009.000,00	47,83%	27.100.000,00	47,83%	9.240.000,00	100,00%	34,10%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		47,83%		47,83%		100,00%								
		207	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		62.384.000,00	43,08%	25.337.000,00	43,08%	7.698.500,00	100,00%	30,38%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		43,08%		43,08%		100,00%								
		208	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		37.769.000,00	45,00%	14.908.500,00	45,00%	3.145.000,00	100,00%	21,10%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%								
		209	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		86.845.000,00	45,60%	36.485.000,00	40,00%	23.880.000,00	87,72%	65,45%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		45,60%		40,00%		87,72%								
		210	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0,00		0,00		669.065.512,00	55,66%	359.528.512,00	50,00%	203.991.000,00	89,83%	56,74%							
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS Bersama Lintas Sektoral di Wilayah Kemantren		0 Laporan		0 Laporan		14 Laporan		55,66%		50,00%		89,83%								
		211	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		41.173.000,00	27,47%	11.311.000,00	27,00%	0,00	98,29%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		27,47%		27,00%		98,29%								
		212	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		31.241.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		15 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		213	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		78.810.000,00	78,00%	60.450.000,00	67,00%	33.600.000,00	85,90%	55,58%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		78,00%		67,00%		85,90%								
		214	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		73.097.500,00	44,06%	32.203.500,00	20,00%	11.650.000,00	45,39%	36,18%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		44,06%		20,00%		45,39%								
		215	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		108.867.500,00	44,00%	47.075.500,00	22,00%	17.215.000,00	50,00%	36,57%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		9 dokumen		44,00%		22,00%		50,00%								
		216	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		42.348.000,00	66,73%	28.258.000,00	45,00%	10.923.000,00	67,44%	38,65%							

			Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		66,73%		45,00%		67,44%							
		217	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		38.662.500,00	44,76%	16.627.500,00	27,41%	0,00	61,24%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		44,76%		27,41%		61,24%							
		218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		45.912.500,00	9,98%	3.370.000,00	9,98%	3.130.000,00	100,00%	92,88%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		9,98%		9,98%		100,00%							
		219	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		67.739.500,00	54,26%	36.756.500,00	54,26%	33.156.500,00	100,00%	90,21%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		20 Dokumen		54,26%		54,26%		100,00%							
		220	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		43.563.000,00	65,57%	28.565.000,00	65,57%	11.355.000,00	100,00%	39,75%						
				jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		65,57%		65,57%		100,00%							
		221	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		73.588.000,00	44,15%	32.486.000,00	44,15%	23.199.600,00	100,00%	71,41%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		11 dokumen		44,15%		44,15%		100,00%							
		222	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		40.822.500,00	41,67%	16.922.500,00	41,67%	3.510.000,00	100,00%	20,74%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		41,67%		41,67%		100,00%							
		223	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		59.625.000,00	59,54%	35.500.000,00	30,99%	9.900.000,00	52,05%	27,89%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		59,54%		30,99%		52,05%							
		224	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		67.263.500,00	69,00%	45.563.500,00	67,00%	34.586.000,00	97,10%	75,91%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		16 Dokumen		69,00%		67,00%		97,10%							
		225	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		9.200.000,00	86,00%	7.800.000,00	85,00%	5.250.000,00	98,84%	67,31%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		86,00%		85,00%		98,84%							
		226	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		3.400.000,00	44,12%	1.500.000,00	44,12%	1.200.000,00	100,00%	80,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		44,12%		44,12%		100,00%							
		227	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		2.700.000,00	35,19%	950.000,00	35,19%	600.000,00	100,00%	63,16%						
				jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan sesuai standar		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		35,19%		35,19%		100,00%							
		228	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		7.600.000,00	50,00%	3.200.000,00	50,00%	2.800.000,00	100,00%	87,50%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		229	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		2.000.000,00	45,00%	900.000,00	45,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
		230	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		4.900.000,00	50,00%	2.450.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	20,41%						
				Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		231	Pengelolaan Surveilans				0,00		0,00		2.200.000,00	62,50%	1.300.000,00	62,50%	550.000,00	100,00%	42,31%						

			Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		62,50%		62,50%		100,00%							
		232	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		1.000.000,00	40,00%	400.000,00	40,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilens Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		233	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		18.200.000,00	51,00%	9.200.000,00	51,00%	3.750.000,00	100,00%	40,76%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
		234	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		10.200.000,00	49,02%	5.000.000,00	49,02%	4.000.000,00	100,00%	80,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		49,02%		49,02%		100,00%							
		235	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		236	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		5.500.000,00	43,64%	2.400.000,00	43,64%	1.600.000,00	100,00%	66,67%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		43,64%		43,64%		100,00%							
		237	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0,00		0,00		143.394.000,00	54,95%	78.790.000,00	54,95%	76.133.000,00	100,00%	96,63%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		54,95%		54,95%		100,00%							
		238	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		1.100.000,00	45,45%	500.000,00	45,00%	200.000,00	99,01%	40,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		45,45%		45,00%		99,01%							
		239	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		7.400.000,00	55,00%	3.700.000,00	55,00%	2.000.000,00	100,00%	54,05%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		55,00%		55,00%		100,00%							
		240	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		5.100.000,00	58,82%	3.000.000,00	58,82%	1.575.400,00	100,00%	52,51%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		58,82%		58,82%		100,00%							
		241	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		1.400.000,00	21,43%	300.000,00	21,43%	100.000,00	100,00%	33,33%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		21,43%		21,43%		100,00%							
		242	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		24.300.000,00	49,79%	12.100.000,00	27,98%	2.400.000,00	56,20%	19,83%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		49,79%		27,98%		56,20%							
		243	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0,00		0,00		86.082.000,00	20,00%	8.150.000,00	20,00%	7.940.000,00	100,00%	97,42%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		1.500 Orang		20,00%		20,00%		100,00%							
		244	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				0,00		0,00		807.385.720,00	80,94%	518.732.040,00	70,00%	179.183.720,00	86,48%	34,54%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		70,00%		0,00%							
		245	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0,00		0,00		950.584.620,00	50,00%	409.374.000,00	47,00%	247.525.000,00	94,00%	60,46%						
				Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,00%		47,00%		94,00%							

		246	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		37.780.000,00	26,97%	10.190.000,00	22,00%	2.600.000,00	81,57%	25,52%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		26,97%		22,00%		81,57%								
		247	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		54.350.000,00	45,74%	24.000.000,00	45,00%	6.970.000,00	98,38%	29,04%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		45,74%		45,00%		98,38%								
		248	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		32.550.000,00	26,00%	7.050.000,00	26,00%	6.050.000,00	100,00%	85,82%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		26,00%		26,00%		100,00%								
		249	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		22.950.000,00	72,22%	9.250.000,00	72,22%	4.900.000,00	100,00%	52,97%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 laporan		0 laporan		12 laporan		72,22%		72,22%		100,00%								
		250	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		37.250.000,00	42,86%	12.845.000,00	22,95%	5.930.000,00	53,55%	46,17%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		42,86%		22,95%		53,55%								
		251	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		38.164.000,00	54,67%	20.864.000,00	40,69%	15.164.000,00	74,43%	72,68%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		54,67%		40,69%		74,43%								
		252	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		18.540.000,00	76,00%	14.070.000,00	71,00%	10.550.000,00	93,42%	74,98%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		76,00%		71,00%		93,42%								
		253	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		19.900.000,00	36,93%	7.350.000,00	30,00%	3.800.000,00	81,23%	51,70%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		36,93%		30,00%		81,23%								
		254	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		31.450.000,00	33,56%	10.400.000,00	33,56%	9.950.000,00	100,00%	95,67%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		33,56%		33,56%		100,00%								
		255	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		41.950.000,00	46,42%	19.475.000,00	46,42%	19.075.000,00	100,00%	97,95%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		46,42%		46,42%		100,00%								
		256	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		57.210.000,00	33,98%	19.390.000,00	33,98%	4.500.000,00	100,00%	23,21%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		33,98%		33,98%		100,00%								
		257	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		37.469.000,00	54,90%	20.569.000,00	39,68%	10.359.000,00	72,28%	50,36%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		54,90%		39,68%		72,28%								
		258	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		52.820.000,00	35,37%	18.680.000,00	31,88%	13.840.000,00	90,13%	74,09%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		13 dokumen		35,37%		31,88%		90,13%								

		259	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		55.170.000,00	45,00%	24.550.000,00	45,00%	11.350.000,00	100,00%	46,23%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%								
		260	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		26.000.000,00	31,54%	8.200.000,00	31,15%	4.830.000,00	98,76%	58,90%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		31,54%		31,15%		98,76%								
		261	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		37.064.000,00	42,00%	15.166.000,00	42,00%	10.750.000,00	100,00%	70,88%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		11 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%								
		262	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		70.770.000,00	50,00%	17.610.000,00	50,00%	6.425.000,00	100,00%	36,48%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen		13 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		263	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0,00		0,00		43.552.782.926,00	67,78%	28.878.565.326,00	67,78%	17.689.983.534,00	100,00%	61,26%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		67,78%		67,78%		100,00%								
		264	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0,00		0,00		151.350.000,00	25,00%	8.834.000,00	26,00%	2.346.000,00	104,00%	26,56%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		25,00%		26,00%		104,00%								
		265	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		347.311.921,00	49,39%	170.522.463,00	49,00%	130.149.543,00	99,21%	76,32%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		49,39%		49,00%		99,21%								
		266	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		428.215.723,00	50,44%	199.207.600,00	50,13%	132.670.261,00	99,39%	66,60%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		58,24%		0,00%								
		267	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		348.901.928,00	56,21%	174.420.464,00	56,00%	92.878.685,00	99,63%	53,25%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		56,21%		56,00%		99,63%								
		268	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		359.379.442,00	51,66%	184.038.504,00	47,83%	83.638.568,00	92,59%	45,45%						
				Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		51,66%		47,83%		92,59%								
		269	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		111.200.000,00	57,84%	63.693.000,00	57,84%	15.349.007,00	100,00%	24,10%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		57,84%		57,84%		100,00%								
		270	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		395.253.520,00	49,98%	169.606.400,00	49,98%	118.628.800,00	100,00%	69,94%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		49,98%		0,00%								
		271	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		255.861.936,00	47,31%	115.538.853,00	39,50%	78.592.464,00	83,49%	68,02%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		47,31%		39,50%		83,49%								
		272	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		318.450.000,00	54,88%	173.980.000,00	54,88%	95.276.813,00	100,00%	54,76%						
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		54,88%		54,88%		100,00%								
		273	Operasional Pelayanan				0,00		0,00		319.836.000,00	44,89%	143.578.000,00	44,89%	74.110.940,00	100,00%	51,62%						

			Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		44,89%		44,89%		100,00%								
		274	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		113.788.999,00	85,00%	95.068.999,00	80,00%	10.280.000,00	94,12%	10,81%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		85,00%		80,00%		94,12%								
		275	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		357.776.716,00	56,22%	201.088.600,00	56,21%	130.234.560,00	99,98%	64,76%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		56,22%		56,21%		99,98%								
		276	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		338.283.953,00	50,00%	150.686.853,00	50,00%	82.211.220,00	100,00%	54,56%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		55,51%		111,02%								
		277	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		286.116.540,00	50,00%	143.043.500,00	41,74%	96.025.725,00	83,48%	67,13%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		41,74%		0,00%								
		278	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		292.065.740,00	42,00%	120.785.570,00	42,00%	73.077.676,00	100,00%	60,50%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%								
		279	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		98.808.330,00	52,72%	52.088.500,00	45,47%	11.595.918,00	86,25%	22,26%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		52,72%		45,47%		86,25%								
		280	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		198.612.592,00	43,95%	86.178.592,00	43,95%	41.701.000,00	100,00%	48,39%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		43,95%		43,95%		100,00%								
		281	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		106.412.057,00	50,00%	53.206.000,00	50,00%	27.085.000,00	100,00%	50,91%							
				jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		63,32%		0,00%								
		282	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		284.395.000,00	49,34%	137.404.834,00	49,34%	70.564.755,00	100,00%	51,36%							
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		49,34%		49,34%		100,00%								
		283	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services				0,00		0,00		883.851.067,00	57,86%	483.647.558,00	57,86%	366.479.138,00	100,00%	75,77%							
				Jumlah Dokumen Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		57,86%		0,00%								
		284	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		528.855.509,00	77,64%	410.596.609,00	77,40%	355.965.118,00	99,69%	86,69%							
				Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00%		77,40%		0,00%								
		285	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		49.250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
		286	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		698.400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakrditasi di Kabupaten / Kota		0 unit		0 unit		33 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
		287	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Upt Public				0,00		0,00		52.533.575,00	43,00%	21.130.000,00	43,00%	8.580.000,00	100,00%	40,61%							
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		43,00%		43,00%		100,00%								

			Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																				
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								**79.704.620,00**		**53.475.620,00**		**29.108.450,00**		**54.43%**							
		288	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			0,00		0,00		79.704.620,00	67,09%	53.475.620,00	66,00%	29.108.450,00	98,38%	54,43%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		67,09%		66,00%		98,38%							
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**568.518.000,00**		**389.251.000,00**		**28.177.000,00**		**7.24%**							
		289	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			0,00		0,00		48.694.000,00	74,00%	17.095.000,00	92,00%	11.807.000,00	124,32%	69,07%							
				Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		0 Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0 Fasilitas Pelayanan Kesehatan		50 Fasilitas Pelayanan Kesehatan		74,00%		92,00%		124,32%							
		290	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			0,00		0,00		519.824.000,00	75,00%	372.156.000,00	50,00%	16.370.000,00	66,67%	4,40%							
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		0 unit		0 unit		32 unit		75,00%		50,00%		66,67%							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**64.906.500.746,00**		**40.528.319.942,00**		**22.554.629.614,00**		**55.65%**							
		291	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			0,00		0,00		171.482.000,00	54,33%	91.137.500,00	54,50%	62.526.250,00	100,31%	68,61%							
				Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas		0 keluarga		0 keluarga		80.000 keluarga		54,33%		54,50%		100,31%							
		292	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00		0,00		104.320.000,00	86,00%	88.400.000,00	84,74%	8.770.000,00	98,53%	9,92%							
				Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		1.200 orang		86,00%		84,74%		98,53%							
		293	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00		0,00		10.385.000,00	41,00%	4.135.000,00	40,00%	3.560.000,00	97,56%	86,09%							
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		1.250 orang		41,00%		40,00%		97,56%							
		294	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00		0,00		5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	3.310.000,00	100,00%	66,20%							
				Jumlah kasus malaria import yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		295	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I			0,00		0,00		3.000.000,00	53,33%	1.600.000,00	40,00%	200.000,00	75,00%	12,50%							
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		15 Orang		53,33%		40,00%		75,00%							
		296	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii			0,00		0,00		6.000.000,00	60,00%	3.600.000,00	60,00%	3.000.000,00	100,00%	83,33%							
				Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0		0		0		60,00%		60,00%		100,00%							
		297	Pengelolaan pelayanan			0,00		0,00		1.500.000,00	26,67%	400.000,00	26,67%	800.000,00	100,00%	200,00%							

			kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		15 orang		26,67%		26,67%		100,00%							
		298	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		6.000.000,00	60,00%	3.500.000,00	60,00%	500.000,00	100,00%	14,29%						
				jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
		299	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		12.000.000,00	50,00%	6.000.000,00	50,00%	2.400.000,00	100,00%	40,00%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		46 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		300	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		5.000.000,00	70,20%	3.500.000,00	33,33%	1.000.000,00	47,48%	28,57%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		50 Orang		70,20%		33,33%		47,48%							
		301	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		302	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		6.300.000,00	57,50%	3.600.000,00	57,50%	3.000.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		11 orang		57,50%		57,50%		100,00%							
		303	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		4.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%	66,67%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		32 Orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		304	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	80,00%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		102 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		305	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		6.000.000,00	44,44%	2.600.000,00	44,44%	1.800.000,00	100,00%	69,23%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		30 Orang		44,44%		44,44%		100,00%							
		306	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	60,00%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		190 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		307	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	1.250.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 Orang		0 Orang		51 Orang		50,00%		50,00%		100,00%							

		308	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		1.300.000,00	50,00%	650.000,00	50,00%	300.000,00	100,00%	46,15%						
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		35 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		309	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		1.500.000,00	66,67%	1.000.000,00	66,67%	500.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		0 orang		0 orang		93 orang		66,67%		66,67%		100,00%							
		310	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		450.000,00	66,67%	300.000,00	33,33%	150.000,00	49,99%	50,00%						
				Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria		0 Orang		0 Orang		3 Orang		66,67%		33,33%		49,99%							
		311	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang		0 orang		2 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		312	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		500.000,00	40,00%	200.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		313	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	50,00%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang		0 Orang		8 Orang		100,00%		50,00%		50,00%							
		314	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		1.200.000,00	50,01%	600.000,00	18,58%	200.000,00	37,15%	33,33%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang		0 Orang		1 Orang		50,01%		18,58%		37,15%							
		315	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	40,00%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		316	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		4.500.000,00	34,00%	1.500.000,00	34,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang		0 orang		9 orang		34,00%		34,00%		100,00%							
		317	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		12.000.000,00	50,00%	6.000.000,00	50,00%	4.800.000,00	100,00%	80,00%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang		0 Orang		38 Orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		318	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang		0 Orang		1 Orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		319	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang		0 Orang		1 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		320	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		500.000,00	60,00%	300.000,00	60,00%	200.000,00	100,00%	66,67%						

			Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang		0 Orang		280 Orang		60,00%		60,00%		100,00%								
		321	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang		0 orang		304 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		322	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		1.200.000,00	50,86%	600.000,00	50,86%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,86%		50,86%		100,00%								
		323	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		500.000,00	80,00%	400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		80,00%		0,00%		0,00%								
		324	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
		325	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		53.480.000,00	50,00%	24.240.000,00	50,00%	18.005.000,00	100,00%	74,28%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		326	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		327	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		2.469.000,00	2,79%	69.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang		0 Orang		100 Orang		2,79%		0,00%		0,00%								
		328	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		4.800.000,00	41,67%	2.000.000,00	41,67%	1.300.000,00	100,00%	65,00%							
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		41,67%		41,67%		100,00%								
		329	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		5.885.000,00	41,00%	2.385.000,00	41,00%	1.600.000,00	100,00%	67,09%							
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang		0 orang		10 orang		41,00%		41,00%		100,00%								
		330	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		9.776.000,00	40,00%	2.576.000,00	15,00%	0,00	37,50%	0,00%							
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		40,00%		15,00%		37,50%								
		331	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		1.862.000,00	100,00%	1.862.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

			Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0		0		0		100,00%		0,00%		0,00%							
		332	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	25,00%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang		0 orang		12 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		333	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		3.050.000,00	57,00%	1.550.000,00	50,00%	1.200.000,00	87,72%	77,42%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 laporan		0 laporan		2 laporan		57,00%		50,00%		87,72%							
		334	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		2.366.000,00	57,73%	1.366.000,00	57,73%	1.000.000,00	100,00%	73,21%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang		0 orang		108 orang		57,73%		57,73%		100,00%							
		335	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		2.040.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang		0 Orang		1 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		336	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		3.300.000,00	40,00%	1.320.000,00	36,00%	1.000.000,00	90,00%	75,76%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang		0 orang		65 orang		40,00%		36,00%		90,00%							
		337	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		8.755.000,00	51,40%	4.500.000,00	45,69%	3.100.000,00	88,89%	68,89%						
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA		0 orang		0 orang		100 orang		51,40%		45,69%		88,89%							
		338	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		4.600.000,00	68,48%	3.150.000,00	68,48%	3.150.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang		0 Orang		1 Orang		68,48%		68,48%		100,00%							
		339	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		2.570.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang		0 Orang		25 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		340	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		46.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		341	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
		342	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		190.000,00	100,00%	190.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		0,00%		0,00%							
		343	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		4.880.000,00	32,79%	1.600.000,00	32,79%	1.000.000,00	100,00%	62,50%						
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan		0 orang		0 orang		48 orang		32,79%		32,79%		100,00%							

				Pelayanan Kesehatan																			
		344	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		7.450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang		0 orang		1.440 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		345	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		81.910.000,00	57,21%	46.860.000,00	57,21%	25.980.000,00	100,00%	55,44%						
				Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan dan penyakit menular dan tidak menular		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		57,21%		57,21%		100,00%							
		346	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		300.000,00	66,67%	200.000,00	65,00%	0,00	97,50%	0,00%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket		0 Paket		6 Paket		66,67%		65,00%		97,50%							
		347	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		5.000.000,00	60,00%	3.000.000,00	6,00%	300.000,00	10,00%	10,00%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 Paket		0 Paket		50 Paket		60,00%		6,00%		10,00%							
		348	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		500.000,00	20,00%	100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 orang		0 orang		108 orang		20,00%		0,00%		0,00%							
		349	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		600.000,00	55,00%	300.000,00	55,00%	250.000,00	100,00%	83,33%						
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		350	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		3.600.000,00	50,25%	1.800.000,00	50,25%	600.000,00	100,00%	33,33%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 paket		0 paket		12 paket		50,25%		50,25%		100,00%							
		351	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		2.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%	80,00%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		352	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	50,00%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket		0 Paket		12 Paket		50,00%		25,00%		50,00%							
		353	Pengambilan dan				0,00		0,00		8.200.000,00	50,00%	3.950.000,00	50,00%	2.600.000,00	100,00%	65,82%						

			Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 12		0 12		0 12		50,00%		50,00%		100,00%							
		354	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		1.800.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%	750.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Dititribusikan		0 Paket		0 Paket		36 Paket		50,00%		50,00%		100,00%							
		355	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		4.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	26,67%						
				Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional		0 Paket		0 Paket		30 Paket		50,00%		50,00%		100,00%							
		356	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	33,33%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 Paket		0 Paket		12 Paket		50,00%		50,00%		100,00%							
		357	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket		0 Paket		5 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		358	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 paket		0 paket		12 paket		50,00%		50,00%		100,00%							
		359	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		5.000.000,00	50,00%	2.500.000,00	40,00%	500.000,00	80,00%	20,00%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 Paket		0 Paket		50 Paket		50,00%		40,00%		80,00%							
		360	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		750.000,00	54,00%	400.000,00	54,00%	150.000,00	100,00%	37,50%						
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 paket		0 paket		15 paket		54,00%		54,00%		100,00%							
		361	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		50.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		362	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		300.000,00	50,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,00%		0,00%		0,00%							

				dan Pemberian Obat Massal)																			
		363	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		700.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		364	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		300.000,00	50,00%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		50,00%		0,00%		0,00%							
		365	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		366	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		1.400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		0 laporan		0 laporan		7 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		367	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		2.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		368	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		2.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		369	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		370	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		371	Investigasi Awal Kejadian				0,00		0,00		400.000,00	75,00%	300.000,00	75,00%	200.000,00	100,00%	66,67%						

			Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%							
		372	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		373	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		374	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		375	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		376	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**85,30%**	**48,70%**						
									Predikat kinerja							**Tinggi**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rerata dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK Indeks Perencanaan SDMK = Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi Jumlah UPT dan Dinkes dikali 5 Indeks Kinerja SDMK =**	**3,9 skala 0-5**	**0,00**		**0,00**	**3,6 skala 0-5**	**11.192.829.000,00**	**2.0 skala 0-5**	**5.849.226.500,00**	**3.20 skala 0-5**	**4.500.849.500,00**	**160%**	**78,74%**						

				Rerata SKP atau Angka Kredit dibagi jumlah target SKP atau Angka kredit dikali 5 Indeks Kompetensi SDMK = Jumlah SIP dibagi jumlah Nakes dikali 5 Indeks Pengembangan SDMK: Jumlah yang ikut pelatihan dibagi jumlah target Nakes yang dilatih dikali 5																	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama sesuai standar	81,50	0,00	82,75	0,00	80,00	0,00	80	0,00	82.79	0,00	103,49%	0,00%						
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	81,50	0,00	83,62	0,00	80,00	0,00	80	0,00	83.62	0,00	104,53%	0,00%						
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	61,00	0,00	65,92	0,00	46,00	0,00	46	0,00	65.92	0,00	143,30%	0,00%						
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%						
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar	jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik dibagi jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta dikali 100%	95,00 %	0,00		0,00	95,00 %	0,00	50%	0,00	101.95%	0,00	203,90%	0,00%						
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								165.944.000,00		77.582.500,00		62.577.500,00		80.66%						

		1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0,00		0,00		165.944.000,00	50,00%	77.582.500,00	64,75%	62.577.500,00	129,50%	80,66%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1.200 Dokumen		50,00%		64,75%		129,50%						
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								**9.401.627.000,00**		**4.478.009.000,00**		**4.115.812.000,00**		**91.91%**						
		2	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		0,00		12.365.000,00	56,00%	6.315.000,00	48,00%	2.860.000,00	85,71%	45,29%						
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		56,00%		48,00%		85,71%						
		3	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		100.992.000,00	50,00%	50.496.000,00	50,00%	50.496.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)		0 orang		0 orang		3 orang		50,00%		50,00%		100,00%						
		4	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services				0,00		0,00		855.012.000,00	54,00%	427.506.000,00	54,00%	419.913.000,00	100,00%	98,22%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		54,00%		54,00%		100,00%						
		5	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		439.632.000,00	50,00%	199.690.000,00	50,00%	196.440.000,00	100,00%	98,37%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		13 orang		50,00%		50,00%		100,00%						
		6	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		531.372.000,00	50,00%	221.405.000,00	50,00%	218.155.000,00	100,00%	98,53%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		19 orang		50,00%		50,00%		100,00%						
		7	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		372.168.000,00	50,00%	186.084.000,00	50,00%	155.070.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang		0 Orang		10 Orang		50,00%		50,00%		100,00%						
		8	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		312.132.000,00	50,00%	156.066.000,00	50,00%	130.055.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang		0 Orang		9 Orang		50,00%		50,00%		100,00%						
		9	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		403.120.000,00	50,00%	201.560.000,00	50,00%	201.560.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang		0 Orang		14 Orang		50,00%		50,00%		100,00%						
		10	Pemenuhan Kebutuhan				0,00		0,00		502.782.000,00	42,80%	215.180.000,00	42,80%	215.180.000,00	100,00%	100,00%						

			Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang		0 Orang		15 Orang		42,80%		42,80%		100,00%								
		11	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		413.840.000,00	54,28%	220.128.000,00	54,00%	183.440.000,00	99,48%	83,33%							
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		12 orang		54,28%		54,00%		99,48%								
		12	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		610.064.000,00	48,00%	274.300.000,00	48,00%	254.165.000,00	100,00%	92,66%							
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di FasilitasPelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		18 orang		48,00%		48,00%		100,00%								
		13	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		312.756.000,00	50,23%	156.378.000,00	50,23%	130.315.000,00	100,00%	83,33%							
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		9 orang		50,23%		50,23%		100,00%								
		14	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		403.098.000,00	53,44%	215.420.000,00	53,44%	215.420.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		14 orang		53,44%		53,44%		100,00%								
		15	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		395.659.000,00	49,98%	174.012.000,00	49,98%	174.012.000,00	100,00%	100,00%							
				Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		0 orang		0 orang		12 orang		49,98%		49,98%		100,00%								
		16	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		479.462.000,00	58,00%	275.268.000,00	58,00%	229.390.000,00	100,00%	83,33%							
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang		0 Orang		15 Orang		58,00%		58,00%		100,00%								
		17	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		496.562.000,00	42,10%	209.010.000,00	42,10%	206.479.000,00	100,00%	98,79%							
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		13 orang		42,10%		42,10%		100,00%								
		18	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		581.496.000,00	49,98%	242.290.000,00	49,98%	242.290.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		25 orang		49,98%		49,98%		100,00%								
		19	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		412.084.000,00	49,21%	202.792.000,00	49,21%	167.910.000,00	100,00%	82,80%							
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		13 orang		49,21%		49,21%		100,00%								
		20	Pemenuhan Kebutuhan				0,00		0,00		402.539.000,00	42,00%	166.670.000,00	42,00%	193.000.000,00	100,00%	115,80%							

			Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang		0 Orang		12 Orang		42,00%		42,00%		100,00%							
		21	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		589.623.000,00	51,58%	303.483.000,00	51,64%	248.200.000,00	100,12%	81,78%						
				Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan		0 Orang		0 Orang		18 Orang		0,00%		51,64%		0,00%							
		22	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		571.128.000,00	41,67%	237.970.000,00	41,67%	237.970.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang		0 orang		17 orang		41,67%		41,67%		100,00%							
		23	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		0,00		203.741.000,00	71,00%	135.986.000,00	71,00%	43.492.000,00	100,00%	31,98%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		71,00%		71,00%		100,00%							
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**1.625.258.000,00**		**1.293.635.000,00**		**322.460.000,00**		**24.93%**							
		24	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.625.258.000,00	85,00%	1.293.635.000,00	80,00%	322.460.000,00	94,12%	24,93%						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		0 orang		0 orang		30 orang		85,00%		80,00%		94,12%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,37%**	**86,10%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM SEDIAAN FARMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang laik hygiene sanitasi**	**Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**90,00 %**	**0,00**	**93,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**366.150.320,00**	**50% %**	**143.253.320,00**	**64.29% %**	**83.478.500,00**	**129%**	**58,27%**						
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan	**Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah**	**80,00 %**	**0,00**	**91,00 %**	**0,00**	**80,00 %**	**0,00**	**53%**	**0,00**	**88.89%**	**0,00**	**167,72%**	**0,00%**						

			Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	**Tangga yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%**																			
		Pemberian Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatan dan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								**6.560.000,00**		**3.280.000,00**		**1.219.000,00**		**37.16%**							
		1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatandan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0,00		0,00		6.560.000,00	53,33%	3.280.000,00	63,33%	1.219.000,00	118,75%	37,16%							
				Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan dan Optikalm Usaha Mikro Obat Trasisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin		0 sarana		0 sarana		30 sarana		53,33%		63,33%		118,75%								
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								**100.952.320,00**		**63.118.320,00**		**26.265.000,00**		**41.61%**							
		2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				0,00		0,00		100.952.320,00	66,67%	63.118.320,00	76,67%	26.265.000,00	115,00%	41,61%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		0 Dokumen		0 Dokumen		120 Dokumen		66,67%		76,67%		115,00%								
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								**133.370.000,00**		**29.360.000,00**		**20.370.000,00**		**69.38%**							
		3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0,00		0,00		133.370.000,00	50,00%	29.360.000,00	75,00%	20.370.000,00	150,00%	69,38%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		75,00%		150,00%								
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								**125.268.000,00**		**47.495.000,00**		**35.624.500,00**		**75.01%**							
		4	Pemeriksaan Post Market				0,00		0,00		125.268.000,00	45,00%	47.495.000,00	50,00%	35.624.500,00	111,11%	75,01%							

			pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga		0 sarana		0 sarana		65 sarana		45,00%		50,00%		111,11%								
											Rata-rata capaian kinerja						**123,72%**	**55,79%**						
											Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif**	**Jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %**	**100,00 %**	**0,00**		**0,00**	**80,00 %**	**888.691.000,00**	**0 %**	**559.552.500,00**	**0 %**	**274.595.000,00**	**0,00%**	**0,00%**							
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**888.691.000,00**		**559.552.500,00**		**274.595.000,00**		**49.07%**							
		1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0,00		0,00		574.681.000,00	73,56%	400.212.000,00	68,00%	201.695.000,00	92,44%	50,40%							
				Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)		0 Kelurahan		0 Kelurahan		36 Kelurahan		73,56%		68,00%		92,44%							
		2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		16.650.000,00	53,33%	8.880.000,00	53,33%	6.870.000,00	100,00%	77,36%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		53,33%		53,33%		100,00%							
		3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		14.250.000,00	22,22%	1.980.000,00	17,98%	0,00	80,92%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		22,22%		17,98%		80,92%							
		4	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		8.490.000,00	38,63%	3.280.000,00	34,00%	0,00	88,01%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		38,63%		34,00%		88,01%							
		5	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		8.280.000,00	46,00%	3.780.000,00	46,00%	2.160.000,00	100,00%	57,14%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		46,00%		46,00%		100,00%							
		6	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		11.790.000,00	64,12%	7.560.000,00	40,00%	3.990.000,00	62,38%	52,78%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		27 Dokumen		64,12%		40,00%		62,38%							

		7	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		12.900.000,00	21,00%	2.602.500,00	18,00%	1.920.000,00	85,71%	73,78%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		21,00%		18,00%		85,71%								
		8	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		10.170.000,00	100,00%	10.170.000,00	17,45%	0,00	17,45%	0,00%							
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 laporan		0 laporan		4 laporan		100,00%		17,45%		17,45%								
		9	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		27.480.000,00	76,67%	20.130.000,00	52,04%	13.800.000,00	67,88%	68,55%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		76,67%		52,04%		67,88%								
		10	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		28.530.000,00	51,35%	14.220.000,00	51,35%	5.040.000,00	100,00%	35,44%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		51,35%		51,35%		100,00%								
		11	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		22.140.000,00	20,33%	4.500.000,00	13,55%	1.650.000,00	66,65%	36,67%							
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		20,33%		13,55%		66,65%								
		12	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		22.470.000,00	46,60%	10.470.000,00	46,60%	10.320.000,00	100,00%	98,57%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		46,60%		46,60%		100,00%								
		13	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		35.130.000,00	52,01%	18.240.000,00	43,89%	2.700.000,00	84,39%	14,80%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		52,01%		43,89%		84,39%								
		14	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		10.830.000,00	20,22%	2.190.000,00	20,22%	1.950.000,00	100,00%	89,04%							
				Jumlah dokumen hasil bimtek dan surpevisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		1.817 Dokumen		20,22%		20,22%		100,00%								
		15	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		39.660.000,00	68,67%	27.248.000,00	68,67%	5.280.000,00	100,00%	19,38%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		68,67%		68,67%		100,00%								
		16	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas				0,00		0,00		8.850.000,00	40,68%	3.600.000,00	36,20%	2.400.000,00	88,99%	66,67%							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		40,68%		36,20%		88,99%								

			Pakualaman	(UKBM)																				
		17	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		7.560.000,00	44,44%	3.240.000,00	41,44%	1.980.000,00	93,25%	61,11%						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		44,44%		41,44%		93,25%							
		18	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		19.560.000,00	51,23%	10.020.000,00	51,23%	7.650.000,00	100,00%	76,35%						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tehnis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		51,23%		51,23%		100,00%							
		19	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		9.270.000,00	78,00%	7.230.000,00	75,00%	5.190.000,00	96,15%	71,78%						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		34 Dokumen		78,00%		75,00%		96,15%							
									Rata-rata capaian kinerja								**85,49%**	**49,99%**						
									Predikat kinerja								**Tinggi**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei**			**0,00**		**0,00**		**144.524.773.628,00**		**89.684.600.286,00**		**74.111.351.050,00**	**0,00%**	**82,63%**						
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	**sesuai dengan penialian yang diberikan oleh Inspektorat**		**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev., Ak.**	
			Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	**(Realisasi pendapatan dibagi target pendapatan) kali 100**	**100,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**53,77%**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**May Indra, S.Kom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**145.949.000,00**		**75.854.500,00**		**50.475.000,00**		**66.54%**						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		47.055.500,00	57,16%	26.896.000,00	57,00%	23.445.000,00	99,72%	87,17%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		57,16%		57,00%		99,72%							
		2	Koordinasi dan				0,00		0,00		4.953.750,00	100,00%	4.953.750,00	100,00%	4.493.750,00	100,00%	90,71%						

			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		4.953.750,00	24,85%	1.231.000,00	24,00%	0,00	96,58%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		24,85%		24,00%		96,58%								
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.553.750,00	100,00%	5.553.750,00	100,00%	3.057.750,00	100,00%	55,06%							
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.553.750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		39.261.500,00	47,27%	18.559.000,00	47,27%	18.237.500,00	100,00%	98,27%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		47,27%		47,27%		100,00%								
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		38.617.000,00	48,32%	18.661.000,00	35,60%	1.241.000,00	73,68%	6,65%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		48,32%		35,60%		73,68%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**117.290.417.350,00**		**74.102.617.368,00**		**62.513.256.385,00**		**84.36%**						
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		117.053.961.350,00	65,00%	73.986.647.868,00	64,00%	62.420.765.985,00	98,46%	84,37%							
				Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		12 Orang/Bulan		65,00%		64,00%		98,46%								
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		102.856.000,00	51,00%	50.537.500,00	50,00%	40.440.000,00	98,04%	80,02%							
				Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		51,00%		50,00%		98,04%								
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		3.220.000,00	27,00%	805.000,00	27,00%	805.000,00	100,00%	100,00%							
				Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		27,00%		27,00%		100,00%								
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		59.571.000,00	51,00%	29.383.000,00	50,00%	24.620.000,00	98,04%	83,79%							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		51,00%		50,00%		98,04%								
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%	100,00%							
				Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		65.919.000,00	51,00%	32.769.000,00	50,00%	24.150.400,00	98,04%	73,70%						
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		51,00%		50,00%		98,04%						
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		3.220.000,00	27,00%	805.000,00	27,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		27,00%		27,00%		100,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**34.300.000,00**		**15.310.000,00**		**12.620.000,00**		**82.43%**						
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.760.000,00	50,00%	1.380.000,00	50,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
		16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		20.500.000,00	50,00%	10.250.000,00	50,00%	10.250.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%						
		17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		8.280.000,00	33,33%	2.760.000,00	33,00%	990.000,00	99,01%	35,87%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		33,33%		33,00%		99,01%						
		18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.760.000,00	33,33%	920.000,00	30,00%	0,00	90,01%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		33,33%		30,00%		90,01%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**20.500.000,00**		**10.250.000,00**		**0,00**		**0%**						
		19	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		20.500.000,00	50,00%	10.250.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**976.724.931,00**		**469.739.001,00**		**235.908.454,00**		**50.22%**						
		20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		33.584.900,00	76,33%	25.634.900,00	76,33%	25.633.650,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		76,33%		76,33%		100,00%						
		21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		198.498.175,00	53,06%	105.325.675,00	51,00%	13.145.000,00	96,12%	12,48%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		6 Paket		53,06%		51,00%		96,12%						
		22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		52.779.606,00	26,34%	13.904.200,00	26,29%	13.875.000,00	99,81%	99,79%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		26,34%		26,29%		99,81%						
		23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		124.631.250,00	55,19%	68.781.226,00	53,00%	9.472.250,00	96,03%	13,77%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		55,19%		53,00%		96,03%						
		24	Penyediaan Bahan				0,00		0,00		4.500.000,00	48,89%	2.200.000,00	40,00%	636.000,00	81,82%	28,91%						

			Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		48,89%		40,00%		81,82%								
		25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		562.731.000,00	45,12%	253.893.000,00	43,00%	173.146.554,00	95,30%	68,20%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		247 Laporan		45,12%		43,00%		95,30%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**548.843.000,00**		**440.843.000,00**		**175.300.000,00**		**39.76%**							
		26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		548.843.000,00	80,34%	440.843.000,00	78,00%	175.300.000,00	97,09%	39,76%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		94 Unit		80,34%		78,00%		97,09%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**945.436.500,00**		**528.195.996,00**		**259.554.023,00**		**49.14%**							
		27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.012.500,00	57,96%	1.746.000,00	40,00%	1.006.500,00	69,01%	57,65%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		57,96%		40,00%		69,01%								
		28	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		13.800.000,00	50,00%	6.900.000,00	50,00%	2.410.523,00	100,00%	34,94%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		928.624.000,00	55,95%	519.549.996,00	50,00%	256.137.000,00	89,37%	49,30%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		55,95%		50,00%		89,37%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.210.850.947,00**		**739.363.319,00**		**311.529.726,00**		**42.13%**							
		30	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		473.087.591,00	50,10%	236.902.091,00	48,00%	66.767.886,00	95,81%	28,18%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		51 Unit		50,10%		48,00%		95,81%								
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		26.180.000,00	35,14%	9.200.000,00	33,00%	3.090.000,00	93,91%	33,59%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		49 Unit		35,14%		33,00%		93,91%								
		32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		550.021.356,00	73,40%	403.730.228,00	71,00%	197.100.000,00	96,73%	48,82%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		6 Unit		73,40%		71,00%		96,73%								
		33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		161.562.000,00	55,42%	89.531.000,00	48,00%	44.571.840,00	86,61%	49,78%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		100 Unit		55,42%		48,00%		86,61%								
		Peningkatan Pelayanan BLUD									**23.351.751.900,00**		**13.302.427.102,00**		**10.552.707.462,00**		**79.33%**							
		34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		776.392.760,00	59,40%	461.191.468,00	59,00%	348.172.044,00	99,33%	75,49%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		59,40%		59,00%		99,33%								
		35	Pelayanan dan Penunjang				0,00		0,00		624.906.339,00	62,32%	389.415.715,00	62,32%	334.491.400,00	100,00%	85,90%							

			Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		62,32%		62,32%		100,00%								
		36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		1.171.088.370,00	53,10%	620.822.658,00	53,10%	452.013.110,00	100,00%	72,81%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		53,10%		53,10%		100,00%								
		37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		1.314.300.000,00	60,00%	752.302.100,00	60,00%	552.552.768,00	100,00%	73,45%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		60,00%		60,00%		100,00%								
		38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		1.831.885.000,00	59,83%	1.095.574.100,00	59,83%	816.122.307,00	100,00%	74,49%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		59,83%		59,83%		100,00%								
		39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		1.008.754.901,00	53,07%	535.306.868,00	50,00%	430.579.376,00	94,22%	80,44%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		53,07%		50,00%		94,22%								
		40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		950.616.361,00	58,24%	547.450.000,00	54,57%	418.036.639,00	93,70%	76,36%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		58,24%		54,57%		93,70%								
		41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		1.960.525.000,00	50,00%	958.470.450,00	50,00%	974.687.871,00	100,00%	101,69%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		50,00%		50,00%		100,00%								
		42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		639.510.851,00	58,68%	371.257.639,00	56,02%	175.249.098,00	95,47%	47,20%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		58,68%		56,02%		95,47%								
		43	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		1.344.968.000,00	61,45%	826.545.400,00	61,45%	624.211.433,00	100,00%	75,52%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		61,45%		61,45%		100,00%								
		44	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		803.735.080,00	67,30%	539.319.100,00	67,30%	411.611.816,00	100,00%	76,32%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		67,30%		67,30%		100,00%								
		45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		1.387.800.500,00	59,55%	826.054.700,00	59,00%	584.863.417,00	99,08%	70,80%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		59,55%		59,00%		99,08%								
		46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		2.565.973.800,00	59,47%	1.525.867.530,00	59,47%	1.386.670.515,00	100,00%	90,88%							
				jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan sesuai standar		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00%		59,47%		0,00%								
		47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		1.104.534.250,00	50,00%	546.654.250,00	50,00%	480.803.163,00	100,00%	87,95%							
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		50,00%		50,00%		100,00%								

		48	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		587.063.000,00	67,27%	394.892.250,00	67,27%	261.009.945,00	100,00%	66,10%						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		67,27%		67,27%		100,00%							
		49	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		2.827.119.000,00	49,98%	1.406.012.851,00	49,98%	1.118.867.339,00	100,00%	79,58%						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit kerja		0 Unit kerja		1 Unit kerja		49,98%		49,98%		100,00%							
		50	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		1.655.561.000,00	53,70%	888.876.700,00	53,70%	731.057.650,00	100,00%	82,25%						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja		0 unit kerja		1 unit kerja		53,70%		53,70%		100,00%							
		51	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		797.017.688,00	77,34%	616.413.323,00	70,00%	451.707.571,00	90,51%	73,28%						
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		77,34%		70,00%		90,51%							
Rata-rata capaian kinerja																**96,43%**	**65,03%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
Total anggaran dari seluruh program											**238.276.374.555,00**		**147.720.829.845,00**		**105.005.089.585,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)																**87,79%**	**71,08%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																**Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: -Adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk pelaksanaan program dan sasaran di Dinkes -Sarpras yang memadai -Komitmen jejaring yang kuat -Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan dukungan dana DAK -Adanya Koordinasi dengan Lintas Program, Koordinasi dengan Lintas Sektor, maupun pihak LSM.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: -Pelaksanaan skrining kesehatan pada peserta didik baru dilaksanakan mulai bulan Juli -pelaksanaan kegiatan posbindu tertunda karena bulan ramadhan dan persiapan akreditasi pusk -Belum semua sasaran hadir ke posyandu/faskes secara berkala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: - Agar diupayakan pencapaian indikator persentase usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan dgn memanfaatkan event2 lain lintas OPD utk menjaring sasaran. - Pencapaian indikator persentase anak pd usia dasar yg mendapatkan pelayanan kesehatan optimis tercapai di TW III dengan metode skrening mandiri melalui mob screen dan roadshow ke sekolah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Agar target dan upaya2 yg bersifat promotif dan preventif lebih ditingkatkan dgn harapan kejadian kesakitan pada masyarakat bisa menurun baik itu penyakit menular maupun tdk menular

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala DINAS KESEHATAN

drg. EMMA RAHMI ARYANI ,M.M.

NIP. 196606091993032004

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Faktor–Faktor dalam Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perlu peningkatan upaya *promotif* dan *preventif* kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga.
b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara lebih baik.
c. Perlunya peningkatan upaya keterjaminan ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kota Yogyakarta melalui program JKN (BPJS) maupun Program Jaminan pembiayaan dan Pemeliharaan kesehatan daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap faslitas pelayanan kesehatan.
d. Masih tingginya angka kematian dan kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, sehingga perlu peningkatan pengawasan oleh surveilans yang lebih baik sehingga dpat ditanggulangi dan diintervensi secara dini.
e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan.
f. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal serta masih rendahnya
g. Melanjutkan aktifitas sub kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti YES 119, Rumah Pemulihan Gizi, Rumah sehat Lansia, Community deal pencegahan penyakit menular potensial wabah (DBD, H1N1, H5N1, Campak, Difteri, Diare) dan penyakit tidak menular di tingkat kelurahan.
h. Adanya dukungan sumber-sumber anggaran untuk percepatan penyelesaian permasalahan program.

B. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2023 terdiri dari Program Internal dan Program Eksternal, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada dokumen perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2023 ini tidak ada penambahan maupun pengurangan program namun ada penambahan satu kegiatan.

Hal ini dikarenakan kebijakan baru pada pemetaan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan yang mewarnai dinamika perubahan sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Pada perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2023 selain menambah kegiatan juga terdapat penambahan sub kegiatan, sehingga susunannya menjadi 1 (satu) program internal, 4 (empat) program eksternal, 22 kegiatan, 474 sub kegiatan.

Kegiatan dan sub kegiatan yang bertambah adalah :

Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Internal pada Dinas Kesehatan

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023		
Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	01.201. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		01.201.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

		01.201.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		01.201.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		01.201.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		01.201.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	01.202. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		01.202.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
		01.202.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		01.202.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		01.202.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		01.202.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		01.202.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	01.203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	01.203.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		01.203.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		01.203.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		01.203.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	01.205. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	01.205.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

		01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	01.207. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	01.207.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	01.209. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		01.209.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	01.210. Peningkatan Pelayanan BLUD	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Selain Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang menjadi kewajiban OPD yaitu yang bersifat Internal, bahwa untuk mendukung pencapaian program dalam rangka pemenuhan capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan maka diperlukan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Eksternal pada Dinas Kesehatan. Berikut disampaikan data dimaksud;

Tabel 3.2: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Eksternal pada Dinas Kesehatan

02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	02.201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	02.201.06 Pengembangan Puskesmas

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		02.201.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		02.201.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		02.201.16 Pengadaan Obat dan Vaksin
		02.201.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
		02.201.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		02.201.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		02.201.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (lab)
		02.201.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
	02.202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

		02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		02.202.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		02.202.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		02.202.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		02.202.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		02 2.02.28. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

		02.202.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
		02.202.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		02.202.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		02.202.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		02.202.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
		02.202.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		02.202.42 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
	02.203 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	02.203.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	02.204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	02.204.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		02.204.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	03.201. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	03.201.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	03.202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	03.202.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

		03.202.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	03.203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	03.203.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	04.201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	04.201.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	04.203 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	04.203.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	04.204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	04.204.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	04.206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	04.206.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	05.201 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	05.201.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	05.203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

C. Perubahan Belanja Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Secara rinci, perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 tertuang pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023
Pemerintah Kota Yogyakarta

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**190,886,109,497**	**198,594,715,501**					**195,675,224,486**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**121,333,021,728**	**131,558,964,723**					**127,396,409,797**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**305,949,000**	**113,597,000**					**150,327,163**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	47,055,500	47,055,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	25,956,000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	4,953,750	4,953,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	5,102,363
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	4,953,750	4,953,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	5,102,363
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	5,553,750	5,553,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	5,720,363
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	5,553,750	5,553,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	5,720,363

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	39,261,500	39,261,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	96,272,761
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	198,617,000	6,265,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	6,452,950
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**117,290,417,350**	**125,833,212,350**					**121,465,562,600**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terkelolanya dokumen admiistrasi keuangan perangkat daerah secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	100 persen	100 persen	117,053,961,350	125,597,531,350			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	121,321,696,650
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terkelolanya dokumen admiistrasi keuangan perangkat daerah secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	102,856,000	98,436,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	91,253,550
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terkelolanya dokumen admiistrasi keuangan perangkat daerah secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	3,220,000	3,220,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	3,296,000
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkelolanya dokumen admiistrasi keuangan perangkat daerah secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	59,571,000	59,571,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	2,472,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terkelolanya dokumen admiistrasi keuangan perangkat daerah secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1,670,000	1,670,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	1,957,000
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terkelolanya dokumen admiistrasi keuangan perangkat daerah secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	18 Laporan	18 Laporan	100 persen	100 persen	65,919,000	69,564,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	41,591,400
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terkelolanya dokumen admiistrasi keuangan perangkat daerah secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	3,220,000	3,220,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	3,296,000
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**34,300,000**	**32,920,000**					**33,907,600**
1	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terkelolanya administrasi barang milik daerah pada Dinas Kesehatan secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	2,760,000	2,760,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	2,842,800
1	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terkelolanya administrasi barang milik daerah pada Dinas Kesehatan secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	20,500,000	20,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	21,115,000
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya administrasi barang milik daerah pada Dinas Kesehatan secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	8,280,000	8,280,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	8,528,400
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya administrasi barang milik daerah pada Dinas Kesehatan secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	2,760,000	1,380,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	1,421,400
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**20,500,000**	**20,500,000**					**21,115,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terkelolanya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	20,500,000	20,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	21,115,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**976,724,931**	**1,054,213,425**					**1,085,839,828**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terkelolanya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	33,584,900	55,688,900			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	57,359,567
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terkelolanya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	8 Paket	100 persen	100 persen	198,498,175	175,081,319			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	180,333,759
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terkelolanya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	52,779,606	39,558,706			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	40,745,467
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terkelolanya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	124,631,250	106,638,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	109,837,655
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terkelolanya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	4,500,000	2,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	2,286,600
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkelolanya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	247 Laporan	271 Laporan	100 persen	100 persen	562,731,000	675,026,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	695,276,780
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**548,843,000**	**2,288,293,000**					**2,356,941,790**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terkelolanya pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	94 Unit	342 Unit	100 %	100 %	548,843,000	2,288,293,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	2,356,941,790
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,065,076,500**	**840,407,000**					**865,619,210**
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3,012,500	2,623,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	2,701,690
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terkelolanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	13,800,000	8,160,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	8,404,800
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terkelolanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,048,264,000	829,624,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	854,512,720
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,091,210,947**	**1,375,821,948**					**1,417,096,606**
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	51 Unit	51 Unit	100 %	100 %	473,087,591	417,198,300			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	429,714,249

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	49 Unit	33 Unit	100 %	100 %	26,180,000	20,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	21,012,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Unit	7 Unit	100 %	100 %	430,381,356	817,658,808	Kurang Bayar DBH Pajak		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	842,188,572
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	100 Unit	100 Unit	100 %	100 %	161,562,000	120,564,840			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	124,181,785
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**67,241,289,449**	**64,348,682,218**					**67,782,590,229**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**16,263,814,931**	**15,056,854,551**					**15,651,970,439**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 % 77,23 % 98 % 95 %	61 % 77,23 % 98 % 95 %	18 Unit	18 Unit	100 persen	100 persen	221,738,160	129,238,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	61 % 77,23 % 98 % 95 %	206,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 % 77,23 % 98 % 95 %	61 % 77,23 % 98 % 95 %	20 Unit	20 Unit	100 persen	100 persen	0	0			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	61 % 77,23 % 98 % 95 %	181,932,505

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 % 77,23 % 98 % 95 %	61 % 77,23 % 98 % 95 %	18 Unit	50 paket	100 persen	100 persen	4,094,742,524	4,094,742,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	61 % 77,23 % 98 % 95 %	3,037,970,090
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 % 77,23 % 98 % 95 %	61 % 77,23 % 98 % 95 %	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	3,555,243,247	5,757,843,247	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	61 % 77,23 % 98 % 95 %	3,768,692,730

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 % 77,23 % 98 % 95 %	61 % 77,23 % 98 % 95 %	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	7,460,491,000	4,223,430,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	61 % 77,23 % 98 % 95 %	7,707,647,384
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 % 77,23 % 98 % 95 %	61 % 77,23 % 98 % 95 %	18 Unit	18 Unit	100 persen	100 persen	796,600,000	796,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	61 % 77,23 % 98 % 95 %	629,227,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 % 77,23 % 98 % 95 %	61 % 77,23 % 98 % 95 %	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	135,000,000	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	61 % 77,23 % 98 % 95 %	120,500,730
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**50,329,251,898**	**48,730,438,217**					**51,104,748,480**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	2236 Orang	2225 Orang	100 persen	100 persen	200,015,000	94,422,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	220,016,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	2236 Orang	2225 Orang	100 persen	100 persen	25,740,000	6,340,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	28,314,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	2200 Orang	2187 Orang	100 persen	100 persen	190,560,000	14,080,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	209,616,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	10250 Orang	10379 Orang	100 persen	100 persen	340,638,480	284,858,480	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	374,702,328

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	29700 Orang	56833 Orang	100 persen	100 persen	195,140,000	226,515,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	214,654,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	2887 Orang	72198 Orang	100 persen	100 persen	417,376,500	176,275,500			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	 100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	190,369,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	19000 Orang	34954 Orang	100 persen	100 persen	89,915,000	62,625,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	 100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	98,906,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	28699 Orang	27418 Orang	100 persen	100 persen	10,120,000	10,120,000			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	10,423,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	13594 Orang	13031 Orang	100 persen	100 persen	18,245,000	462,333,800	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	11,794,530

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	909 Orang	1064 Orang	100 persen	100 persen	146,440,000	78,490,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	 100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	41,729,420

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	6120 Orang	6016 Orang	100 persen	100 persen	77,070,000	2,303,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	126,530,144

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	9630 Orang	6321 Orang	100 persen	100 persen	38,232,000	128,232,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	53,218,616

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	47,000,000	0			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	 100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	167,578,940

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	237,006,500	176,919,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	260,707,150

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 persen	100 persen	40,895,000	56,815,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	34,664,907

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen	100 persen	1,208,141,640	599,465,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	1,340,641,335

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	14 Dokumen	14 Dokumen	100 persen	100 persen	922,400,512	661,065,512	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	958,312,527

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	96,394,000	142,524,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	 100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	91,500,626

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	15000 Orang	15000 Orang	100 persen	100 persen	71,132,000	86,082,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	10,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	807,385,720	395,648,720			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	339,020,092

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	455,684,620	763,102,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	456,732,446

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	43,552,782,926	40,913,301,985			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	43,955,347,240

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen	100 persen	151,350,000	175,975,000			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	37,990,829

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	33 Unit	33 Unit	100 persen	100 persen	698,400,000	631,767,600			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	1,042,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	80000 Keluarga	80000 Keluarga	100 persen	100 persen	171,482,000	169,805,000			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	 100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	721,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	1200 Orang	102 Orang	100 persen	100 persen	104,320,000	94,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	 100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	102,840,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal		100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	1250 Orang	1250 Orang	100 persen	100 persen	10,385,000	10,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan													Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Jumlah kasus malaria import yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara optimal		 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 87,5 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 82,20 % 76 %	100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	40 Orang	40 Orang	100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	 100 % 100 % 0,41 skala 0-1 54 % 77,23 % 99,20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87,5 % 100 % 87,5 % 100 % 100 % 100 % UHC 86,84 % 100 % 82,20 % 76 %	5,637,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi													Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan														Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**79,704,620**	**67,371,450**					**174,711,710**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	79,704,620	67,371,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100 %	174,711,710
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**568,518,000**	**494,018,000**					**851,159,600**
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Menyelenggarakan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit (18 puskesmas dan 20 rumah sakit) Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 % 86,84 %	90 % 86,84 %	50 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 persen	100 persen	48,694,000	39,884,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	90 % 86,84 %	96,119,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Menyelenggarakan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit (18 puskesmas dan 20 rumah sakit) Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 % 86,84 %	90 % 86,84 %	32 Unit	32 Unit	100 persen	100 persen	519,824,000	454,134,000			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	90 % 86,84 %	755,040,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**1,920,008,000**	**1,754,706,350**					**155,260,470**
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**											**165,944,000**	**165,896,850**					**155,260,470**
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1200 Dokumen	1200 Dokumen	6500 dokumen	6500 dokumen	165,944,000	165,896,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar	95 %	155,260,470
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**128,806,000**	**161,688,000**					**0**
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kota Yogyakarta Sesuai Regulasi Yang Berlaku	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,6 Skala 0-5	3,6 Skala 0-5	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	12,365,000	12,365,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,6 Skala 0-5	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kota Yogyakarta Sesuai Regulasi Yang Berlaku	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,6 Skala 0-5	3,6 Skala 0-5	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	116,441,000	149,323,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,6 Skala 0-5	0
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,625,258,000**	**1,427,121,500**					**0**
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Menyelenggarakan Pengelolaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,6 Skala 0-5	3,6 Skala 0-5	30 Orang	30 Orang	30 laporan	30 laporan	1,625,258,000	1,427,121,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,6 Skala 0-5	0
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**366,150,320**	**357,681,210**					**314,554,790**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**6,560,000**	**5,111,000**					**17,863,290**
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Menyelenggarakan Pengelolaan Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 % 90 %	30 Sarana	30 Sarana	30 dokumen	30 dokumen	6,560,000	5,111,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 % 90 %	17,863,290

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**											**100,952,320**	**96,642,210**					**130,336,200**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	120 Dokumen	120 Dokumen	120 dokumen	120 dokumen	100,952,320	96,642,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	80 %	130,336,200
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**											**133,370,000**	**130,660,000**					**61,470,400**
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang laik hygiene sanitasi Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 % 90 %	90 % 90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	133,370,000	130,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang laik hygiene sanitasi Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	90 % 90 %	61,470,400
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**											**125,268,000**	**125,268,000**					**104,884,900**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Meningkatkan Pengelolaan Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	65 Unit	65 Unit	65 laporan	65 laporan	125,268,000	125,268,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	80 %	104,884,900
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**25,640,000**	**574,681,000**					**26,409,200**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**25,640,000**	**0**					**26,409,200**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	80,00 %	36 Dokumen	36 Dokumen	36 kelurahan	36 kelurahan	25,640,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	80,00 %	26,409,200
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**574,681,000**					**0**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Dokumen			0	574,681,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0
															TOTAL	**190,886,109,497**	**198,594,715,501**				**195,675,224,486**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,809,247,681**	**2,122,006,215**					**1,969,390,301**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**776,392,760**	**1,069,151,294**					**799,684,543**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**776,392,760**	**1,069,151,294**					**799,684,543**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	776,392,760	1,069,151,294	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	799,684,543
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**720,722,921**	**732,232,921**					**894,813,685**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**720,722,921**	**732,232,921**					**894,813,685**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	43 Orang	43 Orang	12 laporan	12 laporan	46,410,000	56,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	57,938,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	43 Orang	43 Orang	12 laporan	12 laporan	32,400,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	33,372,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	42 Orang	40 Orang	12 laporan	12 laporan	100,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	103,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	300 Orang	230 Orang	12 laporan	12 laporan	12,400,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	12,772,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	1300 Orang	1284 Orang	12 laporan	12 laporan	27,000,000	26,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	27,400,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	3275 Orang	3000 Orang	12 laporan	12 laporan	18,818,000	15,218,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	15,700,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	700 Orang	751 Orang	12 laporan	12 laporan	14,449,000	14,449,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	14,882,470
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	689 Orang	800 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	28,840,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	291 Orang	397 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	154,500
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	21 Orang	21 Orang	12 laporan	12 laporan	7,069,000	4,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	4,750,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	90 Orang	136 Orang	12 laporan	12 laporan	6,450,000	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	3,100,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	100 Orang	94 Orang	12 laporan	12 laporan	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	2,472,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,300,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	1,339,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	12 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	2,100,000	106,660,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	109,900,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	5 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	1,236,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	5 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	4,080,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	4,620,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	13 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	86,845,000	86,845,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	89,450,350
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	3 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	2,150,000	1,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	2,214,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100		250 Orang	12 laporan	12 laporan	0	2,469,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	3,141,500
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	11 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	109,440,000	37,780,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	112,723,200
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100		6 Paket	12 laporan	12 laporan	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	310,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	347,311,921	367,311,921	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	354,895,165
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	50,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	100,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100	1881 Keluarga	1881 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	10,300,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		80 skala 0 - 100		15 Orang	12 laporan	12 laporan	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 skala 0 - 100	3,100,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**312,132,000**	**312,132,000**					**274,892,073**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**312,132,000**	**312,132,000**					**274,892,073**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	9 Orang	9 Orang	12 laporan	12 laporan	312,132,000	312,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	274,892,073
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**8,490,000**					**0**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**8,490,000**					**0**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Dokumen			0	8,490,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
															TOTAL	**1,809,247,681**	**2,122,006,215**					**1,969,390,301**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,701,645,655**	**1,941,821,776**					**2,000,076,429**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**624,906,339**	**784,069,132**					**807,591,206**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**624,906,339**	**784,069,132**					**807,591,206**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	624,906,339	784,069,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	807,591,206
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**704,571,316**	**768,934,644**					**792,002,683**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**704,571,316**	**768,934,644**					**792,002,683**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	54 Orang	32 Orang	12 laporan	12 laporan	17,090,000	39,890,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	41,086,700
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	319 Orang	200 Orang	12 laporan	12 laporan	23,280,000	10,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	10,382,400
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	1777 Orang	1609 Orang	12 laporan	12 laporan	17,050,000	15,050,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	15,501,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	3821 Orang	3321 Orang	12 laporan	12 laporan	60,775,000	37,675,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	38,805,250
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	1200 Orang	1100 Orang	12 laporan	12 laporan	16,508,500	16,508,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	17,003,755
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	30 Orang	26 Orang	12 laporan	12 laporan	12,000,000	7,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	7,416,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	188 Orang	177 Orang	12 laporan	12 laporan	23,700,000	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	6,180,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	159 Orang	80 Orang	12 laporan	12 laporan	550,000	550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	566,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	12 Dokumen	0 Dokumen	12 laporan	12 laporan	29,000,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	29,273,000	42,473,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	43,747,190
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	5 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	18,284,100	13,320,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	13,719,703
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	3 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	65,084,000	62,384,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	64,255,520
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	5 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	6,750,000	24,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	25,029,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100		38 Orang	12 laporan	12 laporan	0	4,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	4,944,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	2 Dokumen	6 Dokumen	12 laporan	12 laporan	10,650,000	38,164,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	39,308,920
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100		50 Paket	12 laporan	12 laporan	0	5,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	5,150,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	357,776,716	438,790,044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	451,953,745
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100		2 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	309,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100	1280 Keluarga	0 Keluarga	12 laporan	12 laporan	16,800,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	0
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100		22 Orang	12 laporan	12 laporan	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	6,180,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran		80 Skala 0 - 100		3 Orang	12 laporan	12 laporan	0	450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	80 Skala 0 - 100	463,500
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**372,168,000**	**372,168,000**					**383,333,040**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**372,168,000**	**372,168,000**					**383,333,040**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	10 Orang	10 Orang	12 laporan	12 laporan	372,168,000	372,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	383,333,040
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**16,650,000**					**17,149,500**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**16,650,000**					**17,149,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran				4 Dokumen			0	16,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				17,149,500
TOTAL																**1,701,645,655**	**1,941,821,776**					**2,000,076,429**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,491,659,093**	**2,881,269,690**				**2,607,347,620**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,171,088,370**	**1,560,698,967**				**1,206,221,021**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,171,088,370**	**1,560,698,967**				**1,206,221,021**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,171,088,370	1,560,698,967	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,206,221,021
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**789,198,723**	**800,948,723**				**822,357,449**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**789,198,723**	**800,948,723**				**822,357,449**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	78 Orang	78 Orang	12 laporan	12 laporan	59,332,000	49,872,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	106,414,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	78 Orang	78 Orang	12 laporan	12 laporan	300,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,180,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	78 Orang	78 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,407,500
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	657 Orang	408 Orang	12 laporan	12 laporan	62,190,000	30,870,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	53,990,540
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	350 Orang	2053 Orang	12 laporan	12 laporan	13,900,000	12,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,083,700
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4423 Orang	4423 Orang	12 laporan	12 laporan	7,250,000	7,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,119,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1508 Orang	1508 Orang	12 laporan	12 laporan	17,445,000	17,445,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	41,453,380
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	898 Orang	936 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,708,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	585 Orang	627 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,781,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	49 Orang	47 Orang	12 laporan	12 laporan	8,366,000	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13,081,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	306 Orang	308 Orang	12 laporan	12 laporan	3,900,000	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,260,340
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	333 Orang	1042 Orang	12 laporan	12 laporan	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,060,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,600,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	91,019,040
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	3,691,000	79,471,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,253,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,600,000	1,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,541,140
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	8,340,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	24,668,500
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8 Dokumen	8 Dokumen	12 laporan	12 laporan	86,009,000	86,009,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	18,966,420
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	700,000	1,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	721,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		2358 Orang	12 laporan	12 laporan	0	2,366,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,436,980
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	66,360,000	22,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	26,512,200
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Paket	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	428,215,723	454,215,723			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	317,453,959

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	721,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	450 Keluarga	450 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	66,950,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		15 Orang	12 laporan	12 laporan	0	1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,545,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Orang	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**531,372,000**	**505,372,000**					**578,769,150**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**531,372,000**	**505,372,000**					**578,769,150**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	19 Orang	14 Orang	12 laporan	12 laporan	531,372,000	505,372,000			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	578,769,150
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**14,250,000**					**0**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**14,250,000**					**0**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Dokumen			0	14,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0
TOTAL																**2,491,659,093**	**2,881,269,690**					**2,607,347,620**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,457,976,928**	**3,159,570,081**				**2,738,780,008**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,314,300,000**	**2,017,881,153**				**1,353,729,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,314,300,000**	**2,017,881,153**				**1,353,729,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,314,300,000	2,017,881,153	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,353,729,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**704,044,928**	**698,074,928**				**921,755,048**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**704,044,928**	**698,074,928**				**921,755,048**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	201 Orang	149 Orang	12 laporan	12 laporan	25,218,000	52,748,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	54,330,440
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	220 Orang	149 Orang	12 laporan	12 laporan	3,600,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,523,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	198 Orang	147 Orang	12 laporan	12 laporan	400,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,523,500
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	612 Orang	628 Orang	12 laporan	12 laporan	65,610,000	35,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	32,620,100
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1326 Orang	4121 Orang	12 laporan	12 laporan	20,250,000	19,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	20,085,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4679 Orang	4105 Orang	12 laporan	12 laporan	15,390,000	14,640,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	15,079,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	964 Orang	2425 Orang	12 laporan	12 laporan	59,708,500	59,708,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	61,499,755
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2203 Orang	2251 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,410,200
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1264 Orang	1356 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,410,200
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	43 Orang	55 Orang	12 laporan	12 laporan	13,050,000	10,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	74 Orang	451 Orang	12 laporan	12 laporan	11,220,000	3,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,180,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	288 Orang	170 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,765,550
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	0 Dokumen	12 laporan	12 laporan	7,600,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	148,172,422
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	21,177,500	60,587,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	62,405,125

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	500,000	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	9,960,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,326,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	37,769,000	37,769,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	38,902,070
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	300,000	7,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7,622,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	3,050,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,050,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	7 Dokumen	12 laporan	12 laporan	63,390,000	32,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	33,526,500
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 paket	12 laporan	12 laporan	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	618,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	348,901,928	348,901,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	359,368,986

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		2 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	309,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal		80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4136 Keluarga	0 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	46,350,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal		80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		55 Orang	12 laporan	12 laporan	0	6,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,862,500
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**439,632,000**	**433,444,000**					**452,820,960**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**439,632,000**	**433,444,000**					**452,820,960**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	19 Orang	11 Orang	12 laporan	12 laporan	439,632,000	433,444,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	452,820,960
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**10,170,000**					**10,475,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**10,170,000**					**10,475,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro				4 Dokumen			0	10,170,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				10,475,000
															TOTAL	**2,457,976,928**	**3,159,570,081**					**2,738,780,008**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,757,242,893**	**2,112,923,586**				**2,185,056,313**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**639,510,851**	**995,191,544**				**1,025,047,290**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**639,510,851**	**995,191,544**				**1,025,047,290**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	639,510,851	995,191,544	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,025,047,290
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**703,892,042**	**648,946,042**				**704,367,923**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**703,892,042**	**648,946,042**				**704,367,923**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	48 Orang	36 Orang	12 laporan	12 laporan	23,700,000	47,620,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	49,048,600
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	36 Orang	36 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	17,201,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	36 Orang	36 Orang	12 laporan	12 laporan	100,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	345 Orang	273 Orang	12 laporan	12 laporan	51,700,000	19,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	19,673,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5797 Orang	5093 Orang	12 laporan	12 laporan	40,700,000	38,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	39,655,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2318 Orang	2318 Orang	12 laporan	12 laporan	14,875,000	14,875,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	15,321,250

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	858 Orang	858 Orang	12 laporan	12 laporan	5,505,000	5,505,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,670,150
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	915 Orang	1056 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,120,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	416 Orang	506 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,317,500
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9 Orang	8 Orang	12 laporan	12 laporan	2,300,000	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	195 Orang	182 Orang	12 laporan	12 laporan	14,510,000	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,060,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10 Orang	381 Orang	12 laporan	12 laporan	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,236,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	5,000,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	37,718,000	61,398,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	63,239,940

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	250,000	250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	257,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	12,111,600	8,511,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8,766,948
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	41,173,000	41,173,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	42,408,190
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	2,100,000	5,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,253,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Orang	12 laporan	12 laporan	0	800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	824,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9 Dokumen	7 Dokumen	12 laporan	12 laporan	91,570,000	54,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	55,980,500
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	359,379,442	332,963,442	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	342,952,345
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	2,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,163,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1778 Keluarga	1778 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12,360,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		46 Orang	12 laporan	12 laporan	0	12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12,360,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**413,840,000**	**440,256,000**					**426,255,200**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**413,840,000**	**440,256,000**					**426,255,200**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	12 Orang	12 Orang	12 laporan	12 laporan	413,840,000	440,256,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	426,255,200
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**28,530,000**					**29,385,900**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**28,530,000**					**29,385,900**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Dokumen			0	28,530,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				29,385,900
															TOTAL	**1,757,242,893**	**2,112,923,586**					**2,185,056,313**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,870,985,533**	**2,352,641,107**				**2,402,620,341**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**803,735,080**	**1,184,766,654**				**1,220,309,654**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**803,735,080**	**1,184,766,654**				**1,220,309,654**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	803,735,080	1,184,766,654	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,220,309,654
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**664,130,453**	**656,650,453**				**655,749,967**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**664,130,453**	**656,650,453**				**655,749,967**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	63 Orang	63 Orang	12 laporan	12 laporan	67,140,000	51,840,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	53,395,200
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	63 Orang	63 Orang	12 laporan	12 laporan	9,090,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	61 Orang	61 Orang	12 laporan	12 laporan	500,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	562 Orang	444 Orang	12 laporan	12 laporan	31,800,000	20,540,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	21,156,200
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	960 Orang	2708 Orang	12 laporan	12 laporan	25,500,000	22,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	23,432,500
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2886 Orang	2450 Orang	12 laporan	12 laporan	6,900,000	6,150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,334,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1496 Orang	1496 Orang	12 laporan	12 laporan	28,485,000	28,485,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	29,339,550
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	959 Orang	1054 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	521 Orang	493 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	38 Orang	49 Orang	12 laporan	12 laporan	21,240,000	19,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	19,776,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	378 Orang	219 Orang	12 laporan	12 laporan	15,930,000	10,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,300,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	85 Orang	201 Orang	12 laporan	12 laporan	10,650,000	10,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,969,500
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	0 Dokumen	12 laporan	12 laporan	6,500,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	3,030,000	38,120,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	39,263,600
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,030,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	8,700,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,326,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	15 Dokumen	15 Dokumen	12 laporan	12 laporan	31,241,500	31,241,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	32,178,745

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	3,600,000	5,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,665,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Orang	12 laporan	12 laporan	0	2,040,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,101,200
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	60,600,000	37,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	38,367,500
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Paket	12 laporan	12 laporan	0	1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,236,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	332,223,953	358,283,953	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	348,432,472
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,545,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2409 Keluarga	2409 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		50 Orang	12 laporan	12 laporan	0	5,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,150,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Orang	12 laporan	12 laporan	0	1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,236,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**403,120,000**	**483,744,000**					**498,256,320**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**403,120,000**	**483,744,000**					**498,256,320**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	14 Orang	14 Orang	12 laporan	12 laporan	403,120,000	483,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	498,256,320
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**27,480,000**					**28,304,400**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**27,480,000**					**28,304,400**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan				12 Dokumen			0	27,480,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				28,304,400
TOTAL																**1,870,985,533**	**2,352,641,107**					**2,402,620,341**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,974,767,999**	**3,020,529,469**					**3,318,285,213**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,960,525,000**	**2,006,286,470**					**2,013,650,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,960,525,000**	**2,006,286,470**					**2,013,650,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,960,525,000	2,006,286,470	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	2,013,650,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**404,178,999**	**391,346,999**					**619,374,813**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**404,178,999**	**391,346,999**					**619,374,813**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	151 Orang	152 Orang	12 laporan	12 laporan	45,320,000	33,720,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	15,218,250
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	151 Orang	152 Orang	12 laporan	12 laporan	21,400,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	11,433,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	151 Orang	152 Orang	12 laporan	12 laporan	1,200,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,296,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	795 Orang	795 Orang	12 laporan	12 laporan	8,320,000	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	21,115,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1677 Orang	4637 Orang	12 laporan	12 laporan	13,200,000	13,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	35,607,100
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5221 Orang	4378 Orang	12 laporan	12 laporan	2,625,000	2,625,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,540,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1881 Orang	2296 Orang	12 laporan	12 laporan	25,730,000	25,730,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	43,043,700
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2040 Orang	2423 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,957,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	716 Orang	1022 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,957,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	65 Orang	79 Orang	12 laporan	12 laporan	13,800,000	10,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	15,728,100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	414 Orang	400 Orang	12 laporan	12 laporan	7,200,000	7,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7,802,250
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	248 Orang	231 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	432,600
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	8,200,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	108,150,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	28,145,000	68,265,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	41,761,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	800,000	800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13,350,860
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	7,080,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	18,282,500
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	78,810,000	78,810,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	15,211,905
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	2,100,000	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	86,005,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		65 Orang	12 laporan	12 laporan	0	3,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,630,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	26,460,000	18,540,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	19,214,650
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		11 Paket	12 laporan	12 laporan	0	8,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9,020,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	113,788,999	113,856,999	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	125,167,898

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4618 Keluarga	4618 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	15,450,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**610,064,000**	**609,996,000**					**671,070,400**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**610,064,000**	**609,996,000**					**671,070,400**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	18 Orang	17 Orang	12 laporan	12 laporan	610,064,000	609,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	671,070,400
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**12,900,000**					**14,190,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**12,900,000**					**14,190,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan				4 Dokumen			0	12,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				14,190,000
															TOTAL	**2,974,767,999**	**3,020,529,469**					**3,318,285,213**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,509,601,500**	**2,897,905,351**				**3,013,222,991**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,344,968,000**	**1,688,271,851**				**1,738,920,006**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,344,968,000**	**1,688,271,851**				**1,738,920,006**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,344,968,000	1,688,271,851	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,738,920,006
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**661,851,500**	**695,061,500**				**734,238,185**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**661,851,500**	**695,061,500**				**734,238,185**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	177 Orang	146 Orang	12 laporan	12 laporan	52,220,000	67,820,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	69,854,600
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	177 Orang	146 Orang	12 laporan	12 laporan	25,600,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	26,880,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	177 Orang	144 Orang	12 laporan	12 laporan	200,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	210,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	975 Orang	757 Orang	12 laporan	12 laporan	13,300,000	19,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	20,476,400
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3785 Orang	3814 Orang	12 laporan	12 laporan	18,450,000	15,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	16,222,500
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3488 Orang	3488 Orang	12 laporan	12 laporan	7,314,000	7,314,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7,533,420

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Semua Kab/Kota, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2306 Orang	2300 Orang	12 laporan	12 laporan	40,996,000	40,996,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	42,225,880
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0 Orang	1372 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	669 Orang	669 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	51 Orang	52 Orang	12 laporan	12 laporan	9,462,000	7,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7,828,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	340 Orang	340 Orang	12 laporan	12 laporan	2,400,000	900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	927,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	276 Orang	170 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	12,500,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13,125,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	49,136,000	52,556,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	54,132,680
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	750,000	750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	772,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	11,100,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,326,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7 Dokumen	7 Dokumen	12 laporan	12 laporan	73,097,500	73,097,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	75,290,425

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	2,000,000	10,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,506,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		10 Orang	12 laporan	12 laporan	0	1,862,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,917,860
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	23,490,000	19,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	20,497,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		10 Paket	12 laporan	12 laporan	0	2,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,060,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	319,836,000	364,836,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	353,890,920
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		10 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	2,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,060,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2200 Keluarga	2200 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Orang	12 laporan	12 laporan	0	900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	927,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		8 Orang	12 laporan	12 laporan	0	2,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,060,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**502,782,000**	**502,782,000**					**527,921,100**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**502,782,000**	**502,782,000**					**527,921,100**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	15 Orang	15 Orang	12 laporan	12 laporan	502,782,000	502,782,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	527,921,100
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**11,790,000**					**12,143,700**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**11,790,000**					**12,143,700**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				27 Dokumen			0	11,790,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12,143,700
															TOTAL	**2,509,601,500**	**2,897,905,351**					**3,013,222,991**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,921,286,461**	**2,128,372,684**					**2,251,942,002**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**950,616,361**	**1,140,088,604**					**1,197,093,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**950,616,361**	**1,140,088,604**					**1,197,093,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	950,616,361	1,140,088,604	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,197,093,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**657,914,100**	**667,248,080**					**717,926,802**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**657,914,100**	**667,248,080**					**717,926,802**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	109 Orang	109 Orang	12 laporan	12 laporan	28,514,000	18,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	18,540,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		109 Orang	12 laporan	12 laporan	1,640,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	107 Orang	107 Orang	12 laporan	12 laporan	5,200,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	547 Orang	432 Orang	12 laporan	12 laporan	29,896,000	16,460,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	16,953,800
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	758 Orang	1244 Orang	12 laporan	12 laporan	7,200,000	6,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,489,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3083 Orang	2700 Orang	12 laporan	12 laporan	5,487,000	4,839,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,984,170

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1116 Orang	1116 Orang	12 laporan	12 laporan	12,079,000	12,079,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12,441,370
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1661 Orang	970 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1003 Orang	493 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	29 Orang	32 Orang	12 laporan	12 laporan	15,885,000	10,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	205 Orang	187 Orang	12 laporan	12 laporan	17,280,000	7,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7,416,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	185 Orang	229 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	22,800,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	23,940,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,236,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	10 Dokumen	12 laporan	12 laporan	14,754,000	67,742,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	69,774,260
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,090,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	9,411,600	8,511,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8,766,948
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	11 Dokumen	9 Dokumen	12 laporan	12 laporan	108,867,500	108,867,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	112,133,525

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,400,000	18,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	18,746,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	5,885,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,061,550
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6 Dokumen	8 Dokumen	12 laporan	12 laporan	56,050,000	31,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	32,393,500
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Paket	12 laporan	12 laporan	0	3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,708,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	318,450,000	336,063,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	352,867,179
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		7 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	1,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,442,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2937 Keluarga	0 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		11 Orang	12 laporan	12 laporan	0	6,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,489,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		2 Orang	12 laporan	12 laporan	0	150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	154,500
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**312,756,000**	**312,756,000**					**328,393,800**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**312,756,000**	**312,756,000**					**328,393,800**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	9 Orang	9 Orang	12 laporan	12 laporan	312,756,000	312,756,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	328,393,800
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**8,280,000**					**8,528,400**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**8,280,000**					**8,528,400**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun				4 Dokumen			0	8,280,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				8,528,400
															TOTAL	**1,921,286,461**	**2,128,372,684**					**2,251,942,002**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,037,413,337**	**2,410,914,367**				**2,555,741,920**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,008,754,901**	**1,241,493,863**				**1,278,738,679**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,008,754,901**	**1,241,493,863**				**1,278,738,679**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,008,754,901	1,241,493,863	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,278,738,679
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**625,560,436**	**629,942,504**				**721,340,901**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**625,560,436**	**629,942,504**				**721,340,901**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	101 Orang	82 Orang	12 laporan	12 laporan	65,520,000	33,760,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	34,772,800
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	82 Orang	82 Orang	12 laporan	12 laporan	200,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	79 Orang	79 Orang	12 laporan	12 laporan	5,760,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	598 Orang	472 Orang	12 laporan	12 laporan	46,440,000	61,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	63,211,100
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1830 Orang	2645 Orang	12 laporan	12 laporan	28,500,000	20,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	20,600,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4249 Orang	4249 Orang	12 laporan	12 laporan	22,129,500	14,514,500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	14,949,935

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1826 Orang	1958 Orang	12 laporan	12 laporan	15,590,000	9,140,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9,414,200
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1016 Orang	1169 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	526 Orang	432 Orang	12 laporan	12 laporan	4,300,000	0			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	516 Orang	58 Orang	12 laporan	12 laporan	20,576,000	10,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	11,124,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	35 Orang	319 Orang	12 laporan	12 laporan	11,010,000	10,560,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,876,800
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	35 Orang	159 Orang	12 laporan	12 laporan	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,030,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	1 Paket	12 laporan	12 laporan	1,200,000	400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	412,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	67,455,000	84,910,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	87,457,300

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	15,550,000	4,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,841,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	44,548,000	42,348,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	43,618,440
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	500,000	1,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,030,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		4 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	9,776,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,069,280

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	19,420,000	41,950,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	43,208,500
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	255,861,936	282,714,004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	295,715,546
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3830 Keluarga	3830 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	67,980,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		10 Orang	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**403,098,000**	**517,008,000**					**532,518,240**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**403,098,000**	**517,008,000**					**532,518,240**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	16 Orang	14 Orang	12 laporan	12 laporan	403,098,000	517,008,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	532,518,240
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**22,470,000**					**23,144,100**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**22,470,000**					**23,144,100**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten				4 Dokumen			0	22,470,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				23,144,100
														TOTAL		**2,037,413,337**	**2,410,914,367**					**2,555,741,920**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,017,705,520**	**3,473,703,402**					**3,699,285,572**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,831,885,000**	**2,207,882,882**					**2,274,110,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,831,885,000**	**2,207,882,882**					**2,274,110,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,831,885,000	2,207,882,882	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	2,274,110,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**790,161,520**	**799,062,520**					**911,741,772**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**790,161,520**	**799,062,520**					**911,741,772**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	251 Orang	198 Orang	12 laporan	12 laporan	58,195,000	75,015,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	82,516,500
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	239 Orang	198 Orang	12 laporan	12 laporan	4,060,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,466,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	228 Orang	198 Orang	12 laporan	12 laporan	6,220,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,842,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1112 Orang	791 Orang	12 laporan	12 laporan	100,390,000	60,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	66,066,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1686 Orang	2340 Orang	12 laporan	12 laporan	19,600,000	19,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	21,560,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7132 Orang	5400 Orang	12 laporan	12 laporan	7,350,000	2,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,585,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3361 Orang	2963 Orang	12 laporan	12 laporan	4,508,000	4,508,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,958,800
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1699 Orang	2187 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	833 Orang	909 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	90 Orang	109 Orang	12 laporan	12 laporan	14,570,000	12,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	347 Orang	523 Orang	12 laporan	12 laporan	9,450,000	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,300,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	486 Orang	340 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	8,662,500	48,312,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	53,143,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	600,000	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	660,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,620,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	69,322,500	38,662,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	42,528,750
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	2,700,000	2,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,420,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		25 Orang	12 laporan	12 laporan	0	2,570,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,827,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	85,080,000	57,210,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	62,931,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Paket	12 laporan	12 laporan	0	600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	660,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	395,253,520	463,224,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	509,546,972

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	330,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7770 Keluarga	7770 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	21,630,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		32 Orang	12 laporan	12 laporan	0	4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,950,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Orang	12 laporan	12 laporan	0	150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**395,659,000**	**431,628,000**					**474,790,800**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**395,659,000**	**431,628,000**					**474,790,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	12 Orang	12 Orang	12 laporan	12 laporan	395,659,000	431,628,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	474,790,800
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**35,130,000**					**38,643,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**35,130,000**					**38,643,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron				4 Dokumen			0	35,130,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				38,643,000
																TOTAL	**3,017,705,520**	**3,473,703,402**				**3,699,285,572**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,610,256,600**	**3,184,429,661**				**3,544,584,627**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,655,561,000**	**2,209,143,861**				**2,430,058,247**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,655,561,000**	**2,209,143,861**				**2,430,058,247**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,655,561,000	2,209,143,861	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	2,430,058,247
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**458,133,600**	**456,583,800**				**543,954,180**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**458,133,600**	**456,583,800**				**543,954,180**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	174 Orang	156 Orang	12 laporan	12 laporan	16,650,000	50,530,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	55,583,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	174 Orang	156 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	174 Orang	153 Orang	12 laporan	12 laporan	400,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	542 Orang	800 Orang	12 laporan	12 laporan	49,150,000	22,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	25,113,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2056 Orang	3227 Orang	12 laporan	12 laporan	27,000,000	25,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	27,720,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6405 Orang	4452 Orang	12 laporan	12 laporan	13,120,000	12,520,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13,772,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1108 Orang	2677 Orang	12 laporan	12 laporan	36,460,000	36,460,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	40,106,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	498 Orang	786 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,595,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	95 Orang	175 Orang	12 laporan	12 laporan	17,755,000	9,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13,772,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	440 Orang	470 Orang	12 laporan	12 laporan	2,800,000	1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,980,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	304 Orang	296 Orang	12 laporan	12 laporan	0	600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	660,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	0 Dokumen	12 laporan	12 laporan	9,000,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	29,555,500	51,995,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	57,195,050
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	100,000	2,410,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,651,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	21,651,600	8,511,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9,362,760
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	48,222,500	45,912,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	50,503,750
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	400,000	4,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,390,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		114 Orang	12 laporan	12 laporan	0	8,755,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9,630,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10 Dokumen	8 Dokumen	12 laporan	12 laporan	74,669,000	37,469,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	41,215,900
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		30 Paket	12 laporan	12 laporan	0	4,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,950,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	111,200,000	131,790,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	144,969,220
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	440,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5930 Keluarga	5930 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	34,650,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		47 Orang	12 laporan	12 laporan	0	1,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,100,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**496,562,000**	**496,562,000**					**546,218,200**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**496,562,000**	**496,562,000**					**546,218,200**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	14 Orang	14 Orang	12 laporan	12 laporan	496,562,000	496,562,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	546,218,200
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**22,140,000**					**24,354,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**22,140,000**					**24,354,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman				2 Dokumen			0	22,140,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				24,354,000
TOTAL																**2,610,256,600**	**3,184,429,661**					**3,544,584,627**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,952,229,728**	**2,240,290,187**					**2,495,602,239**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**797,017,688**	**961,035,687**					**1,057,139,255**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**797,017,688**	**961,035,687**					**1,057,139,255**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	797,017,688	961,035,687	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,057,139,255
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**675,750,040**	**721,158,500**					**824,557,384**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**675,750,040**	**721,158,500**					**824,557,384**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	88 Orang	88 Orang	12 laporan	12 laporan	53,719,000	39,478,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	43,425,800
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	88 Orang	88 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,320,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	89 Orang	89 Orang	12 laporan	12 laporan	1,200,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,320,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	654 Orang	517 Orang	12 laporan	12 laporan	34,160,000	26,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	28,776,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3223 Orang	2850 Orang	12 laporan	12 laporan	35,700,000	33,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	36,630,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4972 Orang	3209 Orang	12 laporan	12 laporan	33,300,000	13,461,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	14,807,100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1488 Orang	1488 Orang	12 laporan	12 laporan	33,485,000	28,885,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	31,773,500
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	834 Orang	1031 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	794,130
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	500 Orang	426 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	794,130
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	48 Orang	21 Orang	12 laporan	12 laporan	18,900,000	18,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	20,790,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	289 Orang	289 Orang	12 laporan	12 laporan	11,520,000	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,300,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	250 Orang	280 Orang	12 laporan	12 laporan	0	500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	550,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	57,820,080
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	53,480,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	58,828,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	900,000	900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	990,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	17,970,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,620,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	20 Dokumen	20 Dokumen	12 laporan	12 laporan	86,639,500	67,739,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	74,513,450
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	9,600,000	7,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8,360,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Orang	12 laporan	12 laporan	0	4,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,060,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13 Dokumen	13 Dokumen	12 laporan	12 laporan	27,540,000	70,770,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	77,847,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		36 paket	12 laporan	12 laporan	0	1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,980,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	286,116,540	339,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	314,728,194

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	110,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1000 Keluarga	1000 Keluarga	12 laporan	12 laporan	25,000,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	27,500,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		30 Orang	12 laporan	12 laporan	0	6,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,600,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Orang	12 laporan	12 laporan	0	1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,320,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**479,462,000**	**550,536,000**					**605,589,600**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**479,462,000**	**550,536,000**					**605,589,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	15 Orang	15 Orang	12 laporan	12 laporan	479,462,000	550,536,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	605,589,600
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**7,560,000**					**8,316,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**7,560,000**					**8,316,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan				6 Dokumen			0	7,560,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				8,316,000
TOTAL																**1,952,229,728**	**2,240,290,187**					**2,495,602,239**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,618,382,000**	**1,945,182,297**				**1,750,431,990**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**587,063,000**	**899,263,297**				**604,674,890**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**587,063,000**	**899,263,297**				**604,674,890**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	587,063,000	899,263,297	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	604,674,890
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**619,235,000**	**624,985,000**				**682,729,700**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**619,235,000**	**624,985,000**				**682,729,700**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	49 Orang	53 Orang	12 laporan	12 laporan	85,678,000	48,278,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	53,105,800
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	39 Orang	53 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	37 Orang	51 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	40 Orang	200 Orang	12 laporan	12 laporan	60,598,000	47,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	52,085,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	900 Orang	1055 Orang	12 laporan	12 laporan	9,450,000	9,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,395,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3568 Orang	2000 Orang	12 laporan	12 laporan	9,146,000	6,876,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7,563,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	938 Orang	934 Orang	12 laporan	12 laporan	9,060,000	9,060,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9,966,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	812 Orang	812 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	420 Orang	420 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	31 Orang	31 Orang	12 laporan	12 laporan	12,290,000	12,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13,310,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	167 Orang	103 Orang	12 laporan	12 laporan	2,360,000	1,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,870,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	120 Orang	500 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	0 Dokumen	12 laporan	12 laporan	2,400,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	3,360,000	56,078,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	61,685,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,400,000	1,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,540,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	6,690,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,620,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	11 Dokumen	11 Dokumen	12 laporan	12 laporan	73,588,000	73,588,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	80,946,800
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	300,000	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		10 Orang	12 laporan	12 laporan	0	190,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	209,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	13 Dokumen	13 Dokumen	12 laporan	12 laporan	58,520,000	52,820,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	53,348,200
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Paket	12 laporan	12 laporan	0	600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	660,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	284,395,000	298,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	328,894,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		2 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	330,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	410 Keluarga	410 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**412,084,000**	**412,084,000**					**453,292,400**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**412,084,000**	**412,084,000**					**453,292,400**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	13 Orang	11 Orang	12 laporan	12 laporan	412,084,000	412,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	453,292,400
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**8,850,000**					**9,735,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**8,850,000**					**9,735,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Dokumen			0	8,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				9,735,000
															TOTAL	**1,618,382,000**	**1,945,182,297**					**1,750,431,990**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,939,682,592**	**4,227,255,704**				**4,077,628,989**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,827,119,000**	**3,046,986,152**				**3,109,830,900**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,827,119,000**	**3,046,986,152**				**3,109,830,900**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 unit kerja	1 unit kerja	12 laporan	12 laporan	2,827,119,000	3,046,986,152	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	3,109,830,900
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**531,067,592**	**559,113,552**				**346,080,330**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**531,067,592**	**559,113,552**				**346,080,330**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	245 Orang	246 Orang	12 laporan	12 laporan	73,340,000	53,165,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	49,180,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	245 Orang	246 Orang	12 laporan	12 laporan	1,705,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,490,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	246 Orang	246 Orang	12 laporan	12 laporan	14,300,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1109 Orang	790 Orang	12 laporan	12 laporan	28,160,000	31,440,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	54,225,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	986 Orang	4373 Orang	12 laporan	12 laporan	29,000,000	25,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	18,960,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3631 Orang	3631 Orang	12 laporan	12 laporan	1,640,000	1,175,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2081 Orang	2976 Orang	12 laporan	12 laporan	8,420,000	8,420,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3712 Orang	2757 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	14,140,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1095 Orang	957 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	19,089,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	69 Orang	90 Orang	12 laporan	12 laporan	9,300,000	8,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	190 Orang	551 Orang	12 laporan	12 laporan	6,820,000	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	539 Orang	811 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,175,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	0 Dokumen	12 laporan	12 laporan	500,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	11,637,500	62,342,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,000,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	18,460,000	7,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	21,121,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3 Dokumen	3 Dokumen	12 laporan	12 laporan	40,822,500	40,822,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	30,339,880
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 dokumen	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	88,350,000	55,170,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		5 laporan	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	198,612,592	257,578,552			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	104,360,450

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	200 Keluarga	200 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	24,000,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,41 skala 0-1 80 Skala 0-100	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		141 Orang	12 laporan	12 laporan	0	2,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	0,41 skala 0-1 80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**581,496,000**	**581,496,000**					**621,717,759**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**581,496,000**	**581,496,000**					**621,717,759**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	25 Orang	16 Orang	12 laporan	12 laporan	581,496,000	581,496,000			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	621,717,759
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**39,660,000**					**0**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**39,660,000**					**0**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener					6 Dokumen		0	39,660,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0
															TOTAL	**3,939,682,592**	**4,227,255,704**					**4,077,628,989**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,647,168,857**	**4,050,927,009**				**4,337,196,110**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,565,973,800**	**2,969,731,952**				**3,058,823,911**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,565,973,800**	**2,969,731,952**				**3,058,823,911**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	2,565,973,800	2,969,731,952	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	3,058,823,911
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**491,572,057**	**488,335,057**				**659,905,609**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**491,572,057**	**488,335,057**				**659,905,609**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	286 Orang	318 Orang	12 laporan	12 laporan	15,650,000	63,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	65,456,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	286 Orang	318 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,193,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	313 Orang	312 Orang	12 laporan	12 laporan	43,600,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	23,587,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2047 Orang	1255 Orang	12 laporan	12 laporan	107,721,000	19,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	20,414,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6888 Orang	6265 Orang	12 laporan	12 laporan	53,050,000	39,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	40,170,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8681 Orang	6945 Orang	12 laporan	12 laporan	39,040,000	5,140,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,294,200
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3460 Orang	3460 Orang	12 laporan	12 laporan	2,680,000	2,680,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,760,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1817 Orang	2550 Orang	12 laporan	12 laporan	1,770,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,751,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1001 Orang	1709 Orang	12 laporan	12 laporan	18,933,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,326,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	95 Orang	83 Orang	12 laporan	12 laporan	9,846,000	9,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	10,094,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	701 Orang	575 Orang	12 laporan	12 laporan	9,000,000	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,090,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	304 Orang	740 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,004,250
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,500,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	118,656,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	25,550,000	90,914,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	93,641,420
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,420,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9 Dokumen	9 Dokumen	12 laporan	12 laporan	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,326,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	14 Dokumen	14 Dokumen	12 laporan	12 laporan	6,060,000	43,563,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	44,869,890
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	46,560,000	2,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,781,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Orang	12 laporan	12 laporan	0	46,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	47,380

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	81,910,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	84,367,300
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	106,412,057	106,412,057	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	109,604,419
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	618,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8858 Keluarga	8858 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,982,750
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		51 Orang	12 laporan	12 laporan	0	3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,090,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		38 Orang	12 laporan	12 laporan	0	12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12,360,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**589,623,000**	**582,030,000**					**607,311,690**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**589,623,000**	**582,030,000**					**607,311,690**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	18 Orang	17 Orang	12 laporan	12 laporan	589,623,000	582,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	607,311,690
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**10,830,000**					**11,154,900**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**10,830,000**					**11,154,900**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan					3 Dokumen		0	10,830,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				11,154,900
															TOTAL	**3,647,168,857**	**4,050,927,009**					**4,337,196,110**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,176,910,590**	**2,497,755,562**				**2,397,956,456**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,104,534,250**	**1,400,379,222**				**1,191,993,250**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,104,534,250**	**1,400,379,222**				**1,191,993,250**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,104,534,250	1,400,379,222	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,191,993,250
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**669,837,340**	**691,600,340**				**767,384,773**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**669,837,340**	**691,600,340**				**767,384,773**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	87 orang	87 orang	12 laporan	12 laporan	21,580,000	35,810,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	22,455,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	87 orang	87 orang	12 laporan	12 laporan	8,990,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,244,240

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	84 orang	84 orang	12 laporan	12 laporan	400,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,545,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	795 orang	628 orang	12 laporan	12 laporan	50,647,000	50,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	32,858,195
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4040 orang	4015 orang	12 laporan	12 laporan	23,250,000	19,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	32,408,950
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	7029 orang	7029 orang	12 laporan	12 laporan	8,820,000	2,820,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,611,652

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2850 orang	2571 orang	12 laporan	12 laporan	22,950,000	22,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	21,372,500
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	887 orang	1572 orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3,738,900
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	632 orang	734 orang	12 laporan	12 laporan	3,560,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,736,200
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	62 orang	79 orang	12 laporan	12 laporan	16,150,000	8,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9,697,450

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	394 orang	376 orang	12 laporan	12 laporan	5,020,000	2,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,083,950
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	175 orang	262 orang	12 laporan	12 laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,626,500
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	14,200,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	128,813,242
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	55,025,500	68,622,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	86,610,269

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6 Dokumen	6 Dokumen	12 laporan	12 laporan	16,890,000	17,640,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12,071,600
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	11 Dokumen	11 Dokumen	12 laporan	12 laporan	13,431,600	8,511,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	32,166,900
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	16 Dokumen	16 Dokumen	12 laporan	12 laporan	38,903,500	67,263,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	29,896,780
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5 Dokumen	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	900,000	9,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12,045,850

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		1440 Orang	12 laporan	12 laporan	0	7,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8,195,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	11 Dokumen	11 Dokumen	12 laporan	12 laporan	77,394,000	37,064,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	58,343,114
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		15 Paket	12 laporan	12 laporan	0	750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	825,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	289,725,740	323,098,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	227,218,481

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		12 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	900,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4425 Keluarga	4425 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	18,540,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		15 Orang	12 laporan	12 laporan	0	1,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,430,000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal		80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		9 Orang	12 laporan	12 laporan	0	4,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	4,950,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**402,539,000**	**396,506,000**					**428,381,433**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**402,539,000**	**396,506,000**					**428,381,433**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	12 orang	12 orang	12 laporan	12 laporan	402,539,000	396,506,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	428,381,433
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**9,270,000**					**10,197,000**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**9,270,000**					**10,197,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan				34 Dokumen			0	9,270,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10,197,000
															TOTAL	**2,176,910,590**	**2,497,755,562**					**2,397,956,456**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,389,606,830**	**2,798,799,460**					**2,916,640,144**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,387,800,500**	**1,796,993,130**					**1,850,902,924**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,387,800,500**	**1,796,993,130**					**1,850,902,924**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 laporan	12 laporan	1,387,800,500	1,796,993,130	Pendapatan dari BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	1,850,902,924
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**430,678,330**	**411,118,330**					**504,466,427**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**430,678,330**	**411,118,330**					**504,466,427**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	151 Orang	189 Orang	12 laporan	12 laporan	56,630,000	34,630,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	58,328,900
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	151 Orang	189 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	150 Orang	180 Orang	12 laporan	12 laporan	2,150,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2,214,500
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	962 Orang	759 Orang	12 laporan	12 laporan	10,880,000	21,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	47,544,800
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	3700 Orang	3500 Orang	12 laporan	12 laporan	8,900,000	7,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	9,167,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5622 Orang	5100 Orang	12 laporan	12 laporan	18,425,000	17,625,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	18,895,350

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	2717 Orang	2077 Orang	12 laporan	12 laporan	37,400,000	37,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	38,522,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1157 Orang	1157 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	568 Orang	568 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,493,500
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	26 Orang	49 Orang	12 laporan	12 laporan	20,880,000	16,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	21,506,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	442 Orang	410 Orang	12 laporan	12 laporan	6,500,000	3,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6,695,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	335 Orang	335 Orang	12 laporan	12 laporan	0	0			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	8,200,000	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	8,446,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	44,270,000	68,520,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	45,598,100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	0	0			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	14,100,000	4,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	14,523,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	59,625,000	59,625,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	61,496,150
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	500,000	3,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		48 Orang	12 laporan	12 laporan	0	4,880,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,026,400
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	43,410,000	26,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	44,712,300
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		50 Paket	12 laporan	12 laporan	0	5,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	5,150,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	98,808,330	98,808,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	112,572,027

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		5 Laporan	12 laporan	12 laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	515,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	6138 Keluarga	6138 Keluarga	12 laporan	12 laporan	0	0			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	0
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100		57 Orang	12 laporan	12 laporan	0	1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0 - 100 80 Skala 0-100	1,545,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**571,128,000**	**571,128,000**					**541,123,993**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**571,128,000**	**571,128,000**					**541,123,993**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	17 Orang	17 Orang	12 laporan	12 laporan	571,128,000	571,128,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	80 Skala 0-100	541,123,993
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**19,560,000**					**20,146,800**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**19,560,000**					**20,146,800**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan				7 Dokumen			0	19,560,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				20,146,800
															TOTAL	**2,389,606,830**	**2,798,799,460**					**2,916,640,144**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,791,396,642**	**1,791,396,642**					**1,468,048,819**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**936,384,642**	**936,384,642**					**417,797,432**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**936,384,642**	**936,384,642**					**417,797,432**
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Menyelenggarakan Pengelolaan Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	883,851,067	881,261,067			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	366,159,850
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Menyelenggarakan Pengelolaan Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 laporan	12 laporan	52,533,575	55,123,575			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	51,637,582
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**855,012,000**	**855,012,000**					**1,050,251,387**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**855,012,000**	**855,012,000**					**1,050,251,387**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Menyelenggarakan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di PSC 119 YES Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 Orang	33 Orang	33 laporan	33 laporan	855,012,000	855,012,000			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	1,050,251,387
															TOTAL	**1,791,396,642**	**1,791,396,642**					**1,468,048,819**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Laboratorium Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,715,098,619**	**2,715,098,619**					**7,501,347,233**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,614,106,619**	**2,614,106,619**					**7,387,641,166**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**2,036,001,110**	**2,036,001,110**					**6,826,126,000**
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Terpeliharanya alat kesehatan/alat kesehatan medik fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 %	46 %	14 Unit	14 Unit	24 unit	24 unit	1,939,001,110	1,939,001,110	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	46 %	6,775,450,000
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Terpeliharanya alat kesehatan/alat kesehatan medik fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 %	46 %	1 Unit	1 Unit	24 unit	24 unit	65,000,000	65,000,000			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	46 %	17,716,000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Terpeliharanya alat kesehatan/alat kesehatan medik fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 %	46 %	24 Unit	24 Unit	24 unit	24 unit	32,000,000	32,000,000			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	46 %	32,960,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**578,105,509**	**578,105,509**					**561,515,166**
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Akreditasi Laboratorium Kesehatan secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 %	46 %	12 Dokumen	12 Dokumen	1 kali	1 kali	528,855,509	541,155,509			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	46 %	509,397,166

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Laboratorium Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Laboratorium Kesehatan secara optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 %	46 %	1 Unit	1 Unit	1 kali	1 kali	49,250,000	36,950,000			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	46 %	52,118,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**100,992,000**	**100,992,000**					**113,706,067**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**100,992,000**	**100,992,000**					**113,706,067**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah laporan kinerja sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 %	46 %	3 Orang	3 Orang	3 laporan	3 laporan	100,992,000	100,992,000			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	46 %	113,706,067
															TOTAL	**2,715,098,619**	**2,715,098,619**					**7,501,347,233**

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa pada rencana kerja perubahan tahun 2023 ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 14.371.133.815,- di bandingkan dengan rencana kerja murni tahun 2023 , hal ini dikarenakan adanya :

1) Belanja BLUD Puskesmas Naik karena adanya perhitungan Silpa dan penambahan pendapatan sebesar Rp. 5.827.563.815,-
2) Sedang untuk Dinas Kesehatan perubahan atau penambahan anggaran di perubahan 2023 ada pada gaji. Dan untuk perubahan dibeberapa sub kegiatan dikarenakan penyesuaian anggaran yang disamakan dengan realisasi atau kebutuhan, khususnya untuk jaminan kesehatan ada penurunan sebesar Rp.2.574.480.941, penurunanan tersebut dan ditambah dari berbagai sub kegiatan lain digunakan untuk penambahan pembelian obat dan pemenuhan komputer terkait ERM.
3) Penambahan perhitungan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 8.543.570.000

Untuk penambahan kegiatan dan sub kegiatan disesusaikan dengan Permendagri No. 050.5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah sedangkan jumlah dan nomenklatur apa saja yang berubah sudah diterangkan dalam tabel 3.1 dan 3.2 diatas.

BAB IV

P E N U T U P

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan revisi dari Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan rencana kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023. Dengan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik.

Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2023 ini terdapat penaikan total sebanyak Rp14.371.133.815,- dari semula Rp.238.276.374.555,- menjadi Rp.252.647.508.370. Pada akhir tahun anggaran 2023 akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GRAFIK ii

BAB I PENDAHULUAN .....I - 1
1.1. Latar Belakang.....I - 1
1.2. Landasan Hukum .....I - 5
1.3. Maksud dan Tujuan.....I - 7
1.4.Sistematika Penulisan .....I - 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... II -1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....II-4
1.Pencapaian Kinerja Pelayanan.....II-4
2.Pencapaian Kinerja Keuangan.....II-21
3.Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah.....II-28

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2023.....III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-1
3.2 Program dan Kegiatan III-1

BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II 2023..... .....II-2
Tabel 2.2 Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap Periode: Januari s.d. Mei 2023..... ..... II-12
Tabel 2.3 Persentase Jumlah Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Periode Bulan Januari-Juni 2023.....II-21
Tabel 2.4 Data Penerimaan Pendapatan sampai dengan bulan Juni 2022...II-22
Tabel 2.5 Data Realisasi Belanja sampai dengan bulan Juni 2023.....II-24
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....II-29
Tabel 3.1 Target Kinerja Indikator Program Perubahan Renja 2023.....III-2
Tabel 3.2 Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja 2023..... .....III-3
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Renja Tahun 2023..... .....III-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Januari s.d. Mei 2023..... .....II-5
Grafik 2. Jumlah Kunjungan Poliklinik Januari s.d. Mei 2023.....II-6
Grafik 3. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan (Baru dan Lama) Januari s.d.Mei 2023..... .....II-7
Grafik 4. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar (Umum, JKN dan Non-JKN) Januari s.d Mei 2023.....II-7
Grafik 5. Jumlah Kunjungan Pasien IGD Januari s.d Mei 2023..... .....II-8
Grafik 6. Jumlah Kunjungan Pasien IGD (Baru dan Lama) Januari s.d Mei 2023..... .....II-9
Grafik 7. Jumlah Kunjungan Pasien IGD Per Status Rujukan Periode: Januari s.d. Mei 2023..... .....II-9
Grafik 8. Jumlah Kunjungan Pasien UGD Berdasarkan Cara Bayar (Umum, JKN dan Non-JKN) Periode: Januari s.d. Mei 2023.....II-10
Grafik 9.Grafik Barber Johnson Perbandingan Performance Pelayanan Rawat Inap Januari s.d. Mei 2023.....II-11
Grafik 10. Grafik Indikator GDR & NDR Periode: Januari s.d. Mei 2023.....II-12
Grafik 11. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar (Umum, JKN dan Non-JKN) Periode: Januari s.d. Mei 2023..... .....II-14

Grafik 12. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Periode: Januari s.d. Mei 2023..... II-15
Grafik 13. Jumlah Kunjungan Radiologi Periode: Januari s.d. Mei 2023..... II-15
Grafik 14. Jumlah Pemeriksaan Radiologi Periode: Januari s.d. Mei 2023..... II-16
Grafik 15. Jumlah Kunjungan Rehabilitasi Medis Periode: Januari s.d. Mei 2023 ..... II-16
Grafik 16. Jumlah Pelayanan Farmasi Periode: Januari s.d. Mei 2023..... II-17
Grafik 17. Jumlah Tindakan Operasi di IBS Periode: Januari s.d. Mei 2023..... II-17
Grafik 18. Jumlah Kegiatan Operasi Berdasarkan Spesialisasi Periode: Januari s.d. Mei 2023..... II-18
Grafik 19. Jumlah Pemakaian Darah di BDRS Periode: januari s.d. Mei 2023..... II-18
Grafik 20. Jumlah Kunjungan Pelayanan Hemodialisa Periode: Januari s.d. Mei 2023..... II-19
Grafik 21. Jumlah Kunjungan Pelayanan Audiometri Periode: Januari s.d. Mei 2023 ..... II-19
Grafik 22. Jumlah Kunjungan Kemoterapi Periode: Januari s.d. Mei 2023 . II-20
Grafik 23. Jumlah Kunjungan Endoskopi Periode: Januari s.d. Mei 2023 .. II-20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki peran strategis dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus juga berperan sebagai pendukung Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Saat ini RSUD Kota Yogyakarta mempunyai klasifikasi Rumah Sakit tipe B Pendidikan dan diselenggarakan berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) secara penuh melalui keputusan Walikota Yogyakarta No.423/KEP/2007 tanggal 21 September 2007 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta merupakan unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan RSUD Kota Yogyakarta yang berdasar pada PPK BLUD diharapkan pengelolaan Rumah Sakit menjadi lebih responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima yang efektif dan efisien namun tidak meninggalkan fungsi sosialnya. Dalam perkembangannya, Rumah Sakit saat ini telah berubah menjadi suatu institusi yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu

manajemen yang baik. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integrative yang menyangkut struktur, proses, outcome secara objektif, sistematik dan berlanjut memantau serta menilai mutu dan kewajaran pelayanan terhadap pasien, menggunakan setiap peluang untuk meningkatkan pelayanan pasien, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul sehingga pelayanan yang diberikan di rumah sakit berdaya guna dan berhasil guna.

Pengelolaan Rumah Sakit pada masa ini dituntut semakin berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Pengelolaan rumah sakit yang baik bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga diharapkan berujung pada kepuasan pasien. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan medis, dan sumber daya keuangan rumah sakit yang memadai. Oleh karena itu Rumah Sakit diwajibkan menyusun rencana kerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai arah dan acuan kebijakan pembangunan kesehatan dalam anggaran perubahan tahun berjalan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Yogyakarta yang telah mengakomodir program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program kewilayahan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai Organisasi Bersifat Khusus dibawah Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta maka dalam hal penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja harus selaras dan menjadi bagian dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 ini dilakukan melalui perencanaan yang bersifat bottom-up berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan dengan tetap berpedoman pada indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan rumah sakit. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan perubahan anggaran yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung pada periode anggaran perubahan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sekaligus sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran Perubahan (RBA-P) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Renja 2023 ini berpedoman pada Rencana Stategis Bisnis (RSB) tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya Dan Pusat Pelayanan Jasa, Yang Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas

9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Berdasar pada visi misi tersebut kemudian ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun kedepan, RSUD Kota Yogyakarta mendukung Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam mencapai misi ke 9 “Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat” yang mempunyai tujuan dan sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator “Angka Harapan Hidup” serta target tahun 2023 sebesar 74,77.

Program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yaitu pada tujuan strategis “Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan” dengan sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan” dengan fokus pada tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut kemudian ditetapkan visi, misi, nilai-nilai dan motto pelayanan RSUD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya Rumah Sakit Pilihan Masyarakat dan Wahana Pendidikan Berkompeten ”

2. Misi

1) Mewujudkan pelayanan rumah sakit secara paripurna berbasis keselamatan pasien
2) Menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
3) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar
4) Mewujudkan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan

3. Nilai-Nilai

a. Transparan

Yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan informasi dalam pengelolaan sumber daya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jujur

Yaitu sikap yang selalu berusaha memberikan informasi yang sesuai kenyataan dan penuh kesungguhan hati.

c. Akuntabel

Yaitu pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara periodik dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Empati

Yaitu kemampuan untuk mengenali, peduli, ikhlas, penuh perhatian dan mampu meresapi perasaan orang lain.

e. Etika dan Kekompakan

Yaitu dalam berperilaku menjunjung tinggi adat dan budaya setempat dengan moral luhur berdasarkan kodrat manusia; dalam ikatan kerja yang bersatu dan saling membantu.

4. Motto

Melayani dengan hati, profesional dan senyum

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023 ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait, antara lain:

a. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1214/MENKES/SK/XI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jogja Milik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07/MENKES/243/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan

Senopati dan Fakultas Kesehatan Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
r. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/2821/SE/2023 Tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2023 terdapat adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap mempertimbangkan prioritas, sasaran pembangunan dan kemampuan keuangan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai di anggaran perubahan tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dengan harapan akan:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit yang transparan, efektif dan efisien, responsif serta berkeadilan, dengan tersedianya rencana kerja sebagai pedoman arah dan tujuan yang pasti,
b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan rumah sakit
c. Mengembangkan pola pikir sumber daya manusia dan manajemen rumah sakit kepada sikap dan tindakan yang berorientasi pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan.
d. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan pembangunan.
e. Tersusunnya program, rencana kegiatan, dengan indikator-indikator program dan kegiatan yang akan dicapai, sumber-sumber pembiayaan/dana yang diperlukan, tatakala kegiatan dengan jelas, terinci dan terstruktur, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.
f. Dikenali dan dapat diantisipasinya kelemahan, tantangan serta hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja sehingga dapat menyusun strategi pemecahan masalah dengan tepat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Tahun Anggaran 2023 RSUD Kota Yogyakarta disusun dengan sistematika sesuai Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/2821/SE/2023 Tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Sampai Dengan TW II Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2023

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan memasuki masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 sebagian besar tercapai sesuai rencana, namun ada beberapa sub kegiatan yang akan disesuaikan pada anggaran perubahan 2023 ini.

Capaian realisasi indikator program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023 (sd Mei 2023)		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023 (sd Mei 2023)		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/11	18	19
1	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	(∑ Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal : ∑ Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%	81%	-	83,03%	-	80,25%	34.220.165.600	50,0%	16.595.696.000	54,41%	1.461.231.076	109%	8,80%	RSUD KOTA YOGYAKARTA	
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	(∑ Indikator SPM yang Tercapai : ∑ Indikator SPM Pelayanan Medis) x 100	83%	-	-	-	80%		76%		75,90%		100%		RSUD KOTA YOGYAKARTA	
			Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	((Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan) : 3)	83%	-	-	-	80%		80%		92,46%		116%		RSUD KOTA YOGYAKARTA	
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota								33.845.165.600		16.440.656.000		1.416.625.076		8,62%		
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50.000.000		20.040.000		10.406.000		51,93%		
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								325.000.000		135.000.000		34.200.000		25,33%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/11	18	19
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	-	-	A (83,37)	-	A (80-90)	106.516.347.630	A (80-90)	61.198.737.245	A (83,37)	43.806.422.786	100%	71,58%	RSUD KOTA YOGYAKARTA	
			Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	(Realisasi Pendapatan:Target Pendapatan) x 100	100%	-	-		100%		53,77%		49%		91%		RSUD KOTA YOGYAKARTA	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.890.000		2.599.000		2.201.000		84,69%		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah								5.736.000		2.275.000		1.752.000		77,01%		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah								3.000.000		1.500.000		1.095.000		73,00%		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								448.455.610		232.412.805		196.191.500		84,42%		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.985.964.000		3.723.985.988		2.862.753.444		76,87%		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.051.917.500		982.828.365		710.615.793		72,30%		
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD								96.015.384.520		56.253.136.087		40.031.814.049		71,16%		

Indikator tahun 2023-2026 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ada 3 yaitu : Persentase Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis Dan Non Medis Yang Terpelihara Dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal; Persentase Tercapainya Indikator SPM Layanan Medis RS; Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan. Sedangkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 indikator yaitu: Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Dan Operasional BLUD Rumah Sakit Terpenuhi. Hampir semua indikator program dapat mencapai target yang ditetapkan, ada 1 indikator yang belum tercapai yaitu Operasional BLUD Rumah Sakit Terpenuhi yang perhitungannya berasal dari realisasi pendapatan RS, target pada TW II sebesar 53,77% baru tercapai sebesar 48,99%. Hal ini dikarenakan terdapat klaim yang terpending dan masih proses memenuhi kelengkapan berkas untuk pengajuan klaim BPJS Kesehatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

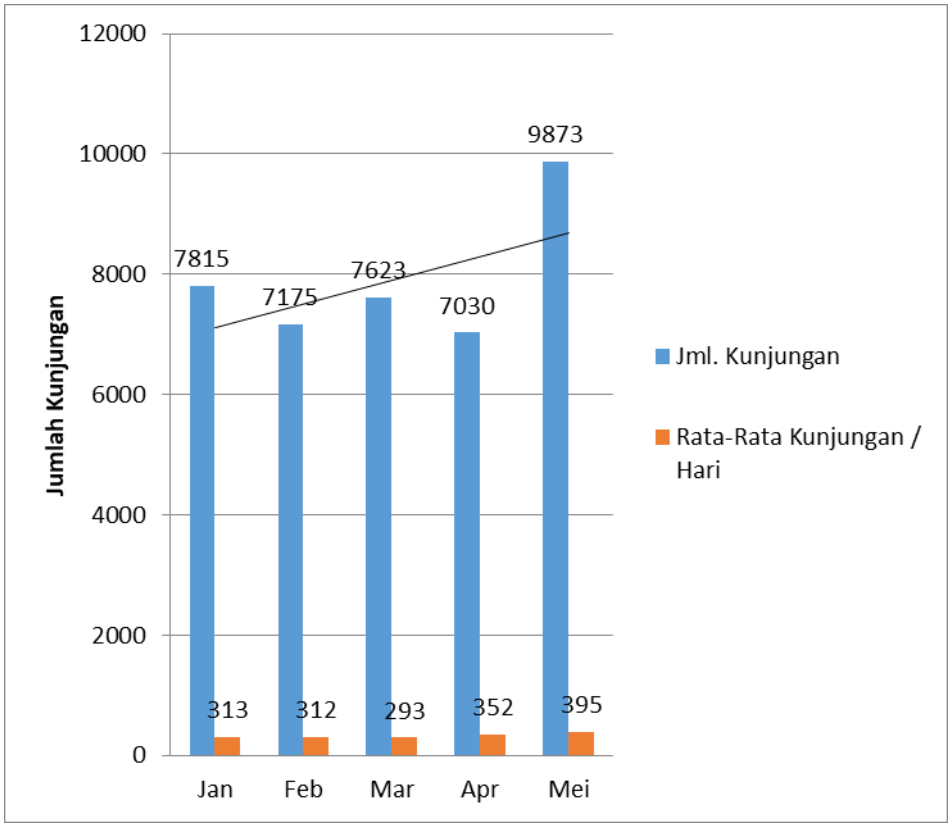
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan RSUD Kota Yogyakarta dapat dilihat dari capaian indikator program di tabel 2.1 diatas. Seiring dengan tingginya angka capaian vaksin COVID-19 di DIY, menurunnya kasus COVID-19 dan pencabutan status PPKM pada akhir tahun 2022 serta pernyataan presiden RI bahwa status pandemi dicabut dan berganti menjadi endemi pada 21 Juni 2023 lalu maka kunjungan pasien di RSUD Kota Yogyakarta sudah tidak ada pembatasan sehingga kunjungan pasien dan pelayanan kepada pasien sudah berangsur normal kembali.

Analisis kinerja pelayanan RSUD Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Mei 2023 sebagai berikut :

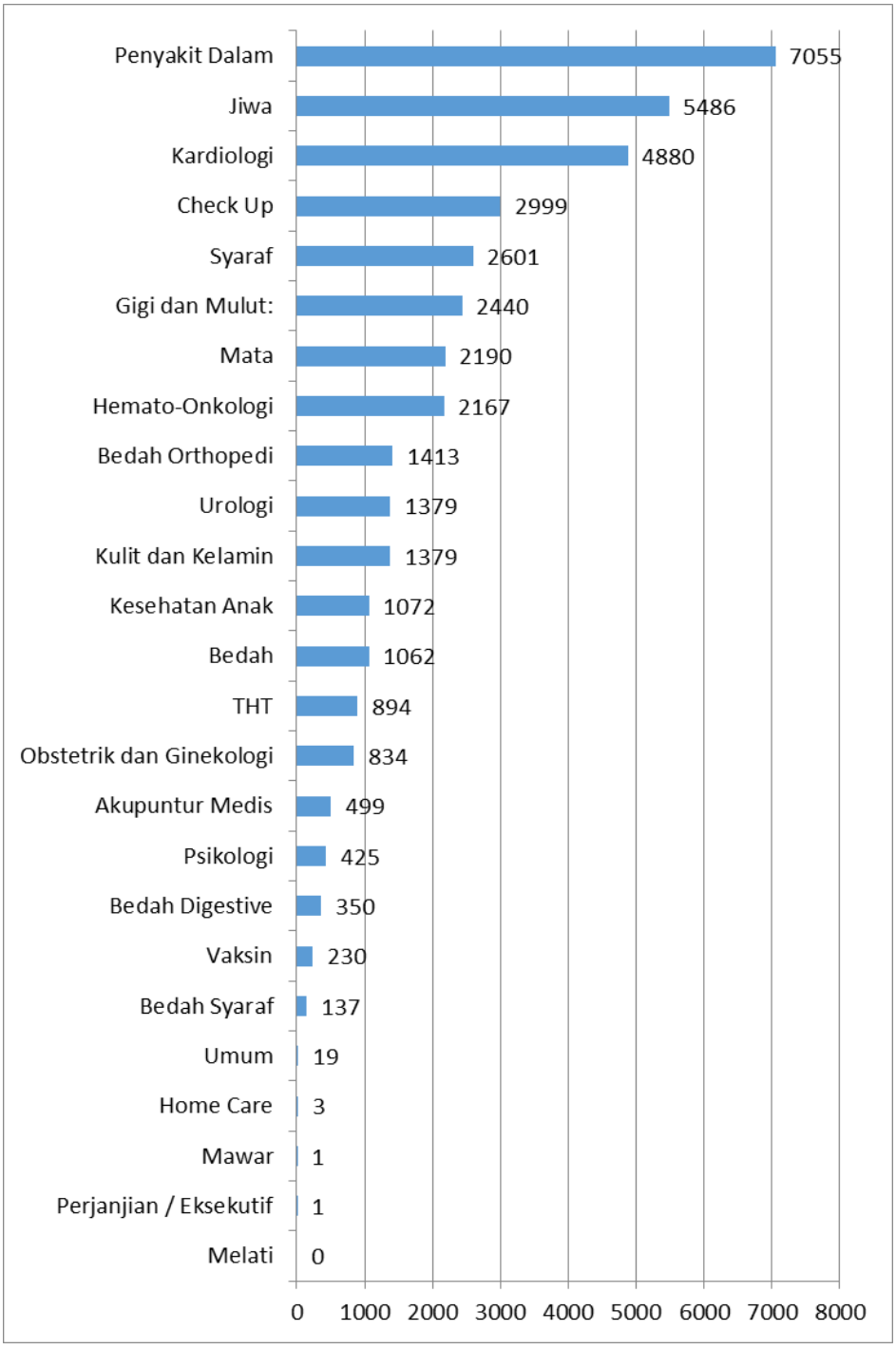
A. PELAYANAN RAWAT JALAN

Grafik 1. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Januari s.d. Mei 2023



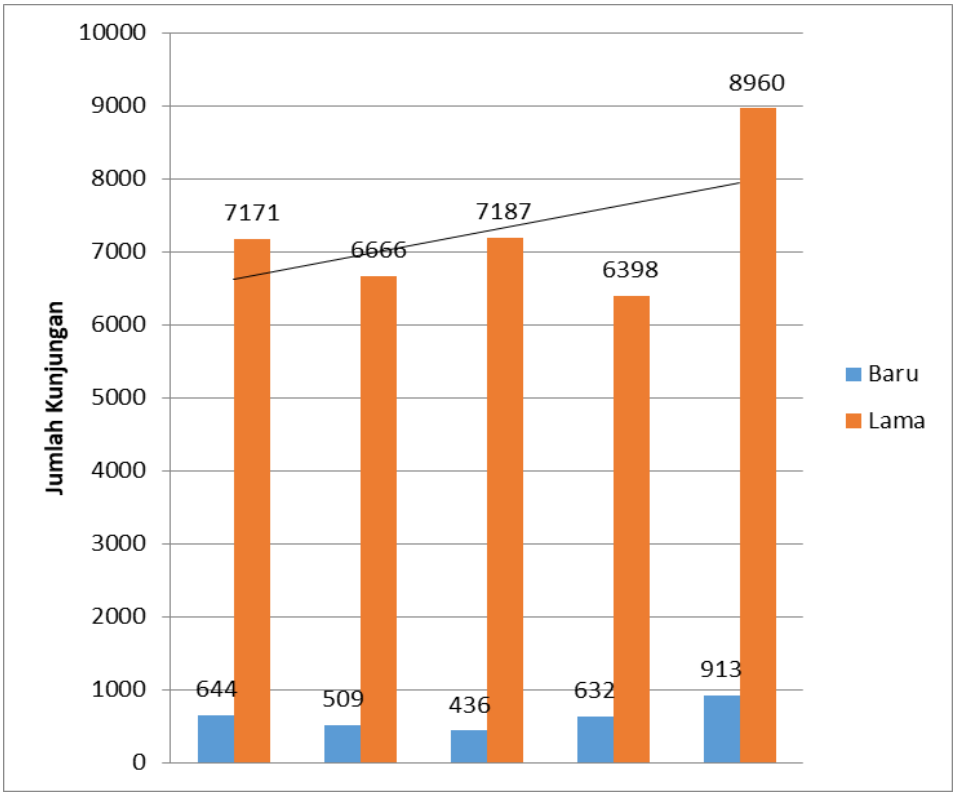
Kunjungan pasien rawat jalan pada periode Januari s.d. Mei 2023 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah Kunjungan pasien rawat jalan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2023 (9873) dan terendah terjadi pada bulan Februari 2023 (7175).

Grafik 2. Jumlah Kunjungan Poliklinik
Januari s.d. Mei 2023



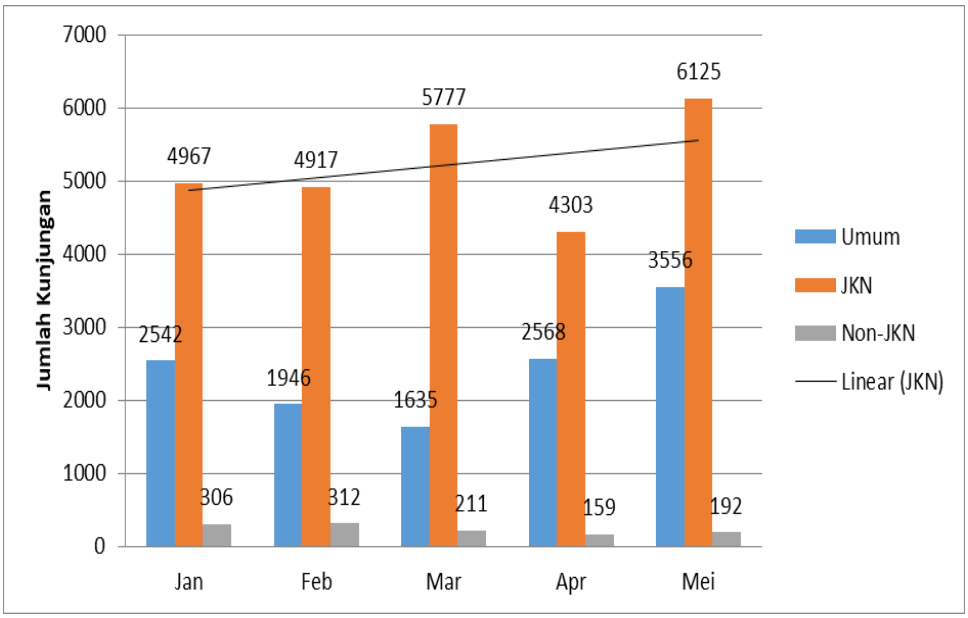
Dalam periode Januari s.d. Mei 2023, kunjungan poliklinik tertinggi yaitu klinik penyakit dalam (7055), Klinik Jiwa (5486) dan Klinik Kardiologi (4880).

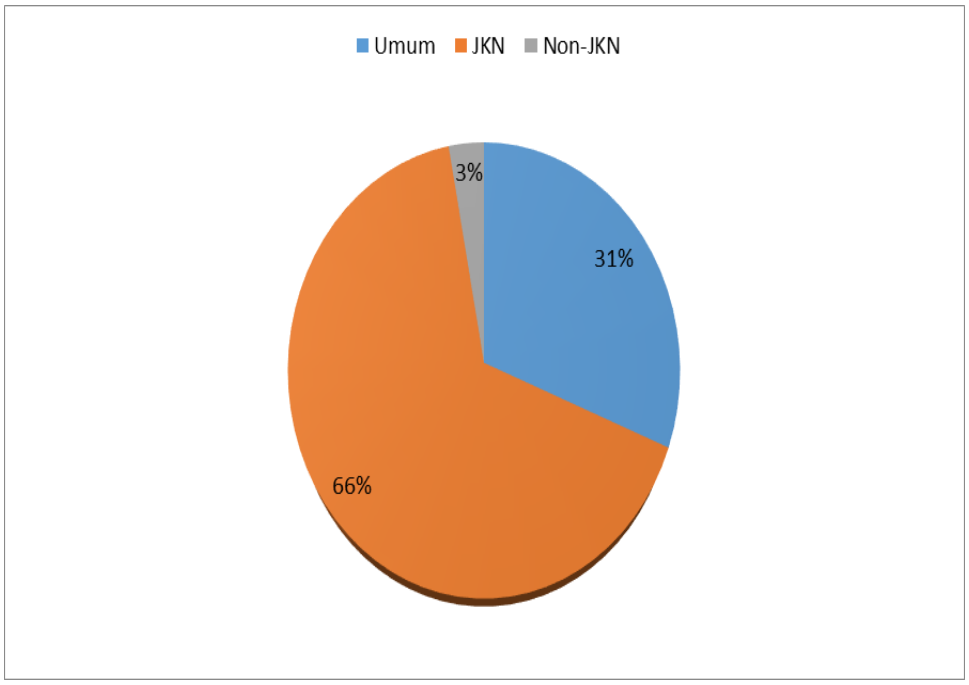
Grafik 3. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan (Baru dan Lama)
Januari s.d. Mei 2023



Pada periode Januari s.d. Mei 2023, jumlah kunjungan pasien baru dan lama cenderung mengalami peningkatan.

Grafik 4. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Berdasarkan Cara Bayar (Umum, JKN dan Non-JKN)
Januari s.d. Mei 2023

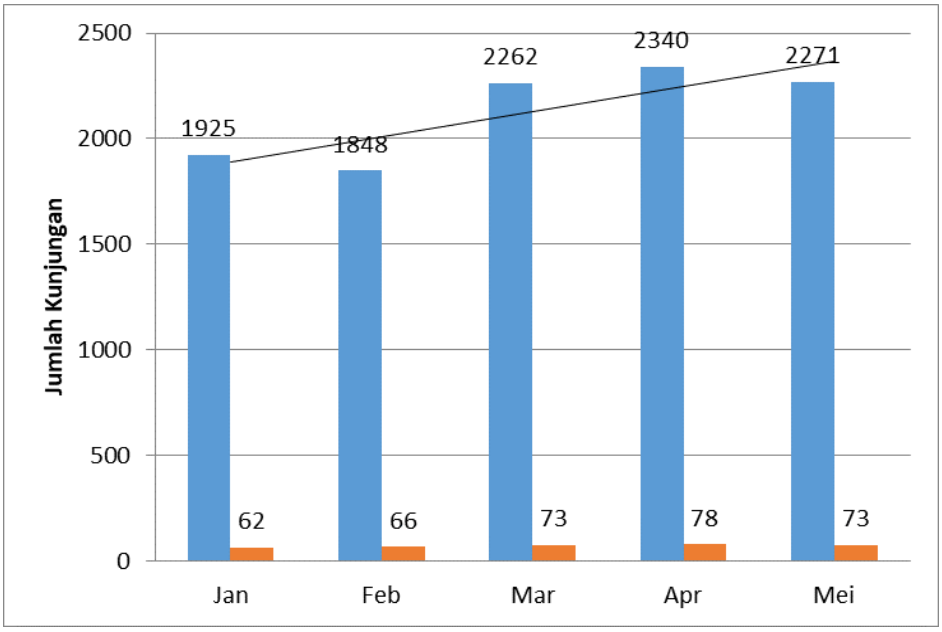




Pada bulan Januari s.d. Mei 2023, jumlah kunjungan pasien berdasarkan cara bayar cenderung mengalami peningkatan. Prosentase kunjungan pasien dengan cara bayar yaitu JKN (66%), Umum (31%) dan Non-JKN (3%).

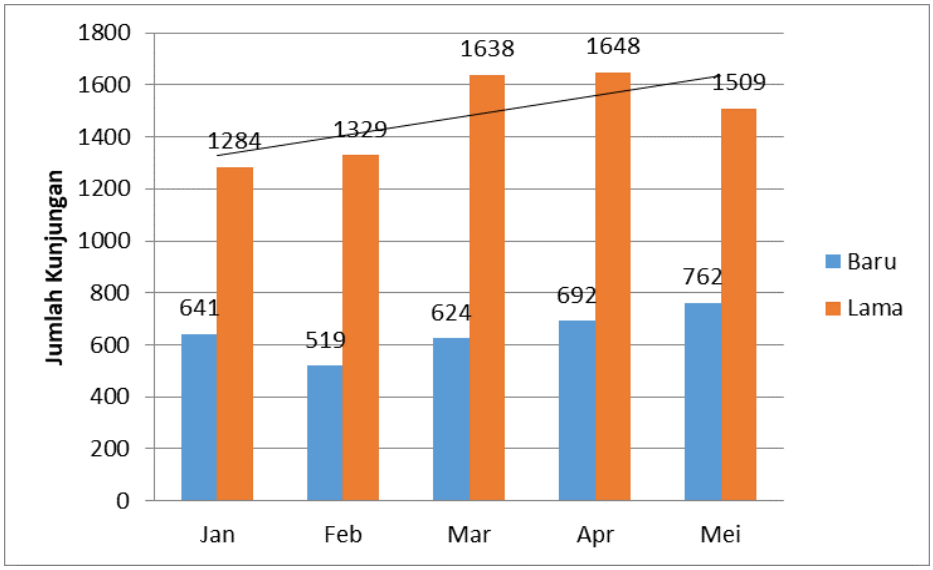
B. PELAYANAN IGD

Grafik 5. Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Januari s.d. Mei 2023



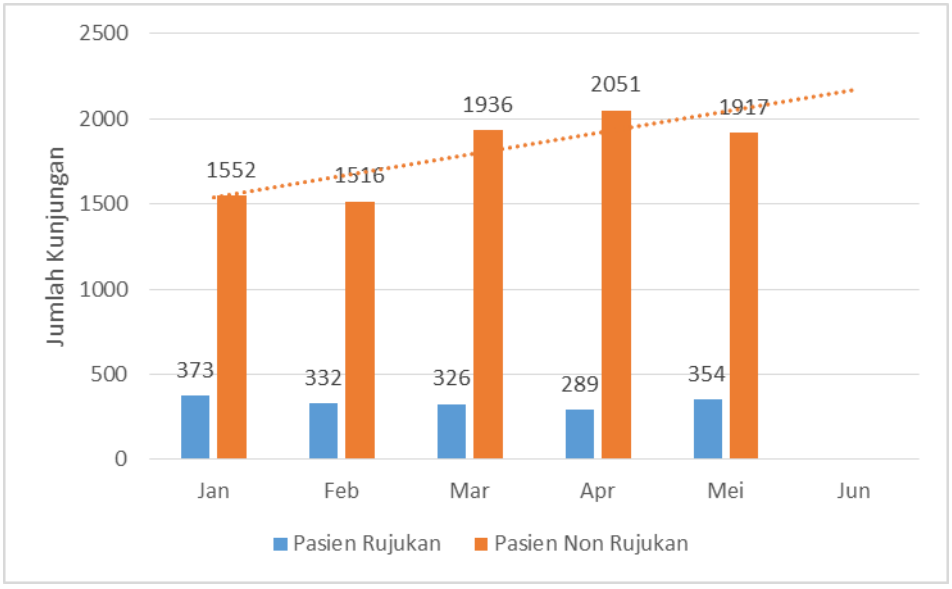
Dalam periode Januari s.d. Mei 2023, Kunjungan pasien IGD mengalami peningkatan. Kunjungan pasien IGD tertinggi terjadi pada bulan April 2023 yaitu sebesar 2340.

Grafik 6. Jumlah Kunjungan Pasien IGD (Baru dan Lama)
Januari s.d. Mei 2023



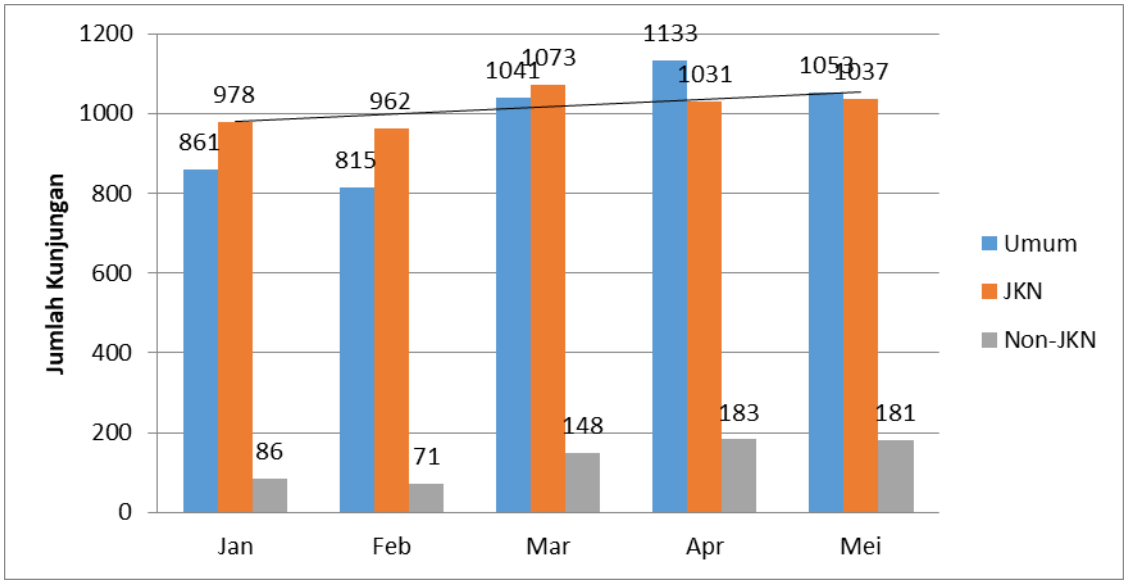
Pada periode Januari s.d. Mei 2023, jumlah kunjungan pasien baru dan lama cenderung mengalami peningkatan, kunjungan pasien baru tertinggi terjadi pada bulan Mei 2023 (762) dan kunjungan pasien lama tertinggi terjadi pada bulan April 2023 (1648).

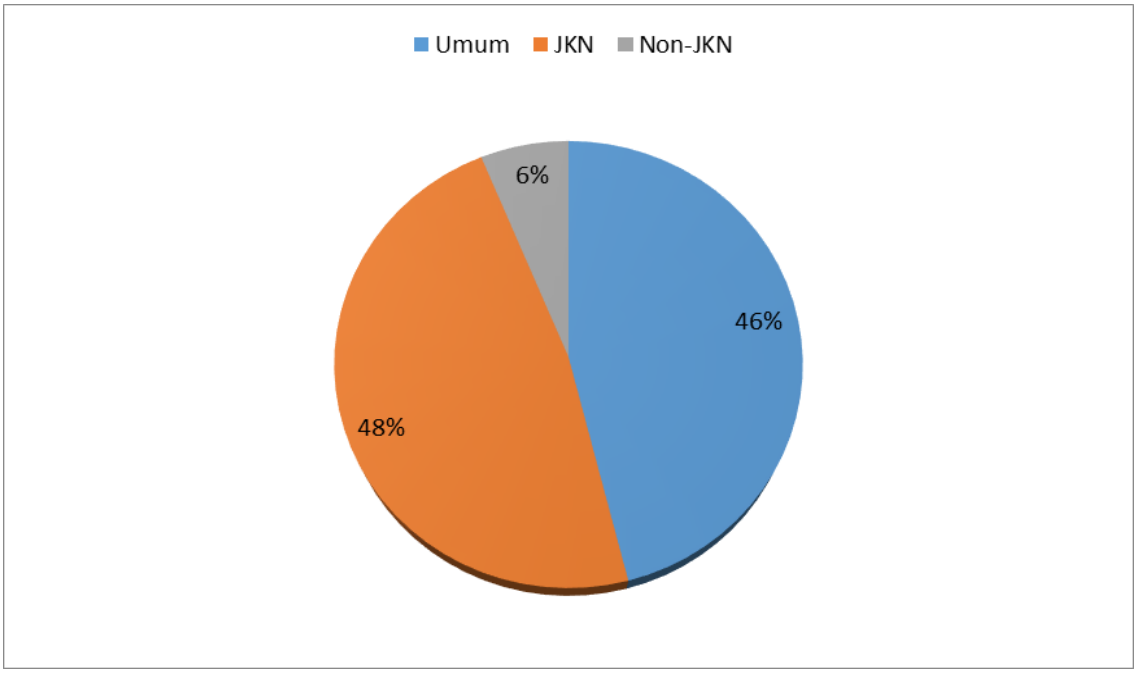
Grafik 7. Jumlah Kunjungan Pasien IGD Per Status Rujukan
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Kunjungan pasien di IGD didominasi oleh Pasien Non Rujukan. Pada periode Januari s.d. Mei 2023 kunjungan pasien IGD Per Status Rujukan cenderung mengalami peningkatan.

Grafik 8. Jumlah Kunjungan Pasien UGD
Berdasarkan Cara Bayar (Umum, JKN dan Non-JKN)
Periode: Januari s.d. Mei 2023

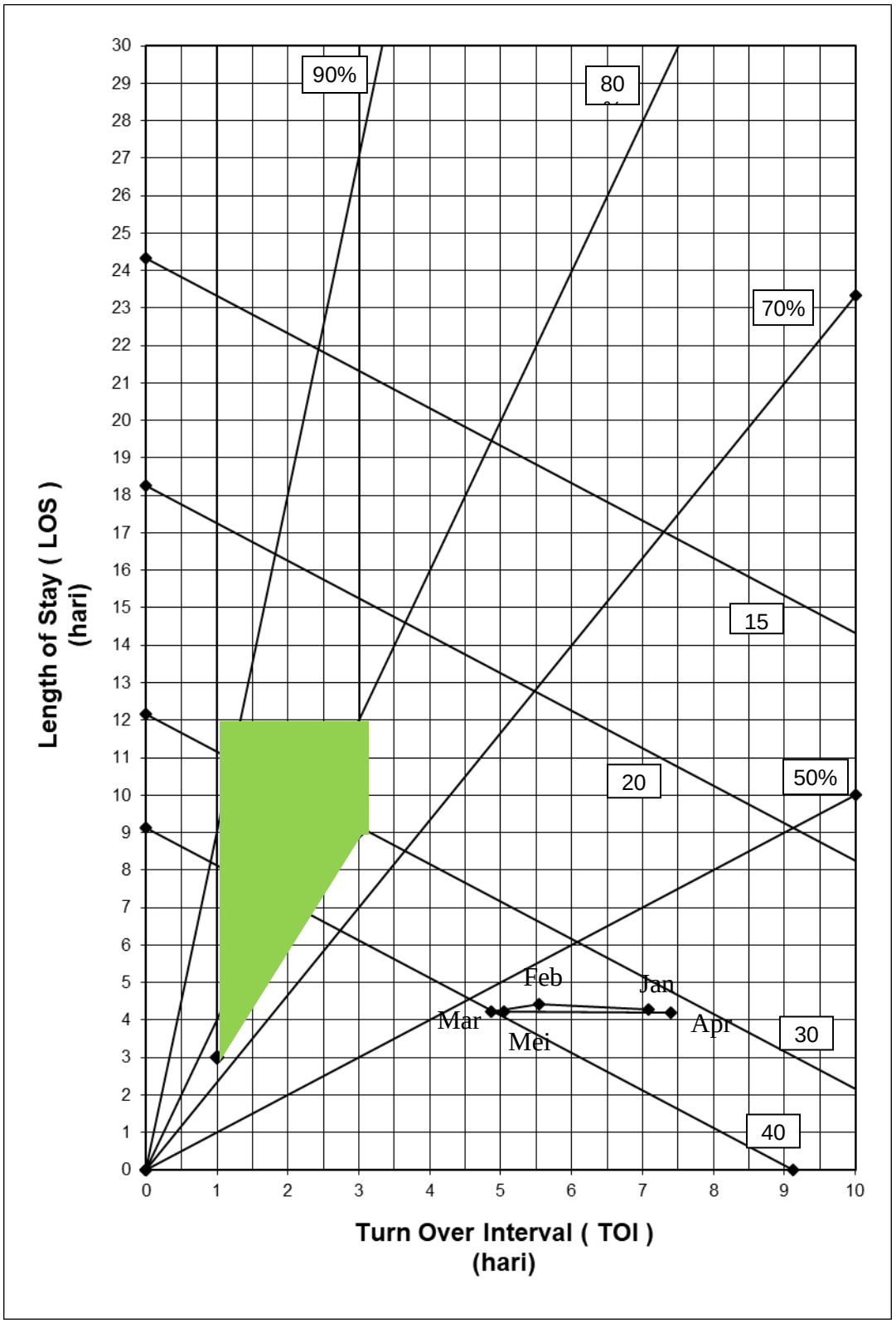




Pada periode Januari s.d. Mei 2023, kunjungan pasien IGD berdasarkan cara bayar cenderung mengalami peningkatan. Prosentase Jumlah Kunjungan IGD Berdasarkan Cara Bayar adalah JKN (48%), Umum (46%) dan Non-JKN (6%).

C. PELAYANAN RAWAT INAP

Grafik 9.
Grafik Barber Johnson
Perbandingan Performance Pelayanan Rawat Inap
Januari s.d. Mei 2023



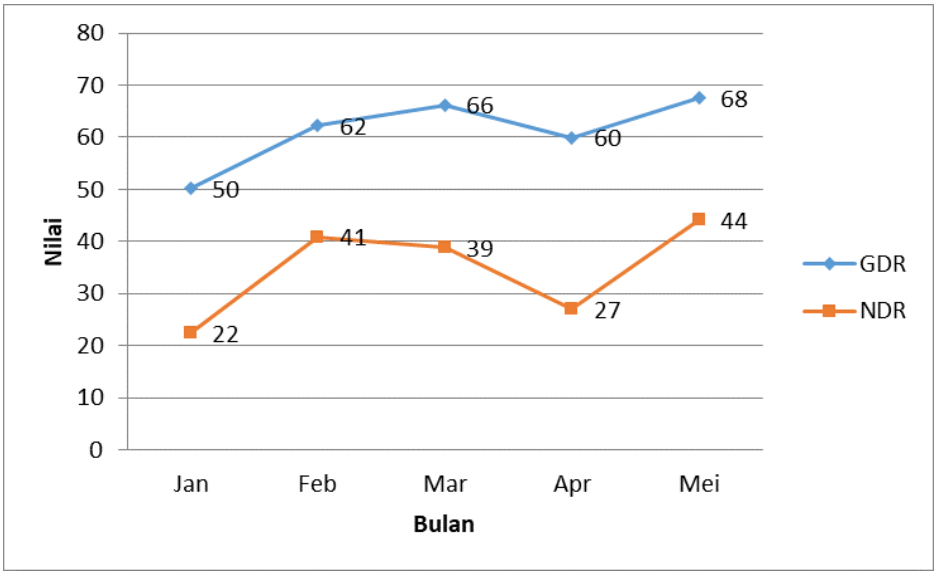
Berdasarkan tabel Grafik barber Johnson, titik performance pelayanan rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta dalam periode Januari s.d. Mei 2023 belum berada pada daerah efisien. Meskipun demikian, titik performance Grafik Barber Johnson pada periode tersebut menunjukkan bahwa nilai efisiensi pengelolaan tempat tidur di RSUD Kota Yogyakarta mendekati daerah efisien.

Tabel 2.2
Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap
Periode: Januari s.d. Mei 2023

Bulan	BOR (Dalam %)	LOS (Dalam Hari)	TOI (Dalam Hari)	BTO (Dalam Kali)
Januari 2023	38.92%	4.28	7.09	2.67
Februari 2023	44.65%	4.43	5.54	2.80
Maret 2023	51.58%	4.22	4.87	3.08
April 2023	36.58%	4.19	7.40	2.57
Mei 2023	44.89%	4.23	5.05	3.38
Nilai Ideal	**60-85%**	**6-9**	**1-3**	**3-4**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Nilai BOR, LOS dan TOI RSUD Kota Yogyakarta untuk periode Januari s.d. Mei 2023 tidak berada pada nilai ideal. Sedangkan Nilai BTO untuk periode Januari, Februari dan April 2023 tidak berada pada nilai ideal.

Grafik 10. Grafik Indikator GDR & NDR
Periode: Januari s.d. Mei 2023

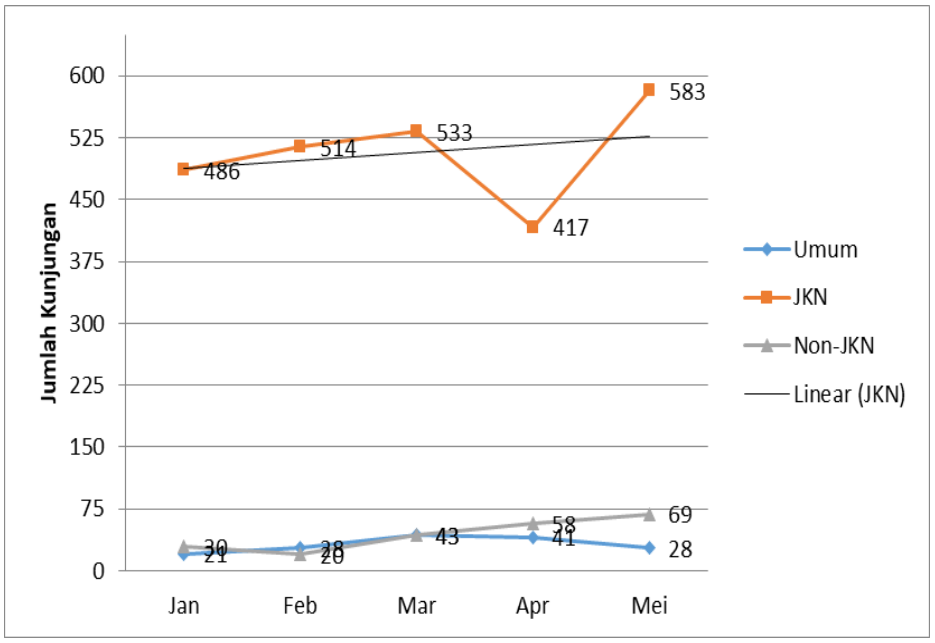


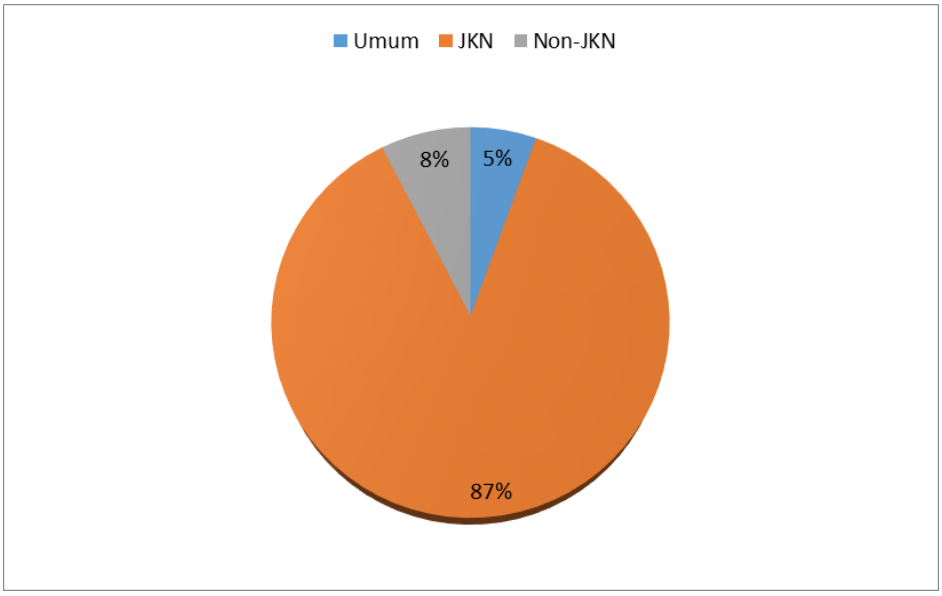
Standar nilai ideal GDR oleh Depkes adalah sebesar kurang dari 45 permil. Nilai GDR di RSUD Kota Yogyakarta pada perioe Januari s.d. Maret 2023 berada dalam kategori tidak ideal atau lebih dari 45 permil. Sedangkan standar untuk nilai NDR adalah kurang dari 25 permil. Nilai NDR bulan Januari 2023 berada dalam kategori ideal dan Februari s.d. Mei 2023 berada dalam kategori tidak ideal atau lebih dari 25 permil.

Sebagai catatan bahwa semakin tinggi nilai Gross Death Rate berarti semakin tinggi pula angka kematian kotor. Begitu pula dengan Net Death Rate, semakin tinggi nilai Net Death Rate semakin tinggi pula angka kematian bersih. Artinya jika nilai Gross Death Rate maupun Net Death Rate semakin tinggi, maka mutu pelayanan yang diberikan asumsinya adalah semakin buruk. Oleh karena itu rumah sakit perlu memperbaiki pelayanan, baik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun memberikan pelatihan kepada tenaga medis khususnya pelatihan dalam menangani pasien yang sedang mengalami kritis agar angka Gross Death Rate maupun Net Death Rate dapat menurun.

Angka Gross Death Rate dan Net Death Rate yang meningkat dan di atas standar nasional menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien selama rawat inap dirumah sakit belum baik. Banyak faktor yang berpengaruh dalam kematian tersebut seperti, tingkat keparahan suatu penyakit, kecekatan dan kesigapan pelayanan perawatan, serta ketepatan pengobatan, menjadi hal yang sangat diperhatikan dan berpengaruh. Pasien yang meninggal sebelum mendapat perawatan 48 jam diasumsikan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi sakit berat sehingga sangat dimungkinkan meninggalnya pasien termasuk bukan karena kurangnya mutu pelayanan medis, tetapi karena memang kondisi pasien yang sudah sakit berat.

Grafik 11. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap
Berdasarkan Cara Bayar (Umum, JKN dan Non-JKN)
Periode: Januari s.d. Mei 2023



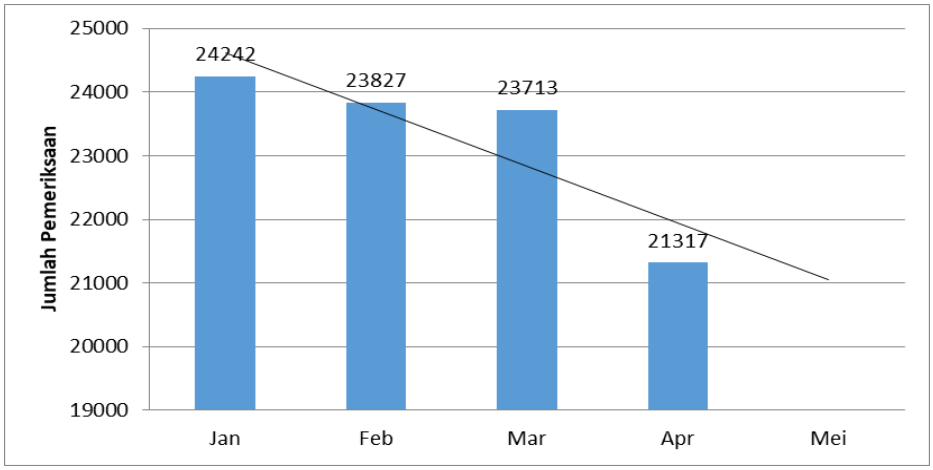


Pada periode Januari s.d. Mei 2023, kunjungan pasien rawat inap berdasarkan cara bayar cenderung mengalami peningkatan. Prosentase Jumlah Kunjungan pasien rawat inap Berdasarkan Cara Bayar adalah JKN (87%), Umum (5%) dan Non-JKN (8%).

D. PELAYANAN PENUNJANG

1. Kegiatan Laboratorium

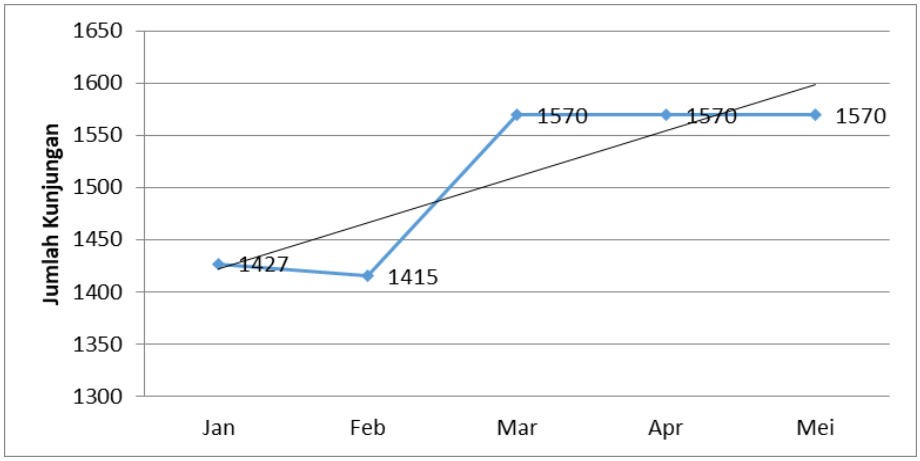
Grafik 12. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Jumlah pemeriksaan Labolatorium pada periode Januari s.d. Mei 2023 cenderung mengalami penurunan. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium pada terendah terjadi pada bulan April 2023. Untuk Jumlah Pemeriksaan Laboratorium periode Mei 2023 belum ada data.

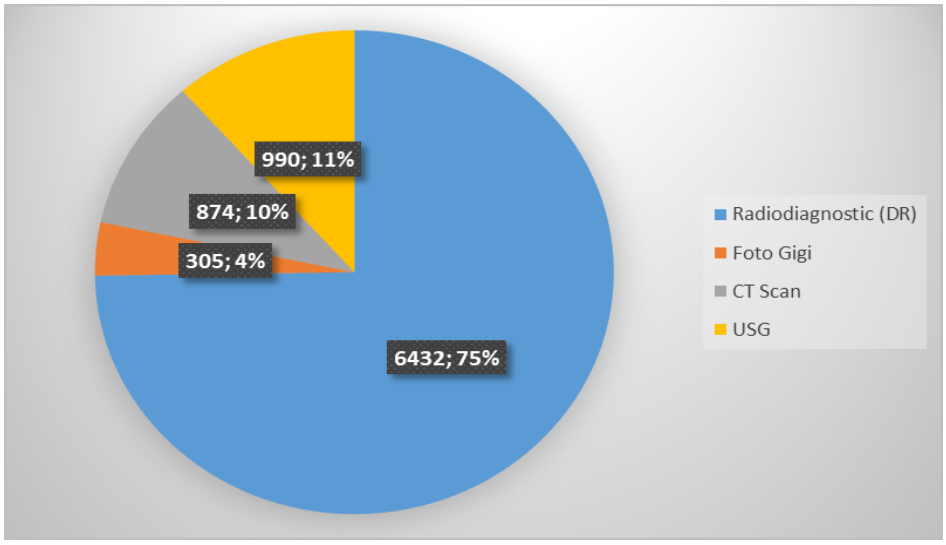
2. Kegiatan Radiologi

Grafik 13. Jumlah Kunjungan Radiologi
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Pada bulan Januari s.d. Mei 2023, Jumlah kunjungan Radiologi cenderung mengalami peningkatan.

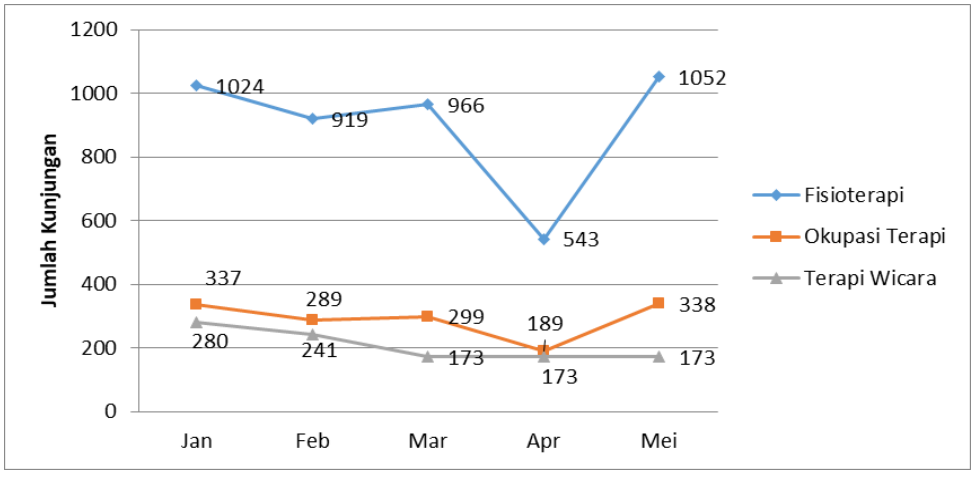
Grafik 14. Jumlah Pemeriksaan Radiologi
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Dalam periode Januari sd. Mei 2023, prosentase jumlah Pemeriksaan Radiologi adalah Radiodiagnostic (75%), USG (11%), CT Scan (10%) dan Foto Gigi (4%).

3. Kegiatan Rehabilitasi Medis

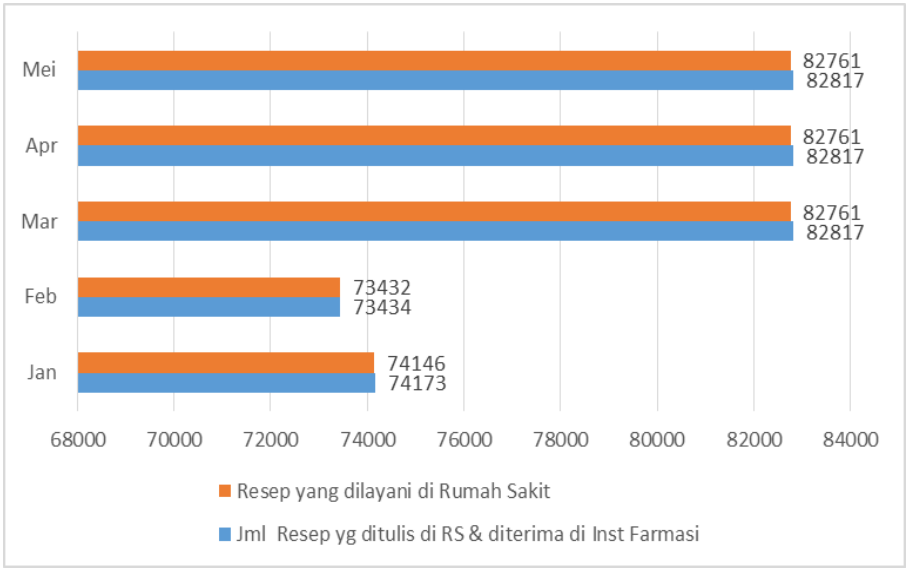
Grafik 15. Jumlah Kunjungan Rehabilitasi Medis
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Pada periode Januari s.d. Mei 2023, Jumlah keseluruhan kunjungan Rehabilitasi Medis mengalami penurunan.

4. Kegiatan Farmasi

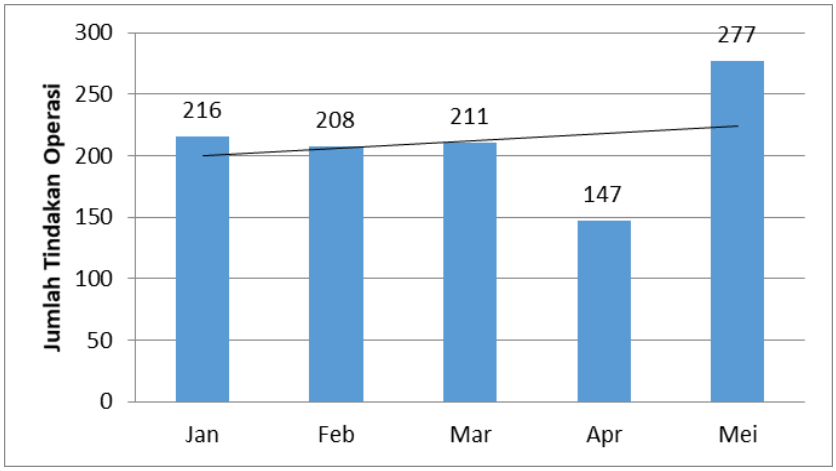
Grafik 16. Jumlah Pelayanan Farmasi
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Pada periode Januari s.d. Mei 2023, jumlah resep yang ditulis di RS dan diterima di Inst. Farmasi mengalami peningkatan dan Jumlah Resep yang dilayani di Rumah Sakit juga mengalami peningkatan.

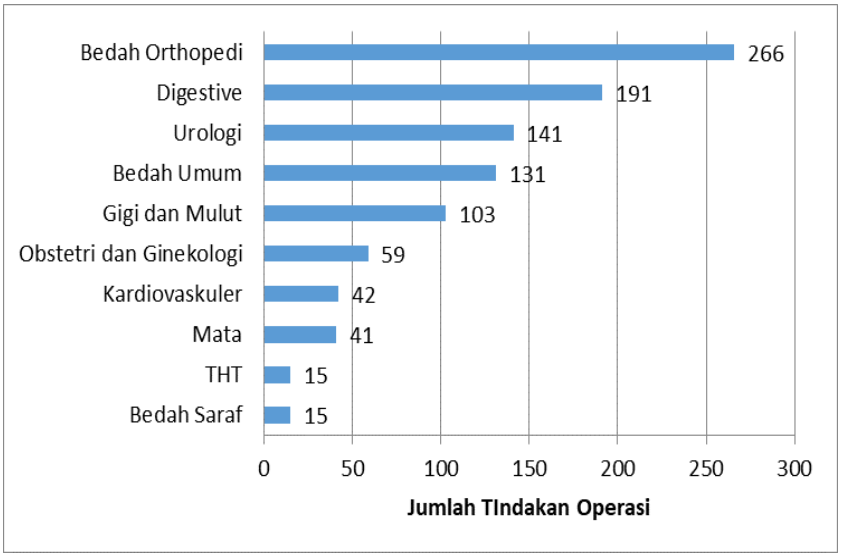
5. Kegiatan Kamar Operasi

Grafik 17. Jumlah Tindakan Operasi di IBS
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Dalam Januari s.d. Mei 2023, jumlah tindakan operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS) cenderung mengalami peningkatan.

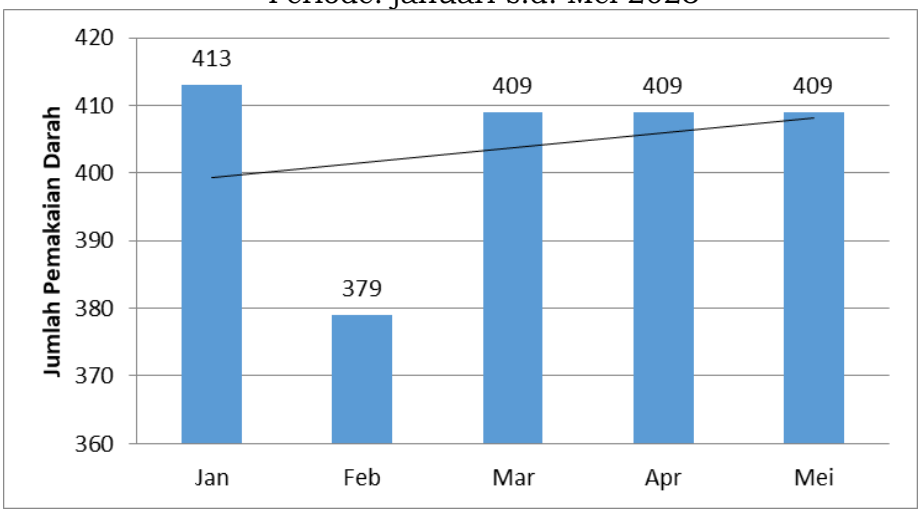
Grafik 18 Jumlah Kegiatan Operasi Berdasarkan Spesialisasi
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Apabila dilihat dari jumlah kegiatan operasi berdasarkan spesialisasinya, jenis tindakan operasi tertinggi pada periode Januari s.d. Mei 2023 yaitu bedah Orthopedi 266, Bedah Digestive 191 dan Urologi 141.

6. Kegiatan Bank Darah

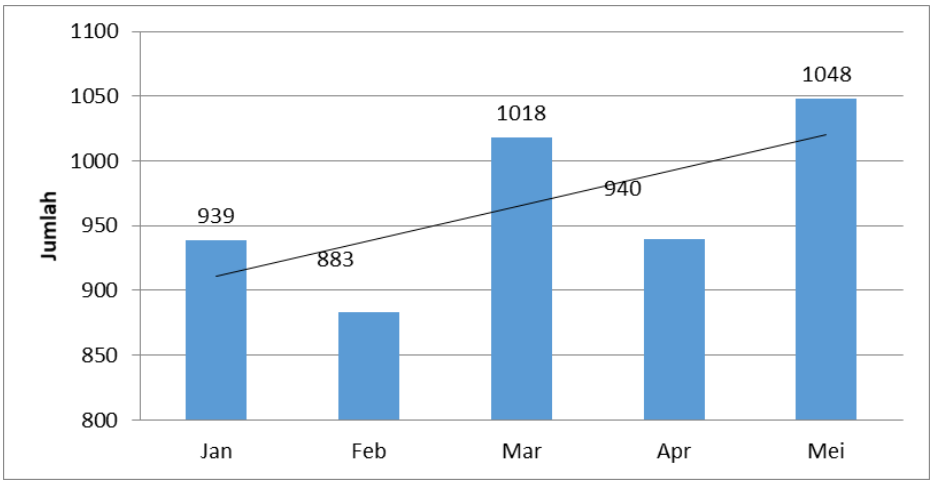
Grafik 19. Jumlah Pemakaian Darah di BDRS
Periode: januari s.d. Mei 2023



Pada periode januari s.d. Mei 2023, jumlah pemakaian darah di Bank Darah Rumah Sakit mengalami peningkatan. Jumlah pemakaian darah terendah terjadi pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar 379 dan tertinggi pada bulan Januari 2023 sebesar 413.

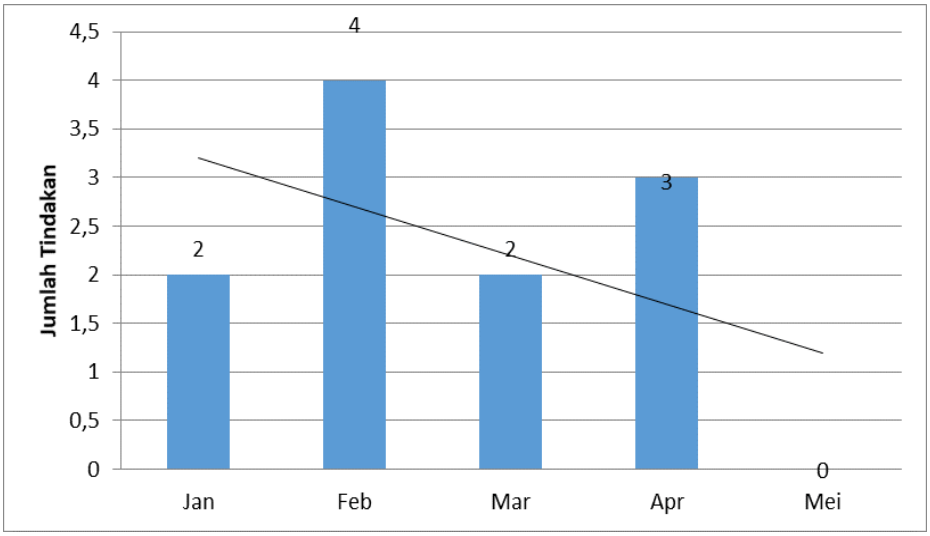
7. Kegiatan Pelayanan Penunjang Lain

Grafik 20. Jumlah Kunjungan Pelayanan Hemodialisa
Periode: Januari s.d. Mei 2023



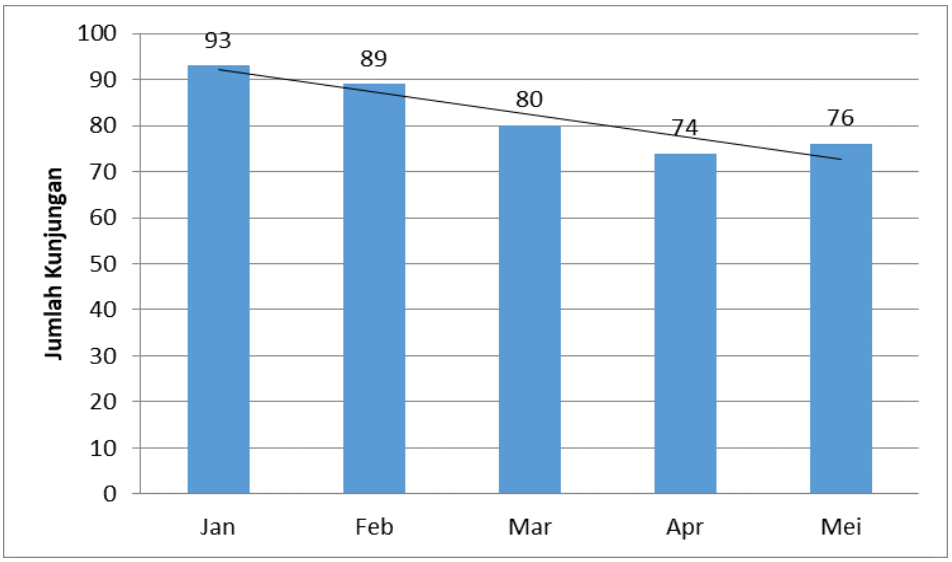
Jumlah kunjungan Hemodialisa pada periode Januari s.d. Mei 2023 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan HD tertinggi terjadi pada bulan Mei 2023 sebesar 1048

Grafik 21. Jumlah Kunjungan Pelayanan Audiometri
Periode: Januari s.d. Mei 2023



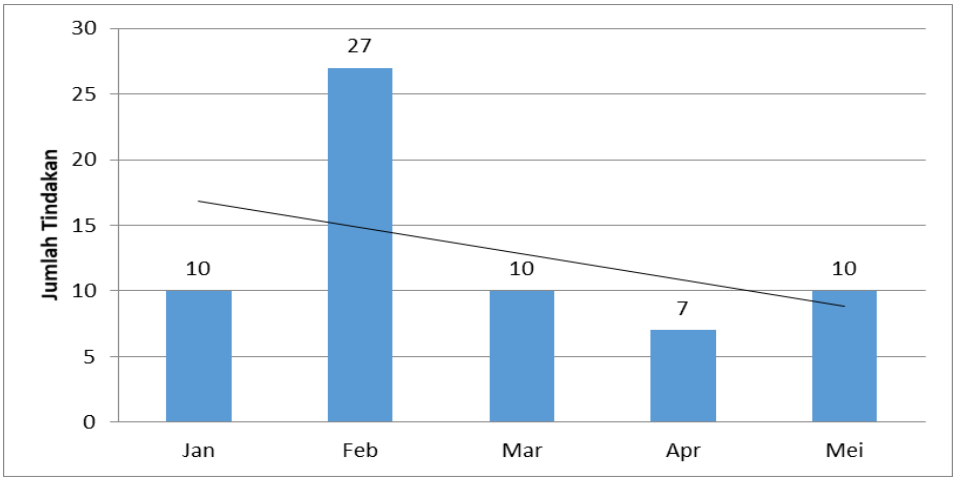
Jumlah pelayanan Audiometri pada periode Januari s.d. Mei 2023 cenderung mengalami penurunan. Jumlah pelayanan Audiometri tertinggi terjadi pada bulan Februari 2023 sebesar 4.

Grafik 22. Jumlah Kunjungan Kemoterapi
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Jumlah kunjungan Kemoterapi pada periode Januari s.d. Mei 2023 mengalami penurunan. Jumlah kunjungan kemoterapi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2023 sebesar 93.

Grafik 23. Jumlah Kunjungan Endoskopi
Periode: Januari s.d. Mei 2023



Jumlah tindakan Endoskopi pada periode Januari s.d. Mei 2023 mengalami penurunan. Jumlah tindakan endoskopi tertinggi terjadi pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar 27.

2. Pencapaian Kinerja Keuangan

Status PPK BLUD pada RSUD Kota Yogyakarta sesuai Keputusan Walikota Yogyakarta No.423/KEP/2007 tanggal 21 September 2007 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit.

Adanya ketentuan peraturan perundangan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah RI harus mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014. Jika dilihat dari angka capaian kepesertaan JKN di Kota Yogyakarta tahun 2022 sebesar 99,9% dari seluruh penduduk, yang berarti bahwa sebanyak 99,9% dari penduduk Kota Yogyakarta sudah menjadi peserta JKN (BPJS Kesehatan). Sebagai RS milik pemerintah, sebagian besar pasien RSUD Kota Yogyakarta adalah masyarakat peserta JKN sehingga pendapatan terbesar RS berasal dari klaim BPJS Kesehatan. Maka dari itu kinerja penerimaan pendapatan dipengaruhi oleh pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan (JKN). Sedangkan pembayaran dari pasien umum maupun penjaminan lainnya cenderung mengalami penurunan. Presentase jumlah kunjungan pasien berdasarkan cara bayar sebagai berikut :

Tabel 2.3
Persentase Jumlah Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
Periode Bulan Januari-Juni 2023

Cara Bayar	Rawat Jalan	IGD	Rawat Inap
JKN	66%	48%	87%
Umum	31%	46%	5%
Lainnya	3%	6%	8%

Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta 2023

Berdasarkan data dalam tabel diatas terlihat bahwa kunjungan pasien baik rawat jalan, rawat inap maupun IGD didominasi oleh pasien JKN.

Pada tabel berikut adalah data yang menunjukkan keseluruhan penerimaan pendapatan RSUD Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Mei tahun 2023 :

Tabel 2.4

Data Penerimaan Pendapatan sampai dengan bulan Juni 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D BULAN INI	LEBIH/ (KURANG)	%
4.1.4.17	**PENDAPATAN BLUD**				
4.1.4.17.01	**Jasa Layanan**	**85.215.000.000,00**	**41.620.761.269,00**	**(43.594.238.731,00)**	48,84%
	Klaim BPJS Kesehatan	69.480.000.000,00	34.298.584.478,00	(35.181.415.522,00)	49,36%
	Klaim BPJS Ketenagakerjaan	140.400.000,00	544.320,00	(139.855.680,00)	0,39%
	Klaim Jamkesos	336.000.000,00	165.954.553,00	(170.045.447,00)	49,39%
	Klaim Jamkesda Kota Yogyakarta	192.000.000,00	109.737.234,00	(82.262.766,00)	57,15%
	Klaim Jamkesda Kab. Bantul	174.000.000,00	7.939.900,00	(166.060.100,00)	4,56%
	Klaim TASPEN	-	0,00	-	0,00%
	Klaim Jasa Raharja	1.453.800.000,00	1.189.980.600,00	(263.819.400,00)	81,85%
	Klaim Penjaminan Lain	16.800.000,00	9.169.026,00	(7.630.974,00)	54,58%
	Pelayanan Pasien Umum	10.080.000.000,00	5.295.447.158,00	(4.784.552.842,00)	52,53%
	Pendapatan Diklit	282.000.000,00	314.072.000,00	32.072.000,00	111,37%
	Klaim Pasien Covid	3.060.000.000,00	229.332.000,00	(2.830.668.000,00)	7,49%
4.1.4.17.02	**Hibah**	**-**	**0,00**	**-**	0,00%
4.1.4.17.03	**Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain**	**173.984.520,00**	**104.428.704,00**	**(69.555.816,00)**	60,02%
	Pemanfaatan Aset :				
	Lahan Parkir	60.000.000,00	30.800.000,00	(29.200.000,00)	51,33%
	Lahan Kantin	26.800.000,00	26.865.000,00	65.000,00	100,24%
	Sewa Ruang ATM	47.250.000,00	0,00	(47.250.000,00)	0,00%
	Listrik & Laundry	3.000.000,00	6.872.700,00	3.872.700,00	229,09%
	Kerjasama Promosi Kesehatan	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	333,33%
	Kerjasama EDC	934.520,00	41.004,00	(893.516,00)	4,39%
	Pengolahan Limbah	30.000.000,00	19.850.000,00	(10.150.000,00)	66,17%
4.1.4.17.06	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**626.400.000,00**	**415.594.887,00**	**(210.805.113,00)**	66,35%
	Jasa Giro	24.000.000,00	16.774.887,00	(7.225.113,00)	69,90%
	Bunga Deposito	600.000.000,00	374.000.000,00	(226.000.000,00)	62,33%
	Pengembangan Usaha	1.200.000,00	22.600.000,00	21.400.000,00	1883,33%
	Lain-lain	1.200.000,00	2.220.000,00	1.020.000,00	185,00%
	Jumlah	**86.015.384.520,00**	**42.140.784.860,00**	**(43.874.599.660,00)**	48,99%

Sumber : Data penerimaan pendapatan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023

Target pendapatan sampai dengan TW II (bulan Juni) 2023 sebesar 53,77% sedangkan penerimaan pendapatan BLUD RSUD Kota Yogyakarta sampai TW II 2023 baru mencapai 48,99%. Pendapatan belum tercapai karena terdapat klaim yang terpending dan masih proses memenuhi kelengkapan berkas untuk pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Sampai dengan bulan Juni 2023 besaran penerimaan pendapatan yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan masih menempati urutan pertama, sedangkan penerimaan pendapatan paling besar kedua berasal dari pembayaran pasien umum. Besarnya realisasi penerimaan pendapatan dari target yang direncanakan sebagaimana tabel diatas, dipengaruhi oleh perencanaan yang mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Pengajuan klaim peserta JKN sebagai penerimaan terbesar Rumah Sakit ke BPJS Kesehatan yang tidak seluruhnya dibayarkan namun berdasarkan pemilahan berkas yaitu layak, revisi, pending dan tidak layak.
b. Kebijakan dan/atau ketentuan yang diberlakukan dalam pelaksanaan program JKN seringkali mengalami perubahan. Salah satu kebijakan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan adalah penerapan rujukan online, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan secara berjenjang dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sesuai kompetensi. Adapun dampak dari kebijakan rujukan online ini adalah penurunan jumlah kunjungan pasien yang cukup signifikan di RSUD Kota Yogyakarta yang merupakan RS kelas B karena pasien sudah tersaring di fasilitas kesehatan dibawahnya.

Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan tentang PPK BLUD maka hasil penerimaan pendapatan sebagaimana diuraikan diatas, dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional rumah sakit. Struktur biaya sesuai ketentuan berbeda dengan struktur belanja pada perangkat daerah pada umumnya, namun untuk proses penyusunan anggaran maupun laporan realisasi biayanya dilakukan konversi ke jenis belanja sesuai struktur belanja untuk memudahkan konsolidasi. Berikut ini disajikan data realisasi belanja sampai dengan bulan Juni tahun 2023 :

Tabel 2.5
Data Realisasi Belanja
sampai dengan bulan Juni 2023

URAIAN	ANGGARAN DPA BLUD	REALISASI S/D BULAN JUNI	SISA ANGGARAN	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**106.513.347.630**	**49.684.766.402**	**56.828.581.228**	**46,65%**
Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**5.890.000**	**2.201.000**	3.689.000	**37,37%**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**5.890.000**	**2.201.000**	**3.689.000**	**37,37%**
Belanja Makan Dan Minuman Rapat	5.890.000	**2.201.000**	**3.689.000**	**37,37%**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.736.000**	**2.186.000**	**3.550.000**	**38,11%**
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**5.736.000**	**2.186.000**	**3.550.000**	**38,11%**
Belanja Makan Dan Minuman Rapat	5.736.000	**2.186.000**	**3.550.000**	**38,11%**
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**3.000.000**	**1.401.000**	1.599.000	**46,70%**
Sub Kegiatan Monitoring,Evaluasi,dan,Penilaian Kinerja Pegawai	**3.000.000**	**1.401.000**	**1.599.000**	**46,70%**
Belanja Makan Dan Minuman Rapat	3.000.000	**1.401.000**	**1.599.000**	**46,70%**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**448.455.610**	**196.191.500**	252.264.110	**43,75%**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**199.810.000**	**80.260.000**	**119.550.000**	**40,17%**
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	199.810.000	**80.260.000**	**119.550.000**	**40,17%**
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**193.645.610**	**115.931.500**	**77.714.110**	**59,87%**
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	193.645.610	**87.431.500**	**106.214.110**	**45,15%**
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	55.000.000	**28.500.000**	**26.500.000**	**51,82%**
Kegiatan Penyedia jasaPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	**7.985.964.000**	**3.493.815.791**	4.492.148.209	**43,75%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	**2.671.200.000**	**1.115.592.623**	**1.555.607.377**	**41,76%**
Belanja Tagihan Telepon	144.000.000	**35.565.513**	**108.434.487**	**24,70%**
Belanja Tagihan Air	7.200.000	**3.025.000**	**4.175.000**	**42,01%**
Belanja Tagihan Listrik PLN	2.040.000.000	**860.486.310**	**1.179.513.690**	**42,18%**
Belanja awat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	480.000.000	**216.515.800**	**263.484.200**	**45,11%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**5.314.764.000**	**2.378.223.168**	**2.936.540.832**	**44,75%**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	492.072.000	**205.030.000**	**287.042.000**	**41,67%**
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Umum	79.248.000	**33.020.000**	**46.228.000**	**41,67%**

Belanja Jasa Tenaga Administrasi	791.928.000	**325.207.000**	**466.721.000**	**41,07%**
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	356.616.000	**148.590.000**	**208.026.000**	**41,67%**
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.300.000.000	**1.543.501.168**	**1.756.498.832**	**46,77%**
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	198.120.000	**82.550.000**	**115.570.000**	**41,67%**
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	57.156.000	**23.815.000**	**33.341.000**	**41,67%**
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	39.624.000	**16.510.000**	**23.114.000**	**41,67%**
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.051.917.500**	**742.765.813**	**1.309.151.687**	**36,20%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**40.935.500**	**15.013.140**	**25.922.360**	**36,68%**
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.935.500	**15.013.140**	**25.922.360**	**36,68%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**88.982.000**	**17.063.634**	**71.918.366**	**19,18%**
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88.982.000	**17.063.634**	**71.918.366**	**19,18%**
Sub Kegiatan emeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	**120.000.000**	**51.800.000**	**68.200.000**	**43,17%**
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	120.000.000	**51.800.000**	**68.200.000**	**43,17%**
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**1.802.000.000**	**658.889.039**	**1.143.110.961**	**36,56%**
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.802.000.000	**658.889.039**	**1.143.110.961**	**36,56%**
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	**96.015.384.520**	**45.246.205.298**	**50.769.179.222**	**47,12%**
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**96.015.384.520**	**45.246.205.298**	**50.769.179.222**	**47,12%**
Belanja Pegawai BLUD	40.000.000.000	**18.412.673.508**	**21.587.326.492**	**46,03%**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.115.384.520	**25.167.820.517**	**19.947.564.003**	**55,79%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.200.000.000	**1.333.309.618**	**1.866.690.382**	**41,67%**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.000.000.000	-	**5.000.000.000**	**0,00%**
Belanja Modal Jalan,Jaringan,dan Irigasi BLUD	2.300.000.000	**332.401.655**	**1.967.598.345**	**14,45%**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	400.000.000	-	**400.000.000**	**0,00%**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**34.220.165.600**	**4.559.773.708**	**29.660.391.892**	**13,32%**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**33.845.165.600**	**4.512.553.708**	**29.332.611.892**	**13,33%**
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	**200.000.000**	-	**200.000.000**	**0,00%**
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.000	-	**200.000.000**	**0,00%**
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**6.600.000.000**	**37.187.500**	**6.562.812.500**	**0,56%**

Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000	**37.187.500**	**162.812.500**	**18,59%**
Belanja Modal Instalasi Lain	6.400.000.000	-	**6.400.000.000**	**0,00%**
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehata/Penunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan	**7.458.156.000**	**292.013.500**	**7.166.142.500**	**3,92%**
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.458.156.000	**292.013.500**	**7.166.142.500**	**3,92%**
Sub Kegiatan Pengadaan Obat , Vaksin	**9.587.009.600**	**2.349.027.642**	**7.237.981.958**	**24,50%**
Belanja Obat-Obatan-Obat	9.587.009.600	**2.349.027.642**	**7.237.981.958**	**24,50%**
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	**7.500.000.000**	**1.483.298.305**	**6.016.701.695**	**19,78%**
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000.000	**1.483.298.305**	**6.016.701.695**	**19,78%**
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**2.500.000.000**	**351.026.761**	**2.148.973.239**	**14,04%**
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	400.000.000	**195.695.484**	**204.304.516**	**48,92%**
Belanja Jasa Kalibrasi	500.000.000	**42.249.375**	**457.750.625**	**8,45%**
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	400.000.000	**89.600.602**	**310.399.398**	**22,40%**
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	400.000.000	-	**400.000.000**	**0,00%**
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	400.000.000	-	**400.000.000**	**0,00%**
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	200.000.000	-	**200.000.000**	**0,00%**
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	200.000.000	**23.481.300**	**176.518.700**	**11,74%**
Kegiatan Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**50.000.000**	**13.020.000**	**36.980.000**	**26,04%**
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	**50.000.000**	**13.020.000**	**36.980.000**	**26,04%**
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000	**13.020.000**	**36.980.000**	**26,04%**
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**325.000.000**	**34.200.000**	**290.800.000**	**10,52%**
Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	**325.000.000**	**34.200.000**	**290.800.000**	**10,52%**
Belanja Modal Komputer Jaringan	265.000.000	-	**265.000.000**	**0,00%**
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000	**34.200.000**	**25.800.000**	**57,00%**
JUMLAH	**140.733.513.230**	**54.244.540.110**	**86.488.973.120**	**38,54%**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel 2.5 diatas, persentase total belanja RSUD Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 38,54% dari total

anggaran belanja tahun 2023. Realisasi belanja pada masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp.49.684.766.402,- atau sebesar 46,65% dengan target realisasi belanja sampai dengan bulan Juni 2023 Rp.61.198.737.245,- atau sebesar 57,46%. Realisasi masih dibawah target karena pada program ini sebagian besar adalah belanja rutin sehingga realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan operasional pelayanan Rumah Sakit.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp. 4.559.773.708,- atau sebesar 13,32% dengan target realisasi belanja sampai dengan bulan Juni 2023 Rp. 34.220.165.600,- atau sebesar 69,57%. Realisasi masih rendah dan jauh dari target karena beberapa hal, antara lain :
    a. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersumber DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk mendukung layanan RS mampu PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif), mundur dari tata kala karena adanya kenaikan harga e-katalog dan adanya perubahan spesifikasi pada beberapa alat kesehatan. Perubahan spesifikasi ini disebabkan karena adanya saran rekomendasi dari RS Sardjito sebagai konsultan layanan PONEK untuk menyesuaikan spesifikasi alkes agar lebih maksimal dan efektif dalam pelayanan pasien. Dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut maka dibutuhkan proses untuk melakukan revisi RAB (Rencana Anggaran Biaya) sehingga pelaksanaan pengadaan menjadi mundur pada triwulan 3.
    b. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa instalasi tata udara anteroom ruang isolasi. Pelaksanaan pekerjaan mundur dari tata kala karena tiap ruangan membutuhkan spesifikasi khusus yang berbeda-beda.
    c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit berupa renovasi ruang isolasi rawat inap, pekerjaan mundur karena dibutuhkan revisi DED.

d. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin berupa belanja obat-obatan. Realisasi sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar 5,5%, masih cukup rendah dikarenakan adanya ketentuan dari BPKAD dan KPP Pratama bahwa pengajuan SPJ obat harus 1 faktur pajak untuk 1 NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Pada tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan pertemuan dan advokasi RS dengan BPKAD dan KPP Pratama yang menghasilkan kesepakatan pengajuan SPJ dengan 1 faktur dan pajak 1 NTPN.

3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah

Kinerja pelayanan daerah yang dilihat dari pencapaian indikator sasaran maupun indikator program RSUD Kota Yogyakarta sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	Indikator Sasaran :										
1	Hasil Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna	
2	Skor Akreditasi RS		-	-	80%	81%	-	93,27%	93,27%	93,27%	
3	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat		-	-	74,47	74,48	74,44	-	74,47	74,48	
B.	Indikator Program :										
1	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun		12%	60%	-	-	69,42%	-	-	-	
2	Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan		81%	82%	-	-	83,03%	-	-	-	
3	Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)		24 Modul	26 Modul	-	-	28 Modul	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	TW II 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal		-	80%		80,50%	83,03%	54,41%	80%	80,25%	
5	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS		-	-	80%	81%	-	75,9%	-	80%	
6	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan		-	-	80%	81%	-	92,46%	-	80%	
7	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat		-	A (Nilai 80-90)	A (Nilai 80-90)	A (Nilai 80-90)	-	83,37	A (Nilai 80-90)	A (Nilai 80-90)	
8	Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi		-	-	100%	100%	-	49%	100%	100%	

Tahun 2023 adalah tahun awal pelaksanaan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Renstra Tahun 2023-2026 sehingga tabel diatas mencantumkan target dan realisasi kinerja pelayanan dalam Renstra Tahun 2017-2022 dan target Renstra 2023-2026. Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator sasaran "Hasil Akreditasi Paripurna" dan indikator program yang terdiri dari 4 yaitu : Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun, Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan, Jumlah modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System) dan Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal pada periode Renstra 2027-2022 telah tercapai melampaui target.

Sedangkan capaian indikator program pada tahun 2023 sampai dengan TW II adalah sebagai berikut:

1. Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal tercapai sebesar 54,41% dari target tahun 2023 sebesar 80,25%.
2. Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS tercapai sebesar 75,9% dari target tahun 2023 sebesar 80%.
3. Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan tercapai sebesar 92,46% dari target tahun 2023 sebesar 80%.
4. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat tercapai sebesar 83,37 yang masuk dalam kriteria A(Memuaskan). Capaian ini masih menggunakan hasil penilaian tahun 2021 karena hasil penilaian SAKIP tahun 2022 masih dalam proses.
5. Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi tercapai sebesar 49% dari target tahun 2023 sebesar 100%.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2023

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai pelaksanaan dari salah satu misi Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Kota Yogyakarta; maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.

Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sesuai Perwal tersebut kemudian dirumuskan menjadi program kegiatan dengan dituangkan dalam Renstra Tahun 2023-2026. Visi yang menjadi target kinerja RSUD Tahun 2023-2026 adalah:

"Terwujudnya Rumah Sakit Pilihan Masyarakat dan Wahana Pendidikan Berkompeten".

Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan menetapkan misi dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan dalam 4 tahun. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam 1 tahun anggaran kemudian disusun Renja dan Renja Perubahan untuk menyesuaikan kegiatan yang berubah pada tahun berjalan.

3.2 Program dan Kegiatan

Perubahan Renja 2023 merupakan dokumen yang berisi penyesuaian program dan kegiatan beserta indikator yang akan dicapai pada periode anggaran perubahan 2023. Penyusunan Perubahan Renja 2023 ini mendasarkan pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Anggaran pendapatan dari belanja daerah tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 berupa rumusan Indikator Program dan Indikator Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Indikator Program
Perubahan Renja 2023

No	Program	Indikator	Target Capaian	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	80,25%	80,50%
		Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80,00%	81,00%
		Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	80,00%	81,00%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai 80-90)	A (Nilai 80-90)
		Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	100%	100%

Tabel 3.2
Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perubahan Renja 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Keluaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Hasil Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	11 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	200 Unit	200 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Keluaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Hasil Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Terpenuhinya Operasional Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	70 Unit	90 Unit	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	2 Paket	2 Paket	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	2 Paket	2 Paket	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13 Paket	15 Paket	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet	9 Unit	29 Unit	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Berdasar tabel diatas, pada Perubahan Renja 2023 ini tidak dilakukan penambahan atau penghapusan program, kegiatan maupun sub kegiatan karena program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada sudah akomodatif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2023. Tabel 3.1 menggambarkan bahwa pada perubahan Renja 2023 ini tidak dilakukan penyesuaian pada program dan indikator program beserta targetnya. Sedangkan tabel 3.2 juga tidak ada penyesuaian pada kegiatan dan sub kegiatan, yang dilakukan penyesuaian adalah pada rincian belanja

beserta anggarannya sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan RS, sehingga keluaran pada beberapa sub kegiatan bertambah. Di samping itu juga terdapat penambahan pendanaan pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD yang bersumber dana dari penerimaan pendapatan RS karena adanya penyesuaian dengan asumsi penerimaan pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. Penambahan pendanaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang meliputi rehabilitasi gedung, belanja persediaan obat-obatan, persediaan bahan habis pakai, dan kebutuhan operasional pelayanan lainnya karena anggaran yang ditetapkan pada Renja 2023 murni menggunakan asumsi kebutuhan selama 10 bulan sehingga belum mencukupi sampai dengan akhir tahun.

Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan 2023 secara terperinci seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Perubahan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150,746,557,230**	**140,736,513,230**	**179,614,070,509**							**165,134,332,710**	
1	**02**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	**112,571,557,230**	**106,516,347,630**	**143,321,904,909**						A Nilai	**125,027,824,000**	
1	**02**	**001**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RSUD Kota Yogyakarta	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	**5,998,000**	**5,890,000**	**5,890,000**						5 dokumen	**25,500,000**	
1	02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5,998,000	5,890,000	5,890,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	5 Dokumen	25,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**6,000,000**	**5,736,000**	**5,736,000**						12 laporan	**12,000,000**	
1	02	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	5,736,000	5,736,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	12 Laporan	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**						3 dokumen	**6,000,000**	
1	02	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	3 Dokumen	6,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket		paket	1 paket	1 paket	**448,455,610**	**448,455,610**	**423,455,610**						1 paket	**705,000,000**	
						Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	paket		paket	2 paket	2 paket									2 paket		
1	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199,810,000	199,810,000	199,810,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	1 Paket	220,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	248,645,610	248,645,610	223,645,610	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	2 Paket	485,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**14,072,601,600**	**7,985,964,000**	**7,737,860,000**						12 laporan	**8,657,964,000**	
						Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan									12 laporan		
1	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,671,200,000	2,671,200,000	2,401,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	12 Laporan	2,923,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11,401,401,600	5,314,764,000	5,336,660,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	12 Laporan	5,734,764,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket		paket	1 paket	1 paket	**2,051,917,500**	**2,051,917,500**	**1,896,330,000**						1 paket	**3,172,000,000**	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	11 unit	11 unit									11 unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		unit	3 unit	3 unit									3 unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		unit	200 unit	200 unit									200 unit		
1	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	41,000,000	40,935,500	33,360,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	3 Unit	42,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	88,917,500	88,982,000	62,970,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	11 Unit	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	200 Unit	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket	1 paket	1,802,000,000	1,802,000,000	1,680,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	1 paket	2,860,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**001**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit		unit	1 unit	1 unit	**95,983,584,520**	**96,015,384,520**	**133,249,633,299**						1 unit	**112,449,360,000**	
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	95,983,584,520	96,015,384,520	133,249,633,299	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	1 Unit Kerja	112,449,360,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**002**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	81 %		0 %	80,25 %	80,25 %	**38,175,000,000**	**34,220,165,600**	**36,292,165,600**						80,25 %	**40,106,508,710**	
						Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	83 %		0 %	80 %	80 %									80 %		
1	**02**	**002**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit/paket		unit/paket	13 unit	15 unit/paket	**37,800,000,000**	**33,845,165,600**	**35,641,165,600**						15 unit/paket	**39,697,508,710**	
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit		unit	11 paket	90 unit									90 unit		
						Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	paket		paket	2 paket	2 paket									2 paket		
						Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket		paket	2 paket	2 paket									2 paket		
						Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket		paket	1 paket	18 paket									18 paket		
						Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	unit		unit	1 unit	1 unit									1 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	002	2.01	008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	2,600,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	1 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 paket	1 paket	4,200,000,000	6,600,000,000	4,772,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	1 paket	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				70 Unit	90 Unit	17,500,000,000	7,458,156,000	13,553,156,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	90 Unit	24,602,508,710	Dinas Kesehatan
																DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan						
1	02	002	2.01	016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 paket	2 paket	7,000,000,000	9,587,009,600	7,087,009,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	2 paket	5,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				2 paket	2 paket	4,000,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	2 paket	5,920,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2.01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				13 paket	15 paket	2,500,000,000	2,500,000,000	2,529,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	15 paket	2,775,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**002**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						2 dokumen	**50,000,000**	
1	02	002	2.02	032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	2 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**002**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	unit		unit	9 unit	29 unit	**325,000,000**	**325,000,000**	**601,000,000**						29 unit	**359,000,000**	
1	02	002	2.03	003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				9 unit	29 unit	325,000,000	325,000,000	601,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	29 unit	359,000,000	Dinas Kesehatan
									TOTAL			**150,746,557,230**	**140,736,513,230**	**179,614,070,509**							**165,134,332,710**	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2023 RSUD Kota Yogyakarta ini sebagai penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja sampai dengan akhir tahun 2023. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) RSUD Kota Yogyakarta ini sekaligus juga merupakan dokumen perencanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan; sekaligus sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Kota Yogyakarta. Merupakan tantangan tersendiri bagi RSUD sebagai rumah sakit milik pemerintah dimana pada era digital ini keterbukaan informasi tidak terbatas dapat dengan mudah diakses yang secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya kesempurnaan dokumen perencanaan di tahun-tahun mendatang sehingga mampu menjadi pedoman bagi Rumah Sakit agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat pada era jaminan kesehatan nasional agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan biaya terjangkau dengan kinerja profesional.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN UNIT KERJA
TAHUN 2023

RUMAH SAKIT PRATAMA
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ……..1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 …… 6

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA…… 17

BAB V PENUTUP ……..... 24

BAB I
PENDAHULUAN

Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasaran Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama. Peraturan Walikota tersebut menetapkan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan.

Sebagai rumah sakit umum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, maka operasional pelayanan rumah sakit tidak dapat diselenggarakan hanya pada pagi atau siang hari saja, tetapi harus diselenggarakan selama 24 jam penuh setiap harinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit umum meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang. Dalam operasional pelayanannya Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit tipe D menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, pelayanan penunjang pemeriksaan, pelayanan gawat darurat, serta tindakan medik.

Dalam perkembangannya, rumah sakit telah berubah menjadi suatu institusi yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu manajemen yang baik. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integrative yang menyangkut struktur, proses, *outcome* secara objektif, sistematik dan berlanjut memantau dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan terhadap pasien, menggunakan peluang untuk meningkatkan pelayanan pasien, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul sehingga pelayanan yang diberikan di rumah sakit berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk dapat memberikan pelayanan seperti yang menjadi harapan

masyarakat, pengelolaan rumah sakit baik dari aspek manajemen maupun operasional juga harus mengikuti tuntutan masyarakat tersebut. Rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga diharapkan berujung pada kepuasan pasien. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan medis, dan anggaran rumah sakit yang memadai. Dalam hal pengelolaan keuangan, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 293 Tahun 2016, dengan demikian diharapkan pengelolaan Badan Layanan Umum dapat menjadi lebih baik dalam menghadapi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima yang efektif dan efisien namun tidak meninggalkan fungsi sosialnya.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang akan menjadi dasar penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dalam pelaksanaannya, rencana kerja terus berubah secara dinamis mengikuti kondisi terkini. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Kerja Perubahan.

Rencana kerja perubahan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta serta menentukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan ke depannya untuk mencapai tujuan awal penetapan rencana kerja dengan tetap memperhatikan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Penyusunan rencana kerja perubahan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2023 dilakukan melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up* berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan rumah sakit sekaligus sebagai

pedoman dalam menyusun Rencana Belanja dan Anggaran Perubahan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Tahun 2023.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/Sk/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana kerja perubahan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dan pihak-pihak yang terkait yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan selama tahun 2023 untuk menggantikan rencana kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogayakarta tahun 2023 yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya rencana kerja perubahan Rumah Sakit Pratama kota Yogyakarta Tahun 2023 ini adalah :

a) Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun anggaran 2023;
b) Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan tahun 2023 sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran unit kerja;
c) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pelayanan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
d) Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta.

D. Dasar Pertimbangan Perubahan

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dibuktikan dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan kesehatan, perlu dilakukan penanganan permasalahan

kesehatan yang spesifik dan sangat mendasar. Pembangunan kesehatan dapat dilakukan dengan upaya mewujudkan :

1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat

Rencana kerja perubahan perlu dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perubahan kondisi terkini dengan kondisi awal saat rencana kerja disusun, seperti :

1. Pada triwulan pertama, ada sejumlah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yang diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga terdapat selisih anggaran yang harus disesuaikan;
2. Kebutuhan pembelian obat-obatan pasien di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta seiring dengan penambahan layanan yang ada, seperti layanan poli syaraf;
3. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja yang diiringi oleh perubahan anggaran.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja perubahan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
BAB III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah
BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

A. Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Rencana kerja Tahun 2023 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sesuai yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdiri atas 3 program, 4 kegiatan, dan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

   Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

   - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

   Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

   - Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehaan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

   Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota

   - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Juni 2023

Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator kinerja program yang telah direncanakan dalam Renstra maupun Rencana Kerja, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan program dalam rangka

mencapai target indikator sasaran tersebut.

Indikator pencapaian kinerja pelayanan daerah untuk Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yaitu Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan setiap semester. Dari hasil survei yang diperoleh kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan terhadap unsur penilaian yang masih dianggap kurang oleh masyarakat. Indeks kepuasan layanan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran survei kepuasan masyarakat sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI SEMESTER I 2023
		2023	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	80	82,79%

Sumber: Survei Kepuasan Masyarakat di RS Pratama Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa indikator pengukuran kinerja untuk Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta hanya ada satu, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan. Hasil pengukuran kinerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sampai dengan TW I tahun 2023 sebesar 82,79%. Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Ketersediaan jaminan kesehatan bagi penduduk kota Yogyakarta dari Pemerintah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta;
3. Komitmen Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

C. Analisis Kinerja Pelayanan Unit Kerja

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja sampai dengan bulan Juli 2023 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Darurat

Pasien rawat darurat dilayani di Instalasi Gawat Darurat dengan pelayanan 24 jam dalam tujuh hari penuh. Pelayanan dilakukan oleh SDMK yang terlatih sesuai dengan bidang keahliannya beserta sarana & prasarana yang memadahi, antara lain :

1) Dokter bersertifikat ATLS, ACLS dan GELS
2) Perawat Terlatih PPGD
3) Ambulance 118

Data kunjungan Instalasi Gawat Darurat dalam bulan Januari sampai bulan Julim Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2 berikut :

Tabel 2

Data Kunjungan IGD Bulan Januari - Juli Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN
1	Januari	654
2	Pebruari	496
3	Maret	707
4	April	765
5	Mei	703
6	Juni	779
7	Juli	846
Jumlah		**4950**

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2023

Dari tabel 2 terlihat bahwa kunjungan pasien rawat darurat paling rendah terjadi pada bulan Februari, lalu pada bulan Maret - Juli cukup stabil diatas 700 kunjungan.

b. Pelayanan Rawat Jalan

Kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta periode Bulan Januari - Juli tahun 2023 seperti tersaji pada tabel 3.

Tabel 3

Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Bulan Jalan Januari - Juli Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN	JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN	JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN
		BARU	LAMA	
1	Januari	461	2683	3144
2	Pebruari	389	2474	2863
3	Maret	346	2771	3117
4	April	276	2079	2355
5	Mei	368	2719	3087
6	Juni	656	2912	3568
7	Juli	741	3123	3864
Jumlah		**3237**	**18761**	**21998**

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2023

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien rawat jalan baik pasien baru maupun lama cukup rendah pada bulan Januari dan Februari, kemudian pada bulan April - Juni meningkat.

Apabila dilihat berdasarkan kunjungan dari masing-masing poliklinik, diketahui kunjungan tertinggi terjadi pada poliklinik Penyakit Dalam dengan jumlah kunjungan 9879, diikuti poliklinik Anak dengan jumlah kunjungan 2689. Kunjungan paling rendah terjadi pada poliklinik Umum dengan jumlah kunjungan 409. Data kunjungan berdasarkan polokliniknya tersaji dalam tabel 4.

Tabel 4

Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Poliklinik di RS Pratama Bulan Januari - Juli Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN BERDASARKAN POLIKLINIK							JUMLAH TOTAL KUNJUNGAN
		Umum	Dalam	Anak	Obsgin	Gigi	Bedah	Saraf	
1	Januari	59	1541	339	376	430	235	164	3144
2	Februari	83	1336	356	355	376	181	176	2863
3	Maret	38	1486	468	377	355	221	172	3117
4	April	58	1196	339	277	204	156	125	2355
5	Mei	50	1502	433	335	385	212	170	3087
6	Juni	69	1356	369	344	306	195	150	2789
7	Juli	52	1462	385	314	428	201	176	3018
Jumlah		409	9879	2689	2378	2484	1401	1133	20373

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama Kota Yogyakarta, 2023

c. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta diselenggarakan melalui bangsal Dewasa, bangsal Anak, bangsal Maternal Perinatal serta bangsal Gringsing. Tabel 5 menggambarkan data hasil pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Januari - Juli Tahun 2023.

Tabel 5

Data Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Bangsal Perawatan di RS Pratama Bulan Januari - Juli Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN BERDASARKAN BANGSAL PERAWATAN						JUMLAH TOTAL KUNJUNGAN
		PRINGGONDANI	ANAK	MATERNAL	HCU	PERINA	GRINGSING	
1	Januari	43	52	55	6	30	34	220
2	Februari	41	11	51	4	30	21	191
3	Maret	40	68	73	5	32	40	258
4	April	34	38	60	1	20	31	184
5	Mei	26	48	62	4	26	46	212
6	Juni	17	55	59	7	17	48	203
7	Juli	18	39	57	4	19	31	168
Jumlah		219	311	417	31	174	251	1436

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2023

Dari jumlah 6 bangsal yang melayani rawat inap di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, kunjungan pasien rawat inap tertinggi ada di Bangsal Maternal dengan jumlah kunjungan 417, sedangkan kunjungan paling rendah adalah HCU. Jumlah total kunjungan rawat inap selama Januari - Juli Tahun 2023 sebanyak 1403.

Penilaian efisiensi pelayanan berkaitan dengan pemanfaatan tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, dapa dilihat dari angka :

- BOR *(Bed Occupancy Rate)* atau persen tempat tidur terisi
- LOS *(Length of Stay)* atau lamanya pasien dirawat
- TOI *(Turn Over Interval)* atau tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur,
- BTO *(Bed Turn over)* atau rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu.

Data BOR, LOS, TOI, BTO di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Januari - Juli Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

Data BOR, LOS, TOI, BTO di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Januari - Juli Tahun 2023

NO	BULAN	BOR (%)	LOS (hari)	TOI (hari)	BTO (kali)	GDR	NDR
1	Januari	31.71	2.78	6.25	3.38	0	0
2	Februari	27.80	2.65	6.88	2.94	0	0
3	Maret	35.38	2.70	5.05	3.97	7.75	0
4	April	26.26	2.78	7.82	2.83	5.43	0
5	Mei	28.68	2.62	6.75	3.28	0	0
6	Juni	26,36	2,58	7,07	3,12	0,00	0,00
7	Juli	22,48	2,58	9,30	2,58	0,00	0,00
RATA-RATA JANUARI-JULI TAHUN 2023		24,42	2,58	8,185	2,85	0	0

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2023

Dari tabel 6 terlihat bahwa rata-rata tempat tidur terisi pada Januari - Juli Tahun 2023 sebesar 24,42%, sedangkan rata-rata lama pasien

dirawat adalah 2,58 hari. Rata-rata tempat tidur tidak terisi adalah 8,18 hari, dan rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu adalah 2,85 kali.

d. Pelayanan Penunjang

1) Kegiatan Laboratorium

Jumlah layanan pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Januari-Juli Tahun 2023 sebanyak 10456 pemeriksaan, terdiri dari pemeriksaan darah sebanyak 9364, pemeriksaan urin sebanyak 1046, dan pemeriksaan faeces sebanyak 46 pemeriksaan. Data jumlah pemeriksaan laboratorium tahun Januari-Juli Tahun 2023 tersaji pada table 7.

Tabel 7

Jumlah Pemeriksaan Laboratorium RS Pratama Bulan Januari - Juli Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
		Darah	Urin	Faeces	JUMLAH TOTAL
1	Januari	1360	121	9	1490
2	Pebruari	1247	179	4	1430
3	Maret	1714	191	14	1919
4	April	1138	139	2	1279
5	Mei	1378	170	9	1557
6	Juni	1310	132	1	1443
7	Juli	1217	114	7	1338
TOTAL		9364	1046	46	10456

Sumber : Instalasi Laboratorium RS Pratama, 2023

2) Kegiatan Radiologi

Rerata jumlah pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada bulan Januari - Juli 2023 ada di 441 pasien perbulan. Kondisi ini juga sesuai dengan fluktuasi jumlah kunjungan pasien yang ada. Data jumlah pemeriksaan radiologi selengkapnya dapat dilihat pada table 8.

Tabel 8

Data Jumlah Pemeriksaan Radiologi di RS Pratama Bulan Januari - Juli Tahun 2023

NO	BULAN	JENIS PEMERIKSAAN			TOTAL
		PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK SEDERHANA TANPA KONTRAS	PEMERIKSAAN USG	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK DENGAN KONTRAS	
1	Januari	401	68	2	471
2	Februari	347	75	6	428
3	Maret	427	99	3	529
4	April	315	55	1	371
5	Mei	400	87	3	490
6	Juni	367	53	2	422
7	Juli	338	36	1	375
	TOTAL	2595	473	18	3086

Sumber data : Instalasi Radiologi RS Pratama, 2023

3) Kegiatan Farmasi

Hasil kegiatan pelayaan farmasi berupa pelayanan resep obat di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Januari - Juli Tahun 2023 tersaji dalam tabel 9.

Tabel 9

Jumlah Pelayanan Resep Obat di RS Pratama Bulan Januari - Juli Tahun 2023

BULAN	IGD		RAWAT JALAN		RAWAT INAP		JUMLAH
	UMUM	BPJS	UMUM	BPJS	UMUM	BPJS	
Januari	140	438	280	2201	23	678	3760
Februari	109	324	264	1981	28	560	3266
Maret	151	481	306	2229	41	632	3840
April	153	543	308	1672	26	584	3286
Mei	172	473	307	2177	18	664	3811
Juni	526	175	347	2001	24	865	3938
Juli	619	147	323	2178	25	758	4050
TOTAL	**1870**	**2581**	**2135**	**14439**	**185**	**4741**	**25951**

Sumber data : Instalasi Farmasi RS Pratama, 2023

Jumlah resep yang dilayani selama Januari - Juli 2023 sebanyak

25.951 resep. Jumlah pelayanan resep perbulannya diatas 3000 resep perbulan dengan rata- rata jumlah resep perbulan adalah 3.707 resep.

D. Pencapaian Kinerja Keuangan

Sebagai rumah sakit yang ditetapkan sebagai unit kerja dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta mendapatkan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit.

Rincian kinerja keuangan dari sisi pendapatan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta untuk Bulan Januri - Juli tahun 2023 tersaji pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10

Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta
Januari - Juli Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Pendapatan

No	Sumber Pendapatan	Anggaran	Realisasi s.d Juli	Persentase Realisasi
1	Kunjungan Pasien bayar Tunai	1.618.118.137,92	992.420.189,00	61,33%
2	Kunjungan pasien dengan Jamkesos	11.242.809,25	-	0%
3	Kunjungan Pasien dengan Jamkesda	188.608.136,08	4.428.710,00	2,35%
4	Jasa Raharja	7.280.000,00	1.315.899,00	18,08%
5	Kemenkes	-	195.877.000,00	-
6	Kunjungan Pasien dengan JKN (BPJS Kesehatan)	14.918.731.833,97	9.186.539.697,00	61,58%
7	Kegiatan PKL dan Penelitian Tunai	30.833.400,00	41.920.000,00	135,96%
8	Kerja sama dengan Pihak Ketiga Tunai	-	-	-
9	Lain-lain	225.185.682,78	78.553.393,00	34,88%
	Jumlah	**17.000.000.000,00**	**10.501.054.888,00**	61,77%

Sumber : Laporan Bendahara Penerimaan RS Pratama, 2023

Apabila dibandingkan dengan asumsi pendapatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023, realisasi pendapatan sampai dengan bulan Juli sudah mencapai mencapai 61,77% atau sebesar Rp 10.501.054.888 dari total asumsi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.000.000.000.

Tabel 11

Realisasi Belanja RS Pratama Bulan Januari - Juni Tahun 2023

Program/kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi s.d Juni 2023	Persentase Realisasi
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**19.524.704.838**	**12.195.546.647**	**62,46%**
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.171.076.000**	**933.012.000**	**42,97%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**2.171.076.000**	**933.012.000**	**42,97%**
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.320.000.000	585.000.000	**44,32%**
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	720.000.000	290.070.000	**40,29%**
Belanja Jasa Tenaga Supir	131.076.000	57.942.000	**44,20%**
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	**17.353.628.838**	**11.262.534.647**	**64,90%**
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**17.353.628.838**	**11.262.534.647**	**64,90%**
Belanja Pegawai	5.639.929.371	3.818.908.929	**67,71%**
Belanja Barang Dan Jasa	11.492.449.467	7.287.015.226	**63,41%**
Belanja Modal	221.250.000	156.610.492	**70,78%**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**975.462.189**	**471.565.628**	**48,34%**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**975.462.189**	**471.565.628**	**48,34%**

Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	**675.462.189**	**389.002.718**	**57,59%**
Belanja Obat-Obatan-Obat	675.462.189	389.002.718	**57,59%**
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**300.000.000**	**82.562.910**	**27,52%**
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	300.000.000	82.562.910	**27,52%**
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**5.821.920.000**	**2.743.189.000**	**47,12%**
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**5.821.920.000**	**2.743.189.000**	**47,12%**
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	**5.821.920.000**	**2.743.189.000**	**47,12%**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.810.336.000	1.768.646.000	**46,42%**
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.011.584.000	974.543.000	**48,45%**
Total	**26.322.087.027**	**15.410.301.275**	**58,55%**

Sumber : Laporan Bendahara Pengeluaran RS Pratama, 2023

Realisasi belanja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta secara keseluruhan sebesar Rp15.410.301.275,00 dari total anggaran Rp26.322.087.027,00 atau tercapai 58,55%. Realisasi belanja terdiri dari belanja pembayaran jasa lainnya orang perorangan, pembayaran jasa pihak ketiga *(cleaning service* dan *security),* pembelian obat-obatan pasien, pemeliharaan alat kesehatan, dan belanja rutin BLUD.

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

A. Faktor–Faktor dalam Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai rumah sakit tipe D sesuai dengan sistem rujukan berjenjang yang berlaku di Indonesia, maka Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dituntut untuk dapat menerima rujukan pertama dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperi Puskesmas, Dokter Keluarga dan Klinik. Dalam hal ini maka pemenuhan sarana maupun prasarana serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas untuk dipenuhi.
2. Tatanan kehidupan baru setelah adanya penurunan kurva penyebaran angka Covid-19 dan upaya menyediakan fasilitas kesehatan yang mumpuni dan pengawasan yang ketat.
3. Peningkatan upaya *promotif* dan *preventif* kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara lebih baik.
5. Lahan parkir yang tahun ini sudah tersedia masih harus optimalkan kedepannya. Penyedian sarana penunjang pengunjung rumah sakit seperti kanti juga menjadi perhatian.
6. Pengembangan layanan poli dan pendukungnya perlu ditingkatkan lagi. Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta mempunyai rencana pengembangan layanan poli mata, rehab medis, psikologi dan juga optimalisasi radiologi.
7. Perlunya dukungan sumber anggaran untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit seiring dengan penambahan layanan poli syaraf, dan jumlah alat-alat kesehatan.

B. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengadaan Obat, Vaksin
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

C. Perubahan Rencana Kerja Belanja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Secara keseluruhan, terdapat 3 sub kegiatan yang berubah dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan ya itu sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin; sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD; dan sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

Rumusan rencana kerja perubahandan pendanaan unit kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 13 berikut:

Tabel 13

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kode						Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
								Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	**2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
1	**2**	**1**	**2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	2.171.076.000,00	2.171.076.000,00
1	**2**	**1**	**2**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**					
1	2	1	2	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	17.353.628.838,00	23.453.628.838,00
1	**2**	**2**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					
1	2	2	2	1		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**					
1	2	2	2	1	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	12 Paket	20 Paket	675.462.189,00	1.293.907.189,00

1	2	2	2	1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	24 Unit	24 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00
1	**2**	**3**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					
1	2	2	3	2		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**					
1	2	2	3	2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	136 Orang	5.821.920.000,00	5.203.475.000,00

D. Perubahan Rencana Kerja Pendapatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Tabel 14

Perubahan Asumsi Pendapatan Tahun 2023

No	Sumber Pendapatan	Murni	Perubahan
1	Kunjungan Pasien bayar Tunai	1.618.118.137,92	1.699.999.999,92
2	Kunjungan pasien dengan Jamkesos	11.242.809,25	11.242.809,25
3	Kunjungan Pasien dengan Jamkesda	188.608.136,08	158.608.136,08
4	BPJS Ketenagakerjaan	-	5.000.000,00
5	Jasa Raharja	7.280.000,00	7.280.000,00
6	Kemenkes	-	-
7	Kunjungan Pasien dengan JKN (BPJS Kesehatan)	14.918.731.833,97	15.861.849.971,97
8	Kegiatan PKL dan Penelitian Tunai	30.833.400,00	30.833.400,00
9	Kerja sama dengan Pihak Ketiga Tunai	-	
10	Lain-lain	225.185.682,78	225.185.682,78
	Jumlah	**17.000.000.000,00**	**18.000.000.000,00**

E. Perubahan Rencana Kerja Indikator Program Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Berdasarkan review Indikator Program Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2023 - 2026, tedapat penyesuaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagaimana tabel berikut :

Tabel 15

Capaian Indikator Program Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama sesuai standar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei
	Review 2023		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	Nilai hasil pengukuran survei kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama pada kurun waktu tertentu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei

Sumber Data : Metadata RPD Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan review Indikator Program Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2023 - 2026, tedapat penyesuaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagaimana tabel di atas. Uraian indikator kinerja sebelumnya adalah “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei”, namun setelah perubahan terdapat penyesuaian uraian indikator kinerja menjadi “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama”. Sementara untuk target indikator program tidak ada perubahan, sama seperti pada awal penyusunan RPD sebesar 80 - skala 100.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan rencana kerja perubahan Tahun 2023 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh personil Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui hasil evaluasi dan perkembangan kondisi.

Dalam Rencana Kerja Perubahan ini terdapat kenaikan belanja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp6.100.000.000.000 dari yang semula sebesar Rp26.322.087.027 menjadi Rp32.422.087.027. Kenaikan ini didasarkan pada kebutuhan rumah sakit yang terus bertambah seiring dengan penambahan fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta.

Anggaran APBD Rp8.968.458.189 (termasuk DAU sebesar Rp975.462.189) tidak mengalami kenaikan/penurunan. Namun terdapat peralihan anggaran APBD (selain DAU) sebesar Rp618.445.000 yang merupakan sisa anggaran dari sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar. Sisa ini dialihkan ke sub kegiatan Pengadaan Obat Vaksin mengingat kebutuhan obat di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yang semakin meningkat.

Kenaikan anggaran belanja juga diiringi dengan kenaikan asumsi pendapatan, yang awalnya sebesar Rp17.000.000.000 menjadi Rp18.000.000.000. Selisih lebih/kurang akan dibiayai menggunakan SILPA.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat tercapai, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan pencapaian program yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan dengan segera apabila dibutuhkan.

Yogyakarta, Juli 2023

Direktur RS Pratama

drg. Arief Haritono, M.Kes

NIP. 196703271992031008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
(PERUBAHAN RENJA)

DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah , sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun perubahanrencana kerja (Perubahan RENJA) tahun 2022 .

PerubahanRENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partispatif melalui melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

Demikian Semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta,

KEPALA

Ir. Hari Setyowacono,MT
NIP.19640126 199303 1 005

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN..... I.1
1.1. Latar Belakang I.1
1.2. Landasan Hukum..... I.1 - I.3
1.3. Maksud dan Tujuan..... I.3 - I-3
1.4. Sistematika Penulisan I.3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II II.1
2.1. Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2022 ..... II.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman..... II.1 – I.2
2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022..... II.2
2.4. Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah..... II.2 – II.4

BAB III PERUBAHAN RENJA SKPD..... III.1
BAB IV PENUTUP IV.1

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuain dengan perkembangan keadaan tahun 2023, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat
2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program kota
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan TW II

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusu nan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2021 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan / direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

1.4 Sistematika

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II
BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD
BAB IV Penutup
LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan PD sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menguraikan tentang tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra PD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

(Tabel pada Excel)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Permukiman,Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2023 masih terdapat kekurangan sarana prasarana pendukung kerja dalam melaksanakan program

dan kegiatan untuk itu perlu adanya tambahan ataupun perbaikan guna mendukung dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat .

2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :

- Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sd TW II , fisik 82,09 % sedangkan keuangan 61,78 % .
  Pekerjaan fisik yang ditargetkan pada triwulan II dapat terlaksana sesuai target, namun beberapa belum dapat dilaksanakan disebabkan keterlambatan proses pengadaan karena adanya penambahan waktu proses pengadaan yang mempersyaratkan TKDN Namun ada beberapa tambahan usulan dan pagu anggaran disebabkan dana yang tersedia kurang mencukupi dan beberapa anggaran pada satu rekening perlu dikurangi ataupun dialokasikan ke kebutuhan lainnya.
- Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada pagu anggaran dan tolak ukur serta target kinerja , maka perlu disesuaikan dengan penyusunan rencana kerja perubahan (Renja) Perubahan TA 2023.

2.4 Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra , maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2021 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

a. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
b. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
f. Pemberian rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan Detail Engineering Design yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja;
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
i. Pengkoordinasian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
j. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase;
k. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan /atau non perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
l. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas;
m. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
n. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
o. Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
p. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
q. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
r. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

- **Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis. Berkaitan dengan ketugasan teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
d. Adanya Keterbatasan Anggaran disebabkan anggaran direalokasikan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, terdapat beberapa perubahan baik dari segi anggaran, peubahan output kegiatan, penambahan dan pengurangan target kinerja, yang mencangkup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dalam tabel 3.1 .

Dari anggaran murni untuk belanja sebesar Rp. 190,764,076,085,- menjadi Rp 207,040,534,568,- ,- bertambah sebesar Rp. 16.276.458.483,-

(tabel 3.1) Tabel rumusan program dan Kegiatan , terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2023 dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2023 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Yogyakarta serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Lampiran 2

TATA CARA PENYUSUNAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(Perubahan Renja Perangkat Daerah)

A. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA Perangkat Daerah

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV. Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Mohon diperhatikan, agar data-data yang tercantum di narasi sinkron dengan data yang diinputkan di SIPD. Hindari copy paste renja tahun sebelumnya tanpa memperbaiki informasi yang sudah tidak relevan, misalnya: tahun 2022 masih menggunakan dasar RPJMD dan Renstra 2017-2022, saat ini sudah menggunakan RPD dan Renstra 2023-2026.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**25,000,000,000**	**27,346,616,000**	**34,890,916,000**							**29,406,875,130**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	93,75 %		0 %		75,18 %	**25,000,000,000**	**27,346,616,000**	**34,890,916,000**						75,18 %	**29,406,875,130**	
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	26.672 Unit		0 Unit	21.272 Unit	21.272 Unit	**25,000,000,000**	**27,346,616,000**	**34,890,916,000**						21.272 Unit	**29,406,875,130**	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				21272 Unit	21774 Unit	25,000,000,000	27,346,616,000	34,890,916,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	WIlayah Kota Yogyakarta	21774 Unit	29,406,875,130	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**1,382,290,800**	**1,553,747,880**	**2,084,247,030**							**1,520,519,880**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	100,00 % 99,41 %		0 % 0 %	100,00 % 96,00 %	100,00 % 97,58 %	**1,382,290,800**	**1,553,747,880**	**2,084,247,030**						100,00 % 97,58 %	**1,520,519,880**	
1	**04**	**02**	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,382,290,800**	**1,553,747,880**	**2,084,247,030**						3 Dokumen	**1,520,519,880**	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	3 Dokumen	1,382,290,800	1,553,747,880	2,084,247,030	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Susun di Wilayah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	1,520,519,880	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**3,642,242,580**	**3,618,014,580**	**3,835,264,580**							**4,356,290,400**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman Persentase pelayanan SPALD-S akses layak Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	22,96 % 56,70 % 19,24 %		0 % 0 % 0 %	 15,42 %	20,06 % 59,85 % 19,00 %	**3,642,242,580**	**3,618,014,580**	**3,835,264,580**						20,06 % 59,85 % 19,00 %	**4,356,290,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	100 SR 200 SR 18 Unit		0 SR 0 SR 0 Unit	100 SR 157 SR 7 Unit	100 SR 157 SR 7 Unit	**3,642,242,580**	**3,618,014,580**	**3,835,264,580**						100 SR 157 SR 7 Unit	**4,356,290,400**	
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	3,642,242,580	3,618,014,580	3,835,264,580	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	7 Unit	4,356,290,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**115,459,120,280**	**132,816,974,875**	**139,923,822,908**							**131,234,892,096**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	**20,242,874,198**	**17,519,466,750**	**19,005,414,500**						A Nilai	**20,666,209,433**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**175,163,210**	**301,517,500**	**339,256,250**						3 Dokumen	**182,051,125**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	16,250,000	29,026,000	36,484,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	12,644,500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	14,626,750	17,599,500	24,400,250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	13,846,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	144,286,460	254,892,000	278,372,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Laporan	155,560,625	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP	26 Laporan		0 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	**16,038,700,848**	**13,771,711,850**	**14,218,469,350**						26 Laporan	**16,043,725,448**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	16,027,680,848	13,690,699,850	14,127,474,850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	120 Orang/bulan	16,027,680,848	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11,020,000	81,012,000	90,994,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	16,044,600	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum DPUPKP	19 Laporan		0 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	**662,195,500**	**638,901,500**	**769,383,000**						19 Laporan	**675,963,800**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,045,000	12,045,000	17,520,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	13,158,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	315,250,000	284,483,000	274,605,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Paket	360,921,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	120,980,500	128,480,500	158,476,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	127,185,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2 Dokumen	2,100,000	2,100,000	4,100,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	2,904,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	211,820,000	211,793,000	314,681,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	171,795,800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Unit		0 Unit	4 Unit	4 Unit	**766,533,000**	**711,938,000**	**1,287,048,000**						4 Unit	**553,828,000**	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	9 Unit	344,928,000	331,428,000	509,278,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	9 Unit	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	11 Unit	421,605,000	380,510,000	777,770,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	11 Unit	443,828,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Laporan		0 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	**1,241,221,640**	**568,946,000**	**582,946,000**						36 Laporan	**1,654,025,230**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14,430,000	14,430,000	28,430,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	35,864,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	246,000,000	284,520,000	284,520,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	268,620,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	980,791,640	269,996,000	269,996,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	1,349,540,830	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	169 Unit		0 Unit	169 Unit	169 Unit	**1,359,060,000**	**1,526,451,900**	**1,808,311,900**						169 Unit	**1,556,615,830**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	51,600,000	51,600,000	52,900,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit	59,483,600	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				73 Unit	73 Unit	949,110,000	1,147,401,900	1,154,261,900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	73 Unit	1,112,066,230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Unit	16,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87 Unit	155 Unit	68,350,000	87,450,000	111,150,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	155 Unit	66,066,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	275,000,000	225,000,000	475,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	302,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	92,33 %		0 %		92,29 %	**5,971,688,395**	**5,971,688,395**	**6,635,279,895**						92,29 %	**6,185,794,005**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun dan tanggul sungai yang direhabilitasi Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	0.2 km 0.6 km		0 km 0 km	0.3 km 0.6 km	0.3 km 0.6 km	**5,050,681,595**	**5,050,681,595**	**5,714,273,095**						0.3 km 0.6 km	**5,612,375,005**	
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.08 KM	0.13 KM	1,153,597,500	1,153,597,500	1,487,049,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.13 KM	1,268,957,250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.169 KM	0.169 KM	2,104,320,000	2,104,320,000	2,003,985,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.169 KM	1,271,377,250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.6 KM	0.7 KM	1,792,764,095	1,792,764,095	2,223,239,095	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.7 KM	3,072,040,505	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	1 km		0 km	1 km	1 km	**921,006,800**	**921,006,800**	**921,006,800**						1 km	**573,419,000**	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	921,006,800	921,006,800	921,006,800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan Irigasi di Wilayah Kota Yogyakarta	1 KM	573,419,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100 %		0 %	90,50 %	100 %	**6,005,000**	**56,025,000**	**53,481,875**						100 %	**7,500,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**6,005,000**	**56,025,000**	**53,481,875**						1 Unit	**7,500,000**	
1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	6,005,000	56,025,000	53,481,875	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	1 Badan Usaha	7,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman Persentase pelayanan SPALD-S akses layak Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	22,96 % 56,70 % 19,24 %		0 % 0 % 0 %	15,42 %	20,06 % 59,85 % 19,00 %	**5,121,518,040**	**6,663,518,040**	**7,617,983,332**						20,06 % 59,85 % 19,00 %	**4,186,682,500**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	100 SR 200 SR 18 Unit		0 SR 0 SR 0 Unit	100 SR 157 SR 7 Unit	100 SR 157 SR 7 Unit	**5,121,518,040**	**6,663,518,040**	**7,617,983,332**						100 SR 157 SR 7 Unit	**4,186,682,500**	
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				269 Rumah Tangga	269 Rumah Tangga	3,316,643,040	4,858,643,040	5,178,954,932	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	269 Rumah Tangga	2,035,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota				100 Rumah Tangga	137 Rumah Tangga	1,804,875,000	1,804,875,000	2,439,028,400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	137 Rumah Tangga	2,151,682,500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan	87,77 %		0 %	5,50 %	87,66 %	**12,780,063,280**	**12,778,063,280**	**14,261,767,480**						87,66 %	**15,701,414,586**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	1200 m 10.000 m		0 m 0 m	1150 m 10 m	1150 m 10 m	**12,780,063,280**	**12,778,063,280**	**14,261,767,480**						1150 m 10 m	**15,701,414,586**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				1251.3 M	1736.3 M	9,766,926,800	9,764,926,800	10,359,312,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Saluran Drainase di Wilayah Kota Yogyakarta	1736.3 M	13,020,564,480	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				10000 M	10134 M	3,013,136,480	3,013,136,480	3,902,455,480	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Saluran Drainase di Wilayah Kota Yogyakarta	10134 M	2,680,850,106	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik	100 % 92,75 %		0 % 0 %	91,00 % 91,49 %	100 % 91,50 %	**22,241,118,140**	**24,433,146,000**	**24,639,948,892**						100 % 91,50 %	**24,280,660,392**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Jumlah dokumen penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Unit Dokumen Dokumen		Unit Dokumen Dokumen	7 Unit 12 Dokumen 9 Dokumen	7 Unit 12 Dokumen 9 Dokumen	**22,241,118,140**	**24,433,146,000**	**24,639,948,892**						7 Unit 12 Dokumen 9 Dokumen	**24,280,660,392**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				12 Dokumen	12 Dokumen	1,069,345,000	1,217,957,000	536,681,892	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1,217,713,750	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	10 Dokumen	758,111,640	863,343,500	951,993,500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	10 Dokumen	1,104,865,084	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				12 Unit	19 Unit	20,413,661,500	22,351,845,500	23,151,273,500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	19 Unit	21,958,081,558	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	94,49 %		0 %	93,89 %	93,89 %	**13,452,290,800**	**11,883,756,650**	**14,143,335,175**						93,89 %	**16,682,400,680**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman Jumlah penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman	kawasan kawasan		kawasan kawasan	4 kawasan 4 kawasan	4 kawasan 4 kawasan	**13,452,290,800**	**11,883,756,650**	**14,143,335,175**						4 kawasan 4 kawasan	**16,682,400,680**	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				8 Kawasan	8 Kawasan	9,641,472,800	8,122,938,650	7,794,217,100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kawasan Permukiman di Wilayah Kota Yogyakarta	8 Kawasan	12,490,500,880	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				5 Kawasan	5 Kawasan	3,810,818,000	3,760,818,000	6,349,118,075	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kawasan Permukiman di Wilayah Kota Yogyakarta	5 Kawasan	4,191,899,800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	92,75 %		0 %	92,00 %	92,00 %	**11,178,761,027**	**19,010,631,510**	**19,138,296,759**						92,00 %	**13,054,328,210**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	10.2 km 6.8 km		0 km 0 km	9.1 km 0.726 km	9.1 km 0.726 km	**11,178,761,027**	**19,010,631,510**	**19,138,296,759**						9.1 km 0.726 km	**13,054,328,210**	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				3.153 KM	3.153 KM	3,958,791,100	11,086,864,000	10,598,315,249	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	3.153 KM	4,354,670,210	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				9.1 KM	9.1 KM	6,478,811,927	7,182,609,510	7,798,823,510	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	9.1 KM	7,884,384,200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				133.22 M	133.22 M	741,158,000	741,158,000	741,158,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	133.22 M	815,273,800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi	78,46 %		0 %	51,80 %	65,00 %	**464,801,400**	**484,376,250**	**512,177,000**						65,00 %	**469,902,290**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan kelembagaan kontruksi	630 Orang		0 Orang	440 Orang	440 Orang	**227,799,400**	**243,959,250**	**216,740,000**						440 Orang	**298,116,170**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				120 Orang	120 Orang	84,639,400	100,249,250	123,645,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	120 Orang	127,730,020	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				120 Orang	120 Orang	72,000,000	72,000,000	18,000,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	120 Orang	88,935,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				200 Orang	200 Orang	71,160,000	71,710,000	75,095,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	200 Orang	81,451,150	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	13 Laporan		0 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	**237,002,000**	**240,417,000**	**295,437,000**						13 Laporan	**171,786,120**	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				12 Laporan	12 Laporan	81,152,000	84,612,000	84,612,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga kerja konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	12 Laporan	38,637,720	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				2 Dokumen	3 Dokumen	155,850,000	155,805,000	210,825,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga kerja konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	133,148,400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100,00 %		0 %	100,00 %	100,00 %	**24,000,000,000**	**34,016,303,000**	**33,916,138,000**						100,00 %	**30,000,000,000**	
1	**03**	**13**	5.02		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	**24,000,000,000**	**34,016,303,000**	**33,916,138,000**						2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	**30,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	13	5.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				2 Dokumen	2 Dokumen	19,000,000,000	0	0	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	25,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	13	5.02	07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru				2 Dokumen	2 Dokumen	0	502,000,000	401,835,000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Keistimewaan DIY Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	13	5.02	14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	13	5.02	16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman				2 Dokumen	2 Dokumen	0	28,514,303,000	28,514,303,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**5,456,188,000**	**5,428,722,750**	**6,306,284,050**							**6,014,866,000**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	100,00 % 99,41 %		0 % 0 %	100,00 % 96,00 %	100,00 % 97,58 %	**97,000,000**	**97,300,000**	**97,300,000**						100,00 % 97,58 %	**165,000,000**	
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**97,000,000**	**97,300,000**	**97,300,000**						1 Dokumen	**165,000,000**	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	97,000,000	97,300,000	97,300,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Terdampak di wilayah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	28,37 %		0 %	20,52 %	20,52 %	**5,359,188,000**	**5,331,422,750**	**6,208,984,050**						20,52 %	**5,849,866,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	7 Dokumen 130 Unit Rumah		0 Dokumen 0 Unit Rumah	4 Dokumen 140 Unit Rumah	4 Dokumen 140 Unit Rumah	**5,359,188,000**	**5,331,422,750**	**6,208,984,050**						4 Dokumen 140 Unit Rumah	**5,849,866,000**	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				9 Dokumen	12 Dokumen	395,600,000	592,000,000	744,561,300	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	792,066,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				118 Unit Rumah	138 Unit Rumah	4,963,588,000	4,739,422,750	5,464,422,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Kota Yogyakarta	138 Unit Rumah	5,057,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**0**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**							**0**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100 %		0 %		100 %	**0**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**						100 %	**0**	
2	**22**	**08**	5.03		**Pengelolaan Taman Budaya**	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yangDikelola dan Dikembangkan	Obyek		Obyek		1 Obyek	**0**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000**						1 Obyek	**0**	
2	22	08	5.03	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	0	20,000,000,000	20,000,000,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	0	1 Objek	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
									TOTAL			**150,939,841,660**	**190,764,076,085**	**207,040,534,568**							**172,533,443,506**	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	75.33 Skala 0-100
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	64.44 Skala 0-100
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	73.41 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase kualitas saluran pengairan atau penyediaan bangunan talud**	**(Panjang talud dan saluran kondisi baik / Total panjang talud dan saluran air) x 100 %**	**94,00 %**	**0,00**	**92,28 %**	**0,00**	**92,50 %**	**5.971.688.395,00**	**92.5 %**	**1.873.134.562,00**	**92.28 %**	**640.355.100,00**	**99,76%**	**34,19%**					**Bidang Sumber Daya Air dan Drainase**	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSdalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota								**5.050.681.595,00**		**1.387.425.775,00**		**463.957.600,00**		**33.44%**						
		1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				0,00		0,00		1.153.597.500,00	28,24%	325.772.250,00	2,12%	24.399.000,00	7,51%	7,49%						
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		0 km		0 km		0 km		0,00%		2,12%		0,00%							
		2 Rehabilitasi Tanggul Sungai				0,00		0,00		2.104.320.000,00	30,24%	596.877.000,00	12,47%	223.415.000,00	41,24%	37,43%						
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		0 kilometer		0 kilometer		0 kilometer		0,00%		12,47%		0,00%							
		3 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				0,00		0,00		1.792.764.095,00	29,88%	464.776.525,00	28,82%	216.143.600,00	96,45%	46,50%						
			Panjang Tanggul danTebing Sungai yang di Pelihara		0 Km		0 Km		1 Km		0,00%		28,82%		0,00%							
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota								**921.006.800,00**		**485.708.787,00**		**176.397.500,00**		**36.32%**						
		4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		0,00		921.006.800,00	55,00%	485.708.787,00	48,83%	176.397.500,00	88,78%	36,32%						
			Panjang Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara		0 Km		0 Km		1 Km		0,00%		48,83%		0,00%							
		Rata-rata capaian kinerja													**58,49%**	**31,94%**						
		Predikat kinerja													**Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM**	**(Jumlah capaian kinerja pelayanan air minum PDAM) / (Jumlah total kinerja pelayanan air minum PDAM) x 100%**	**92,00 %**	**0,00**	**%**	**0,00**	**90,50 %**	**56.025.000,00**	**90.50 %**	**52.662.000,00**	**91,00 %**	**995.000,00**	**100%**	**1,89%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAMdi Daerah Kabupaten/Kota								**56.025.000,00**		**52.662.000,00**		**995.000,00**		**1.89%**						
		1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri				0,00		0,00		56.025.000,00	100,00%	52.662.000,00	95,00%	995.000,00	95,00%	1,89%						
			Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi		0 badan usaha		0 badan usaha		1 badan usaha		100,00%		95,00%		95,00%							
		Rata-rata capaian kinerja													**95,00%**	**1,89%**						
		Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						

		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai**	**Jumlah tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %**	**89,00 %**	**0,00**	**91,06 %**	**0,00**	**88,00 %**	**10.281.532.620,00**	**88 %**	**3.359.614.330,00**	**88.49 %**	**1.363.923.822,00**	**100%**	**34,22%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	**(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%**	**90,00 %**	**0,00**	**50,00 %**	**0,00**	**60,00 %**	**0,00**	**50**	**0,00**	**50**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**UPT Pengelolaan Air Limbah**	
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	**(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%**	**15,90 %**	**0,00**	**15,40 %**	**0,00**	**15,42 %**	**0,00**	**15.40**	**0,00**	**15.40**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								**10.281.532.620,00**		**3.359.614.330,00**		**1.363.923.822,00**		**40.6%**						
		1 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota				0,00		0,00		4.858.643.040,00	32,81%	1.481.121.000,00	2,56%	94.836.932,00	7,80%	6,40%						
			Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		0 rumah tangga		0 rumah tangga		269 rumah tangga		0,00%		2,56%		0,00%						
		2 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				0,00		0,00		1.804.875.000,00	39,92%	702.740.000,00	42,11%	447.856.600,00	105,49%	63,73%						
			Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-TSkala Kota		0 rumah tangga		0 rumah tangga		100 rumah tangga		0,00%		42,11%		0,00%						
		3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Upt Pengelolaan Air Limbah				0,00		0,00		3.618.014.580,00	50,99%	1.175.753.330,00	44,15%	821.230.290,00	86,59%	69,85%						
			Jumlah Unit Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Dioperasikan Dan Dipelihara		0 Unit		0 Unit		7 Unit		0,00%		44,15%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**66,62%**	**46,66%**						
									Predikat kinerja						**Sedang**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan**	**(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan / Total panjang saluran drainase) x 100%**	**7,00 %**	**0,00**	**5,00 %**	**0,00**	**5,50 %**	**12.778.063.280,00**	**5.5 %**	**3.697.076.540,00**	**5 %**	**426.633.500,00**	**100%**	**11,54%**					**Bidang Sumber Daya Air dan Drainase**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								**12.778.063.280,00**		**3.697.076.540,00**		**426.633.500,00**		**11.54%**						
		1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				0,00		0,00		9.764.926.800,00	31,35%	2.865.240.440,00	0,84%	68.257.000,00	2,68%	2,38%						
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		0 meter		0 meter		1.251 meter		0,00%		0,84%		0,00%						
		2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				0,00		0,00		3.013.136.480,00	45,20%	831.836.100,00	23,79%	358.376.500,00	52,63%	43,08%						
			Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		0 meter		0 meter		10.000 meter		0,00%		23,79%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**27,66%**	**22,73%**						
									Predikat kinerja						**Sangat**	**Sangat**						

																	Rendah	**Rendah**					
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan**	**(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun atau direhab/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%**	**93,00 %**	**0,00**	**91,16 %**	**0,00**	**91,49 %**	**24.433.146.000,00**	**91,49 %**	**3.066.517.750,00**	**91,24 %**	**1.111.952.410,00**	**99%**	**36,26%**					**Bidang Penataan Bangunan**		
			Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	**(Jumlah penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) / (Jumlah Total teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) x 100%**	**94,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**91,00 %**	**0,00**	**91**	**0,00**	**100**	**0,00**	**109,89%**	**0,00%**					**Bidang Penataan Bangunan**		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/KotaPemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMBdan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								**24.433.146.000,00**		**3.066.517.750,00**		**1.111.952.410,00**		**36.26%**							
		1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Sertifikat Laik Fungsi (SLF)peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Pendataan Bangunan Gedungserta Implementasi SIMBG				0,00		0,00		1.217.957.000,00	51,22%	623.858.000,00	50,00%	230.512.142,00	97,62%	36,95%							
				Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), SertifikatLaik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, sertaImplementasi SIMBG		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		51,22%		50,00%		97,62%							
		2	PerencanaanPembangunanPengawasandan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		863.343.500,00	47,61%	324.987.250,00	64,36%	304.060.950,00	135,18%	93,56%							
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		0,00%		64,36%		0,00%							
		3	RehabilitasiRenovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		22.351.845.500,00	18,46%	2.117.672.500,00	5,84%	577.379.318,00	31,64%	27,26%							
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		0 Unit		0 Unit		12 Unit		0,00%		5,84%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**88,15%**	**52,59%**						
										Predikat kinerja						**Tinggi**	**Rendah**						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman**	**(Kawasan dengan sarana prasarana baik / Total kawasan) x 100 %**	**94,49 %**	**0,00**	**93,69 %**	**0,00**	**93.89 %**	**11.883.756.650,00**	**92.5 %**	**1.615.321.450,00**	**92.28 %**	**1.277.666.925,00**	**99,76%**	**79,10%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								**11.883.756.650,00**		**1.615.321.450,00**		**1.277.666.925,00**		**79.1%**							
		1	Penataan Bangunan dan Lingkungan				0,00		0,00		8.122.938.650,00	15,31%	613.241.450,00	13,30%	574.726.700,00	86,87%	93,72%							
				Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya danTradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional danKawasan Strategis Lainnya		0 Kawasan		0 Kawasan		8 Kawasan		0,00%		13,30%		0,00%							
		2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				0,00		0,00		3.760.818.000,00	26,98%	1.002.080.000,00	29,87%	702.940.225,00	110,71%	70,15%							

				Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya danTradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional danKawasan Strategis Lainnya		0 Kawasan		0 Kawasan		5 Kawasan		0,00%		29,87%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja								**98,79%**	**81,93%**					
										Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan**	**(60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100%**	**92,75 %**	**0,00**	**96,88 %**	**0,00**	**92,00 %**	**19.010.631.510,00**	**92 %**	**6.145.619.600,00**	**96.88 %**	**2.121.552.000,00**	**105%**	**34,52%**					**Bidang Jalan dan Jembatan**	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								**19.010.631.510,00**		**6.145.619.600,00**		**2.121.552.000,00**		**34.52%**								
		1	Pemeliharaan Berkala Jalan				0,00		0,00		11.086.864.000,00	31,90%	3.181.219.600,00	28,66%	21.776.000,00	89,84%	0,68%							
				Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		0 km		0 km		3 km		0,00%		28,66%		0,00%								
		2	Pemeliharaan Rutin Jalan				0,00		0,00		7.182.609.510,00	47,63%	2.751.360.000,00	46,08%	2.099.776.000,00	96,75%	76,32%							
				Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin		0 kilometer		0 kilometer		9 kilometer		0,00%		46,08%		0,00%								
		3	Pemeliharaan Rutin Jembatan				0,00		0,00		741.158.000,00	29,91%	213.040.000,00	29,91%	0,00	100,00%	0,00%							
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		0 m'		0 m'		133 m'		0,00%		29,91%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**95,53%**	**25,67%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**							
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi**	**(Jumlah TKK dan BU yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi) / (Jumlah Total target peserta pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi) x100%**	**57,20 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**51,80 %**	**484.376.250,00**	**25 %**	**238.285.750,00**	**25 %**	**74.569.770,00**	**100%**	**31,29%**					**Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi**	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								**243.959.250,00**		**118.644.750,00**		**58.026.770,00**		**48.91%**								
		1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				0,00		0,00		100.249.250,00	51,66%	51.789.750,00	26,67%	28.988.020,00	51,63%	55,97%							
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang mengikuti Pelatihan		0 orang		0 orang		120 orang		51,66%		26,67%		51,63%								
		2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi				0,00		0,00		72.000.000,00	50,00%	36.000.000,00	26,67%	1.600.000,00	53,34%	4,44%							
				umlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisyang Tersertifikasi		0 orang		0 orang		120 orang		50,00%		26,67%		53,34%								
		3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				0,00		0,00		71.710.000,00	42,43%	30.855.000,00	42,40%	27.438.750,00	99,93%	88,93%							
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		0 orang		0 orang		200 orang		42,43%		42,40%		99,93%								
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								**240.417.000,00**		**119.641.000,00**		**16.543.000,00**		**13.83%**								

		4	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi				0,00		0,00		84.612.000,00	20,25%	17.136.000,00	16,30%	14.373.000,00	80,49%	83,88%						
				Jumlah Laporan Penyenggaraan dukungan Mananejemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		0 laporan		0 laporan		12 laporan		20,25%		16,30%		80,49%							
		5	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				0,00		0,00		155.805.000,00	65,79%	102.505.000,00	46,42%	2.170.000,00	70,56%	2,12%						
				Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		50,42%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**71,19%**	**47,07%**						
										Predikat kinerja						**Sedang**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang**	**(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**%**	**0,00**	**100,00 %**	**34.016.303.000,00**	**100 %**	**4.563.539.000,00**	**9,96 %**	**2.911.104.196,00**	**9%**	**63,79%**					**Bidang Penataan Bangunan, Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten									**34.016.303.000,00**		**4.563.539.000,00**		**2.911.104.196,00**		**63.79%**						
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru				0,00		0,00		502.000.000,00	72,00%	361.080.000,00	80,00%	0,00	111,11%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		80,00%		0,00%							
		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton				0,00		0,00		5.000.000.000,00	34,45%	1.538.340.000,00	1,00%	587.143.091,00	2,90%	38,17%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Karaton		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		1,00%		0,00%							
		3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman				0,00		0,00		28.514.303.000,00	22,98%	2.664.119.000,00	9,97%	2.323.961.105,00	43,39%	87,23%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		9,97%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**52,47%**	**41,80%**						
										Predikat kinerja						**Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		**Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program**	**(Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**%**	**0,00**	**100,00 %**	**1.651.047.880,00**	**100 %**	**1.004.577.060,00**	**100 %**	**623.661.525,00**	**100%**	**62,08%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
				Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	**(Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100%**	**96,00 %**	**0,00**	**101,37 %**	**0,00**	**99,00 %**	**0,00**	**49,5**	**0,00**	**53,28**	**0,00**	**108,16%**	**0,00%**					**UPT Pengelolaan Rusunawa**	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									**97.300.000,00**		**650.000,00**		**0,00**		**0%**						
		1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0,00		0,00		97.300.000,00	0,70%	650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,70%		0,00%		0,00%							

		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								**1.553.747.880,00**		**1.003.927.060,00**		**623.661.525,00**		**62.12%**							
		2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa			0,00		0,00		1.553.747.880,00	70,59%	1.003.927.060,00	62,86%	623.661.525,00	89,05%	62,12%							
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		62,86%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**44,52%**	**31,06%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		**Persentase permukiman kumuh yang tertangani**	**(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%**	**28,37 %**	**0,00**	**17,90 %**	**0,00**	**20,52 %**	**5.331.422.750,00**	**20.52 %**	**1.916.745.750,00**	**18,71 %**	**859.755.150,00**	**91%**	**44,85%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluhHa								**5.331.422.750,00**		**1.916.745.750,00**		**859.755.150,00**		**44.85%**							
		1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plandan Detail Engineering Design (DEDPeremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			0,00		0,00		592.000.000,00	3,00%	0,00	30,00%	0,00	1.000,00%	0,00%							
				Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		0 dokumen		0 dokumen		9 dokumen		3,00%		30,00%		1.000,00%							
		2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			0,00		0,00		4.739.422.750,00	44,41%	1.916.745.750,00	32,09%	859.755.150,00	72,26%	44,85%							
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki		0 unit rumah		0 unit rumah		118 unit rumah		0,00%		32,09%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**536,13%**	**22,43%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		**Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan**	**(Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100%**	**93,20 %**	**0,00**	**70,53 %**	**0,00**	**75,92 %**	**27.346.616.000,00**	**75.92 %**	**13.199.341.270,00**	**70.53 %**	**9.399.294.221,00**	**92,90%**	**71,21%**					**UPT Penerangan Jalan Umum**	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								**27.346.616.000,00**		**13.199.341.270,00**		**9.399.294.221,00**		**71.21%**							
		1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Upt Penerangan Jalan Umum			0,00		0,00		27.346.616.000,00	66,12%	13.199.341.270,00	54,93%	9.399.294.221,00	83,08%	71,21%							
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		0 unit		0 unit		21.272 unit		0,00%		54,93%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**83,08%**	**71,21%**						
										Predikat kinerja						**Tinggi**	**Sedang**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					**0,00**		**0,00**		**20.000.000.000,00**	**92,5**	**4.830.881.500,00**	**92.28**	**12.989.650,00**	**100,30%**	**0,27%**						
		Pengelolaan Taman Budaya								**20.000.000.000,00**		**4.830.881.500,00**		**12.989.650,00**		**0.27%**							
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota			0,00		0,00		20.000.000.000,00	25,13%	4.830.881.500,00	0,21%	12.989.650,00	0,84%	0,27%							
				Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan		0 objek		0 objek		1 objek		0,00%		0,21%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**0,84%**	**0,27%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**17.519.466.750,00**	**A Nilai**	**12.495.656.589,00**	**A Nilai**	**8.440.853.507,00**	**0,00%**	**67,55%**					**Sekretariat**	

				Kawasan Permukiman																			
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**301.517.500,00**		**225.921.000,00**		**108.966.000,00**		**48.23%**							
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		29.026.000,00	79,00%	22.804.000,00	79,00%	20.713.750,00	100,00%	90,83%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		79,00%		79,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		17.599.500,00	53,97%	9.452.000,00	53,00%	6.428.000,00	98,20%	68,01%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		53,97%		53,00%		98,20%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		254.892.000,00	76,68%	193.665.000,00	56,56%	81.824.250,00	73,76%	42,25%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		56,56%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**13.771.711.850,00**		**10.251.361.339,00**		**6.681.993.220,00**		**65.18%**							
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		13.690.699.850,00	75,00%	10.206.765.339,00	65,00%	6.643.649.720,00	86,67%	65,09%						
				Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang		0 orang		120 orang		75,00%		65,00%		86,67%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		81.012.000,00	57,05%	44.596.000,00	51,00%	38.343.500,00	89,40%	85,98%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		57,05%		51,00%		89,40%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**638.901.500,00**		**331.778.250,00**		**263.292.108,00**		**79.36%**							
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		12.045.000,00	100,00%	12.045.000,00	100,00%	11.837.400,00	100,00%	98,28%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		284.483.000,00	47,00%	133.888.250,00	42,00%	73.362.900,00	89,36%	54,79%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket		47,00%		42,00%		89,36%							
		8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		128.480.500,00	79,00%	101.795.000,00	75,00%	98.943.500,00	94,94%	97,20%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		79,00%		75,00%		94,94%							
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.100.000,00	50,00%	1.050.000,00	50,00%	1.050.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		211.793.000,00	40,00%	83.000.000,00	40,00%	78.098.308,00	100,00%	94,09%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		40,00%		40,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**711.938.000,00**		**711.938.000,00**		**686.600.000,00**		**96.44%**							
		11	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		331.428.000,00	100,00%	331.428.000,00	100,00%	317.450.000,00	100,00%	95,78%						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		0,00%		124,00%		0,00%							
		12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		380.510.000,00	100,00%	380.510.000,00	100,00%	369.150.000,00	100,00%	97,01%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		6 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**568.946.000,00**		**285.258.000,00**		**189.460.379,00**		**66.42%**							
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		14.430.000,00	35,00%	5.000.000,00	35,00%	4.750.000,00	100,00%	95,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		35,00%		35,00%		100,00%							

		14	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		284.520.000,00	52,00%	145.260.000,00	50,00%	105.662.879,00	96,15%	72,74%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		52,00%		50,00%		96,15%							
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		269.996.000,00	49,98%	134.998.000,00	49,00%	79.047.500,00	98,04%	58,55%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0		0		0		0,00%		49,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.526.451.900,00**		**689.400.000,00**		**510.541.800,00**		**74.06%**						
		16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		51.600.000,00	51,00%	26.300.000,00	50,00%	20.083.100,00	98,04%	76,36%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		2 Unit		51,00%		50,00%		98,04%							
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		1.147.401.900,00	49,98%	544.100.000,00	48,23%	424.046.200,00	96,50%	77,94%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		73 Unit		0,00%		48,23%		0,00%							
		18	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	14.850.000,00	100,00%	99,00%						
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		87.450.000,00	49,98%	39.000.000,00	45,00%	21.951.500,00	90,04%	56,29%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		87 Unit		49,98%		45,00%		90,04%							
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		225.000.000,00	80,67%	65.000.000,00	56,67%	29.611.000,00	70,25%	45,56%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		56,67%		0,00%							
		Rata-rata capaian kinerja														**94,07%**	**78,54%**						
		Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
		Total anggaran dari seluruh program									**190.764.076.085,00**		**58.058.973.151,00**		**29.265.306.776,00**								
		Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 14) (%)														**95,63%**	**50,41%**						
		Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 14)														**Sangat Tinggi**	**Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Perencanaan siap dari awal 2. Adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dengan adanya kebijakan penunjukan PA dan KPA beserta bendahara pembantu dibidang menyebabkan administrasi pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat 2. Penyesuaian PPN 11%
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ir. HARI SETOWACONO, MT
NIP. 196401261993031005

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

(*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)

KOTA YOGYAKARTA

2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perkembangan keadaan sebagai dasar perubahan Renja Perangkat Daerah, diantaranya meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus direalisasikan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023, terdiri dari :

BAB I **Pendahuluan**

memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II**

memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III **Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah**

memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV **Penutup**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2023 ditujukan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II akan dijadikan bahan acuan perumusan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) dengan target kinerja nilai SAKIP A. Anggaran program tahun 2023 sebesar Rp. 5.790.097.900,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.933.467.050,-.

   Pada triwulan II tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan nilai SAKIP A sehingga target kinerja program telah tercapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.053.008.414,- yaitu tercapai 77,62% terhadap target triwulan II atau 52,73% terhadap total pagu program. Sebagian besar target keuangan yang belum terserap merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai di tahun 2023.

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

   Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu:

   a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki 2 (dua) indikator yaitu Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dengan target sebesar 88,67% dan Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dengan target 76%. Anggaran program tahun 2023 sebesar Rp. 1.815.946.000,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 587.659.000,-.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang tercapai sebesar 88,58% sedangkan indikator Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang tercapai 75,63%. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II mencapai Rp. 382.645.430,- yaitu terealisasi 65,11% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan II atau 21,07% terhadap total pagu program. Realisasi keuangan belum optimal diantaranya disebabkan adanya kendala proses pengadaan penyedia jasa konsultansi melalui SPSE, keterbatasan ketersediaan Tenaga Ahli yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, dan adanya perubahan format/rencana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari tatakala.

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki indikator Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan dengan target sebesar 100%. Target keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 137.270.800,- dari anggaran program sebesar Rp. 248.507.000,-

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan II mencapai 55,29% dan realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 48.862.950,- yaitu terealisasi 35,60% terhadap target keuangan triwulan II atau 19,66% terhadap total pagu program. Realisasi keuangan tidak optimal disebabkan kegiatan Pengamanan Jl. Perwakilan Kota Yogyakarta telah dapat diselesaikan di triwulan I sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut pada triwulan II tidak direalisasikan.

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini memiliki indikator Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah dengan target sebesar 98,27%. Anggaran program tahun 2023 sebesar Rp. 1.789.443.000,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 115.876.000,-.

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 97,50% yang diperhitungkan dari realisasi kinerja tahun 2022. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.

49.470.400,- yaitu tercapai 42,69% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan II atau 2,76% terhadap total pagu program. Kegiatan perencanaan pengadaan tanah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang tidak dapat dilaksanakan dan proses pengadaan tanah untuk IPAL di Kelurahan Karangwaru yang terkendala penyiapan dokumen pengadaan tanahnya menyebabkan realisasi keuangan tidak dapat terpenuhi sesuai ploting anggaran yang telah direncanakan.

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong

   Program Pengelolaan Tanah Kosong didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong. Program ini memiliki indikator Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot dengan target sebesar 91,67% dan target keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 334.755.000,- dari anggaran program sebesar Rp. 673.139.000,-.

   Capaian kinerja Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot sampai dengan triwulan II telah tercapai 92,37%. Hal tersebut didukung telah terbitnya bukti pendaftaran pensertifikatan jalan dan non jalan sebanyak 107 berkas sehingga total pendaftaran pensertifikatan aset tanah Pemkot sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai 920 dari 996 aset tanah pemkot yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 216.232.040,- yaitu tercapai 64,59% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan II atau 32,12% terhadap total pagu program. Realisasi keuangan tidak optimal karena biaya pendaftaran pensertifikatan tanah yang belum terbayarkan atau menunggu tagihan/proses dari BPN.

6. Program Penatagunaan Tanah

   Program Penatagunaan Tanah didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah kabupaten/Kota. Program ini memiliki indikator Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara dengan target sebesar 100% dan target keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 32.743.000,- dari anggaran program Rp. 81.512.000,-.

   Capaian kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 58,33% yang didukung telah terbitnya surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara sebanyak 7 lokasi sehingga total telah diterbitkan sebanyak 35 dari target 60 surat rekomendasi yang direncanakan sampai dengan masa akhir renstra 2023-2026. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 29.877.380,- yaitu tercapai 91,25% terhadap target keuangan triwulan II atau 36,63% terhadap total pagu program.

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

   Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

   a. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
   b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan memiliki 2 (dua) indikator yaitu Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan target sebesar 25% dan Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan target 25%. Anggaran program tahun 2023 sebesar Rp. 1.095.017.000,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 293.863.000,-.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 indikator Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tercapai sebesar 8,01%. Sedangkan indikator Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tercapai 40%. Tingginya capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan monitoring terhadap 24 lokasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten dari 15 lokasi yang direncanakan di tahun 2023 atau 60 lokasi yang direncanakan selama masa renstra 2023-2026.

Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II mencapai Rp. 275.358.200,- yaitu terealisasi 93,70% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan II atau 25,15% terhadap total pagu program.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	82.33 nilai
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	93,91
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang**	**Jumlah penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan**	**90,13%**	**0**	**88,48 %**	**0**	**88,67 %**	**0**	**88,58% %**	**0**	**88,58% %**	**382.645.430,00**	**100%**	**0,00%**	**Bidang Tata Ruang**	

				Tata Ruang dikalikan bobotnya.														
			Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	**Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.**	**77,00 persen**	**0**	**75,45 persen**	**0**	**76,00 persen**	**0**	**75,63%**	**0**	**75,63%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**	**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWdan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTRKabupaten/Kota																
		1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					0		0		234.004.000,00	55,00%	80.640.000,00	55,00%	76.694.650,00	100,00%	95,11%		
				Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%				
		2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang					0		0		235.507.000,00	25,00%	49.587.000,00	41,00%	38.791.400,00	164,00%	78,23%		
				Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		0 dokumen		0 dokumen		750 dokumen		25,00%		41,00%		164,00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																		
		3	Koordinasi dan					0		0		537.720.000,00	62,77%	198.020.000,00	61,84%	96.993.950,00	98,52%	48,98%		

			Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		61,84%		0,00%			
		4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				0		0		204.280.000,00	75,00%	103.119.000,00	75,00%	41.853.230,00	100,00%	40,59%		
				Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		75,00%		75,00%		100,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				0		0		239.286.000,00	24,64%	16.310.000,00	24,64%	15.905.000,00	100,00%	97,52%		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		24,64%		0,00%			
		6	Sistem Informasi Penataan Ruang				0		0		151.580.000,00	50,00%	65.010.000,00	50,00%	38.686.000,00	100,00%	59,51%		
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	

		7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				0		0		38.580.000,00	45,77%	17.640.000,00	45,77%	17.065.000,00	100,00%	96,74%		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		45,77%		45,77%		100,00%			
		8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				0		0		108.576.000,00	37,45%	40.612.000,00	37,45%	40.612.000,00	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		37,45%		37,45%		100,00%			
		9	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0		0		66.413.000,00	25,23%	16.721.000,00	25,23%	16.044.200,00	100,00%	95,95%		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,23%		25,23%		100,00%			
Rata-rata capaian kinerja																**106,95%**	**79,18%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase penanganan permasalahan pertanahan**	**Jumlah penanganan terhadap masalah pertanahan yang terfasilitasi dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang masuk. x 100%**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**55,29%**	**0**	**55,29%**	**48.862.950,00**	**100%**	**0,00%**	**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
		1	Inventarisasi SengketaKonflikdan Perkara Pertanahan dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/ Kota				0		0		248.507.000,00	55,29%	137.270.800,00	55,29%	48.862.950,00	100,00%	35,60%		
				Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		55,29%		55,29%		100,00%			
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**35,60%**		
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		**Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah**	**Jumlah BA musyawarah negosiasi pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%**	**100,00%**	**0**	**99,22%**	**0**	**98,27%**	**0**	**97,50%**	**0**	**97,50%**	**49.470.400,00**	**100%**	**0,00%**	**Bidang Pertanahan**	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
		1	Koordinasi dan				0		0		1.789.443.000,00	82,66%	115.876.000,00	15,00%	49.470.400,00	18,15%	42,69%		

			Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		15,00%		0,00%			
Rata-rata capaian kinerja																**18,15%**	**42,69%**		
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**		**Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset pemkot**	**Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Data aset tanah pemkot x 100%**	**97,69%**	**0**	**101,26%**	**0**	**91,67%**	**0**	**91,36%**	**0**	**92,37%**	**216.232.040,00**	**101%**	**0,00%**	**Bidang Pertanahan**	
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																	
		1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				0		0		673.139.000,00	57,19%	334.755.000,00	57,32%	216.232.040,00	100,23%	64,59%		
				Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		57,32%		0,00%			
Rata-rata capaian kinerja																**100,23%**	**64,59%**		
Predikat kinerja																**Sangat**	**Rendah**		

															Tinggi			
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara**	**Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.**	**100,00%**	**0**	**140,00%**	**0**	**50,00%**	**0**	**48,33%**	**0**	**58,33%**	**29.877.380,00**	**120%**	**0,00%**	**Bidang Pertanahan**	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				0		0		81.512.000,00	41,00%	32.743.000,00	70,00%	29.877.380,00	170,73%	91,25%		
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		2 laporan		41,00%		70,00%		170,73%			
Rata-rata capaian kinerja																**170,73%**	**91,25%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten x 100%**	**100,00%**	**0**	**- %**	**0**	**25,00 %**	**0**	**8,01 % %**	**0**	**8,01% %**	**275.358.200,00**	**100%**	**0,00%**	**Bidang Pertanahan**	
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	**Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dibagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev x 100%**	**100,00%**	**0**	**- %**	**0**	**25,00 %**	**0**	**7,74 %**	**0**	**40%**	**0**	**571,43%**	**0,00%**	**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**	
		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																
		1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan				0		0		165.000.000,00	53,20%	71.337.000,00	44,00%	69.136.700,00	82,71%	96,92%		
				Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		53,20%		44,00%		82,71%			

			dan Kadipaten	Kasultanan dan Kadipaten														
		2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				0		0		74.861.000,00	26,87%	15.797.000,00	24,00%	9.714.000,00	89,32%	61,49%		
				Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa		0 Berita Acara		0 Berita Acara		2 Berita Acara		26,87%		24,00%		89,32%			
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																	
		3	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				0		0		680.156.000,00	32,04%	171.129.000,00	33,34%	163.658.500,00	104,06%	95,63%		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		33,64%		0,00%			
		4	Pengawasan Tanah				0		0		175.000.000,00	31,03%	35.600.000,00	49,09%	32.849.000,00	158,20%	92,27%		

			Kasultanan Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		31,03%		49,09%		158,20%			
Rata-rata capaian kinerja																**108,57%**	**86,58%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**3.053.008.414,00**	**100%**	**0,00%**	**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		6.070.000,00	67,85%	3.820.000,00	67,85%	3.589.000,00	100,00%	93,95%		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		67,85%		67,85%		100,00%			
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		2.400.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%			

				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		2.600.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%			
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.725.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%			
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		1.925.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%			

		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		16.325.000,00	73,41%	11.800.000,00	73,41%	11.099.000,00	100,00%	94,06%		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		21 Laporan		73,41%		73,41%		100,00%			
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		3.600.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4.783.023.500,00	69,00%	3.275.352.150,00	69,00%	2.459.590.924,00	100,00%	75,09%		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang		0 orang		33 orang		69,00%		69,00%		100,00%			
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		3.312.000,00	50,00%	1.104.000,00	50,00%	1.104.000,00	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			

				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		3.312.000,00	50,00%	1.104.000,00	50,00%	1.104.000,00	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		3.312.000,00	50,00%	1.104.000,00	50,00%	1.104.000,00	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		1.265.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%			
		13	Pengelolaan dan				0		0		1.564.000,00	50,00%	782.000,00	50,00%	775.000,00	100,00%	99,10%		

			Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		37.772.000,00	50,00%	15.638.000,00	50,00%	15.377.000,00	100,00%	98,33%		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%			
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		544.000,00	32,35%	176.000,00	32,35%	176.000,00	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		32,35%		32,35%		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				0		0		418.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	100,00%		
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			

			SKPD															
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		440.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%			
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00 %	437.000,00	100,00%	99,32%		
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00 %		100,00%			
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		308.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00 %		0,00%		0,00%			
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		308.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00 %		0,00%		0,00%			

		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		308.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		484.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		4.730.000,00	100,00%	4.730.000,00	100,00 %	3.853.500,00	100,00%	81,47%		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00 %		100,00%			
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		3.055.250,00	100,00%	3.055.250,00	100,00 %	3.052.050,00	100,00%	99,90%		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00 %		100,00%			
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		9.700.000,00	67,00%	5.900.000,00	67,00%	4.633.750,00	100,00%	78,54%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		0 paket		0 paket		2 paket		67,00%		67,00%		100,00%			

				yang Disediakan															
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		4.500.000,00	30,00%	1.250.000,00	30,00%	1.200.000,00	100,00%	96,00%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		30,00%		30,00%		100,00%			
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		169.210.000,00	35,00%	56.830.000,00	35,00%	46.067.081,00	100,00%	81,06%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		103 Laporan		35,00%		35,00%		100,00%			
		28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	434.000,00	100,00%	98,64%		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
		29	Pengadaan Mebel				0		0		198.800.000,00	100,00%	198.800.000,00	100,00%	193.200.000,00	100,00%	97,18%		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		28 Unit		0,00%		100,00%		0,00%			
		30	Pengadaan Peralatan				0		0		27.273.950,00	100,00%	27.273.950,00	100,00%	26.044.000,00	100,00%	95,49%		

			dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	100,00%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		4.200.000,00	52,00%	2.100.000,00	52,00%	2.020.592,00	100,00%	96,22%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		52,00%		52,00%		100,00%			
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		170.114.200,00	55,00%	77.175.200,00	55,00%	76.080.072,00	100,00%	98,58%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		55,00%		55,00%		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		34	Penyediaan Jasa				0		0		29.100.000,00	72,00%	20.400.000,00	72,00%	13.410.500,00	100,00%	65,74%		

			PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		72,00%		72,00%		100,00%			
		35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		129.625.000,00	57,00%	71.850.000,00	57,00%	38.887.305,00	100,00%	54,12%		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		14 unit		57,00%		57,00%		100,00%			
		36	Pemeliharaan Mebel				0		0		8.575.000,00	100,00%	8.575.000,00	100,00%	8.275.000,00	100,00%	96,50%		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit		0 unit		23 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		40.819.000,00	62,00%	24.849.500,00	62,00%	23.381.000,00	100,00%	94,09%		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		24 unit		62,00%		62,00%		100,00%			
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		112.000.000,00	100,00%	112.000.000,00	100,00%	111.195.640,00	100,00%	99,28%		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		100,00%		0,00%			

				Dipelihara/Direhabilitasi																	
Rata-rata capaian kinerja																		**71,05%**	**65,60%**		
Predikat kinerja																		**Sedang**	**Sedang**		
Total anggaran dari seluruh program												**0**		**0**		**4.055.454.814,00**					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)																		**81,56%**	**0%**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)																		**Tinggi**	**Sangat Rendah**		

Tabel 2.2
HASIL EVALUASI METADATA RENSTRA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD	2023		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	2023	
			Target	Realisasi S/d Triwulan II				Target	Realisasi S/d Triwulan II
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Rata-rata Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	82,33%	82,11%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	Jumlah penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.	88,67%	88,58%
		Data:					Data:		
		Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	88,67%	88,58%			Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	88,67%	88,58%
		Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	76,00%	75,63%		Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.	76,00%	75,63%
							Data:		
							Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	76,00%	75,63%
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100	93,91%	94,11%	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	Jumlah penanganan terhadap masalah pertanahan yang terfasilitasi dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang masuk x 100%	100%	55,29%
		Data:					Data:		
		Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset pemkot	91,67%	92,37%			Penanganan Masalah Pertanahan yang terfasilitasi	1	1
		Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	98,27%	97,50%			Masalah Pertanahan yang masuk	1	2

					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	Jumlah BA musyawarah negosiasi pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%	98,27%	97,50%
							Data:		
							Jumlah BA musyawarah negosiasi pengadaan tanah pemkot	511	507
							Jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot	520	520
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset pemkot	Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Data aset tanah pemkot x 100%	91,67%	92,37%
							Data:		
							Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya	913	920
							Data aset tanah pemkot	996	996
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	Surat Rekomendasi/jawaban Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.	50,00%	58,33%
							Data:		
							Surat Rekomendasi/jawaban yang terbit	30	35
							Surat Permohonan Rekomendasi	60	60

					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Rencana pendaftaran pensertifikatan tanak Kasultanan dan Tanah Kadipaten x 100%	25,00%	8,01%
							Data:		
							Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya	50	16
							Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	200	200
						Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dibagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev x 100%	25,00%	58,33%
							Data:		
							Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev	15	35
							Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev	60	60
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91	90,36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	A Nilai
		Data					Data:		
		Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase	91	90,36			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	A Nilai

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Dalam rangka pengukuran kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yang lebih terukur, akuntabel, serta selaras dengan dinamika perkembangan pembangunan, pada tahun 2023 ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan reviu terhadap Rencana Strategis 2023 – 2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	
				Murni	Reviu
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	82,33	84,84
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	93,91	92,73
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91 poin	A nilai

Sasaran dan Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target	
				Murni	Reviu
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	88,67 %	80,07 %
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	76 %	89,61 %

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target	
				Murni	Reviu
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	100 %	
			Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP		100 %
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	98,27 %	100 %
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset pemkot	91,67 %	85,45 %
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	50 %	
			Persentase Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang Diterbitkan sesuai SOP		100 %
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25 %	81,22 %
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25 %	25 %
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	A nilai	A nilai

Mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan dinamika pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, maka untuk mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan, maka diperlukan perubahan Renja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan output, target, dan anggaran. Penambahan tersebut dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melalui peningkatan kuantitas sarana dan prasarana yang ada dan peningkatan pelayanan internal. Penambahan anggaran juga dilakukan terhadap anggaran gaji dan tunjangan ASN untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Total perubahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota naik menjadi sebesar Rp. 6.283.504.900,-.

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

   Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang naik menjadi sebesar Rp. 2.091.801.000,- untuk mewadahi penambahan output dan target pada pada fungsi pengaturan dan pembinaan tata ruang berupa pekerjaan penyusunan RTBL Kawasan Koridor Embung Budaya, Kajian Identifikasi Delineasi Kawasan RTBL Penjabaran RDTR, dan Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Reklame Pasca Penerapan Peraturan Pelaksanaan.

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

   Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan melalui Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran kegiatan/subkegiatan menjadi sebesar Rp. 145.722.000,- sebagai hasil efisiensi dari pelaksanaan kegiatan Pengamanan Jalan Perwakilan yang telah berhasil diselesaikan/difasilitasi pada bulan Januari 2023.

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

   Pada program ini dilakukan penambahan output dan target meskipun dilakukan pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.706.685.000,-. Pada pekerjaan pengadaan tanah untuk IPAL Komunal di Kelurahan Karangwaru dilakukan efisiensi/pengurangan anggaran menyesuaikan keluasan tanah yang ada. Hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk penambahan rencana pengadaan tanah untuk RTHP sebanyak 2 (dua) lokasi sebagai wujud dukungan upaya pencapaian luasan RTHP 20% dari luas Kota Yogyakarta.

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong

   Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong yang didukung oleh Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong dilakukan pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 656.539.000,-. Pengurangan tersebut merupakan hasil efisiensi biaya untuk pendaftaran pensertifikatan aset tanah Pemkot. Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pendaftaran pensertifikatan aset tanah Pemkot terutama pada jalan-jalan lingkungan, maka pada perubahan renja direncanakan penyusunan Kajian Identifikasi Ruas Jalan yang Belum Bersertifikat.

6. Program Penatagunaan Tanah

   Pada Program Penatagunaan Tanah yang didukung oleh Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 174.612.000,-. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan Kajian Identifikasi Kegiatan Pemanfaatan Tanah Negara guna mendukung pelayanan penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah negara.

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

   Pada Program yang didukung oleh kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ini dilakukan pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 904.594.000,-. Pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian standar harga barang/jasa. Mulai tahun 2023 kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan dilaksanakan dengan berpedoman pada standar harga barang/jasa pada masing-masing kabupaten/kota.

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sas*ana) Kota Yogyakarta Tahun 2023 terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**7,606,043,900**	**8,375,305,900**					**7,877,243,926**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,790,097,900**	**6,283,504,900**					**6,205,744,806**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**34,645,000**	**34,645,000**					**28,338,000**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	6,070,000	6,070,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	4,776,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,400,000	2,400,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,474,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,600,000	2,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,725,000	1,725,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,925,000	1,925,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,574,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	21 Laporan	21 Laporan	100 %	100 %	16,325,000	16,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	13,934,000
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,600,000	3,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,432,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,834,104,500**	**5,045,521,500**					**5,072,687,040**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	33 Orang/bulan	34 Orang/bulan	100 %	100 %	4,783,023,500	4,994,440,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,024,501,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,312,000	3,312,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	3,312,000	3,312,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	3,312,000	3,312,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	3,400,000
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,265,000	1,265,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,274,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,564,000	1,564,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	37,772,000	37,772,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	34,653,040
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	544,000	544,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	493,000
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**2,222,000**	**2,222,000**					**11,301,000**
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	418,000	418,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,794,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	440,000	440,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	440,000	440,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	308,000	308,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,431,000
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	308,000	308,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,805,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	308,000	308,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,139,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**484,000**	**484,000**					**1,566,000**
1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	484,000	484,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	1,566,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**191,635,250**	**188,610,250**					**209,531,310**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,730,000	4,730,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,300,000
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Paket	2 Paket	100 %	100 %	3,055,250	3,715,250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	6,110,310

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Paket	3 Paket	100 %	100 %	9,700,000	12,475,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	26,350,000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	4,500,000	4,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,640,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	103 Laporan	92 Laporan	100 %	100 %	169,210,000	162,750,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	166,579,000
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	440,000	440,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	2,552,000
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**226,073,950**	**527,018,950**					**329,140,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	28 Unit	64 Unit	100 %	100 %	198,800,000	474,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	216,000,000
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Unit	11 Unit	100 %	100 %	27,273,950	52,818,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	113,140,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**180,814,200**	**185,764,200**					**180,146,256**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	6,500,000	6,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	7,111,500
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,200,000	4,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	4,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	170,114,200	174,914,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	168,834,756
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**320,119,000**	**299,239,000**					**373,035,200**
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	29,100,000	29,100,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	23,500,000
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	129,625,000	108,745,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	99,525,000
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	23 Unit	23 Unit	100 %	100 %	8,575,000	8,575,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	5,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	40,819,000	40,819,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	44,510,200
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	112,000,000	112,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	200,000,000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**1,815,946,000**	**2,091,801,000**					**1,671,499,120**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**											**469,511,000**	**514,911,000**					**431,038,040**
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	234,004,000	234,004,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	236,580,000
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	750 Dokumen	750 Dokumen	100 %	100 %	235,507,000	280,907,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	194,458,040
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**742,000,000**	**1,002,455,000**					**463,120,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	3 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	537,720,000	722,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	260,000,000
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	2 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	204,280,000	280,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	203,120,000
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**390,866,000**	**360,866,000**					**487,883,040**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	239,286,000	239,286,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	336,303,040

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	151,580,000	121,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	151,580,000
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**213,569,000**	**213,569,000**					**289,458,040**
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	38,580,000	38,580,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	38,580,000
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	108,576,000	108,576,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	187,180,000
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	76,00 % 88,67 %	89,61 % 80,07 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	66,413,000	66,413,000			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	89,61 % 80,07 %	63,698,040

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**3,887,618,000**	**3,588,152,000**					**7,341,844,920**
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**248,507,000**	**145,722,000**					**180,302,000**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**248,507,000**	**145,722,000**					**180,302,000**
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kejelasan status hukum pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	248,507,000	145,722,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP	100 %	180,302,000
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**											**1,789,443,000**	**1,706,685,000**					**5,000,000,000**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**1,789,443,000**	**1,706,685,000**					**5,000,000,000**
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya aset/ fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	98,27 %	100 %	2 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,789,443,000	1,706,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	100 %	5,000,000,000
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**											**673,139,000**	**656,539,000**					**699,089,920**
2	**10**	**08**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**											**673,139,000**	**656,539,000**					**699,089,920**
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		85,45 %	6 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	673,139,000	656,539,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	85,45 %	699,089,920
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**											**81,512,000**	**174,612,000**					**68,200,000**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**											**81,512,000**	**174,612,000**					**68,200,000**
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	2 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	81,512,000	174,612,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP	100 %	68,200,000
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**											**1,095,017,000**	**904,594,000**					**1,394,253,000**
2	**10**	**11**	**5.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**											**855,156,000**	**707,333,000**					**1,003,831,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	11	5.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	81,22 % 25,00 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	680,156,000	600,471,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	81,22 % 25,00 %	898,081,000
2	10	11	5.01	04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	81,22 % 25,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	175,000,000	106,862,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	81,22 % 25,00 %	105,750,000
2	**10**	**11**	**5.02**		**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**											**239,861,000**	**197,261,000**					**390,422,000**
2	10	11	5.02	01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Kejelasan status hukum pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	81,22 % 25,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	165,000,000	142,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	81,22 % 25,00 %	315,661,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	11	5.02	02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Kejelasan status hukum pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	25,00 % 25,00 %	81,22 % 25,00 %	2 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %	100 %	74,861,000	55,261,000			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	81,22 % 25,00 %	74,761,000
															TOTAL	**11,493,661,900**	**11,963,457,900**					**15,219,088,846**

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023, masih diperlukan upaya-upaya untuk pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta serta dalam rangka memaksimalkan capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP.
NIP. 19720411 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam menghadapi dinamisasi keadaan di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi dan ketugasan Bidang Trantibumlinmas di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

OCTO NOOR ARAFAT, S.IP.,M.Si
NIP. 19741010 199311 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksananaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan serta masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis OPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2023-2026. Dengan berpedoman pada RPD, selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi pergeseran pagu kegiatan OPD, penambahan program dan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Maka berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
18. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023 sampai dengan Tribulan II

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan .

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pada tahun 2023, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan (laporan dinamis). Selain itu juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil renja setiap tribulan oleh Bappeda Kota Yogyakarta melalui SIM Monitoring dan Evaluasi (SIMONEVA).

Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan setiap tribulan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Capaian realisasi kinerja fisik terhadap target s.d. TW II sebesar 92,92% (minus Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai), sedangkan realisasi keuangan sebesar 73,05% (untuk seluruh komponen belanja) dan 90,50% (minus Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai).

Adapun analisis capaian kinerja sampai dengan Tibulan II atau Semester I Tahun 2023 Satpol PP untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Pada indikator program internal ini belum dapat disajikan data capaian program karena baru dapat terlihat dari Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian dari hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun anggaran 2022 didapatkan nilai SAKIP Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 83,80 dengan predikat A (memuaskan). Dilihat dari perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tribulan II dapat diketahui capaian kegiatan pada program internal, sebagai berikut :

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% telah sesuai dengan target.

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sampai dengan TW II realisasi fisik kegiatan adalah 100% telah sesuai dengan target. Untuk realisasi keuangan tidak/belum dilaksanakan karena kegiatan telah berjalan efektif tanpa harus menggunakan anggaran yang ada.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Deviasi Fisik > 5% terdapat pada beberapa sub kegiatan, diantaranya :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (deviasi 50%)
- Efektifitas koordinasi; kegiatan belum memerlukan dukungan anggaran makan minum rapat; pelaksanaan kegiatan direalisasikan pada bulan berikutnya
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah (deviasi 50%)
  Efektifitas koordinasi; kegiatan belum memerlukan dukungan anggaran makan minum rapat; pelaksanaan kegiatan direalisasikan pada bulan berikutnya
- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (deviasi 50%)
  Efektifitas koordinasi; kegiatan belum memerlukan dukungan anggaran makan minum rapat; pelaksanaan kegiatan direalisasikan pada bulan berikutnya (E-PKP)
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (deviasi 61%)
  Kegiatan tidak dapat SPJ kan karena penempatan kode rekening belanja kurang tepat; Terdapat penyempurnaan Perwal Penjabaran APBD (pergeseran tahap 2) dengan memecah kode rekening pemeliharaan RPU, sewa tanah untuk repeater, dan pembayaran pajak hak penggunaan frekuensi radio)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (deviasi 12%)
  - Pemeliharaan/servis kendaraan roda 2 belum diperlukan karena kondisi beberapa kendaraan masih dalam kategori baik
  - Kurang optimalnya penggunaan BBM kendaraan dinas jabatan
  - Perlu kebijakan pimpinan untuk mengoptimalkan kegiatan servis rutin dan penggunaan BBM kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan (deviasi 11,65%)
  - Pemeliharaan/servis kendaraan operasional belum diperlukan karena kondisi beberapa kendaraan masih dalam kategori baik
  - Kurang optimalnya penggunaan BBM kendaraan dinas operasional
  - Perlu penghitungan secara cermat penggunaan BBM kendaraan dinas operasional sesuai kebutuhan riil dan berdasarkan jadwal/tatakala patroli rutin petugas lapangan sehingga SILPA akhir tahun anggaran BBM tidak terlalu besar atau untuk dapat disesuaikan pada perubahan anggaran 2023.

Untuk keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan TW II di luar belanja gaji dan tunjangan telah terealisasi Rp855.241.774,00 dari target Rp1.308.196.880,00 (tingkat realisasi 65,38%). Terhadap target satu tahun mendapat capaian realisasi keuangan sebesar 39,25%.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Pada pogram utama Satpol PP Kota Yogyakarta ini diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

   a. Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada Capaian kinerja program ini

dengan diukur dengan indikator persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dan dengan menggunakan rumus : Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada terselesaikan dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi x 100%

Sampai dengan Tribulan II 2023 telah terjaring 2297 pelanggaran perda dan perkada dan terselesaikan 2297 pelanggaran. Jumlah 2297 pelanggaran didapat dari pelanggaran perda dan perwal yang terjaring dan terselesaikan secara yustisi dan non yustisi. Dari data tersebut didapat realiasi fisik program sebesar 100% terhadap target TW II 2022 yaitu 100%, sehingga tingkat realisasinya mencapai 100%.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja pada program ini yakni terdapat optimalisasi kinerja pejabat fungsional Satpol PP dan SDM pendukung kegiatan penegakan perda telah mencukupi. Untuk faktor penghambat kinerja diantaranya sarpras pendukung kegiatan penegakan perda yang masih belum dapat terakomodir dan juga banyaknya peraturan daerah yang perlu ditegakkan menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan penegakannya.

b. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan rumus : Jumlah potensi gangguan tibumtranmas yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan tibumtranmas di Kota Yogyakarta. Sampai dengan TW II 2023 ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100% dengan realisasi 100% dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Faktor pendorong keberhasilan kinerja pada program ini adalah terdapat sinergitas petugas di lapangan dengan stakeholder dan instansi vertikal (TNI, Polri) dalam mencegah dan menanggulangi potensi konflik. Beberapa kendala yang dihadapi seringkali karena faktor eksternal yakni keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi konflik yang lebih besar (kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat).

c. Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP

Capaian realisasi pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- Rumusan pengukuran realiasasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan dibagi target jumlah pengkajian peraturan perundang-undangan. Realisasi untuk indikator ini adalah 80% atau capaian komposit kinerja pada indikator ini adalah 20% sesuai dengan target sampai dengan TW II.

$$\text{Rumus :} \quad \frac{\sum \text{hasil kajian peraturan perUUan}}{\sum \text{target peraturan perundang-undangan.}} \times 100\%$$

$$\text{(\%) pengkajian :} \quad \frac{8}{10} \times 100\% = 80\ \%$$

- Rumusan realisasi Bimbingan intelektual/ konseling pegawai didapat dari jumlah pegawai yang melaksanakan bimbingan intelektual/konseling dibagi jumlah target pegawai yang mendapatkan bimbingan/konseling. Realisasi sampai dengan TW II ini telah tercapai 100% sesuai dengan target
- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaan dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaan. Sampai dengan TW II, kegiatan ini belum terlaksana karena tatakal kegiatan dilaksanakan di Tribulan III dan IV. Dalam rangka mengukur capaian kinerja program menggunakan indikator Persentase peningkatan kapasitas Pol PP dengan formulasi penghitungan : (50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas (jumlah komposit dari 25% dikali persentase realisasi anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi anggota yang lulus samapta. Untuk kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan didapatkan realisasi peserta lulus pemahaman peraturan sampai TW II 2023 ini sebesar 94,74% dari target TW II sebesar 95% atau capaian kinerja 99,70% dengan bobot komposit 25% dari sasaran program sehingga didapatkan realisasi komposit sebesar 23,68%.

  Faktor Pendorong keberhasilan kinerja pada program ini antara lain terdapat antusiasme pegawai dalam kegiatan pengembangan kapasitas SDM dan SDM pengkaji peraturan perundang-undangan yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM terkadang terhambat jadwal pelaksanaan kegiatan reguler pegawai

d. Indikator Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dengan rumus Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 kampung, 10 Linmas) dengan bobot komposit 50%; 2. Pembentukan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Pembentukan Sekolah Panca Tertib bobot 5% 3.Penumbuhan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Penumbuhan Sekolah Panca Tertib bobot 5%.
   - Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 kampung terdapat minimal 10 orang petugas linmas. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 4039 personil dengan jumlah kampung di Kota Yogyakarta sejumlah 169 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki petugas linmas telah terpenuhi 100%. Bobot nilai komposit dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50% dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 50%.
   - Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan TW II tahun 2023 telah terbentuk 139 Kampung Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 82,25% yang merupakan hasil dari 139 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari

Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 82,25% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 16,45%.

- Realisasi Pembentukan Pantib for school sampai dengan TW II tahun 2023 telah terbentuk 11 sekolah dari target 15 sekolah pada tahun 2023. Target pembentukan Pantib for School secara akumulasi RPD tahun 2023-2026 sejumlah 30 sekolah, Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Pantib for school yang terbentuk adalah 36,67% yang merupakan hasil dari 11 sekolah panca tertib dibagi target 30 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Pantib for school adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5% dikali 36,67% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 1,83%.
- Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib sampai dengan TW II tahun 2022 telah ditumbuhkan 125 Kampung Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang ditumbuhkan adalah 73,96% yang merupakan hasil dari 125 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 73,96% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 14,79%.
- Realisasi Penumbuhan Pantib for school sampai dengan TW II tahun 2023 telah ditumbuhkan 4 sekolah dari target 10 sekolah di tahun 2023. Target penumbuhan Pantib for School secara akumulasi RPD tahun 2023-2026 sejumlah 30 sekolah Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Pantib for school yang ditumbuhkan adalah 13,33% yang merupakan hasil dari 4 sekolah panca tertib dibagi target 30 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Pantib for school adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5% dikali 13,33% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 0,67%.

  Sampai dengan TW II 2023 telah terealisasi 83,74% dari target 83,67% (tingkat realisasi 100,08%). Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pada program ini adalah tingginya animo masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat (peran serta aktif kegiatan Gerakan Panca Tertib dan keikutsertaan menjadi anggota linmas). Kendala yang terkadang ditemui yakni koordinasi lintas OPD belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Panca Tertib dan juga jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat menyesuaikan agenda dari kampung bersangkutan.

Capaian kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP semester I Tahun 2023 sebesar 100,39% diperoleh dari realisasi 90,49% terhadap target 90,13%. Realisasi sebesar 90,49% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 20% realisasi

peningkatan kapasitas Pol PP , dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada adalah 30% x 100% = 30%
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah 30% x 100% = 30 %
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah 20% x 69,68% = 13,74%
- Komposit realiasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah 20% x 83,74% = 26,75%

Untuk keuangan pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sampai dengan TW II ini telah terealisasi Rp9.418.936.487,00 dari target Rp12.782.085.000,00 (tingkat realisasi 73,69%). Terhadap target satu tahun mendapat capaian realisasi keuangan sebesar 38,21%.

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja s.d Tribulan II Tahun Anggaran 2023 secara naratif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar Rp43.134.829.332,00 yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sejumlah Rp16.302.656.050,00 serta Belanja Operasional sejumlah Rp26.832,173.282,00.

Realisasi anggaran Satpol PP Kota Yogyakarta s.d TW II 2023 sebesar Rp18.654.971.199,00 atau sebesar 68,98% dari target s.d. TW II (termasuk belanja gaji dan tunjangan) atau 43,25% dari total anggaran satu tahun.

- Deviasi Keuangan secara umum dikarenakan beberapa hal, diantaranya :
  - Kegiatan bersifat kondisional dan insidentil serta menyesuaikan kebutuhan riil, seperti belanja pemeliharaan sarpras, perjalanan dinas, jasa surat menyurat
    - Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, misal terkait dengan anggaran makan minum rapat koordinasi belum diperlukan karena pemenuhan pekerjaan sudah dapat tercapai melalui koordinasi di luar forum rapat
    - Menyesuaikan dengan capaian pelaksanaan fisik kegiatan, seperti pada kegiatan iringan korsik yang pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target karena mengikuti agenda ceremonial/upacara di Pemkot Yogyakarta; Pembayaran honor petugas sidang tipiring tidak optimal karena menyesuaikan jadwal sidang PN, beberapa perda bersifat ultimum remidium atau mengutamakan pemberian sanksi administratif pada pelanggar perda sehingga berdampak pada menurunnya volume pelanggaran perda yang disidangkan di pengadilan
    - Terdapat dinamisasi kondisi pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran tidak memungkinkan direalisasikan sesuai target, seperti pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai yang rencananya peserta dari unsur masyarakat (terdapat anggaran uang transport) dialihkan sasaran peserta dari internal pegawai Satpol PP.
    - Pelaksanaan kegiatan tertunda karena faktor teknis dan non teknis, seperti belanja kamera yang spesifikasi dan harga di E-katalog tidak sesuai dengan pagu anggaran

belanja sehingga harus mencari spesifikasi yang masuk kriteria anggaran; Belanja cetak pada Seksi Pembinaan SDM tidak sesuai target karena padatnya agenda kegiatan lainnya

- SPJ kegiatan diproses pada bulan berikutnya (pemeliharaan gedung)

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah koordinasi internal setiap minggu, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi. Faktor penghambat pelaksanaan kinerja sasaran diantaranya pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan pihak ketiga, kegiatan insidentil, serta dinamisasi keadaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan; Kebijakan terkait penatausahaan keuangan yang mempengaruhi serapan anggaran tidak optimal (misal terdapat penyempurnaan/revisi perwal penjabaran APBD).

Dalam rangka meminimalisasi kendala/ hambatan, maka perlu dan telah diambil langkah tindakan sebagai berikut :

1) melaksanakan kegiatan secara optimal dengan ketersediaan sarpras pendukung yang ada, sehingga tidak terjadi deviasi baik keuangan maupun fisik pada tribulan berikutnya
2) Koordinasi lebih intensif dengan pihak penyedia dan stekeholder lain untuk menunjang optimalisasi realisasi fisik kegiatan dan keuangan
3) Penyesuaian ulang tatakala kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan
4) Penataan kembali tatakala kegiatan yang menjadi prioritas. Kegiatan yang belum terlaksana segera dilaksanakan sesuai tatakala untuk memaksimalkan realisasi fisik dan penyerapan anggaran
5) Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/ program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
6) Optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
7) Perlu perencanaan yang lebih matang dan komprehensif dalam penentuan target fisik, tatakala kegiatan, dan perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman pada kegiatan prioritas sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal
8) Strategi proses penyampaian SPJ kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pihak ketiga perlu dievaluasi kembali.
9) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
10) Penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya dengan melihat trend maupun kecenderungan pada tahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada tribulan awal tidak mengalami deviasi yang cukup signifikan, khususya terkait dengan penyusunan kontrak lebih awal dengan penyedia jasa pihak ketiga

Evaluasi terhadap hasil renja Satpol PP Tahun 2023 sampai dengan Tribulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	96.05 %
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87.62 Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat**	**Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas dengan bobot komposit 50% 2. jumlah kampung panca tertib yg terbentuk dengan bobot komposit 20 % 3. Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk bobot komposit 5 % 4. jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkandengan bobot komposit 20% 5. Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan dengan bobot komposit 5 %**	**100,00 %**	**0,00**	**91,53 %**	**0,00**	**86,24 %**	**24.653.335.000,00**	**83.67% %**	**12.783.292.000,00**	**83.74% %**	**9.418.936.487,00**	**100.08%**	**73,68%**					**Ka. Bidang Perlindungan Masyarakat**	
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	**Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	**(25% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan + 25% Bimbingan Intelektual/Konseling SDM Pol PP) + (25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang memahami peraturan ditambah 25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang lulus samapta)**	**97,50 %**	**0,00**	**97,09 %**	**0,00**	**97,00 %**	**0,00**	**67%**	**0,00**	**68.68.%**	**0,00**	**102,51%**	**0,00%**					**Ka. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM**	
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	**Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%**	**99,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Ka. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (P3U)**	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota								**17.232.717.000,00**		**9.380.059.000,00**		**6.180.694.370,00**		**65.89%**						

		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah DiniPembinaan dan PenyuluhanPelaksanaan PatroliPengamanandan Pengawalan				0,00		0,00		10.049.917.000,00	48,07%	4.550.482.000,00	48,07%	4.242.001.870,00	100,00%	93,22%						
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		0 Kasus		0 Kasus		170 Kasus		0,00%		48,07%		0,00%						
		2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				0,00		0,00		159.019.000,00	43,00%	67.150.000,00	43,00%	66.062.026,00	100,00%	98,38%						
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		0 Kasus		0 Kasus		36 Kasus		43,00%		43,00%		100,00%						
		3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		55.245.000,00	58,00%	31.555.000,00	58,00%	31.555.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		24 Dokumen		58,00%		58,00%		100,00%						
		4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				0,00		0,00		5.174.597.000,00	79,04%	4.007.678.000,00	23,29%	1.198.311.103,00	29,47%	29,90%						
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0		0		0		0,00%		23,29%		0,00%						
		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				0,00		0,00		321.192.000,00	45,00%	143.692.000,00	45,00%	117.562.410,00	100,00%	81,82%						
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 kali		0 kali		19 kali		0,00%		45,00%		0,00%						
		6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0,00		0,00		1.322.747.000,00	42,00%	554.502.000,00	42,00%	525.201.961,00	100,00%	94,72%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan		0 dokumen		0 dokumen		156 dokumen		0,00%		42,00%		0,00%						
		7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada				0,00		0,00		150.000.000,00	17,00%	25.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		17,00%		0,00%		0,00%						
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									**7.413.618.000,00**		**3.403.233.000,00**		**3.238.242.117,00**		**95.15%**						
		8	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				0,00		0,00		15.790.000,00	56,00%	8.755.000,00	56,00%	8.380.000,00	100,00%	95,72%						
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		56,00%		56,00%		100,00%						
		9	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				0,00		0,00		7.007.234.000,00	50,56%	3.196.470.000,00	49,14%	3.071.790.397,00	97,19%	96,10%						
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		49,14%		0,00%						
		10	Penanganan atas				0,00		0,00		390.594.000,00	51,00%	198.008.000,00	49,00%	158.071.720,00	96,08%	79,83%						

			Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		51,00%		49,00%		96,08%							
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSKabupaten/Kota								**7.000.000,00**		**0,00**		**0,00**		**NAN%**							
		11	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			0,00		0,00		7.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**82,27%**	**76,97%**						
									Predikat kinerja							**Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja**		**0,00**		**0,00**		**18.481.494.332,00**		**12.221.266.746,00**		**9.236.034.712,00**	**0,00%**	**75,57%**							
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**40.853.000,00**		**17.402.750,00**		**14.385.468,00**		**82.66%**							
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		2.065.000,00	81,00%	1.657.500,00	81,00%	1.462.000,00	100,00%	88,21%							
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		81,00%		81,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		959.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		533.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00		0,00		315.500,00	20,00%	62.500,00	20,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		20,00%		20,00%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		171.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		35.800.750,00	43,50%	15.431.750,00	43,50%	12.923.468,00	100,00%	83,75%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		43,50%		43,50%		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		1.008.750,00	25,00%	251.000,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		25,00%		25,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**16.305.976.550,00**		**10.878.161.866,00**		**8.380.792.938,00**		**77.04%**							

		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		16.302.656.050,00	67,00%	10.877.469.866,00	67,00%	8.380.792.938,00	100,00%	77,05%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		174 Orang/bulan		67,00%		67,00%		100,00%								
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		503.500,00	88,00%	441.000,00	88,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		88,00%		88,00%		100,00%								
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		503.500,00	10,00%	50.000,00	10,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		10,00%		10,00%		100,00%								
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		503.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		491.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		414.000,00	10,00%	40.000,00	10,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		10,00%		10,00%		100,00%								
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		414.000,00	40,00%	161.000,00	40,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		40,00%		40,00%		100,00%								
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		491.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**7.500.000,00**		**5.625.000,00**		**2.542.000,00**		**45.19%**						
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	50,00%	578.000,00	50,00%	46,24%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		50,00%		50,00%								
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	31,28%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		50,00%		50,00%								
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.250.000,00	50,00%	625.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	64,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.250.000,00	50,00%	625.000,00	50,00%	391.000,00	100,00%	62,56%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		20	Penatausahaan Barang Milik				0,00		0,00		1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	31,28%						

			Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		50,00%		50,00%								
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.250.000,00	50,00%	625.000,00	50,00%	391.000,00	100,00%	62,56%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**197.340.000,00**		**196.670.000,00**		**192.302.750,00**		**97.78%**							
		22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		196.000.000,00	100,00%	196.000.000,00	100,00%	191.724.750,00	100,00%	97,82%							
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		2 paket		0,00%		100,00%		0,00%								
		23	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.340.000,00	50,00%	670.000,00	50,00%	578.000,00	100,00%	86,27%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**366.114.232,00**		**204.640.230,00**		**188.217.207,00**		**91.97%**							
		24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		9.660.500,00	100,00%	9.660.500,00	100,00%	9.660.500,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		8 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		102.703.752,00	55,00%	56.222.000,00	55,00%	52.752.125,00	100,00%	93,83%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		3 paket		55,00%		55,00%		100,00%								
		26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		19.675.230,00	100,00%	19.675.230,00	100,00%	19.654.000,00	100,00%	99,89%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		20 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		95.304.750,00	45,00%	42.622.500,00	45,00%	40.100.500,00	100,00%	94,08%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		14 paket		45,00%		45,00%		100,00%								
		28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.880.000,00	50,00%	1.440.000,00	50,00%	1.440.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		135.890.000,00	56,00%	75.020.000,00	56,00%	64.610.082,00	100,00%	86,12%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		88 Laporan		56,00%		56,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**281.768.150,00**		**153.719.500,00**		**94.158.146,00**		**61.25%**							
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		7.400.000,00	52,00%	3.810.000,00	52,00%	2.750.000,00	100,00%	72,18%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		52,00%		52,00%		100,00%								
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		75.400.150,00	73,00%	54.300.000,00	73,00%	716.896,00	100,00%	1,32%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		73,00%		73,00%		100,00%								
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		198.968.000,00	49,98%	95.609.500,00	49,98%	90.691.250,00	100,00%	94,86%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		13 Laporan		49,98%		49,98%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.281.942.400,00**		**765.047.400,00**		**363.636.203,00**		**47.53%**							
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan				0,00		0,00		142.710.000,00	52,00%	73.374.000,00	37,00%	38.846.753,00	71,15%	52,94%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 unit		0 unit		18 unit		52,00%		37,00%		71,15%								

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																		
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00		0,00		1.011.282.400,00	59,00%	587.548.400,00	47,24%	316.089.450,00	80,07%	53,80%						
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	0 unit		0 unit		57 unit		0,00%		47,24%		0,00%							
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		47.950.000,00	51,00%	24.125.000,00	29,00%	8.700.000,00	56,86%	36,06%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit		0 unit		76 unit		51,00%		29,00%		56,86%							
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		0,00		80.000.000,00	100,00%	80.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**91,94%**	**53,87%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**43.134.829.332,00**		**25.004.558.746,00**		**18.654.971.199,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**89,52%**	**74,61%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi internal secara rutin, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Kegiatan yang sifatnya kondisional dan insidentil terkadang mempengaruhi serapan anggaran tidak optimal (kegiatan penunjang/pemeliharaan (peralatan dan kendaraan)) - Beberapa kegiatan terkendala kebijakan dan peraturan dari pusat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi capaian kinerja fisik dan serapan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. agar dapat mengisikan target dan realisasi pada indikator program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. 2. agar dapat mengisikan faktor pendorong dan faktor penghambat pada indikator program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: agar pada saat melakukan proses penyusunan perencanaan dapat mempertimbangkan kondisi atau trend/kecenderungan realisasi pada tahun sebelumnya.

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.
NIP. 19741010199311001

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 19720306199603100 4

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp43.134.829.332,00 (Empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan DBH CHT.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan, terdapat dinamisasi kebijakan perencanaan dengan adanya penambahan satu program yang diampu oleh Satpol PP yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais) pada Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dengan Sub Kegiatan Pembinaan Jagawarga yang anggarannya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan. Dalam perkembangannya, Kelompok Jagawarga secara organisasi telah terbentuk di Kota Yogyakarta sejumlah 170 Kelompok Jagawarga di setiap kampung. Satpol PP Kota Yogyakarta bertugas melaksanakan fasilitasi pengukuhan/ pelantikan Kelompok Jagawarga berdasarkan amanat di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jagawarga.

Total Pagu Anggaran Perubahan Renja 2023 Satpol PP sejumlah Rp46.827.663.732,00 (Empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga tujuh ratus tiga puluh dua rupiah). Mengalami kenaikan pagu sejumlah Rp3.692.834.400,00 dari Anggaran Murni 2023 (termasuk penambahan penghitungan gaji dan kegiatan fasilitasi jagawarga dengan sumber dana dari BKK/DAIS). Dinamisasi pengurangan dan penambahan pagu Operasional sejumlah Rp2.864.768.400,00 (tidak termasuk tambahan gaji dan BKK DAIS).

Dinamisasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.26.905.987.550,00

   Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp19.099.049.550,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanandan Pengawalan.

   Terdapat penyesuaian pengurangan anggaran kegiatan pada belanja Honorarium Petugas Operasional-Instansi Vertikal/Mitra (Pengamanan Shelter Covid19), serta penambahan anggaran Honorarium Pengamanan Umum (cipta kondisi pra pemilu dan Nataru)

2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

   Terdapat penambahan belanja jasa narasumber kegiatan konseling SDM pegaawai dan makan minum rapat

4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Penambahan volume belanja KTA Linmas sejumlah 1000 buah; Pengadaan PDL linmas 350 stel, penyesuaian makan dan minum rapat; penyesuaian volume hari (murni 334 hari menjadi 366 hari) dan satuan SHBJ (murni Rp60.000, menjadi Rp80.000) untuk uang piket linmas termasuk piket pengamanan depo sampah (murni 240 hari menjadi 332 hari); Penambahan kegiatan pengamanan TPS sampah (7 titik selama 92 hari); pengadaan sarpras penunjang ketugasan linmas (mobil patroli linmas, peralatan dan perlengkapan rescue linmas dan ketugasan lapangan linmas)

5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

   Terdapat pengurangan anggaran honorarium pelatih korsik, instruktur kesamaptaan dan honor iringan korsik menyesuaikan kebutuhan riil; penambahan volume kegiatan iringan korsik dan tes kesamaptaan

6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

   Rasionalisasi anggaran pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM); Sampai dengan TW II tidak terdapat WN yang mendapat ganti kerugian akibat dari penegakan perda dan perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp7.799.938.000,00 terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

      Penambahan volume kegiatan pemahaman peraturan bidang cukai sejumlah 2 kegiatan; Sumber dana DBH CHT

2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

   Penambahan volume kegiatan operasional hukum terpadu dan belanja sarpras penunjang ketugasan penegakan perda dan perkada (tangga, tang potong, galah, kain penutup reklame ilegal, stiker tanda pelanggaran perda, perlengkapan pakaian anti huru-hara, senjata perlindungan diri dsb)

3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

   Rasionalisasi honor tim kebijakan optimalisasi penegakan perda (wawali), pengurangan volume kegiatan dan honor petugas sidang tipiring menyesuaikan kebutuhan riil

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp7.000.000,00

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Satpol PP. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satpol PP sebesar Rp19.787.556.182,00

   Adapun kegiatan pendukung untuk program ini antara lain :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

         Penyesuaian penghitungan gaji dan tunjangan ASN dari BPKAD
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD
      8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      2) Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD
      3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rekonsiliasi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penambahan belanja sarpras penunjang ketugasan kesekretariatan Satpol PP (printer, scanner, lemari, kursi rapat, AC, speaker, mikrophone, TV, Tenda Pleton, kamera, dsb)
4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penambahan volume belanja penggandaan dan cetak box arsip
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pengurangan anggaran pemeliharaan RPU
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Rasionalisasi anggaran Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 2 menyesuaikan dengan kebutuhan riil
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Penambahan belanja pemeliharaan dan renovasi gedung (Ruang Kasat dan Pemeliharaan Bangunan Gedung)

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais) pada Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dengan Sub Kegiatan Pembinaan Jagawarga.

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**43,134,829,332**	**46,693,543,732**				**40,485,182,400**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**18,481,494,332**	**19,787,556,182**				**19,059,046,584**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**40,853,000**	**40,853,000**				**36,545,132**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	2,065,000	2,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	2,066,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	959,000	959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	321,400
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	533,000	533,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	178,600
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	315,500	315,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	321,400
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	171,000	171,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	178,600
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	35,800,750	35,800,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	32,479,132
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,008,750	1,008,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,000,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16,305,976,550**	**16,999,922,550**					**16,931,646,000**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	174 Orang/bulan	174 Orang/bulan	100 %	100 %	16,302,656,050	16,996,602,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	16,928,276,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	503,500	503,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	512,000
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	503,500	503,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	512,000
1 05 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	503,500	503,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	512,000
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	491,000	491,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	500,000
1 05 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	414,000	414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	417,000
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	414,000	414,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	417,000
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	491,000	491,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	500,000
1 05 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**7,500,000**	**7,500,000**					**7,500,000**
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada Satpol PP	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,250,000
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**197,340,000**	**336,297,500**					**197,580,000**
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersusunnya laporan penilaian kinerja pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Paket	6 Paket	100 %	100 %	196,000,000	334,957,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	196,240,000
1 05 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya laporan penilaian kinerja pegawai	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,340,000	1,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	1,340,000
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**366,114,232**	**686,286,332**					**453,327,452**
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	9,660,500	9,660,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	9,662,200
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	3 Paket	15 Paket	100 %	100 %	102,703,752	415,025,852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	128,703,752
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	20 Paket	20 Paket	100 %	100 %	19,675,230	19,675,230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	19,676,500
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	14 Paket	15 Paket	100 %	100 %	95,304,750	103,154,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	95,255,000
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,880,000	2,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	2,880,000
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	88 Laporan	88 Laporan	100 %	100 %	135,890,000	135,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	197,150,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**281,768,150**	**251,768,000**					**211,768,000**
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,400,000	7,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	7,400,000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	75,400,150	45,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	5,400,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	13 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	198,968,000	198,968,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	198,968,000
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,281,942,400**	**1,464,928,800**					**1,220,680,000**
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	18 Unit	18 Unit	100 %	100 %	142,710,000	125,696,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	154,850,000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	57 Unit	57 Unit	100 %	100 %	1,011,282,400	1,011,282,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	737,880,000
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	76 Unit	76 Unit	100 %	100 %	47,950,000	47,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	47,950,000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Unit	3 Unit	100 %	100 %	80,000,000	280,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai	280,000,000
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**24,653,335,000**	**26,905,987,550**					**21,426,135,816**
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**17,232,717,000**	**19,099,049,550**					**11,323,891,504**
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	170 Kasus	170 Kasus	100 %	100 %	10,049,917,000	9,916,157,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	7,538,721,696

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Perkada		
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	36 Kasus	36 Kasus	100 %	100 %	159,019,000	159,049,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	165,686,272
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	24 Dokumen	25 Dokumen	100 %	100 %	55,245,000	59,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	95,426,000
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	12 Dokumen	13 Dokumen	100 %	100 %	5,174,597,000	7,243,513,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	1,746,740,408

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	100 Orang	150 Orang	100 %	100 %	321,192,000	347,808,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	278,301,132
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	156 Dokumen	156 Dokumen	100 %	100 %	1,322,747,000	1,322,747,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	1,351,515,996
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	150,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	147,500,000
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**7,413,618,000**	**7,799,938,000**					**10,095,244,312**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi		86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	6 Laporan	9 Laporan	100 %	100 %	15,790,000	20,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	12,990,000
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	12 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	7,007,234,000	7,420,014,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	9,749,403,464
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	12 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	390,594,000	359,194,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	332,850,848
1 05 02 2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**											**7,000,000**	**7,000,000**					**7,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme Penyidik PNS (PPNS)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,24 % 100 % 97,00 % 99,00 %	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	7,000,000	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	87,30 % 100 % 97,00 % 100,00 %	7,000,000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**0**	**134,120,000**					**134,120,000**
2 22 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**0**	**134,120,000**					**134,120,000**
2 22 08 5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**0**	**134,120,000**					**134,120,000**
2 22 08 5.07 12	Pembinaan Jagawarga	Persentase Kelompok Jaga Warga yang dikukuhkan dan didampingi	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Terlaksananya pengukuhan dan pembinaan kelompok Jagawarga			100 %		1400 Orang		170 kelompok	0	134,120,000	Dana Keistimewaan		Persentase Kelompok Jaga Warga yang dikukuhkan dan didampingi	100 %	134,120,000
											TOTAL	**43,134,829,332**	**46,827,663,732**					**40,619,302,400**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini memuat dinamisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satpol PP Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja;
3. Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023;
5. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023.

Yogyakarta, 2023

Kepala

OCTO NOOR ARAFAT, S.IP.,M.Si.
NIP. 19731010 199311 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 587101
EMAIL : dpkp@jogjakota.go.id Faximile (0274) 587101
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya telah mengalami perubahan karena beberapa perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan tentang perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

Namun demikian, adanya perubahan kebijakan tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran. Sedangkan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Walikota tersebut diatas adalah

a. perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub urusan kebakaran;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan sub urusan kebakaran

Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 hasil penyesuaian kebijakan ini dalam rangka mendukung keterpaduan dan keselarasan antar Program dan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun muatan program dan kegiatanberdasarkan capaian kinerja tahun anggaran sebelumnya dan usulan dari masyarakat hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sedangkan rencana pelaksanaannya secara

swakelola maupun mendorong partisipasi masyarakat dan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. PeraturanPemerintahNomor 18 tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai :

   a. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program.

b. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2022
c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja DinasPemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini adalah:

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pencegahandanpenanggulangankebakaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
1.1 Landasan Hukum
1.2 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*
2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*
2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*
2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*
2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah yaitu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, melaksanakan SPM Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Adapun penerima layanan dasar tersebut adalah yang menjadi korban kebakaran atau terdampakkebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasarpelayanan penyelamatan dan evakuasi korbankebakaran.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikitmemuat:

a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawankebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pascakebakaran.

Sedangkan mutu pelayanan dasar yang diamanatkan dalam Permendagri ini adalah,

a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warganegara yang terdampak kebakaran.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dirumuskan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan 2023 - 2026 adalah Program Pencegahan Kebakaran dan Program Penanggulangan Kebakaran, yang kedua program tersebut merupakan program pelayanan eksternal. Adapun program pendukungnya yang bersifat internal antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pencapaian kinerja fisik dan keuangan masing-masing program pada Dinas Kebakaran Tahun 2020secara ringkas sebagai berikut :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Berdasarkan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022

No.	Nama Program	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	92,64%
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	91,39%

2.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	%	98.80	100	101,2 %

Capaian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	%	99,40	100	100,6 %

Perbandingan tabel di atas, pada tahun 2021 dan tahun 2022 capaian indikator telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,2 % dan 100,6 %.

3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatanyang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Analisa Capaian Sasaran Strategis

Tolok ukur capaian sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran PD	Target	Perhitungan
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30% edukasi proteksi kebakaran + 40 % response time	98.80%	((0,3*100)+(0,3*100%)+(0,4*100) = 100 %

Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran PD	Target	Perhitungan
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30% edukasi proteksi kebakaran + 40 % response time	99.40%	((0,3*100)+(0,3*100%)+(0,4*100) = 100 %

Kinerja sasaran Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat, dengan indikator Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	100	99,40	100	100,6	99,40	100,6

Dari tabel 3.4 tersebut diatas, nampak bahwa target sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 99,40 %. Artinya indeks ketahanan (kemampuan) dan keselamatan kebakaran oleh masyarakat dalam

menghadapi ancaman bahaya kebakaran dan upaya penyelamatan secara mandiri sebesar 99,40 %.

3.1.2 Analisa Capaian Indikator Sasaran Strategis

Tabel 3.5
Anggaran Belanja Langsung per Program

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	1. Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran 1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 3. Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 1.702.248.500
	2. Persentase edukasi proteksi kebakaran	98%		Rp. 490.100.000
	3.. Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%		Rp. 3.718.891.240
	4. Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100%		
	5. Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia(operasi darurat non kebakaran)	100%		Rp. 57.500.000

Keterangan :

Pengertian prosentase target berdasarkan formulasi perhitungan capaian kinerja program pencegahan kebakaran adalah

1. Target 100% rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu adalah jumlah pemohon rekomendasi proteksi kebakaran yang telah memenuhi syarat administrasi diproses secara tepat waktu minimal 100% dari jumlah pemohon yang memenuhi syarat administrasi
2. 100 % edukasi proteksi kebakaran adalah jumlah permohonan dari wilayah yang dilayani untuk edukasi tentang pencegahan kebakaran minimal 100% dari jumlah pemohon

1.2.2.1. Kinerja Program Pencegahan Kebakaran

Program pencegahan kebakaran merupakan program upaya yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegiatan pendukungnya yaitu

1) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu, dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 100 %. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
   a) Pemberian rekomendasi proteksi bagi masyarakat yang akan mendirikan bangun bangunan di wilayah Kota Yogyakarta. Adapun target penyelesaian adalah 3 (hari) dengan dokumen persyaratan lengkap seperti gambar atau design bangunan guna diidentifikasi titik rawan kebakaran sesuai tipe atau klas bangunan. Sedangkan pengawasan dilakukan pada saat uji kelayakan sebelum bangunan difungsikan atau digunakan.

Tabel 3.6

Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Proteksi Kebakaran Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	2021	18	12	23	17	14	24	7	9	19	24	25	13	205

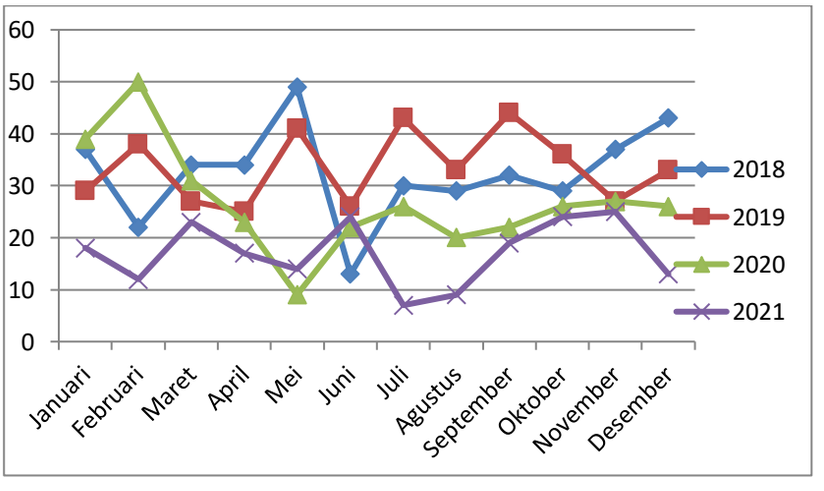
Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Proteksi Kebakaran Tahun 2022

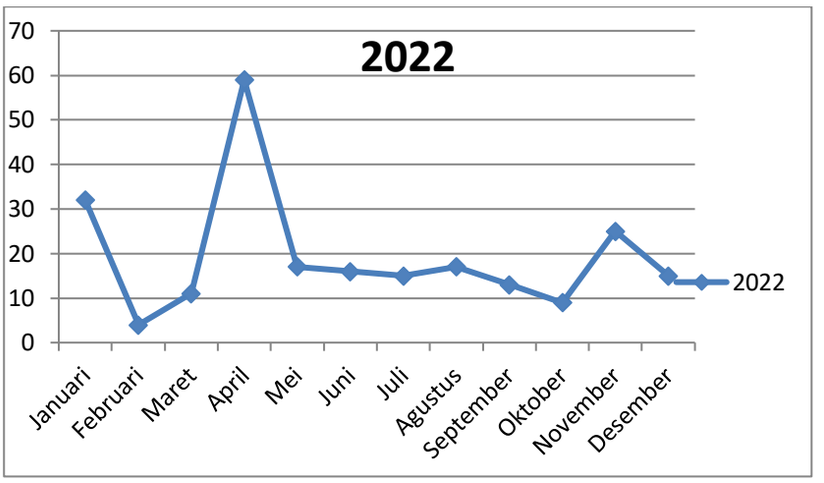
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jumlah
Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	32	4	11	59	17	17	15	17	13	8	25	15	233

Terdapat jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran sebanyak 233 yang telah dilayani. Dibandingkan tahun sebelumnya bahwa jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran mengalami kenaikan, dari 205 pemohon di tahun 2021. Hal ini karena adanya kondisi pandemi covid 19, namun demikian masih ada kesadaran masyarakat dalam hal proteksi bahaya kebakaran pada bangunan yang didirikaannya.

Grafik 1

Perbandingan jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran tahun 2018 s.d tahun 2022





b) Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran tidak terlepas dari upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan penyuluhan dan edukasi bahaya kebakaran pada masyarakat. Kinerja pelayanan penyuluhan dan edukasi bahaya kebakaran selama kurun waktu 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 3.7

Jumlah Penyuluhan Proteksi Kebakaran Tahun 2021

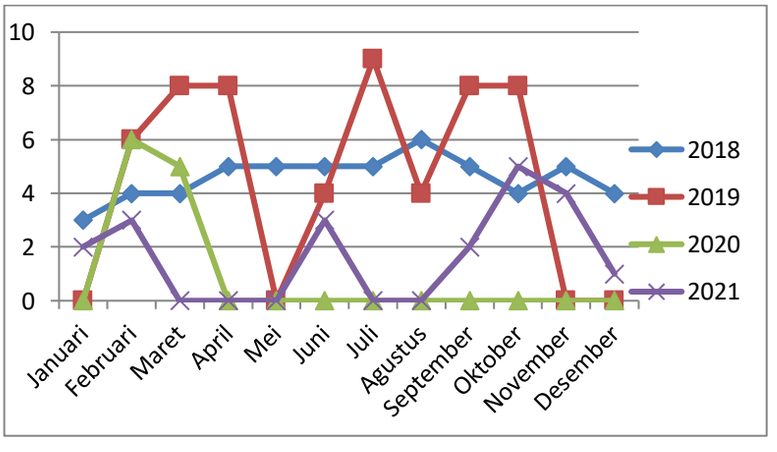
Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	2021	2	3	0	0	0	3	0	0	2	5	4	1	20

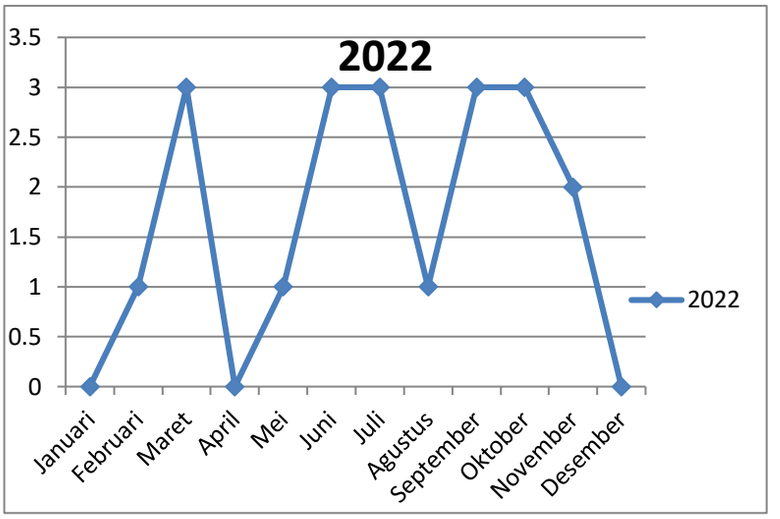
Jumlah Penyuluhan Proteksi Kebakaran Tahun 2022

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	2022	0	1	3	0	1	3	3	1	3	3	2	0	20

Terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap kegiatan penyuluhan proteksi bahaya kebakaran di titik rawan bencana di tahun 2022 karena adanya kondisi pandemi covid 19, sehingga untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini maka kegiatan penyuluhan dikurangi dan dibatasi sehingga pelaksanaannya hanya dilaksanakan di tingkat kemantren saja sebanyak 20 kali penyuluhan.

Grafik 2 Perbandingan capaian kinerja penyuluhan proteksi bahaya kebakaran di titik rawan bencana per bulan tahun 2018 s.d tahun 2022





Disamping kegiatan penyuluhan yang dihentikan, juga penghentian kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran di masyarakat yang pada awalnya bertujuan masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta mampu mendeteksi dini penanganan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam sampai di tempat kejadian. Adapun data kinerja kegiatan simulasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.8
Simulasi Bahaya Kebakaran di Wilayah Rawan Kebakaran Tahun 2021

No	Lokasi	Pelaksanaan	Ket
1	Kecamatan Ngampilan, Kelurahan Ngampilan	30 November 2021	

Simulasi Bahaya Kebakaran di Wilayah Rawan Kebakaran Tahun 2022

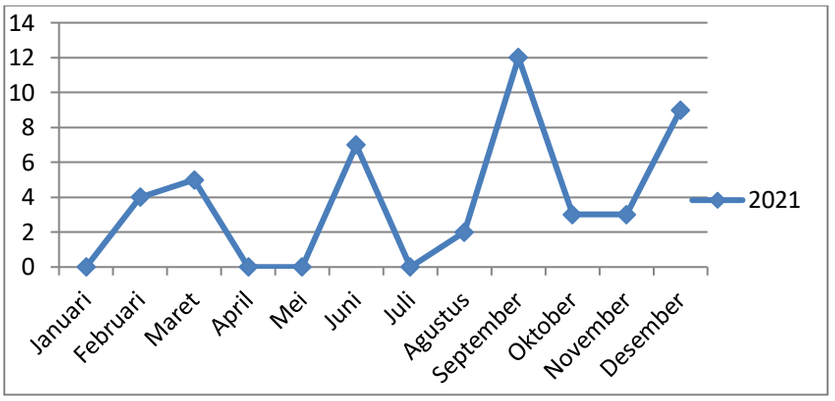
No	Lokasi	Pelaksanaan	Ket
1	Kecamatan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kumendaman	18 November 2022	

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pencegahan bahaya kebakaran adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan kelembagaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dengan tujuan membantu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini, antara lain melaksanakan pengawasan, pemeliharaan alat proteksi kebakaran di lingkungannya, evakuasi atau penyelamatan terhadap korban kebakaran dan/atau harta bendanya, pemberian informasi akses ketersediaan air atau hidran air dan akses jalan masuk ke tempat kejadian, melakukan pengamanan aset dan wilayah terdampak. Adapun pada tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah membentuk kelembagaan Redkar di 45 Kelurahan se–Kota Yogyakarta dengan jumlah masing – masing kelurahan minimal 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Sedangkan di tingkat

Kemantren telah di bentuk koordinator Redkar di 14 Kemantren se-Kota Yogyakarta. Pembentukan kelembagaan Redkar sebagaimana tabel berikut ini.

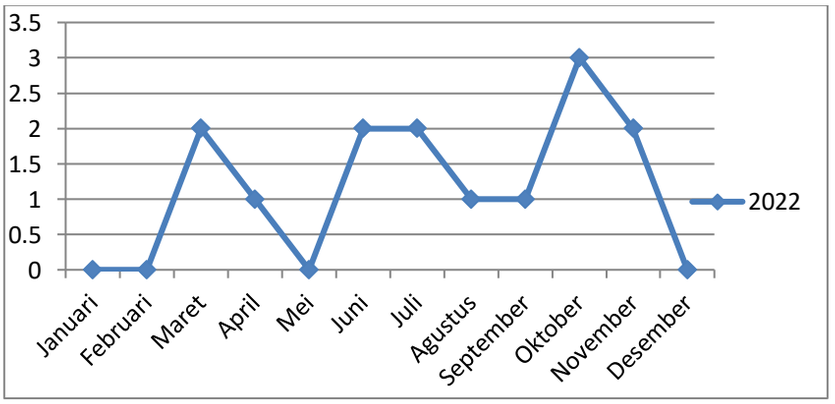
Tabel 3.9
Banyaknya Jumlah Kelembagaan Redkar di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Kelembagaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	2021	0	4	5	0	0	7	0	2	12	3	3	9	45



Banyaknya Jumlah Kelembagaan Redkar di Kota Yogyakarta Tahun 2022

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah Kelebagaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	2022	0	0	2	1	0	2	2	1	1	3	2	0	14



Bahwa serangkaian kegiatan penyuluhan, simulasi penanganan kebakaran dan pelatihan bagi satuan relawan pemadam kebakaran (Redkar) merupakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dengan target sasaran warga masyarakat kelompok usia dewasa dan orang tua. Adapun untuk sasaran warga masyarakat kelompok usia anak-anak juga dilakukan dengan pengenalan dini akan bahaya kebakaran dan penanganannya, khususnya anak sekolah PAUD dan TK, dengan tujuan lebih mengenalkan kepada anak-anak tentang bahaya kebakaran dan petugas pemadam kebakaran serta peralatan yang digunakan. Namun demikian, kegiatan ini

juga terhenti karena kondisi pandemi Covid – 19. Capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.10

Jumlah Edukasi Proteksi Kebakaran Bagi Anak Didik Yang Dilayani Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

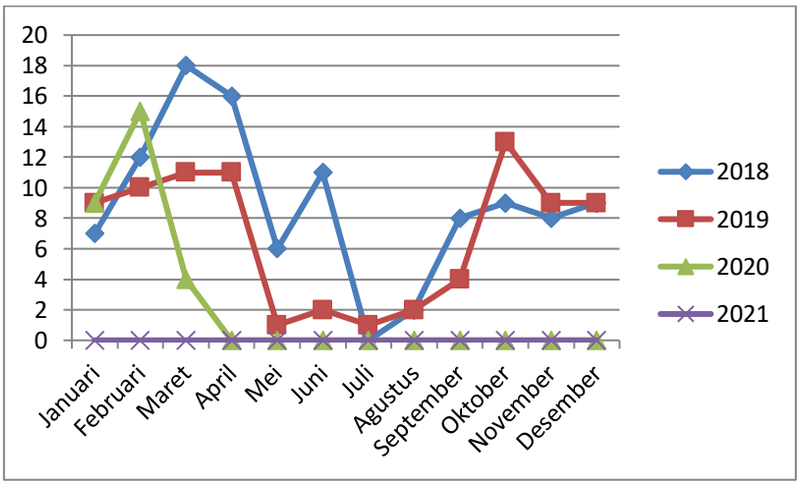
Jumlah Edukasi Proteksi Kebakaran Bagi Anak Didik Yang Dilayani Tahun 2022

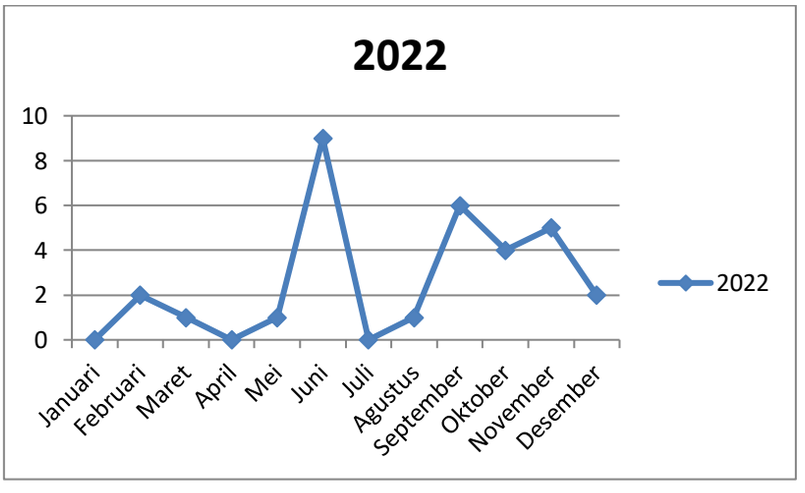
Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apl	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2022	0	2	1	0	1	9	0	1	6	4	5	2	31

Kinerja pelayanan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani Tahun 2022 ini terhenti karena kondisi covid 19 serta adanya Peraturan yang membatasi pembelajaran secara Tatapmuka dan dengan pembelajaran secara daring sehingga Kinerja pelayanan edukasi kepada anak sekolah PAUD dan TK dihentikan.

Grafik 3

Perbandingan capaian kinerja jumlah edukasi proteksi bahaya kebakaran Bagi anak didik per bulan tahun 2018 s.d tahun 2022





c) Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan pencegahan kebakaran merupakan kegiatan penyediaan akses hidran air yang berlokasi di kampung terutama kampung padat hunian yang berpotensi terhadap keterbatasan akses masuk kendaraan pemadam kebakaran dan ketersediaan air. Penyediaan hidran kampung ini didasarkan pada dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan konstruksi hidran aktif di wilayah perkampungan Kota Yogyakarta, terdapat 18 titik yang direncanakan. Adapun pelaksanaannya secara bertahap yaitu tahun 2015 s.d 2017 berlokasi :

a) Kampung Pathuk, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan
b) Kampung Kauman, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.
c) Kampung Prawirodirjan, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan

Untuk pembangunan di kampung prawirodirjan belum mencakup seluruh wilayah mengingat penganggarannya terbatas selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2015 s.d 2016, namun demikian pembangunan hidran ini sudah dapat difungsikan.

Kendala utama pembangunan hidran aktif sebagai upaya pencegahan disamping keterbatasan anggaran adalah sulitnya lahan, sumber air dan ketersediaan daya listrik. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan kebakaran tetap dilakukan adalah dengan pembangunan jaringan hidran kering yang pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan di 6 titik yaitu

a) Kampung Basen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede
b) Kampung Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan
c) Kampung Gemblakan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
d) Kampung Corkrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
e) Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen
f) Kampung Karangwaru, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, sebagai kelanjutan pembangunan tahun 2018 berlokasi di :

a) Kampung Basen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede
b) Kampung Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan
c) Kampung Ronodigdayan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan
d) Kampung Corkrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
e) Kampung Pingit, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis
f) Kampung Karangwaru, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo

Jika pembangunan hidran kering kampung di tahun anggaran 2020 tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan penyebaran virus covid 19, maka pada tahun anggaran 2021, pembangunan hidran kering kampung sudah dapat dilaksanakan kembali, dengan titik pembangunan hidran kering kampung berada di lokasi Kampung Ngadiwinatan dan Purwodiningratan di Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta. Dan pada tahun 2022 ini, pembangunan hidran kering kampung berada di lokasi Kampung Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan

1.2.2.2. Evaluasi Kinerja Program Pencegahan Kebakaran

Tabel 3.11

Data Kinerja Indikator 1 Program Pencegahan Kebakaran tahun 2021 dan 2022

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran Yang Diproses Tepat Waktu	jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	39	50	31	23	9	22	26	20	22	26	27	26	321
	Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	39	50	31	23	9	22	26	20	22	26	27	26	321
	Prosentase capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jumlah
Prosentase rekomendasi proteksi kebakaran yang di proses tepat waktu	Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	32	4	11	59	17	17	15	17	13	8	25	15	233
	Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang di proses tepat waktu	32	4	11	59	17	17	15	17	13	8	25	15	233
	Presentasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mendasarkan pada tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja indikator 1 program pencegahan kebakaran berupa persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu sebesar 100% telah terpenuhi. Artinya bahwa target pelayanan pemberian rekomendasi proteksi bahaya kebakaran terhadap jumlah pemohon yang diproses tepat waktu minimal 100% pada prakteknya dapat terlayani seluruhnya.

Tabel 3.12

Data Kinerja Indikator 2 Program Pencegahan Kebakaran tahun 2021 dan 2022

Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Penyuluhan proteksi kebakarandi titik rawaan bencana kebakaran	2021	2	3	0	0	0	3	0	0	2	5	4	1	20

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tahun 2022

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana alam	2022	0	1	3	0	1	3	3	1	3	3	2	0	20

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apl	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2022	0	2	1	0	1	9	0	1	6	4	5	2	31

Mendasarkan pada tabel 3.12 diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja indikator 2 program pencegahan kebakaran berupa persentase edukasi proteksi kebakaran sebesar 100% juga telah terpenuhi. Artinya bahwa target pelayanan pemberian edukasi kepada pemohon dari penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/SD) terhadap jumlah pemohon telah dilayani minimal 100%.

Tabel 3.13
Perhitungan indikator 1 Program Pencegahan Kebakaran
Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran Yang Diproses Tepat Waktu
Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%	95%	(347/ 347)x100%= 100%	96%	(389/389)x100%= 100%	97 %	(402/402)x100 % = 100%	98%	(321/321)x 100%=100%	99%	(205/205)x 100%=100%

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja	
	2022	
	Target	Realisasi
(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%	100%	(233/233)x 100%=100%

Selanjutnya, hasil olah data dan informasi yang dihimpun dari kegiatan penyuluhan, dan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik tahun 2022 menunjukkan bahwa pencapaian rencana target kinerja indikator 2 program pencegahan berupa prosentase edukasi proteksi kebakaran sebesar 100 % juga dapat terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisa data berdasarkan formula indikator program bahwa persentase yang dicapai sebesar 100 %

Tabel 3.14
Perhitungan Indikator 2 Program Pencegahan Kebakaran Tahun 2017 sd 2022

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%	95%	(50% x (50/ 50)) + (50% x (66/67)) x 100% = **99,25 %**	96%	(50%x(55/55)) + (50%x(105/107)) x 100% = **99,53**	96%	50%x(55/55)) + 50%x(82/82)) X100% = **99,53**	97%	50%x(11/11)) + 50%x(28/28)) X100% = **99,53**	97%	50%x(11/11)) + 50%x(28/28)) X100% = **99,53**

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja	
	2022	
	Target	Realisasi
50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%	100%	50%x(20/20)) + 50%x(31/31)) X100% = **100**

Capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut berdasarkan olah data yang ada menunjukkan adanya keberhasilan dalam perumusan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan capaian program dipengaruhi oleh upaya terus menerus dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menghadapi permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat pencegahan dan proteksi bahaya kebakaran.

1.2.2.3. Kinerja Program Penanganan Kebakaran

Program Penanganan Kebakaran merupakan penanganan kejadian kebakaran dan upaya penyelamatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Adapun indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegiatan pendukungnya yaitu Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit.

Bahwa dalam rangka mencapai respon time pemadam kebakaran tersebut upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran, dan peningkatan mutu sarana-prasarana kebakaran melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penanganan Kebakaran

Penanganan kejadian kebakaran dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang memerlukan bantuan. Adapun data kejadian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.15
Data Kejadian Kebakaran di Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian					
		2022	2021	2020	2019	2018	2017
1.	Umbulharjo	15	11	13	17	10	13
2.	Gedongtengen	2	0	0	4	7	5
3.	Jetis	2	3	2	8	7	5
4.	Gondokusuman	3	2	5	7	9	11
5.	Gondomanan	4	2	1	4	2	3
6.	Kotagede	1	5	3	2	4	3
7.	Kraton	-	1	0	0	2	0
8.	Ngampilan	2	5	1	4	3	1
9.	Tegalrejo	6	4	5	12	7	10
10.	Danurejan	4	2	6	0	3	0
11.	Mantrijeron	8	4	2	2	2	1
12.	Mergangsan	-	8	2	3	5	1
13.	Pakualaman	-	1	1	4	1	4
14.	Wirobrajan	-	2	2	2	2	1
Jumlah		56	50	43	69	64	58

Tabel 3.16

Data Penyebab Kejadian Kebakaran di Wilayah Kota Yogyakarta

No	Penyebab/Sumber Kebakaran	Jumlah Kejadian					
		2022	2021	2020	2019	2018	2017
1.	Hubungan Arus Pendek	27	17	23	27	34	46
2.	Kebocoran Gas	11	7	4	6	5	11
3.	Tungku	-	0	0	4	2	0
4.	Puntung Rokok	-	0	0	0	3	1
5.	Human Error	9	12	13	19	17	0
6.	Belum Diketahui	9	14	3	13	3	9
Jumlah		56	50	43	69	64	67

Meskipun kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menurun, namun yang perlu diwaspadai adalah penyebab terbanyak disebabkan oleh hubungan arus pendek (listrik).

Disamping penanganan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan upaya penyelamatan yang berasal dari permohonan dan/atau pengaduan masyarakat antara lain operasi tangkap tawon, evakuasi hewan piaraan yang terjebak di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan lain-lain, yang pada prinsipnya keadaan mendesak non kebencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera dilakukan penyelamatan ataupun evakuasi.

Dengan banyaknya kejadian kebakaran dan permohonan/pengaduan dari masyarakat maka diperlukan kesiapsiagaan secara fisik, ketrampian dan keahlian dari para petugas pemadam kebakaran. Mengacu pada target respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- pelatihan rutin bagi petugas operasional, dalam rangka peningkatan ketrampilan SDM.
- pengiriman petugas Damkar ke diklat-diklat pemadam kbakaran bersertifikasi sebagai peningkatan profesionalitas dan kualitas SDM.
- keikusertaan dalam forum komunikasi Damkar se DIY sebagai upaya peningkatan kerjasama dan wewenang wilayah dalam hal pemadaman kebakaran.

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebakaran

Kegiataan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran merupakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran sebagai pendukung petugas pemadam kebakaran antara lain mobil pemadam kebakaran, alat pelindung diri (APD), tabung pemadam dll

Tabel 3.17

Data Sarana Prasarana Kebakaran

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kendaraan Pemadam Kebakaran	12	12	13	13	10	11
2	Kendaraan Pemadam Kebakaran Roda Dua	-	-	-	-	-	2
3	Pos Pemadam Kebakaran	2	2	2	2	2	2

1.2.2.4. Evaluasi Program Kinerja Program Penanganan Kebakaran

Indikator Program Penanggulangan Kebakaran yaitu "Persentase Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran Maksimum 15 menit" merupakan standar pelayanan minimal yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Adapun banyaknya kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta dapat diatasi secara cepat mulai penerimaan pengaduan/berita dari masyarakat sampai ke tempat kejadian.

Adapun data kejadian bencana kebakaran yang dapat ditanggulangi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun 2022

No.	Tahun	Capaian Target Kinerja	
		Target	Realisasi
1	2020	100%	(43/43)x100%=100%
2	2021	100%	(50/50)x100%=100%
3	2022	100%	(56/56)x100%=100%

Keberhasilan capaian program dipengaruhi oleh upaya terus menerus dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melakukan pelatihan secara rutin, peningkatan pengetahuan melalui diklat bersertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran, dan pemeliharaan sarana-prasarana kebakaran secara berkala.

1.3. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan total anggaran belanja perubahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 sejumlah Rp. 14.955.589.929,00 dari pagu anggaran perubahan sejumlah Rp. 16.263.827.767,00 atau sebesar 91,96 %. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, realisasi anggaran belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut kelompok belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19

Realisasi anggaran belanja menurut kelompok belanja

Tahun Anggaran	JENIS BELANJA					
	Anggaran			Realisasi		%
2022	16.263.827.767,00			14.955.589.929,00		91,96
2021	13.005.290.785,00			11.508.072.462,31		88,49
	Tidak Langsung			Langsung		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%

2020	2.979.124.773,00	2.427.004.906,50	81,47	3.669.178.000,00	3.540.214.269,00	96,49
2019	3.564.360.434,00	3.456.318.030,00	96,96	9.109.253.000,00	8.342.817.157,29	91,58
2018	3.401.846.693,00	3.302.278.110,00	97,07	4.748.302.775,00	4.355.576.879,40	91,73

Apabila ditinjau dari realisasi anggaran per program berdasarkan penetapan kinerja sebagai upaya pencapaian indikator kunci utama (IKU) maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Realisasi Anggaran Belanja Program Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Nama Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	7	8	9	10
1	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Program Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	16.263.827.767,00	14.955.589.929,00	91,96
		Persentase edukasi proteksi kebakaran				
		Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit				

Capaian kinerja program pencegahan kebakaran 100 % terealisasi sesuai dengan alokasi anggaran perubahan 2022 karena adanya realokasi prioritas anggaran untuk penanggulangan penyebaran virus covid 19, sedangkan capaian program penanggulangan kebakaran kurang dari 95 % disebabkan sisa anggaran pemeliharaan sarana prasarana kebakaran berupa kendaraan operasional petugas pemadam kebakaran yang kondisinya masih baik dan belum memerlukan penggantian suku cadang (spare part), Belanja Bahan Bakar Minyak terdapat perbedaan harga pasaran dengan harga di DPA, serta adanya kebijakan pengetatan keuangan (*tight money policy*) guna menjaga ketersediaan kas daerah dalam penanganan pandemi covid 19

Berikut diuraikan capaian program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka pelayanan internal tahun 2022 terdiri dari 2 Program dan 9 Kegiatan, sbb:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5 (lima) kegiatan.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 4 (empat) kegiatan.

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran Belanja Program Pelayanan Internal

No	Program / Kegiatan	Prosentase Serapan Anggaran				
		2022	2021	2020	2019	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			96,84	94,50	93,98
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			77,78	87,53	83,30
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	58,33	100

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			100	93,31	98,80
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,64	91,69			
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	91,39	84,72			

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

3.3 Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran dalam rangka mencapai target kinerja sasaran strategis, dengan proporsi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp. 16.263.827.767 terhadap total anggaran pemerintah Kota Yogyakarta (APBD) Tahun 2022 adalah Rp. 2.141.124.899.206 maka besaran anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya 0,75%. Maka dari itu tetap optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki meskipun terbatas, dan peningkatan keahlian dan latihan secara rutin bagi petugas pemadam kebakaran

3.4. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2022 ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meneruskan inovasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2018 yaitu Sistem Jaringan Hidran Kering Kampung atau “Si Jarik Kampung” dan mengusulkan inovasi pada tahun 2022 yaitu Sistem Digitalisasi Hidran dan Bak Tandon “SHIBA”

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta telah meluncurkan SICAKRA (Sigap cepat atasi kebakaran) yaitu sepeda motor roda dua yang telah di lengkapi peralatan peadam kebakaran yang sangat canggih dengan teknologi tekini. SICAKRA merupakan inovasi reaksi cepat tanggap atasi kebakaran khususnya kebakaran mobil dan area kebaran kecil di perkampungan padat penduduk.

Rabu Pintar adalah merupakan inovasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta yang bertujan untuk bertukar ilmu tentang semua ketugasan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kegiatan Rabu Pintar adalah inovasi yang di mulai pada tahun 2022 dan sampai sekarang. Rabu pintar merupakan ajang bertukar inforasi dan pengetahuan dari narasumber sudah berkopeten di bidangnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah, Sub Urusan Kebakaran yang dilaksanakan oleh

DinasKebakaranKota Yogyakarta belum sepenuhnya terakomodir dalam program dan kegiatantahun 2022

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Bahaya Kebakaran di Perkotaan, dinyatakan bahwa untuk mengupayakan kesiapan instansi pemadam kebakaran dan instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, dan masyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di dalam kota diperlukan manajemen proteksi kebakaranperkotaan (MPKP). Adapun dalam rangka perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu suatu wilayah yang terdiri atas kelompok-kelompok hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

Tabel 2.19

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2022

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km^2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km^2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

WMK ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (travel distance) dan dipenuhinya waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan bahan-bahan berbahaya (B3) pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan

Adapun capaian kinerja dari SPM yang ditetapkan yaitu waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 menit, sebagai berikut

Tabel 2.20

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (*Response Time Rate*) ≤ 15 menit	Kejadian	49	63	71	64	69	32
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	49	63	71	64	69	53
3.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100	60
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	11	11	11	11	11	13,4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, telah ditetapkanPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Adapun secara kelembagaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatandipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai 1 Sekretariatdengan 2 (dua) Sub Bagian dan 2 (dua) Bidang, masing-masingbidangterdiriatas 2 (dua) Seksi. Bidang tersebut adalah Pencegahan Kebakaran dan OperasionalPenanggulangan Kebakaran dan Penyelamatans.

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DinasPemadam Kebakaran dan Penyelamatanantara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan 4 Sektor Pemadam Kebakaran (SPK) dan 12 unit Pos Pemadam Kebakaran (berdasarkan Kajian UGM tahun 2014). Dengan kepadatan penduduk dan tingkat risiko terjadinya kebakaran yang tinggi maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta mengusulkan untuk menambah Pos Pemadam Kebakaran.
2. Renovasi Bak Tandon tersebar di 16 titik untuk memudahkan akses mobil Pemadam Kebakaran. Untuk mempercepat akses pengisian mobil Pemadam Kebakaran maka diusulkan untuk membangun Bak Tandon di titik yang tersebar.
3. Penambahan personil Pemadam Kebakaran. Dengan ditambahnya Pos Pemadam Kebakaran maka diusulkan pula penambahan personil Pemadam Kebakaran.
4. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini. Dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

5. Penanganan kebakaran kampung dengan hidran kering. Untuk mencegah kebakaran menjadi besar maka di bangun hidran kering di beberapa kampung.
6. Optimalisasi proteksi Kebakaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan PD dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja dan Target Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator	Target Tahun 2023
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,10
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	65,00
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	95,0
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)	0,390
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,23%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	Angka Kriminalitas	600
		Jumlah pelanggaran Perda	1.225
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,47 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,44 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,66 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	72%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,50%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,56
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	44,41
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Tabel 2.21

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Yogyakarta

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indiator	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
46	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,40	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum PD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan kebakaran sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2023, berdasarkanprioritasdananalisakebutuhan, sebagian belum dapat terakomodasi karena menyesuaikankemampuananggarandaerah.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulanganbencana disajikan dalam tabel 2.22

Tabel 2.22
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Yogyakarta

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
RS6209c3a56525e	14-02-2022	GM deddy jati setyawan	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	pemasangan Hydran karena kondisi kepadatan penduduk dan kondisi gang yang sangat sempit sehingga tidak dapat dilalui Damkar ketika ada bencana kebakaran	Warga RT 41 Gandekan, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	4 titik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 lokasi Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 4 lokasi Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di Tampung, Untuk pemasangan hidran harus mengusulkan DED terlebih dahulu untuk wilayah ini karena belum ada DED, Penyuluhan bisa dilaksanakan akan tetapi tidak menggunakan hidran kering kampung (lokasi tidak ada hidran) Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 1500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS6209c429d83d6	14-02-2022	GM deddy jati setyawan	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.03] Simulasi kebakaran	permohonan diadakan Pelatihan cara menyikapi bencana kebakaran ringan	warga RT 42 Gandekan, Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	200 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 200 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 200 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran berbasis kampung. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 250 orang Koefisien : 250 orang Anggaran : 25000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS6204b2147b2f5	10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Kurangnya ketrampilan bagi anggota Satlaskar sehingga perlu diadakan kegiatan sarasehan penanggulangan kebakaran.	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Pandeyan	50 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 50 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan tersebut. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 20 orang Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
RS6204d1eb7f471	10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.01] Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	Pelatihan untuk relawan supaya terampil	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	1 paket	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan tersebut. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 20 orang Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS62075af34f27b	12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.03] Simulasi kebakaran	Simulasi kebakaran Trampil menggunakan alat apabila terjadi bencana	Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	20 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran berbasis kemantren.kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 30 orang Koefisien : 30 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS62075b3a4bc98	12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan Kebakaran Trampil menangani musibah kebakaran	Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	20 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran berbasis kemantren.kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 30 orang Koefisien : 30 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
RS620a73feea164	14-02-2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.01] Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	Pelatihan penggunaan hidran kering	Basen RT 13 rW 04, Kota Yogyakarta	Kotagede	Purbayan	20 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan tersebut berbasis kemantren.kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 30 orang Koefisien : 30 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS620df19f9a063	17-02-2022	Nurcahyo Nugroho	PKS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Kurangnya ketrampilan bagi anggota Satlaskar sehingga perlu diadakan kegiatan sarasehan penanggulangan kebakaran.	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	30 Orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 30 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 30 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran berbasis kampung. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 250 orang Koefisien : 250 Orang Anggaran : 25000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS620496ab26f2f	10-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.03] Simulasi kebakaran	Permintaan untuk dilaksanakannya Simulasi kebakaran yang melibatkan beberapa OPD terkait (Dinas Perhubungan, BPBD, Polisi, Koramil dll.)	Di wilayah RW 07 Baciro Kecamatan Gondokusuman., Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	1 kali	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan. Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan Simulasi kebakaran yang melibatkan beberapa OPD terkait dengan berbasis kampung. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 250 orang Koefisien : 1 kali Anggaran : 25000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
RS620834b8bb35d	13-02-2022	Suryani	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.01] Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	masih kurang kemampuan relawan Satlakar dalam mengatasi bencana kebakaran di wilayah	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	1 Kegiatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan skil untuk redkar berbasis kemantren.kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 60 orang Koefisien : 60 orang Anggaran : 8000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Alenia ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan RI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan RI Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Adapun untuk OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta termasuk dalam jenis bencana alam, sedangkan urusan pemerintahan yang diserahkan menurut peraturan perundangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib.

Urusan wajib yang diserahkan tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Dengan demikian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi nya berkaitan dengan urusan wajib tersebut diatas.

Dalam hal menjalankan kebijakan nasional untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang secara khusus pelayanan dasarnya adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

3.2 Tujuan danSasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan sasaran stratejis

merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*Performance Plan*). Adapun tujuan stratejis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yaitu mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran stratejis Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

SasaranStrategis	IndikatorKinerjaHasil/Keluaran	Target 2023
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100%
	Persentase edukasi proteksi kebakaran	100%
	Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2023 disusun dengan mengacu RKPD dan Renstra PD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang telah dilakukan review berkaitan ketentuan revitalisasi stuktur program kegiatan dan sub kegiatan serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Dalam tahun 2023 Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Sub Kegiatan Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyusunan Perenanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
d. Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri
f. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
b. Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

b. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2023 dijabarkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 (**Sebelum Pembahasan KUA/PPAS**)

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**12,322,622,361**	**2,425,110,000**	**0**	**0**	**14,747,732,361**	**12,327,789,059**	**6,353,696,000**	**0**	**0**	**18,681,485,059**	**3.933.752.698**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7,559,369,161**	**93,244,000**	**0**	**0**	**7,652,613,161**	**7,651,267,659**	**107,090,000**	**0**	**0**	**7,758,357,659**	**105.744.498**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**34,140,000**	**0**	**0**	**0**	**34,140,000**	**20,540,000**	**0**	**0**	**0**	**20,540,000**	**(13.600.000)**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		5,880,000	0	0	0	5,880,000	3,960,000	0	0	0	3,960,000	(1.920.000)	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		6,600,000	0	0	0	6,600,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000	(4.200.000)	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4,560,000	0	0	0	4,560,000	2,360,000	0	0	0	2,360,000	(2.200.000)	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Pemadam		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4,560,000	0	0	0	4,560,000	2,360,000	0	0	0	2,360,000	(2.200.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kebakaran dan Penyelamatan)															
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4,560,000	0	0	0	4,560,000	3,760,000	0	0	0	3,760,000	(800.000)	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		6,380,000	0	0	0	6,380,000	4,100,000	0	0	0	4,100,000	(2.280.000)	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6,375,707,400**	**0**	**0**	**0**	**6,375,707,400**	**6,688,076,379**	**0**	**0**	**0**	**6,688,076,379**	**312.368.979**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		6,360,127,400	0	0	0	6,360,127,400	6,676,226,379	0	0	0	6,676,226,379	316.098.979	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4,400,000	0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Pemadam		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4,400,000	0	0	0	4,400,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	(1.400.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kebakaran dan Penyelamatan)															
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1,600,000	0	0	0	1,600,000	600,000	0	0	0	600,000	(1.000.000)	
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1,980,000	0	0	0	1,980,000	1,350,000	0	0	0	1,350,000	(630.000)	
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1,600,000	0	0	0	1,600,000	900,000	0	0	0	900,000	(700.000)	
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**13,484,200**	**0**	**0**	**0**	**13,484,200**	**8,957,700**	**0**	**0**	**0**	**8,957,700**	**(4.526.500)**	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		840,000	0	0	0	840,000	840,000	0	0	0	840,000	0	
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pemadam		Kota Yogyakarta,		3,020,200	0	0	0	3,020,200	2,067,700	0	0	0	2,067,700	(952.500)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kebakaran dan Penyelamatan)		Umbulharjo, Muja Muju													
1	05	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1,740,000	0	0	0	1,740,000	800,000	0	0	0	800,000	(940.000)	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		3,300,000	0	0	0	3,300,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	(1.500.000)	
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		2,304,000	0	0	0	2,304,000	1,260,000	0	0	0	1,260,000	(1.044.000)	
1	05	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		2,280,000	0	0	0	2,280,000	2,190,000	0	0	0	2,190,000	(90.000)	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**3,720,000**	**0**	**0**	**0**	**3,720,000**	**2,520,000**	**0**	**0**	**0**	**2,520,000**	**(1.200.000)**	
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		3,720,000	0	0	0	3,720,000	2,520,000	0	0	0	2,520,000	(1.200.000)	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**204,244,500**	**2,500,000**	**0**	**0**	**206,744,500**	**217,560,000**	**1,870,000**	**0**	**0**	**219,430,000**	**12.685.500**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		6,382,000	0	0	0	6,382,000	4,680,000	0	0	0	4,680,000	(1.702.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	1,870,000	0	0	1,870,000	(630.000)	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		20,322,500	0	0	0	20,322,500	14,900,000	0	0	0	14,900,000	(5.422.500)	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4,140,000	0	0	0	4,140,000	3,480,000	0	0	0	3,480,000	(660.000)	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		173,400,000	0	0	0	173,400,000	194,500,000	0	0	0	194,500,000	21.100.000	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**347,981,557**	**90,744,000**	**0**	**0**	**438,725,557**	**308,097,280**	**105,220,000**	**0**	**0**	**413,317,280**	**(25.408.277)**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		9,000,000	0	0	0	9,000,000	3,840,000	0	0	0	3,840,000	(5.160.000)	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Yogyakarta,		131,261,557	90,744,000	0	0	222,005,557	117,194,395	105,220,000	0	0	222,414,395	408.838	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	(PAD)	Umbulharjo, Muja Muju													
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		205,620,000	0	0	0	205,620,000	184,962,885	0	0	0	184,962,885	(20.657.115)	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**580,091,504**	**0**	**0**	**0**	**580,091,504**	**405,516,300**	**0**	**0**	**0**	**405,516,300**	**(174.575.204)**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		21,730,900	0	0	0	21,730,900	18,713,300	0	0	0	18,713,300	(3.017.600)	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		162,873,500	0	0	0	162,873,500	115,297,000	0	0	0	115,297,000	(47.576.500)	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		195,487,104	0	0	0	195,487,104	171,506,000	0	0	0	171,506,000	(23.981.104)	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		200,000,000	0	0	0	200,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	(100.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**4,763,253,200**	**2,331,866,000**	**0**	**0**	**7,095,119,200**	**4,676,521,400**	**6,246,606,000**	**0**	**0**	**10,923,127,400**	**3.828.008.200**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**3,943,454,200**	**2,223,166,000**	**0**	**0**	**6,166,620,200**	**3,944,472,400**	**5,559,906,000**	**0**	**0**	**9,504,378,400**	**3.337.758.200**	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		785,500,000	1,223,000,000	0	0	2,008,500,000	615,500,000	1,438,000,000	0	0	2,053,500,000	45.000.000	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		2,509,954,000	0	0	0	2,509,954,000	2,622,781,000	990,000	0	0	2,623,771,000	113.817.000	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		278,175,200	0	0	0	278,175,200	302,756,400	0	0	0	302,756,400	24.581.200	
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		17,325,000	12,992,000	0	0	30,317,000	17,325,000	12,992,000	0	0	30,317,000	0	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Dinas Pemadam		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		18,320,000	987,174,000	0	0	1,005,494,000	18,320,000	4,101,924,000	0	0	4,120,244,000	3.114.750.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kebakaran dan Penyelamatan)															
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		334,180,000	0	0	0	334,180,000	367,790,000	6,000,000	0	0	373,790,000	39.610.000	
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**				**250,356,000**	**0**	**0**	**0**	**250,356,000**	**263,856,000**	**659,000,000**	**0**	**0**	**922,856,000**	**672.500.000**	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		130,156,000	0	0	0	130,156,000	158,656,000	659,000,000	0	0	817,656,000	687.500.000	
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		120,200,000	0	0	0	120,200,000	105,200,000	0	0	0	105,200,000	(15.000.000)	
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**				**26,320,000**	**3,200,000**	**0**	**0**	**29,520,000**	**26,320,000**	**3,200,000**	**0**	**0**	**29,520,000**	**0**	
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		26,320,000	3,200,000	0	0	29,520,000	26,320,000	3,200,000	0	0	29,520,000	0	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**				**543,123,000**	**105,500,000**	**0**	**0**	**648,623,000**	**441,873,000**	**24,500,000**	**0**	**0**	**466,373,000**	**(182.250.000)**	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Dinas Pemadam		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		389,323,000	24,500,000	0	0	413,823,000	389,323,000	24,500,000	0	0	413,823,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kebakaran dan Penyelamatan)															
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		153,800,000	81,000,000	0	0	234,800,000	52,550,000	0	0	0	52,550,000	(182.250.000)	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Peragkat Daerah Perubahan Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja PD Tahunan merupakan jabaran dari Renstra PD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja PD memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja PD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta merupakan hasil analisis dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Yogyakarta, 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410101993111001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalaman perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja dapat diubah mengikuti perubahan dalam RKPD. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatana prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Dokumen Renja Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Perubahan SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pada tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Renja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan Renja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023, sebagai salah satu bagian dari RKPD Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan capaian kinerja program dan kegiatan, pemenuhan program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam Renja 2023 serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun tujuannya adalah:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2023;
2) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Realisasi Program Renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
s/d Triwulan II

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:
1. Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat
   Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana : 87,33 Skala 1-100

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	87.33 Skala 0-100
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana**	**(60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu) dikali 100**	**84,56 %**	**0,00**	**0,00 0**	**0,00**	**77,44 %**	**5.825.634.250**	**47,69% %**	**3.885.430.250**	**47,69% %**	**2.763.909.055**	**100%**	**71,14%**					**Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan**	
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	**(Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi**	

				Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	**(Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNA) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi**	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									**712.574.750**		**456.559.750**		**92.437.350**		**20.25%**						
		1	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		712.574.750	66,06%	456.559.750	34,48%	92.437.350	52,19%	20,25%						
				Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		34,48%		0,00%						
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									**3.767.263.500**		**2.787.980.500**		**2.077.001.000**		**74.50%**						
		2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		424.362.500	62,55%	264.712.500	53,74%	188.025.658	85,92%	71,03%						
				Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		0 orang		0 orang		425 orang		0,00%		53,74%		0,00%						
		3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.658.545.000	79,44%	1.308.623.000	74,77%	1.074.680.480	94,12%	82,12%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		0,00%		74,77%		0,00%						
		4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				0,00		0,00		1.556.024.000	72,74%	1.127.757.000	70,01%	774.039.862	96,25%	68,64%						
				Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		0 Kawasan		0 Kawasan		10 Kawasan		0,00%		70,01%		0,00%						
		5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRCBencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		128.332.000	70,00%	86.888.000	70,00%	40.255.000	100,00%	46,33%						
				Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		0 Orang		0 Orang		100 Orang		70,00%		70,00%		100,00%						
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									**1.345.796.000**		**640.890.000**		**594.470.705**		**92.76%**						
		6	PencarianPertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.135.296.000	48,00%	473.040.000	48,00%	455.673.000	100,00%	96,33%						
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		0 Orang		0 Orang		38 Orang		0,00%		48,00%		0,00%						
		7	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		210.500.000	80,00%	167.850.000	80,00%	138.797.705	100,00%	82,69%						
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0 Orang		0 Orang		100 Orang		80,00%		80,00%		100,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**89,78%**	**66,77%**						
										Predikat kinerja						**Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**5.409.051.645**	**A Nilai**	**4.318.873.446**	**A Nilai**	**2.681.146.425**	**100%**	**62,08%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**293.362.000**		**251.807.000**		**21.638.000**		**8.59%**						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		225.830.000	97,37%	220.195.000	18,55%	7.618.000	19,05%	3,46%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		0,00%		18,55%		0,00%						
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.400.000	50,00%	1.700.000	50,00%	0	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						

		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		64.132.000	46,64%	29.912.000	46,64%	14.020.000	100,00%	46,87%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		25 Laporan		46,64%		46,64%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.554.962.300**		**2.803.608.016**		**1.795.198.266**		**64.03%**							
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		3.507.556.300	80,00%	2.781.928.016	80,00%	1.779.589.266	100,00%	63,97%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ Bulan		0 Orang/ Bulan		26 Orang/Bulan		80,00%		80,00%		100,00%								
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		9.180.000	55,56%	5.100.000	55,56%	1.610.000	100,00%	31,57%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		55,56%		55,56%		100,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		38.226.000	44,00%	16.580.000	44,00%	13.999.000	100,00%	84,43%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		44,00%		44,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**283.073.079**		**224.018.064**		**106.252.309**		**47.43%**							
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		3.340.000	100,00%	3.340.000	100,00%	1.392.500	100,00%	41,69%							
				Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		8 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		92.252.015	84,00%	68.400.000	84,00%	13.368.500	100,00%	19,54%							
				Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		8 Paket		84,00%		84,00%		100,00%								
		9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		3.968.264	100,00%	3.968.264	100,00%	2.835.000	100,00%	71,44%							
				Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		7 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		31.109.800	89,00%	23.734.800	89,00%	10.129.500	100,00%	42,68%							
				Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		89,00%		89,00%		100,00%								
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.556.000	89,00%	2.028.000	89,00%	330	100,00%	16,27%							
				Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		89,00%		89,00%		100,00%								
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		149.847.000	96,00%	122.547.000	96,00%	78.196.809	100,00%	63,81%							
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		96,00%		96,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**486.531.800**		**311.107.800**		**211.954.288**		**68.13%**							
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	100,00%							
				Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		22.200.000	88,00%	16.350.000	88,00%	7.134.616	100,00%	43,64%							
				Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		88,00%		88,00%		100,00%								
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		461.331.800	76,00%	291.757.800	76,00%	201.819.672	100,00%	69,17%							
				Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		16 laporan		76,00%		76,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**791.122.466**		**728.332.566**		**546.103.562**		**74.98%**							
		16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		126.740.000	98,00%	112.650.100	98,00%	48.868.400	100,00%	43,38%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		22 Unit		98,00%		98,00%		100,00%								
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		205.851.000	89,00%	170.151.000	89,00%	67.241.600	100,00%	39,52%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		17 Unit		89,00%		89,00%		100,00%								
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		22.000.000	87,00%	19.000.000	87,00%	9.633.000	100,00%	50,70%							
				Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		15 Unit		87,00%		87,00%		100,00%								
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		436.531.466	97,71%	426.531.466	97,71%	420.360.562	100,00%	98,55%							
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		97,71%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja								**95,74%**	**48,98%**							

Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**							
Total anggaran dari seluruh program		**11.234.685.895**		**8.204.303.696**		**5.445.055.480**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**94,14%**	**66,37%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai tatakala kegiatan, kecuali pekerjaan rehab rekon talud Gambiran dikarenakan menunggu kesepakatan mekanisme rehab rekon antara pemkot dan balai besar sungai (terkait kewenangan pemeliharaan sungai). Sampai dengan TW II telah terlaksana kegiatan: 1) Evakuasi 70 jiwa; 2) Rehab rekon pemberian bantuan material non permanen terhadap 7 rumah yang terdampak bencana; 3) Rehab rekon talud Gambiran dalam proses pelaksanaan pekerjaan; 4) Pembentukan 6 KTB Rintisan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan talud Gambiran yang mundur dari tatakala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Pada tahun 2023, BPBD Kota Yogyakarta mengampu 1 program eksternal dan 1 program internal, yakni Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan catatan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, BPBD Kota Yogyakarta memiliki 3 (tiga) indikator Program Penanggulangan Bencana, yaitu Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dan Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Realisasi indikator program Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada triwulan II sebesar 47,69% dengan capaian kinerja 100% (sesuai target).
3. Realisasi indikator program Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dan Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi terealisasi 100% s/d triwulan II.
4. Pembentukan KTB rintisan sesuai tatakala. Sampai dengan TW II telah terbentuk 6 KTB rintisan, terdiri dari KTB Rintisan Gedhongan, KTB Rintisan Glagahsari, KTB Rintisan Ngadisuryan, KTB Rintisan Glagah, KTB Rintisan Demakan, dan KTB Rintisan Pujokusuman.
5. Kegiatan evakuasi terhadap 70 jiwa sampai dengan TW II berjalan baik tanpa kendala berarti (kejadian: cuaca ekstrim).
6. Dukungan anggaran masih mencukupi untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan material non permanen bagi rumah/infrastruktur yang terdampak bencana. Sampai dengan TW II terdapat 7 rumah terdampak bencana yang memperoleh bantuan material non permanen dan 1 pemeliharaan talud (talud gambiran) yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
7. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan monitoring evaluasi berjalan dengan baik (untuk SPIP dan desk bulanan).

Sedangkan dilihat dari kinerja fisik dan keuangan, BPBD memiliki 26 keluaran/output sub kegiatan, dimana 23 keluaran/output sub kegiatan sedang berjalan dan 3 keluaran/output sub kegiatan yang telah selesai.

Secara lebih rinci, Kegiatan/Sub Kegiatan/Keluaran yang mengalami deviasi fisik dan keuangan sampai dengan bulan Juni 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

Kegiatan	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
							Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosenatas tertimbang (9x8:100)	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	425.00 orang	62.55	12 bulan	424.362.500	100	53,74	-8,81	53,74	188.025.658	44,31	44,31	Terlaksana 2 kali pelatihan PB, terpasang sarpras SPAB, dan perubahan jadwal SPAB tingkat SD-SMP ke bulan Juli
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6.00 Dokumen	79.44	12 Bulan	1.658.545.000	100	74,77	-4,67	74,77	1.074.680.480	64,80	64,80	Pengadaan Telemetry, Water Level, Tower sudah selesai 100%, pemeliharaan EWS dan RPU masih dalam proses pekerjaan
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10.00 Kawasan	72.74	12 bulan	1.556.024.000	100	70,01	-2,73	70,01	774.039.862	49,74	49,74	Terlaksana 6 KTB sd simulasi, 4 KTB simulasi bulan Juli - Agustus
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRCBencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100.00 Orang	70	12 Bulan	128.332.000	100	70,00	0,00	70,00	40.255.000	31,37	31,37	Pelatihan pertama sudah dilaksanakan bulan Maret, Bimtek sudah terlaksana namun masih dalam proses administrasi
PencarianPertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	38.00 Orang	48	12 Bulan	1.135.296.000	100	48,00	0,00	48,00	455.673.000	40,14	40,14	Untuk pembayaran belanja jasa tenaga penanganan bencana (tenaga teknis) Bulan Mei
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.00 Orang	80	12 Bulan	210.500.000	100	80,00	0,00	80,00	138.797.705	65,94	65,94	Untuk pembayaran makan minum rapat, aktivitas lapangan dan pemeliharaan peralatan
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana	3.00 Dokumen	66.06	12 Bulan	712.574.750	100	34,48	-31,58	34,48	92.437.350	12,97	12,97	Kegiatan Rehabilitasi dan Pendataan Sesuai dengan Tatakala, namun untuk Rekonstruksi pasca bencana baru bisa dilaksanakan bulan Mei

Kegiatan	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
							Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosenatas tertimbang (9x8:100)	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)												karena perbedaan kode rekening dan diskusi terkait aset telah diselesaikan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00 Dokumen	97.37	1 Tahun	225.830.000	100	18,55	-78,82	18,55	7.618.000	3,37	3,37	Kegiatan RPB sudah audiensi dengan kepala daerah, selanjutnya pembentukan tim teknis dan pembuatan rencana rancangan kerja yang dilakukan akhir juni, selanjtnya masuk ke tahap penyusunan yang di rencanakan di bulan juli 2024
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.00 Dokumen	50	1 Tahun	3.400.000	100	50,00	0,00	50,00	0	0,00	0,00	Terlaksana Rapat koordinasi perubahan 2023 dan murni 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	25.00 Laporan	46.64	1 Tahun	64.132.000	100	46,64	0,00	46,64	14.020.000	21,86	21,86	Terlaksana rapat koordinasi laporan skp dan belanja jasa tenaga administrasi bulan mei
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26.00 Orang/Bulan	80	1 Tahun	3.507.556.300	100	80,00	0,00	80,00	1.779.589.266	50,74	50,74	Terlaksana pembayaran gaji dan tunjanga asn bullan juni
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	55.56	1 Tahun	9.180.000	100	55,56	0,00	55,56	1.610.000	17,54	17,54	Terlaksana rapat koordinasi laporan akuntansi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12.00 Laporan	44	1 Tahun	38.226.000	100	44,00	0,00	44,00	13.999.000	36,62	36,62	Terlaksana rapat koordinasi dan pembayaran gaji tenaga administrasi

Kegiatan	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
							Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosenatas tertimbang (9x8:100)	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15
	keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	100	12 Bulan	3.340.000	100	100,00	0,00	100,00	1.392.500	41,69	41,69	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	84	12 Bulan	92.252.015	100	84,00	0,00	84,00	13.368.500	14,49	14,49	Pembelian bahan komputer dan ATK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.00 Paket	100	12 Bulan	3.968.264	100	100,00	0,00	100,00	2.835.000	71,44	71,44	Pengadaan tabung pemadam kebakaran dan obat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	89	12 Bulan	31.109.800	100	89,00	0,00	89,00	10.129.500	32,56	32,56	Belanja kegiatan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 Dokumen	89	12 Bulan	2.556.000	100	89,00	0,00	89,00	330.000	12,91	12,91	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 laporan	96	12 Bulan	149.847.000	100	96,00	0,00	96,00	78.196.809	52,18	52,18	Terselenggarakannya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 laporan	100	12 Bulan	3.000.000	100	100,00	0,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00	Tersedianya jasa surat-menyurat
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 laporan	88	12 Bulan	22.200.000	100	88,00	0,00	88,00	7.134.616	32,14	32,14	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16.00 laporan	76	12 Bulan	461.331.800	100	76,00	0,00	76,00	201.819.672	43,75	43,75	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor berupa PDH, PDL, dan jasa tenaga
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22.00 Unit	98	12 Bulan	126.740.000	100	98,00	0,00	98,00	48.868.400	38,56	38,56	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan berupa bahan bakar, perizinan, dan jasa pemeliharaan

Kegiatan	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
							Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosenatas tertimbang (9x8:100)	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17.00 Unit	89	12 Bulan	205.851.000	100	89,00	0,00	89,00	67.241.600	32,67	32,67	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.00 Unit	87	12 Bulan	22.000.000	100	87,00	0,00	87,00	9.633.000	43,79	43,79	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya berupa alat bantu pompa, alat rumah tangga, belanja pemeliharaan komputer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	97.71	12 Bulan	436.531.466	100	97,71	0,00	97,71	420.360.562	96,30	96,30	
					11.234.685.895					5.445.055.480			

Capaian kinerja fisik di BPBD pada TW II, telah tercapai sebesar 70,25% dari target sebesar 75,24%. Terdapat deviasi -4,998% dan beberapa kegiatan yang deviasi fisik lebih dari - 5% antara lain: 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dari rencana 62,55% baru realisasi 53,74%; 2. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dari rencana 66,06% realisasi 34,48% dan 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana 97,37% realisasi 18,55%. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal:

1. Faktor Pendorong
    - Sebagian besar pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai tatakala kegiatan; dan
    - Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan monitoring evaluasi internal dan eksternal berjalan dengan baik.
2. Faktor Penghambat
    - Tatakala pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang mulai di bulan Juli terbentur dengan jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan SPAB;
    - Penyusunan tatakala dokumen RPB yang meleset jauh dari waktu pelaksanaan realisasi kegiatan; dan
    - Pelaksanaan rehab talud Gambiran menunggu surat balasan dari BBWS terkait rekomtek dan perizinan infrastruktur di tepi sungai.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja 2023 sampai dengan triwulan II yang telah diuraikan pada Bab II, maka disusun Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Pemerintah Kota Yogyakarta

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**10,812,958,215**	**11,234,685,895**	**17,188,728,313**		**10,302,061,081**	
1	**05**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk BPBD	**A Nilai**	**A Nilai**	**A Nilai**	**5,146,075,979**	**5,409,051,645**	**6,725,254,063**	**A Nilai**	**4,875,635,556**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD	46 Dokumen	46 Dokumen	35 Dokumen	**398,553,040**	**293,362,000**	**343,362,000**	35 Dokumen	**259,413,040**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen	354,013,040	225,830,000	225,830,000	6 Dokumen	243,573,040	BPBD
1	05	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	5,980,000	3,400,000	3,400,000	2 Dokumen	4,240,000	BPBD
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		25 Laporan	27 Laporan	32,580,000	64,132,000	114,132,000	27 Laporan	11,600,000	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD	56 Laporan	56 Laporan	50 Laporan	**3,584,146,000**	**3,554,962,300**	**3,810,414,068**	50 Laporan	**3,477,053,000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 orang/bulan	26 orang/bulan	3,560,656,000	3,507,556,300	3,763,008,068	26 orang/bulan	3,464,293,000	BPBD
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	9,570,000	9,180,000	9,180,000	12 Dokumen	6,380,000	BPBD
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	12 Laporan	9,570,000	38,226,000	38,226,000	12 Laporan	6,380,000	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum BPBD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	299,271,979	283,073,079	555,722,729	6 Laporan	275,365,556	BPBD
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	12 Paket	3,340,000	3,340,000	6,490,750	12 Paket	3,300,000	BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 Paket	11 Paket	62,761,015	92,252,015	201,580,015	11 Paket	47,487,756	BPBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7 Paket	10 Paket	32,005,964	3,968,264	125,191,164	10 Paket	61,839,800	BPBD
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	32,392,000	31,109,800	59,959,800	4 Paket	27,992,000	BPBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2 Dokumen	2,556,000	2,556,000	2,556,000	2 Dokumen	1,056,000	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	166,217,000	149,847,000	159,945,000	12 Laporan	133,690,000	BPBD
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**325,789,960**	**486,531,800**	**473,031,800**	3 Laporan	**336,288,960**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	2,200,000	3,000,000	6,000,000	12 Laporan	2,100,000	BPBD
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	29,400,000	22,200,000	22,200,000	12 Laporan	29,400,000	BPBD
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		16 Laporan	16 Laporan	294,189,960	461,331,800	444,831,800	16 Laporan	304,788,960	BPBD
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	60 Unit	60 Unit	60 Unit	**538,315,000**	**791,122,466**	**1,542,723,466**	60 Unit	**527,515,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		22 Unit	22 Unit	126,740,000	126,740,000	160,840,000	22 Unit	126,740,000	BPBD
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		17 Unit	17 Unit	177,745,000	205,851,000	896,802,000	17 Unit	166,945,000	BPBD
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	25 Unit	18,830,000	22,000,000	40,500,000	25 Unit	18,830,000	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	215,000,000	436,531,466	444,581,466	3 Unit	215,000,000	BPBD
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	84,64 % 100,00 % 100,00 %	74,65 % 100,00 % 100,00 %	76,76 % 100,00 % 100,00 %	**5,666,882,236**	**5,825,634,250**	**10,463,474,250**	76,76 % 100,00 % 100,00 %	**5,426,425,525**	
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah dokumen informasi rawan bencana Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	6 Dokumen 20 Kawasan 40 Orang	6 Dokumen 23 Kawasan 40 Orang	6 Dokumen 23 Kawasan 150 Orang	**3,369,538,220**	**3,767,263,500**	**8,497,653,500**	6 Dokumen 23 Kawasan 150 Orang	**3,269,067,545**	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		425 Orang	500 Orang	281,775,000	424,362,500	541,912,500	500 Orang	267,530,625	BPBD
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		6 Dokumen	15 Dokume	n 1890041640	1,658,545,000	3,919,045,000	15 Dokumen	1,607,421,590	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		10 Kawasan	13 Kawasan	1,102,381,580	1,556,024,000	3,851,689,000	13 Kawasan	1,337,192,830	BPBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		100 Orang	150 Orang	95,340,000	128,332,000	185,007,000	150 Orang	56,922,500	BPBD
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	100 Orang 100 Orang	100 Orang 100 Orang	100 Orang 100 Orang	**1,410,424,016**	**1,345,796,000**	**1,335.271,000**	100 Orang 100 Orang	**1,415,468,540**	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		200 Orang	200 Orang	1,028,654,016	1,135,296,000	1,135,296,000	200 Orang	1,148,115,040	BPBD
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 Orang	100 Orang	381,770,000	210,500,000	199,975,000	100 Orang	267,353,500	BPBD
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**886,920,000**	**712,574,750**	**630,549,750**	3 Laporan	**741,889,440**	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		3 Dokumen	3 Dokumen	886,920,000	712,574,750	630,549,750	3 Dokumen	741,889,440	BPBD
TOTAL										**10,802,628,215**	**11,234,685,895**	**17,188,728,313**		**10,302,061,081**	

Secara keseluruhan, belanja langsung anggaran perubahan tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertambah Rp 5.954.042.418,- dari total belanja langsung anggaran murni. Penambahan anggaran tersebut dipergunakan untuk:

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ada penambahan Rp 50.000.000 pada Pembuatan profil BPBD dan media KIE;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ada penambahan Rp 3.150.750 pada belanja lampu dan kabel listrik;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ada penambahan Rp 109.328.000 pada belanja ATK, tambahan belanja bahan komputer, belanja kamera, belanja 2 laptop, 1 printer, 1 scanner, 5 komputer, kalkulator.
4) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ada penambahan Rp 121.222.900 pada belanja APAR kecil untuk mobil, obat-obatan, mebel, AC split 5 unit, dispenser, microphone 2 unit, televisi cctv di Tegalturi, mirroring device;
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ada penambahan Rp 28.850.000 pada belanja cetak penggandaan, cetak box arsip, cetak stopmap BPBD;
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ada penambahan Rp 10.098.000 pada belanja konsumsi rapat koordinasi;
7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ada penambahan Rp 3.000.000 pada belanja materai;
8) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ada pengurangan Rp (16.500.000) pada sisa pengadaan;
9) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional atau Lapangan ada penambahan Rp 725.051.000 pada Belanja BBM penambahan volume dan harga satuan dan pelumas, pemeliharaan kendaraan roda 6, adanya pembelian mobil jenazah 2 unit (menghapus 3 mobil jenazah berumur >10 tahun dan sudah tidak layak kondisinya). Dan penghapusan belanja perpanjangan SIM, pengurangan belanja STNK 3 KTB, pengurangan belanja BBM roda 3;
10) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ada penambahan Rp 18.500.000 pada belanja pemeliharaan AC, tambah belanja komputer/laptop, tambah belanja pemeliharaan printer;
11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ada penambahan Rp 8.050.000 pada biaya pindah dari Gedung 40-an ke Tegal Turi;
12) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota ada

penambahan Rp. 117.550.000 pada belanja makan minum rapat, transport peserta pelatihan peralatan KTB, tambahan belanja papan Informasi SPAB, Sosialisasi dan bimtek kelompok rentan HIV AIDS, Penambahan PPGD, dan pelatihan peralatan SPAB

13) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota ada penambahan Rp 2.260.500.000 pada:
    - Mantel Sepatu Lapangan, Pakaian Kerja Kebencanaan, Rompi Lapangan, Tas Lapangan @150 buah Rp 180.000.000
    - Perizinan Early Warning System & Perizinan Radio Pancar Ulang (Repeater) Rp 44.000.000
    - Pemeliharaan Pos Ngentak, Pemeliharaan Ruang Pusdalops Rp 244.000.000 (termasuk perencanaan, pengawasan dan konstruksinya)
    - Alat Telemetry Sungai Belik Rp 216.000.000 (termasuk perencanaan, pengawasan dan konstruksinya)
    - Alat Telemetry Sungai Buntung Rp 216.000.000 (termasuk perencanaan, pengawasan dan konstruksinya)"
    - Water Level Sungai Belik Rp 204.500.000 (untuk 34-36 titik)
    - Water Level Sungai Buntung Rp 204.500.000 (untuk 34-36 titik)
    - GPS Geodetic Rp100.000.000
    - Radio Pancar Ulang (Repeater) Rp 200.000.000 (pemindahan lokasi Repeater dari Pakem ke Tegalturi)
    - Early Warning System Sungai Belik Rp 234.500.000
    - Automatic Weather Station Rp 238.000.000
    - Drone dan Baterai Rp 100.000.000
    - Kamera CCTV Rp 60.000.000
14) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ada penambahan Rp. 2.295.665.000 pada:
    - Belanja Pakaian Kerja Lapangan Review KTB Tahap 2 Rp110.250.000
    - Belanja Pakaian Kerja Lapangan Review Pengurus KTB Rp105.000.000 (20 KTB di perubahan)
    - Tambahan belanja instruktur Rp43.500.000
    - Tambahan belanja transport
    - Hibah peralatan KTB Rp1.763.300.000
    - Belanja Modal Petunjuk Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Rp 256.800.000
15) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota ada pengurangan belanja Rp (10.525.000) dari sisa pengadaan dan pengurangan belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;

16) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota ada penambahan Rp 56.675.000 pada penambahan volume pelatihan TRC dari 4 kali menjadi 5 kali;
17) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota ada pengurangan Rp 82.025.000 pada belanja bahan bangunan untuk rehabilitasi kerusakan pasca bencana dan pengurangan belanja makan minum.

BAB IV
PENUTUP

Penyesuaian target dan anggaran pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 tidak lepas dari masukan dan perubahan keadaan di lapangan.

Dengan disusunnya usulan Perubahan Renja SKPD ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih dapat menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung dan mendorong pencapaian kinerja Badan.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA
2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. .

Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, sasaran, tujuan, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Adapun tujuan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi diantaranya adalah:

1. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Menurunkan angka pengangguran

3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
4. Meningkatkan kualitas kerjasama transmigrasi
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedangkan sasaran strategis dari Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi antara lain:

1. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
4. Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Renja OPD dapat diubah apabila terdapat hal yang tidak sesuaidengan dinamika tahun berjalan, seperti antara lain:

1. Perkembangan situasi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsiKUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Berkenaan dengan dinamika kebijakan Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi, maka Renja dan anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami beberapa kali pergeseran dan perubahan anggaran. Perubahan Renja OPD ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan RKPD KotaYogyakarta Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
24. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57);
25. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi dinamika kebutuhan yangmuncul di pertengahan tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain:

1. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada Triwulan ke-4 Tahun 2023;
2. Sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2023

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan evaluasi Renja dan Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2023 (sebagaimana Tabel 2.1.) sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari target fisik Renja yaitu pencapaian nilai SAKIP A, pada Triwulan II ini belum dapat direalisasikan mengingat bahwa penilaian SAKIP sifatnya tahunan. Dengan demikian pencapaian fisik program ini baru dapat dinilai keberhasilannya di akhir Tahun 2023. Program ini dijabarkan ke dalam 8 kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 67,84% (Rp 3.910.659.001,-) dari target keuangan pada TW II (Rp 9.407.325.683).
2. Program Pemberdayaan Sosial dijabarkan menjadi 1 kegiatan. Adapun dari target fisik di TW II sebesar 90,25% berhasil

direalisasikan sebesar 100,49 %. Dan dari aspek keuangan telah tercapai 91,02% (Rp. 186.933.600,-) dari target sebesar Rp. 205.369.600,- pada TW II.

3. Program Rehabilitasi Sosial dijabarkan menjadi 2 kegiatan yang mengakomodasi kegiatan rehabilitasi oleh unit kerja UPT RPA Wilosoprojo, UPT RPSLU Budhi Dharma dan oleh Dinas Sosnakertrans. Terdapat 7 (tujuh) indikator program Rehabilitasi Sosial, yaitu Indikator Persentase jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan target fisik pada TW II sebesar 47,31% dan berhasil direalisasikan sebesar 211%. Indikator ke-2 adalah Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti dengan target fisik di TW II sebesar 20,51% berhasil direalisasikan 107,51%. Indikator ke-3 adalah Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan target fisik di TW II sebesar 91,43% berhasil direalisasikan 109,37%. Indikator ke-4 adalah Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan target fisik di TW II sebesar 32,37% berhasil direalisasikan 165,03%. Indikator ke- 5 adalah Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri dengan target fisik di TW II sebesar 22,10% berhasil direalisasikan 100%. Indikator ke-6 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yangtertangani layanan di luar Panti Sosial dengan target fisik di TW II sebesar 66.67% berhasil direalisasikan 100%. Indikator ke-7 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial dengan target fisik di TW II sebesar 100% berhasil direalisasikan 100.00%. Adapun dari aspek keuangan telah tercapai 84,24% (Rp 1.275.361.760,-) dari target sebesar Rp 1.513.904.712,- pada TW II.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dijabarkan dalam menjadi 1 kegiatan. Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan target fisik di TW II sebesar 88.59%, berhasil direalisasikan sebesar 112,89%. Dan dari aspek keuangan telah tercapai 62,27% (Rp. 274.769.000,-) dari target sebesar Rp. 441.234.250,- pada TW II.

5. Program Penanganan Bencana dijabarkan dalam menjadi 2 kegiatan. Adapun dari target fisik renja TW II sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100 %. Dan dari aspek keuangan telah tercapai 48,05 % (Rp. 188.603.250,-) dari target sebesar Rp. 392.533.500,- pada TW II.

6. Program Perencanaan Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro. Berdasarkan target fisik Renja TW II sebesar 45,15 % dapat direalisasikan target (98,41 % dari target TW II). Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 9.58% (Rp. 10.593.250,-) dari Rp. 110.593.250,- (target TW II).

7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam 3 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 91 % dari target TW II sebesar 46,86%. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 64,32% (Rp.527.055.600,-) dari target TW II sebesar Rp. 819.392.260,-.

8. Program Penempatan Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam 2 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 104% dari target TW II sebesar 68,63%. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 84,60% (Rp. 437.168.100,-) dari target TW II sebesar Rp. 547.481.120,-.

9. Program Hubungan Industrial dimanifestasikan dalam 2 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 96,76% dari target TW II sebesar 19,99%. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 63,44% (Rp. 338.152.876,-) dari target TW II sebesar Rp. 1.048.888.250,-.

10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dimanifestasikan dalam 1 kegiatan. Target pada triwulan II masih 0 % dikarenakan pemberangkatan transmigran direncanakan terealisasi pada triwulan III. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 86,57% (Rp.46.280.000,-) dari target TW II sebesar Rp.46.280.000,-..

Adapun matriks Evaluasi terhadap Hasil Renja adalah sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	87.76 %
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,98 - 7,18% %
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	4.14 %
4	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	100 %
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	87.35 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**	**Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring**	**92,84 %**	**0,00**	**90,42 %**	**0,00**	**90,25 %**	**0,00**	**90.25 %**	**0,00**	**90.69 %**	**186.933.600,00**	**100.49%**	**0,00%**					**Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**	
	Pengembangan	**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**																				
		1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		55.723.000,00	60,00%	33.043.000,00	60,00%	33.043.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		75 Orang		60,00%		60,00%		100,00%							
		2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		177.590.600,00	44,75%	78.834.600,00	44,70%	64.708.600,00	99,89%	82,08%						
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		14 Orang		0,00%		44,70%		0,00%							
		3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		31.920.000,00	43,00%	13.700.000,00	43,00%	13.700.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		24 Orang		43,00%		43,00%		100,00%							
		4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		306.849.000,00	26,68%	79.792.000,00	26,68%	75.482.000,00	100,00%	94,60%						
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Lembaga		0 Lembaga		5 Lembaga		0,00%		26,68%		0,00%							
				Rata-rata capaian kinerja											**99,97%**	**94,17%**						
				Predikat kinerja										**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti**	**(Jumlah anak terlantar yang tertangani/Jumlah anak terlantar) dikali 100%**	**96,77 %**	**0,00**		**0,00**	**87,10 %**	**0,00**	**47.31 %**	**0,00**	**100 %**	**1.275.361.760,00**	**211%**	**0,00%**					**Bidang Pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial**	
			Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	**(Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani/Jumlah tuna sosial khususnya**	**56,41 %**	**0,00**		**0,00**	**56,41 %**	**0,00**	**20.51**	**0,00**	**22.05**	**0,00**	**107,51%**	**0,00%**					**Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**	

			dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	**gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani) dikali 100%**																			
			Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	**(Jumlah lansia terlantar yang tertangani/Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**		**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**91.43**	**0,00**	**100**	**0,00**	**109,37%**	**0,00%**					**Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**	
			Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	**(Jumlah penyandang disabilitas dan keluarga yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial/Jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**92,11 %**	**0,00**		**0,00**	**88,16 %**	**0,00**	**32.37**	**0,00**	**53.42**	**0,00**	**165,03%**	**0,00%**					**Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**	
			Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	**(Jumlah KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri/Jumlah Kelompok KUBE dan USEP keseluruhan yang sudah berdiri minimal 3 tahun) dikali 100%**	**48,34 %**	**0,00**		**0,00**	**44,20 %**	**0,00**	**22.10**	**0,00**	**22.10**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	**(Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang tertangani/Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**		**0,00**	**66,67 %**	**0,00**	**66.67**	**0,00**	**100**	**0,00**	**149,99%**	**0,00%**					**Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	**Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
	Rehabilitasi So		**ial Dasar Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**																				
		1 Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		758.101.000,00	54,34%	408.003.000,00	54,34%	369.101.100,00	100,00%	90,47%							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		68 orang		0,00%		54,34%		0,00%							
		2 Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		258.643.000,00	50,83%	131.460.000,00	50,83%	97.060.000,00	100,00%	73,83%							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		50,83%		0,00%							

		3	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		56.750.000,00	49,59%	27.912.500,00	47,59%	17.143.500,00	95,97%	61,42%						
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		30 orang		49,59%		47,59%		95,97%							
		4	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		105.641.000,00	69,00%	71.066.000,00	69,00%	66.798.100,00	100,00%	93,99%						
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		68 orang		69,00%		69,00%		100,00%							
		5	Penyediaan Alat Bantu				0,00		0,00		27.915.000,00	49,00%	13.485.000,00	40,00%	1.085.000,00	81,63%	8,05%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		0		49,00%		40,00%		81,63%							
		6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		2.400.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%	80,00%						
				Reunifikasi Keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma		0 orang		0 orang		68 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		7	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0,00		0,00		589.843.035,00	50,55%	268.108.912,00	50,55%	258.675.260,00	100,00%	96,48%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		68 orang		0,00%		50,55%		0,00%							
		8	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		53.500.000,00	56,07%	25.000.000,00	56,07%	15.500.000,00	100,00%	62,00%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		30 orang		56,07%		56,07%		100,00%							
		9	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial				0,00		0,00		643.364.000,00	30,70%	157.760.000,00	30,70%	157.510.000,00	100,00%	99,84%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		3.620 Orang		0,00%		30,70%		0,00%							
		10	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				0,00		0,00		123.950.000,00	26,26%	27.371.000,00	26,26%	27.371.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		260 Orang		0,00%		26,26%		0,00%							
		11	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		231.108.000,00	49,98%	96.295.000,00	49,98%	96.295.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		49,98%		0,00%							
		12	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta KelahiranSurat Nikahdan Kartu Identitas Anak				0,00		0,00		10.176.000,00	52,00%	5.096.000,00	52,00%	4.696.000,00	100,00%	92,15%						
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		0		52,00%		52,00%		100,00%							
		13	Pemberian Akses ke				0,00		0,00		269.275.600,00	35,79%	87.420.500,00	31,35%	44.960.500,00	87,59%	51,43%						

			Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		200 Orang		0,00%		31,35%		0,00%							
		14	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0,00		0,00		170.940.000,00	41,36%	67.366.000,00	41,36%	39.707.000,00	100,00%	58,94%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		42,07%		0,00%							
		15	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0,00		0,00		2.420.000,00	40,00%	920.000,00	40,00%	580.000,00	100,00%	63,04%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		0		40,00%		40,00%		100,00%							
		16	Pemberian Layanan Rujukan				0,00		0,00		19.325.000,00	40,00%	6.665.000,00	40,00%	5.940.000,00	100,00%	89,12%							
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		0		40,00%		40,00%		100,00%							
	Rehabilitasi So		**ial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSLainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**																				
		17	Pemberian Layanan Kedaruratan				0,00		0,00		140.860.800,00	52,42%	72.804.800,00	52,42%	35.469.300,00	100,00%	48,72%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		500 orang		0,00%		52,42%		0,00%							
		18	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial				0,00		0,00		216.532.000,00	18,34%	32.791.000,00	18,34%	23.790.000,00	100,00%	72,55%							
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang		0 Orang		55 Orang		0,00%		18,34%		0,00%							
		19	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.				0,00		0,00		67.347.000,00	20,00%	13.380.000,00	20,00%	12.880.000,00	100,00%	96,26%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		0		20,00%		20,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**98,17%**	**75,70%**						
										Predikat kinerja					**Sangat**	**Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga**	**90,33 %**	**0,00**	**89,25 %**	**0,00**	**88,58 %**	**0,00**	**88.59 %**	**0,00**	**100 %**	**274.769.000,00**	**112.89%**	**0,00%**					**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
	Pengelolaan D	**ata Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**																					
		1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.424.330.000,00	27,05%	232.649.250,00	27,05%	97.302.000,00	100,00%	41,82%							
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang DiData		0 orang		0 orang		144.101 orang		0,00%		27,05%		0,00%							
		2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				0,00		0,00		423.620.000,00	52,32%	208.315.000,00	52,32%	177.197.000,00	100,00%	85,06%							
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Keluarga		0 Keluarga		32.078 Keluarga		0,00%		52,32%		0,00%							
		3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		161.310.000,00	1,54%	270.000,00	1,54%	270.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		0 Orang		0 Orang		50 Orang		0,00%		1,54%		0,00%							

				Kewenangan Kabupaten/Kota																			

			Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		54,46%		0,00%						
											Rata-rata capaian kinerja					100,00%		9,58%				
											Predikat kinerja					Sangat	Tinggi	Sangat Rendah				
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal**	**(Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal/Jumlah Peserta Pelatihan) x 100 %**	**92,50 %**	**0,00**	**91,77 %**	**0,00**	**91,56 %**	**0,00**	**46.84 %**	**0,00**	**42.82 %**	**527.055.600,00**	**91%**	**0,00%**					**Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan transmigrasi**	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																					
		1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			0,00		0,00		1.487.717.510,00	53,48%	765.542.010,00	53,48%	473.215.350,00	100,00%	61,81%						
				Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023		0 Orang		0 Orang		348 Orang		0,00%		53,48%		0,00%						
	Pembinaan Le baga Pelatihan Kerja Swasta																					
		2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			0,00		0,00		125.323.000,00	49,15%	53.760.250,00	49,15%	53.750.250,00	100,00%	99,98%						
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		0 Lembaga		0 Lembaga		30 Lembaga		0,00%		49,15%		0,00%						
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																					
		3	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			0,00		0,00		18.928.900,00	15,00%	90.000,00	15,00%	90.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		0 Perusahaan		0 Perusahaan		40 Perusahaan		15,00%		15,00%		100,00%						
											Rata-rata capaian kinerja					100,00%		87,27%				
											Predikat kinerja					Sangat	Tinggi	Tinggi				
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja**	**(jumlah tenaga kerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan kerja)*100%**	**71,72 %**	**0,00**	**75,16 %**	**0,00**	**70,63 %**	**0,00**	**68.63 %**	**0,00**	**71.15 %**	**774.915.350,00**	**104%**	**0,00%**					**Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan transmigrasi**	
	Pelayanan Ant arkerja di Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			0,00		0,00		18.450.000,00	100,00%	18.450.000,00	100,00%	18.450.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			0,00		0,00		17.360.000,00	50,00%	6.780.000,00	50,00%	6.780.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		0 orang		0 orang		604 orang		50,00%		50,00%		100,00%						
		3	Perluasan Kesempatan Kerja			0,00		0,00		1.879.439.500,00	50,01%	864.527.206,00	53,84%	723.593.600,00	107,66%	83,70%						
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		0 orang		0 orang		304 orang		0,00%		56,65%		0,00%						
	Pengelolaan In ormasi Pasar Kerja																					
		4	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			0,00		0,00		81.126.750,00	29,00%	21.426.750,00	29,00%	21.291.750,00	100,00%	99,37%						
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui sistem Online (Karir Hub)		0 orang		0 orang		200 orang		29,00%		29,00%		100,00%						
		5	Job Fair/Bursa Kerja			0,00		0,00		91.610.000,00	35,00%	4.800.000,00	35,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		0 orang		0 orang		1.350 orang		35,00%		35,00%		100,00%						
											Rata-rata capaian kinerja					101,53%		96,61%				

												Predikat kinerja						**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**	**(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %**	**46,01 %**	**0,00**	**38,27 %**	**0,00**	**40,33 %**	**0,00**	**19.99 %**	**0,00**	**19.34 %**	**338.152.876,00**	**96.76%**	**0,00%**					**Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial**	
	Pengesahan Pe	**aturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota**																						
		1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				0,00		0,00		18.376.000,00	91,00%	16.636.000,00	90,00%	16.520.000,00	98,90%	99,30%								
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		0 Perusahaan		0 Perusahaan		25 Perusahaan		91,00%		90,00%		98,90%								
		2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan				0,00		0,00		13.987.250,00	95,00%	13.117.250,00	95,00%	13.067.250,00	100,00%	99,62%								
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		0 Perusahaan		0 Perusahaan		15 Perusahaan		95,00%		95,00%		100,00%								
		3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				0,00		0,00		254.942.250,00	61,05%	148.382.250,00	57,58%	97.833.530,00	94,32%	65,93%								
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta Pengupahan		0 Laporan		0 Laporan		362 Laporan		0,00%		57,58%		0,00%								
	Pencegahan da	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**																						
		4 Pencegahan Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		202.808.500,00	72,00%	142.712.500,00	72,00%	101.243.450,00	100,00%	70,94%								
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah		0 Perkara		0 Perkara		4 Perkara		72,00%		72,00%		100,00%								
		5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		21.378.000,00	89,00%	18.913.000,00	90,00%	16.918.000,00	101,12%	89,45%								
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		0 Perkara		0 Perkara		24 Perkara		89,00%		90,00%		101,12%								
		6 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi PengusahaFederasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				0,00		0,00		94.318.000,00	72,03%	67.560.000,00	100,00%	2.781.000,00	138,83%	4,12%								
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		0 Paket		0 Paket		1 Paket		0,00%		110,00%		0,00%								
		7 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		84.516.000,00	70,00%	58.451.000,00	70,00%	42.082.396,00	100,00%	72,00%								
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		70,00%		70,00%		100,00%								
		8 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				0,00		0,00		358.562.250,00	18,72%	66.382.250,00	18,72%	47.707.250,00	100,00%	71,87%								
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan		0 Orang		0 Orang		159 Orang		0,00%		18,72%		0,00%								
											Rata-rata capaian kinerja				**104,15%**		**71,65%**						
											Predikat kinerja				**Sangat**	**Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase penempatan transmigran**	**(Jumlah calon transmigran yang berangkat /Jumlah kuota transmigran)*100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**46.280.000,00**	**100%**	**0,00%**					**Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																							
		1 Koordinasi dan				0,00		0,00		52.940.000,00	62,00%	30.560.000,00	62,00%	30.560.000,00	100,00%	100,00%								

			Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		0 laporan		0 laporan		2 laporan		62,00%		62,00%		100,00%							
		2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		44.977.000,00	48,00%	15.720.000,00	48,00%	15.720.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		0 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga		8 Kepala Keluarga		48,00%		48,00%		100,00%							
		3	Pelatihan Transmigrasi				0,00		0,00		43.858.675,00	8,00%	0,00	8,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		0 orang		0 orang		8 orang		8,00%		8,00%		100,00%							
		4	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi				0,00		0,00		84.000.000,00	15,00%	0,00	15,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Pemukiman Transmigrasi		0 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga		8 Kepala Keluarga		15,00%		15,00%		100,00%							
											Rata-rata capaian kinerja				**100,00%**		**50,00%**						
											Predikat kinerja				**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**3.910.659.001,00**	**100%**	**0,00%**					**Sekretariat**	
	PerencanaanP	**enganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		9.782.150,00	68,00%	6.156.540,00	68,00%	5.467.250,00	100,00%	88,80%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		68,00%		68,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.570.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.970.000,00	64,00%	1.200.000,00	64,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		64,00%		64,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.838.720,00	100,00%	2.838.720,00	100,00%	2.838.000,00	100,00%	99,97%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.238.720,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan				0,00		0,00		147.188.080,00	43,55%	63.064.000,00	39,94%	55.439.000,00	91,71%	87,91%						

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 orang		0 orang		2 orang		0,00%		39,94%		0,00%								
	Administrasi K uangan Perangkat Daerah																							
		7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		11.155.939.200,00	65,21%	7.979.820.471,00	65,21%	2.793.236.871,00	100,00%	35,00%								
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		85 Orang		0,00%		65,21%		0,00%								
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		94.056.000,00	49,98%	39.359.000,00	49,98%	39.144.000,00	100,00%	99,45%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Orang		0 Orang		2 Orang		0,00%		49,98%		0,00%								
	Administrasi B arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																							
		9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.800.000,00	45,00%	735.000,00	45,00%	690.000,00	100,00%	93,88%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%								
		10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.740.000,00	35,00%	570.000,00	35,00%	535.000,00	100,00%	93,86%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		35,00%		35,00%		100,00%								
		11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		15.340.000,00	35,00%	870.000,00	35,00%	700.000,00	100,00%	80,46%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		35,00%		35,00%		100,00%								
		12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.368.000,00	72,50%	988.000,00	70,00%	825.000,00	96,55%	83,50%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		72,50%		70,00%		96,55%								
		13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.980.000,00	60,00%	1.170.000,00	60,00%	800.000,00	100,00%	68,38%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		60,00%		60,00%		100,00%								
		14	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.410.000,00	40,00%	870.000,00	40,00%	590.000,00	100,00%	67,82%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%								
	Administrasi K pegawaian Perangkat Daerah																							
		15	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		5.220.000,00	45,00%	1.740.000,00	42,00%	1.389.000,00	93,33%	79,83%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		213 dokumen		45,00%		42,00%		93,33%								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
		16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		8.705.440,00	85,00%	6.774.440,00	85,00%	6.689.940,00	100,00%	98,75%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		85,00%		85,00%		100,00%								
		17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		118.001.912,00	62,61%	61.753.762,00	60,11%	61.599.880,00	96,01%	99,75%								
				Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		12 Paket		0,00%		60,11%		0,00%								
		18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		41.352.750,00	40,00%	15.757.250,00	38,00%	14.247.550,00	95,00%	90,42%								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		10 Paket		40,00%		38,00%		95,00%								
		19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		29.506.600,00	32,00%	9.295.500,00	32,00%	9.286.000,00	100,00%	99,90%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang		0 Paket		0 Paket		12 Paket		32,00%		32,00%		100,00%								

			Disediakan																				
		20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00		0,00		5.820.000,00	50,00%	2.910.000,00	50,00%	2.790.000,00	100,00%	95,88%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		505.665.000,00	55,00%	268.988.000,00	52,00%	161.529.688,00	94,55%	60,05%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		106 laporan		0,00%		52,00%		0,00%								
	Pengadaan Ba	**ang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																					
		22	Pengadaan Mebel			0,00		0,00		59.468.000,00	55,00%	3.500.000,00	55,00%	3.495.000,00	100,00%	99,86%							
			Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		0 unit		0 unit		6 unit		55,00%		55,00%		100,00%								
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		78.070.000,00	10,00%	3.000.000,00	10,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		0 unit		0 unit		4 unit		10,00%		10,00%		100,00%								
	Penyediaan Ja	**a Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																					
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		8.100.000,00	72,00%	5.800.000,00	70,00%	5.295.500,00	97,22%	91,30%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		72,00%		70,00%		97,22%								
		25	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		9.000.000,00	30,00%	2.600.000,00	30,00%	2.360.425,00	100,00%	90,79%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		30,00%		30,00%		100,00%								
		26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		1.225.969.224,00	53,15%	625.870.000,00	50,11%	529.642.000,00	94,28%	84,62%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		50,11%		0,00%								
	Pemeliharaan	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																					
		27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		25.100.000,00	65,00%	15.500.000,00	62,00%	10.444.421,00	95,38%	67,38%							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		65,00%		62,00%		95,38%								
		28	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00		0,00		319.024.000,00	54,30%	163.270.000,00	54,30%	85.992.276,00	100,00%	52,67%							
			Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		64 unit		0,00%		54,30%		0,00%								
		29	Pemeliharaan Mebel			0,00		0,00		3.400.000,00	35,00%	1.650.000,00	50,00%	1.650.000,00	142,86%	100,00%							
			Jumlah Mebel Yang Dipelihara		0 unit		0 unit		4 unit		35,00%		50,00%		142,86%								
		30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		46.025.000,00	47,00%	21.275.000,00	45,00%	13.643.200,00	95,74%	64,13%							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		63 unit		47,00%		45,00%		95,74%								
		31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00		0,00		100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	99,20%	99.139.000,00	99,20%	99,14%							
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		99,20%		99,20%								
								Rata-rata capaian kinerja							**93,29%**	**76,56%**							
								Predikat kinerja						**Sangat**	**Tinggi**	**Tinggi**							
								Total anggaran dari seluruh program	**0,00**	**0,00**	**533.323.687,00**												
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)							**97,56%**	**0%**						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)						**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak atau stakeholder berjalan secara lancar 2. Pemantauan progres pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dilakukan secara rutin 3. Perusahaan selaku stakeholder yang mendukung capaian target sudah melakukan rekruitmen secara normal pasca pandemi dan sudah ada kesadaran untuk menyusun Struktur Skala Upah 4. Tingginya animo yang mendaftar transmigrasi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Ada kegiatan yg tidak bisa diprediksi, misalnya kegiatan terkait kebencanaan, sehingga serapan keuangan tidak maksimal. 2. Sasaran PPKS ada yang bukan penduduk kota YK 3. pemasaran KUBE belum lancar 4. Ada beberapa perusahaan yang masih ragu untuk menyusun Struktur Skala Upah serta mensosialisasikan Struktur Skala Upah kepada pekerja 5. Semakin menurunnya kuota penempatan dari Kementerian Desa PDTT
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Untuk anggaran yang tidak terserap agar dapat disesuaikan di Perubahan 2023 2. Perlu dilakukan pembinaan secara lebih intensif ke perusahaan untuk menyusun Struktur Skala Upah dan mensosialisasikannya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Drs. Maryustion Tonang, M.M
NIP. 196606141994031006

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Evaluasi atas capaian kinerja dalam Tabel 2.1. tersebut di atas tampak bahwa dari capaian keseluruhan program merefleksikan bahwa Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpredikat Sangat Tinggi dari aspek capaian fisik (100,07 %) namun Rendah dari aspek capaian keuangan (52,37%). Ketimpangan pencapaian realisasi fisik dan keuangan pada Triwulan II disebabkan adanya faktor penghambat sebagai berikut:

1. Perlunya sinkronisasi dengan kebijakan tingkat atas (pusat dan atau DIY), yaitu antara lain terkait kebijakan pemberian bantuan sosial, kebijakan pemberangkatan transmigrasi, dan penyusunan Kajian Naskah Akademik Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan dari pusat terkait ketenagakerjaan (pengganti Undang-undang Cipta Kerja) yang hingga awal Triwulan II masih belum jelas. Hal ini mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan yang harus mengacu / berpedoman pada ketentuan peraturan tersebut;
2. Adanya kebijakan penutupan Layanan Shelter Covid-19 seiring dengan tren penurunan jumlah kasus yang signifikan sepanjang semester I Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022;
3. Adanya mekanisme pergeseran anggaran yang harus diikuti oleh Dinsosnakertrans dalam rangka penyesuaian plotting dan rekening di SIPD. Hal ini menyebabkan mundurnya tatakala pelaksanaan kegiatan;
4. Adanya pengunduran tatakala pelaksanaan sub kegiatan karena adanya permohonan warga masyarakat, keterlambatan penerbitan dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan, lokus sub kegiatan yang tidak memungkinkan kondisinya untuk terlaksananya sub kegiatan;
5. Sifat sub kegiatan *unpredictable* / adang-adang, dalam artian pelaksanaan kegiatan sebagai langkah responsif penanganan sesuai ada tidaknya kejadian, permohonan dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
2. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan;
3. Optimalisasi koordinasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan baik; dan
4. Adanya teknologi informasi dan sistem yang memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja untuk Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indikator yang belum tercapai untuk segera diakselerasi pencapaiannya di triwulan berikutnya;
2. Optimalisasi mekanisme koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DIY dalam rangka akselerasi akses informasi regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan di Dinasosnakertrans;
3. Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang;
4. Rasionalisasi anggaran yang tidak terserap pada Perubahan APBD Tahun 2023.

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perubahan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Review Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026 termasuk di dalamnya Tujuan serta Sasaran OPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun tujuan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya adalah:

1. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
2. Menurunkan angka pengangguran;
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;
4. Meningkatkan kualitas kerjasama transmigrasi;
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sedangkan sasaran strategis dari Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi antara lain:

1. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
4. Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Perubahan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun pula untuk mengadopsi dinamika masyarakat dan kebijakan Pemerintah (baik Pusat, DIY maupun Daerah), khususnya saat ini berkaitan dengan fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Ketua RT / RW / Kampung / LMPK. Selain itu dalam penyusunan Perubahan Renja perlu juga memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi sehingga perlu dilakukan perubahan program / kegiatan / sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2023, baik berupa pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan, penghapusan

kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan output dan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan.

Pasca pandemi Covid-19 masalah lesunya perekonomian berkontribusi utama pada kemiskinan hingga tahun 2023 ini, sehingga penanganan kemiskinan makin menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian utama Pemerintah pada setiap tingkatan. Salah satu tugas fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal penanganan kemiskinan dan kerentanan sosial salah 1 (satu) upayanya dengan pemenuhan kebutuhan dasar antara lain melalui aktivitas pemberian bantuan sosial. Aktivitas pemberian bantuan ini merupakan perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok kurang atau tidak potensial agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Jika tidak diberikan bantuan sosial, maka sasaran kelompok kurang atau tidak potensial tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar. Dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial harus benar-benar berdasarkan ketentuan peraturan terkait antara lain yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

Mendasarkan pada:

1. Ketentuan peraturan bantuan sosial bahwa bantuan sosial tidak dapat diberikan secara terus menerus kecuali dalam keadaaan tertentu yaitu sampai dengan penerima bantuan terlepas dari resiko sosial;
2. Adanya fasilitasi pemberian bantuan sosial oleh pusat;
3. Adanya sasaran calon penerima bantuan belum mendapatkan intervensi program,

maka pada Perubahan Renja Tahun 2023 ini dialokasikan Bantuan Sosial APBD pada Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM) sebesar Rp. 827.600.000,- dengan target calon penerima sebanyak 2.069 jiwa (@ Rp. 200.000,- diberikan selama 2 bulan).

Adapun bansos bagi Penyandang Disabilitas tidak dialokasi anggarannya mengingat fasilitasi bantuan untuk penyandang disabilitas telah tercukupi baik dari APBN maupun dari sumber dana lainnya. Dengan demikian secara keseluruhan anggaran Bantuan Sosial APBD dalam Renja Perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 1.321.600.000,- (pada Anggaran Kegiatan Dinsosnakertrans) dan sebesar Rp. 3.040.000.000,- pada Belanja Tak Terduga (BTT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Bantuan Sosial Tahun 2023

I. OPERASIONAL

NO	SUB KEGIATAN	NAMA BANTUAN SOSIAL	BANSOS 2023 MURNI		BANSOS RENJA PERUBAHAN	
			ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pemberian bimbingan fisik,Mental,spiritual dan sosial	Bantuan modal untuk penumbuhan KUBE	230.000.000	Untuk 10 kelompok @Rp23.000.000	230.000.000	Untuk 10 kelompok @23.000.000
2	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Bantuan modal usaha untuk KPM UEP PKH GRADUASI	150.000.000	Untuk 50 orang @3.000.000 TIDAK JADI DILAKSANAKAN (AKAN DIHAPUS DI PERUBAHAN)	-	-
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM)	-	-	827.600.000	2.069 Lansia x Rp 200.000 x 2 bulan
4	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	BLT DBHCHT	264.000.000	220 Orang x 2 Bulan @600.000	264.000.000	220 Orang x 2 Bulan @600.000
TOTAL			**644.000.000**		**1.321.600.000**	

II. BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

NO	NAMA BANTUAN SOSIAL	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Santunan Kematian	3.000.000.000	untuk 1.000 orang @Rp 3.000.000
2	Bantuan Orang Terlantar Kehabisan Bekal	40.000.0000	untuk 160 orang
	TOTAL	**3.040.000.000**	

Memasuki periode TW II, terdapat kebijakan penutupan Shelter Layanan Covid- 19 oleh Pemerintah Kota Yogyakarta inline dengan melandainya kasus dan jumlah penyintas Covid-19 yang selanjutnya diikuti pula dengan menurunnya siginifikan jumlah warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isolman). Oleh karena itu terdapat penurunan anggaran operasionalisasi shelter dan fasilitasi permakanan isolasi mandiri pada Perubahan Renja Dinsosnakertrans sebesar sekitar Rp. 623.108.000,-.

Sedangkan bagi masyarakat yang potensial, dilakukan intervensi melalui aktivitas yang bersifat memberdayakan untuk membangun kesadaran serta mendorong kemandirian dan akses keluar dari kemiskinan dan atau kerentanan. Program pemberdayaan baik dari bidang sosial maupun ketenagakerjaan perlu ditempuh mengingat pemberian bantuan sosial secara terus menerus justru dapat melemahkan daya juang masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan bagi pencari kerja adalah pemberian pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi yang ditambahkan jenis dan volumenya meliputi:

1. Pelatihan Satpam bagi 25 orang;
2. Pelatihan Sosial Media Marketing DBHCHT bagi 16 orang;
3. Pelatihan Stir Mobil bagi 25 orang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas program kegiatan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), maka pada anggaran Perubahan 2023 Dinsosnakertrans mengalokasikan anggaran Kajian Anak Berhadapan dengan Hukum sebesar Rp. 70.000.000,-.

Penyusunan program kerja tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan produk hukum ini berimplikasi pada struktur program kerja dan penganggaran perangkat daerah. Pada urusan sosial, klasifikasi program kegiatan telah selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan telah memuat standar tersebut meliputi pelayanan rehabilitasi sosial dasar dan penanganan korban bencana skala kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat.

Untuk Perubahan Anggaran Tahun 2023, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang program kerja yang terdiri dari 1 program internal dan 10 program eksternal berdasarkan urusan pemerintah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 27.276.267.066,- atau bertambah sebesar Rp. 1.841.279.900,- (dari anggaran Murni 25.434.987.166,-). Secara keseluruhan dilakukan penyesuaian harga satuan makan minum rapat dengan Peraturan Walikota tentang Standard Harga Barang dan Jasa yang terbaru.

Terdapat 5 program, 14 kegiatan dan 64 sub kegiatan urusan sosial. Sedangkan urusan tenaga kerja terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Pada urusan transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Program-program yang mengalami dinamika signifikan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, antara lain berkaitan dengan penambahan gaji dan tunjangan ASN seiring dengan kebijakan pemberian Gaji ke-13 dan bertambahnya PPPK sebanyak 1 orang. Selain itu terdapat penambahan anggaran sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena direncanakan penambahan belanja modal peralatan/perlengkapan rumah tangga dan elektronik seperti CCTV, Komputer, Laptop, Printer dan lain sebagainya. Anggaran Pemeliharaan Gedung juga mengalami kenaikan untuk Jasa Perencanaan Konstruksi.
2. Program Rehabilitasi Sosial berkaitan dengan dinamika penambahan anggaran pada:
   - Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial menambahkan anggaran untuk Kajian Anak Berhadapan dengan Hukum sebesar Rp. 70.000.000,-;
   - Sub Kegiatan Penyediaan permakanan pada UPT RPSLUT Budhi Dharma dari sebelumnya dianggarkan 10 bulan (pada Murni 2023) menjadi 12 bulan, sehingga anggaran bertambah Rp. 147.310.000,- menjadi Rp. 905.411.000,- pada Perubahan 2023.

   Namun pada sub kegiatan yang dikelola oleh UPT RPA Wiloso Projo mengalami penurunan anggaran selaras dengan penuruna jumlah kelayan pada UPT RPA tersebut.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bertambah anggarannya dikarenakan adanya kebijakan pembeian bantuan sosial Asistensi Lajut Usia Miskin (ASLUM) sebesar Rp. 827.600.000,- kepada 2.069 Lansia (diberikan @Rp 200.000 x 2 bulan). Di sisi lain terdapat penghapusan pemberian Bansos berupa modal bagi peserta UEP PKH Graduasi Mandiri. Selain itu terdapat penurunan anggaran pula pada Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota berkenaan dengan ditiadakannya Tenaga Ahli serta pengurangan Tim Verval DTKS dan Validasi PBI.
4. Program Penanganan Bencana mengalami penurunan anggaran yang signifikan yang berkorelasi dengan kebijakan penutupan shelter akibatnya landainya kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta sejak awal tahun 2023.
5. Program Ketenagakerjaan pada beberapa sub kegiatan mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu:
   - Perluasan Kesempatan Kerja anggaran bertambah 1.297.825.000,- untuk mengakomodasi anggaran Padat Karya dari sumber dana BKK DIY;
   - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi bertambah anggarannya sebesar Rp. 187.371.090,- untuk mengakomodasi penambahan jenis pelatihanyaitu pelatihan Stir Mobil, Sosial Media Marketing dan Satpam.
6. Program Kesejahteraan Hubungan Industrial, khususnya pada sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja mengalami penambahan anggaran berkenaan dengan adanya kebijakan fasilitasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Ketua RT / RW / LPMK / Kampung sebesar Rp. 126.617.526,- (dengan rincian : 3.362 orang x 3 bulan x Rp 12.553,79,-).

Adapun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 secara terinci adalah sebagaimana tabel 3.2. di bawah ini.

TABEL 3.2
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**21,343,536,331**	**139,038,000**	**0**	**0**	**21,482,574,331**	**21,373,015,869**	**334,202,400**	**0**	**0**	**21,707,218,269**	**224.643.938**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**13,890,610,796**	**139,038,000**	**0**	**0**	**14,029,648,796**	**13,956,135,434**	**334,202,400**	**0**	**0**	**14,290,337,834**	**260.689.038**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**166,587,670**	**0**	**0**	**0**	**166,587,670**	**136,822,670**	**0**	**0**	**0**	**136,822,670**	**(29.765.000)**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,782,150	0	0	0	9,782,150	11,367,150	0	0	0	11,367,150	1.585.000	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,570,000	0	0	0	2,570,000	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,970,000	0	0	0	1,970,000	1,970,000	0	0	0	1,970,000	0	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,838,720	0	0	0	2,838,720	2,838,720	0	0	0	2,838,720	0	
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,238,720	0	0	0	2,238,720	2,238,720	0	0	0	2,238,720	0	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147,188,080	0	0	0	147,188,080	115,838,080	0	0	0	115,838,080	(31.350.000)	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11,249,995,200**	**0**	**0**	**0**	**11,249,995,200**	**11,395,618,200**	**0**	**0**	**0**	**11,395,618,200**	**145.623.000**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,155,939,200	0	0	0	11,155,939,200	11,300,768,200	0	0	0	11,300,768,200	144.829.000	
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,056,000	0	0	0	94,056,000	94,850,000	0	0	0	94,850,000	794.000	
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**24,638,000**	**0**	**0**	**0**	**24,638,000**	**8,405,000**	**0**	**0**	**0**	**8,405,000**	**(16.233.000)**	
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,725,000	0	0	0	1,725,000	(75.000)	
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,740,000	0	0	0	1,740,000	1,465,000	0	0	0	1,465,000	(275.000)	
1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,340,000	0	0	0	15,340,000	1,325,000	0	0	0	1,325,000	(14.015.000)	
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,368,000	0	0	0	1,368,000	1,815,000	0	0	0	1,815,000	447.000	
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,980,000	0	0	0	1,980,000	1,205,000	0	0	0	1,205,000	(775.000)	
1	06	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,410,000	0	0	0	2,410,000	870,000	0	0	0	870,000	(1.540.000)	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**5,220,000**	**0**	**0**	**0**	**5,220,000**	**3,180,000**	**0**	**0**	**0**	**3,180,000**	**(2.040.000)**	
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,220,000	0	0	0	5,220,000	3,180,000	0	0	0	3,180,000	(2.040.000)	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**707,551,702**	**1,500,000**	**0**	**0**	**709,051,702**	**812,446,564**	**0**	**0**	**0**	**812,446,564**	**103.394.862**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,705,440	0	0	0	8,705,440	13,429,380	0	0	0	13,429,380	4.723.940	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118,001,912	0	0	0	118,001,912	146,073,384	0	0	0	146,073,384	28.071.472	
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,852,750	1,500,000	0	0	41,352,750	29,696,700	0	0	0	29,696,700	(11.656.050)	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,506,600	0	0	0	29,506,600	27,853,100	0	0	0	27,853,100	(1.653.500)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,820,000	0	0	0	5,820,000	5,820,000	0	0	0	5,820,000	0	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		505,665,000	0	0	0	505,665,000	589,574,000	0	0	0	589,574,000	83.909.000	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**137,538,000**	**0**	**0**	**137,538,000**	**0**	**334,202,400**	**0**	**0**	**334,202,400**	**196.664.400**	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	59,468,000	0	0	59,468,000	0	71,400,000	0	0	71,400,000	11.932.000	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	78,070,000	0	0	78,070,000	0	262,802,400	0	0	262,802,400	184.732.400	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,243,069,224**	**0**	**0**	**0**	**1,243,069,224**	**1,193,050,000**	**0**	**0**	**0**	**1,193,050,000**	**(50.019.224)**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,100,000	0	0	0	8,100,000	5,300,000	0	0	0	5,300,000	(2.800.000)	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,000,000	0	0	0	9,000,000	6,410,000	0	0	0	6,410,000	(2.590.000)	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,225,969,224	0	0	0	1,225,969,224	1,181,340,000	0	0	0	1,181,340,000	(44.629.224)	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**493,549,000**	**0**	**0**	**0**	**493,549,000**	**406,613,000**	**0**	**0**	**0**	**406,613,000**	**(86.936.000)**	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,100,000	0	0	0	25,100,000	22,270,000	0	0	0	22,270,000	(2.830.000)	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		319,024,000	0	0	0	319,024,000	209,564,000	0	0	0	209,564,000	(109.460.000)	
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,400,000	0	0	0	3,400,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	1.100.000	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46,025,000	0	0	0	46,025,000	41,140,000	0	0	0	41,140,000	(4.885.000)	
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	129,139,000	0	0	0	129,139,000	29.139.000	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**572,082,600**	**0**	**0**	**0**	**572,082,600**	**597,687,600**	**0**	**0**	**0**	**597,687,600**	**25.605.000**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**572,082,600**	**0**	**0**	**0**	**572,082,600**	**597,687,600**	**0**	**0**	**0**	**597,687,600**	**25.605.000**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55,723,000	0	0	0	55,723,000	55,723,000	0	0	0	55,723,000	0	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		177,590,600	0	0	0	177,590,600	177,590,600	0	0	0	177,590,600	0	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,920,000	0	0	0	31,920,000	31,920,000	0	0	0	31,920,000	0	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		306,849,000	0	0	0	306,849,000	332,454,000	0	0	0	332,454,000	25.605.000	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**3 748,091,435**	**0**	**0**	**0**	**3,748,091,435**	**3,739,452,835**	**0**	**0**	**0**	**3,739,452,835**	**(8.638.600)**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**3 323,351,635**	**0**	**0**	**0**	**3,323,351,635**	**3,281,479,035**	**0**	**0**	**0**	**3,281,479,035**	**(41.872.600)**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		758,101,000	0	0	0	758,101,000	905,411,000	0	0	0	905,411,000	147.310.000	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		258,643,000	0	0	0	258,643,000	241,911,000	0	0	0	241,911,000	(16.732.000)	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		56,750,000	0	0	0	56,750,000	46,339,000	0	0	0	46,339,000	(10.411.000)	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		105,641,000	0	0	0	105,641,000	90,791,000	0	0	0	90,791,000	(14.850.000)	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,915,000	0	0	0	27,915,000	4,090,000	0	0	0	4,090,000	(23.825.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		2,400,000	0	0	0	2,400,000	5,460,000	0	0	0	5,460,000	3.060.000	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		53,500,000	0	0	0	53,500,000	50,460,000	0	0	0	50,460,000	(3.040.000)	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		589,843,035	0	0	0	589,843,035	565,775,035	0	0	0	565,775,035	(24.068.000)	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah			643,364,000	0	0	0	643,364,000	646,214,000	0	0	0	646,214,000	2.850.000	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Lain-lain PAD Yang Sah			231,108,000	0	0	0	231,108,000	231,108,000	0	0	0	231,108,000	0	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123,950,000	0	0	0	123,950,000	124,450,000	0	0	0	124,450,000	500.000	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,176,000	0	0	0	10,176,000	10,236,000	0	0	0	10,236,000	60.000	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan		170,940,000	0	0	0	170,940,000	117,774,000	0	0	0	117,774,000	(53.166.000)	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		269,275,600	0	0	0	269,275,600	219,430,000	0	0	0	219,430,000	(49.845.600)	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,420,000	0	0	0	2,420,000	2,520,000	0	0	0	2,520,000	100.000	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,325,000	0	0	0	19,325,000	19,510,000	0	0	0	19,510,000	185.000	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**424,739,800**	**0**	**0**	**0**	**424,739,800**	**457,973,800**	**0**	**0**	**0**	**457,973,800**	**33.234.000**	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140,860,800	0	0	0	140,860,800	117,235,800	0	0	0	117,235,800	(23.625.000)	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		216,532,000	0	0	0	216,532,000	273,316,000	0	0	0	273,316,000	56.784.000	
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67,347,000	0	0	0	67,347,000	67,422,000	0	0	0	67,422,000	75.000	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**2,009,260,000**	**0**	**0**	**0**	**2,009,260,000**	**2,578,773,000**	**0**	**0**	**0**	**2,578,773,000**	**569.513.000**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**2,009,260,000**	**0**	**0**	**0**	**2,009,260,000**	**2,578,773,000**	**0**	**0**	**0**	**2,578,773,000**	**569.513.000**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,424,330,000	0	0	0	1,424,330,000	1,353,797,000	0	0	0	1,353,797,000	(70.533.000)	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		423,620,000	0	0	0	423,620,000	1,223,556,000	0	0	0	1,223,556,000	799.936.000	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		161,310,000	0	0	0	161,310,000	1,420,000	0	0	0	1,420,000	(159.890.000)	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**1,123,491,500**	**0**	**0**	**0**	**1,123,491,500**	**500,967,000**	**0**	**0**	**0**	**500,967,000**	**(622.524.500)**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**714,058,000**	**0**	**0**	**0**	**714,058,000**	**91,070,000**	**0**	**0**	**0**	**91,070,000**	**(622.988.000)**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		712,618,000	0	0	0	712,618,000	89,510,000	0	0	0	89,510,000	(623.108.000)	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		720,000	0	0	0	720,000	780,000	0	0	0	780,000	60.000	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		720,000	0	0	0	720,000	780,000	0	0	0	780,000	60.000	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**				**409,433,500**	**0**	**0**	**0**	**409,433,500**	**409,897,000**	**0**	**0**	**0**	**409,897,000**	**463.500**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,160,000	0	0	0	2,160,000	2,280,000	0	0	0	2,280,000	120.000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		407,273,500	0	0	0	407,273,500	407,617,000	0	0	0	407,617,000	343.500	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**3,726,637,160**	**0**	**0**	**0**	**3,726,637,160**	**5,344,123,122**	**0**	**0**	**0**	**5,344,123,122**	**1.617.485.962**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**				**257,793,250**	**0**	**0**	**0**	**257,793,250**	**258,093,250**	**0**	**0**	**0**	**258,093,250**	**300.000**	
2	**07**	**02**	**2.01**	**Pe**	**yusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**				**257,793,250**	**0**	**0**	**0**	**257,793,250**	**258,093,250**	**0**	**0**	**0**	**258,093,250**	**300.000**	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		257,793,250	0	0	0	257,793,250	258,093,250	0	0	0	258,093,250	300.000	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**1,631,969,410**	**0**	**0**	**0**	**1,631,969,410**	**1,819,710,500**	**0**	**0**	**0**	**1,819,710,500**	**187.741.090**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**				**1,487,717,510**	**0**	**0**	**0**	**1,487,717,510**	**1,675,088,600**	**0**	**0**	**0**	**1,675,088,600**	**187.371.090**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,487,717,510	0	0	0	1,487,717,510	1,675,088,600	0	0	0	1,675,088,600	187.371.090	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**				**125,323,000**	**0**	**0**	**0**	**125,323,000**	**125,693,000**	**0**	**0**	**0**	**125,693,000**	**370.000**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125,323,000	0	0	0	125,323,000	125,693,000	0	0	0	125,693,000	370.000	
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**				**18,928,900**	**0**	**0**	**0**	**18,928,900**	**18,928,900**	**0**	**0**	**0**	**18,928,900**	**0**	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,928,900	0	0	0	18,928,900	18,928,900	0	0	0	18,928,900	0	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				**787,986,250**	**0**	**0**	**0**	**787,986,250**	**2,089,666,250**	**0**	**0**	**0**	**2,089,666,250**	**1.301.680.000**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**				**615,249,500**	**0**	**0**	**0**	**615,249,500**	**1,915,939,500**	**0**	**0**	**0**	**1,915,939,500**	**1.300.690.000**	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,450,000	0	0	0	18,450,000	21,015,000	0	0	0	21,015,000	2.565.000	
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,360,000	0	0	0	17,360,000	17,660,000	0	0	0	17,660,000	300.000	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		579,439,500	0	0	0	579,439,500	1,877,264,500	0	0	0	1,877,264,500	1.297.825.000	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**				**172,736,750**	**0**	**0**	**0**	**172,736,750**	**173,726,750**	**0**	**0**	**0**	**173,726,750**	**990.000**	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81,126,750	0	0	0	81,126,750	82,116,750	0	0	0	82,116,750	990.000	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		91,610,000	0	0	0	91,610,000	91,610,000	0	0	0	91,610,000	0	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**1,048,888,250**	**0**	**0**	**0**	**1,048,888,250**	**1,176,653,122**	**0**	**0**	**0**	**1,176,653,122**	**127.764.872**	
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**287,305,500**	**0**	**0**	**0**	**287,305,500**	**284,855,500**	**0**	**0**	**0**	**284,855,500**	**(2.450.000)**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,376,000	0	0	0	18,376,000	18,976,000	0	0	0	18,976,000	600.000	
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,987,250	0	0	0	13,987,250	14,362,250	0	0	0	14,362,250	375.000	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		254,942,250	0	0	0	254,942,250	251,517,250	0	0	0	251,517,250	(3.425.000)	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**761,582,750**	**0**	**0**	**0**	**761,582,750**	**891,797,622**	**0**	**0**	**0**	**891,797,622**	**130.214.872**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		202,808,500	0	0	0	202,808,500	193,934,700	0	0	0	193,934,700	(8.873.800)	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,378,000	0	0	0	21,378,000	22,253,000	0	0	0	22,253,000	875.000	

2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,318,000	0	0	0	94,318,000	95,354,000	0	0	0	95,354,000	1.036.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Buruh serta Non Afiliasi (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)															
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84,516,000	0	0	0	84,516,000	86,026,146	0	0	0	86,026,146	1.510.146	
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		358,562,250	0	0	0	358,562,250	494,229,776	0	0	0	494,229,776	135.667.526	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**225,775,675**	**0**	**0**	**0**	**225,775,675**	**224,925,675**	**0**	**0**	**0**	**224,925,675**	**(850.000)**	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				**225,775,675**	**0**	**0**	**0**	**225,775,675**	**224,925,675**	**0**	**0**	**0**	**224,925,675**	**(850.000)**	
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**225,775,675**	**0**	**0**	**0**	**225,775,675**	**224,925,675**	**0**	**0**	**0**	**224,925,675**	**(850.000)**	
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,940,000	0	0	0	52,940,000	63,486,000	0	0	0	63,486,000	10.546.000	
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44,977,000	0	0	0	44,977,000	44,977,000	0	0	0	44,977,000	0	
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43,858,675	0	0	0	43,858,675	39,974,675	0	0	0	39,974,675	(3.884.000)	
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84,000,000	0	0	0	84,000,000	76,488,000	0	0	0	76,488,000	(7.512.000)	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan teknis dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Perubahan yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Oleh karenanya kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta sangat diperlukan agar program-program kerja tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Ir. Edy Muhammad
NIP. 19630916 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 4
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023 ..... **II - 1**

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**

BAB IV PENUTUP ..... **IV - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta DP3AP2KB Tahun 2023.....II - 27
Tabel 3.1 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023..... III - 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti yang menjadi pertimbangan DP3AP2KB, yaitu:

1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dengan mendasari Juknis DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.
2. Kebutuhan sarana prasarana/modal dengan bertambahnya CPNS per 1 Maret 2022 sebanyak 11 orang di DP3AP2KB yang belum semua terpenuhi pada anggaran.
3. Kebutuhan pemeliharaan gedung dengan kepindahan gedung UPT PPA yang semula di Jl. Batikan pindah ke Depokan sesuai Keputusan Sekda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Derah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penempatan Lokasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 17 Mei 2022.
4. Kebutuhan pemeliharaan gedung untuk Rumah Aman di Depokan.
5. CCTV di kantor DP3AP2KB, TPA Beringharjo, dan Kantor Depokan (UPT dan Rumah Aman).
6. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang dirasa masih belum cukup dengan bertambahnya 11 orang CPNS di tahun 2022 dengan keseluruhan total 39 ASN dan 59 TT dengan 7 gedung: Gedung DP3AP2KB Balaikota, Gedung PKK, TPA Praba Dharma, TPA Beringharjo, UPT PPA dan Rumah Aman, Balai Penyuluh Jetis, serta Balai Penyuluh Mergangsan.
7. SPPD untuk acara Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus GOW ke Kota Batu, Malang, Studi Tiru Kampung KB, Kongres Anak dan Hari Anak Internasional, serta pengawalan dan pendampingan penghapusan alokon ke Semarang untuk 4 orang.
8. Pemeliharaan kursi 42 unit.
9. Penguatan di beberapa kegiatan seperti Monev Lembaga Layanan Pemberdayaan, Dokumen Kajian Rentrsa PKK, *Support Group* Perempuan Penyintas Korban Kekerasan Berbasis Gender, penguatan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Pembuatan Film Pendek terkait pencegahan perkawinan anak, honor mitra keluarga, FGD pencegahan kekerasan anak di sekolah, *Support Group* Anak Penyintas Korban Kekerasan, koordinasi forum KKB, Raperwal KKB, koordinasi fapsedu, serta Optimalisasi Kelompok Kegiatan BKS, PIKR dan UPPKA.

10. Beberapa tambahan honor pada beberapa kegiatan, diantaranya honor pengelola rumah data kependudukan, honor KIE Kader IMP, honor bagi kader SIP Posyandu, honor forum Genre dan Pertemuan sosialisasi Program Genre, serta honor Satgas Sigrak 3 bulan.
11. Kajian pemberdayaan ekonomi berbasis gender dan pembuatan video profil Kampung KB Terinspiratif.
12. Penyesuaian penghitungan gaji dan tunjangan ASN dari CASN menjadi ASN sebanyak 11 orang.
13. Efisiensi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan yang masih membutuhkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; serta
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan II Tahun 2023;
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;

3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2023 ini antara lain memuat:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023

DP3AP2KB kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksankaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian salah satu ketugasannya adalah merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan DP3AP2KB adalah memberikan informasi dan pemikiran strategis pada:

1. Penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan
2. Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak
3. Penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data
4. Penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Upaya DP3AP2KB dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

1. Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif
2. Persentase perempuan korban kekerasan yang terselesaikan
3. Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak
4. Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani
5. Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender
6. CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*)
7. Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan
8. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)
9. Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan DP3AP2KB meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manuasia melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional,

2. Tersedianya hasil-hasil kajian,
3. Fasilitasi berbagai forum dari mitra DP3AP2KB,
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang sinergis dan terpadu.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dimana target yang ingin dicapai adalah nilai A. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp3.578.378.019 dari target sebesar Rp4.886.104.360 atau sebesar 73,24% dan Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II sebesar 100%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 50,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp5.013.250 atau sebesar 98,80% dari target sebesar Rp5.074.250. Realisasi fisik tercapai 100% dan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 60,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 60,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp1.000.000 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp1.000.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 55,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp1.947.500 atau sebesar 99,87% target sebesar Rp1.950.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 55,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp3.800.000 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp3.800.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 5,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 5,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II belum ada atau sebesar 0,00%. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 30,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 30,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp2.456.000 atau sebesar 96,65% dari target sebesar Rp2.541.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tercapai sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 35,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 35,00%. Kemajuan keuangan

sampai Triwulan II adalah sebesar Rp1.265.000 atau sebesar 99,22% dari target sebesar Rp1.275.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 69,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 69,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp2.880.015.569 atau sebesar 70,32% dari target sebesar Rp4.095.873.137. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan penyerapan gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah sesuai dengan kebutuhan sampai akhir tahun 2023.

   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 70,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 70,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp5.247.850 atau sebesar 99,97% dari target sebesar Rp5.249.500. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 50,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp286.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp286.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kemajuan fisik maupun kemajuan keuangan belum ada, karena belum ada target. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kemajuan fisik maupun kemajuan keuangan belum ada, karena belum ada target. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 40,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 40,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp926.000 atau sebesar 84,18% dari target sebesar Rp1.100.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 25,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 25,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II belum ada karena belum ada target. Realisasi fisik tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 60,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 60,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp2.061.000 atau sebesar 82,11% dari target sebesar Rp2.510.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasikan pada makan minum.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 67,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 67,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp199.000 atau sebesar 99,50% dari target sebesar Rp200.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 67,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 67,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp993.000 atau sebesar 76,38% dari target sebesar Rp1.300.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasikan menyesuaikan kebutuhan belanja penggandaan.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 50,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp996.750 atau sebesar 67,35% dari target sebesar Rp1.480.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasikan pada makan minum.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 52,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp1.860.500 atau sebesar 86,33% dari target sebesar Rp2.155.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasikan pada makan minum.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 52,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp1.218.250 atau sebesar 69,81% dari target sebesar Rp1.745.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasikan pada makan minum.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 21,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 21,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp500.000 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp500.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 78,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 78,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp3.484.000 atau sebesar 99,54% dari target sebesar Rp3.500.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 86,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 86,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp30.770.100 atau sebesar 94,90% dari target sebesar Rp32.424.400. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini

didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah peralatan dan perlengkapan kantor dan juga pemeliharaan 42 kursi.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 77,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 77,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp4.399.500 atau sebesar 51,76% dari target sebesar Rp8.500.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini dikarenakan proses administrasi keuangan di akhir bulan Juni. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah beberapa jenis peralatan rumah tangga.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 58,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 58,00% Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp24.680.000 atau sebesar 88,14% dari target sebesar Rp28.000.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah cetak dus arsip.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 55,00% Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp300.000 atau sebesar 83,33% dari target sebesar Rp360.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah menyesuaikan belanja langganan surat kabar.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 77,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 77,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp55.582.335 atau sebesar 79,19% dari target sebesar Rp70.191.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah perjalanan

dinas sebagai pendamping kegiatan perjalanan dinas pada kegiatan di beberapa bidang.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 100,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp1.520.000 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp1.520.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah materai dan buku cek bendahara.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp3.835.508 atau sebesar 58,65% dari target sebesar Rp6.540.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini dikarenakan perencanaan tagihan telepon terlalu tinggi. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasikan.

   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 100,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp700.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp700.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 45,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp214.990.500 atau sebesar 97,12% dari target sebesar Rp221.368.500. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan

dirasionalisasikan pada honor Tenaga Teknis dan Jasa Tenaga Kebersihan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 47,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 47,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp22.931.213 atau sebesar 62,83% dari target sebesar Rp36.500.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah biaya mutasi mobil Perlindungan (Molin) dari Jakarta menjadi Yogyakarta.

   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 53,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 53,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp36.729.794 atau sebesar 68,53% dari target sebesar Rp53.600.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasi pada suku cadang kendaraan roda dua.

   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 59,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 59,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp34.400.400 atau sebesar 58,31% dari target sebesar Rp59.000.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah belanja headset 5 unit.

   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 78,71% dari target fisik Triwulan II sebesar 78,71%. Kemajuan keuangan

sampai Triwulan II adalah sebesar Rp234.269.000 atau sebesar 99,32% dari target sebesar Rp235.861.573. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah pemeliharaan gedung Depokan (UPT PPA dan Rumah Aman), bongkar pasang AC dari gedung UPT PPA di Batikan ke Depokan.

II. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp368.431.750,00 dari target Rp461.559.250,00 (79,82%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 40,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 40,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp14.151.000 atau sebesar 42,02% dari target sebesar Rp33.680.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah penguatan berupa kajian rentra PKK dan kajian pemberdayaan ekonomi berbasis gender.

   b. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 90,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 90,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp13.155.000 atau sebesar 96,30% dari target sebesar Rp13.660.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang

ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 98,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 98,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp9.230.000 atau sebesar 41,02% dari target sebesar Rp22.498.750. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

   b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 55,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp33.852.000 atau sebesar 57,04% dari target sebesar Rp59.349.500. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan capain fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 67,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 67,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp293.144.000 atau sebesar 89,71% dari target sebesar Rp326.751.250. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah penguatan

berupa tambahan peserta pada penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan pelatihan administrasi PKK serta perjalanan dinas untuk GOW.

b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 60,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 60,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp4.899.750 atau sebesar 87,19% dari target sebesar Rp5.619.750. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

III. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Persentase perempuan korban kekerasan yang terselesaikan.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp282.793.000 dari target Rp368.433.500 (76,76%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 93,06%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 40,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 45,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp23.640.000 atau sebesar 78,49% dari target sebesar Rp30.120.000. Realisasi fisik tercapai 88,89% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah fasilitasi FPKK Kemantren.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 50,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp142.380.000 atau sebesar 91,38% dari target sebesar Rp155.816.500. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah honor Satgas Sigrak, *support group* penyintas perempuan korban kekerasan dan Forum Satgas Sigrak.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 54,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 54,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp71.994.000 atau sebesar 65,27% dari target sebesar Rp110.302.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasikan.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 60,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp44.779.000 atau sebesar 62,03% dari target sebesar Rp72.195.000. Realisasi fisik tercapai 83,33% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini

didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

IV. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp547.646.250 dari target Rp605.125.500 (90,50%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 45,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp511.585.500 atau sebesar 90,94% dari target sebesar Rp562.524.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah perjalanan dinas pemenuhan hak anak, hari anak internasional, belanja Penambah Daya Tahan tubuh TPA, Papan nama Ramah Anak.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 45,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp33.455.750 atau sebesar 85,82% dari target sebesar Rp38.981.500. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dirasionalisasi.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 6,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 6,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp2.605.000 atau sebesar 71,96% dari target sebesar Rp3.620.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

V. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp42.813.590 dari target Rp492.404.250 (69,62%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100% .

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 38,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 38,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp84.185.000 atau sebesar 80,91% dari target sebesar Rp104.046.750. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah Perjalanan Dinas untuk Puspaga, Pembuatan Film Pendek terkait Pencegahan Perkawinan Anak, Honor mitra keluarga, dan Baju Identitas Puspaga.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 56,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 56,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp200.783.000 atau sebesar 73,83% dari target sebesar Rp271.938.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah FGD Pencegahan Kekekrasan Anak di Sekolah, Laporan Billingual.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 90,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 90,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp1.380.000 atau sebesar 5,15% dari target sebesar Rp26.780.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ada di akhir bulan sehingga administrasi keuangan baru terpenuhi di bulan Juli 2023. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 65,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 65,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp8.402.500 atau sebesar 83,40% dari target sebesar Rp10.075.500. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang

ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah Support Group Anak Penyintas Korban Kekerasan.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 57,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 57,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp45.138.090 atau sebesar 59,03% dari target sebesar Rp76.464.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 63,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 63,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp2.925.000 atau sebesar 94,35% dari target sebesar Rp3.100.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

VI. Program Pengendalian Penduduk

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp147.715.225 dari target Rp148.045.225 (99,78%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100% .

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 14,75% dari target fisik Triwulan II sebesar 14,75%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp3.305.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp3.305.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan dilakukan penambahan pada rapat koordinasi karena adanya penambahan 14 sekolah.

b. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 43,25% dari target fisik Triwulan II sebesar 43,25%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp51.754.000 atau sebesar 99,42% dari target sebesar Rp51.754.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah beberapa rapat koordinasi yaitu untuk forum KKB, Raperwal KKB, Honor Tim Fapsedu, honor operasional ketua KKB, honor Fapsedu dan kebutuhan perjalanan dinas studi tiru.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

a. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 56,27% dari target fisik Triwulan II sebesar 56,27%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp2.660.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp2.660.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah honor pengelola rumah data kependudukan.

b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45,02% dari target fisik Triwulan II sebesar 45,02%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp36.972.225 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp36.972.225. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah honor pengelola rumah data kependudukan.

c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52,53% dari target fisik Triwulan II sebesar 52,53%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp30.824.000 atau sebesar 99,90% dari target sebesar Rp30.854.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

d. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,38% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,38%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp22.200.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp22.200.000. Realisasi fisik dan realisasi keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

VII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur CPR (Contraceptive Prevalence Rate) dan Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp747.528.000 dari target Rp1.498.250.900 (49,89%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 95,90%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 75,33% dari target fisik Triwulan II sebesar 85,33%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp16.500.000 atau sebesar 13,52% dari target sebesar Rp122.000.000. Realisasi fisik tercapai 88,28%, sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan

   b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,12% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,12%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp50.990.000 atau sebesar 60,87% dari target sebesar Rp83.762.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah makan minum untuk pertemuan persiapan minilokakarya stunting.

   c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,33% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,33%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp17.370.000 atau sebesar 70,75% dari target sebesar Rp24.550.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan

   d. Pengendalian Program KKBPK

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 38,95% dari target fisik Triwulan II sebesar 38,95%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp25.492.500 atau sebesar

94,14% dari target sebesar Rp27.080.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan

e. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,16% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,16%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp54.682.000 atau sebesar 92,70% dari target sebesar Rp58.990.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 9,35% dari target fisik Triwulan II sebesar 9,35%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp3.737.000 atau sebesar 95,40% dari target sebesar Rp3.917.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah Honor KIE Kader IMP.

b. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 45,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp600.000 atau sebesar 75,00% dari target sebesar Rp800.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,11% dari target fisik Triwulan II sebesar 55,11%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp23.763.000 atau sebesar 83,81% dari target sebesar Rp28.355.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah perjalanan dinas ke Semarang untuk kegiatan pengghapusan alokon ED (expired Date).

b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 59,72% dari target fisik Triwulan II sebesar 59,72%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp270.837.500 atau sebesar 58,65% dari target sebesar Rp461.778.900. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan

c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 100,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp87.049.000 atau sebesar 33,06% dari target sebesar Rp263.290.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan

d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 65,93% dari target fisik Triwulan II sebesar 65,93%. Kemajuan keuangan

sampai Triwulan II adalah sebesar Rp12.841.000 atau sebesar 82,62% dari target sebesar Rp5.543.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 35,30% dari target fisik Triwulan II sebesar 60,37%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp178.416.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp402.885.000. Realisasi fisik tercapai 58,47% sedangkan realisasi keuangan rendah. Pelaksanaan kegiatan ini terkendala dengan penyesuaian waktu kegiatan bersama wilayah. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah pembuatan video profil 5 Kampung KB terinspiratif.

   b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 61,14% dari target fisik Triwulan II sebesar 61,14%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp5.250.000 atau sebesar 99,06% dari target sebesar Rp5.300.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

VIII. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp385.483.500 dari target Rp999.420.000 (38,57%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 85,30%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 80,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 100,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II belum ada atau sebesar 0% dari target sebesar Rp360.000.000. Realisasi fisik tercapai 80% sedangkan realisasi keuangan masih nol. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan melalui e-katalog sesuai dengan tata kala yang ditetapkan, namun terkendala dari pengiriman barang oleh penyedia. Sisa anggaran pada Perubahan Renja 2023 akan dioptimalkan.

   b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 39,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 39,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp45.397.000 atau sebesar 94,45% dari target sebesar Rp48.065.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah untuk dilakukan optimalisasi kegiatan BKS,PIKR dan UPPKA.

   c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 52,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp326.361.500 atau sebesar 60,10% dari target sebesar Rp543.020.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan cukup. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah honor TPPS tingkat kota karena jumlah anggota dalam SK TPPS bertambah.

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 20,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 43,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp7.500.000 atau sebesar 18,02% dari target sebesar Rp41.610.000. Realisasi fisik tercapai 46,51% sedangkan realisasi keuangan rendah. Pelaksanaan kegiatan ini terkendala penyesuaian waktu bersama wilayah. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah honor bagi kader SIP Posyandu.

   b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 26,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 26,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp6.225.000 atau sebesar 92,57% dari target sebesar Rp6.725.000. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 akan ditambah honor forum genre dan pertemuan sosialisasi program genre.

Adapun evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan DP3AP2KB sampai Triwulan II secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini (Simoneva).

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023

1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.18 Nilai
2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	0,10 persen
3	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak	0,06 persen
4	Terkendalinya jumlah penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	10-9 CBR
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	86.17 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya keberdayaan perempuan	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif**	**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif = (Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelemb**	**83,00 persen**	**0**	**95,56 persen**	**0**	**78,89 persen**	**791.010.919,00**	**76.67 persen**	**461.559.250,00**	**persen**	**368.431.750,00**	**0,00 %**	**79,82 %**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	

				agaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%																			
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUGpada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								**116.578.960,00**		**47.340.000,00**		**27.306.000,00**		**57.68 %**						
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				0		0		100.618.960,00	40,00%	33.680.000,00	40,00%	14.151.000,00	100,00%	42,02 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		2	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				0		0		15.960.000,00	90,00%	13.660.000,00	90,00%	13.155.000,00	100,00%	96,30 %						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		41 Perangkat Daerah		90,00%		90,00%		100,00%							
		Pemberdayaan Perempuan Bidang PolitikHukumSosialdan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								**141.613.090,00**		**81.848.250,00**		**43.082.000,00**		**52.64 %**						
		3	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi				0		0		25.423.860,00	98,00%	22.498.750,00	98,00%	9.230.000,00	100,00%	41,02 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		98,00%		98,00%		100,00%							
		4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan				0		0		116.189.230,00	55,00%	59.349.500,00	55,00%	33.852.000,00	100,00%	57,04 %						

			Peningkatan Partisipasi Perempuan dan PolitikHukumSosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 organisasi		0 organisasi		20 organisasi		55,00%		55,00%		100,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									**532.818.869,00**		**332.371.000,00**		**298.043.750,00**		**89.67 %**						
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		521.898.914,00	67,00%	326.751.250,00	67,00%	293.144.000,00	100,00%	89,71 %						
				Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		0 orang		0 orang		120 orang		67,00%		67,00%		100,00%							
		6	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.919.955,00	60,00%	5.619.750,00	60,00%	4.899.750,00	100,00%	87,19 %						
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**68,88 %**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan**	**Persentase perempuan korban Kekerasan yang terselesaikan = (Jumlah korban kekerasan perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban kekerasan perempuan) *100%**	**91,00 persen**	**0**	**87,91 persen**	**0**	**88,00 persen**	**757.359.500,00**	**60.00 persen**	**368.433.500,00**	**persen**	**282.793.000,00**	**0,00 %**	**76,76 %**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								**74.750.000,00**		**30.120.000,00**		**23.640.000,00**		**78.49 %**							
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0		0		74.750.000,00	45,00%	30.120.000,00	40,00%	23.640.000,00	88,89%	78,49 %						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		45,00%		40,00%		88,89%							
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								**551.224.500,00**		**266.118.500,00**		**214.374.000,00**		**80.56 %**							
		2 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban				0		0		340.778.500,00	50,00%	155.816.500,00	50,00%	142.380.000,00	100,00%	91,38 %						

			Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		0 orang		0 orang		100 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		210.446.000,00	54,00%	110.302.000,00	54,00%	71.994.000,00	100,00%	65,27 %						
				Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota		0 layanan		0 layanan		6 layanan		54,00%		54,00%		100,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**131.385.000,00**		**72.195.000,00**		**44.779.000,00**		**62.03 %**							
		4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		131.385.000,00	60,00%	72.195.000,00	50,00%	44.779.000,00	83,33%	62,03 %						
				Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		0 Orang		0 Orang		210 Orang		60,00%		50,00%		83,33%							
		Rata-rata capaian kinerja														**93,06%**	**74,29 %**						
		Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

	Menurunnya kekerasan terhadap anak	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak**	**Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak = Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA**	**888-910 Nilai**	**0**	**886,00 Nilai**	**0**	**822-886 Nilai**	**1.472.936.000,00**	**822-886 Nilai**	**605.125.500,00**	**Nilai**	**547.646.250,00**	**0,00 %**	**90,50 %**					**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK**	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintahdan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									**1.389.582.500,00**		**601.505.500,00**		**545.041.250,00**		**90.61 %**						
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga PemerintahNon PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		1.302.201.000,00	45,00%	562.524.000,00	45,00%	511.585.500,00	100,00%	90,94 %						
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		0 Organisasi		0 Organisasi		143 Organisasi		45,00%		45,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		87.381.500,00	45,00%	38.981.500,00	45,00%	33.455.750,00	100,00%	85,82 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									**83.353.500,00**		**3.620.000,00**		**2.605.000,00**		**71.96 %**						
		3	Pengembangan KomunikasiInforma				0		0		83.353.500,00	6,00 %	3.620.000,00	6,00 %	2.605.000,00	100,00%	71,96 %						

			si dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		6,00 %		6,00 %		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																	**100,00%**	**82,91 %**						
Predikat kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani = (Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/ Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama)*100%**	**100,00 persen**	**0**	**100,00 persen**	**0**	**100,00 persen**	**970.964.750,00**	**100.00 persen**	**492.404.250,00**	**persen**	**342.813.590,00**	**0,00 %**	**69,62 %**					**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK**	

		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									**776.935.750,00**		**375.984.750,00**		**284.968.000,00**		**75.79 %**							
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		284.161.750,00	38,00%	104.046.750,00	38,00%	84.185.000,00	100,00%	80,91 %							
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah		38,00%		38,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		492.774.000,00	56,00%	271.938.000,00	56,00%	200.783.000,00	100,00%	73,83 %							
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		56,00%		56,00%		100,00%							
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									**164.029.000,00**		**89.639.500,00**		**56.465.590,00**		**62.99 %**							
		3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		17.415.500,00	65,00%	10.075.500,00	65,00%	8.402.500,00	100,00%	83,40 %							
				Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		40 orang		65,00%		65,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi				0		0		141.555.000,00	57,00%	76.464.000,00	57,00%	45.138.090,00	100,00%	59,03 %							

			Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0 layanan		0 layanan		7 layanan		57,00%		57,00%		100,00%							
		5	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		5.058.500,00	63,00%	3.100.000,00	63,00%	2.925.000,00	100,00%	94,35 %						
				Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		63,00%		63,00%		100,00%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**30.000.000,00**		**26.780.000,00**		**1.380.000,00**		**5.15%**						
		6	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		30.000.000,00	90,00%	26.780.000,00	90,00%	1.380.000,00	100,00%	5,15%						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		90,00%		90,00%		100,00%							
		Rata-rata capaian kinerja														**100,00%**	**66,11 %**						
		Predikat kinerja														**Sangat Ting**	**Sedang**						

																gi							
	Terkendalinya jumlah penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender = (40% ketersediaan data resmi pengendalian penduduk berbasis gender + 60% lembaga yang memanfaatkan)	100,00 persen	0	- -	0	65,00 persen	406.432.225,00	61.45 persen	148.045.225,00	persen	147.715.225,00	0,00 %	99,78 %					KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN DATA	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								**148.522.000,00**		**55.359.000,00**		**55.059.000,00**		**99.46 %**							
		1 AdvokasiSosialisasi dan Fasilitasi				0		0		23.630.000,00	14,75%	3.305.000,00	14,75%	3.305.000,00	100,00%	100,00%							

			Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTSJalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		0 Satuan pendidikan		0 Satuan pendidikan		24 Satuan pendidikan		14,75%		14,75%		100,00%						
		2	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan				0		0		124.892.000,00	43,25%	52.054.000,00	43,25%	51.754.000,00	100,00%	99,42%						
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Stategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		0 Organisasi		0 Organisasi		1 Organisasi		43,25%		43,25%		100,00%						
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								**257.910.225,00**		**92.686.225,00**		**92.656.225,00**		**99.97%**						
		3	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain				0		0		4.825.000,00	56,27%	2.660.000,00	56,27%	2.660.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		0 Unit		0 Unit		28 Unit		56,27%		56,27%		100,00%						
		4	Pembinaan dan Pengawasan				0		0		64.200.000,00	52,53%	30.854.000,00	52,53%	30.824.000,00	100,00%	99,90%						

			Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		52,53%		52,53%		100,00%							
		5	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0		0		97.800.000,00	51,38%	22.200.000,00	51,38%	22.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		51,38%		51,38%		100,00%							
		6	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0		0		91.085.225,00	45,02%	36.972.225,00	45,02%	36.972.225,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		45,02%		45,02%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,89 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Terkendalinya jumlah penduduk	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**CPR (Contraceptive Prevalence Rate)**	**CPR (Contraceptive Prevalence Rate) = (Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100**	**51,60 persen**	**0**	**74,04 persen**	**0**	**50,70 persen**	**2.569.069.000,00**	**50.65 persen**	**1.498.250.900,00**	**persen**	**747.528.000,00**	**0,00 %**	**49,89 %**					**KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**	

			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan = (Jumlah Kampung KB Berkelanjutan x Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta) *100%	100,00 persen	0	24,44 persen	0	53,33 persen	0	33.33	0		0	0,00 %	0,00%					KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN DATA	
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) = ((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) :	22,00 persen	0	28,03 persen	0	24,12 persen	0	27.20	0		0	0,00 %	0,00%					KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	

				Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100																			
		Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								**593.652.000,00**		**316.382.000,00**		**165.034.500,00**		**52.16 %**						
		1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0		0		128.552.000,00	51,16%	58.990.000,00	51,16%	54.682.000,00	100,00%	92,70 %						
				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		0 Organisasi		0 Organisasi		1 Organisasi		51,16%		51,16%		100,00%							
		2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				0		0		150.000.000,00	85,33%	122.000.000,00	75,33%	16.500.000,00	88,28%	13,52 %						
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		85,33%		75,33%		88,28%							
		3	Pelaksanaan Mekanisme				0		0		182.000.000,00	51,12%	83.762.000,00	51,12%	50.990.000,00	100,00%	60,87 %						

			Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam)Rapat Koordinasi Desa (Rakordes)dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		0 Laporan		0 Laporan		14 Laporan		51,12%		51,12%		100,00%							
		4	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK				0		0		53.100.000,00	51,33%	24.550.000,00	51,33%	17.370.000,00	100,00%	70,75 %						
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		51,33%		51,33%		100,00%							
		5	Pengendalian Program KKBPK				0		0		80.000.000,00	38,95%	27.080.000,00	38,95%	25.492.500,00	100,00%	94,14 %						
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		38,95%		38,95%		100,00%							
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								**92.000.000,00**		**4.717.000,00**		**4.337.000,00**		**91.94 %**							
		6	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0		0		2.000.000,00	45,00%	800.000,00	45,00%	600.000,00	100,00%	75,00 %						
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		0 Organisasi		0 Organisasi		1 Organisasi		45,00%		45,00%		100,00%							

		7	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			0		0		90.000.000,00	9,35 %	3.917.000,00	9,35 %	3.737.000,00	100,00%	95,40 %							
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		0 Orang		0 Orang		662 Orang		9,35 %		9,35 %		100,00%							
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								**1.176.917.000,00**		**768.966.900,00**		**394.490.500,00**		**51.3%**							
		8	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			0		0		56.700.000,00	55,11%	28.355.000,00	55,11%	23.763.000,00	100,00%	83,81 %							
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		0 Laporan		0 Laporan		63 Laporan		55,11%		55,11%		100,00%							
		9	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			0		0		826.027.000,00	59,72%	461.778.900,00	59,72%	270.837.500,00	100,00%	58,65 %							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		0 Orang		0 Orang		1.784 Orang		59,72%		59,72%		100,00%							
		10	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			0		0		263.290.000,00	100,00%	263.290.000,00	100,00%	87.049.000,00	100,00%	33,06 %							
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			0		0		30.900.000,00	65,93%	15.543.000,00	65,93%	12.841.000,00	100,00%	82,62 %							
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		65,93%		65,93%		100,00%							
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								**706.500.000,00**		**408.185.000,00**		**183.666.000,00**		**45%**							

		12	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			0		0		9.000.000,00	61,14%	5.300.000,00	61,14%	5.250.000,00	100,00%	99,06%							
				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	61,14%		61,14%		100,00%								
		13	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			0		0		697.500.000,00	60,37%	402.885.000,00	35,30%	178.416.000,00	58,47%	44,28%							
				Jumlah kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di kampung KB		0 Kampung		0 Kampung		45 Kampung	60,37%		39,30%		65,10%								
Rata-rata capaian kinerja															**95,90%**	**69,53%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**							
	Terkendalinya jumlah penduduk	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna**	**Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna = (Kelompok kegiatan bina keluarga sejahter**	**8,00 persen**	**0**	**0,00 persen**	**0**	**5,00 persen**	**1.674.431.000,00**	**4.41 persen**	**999.420.000,00**	**persen**	**385.483.500,00**	**0,00 %**	**38,57 %**					**KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**	

				a dengan stratifikasi paripurna x Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) *100%																			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								**1.549.191.000,00**		**951.085.000,00**		**371.758.500,00**		**39.09 %**							
		1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0		0		360.000.000,00	100,00%	360.000.000,00	80,00%	0	80,00%	0,00%							
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0 Unit		0 Unit		30 Unit		100,00%		80,00%		80,00%							
		2	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0		0		126.191.000,00	39,00%	48.065.000,00	39,00%	45.397.000,00	100,00%	94,45 %							
				Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		39,00%		39,00%		100,00%							
		3	Penyediaan Biaya Operasional bagi				0		0		1.063.000.000,00	52,00%	543.020.000,00	52,00%	326.361.500,00	100,00%	60,10 %							

			Pengelola dan Pelaksana (KaderKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPP KSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)		0 Orang		0 Orang		495 Orang		52,00%		52,00%		100,00%							
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								**125.240.000,00**		**48.335.000,00**		**13.725.000,00**		**28.4%**							
		4	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPP KSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			0		0		98.365.000,00	43,00%	41.610.000,00	20,00%	7.500.000,00	46,51%	18,02%							
				Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatandalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		43,00%		20,00%		46,51%							
		5	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			0		0		26.875.000,00	26,00%	6.725.000,00	26,00%	6.225.000,00	100,00%	92,57%							
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		26,00%		26,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**85,30%**	**53,03%**						
									Predikat kinerja							**Tinggi**	**Rendah**						

	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana =**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**7.590.455.280,00**	**A nilai**	**4.886.104.360,00**	**nilai**	**3.578.378.019,00**	**0,00 %**	**73,24 %**					**SEKRETARIS DINAS**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**45.339.750,00**		**15.640.250,00**		**15.481.750,00**		**98.99 %**						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		10.373.750,00	50,00%	5.074.250,00	50,00%	5.013.250,00	100,00%	98,80 %						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.725.000,00	60,00%	1.000.000,00	60,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		3.900.000,00	55,00%	1.950.000,00	55,00%	1.947.500,00	100,00%	99,87 %						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							

		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0		0		7.355.000,00	55,00%	3.800.000,00	55,00%	3.800.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0		0		8.715.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		5,00%		5,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		0		9.321.000,00	30,00%	2.541.000,00	30,00%	2.456.000,00	100,00%	96,65%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		15 Laporan		30,00%		30,00%		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		0		3.950.000,00	35,00%	1.275.000,00	35,00%	1.265.000,00	100,00%	99,22%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		35,00%		35,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**6.043.039.750,00**		**4.102.508.637,00**		**2.886.475.419,00**		**70.36%**							
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0		0		6.029.866.000,00	69,00%	4.095.873.137,00	69,00%	2.880.015.569,00	100,00%	70,32%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ Bulan		0 Orang/ Bulan		42 Orang/ Bulan		69,00%		69,00%		100,00%							
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		7.598.500,00	70,00%	5.249.500,00	70,00%	5.247.850,00	100,00%	99,97%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%							

		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		572.250,00	50,00%	286.000,00	50,00%	286.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		0		1.196.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		0		671.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			0		0		2.784.000,00	40,00%	1.100.000,00	40,00%	926.000,00	100,00%	84,18%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		14 Laporan		40,00%		40,00%		100,00%							
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0		352.000,00	25,00%	0	25,00%	0	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**17.244.000,00**		**9.390.000,00**		**7.328.500,00**		**78.05 %**							
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		4.210.000,00	60,00%	2.510.000,00	60,00%	2.061.000,00	100,00%	82,11%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							

		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		305.500,00	67,00%	200.000,00	67,00%	199.000,00	100,00%	99,50%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		67,00%		67,00%		100,00%									
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0		0		2.000.000,00	67,00%	1.300.000,00	67,00%	993.000,00	100,00%	76,38%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		67,00%		67,00%		100,00%									
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		0		3.060.000,00	50,00%	1.480.000,00	50,00%	996.750,00	100,00%	67,35%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%									
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		0		4.210.000,00	52,00%	2.155.000,00	52,00%	1.860.500,00	100,00%	86,33%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		52,00%		52,00%		100,00%									
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		3.458.500,00	52,00%	1.745.000,00	52,00%	1.218.250,00	100,00%	69,81%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		52,00%		52,00%		100,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**2.500.000,00**		**500.000,00**		**500.000,00**		**100%**							
		21	MonitoringEvaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0		0		2.500.000,00	21,00%	500.000,00	21,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		21,00%		21,00%		100,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**195.055.283,00**		**142.975.400,00**		**119.215.935,00**		**83.38%**							
		22	Penyediaan Komponen Instalasi			0		0		4.557.150,00	78,00%	3.500.000,00	78,00%	3.484.000,00	100,00%	99,54%							

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		78,00%		78,00%		100,00%							
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		38.370.968,00	86,00%	32.424.400,00	86,00%	30.770.100,00	100,00%	94,90%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		86,00%		86,00%		100,00%							
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		11.295.665,00	77,00%	8.500.000,00	77,00%	4.399.500,00	100,00%	51,76%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		77,00%		77,00%		100,00%							
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		48.980.500,00	58,00%	28.000.000,00	58,00%	24.680.000,00	100,00%	88,14%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		58,00%		58,00%		100,00%							
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		660.000,00	55,00%	360.000,00	55,00%	300.000,00	100,00%	83,33%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		91.191.000,00	77,00%	70.191.000,00	77,00%	55.582.335,00	100,00%	79,19%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		77,00%		77,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**659.766.000,00**		**230.128.500,00**		**221.046.008,00**		**96.05%**						
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1.520.000,00	100,00%	1.520.000,00	100,00%	1.520.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan0		0 Laporan0		1 Laporan0		100,00%		100,00%		100,00%							
		29	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber				0		0		13.080.000,00	51,00%	6.540.000,00	51,00%	3.835.508,00	100,00%	58,65%						

			Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		51,00%		51,00%		100,00%								
		30	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		644.466.000,00	45,00%	221.368.500,00	45,00%	214.990.500,00	100,00%	97,12%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		45,00%		45,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**627.510.497,00**		**384.961.573,00**		**328.330.407,00**		**85.29%**							
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		79.810.000,00	47,00%	36.500.000,00	47,00%	22.931.213,00	100,00%	62,83%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		10 unit		47,00%		47,00%		100,00%								
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		101.251.500,00	53,00%	53.600.000,00	53,00%	36.729.794,00	100,00%	68,53%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		48 unit		53,00%		53,00%		100,00%								
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		100.002.500,00	59,00%	59.000.000,00	59,00%	34.400.400,00	100,00%	58,31%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		59,00%		59,00%		100,00%								
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		346.446.497,00	78,71%	235.861.573,00	78,71%	234.269.000,00	100,00%	99,32%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Paket		0 Paket		1 Paket		0,00%		82,26%		0,00%								

Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**80,97 %**						
Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program		**16.232.658.674,00**		**9.459.342.985,00**		**6.400.789.334,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)							**97,97%**	**67,67 %**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta akselerasi kegiatan dilakukan pasca libur Idul Fitri.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Lambatnya proses pengadaan untuk produk terkait anggaran DAK Fisik melalui e-katalog, sehingga target Juni baru bisa tercapai di awal Juli.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Ir. Edy Muhammad

NIP. 196309161992031006

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif DP3AP2KB naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang semula sebesar Rp16.232.658.674 pada Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Tahun 2023 menjadi Rp18.540.815.819 ada kenaikan sebesar Rp2.308.157.145. Hal ini disebabkan karena adanya rencana penambahan paket peralatan dan perlengkapan kantor dan pemeliharaan gedung atas perpindahan gedung UPT dari Jalan Batikan ke jalan Depokan, di mana di dalamnya juga termasuk pemeliharaan gedung Rumah Aman dan penyesuaian gaji dan tunjangan ASN yang semula penganggaran untuk CASN menjadi ASN.

Di samping itu juga adanya penguatan-penguatan untuk beberapa kegiatan berupa kajian renstra PKK, kajian pemberdayaan ekonomi berbasis gender, tambahan 40 penyediaan layanan pemberdayaan masyarakat dan tambahan peserta pelatihan administrasi PKK sebanyak 20 orang, support group perempuan penyintas korban kekerasan, peringatan hari anak Internasional dan pembuatan papan ramah anak, pembuatan film pendek terkait pencegahan perkawinan anak, rapat koordinasi (rakor) KKB, rakor Rapewal KKB, Honor Tim Fapsedu, Honor Operasional Ketua KKB, tambahan honor KIE Kader IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan), pembuatan video profil Kampung KB Terinspiratif, optimalisasi kegiatan BKS, PIK-R, dan UPPKA, tambahan honor bagi kader SIP Posyandu, tambahan honor forum Genre dan pertemuan sosialisasi program Genre. Di samping penambahan belanja, beberapa kegiatan juga melakukan rasionalisasi pada volume makan minum, penggandaan, dan biaya operasional Satgas Sigrak.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalamipenurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp7.590.455.280 dan pada Perubahan Renja 2023 menjadi Rp8.724.895.503. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp1.134.440.223.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah naik Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

   Anggaran murni sebesar Rp45.339.750 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp45.339.750. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran murni sebesar Rp10.373.750 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp10.373.750. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp1.725.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp1.725.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp3.900.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp3.900.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp7.355.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp7.355.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp8.715.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp8.715.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp9.321.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp9.321.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp3.950.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp3.950.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp6.043.039.750 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp6.142.605.750. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian gaji untuk penambahan komponen tunjangan.

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran murni sebesar Rp6.029.866.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp6.129.432.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian gaji untuk penambahan komponen tunjangan.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran murni sebesar Rp7.598.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp7.598.500. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran murni sebesar Rp572.250 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp572.250. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran murni sebesar Rp1.196.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp1.196.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran murni sebesar Rp671.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp671.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Anggaran murni sebesar Rp2.784.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp2.784.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran murni sebesar Rp352.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp352.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp17.244.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp14.932.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada anggaran makan minum.

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran murni sebesar Rp4.210.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp3.285.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada anggaran makan minum.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran murni sebesar Rp305.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp305.500. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran murni sebesar Rp2.000.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp1.986.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada anggaran makan minum.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran murni sebesar Rp3.060.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp2.715.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada anggaran makan minum.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran murni sebesar Rp4.210.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp3.670.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada anggaran makan minum.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran murni sebesar Rp3.458.500 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp2.970.500. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada anggaran makan minum.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp2.500.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp2.500.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran murni sebesar Rp2.500.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp2.500.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp195.055.283 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp850.581.506. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, kebutuhan barang cetakan, belanja langgaran surat kabar, dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran murni sebesar Rp4.557.150 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp4.557.150. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran murni sebesar Rp38.370.968 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp630.996.291. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan kebutuhan anggaran kertas selama 3 bulan sebagai bentuk pengembalian rasionalisasi saat penyusunan anggaran murni 2023 dan pemeliharaan mebeulair di antaranya sebanyak 42 kursi, serta belanja modal untuk memenuhi kebutuhan perpindahan gedung UPT PPA dari Jalan Batikan ke Jalan Depokan dan untuk mengganti beberpa komputer/laptop yang akan diajukan pada usulan penghapusan.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran murni sebesar Rp11.295.665 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp11.695.665. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya anggaran belanja bendera dan kapur barus.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran murni sebesar Rp48.980.500 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp51.821.400. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya kebutuhan 3 bulan cetak boks arsip sebagai pengembalian rasionalisasi saat penyusunan anggaran murni 2023, cetak amplop, map KPAI yang telah berganti alamat mengikuti perpindahan gedung UPT PPA.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran murni sebesar Rp660.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp720.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian biaya langgaran surat kabar.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran murni sebesar Rp91.191.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp150.791.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan rapat koordinasi dan perjalanan dinas PNS sebagai pendamping kegiatan di dalam/luar Jawa.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp659.766.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp654.340.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada penyediaan jasa komunikasi, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa lain orang perseorangan, namun ada kenaikan juga di kebutuhan buku cek Bank dan materai.

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Anggaran murni sebesar Rp1.520.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp2.270.000. Kenaikan anggaran dikarenakan penyesuaian kebutuhan buku cek Bank dan materai.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran murni sebesar Rp13.080.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp9.600.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada belanja tagihan telepon yaitu Hotline Service, Puspaga, UPT PPA, dan telepon Dinas.

   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran murni sebesar Rp700.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp700.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Anggaran murni sebesar Rp644.466.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp641.770.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada jasa lain orang perseorangan selama 1 bulan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp627.510.497 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp1.014.596.497. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan bahan bakar minyak, mutasi kendaraan, belanja modal berupa headset, dan kebtuuhan pemeliharaan gedung yaitu UPT PPA dan Rumah Aman. Namun ada juga yang penurunan anggaran, yang disebabkan rasionalisasi pada belanja pemeliharaan rutin kendaraan.

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Anggaran murni sebesar Rp79.810.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp89.760.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan bahan bakar minyak selama 3 bulan sebagai bentuk pengembalian hasil rasionalisasi saat pembahasan Anggaran murni 2023 dan kebutuhan mutasi kendaraan Molin dari Jakarta menjadi Yogyakarta.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Anggaran murni sebesar Rp101.251.500 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp101.240.000. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada pemeliharaan rutin kendaraan roda 2, namun juga ada kenaikan pada anggaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan roda 2.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Anggaran murni sebesar Rp100.002.500 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp102.650.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan belanja modal berupa headset dan kebutuhan bahan komputer.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Anggaran murni sebesar Rp346.446.497 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp720.946.497. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian pada anggaran pemeliharaan gedung yaitu UPT dan Rumah Aman yang akan melakukan pindah alamat di akhir Juni 2023.

II. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp791.010.919 dan pada Perubahan Renja 2023 menjadi Rp997.585.049. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp206.574.130.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp116.578.960 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp207.573.090. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya kajian renstra PKK dan kajian pemberdayaan ekonomi berbasis gender.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

   Anggaran murni sebesar Rp100.618.960 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp191.613.090. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya kajian renstra PKK dan kajian pemberdayaan ekonomi berbasis gender.

b. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

   Anggaran murni sebesar Rp15.960.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp15.960.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp141.613.090 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp141.613.090. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

      Anggaran murni sebesar Rp25.423.860 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp25.423.860. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

      Anggaran murni sebesar Rp116.189.230 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp116.189.230. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp532.818.869 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp648.398.869. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan penambahan peserta pelatihan administrasi PKK, serta perjalanan dinas untuk GOW.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp521.898.914 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp637.478.914. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan penambahan peserta pelatihan administrasi PKK, serta perjalanan dinas untuk GOW.

   b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp10.919.955 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp10.919.955. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

III. Program Perlindungan Perempuan

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp757.359.500 dan pada Perubahan Renja 2023 menjadi Rp823.743.500. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp66.384.000.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp74.750.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp87.515.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan fasilitasi FPKK Kemantren.

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp74.750.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp87.515.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan fasilitasi FPKK Kemantren.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp551.224.500 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp604.843.500. Kenaikan anggaran dikarenakan tambahan honor satgas sigrak selama 3 bulan, support group penyintas perempuan korban kekerasan, dan Forum Satgas Sigrak.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp340.778.500 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp399.558.500. Kenaikan anggaran dikarenakan tambahan honor satgas sigrak selama 3 bulan, support group penyintas perempuan korban kekerasan, dan Forum Satgas Sigrak.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp 210.446.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 205.285.000. Penurunan anggaran dikarenakan rasionalisasi pada biaya operasional Satgas Sigrak.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp131.385.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp131.385.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp131.385.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp131.385.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

IV. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp1.472.936.000 dan pada Perubahan Renja 2023 menjadi Rp1.588.800.000. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp115.864.000.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp1.389.582.500 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp1.505.446.500. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian tambahan belanja penambah daya tahan tubuh anak-anak TPA, pembuatan papan ramah anak, dan perjalanan dinas pemenuhan hak anak, hari anak internasional. Selain itu terdapat rasionalisasi pada pelaku seni.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp1.302.201.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp1.419.690.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian tambahan belanja penambah daya tahan tubuh anak-anak TPA, pembuatan papan ramah anak, dan perjalanan dinas pemenuhan hak anak, hari anak internasional.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp87.381.500 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp85.756.500. Penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pada pelaku seni.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp83.353.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp83.353.500. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp83.353.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp83.353.500. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

V. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp970.964.750 dan pada Perubahan Renja 2023 menjadi Rp1.042.564.750. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp71.600.000.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp776.935.750 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp836.635.750. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan perjalanan dinas Puspaga, pembuatan film pendek terkait pencegahan perkawinan anak, honor mitra keluarga, baju identitas Puspaga, FGD pencegahan kekerasan anak di sekolah, laporan bilingual KPAID.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp284.161.750 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp324.661.750. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan perjalanan dinas Puspaga, pembuatan film pendek terkait pencegahan perkawinan anak, honor mitra keluarga, baju identitas Puspaga.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp492.774.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp511.974.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya kegiatan FGD pencegahan kekerasan anak di sekolah dan laporan bilingual KPAID.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp30.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp30.000.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp30.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp30.000.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp164.029.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp175.929.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya kegiatan support group anak penyintas korban kekerasan.

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp17.415.500 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp29.315.500. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya kegiatan support group anak penyintas korban kekerasan.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp141.555.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp141.555.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp5.058.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp5.058.500. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

VI. Program Pengendalian Penduduk

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp406.432.225 dan pada Perubahan Renja 2023 menjadi Rp544.697.017. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp138.264.792.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

   Anggaran murni sebesar Rp148.522.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp253.780.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya kebutuhan rapat koordinasi SSK (Satuan Siaga Kependudukan), rakor forum KKB dan juga rakor Raperwal KKB.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

      Anggaran murni sebesar Rp23.630.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp24.842.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya kebutuhan rapat koordinasi SSK (Satuan Siaga Kependudukan).

   b. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

      Anggaran murni sebesar Rp124.892.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp228.938.000. Kenaikan anggaran

dkarenakan adanya kebutuhan rapat koordinasi forum KKB dan juga rakor Raperwal KKB.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp257.910.225 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp290.917.017. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya penyesuaian honor pengelola rumah data kependudukan, honor entry data SIM KB, dan kebutuhan rapat evaluasi hasil kegiatan.

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

      Anggaran murni sebesar Rp4.825.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp19.825.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya penyesuaian honor pengelola rumah data kependudukan.

   b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

      Anggaran murni sebesar Rp91.085.225 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp109.092.017. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya penyesuaian honor entry data SIM KB dan kebutuhan rapat evaluasi hasil kegiatan.

   c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

      Anggaran murni sebesar Rp64.200.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp64.200.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   d. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

      Anggaran murni sebesar Rp97.800.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp97.800.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

VII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp2.569.069.000 dan pada Perubahan Renja 2023 menjadi Rp2.755.749.000. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp186.680.000.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

   Anggaran murni sebesar Rp593.652.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp609.052.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya tambahan konsumsi pertemuan persiapan Minilokakarya Stunting di 14 Kemantren.

   Terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

      Anggaran murni sebesar Rp150.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp150.000.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

   b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

      Anggaran murni sebesar Rp182.000.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp197.400.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya tambahan konsumsi pertemuan persiapan Minilokakarya Stunting di 14 Kemantren.

   c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

      Anggaran murni sebesar Rp53.100.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp53.100.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

   d. Pengendalian Program KKBPK

      Anggaran murni sebesar Rp80.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp80.000.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

   e. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

      Anggaran murni sebesar Rp128.552.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp128.552.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

   Anggaran murni sebesar Rp92.000.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp151.580.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya penyesuaian honor KIE untuk Kader IMP.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

      Anggaran murni sebesar Rp90.000.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp149.580.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya penyesuaian honor KIE untuk Kader IMP.

   b. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

      Anggaran murni sebesar Rp2.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp2.000.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp1.176.917.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp1.213.617.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya penyesuaian kebutuhan penghapusan alokon ed yang mengharuskan monitoring penghapusan ke Semarang.

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

      Anggaran murni sebesar Rp56.700.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp93.400.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya penyesuaian kebutuhan penghapusan alokon ed yang mengharuskan monitoring penghapusan ke Semarang.

   b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

      Anggaran murni sebesar Rp826.027.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp826.027.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Anggaran murni sebesar Rp263.290.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp263.290.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Anggaran murni sebesar Rp30.900.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp30.900.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Anggaran murni sebesar Rp706.500.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp781.500.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya pembuatan video profil 5 kampung KB Terinspiratif.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Anggaran murni sebesar Rp697.500.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp772.500.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya pembuatan video profil 5 kampung KB Terinspiratif.

b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Anggaran murni sebesar Rp9.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp9.000.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

VIII. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp1.674.431.000 dan pada Perubahan Renja 2023 menjadi Rp2.062.781.000. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp388.350.000.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Anggaran murni sebesar Rp1.549.191.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp1.786.351.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya optimalisasi kegiatan BKS, PIK-R, dan UPPKA dan penambaam honor TPPS tingkat kota karena jumlah anggota dalam SK TPPS bertambah.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

   Anggaran murni sebesar Rp360.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp360.000.000. Tidak ada perubahan anggaran pada Perubahan Renja

b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

   Anggaran murni sebesar Rp126.191.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp356.551.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya optimalisasi kegiatan BKS, PIK-R, dan UPPKA.

c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

   Anggaran murni sebesar Rp1.063.000.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp1.069.800.000. Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan honor TPPS tingkat kota karena jumlah anggota dalam SK TPPS bertambah.

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

   Anggaran murni sebesar Rp125.240.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp276.430.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya tambahan honor bagi kader SIP Posyandu dan honor Forum Genre dan pertemuan sosialisasi Program Genre.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

   Anggaran murni sebesar Rp98.365.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp198.565.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya tambahan honor bagi kader SIP Posyandu.

b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

   Anggaran murni sebesar Rp26.875.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp77.865.000. Kenaikan anggaran dkarenakan adanya tambahan honor Forum Genre dan pertemuan sosialisasi Program Genre.

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**10.861.688.480**	**10.867.472.949**	**12.396.816.302**							**11.247.485.297**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	**7.742.082.310**	**7.590.455.280**	**8.724.895.503**						A Nilai	**7.945.884.942**	
2	**08**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 dokumen		0 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	**33.289.750**	**45.339.750**	**45.339.750**						30 dokumen	**45.339.750**	

2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.198.750	10.373.750	10.373.750	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	10.373.750	DP3AP2KB
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.725.000	1.725.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.725.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	3.900.000	3.900.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3.900.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.605.000	7.355.000	7.355.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	7.355.000	DP3AP2KB

2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.560.000	8.715.000	8.715.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	8.715.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	7.410.000	9.321.000	9.321.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	15 Laporan	9.321.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	3.016.000	3.950.000	3.950.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Laporan	3.950.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	44 laporan		0 laporan	44 laporan	44 laporan	**6.193.506.750**	**6.043.039.750**	**6.142.605.750**						44 laporan	**6.043.039.750**	

2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.180.333.000	6.029.866.000	6.129.432.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	42 Orang/bulan	6.029.866.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	12 dokumen	7.576.500	7.598.500	7.598.500	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 dokumen	7.598.500	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	12 dokumen	572.250	572.250	572.250	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 dokumen	572.250	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.196.000	1.196.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.196.000	DP3AP2KB

2	08	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan				3 dokumen	3 dokumen	675.000	671.000	671.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 dokumen	671.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.790.000	2.784.000	2.784.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	14 Laporan	2.784.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 dokumen	2 dokumen	360.000	352.000	352.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 dokumen	352.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	**19.238.500**	**17.244.000**	**14.932.000**						3 laporan	**17.238.500**	

2	08	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.210.000	4.210.000	3.285.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	4.210.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	305.500	305.500	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	300.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.986.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	2.000.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.060.000	3.060.000	2.715.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	3.060.000	DP3AP2KB

2	08	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.210.000	4.210.000	3.670.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	4.210.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.458.500	3.458.500	2.970.500	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3.458.500	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**						2 dokumen	**2.500.000**	
2	08	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 dokumen	2.500.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	8 laporan		0 laporan	8 laporan	8 laporan	**141.569.214**	**195.055.283**	**850.581.506**						8 laporan	**185.646.114**	

2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.557.150	4.557.150	4.557.150	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	4.557.150	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.646.318	38.370.968	630.996.291	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	38.370.968	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.595.665	11.295.665	11.695.665	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	11.295.665	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.360.081	48.980.500	51.821.400	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	49.871.331	DP3AP2KB

2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yangDisediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	660.000	660.000	720.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	660.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.750.000	91.191.000	150.791.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	80.891.000	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	**642.963.599**	**659.766.000**	**654.340.000**						3 laporan	**629.047.831**	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	520.000	1.520.000	2.270.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 laporan	1.520.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				1 laporan	1 laporan	13.080.000	13.080.000	9.600.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokra	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 laporan	13.080.000	DP3AP2KB

						Daya Air dan Listrik yang Disediakan									Muju		Dan Transformasi Pelayanan Publik	si			
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	700.000	700.000	700.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 laporan	700.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	628.663.599	644.466.000	641.770.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 laporan	613.747.831	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	56 unit		0unit	56 unit	56 unit	**709.014.497**	**627.510.497**	**1.014.596.497**						56 unit	**1.023.072.997**	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	100.310.000	79.810.000	89.760.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Unit	82.173.000	DP3AP2KB

2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	163.715.000	101.251.500	101.240.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	48 Unit	114.951.000	DP3AP2KB
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	126.263.000	100.002.500	102.650.000	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Unit	105.002.500	DP3AP2KB
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket	3 paket	318.726.497	346.446.497	720.946.497	Kota Yogyakarta Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 paket	720.946.497	DP3AP2KB
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	95,60 %		0 %	78,89 %	78,89 %	**783.273.171**	**791.010.919**	**997.585.049**						78,89 %	**891.465.049**	

2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**113.080.000**	**116.578.960**	**207.573.090**						2 dokumen	**157.573.090**	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 dokumen	5 dokumen	97.120.000	100.618.960	191.613.090	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 dokumen	141.613.090	DP3AP2KB
2	08	02	2.01	04	SosialisasiKebijakanPelaksanaan PUGTermasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti SosialisasiKebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk PerencaanPembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				41 PerangkaDaerah	41 PerangkaDaerah	15.960.000	15.960.000	15.960.000	KotaYogyakarta,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	MeningkatkanSumberDayaManusiaYangBerkualitasDanBerdayaSaing	PeningkatanKualitasSumberDayaManusia	MasyarakatKotaYogyakarta	41 PerangkaDaerah	15.960.000	DP3AP2KB

2	**08**	**02**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan PartisipasPerempuan dan PolitikHukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**163.913.090**	**141.613.090**	**141.613.090**						2 dokumen	**143.613.090**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 dokumen	2 dokumen	27.423.860	25.423.860	25.423.860	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 dokumen	27.423.860	DP3AP2KB
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Organisasi	20 Organisasi	136.489.230	116.189.230	116.189.230	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	20 Organisasi	116.189.230	DP3AP2KB

2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**506.280.081**	**532.818.869**	**648.398.869**						3 dokumen	**590.278.869**	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				120 Orang	230 Orang	495.360.126	521.898.914	637.478.914	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	230 Orang	579.358.914	DP3AP2KB
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 dokumen	3 dokumen	10.919.955	10.919.955	10.919.955	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 dokumen	10.919.955	DP3AP2KB
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	91,00 %		0 %	88 %	88 %	**139.950.000**	**206.135.000**	**218.900.000**						88 %	**222.900.000**	

2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**75.225.000**	**74.750.000**	**87.515.000**						2 dokumen	**87.515.000**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen HasiKoordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 dokumen	3 dokumen	75.225.000	74.750.000	87.515.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 dokumen	87.515.000	DP3AP2KB
2	**08**	**03**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	210 orang		0 orang	210 orang	210 orang	**64.725.000**	**131.385.000**	**131.385.000**						210 orang	**135.385.000**	

2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				210 orang	210 orang	64.725.000	131.385.000	131.385.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	210 orang	135.385.000	DP3AP2KB
2	**08**	**06**			**PROGRAMPEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Utama Predikat		0 Predikat		Utama Predikat	**1.342.098.954**	**1.472.936.000**	**1.588.800.000**						Utama Predikat	**1.380.970.436**	
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	173 organisasi		1730	143 organisasi	143 organisasi	**1.260.944.011**	**1.389.582.500**	**1.505.446.500**						143 organisasi	**1.297.616.936**	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi				143 organisasi	143 organisasi	1.171.533.011	1.302.201.000	1.419.690.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	143 organisasi	1210235436	DP3AP2KB

					Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha									han							
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	2 dokumen	89.411.000	87.381.500	85.756.500	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 dokumen	87.381.500	DP3AP2KB
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**81.154.943**	**83.353.500**	**83.353.500**						1 dokumen	**83.353.500**	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga				1 dokumen	1 dokumen	81.154.943	83.353.500	83.353.500	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 dokumen	83.353.500	DP3AP2KB

					Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									han							
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100 %		0 %	100 %	100 %	**854.284.045**	**806.935.750**	**866.635.750**						100%	**806.264.870**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	5 lembaga		0 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	**751.978.045**	**776.935.750**	**836.635.750**						5 lembaga	**776.264.870**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	252.967.620	284.161.750	324.661.750	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Perangkat Daerah	275.020.870	DP3AP2KB

					Kabupaten/Kota	Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	2 dokumen	499.010.425	492.774.000	511.974.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 dokumen	501244000	DP3AP2KB
2	**08**	**07**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**102.306.000**	**30.000.000**	**30.000.000**						1 dokumen	**30.000.000**	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas SumbeDaya Lembaga Penyedia LayanaAnak yang	umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				1 dokumen	1 dokumen	102.306.000	30.000.000	30.000.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelura	DAK NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 dokumen	30.000.000	DP3AP2KB

					Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									han	Anak						
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**4.386.331.510**	**4.649.932.225**	**5.363.227.017**							**4.811.196.465**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	100 %		0 %	65 %	65 %	**292.634.950**	**406.432.225**	**544.697.017**						65 %	**504.692.305**	
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan	53 organisasi		0 organisasi	25 organisasi	25 organisasi	**131.839.120**	**148.522.000**	**253.780.000**						25 organisasi	**253.780.000**	

2	1 4	0 2	2. 01	0 9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				24 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	23.630.000	23.630.000	24.842.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	33 Satuan Pendidikan	24.842.000	DP3AP2KB
2	1 4	0 2	2. 01	1 3	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1 Organisasi	2 Organisasi	108.209.120	124.892.000	228.938.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Organisasi	228.938.000	DP3AP2KB
2	**1 4**	**0 2**	2. 02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**160.795.830**	**257.910.225**	**290.917.017**						3 dokumen	**250.912.305**	

						gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan															
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				28 Unit	30 Unit	4.825.000	4.825.000	19.825.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	30 Unit	4.825.000	DP3AP2KB
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 laporan	1 laporan	0	64.200.000	64.200.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 laporan	64.200.000	DP3AP2KB
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data				1 laporan	1 laporan	0	97.800.000	97.800.000	Kota Yogyakarta Semua Keca	DAK Non Fisik-BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Sumber	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 laporan	97.800.000	DP3AP2KB

						Keluarga								matan Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia				
2	14	02	2.02	13	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pengumpulan Data Keluarga				1 laporan	1 laporan	143.290.830	91.085.225	109.092.017	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 laporan	84.087.305	DP3AP2KB
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	51,60 % 100 % 22 %		0 % 0 % 0 %	50,70 % 53,33 % 24,12 %	50,70 % 53,33 % 24,12 %	**2.320.962.440**	**2.569.069.000**	**2.755.749.000**						50,70 % 53,33 % 24,12 %	**2.640.570.040**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal	6 dokumen		0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	**484.468.040**	**593.652.000**	**609.052.000**						6 dokumen	**590.153.040**	

2	1 4	0 3	2. 01	0 1	Advokasi ProgramKKB PK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	4.375.000	128.552.000	128.552.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DAK NonFisik - BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PeningkatanKualitas SumberDaya Manusia	MasyarakatKotaYogyakarta	1 Organisasi	125.053.040	DP3AP 2KB
2	1 4	0 3	2. 01	0 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	70.640.000	150.000.000	150.000.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	150.000.000	DP3AP 2KB
2	1 4	0 3	2. 01	0 6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				14 Laporan	14 Laporan	218.400.000	182.000.000	197.400.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	14 Laporan	182.000.000	DP3AP 2KB

					dan Mini Lokakarya (Minilok)	Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 laporan	2 laporan	81.000.000	53.100.000	53.100.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 laporan	53.100.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 laporan	1 laporan	85.053.040	80.000.000	80.000.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 laporan	80.000.000	DP3AP2KB
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662 orang		0 orang	662 orang	662 orang	**216.000.000**	**92.000.000**	**151.580.000**						662 orang	**92.000.000**	

2	1 4	0 3	2. 02	0 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1 Organisasi	0	2.000.000	2.000.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Organisasi	2.000.000	DP3AP2KB
2	1 4	0 3	2. 02	0 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	umlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				662 orang	662 orang	216.000.000	90.000.000	149.580.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	662 orang	90.000.000	DP3AP2KB
2	**1 4**	**0 3**	2. 03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**1.154.744.400**	**1.176.917.000**	**1.213.617.000**						4 dokumen	**1.176.917.000**	

2	1 4	0 3	2. 03	0 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				63 Laporan	63 Laporan	28.350.000	56.700.000	93.400.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	63 Laporan	56.700.000	DP3AP2KB
2	1 4	0 3	2. 03	0 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1784 Orang	1784 Orang	629.194.400	826.027.000	826.027.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1784 Orang	826.027.000	DP3AP2KB
2	1 4	0 3	2. 03	0 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Jenis	4 Jenis	475.000.000	263.290.000	263.290.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KBReguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Jenis	263.290.000	DP3AP2KB
2	1 4	0 3	2. 03	0 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan				2 Laporan	2 Laporan	22.200.000	30.900.000	30.900.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PeningkatanKualitasSumberDaya Manusia	MasyarakatKotaYogyakarta	2 Laporan	30.900.000	DP3AP2KB

						TermasukJaringan dan Jejaringnya																
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	45 kampung		0 kampung	45 kampung	45 kampung	**465.750.000**	**706.500.000**	**781.500.000**						45 kampung	**781.500.000**	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	-	9.000.000	9.000.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	9.000.000	DP3AP2KB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduk				45 kampung	45 kampung	465.750.000	697.500.000	772.500.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	45 kampung	772.500.000	DP3AP2KB

						an, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB															
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna	8,13 %		0%	5%	5%	**1.772.734.120**	**1.674.431.000**	**2.062.781.000**						0,05	**1.665.934.120**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	**1.638.894.120**	**1.549.191.000**	**1.786.351.000**						3 laporan	**1.540.694.120**	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30 unit	30 unit	275.000.000	360.000.000	360.000.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	30 unit	360.000.000	DP3AP2KB

2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	6 Laporan	115.694.120	126.191.000	356.551.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	6 Laporan	117.694.120	DP3AP2KB
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola danPelaksana (Kader) Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Jumlah Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Yogyakarta yang turut serta dalam penanganan stunting				495 Orang	565 Orang	1.248.200.000	1.063.000.000	1.069.800.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	565 Orang	1.063.000.000	DP3AP2KB

2	**14**	**04**	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 laporan		0 laporan	2 laporan	2 laporan	**133.840.000**	**125.240.000**	**276.430.000**						2 laporan	**125.240.000**	
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 laporan	6 laporan	103.195.000	98.365.000	198.565.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	6 laporan	98.365.000	DP3AP2KB

2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan SosialisasProgram Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 laporan	3 laporan	30.645.000	26.875.000	77.865.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PeningkatanKualitas SumberDaya Manusia	MasyarakatKotaYogyakarta	3 laporan	26.875.000	DP3AP2KB
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**706.307.651**	**715.253.500**	**780.772.500**							**702.603.651**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	91,00 %		0 %	88%	88%	**564.058.651**	**551.224.500**	**604.843.500**						0,88	**532.969.651**	
2	**08**	**03**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang		0 orang	100 orang	100 orang	**564.058.651**	**551.224.500**	**604.843.500**						100 orang	**532.969.651**	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang				100 orang	105 orang	324.023.651	340.778.500	399.558.500	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkuali	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Masyarakat Kota Yogyakarta	105 orang	322.523.651	DP3AP2KB

					Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapatkan Layanan Pengaduan									Semua Kelurahan		tas Dan Berdaya Saing	Manusia				
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 layanan	6 layanan	240.035.000	210.446.000	205.285.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	6 layanan	210.446.000	DP3AP2KB
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100 %		0 %	100 %	100 %	**142.249.000**	**164.029.000**	**175.929.000**						100%	**169.634.000**	
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	40 orang		0 orang	40 orang	40 orang	**142.249.000**	**164.029.000**	**175.929.000**						40 orang	**169.634.000**	

2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang		0 orang	40 orang	42 orang	17.415.500	17.415.500	29.315.500	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	42 orang	17.415.500	DP3AP2KB
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Layanan	7 Layanan	114.170.000	141.555.000	141.555.000	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	7 Layanan	141.555.000	DP3AP2KB
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.663.500	5.058.500	5.058.500	Kota Yogyakarta Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10.663.500	DP3AP2KB
									TOTAL			**15.916.647.641**	**16.232.658.674**	**18.540.815.819**							**16.761.285.413**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berusaha memenuhi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan pada organisasi dan menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan.

Perubahan nomenklatur kelembagaan yang telah dilalui beberapa kali sedianya tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi urusan yang diemban, sehingga tidak mengganggu tersedianya pelayanan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Partisipasi, kerja sama, konsentrasi serta kesadaran akan peran masing-masing sangat diperlukan agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai keberhasilan yang optimal. Termasuk kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Dengan disusunnya usulan Perubahan Renja OPD 2023 ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di DP3AP2KB lebih mempunyai visi yang jelas dan prioritas yang harus dilakukan.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala DP3AP2KB

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Ir. Edy Muhammad.
NIP. 19630916 199203 1 006

2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan, Umbulharjo
Yogyakarta 55361 Telp/Fax (0274) 4396955
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id
WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, dimana Perubahan RKPD Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, akan menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023 apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor …. Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023, dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 ini adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023.
3. Sebagai Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023.

1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilakukan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang diantaranya dapat disebabkan karena :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD S/D TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD S/D TRIWULAN II

Review hasil pelaksanaan Renja DPP sampai dengan Triwulan II dan pencapaian target Renstra DPP Tahun 2017-2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPP 2023 sampai dengan Triwulan II disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPP Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Tribulan II Tahun 2023, realisasi pelaksanaan kegiatan secara fisik mencapai 61,07% dan realisasi keuangan 37.04% berdasarkan target sampai akhir tahun. Secara umum seluruh kegiatan fisik terlah berjalan sesuai dengan tatakala, Terdapat beberapa pembangunan yang telah diselesaikan secara fisik hanya tinggal pencairan seperti pembuatan rumah aklimatisasi dan pembuatan rumah jaga keamanan kantor, serta terdapat satu pekerjaan penyusunan DED masterplan kebun tegalrejo yang mengalami penundaan dari tatakala.

Seluruh target program pada TW 2 telah tercapai seluruhnya, baik pada Bidang Pangan, Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan dan Kehewanan. Secara rinci capaian realisasi kegiatan sampai dengan TW 2 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	90.4 poin
2	Meningkatnya Reformasi Rirokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	80.5 poin

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi s/d tahun 2022		Tingkat Capaian		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
			Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu						
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari**	**55,56 persen**	**0,00**	**26,67 persen**	**0,00**	**28,88 persen**	**0,00**	**28.88 persen**	**0,00**	**28.88 persen**	**580.140.000,00**	**100%**	**0,00%**					**Bidang Pangan**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
	1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			0,00		0,00		609.642.000,00	97,00%	585.906.000,00	97,00%	580.140.000,00	100,00%	99,02%						
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 unit		0 unit		10 unit		97,00%		97,00%		100,00%							
	Rata-rata capaian kinerja												**100,00%**	**99,02%**						
	Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Angka Ketersediaan Energi**	**2.626,90 kkal/kapita/ hari**	**0,00**	**2692,47 kkal/kapita/ hari**	**0,00**	**2.611,90 kkal/kapita/ hari**	**0,00**	**0 kkal/kapita/hari**	**0,00**	**0 kkal/kapita/hari**	**280.354.900,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Bidang Pangan**	
		Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	**100,00 persen**	**0,00**	**38,96 persen**	**0,00**	**54,21 persen**	**0,00**	**18.3**	**0,00**	**18.3**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang pangan**	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																			
	1 Penyediaan			0,00		0,00		109.126.824,00	54,00%	58.790.000,00	54,00%	50.965.000,00	100,00%	86,69%						

		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0 Laporan		0 Laporan		13 Laporan		54,00%		54,00%		100,00%							
	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			0,00		0,00		457.483.820,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
	3	Pemantauan StokPasokan dan Harga Pangan			0,00		0,00		10.202.464,00	51,00%	5.120.000,00	51,00%	5.120.000,00	100,00%	100,00%						
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota																				
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			0,00		0,00		71.410.000,00	11,00%	6.910.000,00	11,00%	6.250.000,00	100,00%	90,45%						
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		11,00%		11,00%		100,00%							
	5	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		192.150.000,00	100,00%	192.150.000,00	100,00%	192.150.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 ton		0 ton		18 ton		0,00%		100,00%		0,00%							
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																				
	6	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			0,00		0,00		60.730.000,00	8,00%	730.000,00	8,00%	729.900,00	100,00%	99,99%						
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		8,00%		8,00%		100,00%							
	7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			0,00		0,00		153.472.000,00	18,00%	25.140.000,00	18,00%	25.140.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		18,00%		18,00%		100,00%							
	Rata-rata capaian kinerja													**85,71%**	**82,45%**						
	Predikat kinerja													**Tinggi**	**Tinggi**						
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN	**Penurunan wilayah rawan pangan prioritas**	**0,00 wilayah**	**0,00**	**0,00 wilayah**	**0,00**	**3,00 wilayah**	**0,00**	**0 wilayah**	**0,00**	**0 wilayah**	**14.390.000,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Bidang pangan**	

	PANGAN	**2**																			
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan																				
	1	PenyusunanPemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			0,00		0,00		94.691.336,00	19,00%	17.036.000,00	19,00%	14.390.000,00	100,00%	84,47%						
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		19,00%		19,00%		100,00%							
	Rata-rata capaian kinerja													**100,00%**	**84,47%**						
	Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi**	**53,10 persen**	**0,00**	**17,70 persen**	**0,00**	**26,55 persen**	**0,00**	**22.12 persen**	**0,00**	**22.30 persen**	**103.548.900,00**	**100.81%**	**0,00%**					**Bidang Pangan**		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																				
	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		93.442.290,00	22,00%	19.969.000,00	22,00%	19.796.600,00	100,00%	99,14%						
			Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		22,00%		22,00%		100,00%							
	2	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		23.222.930,00	66,00%	15.205.750,00	66,00%	14.976.600,00	100,00%	98,49%						
			Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		66,00%		66,00%		100,00%							
	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		126.782.000,00	60,00%	75.351.000,00	60,00%	68.775.700,00	100,00%	91,27%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
	Rata-rata capaian kinerja													**100,00%**	**96,30%**						
	Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

PERUBAHAN RENJA DPP 2023

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin**	**2,25 persen**	**0,00**	**0,88 persen**	**0,00**	**1,27 persen**	**0,00**	**0.74 persen**	**0,00**	**1.76 persen**	**324.159.950,00**	**237%**	**0,00%**					**Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																				
	1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			0,00		0,00		119.428.000,00	65,00%	73.819.000,00	67,00%	68.240.000,00	103,08%	92,44%						
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 Kelompok		0 Kelompok		71 Kelompok		65,00%		67,00%		103,08%							
	2	Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu PengetahuanTeknologi dan Informasiserta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			0,00		0,00		225.924.818,00	20,00%	41.308.068,00	22,00%	32.244.900,00	110,00%	78,06%						
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok		0 Kelompok		6 Kelompok		20,00%		22,00%		110,00%							
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																				
	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		423.033.350,00	61,00%	249.964.350,00	65,00%	223.675.050,00	106,56%	89,48%						
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0 unit		0 unit		3 unit		61,00%		65,00%		106,56%							
	Rata-rata capaian kinerja													**106,54%**	**86,66%**						
	Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Peningkatan angka konsumsi ikan**	**35,55 Kg/Kapita/Tahun**	**0,00**	**35,43**	**0,00**	**35,46**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**28.585.000,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																				
	1	Pelaksanaan			0,00		0,00		130.447.500,00	24,00%	28.930.000,00	26,00%	28.585.000,00	108,33%	98,81%						

		Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	0 unit usaha		0 unit usaha		19 unit usaha		24,00%		26,00%		108,33%							
Rata-rata capaian kinerja														**108,33%**	**98,81%**						
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat**	**7,08 persen**	**0,00**	**1,77 persen**	**0,00**	**2,06 persen**	**0,00**	**0,95 persen**	**0,00**	**1.58 persen**	**484.042.470,00**	**166.32%**	**0,00%**					**Bidang Pertanian**	
			Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	**66,67 persen**	**0,00**	**40,00 persen**	**0,00**	**41,67 persen**	**0,00**	**22%**	**0,00**	**60%**	**0,00**	**272,73%**	**0,00%**					**Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	**100,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**30%**	**0,00**	**47.75%**	**0,00**	**159,17%**	**0,00%**					**Bidang Pertanian**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																				
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana			0,00		0,00		12.207.900,00	68,00%	8.203.700,00	66,00%	7.173.670,00	97,06%	87,44%						

		Pendukung Pertanian sesuai dengan KomoditasTeknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana dan Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		68,00%		66,00%		97,06%							
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhandan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																				
	2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			0,00		0,00		890.653.800,00	56,00%	491.912.050,00	56,00%	433.041.100,00	100,00%	88,03%						
			Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0 VUB		0 VUB		317 VUB		56,00%		56,00%		100,00%							
	3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			0,00		0,00		35.712.500,00	98,00%	34.812.500,00	98,00%	32.353.000,00	100,00%	92,94%						
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		98,00%		98,00%		100,00%							
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer																				
	4	Pemeriksaan MutuKhasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			0,00		0,00		15.821.320,00	83,00%	12.966.320,00	83,00%	11.474.700,00	100,00%	88,50%						
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	0 laporan		0 laporan		4 laporan		83,00%		83,00%		100,00%							
	Rata-rata capaian kinerja													**99,26%**	**89,23%**						
	Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**24,00 unit**	**0,00**	**22,00 unit**	**0,00**	**22,00 unit**	**0,00**	**22 unit**	**0,00**	**21 unit**	**5.249.900,00**	**95.45%**	**0,00%**					**Bidang Pertanian**	
	Pembangunan Prasarana Pertanian																				
	1	PembangunanRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			0,00		0,00		5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	5.249.900,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	Rata-rata capaian kinerja													**100,00%**	**100,00%**						

			Predikat kinerja										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi**	**90,38 persen**	**0,00**	**persen**	**0,00**	**61,54 persen**	**0,00**	**32% persen**	**0,00**	**85% persen**	**759.688.550,00**	**266%**	**0,00%**					**Bidang Perikanan dan Kehewanan**		
		Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	**48,72 persen**	**0,00**	**13,75 persen**	**0,00**	**22,49 persen**	**0,00**	**18.41%**	**0,00**	**18.53%**	**0,00**	**100,65%**	**0,00%**					**Bidang Pangan**		
	Penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			0,00		0,00		59.352.150,00	54,00%	31.049.150,00	54,00%	25.299.200,00	100,00%	81,48%							
			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0 laporan		0 laporan		4 laporan		54,00%		54,00%		100,00%								
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			0,00		0,00		222.371.500,00	82,00%	175.539.500,00	82,00%	167.695.200,00	100,00%	95,53%							
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 laporan		0 laporan		12 laporan		82,00%		82,00%		100,00%								
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																				
	3	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			0,00		0,00		410.179.830,00	53,00%	214.430.982,00	53,00%	192.113.000,00	100,00%	89,59%							
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 laporan		0 laporan		24 laporan		53,00%		53,00%		100,00%								
	4	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis			0,00		0,00		366.937.450,00	56,00%	197.730.450,00	56,00%	167.683.400,00	100,00%	84,80%							
			Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	0 laporan		0 laporan		12 laporan		56,00%		56,00%		100,00%								
	5	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			0,00		0,00		277.293.600,00	88,00%	241.361.676,00	88,00%	206.897.750,00	100,00%	85,72%							
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 dokumen		0 dokumen		24 dokumen		88,00%		88,00%		100,00%								
			Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**87,43%**							
			Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

PERUBAHAN RENJA DPP 2023

	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		**Persentase zoonosis prioritas yang terkendali**	**100,00 persen**	**0,00**	**84,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**100% persen**	**0,00**	**100% persen**	**91.868.015,00**	**100%**	**0,00%**					**Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																				
	1	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis			0,00		0,00		125.300.575,00	82,00%	101.349.825,00	82,00%	91.868.015,00	100,00%	90,64%						
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	0 laporan		0 laporan		1 laporan		82,00%		82,00%		100,00%							
	Rata-rata capaian kinerja													**100,00%**	**90,64%**						
	Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**Cakupan bina kelompok tani**	**49,11 persen**	**0,00**	**18,93 persen**	**0,00**	**27.55 persen**	**0,00**	**0 persen**	**0,00**	**0 persen**	**197.762.500,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Bidang Pertanian**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																				
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			0,00		0,00		129.054.500,00	65,00%	80.470.000,00	65,00%	75.063.000,00	100,00%	93,28%						
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 unit		0 unit		1 unit		65,00%		65,00%		100,00%							
	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			0,00		0,00		589.430.000,00	20,00%	111.525.000,00	20,00%	110.399.500,00	100,00%	98,99%						
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 unit		0 unit		3 unit		20,00%		20,00%		100,00%							
	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			0,00		0,00		12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	Rata-rata capaian kinerja													**100,00%**	**97,42%**						
	Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

PERUBAHAN RENJA DPP 2023

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**5.632.600.427,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretariat**	
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		5.812.500,00	65,00%	3.595.000,00	65,00%	2.543.500,00	100,00%	70,75%						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		65,00%		65,00%		100,00%								
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		680.000,00	100,00%	680.000,00	75,00%	495.000,00	75,00%	72,79%						
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		75,00%		75,00%								
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		680.000,00	35,00%	0,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%								
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00		0,00		680.000,00	80,00%	500.000,00	40,00%	0,00	50,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		80,00%		40,00%		50,00%								
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		680.000,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%								
	6 Koordinasi dan			0,00		0,00		3.780.000,00	65,00%	2.287.500,00	65,00%	1.761.500,00	100,00%	77,01%						

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		65,00%		65,00%		100,00%							
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		5.340.000,00	55,00%	2.625.000,00	55,00%	2.370.000,00	100,00%	90,29%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		55,00%		55,00%		100,00%							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		9.331.981.195,00	72,00%	5.971.775.372,00	72,00%	4.719.124.713,00	100,00%	79,02%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 orang		0 orang		95 orang		72,00%		72,00%		100,00%							
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		39.072.000,00	55,00%	19.536.000,00	55,00%	16.155.000,00	100,00%	82,69%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		725.000,00	100,00%	725.000,00	100,00%	724.500,00	100,00%	99,93%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		727.500,00	30,00%	127.500,00	30,00%	122.000,00	100,00%	95,69%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		30,00%		30,00%		100,00%							
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		650.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							

			Pemeriksaan																		
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00		0,00		2.185.000,00	58,00%	1.182.500,00	58,00%	1.127.000,00	100,00%	95,31%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		58,00%		58,00%		100,00%							
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		375.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		450.000,00	50,00%	225.000,00	50,00%	225.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		650.000,00	50,00%	325.000,00	25,00%	0,00	50,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0		0		0		50,00%		25,00%		50,00%							
	17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		3.740.000,00	36,00%	1.340.000,00	42,00%	1.180.000,00	116,67%	88,06%						
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		36,00%		42,00%		116,67%							
	18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		360.000,00	50,00%	180.000,00	45,00%	0,00	90,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,00%		45,00%		90,00%							
	19	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		560.000,00	50,00%	280.000,00	50,00%	180.000,00	100,00%	64,29%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							

			Daerah SKPD																		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
	20	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		1.600.000,00	50,00%	800.000,00	25,00%	0,00	50,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		25,00%		50,00%							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		12.049.400,00	100,00%	12.049.400,00	100,00%	12.037.400,00	100,00%	99,90%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
	22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		51.177.792,00	77,00%	38.850.292,00	77,00%	36.117.600,00	100,00%	92,97%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		4 Paket		77,00%		77,00%		100,00%							
	23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		18.763.750,00	100,00%	18.763.750,00	100,00%	18.362.000,00	100,00%	97,86%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
	24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		11.647.500,00	75,00%	8.647.500,00	71,00%	6.109.000,00	94,67%	70,64%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		2 Paket		75,00%		71,00%		94,67%							
	25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00		0,00		2.160.000,00	50,00%	1.080.000,00	50,00%	840.000,00	100,00%	77,78%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
	26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		46.590.000,00	50,00%	23.095.000,00	30,00%	10.915.000,00	60,00%	47,26%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		0 Laporan		80 Laporan		50,00%		30,00%		60,00%							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
	27	Pengadaan			0,00		0,00		3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	80,00%						

		Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	28	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		6.600.000,00	50,00%	3.300.000,00	50,00%	1.439.454,00	100,00%	43,62%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
	29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		1.659.382.082,00	42,00%	696.623.000,00	42,00%	666.568.160,00	100,00%	95,69%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		42,00%		42,00%		100,00%							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	30	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		25.550.000,00	60,00%	15.090.000,00	60,00%	14.370.300,00	100,00%	95,23%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit		0 unit		1 unit		60,00%		60,00%		100,00%							
	31	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00		0,00		211.840.000,00	57,00%	120.317.000,00	50,00%	88.196.700,00	87,72%	73,30%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		0 Unit		31 Unit		57,00%		50,00%		87,72%							
	32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		55.050.000,00	65,00%	35.450.000,00	58,00%	28.836.600,00	89,23%	81,34%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit		64 Unit		65,00%		58,00%		89,23%							
	33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		0,00		50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							

Rata-rata capaian kinerja						**92,83%**	**59,74%**						
Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program	**0,00**		**0,00**		**8.502.390.612,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 12) (%)						**95,05%**	**0%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 12)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. SUYANA

NIP. 196309101990031008

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPP Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, terdapat catatan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja output maupun outcome. Selain itu dengan adanya perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 serta adanya beberapa tambahan poin pokok-pokok pikiran legislatif, maka dalam Renja DPP Tahun 2023 ini dilakukan beberapa perubahan.

Beberapa kebijakan dalam perubahan yang dilaksanakan oleh DPP Kota Yogyakarta secara garis besar diantaranya adalah :

1. Adanya penyesuaian pada gaji dan tunjangan karena terdapat 1 orang mutarsi dari daerah lain dan 19 orang pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
2. Penambahan anggaran untuk belanja komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan peralatan rumah tangga.
3. Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
4. Penambahan anggaran untuk belanja mebelair kantor seperti kursi tunggu, , rak buku serta untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya seperti mesin pompa air, AC split, lemari pendingin, water dispenser, komputer serta printer.
5. Pengurangan anggaran penyesuaian sisa kontrak pengadaan jasa keamanan dan kebersihan kantor.
6. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan kantor berupa renovasi ruang kerja sekretariat dinas serta perbaikan rumah jaga petugas kebun hortikultura.
7. Penambahan belanja bahan dan alat kerja laboratorium mutu pangan serta laboratorium kultur jaringan.
8. Penambahan anggaran bimtek budidaya ikan hias dan aquascape, bimtek budidaya ikan konsumis serta bimtek pembenihan lele. Penambahan belanja operasional Balai Benih Ikan dan Sub Raiser berupa pakan ikan serta bahan dan alat kerja.
9. Penambahan anggaran untuk operasional Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura berupa bahan kimia, bahan dan bibit tanaman, belanja pemeliharaan peralatan laboratorium kultur jaringan serta perbaikan green house.

10. Penambahan anggaran untuk operasional Poliklinik Hewan serti bahan dan alat kerja, obat-obatan, bahan kimia serta belanja peralatan kedokteran berupa lampu tindakan medis, kandang nebulizer, sterilisator serta alat USG.
11. Penambahan belanja alat Centriguce susu dan lampu UV Sterilizer Ruangan untuk Laboratorium Kesmavet.
12. Penambahan anggaran untuk belanja sarana prasarana pertanian, bahan bibit tanaman, bahan baku demplot, bagan warna daun, pH meter serta solartuff untuk kegiatan penyuluhan pertanian.

Kebutuhan Dana untuk Program dan Kegiatan Perubahan Renja DPP 2023

No	Program/ Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**13,557,394,383**	**14,462,217,281**	**902,822,898**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**13,557,394,383**	**14,462,217,281**	**902,822,898**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**11,555,038,719**	**12,451,561,617**	**894,522,898**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**17,652,500**	**19,652,500**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,812,500	5,812,500	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	680,000	680,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	680,000	680,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	680,000	680,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	680,000	680,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,780,000	3,780,000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,340,000	7,340,000	2,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9,375,715,695**	**9,789,885,425**	**414,169,730**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,331,981,195	9,744,650,925	412,669,730
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39,072,000	39,072,000	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	725,000	725,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	727,500	2,227,500	1,500,000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	650,000	650,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,185,000	2,185,000	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	375,000	375,000	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**5,760,000**	**8,360,000**	**2,600,000**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	450,000	450,000	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	650,000	1,450,000	800,000

PERUBAHAN RENJA DPP 2023

No	Program/ Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,740,000	3,740,000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	360,000	1,360,000	1,000,000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	560,000	1,360,000	800,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1,600,000**	**1,600,000**	**-**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,600,000	1,600,000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**142,388,442**	**269,094,192**	**126,705,750**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,049,400	23,193,650	11,144,250
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,177,792	54,930,292	3,752,500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,763,750	22,372,750	3,609,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,647,500	11,647,500	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,160,000	2,160,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46,590,000	154,790,000	108,200,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**3,500,000**	**62,330,300**	**58,830,300**
	Pengadaan Mebel	3,500,000	18,200,000	14,700,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Laiinya		44,130,300	44,130,300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1,665,982,082**	**1,607,199,200**	**(58,782,882)**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,600,000	6,600,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,659,382,082	1,600,599,200	(58,782,882)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**342,440,000**	**693,440,000**	**351,000,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,550,000	25,550,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211,840,000	247,840,000	36,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,050,000	55,050,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	365,000,000	315,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	**609,642,000**	**609,642,000**	**0**
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**609,642,000**	**609,642,000**	**0**
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	609,642,000	609,642,000	-
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**1,054,575,108**	**1,054,575,108**	**0**

PERUBAHAN RENJA DPP 2023

No	Program/ Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**576,813,108**	**576,813,108**	**0**
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	109,126,824	109,126,824	-
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	457,483,820	457,483,820	-
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10,202,464	10,202,464	-
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**263,560,000**	**263,560,000**	**0**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	71,410,000	71,410,000	-
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	192,150,000	192,150,000	-
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**214,202,000**	**214,202,000**	**0**
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	60,730,000	60,730,000	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	153,472,000	153,472,000	-
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**94,691,336**	**94,691,336**	**0**
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**94,691,336**	**94,691,336**	**0**
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	94,691,336	94,691,336	-
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**243,447,220**	**251,747,220**	**8,300,000**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**243,447,220**	**251,747,220**	**8,300,000**
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	93,442,290	93,442,290	-
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	23,222,930	23,222,930	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	126,782,000	135,082,000	8,300,000
	URUSAN PEMERINTAH PILHAN	**4,050,698,793**	**4,533,874,093**	**483,175,300**
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**898,833,668**	**983,786,668**	**84,953,000**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**768,386,168**	**856,539,168**	**88,153,000**
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**345,352,818**	**399,543,818**	**54,191,000**
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	119,428,000	135,928,000	16,500,000
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	225,924,818	263,615,818	37,691,000

PERUBAHAN RENJA DPP 2023

No	Program/ Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**423,033,350**	**456,995,350**	**33,962,000**
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	423,033,350	456,995,350	33,962,000
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**130,447,500**	**127,247,500**	**-3,200,000**
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**130,447,500**	**127,247,500**	**-3,200,000**
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	130,447,500	127,247,500	(3,200,000)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN	**3,151,865,125**	**3,550,087,425**	**398,222,300**
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**954,395,520**	**1,048,142,820**	**93,747,300**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**12,207,900**	**11,712,700**	**-495,200**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12,207,900	11,712,700	(495,200)
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**926,366,300**	**1,020,608,800**	**94,242,500**
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	890,653,800	972,896,300	82,242,500
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	35,712,500	47,712,500	12,000,000
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**15,821,320**	**15,821,320**	**0**
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	15,821,320	15,821,320	-
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**5,250,000**	**69,845,000**	**64,595,000**
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**5,250,000**	**69,845,000**	**64,595,000**
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5,250,000	69,845,000	64,595,000
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**1,336,134,530**	**1,473,974,530**	**137,840,000**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**59,352,150**	**63,302,150**	**3,950,000**
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	59,352,150	63,302,150	3,950,000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**222,371,500**	**324,061,500**	**101,690,000**
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	222,371,500	324,061,500	101,690,000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**1,054,410,880**	**1,086,610,880**	**32,200,000**
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	410,179,830	408,979,830	(1,200,000)
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	366,937,450	365,837,450	(1,100,000)

PERUBAHAN RENJA DPP 2023

No	Program/ Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	277,293,600	311,793,600	34,500,000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**125,300,575**	**141,830,575**	**16,530,000**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**125,300,575**	**141,830,575**	**16,530,000**
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	125,300,575	141,830,575	16,530,000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**730,784,500**	**816,294,500**	**85,510,000**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**730,784,500**	**816,294,500**	**85,510,000**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	129,054,500	132,454,500	3,400,000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	589,430,000	633,560,000	44,130,000
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12,300,000	50,280,000	37,980,000
TOTAL		**17,608,093,176**	**18,996,091,374**	**1,385,998,198**

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											13,557,394,383	14,462,217,281					15,023,137,38
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											11,555,038,719	12,451,561,617					12,962,732,80
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											17,652,500	19,652,500					23,882,400
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	5,812,500	5,812,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	6,646,000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	680,000	680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	907,100
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	680,000	680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	907,100

					Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	680,000	680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	907,100
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	680,000	680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	907,100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,780,000	3,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	6,106,000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	5,340,000	7,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	7,502,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										**9,375,715,695**	**9,789,885,425**					**10,252,950,409**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	95 Orang/bula	n97 Orang/bula	n100 %	100 %	9,331,981,195	9,744,650,925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	10,245,803,834

					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas Keuangan SKPD	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	39,072,000	39,072,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	121,000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	725,000	725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,376,375
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	727,500	2,227,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	809,200
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	650,000	650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,210,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	uangan n/ aKoeoiuaaonga aonas n°a°n°L°a'pora n teradministrasi ,dseongeaanbr aaik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,185,000	2,185,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	3,146,000
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keuangan dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	375,000	375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	484,000
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										**5,760,000**	**8,360,000**					**10,600,000**

					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	450,000	450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,600,000
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	650,000	1,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,800,000
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,740,000	3,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	5,000,000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	360,000	1,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,600,000
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	560,000	1,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	600,000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											**1,600,000**	**1,600,000**					**1,800,000**
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kepegawaian OPD dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,600,000	1,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,800,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah											**142,388,442**	**269,094,192**					**225,500,000**

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	12,049,400	23,193,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	31,500,000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	51,177,792	54,930,292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	78,000,000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	18,763,750	22,372,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	11,000,000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	11,647,500	11,647,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	16,000,000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,160,000	2,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	4,000,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perlengkapan dan peralatan umum dinas dapat teradministrasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	80 Laporan	90 Laporan	100 %	100 %	46,590,000	154,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	85,000,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											**3,500,000**	**62,330,300**					**160,000,000**
					Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barang Milik Daerah tersedia sesuai kebutuhan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	4 Unit	100 %	100 %	3,500,000	18,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	160,000,000

					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang Milik Daerah tersedia sesuai kebutuhan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai		7 Unit	100 %	100 %	0	44,130,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											**1,665,982,082**	**1,607,199,200**					**1,708,000,000**
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa penunjang urusan dinas tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	6,600,000	6,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	8,000,000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa penunjang urusan dinas tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,659,382,082	1,600,599,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	1,700,000,000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											**342,440,000**	**693,440,000**					**580,000,000**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	25,550,000	25,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	20,000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	31 Unit	31 Unit	100 %	100 %	211,840,000	247,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	150,000,000
					Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai		0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	0

					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik.	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	64 Unit	64 Unit	100 %	100 %	55,050,000	55,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	60,000,000
					Pemeliharaan /Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	ntBoarrang Milik nDyaaerah terpelihara lidtaesnigan baik.	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	4 Unit	100 %	100 %	50,000,000	365,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai	350,000,000
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN										**609,642,000**	**609,642,000**					**715,000,000**
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										**609,642,000**	**609,642,000**					**715,000,000**
					Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Infrastruktur pendukung kemandirian pangan dapat tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.88 %	28.88 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	609,642,000	609,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	28.88 %	715,000,000
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										**1,054,575,108**	**1,054,575,108**					**750,950,000**
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										**576,813,108**	**576,813,108**					**353,100,000**
					Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga tersedia dan tersalurkan dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2611.9 kkal/ka 54.21 %	p2it6a1/h1a.9rikkal/ka 54.21 %	pita/hari 13 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	109,126,824	109,126,824	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/ka 54.21 %	pita/hari 133,100,000
					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga tersedia dan tersalurkan dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2611.9 kkal/ka 54.21 %	p2it6a1/h1a.9rikkal/ka 54.21 %	pita/hari 2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	457,483,820	457,483,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/ka 54.21 %	pita/hari 198,000,000

					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga tersedia dan tersalurkan dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2611.9 kkal/ka 54.21 %	p2it6a1/h1a.9rikkal/ka 54.21 %	pita/hari 12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	10,202,464	10,202,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/ka 54.21 %	pita/hari 22,000,000
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										**263,560,000**	**263,560,000**					**203,150,000**
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Keseimbangan cadangan pangan daerah terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2611.9 kkal/ka 54.21 %	p2it6a1/h1a.9rikkal/ka 54.21 %	pita/hari 2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	71,410,000	71,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/ka 54.21 %	pita/hari 11,000,000
					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Keseimbangan cadangan pangan daerah terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2611.9 kkal/ka 54.21 %	p2it6a1/h1a.9rikkal/ka 54.21 %	pita/hari 18.3 Ton	18.3 Ton	100 %	100 %	192,150,000	192,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/ka 54.21 %	pita/hari 192,150,000
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										**214,202,000**	**214,202,000**					**194,700,000**
					Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi pangan sesuai AKG dapat tercapai	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2611.9 kkal/ka 54.21 %	p2it6a1/h1a.9rikkal/ka 54.21 %	pita/hari 1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	60,730,000	60,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/ka 54.21 %	pita/hari 84,700,000
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Target konsumsi pangan sesuai AKG dapat tercapai	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2611.9 kkal/ka 54.21 %	p2it6a1/h1a.9rikkal/ka 54.21 %	pita/hari 1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	153,472,000	153,472,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Ketersediaan Energi Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	2611.9 kkal/ka 54.21 %	pita/hari 110,000,000
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										**94,691,336**	**94,691,336**					**116,765,000**
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan										**94,691,336**	**94,691,336**					**116,765,000**

					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan dapat tersusun dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 wilayah	3 wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	94,691,336	94,691,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	3 wilayah	116,765,000
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN										**243,447,220**	**251,747,220**					**477,689,575**
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										**243,447,220**	**251,747,220**					**477,689,575**
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Keamanan pangan segar dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.55 %	26.55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	93,442,290	93,442,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	26.55 %	129,862,150
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan pangan segar dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.55 %	26.55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	23,222,930	23,222,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	26.55 %	32,764,325
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan pangan segar dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.55 %	26.55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	126,782,000	135,082,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	26.55 %	315,063,100
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										**898,833,668**	**983,786,668**					**1,026,000,000**
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										**768,386,168**	**856,539,168**					**924,000,000**
					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil										**345,352,818**	**399,543,818**					**420,000,000**
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembudi daya ikan kecil lebih berdaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.27 %	1.27 %	71 Kelompok	71 Kelompok	100 %	100 %	119,428,000	135,928,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	1.27 %	180,000,000

					Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pembudi daya ikan kecil lebih berdaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.27 %	1.27 %	6 Kelompok	6 Kelompok	100 %	100 %	225,924,818	263,615,818	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	1.27 %	240,000,000
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										**423,033,350**	**456,995,350**					**504,000,000**
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prasarana pembudidayaan ikan terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.27 %	1.27 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	423,033,350	456,995,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	1.27 %	504,000,000
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										**130,447,500**	**127,247,500**					**102,000,000**
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										**130,447,500**	**127,247,500**					**102,000,000**
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Usaha pengolahan dan pemasaran terbina mutu dan keamanan hasil perikanannya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 %	19 Unit Usaha	19 Unit Usaha	100 %	100 %	130,447,500	127,247,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	40 %	102,000,000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										**3,151,865,125**	**3,550,087,425**					**6,186,335,937**
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										**954,395,520**	**1,048,142,820**					**1,402,859,196**
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										**12,207,900**	**11,712,700**					**26,716,894**

					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikatPeningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasiPersentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Penggunaan sarana pertanian dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.06 %41.67 % 100 %	2.06 %41.67 % 100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	12,207,900	11,712,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikatPeningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasiPersentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	2.06 %41.67 % 100 %	26,716,894
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota										**926,366,300**	**1,020,608,800**					**1,321,142,302**
					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Sumber daya genetik tumbuhan terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.06 % 41.67 % 100 %	2.06 % 41.67 % 100 %	317 VUB	317 VUB	100 %	100 %	890,653,800	972,896,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	2.06 % 41.67 % 100 %	946,142,302

					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Sumber daya genetik tumbuhan terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.06 % 41.67 % 100 %	2.06 % 41.67 % 100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	35,712,500	47,712,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	2.06 % 41.67 % 100 %	375,000,000
					Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer										**15,821,320**	**15,821,320**					**55,000,000**
					Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Obat hewan yang beredar di tngkat pengecer dapat terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.06 % 41.67 % 100 %	2.06 % 41.67 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	15,821,320	15,821,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	2.06 % 41.67 % 100 %	55,000,000
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										**5,250,000**	**69,845,000**					**1,707,350,000**
					Pembangunan Prasarana Pertanian										**5,250,000**	**69,845,000**					**1,707,350,000**

					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Prasarana pertanian dapat terbangun dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 unit	22 unit	12 Unit	13 Unit	100 %	100 %	5,250,000	69,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	22 unit	1,707,350,000
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										**1,336,134,530**	**1,473,974,530**					**1,797,632,195**
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota										**59,352,150**	**63,302,150**					**170,000,000**
					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasiPersentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kesehatan hewan s penutupan/pembu daerah wabah peny hewan menular terjamin dengan ba	„Kota Y'o°gyakarta,k °S°e°mua°K°e°camatan,ik Semua Kelurahan	61.54 %22.49 %	61,76 %22,49 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	59,352,150	63,302,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasiPersentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61,76 %22,49 %	170,000,000
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										**222,371,500**	**324,061,500**					**460,000,000**
					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner terkelola dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.54 % 22.49 %	61,76 % 22,49 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	222,371,500	324,061,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61,76 % 22,49 %	460,000,000
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										**1,054,410,880**	**1,086,610,880**					**1,167,632,195**
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veternier diterapkan dan terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.54 % 22.49 %	61,76 % 22,49 %	24 Laporan	24 Laporan	100 %	100 %	410,179,830	408,979,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61,76 % 22,49 %	438,640,895

					Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veternier diterapkan dan terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.54 % 22.49 %	61,76 % 22,49 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	366,937,450	365,837,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61,76 % 22,49 %	455,000,000
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veternier diterapkan dan terawasi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.54 % 22.49 %	61,76 % 22,49 %	24 Dokumen	24 Dokumen	100 %	100 %	277,293,600	311,793,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	61,76 % 22,49 %	273,991,300
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										**125,300,575**	**141,830,575**					**250,000,000**
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										**125,300,575**	**141,830,575**					**250,000,000**
					Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Bencana pertanian non alam zoonosis terkendali dan tertanggulangi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	125,300,575	141,830,575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	100 %	250,000,000
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										**730,784,500**	**816,294,500**					**1,028,494,546**
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										**730,784,500**	**816,294,500**					**1,028,494,546**
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Cakupan bina kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.55 %	21,74 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	129,054,500	132,454,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan bina kelompok tani	21,74 %	218,298,296

					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Cakupan bina kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.55 %	21,74 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	589,430,000	633,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan bina kelompok tani	21,74 %	790,996,250
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.55 %	21,74 %	14 Unit	18 Unit	100 %	100 %	12,300,000	50,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan bina kelompok tani	21,74 %	19,200,000
															TOTAL	**17,608,093,176**	**18,996,091,374**					**22,235,473,32**

BAB 4
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPP Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun melalui mekanisme penyusunan yang telah sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan selaras dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang selanjutnya akan digunakan oleh DPP Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada anggaran Perubahan tahun 2023.

Secara umum perubahan pada Rencana Kerja DPP Tahun 2023 ini meliputi :

1. Adanya penyesuaian pada gaji dan tunjangan karena terdapat 1 orang mutarsi dari daerah lain dan 19 orang pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
2. Penambahan anggaran untuk belanja komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan peralatan rumah tangga.
3. Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
4. Penambahan anggaran untuk belanja mebelair kantor seperti kursi tunggu, , rak buku serta untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya seperti mesin pompa air, AC split, lemari pendingin, water dispenser, komputer serta printer.
5. Pengurangan anggaran penyesuaian sisa kontrak pengadaan jasa keamanan dan kebersihan kantor.
6. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan kantor berupa renovasi ruang kerja sekretariat dinas serta perbaikan rumah jaga petugas kebun hortikultura.
7. Penambahan belanja bahan dan alat kerja laboratorium mutu pangan serta laboratorium kultur jaringan.
8. Penambahan anggaran bimtek budidaya ikan hias dan aquascape, bimtek budidaya ikan konsumis serta bimtek pembenihan lele. Penambahan belanja operasional Balai Benih Ikan dan Sub Raiser berupa pakan ikan serta bahan dan alat kerja.
9. Penambahan anggaran untuk operasional Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura berupa bahan kimia, bahan dan bibit tanaman, belanja pemeliharaan peralatan laboratorium kultur jaringan serta perbaikan green house.

10. Penambahan anggaran untuk operasional Poliklinik Hewan serti bahan dan alat kerja, obat-obatan, bahan kimia serta belanja peralatan kedokteran berupa lampu tindakan medis, kandang nebulizer, sterilisator serta alat USG.
11. Penambahan belanja alat Centriguce susu dan lampu UV Sterilizer Ruangan untuk Laboratorium Kesmavet.
12. Penambahan anggaran untuk belanja sarana prasarana pertanian, bahan bibit tanaman, bahan baku demplot, bagan warna daun, pH meter serta solartuff untuk kegiatan penyuluhan pertanian.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DPP Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab DPP Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

2023

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP





Jl. Bimasakti No.1 Demangan, kec. Gondokusuman, Yogyakarta

Telp/fax : (0274) 515876

Email: lingkunganhidup@jogjakota.go.id

Website: lingkunganhidup.jogjakota.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 4

I.1 Latar Belakang 4

I.2 Landasan Hukum 4

I.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistem Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN RENJA TAHUN 2023 (TRIWULAN II) 15

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Realisasi Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 15

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023 18

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 112

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 114

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 119

3.1 Program Dan Kegiatan 119

3.2 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah 122

BAB IV PENUTUP 151

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 15
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD 20
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 112
Tabel 2.3.2 Sasaran, Indikator, Target dan Realisasi Triwulan I dan II Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 113
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 117
Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH 2023 119
Tabel 3.2 Total Perubahan Kebutuhan Dana 2023 **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 131

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peraturan Dalan Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup wajib menyusun perubahan renja yang mengacu pada perubahan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2023, dimana perubahan RKPD kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, akan menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023 apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan:
   - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   - PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
   - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
   - UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
   - dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2015);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2012);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun

2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2022);

27. Peraturan Gubernur Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2022);
28. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 103 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
29. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman;
30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat (Berita Daerah Nomor 6 Tahun 2010);
31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2010);
32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2014);
33. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik;
34. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup;
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
38. Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup;
39. Peraturan Walikota Yogyakarta No.17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum;
40. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Berita Daerah Nomor 104 Tahun 2021);
41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Air Baku Usaha di Kota Yogyakarta;
43. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Nomor 35 Tahun 2022);
44. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2036 (Berita Daerah Nomor 22 Tahun 2022);
45. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2031;

46. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
47. Instruksi Walikota nomor 4 tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Atau Kantong Berbahan Dasar Plastik Sekali Pakai Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2023.

Tujuan :

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini ditujukan untuk:

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.4 Sistem Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan DLH Kota Yogyakarta Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai penjelasan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RenjaPerangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022 DAN RENJA TAHUN 2023 (TRIWULAN II)

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu (2022) dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun ini (2023) hingga Triwulan II.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Realisasi Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023

Berisikan indicator dan target kinerja sampai Triwulan II Tahun 2023 Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran Perangkat Daerah.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
2. Sasaran, indicator, target, dan realisasi Triwulan I dan II Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Tugas pokok dan Fungsi SKPD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya (tahun 2022) yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2023.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yangtersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN RENJA TAHUN 2023 (TRIWULAN II)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Realisasi Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam mencapai target sasaran Perangkat daerah, melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dilakukan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian RPD dan Renstra Tahun 2023 – 2026. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.1. Sementara itu untuk capaian Renstra PD disajikan pada Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Kota Yogyakarta sampai Triwulan II Tahun 2023.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	IKLH	51.20	38.54	75.27%
		Indeks Kualitas Udara.	IKLH	90.74	90.74	103.825%
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota	%	40.60	40.64%	100.1%

		Yogyakarta				
3	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	%	26.00	27.95%	107.50%
		Persentase pengangkutan sampah	%	99.47	97.41%	97.93%

Dari tabel 2.1 di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2022, terdapat 3 (tiga) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar ≥ 100%. Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Capaian tertinggi diraih pada indikator kinerja Persentase Pengurangan Sampah dengan persentase 107,50%, kemudian Indeks Kualitas Udara dengan persentase 103,83% dan Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta sebesar 100,1%, Sementara itu 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Kualitas Air dengan capaian 75,27% dan untuk Persentase Pengangkutan Sampah memiliki capaian yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,93%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat yaitu keberadaan RTHP menjadi fasilitas umum yang mulai banyak dirasakan manfaatnya untuk kepentingan kegiatan kemasyarakatan sebagai tempat sarana bersosialisasi, sarana kegiatan masyarakat, dan lain-lain sehingga nilai IKL di Kota Yogyakarta masih harus ditingkatkan, area RTHP di Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan lagi luasannya lagi dikarenakan kebutuhan di lapangan masih jauh dari cukup, walaupun secara rasio dari target 20% luas Kota Yogyakarta pada tahun 2022 telah melampaui target, nilai IKM pada tahun sebelumnya yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik

perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman. Sementara itu, faktor pendorong keberhasilan kinerja sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat di antaranya adanya dukungan dari pemangku kebijakan dan OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta untuk terlaksananya SE PJ Walikota Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik dan terselenggaranya kegiatan Laron Sarungan (Laboratorium Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan) untuk meningkatkan edukasi pengelolaan sampah. Dalam upaya perhitungan nilai IKA dan IKU dilakukan kerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam analisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta, adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time, dan dapat dibangun RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja dalam hal perhitungan dan peningkatan nilai IKL meliputi penyesuaian luas administrasi Kota Yogyakarta menjadi lebih luas namun tidak ada pemekaran, sehingga angka IKL terlihat menurun dari tahun sebelumnya tanpa ada tambahan potensi kenaikannya dan meningkatnya RTH menjadi satu-satunya potensi kenaikan IKL, namun beberapa aspek RTH tidak dapat ditingkatkan lagi luasannya. Faktor penghambat kinerja dalam hal capaian pengelolaan persampahan disebabkan oleh keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta untuk tempat pengolahan sampah dan adanya penutupan TPA Piyungan. Dalam hal perhitungan nilai IKA dan IKU terdapat hambatan meliputi IKA cenderung kurang/rendah dari 8 parameter dan ada 2 parameter yang tidak memenuhi baku mutu (*fecal coli* dan total fosfat), masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta.

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Bulan Juni Triwulan II Tahun 2023, realisasi pelaksanaan kegiatan secara fisik Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta mencapai 85,37% dan realisasi keuangan 83,72% berdasarkan target sampai akhir tahun. Secara umum pelaksanaannya masih dalam koridor sesuai dengan tatakala kegiatan yang direncanakan.

Sesuai data yang didapatkan dari Laporan SPJ Fungsional bulan Juni 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diketahui bahwa sampai dengan triwulan II bulan Juni tahun 2023 capaian realisasi keuangan sebesar Rp.27.273.176.761,00 atau 45,78% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 59.571.104.323,00 sedangkan dilihat dari persediaan dana/SPD sampai dengan triwulan II (Rp.32.578.504.490,00) serapan keuangannya sebesar 83,72%.

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan. Capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup hingga TW II sebesar 100%, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mencapai realisasi fisik sebesar 98,33%. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mencapai realisasi fisik sebesar 94,35%. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencapai realisasi fisik sebesar 109,65%. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mencapai realisasi fisik sebesar 97,93%. Program Pengelolaan Sampah mencapai realisasi fisik sebesar 77,53%. Capaian realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 80,59%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x< 50$, maka pencapaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta keduanya termasuk dalam kategori "tinggi". Hasil evaluasi tiap program berdasarkan pada kriteria tersebut pada program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 100% termasuk dalam kategori "tinggi", Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mencapai realisasi fisik sebesar 98,33% termasuk dalam kategori "tinggi". Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mencapai realisasi fisik sebesar 94,35% juga termasuk dalam kategori "tinggi". Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencapai realisasi fisik sebesar 109,65% juga termasuk dalam kategori "tinggi", begitupula pada Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mencapai realisasi fisik sebesar 97,93% juga termasuk kategori realisasi kinerja "tinggi". Sementara itu pada Program Pengelolaan Sampah mencapai realisasi fisik sebesar 77,53% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 80,59% termasuk dalam kategori "sedang". Secara keseluruhan pada triwulan II ini rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 85,37% dengan predikat kinerja "tinggi". Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2023 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.66
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99.60 %
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	75.94 poin

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**0**		**0**		**700,000,000**		**350,000,000**		**335,249,193**	**0.00%**	**95.79 %**						
		1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota								**350,000,000**	**100.00%**	**350,000,000**	**100.00%**	**335,249,193**	**100.00%**	**95.79 %**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0.00 %		100.00%		0.00%			0		0.00%		
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0.00 %		100.00%		0.00%							

			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0.00 %		100.00%		0.00%							
		2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								**350,000,000**	**50.00%**	**0**	**50.00%**	**0**	**100.00%**	**0.00%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0.00 %		50.00%		0.00%			0		0.00%		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0.00 %		50.00%		0.00%							
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0.00 %		50.00%		0.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**47.89 %**			**0.00 %**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase sungai yang terpelihara**	**(Panjang sungai yang dipelihara / panjang sungai di Kota Yogyakarta) x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**2,335,871,112**		**1,102,705,584**		**1,083,053,949**	**0.00%**	**98.22 %**					**Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M**	
			Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	**(20% Hasil pemantauan kualitas air ditambah 80% Hasil**	**73**				**71**						**0.00%**	**0.00%**						

				pemantauan kualitas udara) dikali 100%																		
		1	**KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media TanahAirUdaradan Laut**							**210,877,084**	**67.12%**	**84,551,056**	**67.59%**	**80,922,128**	**100.70%**	**95.71%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		67.12%		67.59%		100.70%			0		0.00%		
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		67.12%		67.59%		100.70%							
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		67.12%		67.59%		100.70%							
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		67.12%		67.59%		100.70%							
		2	**Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan**							**425,778,528**	**60.56%**	**257,861,528**	**57.10%**	**243,137,040**	**94.29%**	**94.29%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		60.56%		57.10%		94.29%			0		0.00%		
				Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		60.56%		57.10%		94.29%							

			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		60.56%		57.10%		94.29%							
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		60.56%		57.10%		94.29%							
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar								**1,699,215,500**	**53.76%**	**760,293,000**	**53.76%**	**758,994,781**	**100.00%**	**99.83%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		0.00%		53.76%		0.00%			0		0.00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		0.00%		53.76%		0.00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		0.00%		53.76%		0.00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		0.00%		53.76%		0.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**98.33%**	**96.61%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**0**		**0**		**9,652,233,839**		**4,617,011,817**		**4,458,240,164**	**0.00%**	**96.56%**						
		1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								**3,163,076,364**	**63.38%**	**1,382,396,370**	**58.63%**	**1,349,349,779**	**92.51%**	**97.61%**			**0.00%**	**0.00%**		

			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		3 Ha		0.00 %		58.63%		0.00%			0		0.00%		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		3 Ha		0.00 %		58.63%		0.00%							
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		3 Ha		0.00 %		58.63%		0.00%							
		2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya								**6,489,157,475**	**84.46%**	**3,234,615,447**	**81.24%**	**3,108,890,385**	**96.19%**	**96.11%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		77 Ha		0.00 %		81.24%		0.00%			0		0.00%		
			Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		77 Ha		0.00 %		81.24%		0.00%							
			Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Ha		0 Ha		77 Ha		0.00 %		81.24%		0.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**94.35%**	**96.86%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**0**		**0**		**620,548,278**		**311,222,528**		**196,277,180**	**0.00%**	**63.07%**						
		1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH								**394,172,500**	**58.28%**	**198,670,000**	**76.99%**	**96,157,000**	**132.10%**	**48.40%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		0 dokumen		0 dokumen		56 dokumen		58.28%		76.99%		132.10%			0		0.00%		

			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		0 dokumen		0 dokumen		56 dokumen		58.28%		76.99%		132.10%							
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		0 dokumen		0 dokumen		56 dokumen		58.28%		76.99%		132.10%							
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		0 dokumen		0 dokumen		56 dokumen		58.28%		76.99%		132.10%							
		2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan HidupIzin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								**46,213,778**	**70.99%**	**22,183,528**	**69.39%**	**20,739,935**	**97.75%**	**93.49%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		24 laporan		70.99%		69.39%		97.75%			0		0.00%		
			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		24 laporan		70.99%		69.39%		97.75%							
			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		24 laporan		70.99%		69.39%		97.75%							

			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		24 laporan		70.99%		69.39%		97.75%							
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH							**180,162,000**	**67.63%**	**90,369,000**	**67.03%**	**79,380,245**	**99.11%**	**87.84%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		0 dokumen		0 dokumen		215 dokumen		67.63%		67.03%		99.11%			0		0.00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		0 dokumen		0 dokumen		215 dokumen		67.63%		67.03%		99.11%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		0 dokumen		0 dokumen		215 dokumen		67.63%		67.03%		99.11%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		0 dokumen		0 dokumen		215 dokumen		67.63%		67.03%		99.11%							
Rata-rata capaian kinerja														**109.65%**	**76.58%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim**		**11%**	**0**		**0**	**11%**	**1,501,815,500**		**1,039,689,000**		**809,540,000**	**0.00%**	**77.86%**					
		1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan								**1,501,815,500**	**75.04%**	**1,039,689,000**	**73.49%**	**809,540,000**	**97.93%**	**77.86%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		0 lembaga		0 lembaga		43 lembaga		75.04%		73.49%		97.93%			0		0.00%	
			Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		0 lembaga		0 lembaga		43 lembaga		75.04%		73.49%		97.93%						
Rata-rata capaian kinerja															**97.93%**	**77.86%**			**0.00%**	**0.00%**	
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			**0**		**0**		**18,797,692,979**		**9,316,901,664**		**8,663,692,248**	**0.00%**	**92.99%**						
		1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota							**50,320,000**	**38.10%**	**15,695,000**	**28.57%**	**5,180,000**	**74.99%**	**33.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		38.10%		28.57%		74.99%			0		0.00%	
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		38.10%		28.57%		74.99%						

			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		38.10%		28.57%		74.99%							
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		38.10%		28.57%		74.99%							
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		38.10%		28.57%		74.99%							
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		38.10%		28.57%		74.99%							
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		38.10%		28.57%		74.99%							
		2 Pengurangan Sampah dengan melakukan PembatasanPendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali								**249,620,250**	**78.80%**	**171,260,250**	**58.97%**	**135,004,750**	**74.84%**	**78.83%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		78.80%		58.97%		74.84%			0		0.00%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		78.80%		58.97%		74.84%							

			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		78.80%		58.97%		74.84%										
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		78.80%		58.97%		74.84%										
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		78.80%		58.97%		74.84%										
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		78.80%		58.97%		74.84%										
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		78.80%		58.97%		74.84%										
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan		78.80%		58.97%		74.84%										
		3 Penanganan Sampah dengan melakukan PemilahanPengumpulanPengangkutanPengolahandan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								**4,906,363,082**	**52.60%**	**2,499,844,272**	**46.21%**	**2,253,930,083**	**87.85%**	**90.16%**			**0.00%**	**0.00%**				
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari		0.00%		46.21%		0.00%			0		0.00%				

			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari		0.00 %		46.21%		0.00%							
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari		0.00 %		46.21%		0.00%							
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari		0.00 %		46.21%		0.00%							
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari		0.00 %		46.21%		0.00%							
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari		0.00 %		46.21%		0.00%							
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari		0.00 %		46.21%		0.00%							
		4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								**1,138,180,000**	**77.27%**	**697,130,002**	**50.67%**	**563,055,775**	**65.58%**	**80.77%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		77.27%		50.67%		65.58%			0		0.00%		

			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		77.27%		50.67%		65.58%							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		77.27%		50.67%		65.58%							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		77.27%		50.67%		65.58%							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		77.27%		50.67%		65.58%							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		77.27%		50.67%		65.58%							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		77.27%		50.67%		65.58%							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok		77.27%		50.67%		65.58%							
		5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan								**11,578,735,136**	**58.21%**	**5,613,389,640**	**58.21%**	**5,587,188,140**	**100.00%**	**99.53%**			**0.00%**	**0.00%**		

		Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0		0		0		0.00 %		58.21%		0.00%				0		0.00%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0		0		0		0.00 %		58.21%		0.00%								

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0	0	0	0.00 %	58.21%	0.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0	0	0	0.00 %	58.21%	0.00%						

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0	0	0	0.00 %	58.21%	0.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0	0	0	0.00 %	58.21%	0.00%						

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0		0		0		0.00 %		58.21%		0.00%							
		6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							**874,474,511**	**96.87%**	**319,582,500**	**59.98%**	**119,333,500**	**61.92%**	**37.34%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0.00 %		59.98%		0.00%			0		0.00%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0.00 %		59.98%		0.00%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0.00 %		59.98%		0.00%							

			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0.00 %		59.98%		0.00%									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0.00 %		59.98%		0.00%									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0.00 %		59.98%		0.00%									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0.00 %		59.98%		0.00%									
			Rata-rata capaian kinerja												**77.53 %**	**69.94 %**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Predikat kinerja												**Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**0**		**0**		**25,962,942,615**		**15,840,973,897**		**11,727,124,027**	**0.00%**	**74.03 %**						
		1 Penyusunan Dokumen								**3,948,50**	**69.5**	**2,745,50**	**69.5**	**1,369,50**	**100.0**	**49.88**			**0.00**	**0.00%**		

		Perencanaan Perangkat Daerah							**0**	**3%**	**0**	**3%**	**0**	**0%**	**%**			**%**			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	69.53%		69.53%		100.00%							

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		69.53%		69.53%		100.00%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								**2,819,000**	**51.76%**	**1,459,000**	**51.00%**	**731,000**	**98.53%**	**50.10%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		51.76%		51.00%		98.53%			0		0.00%			

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%						
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%						
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%						
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%						
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%						
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%						
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%						
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%						

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	51.76%	51.00%	98.53%					

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		51.76%		51.00%		98.53%								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		51.76%		51.00%		98.53%								
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								**36,941,500**	**97.13%**	**35,880,000**	**97.13%**	**275,000**	**100.00%**	**0.77%**			**0.00%**	**0.00%**				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%			0		0.00%			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%								

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%		

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%							
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%							
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%							
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%							
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%							

| | | |

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		97.13%		97.13%		100.00%							
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								**20,742,411,150**	**63.17%**	**13,103,606,470**	**63.17%**	**9,789,163,672**	**100.00%**	**74.71%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%							

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	222 orang perbulan	63.17%	63.17%	100.00%						

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		222 orang perbulan		63.17%		63.17%		100.00%								
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								**630,000**	**77.94%**	**491,000**	**77.94%**	**414,000**	**100.00%**	**84.32%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		77.94%		77.94%		100.00%			0		0.00%			

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%						

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	77.94%	77.94%	100.00%							

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		77.94%		77.94%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		77.94%		77.94%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		77.94%		77.94%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		77.94%		77.94%		100.00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								**520,000**	**100.00%**	**520,000**	**100.00%**	**267,000**	**100.00%**	**51.35%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1200 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%						

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1200 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								**520,000**	**44.23%**	**230,000**	**44.23%**	**230,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		44.23%		44.23%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		44.23%		44.23%		100.00%							

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	44.23%	44.23%	100.00%								

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen	0	dokumen	12	dokumen	44.23%	44.23%	100.00%				

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		44.23%		44.23%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		44.23%		44.23%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		44.23%		44.23%		100.00%								
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								**2,610,000**	**13.60%**	**355,000**	**13.60%**	**125,000**	**100.00%**	**35.21%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%			0		0.00%			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%							

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		13.60%		13.60%		100.00%								
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								**400,000**	**100.00%**	**400,000**	**100.00%**	**391,000**	**100.00%**	**97.75%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%							

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								**470,000**	**0.00 %**	**0**	**0.00 %**	**0**	**0.00%**	**0.00%**			**0.00 %**	**0.00%**			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%			0		0.00%			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%								

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%							

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00%								
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								**460,000**	**0.00 %**	**0**	**0.00 %**	**0**	**0.00%**	**0.00%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0.00 %		0.00 %		0.00%			0		0.00%		

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%							

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00%						

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0.00 %		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0.00 %		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0.00 %		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0.00 %		0.00 %		0.00%							
		12 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Upt Bengkel								**2,750,000**	**100.00%**	**2,750,000**	**0.00 %**	**0**	**0.00%**	**0.00%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%			0		0.00%		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%							

Kelengkapan												
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	0.00 %	0.00%						

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		0.00 %		0.00%									
		13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								**12,258,000**	**100.00%**	**12,258,000**	**100.00%**	**12,258,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%									

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	100.00%	100.00%	100.00%						

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00%		100.00%							
		14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**232,138,465**	**72.44%**	**168,169,225**	**72.00%**	**165,731,824**	**99.39%**	**98.55%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%			0		0.00%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%							

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	7 paket	72.44%	72.00%	99.39%							

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		72.44%		72.00%		99.39%						
		15 Penyediaan Peralatan dan								**110,787,**	**61.2**	**67,867,5**	**60.7**	**67,258,1**	**99.10**	**99.10**			**0.00**	**0.00%**		

		Perlengkapan Kantor Upt Bengkel							**750**	**6%**	**00**	**1%**	**25**	**%**	**%**			**%**			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%			0		0.00%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	1 paket	61.26%	60.71%	99.10%							

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		61.26%		60.71%		99.10%							
		16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								**10,146,250**	**89.99%**	**7,290,000**	**89.00%**	**6,527,250**	**98.90%**	**89.54%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%			0		0.00%		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket	89.99%	89.00%	98.90%							

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		89.99%		89.00%		98.90%							
		17 Penyediaan Bahan Bacaan								**1,200,00**	**50.0**	**600,000**	**50.0**	**540,000**	**100.0**	**90.00**			**0.00**	**0.00%**		

		dan Peraturan Perundang-undangan							**0**	**0%**		**0%**		**0%**	**%**			**%**			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.00%	50.00%	100.00%						

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
		18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								**136,875,000**	**43.92%**	**55,650,000**	**43.00%**	**46,583,635**	**97.91%**	**83.71%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%			0		0.00%		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							

| | | |

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		43.92%		43.00%		97.91%							
		19 Penyelenggaraan Rapat								**16,489,0**	**45.2**	**7,457,00**	**2.94**	**484,000**	**6.50%**	**6.49%**			**0.00**	**0.00%**		

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel							**00**	**2%**	**2**	**%**						**%**			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%			0		0.00%		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan	45.22%	2.94%	6.50%							

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45.22%		2.94%		6.50%							
		20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat								**2,750,000**	**100.00%**	**2,750,000**	**100.00%**	**2,500,000**	**100.00%**	**90.91%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%							

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100.00%	100.00%	100.00%					

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%								
		21 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik								**102,840,000**	**50.00%**	**51,420,000**	**50.00%**	**51,149,287**	**100.00%**	**99.47%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%			0		0.00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		50.00%		50.00%		100.00%								
		22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								**1,158,010,000**	**50.00%**	**482,400,000**	**50.00%**	**482,399,760**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0.00%		50.00%		0.00%			0		0.00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0.00%		50.00%		0.00%								

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	0.00 %	50.00%	0.00%							

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0.00%		50.00%		0.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0.00%		50.00%		0.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0.00%		50.00%		0.00%							
		23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel								**237,744,000**	**50.00%**	**99,060,000**	**50.00%**	**99,060,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	12 laporan	50.00%	50.00%	100.00%							

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50.00%		50.00%		100.00%							
		24 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel								**2,849,220,000**	**52.30%**	**1,490,211,200**	**50.00%**	**759,412,974**	**95.60%**	**50.96%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60%			0		0.00%		

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60 %							

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60%								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		141 unit		52.30%		50.00%		95.60%								
		25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								**155,600,000**	**67.48%**	**105,000,000**	**67.00%**	**98,453,000**	**99.29%**	**93.76%**			**0.00%**	**0.00%**			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%			0		0.00%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		2 unit		67.48%		67.00%		99.29%								

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	2 unit	67.48%	67.00%	99.29%						

		26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							**142,404,000**	**100.00%**	**142,404,000**	**0.00%**	**141,800,000**	**0.00%**	**99.58%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%			0		0.00%		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00%		325.00%		0.00%							

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit	0.00 %	325.00%	0.00%						

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00 %		325.00%		0.00%								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00 %		325.00%		0.00%								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00 %		325.00%		0.00%								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00 %		325.00%		0.00%								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00 %		325.00%		0.00%								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0.00 %		325.00%		0.00%								
Rata-rata capaian kinerja													**80.59 %**	**67.16 %**			**0.00 %**	**0.00%**			
Predikat kinerja													**Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			

Total anggaran dari seluruh program				**59,571,104,323**		**32,578,504,490**		**27,273,176,761**													

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)													**85.37 %**	**83.72 %**			**0.00 %**	**0.00%**			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)													**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Sumber : Sim Pelaporan

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Tahun 2023-2026, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dengan adanya pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. Untuk tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel 2.3

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja	Target	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi 2023	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
I	**Indikator Sasaran**											
	1. Persentase pengurangan sampah.	20%		18,43 %	18,65 %	18,90 %	15.00 %	25,64 %	23,50 %	27,95 %	15%	
	2. Persentase pengangkutan sampah.	70%		95,82 %	97,65 %	99,47 %	84.60 %	72,96 %	101,2 %	99.47 %	84,60%	

	3. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.	100%		29,85 %	30,02 %	30,19 %	38.99 %	30,31 %	40,60 %	40.64 %	38,99%	
II	**IKK**											
	1. Penanganan sampah			n/a	n/a	n/a		n/a	n/a		n/a	
	2. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk			n/a	n/a	n/a		n/a	n/a		n/a	
	3. Penegakan hukum lingkungan		100 %	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a		n/a	

Capaian kinerja Renstra pada sasaran sampai dengan triwulan II bulan Juni sebagian sudah ada yang terealisasi dan ada yang belum karena terdapat indikator baru dalam Renstra 2023-2026. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator "IKLH" terealisasi sebesar 56,65 dari target sebesar 54,66. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan dengan indikator "Jumlah Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah" teralisasi sebesar 94,49% dari target sebesar 99,60%. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan indikator "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat" terealisasi dengan nilai 68,15 dari target sebesar 75,94.

Tabel 2.3.2 Sasaran, Indikator, Target dan Realisasi Triwulan I dan II Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Triwulan I		Triwulan II	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	54,66	56,89	54,66	56,65
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur	Persentase capaian pengelolaan persampahan	99,60	94,50	99,60	94,49

persampahan					
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	75,94	68,15	75,94	68,15

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;

5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

2.4.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

1. Pengelolaan Sampah Belum Optimal

Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kota Yogyakarta. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Angka timbulan sampah di Kota Yogyakarta sampai dengan semester 2 tahun 2022 sebesar 303,13 ton/ hari dengan jumlah sampah dari kegiatan pengurangan sampah adalah 33,93 ton/hari atau sekitar 11,19% dari total timbulan sampah dan jumlah sampah dari kegiatan penanganan sampah adalah 267,67 ton/hari atau sekitar 88,30% dari total timbulan sampah dengan persentase pengelolaan persampahan sebesar 94,49% dengan capaian 94,87%

Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta antara lain operasional untuk fasilitas pengurangan sampah belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal sumber daya yang terlatih. Faktor penghambat lain adalah kegiatan pemilahan sampah di rumah tangga masih jarang dilakukan, keterbatasan lahan di kota yogyarta untuk mengolah sampah skala kota dan draf Jakstrada setelah diinput di SIPSN mengalami penurunan sebesar 0,01% karena ada perbedaan antara format excel dan sim pelaporan, penutupan TPA Regional Piyungan menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di TPS/Depo, dan meningkatnya jumlah wisatawan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Rencana tindak lanjut sebagai alternatif permasalahan tersebut adalah melakukan optimalisasi pengolahan sampah melalui bank sampah, mengupayakan proses input data ke SIPSN sesegera mungkin agar data yang

diinput dapat disesuaikan dengan data di SIPSN, meningkatkan upaya edukasi dan penjagaan di TPS/depo, melakukan koordinasi dengan satpol PP, kemantren, dan kelurahan untuk menindak tegas pelaku pembuangan sampah liar.

2. Pencemaran Air Sungai Masih Terjadi

Persentase parameter kualitas air sungai yang sesuai baku mutu masih cukup rendah. Berdasarkan hasil pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi lingkungan 4 sungai (Code, Winongo, Gajahwong, Manunggal), Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II ini sebesar 27,37. Hal ini dikarenakan jumlah sampel dengan status mutu air "sedang" dan "berat" lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Parameter yang masih dominan melebihi baku mutu adalah parameter fecal *Coliform*. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satu yang paling berpengaruh adalah musim panas/kemarau yang cukup panjang sehingga mengakibatkan beberapa titik pemantauan memiliki debit kecil. Faktor Pendorong Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam analisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta. Faktor Penghambatnya adalah masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Selain itu, dari 8 parameter uji yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu Fecal Coliform dan Total Fosfat yang selalu melebihi baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada menurunnya nilai IKA. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan pembinaan dan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktifitas yang menambah beban pencemaran air sungai. Selain itu juga kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh satgas kebersihan sungai yang didukung oleh masyarakat di wilayah pinggiran sungai, diharapkan mampu mengurangi pembuangan limbah dan sampah ke sungai.

3. Luasan RTH Publik Masih Belum Mencukupi

Luasan RTH Publik di Kota Yogyakarta belum mencapai target sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang sebesar 20 persen dari luas wilayah Kota

Yogyakarta. Pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II menjadi 7.654.892 m². Tantangan untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta akan cukup berat mengingat ketersediaan lahan yang terbatas. Akan tetapi nilai IKL di Kota Yogyakarta masih harus ditingkatkan. Sementara itu faktor yang menghambat adalah lahan di beberapa unsur RTH sudah sulit untuk dikembangkan luasannya, terutama pengembangan jalur hijau. Upaya yang telah dilakukan yaitu pembangunan RTHP di lingkungan permukiman untuk peningkatan luasan dengan proporsi vegetasi minimal sesuai dengan ketentuan pada Perwal No.17 tahun 2021, pemeliharaan RTHP existing, pemeliharaan jalur hijau untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan tajuk pohon.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023

Program/ Kegiatan RKPD 2023	Hasil Pembahasan Awal Renja (Rp.)	Program/ Kegiatan Renja DLH 2023	Kebutuhan Dana (Rp.)	Selisih
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	25,962,942,615	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,435,881,630	1,472,939,015
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	700,000,000	2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	731,000,000	13,000,000
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,335,871,112	3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3,210,593,112	874,722,000
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9,652,233,839	4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	15,394,847,334	5,742,613,495

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	620,548,278	5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	690,438,278	69,890,000
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,501,815,500	6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4,233,233,000	2,731,417,500
7. Program Pengelolaan Persampahan	18,797,692,979	7. Program Pengelolaan Persampahan	28,583,150,687	9,785,457,708
Total	**Rp59,571,104,323**	**Total**	**Rp80,261,144,041**	Rp20,690,039,718

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan hasil pembahasan awal renja berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam perhitungan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup ternyata menunjukkan kebutuhan dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD. Pagu dari hasil pembahasan awal Renja ini dimaksudkan untuk penyelarasan kegiatan dengan perjanjian kinerja strategis dan efisiensi anggaran yang tidak menunjang secara langsung terhadap output kegiatan. Peningkatan kebutuhan pagu indikatif Renja Perubahan DLH 2023 disebabkan oleh adanya penambahan mebeler dalam lingkungan dinas, penyesuaian harga bahan bakar, pengadaan alat-alat dan armada yang menunjang kegiatan pengelolaan persampahan dan lain-lain.

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Program Dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH Kota Yogyakarta pada tahun 2023 terdiri 7 (tujuh) rumusan program, 14 (empat belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 59.571.104.323,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh tiga). Dan untuk anggaran perubahan 2023 sebesar 80.261.144.041,- (Delapan puluh milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat satu rupiah) Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Tujuan dan sasaran di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang terdiri dari program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH 2023

No Urut	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	**2**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **(UPT BENGKEL)**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT BENGKEL)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AP)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (AP)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT BENGKEL)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT BENGKEL)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (AP)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT BENGKEL)
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Pengawasan)

	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPT Lab)
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
6	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidupuntuk Lembaga Kemasyarakatan
7	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
	Pengelolaan Sampah
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

3.2 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kota Yogyakarta.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DLH Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, terdapat catatan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja output maupun outcome. Selain itu dengan adanya perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 serta adanya beberapa tambahan poin pokok-pokok pikiran legislatif, maka dalam Renja DLH Tahun 2023 ini dilakukan beberapa perubahan. Beberapa kebijakan dalam perubahan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Yogyakarta diantaranya adalah:

1. Penambahan belanja modal Belanja Mebeler, belanja peralatan studio (Gimbal Kamera & Hp, LCD Proyektor, Peralatan Zoom), PC, dan HP
2. Perjalanan DInas
3. Penambahan anggaran Belanja Bahan – Bahan Bangunan dan Konstruksi (Besi baja profil/UNP (Besi tulangan), Besi plat, dan Pisau (Mata gerinda potong), dan impact
4. penambahan anggaran Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung dan Landscape Parkiran DLH, penambahan anggaran Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung, penambahan anggaran Landscape Penataan Area Parkiran Kantor DLH dan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah
5. penambahan anggaran peralatan Laboratorium
6. Penambahan Jasa konsultansi pengawas Penambahan Fasilitas diRTHP Suryatmajan, Jasa konsultansi pengawas Penataan Elemen Taman diRTHP Jopraban, Jasa konsultansi pengawas Penataan RTHP Brontokusuman (Kampung Karanganyar RW 18), Jasa konsultansi pengawas Peningkatan Kualitas Tamandi RTHP Warungboto dan Bumijo , Jasa konsultansi pengawas Revitalisasi RTHP KawasanPinggir Sungai Widuri Kelurahan

Wirobrajan, Penambahan Fasilitas di RTHP Suryatmajan 256 M2, Penataan Elemen Taman di RTHP Jopraban 400 M2 , Penataan RTHP Brontokusuman (Kampung KaranganyarRW 18) 315 M2 , Peningkatan Kualitas Taman di RTHP Warungboto dan Bumijo 800 M2, Revitalisasi RTHP Kawasan Pinggir Sungai WiduriKelurahan Wirobrajan 251 M2, Pengurangan anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Pengurangan Jasa konsultansi Pengawasan Pembuatan RTHP Kel. Purbayan (RW 06) Kota Yogyakarta

7. penambahan anggaran Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi , penambahan anggaran Belanja Bahan-Bahan Kimia, penambahan anggaran Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, penambahan anggaran Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Pengganti Suku Cadang Mesin Potong Rumput), penambahan anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Tree prunner, Demolition Hammer, dan kuas), penambahan anggaran Belanja Truk crane 1 unit, penambahan anggaran Belanja Dump Truk 3 unit, pengurangan anggaran Jasa Konsultan Perencana Renovasi Taman Jl. Kerto
8. Pembuatan Display produk daur ulang sampah, Penambahan belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat, (alat pelatihan, alat peraga, hadiah), Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Penambahan Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Penambahan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pembuatan video lingkungan, dan Publikasi ILM media Televisi), Penambahan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin (Sewa genset, Belanja sewa mebel, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya, Sewa Sound System, sewa tenda, sewa panggung), Penamabahan Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan (Belanja Hadiah Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat), Penambahan Sewa gedung bangunan, Penambahan Perjadin biasa (Studi Lapangan Bimtek Fasilitator Pengelola Sampah Mandiri dan Studi lapangan Forum Bank sampah)
9. Penambahan anggaran belanja jasa tenaga pengelolaan persampahan, Banner khusus di Depo Tamansari, Geo Membran, Dinamo Mesin Pengolahan

Sampah Nitikan 3 unit, Pemasangan Instalasi listrik 3 Phase Nitikan, Pemasangan jaringan listrik 3 Phase Nitikan, Pemasangan listrik Depo Sampah, Rehabilitasi Depo Sampah Argolobang, Rehabilitasi Depo Sampah Kemasan Kotagede, Rehabilitasi Depo Sampah Pringgokusuman , pengurangan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi dan peningkatan TPS3RNitikan, Pengadaan Dump Truk Sampah 7m³ 3 unit, Pengadaan Kendaraan Pick Up L300 1 unit, Pengadaan Mesin Pencacah Plastik 1 unit, Pengadaan Incenerator 1 unit.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 perubahan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Total Perubahan Kebutuhan Dana 2023

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	Bertambah / Berkurang (%)
		Murni 2023	Perubahan 2023		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Rp 25,962,942,615**	**Rp 27,435,881,630**	**Rp 1,472,939,015**	**5.67%**
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 43,709,000**	**Rp 45,297,000**	**Rp 1,588,000**	**3.63%**
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3,948,500	Rp 3,948,500	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 2,819,000	Rp 2,819,000	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 36,941,500	Rp 38,529,500	**Rp 1,588,000**	**4.30%**
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 20,748,021,150**	**Rp 20,957,260,150**	**Rp 209,239,000**	**1.01%**

2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 20,742,411,150	Rp 20,951,650,150	**Rp 209,239,000**	**1.01%**
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 630,000	Rp 630,000	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 520,000	Rp 520,000	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 520,000	Rp 520,000	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2,610,000	Rp 2,610,000	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 400,000	Rp 400,000	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 470,000	Rp 470,000	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 460,000	Rp 460,000	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPT BENGKEL)**	**Rp 2,750,000**	**Rp -**	**Rp (2,750,000)**	**-100.00%**
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 2,750,000	Rp -	**Rp (2,750,000)**	**-100.00%**
2 11 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 519,894,465**	**Rp 1,319,893,980**	**Rp 799,999,515**	**153.88%**
	UMUM KEPEGAWAIAN	**Rp 392,617,715**	**Rp 1,179,768,230**	**Rp 787,150,515**	**200.49%**
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12,258,000	Rp 12,258,000	**Rp -**	**0.00%**
2 11 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 232,138,465	Rp 854,558,980	**Rp 622,420,515**	**268.12%**

2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 10,146,250	Rp 10,146,250	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1,200,000	Rp 1,080,000	**Rp (120,000)**	**- 10.00%**
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 136,875,000	Rp 301,725,000	**Rp 164,850,000**	**120.44 %**
	UPT BENGKEL	**Rp 127,276,750**	**Rp 140,125,750**	**Rp 12,849,000**	**10.10%**
2 11 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 110,787,750	Rp 137,947,750	**Rp 27,160,000**	**24.52%**
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 16,489,000	Rp 2,178,000	**Rp (14,311,000)**	**- 86.79%**
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 1,501,344,000**	**Rp 1,528,206,500**	**Rp 26,862,500**	**1.79%**
	UMUM KEPEGAWAIAN	**Rp 1,263,600,000**	**Rp 1,290,462,500**	**Rp 26,862,500**	**2.13%**
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2,750,000	Rp 2,500,000	**Rp (250,000)**	**-9.09%**
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 102,840,000	Rp 129,952,500	**Rp 27,112,500**	**26.36%**
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,158,010,000	Rp 1,158,010,000	**Rp -**	**0.00%**
	UPT BENGKEL	**Rp 237,744,000**	**Rp 237,744,000**	**Rp -**	**0.00%**
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 237,744,000	Rp 237,744,000	**Rp -**	**0.00%**
2 11 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 3,147,224,000**	**Rp 3,585,224,000**	**Rp 438,000,000**	**13.92%**
	UPT BENGKEL	**Rp 2,849,220,000**	**Rp 2,849,220,000**	**Rp -**	**0.00%**

2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 2,849,220,000	Rp 2,849,220,000	**Rp -**	**0.00%**
	UMUM KEPEGAWAIAN	**Rp 298,004,000**	**Rp 736,004,000**	**Rp 438,000,000**	**146.98 %**
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 155,600,000	Rp 163,600,000	**Rp 8,000,000**	**5.14%**
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 142,404,000	Rp 572,404,000	**Rp 430,000,000**	**301.96 %**
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		**Rp 700,000,000**	**Rp 713,000,000**	**Rp 13,000,000**	**1.86%**
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Rp 350,000,000**	**Rp 360,000,000**	**Rp 10,000,000**	**2.86%**
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp 350,000,000	Rp 360,000,000	**Rp 10,000,000**	**2.86%**
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Rp 350,000,000**	**Rp 353,000,000**	**Rp 3,000,000**	**0.86%**
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp 350,000,000	Rp 353,000,000	**Rp 3,000,000**	**0.86%**
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**Rp 2,335,871,112**	**Rp 3,210,593,112**	**Rp 874,722,000**	**37.45%**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Rp 636,655,612**	**Rp 1,395,577,612**	**Rp 758,922,000**	**119.20 %**

2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 210,877,084	Rp 214,277,084	**Rp 3,400,000**	**1.61%**
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 425,778,528	Rp 1,181,300,528	**Rp 755,522,000**	**177.44%**
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Rp 1,699,215,500**	**Rp 1,815,015,500**	**Rp 115,800,000**	**6.81%**
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Rp 1,699,215,500	Rp 1,815,015,500	**Rp 115,800,000**	**6.81%**
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		**Rp 9,652,233,839**	**Rp 15,394,847,334**	**Rp 5,742,613,495**	**59.50%**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Rp 9,652,233,839**	**Rp 15,394,847,334**	**Rp 5,742,613,495**	**59.50%**
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 3,163,076,364	Rp 4,943,831,411	**Rp 1,780,755,047**	**56.30%**
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp 6,489,157,475	Rp 10,451,015,923	**Rp 3,961,858,448**	**61.05%**
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (PPLH)		**Rp 620,548,278**	**Rp 690,438,278**	**Rp 69,890,000**	**11.26%**
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	**Rp 620,548,278**	**Rp 690,438,278**	**Rp 69,890,000**	**11.26%**

	Kabupaten/Kota				
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp 394,172,500	Rp 400,422,500	**Rp 6,250,000**	**1.59%**
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 46,213,778	Rp 46,213,778	**Rp -**	**0.00%**
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp 180,162,000	Rp 243,802,000	**Rp 63,640,000**	**35.32%**
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Rp 1,501,815,500**	**Rp 4,233,233,000**	**Rp 2,731,417,500**	**181.87 %**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 1,501,815,500**	**Rp 4,233,233,000**	**Rp 2,731,417,500**	**181.87 %**
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidupuntuk Lembaga Kemasyarakatan	**Rp 1,501,815,500**	**Rp 4,233,233,000**	**Rp 2,731,417,500**	**181.87 %**
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		**Rp 18,797,692,979**	**Rp 28,583,150,687**	**Rp 9,785,457,708**	**52.06%**

2.11.11.2.01.	**Pengelolaan Sampah**	**Rp 18,797,692,979**	**Rp 28,583,150,687**	**Rp 9,785,457,708**	**52.06%**
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Rp 50,320,000	Rp 82,020,000	**Rp 31,700,000**	**63.00%**
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp 249,620,250	Rp 330,774,500	**Rp 81,154,250**	**32.51%**
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 4,906,363,082	Rp 5,003,963,082	**Rp 97,600,000**	**1.99%**
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 1,138,180,000	Rp 1,295,690,000	**Rp 157,510,000**	**13.84%**
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp 11,578,735,136	Rp 13,414,228,594	**Rp 1,835,493,458**	**15.85%**
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 874,474,511	Rp 8,456,474,511	**Rp 7,582,000,000**	**867.03 %**
TOTAL		**Rp59,571,104,323**	**Rp80,261,144,041**	**Rp20,690,039,718**	**34.73%**

Tabel 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**55,928,335,045**	**75,852,753,763**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**22,745,951,865**	**24,208,791,880**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**43,709,000**	**45,297,000**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	3,948,500	3,948,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	1 1	0 1	2. 0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	2,819,000	2,819,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 1	0 1	2. 0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	21 Laporan	21 Laporan	100 %	100 %	36,941,500	38,529,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**1 1**	**0 1**	**2. 0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**20,748,021, 150**	**20,957,260, 150**	

2	1 1	0 1	2. 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	222 Orang /bu	la2n22 Orang /bu	la1n00 %	100 %	20,742,411,150	20,951,650,150	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	1 1	0 1	2. 0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	630,000	630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 1	0 1	2. 0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika Keuangan SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas siKinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	1200 Dokume	n1200 Dokume	n100 %	100 %	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 1	0 1	2. 0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	1 1	0 1	2. 0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,610,000	2,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 1	0 1	2. 0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 1	0 1	2. 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan K Bulanan/ Triwulan Semesteran SKPD Koordinasi Penyus Keuangan Bulanan/Triwulan SKPD	euDaunkguannganaKne/tercapaian dAaknuLnatpaboirlaitnasuKniannerLjaporananP/eSramngeksatetran Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	470,000	470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	460,000	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**392,617,715**	**1,179,768,230**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	12,258,000	12,258,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	7 Paket	13 Paket	100 %	100 %	232,138,465	854,558,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	10,146,250	10,146,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	1 1	0 1	2. 0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 1	0 1	2. 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	136,875,000	301,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**1 1**	**0 1**	**2. 0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,263,600,000**	**1,290,462,500**	
2	1 1	0 1	2. 0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,750,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 1	0 1	2. 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	102,840,000	129,952,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,158,010,000	1,158,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**298,004,000**	**736,004,000**	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	155,600,000	163,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Gedung Kadan Bangunan Lai yang Dipelihara/Direha	Dukungan nKtoetrercapaian nAnkyauntabilitas Kinerja biPlietarasingkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	1 Unit	3 Unit	100 %	100 %	142,404,000	572,404,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**700,000,000**	**713,000,000**	
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**											**350,000,000**	**360,000,000**	

2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	n2.5 %	0 % 25 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	350,000,000	360,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**											**350,000,000**	**353,000,000**	

2	1 1	0 2	2. 0 2	0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	Terlaksanany a Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		25 %	25 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	350,000,000	353,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**1,910,092,584**	**2,029,292,584**	
2	**1 1**	**0 3**	**2. 0 1**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**210,877,084**	**214,277,084**	
2	1 1	0 3	2. 0 1	0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Kebersihan Sungai yang terpelihara Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Terlaksana	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	100 % n7.1.30 %	100 % 71.30 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	210,877,084	214,277,084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**1,699,215,500**	**1,815,015,500**	
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Kebersihan Sungai yang terpelihara Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	100 % n7.1.30 %	100 % 71.30 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,699,215,500	1,815,015,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**9,652,233,839**	**15,394,847,334**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**9,652,233,839**	**15,394,847,334**	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya RTHP dan terpeliharanya Taman Kota	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	n2,3,5 48 %	23,340 %	2.76 Ha	2.88 Ha	100 %	100 %	3,163,076,364	4,943,831,411	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya RTHP dan terpeliharanya Taman Kota	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	n2,3,5 48 %	23,340 %	76.7 Ha	76.7 Ha	100 %	100 %	6,489,157,475	10,451,015,923	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**620,548,278**	**690,438,278**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**620,548,278**	**690,438,278**	

2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha melakukan Pengeloaan Lingkungan Hidup Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	8,00 % n8,0,77 % 15,58 %	8,00 % 80,77 % 15,58 %	56 Dokumen	56 Dokumen	100 %	100 %	394,172,500	400,422,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	1 1	0 6	2. 0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha melakukan Pengeloaan Lingkungan Hidup Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	8,00 % n8,0,77 % 15,58 %	8,00 % 80,77 % 15,58 %	24 Laporan	30 Laporan	100 %	100 %	46,213,778	46,213,778	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha melakukan Pengeloaan Lingkungan Hidup Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	8,00 % n8,0,77 % 15,58 %	8,00 % 80,77 % 15,58 %	215 Dokumen	215 Dokumen	100 %	100 %	180,162,000	243,802,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**1,501,815,500**	**4,233,233,000**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,501,815,500**	**4,233,233,000**	

2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Bank Sampah yang aktif Persentase Kampung ProKlim Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	Jumlah Lembaga/kelompo Masyarakat/Institu yang Terdaftar yan Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Sekolah berwawasan lingkungan, Kelompok kmasyarakat spi engelola gsampah meningkat, Usaha yang memiliki izin PPLH meningkat, Potensi pencemaran dari kegiatan usaha terkendali	Kota Yogyakarta, Gondoksuma Demangan	n,	56,92 % 59,17 % 37,42 %	43 Lembaga	43 Lembaga	100 %	100 %	1,501,815,500	4,233,233,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**18,797,692,979**	**28,583,150,687**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**											**18,797,692,979**	**28,583,150,687**	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Sampah dari TPS terangkut ke TPA, kebersihan jalan, volume sampah yang di daur ulang, sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	Kota Yogyakarta, Gondoksuma Demangan	15,00 % n8.4,60 %	15,00 % 84,60 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50,320,000	82,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	11	11	2.01	02	Penguranga n Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaata n Kembali	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sampah dari TPS terangkut ke TPA, kebersihan jalan, volume sampah yang di daur ulang, sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	Kota Yogyakart a, Gondoku suma Demanga n	15,00 % n8.4,6 0 %	15,00 % 84,60 %	4 Lapora n	4 Lapora n	100 %	100 %	249,620,2 50	330,774,5 00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpula n, Pengangkut an, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/S PA Kabupaten/ Kota	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulka n, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/S PA Kabupaten/ Kota	Sampah dari TPS terangkut ke TPA, kebersihan jalan, volume sampah yang di daur ulang, sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	Kota Yogyakart a, Gondoku suma Demanga n	15,00 % n8.4,6 0 %	15,00 % 84,60 %	284.3 5 Ton/h	ar2i 84.35 Ton/h	ar1i 00 %	100 %	4,906,363, 082	5,003,963, 082	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)

2	1 1	1 1	2. 0 1	0 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Sampah dari TPS terangkut ke TPA, kebersihan jalan, volume sampah yang di daur ulang, sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	15,00 % n8.4,60 %	15,00 % 84,60 %	27 Kelompok	27 Kelompok	100 %	100 %	1,138,180,000	1,295,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Sampah dari TPS terangkut ke TPA, kebersihan jalan, volume sampah yang di daur ulang, sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	15,00 % n8·4,60 %	15,00 % 84,60 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	11,578,735,136	13,414,228,594	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Sampah dari TPS terangkut ke TPA, kebersihan jalan, volume sampah yang di daur ulang, sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	15,00 % n8·4,60 %	15,00 % 84,60 %	57 Unit	63 Unit	100 %	100 %	874,474,511	8,456,474,511	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
															TOTAL	**55,928,335,045**	**75,852,753,763**	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Kebersihan Sungai yang terpelihara Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Meningkatnya pelayanan parameter kualitas air dan udara	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	100 % n7·1.30 %	100 % 71.30 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	425,778,528	1,181,300,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
															TOTAL	**425,778,528**	**1,181,300,528**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**3,216,990,750**	**3,227,089,750**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,216,990,750**	**3,227,089,750**	

2	**1 1**	**0 1**	**2. 0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,750,000**	**0**	
2	1 1	0 1	2. 0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	2,750,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**1 1**	**0 1**	**2. 0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**127,276,750**	**140,125,750**	
2	1 1	0 1	2. 0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	110,787,750	137,947,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 1	0 1	2. 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,489,000	2,178,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**1 1**	**0 1**	**2. 0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**237,744,000**	**237,744,000**	

2	1 1	0 1	2. 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	237,744,000	237,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**1 1**	**0 1**	**2. 0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,849,220,000**	**2,849,220,000**	
2	1 1	0 1	2. 0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuma Demangan	nA, Nilai	A Nilai	141 Unit	141 Unit	100 %	100 %	2,849,220,000	2,849,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
															TOTAL	**3,216,990,750**	**3,227,089,750**	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 Triwulan II yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan selaras dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang selanjutnya akan digunakan oleh DLH Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada anggaran Perubahan tahun 2023. Secara umum tidak ada perubahan pada nomenklatur program maupun kegiatan. Perubahan pada Renja DLH ini hanya terjadi pada penambahan pagu anggaran karena adanya penambahan mebeler dalam lingkungan dinas, pengadaan alat-alat yang menunjang kegiatan pengelolaan persampahan, dan taman perindang, pembangunan RTHP, rehabilitasi depo-depo sampah, penambahan biaya anggaran gaji untuk outsourcing dan berkaitan dengan bank sampah.

Perubahan Rencana Kerja DLH tahun 2023 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp20,690,039,718,- atau 34.73% dari anggaran semula murni Rp59,571,104,323,- menjadi anggaran perubahan Rp80,261,144,041,-. Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DLH Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggungjawab DLH Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta, 8 Juni 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

Drs. SUGENG DARMANTO
NIP. 196501221992031005

PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

2023

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA YOGYAKARTA

2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan penyusunan dokumen perubahan perencanaan unit kerja, yaitu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Proses Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan diatasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438) ;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentangrencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah agar tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat dicapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

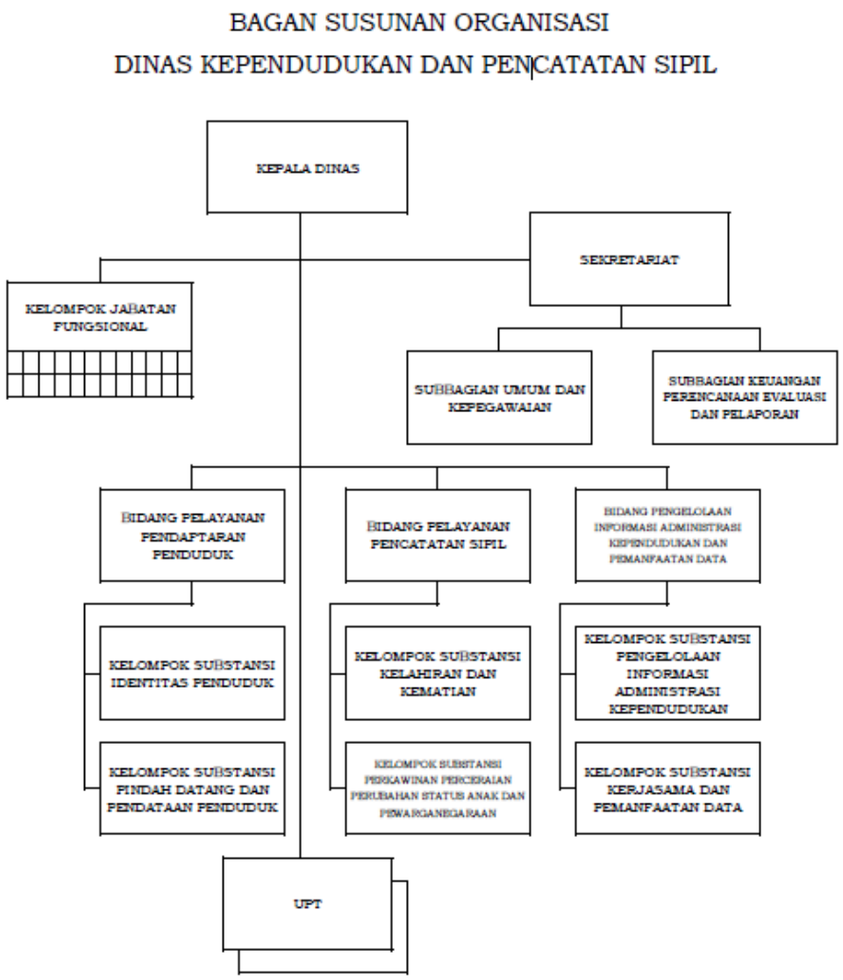
BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah ssebagaimana dalam bagan berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki 4 program, 14 kegiatan, dan 48 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan :
   a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan pelaksanaan

penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD, sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD, sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah SKPD, sub kegiatan pemanfaatan barang milik daerah SKPD;
d. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
f. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan mebel, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
g. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
h. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

2. Program Pendaftaran Penduduk:
    a. Kegiatan Pelayanan Pendafataran Penduduk, yang terdiri dari sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
    b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari Sosialisasi Pendaftaran Penduduk;

3. Program Pencatatan Sipil:
    a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
    b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:
    a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, yang terdiri dari Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
    b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi, dan Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan.

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	96,67 Skala 1-100
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	75 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan**	**Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK, SKPTI, SKPWNI)**	**96,32 %**	**0,00**	**99,84 %**	**0,00**	**95,00 %**	**1.265.367.500,00**	**94.80%**	**1.037.413.250,00**	**96.27%**	**1.018.599.250,00**	**101.55%**	**98,19%**					**Plt. Kabid Pendaftaran Penduduk**	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								**1.198.245.250,00**		**1.001.510.000,00**		**983.266.000,00**		**98.18%**						
		1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		9.180.000,00	37,00%	3.380.000,00	37,00%	3.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		35 Dokumen		37,00%		37,00%		100,00%							
		2 PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		1.017.398.000,00	92,47%	929.051.000,00	92,47%	914.667.000,00	100,00%	98,45%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		0 Dokumen		0 Dokumen		6.005 Dokumen		0,00%		92,47%		0,00%							
		3 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		129.895.250,00	41,00%	50.569.000,00	41,00%	46.769.000,00	100,00%	92,49%						
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		41,00%		41,00%		100,00%							
		4 PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0,00		0,00		41.772.000,00	49,00%	18.510.000,00	49,00%	18.450.000,00	100,00%	99,68%						
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		7.100 Dokumen		49,00%		49,00%		100,00%							
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								**67.122.250,00**		**35.903.250,00**		**35.333.250,00**		**98.41%**						
		5 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		67.122.250,00	57,00%	35.903.250,00	57,00%	35.333.250,00	100,00%	98,41%						
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		0 Laporan		0 Laporan		14 Laporan		57,00%		57,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,81%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)**	**95,86 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**95,00 %**	**631.665.000,00**	**94.24%**	**271.012.000,00**	**96.37%**	**259.436.000,00**	**102.26%**	**95,73%**					**Bidang Pencatatan Sipil**	
		Pelayanan Pencatatan Sipil								**479.670.000,00**		**206.182.000,00**		**196.256.000,00**		**95.19%**						
		1 PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				0,00		0,00		131.524.000,00	64,00%	79.500.000,00	64,00%	76.485.000,00	100,00%	96,21%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		0 Dokumen		0 Dokumen		550 Dokumen		64,00%		64,00%		100,00%							
		2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		348.146.000,00	39,11%	126.682.000,00	39,11%	119.771.000,00	100,00%	94,54%						
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan		0 Layanan		0 Layanan		10.000 Layanan		0,00%		39,11%		0,00%							
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								**151.995.000,00**		**64.830.000,00**		**63.180.000,00**		**97.45%**						
		3 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		151.995.000,00	45,00%	64.830.000,00	45,00%	63.180.000,00	100,00%	97,45%						
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**96,07%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**Rerata persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**457.693.000,00**	**100 %**	**262.493.000,00**	**100 %**	**255.949.800,00**	**100%**	**97,51%**					**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								**40.152.000,00**		**18.065.000,00**		**18.021.000,00**		**99.76%**							
		1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		40.152.000,00	45,00%	18.065.000,00	45,00%	18.021.000,00	100,00%	99,76%							
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%								
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								**417.541.000,00**		**244.428.000,00**		**237.928.800,00**		**97.34%**							
		2 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		173.276.000,00	84,22%	143.508.000,00	84,22%	143.216.800,00	100,00%	99,80%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		84,22%		0,00%								
		3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		4.610.000,00	50,00%	2.195.000,00	50,00%	2.195.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		4 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		227.260.000,00	41,60%	91.784.000,00	41,60%	85.580.000,00	100,00%	93,24%							
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		41,60%		0,00%								
		5 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				0,00		0,00		7.705.000,00	50,00%	3.741.000,00	50,00%	3.741.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		6 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				0,00		0,00		4.690.000,00	69,00%	3.200.000,00	69,00%	3.196.000,00	100,00%	99,88%							
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		69,00%		69,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,78%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**A (Nilai >80 s.d 90)**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**6.416.347.275,00**	**Nilai**	**4.238.960.683,00**	**Nilai**	**3.162.897.433,00**	**0,00%**	**74,61%**					**Sekretaris**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**16.151.000,00**		**7.325.000,00**		**6.961.000,00**		**95.03%**							
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.960.000,00	66,00%	1.280.000,00	66,00%	1.276.000,00	100,00%	99,69%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		66,00%		66,00%		100,00%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	26,00%	160.000,00	26,00%	160.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		26,00%		26,00%		100,00%								
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	75,00%	460.000,00	75,00%	460.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		75,00%		75,00%		100,00%								
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		10.810.000,00	45,00%	4.534.000,00	45,00%	4.174.000,00	100,00%	92,06%							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		45,00%		45,00%		100,00%								
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		901.000,00	31,00%	271.000,00	31,00%	271.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		31,00%		31,00%		100,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.388.468.950,00**		**3.667.324.633,00**		**2.646.607.483,00**		**72.17%**							

		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.387.063.950,00	69,00%	3.667.194.633,00	69,00%	2.646.477.483,00	100,00%	72,17%							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		43 Orang/bulan		69,00%		69,00%		100,00%								
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		120.000,00	40,00%	30.000,00	40,00%	30.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%								
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		295.000,00	20,00%	25.000,00	20,00%	25.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		20,00%		20,00%		100,00%								
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		150.000,00	50,00%	75.000,00	50,00%	75.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		460.000,00	15,00%	0,00	15,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		15,00%		15,00%		100,00%								
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**1.330.000,00**		**360.000,00**		**360.000,00**		**100%**							
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		180.000,00	50,00%	90.000,00	50,00%	90.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		200.000,00	25,00%	50.000,00	25,00%	50.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		25,00%		25,00%		100,00%								
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		430.000,00	45,00%	0,00	45,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		45,00%		45,00%		100,00%								
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**150.000,00**		**75.000,00**		**0,00**		**0%**							
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		150.000,00	50,00%	75.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**309.885.125,00**		**197.937.050,00**		**179.354.865,00**		**90.61%**							
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		9.183.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		0,00%		0,00%		0,00%								
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		144.321.690,00	67,00%	92.767.050,00	67,00%	83.959.800,00	100,00%	90,51%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		67,00%		67,00%		100,00%								
		24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		20.344.435,00	36,00%	7.200.000,00	36,00%	6.778.000,00	100,00%	94,14%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		36,00%		36,00%		100,00%								
		25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.720.000,00	49,98%	1.860.000,00	49,98%	1.860.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		49,98%		49,98%		100,00%								
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		132.316.000,00	73,00%	96.110.000,00	73,00%	86.757.065,00	100,00%	90,27%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		73,00%		73,00%		100,00%								

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**19.035.000,00**		**19.035.000,00**		**18.948.000,00**		**99.54%**														
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		19.035.000,00	100,00%	19.035.000,00	100,00%	18.948.000,00	100,00%	99,54%														
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**279.969.000,00**		**115.380.000,00**		**107.479.666,00**		**93.15%**														
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		26.500.000,00	75,00%	19.700.000,00	75,00%	18.752.000,00	100,00%	95,19%														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%															
		29	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		10.100.000,00	51,00%	5.075.000,00	51,00%	3.652.666,00	100,00%	71,97%														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		51,00%		51,00%		100,00%															
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		243.369.000,00	43,20%	90.605.000,00	43,20%	85.075.000,00	100,00%	93,90%														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		43,20%		0,00%															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**401.358.200,00**		**231.524.000,00**		**203.186.419,00**		**87.76%**														
		31	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		146.545.500,00	51,00%	74.450.000,00	51,00%	58.897.114,00	100,00%	79,11%														
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		26 Unit		51,00%		51,00%		100,00%															
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		79.634.500,00	48,00%	37.600.000,00	48,00%	31.147.550,00	100,00%	82,84%														
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		4 Unit		48,00%		48,00%		100,00%															
		33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		85.178.200,00	36,00%	29.474.000,00	36,00%	23.803.755,00	100,00%	80,76%														
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		77 Unit		36,00%		36,00%		100,00%															
		34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%	89.338.000,00	100,00%	99,26%														
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%															
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**83,62%**														
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**														
										Total anggaran dari seluruh program		**8.771.072.775,00**		**5.809.878.933,00**		**4.696.882.483,00**															
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						**100,00%**	**80,84%**														
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**														

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan, 2) adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik, 3) Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu, 4) adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil, 5) Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan; 2) sarana dan prasarana perlu diupgrade utk percepatan layanan; 3) Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola, 4) Gangguan jaringan listrik, 5) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK), 6) beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 Nopember 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Sosialisasi yang lebih intensif terkait kepemilikan dokumen kependudukan. 2. Perlu adanya upaya untuk mencapai target Identitas Kependudukan Digital (IKD). 3. Koordinasi dengan OPD terkait jaringan listrik dan internet
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini dapat diidentifikasi

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sangat baik karena dari ke lima indikator kinerja tersebut, telah memenuhi target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan perubahan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi tidak segera diikuti dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Masih adanya penduduk yang bersatus belum rekam namun tidak dijumpai di tempat domisilinya.
3. Banyaknya catatan peristiwa penting kependudukan di masa lalu yang belum tercatat dalam database kependudukan.

4. Belum terselesaikannya pembentukan arsip digital untuk seluruh Akta-akta Pencatatan Sipil.
5. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan terbaru.
6. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan.
7. Masih adanya permasalahan-permasalahan penyelenggara adminduk bagi masyarakat yang bersifat lintas instansi.
8. Trouble system di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sering terjadi dan mengganggu kelancaran pelayanan.

2.3.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap capaian Program Nasional.

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai penjabaran dari visi misi Kota Yogyakarta akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian pembanguan Pemerintah DIY yang diarahkan pada tema : ***" Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan semangat Segoro Amarto."*** Serta pencapaian visi nasional yaitu " **Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil "**

Hasil Penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogykarta oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan kinerja dengan sangat baik dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian target di Tingkat Nasional.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dari kondisi yang mempengaruhi kegiatan pelayanan maka terdapat peluang untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih baik. Peluang dapat dirumuskan dengan memperhatikan factor internal maupun ekseternal yang berpengaruh yaitu :

- **Faktor Internal**

  <u>Kekuatan</u>

  a. Telah adanya peraturan pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa Peraturan pada tataran Nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden

dan Menteri serta adanya Peraturan pelaksanaan yang diterbitkan di daerah yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

b. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas.
d. Program Kependudukan berbasis NIK menjamin akurasi data kependudukan
e. Adanya database kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
f. Terkelolanya Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang baik

Kelemahan

a. Terbatasnya jumlah personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan akibat mutasi, promosi dan purna tugas yang tidak diganti ;
b. Belum meratanya kemampuan personil dalam menghadapi sistem pelayanan secara daring;
c. Belum mencukupinya jumlah perangkat teknologi informasi untuk pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring;
d. Terbatasnya ruang pelayanan Administrasi Kependudukan.

- **Faktor eksternal**

Peluang

a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tertib Administrasi Kependudukan.
b. Adanya peraturan tentang system layanan Administrasi Kependudukan secara daring/online.
c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik dan murah.
d. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).
e. Banyaknya pemangku kepentingan (stakeholder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan.
f. Banyaknya pemangku kepentingan yang menggunakan data kependudukan.
g. Dokumen kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.

h. Peraturan penyelenggaran Adminduk yang semakin memudahkan masyarakat untuk tertib administrasi.

Ancaman

a. Mobilitas dan dinamika perubahan identitas hukum penduduk yang tinggi.
b. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Kependudukan dan Pelayanan Publik yang tidak diikuti dengan sosilisasi yang memadai menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam pelayanan masyarakat.
c. Belum familiarnya masyarakat Kota Yogyakarta serta sistem pelayanan daring/online.

Dari pemetaan faktor internal dan eksternal tersebut maka di masa depan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpeluang untuk memantapkan pelayanan Go Digital dengan peningkatan berbagai inovasi disertai dengan upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat atas berbagai perubahan kebikajakan administrasi kependudukan dengan tetap memperhatikan pelayanan yang besifat gender.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp. 605.974.550,- dari Rp. 6.416.347.275,- menjadi Rp. 7.022.321.825,- terdiri dari kegiatan : Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, anggaran tetap sebesar Rp16.151.000; Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, anggaran naik sebesar Rp. 78.320.000,- dari Rp 5.388.468.950,- menjadi Rp. 5.466.788.950,-; Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, anggaran naik sebesar Rp. 1.150.000,- dari Rp. 1.330.000,- menjadi Rp. 2.480.000,-; Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah anggaran naik sebesar Rp. 1.380.000,- dari Rp. 150.000,- menjadi Rp. 1.530.000,-; Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, anggaran naik sebesar Rp. 102.651.750,-, dari Rp. 309.885.125,- menjadi Rp. 412.536.875,-; Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, anggaran naik sebesar Rp. 390.364.000,- dari Rp. 19.035.000,- menjadi Rp. 409.399.000,- ; Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran turun sebesar Rp. 3.100.000,- dari Rp. 279.969.000,- menjadi Rp. 276.869.00,-; Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp. 35.208.800, dari Rp. 401.358.200,- menjadi Rp. 436.567.000,-.

Program Pendaftaran Penduduk, anggaran naik sebesar Rp. 24.440.000,- dari Rp. 1.265.367.500,- menjadi Rp. 1.289.807.500,- terdiri dari kegiatan: Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, anggaran naik sebesar Rp. 24.440.000,- dari Rp. 1.198.245.250,- menjadi Rp. 1.222.685.250,-. dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk anggaran tetap sebesar Rp. 67.122.250,-

Program Pencatatan Sipil, anggaran tetap sebesar Rp. 631.665.000,- terdiri dari kegiatan: Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, anggaran sebesar Rp. 479.670.000,- dan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, anggaran sebesar Rp. 151.995.000,-

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, anggaran naik sebesar Rp. 404.647.200,- dari Rp. 457.693.000,- menjadi Rp. 862.340.200,- terdiri dari kegiatan: Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, anggaran tetap sebesar Rp. 40.152.000,- dan Kegiatan

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, anggaran naik sebesar Rp. 404.647.200,-, dari Rp. 417.541.000,- menjadi Rp. 822.188.200,-

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	901,000	901,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	630,000
2 12 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,388,468,950**	**5,466,788,950**					**5,767,108,000**
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	100 %	100 %	5,387,063,950	5,465,383,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	5,765,848,000
2 12 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	120,000	120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	120,000
2 12 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	295,000	295,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	240,000
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	230,000	230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	200,000
2 12 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	150,000	150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	150,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	460,000	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	400,000
2 12 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	150,000	150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	150,000
2 12 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**1,330,000**	**2,480,000**					**1,060,000**
2 12 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	180,000
2 12 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	150,000	150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	150,000
2 12 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	220,000	220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	180,000
2 12 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	200,000
2 12 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	430,000	430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kinerja Perangkat Daerah	Muja Muju											untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	150,000	1,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	150,000
2 12 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**150,000**	**1,530,000**					**120,000**
2 12 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	150,000	1,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	120,000
2 12 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**309,885,125**	**412,536,875**					**282,660,133**
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Paket	2 Paket	100 %	100 %	9,183,000	14,234,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	9,183,000
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	144,321,690	144,321,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	171,257,690
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	20,344,435	20,344,435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	20,213,443
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,720,000	3,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan	A Nilai	3,720,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Sipil														Pencatatan Sipil		
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	132,316,000	229,916,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	78,286,000
2 12 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**19,035,000**	**409,399,000**					**31,337,900**
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai		18 Unit	100 %	100 %	0	253,146,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	0
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	3 Unit	12 Unit	100 %	100 %	19,035,000	156,253,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	31,337,900
2 12 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**279,969,000**	**276,869,000**					**256,085,330**
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	26,500,000	23,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	26,500,000
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10,100,000	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	7,500,000
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	243,369,000	245,369,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	222,085,330

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 12 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**401,358,200**	**436,567,000**					**291,459,400**
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	26 Unit	26 Unit	100 %	100 %	146,545,500	137,272,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	105,745,500
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	79,634,500	80,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	79,634,500
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	77 Unit	77 Unit	100 %	100 %	85,178,200	91,595,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	86,079,400
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Unit	3 Unit	100 %	100 %	90,000,000	127,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	20,000,000
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**1,265,367,500**	**1,289,807,500**					**1,210,443,884**
2 12 02 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**1,198,245,250**	**1,222,685,250**					**1,135,095,484**
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		87,50 %	35 Dokumen	35 Dokumen	100 %	100 %	9,180,000	9,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	87,50 %	11,700,000
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,50 %	6005 Dokumen	60005 Dokumen	100 %	100 %	1,017,398,000	1,017,398,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	87,50 %	991,631,674

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,50 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	129,895,250	154,335,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	87,50 %	94,145,250
2 12 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,50 %	7100 Dokumen	7100 Dokumen	100 %	100 %	41,772,000	41,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	87,50 %	37,618,560
2 12 02 2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**											**67,122,250**	**67,122,250**					**75,348,400**
2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,50 %	14 Laporan	14 Laporan	100 %	100 %	67,122,250	67,122,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	87,50 %	75,348,400
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**631,665,000**	**631,665,000**					**613,708,210**
2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**479,670,000**	**479,670,000**					**461,608,210**
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	95 %	97,25 %	550 Dokumen	550 Dokumen	100 %	100 %	131,524,000	131,524,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	97,25 %	132,886,705
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	97,25 %	10000 Layanan	10000 Layanan	100 %	100 %	348,146,000	348,146,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	97,25 %	328,721,505
2 12 03 2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**											**151,995,000**	**151,995,000**					**152,100,000**
2 12 03 2.02 08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	95 %	97,25 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	151,995,000	151,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	97,25 %	152,100,000
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**457,693,000**	**862,340,200**					**449,197,120**
2 12 04 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**40,152,000**	**40,152,000**					**8,400,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	40,152,000	40,152,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	8,400,000
2 12 04 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**417,541,000**	**822,188,200**					**440,797,120**
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	2 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	173,276,000	577,923,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	247,077,120
2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	4,610,000	4,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	4,600,000
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	227,260,000	227,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	176,725,000
2 12 04 2.03 06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	SIAK berfungsi dengan baik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	7,705,000	7,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	7,705,000
2 12 04 2.03 08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	SIAK berfungsi dengan baik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	4,690,000	4,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	4,690,000
											TOTAL	**8,771,072,775**	**9,806,134,525**					**8,918,819,977**

BAB IV
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari 4 program, 14 kegiatan, dan 49 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.806.134.525,- mengalami penambahan sebesar Rp. 1.035.061.750,- dari sebelumnya yang sebesar Rp. 8.771.072.775,- Penambahan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2023.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta maka perubahan rencana kerja yang dibuat berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi ke depan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti.

5.3. Rencana Tidak Lanjut.

Atas rencana tindaklanjut dari penyusunan dokukem Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan program kegiatan seperti yang tertuang dalam Tabel 3.1 perubahan rencana kerja setelah mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun penyempurnaan atas perubahan rencana program kerja dalam proses perencanan atas hasil pembahasan bersama tim di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta akan diterima sebagai bagian dinamika perencanaan yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan Rencana Kerja yang disusun.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

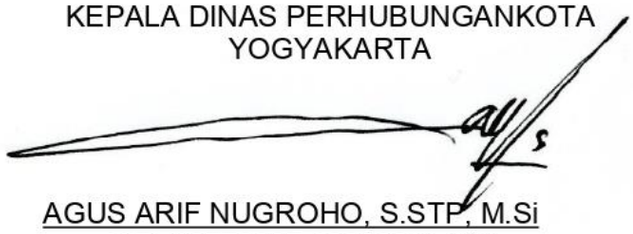
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENJA SKPD) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan Renja SKPD tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta disusun mendasarkan pada Rancangan Perubahan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, serta penyesuaian dengan perkembangan keadaan.

Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan dalam penyusunan PERUBAHAN RENJA SKPD Tahun 2023 ini untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA
YOGYAKARTA



AGUS ARIF NUGROHO, S.STP, M.Si
NIP. 19770907 199603 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 7

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 20

BAB IV: PENUTUP 62

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

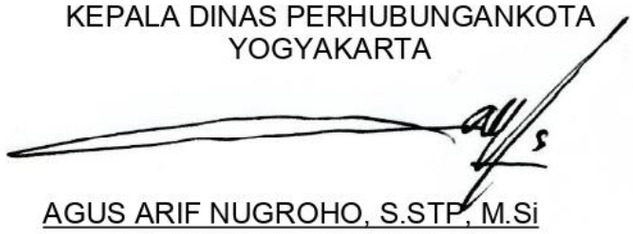
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENJA SKPD) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan Renja SKPD tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta disusun mendasarkan pada Rancangan Perubahan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, serta penyesuaian dengan perkembangan keadaan.

Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan dalam penyusunan PERUBAHAN RENJA SKPD Tahun 2023 ini untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA
YOGYAKARTA



AGUS ARIF NUGROHO, S.STP, M.Si
NIP. 19770907 199603 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 7

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 20

BAB IV: PENUTUP 62

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni tahun berjalan mengalami perubahan serta direvisi dengan menambah dan mengurangi kegiatan dengan melihat pencapaian kinerja Dinas selama dua triwulan. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Uraian	Target Murni	Target Perub Penjabaran
Pendapatan Daerah	**5.906.998.800**	**6.378.515.000**
Pendapatan Asli Daerah	5.906.998.800	6.378.515.000
Retribusi Daerah	5.900.998.800	6.372.515.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.000.000	6.000.000
Belanja Daerah	**22.144.456.103**	**24.268.587.297**
Belanja Operasi	**20.801.846.965**	**22.082.104.493**
Belanja Pegawai	8.930.305.940	9.199.575.233
Belanja Barang dan Jasa	11.871.541.025	12.882.529.260
Belanja Modal	**1.342.609.138**	**2.186.482.804**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.312.609.138	2.117.130.304
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000	69.352.500

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Dinas Perhubungan merupakan dinas yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai 2 tugas utama yaitu sebagai dinas yang mengelola pendapatan dan dinas yang melaksanakan tupoksi di bidang perhubungan dengan pembiayaan/belanja dari APBD. Untuk Evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan sampai dengan Bulan Juni dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Retribusi Jasa Umum**	**5.541.415.000**	**3.179.269.000**	**57,37**
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.830.000.000	2.814.804.000	58,28
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	711.415.000	364.465.000	51,23
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**359.583.800**	**247.016.600**	**68,70**
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	283.983.800	147.300.000	51,87
	Retribusi Penyewaan bangunan	75.600.000	99.716.600	131,90
3	**Pendapatan dari Barang Milik Daerah**	**6.000.000**	**3.000.000**	**50**
	Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000	3.000.000	50
	JUMLAH	**5.906.998.800**	**3.179.269.000**	**57,37**

Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan setiap tribulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar Rp. 22.144.456.103,- yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp. 9.916.930.299,4 atau 44,87% dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Operasional realisasi sebesar Rp. 9.839.213.229,- atau 47,30% dari anggaran sebesar Rp 20.801.846.965,- dan;

b) untuk realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 77.717.000 atau 5,79% dari anggaran sebesar Rp. 1.342.609.138,-

Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program/kegiatan/Sub. Kegiatan sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcame)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan**	**91.51%**	**10,586,313,538.00**	**91,51% %**	**6,703,566,354.00**	**87.34%**	**4,155,828,014.00**	**95.60%**	**61.98%**
		Persentase juru parkir yang tertib	**97.60%**	**0**	**97.60%**	**0**	**97.47**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
		Persentase ketertiban lalu lintas	**83.00%**	**0**	**83.00%**	**0**	**90.66%**	**0**	**109.23%**	**0.00%**
		Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	**68.29%**	**0**	**68.29%**	**0**	**65.27%**	**0**	**95.59%**	**0.00%**
		Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	**100.00%**	**0**	**50%**	**0**	**66.66%**	**0**	**133.32%**	**0.00%**
		Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	**100.00%**	**0**	**50%**	**0**	**50%**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
		Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	**94.53%**	**0**	**94.53**	**0**	**94.12**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			**3,035,942,400.00**		**2,671,536,200.00**		**537,944,500.00**		**20.14%**
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			1,387,000,000.00	100.00%	1,387,000,000.00	48.87%	49,727,000.00	48.87%	3.59%
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	107 unit		0.00%		48.87%		0.00%	
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1,648,942,400.00	78.50%	1,284,536,200.00	62.63%	488,217,500.00	79.78%	38.01%
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	155 Unit		0.00%		62.63%		0.00%	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			**4,647,654,200.00**		**2,756,789,102.00**		**2,432,476,326.00**		**88.24%**
3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik			305,503,000.00	78.75%	212,347,502.00	78.76%	118,258,000.00	100.01%	55.69%
		Jumlah Dokument Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen		78.75%		78.76%		100.01%	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			4,342,151,200.00	62.60%	2,544,441,600.00	65.00%	2,314,218,326.00	103.83%	90.95%
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan		62.60%		65.00%		103.83%	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			**1,372,792,000.00**		**589,713,000.00**		**550,525,800.00**		**93.35%**
5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			218,601,000.00	41.74%	91,243,000.00	41.74%	88,984,000.00	100.00%	97.52%
		Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan		41.74%		41.74%		100.00%	
6	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan			19,260,000.00	50.00%	9,630,000.00	50.00%	9,443,000.00	100.00%	98.06%

		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		50.00%		50.00%		100.00%	
	7	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			1,134,931,000.00	45.45%	488,840,000.00	45.45%	452,098,800.00	100.00%	92.48%
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan 1. Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	44 Laporan		45.45%		45.45%		100.00%	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalinuntuk Jalan Kabupaten/Kota				**158,640,000.00**		**12,945,000.00**		**13,517,000.00**		**104.42%**
	8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			131,840,000.00	25.35%	920,000.00	25.35%	2,070,000.00	100.00%	225.00%
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen		0.00%		25.35%		0.00%	
	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			15,070,000.00	45.45%	6,850,000.00	45.45%	6,617,000.00	100.00%	96.60%
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	24 Laporan		45.45%		45.45%		100.00%	
	10	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			11,730,000.00	45.83%	5,175,000.00	45.83%	4,830,000.00	100.00%	93.33%
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	24 Laporan		45.83%		45.83%		100.00%	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				**453,246,138.00**		**243,033,138.00**		**213,061,188.00**		**87.67%**
	11	Pelaksanaan InspeksiAudit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			453,246,138.00	56.03%	243,033,138.00	56.03%	213,061,188.00	100.00%	87.67%
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan		0.00%		56.03%		0.00%	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah				**416,450,800.00**		**166,669,914.00**		**157,466,700.00**		**94.48%**
	12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota			416,450,800.00	40.02%	166,669,914.00	41.40%	157,466,700.00	103.45%	94.48%
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	513 Unit		40.02%		41.40%		103.45%	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				**501,588,000.00**		**262,880,000.00**		**250,836,500.00**		**95.42%**
	13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor			325,382,000.00	50.00%	158,310,000.00	50.00%	146,659,000.00	100.00%	92.64%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 Unit		50.00%		50.00%		100.00%	
	14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor			1,200,000.00	50.00%	600,000.00	50.00%	600,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang		50.00%		50.00%		100.00%	
	15	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor			50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.000 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%	
	16	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur			1,440,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	100.00%

		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan	1 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%	
	17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor			118,000,000.00	50.00%	50,000,000.00	50.00%	49,783,500.00	100.00%	99.57%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit		50.00%		50.00%		100.00%	
	18	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor			5,566,000.00	46.00%	2,530,000.00	46.00%	2,354,000.00	100.00%	93.04%
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan		46.00%		46.00%		100.00%	
		Rata-rata capaian kinerja								**96.44%**	**92.15%**
		Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan**	**A Nilai**	**11,558,142,565.00**	**A Nilai**	**7,170,275,732.00**	**A Nilai**	**5,762,252,285.00**	**0.00%**	**80.36%**
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**86,173,000.00**		**10,234,000.00**		**8,007,000.00**		**78.24%**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2,501,500.00	100.00%	2,501,500.00	100.00%	1,903,500.00	100.00%	76.09%
			Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2,468,500.00	100.00%	2,468,500.00	100.00%	1,703,500.00	100.00%	69.01%
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2,468,500.00	68.24%	1,684,500.00	68.24%	1,313,500.00	100.00%	77.98%
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		68.24%		68.24%		100.00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2,468,500.00	100.00%	2,468,500.00	100.00%	2,261,500.00	100.00%	91.61%
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2,468,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0		0.00%		0.00%		0.00%	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			71,822,500.00	25.00%	561,000.00	25.00%	275,000.00	100.00%	49.02%
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		25.00%		25.00%		100.00%	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,975,000.00	27.85%	550,000.00	27.85%	550,000.00	100.00%	100.00%

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan		27.85%		27.85%		100.00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**8,932,919,190.00**		**5,703,993,362.00**		**4,498,254,549.00**		**78.86%**
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8,930,305,940.00	64.28%	5,703,676,612.00	64.28%	4,498,254,549.00	100.00%	78.87%
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Bulan		64.28%		64.28%		100.00%	
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			251,250.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			202,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			398,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%	
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			685,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			950,500.00	34.55%	316,750.00	34.55%	0	100.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan		34.55%		34.55%		100.00%	
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			125,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**2,232,500.00**		**935,000.00**		**935,000.00**		**100%**
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			445,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			455,000.00	100.00%	455,000.00	100.00%	455,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%	
	17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			455,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%	
	18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			397,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%	

	19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%	
	20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**126,709,000.00**		**126,225,000.00**		**121,498,500.00**		**96.26%**
	21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			126,225,000.00	100.00%	126,225,000.00	100.00%	121,498,500.00	100.00%	96.26%
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket		100.00%		100.00%		100.00%	
	22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			484,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**448,842,875.00**		**272,610,330.00**		**229,585,136.00**		**84.22%**
	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10,110,000.00	100.00%	10,110,000.00	100.00%	9,675,000.00	100.00%	95.70%
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket		100.00%		100.00%		100.00%	
	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			136,105,125.00	85.29%	86,095,125.00	85.29%	77,769,000.00	100.00%	90.33%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	34 Paket		85.29%		85.29%		100.00%	
	25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30,281,750.00	100.00%	30,281,750.00	100.00%	26,025,000.00	100.00%	85.94%
			Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	9 Paket		100.00%		100.00%		100.00%	
	26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			81,000,000.00	64.12%	51,740,000.00	64.12%	43,307,000.00	100.00%	83.70%
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket		64.12%		64.12%		100.00%	
	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8,760,000.00	49.50%	4,380,000.00	49.50%	4,380,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen		49.50%		49.50%		100.00%	
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			182,586,000.00	50.67%	90,003,455.00	50.67%	68,429,136.00	100.00%	76.03%
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		50.67%		50.67%		100.00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**51,921,000.00**		**0**		**0**		**NAN%**
	29	Pengadaan Mebel			6,171,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit		0.00%		0.00%		0.00%	
	30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45,750,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit		0.00%		0.00%		0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1,090,484,000.00**		**571,725,040.00**		**522,486,512.00**		**91.39%**
	31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,400,000.00	37.20%	2,350,000.00	37.20%	1,850,000.00	100.00%	78.72%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		37.20%		37.20%		100.00%	
	32	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya			406,800,000.00	60.00%	243,600,000.00	60.00%	224,206,979.00	100.00%	92.04%

		Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan		60.00%		60.00%		100.00%	
	33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			677,284,000.00	48.86%	325,775,040.00	48.86%	296,429,533.00	100.00%	90.99%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7 Laporan		48.86%		48.86%		100.00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**818,861,000.00**		**484,553,000.00**		**381,485,588.00**		**78.73%**
	34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			54,496,000.00	50.00%	26,348,000.00	50.00%	20,635,167.00	100.00%	78.32%
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit		50.00%		50.00%		100.00%	
	35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			460,188,000.00	50.00%	216,819,000.00	50.00%	134,980,721.00	100.00%	62.26%
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	48 Unit		50.00%		50.00%		100.00%	
	36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105,177,000.00	40.91%	42,386,000.00	40.91%	29,643,700.00	100.00%	69.94%
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	99 Unit		40.91%		40.91%		100.00%	
	37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			199,000,000.00	100.00%	199,000,000.00	100.00%	196,226,000.00	100.00%	98.61%
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%	
Rata-rata capaian kinerja										**100.00%**	**81.66%**
Predikat kinerja										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**
Total anggaran dari seluruh program					**22,144,456,103.00**		**13,873,842,086.00**		**9,918,080,299.00**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)										**98.51%**	**71.49%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)										**Sangat Tinggi**	**Sedang**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 realisasi anggaran tercapai 47% dari target 100% dengan predikat Sedang. Penyebab belum optimalnya serapan program dan kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

a) Ada ketidaksesuaian antara tata kala dengan pelaksanaan pekerjaan karena adanya perubahan pekerjaan-pekerjaan yang sulit diprediksikan di awal;

b) Adanya beberapa kegiatan yang ikut dalam pergeseran anggaran karena kesalahan dalam penginputan kode rekening sehingga pelaksanaan kegiatan ikut bergeser.

Dalam rangka meminimalisir hambatan yang rata, maka upaya yang dilakukan antara lain:

a) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan di internal SKPD, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan program dan kegiatan;

b) Perlunya perencanaan yang lebih matang dan komprehensif dalam penentuan target fisik, tatakala kegiatan, dan perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman pada kegiatan prioritas sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal;

c) Intensifikasi terhadap pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka menigkatkan kompetensi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;

d) Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

e) Mengefisiensikan anggaran yang tidak bisa terlaksana dan tidak terserap pada anggaran perubahan.

Adapun hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Juni 2023 disajikan dalam tabel di bawah sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22
	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan**	**Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji / Jumlah Kendaraan yang di Uji x 100%**	**91.54%**	**0**	**86.15%**	**0**	**91.51%**	**10,586,313,538.00**	**91,51% %**	**6,703,566,354.00**	**87.34%**	**4,155,828,014.00**	**95.60%**	**61.98%**	**Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**
			Persentase juru parkir yang tertib	**Jumlah juru parkir resmi yang tertib / Jumlah juru parkir resmi x 100%**	**98.00%**	**0**	**97.47%**	**0**	**97.60%**	**0**	**97.60%**	**0**	**97.47**	**0**	**100.00%**	**0.00%**	**Kepala Bidang Perparkiran**
			Persentase ketertiban lalu lintas	**Jumlah yang menaati ketertiban lalu lintas / jumlah Total pengguna lalu lintas yang diperiksa x 100%**	**83.00%**	**0**	**0,00 0**	**0**	**83.00%**	**0**	**83.00%**	**0**	**90.66%**	**0**	**109.23%**	**0.00%**	**Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan**
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	**Jumlah Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik / jumlah total sarpras lalu lintas x 100%**	**77.00%**	**0**	**65.27%**	**0**	**68.29%**	**0**	**68.29%**	**0**	**65.27%**	**0**	**95.59%**	**0.00%**	**Kepala Bidang Lalu Lintas**
			Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	**Jumlah Rekomendasi yang dilayani / Jumlah Total pemohon rekomendasi x 100%**	**100.00%**	**0**	**0,00 0**	**0**	**100.00%**	**0**	**50%**	**0**	**66.66%**	**0**	**133.32%**	**0.00%**	**Kepala Bidang Lalu Lintas**
			Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	**Jumlah penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas / Jumlah Total Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas x 100%**	**100.00%**	**0**	**0,00 0**	**0**	**100.00%**	**0**	**50%**	**0**	**50%**	**0**	**100.00%**	**0.00%**	**Kepala Bidang Lalu Lintas**
			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	**Sarpras parkir yang kondisi baik / Jumlah sarpras parkir x 100%**	**97.00%**	**0**	**94.12%**	**0**	**94.53%**	**0**	**94.53**	**0**	**94.12**	**0**	**100.00%**	**0.00%**	**Kepala Bidang Perparkiran**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								**3,035,942,400.00**		**2,671,536,200.00**		**537,944,500.00**		**20.14%**	
		1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				0		0		1,387,000,000.00	100.00%	1,387,000,000.00	48.87%	49,727,000.00	48.87%	3.59%	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 unit		0 unit		107 unit		0.00%		48.87%		0.00%		
		2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				0		0		1,648,942,400.00	78.50%	1,284,536,200.00	62.63%	488,217,500.00	79.78%	38.01%	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		0 Unit		0 Unit		155 Unit		0.00%		62.63%		0.00%		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								**4,647,654,200.00**		**2,756,789,102.00**		**2,432,476,326.00**		**88.24%**	
		3 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0		0		305,503,000.00	78.75%	212,347,502.00	78.76%	118,258,000.00	100.01%	55.69%	
			Jumlah Dokument Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		78.75%		78.76%		100.01%		
		4				0		0		4,342,151,200.00	62.60%	2,544,441,600.00	65.00%	2,314,218,326.00	103.83%	90.95%	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		62.60%		65.00%		103.83%		
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								**1,372,792,000.00**		**589,713,000.00**		**550,525,800.00**		**93.35%**	
		5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			0		0		218,601,000.00	41.74%	91,243,000.00	41.74%	88,984,000.00	100.00%	97.52%	
				Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		41.74%		41.74%		100.00%		
		6	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			0		0		19,260,000.00	50.00%	9,630,000.00	50.00%	9,443,000.00	100.00%	98.06%	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50.00%		50.00%		100.00%		
		7	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			0		0		1,134,931,000.00	45.45%	488,840,000.00	45.45%	452,098,800.00	100.00%	92.48%	
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan 1. Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota		0 Laporan		0 Laporan		44 Laporan		45.45%		45.45%		100.00%		
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalinuntuk Jalan Kabupaten/Kota								**158,640,000.00**		**12,945,000.00**		**13,517,000.00**		**104.42%**	
		8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			0		0		131,840,000.00	25.35%	920,000.00	25.35%	2,070,000.00	100.00%	225.00%	
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		25.35%		0.00%		

		9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0		0		15,070,000.00	45.45%	6,850,000.00	45.45%	6,617,000.00	100.00%	96.60%	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		45.45%		45.45%		100.00%		
		10	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				0		0		11,730,000.00	45.83%	5,175,000.00	45.83%	4,830,000.00	100.00%	93.33%	
				Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		45.83%		45.83%		100.00%		
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									**453,246,138.00**		**243,033,138.00**		**213,061,188.00**		**87.67%**	
		11	Pelaksanaan InspeksiAudit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				0		0		453,246,138.00	56.03%	243,033,138.00	56.03%	213,061,188.00	100.00%	87.67%	
				Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0.00%		56.03%		0.00%		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota									**416,450,800.00**		**166,669,914.00**		**157,466,700.00**		**94.48%**	
		12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				0		0		416,450,800.00	40.02%	166,669,914.00	41.40%	157,466,700.00	103.45%	94.48%	
				Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 Unit		0 Unit		513 Unit		40.02%		41.40%		103.45%		
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									**501,588,000.00**		**262,880,000.00**		**250,836,500.00**		**95.42%**	
		13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		325,382,000.00	50.00%	158,310,000.00	50.00%	146,659,000.00	100.00%	92.64%	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		0 Unit		0 Unit		4 Unit		50.00%		50.00%		100.00%		
		14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		1,200,000.00	50.00%	600,000.00	50.00%	600,000.00	100.00%	100.00%	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Orang		0 Orang		8 Orang		50.00%		50.00%		100.00%		
		15	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	100.00%	
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0 Dokumen		0 Dokumen		2.000 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		16	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		1,440,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	1,440,000.00	100.00%	100.00%	
				Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%		
		17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		118,000,000.00	50.00%	50,000,000.00	50.00%	49,783,500.00	100.00%	99.57%	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		0 Unit		0 Unit		2 Unit		50.00%		50.00%		100.00%		
		18	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		5,566,000.00	46.00%	2,530,000.00	46.00%	2,354,000.00	100.00%	93.04%	
				Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		46.00%		46.00%		100.00%		
								Rata-rata capaian kinerja								**96.44%**	**92.15%**	
								Predikat kinerja								**Sangat**	**Sangat**	

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**11,558,142,565.00**	**A Nilai**	**7,170,275,732.00**	**A Nilai**	**5,762,252,285.00**	**0.00%**	**80.36%**	**Sekretariat Dinas Perhubungan**
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**86,173,000.00**		**10,234,000.00**		**8,007,000.00**		**78.24%**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2,501,500.00	100.00%	2,501,500.00	100.00%	1,903,500.00	100.00%	76.09%	
			Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		2,468,500.00	100.00%	2,468,500.00	100.00%	1,703,500.00	100.00%	69.01%	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
	3					0		0		2,468,500.00	68.24%	1,684,500.00	68.24%	1,313,500.00	100.00%	77.98%	

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		68.24%		68.24%		100.00%		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		2,468,500.00	100.00%	2,468,500.00	100.00%	2,261,500.00	100.00%	91.61%	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		2,468,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0		0		0		0.00%		0.00%		0.00%		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0		0		71,822,500.00	25.00%	561,000.00	25.00%	275,000.00	100.00%	49.02%	
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		25.00%		25.00%		100.00%		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1,975,000.00	27.85%	550,000.00	27.85%	550,000.00	100.00%	100.00%	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		27.85%		27.85%		100.00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**8,932,919,190.00**		**5,703,993,362.00**		**4,498,254,549.00**		**78.86%**	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		8,930,305,940.00	64.28%	5,703,676,612.00	64.28%	4,498,254,549.00	100.00%	78.87%	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		71 Orang/Bulan		64.28%		64.28%		100.00%		
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		251,250.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%		
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		202,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%		
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		398,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%		
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		685,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%		
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		950,500.00	34.55%	316,750.00	34.55%	0	100.00%	0.00%	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		34.55%		34.55%		100.00%		
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		125,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**2,232,500.00**		**935,000.00**		**935,000.00**		**100%**	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		445,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%		

		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		455,000.00	100.00%	455,000.00	100.00%	455,000.00	100.00%	100.00%	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		455,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%		
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		397,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%		
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	100.00%	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%		
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	240,000.00	100.00%	100.00%	
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**126,709,000.00**		**126,225,000.00**		**121,498,500.00**		**96.26%**	
		21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		126,225,000.00	100.00%	126,225,000.00	100.00%	121,498,500.00	100.00%	96.26%	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Paket		0 Paket		110 Paket		100.00%		100.00%		100.00%		
		22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		484,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**448,842,875.00**		**272,610,330.00**		**229,585,136.00**		**84.22%**	
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		10,110,000.00	100.00%	10,110,000.00	100.00%	9,675,000.00	100.00%	95.70%	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		6 Paket		100.00%		100.00%		100.00%		
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		136,105,125.00	85.29%	86,095,125.00	85.29%	77,769,000.00	100.00%	90.33%	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		34 Paket		85.29%		85.29%		100.00%		
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		30,281,750.00	100.00%	30,281,750.00	100.00%	26,025,000.00	100.00%	85.94%	
				Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0 Paket		0 Paket		9 Paket		100.00%		100.00%		100.00%		
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		81,000,000.00	64.12%	51,740,000.00	64.12%	43,307,000.00	100.00%	83.70%	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		64.12%		64.12%		100.00%		
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		8,760,000.00	49.50%	4,380,000.00	49.50%	4,380,000.00	100.00%	100.00%	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		49.50%		49.50%		100.00%		
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		182,586,000.00	50.67%	90,003,455.00	50.67%	68,429,136.00	100.00%	76.03%	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		75 Laporan		50.67%		50.67%		100.00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**51,921,000.00**		**0**		**0**		**NAN%**	
		29	Pengadaan Mebel				0		0		6,171,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Paket Mebel yang disediakan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		0.00%		0.00%		0.00%		
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		45,750,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0.00%		0.00%		0.00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1,090,484,000.00**		**571,725,040.00**		**522,486,512.00**		**91.39%**	
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		6,400,000.00	37.20%	2,350,000.00	37.20%	1,850,000.00	100.00%	78.72%	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		37.20%		37.20%		100.00%		
		32	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber				0		0		406,800,000.00	60.00%	243,600,000.00	60.00%	224,206,979.00	100.00%	92.04%	

			Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		60.00%		60.00%		100.00%		
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		677,284,000.00	48.86%	325,775,040.00	48.86%	296,429,533.00	100.00%	90.99%	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		48.86%		48.86%		100.00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										**818,861,000.00**		**484,553,000.00**		**381,485,588.00**		**78.73%**	
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		54,496,000.00	50.00%	26,348,000.00	50.00%	20,635,167.00	100.00%	78.32%	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 Unit		0 Unit		9 Unit		50.00%		50.00%		100.00%		
		35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		460,188,000.00	50.00%	216,819,000.00	50.00%	134,980,721.00	100.00%	62.26%	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		0 Unit		0 Unit		48 Unit		50.00%		50.00%		100.00%		
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		105,177,000.00	40.91%	42,386,000.00	40.91%	29,643,700.00	100.00%	69.94%	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 Unit		0 Unit		99 Unit		40.91%		40.91%		100.00%		
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		199,000,000.00	100.00%	199,000,000.00	100.00%	196,226,000.00	100.00%	98.61%	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%		
																100.00%	**81.66%**	
																Sangat	**Tinggi**	
											22,144,456,103.00		**13,873,842,086.00**		**9,918,080,299.00**			
																98.51%	**71.49%**	
																Sangat	**Sedang**	

Yogyakarta,

Disusun oleh

DINAS PERHUBUNGAN

AGUS ARIF NUGROHO, S.STP, M.Si

NIP. 197709071996031001

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan perubahan-perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Renja Dinas Perhubungan mencakup Pendapatan dan Belanja, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Dari sisi nomenklatur Program dan Kegiatan tidak ada perubahan, tetapi lebih pada penambahan atau pengurangan out put kegiatan, penyesuaian pada aturan Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang baru, serta efisiensi pada sisa-sisa pengadaan barang/jasa yang sudah ada ikatan kontraknya. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari 2 Program dan 15 Kegiatan serta 55 Sub. Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        b. Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah
        c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
        d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
        e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
        f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
        g Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD
        b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
        c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
   b. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
   1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
      a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
      b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
   2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir
      a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
      b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
   3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

c. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

d. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

4. Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

b. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

c. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

c. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2023-2026 terdapat 2 revisi yaitu nomenklatur dan metode perhitungan pada Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj) dengan rincian sebagai berikut:

- Nomenklatur Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj) yang sebelumnya Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas menjadi Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar dengan metode perhitungan sebelumnya jumlah rekomendasi yang dilayani dibagi jumlah total pemohon rekomendasi dikali 100% menjadi jumlah layanan pengendalian damapak lalu lintas sesuai standar dikali 100%
- Nomenklatur Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj) yang sebelumnya Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menjadi Jumlah manajemen dan rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan dengan metode semula Jumlah Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dibagi Jumlah

Total Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target semula 100% menjadi angka 2

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2023 untuk Pendapatan sebesar Rp.6.378.515.000 sedangkan untuk Belanja sebesar Rp. 24.268.587.297. Berikut hasil rekapitulasi Anggaran Perubahan pada Dinas Perhubugan Kota Yogyakarta Tahun 2023 :

REKAPITULASI ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

No.	Uraian	Target Murni	Target Perub APBD	Keterangan
A	**PENDAPATAN**	**6.378.515.000**	**6.378.515.000**	Pendapatan Mengalami kenaikan karena berangsur-angsur perekonomian masyarakat sudah mulai membaik
1	**Retribusi Jasa Umum**	**5.811.415.000**	**5.811.415.000**	
1.1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.830.000.000	5.100.000.000	
1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	711.415.000	711.415.000	
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**561.100.000**	**561.100.000**	
2.1	Retribusi Penyewaan Bangunan	75.600.000	75.600.000	
2.2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	283.983.800	485.500.000	
3	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**6.000.000**	**6.000.000**	
3.1	Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000	6.000.000	
B	**BELANJA LANGSUNG**	**22.144.456.103**	**24.268.587.297**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**11.558.142.565**	**12.052.251.383**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.173.000	86.173.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.932.919.190	9.202.188.483	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.232.500	2.232.500	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.709.000	123.266.500	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.842.875	477.354.900	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.921.000	174.921.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.484.000	1.151.134.000	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.861.000	834.981.000	
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj)**	3.035.942.400	237.792.700	
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.035.942.400	3.216.707.966	
2.2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4.647.654.200	5.559.626.000	
2.3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	501.588.000	960.099.000	
2.4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.372.792.000	1.385.367.000	

2.5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	158.640.000	146.639.660	
2.6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	453.246.138	507.994.888	
2.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.450.800	439.900.800	

Adapun Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta secara lebih rinci ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**21,642,868,103**	**23,308,488,297**					**25,749,265,300**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11,558,142,565**	**12,052,251,383**					**13,247,790,696**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**86,173,000**	**86,173,000**					**94,790,300**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	2,501,500	2,501,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,751,650
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	2,468,500	2,468,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,715,350
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	2,468,500	2,468,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,715,350
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	2,468,500	2,468,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,715,350
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	2,468,500	2,468,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,715,350

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	71,822,500	71,822,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	79,004,750
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	1,975,000	1,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	2,172,500
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,932,919,190**	**9,202,188,483**					**10,122,349,581**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	100 persen	100 persen	8,930,305,940	9,199,575,233	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	10,119,532,756
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	251,250	251,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	251,250
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	202,500	202,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	202,500
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	398,500	398,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	438,350

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	685,500	685,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	754,050
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	950,500	950,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	1,045,550
2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	125,000	125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	125,125
2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**2,232,500**	**2,232,500**					**2,368,000**
2	15	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	445,000	445,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	489,500
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	455,000	455,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	500,500
2	15	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	455,000	455,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	500,500
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	397,500	397,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	397,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	240,000	240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	240,000
2	15	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	240,000	240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	240,000
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**126,709,000**	**123,266,500**					**135,546,750**
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	110 Paket	107 Paket	100 persen	100 persen	126,225,000	122,782,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	135,060,750
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	484,000	484,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	486,000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**448,842,875**	**477,354,900**					**519,446,465**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	6 Paket	9 Paket	100 persen	100 persen	10,110,000	10,772,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	10,110,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	34 Paket	37 Paket	100 persen	100 persen	136,105,125	145,949,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	160,544,615
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	9 Paket	9 Paket	100 persen	100 persen	30,281,750	30,281,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	30,281,750
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 persen	100 persen	81,000,000	92,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	101,695,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	8,760,000	8,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	8,760,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	75 Laporan	75 Laporan	100 persen	100 persen	182,586,000	189,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	208,055,100
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**51,921,000**	**174,921,000**					**192,413,100**
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	6,171,000	45,671,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	50,238,100
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	5 Unit	18 Unit	100 persen	100 persen	45,750,000	129,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	142,175,000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,090,484,000**	**1,151,134,000**					**1,266,247,400**
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	6,400,000	5,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	6,435,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 persen	100 persen	406,800,000	468,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	514,800,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	7 Laporan	7 Laporan	100 persen	100 persen	677,284,000	677,284,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	745,012,400
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**818,861,000**	**834,981,000**					**914,629,100**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	9 Unit	9 Unit	100 persen	100 persen	54,496,000	53,896,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	59,285,600
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	48 Unit	48 Unit	100 persen	100 persen	460,188,000	468,208,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	515,028,800
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	99 Unit	107 Unit	100 persen	100 persen	105,177,000	110,377,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	121,414,700
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	199,000,000	202,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai	218,900,000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**10,084,725,538**	**11,256,236,914**					**12,501,474,604**
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**3,035,942,400**	**3,216,707,966**					**3,685,228,762**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	107 Unit	114 Unit	100 persen	100 persen	1,387,000,000	1,525,421,166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	1,677,963,282

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	155 Unit	158 Unit	100 persen	100 persen	1,648,942,400	1,691,286,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2,007,265,480
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**											**4,647,654,200**	**5,559,626,600**					**6,115,589,260**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang Lancar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	4 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	100 persen	305,503,000	429,643,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	472,607,300

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang Lancar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	3 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	4,342,151,200	5,129,983,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	5,642,981,960
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**1,372,792,000**	**1,385,367,000**					**1,497,667,700**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 Laporan	7 Laporan	100 persen	100 persen	218,601,000	240,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	240,461,100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	19,260,000	19,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	19,260,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	44 Laporan	44 Laporan	100 persen	100 persen	1,134,931,000	1,125,406,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	1,237,946,600
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**											**158,640,000**	**146,639,660**					**160,303,626**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	131,840,000	119,839,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	131,823,626

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	24 Laporan	24 Laporan	100 persen	100 persen	15,070,000	15,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	15,577,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kelancaran Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	24 Laporan	24 Laporan	100 persen	100 persen	11,730,000	11,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	12,903,000
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**											**453,246,138**	**507,994,888**					**558,794,376**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Keselamatan Lalu Lintas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	3 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	453,246,138	507,994,888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	558,794,376
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**416,450,800**	**439,900,800**					**483,890,880**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Operasional Angkutan Umum yang optimal	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	513 Unit	517 Unit	100 persen	100 persen	416,450,800	439,900,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	483,890,880
																TOTAL	**21,642,868,103**	**23,308,488,297**				**25,749,265,300**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**501,588,000**	**960,099,000**					**656,482,800**
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**501,588,000**	**960,099,000**					**656,482,800**
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**501,588,000**	**960,099,000**					**656,482,800**
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	4 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	325,382,000	683,893,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	357,920,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	8 Orang	8 Orang	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	1,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2000 Dokumen	2000 Dokumen	100 persen	100 persen	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	1,440,000	1,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	1,440,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	118,000,000	218,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	239,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2 15 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berjalan optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	5,566,000	5,566,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase juru parkir yang tertib Persentase ketertiban lalu lintas Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	2 lokasi 91.51 % 97.60 % 83.00 % 100 % 68.29 % 94.53 %	6,122,600
											TOTAL	**501,588,000**	**960,099,000**				**656,482,800**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra serta untuk menjaga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan dilengkapi dengan Matrik Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif.

Perubahan Rencana Kerja SKPD ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat serta dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul terkait bidang Perhubungan.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHANPERANGKAT DAERAH 2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk periode triwulan akhir tahun, yang memuat perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Perubahan disusun mendasarkan pada rencana strategis dan evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II. Renja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat menyajikan rencana kerja, program dan kegiatan dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan OPD) tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2023 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2022 dan didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada saat ini dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menggabungkan 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika statistik dan persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

1.2. LANDASAN HUKUM

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 050/2821/SE/2023 tanggal 5 Juni 2022 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Komunikasi, Imformatika dan Persandian Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD

yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26); dan
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1) Tujuan

Tujuan perangkat daerah Dinas Kominfo dan Persandian yaitu meningkatkan layanan informasi publik dan meningkatkan keamanan informasi.

2) Sasaran

Sasaran perangkat daerah yaitu layanan informasi publikmeningkat dan keamanan informasi meningkat.

B. Maksud dan Tujuan Disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD

1) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan OPD.

2) Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui :
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi.
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai *Smart City.*
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan keamanan informasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGANTRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IITAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2023

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah :

1. **Meningkatnya Layanan Informasi Publik**, yang diukur dengan indikator sasaran Indeks Layanan Informasi Publik. Pada tahun 2022 Indeks Layanan Informasi Publik tercapai dengan tingkat capaian 123.44% sehingga target di tahun 2022 dan masih berjalan untuk tahun penilaian di tahun 2023 dan masih menggunakan penilaian tahun 2022.
2. **Meningkatnya Keamanan Informasi**. Sasaran ini diukur dengan Indeks Pengamanan Informasi. Pada tahun 2022 telah tercapai dengan tingkat capaian 106.38% dan masih digunakan di tahun berjalan 2023.
3. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian** yang diukur dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Sasaran kinerja ini merupakan sasaran knerja baru di tahun 2023 dengan target nilai 80 poin. Adapaun di tahun 2022 pemenuhan Reformasi Birokrasi mencapai nilai 92.76 poin.

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditunjukkan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pada tahun 2023, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sim Pelaporan (SIM Pengendalian Pembangunan) setiap bulan. Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan setiap tribulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program, Indikator, Target 2022, Realisasi 2022, & Target 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Ket
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	98.14%	98.52%	97.52%	
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	71.93%	135.84%	62.33%	
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	100%	107.10%	86.43%	
		Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	-	-	100%	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	-	-	100%	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
		Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	-	-	100%	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	A	

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunya indikator hasil penilaian sakip oleh Inspektorat mentargetkan nilai Sakip A sebagai indikator program dengan anggaran sebesar Rp.11.061.035.680,- dan telah terealisasi sebesar Rp.5.598.941.432,- sampai dengan triwulan II. Dalam program ini ada 7 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**11.061.035.680**	**5.598.941.432**	**50,62%**	
1	**PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47.027.000**	**20.349.700**	**43,27%**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.080.000	3.957.200	96,99%	100,00%

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	850.000	275.000	32,35%	80,00%
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	850.000	275.000	32,35%	55,00%
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	850.000	0	0,00%	30,00%
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	850.000	0	0,00%	30,00%
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.495.000	2.362.500	42,99%	52,00%
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.052.000	13.480.000	39,59%	52,00%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.790.756.750**	**5.056.175.311**	**51,64%**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.777.831.750	5.053.482.711	51,68%	71,69%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.840.000	458.000	24,89%	52,00%
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.840.000	175.000	9,51%	52,00%
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	880.000	323.000	36,70%	52,00%
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	920.000	0	0,00%	10,00%
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.275.000	460.000	20,22%	85,00%
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	4.825.000	1.276.600	26,46%	58,00%
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345.000	0	0,00%	80,00%
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.865.000**	**1.957.500**	**33,38%**	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	220.000	0	0,00%	50,00%
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	220.000	0	0,00%	50,00%
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	220.000	0	0,00%	51,00%
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.525.000	1.957.500	43,26%	50,00%
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	460.000	0	0,00%	52,00%
3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	220.000	0	0,00%	51,00%
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6.555.000**	**2.679.500**	**40,88%**	
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.020.000	499.500	48,97%	77,00%
4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.000	345.000	50,00%	57,00%
4.3	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	4.845.000	1.835.000	37,87%	60,00%
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**589.259.930**	**304.431.538**	**51,66%**	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.110.000	2.275.000	18,79%	41,00%
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.874.180	40.207.230	49,72%	60,00%
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.194.150	4.815.900	47,24%	60,00%
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.041.200	3.620.000	32,79%	57,00%

5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	210.031.400	88.331.000	42,06%	50,00%
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.009.000	165.182.408	62,33%	82,51%
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**289.422.000**	**79.800.828**	**27,57%**	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.650.000	1.597.400	43,76%	50,00%
6.2	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	11.954.790	33,21%	50,00%
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	4.843.638	33,64%	50,00%
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.372.000	61.405.000	26,09%	52,00%
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**332.150.000**	**133.547.055**	**40,21%**	
7.1	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.730.000	46.713.855	30,39%	49,48%
7.2	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.170.000	6.195.600	14,35%	51,32%
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000	3.456.000	12,68%	50,00%
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.000.000	77.181.600	71,46%	92,36%

Dari realisasi kegiatan tersebut, terdapat ketidaksesuaian realisasi dibandingkan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan, makan diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja maupun penambahan atau pengurangan pagu anggaran pada kegiatan. Pergeseran pagu anggaran kegiatan perubahan pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP diusulkan penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengangkatan CPNS ke PNS serta penyesuaian kenaikan jabatan dan tunjangan yang jumlah nya menyesuaikan perhitungan dari BPKAD dan BKPSDM
2. Pengurangan belanja pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena masih adanya stok yang tersedia
3. Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian AC
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan akan dikurangi anggaran nya
5. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diusulkan untuk menambah anggaran makan minum rapat untuk pelaksanaan kegiatan di akhir tahun
6. Penambahan anggaran pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu untuk biaya transfer keuangan semakin meningkat

7. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik akan dikurangi anggaran biaya telepon
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diusulkan penambahan untuk rehabilitasi ruang kerja dan pengecatan gedung selatan Dinas Kominfo dan Persandian.

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.004.329.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.464.859.300,- sampai dengan triwulan II. Dalam program ini ada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan terdapat 7 sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**3.004.329.500**	**1.464.859.300**	**48,76%**	
1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.004.329.500**	**1.464.859.300**	**48,76%**	
1.1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	218.620.000	34.285.000	15,68%	22,56%
1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.012.030.000	569.082.300	56,23%	61,57%
1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.191.641.500	593.612.500	49,81%	54,53%
1.4	Pelayanan Informasi Publik	275.996.000	109.222.000	39,57%	51,90%
1.5	Layanan Hubungan Media	68.382.000	25.700.000	37,58%	51,48%
1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	41.250.000	18.000.000	43,64%	72,00%
1.7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	196.410.000	114.957.500	58,53%	64,48%

Dari anggaran diatas disusulkan penambahan pagu anggaran pada perubahan anggaran 2023 yaitu :

1. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian smartphone untuk pembuatan konten di media sosial
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik ada penambahan untuk produksi acara di TVRI dan untuk rontek
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik diusulkan penambahan untuk lomba foto dan festival film kampung dan penambahan belanja modal peralatan produksi konten dan peliputan
4. Penambahan honor narasumber tokoh masyarakat serta transport peserta forum KIM pada Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

3) Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp.13.582.096.700,- dan telah terealisasi Rp.4.471.708.009,- sampai dengan bulan Juni. Ada 2 kegiatan dalam program ini yaitu:

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**13.582.096.700**	**4.471.708.009**	**32,92%**	
1	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**5.150.196.000**	**1.459.886.426**	**28,35%**	
1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.150.196.000	1.459.886.426	28,35%	33,33%
2	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**8.431.900.700**	**3.011.821.583**	**35,72%**	
2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	308.340.000	82.913.500	26,89%	42,33%
2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.525.672.700	1.936.523.158	35,05%	60,59%
2.3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	686.071.000	328.270.025	47,85%	57,34%
2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.272.492.000	417.618.900	32,82%	46,35%
2.5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	212.913.000	54.541.000	25,62%	50,00%
2.6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	174.312.000	63.580.000	36,47%	44,67%
2.7	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	252.100.000	128.375.000	50,92%	97,26%

Realisasi keuangan pada Program Aplikasi Informatika sampai dengan triwulan II masih dibawah 50%, hal ini dikarenakan rencana realisasi anggaran memang ada di triwulan II dan IV. Pada anggaran perubahan diusulakan penambahan anggaran belanja yaitu :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah diusulkan penambahan untuk upgrade komputer di lab komputer, pembelian perangkat pendukung ruang Yudhistira, peremajaan perangkat jaringan, pemasangan CCTV Kawasan Kotabaru dan penambahan pemeliharaan panel jaringan LAN

2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah mengusulkan tambahan anggaran belanja untuk penambahan RAM Nutanix, pemeliharaan jaringan sprinkle khusus untuk data center, pembelian APAR CO2, pembelian AC data center dan perpanjangan lisensi zoom
3. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah mengusulkan tambahan anggaran untuk IP Paging dan faximile
4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diusulkan tambahan untuk Jasa Konsultansi Penataan Fiber Optik Persimpangan di Kota Yogyakarta
5. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah mengusulkan tambahan untuk pengadaan komputer, laptop, printer, perbaikan perangkat digital di ruang Yudhistira.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada triwulan II tahun 2023 program ini telah merealisasi anggaran sebesar Rp. 62.620.000,- dari anggaran Rp. 209.557.000,-. Dalam program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat usulan penambahan anggaran belanja pada kegiatan ini yaitu makan minum rapat untuk kegiatan koordinasi.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**209.557.000**	**62.620.000**	**29,88%**	
1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**209.557.000**	**62.620.000**	**29,88%**	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi PengumpulanPengolahanAnalisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	93.630.000	42.526.000	45,42%	50,00%
1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	115.927.000	20.094.000	17,33%	22,88%

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Anggaran pada program ini sebesar Rp 285.239.168,- dan telah terealisasi sebesar Rp118.304.000,-. Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**285.239.168**	**118.304.000**	**41,48%**	
1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**238.218.000**	**101.969.000**	**42,80%**	
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	229.750.000	99.035.000	43,11%	53,62%
1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.468.000	2.934.000	34,65%	50,00%
2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**47.021.168**	**16.335.000**	**34,74%**	
2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.021.168	16.335.000	34,74%	44,00%

Evaluasi terhadap hasil renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.2 berikut.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPDTW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam**	**97,52**	**0**	**97.52**	**0**	**97.30**	**1.464.859.300,00**	**99.77%**	**0,00%**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			218.620.000,00	22,56%	48.740.000,00	22,56%	34.285.000,00	100,00%	70,34%
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 dokumen		0,00%		22,56%		0,00%	
	2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			1.012.030.000,00	63,85%	649.530.000,00	61,57%	569.082.300,00	96,43%	87,61%
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen		0,00%		61,57%		0,00%	
	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1.191.641.500,00	61,04%	700.570.500,00	54,53%	593.612.500,00	89,33%	84,73%
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen		0,00%		54,53%		0,00%	
	4	Pelayanan Informasi Publik			275.996.000,00	51,90%	115.144.000,00	51,90%	109.222.000,00	100,00%	94,86%
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen		0,00%		51,90%		0,00%	
	5	Layanan Hubungan Media			68.382.000,00	41,79%	28.348.000,00	51,48%	25.700.000,00	123,19%	90,66%
			Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan		41,79%		51,48%		123,19%	
	6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			41.250.000,00	52,00%	21.450.000,00	72,00%	18.000.000,00	138,46%	83,92%
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen		52,00%		72,00%		138,46%	
	7				196.410.000,00	64,48%	121.720.000,00	64,48%	114.957.500,00	100,00%	94,44%

		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	1.440 orang		0,00%		64,48%		0,00%	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		**Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun**	**86,43%**	**0**	**81.90 %**	**0**	**81.90 %**	**4.471.708.009,00**	**100%**	**0,00%**
			Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	**62,33**	**0**	**62.33**	**0**	**135.84**	**0**	**217,94%**	**0,00%**
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	**100,00%**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100,00%**	**0,00%**
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			5.150.196.000,00	36,96%	1.864.142.500,00	33,33%	1.459.886.426,00	90,18%	78,31%
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit		0,00%		33,33%		0,00%	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			308.340.000,00	45,25%	135.808.000,00	42,33%	82.913.500,00	93,55%	61,05%
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0,00%		42,33%		0,00%	
	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			5.525.672.700,00	49,98%	2.186.212.200,00	60,59%	1.936.523.158,00	121,23%	88,58%
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit		0,00%		60,59%		0,00%	
	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			686.071.000,00	63,39%	372.015.000,00	57,34%	328.270.025,00	90,46%	88,24%
			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	3 Dokumen		0,00%		62,04%		0,00%	
	5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			1.272.492.000,00	48,61%	585.341.000,00	46,35%	417.618.900,00	95,35%	71,35%
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	18 unit		0,00%		46,35%		0,00%	
	6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			212.913.000,00	48,00%	59.202.000,00	50,00%	54.541.000,00	104,17%	92,13%
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan		0,00%		50,00%		0,00%	

	7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			174.312.000,00	44,67%	40.750.000,00	44,67%	63.580.000,00	100,00%	156,02%
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen		0,00%		44,67%		0,00%	
	8	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			252.100.000,00	97,26%	244.600.000,00	97,26%	128.375.000,00	100,00%	52,48%
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0,00%		97,26%		0,00%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		**Persentase pemanfaatan informasi data statistik**	**100**	**0**	**50**	**0**	**50**	**62.620.000,00**	**100%**	**0,00%**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi PengumpulanPengolahanAnalisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			93.630.000,00	54,00%	48.470.000,00	50,00%	42.526.000,00	92,59%	87,74%
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 dokumen		54,00%		50,00%		92,59%	
	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral			115.927.000,00	44,40%	48.820.000,00	22,88%	20.094.000,00	51,53%	41,16%
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 dokumen		0,00%		22,88%		0,00%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		**Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah**	**100,00%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**118.304.000,00**	**100%**	**0,00%**
			Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	**100,00%**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100,00%**	**0,00%**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			229.750.000,00	53,62%	103.935.000,00	53,62%	99.035.000,00	100,00%	95,29%
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Dokumen		0,00%		53,62%		0,00%	
	2				8.468.000,00	50,00%	3.290.000,00	50,00%	2.934.000,00	100,00%	89,18%

		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informas	1 Perangkat Daerah		50,00%		50,00%		100,00%	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota										
	3	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			47.021.168,00	43,88%	20.634.000,00	44,00%	16.335.000,00	100,27%	79,17%
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam komunikasi Sandi	42 Perangkat Daerah		43,88%		44,00%		100,27%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**5.598.941.432,00**	**100%**	**0,00%**
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.080.000,00	100,00%	4.080.000,00	100,00%	3.957.200,00	100,00%	96,99%
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			850.000,00	80,00%	575.000,00	80,00%	275.000,00	100,00%	47,83%
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen		80,00%		80,00%		100,00%	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			850.000,00	50,00%	275.000,00	55,00%	275.000,00	110,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen		50,00%		55,00%		110,00%	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			850.000,00	0,00%	0	30,00%	0	0,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen		0,00%		30,00%		0,00%	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			850.000,00	0,00%	0	30,00%	0	0,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen		0,00%		30,00%		0,00%	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.495.000,00	50,00%	2.575.000,00	52,00%	2.362.500,00	104,00%	91,75%
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan		50,00%		52,00%		104,00%	

	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.052.000,00	50,40%	13.480.000,00	52,00%	13.480.000,00	103,17%	100,00%
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan		50,40%		52,00%		103,17%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.777.831.750,00	71,11%	6.296.357.682,00	71,69%	5.053.482.711,00	100,82%	80,26%
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 orang/bulan		0,00%		71,69%		0,00%	
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.840.000,00	51,00%	920.000,00	52,00%	458.000,00	101,96%	49,78%
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		51,00%		52,00%		101,96%	
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.840.000,00	51,00%	920.000,00	52,00%	175.000,00	101,96%	19,02%
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		51,00%		52,00%		101,96%	
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			880.000,00	51,00%	440.000,00	52,00%	323.000,00	101,96%	73,41%
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		51,00%		52,00%		101,96%	
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			920.000,00	0,00%	0	10,00%	0	0,00%	0,00%
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan		0,00%		10,00%		0,00%	
	13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.275.000,00	85,00%	1.700.000,00	85,00%	460.000,00	100,00%	27,06%
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen		85,00%		85,00%		100,00%	
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4.825.000,00	57,00%	2.275.000,00	58,00%	1.276.600,00	101,75%	56,11%
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan		57,00%		58,00%		101,75%	
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			345.000,00	100,00%	345.000,00	80,00%	0	80,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		100,00%		80,00%		80,00%	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			220.000,00	50,00%	110.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%	
	17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			220.000,00	50,00%	110.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%	
	18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			220.000,00	50,00%	110.000,00	51,00%	0	102,00%	0,00%
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan		50,00%		51,00%		102,00%	
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.525.000,00	50,00%	1.975.000,00	50,00%	1.957.500,00	100,00%	99,11%
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		50,00%		50,00%		100,00%	
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			460.000,00	60,00%	230.000,00	52,00%	0	86,67%	0,00%
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		60,00%		52,00%		86,67%	
	21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			220.000,00	50,00%	110.000,00	51,00%	0	102,00%	0,00%
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen		50,00%		51,00%		102,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1.020.000,00	50,00%	510.000,00	77,00%	499.500,00	154,00%	97,94%
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen		50,00%		77,00%		154,00%	
	23	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			690.000,00	50,00%	345.000,00	57,00%	345.000,00	114,00%	100,00%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen		50,00%		57,00%		114,00%	
	24	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			4.845.000,00	55,00%	1.970.000,00	60,00%	1.835.000,00	109,09%	93,15%
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen		55,00%		60,00%		109,09%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										

	25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.110.000,00	60,00%	7.116.000,00	41,00%	2.275.000,00	68,33%	31,97%
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket		60,00%		41,00%		68,33%	
	26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.874.180,00	70,00%	53.209.750,00	60,00%	40.207.230,00	85,71%	75,56%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		70,00%		60,00%		85,71%	
	27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.194.150,00	60,00%	4.834.500,00	60,00%	4.815.900,00	100,00%	99,62%
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket		60,00%		60,00%		100,00%	
	28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.041.200,00	53,00%	5.733.100,00	57,00%	3.620.000,00	107,55%	63,14%
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		53,00%		57,00%		107,55%	
	29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			210.031.400,00	49,98%	105.015.702,00	50,00%	88.331.000,00	100,04%	84,11%
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen		0,00%		50,00%		0,00%	
	30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			265.009.000,00	81,91%	200.459.000,00	82,51%	165.182.408,00	100,73%	82,40%
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan		0,00%		82,51%		0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.650.000,00	58,00%	2.070.000,00	50,00%	1.597.400,00	86,21%	77,17%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		58,00%		50,00%		86,21%	
	32	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			36.000.000,00	49,98%	18.000.000,00	50,00%	11.954.790,00	100,04%	66,42%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		49,98%		50,00%		100,04%	
	33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.400.000,00	49,98%	7.200.000,00	50,00%	4.843.638,00	100,04%	67,27%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		49,98%		50,00%		100,04%	
	34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			235.372.000,00	49,98%	63.905.000,00	52,00%	61.405.000,00	104,04%	96,09%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		0,00%		52,00%		0,00%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			153.730.000,00	49,43%	75.940.000,00	49,48%	46.713.855,00	100,10%	61,51%
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit		0,00%		49,48%		0,00%	
	36	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			43.170.000,00	50,61%	21.870.000,00	51,32%	6.195.600,00	101,40%	28,33%
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit		0,00%		51,32%		0,00%	
	37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.250.000,00	50,00%	13.625.000,00	50,00%	3.456.000,00	100,00%	25,37%
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit		50,00%		50,00%		100,00%	
	38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			108.000.000,00	100,00%	108.000.000,00	92,36%	77.181.600,00	92,36%	71,46%
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		0,00%		92,36%		0,00%	

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk tahun 2023 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022. Kesinambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian KotaYogyakarta mempunyai tugas yang besar mewujudkan Kota Yogyakarat sebagai *Smart City* maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya adalah :

1. Mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No: 050/2821/SE/2023 tanggal 05 Juni 2023 hal Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Dalam perencanaan kerja perubahan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 telah kami mencermati beberapa output yang perlu disesuaikan, baik target maupun besarnya anggaran yang diperlukan mengingat efisiensi dan target kerja yang harus dilaksanakan.

Dalam perjalannya program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2023 yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam dalam lampiran tabel 3.1. berikut :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**27,647,461,880**	**33,075,838,275**					**27,885,653,750**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11,061,035,680**	**12,400,519,075**					**10,817,004,052**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**47,027,000**	**47,027,000**					**12,120,000**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	4,080,000	4,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	4,305,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	850,000	850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	635,000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	850,000	850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	635,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	850,000	850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	635,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	850,000	850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	635,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	5,495,000	5,495,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	4,275,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	34,052,000	34,052,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,000,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9,790,756,750**	**10,395,054,750**					**9,690,477,000**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	82 Orang/bulan	81 Orang/bulan	100 %	100 %	9,777,831,750	10,382,129,750	PENDAPATAN TRANSFER		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	9,679,937,000
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,840,000	1,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,600,000
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,840,000	1,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,000,000
2	16	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	880,000	880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	3,564,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	920,000	920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,000,000
2	16	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,275,000	2,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	500,000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,825,000	4,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	2,376,000
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	345,000	345,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	500,000
2	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**5,865,000**	**5,865,000**					**3,060,000**
2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	220,000	220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	360,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	220,000	220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	180,000
2	16	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	220,000	220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	180,000
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,525,000	4,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,080,000
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	460,000	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,080,000
2	16	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	220,000	220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	180,000
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**6,555,000**	**6,555,000**					**4,860,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,020,000	1,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,620,000
2	16	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,620,000
2	16	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	4,845,000	4,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	1,620,000
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**589,259,930**	**603,470,325**					**389,891,146**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	12,110,000	12,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	8,666,250
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	80,874,180	76,085,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	99,742,796

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	10,194,150	28,409,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	11,223,150
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	11,041,200	9,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	10,563,950
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	210,031,400	210,031,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	178,385,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	265,009,000	267,159,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	81,310,000
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**78,125,000**					**0**
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju				45 Unit			0	78,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**289,422,000**	**285,272,000**					**518,685,906**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,650,000	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	4,995,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	36,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	60,000,000
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	14,400,000	14,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	14,400,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	235,372,000	235,372,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	439,290,906
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**332,150,000**	**979,150,000**					**197,910,000**
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	19 Unit	19 Unit	100 %	100 %	153,730,000	153,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	79,260,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	43,170,000	43,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	23,400,000
2	16	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai		0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	50,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	41 Unit	41 Unit	100 %	100 %	27,250,000	27,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	15,250,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	108,000,000	755,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	30,000,000
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**3,004,329,500**	**3,351,298,500**					**2,902,219,246**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**3,004,329,500**	**3,351,298,500**					**2,902,219,246**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	55.71 % 99.90 % 97.25 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	218,620,000	242,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	55.71 % 99.90 % 97.25 %	218,880,000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	55.71 % 99.90 % 97.25 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	1,012,030,000	1,066,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	55.71 % 99.90 % 97.25 %	960,920,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	55.71 % 99.90 % 97.25 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	1,191,641,500	1,419,565,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	55.71 % 99.90 % 97.25 %	1,075,532,006
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	55.71 % 99.90 % 97.25 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	275,996,000	274,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	55.71 % 99.90 % 97.25 %	289,637,240

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	55.71 % 99.90 % 97.25 %	2 Layanan	2 Layanan	100 %	100 %	68,382,000	68,382,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	55.71 % 99.90 % 97.25 %	68,400,000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	55.71 % 99.90 % 97.25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	41,250,000	41,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	55.71 % 99.90 % 97.25 %	107,250,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	97.25 %	55.71 % 99.90 % 97.25 %	1440 Orang	1440 Orang	100 %	100 %	196,410,000	238,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	55.71 % 99.90 % 97.25 %	181,600,000
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**											**13,582,096,700**	**17,324,020,700**					**14,166,430,452**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**5,150,196,000**	**7,396,466,000**					**4,802,347,750**
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 %	86.43 % 82.50 % 61.22 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	5,150,196,000	7,396,466,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	86.43 % 82.50 % 61.22 %	4,802,347,750
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**8,431,900,700**	**9,927,554,700**					**9,364,082,702**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 %	86.43 % 82.50 % 61.22 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	308,340,000	278,113,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	86.43 % 82.50 % 61.22 %	283,476,120
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 %	86.43 % 82.50 % 61.22 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	5,525,672,700	5,996,772,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	86.43 % 82.50 % 61.22 %	6,760,271,840

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 %	86.43 % 82.50 % 61.22 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	686,071,000	893,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	86.43 % 82.50 % 61.22 %	639,425,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 %	86.43 % 82.50 % 61.22 %	18 Unit	18 Unit	100 %	100 %	1,272,492,000	1,217,868,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	86.43 % 82.50 % 61.22 %	1,019,304,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 %	86.43 % 82.50 % 61.22 %	4 Layanan	4 Layanan	100 %	100 %	212,913,000	310,138,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	86.43 % 82.50 % 61.22 %	207,282,542
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 %	86.43 % 82.50 % 61.22 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	174,312,000	174,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	86.43 % 82.50 % 61.22 %	165,122,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	75.90 % 62.33 %	86.43 % 82.50 % 61.22 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	252,100,000	1,057,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	86.43 % 82.50 % 61.22 %	289,200,000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**209,557,000**	**209,802,000**					**180,014,304**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**209,557,000**	**209,802,000**					**180,014,304**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**209,557,000**	**209,802,000**					**180,014,304**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase penyebarluasan dataset	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		83.80 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	93,630,000	96,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyebarluasan dataset	83.80 %	33,051,250
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase penyebarluasan dataset	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		83.80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	115,927,000	113,577,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyebarluasan dataset	83.80 %	146,963,054
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**285,239,168**	**285,239,168**					**328,980,710**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**285,239,168**	**285,239,168**					**328,980,710**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**238,218,000**	**238,218,000**					**280,920,542**
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keandalan keamanan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		38 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	229,750,000	229,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	38 %	272,340,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Keandalan keamanan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		38 %	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100 %	100 %	8,468,000	8,468,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	38 %	8,580,542
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**											**47,021,168**	**47,021,168**					**48,060,168**
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Keandalan keamanan informasi	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		38 %	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	100 %	100 %	47,021,168	47,021,168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	38 %	48,060,168
															TOTAL	**28,142,258,048**	**33,570,879,443**					**28,394,648,764**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Awal RKPD Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan RPJMD Kota Yogyakarta. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi setiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 serta program dan kegiatan yang telah berjalan di tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Yogyakarta, 2023

IGNATIUS TRIHASTONO, S.Sos., MM
NIP. 196907231996031005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA YOGYAKARTA 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunanPerubahan Renja DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan-perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana lampiran I dengan mempertimbangkan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah sertakemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 lengkap besertausulan terkaittarget pendapatan, belanja dalam bentuk Program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk bantuan sosial/hibah yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Dan berpedoman pada perkembangan kelembagaan DPMPTSP dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP)

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dususun, yang menjadi acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan semoga dapat di pergunakan serta direalisasikan sebagaimana mestinya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerahberdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk meningkatkan keterpaduan dan keselarasan yang fokusnya untuk mensinergikan berbagai macam perizinan berusaha dan non perizinan berusaha dalam suatu wadah pelayanan satu pintu yaitu dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dapat bersifat adil, transparan, akuntabel, cepat, mudah, aman, terjangkau, dan nyaman kepada masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan penyusunan RAPBD maka penyusunan Perubahan Renja PD DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah menjadi dasar atau acuan pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki Tujuan yaitu “Meningkatkan Nilai Investasi” serta Sasaran “Nilai Investasi Meningkat” dan tujuan yang kedua yaitu “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” serta sasaran “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat meningkat”.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki indikator tujuan yaitu nilai investasi dengan target diambil dari target indikator sasaran tahun terakhir sebesar Rp305.095.882.964 dan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan target diambil dari target indikator sasaran tahun terakhir sebesar 83.25. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki indikator sasaran yaitu nilai investasi (dalam rupiah) dan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.

1.2 Landasan Hukum

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;

4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5 Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025;

9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentangPerubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan TataKerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah :

1. Penjabaran lebih lanjut dari rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta selama Tahun 2023;
2. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023;
3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Yogyakarta.
4. Menyelenggarakan MPP sesuai Amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dilihat dari aspek hukum dan aparatur serta dengan adanya perubahan kelembagaan DPMPTSP sebagai garda terdepan pada urusan perizinan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, dimana DPMPTSP berkewajiban untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat Yogyakarta dalam pengurusan izin.

Maka disusunlah perubahan anggaran guna untuk menunjang kelancaran dalam memberikan pelayanan publik yang baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I : **Pendahuluan**

Menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : **Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Memuat Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel 2.1 terlampir.

BAB III : **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan,penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana tabel 3.1 terlampir.

BAB IV : **Penutup**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Adapun kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta saat ini sudah sangat berbeda dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 DPMPTSP Kota Yogyakarta dari segi pelaksanaan tugas akan menyesuaikan penuh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1387 Tahun 2017), sehingga semua program, kegiatan dan sub kegiatan sudah mencerminkan ketugasan DPMPTSP.

Untuk pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Yogyakarta telah melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP bersama Menpan RB, penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP Kota Yogyakarta ditanda tangani langsung oleh Walikota Yogyakarta didampingi oleh Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta, DPMPTSP juga sudah berkoordinasi secara intensif dengan Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, OPD Teknis dan Instansi Vertikal yang akan menempati MPP untuk merumuskan kebijakan pusat tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik /*Online Single Submission* (OSS) dan sesuai dengan Permendagri terkait penyelenggaraan MPP. Selain hal tersebut, prioritas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta lebih pada urusan Penanaman Modal, mulai dari perencanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal. Sehingga terkait dengan pelayanan terpadu satupintu, DPMPTSP Kota Yogyakarta harus mendukung secara penuh kebijakan penanaman modal, baik melalui kebijakan fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu maupun pemberian insentif terkait pelayanannya.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat, maka dalam rencana pembangunan daerah 2023 – 2026 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, adil, transparandan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten dalam satu wadah yaitu dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP);
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi, namun pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di Bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kota Yogyakarta yang lebih kondusif. Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun DPMPTSP Kota Yogyakartadengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi DPMPTSP Kota Yogyakarta yang ada. Kondisi umum DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

    a) Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani sudah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

    b) Didukung sarana dan prasarana yang layak dan memadai;

    c) Investasi di Kota Yogyakarta meningkat sehingga lapangan kerja dan kesejahteraanmasyarakat Kota Yogyakarta meningkat;

    d) Adanya peta investasi untuk memudahkan calon investor berinvetasi di Kota Yogyakarta;

    e) Penyelenggaraan MPP dapat bertahan dan berjalan sesuai dengan harapan yaitu memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1). Kekuatan:

a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/pemohon izin;

c) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung proses perizinan dan non perizinan;

d) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukungpelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;

e) Koordinasi internal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cukup optimal.

2). Kelemahan:

a) Kualitas/kompetensi aparatur dalam bidang penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan berusaha belum optimal dan belum memadai;

b) Belum optimalnya tata laksana antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan OPD teknis terkait pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

b. Faktor Eksternal

1) Peluang:

a) Dukungan goodwill dan political will yang sangat kuat untuk meningkatkan investasi, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;

b) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;

c) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (stakeholder);

d) Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap dunia usaha atas kemudahan layanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang berbasis teknologi.

2) Ancaman

a) Kebutuhan investor akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;

b) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih rendah.

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan pencapaian pelaksanaan kinerja PD sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2023 DPMTPSP Kota Yogyakarta sudah melaksanakan program dan kegiatan belum sesuai dengan ploting dan tata kala yang sudah dibuat oleh masing masing bidang, karena beberapa pelaksanaan kegiatan mundur dari tatakala. Realisasi capaian untuk masing masing kegiatan sampai dengan triwulan II sebagian besar belum mencapai 100 %.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II di tahun 2023 adalah sebagaian besar di kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan yang menggunakan pihak ketiga dimana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dan beberapa kegiatan yang mundur dari tata kala.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan didasarkan atas laporan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II. Selanjutkan hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi	319.966.195.786 Rupiah
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81.75 Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor Baru**	**Nilai Rencana Investasi yang tertuang dalam OSS pada Tahun n**	**399 investor baru investor baru**	**0,00**	**-**	**0,00**	**237 investor baru investor baru**	**1.237.998.770,00**	**119 investor baru investor baru**	**529.499.000,00**	**investor baru**	**240.529.250,00**	**0,00%**	**80,94%**					**Analis Kebijakan Ahli Madya**	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								**621.622.250,00**		**365.511.000,00**		**128.014.500,00**		**35.02%**						
		1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0,00		0,00		621.622.250,00	67,25%	365.511.000,00	0,00%	128.014.500,00	0,00%	35,02%						
			Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		2 DOKUMEN		0,00%		56,71%		0,00%							
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								**616.376.520,00**		**163.988.000,00**		**112.514.750,00**		**68.61%**						
		2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				0,00		0,00		616.376.520,00	38,64%	163.988.000,00	0,00%	112.514.750,00	0,00%	68,61%						
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		0 EVENT		0 EVENT		5 EVENT		0,00%		56,75%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**51,82%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Rendah**						
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur**	**Jumlah perizinan masuk yang sesuai prosedur / Jumlah perizinan yang masuk x 100%**	**89% persen**	**0,00**	**103.68% persen**	**0,00**	**86% persen**	**759.430.750,00**	**86% persen**	**378.962.750,00**	**persen**	**297.797.750,00**	**0,00%**	**84,08%**					**Koordinator Kelompok Substansi PTSP I**	
			Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	**Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang masuk x 100%**	**95,00 persen**	**0,00**	**100% persen**	**0,00**	**95% persen**	**0,00**	**95%**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Koordinator Kelompok Substansi PTSP 1**	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota								**759.430.750,00**		**378.962.750,00**		**297.797.750,00**		**78.58%**						
		1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0,00		0,00		559.956.750,00	51,46%	278.628.750,00	0,00%	231.837.750,00	0,00%	83,21%						
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		1.000 Pelaku Usaha		0,00%		65,25%		0,00%							
		2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				0,00		0,00		97.086.000,00	53,00%	50.064.000,00	0,00%	33.394.000,00	0,00%	66,70%						
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen		0 Kegiatan Usaha		0 Kegiatan Usaha		100 Kegiatan Usaha		53,00%		46,00%		86,79%							

				Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal																				
		3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				0,00		0,00		102.388.000,00	51,00%	50.270.000,00	0,00%	32.566.000,00	0,00%	64,78%						
				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		0 Orang		0 Orang		3.000 Orang		51,00%		43,00%		84,31%						
										Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**71,56%**						
										Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sedang**						
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM**	**Jumlah investor dengan modal berkembang berdasarkan LKPM pada tahun n/ Jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM pada tahun nx 100%**	**30.36% persen**	**0,00**	**-**	**0,00**	**18.80% persen**	**600.504.000,00**	**18.80% persen**	**233.772.000,00**	**persen**	**150.586.300,00**	**0,00%**	**91,80%**					**Penata Perizinan Ahli Madya**	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								**600.504.000,00**		**233.772.000,00**		**150.586.300,00**		**64.42%**							
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				0,00		0,00		430.130.000,00	43,16%	152.450.000,00	0,00%	96.037.150,00	0,00%	63,00%						
				Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		253 Pelaku Usaha		0,00%		33,57%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				0,00		0,00		170.374.000,00	49,48%	81.322.000,00	0,00%	54.549.150,00	0,00%	67,08%						
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan		0 Kegiatan Usaha		0 Kegiatan Usaha		40 Kegiatan Usaha		0,00%		41,74%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**65,04%**						
										Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sedang**						
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data**	**Jumlah pemenuhan permohonan data yang diproses dan selesai di tahun n/Jumlah keseluruhan permohonan data yang masuk x 100%**	**80% persen**	**0,00**	**-**	**0,00**	**80% persen**	**199.219.750,00**	**80% persen**	**98.267.000,00**	**persen**	**43.841.000,00**	**0,00%**	**56,10%**					**Koordinator Kelompok Substansi PTSP II**	
			Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	**Jumlah layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi/Jumlah layanan informasi pelayanan publik yang dimiliki x 100%**	**81,00 persen**	**0,00**	**-**	**0,00**	**75% persen**	**0,00**	**75%**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Analis Kebijakan Ahli Madya**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**199.219.750,00**		**98.267.000,00**		**43.841.000,00**		**44.61%**							
		1	PengolahanPenyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0,00		0,00		199.219.750,00	49,67%	98.267.000,00	0,00%	43.841.000,00	0,00%	44,61%						
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		49,67%		27,30%		54,96%							
										Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**44,61%**						

										Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**9.562.359.356,00**	**A nilai**	**6.710.339.861,00**	**nilai**	**3.551.695.598,00**	**0,00%**	**67,96%**					**Sekretaris Dinas**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**47.739.500,00**		**22.973.250,00**		**15.949.250,00**		**69.43%**						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.258.000,00	53,32%	1.136.250,00	0,00%	1.136.250,00	0,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		53,32%		55,76%		104,58%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.860.000,00	37,33%	1.039.000,00	0,00%	910.500,00	0,00%	87,63%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		37,33%		35,68%		95,58%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.798.750,00	28,21%	761.500,00	0,00%	519.500,00	0,00%	68,22%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		28,21%		23,95%		84,90%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		32.520.750,00	52,81%	16.524.000,00	0,00%	11.299.000,00	0,00%	68,38%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		52,81%		45,87%		86,86%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.798.750,00	47,30%	1.267.750,00	0,00%	1.025.750,00	0,00%	80,91%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		47,30%		40,87%		86,41%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.425.250,00	53,72%	1.205.750,00	0,00%	676.750,00	0,00%	56,13%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		53,72%		53,59%		99,76%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.078.000,00	55,10%	1.039.000,00	0,00%	381.500,00	0,00%	36,72%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		55,10%		30,28%		54,95%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**4.829.056.350,00**		**3.106.124.808,00**		**1.731.810.590,00**		**55.75%**						
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.814.255.850,00	64,39%	3.099.880.808,00	0,00%	1.727.422.590,00	0,00%	55,73%						
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		0 orang		0 orang		38 orang		64,39%		49,76%		77,28%							
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		2.506.500,00	46,00%	1.110.000,00	0,00%	1.090.000,00	0,00%	98,20%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		36 Dokumen		46,00%		45,00%		97,83%							
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		3.267.000,00	54,00%	1.628.000,00	0,00%	1.056.000,00	0,00%	64,86%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen Akuntansi		0 Dokumen Akuntansi		12 Dokumen Akuntansi		54,00%		35,00%		64,81%							
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.753.000,00	38,00%	620.000,00	0,00%	57.000,00	0,00%	9,19%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		38,00%		13,00%		34,21%							

				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		1.836.000,00	25,00%	410.000,00	0,00%	84.000,00	0,00%	20,49%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	25,00%		12,00%		48,00%									
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00		0,00		2.894.000,00	58,00%	1.578.000,00	0,00%	1.228.000,00	0,00%	77,82%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	58,00%		45,00%		77,59%									
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		2.544.000,00	38,00%	898.000,00	0,00%	873.000,00	0,00%	97,22%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	38,00%		35,00%		92,11%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**25.985.750,00**		**9.210.000,00**		**7.298.000,00**		**79.24%**								
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		5.793.500,00	50,00%	2.670.000,00	0,00%	2.290.000,00	0,00%	85,77%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	50,00%		40,00%		80,00%									
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		5.854.750,00	50,00%	2.710.000,00	0,00%	2.463.000,00	0,00%	90,89%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	50,00%		40,00%		80,00%									
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		3.546.000,00	20,00%	700.000,00	0,00%	385.000,00	0,00%	55,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	20,00%		15,00%		75,00%									
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		3.729.750,00	25,00%	820.000,00	0,00%	460.000,00	0,00%	56,10%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	25,00%		15,00%		60,00%									
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		3.525.750,00	35,00%	1.150.000,00	0,00%	895.000,00	0,00%	77,83%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	35,00%		20,00%		57,14%									
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		3.536.000,00	35,00%	1.160.000,00	0,00%	805.000,00	0,00%	69,40%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	35,00%		20,00%		57,14%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**6.344.250,00**		**2.883.750,00**		**1.262.750,00**		**43.79%**								
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		6.344.250,00	50,00%	2.883.750,00	0,00%	1.262.750,00	0,00%	43,79%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	50,00%		40,00%		80,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**984.922.292,00**		**637.470.417,00**		**490.745.958,00**		**76.98%**								
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		50.534.000,00	60,00%	27.592.500,00	0,00%	27.502.500,00	0,00%	99,67%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		23 Paket	60,00%		60,00%		100,00%									
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		384.369.236,00	82,52%	301.720.236,00	0,00%	271.298.902,00	0,00%	89,92%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		102 Paket	0,00%		77,37%		0,00%									
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		121.596.700,00	85,99%	101.885.950,00	0,00%	74.213.080,00	0,00%	72,84%								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		21 Paket	0,00%		85,99%		0,00%									
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		94.713.250,00	55,00%	47.356.625,00	0,00%	46.858.500,00	0,00%	98,95%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		23 Paket	55,00%		55,00%		100,00%									

		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.240.106,00	50,00%	1.620.106,00	0,00%	1.140.000,00	0,00%	70,37%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		41,66%		83,32%							
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		330.469.000,00	50,00%	157.295.000,00	0,00%	69.732.976,00	0,00%	44,33%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		10 Laporan		0,00%		44,64%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**962.947.700,00**		**962.947.700,00**		**594.477.700,00**		**61.74%**						
		28	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		312.492.700,00	100,00%	312.492.700,00	0,00%	96.992.700,00	0,00%	31,04%						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		18 Unit		0,00%		99,99%		0,00%							
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		650.455.000,00	100,00%	650.455.000,00	0,00%	497.485.000,00	0,00%	76,48%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		9 Unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.155.904.159,00**		**579.952.080,00**		**412.790.800,00**		**71.18%**						
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		16.000.000,00	68,00%	10.000.000,00	0,00%	4.000.000,00	0,00%	40,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		68,00%		67,00%		98,53%							
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		16.500.000,00	50,00%	8.250.000,00	0,00%	6.625.000,00	0,00%	80,30%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		41,67%		83,34%							
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.123.404.159,00	50,00%	561.702.080,00	0,00%	402.165.800,00	0,00%	71,60%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		41,66%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.549.459.355,00**		**1.388.777.856,00**		**297.360.550,00**		**21.41%**						
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		245.253.000,00	61,84%	142.302.001,00	0,00%	65.507.150,00	0,00%	46,03%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		20 Unit		0,00%		51,48%		0,00%							
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		7.500.000,00	75,00%	5.400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		75,00%		75,00%		100,00%							
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		184.566.500,00	95,00%	168.936.000,00	0,00%	101.598.900,00	0,00%	60,14%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		123 Unit		95,00%		65,00%		68,42%							
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.112.139.855,00	96,76%	1.072.139.855,00	0,00%	130.254.500,00	0,00%	12,15%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		12 Unit		0,00%		69,29%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**0,00%**	**63,72%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Rendah**						
										Total anggaran dari seluruh program		**12.359.512.626,00**		**7.950.840.611,00**		**4.284.449.898,00**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)						**0,00%**	**53,89%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)						**Sangat Rendah**	**Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah berpedoman pada rancangan perubahan RKPD, dari jumlah total anggaranDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada perubahan sesuai dengan kebutuhan.

Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 5 (lima) program kerja yaitu :

Program Kerja:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kegiatan:

Sedangkan pada Tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan antara lain:

Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta			
Tahun 2023			
No.	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023 untuk program dan kegiatan merupakan lanjutan tahun berjalan, untuk output kegiatan ada penambahan dan ada pengurangan, target kinerja ada perubahan, tidak ada penambahan kegiatan baru/alternatif, pagu indikatif ada beberapa kegiatan yang bertambah dan ada yang berkurang menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II. Adapun secara lengkap rencana program dan kegiatan DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan dalam tabel
3.1 berikut:

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perubahan jumlah anggaran yang disepakati saat pembahasan perubahan renja berbeda dengan hasil akhir anggaran perubahan dikarenakan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan dari BPKAD;
2. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, diharapkan kegiatan yang awalnya belum terwadahi saat ini sudah terwadahi dan bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
3. Perubahan Rencana Kerja Anggaran di Tahun 2023, saat ini lebih fokus pada pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan memperhatikan pada penambahan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diharapkan dapat dan membantu menunjang pelaksanaan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan tugas kedinasan, penambahan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, persediaan sarana dan prasaran serta peningkatan sarana prasarana *drive thru* dengan pengadaan barang mendasarkan proses RKBMD, mempertimbangkan pemenuhan TKDN minimal 25%
4. Penggunaan anggaran berdasarkan pada Perubahan RKA PD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib dan sesuai dengan perencanaan, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tepat sasaran.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta



Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**12,359,512,626**	**13,008,820,533**					**14,064,048,715**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,562,359,356**	**10,194,465,263**					**10,976,457,809**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**47,739,500**	**47,739,500**					**46,233,740**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,258,000	2,258,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	2,144,050
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,860,000	2,860,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	2,889,000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,798,750	2,798,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	2,929,800
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	32,520,750	32,520,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	30,665,840

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,798,750	2,798,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	2,929,800
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 laporan	2 laporan	100 %	100 %	2,425,250	2,425,250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	2,511,250
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,078,000	2,078,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	2,164,000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,829,056,350**	**4,989,065,350**					**6,265,044,776**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	38 Orang	38 Orang	100 %	100 %	4,814,255,850	4,974,264,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	6,238,588,000
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	36 Dokumen	36 Dokumen	100 %	100 %	2,506,500	2,506,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	4,938,656

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen Akuntansi	12 Dokumen Akuntansi	100 %	100 %	3,267,000	3,267,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	4,884,800
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,753,000	1,753,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	3,679,920
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,836,000	1,836,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	3,779,676
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,894,000	2,894,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	5,399,964
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2,544,000	2,544,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	3,773,760

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**25,985,750**	**25,985,750**					**24,796,200**
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	5,793,500	5,793,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	4,968,600
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	5,854,750	5,854,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	5,029,800
2	18	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3,546,000	3,546,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	3,661,200
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,729,750	3,729,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	3,844,800
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3,525,750	3,525,750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	3,640,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	3,536,000	3,536,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	3,651,000
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**6,344,250**	**6,344,250**					**5,519,400**
2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	6,344,250	6,344,250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	5,519,400
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**984,922,292**	**1,062,095,492**					**1,028,163,542**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	23 Paket	25 Paket	100 %	100 %	50,534,000	53,059,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	50,534,000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	102 Paket	112 Paket	100 %	100 %	384,369,236	397,411,236			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	374,642,486
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	21 Paket	23 Paket	100 %	100 %	121,596,700	127,536,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	113,596,700

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	23 Paket	26 Paket	100 %	100 %	94,713,250	150,379,450			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	154,713,250
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,240,106	3,240,106			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	3,240,106
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	330,469,000	330,469,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	331,437,000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**962,947,700**	**1,137,059,050**					**967,447,700**
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	18 Unit	28 Paket	100 %	100 %	312,492,700	457,031,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	231,992,700
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	9 Unit	63 Unit	100 %	100 %	650,455,000	680,027,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	735,455,000
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,155,904,159**	**1,143,904,159**					**1,249,504,159**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	16,000,000	4,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	16,000,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,500,000	16,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	16,500,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,123,404,159	1,123,404,159			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	1,217,004,159
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,549,459,355**	**1,782,271,712**					**1,389,748,292**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	245,253,000	245,253,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	205,113,000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	7,500,000	7,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	6,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	123 Unit	134 Unit	100 %	100 %	184,566,500	190,766,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	184,566,500
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	12 Unit	15 Unit	100 %	100 %	1,112,139,855	1,339,252,212			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai	993,468,792
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**1,237,998,770**	**1,251,698,770**					**1,332,338,082**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**621,622,250**	**629,322,250**					**571,282,428**
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kepastian hukum pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	237 investor baru	237 investor baru	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	621,622,250	629,322,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Investor Baru	237 investor baru	571,282,428
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**616,376,520**	**622,376,520**					**761,055,654**
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Baru	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi potensi investasi penanaman modal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	237 investor baru	237 investor baru	5 event	5 event	100 %	100 %	616,376,520	622,376,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Investor Baru	237 investor baru	761,055,654
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**759,430,750**	**756,932,750**					**696,767,316**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**759,430,750**	**756,932,750**					**696,767,316**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	86 % 95 %	86 % 95 %	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	100 %	100 %	559,956,750	560,456,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	86 % 95 %	453,203,516

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	86 % 95 %	86 % 95 %	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	97,086,000	93,838,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	86 % 95 %	147,604,680
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	86 % 95 %	86 % 95 %	3000 Orang	3000 Orang	100 %	100 %	102,388,000	102,638,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	86 % 95 %	95,959,120
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**600,504,000**	**606,504,000**					**629,745,672**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**600,504,000**	**606,504,000**					**629,745,672**
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pembinaan penanaman modal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	18,80 %	18,80 %	253 Pelaku Usaha	253 Pelaku Usaha	100 %	100 %	430,130,000	430,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18,80 %	457,176,992
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pembinaan penanaman modal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	18,80 %	18,80 %	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	170,374,000	176,374,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	18,80 %	172,568,680
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**199,219,750**	**199,219,750**					**428,739,836**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**199,219,750**	**199,219,750**					**428,739,836**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Terkelolanya arsip dan terpeliharanya SIM Penanaman Modal	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	199,219,750	199,219,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80 %	428,739,836
TOTAL																**12,359,512,626**	**13,008,820,533**					**14,064,048,715**

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2023 di sipd.kemendagri.go.id APBD Murni 2023: Rp 12.359.512.626,00 Perubahan Renja 2023: Rp 13.238.983.542,00 Keterangan Perubahan (tuliskan secara ringkas, garis besar untuk alasan perubahan yang paling dominan): 1) Penyediaan gaji menyesuaikan arahan BPKAD bertambah 127.436.000 2) Penambahan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 55.666.200 (amplop kop sedang, kertas Kop Garuda Emas, Map Snell berlogo IMB) 3) Pengadaan mebel 204.484.000 - Kursi Tunggu 4 seat spon 3 buah @Rp 5.445.000 = Rp 16.335.000 - AC Standing 3 PK 4 unit @Rp 22.000.000 = Rp 88.000.000 - Dispenser 2 unit @Rp 800.000 = Rp 1.600.000 (untuk ruang laktasi) - Soundsystem 1 paket @Rp 60.855.000 = Rp 60.855.000 (ruang MPP) - Standing Bracket 3 unit @Rp 3.000.000 = Rp 9.000.000 - Tangga Lipat Alumunium 8 step 1 buah @Rp 2.199.000 = Rp 2.199.000 - Vertikal Blind 40 m2 @Rp 300.000 = Rp 12.000.000 - Lensa camera DSLR 2 unit @Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000 (penggantian lensa yg rusak) - Handy talky 10 unit @Rp 770.000 = Rp 7.700.000 - Traffic Cone 10 buah @Rp 379.500 = Rp 3.795.000 4) Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Ruang Rapat Arjuna Rp 25.000.000 5) Pemeliharaan Drive Thru 2023 Rp 168.848.009 6) Peningkatan MPP 2023 Rp 198.764.357	YA	mendasarkan prioritas kebutuhan
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.	TIDAK	Tidak ada
3.	Perubahan Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah menjadi bagian dari Perubahan Renja	YA	Perubahan Penjabaran APBD terakhir menjadi bagian dari Perubahan Renja

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
4.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II	YA	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II
5.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai target program / sasaran RPD	YA	Sudah memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
6.	Hasil reviu indikator dan target sasaran dan program perangkat daerah untuk Perubahan 2023 telah tertuang dalam file metadata di bit.ly/perencanaanjogjakota dan sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id	YA	sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id
7.	Menyusun Narasi Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai tatakala	YA	sedang berproses menyusun narasi renja perubahan

CATATAN:
1. Pengadaan barang mendasarkan proses RKBMD, mempertimbangkan pemenuhan TKDN minimal 25%
2. Mempertimbangkan waktu efektif pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan, bersifat urgent dan mendukung sasaran OPD dan Kota Yogyakarta
3. Menghapus sisa anggaran JLOP yang diterima P3K (mekanisme penyelesaian/putus kontrak dan menghapus di e-catalog, administrasi keuangan)
BPBJ mekanisme pemutusan kontrak: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri kepada kepala dinas, selanjutnya kepala dinas memberi wewenang PPK untuk melakukan addendum SPK pada kontrak disesuaikan dengan masa tugas (yang memproses PPK masing-masing OPD)
Pengurangan anggaran gaji JLOP di RKPD perubahan mendasarkan tanggal putus kontrak.
4. Mohon Bagian administrasi pembangunan dan BPBJ menyusun SOP mekanisme putus kontrak, penghapusan di e-catalog, dan LPSE
5. Konfirmasi ke BPKAD (bidang perbendaharaan) berkaitan dengan waktu pemberian honor 3 bulan setelah APBD perubahan ditetapkan apakah bisa (tidak bisa berlaku anti datir), kemungkinan hanya bisa menganggarkan 2 bulan.
6. Konsep pemeliharaan drive thru 168 juta ada perubahan drive thru SIM, penataan interior dan perubahan tenant polres
7. Konsep peningkatan MPP 2023 untuk perubahan tenant, ada penambahan loket paspor agar lebih representative, ruang tunggu untuk pengunjung Ombudsman dan BNN, untuk memecah konsentrasi ruang tunggu imigrasi dipindah (barat dan timur). Mohon cek KBLI untuk pemeliharaan Gedung lebih dari 200 juta konsultasi ke BPBJ.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Juni 2023

Pimpinan Sidang



Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Adhitya Kusuma Zaenardi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	Pinastika Larasati	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3.	Mira Setyaningrum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4.	Budi Santosa, S. STP., M.Si.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.	Hanief Rouhan Mashadi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6.	Patricia Anggit Sri Harsono, S.E	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
7.	Hafidz Zein Muttaqin, S.H.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
8.	Siwi Catur Nugraha	Inspektorat Daerah	
9.	Silvia S	Bagian Administrasi Pembangunan	
10.	Febri Furqon Artadi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
11.	NUR SIGIT EDI PUTRANTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
12.	Dra. Wiwin Giri Doriawani, MM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
13.	Dwi Wulandari	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
14.	Anans Boga T.G., ST., M.Eng.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
15.	Khairunisa Puspitasari, S.E.I.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

KOTA YOGYAKARTA

2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Maksud dan Tujuan 1

I.2. Dasar Pertimbangan Perubahan 1

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 SAMPAI TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA PD 2

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 8

BAB IV PENUTUP 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perubahan perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah urusan kebudayaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Adapun tujuannya adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUPA PPAS tahun 2023 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan OPD Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta;
2. Untuk memastikan bahwa DPPA Tahun 2023 telah disusun berlandaskan RKPD Perubahan tahun 2023.
3. Sebagai acuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam mengoperasionalkan perubahan Rencana Kerja Kota Yogyakarta tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta selama tahun 2023.
5. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan urusan kebudayaan tahun 2023.
6. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku seni dan budaya serta stakeholder terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangkan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain penyesuaian kebutuhan ataupun bertambahnya kebutuhan mendesak dalam rangka penambahan kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta serta penyesuaian Redesign Tahap I dan II Dana Keistimewaan. Berbagai pertimbangan yang diambil dalam perubahan Rencana Kerja ini tetap memperhitungkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi Rencana Kerja hingga triwulan II juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja hingga Triwulan II tahun 2023 untuk mengetahui realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberi gambaran langkah-langkah yang harus ditempuh Dinas Kebudayaan dalam 6 bulan kedepan. Langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan semua kegiatan yang sudah ditetapkan target keluarannya. Hasil evaluasi dari program-program dapat dilihat pada tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

: DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**0**		**0**		**40.696.359.900**		**17.619.330.667**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					
1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan								**960.000.000**	**49,49%**	**472.183.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		10,50%		0,00%			0		0,00%	
2 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra								**1.652.535.000**	**39,34%**	**650.122.750**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		25,98%		0,00%			0		0,00%	
3 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman								**900.000.000**	**81,11%**	**721.494.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan		0 Unit		0 Unit		19 Unit		0,00%		51,15%		0,00%			0		0,00%	
4 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Upt Pengelolaan Kawasan								**10.881.911.900**	**45,98%**	**4.874.979.980**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan		0 Objek		0 Objek		1 Objek		0,00%		38,44%		0,00%			0		0,00%	
5 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan								**1.837.500.000**	**21,42%**	**384.267.240**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Objek Cagar		0 Objek		0 Objek		86 Objek		0,00%		15,27%		0,00%			0		0,00%	
Prasarana Budaya Upt Pengelolaan Kawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		0 Unit		0 Unit		11296 Unit		0,00%		45,75%		0,00%			0		0,00%	
7 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya								**2.130.360.000**	**41,31%**	**580.964.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		15,13%		0,00%			0		0,00%	
8 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni								**600.000.000**	**81,21%**	**485.020.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang		0 Lembaga		0 Lembaga		150 Lembaga		0,00%		19,79%		0,00%			0		0,00%	
9 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya								**1.200.000.000**	**79,47%**	**953.236.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar negeri dalam		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		24,02%		0,00%			0		0,00%	
10 Penghargaan Seniman dan Budayawan								**350.000.000**	**35,00%**	**2.990.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Seniman dan Budayawan yang		0 Orang		0 Orang		7 Orang		0,00%		20,00%		0,00%			0		0,00%	
11 Festival Kebudayaan Yogyakarta								**500.000.000**	**25,00%**	**1.260.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		10,00%		0,00%			0		0,00%	
12 Gelar Budaya Jogja								**4.945.000.000**	**39,12%**	**1.895.627.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		9 Laporan		0,00%		28,82%		0,00%			0		0,00%	
13 Publikasi Seni dan Budaya Daerah								**930.000.000**	**5,21%**	**47.504.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		3,91%		0,00%			0		0,00%	
14 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi								**840.000.000**	**52,77%**	**438.340.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**	
	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan		0 Orang		0 Orang		450 Orang		0,00%		43,73%		0,00%			0		0,00%	

15	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan	1.870.000.000	21,60%	389.321.773	0,00%	0	0,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%	
										0,00%		12,69%		0,00%					0,00%	
16	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Event		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	2.500.000.000	38,50%	880.728.000	0,00%	0	0,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%	
										0,00%		23,82%		0,00%					0,00%	
								Rata-rata capaian kinerja						0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
								Predikat kinerja						Sangat	Sangat			Sangat	Sangat	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0		0			25.088.259.213		11.827.954.735		0	0,00%	0,00%					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								15.585.000	100,00%	15.585.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								9.080.000	41,00%	3.620.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		41,00%		35,00%		85,37%			0		0,00%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								27.440.000	43,00%	11.510.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		43,00%		35,00%		81,40%			0		0,00%	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.330.000	50,00%	2.665.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		50,00%		25,00%		50,00%			0		0,00%	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								8.503.618.850	65,00%	5.477.590.881	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		55,00%		0,00%			0		0,00%	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								2.534.000	46,00%	1.157.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		46,00%		38,00%		82,61%			0		0,00%	
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								2.664.000	50,00%	1.332.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		50,00%		57,00%		114,00%			0		0,00%	
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								5.508.000	53,00%	2.900.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		53,00%		40,00%		75,47%			0		0,00%	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								2.466.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		0 Paket		0 Paket		1 Paket		0,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								2.866.000	51,00%	1.433.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		51,00%		56,00%		109,80%			0		0,00%	

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							6.690.000	50,00%	3.332.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	50,00%		45,00%		90,00%			0		0,00%	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							1.330.000	20,00%	220.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	20,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							6.015.000	47,00%	2.712.200	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	47,00%		46,00%		97,87%			0		0,00%	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Upt							1.500.000	100,00%	1.500.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya							6.480.250	95,00%	6.033.250	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		7 Paket	95,00%		88,00%		92,63%			0		0,00%	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							107.088.996	75,00%	78.657.475	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		6 Paket	0,00%		25,00%		0,00%			0		0,00%	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							44.320.750	51,00%	22.601.975	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan		0 Paket		0 Paket		2 Paket	51,00%		48,00%		94,12%			0		0,00%	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya							9.881.250	80,00%	7.601.250	80,00%	26.426.500	100,00%	347,66%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	80,00%		80,00%		100,00%			0		0,00%	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan							780.000	50,00%	390.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	50,00%		42,00%		84,00%			0		0,00%	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							1.200.000	50,00%	600.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis	50,00%		42,00%		84,00%			0		0,00%	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							233.510.000	45,00%	103.750.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		0 Laporan		0 Laporan		62 Laporan	0,00%		30,00%		0,00%			0		0,00%	
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan							39.600.000	100,00%	39.600.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		34 Unit	100,00%		60,00%		60,00%			0		0,00%	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Upt							2.005.080.000	28,18%	300.610.900	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang		0 Paket		0 Paket		5 Paket	0,00%		10,15%		0,00%			0		0,00%	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							3.000.000	50,00%	1.250.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	50,00%		40,00%		80,00%			0		0,00%	

26	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		0 Paket		0 Paket		1 Paket	**3.300.000**	**50,00%**	**1.650.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										50,00%		45,00%		90,00%			0		0,00%
27	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	**2.500.000**	**50,00%**	**1.250.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										50,00%		35,00%		70,00%			0		0,00%
28	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	**1.348.842.359**	**50,00%**	**672.951.359**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										0,00%		55,00%		0,00%			0		0,00%
29	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	**320.524.008**	**42,00%**	**133.551.665**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										0,00%		34,63%		0,00%			0		0,00%
30	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		0 Unit		0 Unit		2 Unit	**53.300.000**	**55,00%**	**27.950.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										55,00%		38,00%		69,09%			0		0,00%
31	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		0 Unit		0 Unit		4 Unit	**79.968.000**	**65,00%**	**48.444.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										65,00%		40,00%		61,54%			0		0,00%
32	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		0 Unit		0 Unit		17 Unit	**151.209.000**	**47,00%**	**70.972.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										0,00%		32,00%		0,00%			0		0,00%
33	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis	**40.679.000**	**56,00%**	**22.677.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										56,00%		50,00%		89,29%			0		0,00%
34	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang		0 Unit		0 Unit		16 Unit	**9.250.000**	**70,00%**	**6.250.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										70,00%		40,00%		57,14%			0		0,00%
35	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		0 Unit		0 Unit		1 Unit	**45.000.000**	**100,00%**	**45.000.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										100,00%		40,00%		40,00%			0		0,00%
36	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		0 Unit		0 Unit		1 Unit	**180.000.000**	**100,00%**	**180.000.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										0,00%		60,00%		0,00%			0		0,00%
37	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan**	Jumlah pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang		0 Paket		0 Paket		2 Paket	**260.000.000**	**76,92%**	**200.000.000**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										0,00%		76,92%		0,00%			0		0,00%
38	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman**	Jumlah bulan pelaksanaan layanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	**11.560.000.000**	**50,00%**	**4.338.208.030**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**
										50,00%		41,67%		83,34%			0		0,00%

Rata-rata capaian kinerja							95,68%	148,39%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Total anggaran dari seluruh program		65.794.500.363		29.454.886.652		26.426.500							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							95,10%	82,04%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

ng Keberhasilan Kinerja	: Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala
bat Keberhasilan Kinerja	: -
ng diperlukan dalam triwulan	: 1.Indikator/target indikator kinerja program yang berubah (Metadata RPD 2023-2026), untuk diupdate dalam SIMONEVA pada periode triwulan IV.
ng diperlukan dalam tahun	: 1. Menjalin kerja sama (baru dan memperkuat kerja sama yang telah ada) dengan pusat budaya nasional dan/atau regional.

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja hingga Triwulan II serta Berita Acara Redesign I Dana Keistimewaan. Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											30,891,353,604	31,457,076,481					42,383,945,896
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9,675,958,604	10,422,761,481					9,326,537,896
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											57,435,000	54,785,000					31,212,600
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0-100	A Nilai 78 skala 0-100	1 Dokumen	1 Dokumen	11 dokumen	11 dokumen	15,585,000	12,935,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	14,800,000
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0-100	A Nilai 78 skala 0-100	2 Dokumen	2 Dokumen	11 dokumen	11 dokumen	9,080,000	9,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	8,824,000
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0-100	A Nilai 78 skala 0-100	4 Laporan	4 Laporan	11 dokumen	11 dokumen	27,440,000	27,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	2,588,600

2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0-100	A Nilai 78 skala 0-100	4 Laporan	4 Laporan	11 dokumen	11 dokumen	5,330,000	5,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	5,000,000
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,527,676,850**	**9,237,519,850**					**8,311,878,850**
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	41 ASN	41 ASN	1 laporan	1 laporan	8,503,618,850	9,212,781,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	8,273,188,850
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	2,534,000	2,534,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	2,750,000
2	22	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	1 laporan	1 laporan	2,664,000	2,664,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	3,412,000
2	22	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	1 laporan	1 laporan	5,508,000	5,508,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	8,824,000
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket Laporan	1 Paket Laporan	1 laporan	1 laporan	2,466,000	2,466,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	5,500,000

2	22	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	1 laporan	1 laporan	2,866,000	3,546,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	5,500,000
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	1 laporan	1 laporan	6,690,000	6,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	9,704,000
2	22	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	1,330,000	1,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	3,000,000
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**392,134,746**	**406,996,131**					**327,889,496**
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	6,015,000	6,015,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	5,310,000
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Paket	6 Paket	1 laporan	1 laporan	107,088,996	114,450,381	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	128,916,996
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	1 laporan	1 laporan	44,320,750	51,820,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	28,062,500
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Janis	1 Janis	1 laporan	1 laporan	1,200,000	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	1,200,000
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	62 Laporan	62 Laporan	1 laporan	1 laporan	233,510,000	233,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	164,400,000

2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**326,824,008**	**336,824,000**						**308,252,950**
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	3,000,000
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	3,300,000	3,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	3,900,000
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	320,524,008	330,524,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	301,352,950
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**371,888,000**	**386,636,500**						**347,304,000**
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	17 Unit	17 Unit	5 jenis	5 jenis	151,209,000	165,957,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	133,854,000
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Jenis	6 Jenis	5 jenis	5 jenis	40,679,000	40,679,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	33,450,000
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	5 jenis	5 jenis	180,000,000	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kabudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	180,000,000
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**21,215,395,000**	**21,034,315,000**						**33,057,408,000**
2	**22**	**08**	**5.01**		**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**											**3,512,535,000**	**3,512,535,000**						**7,000,000,000**
2	22	08	5.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangan Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.61 %	76.61 %	4 Dokumen	4 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	960,000,000	960,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	2,500,000,000
2	22	08	5.01	02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangan Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.61 %	76.61 %	4 Laporan	4 Laporan	3 dokumen	3 dokumen	1,652,535,000	1,652,535,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	3,000,000,000
2	22	08	5.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangan Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra		76.61 %	76.61 %	19 Unit	19 Unit	3 dokumen	3 dokumen	900,000,000	900,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	1,500,000,000

2	**22**	**08**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**											**1,837,500,000**	**1,887,500,000**				**4,740,000,000**
2	22	08	5.02	02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	Terlestarikannya objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.11 %	70.11 %	86 Objek	86 Objek	90 objek	90 objek	1,837,500,000	1,887,500,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	70.11 %	4,740,000,000
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**15,865,360,000**	**15,634,280,000**				**21,317,408,000**
2	22	08	5.07	01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	5 Laporan	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	2,130,360,000	2,130,360,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	2,401,517,500
2	22	08	5.07	02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	150 Lembaga	150 Lembaga	1 laporan	1 laporan	600,000,000	600,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	713,236,000
2	22	08	5.07	03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	3 Laporan	3 Laporan	1 laporan	1 laporan	1,200,000,000	953,580,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	1,250,000,000
2	22	08	5.07	04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	7 Orang	7 Orang	1 laporan	1 laporan	350,000,000	350,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	500,000,000
2	22	08	5.07	05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	3 Laporan	3 Laporan	1 laporan	1 laporan	500,000,000	500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	754,734,500
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	9 Laporan	9 Laporan	1 laporan	1 laporan	4,945,000,000	4,960,340,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	8,600,000,000

2	22	08	5.07	07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 laporan	1 laporan	930,000,000	930,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	647,920,000
2	22	08	5.07	08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	450 Orang	450 Orang	1 laporan	1 laporan	840,000,000	840,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	1,660,000,000
2	22	08	5.07	09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	6 Laporan	6 Laporan	1 laporan	1 laporan	1,870,000,000	1,870,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	2,540,000,000
2	22	08	5.07	10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Event Penggiat Seni	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	82 % 70.11 %	2 Laporan	2 Laporan	1 laporan	1 laporan	2,500,000,000	2,500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	2,250,000,000
															TOTAL	**30,891,353,604**	**31,457,076,481**					**42,383,945,896**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											21,092,766,759	21,222,601,183					22,658,510,523
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,611,801,859	1,611,801,859					1,726,163,323
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											33,341,500	33,341,500					31,399,000
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	1,500,000
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Paket	7 Paket	1 laporan	1 laporan	6,480,250	6,480,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	9,140,000
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	9,881,250	9,881,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	7,739,000
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	780,000	780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	780,000
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	14,700,000	14,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	12,240,000

2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**39,600,000**	**39,600,000**					**20,100,000**
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	34 Unit	34 Unit	3 jenis	3 jenis	39,600,000	39,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	20,100,000
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,351,342,359**	**1,351,342,359**					**1,557,776,323**
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	2,500,000
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1,348,842,359	1,348,842,359	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	1,555,276,323
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**187,518,000**	**187,518,000**					**116,888,000**
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	3 jenis	3 jenis	53,300,000	53,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	38,450,000
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Unit	4 Unit	3 jenis	3 jenis	79,968,000	79,968,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	44,188,000
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	16 Unit	16 Unit	3 jenis	3 jenis	9,250,000	9,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	9,250,000
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	3 jenis	3 jenis	45,000,000	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	25,000,000
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**19,480,964,900**	**19,610,799,324**					**20,932,347,200**
2	**22**	**08**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**											**10,881,911,900**	**10,806,746,324**					**10,658,347,200**
2	22	08	5.02	01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Terkelolanya objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.50 Skala 0-100	81.50 Skala 0-100	1 Objek	1 Objek	1 objek	1 objek	10,881,911,900	10,806,746,324	Dana Keistimewaan DIY		Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	81.50 Skala 0-100	10,658,347,200

2	22	08	5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan											8,599,053,000	8,804,053,000					10,274,000,000
2	22	08	5.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya sarana dan prasarana budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.50 Skala 0-100	81.50 Skala 0-100	112.955 Unit	112.955 Unit	7 jenis	7 jenis	8,599,053,000	8,804,053,000	Dana Keistimewaan DIY		Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	81.50 Skala 0-100	10,274,000,000
															TOTAL	21,092,766,759	21,222,601,183					22,658,510,523

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											13,825,080,000	21,230,147,900					92,183,080,000
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13,825,080,000	21,230,147,900					13,825,080,000
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											2,005,080,000	2,005,080,000					2,005,080,000
2	22	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Unit	7 Unit	5 Paket	5 Paket	2,005,080,000	2,005,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	2,005,080,000
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											260,000,000	260,000,000					260,000,000
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	2 Paket	2 Paket	260,000,000	260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	260,000,000
2	22	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											11,560,000,000	18,965,067,900					11,560,000,000
2	22	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tercapainya kinerja BLUD dalam memberikan pelayanan publik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 skala 0-100	84 skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 bulan	12 bulan	11,560,000,000	18,965,067,900	Pendapatan dari BLUD		Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya	84 skala 0-100	11,560,000,000
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											0	0					78,358,000,000
2	22	08	5.03		Pengelolaan Taman Budaya											0	0					78,358,000,000
2	22	08	5.03	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Tersedianya pengembangan layanan UPT Pengelolaan Taman Budaya dalam bidang kebudayaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	35 %	35 %	1 Objek	1 Objek	1 event	1 event	0	0	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	35 %	78,358,000,000
															TOTAL	13,825,080,000	21,230,147,900					92,183,080,000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kebudayaan Kota Yogyakarta. Ketersediaan dokumen perubahan Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) Kota Yogyakarta yang mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran. Hal yang mendasari perubahan Rencana Kerja dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dan Berita Acara Redesign I Dana Keistimewaan serta dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan, anggaran, dan ketersediaan waktu untuk memenuhi semua target keluaran yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 menggambarkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara menyeluruh untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah), partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan), politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD menjadi penting dalam perencanaan daerah karena Renja PD merupakan implementasi perencanan strategis Perangkat Daerah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Renja PD merupakan penerjemahan dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Dokumen RKPD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Renja PD adalah instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah dalam realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan kedua tahun 2023 dan penyesuaian terhadap perkembangan dan kebutuhan dalam periode pelaksanaan di tahun yang sedang berjalan.

Penyusunan Perubahanan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2023 juga mempertimbangkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengakses layanan, berpartisipasi mengikuti kegiatan, menyampaikan usulan/masukan, dan mendapatkan manfaat dari perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2023.

2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590));
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kota Yog yakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai dokumen acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja dan sasaran sesuai hasil evaluasi Renja pada triwulan kedua tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah :

1. Sebagai dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pelaksanaan kegiatan tahun 2023.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta di Tahun Anggaran 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
BAB III SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan Renja dalam pencapaian target kinerja dan pendanaan, serta kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Sesuai data yang didapatkan dari Laporan SPJ Fungsional bulan Mei 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta diketahui bahwa sampai dengan triwulan II bulan Mei tahun 2023 capaian realisasi keuangan sebesar Rp.4.765.623.264,00 atau 35,63% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp.13.376.928.350,00 sedangkan dilihat dari persediaan dana/SPD sampai dengan triwulan II (Rp.8.529.154.865,00) serapan keuangannya sebesar 55,87%

Capaian kinerja Renstra pada sasaran Program sampai dengan triwulan II bulan Mei sebagian sudah ada yang terealisasi dan ada yang belum karena merupakan indikator baru dalam Rentra 2023-2026. Capaian kinerja sasaran Program Pembinaan Perpustakaan pada indikator “Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan” terealisasi sebesar 81,93 dari target 78 skala. Indikator “Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP” terealisasi sebesar 29% dari target 20%. Capaian kinerja tersebut merupakan capaian kinerja tahun 2022. Indikator “Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan” terealisasi sebanyak 113 judul bahan pustaka.

Sasaran Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan indikator “Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno” realisasi masih nol dari target 1 orang pada tahun 2023. Program Pengelolaan Arsip dengan indikator “Jumlah arsip statis terdigitalisasi” realisasi masih nol karena masih dalam proses pengalihmediaan sehingga belum bisa dihitung. Indikator ”Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan” terealisasi sebanyak 30.825 arsip dari target 30.421 arsip. Indikator ini mengalami review karena semua OPD sudah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan pada Renstra sebelumnya. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan indikator “Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan” terealisasi sebanyak 1.000 arsip dari target 1.200 arsip. Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan indikator “Persentase pengguna arsip tertutup

yang menerapkan SOP" belum ada realisasi karena SOP masih dalam proses penyusunan.

Pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan 6 (enam) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan. Realisasi fisik capaian kinerja rata-rata dari seluruh program adalah sebesar 49,01% dari target fisik sebesar 49,17%. Secara keseluruhan capaian target fisik kegiatan sudah baik, meskipun ada kegiatan yang target keuangannya belum tercapai dikarenakan sistem pertanggungjawaban yang baru masuk pada bulan berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65<x\leq75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x< 50$.

Jika didasarkan pada kriteria tersebut, maka Program Pembinaan Perpustakaan rata-rata capaian kinerjanya 66,83% dengan predikat kinerja "sedang". Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno rata-rata capaian kinerjanya 93,26% dengan predikat kinerja "sangat tinggi". Program Pengelolaan Arsip rata-rata capaian kinerjanya 100,25% dengan predikat kinerja "sangat tinggi". Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip rata-rata capaian kinerjanya 92,62% dengan predikat kinerja "sangat tinggi". Program Perizinan Penggunaan Arsip rata-rata capaian kinerjanya 0% dengan predikat kinerja "sangat rendah". Program Penunjang Urusan rata-rata capaian kinerjanya 50,81% dengan predikat kinerja "rendah". Secara keseluruhan pada triwulan II ini rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 62,00% dengan predikat kinerja "rendah".

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2023 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37,70 skala
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	60 skala
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	72,33 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan**	**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan diihitung berdasarkan Nilai SKM**	**79,5 skala**	**0,00**	**81,93 skala**	**0,00**	**78,00 skala**	**1.372.326.241,00**	**78 skala**	**545.673.741,00**	**skala**	**416.256.566,00**	**0,00%**	**95,98%**					**Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca**	
			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	**Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan (akumulasi)**	**3.300,00 judul**	**0,00**	**2.056,00 judul**	**0,00**	**1.800,00 judul**	**0,00**	**200 judul**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Ka. Bid. Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	**Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP = Jumlah perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dibagi Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**29,00 %**	**0,00**	**29,00 %**	**0,00**	**20,00 %**	**0,00**	**20**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Ka. Bid. Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									**1.264.861.241,00**	**522.908**	**741,00**		**400.716.566,00**	**76.63%**							
		1 Pengembangan dan Pemeliharaan				0,00		0,00		79.304.241,00	54,76%	43.091.241,00	0,00%	33.328.001,00	0,00%	77,34%						

			Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management))		0 layanan		0 layanan		1 layanan		54,76%		45,95%		83,91%							
		2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		998.332.000,00	40,78%	407.110.000,00	0,00%	315.254.000,00	0,00%	77,44%						
				Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan		2 Perpustakaan		0,00%		32,59%		0,00%						
		3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				0,00		0,00		2.000.000,00	60,00%	1.000.000,00	0,00%	900.000,00	0,00%	90,00%						
				Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan		8 Perpustakaan		60,00%		60,00%		100,00%						
				Standar Nasional Perpustakaan																			
		4	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		3.600.000,00	57,50%	1.800.000,00	0,00%	900.000,00	0,00%	50,00%						
				Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan		2 Perpustakaan		57,50%		36,25%		63,04%						
		5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		5.520.000,00	79,43%	2.760.000,00	0,00%	2.445.000,00	0,00%	88,59%						
				Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang		4 orang		79,43%		47,31%		59,56%						
		6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		58.840.000,00	55,22%	32.440.000,00	0,00%	19.660.000,00	0,00%	60,60%						
				Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		0 Layanan		0 Layanan		2 Layanan		55,22%		40,41%		73,18%						
		7	Pengembangan Bahan Pustaka				0,00		0,00		112.825.000,00	27,86%	31.427.500,00	0,00%	25.269.565,00	0,00%	80,41%						
				Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		0 Eksemplar		0 Eksemplar		1.800 Eksemplar		27,86%		22,57%		81,01%						
		8	Penyusunan Data dan Informasi PerpustakaanTenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		4.440.000,00	76,07%	3.280.000,00	0,00%	2.960.000,00	0,00%	90,24%						
				Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		76,07%		68,87%		90,54%						
	Pembudayaan	**Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**107.465.000,00**		**22.765.000,00**	**15.540**	**000,00**	**68.26%**							
		9	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				0,00		0,00		26.551.000,00	27,50%	3.125.000,00	0,00%	1.540.000,00	0,00%	49,28%						
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		0 Lokus		0 Lokus		3 Lokus		27,50%		13,75%		50,00%						
		10	Pemberian Penghargaan Gerakan				0,00		0,00		29.460.000,00	5,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

			Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		0 Orang		0 Orang		5 Orang		5,00%		0,00%		0,00%							
		11	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				0,00		0,00		51.454.000,00	56,01%	19.640.000,00	0,00%	14.000.000,00	0,00%	71,28%						
				Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan		10 Perpustakaan		56,01%		47,31%		84,47%						
										Rata-rata capaian kinerja						**0,00%**	**66,83%**						
										Predikat kinerja					**Sangat Rendah**		**Sedang**						
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat		**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno**	**Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (akumulatif)**	**4,00 orang**	**0,00**	**0,00 orang**	**0,00**	**1,00 orang**	**45.602.000,00**	**0 orang**	**22.980.000,00**	**orang**	**20.246.000,00**	**0,00%**	**99,83%**					**Ka. Bid. Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
	Pelestarian Na		**kah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**								**43.602.000,00**		**20.980.000,00**	**18.256**	**000,00 87.02%**							
		1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PenyimpananPerawatanPelestariandan Pendaftaran Naskah Kuno				0,00		0,00		43.602.000,00	48,12%	20.980.000,00	0,00%	18.256.000,00	0,00%	87,02%						
				Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian , dan Pendaftaran Naskah Kuno		0 Orang		0 Orang		1 Orang		48,12%		41,93%		87,14%						
	Pengembanga		**Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.990.0**	**00,00 99.5%**							
		2	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	0,00%	1.990.000,00	0,00%	99,50%						
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan		0 Eksemplar		0 Eksemplar		10 Eksemplar		100,00%		100,00%		100,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**0,00%**	**93,26%**						
										Predikat kinerja					**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Jumlah arsip statis terdigitalisasi**	**Jumlah arsip statis terdigitalisasi (target tahunan)**	**1.500,00 arsip**	**0,00**	**0,00 arsip**	**0,00**	**1.000,00 arsip**	**733.674.250,00**	**0 arsip**	**297.645.000,00**	**arsip**	**290.802.500,00**	**0,00%**	**97,74%**					**Ka. Bid. Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	
				Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	**Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan**	**31.921,00 arsip**	**0,00**	**0,00 arsip**	**0,00**	**30.421,00 arsip**	**0,00**	**30421 arsip**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Ka. Bid. Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	
	Pengelolaan Ar		**sip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**107.160.000,00**		**56.330.000,00**		**57.130.000,00**	**101.42%**						
		1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				0,00		0,00		51.030.000,00	93,10%	47.510.000,00	93,10%	47.510.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		0 berkas		0 berkas		2 berkas		93,10%		93,10%		100,00%							
		2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		56.130.000,00	15,71%	8.820.000,00	15,71%	9.620.000,00	100,00%	109,07%						
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		15,71%		15,71%		100,00%							

	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										**285.751.000,00**	**129.783**	**000,00 123.895.0(**	**0,00 95.**	**6%**										
		3	AkuisisiPengolahanPreservasidan Akses Arsip Statis				0,00		0,00		285.751.000,00	45,58%	129.783.000,00	45,58%	123.895.000,00	100,00%	95,46%									
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		0 arsip		0 arsip		1.000 arsip		45,58%		45,58%		100,00%									
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota										**340.763.250,00**	**111.532**	**000,00 109.777.5(**	**0,00 98.**	**3%**										
		4	Penyediaan InformasiAkses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN				0,00		0,00		119.870.000,00	27,90%	33.440.000,00	27,90%	32.822.500,00	100,00%	98,15%									
				Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		0 Pengguna		0 Pengguna		1 Pengguna		27,90%		27,90%		100,00%									
		5	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		220.893.250,00	35,35%	78.092.000,00	35,35%	76.955.000,00	100,00%	98,54%									
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		35,35%		35,35%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**		**100,25%**								
									Predikat kinerja						**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (akumulasi)**	**1.800,00 arsip**	**0,00**	**0,00 arsip**	**0,00**	**1.200,00 arsip**	**101.236.000,00**	**1000 arsip arsip**	**62.800.000,00**	**arsip**	**57.171.500,00**	**0,00%**	**95,85%**								**Ka. Bid. Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**
	Pemusnahan	**Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun**									**46.500.000,00**		**35.645.000,00**		**34.050.000,00**	**95.53%**									
		1	PenilaianPenetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun				0,00		0,00		46.500.000,00	77,00%	35.645.000,00	77,00%	34.050.000,00	100,00%	95,53%									
				Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		0 arsip		0 arsip		1.000 arsip		77,00%		77,00%		100,00%									
	Penyelamatan	**Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkandan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**									**10.660.000,00**	**7.840.0(**	**0,00 7.440.000,00**	**94.9%**											
		2	PendataanPenyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		10.660.000,00	75,00%	7.840.000,00	75,00%	7.440.000,00	100,00%	94,90%									
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		0 Daftar		0 Daftar		1 Daftar		75,00%		75,00%		100,00%									
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota									**39.136.000,00**	**18.235.0**	**00,00 14.601.500,(**	**0 80.07**											
		3	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0,00		0,00		39.136.000,00	48,33%	18.235.000,00	0,00%	14.601.500,00	0,00%	80,07%									
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		0 arsip		0 arsip		500 arsip		48,33%		44,17%		91,39%									
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang										**4.940.000,00**	**1.080.0**	**00,00 1.080.000,0(**	**100%**											

		4	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				0,00		0,00		4.940.000,00	41,88%	1.080.000,00	42,00%	1.080.000,00	100,29%	100,00%							
				Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		0 arsip		0 arsip		2 arsip		41,88%		42,00%		100,29%								
									Rata-rata capaian kinerja							**75,07%**	**92,62%**							
									Predikat kinerja						**Tinggi**		**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**		**Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP**	**Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP = layanan pengguna arsip tertutup dibagi SOP penggunaan arsip tertutup dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**3.600.000,00**	**0 %**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Ka. Bid. Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**	
	Pelayanan Izin	**Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**									**3.600.000,00**		**0,00**		**0,00**	**NAN%**								
		1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0,00		0,00		3.600.000,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan		0 SOP		0 SOP		1 SOP		10,00%		10,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**0,00%**							
									Predikat kinerja						**Sangat**	**Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan = hasil**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**11.120.489.859,00**	**A nilai**	**6.898.699.000,00**	**nilai**	**4.068.540.698,00**	**0,00%**	**76,49%**					**Sekretaris**	
					evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat																			
	Perencanaan	**Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									**68.983.244,00**		**28.779.244,00**		**22.103.000,00**	**76.8%**								
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		32.352.000,00	48,18%	13.480.000,00	0,00%	10.784.000,00	0,00%	80,00%							
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		48,18%		39,55%		82,09%								
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		32.104.500,00	49,95%	13.232.500,00	0,00%	10.351.500,00	0,00%	78,23%							
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		49,95%		33,61%		67,29%								
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.215.000,00	29,75%	350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		29,75%		7,00%		23,53%								
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-				0,00		0,00		1.237.500,00	68,33%	825.000,00	0,00%	400.000,00	0,00%	48,48%							

			SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		68,33%		36,67%		53,67%								
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		246.500,00	5,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		5,00%		0,00%		0,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.620.000,00	52,50%	684.000,00	0,00%	360.000,00	0,00%	52,63%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lporan Hasil Koordinasi Penyusunan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		52,50%		51,39%		97,89%								
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		207.744,00	100,00%	207.744,00	0,00%	207.500,00	0,00%	99,88%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**8.488.929.600,00**		**5.664.140.432,00**	**3.287.**	**26.998,00**	**58.04%**								
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		8.487.878.600,00	66,73%	5.663.828.432,00	0,00%	3.287.496.998,00	0,00%	58,04%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		76 Orang/bulan		66,73%		54,25%		81,30%								
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		140.000,00	100,00%	140.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	14,29%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		172.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		145.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		172.000,00	100,00%	172.000,00	0,00%	10.000,00	0,00%	5,81%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		172.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis				0,00		0,00		250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

			Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**31.946.000,00**	**13.295.**	**00,00**	**10.332.000,**	**0**	**77.71**								
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		190.000,00	100,00%	190.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		2,00%		2,00%								
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		190.000,00	100,00%	190.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		2,00%		2,00%								
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		190.000,00	3,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		3,00%		2,00%		66,67%								
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		190.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		30.996.000,00	57,50%	12.915.000,00	0,00%	10.332.000,00	0,00%	80,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		57,50%		50,42%		87,69%								
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		190.000,00	3,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		3,00%		3,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**63.348.000,00**		**26.395.000,00**		**21.116.000,00**	**80%**								
		21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		30.996.000,00	57,50%	12.915.000,00	0,00%	10.332.000,00	0,00%	80,00%							
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengulahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		57,50%		50,42%		87,69%								
		22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		32.352.000,00	57,50%	13.480.000,00	0,00%	10.784.000,00	0,00%	80,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		57,50%		50,42%		87,69%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**480.415.831,00**	**270.905**	**240,00**	**160.675.8**	**3,00**	**59**	**1%**							
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		21.431.000,00	52,50%	9.643.950,00	0,00%	9.639.000,00	0,00%	99,95%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		52,50%		50,00%		95,24%								
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		52.618.600,00	50,00%	23.678.370,00	0,00%	10.464.450,00	0,00%	44,19%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		50,00%		26,00%		52,00%								

		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		23.986.600,00	62,21%	13.723.036,00	0,00%	6.246.200,00	0,00%	45,52%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		62,21%		44,87%		72,13%							
		26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		0,00		113.498.786,00	63,75%	56.749.394,00	0,00%	50.695.850,00	0,00%	89,33%						
				Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		63,75%		57,50%		90,20%							
		27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		54.087.845,00	51,25%	24.339.530,00	0,00%	22.665.509,00	0,00%	93,12%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket		51,25%		50,00%		97,56%							
		28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	0,00%	1.491.750,00	0,00%	99,45%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		213.293.000,00	68,23%	141.270.960,00	0,00%	59.473.064,00	0,00%	42,10%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		68,23%		51,09%		74,88%							
	Pengadaan Ba	**ang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**69.550.000,00**		**69.550.000,00**		**0,00**	**0%**							
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		69.550.000,00	100,00%	69.550.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		90,00%		90,00%							
	Penyediaan Ja	**a Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**1.481.758.000,00**	**500.022**	**880,00**		**464.143.882,00**	**92.82%**							
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.289.000,00	73,83%	1.621.000,00	0,00%	1.014.500,00	0,00%	62,58%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		5 laporan		73,83%		73,83%		100,00%							
		32	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		6.504.000,00	50,50%	3.056.880,00	0,00%	2.132.216,00	0,00%	69,75%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,50%		42,25%		83,66%							
		33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		375.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.472.590.000,00	35,29%	495.345.000,00	0,00%	460.997.166,00	0,00%	93,07%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		35,28%		0,00%							
	Pemeliharaan	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**435.559.184,00**	**325.611**	**204,00 102.642.9**	**5,00 31**	**2%**								
		35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		89.692.300,00	58,36%	49.651.626,00	0,00%	18.944.341,00	0,00%	38,15%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		22 unit		58,36%		49,69%		85,14%							
		36	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya				0,00		0,00		138.213.700,00	60,97%	80.118.894,00	0,00%	48.816.654,00	0,00%	60,93%						

			PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		19 unit		60,97%		52,39%		85,93%							
		37	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		5.500.000,00	63,00%	3.190.000,00	0,00%	2.085.000,00	0,00%	65,36%						
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit		0 unit		10 unit		63,00%		63,00%		100,00%							
		38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		27.150.000,00	70,00%	17.647.500,00	0,00%	15.150.000,00	0,00%	85,85%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		45 unit		70,00%		70,00%		100,00%							
		39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		175.003.184,00	100,00%	175.003.184,00	0,00%	17.647.000,00	0,00%	10,08%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		91,67%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**0,00%**	**50,81%**					
Predikat kinerja															**Sangat Rendah**		**Rendah**					
Total anggaran dari seluruh program										**13.376.928.**	**50,00 7.827.797.74**	**,00 4.8**	**3.017.264,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																**14,29%**	**62,00%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Sangat Rendah**		**Rendah**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Sumber: Simoneva

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUAPPAS Perubahan Tahun 2023. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Hasil evaluasi Renja triwulan II tahun 2023 menjadi bahan pertimbangan perubahan Renja, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di triwulan berikutnya agar pencapaian target baik fisik maupun keuangan di tahun 2023 terealisasi secara maksimal.

Keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor penghambat dan faktor pendorong penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan pada triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Faktor penghambat:
    a. Belum semua tindak lanjut hasil SKM dapat dilakukan terutama pada tindak lanjut penanganan pengaduan terkait sarpras dan koleksi pustaka;
    b. Ketidaksesuaian data di katalog dengan fisik buku saat dilaksanakan pengadaan bahan pustaka;
    c. Keterbatasan pengelolaan dan sumber daya pada perpustakaan yang dibina;
    d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno;
    e. Masih kurangnya sarpras untuk alih media dan penyimpanan arsip statis;
    f. Masih ada beberapa OPD yang kurang perhatian terhadap pengelolaan arsip sehingga belum semua arsip potensi statis terdata, karena belum lengkapnya JRA (Jadwal Retensi Arsip) yang ada di OPD;

g. Adanya jenis belanja tertentu yang potensial tidak terserap maksimal karena menyesuaikan perkembangan zaman seperti biaya telepon kantor dan pengiriman surat.

- Faktor pendorong:
  a. Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target;
  b. Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
  c. Berbagai inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  d. Adanya regulasi urusan perpustakaan dan kearsipan (UU No. 43 tahun 2007, PERMENDAGRI No 18 Tahun 2020, SE Sekda Nomor 045/148/SE/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penyediaan Record Center dan Penyusutan Arsip di Perangkat Daerah/Unit Kerja) serta tambahan Sumber Daya Manusia (CPNS dan PPPK) yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
  e. Dilakukan monev terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan rencana kerja RB DPK secara berkala beserta rencana tindaklanjutnya;
  f. Berdasarkan Perwal No 63 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran SKM ada kategorisasi standar kepuasan masyarakat, dari 9 unsurnya DPK sudah berkategori baik semua;
  g. LKD sudah menyimpan arsip tertutup dan 30.825 arsip statis.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah hasil pencermatan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan. Sesuai Peraturan Walikota tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di bidang kearsipan. Adapun fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaanperpustakaan dan pengembangan budaya gemar membaca;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi perpustakaan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan arsip dan pengembangan kearsipan;
g. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan penyelamatan arsip, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan data dan sistem informasi perpustakaan kearsipan;
h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
k. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menetapkan sasaran dan indikator strategis dinas. Sasaran, indikator, dan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Sasaran, Indikator, Target, dan Realisasi Triwulan I dan II
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Triwulan I		Triwulan II	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37,50	77,21	37,50	77,21
Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	55	55	55	55
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didapatkan dari perhitungan mandiri oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dengan mengacu pada rumus dan ketentuan yang ada pada Permendagri Nomor 18 tahun 2020. Perhitungan IPLM dilaksanakan sekali dalam satu tahun, sehingga angka IPLM yang terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 77,21 ini merupakan nilai IPLM tahun 2022. Nilai pengawasan tata kelola kearsipan didasarkan pada Perka ANRI nomor 6 tahun 2019 dimana nilai pengawasan tata kelola kearsipan dihitung dari pengisian instrumen 6 aspek pengelolaan arsip pada Unit pengolah dan Unit Kearsipan sesuai struktur organisasi di OPD. Nilai pengawasan tata kelola kearsipan terealisasi sebesar 55 pada tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 masih dalam proses pelaksanaan penilaian pada masing-masing OPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil PMPRB oleh Inspektorat tahun 2022 terealisasi sebesar 85,28% atau dalam kategori A.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah:

1. RPJMN

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dan RPJMD di mana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

Perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dalam Renja ini disusun sesuai pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta juga mengacu pada Dokumen Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024. Dengan demikian penyusunan Renja diharapkan bisa selaras dengan perencanaan pembangunan secara nasional.

2. Rencana Kerja Pemerintah

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renja mengacu pada Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Tahun 2023.

Upaya percepatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional dimana target–target telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perlunya perencanaan berpedoman pada aspek ruang dan lokasi karena aspek tersebut mengarahkan seluruh dinamika pemangku kepentingan terhadap keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan. Dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik, maka seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan termasuk RTRW. Semua aspek keruangan pada dokumen perencanaan termasuk Renja harus berpedoman pada RTRW.

3. 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026 diturunkan dari visi dan misi. Visi Kota Yogyakarta untuk perencanaan jangka menengah tahun 2023-2026 adalah: **Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.**

Selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mengemban misi 1 (mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan) dan misi 6 (mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance, clean government, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum). Misi, tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.

Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Misi 1: Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance, clean government, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Tujuan PD	Sasaran PD
Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat
Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3.3. Program dan Kegiatan

Perubahan Renja tahun 2023 disusun mendasarkan pada PERMENDAGRI 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan 6 (enam) program, 20 (dua puluh) kegiatan, dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 2. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
	3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
	2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	3. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

	4. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
4. Program Perizinan Penggunaan Arsip	1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
5. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 4. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 7. Pengembangan Bahan Pustaka 8. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
6. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
	2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUAPPAS Perubahan Tahun 2023. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja hingga triwulan II digunakan sebagai dasar dilakukannya perubahan Renja. Pada tahun 2023 ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta merubah Renja dengan penyesuaian-penyesuaian. Mengurangi anggaran yang tidak terserap atau terlalu banyak saat perencanaan awal menambah kegiatan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, dan menyesuaikan keluaran/output sesuai perubahan anggaran. Dengan penyesuaian penganggaran sesuai hasil evaluasi sampai dengan triwulan II ini, maka pagu anggaran yang semula Rp.13.376.928.350,00 naik menjadi Rp.14.848.212.309,00

Beberapa perubahan yang dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan gaji dan tunjangan ASN yang disesuaikan dengan data penggajian dari BPKAD;
2. Pengurangan belanja bahan logistik, belanja peralatan dan perlengkapan kantor, dan belanja telepon yang diperkirakan sudah berlebih sampai dengan akhir tahun;
3. Penambahan belanja modal barang, belanja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, penambahan kegiatan maupun belanja yang belum dianggarkan sebelumnya. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta secara terinci tersaji dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**1,417,928,241**	**1,402,460,050**					**1,350,003,035**
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**1,372,326,241**	**1,356,858,050**					**1,279,966,435**
2	**23**	**002**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,264,861,241**	**1,199,803,050**					**1,195,265,560**
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %	79,304,241	86,219,050			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	73,886,200
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul									Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %									Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	

2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100 %	100 %	998,332,000	903,364,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	1,007,134,860
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul								Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %								Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	1,600,000
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul								Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %								Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100 %	100 %	3,600,000	3,600,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	16,349,500
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul								Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %								Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	4 Orang	4 Orang	100 %	100 %	5,520,000	5,835,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	1,800,000

					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1800 judul	35126 judul									Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %									Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	2 Layanan	2 Layanan	100 %	100 %	58,840,000	78,520,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	16,200,000
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul									Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %									Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	1800 Eksemplar	1800 Eksemplar	100 %	100 %	112,825,000	112,825,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	75,090,000
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul									Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %									Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	4,440,000	7,440,000			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	3,205,000
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul									Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	

					Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %								Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	**23**	**002**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**107,465,000**	**157,055,000**					**84,700,875**
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	3 Lokus	3 Lokus	100 %	100 %	26,551,000	38,886,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	8,818,000
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul								Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %								Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	5 Orang	5 Orang	100 %	100 %	29,460,000	33,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	28,600,000
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan				1800 judul	35126 judul								Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %								Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	78 skala 0 - 100	78 skala 0 - 100	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	100 %	100 %	51,454,000	84,709,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	78 skala 0 - 100	47,282,875

						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	yang Dikembangkan			1800 judul	35126 judul							Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	35126 judul	
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP				20 %	35 %							Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	35 %	
2	**23**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**										**45,602,000**	**45,602,000**					**70,036,600**
2	**23**	**003**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**										**43,602,000**	**43,602,000**					**68,036,600**
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Tersedianya informasi dan usaha pelestarian naskah kuno bagi masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		1 naskah	1 Orang	1 orang	100 %	100 %	43,602,000	43,602,000			Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	1 naskah	68,036,600
2	**23**	**003**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**2,000,000**	**2,000,000**					**2,000,000**
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Tersedia dan terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		1 naskah	10 Eksemplar	10 Eksemplar	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000			Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	1 naskah	2,000,000
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**										**11,959,000,109**	**13,445,752,259**					**12,373,454,603**
2	**24**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**11,120,489,859**	**12,261,397,509**					**11,586,363,619**
2	**24**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**68,983,244**	**68,983,244**					**56,099,508**

2	24	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	32,352,000	32,352,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	20,000
2	24	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	32,104,500	32,104,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	55,879,508
2	24	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,215,000	1,215,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	45,000
2	24	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,237,500	1,237,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	45,000

2	24	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	246,500	246,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	45,000
2	24	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,620,000	1,620,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	45,000
2	24	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	207,744	207,744			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	20,000
2	**24**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,488,929,600**	**9,378,129,600**					**9,020,575,000**
2	24	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	100 %	100 %	8,487,878,600	9,377,078,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	9,020,515,000

2	24	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	140,000	140,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	172,000	172,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	145,000	145,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	172,000	172,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	172,000	172,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000

2	24	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	250,000	250,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	**24**	**001**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**31,946,000**	**31,946,000**					**27,651,200**
2	24	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	190,000	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	190,000	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	190,000	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	190,000	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000
2	24	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	30,996,000	30,996,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	27,601,200
2	24	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	190,000	190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	10,000

2	**24**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**63,348,000**	**63,348,000**					**56,457,000**
2	24	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	30,996,000	30,996,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	27,601,200
2	24	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Kepegawaian	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	32,352,000	32,352,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	28,855,800
2	**24**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**480,415,831**	**454,793,081**					**371,839,411**
2	24	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	21,431,000	22,131,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	17,921,000
2	24	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	52,618,600	32,935,100			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	52,618,600
2	24	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	23,986,600	21,986,600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	22,463,800
2	24	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	113,498,786	98,972,936			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	107,902,416

2	24	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	54,087,845	48,974,445			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	55,636,595
2	24	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	1,500,000
2	24	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	213,293,000	228,293,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	113,797,000
2	**24**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**69,550,000**	**156,133,900**					**12,000,000**
2	24	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	8 Unit	41 Unit	100 %	100 %	69,550,000	156,133,900			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	12,000,000
2	**24**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,481,758,000**	**1,475,921,000**					**1,674,184,200**
2	24	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Terhadap Kelancaran Jasa Penunjang Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	2,289,000	1,789,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	39,390,200
2	24	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Jasa Penunjang Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	6,504,000	5,424,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	8,124,000

2	24	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Jasa Penunjang Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	375,000	375,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	375,000
2	24	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Jasa Penunjang Perkantoran	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,472,590,000	1,468,333,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	1,626,295,000
2	**24**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**435,559,184**	**632,142,684**					**367,557,300**
2	24	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	89,692,300	85,313,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	100,055,000
2	24	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	19 Unit	19 Unit	100 %	100 %	138,213,700	139,325,700			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	149,852,300
2	24	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	5,500,000	5,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	5,500,000

2	24	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	45 Unit	52 Unit	100 %	100 %	27,150,000	32,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	27,150,000
2	24	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Terhadap Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	175,003,184	370,003,184			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai	85,000,000
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											733,674,250	760,526,750					695,109,784
2	**24**	**002**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**107,160,000**	**107,160,000**					**107,160,000**
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip statis terdigitalisasi Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Terselenggaranya penataan arsip dinamis sesuai dengan kaidah kearsipan dan pengawasan kearsipan internal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip 	1000 arsip 68 %	2 Berkas	2 Berkas	100 %	100 %	51,030,000	51,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah arsip statis terdigitalisasi Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	1000 arsip 68 %	51,030,000
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis terdigitalisasi Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penataan arsip dinamis sesuai dengan kaidah kearsipan dan pengawasan kearsipan internal	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip 	1000 arsip 68 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	56,130,000	56,130,000			Jumlah arsip statis terdigitalisasi Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	1000 arsip 68 %	56,130,000
2	**24**	**002**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**											**285,751,000**	**283,251,000**					**311,874,200**
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi,	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi,	Terdatanya Arsip Terjaga dan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip	1000 arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	100 %	100 %	285,751,000	283,251,000	PENDAPATAN ASLI		Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1000 arsip	311,874,200

					dan Akses Arsip Statis	Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terselenggaranya Pengolahan Arsip Statis Sesuai dengan Kaidah Kearsipan			68 %							DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	68 %	
2	**24**	**002**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**											**340,763,250**	**370,115,750**					**276,075,584**
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tersedianya akses, informasi, dan layanan pada lembaga kearsipan daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip	1000 arsip	1 Penguna	1 Penguna	100 %	100 %	119,870,000	118,702,500			Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1000 arsip	77,989,400
						Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik					68 %									Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	68 %	
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya akses, informasi, dan layanan pada lembaga kearsipan daerah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1000 arsip	1000 arsip	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	220,893,250	251,413,250			Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1000 arsip	198,086,184
						Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik					68 %									Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	68 %	
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**											**101,236,000**	**420,228,000**					**90,121,200**
2	**24**	**003**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**											**46,500,000**	**46,470,000**					**43,100,000**

2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya pemusnahan arsip sesuai peraturan yang berlaku	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1200 arsip	1200 arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	100 %	100 %	46,500,000	46,470,000			Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	43,100,000
2	**24**	**003**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**											**10,660,000**	**10,480,000**					**10,660,000**
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1200 arsip	1200 arsip	1 Daftar	1 Daftar	100 %	100 %	10,660,000	10,480,000			Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	10,660,000
2	**24**	**003**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**											**39,136,000**	**358,638,000**					**34,321,200**
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlindungiya fisik arsip asli	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1200 arsip	1200 arsip	500 Arsip	500 Arsip	100 %	100 %	39,136,000	358,638,000			Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	34,321,200

2	**24**	**003**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**										**4,940,000**	**4,640,000**					**2,040,000**
2	24	3	2.05	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Tersedianya daftar pencarian arsip statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	1200 arsip	1200 arsip	2 Arsip	2 Arsip	100 %	100 %	4,940,000	4,640,000			Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1200 arsip	2,040,000
2	**24**	**4**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**										**3,600,000**	**3,600,000**					**1,860,000**
2	**24**	**004**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**										**3,600,000**	**3,600,000**					**1,860,000**
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase arsip tertutup yang dilayankan	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Tersedianya SOP perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/ Kota	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	100 %	100 %	1 SOP	1 SOP	100 %	100 %	3,600,000	3,600,000			Persentase arsip tertutup yang dilayankan	100 %	1,860,000
TOTAL															**13,376,928,350**	**14,848,212,309**					**13,723,457,638**

BAB V
PENUTUP

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 disusun mengacu pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan penganggaran sesuai kebutuhan dan sebagai solusi bagi permasalahan yang terjadi sesuai dinamika saat ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Yogyakarta, Agustus 2023
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Yogyakarta

ttd

DEDI BUDIONO, M. Pd.
NIP. 196708041999031007



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

DINAS PARIWISATA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN 1

1.2 DASAR PERTIMBANGAN 1

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 3

BAB III RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 9

BAB IV PENUTUP 19

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 4

Tabel 3. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan maksud untuk menetapkan dokumen perubahan rencana kerja, yang di dalamnya berisikan program, kegiatan, sub kegiatan tolak ukur serta target pembangunan daerah dalam bidang pariwisata. Dokumen Rencana Kerja ini menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk periode tahun 2023.

Tujuan:

1. Sebagai pedoman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam menjabarkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Merumuskan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Tolak Ukur dan Target Kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta selama Tahun 2023.
3. Merupakan acuan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang pariwisata Tahun 2023.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN

Merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, mengajukan usulan Perubahan Anggaran Tahun 2023, dengan mempertimbangkan beberapa poin, antara lain:

1. Menindaklanjuti SE Walikota Nomor 050/2821/SE/2023 Tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
2. Adanya perubahan pelaksanaan pada beberapa rekening belanja, agar dalam pelaksanaannya bisa optimal, efektif dan efisien.
3. Ada beberapa penjelasan dalam uraian yang tidak sinkron dengan jumlah
4. Menyesuaikan beberapa belanja sesuai rekening belanja yang tersedia pada SIPD.
5. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II tahun 2023, menjadi acuan untuk melakukan perubahan pada program/kegiatan/sub kegiatan dan tolak ukur serta target, agar dapat tercapai sasaran perangkat daerah Dinas Pariwisata Tahun 2023. Sejalan dengan adanya

program/kegiatan/sub kegiatan dan tolak ukur serta target, agar dapat tercapai sasaran perangkat daerah Dinas Pariwisata Tahun 2023. Sejalan dengan adanya kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah upaya pemerintah daerah dalam rangka menguatkan tematik pembangunan tahun 2023 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II. Hasil evaluasi Triwulan II tersebut diharapkan dapat memberi gambaran strategi yang harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dalam waktu yang tersisa di Tahun 2023. Strategi tersebut diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditetapkan target kinerjanya. Berikut Tabel 2.1 yang memuat hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rata-Rata Belanja Wisatawan	1.200.000 rupiah
2	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Length of Stay (LoS)	1,7 hari
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Indeks kualitas atraksi pariwisata**	**Hasil survei wisata**	**106,91**	**0**	**88,76**	**0**	**92,35**	**1.970.943.624,00**	**88,76**	**867.812.594,00**	**88,76**	**734.142.000,00**	**100%**	**84,60%**					**Kepala Bidang Daya Tarik**	
			Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	**Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%**	**64,00%**	**0**	**60,98%**	**0**	**58,80%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								**1.970.943.624,00**		**867.812.594,00**		**734.142.000,00**		**84.6%**						
		1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		198.900.000,00	45,00%	68.550.000,00	45,00%	60.380.000,00	100,00%	88,08%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
		2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		258.669.850,00	86,86%	201.740.000,00	86,86%	192.670.000,00	100,00%	95,50%						
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi		0 Lokasi		0 Lokasi		18 Lokasi		0,00%		86,86%		0,00%							
		3 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		185.630.000,00	49,37%	80.442.500,00	97,30%	58.548.000,00	197,08%	72,78%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yangTersedia dan Terpelihara		0 Paket		0 Paket		2 Paket		0,00%		97,30%		0,00%							
		4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		736.090.654,00	61,92%	395.018.654,00	61,92%	388.130.000,00	100,00%	98,26%						
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		61,92%		0,00%							
		5 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		591.653.120,00	21,72%	122.061.440,00	20,29%	34.414.000,00	93,42%	28,19%						
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Lokasi		0 Lokasi		17 Lokasi		0,00%		20,29%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**118,10%**	**76,56%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara**	**Jumlah wisatawan mancanegara di tahun n**	**300,00 wisatawan**	**0**	**106.219,00 wisatawan**	**0**	**108,00 wisatawan**	**4.528.018.970,00**	**54.000 wisatawan**	**2.299.610.250,00**	**91.328 wisatawan**	**972.573.591,00**	**169%**	**42,29%**					**Kepala Bidang Pemasaran**	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	**Jumlah wisatawan nusantara di tahun n**	**2,70 wisatawan**	**0**	**7.338.675 wisatawan**	**0**	**1.692.000 wisatawan**	**0**	**846.000**	**0**	**1.986.021**	**0**	**0,23%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pemasaran**	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya TarikDestinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								**4.528.018.970,00**		**2.299.610.250,00**		**972.573.591,00**		**42.29%**						
		1 Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0		0		368.020.000,00	45,00%	125.700.000,00	37,83%	34.250.000,00	84,07%	27,25%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		0,00%		37,83%		0,00%							
		2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		3.198.982.400,00	58,09%	1.759.546.750,00	47,23%	678.768.328,00	81,30%	38,58%						
			Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		0,00%		47,23%		0,00%							
		3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri				0		0		851.016.570,00	45,61%	304.363.500,00	49,18%	213.495.263,00	107,83%	70,14%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		49,18%		0,00%							
		4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0		0		110.000.000,00	100,00%	110.000.000,00	100,00%	46.060.000,00	100,00%	41,87%						
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (TPO & Java Promo)		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**93,30%**	**44,46%**						
								Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Presentase lembaga Sumber Daya Pariwisata berbasis wilayah yang aktif**	**Jumlah lembaga Sumber Daya Pariwisata berbasis wilayah yang aktif dibagi jumlah lembaga Sumber Daya Pariwisata x 100%**	**30,00%**	**0**		**0**	**20,00%**	**2.495.422.800,00**	**10% %**	**1.072.092.550,00**	**10% %**	**708.140.000,00**	**100%**	**66,05%**					**Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata**	
			Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi	**Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata x 100%**	**57,00%**	**0**	**56,55%**	**0**	**56,83%**	**0**	**56,83%**	**0**	**56,55%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Industri**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								**2.495.422.800,00**		**1.072.092.550,00**		**708.140.000,00**		**66.05%**						
		1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				0		0		247.567.000,00	45,00%	91.982.000,00	45,00%	83.847.000,00	100,00%	91,16%						
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		0 orang		0 orang		150 orang		45,00%		45,00%		100,00%							
		2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				0		0		1.020.038.800,00	44,58%	414.778.550,00	50,00%	291.724.000,00	112,16%	70,33%						
			Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		0 orang		0 orang		480 orang		0,00%		50,00%		0,00%							
		3 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata				0		0		126.900.000,00	33,00%	23.460.000,00	33,00%	23.460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		0 orang		0 orang		60 orang		33,00%		33,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		4 Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0		0		900.917.000,00	64,09%	443.770.000,00	66,82%	220.670.000,00	104,26%	49,73%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		66,82%		0,00%							
		5 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				0		0		200.000.000,00	52,00%	98.102.000,00	49,00%	88.439.000,00	94,23%	90,15%						
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		52,00%		49,00%		94,23%							
										Rata-rata capaian kinerja					**102,13%**	**80,27%**						
										Predikat kinerja					**Sangat**	**Tinggi**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk DInas Pariwisata**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**6.170.730.945,00**	**A Nilai**	**4.063.094.613,00**	**A Nilai**	**2.998.067.902,00**	**100%**	**72,95%**					**Sekretaris**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**45.902.000,00**		**17.485.000,00**		**17.485.000,00**		**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		35.072.000,00	47,00%	15.135.000,00	47,00%	15.135.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		47,00%		47,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.450.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		5,00%		5,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.450.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		530.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		4.500.000,00	35,00%	625.000,00	35,00%	625.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		35,00%		35,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		2.370.000,00	75,00%	1.195.000,00	75,00%	1.195.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.613.576.000,00**		**2.981.601.168,00**		**2.408.469.476,00**		**80.78%**						
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4.606.443.000,00	75,00%	2.977.045.168,00	75,00%	2.404.132.476,00	100,00%	80,76%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		28 Orang/bulan		75,00%		75,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		1.158.000,00	55,00%	575.000,00	55,00%	572.000,00	100,00%	99,48%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1.443.000,00	90,00%	1.278.000,00	90,00%	1.177.000,00	100,00%	92,10%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		90,00%		90,00%		100,00%							
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		782.000,00	75,00%	506.000,00	75,00%	506.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%							
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		539.000,00	50,00%	242.000,00	50,00%	242.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		2.351.000,00	65,00%	1.403.000,00	65,00%	1.288.000,00	100,00%	91,80%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		65,00%		65,00%		100,00%							
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		860.000,00	70,00%	552.000,00	70,00%	552.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		70,00%		70,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**268.970.000,00**		**112.400.500,00**		**109.811.660,00**		**97.7%**						
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		980.000,00	55,00%	490.000,00	55,00%	337.500,00	100,00%	68,88%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		265.000.000,00	45,00%	110.416.500,00	45,00%	108.416.160,00	100,00%	98,19%						
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		1.740.000,00	55,00%	870.000,00	55,00%	690.000,00	100,00%	79,31%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian BarangMilik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		5 laporan		55,00%		55,00%		100,00%							
		18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.250.000,00	60,00%	624.000,00	60,00%	368.000,00	100,00%	58,97%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		60,00%		60,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**1.450.000,00**		**724.000,00**		**460.000,00**		**63.54%**						
		19 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		1.450.000,00	60,00%	724.000,00	60,00%	460.000,00	100,00%	63,54%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**468.584.945,00**		**361.904.945,00**		**199.204.075,00**		**55.04%**						
		20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		4.858.000,00	100,00%	4.858.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	93,66%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		99.843.945,00	100,00%	99.563.945,00	97,00%	84.513.945,00	97,00%	84,88%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		97,00%		97,00%							
		22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		22.213.000,00	87,00%	18.087.000,00	87,00%	15.710.000,00	100,00%	86,86%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		87,00%		87,00%		100,00%							
		23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		2.640.000,00	47,00%	1.100.000,00	47,00%	795.000,00	100,00%	72,27%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		47,00%		47,00%		100,00%							
		24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		329.940.000,00	72,00%	229.206.000,00	72,00%	84.885.130,00	100,00%	37,03%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		111 laporan		72,00%		72,00%		100,00%							
		25 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	100,00%	8.750.000,00	100,00%	96,26%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**152.898.000,00**		**152.898.000,00**		**128.060.000,00**		**83.76%**						
		26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		152.898.000,00	100,00%	152.898.000,00	98,00%	128.060.000,00	98,00%	83,76%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		38 unit		100,00%		98,00%		98,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**189.300.000,00**		**87.730.000,00**		**84.167.242,00**		**95.94%**						
		27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		186.300.000,00	50,00%	84.730.000,00	50,00%	81.167.242,00	100,00%	95,80%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		3 laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**430.050.000,00**		**348.351.000,00**		**50.410.449,00**		**14.47%**						
		29 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		28.700.000,00	50,00%	13.600.000,00	50,00%	9.585.826,00	100,00%	70,48%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		50,00%		50,00%		100,00%							
		30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		23.350.000,00	43,00%	9.375.000,00	43,00%	6.450.000,00	100,00%	68,80%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		44 unit		43,00%		43,00%		100,00%							
		31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		275.000.000,00	100,00%	275.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		32 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		103.000.000,00	58,00%	50.376.000,00	58,00%	34.374.623,00	100,00%	68,24%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		10 unit		58,00%		58,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,83%**	**79,70%**						
								Predikat kinerja							**Sangat**	**Tinggi**						
								Total anggaran dari seluruh program		**15.165.116.339,00**		**8.302.610.007,00**		**5.412.923.493,00**								
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**101,58%**	**65,20%**					
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

BAB III

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2023 memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan dan di entri pada SIPD, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**15,165,116,339**	**17,559,520,423**					**13,957,715,954**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,170,730,945**	**6,637,025,329**					**6,128,451,390**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**45,902,000**	**150,452,000**					**42,403,040**
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	35,072,000	139,622,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	30,653,040
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,450,000	1,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,450,000	1,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	530,000	530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	530,000	530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,500,000	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	4,500,000
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,370,000	2,370,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,613,576,000**	**4,853,859,000**					**4,653,807,000**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100 %	100 %	4,606,443,000	4,844,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	4,637,607,000
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,158,000	1,158,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000
3	26	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,443,000	2,233,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,500,000
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	782,000	1,058,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,400,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	539,000	539,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,351,000	3,386,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	8,700,000
3	26	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	860,000	860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000
3	**26**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**268,970,000**	**264,168,784**					**255,500,000**
3	26	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	980,000	980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,000,000
3	26	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	265,000,000	260,198,784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	250,000,000
3	26	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	1,740,000	1,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,500,000
3	26	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,000,000
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1,450,000**	**1,450,000**					**2,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselesaikannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,450,000	1,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,500,000
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**468,584,945**	**513,500,545**					**442,400,450**
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,858,000	8,902,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	3,060,000
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	99,843,945	119,418,445	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	95,377,650
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	22,213,000	28,411,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	19,223,800
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,640,000	1,908,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,400,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	111 Laporan	111 Laporan	100 %	100 %	329,940,000	336,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	320,000,000
3	26	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	9,090,000	18,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,339,000
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**152,898,000**	**188,575,000**					**237,890,900**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	38 Unit	38 Unit	100 %	100 %	152,898,000	188,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	237,890,900
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**189,300,000**	**187,420,000**					**21,300,000**
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	5,000,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	186,300,000	184,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	16,300,000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**430,050,000**	**477,600,000**					**472,650,000**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	28,700,000	28,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	23,200,000
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah		A Nilai	A Nilai		10 Unit	100 %	100 %	0	103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	103,000,000
3	26	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	103,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	71,450,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	44 Unit	44 Unit	100 %	100 %	23,350,000	20,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	15,000,000
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	275,000,000	325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	260,000,000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**1,970,943,624**	**2,446,185,624**					**1,724,537,800**
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**											**1,970,943,624**	**2,446,185,624**					**1,724,537,800**
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	3 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	198,900,000	288,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	214,755,000
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	18 Lokasi	24 Lokasi	100 %	100 %	258,669,850	315,029,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	398,645,800
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	2 Paket	4 Paket	100 %	100 %	185,630,000	473,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	380,770,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	2 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	736,090,654	736,090,654			Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	327,500,000
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	17 Lokasi	19 Lokasi	100 %	100 %	591,653,120	632,885,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	402,867,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**4,528,018,970**	**5,066,724,970**					**3,326,295,964**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**4,528,018,970**	**5,066,724,970**					**3,326,295,964**
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	368,020,000	513,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	299,620,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	3,198,982,400	3,421,842,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	2,098,849,000
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	3 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	851,016,570	1,025,802,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	816,622,490

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	110,000,000	106,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	111,204,474
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**2,495,422,800**	**3,409,584,500**					**2,778,430,800**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**2,495,422,800**	**3,409,584,500**					**2,778,430,800**
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	150 Orang	190 Orang	100 %	100 %	247,567,000	295,267,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	931,492,000
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	480 Orang	520 Orang	100 %	100 %	1,020,038,800	1,095,702,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	1,020,038,800
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	60 Orang	60 Orang	100 %	100 %	126,900,000	124,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	126,900,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	900,917,000	1,659,815,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	500,000,000
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tercapainnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	200,000,000	234,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	200,000,000
TOTAL																**15,165,116,339**	**17,559,520,423**					**13,957,715,954**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, yang memuat perubahan program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif. Selanjutnya dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 merupakan lanjutan pedoman penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, melanjutkan pelaksanaan dengan pelibatan dan partisipasi aktif seluruh *Stakeholder* sektor pariwisata Kota Yogyakarta, dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, juga merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Yogyakarta, Juli 2023

Kepala Dinas Pariwisata

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

WAHYU HENDRATMOKO, S.E, M.M.

NIP. 197411021998031004

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN

2023







DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

Jl. Pabringan No. 1 Yogyakarta, No. Telp/Faks (0274) 515871
www.perdagangan.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan pengelolaannya dalam tahun berjalan berdasarkan pertimbangan, evaluasi pelaksanaan dan arah kebijakan perubahan renja 2023 dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 telah memuat tujuan, dasar pertimbangan, evaluasi pelaksanaan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah (PD) selama satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam penyusunan dokumen ini kami telah berupaya secara maksimal, namun demikian tentunya masih ada hal-hal yang belum sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, untuk itu masih diperlukan masukan dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Agustus 2023

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Yogyakarta

VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P
NIP. 196912031989032022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan 5
1.5. Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 7
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 21
BAB IV PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.0 Capain Program dan Kegiatan sampai denga TW II TA 2023 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 10
Tabel 2.1 Evaluasi terhadap hasil renja Tahun 2023 sampai Triwulan II 13
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan dinamika dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah mempertimbangkan berbagai pemasalahan dan evasluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan.

Penyusunan Perubahanan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 juga mempertimbangkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengakses layanan, berpartisipasi mengikuti kegiatan, menyampaikan

usulan/masukan, dan mendapatkan manfaat dari perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan memuat indikator sasaran perangkat daerah, program kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan yang bersumber dari APBD. Dalam hal ini, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2023 disusun berdasarkan dinamika dan arah kebijakan penyelenggaraan Perubahan APBD dalam rangka mencapai sasaran dan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DjawaTengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Th 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai dokumen acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja dan sasaran sesuai hasil evaluasi Renja pada triwulan kedua tahun 2023.

Rencana kerja ini menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perubahan perencanaan tahunan Dinas Perdagangan tahun 2023;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan perubahan renja tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perubahan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 050/2821/SE/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penyusunan Perubahan Rkpd Dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain :

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu dan skala prioritas pelaksanaan APBD Perubahan;
3. Sasaran dan Capaian kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah disebabkan karena kondisi yang berubah dari penetapan sebelumnya.
4. Hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Tribulan II tahun 2023, menjadi acuan untuk melakukan perubahan pada program/kegiatan/sub kegiatan, agar dapat tercapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan

Berbagai pertimbangan diatas diperlukan untuk mentukan arah kebijakan dalam penyusunan perubahan rencana kinerja tahun 2023 dengan memperhatikan capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan adanya kebijakan nasional, maka arah kebijakan pembangunan kota yogyakarta ditujukan untuk ***Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan*** menjadi prioritas terutama dalam

peningkatan perekonomian daerah diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi wilayah.

1.5. Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Tujuan Dinas Perdagangan tahun 2023 adalah Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dengan indikator tujuan **"Indeks kinerja perdagangan meningkat**" dengan formulasi (0,2 x kinerja revitalisasi pasar + 0,2 x kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya + 0,2 x kinerja pengendalian harga bahan pokok + 0,2 x kinerja pembinaan UKM 0,2 x kinerja tera UTTP)

Sasaran Strategis Dinas Perdagangan pada tahun 2023 adalah Kinerja Sektor Perdagangan Meningkat diukur **dengan "indeks kinerja perdagangan"**. Pada tahun 2023 target indeks kinerja perdagangan dengan nilai prosentase 50,81%, setelah dilakukan.

Sasaran dan target Dinas Perdagangan tahun 2023 mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dengan indikator berikut ini :

Sasaran Strategis Dinas Perdagangan

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran Tahun 2023
Kinerja Sektor Perdagangan Meningkat	Indeks Kinerja Perdagangan	50.81

Kinerja Sasaran Program Dinas Perdagangan

Program Perangkat Daerah (PD)	Indikator Sasaran Program PD	Target Program Tahun 2023
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	31.03%
	Pendapatan retribusi pasar	12.478.802.500 rupiah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.311.103.336,16 rupiah
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95 %

Target sasaran dan indikator program diatas merupakan awal perencanaan untuk periode 2023-2026 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Sasaran strategis dindag tahun 2023 merupakan awal perencanaan periode RPJMD 2023-2026 ditetapkan berdasarkan evaluasi dan dinamika perkembangan di tahun sebelumnya. Pada

tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan Monitoring dan evaluasi sampai dengan tribulan II tahun 2023 menjadi acuan Dinas Perdagangan untuk melakukan langkah selanjunya yang efektif dan efisien untuk melakukan perubahan target kinerja dan anggaran pada program/kegiatan dan sub kegiatan dengan harapan capaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan dapat memenuhi target yang direncanakan.

Monitoing dan evaluasi sampai dengan tribulan II Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui progres pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan renja Dinas Perdagangan tahun 2023, beberapa pertimbangan berdasarkan dinamika sebagai berikut:

- Perkembangan dinamika pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
- Perkembangan dinamika pelaksanaan monitoring dan evaluasi tribulan II tahun 2023 atas capaian sasaran, indikator, target kinerja dan anggaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai acuan perubahan rencana kerja tahun 2023.
- Perubahan target kinerja dan anggaran program kegiatan untuk mengoptimalkan capaian di perubahan renja tahun 2023
- Penerapan kebijakan umum anggaran pemerintah kota Yogyakarta

Kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdaganagan ditujukan untuk menjabarkan kinerja sasaran, tujuan, visi dan misi daerah dan perangkat daerah sesuai dengan rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan.

Capaian program/kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan tirbulan II tahun 2023 hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.0. rincian capaian program/kegiatan/sub kegiatan antara lain berikut ini:

Tabel 2.0.
capaian program/kegiatan/sub kegiatan
Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi Keuangan	Prosentase Realisasi Fisik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**40.708.141.936,00**	**17.003.947.200,00**	**41,77**		
3.30.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**20.092.136.403,00**	**8.407.504.326,00**	**41,84**		
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.308.500,00**	**3.870.000,00**	**29,08**		
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.678.000,00	1.200.000,00	**71,51**	96,00	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.071.000,00	600.000,00	**56,02**	80,00	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.071.000,00	600.000,00	**56,02**	50,00	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.071.000,00	-	-	43,98	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.071.000,00	-	-	-	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.774.000,00	-	-	50,00	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.572.500,00	1.470.000,00	**41,15**	58,43	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.675.262.730,00**	**5.342.779.608,00**	**50,05**		
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	10.671.302.730,00	5.342.239.608,00	**50,06**	60,00	
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	540.000,00	270.000,00	**50,00**	50,00	
3.30.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.080.000,00	270.000,00	**25,00**	50,00	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	-	-	-	
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000,00	-	-	100,00	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	540.000,00	-	-	50,00	
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000,00	-	-	100,00	
3.30.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.800.000,00**	**1.600.000,00**	**33,33**		
3.30.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	400.000,00	**50,00**	50,00	
3.30.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	400.000,00	**50,00**	50,00	
3.30.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	-	-	-	
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000,00	400.000,00	**50,00**	50,00	
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000,00	-	-	-	
3.30.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	400.000,00	**50,00**	50,00	
3.30.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**800.000,00**	-	-		
3.30.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	800.000,00		-	50,00	
3.30.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**273.199.000,00**	**106.896.542,00**	**39,13**		
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.820.000,00	48.013.700,00	**78,94**	86,00	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.389.000,00	12.620.500,00	**77,01**	80,28	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan					

	dan Penggandaan	42.378.000,00	18.857.600,00	44,50	59,78	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	-	-	-	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	149.112.000,00	27.404.742,00	18,38	40,00	
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18.500.000,00**	**-**	**-**		
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000,00	-	-	-	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.716.440.715,00**	**845.200.443,00**	**49,24**		
3.30.01.2.08.01	Penyediaan JasaSurat Menyurat	11.886.000,00	10.250.000,00	86,24	85,53	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.221.979.731,00	631.845.443,00	51,71	55,41	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.574.984,00	203.105.000,00	42,09	44,79	
3.30.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.143.831.110,00**	**434.082.793,00**	**37,95**		
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	168.469.110,00	68.905.200,00	40,90	45,00	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	507.260.000,00	186.857.624,00	36,84	40,00	
3.30.01.2.09.06	PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya	68.670.000,00	26.795.000,00	39,02	40,00	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.432.000,00	151.524.969,00	37,94	37,94	
3.30.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.245.994.348,00**	**1.673.074.940,00**	**26,79**		
3.30.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.245.994.348,00	1.673.074.940,00	26,79	30,12	
3.30.02.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**204.766.750,00**	**129.242.950,00**	**63,12**		
3.30.01.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya diTingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**204.766.750,00**	**129.242.950,00**	**63,12**		
3.30.01.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna AkhirBahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	204.766.750,00	129.242.950,00	63,12	67,41	
3.30.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**19.144.172.733,00**	**8.082.055.774,00**	**42,22**		
3.30.03.2.01.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**6.494.604.031,00**	**2.984.570.676,00**	**45,95**		
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	943.078.350,00	428.520.276,00	45,44	47,50	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.551.525.681,00	2.556.050.400,00	46,04		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (PL) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT I) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT II) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT PASTY)	1.452.377.792,00 1.671.429.920,00 1.699.846.760,00 727.871.209,00	1.006.093.250,00 562.795.750,00 634.934.500,00 352.226.900,00	69,27 33,67 37,35 48,39	84,98 37,81 49,00 50,70	
3.30.03.2.02.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**12.649.568.702,00**	**5.097.485.098,00**	**40,30**		

3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12.649.568.702,00	5.097.485.098,00	**40,30**	45,46	
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**163.950.200,00**	**81.190.000,00**	**49,52**		
3.30.04.2.01.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**24.278.200,00**	**20.878.000,00**	**85,99**		
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24.278.200,00	20.878.000,00	**85,99**	93,41	
3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**139.672.000,00**	**60.312.000,00**	**43,18**		
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	139.672.000,00	60.312.000,00	**43,18**	43,18	
3.30.06.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**267.021.100,00**	**148.126.150,00**	**55,47**		
3.30.06.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**267.021.100,00**	**148.126.150,00**	**55,47**		
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	188.916.100,00	92.404.550,00	**48,91**	48,91	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	78.105.000,00	55.721.600,00	**71,34**	71,34	
3.30.07.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**836.094.750,00**	**155.828.000,00**	**18,64**		
3.30.07.2.01.	**Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**836.094.750,00**	**155.828.000,00**	**18,64**		
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	713.968.250,00	80.333.000,00	**11,25**	13,99	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	122.126.500,00	75.495.000,00	**61,82**	76,70	
JUMLAH		**40.708.141.936,00**	**17.003.947.200,00**	**41,77**		

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan hingga triwulan II tahun 2023 untuk melihat realisasi program dan kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberi gambaran langkah-langkah yang harus ditempuh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam enam bulan ke depan. Langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan semua kegiatan yang sudah ditetapkan target keluarannya.

Hasil evaluasi dari program-program dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1 dengan deksripsi sebagai berikut:

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	50.81 persen
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya**	**((Kasus(n-1) - Kasus(n))/Kasus(n-1)) x 100%**	**20,00%**	**0**	**20,00%**	**0**	**20,00%**	**204.766.750,00**	**0%**	**138.040.000,00**	**0%**	**129.242.950,00**	**0,00%**	**93,63%**					**Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan**	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan DistribusiPengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah KabupatenKota								**204.766.750,00**		**138.040.000,00**		**129.242.950,00**		**93.63%**						
		1 Pengawasan DistribusiPengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2maupun Produsen B2 (P-B2)				0		0		204.766.750,00	67,41%	138.040.000,00	67,41%	129.242.950,00	100,00%	93,63%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (PB2)		0 Laporan		0 Laporan		10 Laporan		67,41%		67,41%		100,00%							
															Rata-rata capaian kinerja							
															Predikat kinerja							
	Meningkatnya	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI**	**Persentase pasar yang memenuhi**	**(Jumlah pasar yang**	**34,48%**	**0**	**27,60%**	**0**	**31,03%**	**19.144.172.733,00**	**28.60 %**	**9.155.702.742,00**	**28.60 %**	**8.082.055.774,00**	**100%**	**105,20 %**					**Kepala Bidang**	

	Kinerja sektor perdagangan	**PERDAGANGAN**		**standar pasar sehat**	**memenuhi pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%**																	**Pasar Rakyat**	
				Pendapatan retribusi pasar	**Nilai pendapatan retribusi pasar**	**12.538.802.500,00 rupiah**	**0**	**14.963.203.113,00 rupiah**	**0**	**12.478.802.500,00 rupiah**	**0**	**4.991.521.000**	**0**	**6.661.368.086**	**0**	**133,46%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pasar Rakyat**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									**6.494.604.031,00**		**3.396.882.891,00**		**2.984.570.676,00**		**87.86%**						
		1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				0		0		943.078.350,00	47,77%	450.538.350,00	47,50%	428.520.276,00	99,43%	95,11%						
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit		0 unit		97 unit		47,77%		47,50%		99,43%							
		2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0		0		1.452.377.792,00	85,18%	1.237.118.792,00	84,98%	1.006.093.250,00	99,77%	81,33%						
				Jumlah Fasilitasi Pegelolan Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit		0 unit		82 unit		0,00%		84,98%		0,00%							
		3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah I				0		0		1.671.429.920,00	37,81%	631.906.750,00	37,81%	562.795.750,00	100,00%	89,06%						
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 Unit		0 Unit		59 Unit		37,81%		37,81%		100,00%							
		4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah Ii				0		0		1.699.846.760,00	49,98%	708.269.490,00	49,00%	634.934.500,00	98,04%	89,65%						
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit		0 unit		51 unit		49,98%		49,00%		98,04%							
		5	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pasar Satwa Tanaman Hias Yogyakarta (pasthy)				0		0		727.871.209,00	50,70%	369.049.509,00	50,70%	352.226.900,00	100,00%	95,44%						
				fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,70%		50,70%		100,00%							
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									**12.649.568.702,00**		**5.758.819.851,00**		**5.097.485.098,00**		**88.52%**						
		6	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0		0		12.649.568.702,00	45,78%	5.758.819.851,00	43,46%	5.097.485.098,00	94,93%	88,52%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		0 dokumen		0 dokumen		16 dokumen		0,00%		43,46%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja								**98,70%**	**89,85%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan**	**(Realisasi Publikasi Informasi Harga Bahan Pokok/ Target publikasi) x 100%**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**163.950.200,00**	**100 % %**	**82.990.200,00**	**100 % %**	**81.190.000,00**	**100%**	**97,83%**					**Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan**	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah KabupatenKota									**24.278.200,00**		**22.678.200,00**		**20.878.000,00**		**92.06%**						
		1	Pengendalian Ketersediaan Barang				0		0		24.278.200,00	93,41%	22.678.200,00	93,41%	20.878.000,00	100,00%	92,06%						

			Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		0 laporan		0 laporan		3 laporan		93,41%		93,41%		100,00%								
		Pengendalian Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									**139.672.000,00**		**60.312.000,00**		**60.312.000,00**		**100%**								
		2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satuKabupaten/Kota				0		0		139.672.000,00	43,18%	60.312.000,00	43,18%	60.312.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		12 laporan		43,18%		43,18%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,03%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**	**(jumlah alat UTTP yang ditera / jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta) x 100%**	**95,00%**	**0**	**75,86%**	**0**	**95,00%**	**267.021.100,00**	**46.37 %**	**148.621.100,00**	**39.30 %**	**148.126.150,00**	**84.75 %**	**99,67%**					**Kepala UPT Metrologi Legal**	
		Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulangdan Pengawasan									**267.021.100,00**		**148.621.100,00**		**148.126.150,00**		**99.67%**								
		1	Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulang Upt Metrologi Legal				0		0		188.916.100,00	48,94%	92.446.100,00	48,91%	92.404.550,00	99,94%	99,96%							
				Alat UTTP yang ditera/tera ulang		0 alat		0 alat		25.650 alat		48,94%		48,91%		99,94%								
		2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Upt Metrologi Legal				0		0		78.105.000,00	71,92%	56.175.000,00	71,34%	55.721.600,00	99,19%	99,19%							
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		0 orang		0 orang		340 orang		71,92%		71,34%		99,19%								
										Rata-rata capaian kinerja						**99,57%**	**99,57%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina**	**((OmsetUKMn – OmsetUKMn-1)/OmsetUKMn-1) x 100%**	**8,00%**	**0**	**340,71%**	**0**	**8,00%**	**836.094.750,00**	**0%**	**193.562.425,00**	**0%**	**155.828.000,00**	**0,00%**	**80,51%**					**Kepala Bidang Bimbingan Usaha Promosi Dan Kemitraan Perdagangan**	
		Pelaksanaan PromosiPemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									**836.094.750,00**		**193.562.425,00**		**155.828.000,00**		**80.51%**								

		1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		713.968.250,00	13,99%	99.893.125,00	13,99%	80.333.000,00	100,00%	80,42%							
				Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		0 UMKM		0 UMKM		73 UMKM		0,00%		13,99%		0,00%							
		2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		122.126.500,00	76,70%	93.669.300,00	76,70%	75.495.000,00	100,00%	80,60%							
				Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		0 UMKM		0 UMKM		300 UMKM		76,70%		76,70%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**80,51%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan**	**Nilai A**	**A Nilai**	**0**	**BB Nilai**	**0**	**A Nilai**	**20.092.136.403,00**	**A Nilai**	**10.226.965.202,00**	**A Nilai**	**8.407.504.326,00**	**0,00%**	**82,21%**					**Sekretaris**		
				Pendapatan UPT Pusat Bisnis	**Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis**	**5.421.165.429,24 rupiah**	**0**	**4.138.697.581,97 rupiah**	**0**	**5.311.103.336,16 rupiah**	**0**	**1.852.402.018**	**0**	**2.373.483.915**	**0**	**128,13%**	**0,00%**					**Kepala UPT Pusat Bisnis**		
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**13.308.500,00**		**7.281.500,00**		**3.870.000,00**		**53.15%**							
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		1.678.000,00	100,00%	1.678.000,00	96,00%	1.200.000,00	96,00%	71,51%							
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		96,00%		96,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.071.000,00	100,00%	1.071.000,00	80,00%	600.000,00	80,00%	56,02%							
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		80,00%		80,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.071.000,00	0,00%	0	50,00%	600.000,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		50,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.071.000,00	43,98%	471.000,00	43,98%	0	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		43,98%		43,98%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		1.071.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

				dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																			
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		3.774.000,00	52,31%	1.974.000,00	50,00%	0	95,58 %	0,00%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		52,31%		50,00%		95,58 %							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		3.572.500,00	58,43%	2.087.500,00	58,43%	1.470.000,00	100,0 0%	70,42%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		58,43%		58,43%		100,0 0%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**10.675.262.730,00**		**6.699.778.989,00**		**5.342.779.608,00**		**79.75%**						
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		10.671.302.730,00	62,76%	6.697.498.989,00	60,00%	5.342.239.608,00	95,60 %	79,76%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		73 Orang/bulan		62,76%		60,00%		95,60 %							
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		540.000,00	50,00%	270.000,00	50,00%	270.000,00	100,0 0%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,0 0%							
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1.080.000,00	50,00%	540.000,00	50,00%	270.000,00	100,0 0%	50,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,0 0%							
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		600.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0	100,0 0%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,0 0%							
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		540.000,00	50,00%	270.000,00	50,00%	0	100,0 0%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,0 0%							

		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**4.800.000,00**		**2.400.000,00**		**1.600.000,00**		**66.67%**							
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		800.000,00	50,00%	400.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		0,00%		0,00%								
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		800.000,00	50,00%	400.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		0,00%		0,00%								
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**800.000,00**		**400.000,00**		**0**		**0%**							
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**273.199.000,00**		**174.913.748,00**		**106.896.542,00**		**61.11%**							
		22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		60.820.000,00	100,00%	60.820.000,00	86,00%	48.013.700,00	86,00%	78,94%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		6 Paket		100,00%		86,00%		86,00%								
		23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		16.389.000,00	80,28%	13.157.248,00	80,28%	12.620.500,00	100,00%	95,92%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		80,28%		80,28%		100,00%								
		24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		42.378.000,00	59,78%	25.335.500,00	59,78%	18.857.600,00	100,00%	74,43%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		0 Paket		0 Paket		9 Paket		59,78%		59,78%		100,00%								

				Disediakan																				
		25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		4.500.000,00	60,00%	2.700.000,00	40,00%	0	66,67 %	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		60,00%		40,00%		66,67 %								
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		149.112.000,00	48,89%	72.901.000,00	30,00%	27.404.742,00	61,36 %	37,59%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		74 Laporan		48,89%		30,00%		61,36 %								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**18.500.000,00**		**18.500.000,00**		**0**		**0%**							
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		18.500.000,00	100,00%	18.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		0,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.716.440.715,00**		**903.440.356,00**		**845.200.443,00**		**93.55%**							
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		11.886.000,00	85,53%	10.166.000,00	85,53%	10.250.000,00	100,0 0%	100,83 %							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		85,53%		85,53%		100,0 0%								
		29	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		1.221.979.731,00	55,41%	677.109.864,00	55,41%	631.845.443,00	100,0 0%	93,32%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		55,41%		55,41%		100,0 0%								
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		482.574.984,00	44,79%	216.164.492,00	44,79%	203.105.000,00	100,0 0%	93,96%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		44,79%		44,79%		100,0 0%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.143.831.110,00**		**538.663.618,00**		**434.082.793,00**		**80.59%**							
		31	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		168.469.110,00	53,01%	89.304.644,00	45,00%	68.905.200,00	84,89 %	77,16%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		28 Unit		53,01%		45,00%		84,89 %								
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		507.260.000,00	52,34%	265.514.000,00	40,00%	186.857.624,00	76,42 %	70,38%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		11 Unit		52,34%		40,00%		76,42 %								
		33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		68.670.000,00	47,07%	32.320.000,00	40,00%	26.795.000,00	84,98 %	82,91%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		292 Unit		47,07%		40,00%		84,98 %								
		3	Pemeliharaan/Rehabilit				0		0		399.432.000,	37,94%	151.524.974,	37,94%	151.524.969,	100,0	100,00							

		4	asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							00		00		00	0%	%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 paket		0 paket		3 paket	0,00%		37,94%		0,00%								
		Peningkatan Pelayanan BLUD								**6.245.994.348,00**		**1.881.586.991,00**		**1.673.074.940,00**		**88.92%**							
		35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis				0		0	6.245.994.348,00	30,12%	1.881.586.991,00	30,12%	1.673.074.940,00	100,00%	88,92%							
				Peningkatan Pelayanan BLUD		0 bulan		0 bulan		12 bulan	30,12%		30,12%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**85,23%**	**56,94%**							
Predikat kinerja															**Tinggi**	**Rendah**							
Total anggaran dari seluruh program										**40.708.141.936,00**		**19.945.881.669,00**		**17.003.947.200,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**89,31%**	**85,25%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. updateing target sasaran dan perubahan indikator di beberapa program yang mendukung kinerja Dinas Perdagannngan 2. nilai sakip dinas perdagangan dari BB menjadi A
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: standar penilaian indikator kinerja program hasil revieu renstra belum tersedia
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: penyiapan standar penilaian indikator kinerja program untuk menentukan pengukuran kinerja sesuai dengan regulasi dan pengawasan intens pemenuhan pengolahan data dan informasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: melaksanakan monev kinerja program secara intens untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh

DINAS PERDAGANGAN

Veronica Ambar Ismuwardani, S.I.P
NIP. 196912031989032002

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 050/2821/SE/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penyusunan Perubahan RKPD Dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2023 digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan sesuai dengan kondisi dan dinamika saat ini dengan memperhatikan hasil evaluasi, usulan, saran, masukan dan pertimbangan baik Dinas Perdagangan maupun Stake holder, dengan harapan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi pengelola, pemangku kepentingan dan masyarakat kota yogyakarta.

Rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja ini memuat informasi tentang target kinerja sasaran, target indikator kinerja dan anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan dengan membandingkan target indikator kinerja dan anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan sebelumnya ditahun 2023. Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja dinas perdagangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pagu anggaran yang berkurang dan bertambah dengan memperhatikan dinamika saat ini.
2. Penyesuaian target indikator sasaran, program/kegiatan dan sub kegiatan karena dinamika saat ini.
3. Optimalisasi kinerja dan anggaran untuk peningkatan capaian sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 tidak lepas Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 73 Th 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 tersebut terdiri dari 6 program, 16 kegiatan dan 45 sub kegiatan Berikut ini :

PERUBAHAN RENJA

DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif		bertambah/ Berkurang	Keterangan
			APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	APBD 2023	KUPA PPAS 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**40.708.141.936,00**	**45.998.750.084,00**	**5.290.608.148,00**	
3.30.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIPoleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan**	**A Nilai**	**A Nilai**	**20.092.136.403,00**	**22.145.872.531,00**	**2.053.736.128,00**	
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**22 Dokumen**	**22 Dokumen**	**13.308.500,00**	**13.308.500,00**	**-**	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.678.000,00	1.678.000,00	-	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi danPenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.071.000,00	1.071.000,00	-	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.071.000,00	1.071.000,00	-	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.071.000,00	1.071.000,00	-	

3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.071.000,00	1.071.000,00	-	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.774.000,00	3.774.000,00	-	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.572.500,00	3.572.500,00	-	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**29 Laporan**	**29 Laporan**	**10.675.262.730,00**	**11.084.189.000,00**	**408.926.270,00**	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gajidan TunjanganASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN	83 Orang/ bulan	80 Orang/ bulan	10.671.302.730,00	11.080.229.000,00	408.926.270,00	Penyesuaian jumlah ASN dan Insentif Retribusi
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	540.000,00	540.000,00	-	
3.30.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.080.000,00	1.080.000,00	-	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	-	
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	600.000,00	-	

3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	540.000,00	540.000,00	-	
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	600.000,00	-	
3.30.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**55 Laporan**	**55 Laporan**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**-**	
3.30.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000,00	800.000,00	-	
3.30.01.2.03.02	PengamananBarang MilikDaerah SKPD	Jumlah DokumenPengamanan BarangMilik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	800.000,00	800.000,00	-	
3.30.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	-	
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	800.000,00	800.000,00	-	
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	800.000,00	800.000,00	-	
3.30.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	800.000,00	800.000,00	-	

3.30.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-**	
3.30.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000,00	800.000,00	-	
3.30.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**20 Laporan**	**20 Laporan**	**273.199.000,00**	**534.949.500,00**	**261.750.500,00**	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12 Paket	60.820.000,00	114.539.500,00	53.719.500,00	Menambah perlengkapan ATK
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	24 Paket	16.389.000,00	32.786.000,00	16.397.000,00	Menambah Peralatan Rumah tangga
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	16 Paket	42.378.000,00	94.978.000,00	52.600.000,00	Menambah perlengkapan bahan cetak perkantoran
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan	85 Laporan	149.112.000,00	288.146.000,00	139.034.000,00	Menambah 1. SPPD : Pengelolaan Arsip, Minhol, pengelolaan pasar rakyat 2. Makmin rapat dan tamu
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**	**4 unit**	**4 unit**	**18.500.000,00**	**233.100.000,00**	**214.600.000,00**	

3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	33 Unit	18.500.000,00	233.100.000,00	214.600.000,00	Menambah Peralatan kantor: 1. Media promosi : Kamera dan perlengkapannya, SSD, 2. Media elektronik : Komputer, printer, TV, Camera conference, Monitor, HT, Tablet 3. Pelayanan Kantor : Sofa, meja, kursi, Filiing kabinet
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**36 Laporan**	**36 Laporan**	**1.716.440.715,00**	**1.838.297.903,00**	**121.857.188,00**	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan JasaSurat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.886.000,00	11.886.000,00	-	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.221.979.731,00	1.343.836.919,00	121.857.188,00	Menambah biaya air PDAM Prawirotaman dan listrik kantor
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	482.574.984,00	482.574.984,00	-	
3.30.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**332 Unit**	**336 Unit**	**1.143.831.110,00**	**1.526.771.910,00**	**382.940.800,00**	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	168.469.110,00	168.469.110,00	-	

3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	507.260.000,00	504.580.800,00	(2.679.200,00)	Mengurangi BBM kendaraan roda 3 dan roda 4
3.30.01.2.09.06	PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	292 Unit	292 Unit	68.670.000,00	68.670.000,00	-	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 paket	9 paket	399.432.000,00	785.052.000,00	385.620.000,00	Pemeliharaan gedung kantor dan fasilitas umum kantor
3.30.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)**	**1 Unit Kerja**	**1 Unit Kerja**	**6.245.994.348,00**	**6.909.655.718,00**	**663.661.370,00**	
3.30.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.245.994.348,00	6.909.655.718,00	663.661.370,00	Menambah belanja untuk mengakomodir sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2022 berdasarkan BA pertanggung jawaban Keuangan TA 2022
3.30.02.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya**	**20%**		**204.766.750,00**	**211.431.750,00**	**6.665.000,00**	
3.30.01.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya diTingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat**	**10 Laporan**	**11 Laporan**	**204.766.750,00**	**211.431.750,00**	**6.665.000,00**	

3.30.01.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna AkhirBahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)maupun Produsen B2(P-B2)	10 Laporan	11 Laporan	204.766.750,00	211.431.750,00	6.665.000,00	Menambah untuk peralatan uji dan kegiatan sosialisasi Bahan Berbahaya
3.30.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**- Pendapatan retribusi pasar - Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat**	**- 13.379.500.000 rupiah - 41,37%**	**- 13.379.500.000 rupiah - 41,37%**	**19.144.172.733,00**	**22.122.895.253,00**	**2.978.722.520,00**	
3.30.03.2.01.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**- Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi ,pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan - Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan**	**- 29 Pasar - 29 Pasar**	**- 29 Pasar - 29 Pasar**	**6.494.604.031,00**	**8.141.565.551,00**	**1.646.961.520,00**	

3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	97 Unit	138 Unit	943.078.350,00	1.785.773.350,00	842.695.000,00	Menambah untuk : 1. Belanja Bahan Baku Bangun 2. Penyediaan Peralatan Listrik dan perlatan lainnya 3. Review Andalalin, DED dan RAB, UKL-UPL Pasar Kluwih Ngadikusuman 4. Pemeliharaan Travelator 5. Pemeliharaan Genset 6. Pemeliharaan Hydrant Pasar Beringharjo 7. Kajian Pngawasan dan perencanaan pemeliharaan pasar 8. Pemeliharaan Instalasi Listrik Pasar Ngasem 9. Perbaikan/Pemeliharaan Pasar Giwangan, kranggan, legi kota gede, senen dan Klitikan Pakuncen 10. kursi dan Kulkas untuk ruang laktasi
3.30.03.2.01.02	FasilitasiPengelolaanSarana DistribusiPerdagangan (PL)	Jumlah FasilitasiPengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	82 Unit	102 Unit	1.452.377.792,00	1.890.201.792,00	437.824.000,00	Menambah untuk : 1. belanja cetak administrasi pelayanan pasar 2. kajian potensi parkir pasar rakyat 3. Kajian pemetaan potensi lahan pasar rakyat 4. Sosialisasi SIMPATIK Pasar 5. Koordinasi koordinasi internal

3.30.03.2.01.02	FasilitasiPengelolaanSarana DistribusiPerdagangan (UPT I)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	59 Unit	59 Unit	1.671.429.920,00	1.517.833.200,00	(153.596.720,00)	Mengurangi belanja Pengembalian Retribusi
3.30.03.2.01.02	FasilitasiPengelolaanSarana DistribusiPerdagangan (UPT II)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	51 Unit	51 Unit	1.699.846.760,00	1.535.552.000,00	(164.294.760,00)	Mengurangi belanja Pengembalian Retribusi
3.30.03.2.01.02	FasilitasiPengelolaanSarana DistribusiPerdagangan (UPT PASTY)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	31 Unit	51 Unit	727.871.209,00	1.412.205.209,00	684.334.000,00	Menambah untuk : 1. Bahan Baku Bangunan 2. peralatan kantor 3. Pemeliharaan CCTV, Sumur 4. Penataan jaringan listrik 5. Pemeliharaan Pagar dan gapura 6. Pemeliharaan Pasar Pasty 7. Pemeliharaan gazebo dan wahana bermain 8. Pemeliharaan tanaman 9. Pengadaan mesin bor, gerinda, kursi, soun system, komputer, rambu informasi 10. Pembuatan KM/WC
3.30.03.2.02.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**29 Pasar**	**29 Pasar**	**12.649.568.702,00**	**13.981.329.702,00**	**1.331.761.000,00**	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	16 Dokumen	19 Dokumen	12.649.568.702,00	13.981.329.702,00	1.331.761.000,00	Menambah untuk : 1. Pengadaan Dumptruck 2 unit 2. Pelatihan Pemadam Kebakaran 3. Pengadaan tempat sampah

3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok**	**100%**	**72%**	**163.950.200,00**	**267.600.200,00**	**103.650.000,00**	
3.30.04.2.01.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasai ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**24.278.200,00**	**22.478.200,00**	**(1.800.000,00)**	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	3 Laporan	24.278.200,00	22.478.200,00	(1.800.000,00)	Mengurang untuk penyesuaian honor
3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**139.672.000,00**	**245.122.000,00**	**105.450.000,00**	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	12 Laporan	13 Laporan	139.672.000,00	245.122.000,00	105.450.000,00	Menambah untuk : 1. Bantuani biaya pengiriman ongkos distribusi bahan kebutuhan pokok
3.30.06.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**	**95%**	**95%**	**267.021.100,00**	**310.921.100,00**	**43.900.000,00**	
3.30.06.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Alat UTTP yang ditera/tera ulang**	**25667 Alat**	**25667 Alat**	**267.021.100,00**	**310.921.100,00**	**43.900.000,00**	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	25650 Unit	22802 Unit	188.916.100,00	195.916.100,00	7.000.000,00	Menambah unutk pemeliharaan alat ukur tera/tera ulang

3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usahadi Bidang Metrologi Legal yang Dibina	340 Orang	340 Orang	78.105.000,00	115.005.000,00	36.900.000,00	Menambah untuk : 1. Pemeliharaan CCTV 2. Penambahan Daya Listrik 3. Pengadaan Alat ukur kemetrologian
3.30.07.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina**	**8%**	**8%**	**836.094.750,00**	**940.029.250,00**	**103.934.500,00**	
3.30.07.2.01.	**Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**- Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunan produk dalam negeri - Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunan produk dalam negeri**	**- 300 UMK - 100 UMK**	**- 300 UMK - 59 UMK**	**836.094.750,00**	**940.029.250,00**	**103.934.500,00**	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	73 UMKM	59 UMKM	713.968.250,00	832.902.750,00	118.934.500,00	Menambah untukpenyelenggaraan even Disdag festival
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	300 UMKM	300 UMKM	122.126.500,00	107.126.500,00	(15.000.000,00)	Mengurangi untuk biaya ongkos kirim goshop
JUMLAH					**40.708.141.936,00**	**45.998.750.084,00**	**5.290.608.148,00**	

Dari hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan renja perubahan tahun 2023 ada penambahan/kenaikan pagu indikatif sebesar Rp. 5.290.608.148,- atau penambahan 13.00% dari anggaran murni semula Rp.40.708.141.935,- setelah perubahan menjadi Rp. 45.998.750.084, secara rinci Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 3.1.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											30,095,978,599	34,312,582,857					28,921,197,185
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13,846,142,055	15,236,216,813					15,044,253,660
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											13,308,500	13,308,500					13,308,500
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,678,000	1,678,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,678,000
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,071,000	1,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,071,000
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,071,000	1,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,071,000
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,071,000	1,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,071,000
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,071,000	1,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,071,000
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,774,000	3,774,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	3,774,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Kinerja SKPD															
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	3,572,500	3,572,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	3,572,500
3 30 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10,675,262,730**	**11,084,189,000**					**12,017,767,600**
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	100 %	100 %	10,671,302,730	11,080,229,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	12,013,807,600
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	540,000	540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	540,000
3 30 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,080,000	1,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,080,000
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	600,000
3 30 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	600,000
3 30 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	540,000	540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	540,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 30 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	600,000
3 30 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**4,800,000**	**4,800,000**					**4,800,000**
3 30 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**800,000**	**800,000**					**800,000**
3 30 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	800,000
3 30 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**273,199,000**	**534,949,500**					**348,251,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	6 Paket	12 Paket	100 %	100 %	60,820,000	114,539,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	47,091,100
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	24 Paket	100 %	100 %	16,389,000	32,786,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	17,208,400
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	9 Paket	16 Paket	100 %	100 %	42,378,000	94,978,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	44,496,900
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	4,500,000	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	4,500,000
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	74 Laporan	85 Laporan	100 %	100 %	149,112,000	288,146,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	234,955,000
3 30 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**18,500,000**	**233,100,000**					**67,500,000**
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	33 Unit	100 %	100 %	18,500,000	233,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	67,500,000
3 30 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,716,440,715**	**1,838,297,903**					**1,836,126,200**
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	11,886,000	11,886,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	12,480,300
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,221,979,731	1,343,836,919	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	1,356,207,300
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Gondomanan,	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	482,574,984	482,574,984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh	A Nilai	467,438,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Dinas Perdagangan	Kantor yang Disediakan	kinerja perangkat daerah	Ngupasan											Inspektorat untuk Dinas Perdagangan		
3 30 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,143,831,110**	**1,526,771,910**					**755,699,960**
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	168,469,110	168,469,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	195,162,500
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	507,260,000	504,580,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	488,433,960
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	292 Unit	292 Unit	100 %	100 %	68,670,000	68,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	72,103,500
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	A Nilai	A Nilai	3 paket	9 paket	100 %	100 %	399,432,000	785,052,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	0
3 30 02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**204,766,750**	**211,431,750**					**42,859,600**
3 30 02 2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**											**204,766,750**	**211,431,750**					**42,859,600**
3 30 02 2.06 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	20 %	20 %	10 Laporan	11 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	204,766,750	211,431,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20 %	42,859,600
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**15,045,024,844**	**17,657,304,844**					**12,313,757,000**
3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**2,395,456,142**	**3,675,975,142**					**2,897,638,500**
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan, fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	12.478.802.500 rupiah 31.03 %	13.151.500.000 rupiah 31,03 %	97 Unit	138 Unit	29 Pasar	29 Pasar	943,078,350	1,785,773,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan retribusi pasar	13.151.500.000 rupiah 31,03 %	1,548,156,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat		Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat		
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan, fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	12.478.802.500 rupiah 31.03 %	13.151.500.000 rupiah 31,03 %	82 Unit	102 Unit	29 Pasar	29 Pasar	1,452,377,792	1,890,201,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	13.151.500.000 rupiah 31,03 %	1,349,482,500
3 30 03 2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**											**12,649,568,702**	**13,981,329,702**					**9,416,118,500**
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	31.03 %	31,03 %	16 Dokumen	19 Dokumen	29 Pasar	29 Pasar	12,649,568,702	13,981,329,702	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	31,03 %	9,416,118,500
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**163,950,200**	**267,600,200**					**165,319,200**
3 30 04 2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**											**24,278,200**	**22,478,200**					**28,957,100**
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksannnya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	100 %	72 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	24,278,200	22,478,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok	72 %	28,957,100
3 30 04 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**139,672,000**	**245,122,000**					**136,362,100**
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	100 %	72 %	12 Laporan	13 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	139,672,000	245,122,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok	72 %	136,362,100
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**											**836,094,750**	**940,029,250**					**1,355,007,725**
3 30 07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**											**836,094,750**	**940,029,250**					**1,355,007,725**
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	8 %	8 %	73 UMKM	59 UMKM	400 UMK	359 UMK	713,968,250	832,902,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 %	1,223,225,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Produk Dalam Negeri											Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina		
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	8 %	8 %	300 UMKM	300 UMKM	400 UMK	359 UMK	122,126,500	107,126,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8 %	131,781,825
											TOTAL	**30,095,978,599**	**34,312,582,857**				**28,921,197,185**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											1,671,429,920	1,517,833,200					1,760,003,100
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											1,671,429,920	1,517,833,200					1,760,003,100
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											1,671,429,920	1,517,833,200					1,760,003,100
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pasar Wilayah I	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	12.478.802.500 rupiah	13.151.500.000 rupiah	59 Unit	59 Unit	15 pasar	15 pasar	1,671,429,920	1,517,833,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan retribusi pasar	13.151.500.000 rupiah	1,760,003,100
															TOTAL	1,671,429,920	1,517,833,200					1,760,003,100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											1,699,846,760	1,535,552,000					1,859,609,000
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											1,699,846,760	1,535,552,000					1,859,609,000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											1,699,846,760	1,535,552,000					1,859,609,000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pasar Wilayah II	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	12.478.802.500 rupiah	13.151.500.000 rupiah	51 Unit	51 Unit	15 pasar	15 pasar	1,699,846,760	1,535,552,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan retribusi pasar	13.151.500.000 rupiah	1,859,609,000
															TOTAL	1,699,846,760	1,535,552,000					1,859,609,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0003 UPT Pusat Bisnis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											6,245,994,348	6,909,655,718					6,245,994,348
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,245,994,348	6,909,655,718					6,245,994,348
3	30	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											6,245,994,348	6,909,655,718					6,245,994,348
3	30	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	5.311.103.336,16 rupiah	5.311.103.336,16 rupiah	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6,245,994,348	6,909,655,718	Pendapatan dari BLUD		Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.311.103.336,16 rupiah	6,245,994,348
															TOTAL	6,245,994,348	6,909,655,718					6,245,994,348

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0004 UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**727,871,209**	**1,412,205,209**					**959,941,700**
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**727,871,209**	**1,412,205,209**					**959,941,700**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**727,871,209**	**1,412,205,209**					**959,941,700**
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT PASTY	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	12.478.802.500 rupiah	13.151.500.000 rupiah	31 Unit	51 Unit	1 Pasar	1 Pasar	727,871,209	1,412,205,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan retribusi pasar	13.151.500.000 rupiah	959,941,700
															TOTAL	**727,871,209**	**1,412,205,209**					**959,941,700**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0005 UPT Metrologi Legal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**267,021,100**	**310,921,100**					**262,884,700**
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**267,021,100**	**310,921,100**					**262,884,700**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**267,021,100**	**310,921,100**					**262,884,700**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Terselenggaranya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	95 %	95 %	25650 Unit	22802 Unit	25667 Alat	22802 Alat	188,916,100	195,916,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95 %	222,714,700
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Terselenggaranya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	95 %	95 %	340 Orang	340 Orang	25667 Alat	22802 Alat	78,105,000	115,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95 %	40,170,000
															TOTAL	**267,021,100**	**310,921,100**					**262,884,700**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta sesuai dengan perubahan RKPD Kota Yogyakarta sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Tahun 2023, Perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan di dalamnya memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang akan dicapai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi renja, permasalahan yang terjadi serta kebutuhan sesuai dengan dinamika saat ini dengan harapan dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang efektif dan efisien.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Yogyakarta, Agustus 2023

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Yogyakarta

Veronica Ambar Ismuwardani, S.I.P.
NIP. 196912031989032002

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor ...Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023, sehingga

dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
10. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
13. Peraturan Walikota Yogyakarta No 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2023;
3. Pedoman bagi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKPA Perangkat Daerah) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilakukan atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2023 pada triwulan II. Secara rinci review tersebut tergambar selanjutnya pada Tabel 2.1. Yang akan dijelaskan pada bab ini adalah program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan bidang urusan perindustrian, koperasi dan UKM beserta program dan kegiatan penunjang.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

   Program ini merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 9 (delapan) kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di mana target yang ingin dicapai adalah nilai A dan Pendapatan UPT Logam sebesar Rp 440.000.000. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 3.017.500.592 dari target Triwulan II sebesar Rp 4.520.997.814 (73,73%).

   Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 95,18% dari target fisik renja sebesar 60,28%, berhasil direalisasikan sebesar 57,38%. Terdapat 8 (delapan) kegiatan di dalam program tersebut, antara lain:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, antara lain :
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini memiliki 1 (satu) output, yakni Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 4 dokumen
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD, dengan target 1 dokumen
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah dokumen Perubahan

RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, dengan target 1 dokumen

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD, dengan target 1 dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, dengan target 1 dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 1 laporan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat 1 (satu) output pada sub kegiatan ini yakni Jumlah orang uang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 33 orang/bulan
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 1dokumen
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan output Jumlah okumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD. Target output ini sejumlah 1 dokumen
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 1 laporan
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Target output ini sejumlah 12 laporan.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Sub kegiatan ini memiliki output yakni Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD, dengan target 1 dokumen
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penatausahan barang milik daerah pada SKPD, dengan target 2 laporan

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, dengan target 5 dokumen.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yakni :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah paket peralatan dan pelengkapan kantor yang disediakan, dengan target 6 paket.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, dengan target 2 paket
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target 2 dokumen
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target 3 laporan

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yakni
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah paket mebel yang disediakan, dengan target 2 unit
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, dengan target 1 unit.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yakni :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dengan target 2 laporan
- Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target 2 laporan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakann, dengan target 6 laporan

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya, dengan target 1 unit
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 20 unit
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 1 unit

2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri . Program ini memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi, ditargetkan sebesar 3 % dan terealisasi sebesar 6,2 %.
   a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sub kegiatan ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam.

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
   Program ini terdiri dari satu kegiatan yakni Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

   Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan dan satu sub kegiatan yakni Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industru Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Target indikator ini sebanyak 115 koperasi. Kemajuan keuangan hingga triwulan II tahun berjalan sebesar Rp 20.914.000 atau 86,55% dari target sebesar Rp 24.163.000. Sedangkan kemajuan fisik sebesar 15,84%, sesuai dengan target fisik pada triwulan II. Dengan demikian tingkat kinerja fisik program ini sebesar 100%.

   Program ini terdiri satu kegiatan yakni Pemeriksaan dan Pengawan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Nomenklatur kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 115 unit usaha

6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat. Target indikator kinerja ini adalah 115 koperasi dan

terealisasi 115 koperasi. Kemajuan keuangan hingga triwulan II sebesar Rp 11.486.000atau sebesar 75,42% dari target sebesar Rp 15.229.000. Sedangkan kemajuan fisik program ini sebesar 52,65%, sesuai dengan target fisik pada triwulan II tahun berjalan. Dengan demikian tingkat realisasi fisik program ini sebesar 100 %.

Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wialayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan antara lain:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki satu output yakni Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang menyasar 115 koperasi.
- Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan, dengan target sebesar 20 koperasi.

7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi. Target indikator kinerja ini sebanyak 540 orang. Kemajuan fisik program ini sebesar 66%, sesuai dengan target pada triwulan II. Sedangkan kemajuan keuangan mencapai Rp 190.945.000 atau sebesar 99,74% dari target realisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp 191.441.000.

   Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Ouput sub kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian, dengan taget sebesar 540 orang.

8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja program yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 15 koperasi. Kemajuan fisik program ini pada triwulan II mencapai 34%, sedikit dibawah target yang ditetapkan untuk triwulan II yakni 35%. Dengan demikian tingkat realisasi fisik pada triwulan II sebesar 97,14%.

Sedangkan kemajuan keuangan mencapai Rp 91.390.750, atau 81,77% dari target keuangan triwulan II sebesar Rp 111.759.750.

9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini memiliki 2 (dua) output antara lain Jumlah UKM ber-NIB dengan target 400 UKM dan Jumlah Wirausaha Baru yang ditumbuhkan dengan target 100 wirausaha. Kemajuan fisik program ini pada triwulan II sebesar 53%, sesuai dengan target fisik pada triwulan II. Sedangkan kemajuan keuangan program ini mencapai Rp 296.993.500, atau sebesar 95,20% dari target keuangan pada triwulan II yakni Rp 306.882.500.
10. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Kemajuan fisik program ini mencapai 52,56%, sedikit dibawah target fisik pada triwulan II yakni 60,66%. Dengan demikian tingkat capaian fisik program ini sebesar 86,65%. Sedangkan kemajuan keuangan Rp 122.282.000, atau 26,12% dari target keuangan triwulan II sebesar Rp 468.102.000.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan capaian kinerja pelayanan bidang perindustrian, koperasi dan UMKM telah melampaui yang ditargetkan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MEMENGAH
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Anilai
2	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahunan	5.040.000.000.000 Rp
		Omset Koperasi	397.114.727.829 Rp
3	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425 orang
		Nilai Investasi IKM	15.948.506.955 Rp

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								dan Anggaran Renstra 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	an	Fisik	an	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitar baik**	**Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure**	**115,00 koperasi**	**0**	**115,00 koperasi**	**0**	**115,00 koperasi**	**152.227.000,00**	**15,84%**	**24.163.000,00**	**15,84%**	**20.914.000,00**	**100,00%**	**86,55%**					**Bidang Koperasi**	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	**Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**																			
		1 Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitar Koperasi Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitar Koperasi Keuangan Kabupaten/Kota		0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	115 Koperasi	152.227.000,00	15,84%	24.163.000,00	15,84%	20.914.000,00	100,00%	86,55%						
											0,00%		15,93%		0,00%						
				Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**86,55%**						
				Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat**	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n**	**115,00 koperasi**	**0**	**115,00 koperasi**	**0**	**115,00 koperasi**	**71.020.000,00**	**52,65%**	**15.229.000,00**	**52,65%**	**11.486.000,00**	**100**	**75,42%**					**Bidang Koperasi**	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan		0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	115 Koperasi	11.800.000,00	99,00%	11.600.000,00	99,00%	9.330.000,00	100,00%	81,00%						
											99,00%		99,00%		100,00%							
		2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	20 Koperasi	59.220.000,00	6,30%	3.629.000,00	6,30%	2.156.000,00	100,00%	60,00%						
											6,30%		6,30%		100,00%							
				Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**75,42%**						
				Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi**	**Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n**	**765,00 orang**	**0**	**490,00 orang**	**0**	**540,00 orang**	**290.809.523,00**	**66,00%**	**191.441.000,00**	**66%**	**190.945.000,00**	**100%**	**99,74%**					**Bidang Koperasi**	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		0 orang	0	0 orang	0	540 orang	290.809.523,00	66,00%	191.441.000,00	66,00%	190.945.000,00	100,00%	99,74%						
											66,00%		66,00%		100,00%							
				Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**99,74%**						
				Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya - jumlah koperasi yang berkembang usahanya tahun n**		**0**	**15,00 unit**	**0**	**12,00 unit**	**343.064.250,00**	**35,00%**	**111.759.750,00**	**34,00%**	**91.390.750,00**	**97,14%**	**81,77%**						
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitar Nilai Tambah Akzer Pasar Akzer Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akzer Pasar, Akzer Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Keuangan Kabupaten/Kota		0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0	12 Unit Usaha	343.064.250,00	35,00%	111.759.750,00	34,00%	91.390.750,00	97,14%	81,77%						
											35,00%		34,00%		97,14%							
				Rata-rata capaian kinerja											**97,14%**	**81,77%**						
				Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Activate Windows
Go to Settings to activate V

	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PEMBERDATAAN USAHA MEMENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah UKM ber-NIB**			**0**	**410**	**0**	**400**	**543.806.679,00**	**110**	**306.882.500,00**	**125**	**296.993.500,00**	**113%**	**95,39%**						**Bidang UMK**	
			Jumlah wirausaha baru yang	**Jumlah wirausaha baru tahun a**	**100,00**	**0**	**110,00**	**0**	**100,00 wirausaha**	**0**	**50**	**0**	**31**	**0**	**62,00%**	**0,00%**							
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui PendataanKemitraanKemudahan PerizinanPenguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																					
		1 Pendataan Paternsi dan Pengembangan Usaha Mikro				0		0		161.847.160,00	40,00%	63.615.000,00	40,00%	63.105.000,00	100,00%	99,20%							
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, pengiatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Unit		0 Unit		3.600 Unit		40,00%		40,00%		100,00%							
		2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				0		0		12.652.500,00	100,00%	12.652.500,00	100,00%	11.452.500,00	100,00%	90,52%							
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		400 Unit Usaha		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pemberdayaan Kelembagaan Paternsi dan Pengembangan Usaha Mikro				0		0		369.307.019,00	66,00%	230.615.000,00	66,00%	222.436.000,00	100,00%	96,45%							
			Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		0 Wirausaha Baru		0 Wirausaha Baru		100 Wirausaha Baru		66,00%		66,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**95,39%**							
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah UKM Mandiri**	**Jumlah IKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pemeran, pendampingan dan inovasi**	**50,00 UMKM**	**0**	**30,00 UMKM**	**0**	**35,00 UMKM**	**844.220.955,00**	**0 UMKM**	**0**	**UMKM**	**122.282.000,00**	**0,00%**	**0,00%**						**Bidang UMK**	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																					
		1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi				0		0		844.220.955,00	60,66%	468.102.000,00	52,56%	122.282.000,00	86,65%	26,12%							
			Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi		0 UMKM		0 UMKM		265 UMKM		0,00%		55,75%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**86,65%**	**26,12%**							
										Predikat kinerja					**Tinggi**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya Kinerja sektor industri	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa tersstandarisasi meningkat**	**(IKM yang memiliki produk dan jasa tersstandarisasi / total jumlah IKM Kota Tegyakarta) x 100%**	**26,00%**	**0**	**6,29%**	**0**	**11,00%**	**4.823.681.000,00**	**4% %**	**2.465.927.750,00**	**4% %**	**1.585.918.282,00**	**100%**	**63,27%**						**Bidang Industri**	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																					
		1 KoordinasiSinkronisasidan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0		0		524.585.750,00	42,42%	222.475.000,00	44,93%	134.411.500,00	105,92%	60,42%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		44,93%		0,00%							
		2 KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0		0		75.495.000,00	44,95%	30.040.000,00	52,08%	10.112.000,00	115,86%	33,66%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		52,08%		0,00%							
		3 KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0		0		291.004.500,00	52,68%	127.210.000,00	53,88%	131.583.500,00	102,28%	95,90%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		53,88%		0,00%							
		4 KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Upt Lagam				0		0		3.932.595.750,00	53,72%	2.076.202.750,00	46,15%	1.309.811.282,00	85,91%	63,09%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		46,15%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**102,49%**	**63,27%**							
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Rendah**							

	Meningkatnya Kinerja sektor industri	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase IKM yang berijin industri**	**(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta)**	**4,50%**	**0**	**0**	**0**	**3,00%**	**9.060.000,00**	**0,5% x**	**0**	**0,5% x**	**0**	**100%**	**0,00%**					**Bidang Industri**	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKIKewenangan Kabupaten/Kota																				
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUIIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota				0		0		9.060.000,00	0,00%	0	5,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		5,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**0,00%**					
									Predikat kinerja													
	Meningkatnya Kinerja sektor industri	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**49.811.250,00**	**1%**	**500.000,00**	**20%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Bidang Industri**	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUIIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		1 Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas				0		0		49.811.250,00	1,00%	500.000,00	20,00%	0	2000,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		20,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**2000,00%**	**0,00%**					
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**					
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil ...**	**Nilai SAKIP**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**	**A nilai**	**4.520.997.814,00**	**A nilai**	**3.017.500.592,00**	**95,18%**	**73,73%**					**Sekretariat**	
			Pendapatan UPT Lugam			**0**		**0**	**440.000.000**	**0**	**\$\$\$\$\$\$**	**0**	**\$\$\$\$\$\$**	**0**	**116,64%**	**0,00%**						
		PerencanaanPengawasandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		3.000.000,00	80,00%	2.351.000,00	80,00%	2.342.000,00	100,00%	99,62%						
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		80,00%		80,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		730.250,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%						
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		10,00%		10,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		514.000,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%						
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		10,00%		10,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		835.000,00	25,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		580.000,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%						
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		10,00%		10,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		492.500,00	50,00%	227.500,00	50,00%	227.500,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4.946.867.850,00	76,00%	3.691.515.064,00	76,00%	2.449.386.068,00	100,00%	66,35%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		33 Orang/bulan		76,00%		76,00%		100,00%							
		8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		610.000,00	45,00%	235.000,00	45,00%	235.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		612.500,00	46,00%	227.500,00	46,00%	227.500,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		46,00%		46,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		1.547.500,00	50,00%	722.500,00	50,00%	722.500,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							

Activate Windows

| | | |

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu indikatif. Secara keseluruhan pagu indikatif belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang semula sebesar Rp 13.557.028.107 pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2023 menjadi Rp 16.034.475.864 ada kenaikan sebesar Rp 2.423.829.757. Penambahan anggaran dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain alokasi gaji dan tunjangan pegawai bulan November dan Desember, serta penyesuaian 8 orang CPNS menjadi PNS, belanja modal pengadaan sarana dan prasarana kerja, pemeliharaan gedung, kendaraan dan peralatan/mesin, pelaksanaan pameran, pelatihan, promosi IKM/UKM/Koperasi.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunaan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran murni APBD Tahun 2023 pada program ini sebesar Rp 5.989.267.450 naik Rp 1.135.909.507 menjadi Rp 7.125.176.957. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai:

i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran kegiatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 1.987.000 dari anggaran murni sebesar Rp 6.151.750. Pada anggaran perubahan 2023, anggaran kegiatan ini menjadi Rp 8.138.750. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan. Terdapat 3 sub kegiatan yang mengalami peningkatan anggaran, antara lain

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000. Anggaran ini bertambah Rp 1.202.000 menjadi Rp 4.202.000.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD. Pada APBD Murni 2023 sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesarRp

835.000. Anggaran tersebut bertambah Rp 125.000 menjadi Rp 960.000

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang dialokasikan pada sub kegiatan ini melalui APBD Murni 2023 sebesar Rp 492.500

j. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 4.950.137.850. Rada rancangan APBD Perubahan 2023, alokasi tersebut bertambah Rp 742.956.999 menjadi Rp 5.693.094.849. Terdapat 3 sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran pada kegiatan ini.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 1dokumen
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Target output ini sejumlah 12 laporan.

k. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini mengalami penurunan anggaran. Alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 1.000.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain
   - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Sub kegiatan ini memiliki output yakni Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD, dengan target 1 dokumen
   - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penatausahan barang milik daerah pada SKPD, dengan target 2 laporan

l. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini tidak mengalami perubahan. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Pegawai, dengan alokasi anggaran Rp 500.000.

m. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 244.589.350, anggaran tersebut naik Rp 7.588.000 dari alokasi anggaran APBD Murni 2023 sebesar Rp 237.001.350. Penambahan anggaran terjadi pada 2 sub kegiatan yakni :

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 21.314.250, naik Rp 4.000.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 17.314.250.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 151.118.000, bertambah Rp 3.588.000 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 147.530.000

n. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 243.818.000, anggaran tersebut naik Rp 228.618.000 dari alokasi anggaran APBD Murni 2023 sebesar Rp 15.200.000. Penambahan anggaran terjadi pada 2 sub kegiatan yakni :
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 49.839.500, bertambah Rp 45.639.500 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 4.200.000
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 193.978.500, bertambah Rp 182.978.500 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 11.000.000
o. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 558.038.000, anggaran tersebut turun Rp 8.162.000 dari alokasi anggaran APBD Murni 2023 sebesar Rp 566.200.000. Pengurangan anggaran terjadi pada tiga sub kegiatan, yakni :

   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 750.000, turun Rp 250.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 1.000.000.
   - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 12.596.000, turun Rp 1.364.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 12.596.000.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 544.692, turun Rp 6.548.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 544.692.000.

p. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 376.012.008, anggaran tersebut naik Rp 162.935.508 dari alokasi anggaran APBD Murni 2023 sebesar Rp 213.076.500. Penambahan anggaran terjadi pada 3 sub kegiatan yakni:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 22.729.800, bertambah Rp 1.910.800 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 20.819.000.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 122.100.000, bertambah Rp 3.842.500 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 118.257.500.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 231.182.208, bertambah Rp 157.182.208 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 74.000.000.

2. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 208.111.000, naik sebesar Rp 55.884.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 152.227.000.

3. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 71.080.000 tidak mengalami perubahan dari alokasi pada APBD Murni 2023.

4. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 350.100.523, naik sebesar Rp 59.291.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 290.809.523.

5. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 604.515.750, naik sebesar Rp 261.451.500 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 343.064.250.

6. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**.

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 611.106.679, naik sebesar Rp 67.300.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 253.806.679. Program ini terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan. Terdapat satu kegiatan yang mengalami penambahan anggaran yakni Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

7. **Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).**

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 1.182.220.955, naik sebesar Rp 338.000.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 844.220.955. Program ini terdiri dari satu kegiatan dan satu sub kegiatan.

8. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** .

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 5.383.292.750, naik sebesar Rp 559.611.750 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 4.823.681.000. Program ini terdiri dari satu kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Terdapat empat sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, antara lain :

   - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 830.044.750, bertambah Rp 305.459.000 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 524.585.750.
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 242.742.500, bertambah Rp 167.247.500 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 75.495.000.
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sub kegiatan ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam. Sub kegiatan yang diampu oleh Bidang Industri mendapatkan alokasi anggaran Rp 290.944.500 pada Perubahan Renja 2023, turun sebesar Rp 60.000 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 291.004.500. sedangkan sub kegiatan yang diampu oleh UPT Logam mendapatkan alokasi anggaran Rp 4.019.561.000 pada Perubahan Renja 2023, naik

sebesar Rp 86.965.250 dari alokasi anggaran pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 3.932.595.750.

9. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**.

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 9.060.000 tidak mengalami perubahan dari alokasi pada APBD Murni 2023.

11. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.**

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 49.811.250 tidak mengalami perubahan dari alokasi pada APBD Murni 2023.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											8,234,475,857	10,152,311,864					10,091,321,589
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,989,267,450	7,125,176,957					7,747,226,731
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											6,151,750	8,138,750					9,200,000
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	3,000,000	4,202,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	3,300,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	730,250	730,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1,300,000
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	514,000	514,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	835,000	960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1,300,000
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	580,000	580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	16 Dokumen	16 Dokumen	492,500	1,152,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,300,000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,950,137,850	5,693,094,849					6,360,772,205
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	7 Laporan	7 Laporan	4,946,867,850	5,689,187,349	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	6,355,400,205
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	610,000	690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	612,500	612,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1,547,500	2,105,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	3,872,000
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**1,000,000**	**986,000**					**1,000,000**
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	500,000	491,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	500,000	495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**500,000**	**500,000**					**500,000**
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan administrasi kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**237,001,350**	**244,589,350**					**186,354,150**
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Paket	6 Paket	5 Dokumen	5 Dokumen	70,177,100	70,177,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	88,133,750
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	5 Dokumen	5 Dokumen	17,314,250	21,314,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	19,500,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,980,000	1,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,200,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan administrasi umum yang tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	147,530,000	151,118,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	76,520,400

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**15,200,000**	**243,818,000**						**185,000,000**
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barang yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 unit	2 unit	6 Jenis	6 Jenis	4,200,000	49,839,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	0
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	6 Jenis	6 Jenis	11,000,000	193,978,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	185,000,000
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**566,200,000**	**558,038,000**						**732,882,876**
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	1,000,000	750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,000,000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa penunjang urusan yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	13,960,000	12,596,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	4,200,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa penunjang urusan yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Laporan	6 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	551,240,000	544,692,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	726,682,876
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**213,076,500**	**376,012,008**						**271,517,500**
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang yang terpelihara	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	5 Jenis	5 Jenis	20,819,000	22,729,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	21,828,400
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang yang terpelihara	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	20 Unit	20 Unit	5 Jenis	5 Jenis	118,257,500	122,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	149,689,100
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang yang terpelihara	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	5 Jenis	5 Jenis	74,000,000	231,182,208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	100,000,000

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												152,227,000	208,111,000					195,871,944
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota												152,227,000	208,111,000					195,871,944
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang diawasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit	115 Unit	152,227,000	208,111,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi	195,871,944
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI												71,080,000	71,080,000					82,546,200
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												71,080,000	71,080,000					82,546,200
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Koperasi yang dinilai	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit	115 Unit	11,800,000	11,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	68,086,700
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Koperasi yang dinilai	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Koperasi	115 Koperasi	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	115 Unit	115 Unit	59,280,000	59,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	14,459,500
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												290,809,523	350,100,523					349,303,006
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												290,809,523	350,100,523					349,303,006
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	SDM Koperasi yang terdidik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	540 SDM Koperasi	540 SDM Koperasi	540 Orang	540 Orang	540 Orang	540 Orang	290,809,523	350,100,523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	540 SDM Koperasi	349,303,006
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												343,064,250	604,515,750					329,394,862
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												343,064,250	604,515,750					329,394,862
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang terbina	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	12 Unit	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	12 Unit	12 Unit	343,064,250	604,515,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	12 Unit	329,394,862
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												543,806,679	611,106,679					576,317,232
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												543,806,679	611,106,679					576,317,232
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku usaha yang terbina	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 UKM 100 UKM	400 UKM 100 UKM	3600 Unit Usaha	3600 Unit Usaha	620 Orang	620 Orang	161,847,160	161,847,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	223,387,732
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Pelaku usaha yang terbina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 UKM 100 UKM	400 UKM 100 UKM	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	620 Orang	620 Orang	12,652,500	12,652,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	22,929,500
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelaku usaha yang terbina	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 UKM 100 UKM	400 UKM 100 UKM	100 Wirausaha baru	100 Wirausaha baru	620 Orang	620 Orang	369,307,019	436,607,019	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	330,000,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												844,220,955	1,182,220,955					810,661,614
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												844,220,955	1,182,220,955					810,661,614
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM terfasilitasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 UKM	35 UKM	265 Unit Usaha	265 Unit Usaha	265 UMKM	265 UMKM	844,220,955	1,182,220,955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM Mandiri	35 UKM	810,661,614

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												949,956,500	1,422,603,000						1,285,000,000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												891,085,250	1,363,731,750						1,105,000,000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												891,085,250	1,363,731,750						1,105,000,000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen perencanaan industri	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	524,585,750	830,044,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	600,000,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen perencanaan industri	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	75,495,000	242,742,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	120,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen perencanaan industri		11 %	11 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	291,004,500	290,944,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	385,000,000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												9,060,000	9,060,000						20,000,000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota												9,060,000	9,060,000						20,000,000
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang berijin industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan industri	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9,060,000	9,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase IKM yang berijin industri	3 %	20,000,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												49,811,250	49,811,250						160,000,000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota												49,811,250	49,811,250						160,000,000
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Data IKM yang terpublikasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49,811,250	49,811,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100 %	160,000,000
																TOTAL	9,184,432,357	11,574,914,864					11,376,321,589

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0001 UPT Logam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											4,372,595,750	4,459,561,000						1,975,427,978
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											440,000,000	440,000,000						440,000,000
3	31	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											440,000,000	440,000,000						440,000,000
3	31	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan UPT Logam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Layanan UPT Logam	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425.110.000 rupiah	425.110.000 rupiah	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	440,000,000	440,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan UPT Logam	425.110.000 rupiah	440,000,000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											3,932,595,750	4,019,561,000						1,535,427,978
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											3,932,595,750	4,019,561,000						1,535,427,978
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianya Dokumen RPIK dan terfasilitasinya IKM dalam Penyuluhan Sentra IKM, Pelatihan Sarana Produksi dan Teknis Industri, Monev dan Pendampingan IKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3,932,595,750	4,019,561,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industriyang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	1,535,427,978
																	TOTAL	4,372,595,750	4,459,561,000					1,975,427,978

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada perubahan tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 1
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 4
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ..... **II - 1**
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 1
2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... II - 3
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan ..... II - 62
2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II - 65

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**

BAB IV PENUTUP ..... **IV - 1**
4.1. Catatan Penting ..... IV - 1
4.2. Kaidah Pelaksanaan ..... IV - 1
4.3. Rencana Tindak Lanjut ..... IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023..... II - 22
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta..... II - 65
Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II - 66
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kota Yogyakarta..... III - 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta .....II - 2

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri atas:

1. Perumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
   Tahap ini mencakup analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
2. Penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
   Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:
   I. Pendahuluan
   II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
   III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
   IV. Penutup

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 35);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 57).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**
- 2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
- 2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

BAB IV **PENUTUP**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

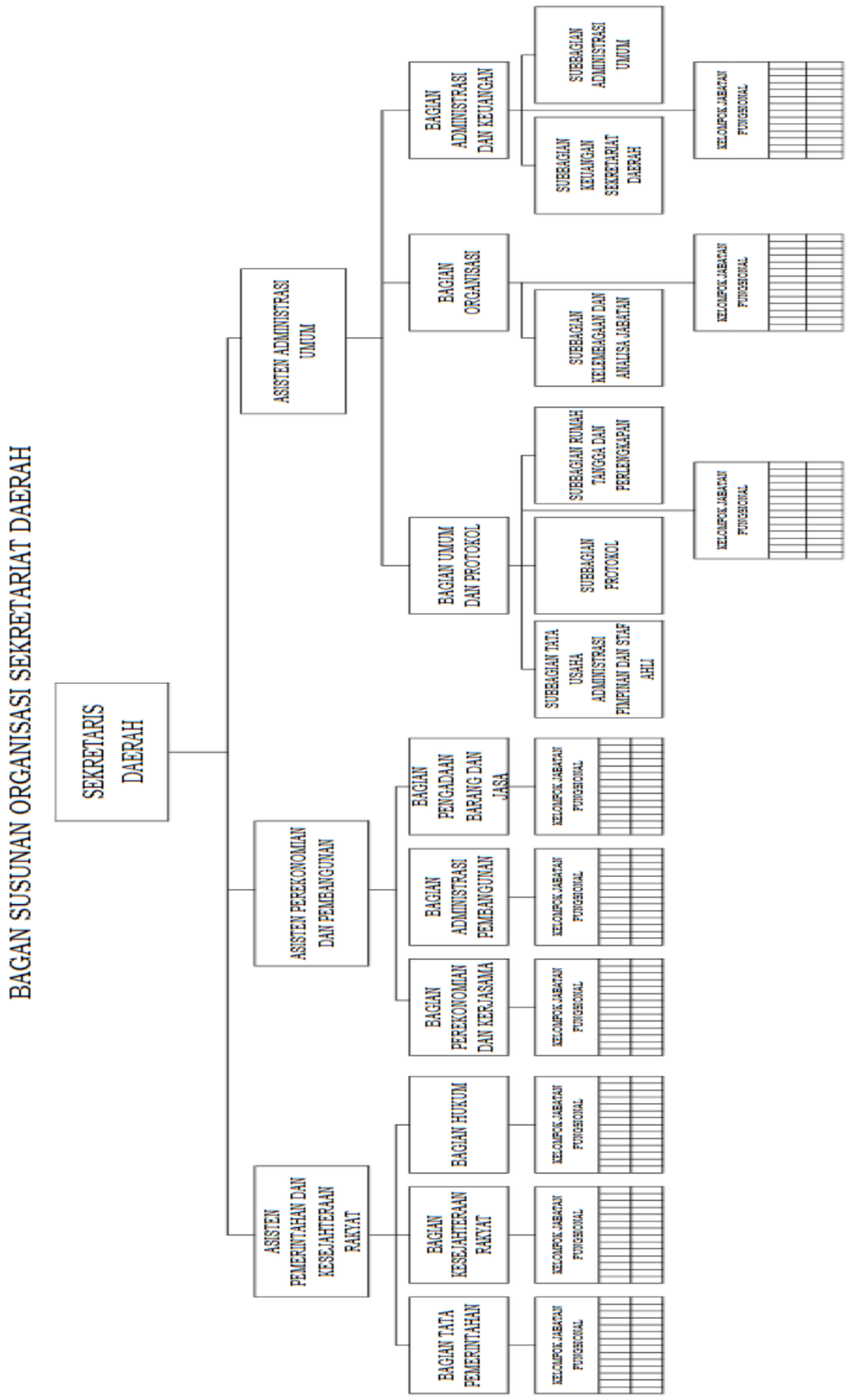
2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    1) Bagian Tata Pemerintahan;
    2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    3) Bagian Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
    1) Bagian Administrasi Pembangunan;
    2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama;
    3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
    1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
        a) Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
        b) Subbagian Protokol; dan
        c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
    2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
        a) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
        b) Subbagian Administrasi Umum.
    3) Bagian Organisasi, terdiri atas subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perwal Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok Bagian Tata Pemerintahan:

   melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

   Fungsi Bagian Tata Pemerintahan:

   1) pengoordinasian perencanaan program Bagian Tata Pemerintahan;
   2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   3) pengoordinasian bahan perumusan dan koordinasi kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   4) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
6) fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas;
7) penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
8) penyiapan bahan, fasilitasi, dan koordinasi kebijakan penanganan sengketa batas wilayah;
9) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi;
10) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan profil dan monografi kelurahan;
11) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Kemantren dan kelurahan;
12) pengoordinasian kegiatan pembinaan administrasi Kemantren dan kelurahan;
13) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi kinerja Kemantren;
14) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi perkembangan kelurahan;
15) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah Kemantren dan/atau kelurahan;
16) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pelaksanaan pembentukan, penggabungan, pemekaran, dan penghapusan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
17) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemilihan dan fasilitasi pelepasan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
18) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan pembentukan kelembagaan kampung;
19) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
20) pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pemilihan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada Kemantren dan Kelurahan;
21) penyiapan bahan penetapan kepengurusan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
22) fasilitasi kegiatan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
23) penyiapan bahan kebijakan penetapan kode dan data kewilayahan;
24) penyiapan bahan dan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Mantri Pamong Praja;

25) monitoring, evaluasi, dan pelaporan dana kelurahan dan dana keistimewaan pada Kemantren dan kelurahan;
26) penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27) penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28) fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah;
29) monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria urusan Pemerintahan Daerah;
30) fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;
31) fasilitasi pengusulan izin dan cuti Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk alasan kepentingan pencalonan Walikota, Wakil Walikota, atau anggota legislatif;
32) penyusunan bahan Memori Jabatan Walikota;
33) koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah;
34) fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
35) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;
36) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Tata Pemerintahan;
37) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Tata Pemerintahan;
38) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan;
39) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan;
40) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan aset Bagian Tata Pemerintahan; dan
41) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Pemerintahan.

2. Tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
4) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
5) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
7) penyiapan bahan kebijakan kerukunan umat beragama;
8) penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan;
9) penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
10) penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
11) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
12) penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan;
13) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;

14) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
15) fasilitasi dan koordinasi organisasi kemasyarakatan keagamaan;
16) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
20) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan kampung;
21) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Daerah;
22) penyiapan bahan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program Gandeng Gendong;
23) fasilitasi dan koordinasi forum stakeholder dan kerja sama pemberdayaan masyarakat;
24) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa;
25) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
26) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
27) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

30) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
31) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
32) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Tugas Pokok Bagian Hukum:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Hukum;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;
6) penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
7) harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
8) penyiapan bahan sambutan Walikota dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
9) penyiapan bahan kajian produk hukum Daerah;
10) pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
11) penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
12) pengoordinasian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13) fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
14) pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;
15) pengoordinasian dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
16) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi serta dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
17) penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
18) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
19) pelayanan administrasi informasi produk hukum;
20) penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Hukum;
22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Hukum;
23) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Hukum;
24) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;
25) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;
26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Hukum; dan
27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Hukum.

4. Tugas pokok Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
6) penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan Badan Milik Daerah dan Badan Layanan Umum;
7) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
8) pelaksanaan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
9) monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
10) penyiapan bahan dan penyusunan data serta analisa di bidang pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif;
11) pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan data usaha mikro dan ekonomi kreatif;
12) fasilitasi dan koordinasi forum kemitraan ekonomi kreatif;
13) fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian perekonomian;
14) fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pengembangan ekonomi kreatif;
15) fasilitasi pelaksanaan kerja sama Daerah;
16) pengelolaan data kerja sama Daerah;
17) fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;

18) pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah;
19) pengendalian kerja sama Daerah;
20) pemantauan dan evaluasi kerja sama Daerah;
21) penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama Daerah;
22) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
23) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
24) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
25) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
26) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
27) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Perekonomian dan Kerja Sama; dan
28) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.

5. Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan:
melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:
1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan;
4) pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan;

5) pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
6) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan;
7) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan sinergitas kebijakan program prioritas pembangunan;
8) penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan;
9) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;
10) pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
11) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
12) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
13) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
14) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan;
15) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
16) koordinasi dan sinkronisasi evaluasi pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
17) penyusunan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
18) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
19) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen evaluasi dan pelaporan pembangunan dan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
20) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa orang perseorangan;
21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi Pembangunan;
23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi Pembangunan;

24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Pembangunan;
25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan;
26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi Pembangunan; dan
27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

6. Tugas pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik.

Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
6) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
7) fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
8) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
9) fasilitasi pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa;

10) fasilitasi penyiapan data dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
11) fasilitasi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;
12) fasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
13) fasilitasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
14) pengoordinasian pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan infrastrukturnya;
15) pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
16) fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
17) pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
18) fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
19) fasilitasi pengelolaan informasi kontrak;
20) pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
21) fasilitasi manajemen sumber daya keahlian pengadaan barang/jasa;
22) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
23) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
24) fasilitasi penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
25) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
26) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
27) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;
29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
30) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

31) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Tugas pokok Bagian Umum dan Protokol:

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan.

Fungsi Bagian Umum dan Protokol:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Umum dan Protokol;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;
7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;
8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol;
9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Umum dan Protokol;
10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;
11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol; dan
12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

8. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Keuangan:

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum.

Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
6) penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
7) penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
8) fasilitasi pelaksanaaan asistensi dan verifikasi perencanaan Sekretariat Daerah;
9) penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
10) pendampingan penyusunan perjanjian kinerja Bagian pada Sekretariat Daerah;
11) fasilitasi dan penyusunan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
12) penyiapan bahan dan fasilitasi terhadap evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah;
13) penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah;
14) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Sekretariat Daerah;

15) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
16) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
17) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
18) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;
19) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

9. Tugas pokok Bagian Organisasi:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Fungsi Bagian Organisasi:

1) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi;
2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
6) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;

7) pendampingan penyusunan ketatalaksanaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
8) pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9) pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
10) monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
11) penyiapan bahan dan penyusunan ketatalaksanaan untuk mendukung urusan keistimewaan bidang kelembagaan;
12) monitoring dan evaluasi survei kepuasan masyarakat;
13) fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;
14) pendampingan penyusunan rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;
15) monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;
16) pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
17) koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
18) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Perangkat Daerah;
19) penyiapan bahan penyusunan kebijakan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah;
20) pengoordinasian dan pendampingan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi;
21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Organisasi;
22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Organisasi;
23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Organisasi;
24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;
25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;
26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Organisasi; dan
27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 program, 23 kegiatan, dan 74 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan:
    a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
    c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD, sub kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD, sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dan sub kegiatan pemanfaatan barang milik daerah SKPD;
    d. Kegiatan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
h. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
i. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah;
j. Kegiatan penataan organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah; dan
l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi keprotokolan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, dan sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan.

2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan, sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan, dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah;

b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat;
c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum, dan sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum; dan
d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, sub kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, dan sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
   b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
   c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kota yogyakarta; dan
   b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan kota yogyakarta.

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Nama Unit Kerja: Bagian Tata Pemerintahan

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu**	**Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu dibagi jumlah seluruh laporan x 100%**	**100%**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 %**	**1.840.689.872**	**100%**	**719.959.568**	**80%**	**541.687.348**	**80%**	**75,24%**					**Bagian Tata Pemerintahan**	
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	**Total Nilai Evaluasi Kelurahan / Jumlah Kelurahan**	**390,00 Nilai**	**0,00**	**Cepat Berkembang Nilai**	**0,00**	**386 (cpt berkembang) Nilai**	**0,00**	**386 (cpt berkembang)**	**0,00**	**391,76 (cpt bkmbang)**	**0,00**	**101,30%**	**0,00%**					**Bagian Tata Pemerintahan**	
		Administrasi Tata Pemerintahan								**1.840.689.872**		**719.959.568**		**541.687.348**		**75.24%**						
		1 Penataan Administrasi Pemerintahan				0,00		0,00		293.698.000	52%	146.859.000	52%	121.922.000	100%	83,02%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		52%		52%		100%							
		2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				0,00		0,00		1.296.037.850	37%	425.816.650	37%	320.629.850	100%	75,30%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		37%		37%		100%							
		3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0,00		0,00		250.954.022	60%	147.283.918	60%	99.135.498	100%	67,31%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		60%		60%		100%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100%**	**75,21%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**610.142.213**	**A Nilai**	**335.595.948**	**A Nilai**	**191.170.206**	**100%**	**56,96%**					**Bagian Tata Pemerintahan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**3.059.000**		**1.311.000**		**1.311.000**		**100%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	874.000,00	50%	437.000,00	50%	437.000,00	100%	100,00%						
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**2.622.000**		**437.000,00**		**437.000,00**		**100%**						
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%						
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		874.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0%		0%		0%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**2.185.000,00**		**874.000,00**		**874.000,00**		**100%**						
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		874.000,00	50%	437.000,00	50%	437.000,00	100%	100,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50%		50%		100%							
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100%		100%		100%							
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0%		0%		0%							
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**437.000,00**		**0,00**		**0,00**		**NAN%**						
		16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**497.779.213**		**263.512.948**		**144.293.155**		**54.76%**						
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		2.000.000	50%	1.000.000	50%	1.000.000	100%	100,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		50%		50%		100%							
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		45.021.213	70%	31.256.948	70%	21.141.150	100%	67,64%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		70%		70%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		5.483.000	100%	5.483.000	100%	4.714.000	100%	85,97%							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100%		100%		100%								
		20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		19.363.000	58%	11.113.000	58%	8.379.750	100%	75,40%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		58%		58%		100%								
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000	50%	1.500.000	50%	1.410.000	100%	94,00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50%		50%		100%								
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		422.912.000	51%	213.160.000	51%	107.648.255	100%	50,50%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		51%		51%		100%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**28.500.000**		**28.500.000**		**26.100.000**		**91.58%**							
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		28.500.000	100%	28.500.000	100%	26.100.000	100%	91,58%							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100%		100%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1.740.000**		**1.140.000**		**1.100.000**		**96.49%**							
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		540.000,00	100%	540.000,00	100%	500.000,00	100%	92,59%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100%		100%		100%								
		25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000	50%	600.000,00	50%	600.000,00	100%	100%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50%		50%		100%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**73.820.000**		**39.821.000**		**17.055.051**		**42.83%**							
		26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		62.445.000	52%	32.221.000	52%	15.255.051	100%	47,35%							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		5 unit		52%		52%		100%								
		27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		11.375.000	68%	7.600.000	68%	1.800.000	100%	23,68%							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		25 unit		68%		68%		100%								
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**84,04%**							
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Total anggaran dari seluruh program										**2.450.832.085**		**1.055.555.516**		**732.857.554**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**100,00%**	**69,43%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi antar subbag yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Kurang optimalnya serapan pada Belanja Pemeliharaan karena menyesuaikan kerusakan yang membutuhkan pemeliharaan dan pada belanja perjalanan dinas kunjungan kerja evaluasi perkembangan kelurahan diundur bulan Juli dikarenakan bertepatan dengan pengumpulan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: - Menginvetarisasi kegiatan ke depan yang sifatnya mandatori dan pelaporan yang bersifat berjenjang. - Penyiapan bahan-bahan untuk Triwulan beikutnya untuk segera dikoordinasikan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:

Nama Unit Kerja: Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat**	**(6,67% x (jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan bina mental spiritual))+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan sosial)+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan masyarakat)))**	**86,68 %**	**0,00**		**0,00**	**46,67 %**	**3.898.144.000**	**33,34% %**	**3.250.634.000**	**33,34 % %**	**2.757.420.430**	**100%**	**84,83%**					**Retnaningtyas , S.STP.,M.IP**	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								**3.898.144.000**		**3.250.634.000**		**2.757.420.430**		**84.83%**						
		1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0,00		0,00		2.957.458.000	82,73%	2.446.626.000	82,73%	2.350.188.000	100%	96,06%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		0 Dokumen		0 Dokumen		26 Dokumen		82,73%		82,73%		100%							
		2 Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				0,00		0,00		254.026.000	73,94%	188.283.000	73,94%	19.923.750	100%	10,58%						
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		73,94%		73,94%		100%							
		3 Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				0,00		0,00		686.660.000	89,70%	615.725.000	89,70%	387.308.680	100%	62,90%						
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		89,70%		89,70%		100%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100%**	**56,51%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Rendah**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**426.025.950**	**A Predikat**	**273.515.200**	**A Predikat**	**174.853.620**	**100%**	**63,93%**					**Retnaningtyas , S.STP., M.IP.**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**36.078.000**		**15.550.000**		**15.136.000**		**97.34%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		34.008.000	42,04%	14.308.000	42,04%	14.308.000	100%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		36 Dokumen		42,04%		42,04%		100%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	0,00	100%	0,00%						
			Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**39.804.000**		**16.792.000**		**15.550.000**		**92.60%**						
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		50,00%		50,00%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		414.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		414.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemerikasaan		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		37.320.000	42,75%	15.964.000	42,75%	15.136.000	100%	94,81%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0		0		0		42,75%		42,75%		100%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	0,00	100%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**34.422.000**		**15.136.000**		**15.136.000**		**100%**						
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100%	100%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100%							
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100%		100%		100%							
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		32.766.000	42,82%	13.894.000	42,82%	13.894.000	100%	100%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		42,82%		42,82%		100%							
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0		0		0		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**828.000,00**		**414.000,00**		**0,00**		**0%**						
		16 MonitoringEvaluasida n Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	0,00	100%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**207.455.950**		**146.429.200**		**65.568.320**		**44.78%**						
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		690.000,00	100%	690.000,00	100%	345.000,00	100%	50,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100%		100%		100%							
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		32.444.050	100%	32.444.050	100%	17.144.600	100%	52,84%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100%		100%		100%							
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		8.394.900	100%	8.394.900	100%	4.197.450	100%	50,00%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100%		100%		100%							
		20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		29.987.000	49,45%	15.008.250	49,45%	10.508.750	100%	70,02%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		49,45%		49,45%		100%							
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		960.000,00	49,98%	480.000,00	49,98%	375.000,00	100%	78,13%						
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0		0		0		49,98%		49,98%		100%							
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		134.980.000	65,63%	89.412.000	65,63%	32.997.520	100%	36,91%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		26 Laporan		65,63%		65,63%		100%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**55.000.000**		**55.000.000**		**48.203.000**		**87.64%**						
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		55.000.000	100%	55.000.000	100%	48.203.000	100%	87,64%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100%		100%		100%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**3.200.000**		**1.600.000**		**1.500.000**		**93.75%**						
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.000.000	50,00%	1.000.000	50,00%	1.000.000	100%	100%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,00%		50,00%		100%							
		25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000	49,98%	600.000,00	49,98%	500.000,00	100%	83,33%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		49,98%		49,98%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**49.238.000**		**22.594.000**		**13.760.300**		**60.90%**						
		26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	4 Unit	37.138.000	45,46%	16.894.000	45,46%	12.560.300	100%	74,35%						
											45,46%		45,46%		100%							
		27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	4 Unit	12.100.000	47,10%	5.700.000	47,10%	1.200.000	100%	21,05%						
											47,10%		47,10%		100%							
		Rata-rata capaian kinerja													**100%**	**69,53%**						
		Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
		Total anggaran dari seluruh program								**4.324.169.950**		**3.524.149.200**		**2.932.274.050**								
		Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)													**100%**	**83,21%**						
		Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)													**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan 2. Komunikasi intensif secara kontinue yang mendesak OPD terkait tusi segera disinkronisasikan secara optimal.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kendala teknis dalam sinkronisasi jadwal koordinasi dengan OPD mitra 2. Update database kebijakan yang kurang optimal 3. Penyesuaian tusi dengan nomenklatur baru yang baru disahkan bulan April dan keluaran masih blm sesuai 4. Teknis input siRup yang mengalami
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: 1. Optimalisasi update database kebijakan serta koordinasi dengan OPD terkait 2. Perlu percepatan program kegiatan terutama untuk mencapai target urusan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya 3. Koordinasi dengan Bagian
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:

Nama Unit Kerja: Bagian Hukum

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum**	**40% Produk hukum diharmonisasi/produk hukum ditetapkan + 20% Produk hukum ditetapkan/produk hukum yg didokumentasi + 20% Peraturan perundang-undangan yg ditetapkan/Peraturan perundang-undangan yg terinformasikan + 10% Perkara terselesaikan/ Perkara masuk + 10% hasil penilaian Kota Peduli HAM**	**99,40 nilai**	**0,00**	**0,00 -**	**0,00**	**99,10 nilai**	**1.722.448.474**	**99.1 nilai**	**952.778.362**	**94.5 nilai**	**738.523.700**	**4%**	**77,51%**					**Bagian HUkum**	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								**1.722.448.474**		**952.778.362**		**738.523.700**		**77.51%**						
		1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				0,00		0,00		732.139.250	69,29%	429.523.250	69,29%	411.689.500	100,00%	95,85%						
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		235 Dokumen		0,00%		69,29%		0,00%							
		2 Fasilitasi Bantuan Hukum				0,00		0,00		366.672.000	69,00%	251.219.000	69,00%	113.611.950	100,00%	45,22%						
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		0 kasus		0 kasus		5 kasus		69,00%		69,00%		100,00%							
		3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				0,00		0,00		623.637.224	47,00%	272.036.112	45,00%	213.222.250	95,74%	78,38%						
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		45,00%		0,00%							
															98,58%	**73,15%**						
															Sangat Tinggi	**Sedang**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**1.142.547.918**	**A Predikat**	**591.979.665**	**A Predikat**	**487.060.013**	**0,00%**	**82,28%**					**Bagian Hukum**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**3.840.000**		**1.656.000**		**1.380.000**		**83.33%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.656.000	67,00%	1.104.000	67,00%	1.104.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		67,00%		67,00%		100,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	50,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**44.028.000**		**18.712.000**		**17.776.000**		**95%**						
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		42.924.000	49,98%	18.160.000	47,00%	17.500.000	94,04%	96,37%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		49,98%		47,00%		94,04%							
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**1.380.000**		**552.000,00**		**552.000,00**		**100%**						
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		552.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**552.000,00**		**276.000,00**		**0,00**		**0%**						
		16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		552.000,00	50,00%	276.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**939.186.940**		**489.424.000**		**404.513.113**		**82.65%**						
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.275.000	68,00%	2.875.000	68,00%	2.875.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		68,00%		68,00%		100,00%							
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		58.037.750	60,00%	34.500.000	53,00%	25.374.296	88,33%	73,55%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket		60,00%		53,00%		88,33%							
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		7.239.940	70,00%	4.999.000	63,00%	3.659.000	90,00%	73,19%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		70,00%		63,00%		90,00%							
		20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		17.034.250	59,00%	10.000.000	47,00%	3.144.000	79,66%	31,44%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		59,00%		47,00%		79,66%							
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		8.600.000	51,00%	4.300.000	45,00%	2.733.450	88,24%	63,57%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		51,00%		45,00%		88,24%							
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		844.000.000	53,00%	432.750.000	53,00%	366.727.367	100,00%	84,74%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		41 Laporan		53,00%		53,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**38.300.000**		**38.300.000**		**27.900.000**		**72.85%**						
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		38.300.000	100,00%	38.300.000	85,00%	27.900.000	85,00%	72,85%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		85,00%		85,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**48.936.000**		**13.368.000**		**12.764.000**		**95.48%**						
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.336.000	60,00%	1.668.000	60,00%	1.364.000	100,00%	81,77%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		60,00%		60,00%		100,00%							
		25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000	50,46%	600.000,00	50,46%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,46%		50,46%		100,00%							
		26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		44.400.000	49,98%	11.100.000	49,98%	10.800.000	100,00%	97,30%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		49,98%		49,98%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**66.324.978**		**29.691.665**		**22.174.900**		**74.68%**						
		27 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				0,00		0,00		53.049.978	44,00%	22.966.665	44,00%	19.399.900	100,00%	84,47%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		6 unit		44,00%		44,00%		100,00%							
		28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		13.275.000	51,00%	6.725.000	40,00%	2.775.000	78,43%	41,26%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		49 unit		51,00%		40,00%		78,43%							
															90,18%	**72,53%**						
															Sangat Tinggi	**Sedang**						
										2.864.996.392		**1.544.758.027**		**1.225.583.713**								
															91,28%	**79,34%**						
															Sangat Tinggi	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Tim kerja yang solid (kompak, kapabel, semangat, dan berdedikasi)I, ingkungan kerja yang nyaman, 2. Sarana dan Prasarana yang memadai 3. Koordinasi dengan instansi/lembaga/OPD terkait yang berjalan lancar 4. Adanya Fasilitasi pergeseran anggaran
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core bussiness . 2. Disposisi dari atasan kadang mendadak, sebagian besar anggaran bersifat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: - Koordinasi atau dikomunikasikan dengan BKPSDM terkait peningkatan kompetensi. - Menyampaikan pelaporan-pelaporan yang menjadi daya dukung pencapaian SAKIP.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Nama Unit Kerja: Bagian Perekonomian dan Kerjasama

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti**	**Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / seluruh kerjasama yang masih berlaku x 100%**	**90,00 %**	**0,00**	**99,49 %**	**0,00**	**87,40 %**	**868.283.000**	**87.40%**	**384.736.000**	**94.42%**	**342.200.326**	**108.03%**	**88,94%**					**Kelompok Substansi Kerjasama Daerah**	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah								**868.283.000**		**384.736.000**		**342.200.326**		**88.94%**						
		1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0,00		0,00		586.568.000	50,00%	284.930.000	48,00%	244.311.000	96,00%	85,74%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama		0 Dokumen		0 Dokumen		42 Dokumen		50,00%		48,00%		96,00%							
		2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				0,00		0,00		48.955.000	98,00%	48.150.000	98,00%	46.340.476	100,00%	96,24%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		98,00%		98,00%		100,00%							
		3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				0,00		0,00		232.760.000	22,50%	51.656.000	22,50%	51.548.850	100,00%	99,79%						
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		0 laporan		0 laporan		1 laporan		22,50%		22,50%		100,00%							
															98,67%	**93,93%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik**	**Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasakan laporan) / jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%**	**86,54 %**	**0,00**		**0,00**	**80,77 %**	**955.644.000**	**80.77%**	**451.498.000**	**81.16%**	**137.503.827**	**100.48%**	**30,46%**					**Kelompok substansi Pembinaan BUMD dan BLUD**	
			Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	**Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi/jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%**	**78,57 %**	**0,00**	**55,00 %**	**0,00**	**57,00 %**	**0**	**21.43**	**0**	**28.57**	**0**	**133,32%**	**0,00%**					**Kelompok Substansi Pengendalian Perekonomian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif**	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								**955.644.000**		**451.498.000**		**137.503.827**		**30.46%**						
		1 KoordinasiSinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0,00		0,00		421.714.000	47,50%	198.160.000	40,00%	51.493.000	84,21%	25,99%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		0 Dokumen		0 Dokumen		24 Dokumen		47,50%		40,00%		84,21%							
		2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0,00		0,00		378.480.000	33,00%	116.863.000	30,00%	84.123.827	90,91%	71,98%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		33,00%		30,00%		90,91%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	155.450.000	88,50%	136.475.000	50,00%	1.887.000	56,50%	1,38%						
											88,50%		50,00%		56,50%								
															77,21%	**33,12%**						
								Rata-rata capaian kinerja														
								Predikat kinerja							**Tinggi**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**565.193.100**	**A**	**316.744.300**	**A**	**293.338.958**	**100%**	**92,61%**					**Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**3.013.000**		**1.426.000**		**1.029.000**		**72.16%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	460.000,00	51,00%	230.000,00	50,00%	115.000,00	98,04%	50,00%						
											51,00%		50,00%		98,04%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	460.000,00	52,00%	230.000,00	50,00%	115.000,00	96,15%	50,00%						
											52,00%		50,00%		96,15%								
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	552.000,00	67,00%	368.000,00	67,00%	368.000,00	100,00%	100,00%						
											67,00%		67,00%		100,00%								
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%								
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	460.000,00	51,00%	230.000,00	50,00%	115.000,00	98,04%	50,00%						
											51,00%		50,00%		98,04%								
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	736.000,00	51,00%	368.000,00	50,00%	316.000,00	98,04%	85,87%						
											51,00%		50,00%		98,04%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**2.139.000,00**		**874.000,00**		**874.000,00**		**100%**						
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	552.000,00	68,00%	368.000,00	68,00%	368.000,00	100,00%	100,00%						
											68,00%		68,00%		100,00%								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	368.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	368.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	621.000,00	46,00%	276.000,00	46,00%	276.000,00	100,00%	100,00%						
											46,00%		46,00%		100,00%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%						
											100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**1.380.000**		**644.000,00**		**483.000,00**		**75%**						
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%						
											47,00%		47,00%		100,00%							
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%						
											47,00%		47,00%		100,00%							
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	345.000,00	47,00%	161.000,00	45,00%	0,00	95,74%	0,00%						
											47,00%		45,00%		95,74%							
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%						
											47,00%		47,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**345.000,00**		**161.000,00**		**161.000,00**		**100%**						
		16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%						
											47,00%		47,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**283.857.100**		**154.050.700**		**135.731.597**		**88.11%**						
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	1.587.000	70,00%	1.099.500	70,00%	1.099.500	100,00%	100,00%						
											70,00%		70,00%		100,00%							
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	39.912.600	85,00%	26.606.200	70,00%	16.352.350	82,35%	61,46%						
											85,00%		70,00%		82,35%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		11.554.000	61,00%	6.999.000	60,00%	5.378.000	98,36%	76,84%						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0 Paket		0 Paket		1 Paket		61,00%		60,00%		98,36%							
		20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		25.611.500	61,00%	15.500.000	60,00%	10.383.000	98,36%	66,99%						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		61,00%		60,00%		98,36%							
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000	50,40%	1.500.000	50,00%	1.150.000	99,21%	76,67%						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0		0		0		50,40%		50,00%		99,21%							
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		202.192.000	52,00%	102.346.000	52,00%	101.368.747	100,00%	99,05%						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		11 Laporan		52,00%		52,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**72.000.000**		**72.000.000**		**71.450.000**		**99.24%**						
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		72.000.000	100,00%	72.000.000	100,00%	71.450.000	100,00%	99,24%						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**138.294.000**		**57.270.000**		**55.627.519**		**97.13%**						
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		46.374.000	42,50%	18.810.000	42,00%	17.834.249	98,82%	94,81%						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		42,50%		42,00%		98,82%							
		25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.920.000	50,40%	960.000,00	50,00%	893.270,00	99,21%	93,05%						
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,40%		50,00%		99,21%							
		26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		90.000.000	42,50%	37.500.000	42,00%	36.900.000	98,82%	98,40%						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		42,50%		42,00%		98,82%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**64.165.000**		**30.318.600**		**27.982.842**		**92.30%**						
		27 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		52.115.000	49,00%	24.518.600	49,00%	23.374.092	100,00%	95,33%						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit		0 Unit		5 Unit		49,00%		49,00%		100,00%							
		28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.050.000	49,00%	5.800.000	49,00%	4.608.750	100,00%	79,46%						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		28 Unit		49,00%		49,00%		100,00%							
		Rata-rata capaian kinerja													**98,45%**	**83,09%**						
		Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
		Total anggaran dari seluruh program								**2.389.120.100**		**1.152.978.300**		**773.043.111**								
		Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)													**96,41%**	**67,05%**						
		Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)													**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai 2. Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot. 3. tersedianya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD 4. Adanya desk pemetaan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap 2. Belum semua OPD memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu 3. Belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap 4. belum tersedianya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: 1. Memanfaatkan teknologi informasi seperti google drive, link tree/ s.id dalam penyimpanan data terkait BUMD dan BLUD yang dapat di akses secara online. 2. Melakukan komunikasi dengann OPD yang belum memberikan atau mengirimkan data yang dibutuhkan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: 1. Memanfaatkan teknologi informasi seperti google drive, link tree/ s.id dalam penyimpanan data terkait BUMD dan BLUD yang dapat di akses secara online. 2. Melakukan komunikasi dengann OPD yang belum memberikan atau mengirimkan data yang dibutuhkan

Nama Unit Kerja: Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)**	**99,29**	**0,00**	**99,93 %**	**0,00**	**98,52 %**	**514.630.930**	**56,87 %**	**217.708.500**	**52,84 %**	**204.693.000**	**92%**	**94,02%**						
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								**514.630.930**		**217.708.500**		**204.693.000**		**94.02%**						
		1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				0,00		0,00		171.421.680	38,63%	57.400.000	38,63%	53.954.000	100,00%	94,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		38,63%		0,00%							
		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0,00		0,00		208.101.250	59,43%	106.059.000	56,42%	98.379.000	94,94%	92,76%						
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		56,42%		0,00%							
		3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				0,00		0,00		135.108.000	44,61%	54.249.500	44,62%	52.360.000	100,02%	96,52%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		44,62%		0,00%							
															98,32%	**94,42%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**244.030.650**	**A Predikat**	**97.239.400**	**A Predikat**	**68.895.925**	**0,00%**	**70,85%**					**Ka. Bag. Administrasi Keuangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**5.643.000**		**646.000,00**		**612.000,00**		**94.74%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				0,00		0,00		874.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.584.000,00	25,00%	646.000,00	25,00%	612.000,00	100,00%	94,74%						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		25,00%		25,00%		100,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		874.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.370.000**		**2.185.000**		**1.683.000**		**77.03%**						
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	95,65%						
			Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.622.000	50,00%	1.311.000	50,00%	1.265.000	100,00%	96,49%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**1.748.000**		**437.000,00**		**437.000,00**		**100%**							
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%								
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%								
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%								
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%						
											100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**437.000,00**		**437.000,00**		**437.000,00**		**100%**							
		16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%						
											100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**142.540.650**		**51.684.400**		**36.939.950**		**71.47%**							
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%						
											100,00%		100,00%		100,00%								
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	22.378.450	44,95%	8.961.200	44,95%	5.498.000	100,00%	61,35%						
											0,00%		47,26%		0,00%								
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	13.088.600	50,00%	6.041.600	50,00%	2.648.000	100,00%	43,83%						
											50,00%		50,00%		100,00%								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	24.050.000	55,00%	12.050.000	55,00%	11.910.950	100,00%	98,85%							
											55,00%		55,00%		100,00%								
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	1.716.600	67,00%	1.146.600	67,00%	985.000,00	100,00%	85,91%							
											67,00%		67,00%		100,00%								
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	80.407.000	29,00%	22.585.000	29,00%	14.998.000	100,00%	66,41%							
											29,00%		29,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**900.000,00**		**900.000,00**		**895.000,00**		**99.44%**							
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	895.000,00	100,00%	99,44%							
			Belanja Peralatan PC		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**32.572.000**		**13.755.000**		**13.735.000**		**99.85%**							
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		31.372.000	42,10%	13.155.000	42,10%	13.135.000	100,00%	99,85%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		42,10%		42,10%		100,00%								
		25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya				0,00		0,00		1.200.000	49,80%	600.000,00	49,90%	600.000,00	100,20%	100,00%							
			Belanja Tagihan Telpon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		49,80%		49,90%		100,20%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**55.820.000**		**27.195.000**		**14.156.975**		**52.06%**							
		26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		50.570.000	50,00%	24.595.000	50,00%	11.656.975	100,00%	47,40%							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		6 Unit		50,00%		50,00%		100,00%								
		27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		5.250.000	55,00%	2.600.000	55,00%	2.500.000	100,00%	96,15%							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		10 Unit		55,00%		55,00%		100,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							**100,01%**	**81,53%**							
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
								Total anggaran dari seluruh program		**758.661.580**		**314.947.900**		**273.588.925**									
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**99,76%**	**86,87%**						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus tercapai agar capaian kinerja organisasinya baik 2. Adanya monev realisasi fisik tiap bulan. 3. Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat 2. Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik 3. Ada kebijakan untuk belanja modal di wilayah tidak diperkenankan untuk dibangun di atas tanah non
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: Agar dilakukan koordinasi secara instensif dengan BPBJ terkait pengadaan vendor untuk pekerjaan konstruksi yang diperlukan dalam pelaksaan belanja hibah di wilayah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Agar meningkatkan kualitas pengendalian pekerjaan fisik untuk menjaga kesesuaian spek pekerjaan di lapangan dengan spek yang tertuang di dalam kontrak

Nama Unit Kerja: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)**	**(Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan aplikasi SIRUP dibagi Total Jumlah Paket Pengadaan) x 100%**	**87,00 %**	**0,00**		**0,00**	**85,50 %**	**600.663.320**	**40% %**	**256.629.000**	**31.51% %**	**248.321.595**	**78,78%**	**96,76%**					**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								**600.663.320**		**256.629.000**		**248.321.595**		**96.76%**						
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0,00		0,00		191.323.000	50,00%	94.723.000	50,00%	94.107.930	100,00%	99,35%						
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				0,00		0,00		226.448.000	49,98%	87.186.000	49,98%	87.002.415	100,00%	99,79%						
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		49,98%		0,00%							
		3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0,00		0,00		182.892.320	40,85%	74.720.000	40,85%	67.211.250	100,00%	89,95%						
			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		0 Orang		0 Orang		50 Orang		40,85%		40,85%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**96,36%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**1.116.977.374**	**A**	**864.597.050**	**A**	**198.316.642**	**100%**	**22,94%**					**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**6.040.000**		**994.000,00**		**763.300,00**		**76.79%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		952.000,00	17,00%	154.000,00	17,00%	142.800,00	100,00%	92,73%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		17,00%		17,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	1.350.000	50,00%	675.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	68,15%						
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	882.000,00	20,00%	165.000,00	20,00%	160.500,00	100,00%	97,27%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**53.878.000**		**22.235.000**		**21.236.476**		**95.51%**						
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	816.000,00	33,00%	264.000,00	33,00%	111.100,00	100,00%	42,08%						
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	630.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.896.000	40,00%	730.000,00	40,00%	698.000,00	100,00%	95,62%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		49.584.000	45,00%	20.765.000	45,00%	20.427.376	100,00%	98,37%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		45,00%		45,00%		100,00%								
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		952.000,00	50,00%	476.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**1.632.000**		**804.000,00**		**408.000,00**		**50.75%**							
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		35,00%		35,00%		100,00%								
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		35,00%		35,00%		100,00%								
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**408.000,00**		**132.000,00**		**0,00**		**0%**							
		16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**160.174.974**		**98.143.050**		**87.858.706**		**89.52%**							
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		2.137.500	100,00%	2.137.500	80,00%	1.610.000	80,00%	75,32%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		80,00%		80,00%								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	44.697.699	45,00%	17.948.800	45,00%	13.855.000	100,00%	77,19%						
											45,00%		45,00%		100,00%							
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	5.892.025	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	11.577.000	55,00%	6.257.000	55,00%	3.362.100	100,00%	53,73%						
											55,00%		55,00%		100,00%							
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	4.800.000	50,00%	2.375.000	50,00%	1.699.700	100,00%	71,57%						
											50,00%		50,00%		100,00%							
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	91.070.750	80,00%	69.424.750	80,00%	67.331.906	100,00%	96,99%						
											80,00%		80,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**148.500.000**		**40.650.000**		**39.929.441**		**98.23%**						
		23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	1.500.000	68,00%	1.000.000	68,00%	1.000.000	100,00%	100,00%						
											68,00%		68,00%		100,00%							
		24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	3.000.000	44,00%	1.250.000	44,00%	1.029.441	100,00%	82,36%						
											44,00%		44,00%		100,00%							
		25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	144.000.000	49,98%	38.400.000	49,98%	37.900.000	100,00%	98,70%						
											0,00%		49,98%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**746.344.400**		**701.639.000**		**48.120.719**		**6.86%**						
		26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	6 Unit	64.730.000	49,98%	28.494.000	49,98%	21.414.969	100,00%	75,16%						
											49,98%		49,98%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		16.614.400	50,00%	8.145.000	50,00%	2.702.000	100,00%	33,17%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		21 Unit		50,00%		50,00%		100,00%							
		28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		665.000.000	100,00%	665.000.000	30,00%	24.003.750	30,00%	3,61%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana GEdung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		30,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**96,09%**	**59,22%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**1.717.640.694**		**1.121.226.050**		**446.638.237**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**96,54%**	**39,83%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat tertangani dengan baik
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan tatakala SiRUP mengakibatkan persentase ketepatan waktu menurun. Dan seharusnya apabila ada perubahan pelaksanaan terkait pemilihan penyedia harus di sesuaikan pula entry data SiRUP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: agar tetap mempertahankan ataupun meningkatkan dalam melakukan pendampingan kepada OPD-OPD yang masih sering melakukan kekeliuran dalam melakukan input data SiRUP.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: terkait dengan ketepatan waktu Rencana Umum Pengadaan yang menjadi capaian kinerja BPBJ, agar dapat terus berperan aktif untuk melakukan pendampingan kepada OPD-OPD yang masih sering mengalami revisi RUP.

Nama Unit Kerja: Bagian Organisasi

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi dengan bobot : evaluasi kelembagaan : 20% + SOP per unit terendah (5 SOP): 10% + Proses Bisnis sampai dengan L2: 15% + Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A: 20% + Nilai PMPRB Perangkat Daerah diatas 70: 25% + Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Pelayanan/SPP: 10%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**88,00 %**	**510.000.000**	**88%**	**164.414.750**	**0%**	**109.118.000**	**0,00%**	**66,37%**					**P. Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. (Kepala Bagian Organisasi)**	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								**255.500.000**		**36.269.750**		**6.029.750**		**16.62%**						
		1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				0,00		0,00		255.500.000	30,41%	36.269.750	30,41%	6.029.750	100,00%	16,62%						
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		0 Lembaga		0 Lembaga		3 Lembaga		0,00%		30,41%		0,00%							
		Peningkatan Budaya Pemerintahan								**254.500.000**		**128.145.000**		**103.088.250**		**80.45%**						
		2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		254.500.000	55,00%	128.145.000	55,00%	103.088.250	100,00%	80,45%						
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
															100,00%	**48,54%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi dengan bobot : evaluasi kelembagaan : 20% + SOP per unit terendah (5 SOP): 10% + Proses Bisnis sampai dengan L2: 15% + Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A: 20% + Nilai PMPRB Perangkat Daerah diatas 70: 25% + Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Pelayanan/SPP: 10%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**88,00 %**	**874.300.495**	**88% %**	**464.429.678**	**0%**	**319.512.791**	**0,00%**	**68,79%**					**P. Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. (Kepala Bagian Organisasi)**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**5.925.000**		**3.100.000**		**2.880.000**		**92.90%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%	758.000,00	100,00%	89,18%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		275.000,00	8,00%	0,00	8,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		8,00%		8,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		275.000,00	7,00%	0,00	7,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		7,00%		7,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.550.000	51,00%	1.125.000	51,00%	1.008.000	100,00%	89,60%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.125.000	30,00%	275.000,00	30,00%	264.000,00	100,00%	96,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		30,00%		30,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**42.174.000**		**17.085.000**		**16.990.000**		**99.44%**						
		8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		39.624.000	43,00%	16.510.000	43,00%	16.510.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		43,00%		43,00%		100,00%							
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		575.000,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		10,00%		10,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		575.000,00	8,00%	0,00	8,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		8,00%		8,00%		100,00%							
		11 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		275.000,00	11,00%	0,00	11,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		11,00%		11,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		850.000,00	73,00%	575.000,00	73,00%	480.000,00	100,00%	83,48%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		73,00%		73,00%		100,00%							
		13 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		275.000,00	11,00%	0,00	11,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		11,00%		11,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**1.700.000**		**1.700.000**		**1.491.000,00**		**87.71%**						
		14 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	264.000,00	100,00%	96,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		15 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	264.000,00	100,00%	96,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		16 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	84,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		17 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	480.000,00	100,00%	83,48%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**575.000,00**		**575.000,00**		**480.000,00**		**83.48%**						
		18 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	480.000,00	100,00%	83,48%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**178.772.695**		**112.863.278**		**87.886.245**		**77.87%**						
		19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		3.708.800	100,00%	3.708.800	80,00%	1.710.000	80,00%	46,11%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		80,00%		80,00%							
		20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		53.456.395	70,00%	35.689.828	66,00%	26.880.658	94,29%	75,32%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket		70,00%		66,00%		94,29%							
		21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		13.413.250	57,00%	7.058.650	53,00%	4.744.000	92,98%	67,21%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		57,00%		53,00%		92,98%							
		22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		16.224.250	58,00%	9.011.000	57,00%	7.535.000	98,28%	83,62%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		58,00%		57,00%		98,28%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.250.000	100,00%	1.250.000	100,00%	1.250.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		90.720.000	67,00%	56.145.000	63,00%	45.766.587	94,03%	81,51%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		67,00%		63,00%		94,03%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**2.764.000**		**1.552.000**		**1.329.705**		**85.68%**						
		25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		724.000,00	68,00%	412.000,00	65,00%	350.000,00	95,59%	84,95%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		68,00%		65,00%		95,59%							
		26 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.040.000	60,00%	1.140.000	59,00%	979.705,00	98,33%	85,94%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		60,00%		59,00%		98,33%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**55.324.800**		**27.922.400**		**19.082.841**		**68.34%**						
		27 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		44.474.800	51,00%	21.922.400	50,00%	15.882.841	98,04%	72,45%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		5 Unit		51,00%		50,00%		98,04%							
		28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		10.850.000	59,00%	6.000.000	58,00%	3.200.000	98,31%	53,33%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		19 Unit		59,00%		58,00%		98,31%							
		Penataan Organisasi								**587.065.000**		**299.632.000**		**189.373.000**		**63.20%**						
		29 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0,00		0,00		254.573.000	55,00%	133.990.000	55,00%	71.227.000	100,00%	53,16%						
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		30 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0,00		0,00		188.190.000	58,00%	106.677.000	58,00%	84.532.500	100,00%	79,24%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		58,00%		58,00%		100,00%							
		31 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0,00		0,00		117.982.000	55,00%	48.460.000	55,00%	27.470.500	100,00%	56,69%						
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		32 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				0,00		0,00		26.320.000	42,00%	10.505.000	42,00%	6.143.000	100,00%	58,48%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%							
															98,43%	**65,60%**						
															Sangat Tinggi	**Sedang**						
										1.384.300.495		**628.844.428**		**428.630.791**								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**98,52%**	**68,16%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi PPTK dan petugas urusan dalam tercapainya kegiatan sesuai tatakala; 2. Adanya komitmen semua ASN untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala;
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Penyedia barang yang tidak semua mempunyai barang yang kita butuhkan; 2. Adanya perubahan kondisi yang menjadi tidak sesuai dengan tatakala. 3. Proses pengadaan barang melalui e-katalog yang lebih membutuhkan banyak waktu.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: - Mengkondisikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:

Nama Unit Kerja: Bagian Umum dan Protokol

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan**	**Hasil survey responden**	**81,50 poin**	**0,00**	**81,41 poin**	**0,00**	**81,25 poin**	**9.264.996.179**	**81,25 poin**	**3.875.542.425**	**81,43 poin**	**2.645.303.031**	**100,00%**	**68,26%**					**Bagian Umum dan Protokol**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**6.305.000**		**2.730.000**		**2.730.000**		**100%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		6,00%		6,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	11,00%	0,00	11,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		11,00%		11,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		6,00%		6,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.545.000	49,00%	1.695.000	49,00%	1.695.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		7 laporan		49,00%		49,00%		100,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.380.000	51,00%	690.000,00	51,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		2 laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.815.000**		**1.995.000**		**1.830.000**		**91.73%**						
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.815.000	47,00%	825.000,00	47,00%	660.000,00	100,00%	80,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		9 dokumen		47,00%		47,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		460.000,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		6,00%		6,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		690.000,00	52,00%	345.000,00	52,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%							
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.815.000	46,00%	825.000,00	46,00%	825.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		46,00%		46,00%		100,00%							
		12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**3.450.000**		**2.070.000**		**2.070.000**		**100%**						
		13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000	53,00%	690.000,00	53,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		53,00%		53,00%		100,00%							
		14 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	53,00%	345.000,00	53,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		53,00%		53,00%		100,00%							
		15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	53,00%	345.000,00	53,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		53,00%		53,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		16 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**54.690.000**		**54.345.000**		**40.594.000**		**74.70%**						
		17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		54.000.000	100,00%	54.000.000	98,00%	40.249.000	98,00%	74,54%						
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		98,00%		98,00%							
		18 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		690.000,00	51,00%	345.000,00	51,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**635.460.600**		**360.961.800**		**315.798.446**		**87.49%**						
		19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		357.142.600	54,29%	191.301.800	54,29%	157.025.600	100,00%	82,08%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket		0,00%		54,29%		0,00%							
		20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		33.268.000	67,00%	22.000.000	67,00%	21.241.750	100,00%	96,55%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		67,00%		67,00%		100,00%							
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		47.880.000	46,00%	21.750.000	46,00%	18.991.500	100,00%	87,32%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,00%		46,00%		100,00%							
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		197.170.000	64,00%	125.910.000	64,00%	118.539.596	100,00%	94,15%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		64,00%		64,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**309.622.000**		**137.555.000**		**131.754.263**		**95.78%**						
		23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		262.822.000	42,17%	109.955.000	42,16%	109.183.800	99,98%	99,30%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		42,16%		0,00%							
		24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		32.400.000	63,00%	20.400.000	63,00%	17.170.463	100,00%	84,17%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		63,00%		63,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		14.400.000	51,00%	7.200.000	51,00%	5.400.000	100,00%	75,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1.047.955.000**		**380.175.000**		**218.774.558**		**57.55%**						
		26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		697.920.000	52,00%	356.875.000	50,00%	209.983.438	96,15%	58,84%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		31 unit		52,00%		50,00%		96,15%							
		27 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		30.735.000	53,00%	16.200.000	53,00%	4.516.120	100,00%	27,88%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		1 unit		53,00%		53,00%		100,00%							
		28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.300.000	58,00%	7.100.000	58,00%	4.275.000	100,00%	60,21%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		34 unit		58,00%		58,00%		100,00%							
		29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		307.000.000	10,00%	0	8,15%	0,00	81,50%	0,00%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		8,15%		0,00%							
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								**3.200.000**		**3.200.000**		**0,00**		**0%**						
		30 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0,00		0,00		3.200.000	100,00%	3.200.000	98,00%	0,00	98,00%	0,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		98,00%		98,00%							
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								**4.660.139.682**		**1.611.415.625**		**1.119.332.184**		**69.46%**						
		31 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				0,00		0,00		912.015.983	49,08%	442.014.000	48,87%	253.923.112	99,57%	57,45%						
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		10 paket		0,00%		48,87%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		32 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				0,00		0,00		207.000.000	39,90%	81.500.000	39,90%	64.992.852	100,00%	79,75%						
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		0,00%		39,90%		0,00%							
		33 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				0,00		0,00		3.541.123.699	35,65%	1.087.901.625	35,26%	800.416.220	98,91%	73,57%						
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		23 paket		0,00%		35,26%		0,00%							
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								**2.538.358.897**		**1.321.095.000**		**812.419.580**		**61.50%**						
		34 Fasilitasi Keprotokolan				0,00		0,00		1.412.233.897	58,79%	817.425.000	56,96%	477.044.328	96,89%	58,36%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		56,96%		0,00%							
		35 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0,00		0,00		1.101.635.000	45,06%	492.085.000	43,70%	326.212.252	96,98%	66,29%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		43,70%		0,00%							
		36 Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0,00		0,00		24.490.000	48,00%	11.585.000	46,00%	9.163.000	95,83%	79,09%						
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		48,00%		46,00%		95,83%							
															98,88%	**68,66%**						
															Sangat Tinggi	**Sedang**						
										9.264.996.179		**3.875.542.425**		**2.645.303.031**								
															98,88%	**68,26%**						
															Sangat Tinggi	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya. 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin (kegiatan seremonial, perjalanan dinas).
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Menyesuaikan acara dan agenda pimpinan (adanya perubahan jadwal acara, adanya undangan mendadak).
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: - Komunikasi intensif penyampaian informasi ploting anggaran dan tatakala kegiatan kepada pimpinan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:

Nama Unit Kerja: Bagian Administrasi dan Keuangan

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**0,00**	**A Predikat**	**817.568.727**	**A Predikat**	**449.333.424**	**A Predikat**	**328.694.843**	**0,00%**	**73,15%**					**Bagian Administrasi dan Keuangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**52.496.000**		**23.846.000**		**22.418.000**		**94.01%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	5 Dokumen	41.192.000	47,74%	19.665.000	47,74%	19.392.000	100,00%	98,61%						
											47,74%		47,74%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.035.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.035.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	529.000,00	100,00%	529.000,00	100,00%	529.000,00	100,00%	100,00%						
											100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	529.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	6.336.000	41,84%	2.651.000	41,84%	1.496.000	100,00%	56,43%						
											41,84%		41,84%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	6 Laporan	1.840.000	54,40%	1.001.000	54,50%	1.001.000	100,18%	100,00%						
											54,40%		54,50%		100,18%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**154.648.000**		**62.531.600**		**60.364.000**		**96.53%**						
		8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		45.328.000	42,72%	19.362.000	42,72%	19.123.000	100,00%	98,77%						
			umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		42,72%		42,72%		100,00%							
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.610.000	40,00%	2.244.000	40,00%	2.048.000	100,00%	91,27%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		58.048.000	41,39%	24.024.600	41,39%	22.527.000	100,00%	93,77%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		41,39%		41,39%		100,00%							
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		2.208.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.012.000	50,00%	506.000,00	50,00%	483.000,00	100,00%	95,45%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		39.722.000	41,27%	16.395.000	41,27%	16.183.000	100,00%	98,71%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		41,27%		41,27%		100,00%							
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		2.720.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**165.030.000**		**69.820.000**		**67.381.000**		**96.51%**						
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000	33,33%	460.000,00	33,33%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		33,33%		33,33%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		680.000,00	67,65%	460.000,00	67,65%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		67,65%		67,65%		100,00%							
		17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		13.640.000	45,45%	6.200.000	45,45%	5.126.000	100,00%	82,68%						
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		45,45%		45,45%		100,00%							
		18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		144.270.000	41,87%	60.400.000	41,87%	59.503.000	100,00%	98,51%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		41,87%		41,87%		100,00%							
		19 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		5.060.000	45,45%	2.300.000	45,45%	1.832.000	100,00%	79,65%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		45,45%		45,45%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**2.850.000**		**1.425.000**		**966.000,00**		**67.79%**						
		20 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		2.850.000	50,00%	1.425.000	50,00%	966.000,00	100,00%	67,79%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**271.518.227**		**174.913.324**		**105.414.363**		**60.27%**						
		21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		5.053.500	56,17%	2.838.750	56,17%	2.811.375	100,00%	99,04%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		56,17%		56,17%		100,00%							
		22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		58.241.927	59,41%	34.600.922	59,41%	28.167.472	100,00%	81,41%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		59,41%		59,41%		100,00%							
		23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		22.044.800	54,87%	12.095.900	54,87%	6.776.200	100,00%	56,02%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		54,87%		54,87%		100,00%							
		24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		26.803.000	62,13%	16.652.752	62,13%	12.035.850	100,00%	72,28%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		62,13%		62,13%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	13 Dokumen	2.700.000	22,22%	600.000,00	22,22%	540.000,00	100,00%	90,00%						
											22,22%		22,22%		100,00%							
		26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	156.675.000	69,01%	108.125.000	69,01%	55.083.466	100,00%	50,94%						
											69,01%		69,01%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**84.500.000**		**75.000.000**		**47.650.080**		**63.53%**						
		27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		84.500.000	88,76%	75.000.000	88,76%	47.650.080	100,00%	63,53%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		88,76%		88,76%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**4.700.000**		**2.100.000**		**1.600.000**		**76.19%**						
		28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.500.000	42,86%	1.500.000	42,86%	1.000.000	100,00%	66,67%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		42,86%		42,86%		100,00%							
		29 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**81.826.500**		**39.697.500**		**22.901.400**		**57.69%**						
		30 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		55.541.500	47,80%	26.547.500	47,80%	14.983.400	100,00%	56,44%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		7 Unit		47,80%		47,80%		100,00%							
		31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		26.285.000	50,03%	13.150.000	50,03%	7.918.000	100,00%	60,21%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		32 Unit		50,03%		50,03%		100,00%							
															100,01%	**83,01%**						
															Sangat Tinggi	**Tinggi**						
										817.568.727		**449.333.424**		**328.694.843**								
															100,01%	**73,15%**						
															Sangat Tinggi	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya perubahan regulasi terkait evaluasi SAKIP sehingga penyusunan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP belum optimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: Untuk SAKIP ada beberapa instrumen agar segera disiapkan dengan komponen-komponen sesuai aturan yang baru kemudian menyiapkan data dukunnya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 6 tujuan dan 6 sasaran. Tujuan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan;
5. Meningkatnya kebijakan pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah.

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dengan indikator kinerja sasaran Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator kinerja sasaran Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian, dengan indikator kinerja sasaran indeks perekonomian;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan, dengan indikator kinerja sasaran indeks pelaksanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kebijakan pelayanan publik, dengan indikator kinerja sasaran Indeks pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah, dengan indikator kinerja sasaran hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung			40,59	40,59	--	--	41,49	42,19	--	--	
2	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat			--	--	40%	42,86%	--	--	40%	42,86%	
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	--	--	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat tinggi (3,4581)	--	--	
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	
5	Indeks Perekonomian			64,62	69,73	71,32	75,34	68	73,05	71,32	75,34	
6	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			94,3	95,4	94,6	94,8	95,15	93,36	94,6	94,8	
7	Indeks Pelayanan publik			80,75	81	84,24	84,26	80,69	81,4	84,24	84,26	
8	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat			--	--	A	A	--	--	A	A	

Sumber: Perwal Kota Yogyakarta no. 35 tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan	Laporan tersusun tepat waktu	a. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. PP Nomor 13/2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Kuantitas SDM yang memahami penyusunan laporan	a. Komitmen dari perangkat daerah terkait untuk mensuplai data yang diperlukan dalam penyusunan laporan b. Terbitnya peraturan/ pedoman baru terkait penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai dan memerlukan waktu yang agak lama

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
2. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Melalui mekanisme hibah uang tunai	Permendagri No.77/2020 Perwal No.20/2021	Pencermatan proposal hibah	Keterlambatan proposal hibah (tidak tepat waktu)	Pencermatan Raperwal tidak tepat waktu
3. Keberadaan kelembagaan kampung dengan RT,RW & LPMK	Regulasi keberadaan kampung diatur melalui Perwal	Perwal No. 25 Tahun 2020	RT,RW & LPMK diatur dengan Perda sehingga memunculkan kesenjangan antara RT, RW LPMK dengan Kampung	Perlu waktu dalam mengganti Perda (untuk memasukkan kampung ke dalam Perda)	Pelaksanaan kegiatan untuk kampung belum maksimal
4. Kurangnya efektivitas, kualitas, dan terlalu banyaknya produk hukum	Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan jumlah yang terlalu banyak serta tumpang tindih	Undang- undang No 12 Tahun 2011, Pemendagri No 20 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Pemendagri No 120 Tahun 2018	SDM, Anggaran, Kurangnya Literatur	a. Adanya undang-undang cipta kerja dan aturan pelaksanaannya b. Pandemi Covid 19	Banyaknya peraturan yang harus disesuaikan namun terhambat dengan kurangnya jumlah SDM dan Anggaran
5. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama	Perangkat Daerah teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi
6. Pengelolaan barang persediaan	Laporan barang persediaan di tingkat setda sering tidak sinkron	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1. SDM	Kurang koordinasi antara Pengurus Barang dengan Bendahara	Masih sering terjadi ketidaksinkronan dalam penyusunan laporan barang persediaan di tingkat setda
7. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	a. PPTK, PPKom dan petugas urusan kurang koordinasi dalam melakukan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporannya pada sub kegiatan b. PPTK masih kurang koordinasi dalam menyusun perencanaan sub kegiatan dan target fisik	Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
8.				c. Adanya pandemi covid19 membuat beberapa pekerjaan tertunda dan /atau dibatalkan d. Adanya peraturan pusat yang tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya sehingga kesulitan dalam penerapanny aperencanaa n kegiatan	
9. Pelayanan pengadaan barang/ jasa	Pejabat pengadaan di BPBJ masih memfasilitasi OPD lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kewilayahan	Belum ada	Terbatasnya jumlah pelaku pengadaan terutama pejabat pengadaan barang/jasa	Ketersediaan SDM pada setiap OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa masih minim	Kurang optimalnya proses pemilihan pengadaan barang/jasa
10. Kelembagaan yang harus harus menyesuaikan dengan pelaksanaan penyederhana an birokrasi	Kelembagaan yang ada sudah sesuai dengan konsep penyederhanaa n birokrasi saat ini	a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 d. Per menpan 7 tahun 2022	Komitmen untuk melaksanaan penyederhanaa n birokrasi	Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyederhanaa n birokrasi yang belum memadai	Belum tersedianya aturan yang memadai dari Pusat terkait dengan pelaksanaan penyederhanaa n birokrasi
11. Perubahan mekanisme pelayanan publik	a. P elayanan publik sudah terintegrasi dalam sistem JSS b. S istem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan sedang dalam proses penyesuaian karena adanya perubahan pelayanan dari manual ke digital	a. UU No 25 tahun 2009 b. UU No.11 Tahun 2020 c. PP No. 96 Tahun 2012 d. PP No. 5 Tahun 2021 e. PP No. 6 Tahun 2021 f. Per da No 7 tahun 2011	Telah tersedia Peraturan Walikota yang mengatur tentang layanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	a. Amanat dari Perpres No. 95 Tahun 2018 b. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas layanan	a. Perlunya penyesuaia n regulasi yang mendukung pelayanan publik terintegrasi dalam sistem JSS. b. Perlunya penyesuaia n Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan yang mendukung perubahan

					pelayanan dari manual ke digital.
Aspek Kajian	**Capaian/ Kondisi Saat Ini**	**Standar yang Digunakan**	**Faktor yang Mempengaruhi**		**Permasalahan Pelayanan PD**
			Internal	**Eksternal**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12. Kualitas layanan keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protokol pemda DIY dan protokol daerah lain	1. Kurangnya jumlah personil dan adanya personil baru karena rotasi pegawai. 2. Intensitas kerja yang sangat tinggi	1. Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolan, 2. Belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	1. Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum 2. Kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan
13. Kualitas layanan kerumahtanggaan	Masih diperlukan review terhadap perencanaan lansekap pertamanan di balaikota	Masterplan pertamanan yang disusun oleh Bagian Umum tahun 2019	2. Kurangnya personil 3. Intensitas kerja tinggi	Adanya perubahan dan penyesuaian di lapangan yang tidak sesuai dengan masterplan yang sudah disusun	Belum adanya ciri khas yang diangkat dalam penataan pertamanan di balaikota

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi empat isu utama, yaitu:

1. Isu terkait kesejahteraan rakyat.
    a. Program pemberdayaan yang dilakukan OPD masih kurang tepat sasaran, banyak pelatihan yang dilakukan tanpa ada proses lebih lanjutnya saja, hanya menjadi pelatihan-pelatihan saja, tanpa ada pendampingan dan pelatihan lebih lanjut, Dan dari banyaknya pelatihan diikuti oleh peserta yang sama, sehingga program yang diberikan menjadi kurang merata.
2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
    a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan se Kota Yogyakarta;
    b. Perubahan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat yang terbit secara mendadak mengakibatkan dat yang perlu diisi belum tentu tersedia; dan
    c. Penyederhanaan produk hukum daerah.
3. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan.
    a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi;
    b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan; dan
    c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.

4. Isu terkait pelayanan publik.
    a. Pengalihan layanan publik melalui layanan online;
    b. Penyelarasan budaya kerja SATRIYA dengan BERAKHLAK;
    c. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan;
    d. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan; dan
    e. Pengelolaan barang persediaan yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan barang persediaan di tingkat setda.

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp 4.286.849.933, dari Rp 39.783.477.406 menjadi Rp 44.070.327.339, terdiri dari kegiatan:
    a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp 13.907.000, dari Rp 122.399.000 menjadi Rp 108.492.000;
    b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, anggaran naik sebesar Rp 896.072.000, dari Rp 24.112.663.800 menjadi Rp 25.008.735.800;
    c. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggaran turun sebesar Rp 500.000, dari Rp 961.709.000 menjadi Rp 961.209.000;
    d. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, anggaran tetap sebesar Rp 61.122.000;
    e. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, anggaran tetap sebesar Rp 212.927.000;
    f. Kegiatan administrasi umum, anggaran naik sebesar Rp 174.107.390, dari Rp 3.316.746.349 menjadi Rp 3.490.853.739;
    g. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, anggaran naik sebesar Rp 589.795.690, dari Rp 279.200.000 menjadi Rp 868.995.690;
    h. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran turun sebesar Rp 11.237.600, dari Rp 690.328.000 menjadi Rp 679.090.400;
    i. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp 51.271.000, dari Rp 2.240.818.678 menjadi Rp 2.292.089.678;
    j. Kegiatan penataan organisasi, anggaran naik sebesar Rp 3159610, dari Rp 587.065.000 menjadi Rp 590.224.610;
    k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, anggaran naik sebesar Rp 2.491.644.740, dari Rp 4.660.139.682 menjadi Rp 7.151.784.422;

l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, anggaran naik sebesar Rp 106.444.103, dari Rp 2.538.358.897 menjadi Rp 2.644.803.000.

2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp 407.474.050, dari Rp 8.329.565.346 menjadi Rp 7.922.091.296, terdiri dari kegiatan:
    a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, anggaran turun sebesar Rp 268.563.800, dari Rp 1.840.689.872 menjadi Rp 1.572.126.072;
    b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp 25.673.000, dari Rp 3.898.144.000 menjadi Rp 3.872.471.000;
    c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, anggaran turun sebesar Rp 126.611.250, dari Rp 1.722.448.474 menjadi Rp 1.595.837.224;
    d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, anggaran naik sebesar Rp 13.374.000, dari Rp 868.283.000 menjadi Rp 868.283.000;
3. Program perekonomian dan pembangunan, anggaran naik sebesar Rp 24.565.000, dari Rp 2.070.938.250 menjadi Rp 2.095.503.250, terdiri dari kegiatan:
    a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, anggaran tetap sebesar Rp 955.644.000;
    b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, anggaran turun sebesar Rp 1.000.000, dari Rp 514.630.930 menjadi Rp 513.630.930;
    c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, anggaran naik sebesar Rp 25.565.000, dari Rp 600.663.320 menjadi Rp 626.228.320;
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, anggaran tetap sebesar Rp 510.000.000, terdiri dari kegiatan:
    a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, anggaran sebesar Rp 255.500.000;
    b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, anggaran sebesar Rp 254.500.000.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah

Kode Program/					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**24.721.694.800**	**25.623.451.800**		**24.721.694.800**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A Nilai	**24.721.694.800**	**25.623.451.800**		**24.721.694.800**
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23.763.185.800**	**24.664.942.800**		**23.763.185.800**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/ bulan	173 Orang/bulan	23.763.185.800	24.664.942.800	Penyesuaian Jumlah CPNS dan PNS	23.763.185.800
4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**958.509.000**	**958.509.000**		**958.509.000**
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	58.509.000	58.509.000		58.509.000
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	900.000.000	900.000.000		900.000.000
								TOTAL	**24.721.694.800**	**25.623.451.800**	Penyesuaian Jumlah CPNS dan PNS	**24.721.694.800**

Sub Unit Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**A**	**A**	**426.025.950**	**417.996.950**		
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**36.078.000**	**25.294.000**		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	34.008.000	23.224.000	Tenaga Teknis YANG DITERIMA PPPK A.N AHMAD SUNU SURASTAPA	sudah sipd
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	414.000	414.000		
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**39.804.000**	**39.804.000**		**0**
4.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas, KP4	9 Dokumen	9 Dokumen	828.000	828.000		
4.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	414.000	414.000		
4.01.01.2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tangggapan Pemerikasaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Laporan	12 Laporan	37.320.000	37.320.000		
4.01.01.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	828.000	828.000		
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**34.422.000**	**34.422.000**		**0**
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	828.000	828.000		

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	414.000	414.000		
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	32.766.000	32.766.000		
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**828.000**	**828.000**	**0**	**0**
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	828.000	828.000		
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**207.455.950**	**208.495.950**		**0**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	1 Paket	690.000	1.730.000	PERSEDIAAN LAMPU RUANG KERJA	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	32.444.050	32.444.050		0
		- Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	4.948.050	4.948.050		
		- Bahan Kertas dan Cover	1 Paket	1 Paket	5.446.000	5.446.000		
		- Bahan Komputer	1 Paket	1 Paket	22.050.000	22.050.000		
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.394.900	8.394.900		
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	29.987.000	29.987.000		0
		- Barang Cetak	6 jenis	6 jenis	5.549.500	5.549.500		
		- Barang Penggandaan	3 jenis	3 jenis	24.437.500	24.437.500		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	960.000	960.000		-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	29 Laporan	134.980.000	**134.980.000**		0
		Makan Minum Rapat Koordinasi dan konsultasi	10 Laporan	10 Laporan	8.280.000	8.280.000		-
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21 Dokumen	21 Dokumen	126.700.000	126.700.000		-
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**55.000.000**	**60.000.000**	**0**	**0**
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	7 Unit	55.000.000	60.000.000		0
		- Personal Komputer : PC	2 Set	2 Set	34.000.000	34.000.000		
		- Printer	2 Unit	2 Unit	16.000.000	16.000.000		
		- Scanner	1 unit	2 unit	5.000.000	10.000.000	Pengadaan Baru	
							tablet dihapus	

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.200.000**	**3.200.000**		**0**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000		0
		Materai	200 Lembar	200 Lembar	2.000.000	2.000.000		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.200.000		-
		Bantuan Komunikasi Kepala OPD	12 bulan	12 bulan	1.200.000	1.200.000		
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**49.238.000**	**45.953.000**		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	37.138.000	37.753.000		
		- BBM Roda 2 dan 4			26.688.000	24.603.000	PENYESUAIAN HARGA BBM	
		- Pajak, Bea, dan Perizinan			1.500.000	1.500.000		
		- Pemeliharaan Roda 4			7.000.000	0	DIHAPUS DIGANTI REKENING BARU	blm sipd
		- Pemeliharaan Roda 4				9.700.000	REKENING BARU KARENA SHBJ TIDAK MENCUKUPI SAAT PERGESERAN	blm sipd
		- Pemeliharaan Roda 2			1.950.000	1.950.000		
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	12.100.000	8.200.000		0
		- Pemeliharaan AC			2.400.000	2.400.000		
		- Pemeliharaan Komputer			4.900.000	2.800.000	sdh ada penambahan komputer dan laptop	
		- Pemeliharaan Printer			4.800.000	3.000.000	sdh penambahan printer baru	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Layanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**46,67%**	**46,67%**	**3.898.144.000**	**3.872.471.000**		**-**
4.01.02.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				**3.898.144.000**	**3.872.471.000**		**0**
4.01.02.2.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	26 Dokumen	27 Dokumen	2.957.458.000	3.065.958.000		0
		- Alat Tulis Kantor			2.000.000	3.500.000		
		- Bahan Cetak Penggandaan			10.500.000	10.500.000		
		- Souvenir/Cinderamata (Haji)			42.500.000	42.500.000		

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Makan Minum rapat			711.305.000	822.880.000	Tambahan 3000 pack fasilitasi, hari santri 750 peserta, 75 lemsos halfday	
		- Narsum, Moderator, Pembawa Acara			2.900.000	4.400.000		
		- Jasa Tenaga Administrasi			32.352.000	32.352.000		
		- Sewa Peralatan dan Mesin			74.925.000	66.600.000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			64.200.000	66.450.000		
		- Belanja Hibah (Kemenag)			1.368.885.000	1.368.885.000		
		- Belanja Hibah (Baznas)			576.287.000	576.287.000		
		- Belanja Hibah (MUI)			71.604.000	71.604.000		
4.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Meliputi; Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	3 Dokumen	254.026.000	215.842.000		
		- Bahan Cetak Penggandaan			22.686.000	22.686.000		
		- Makan Minum rapat			75.700.000	48.300.000	PERHITUNGAN WAKTU DAN LOKASI	
		- Jasa Tenaga Administrasi			32.352.000	21.568.000	Tenaga Teknis YANG DITERIMA PPPK A.N IKA SAKTIANI	sudah sipd
		- Jasa Konsultansi			123.288.000	123.288.000		
4.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Meliputi; Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	3 Dokumen	686.660.000	590.671.000		0
		- Bahan Cetak Penggandaan			11.100.000	11.100.000		
		- Makan Minum rapat			54.590.000	55.731.000	PENYESEUAIAN KEGIATAN	

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Honorarium Narasumber			48.400.000	14.400.000	JADWAL PJ.WALIKOTA BERSAMAAN, NARSUM DEWAN/TOKOH MASY.DISESUAIKAN KRN SEMULA DILAKSANAKAN DI 14 KEC. TAPI BERUBAH DI BALKOT	
		- Honorarium Tim Pelaksana			60.300.000	60.300.000		
		- Jasa Konsultansi			50.000.000	50.000.000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			462.270.000	399.140.000	PENYESUAIAN ANGGARAN	
ANGGARAN TOTAL					**4.324.169.950**	**4.290.467.950**	Penghapusan sisa anggaran tenaga teknis, perjalanan dinas dan honor narasumber	

Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan								
Kode Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A Nilai**	**A Nilai**	**610.142.213**	**698.260.213**		
4.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.059.000**	**3.059.000**		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	874.000	874.000		
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	437.000	437.000		
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.622.000**	**2.622.000**		
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	437.000	437.000		
4.01.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	874.000	874.000		
4.01.01.2.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**2.185.000**	**2.185.000**		
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	874.000	874.000		
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	437.000	437.000		
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	437.000	437.000		
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**437.000**	**437.000**		
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**497.779.213**	**504.885.213**		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	45.021.213	45.021.213		

Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan								
Kode Program	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Tolok Ukur Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**		**Anggaran**		**Keterangan**	**Prakiraan Maju Tahun 2024**
			Murni	**Perubahan**	**Murni**	**Perubahan**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.483.000	5.483.000		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	19.363.000	19.363.000		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	422.912.000	430.018.000	Ada penambahan anggaran belanja makmin internal	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**28.500.000**	**121.700.000**		
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13 Unit	28.500.000	121.700.000	Ada Penambahan belanja Lemari Es, Laptop, Komputer, Dispenser, Tablet	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.740.000**	**1.700.000**		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	540.000	500.000	Ada pengurangan belanja pengiriman dokumen	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000		
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**73.820.000**	**61.672.000**		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	62.445.000	54.822.000	Ada Pengurangan BBM	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	13 Unit	11.375.000	6.850.000	Ada Pengurangan pemeliharaan Mesin Ketik, AC, Laptop, dan Printer	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah**	**386 (Cepat Berkembang)**	**386 (Cepat Berkembang)**	**1.840.689.872**	**1.572.126.072**		
		Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	**100%**	**100%**				
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**				**1.840.689.872**	**1.572.126.072**		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	293.698.000	393.718.000	Ada penambahan karena pergeseran tusi Toponimi dari administrasi kewilayahan	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	9 Dokumen	1.296.037.850	995.595.800	Ada pengurangan karena pergeseran tusi Toponimi ke administrasi pemerintahan dan ada pengurangan di jamuan makan, Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar dan Perjalanan Dinas	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	250.954.022	182.812.272	Ada pengurangan pada jamuan makan, honor tim Pembina dan honor narasumber	
	TOTAL ANGGARAN				**2.450.832.085**	**2.270.386.285**		

Sub Unit Organisasi : Bagian Hukum								
Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**A**	**1.142.547.918**	**1.238.077.978**		**1.067.615.229**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.840.000**	**4.668.000**		**3.840.000**
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	8 Dokumen	1.656.000	2.208.000	Penambahan volume rapat	1.656.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	552.000	828.000	Penambahan volume rapat	552.000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**44.028.000**	**44.028.000**		**58.260.000**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	42.924.000	42.924.000		57.156.000
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**1.380.000**	**1.380.000**		**1.380.000**
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	552.000	552.000		552.000
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	276.000	276.000		276.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**552.000**	**552.000**		**552.000**
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	552.000	552.000		552.000
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**939.186.940**	**975.614.000**		**877.822.250**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.275.000	4.275.000		300.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	58.037.750	53.746.750	Pengurangan rincian belanja	7.648.000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.239.940	6.920.500	Pengurangan rincian belanja	240.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17.034.250	12.771.750	Pengurangan rincian belanja	17.034.250
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	8.600.000	8.600.000		8.600.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Laporan	42 Laporan	844.000.000	889.300.000	Penambahan volume SPPD untuk Propemperda dan Propemperkada	844.000.000
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**38.300.000**	**92.300.000**		**0**
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	9 Unit	38.300.000	92.300.000	Penambahan belanja modal aset	-
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**48.936.000**	**48.936.000**		**48.936.000**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	3.336.000	3.336.000		3.336.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000		1.200.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	44.400.000	44.400.000		44.400.000
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**66.324.978**	**70.599.978**		**76.824.979**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit	53.049.978	57.324.978	Penyesuaian volume BBM	63.449.979
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	49 unit	49 unit	13.275.000	13.275.000		13.375.000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum**	**99,1 skala 0-100**	**99,1 skala 0-100**	**1.722.448.474**	**1.595.837.224**		**1.722.448.474**
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**1.722.448.474**	**1.595.837.224**		**1.722.448.474**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	235 Dokumrn	231 Dokumen	732.139.250	688.828.000	Pengurangan honor tenaga adminstrasi, penambahan volume rapat, pengurangan volume publikasi, dan penambahan volume FC	732.139.250
4.01.02.2.03.02	Fasilitas bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	5 kasus	5 kasus	366.672.000	289.672.000	Pengurangan honor tim dan FC	366.672.000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	2 Dokumen	7 Dokumen	623.637.224	617.337.224	Pengurangan volume FC	623.637.224
ANGGARAN TOTAL					**2.864.996.392**	**2.833.915.202**		**2.790.063.703**

Sub Unit Organisasi : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.01.006.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**A**	**565.193.100**	**709.903.100**		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.013.000**	**3.013.000**		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	460.000	460.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	460.000	460.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	552.000	552.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	460.000	460.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	736.000	736.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.139.000**	**2.139.000**		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	552.000	552.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	368.000	368.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	368.000	368.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	621.000	621.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000	230.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**1.380.000**	**1.380.000**		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**345.000**	**345.000**		
4.01.4.01.01.006.01.2.05.05.	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**283.857.100**	**272.107.100**		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1.587.000	1.587.000		

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.01.006.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	39.912.600	28.162.600	pengurangan bahan komputer	
4.01.4.01.01.006.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	11.554.000	11.554.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	25.611.500	25.611.500		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	3.000.000	3.000.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	202.192.000	202.192.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**72.000.000**	**84.500.000**		
4.01.4.01.01.006.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	72.000.000	84.500.000	pembelian Tablet	
4.01.4.01.01.006.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**138.294.000**	**135.054.000**		
4.01.4.01.01.006.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	46.374.000	43.374.000	pengurangan benda pos	
4.01.4.01.01.006.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	1.920.000	1.680.000	penyesuaian tagihan telpon	
4.01.4.01.01.006.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**64.165.000**	**211.365.000**		
4.01.4.01.01.006.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	52.115.000	52.115.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	28 Unit	12.050.000	9.250.000	pengurangan pemeliharaan komputer	
4.01.4.01.01.006.01.2.09.09.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit		150.000.000	pemeliharaan gedung untuk pembuatan almari arsip, ruang perspustakaan dan akses difabel	
4.01.4.01.01.006.02.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**868.283.000**	**881.657.000**		
4.01.4.01.01.006.02.2.04.	**Fasilitasi Kerja sama Daerah**				**868.283.000**	**881.657.000**		
4.01.4.01.01.006.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	42 Dokumen	42 Dokumen	586.568.000	588.548.000	penambahan makan minum rapat	
4.01.4.01.01.006.02.2.04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	48.955.000	59.755.000	penambahan iuran luar negeri LHC dan ICLEI	
4.01.4.01.01.006.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	1 laporan	232.760.000	233.354.000	penambahan makan minum rapat	
4.01.4.01.01.006.03.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**955.644.000**	**955.644.000**		
4.01.4.01.01.006.03.2.01.	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				**955.644.000**	**955.644.000**		
4.01.4.01.01.006.03.2.01.01.	KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen	24 Dokumen	421.714.000	421.714.000		

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.01.006.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	378.480.000	378.480.000		
4.01.4.01.01.006.03.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	155.450.000	155.450.000		
ANGGARAN TOTAL					**2.389.120.100**	**2.547.204.100**		

Sub Unit Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan								
Kode Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**244.030.650**	**282.530.650**		
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**5.643.000**	**5.643.000**		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	874.000	874.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2.584.000	2.584.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	874.000	874.000		
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.370.000**	**4.370.000**		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Leporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.622.000	2.622.000		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**1.748.000**	**1.748.000**		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Peneilaian Baarang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	437.000	437.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	437.000	437.000		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		

Kode Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**437.000**	**437.000**		
	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**142.540.650**	**143.540.650**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	900.000	900.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	22.378.450	22.378.450		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	13.088.600	13.088.600		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 paket	1 paket	24.050.000	25.050.000	Pergeseran dari sisa belanja sewa Rp. 1.000.000,- di Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.716.600	1.716.600		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	80.407.000	80.407.000		
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**900.000**	**38.400.000**		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4 unit	900.000	38.400.000	Penambahan 37.500.000 untuk Belanja Modal Unit Komputer dan tablet	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**32.572.000**	**32.572.000**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	31.372.000	31.372.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.200.000		
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**55.820.000**	**55.820.000**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	50.570.000	50.570.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.250.000	5.250.000		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**514.630.930**	**513.630.930**		
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**				**514.630.930**	**513.630.930**		
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 laporan		171.421.680	170.421.680	Berkurang Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan		208.101.250	208.101.250		
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembangunan	1 laporan		135.108.000	135.108.000		
					758.661.580	**796.161.580**	**Penambahan belanja modal**	

Sub Unit Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**A**	**1.116.977.374**	**1.348.077.124**		**1.145.539.264**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**6.040.000**	**6.040.000**		**10.128.000**
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Peruabahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laopran Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	1.350.000	1.350.000		3.160.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	882.000	882.000		3.160.000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**53.878.000**	**53.878.000**		**56.538.000**
4.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	816.000	816.000		952.000
4.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	630.000	630.000		630.000
4.01.01.2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.896.000	1.896.000		3.160.000
4.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laoran koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	49.584.000	49.584.000		50.844.000
4.01.01.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**1.632.000**	**1.632.000**		**1.632.000**
4.01.01.3.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.3.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	408.000	408.000		408.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.3.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	408.000	408.000		408.000
4.01.01.3.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.05	***Administrasi kepegawaian perangkat daerah***				**408.000**	**408.000**		**952.000**
4.01.01.5.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		952.000
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**160.174.974**	**225.469.724**		**304.004.684**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2.137.500	2.137.500		2.075.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	44.697.699	53.864.949	Penambahan belanja bahan komputer, ATK dan bahan kebersihan	57.355.409
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5.892.025	7.766.025	Penambahan belanja gelas, piring dan jumbo	5.892.025
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	11.577.000	13.534.500	penambahan belanja box arsip	13.161.500
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000	4.800.000		4.800.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	91.070.750	143.366.750	penambahan belanja perjalanan dinas untuk klarifikasi paket pengadaan	220.720.750
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**	**157.800.000**		**341.940.180**
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12 Unit	-	157.800.000	penambahan belanja laptop, printer dan mebelair	341.940.180
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**148.500.000**	**148.400.000**		**149.000.000**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000	2.000.000	penambahan belanja materai	2.000.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	2.400.000	pengurangan harga satuan pembayaran telepon 7 digit	3.000.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	144.000.000	144.000.000		144.000.000
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**746.344.400**	**754.449.400**		**281.344.400**
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit	64.730.000	64.730.000		64.730.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 Unit	21 Unit	16.614.400	24.719.400	penambahan belanja oli dan aki genset	16.614.400
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	665.000.000	665.000.000		200.000.000
4.01.02	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)**	**85,5%**	**85,5%**	**600.663.320**	**626.228.320**		**650.663.320**
4.01.02.2.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				**600.663.320**	**626.228.320**		**650.663.320**
4.01.02.2.01.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	191.323.000	198.181.000	penambahan belanja makan minum untuk koordinasi paket pengadaan	191.323.000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	226.448.000	256.448.000	penambahan belanja pengembangan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan Barang jasa	276.448.000
4.01.02.2.01.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	50 Orang	50 Orang	182.892.320	171.599.320	pengurangan belanja makan minum, belanja bantuan akomodasi narasumber dan pengurangan harga satuan pada belanja jasa konsultansi	182.892.320
	ANGGARAN TOTAL				**1.717.640.694**	**1.974.305.444**	Penambahan belanja modal	**1.796.202.584**

Sub Unit Organisasi : BAGIAN ORGANISASI

Kode Program	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**A**	**A**	**874.300.495**	**1.092.438.675**		
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**5.925.000**	**5.925.000**		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	850.000	850.000		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2.550.000	2.550.000		
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.125.000	1.125.000		
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**42.174.000**	**42.174.000**		
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	39.624.000	39.624.000		
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	575.000	575.000		
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	575.000	575.000		
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	850.000	850.000		

Kode Program	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**1.700.000**	**1.700.000**		
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	275.000	275.000	Efisiensi pada peralatan rumah tangga yang dibutuhkan, kesalahan kode rekening	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	575.000	575.000	Efisiensi pada fotocopy dan jilid karena saat ini sudah banyak menggunakan paperless	
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000		
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**575.000**	**575.000**		
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000		
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**178.772.695**	**219.923.575**		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.708.800	4.308.800	Penambahan pembelian rol kabel dan terminal listrik	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	53.456.395	55.406.395	Pembetulan kode rekening baterai laptop dan penambahan item dari sebelumnya 2 menjadi 5	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.413.250	16.863.250	Penambahan pembelian sendok, garpu, piring, dan dispenser sabun cair	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	16.224.250	16.525.130	Penyesuaian harga jilid dokumen sebelumnya 20.000 menjadi 27.522	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	90.720.000	125.570.000	Penambahan mamin rapat dan perjalanan dinas dalam jawa sebanyak 2x	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**	**144.227.690**		
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	38 unit	0	144.227.690	Penambahan kebutuhan untuk komputer desktop, AC, TV, meja dan kursi kerja, dispenser air minum, tempat sampah pilah, printer, mesin ketik elektrik, meja dan kursi rapat.	

Kode Program	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.764.000**	**2.764.000**		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	724.000	724.000		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.040.000	2.040.000		
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**55.324.800**	**84.924.800**		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	44.474.800	44.974.800	Penyesuaikan perpanjang pajak 5 tahunan STNK kendaraan dinas jabatan	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit	19 unit	10.850.000	12.950.000		
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	0	27.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung ruang rapat dan kamar mandi	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**				**587.065.000**	**590.224.610**		
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	254.573.000	229.545.000	Efisiensi honor tim (anggota), pengurangan akomodasi krn telah dilaksanakan via zoom, serta penyesuaian workshop	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	5 Laporan	188.190.000	196.690.000	Penambahan FGD dan pengurangan anggaran forsesdasi	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	117.982.000	120.252.000	Penambahan honor tim (anggota) selama 3 bulan dan penambahan FGD	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	26.320.000	43.737.610	Penggantian workshop LKIP yang menjadi workshop full 1 hari dan penyesuaian narasumbernya	
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**				**510.000.000**	**510.000.000**		
4.01.04.2.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				**510.000.000**	**510.000.000**		
4.01.04.2.01.04	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	3 Lembaga	3 Lembaga	255.500.000	255.500.000		
4.01.04.2.02.02	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	254.500.000	254.500.000		
TOTAL ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA					**1.384.300.495**	**1.602.438.675**		

Sub Unit Organisasi : Bagian Umum dan Protokol								
Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET OUTPUT		ANGGARAN		KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**A**	**9.264.996.179**	**11.824.932.422**		**10.454.902.294**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**6.305.000**	**6.305.000**		**6.305.000**
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	3.545.000	3.545.000		3.545.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.380.000	1.380.000		1.380.000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.815.000**	**5.815.000**		**5.815.000**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	1.815.000	1.815.000		1.815.000
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	460.000	460.000		460.000
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.815.000	1.815.000		1.815.000
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**3.450.000**	**3.450.000**		**3.450.000**
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000	1.380.000		1.380.000

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET OUTPUT		ANGGARAN		KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**54.690.000**	**54.690.000**		**102.690.000**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	54.000.000	54.000.000		102.000.000
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**635.460.600**	**719.110.600**		**733.713.100**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	357.142.600	392.192.600	- Penambahan jumlah cinderamata, packaging, plakat (output dan target tidak berubah karena satuannya "paket"). - Pengurangan karangan bunga ucapan Walikota.	417.442.600
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	33.268.000	33.268.000		42.300.500
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	47.880.000	40.080.000	- Penurunan di volume SKH dan majalah.	49.200.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	197.170.000	253.570.000	- Pengurangan di belanja makanan dan minuman jamuan tamu, berdasarkan penyerapan Januari s/d Mei 2023. - Penambahan belanja perjalanan dinas biasa.	224.770.000
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**309.622.000**	**303.264.400**		**306.822.000**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	262.822.000	262.072.000	- Pengurangan di volume buku cek dan pengiriman dokumen karena menyesuaikan kebutuhan.	262.822.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	32.400.000	27.992.400	- Menyesuaikan tarif/tagihan per bulan.	29.600.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	14.400.000	13.200.000	- Menyesuaikan tarif / tagihan sewa mesin foto copy per bulan.	14.400.000
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.047.955.000**	**933.010.000**		**1.170.750.000**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	697.920.000	582.350.000	- Pengurangan di volume BBM dan STNK menyesuaikan pemakaian dan kebutuhan.	795.200.000

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET OUTPUT		ANGGARAN		KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	30.735.000	32.560.000	- Pengurangan di volume BBM bis, STNK menyesuaikan pemakaian dan kebutuhan. - Penambahan di pemeliharaan bis.	56.250.000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	12.300.000	11.100.000	- Pengurangan belanja pemeliharaan komputer.	12.300.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	307.000.000	307.000.000		307.000.000
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**3.200.000**	**2.700.000**		**6.400.000**
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	3.200.000	2.700.000	- Menyesuaikan kebutuhan dan tagihan.	6.400.000
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**				**4.660.139.682**	**7.151.784.422**		**5.521.488.297**
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	11 Paket	912.015.983	1.016.302.813	- Pengurangan pada belanja BBM genset, tenaga administrasi, sisa lelang jasa tenga kebersihan, tagihan telepon, tagihan tv berlangganan, sisa pembayaran PBB rumdin Walikota, dekorasi, pemeliharaan genset menyesuaikan kebutuhan dan tagihan. - Penambahan belanja renovasi pendopo rumdin Walikota.	1.215.349.000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	207.000.000	212.996.910	- Pengurangan pada belanja jasa tenaga kebersihan (sisa lelang), tagihan telepon, sisa pembayaran PBB rumdin Wakil Walikota menyesuaikan kebutuhan dan tagihan. - Penambahan belanja pemeliharaan insidental.	694.900.000

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET OUTPUT		ANGGARAN		KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	23 Paket	31 Paket	3.541.123.699	5.922.484.699	- Pengurangan pada belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor, belanja jasa tenaga kebersihan, sewa alat pendingin, sewa peralatan umum, - Penambahan pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa peralatan dan mesin (sewa kendaraan, mebel, alat RT lainnya), jasa konsultansi, pemeliharaan gedung dan bangunan (ruang Bima, canopi tempat parkir BKPSDM dan bank sampah), belanja modal (videotron Pandawa dan Bima, gorden, mesin pencacah kertas, laptop, pc, printer).	3.611.239.297
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**2.538.358.897**	**2.644.803.000**		**2.603.283.897**
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	1.412.233.897	1.804.962.000	- Pengurangan jumlah bulan di belanja jasa tenaga administrasi. - Penambahan pada belanja jamuan makan minum tamu, perjalanan dinas biasa.	1.462.983.897
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	1.101.635.000	815.351.000	- Pengurangan pada belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga ahli.	1.115.810.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	24.490.000	24.490.000		24.490.000
	ANGGARAN TOTAL				**9.264.996.179**	**11.824.932.422**	**Kecenderungan anggaran perubahan 2023 bertambah dibanding murni 2023, dengan penambahan rupiah terbesar pada belanja modal di sub kegiatan 12.03 (Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah)**	**10.454.412.294**

Sub Unit Organisasi : Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode Program/					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**817.568.727**	**834.658.427**		**834.658.427**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A Nilai	**817.568.727**	**834.658.427**		**834.658.427**
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**52.496.000**	**48.545.000**		**48.545.000**
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	41.192.000	39.816.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	39.816.000
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.035.000	330.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	330.000
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.035.000	330.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	330.000
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	529.000	529.000		529.000
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	529.000	220.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	220.000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	6.336.000	5.346.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	5.346.000
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	1.840.000	1.974.000	Penambahan Belanaja Makan Minum Rapat	1.974.000
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**154.648.000**	**148.963.000**		**148.963.000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	45.328.000	45.328.000		45.328.000
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	5.610.000	5.100.000		5.100.000
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	58.048.000	55.682.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	55.682.000
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.208.000	966.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	966.000

Kode Program/					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.012.000	759.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	759.000
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	39.722.000	39.722.000		39.722.000
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.720.000	1.406.000	Penurunan Belanaja Makan Minum Rapat	1.406.000
4	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**165.030.000**	**165.030.000**		**165.030.000**
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000	1.380.000		1.380.000
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	680.000	680.000		680.000
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.640.000	13.640.000		13.640.000
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	144.270.000	144.270.000		144.270.000
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.060.000	5.060.000		5.060.000
4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2.850.000**	**2.850.000**		**2.850.000**
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	2.850.000	2.850.000		2.850.000
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**271.518.227**	**221.706.927**		**221.706.927**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.053.500	5.493.500	Penambahan Belanja Lampu 19 W	5.493.500
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	58.241.927	54.176.127	Efisiensi Belanja Bahan Komputer, ATK & Kertas	54.176.127
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.044.800	21.068.800	Penambahan Belanja Alat Makan	21.068.800
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.803.000	17.023.500	Efisiensi Belanaja FC	17.023.500
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	2.700.000	2.640.000	Efisiensi Belanaja Surat Kabar	2.640.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	156.675.000	121.305.000	Pengurangan Perjalanan Dinas	121.305.000

Kode Program/					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**84.500.000**	**170.068.000**		**170.068.000**
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	19 Unit	84.500.000	170.068.000	Penambahan Lemari Custom, Gorden, Bor & Rak Siku	170.068.000
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.700.000**	**3.200.000**		**3.200.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan	3.500.000	2.000.000	Pengurangan Belanja Materai	2.000.000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000		1.200.000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**81.826.500**	**74.295.500**		**74.295.500**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	4 Unit	55.541.500	49.195.500	Efisiensi BBM dan STNK	49.195.500
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	27 Unit	26.285.000	25.100.000	Efisiensi Pemeliharaan Mesin Ketik & Rumah tangga	25.100.000
								TOTAL	**817.568.727**	**834.658.427**	Penambahan belanja modal	**834.658.427**

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 terdiri dari 4 program, 21 kegiatan, dan 72 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 54.597.921.885 mengalami penambahan sebesar Rp 3.903.940.883 (7,7%) dari sebelumnya yang sebesar Rp 5.069.398.1002. Penambahan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2023.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2023 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

LAMPIRAN

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di Ruang Sekretaris Bappeda dan melalui zoom meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 2
Jumlah Kegiatan	: 9
Jumlah Sub Kegiatan	: 30
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 3.524.149.200,00
Capaian Realisasi Fisik	: 86.67
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 83.21
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 14

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Target triwulanan perlu memperhatikan tatakala di OPD penyusun kebijakan atau yang mengimplementasikan kebijakan. Misalnya untuk penyusunan Perwal membutuhkan waktu yang lama dengan prosedur yang banyak. Perlu penyesuaian target triwulanan serta koordinasi dengan OPD penyusun kebijakan atau yang mengimplementasikan kebijakan. 2. Daftar regulasi sebagai basis data monitoring implementasi kebijakan perlu dicermati Bagian Kesra Setda dan selanjutnya melibatkan OPD terkait, baik OPD penyusun maupun pelaksana kebijakan, sehingga bisa terpetakan daftar regulasi sesuai prioritas implementasinya.	1. Setelah melakukan pencermatan dan koordinasi dengan mitra OPD atas capaian target program dan sasaran telah mencapai target baik di triwulan 1 maupun triwulan 2. 2. Hasil inventarisasi implementasi kebijakan bagian kesra telah terpetakan daftar regulasi sesuai prioritas implementasinya dan selanjutkan akan dilakukan monev.	**1. Perencanaan**	1. a. Realisasi indikator sasaran "Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat" belum dapat dihitung untuk Urusan Kesejahteraan Masyarakat. b. Database implementasi kebijakan masih bercampur dengan kebijakan yang tidak implementatif 2. Indikator program "Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat" belum mencapai target triwulan II. 3. Realisasi indikator program "Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat" dan tindak lanjut tw sebelumnya belum diinputkan pada SIMONEVA 4. Sinkronisasi tusi yang belum sesuai dengan Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021	1. Optimalisasi update database kebijakan serta koordinasi dengan OPD terkait 2. Perlu percepatan program kegiatan terutama untuk mencapai target urusan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya 3. Isian pada SIMONEVA agar dilengkapi 4. Koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda terkait tusi Bagian Kesra Setda sehingga sesuai dengan kinerja Bagian Kesra Setda
1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak. 3). Dihimbau untuk teman teman tenaga teknis pada Bagian Kesejahteraan Rakyat agar mengisi kinerja harian pada SIM Tenaga Teknis.	1. Progres fisik terkendali dengan baik 2. Tidak ada kontrak di atas 100 jt/ 3. Sudah dilakukan himbauan terhadap TT dalam mengisi ekin di SIM TT dan sudah ditindaklanjuti TT mengisi ekinnya.	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	Pelaksanaan fisik kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik Sebesar 81,47 % dengan target fisik 81,47 %.	1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak.
1) Mohon kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan dan diajukan 2) Pelaksanaan kegiatan sesuikan dengan tata kala	1. Melakukan koordinasi internal dalam pengelolaan keuangan agar proses penyerapan anggaran lebih maksimal 2. Melakukan pencermatan atas capaian fisik dan keuangan agar lebih	**3. Serapan Keuangan**	1) Penyerapan SP2D sampai dengan TW II sebesar 68% 2) Terdapat kegiatan di Kesra yang mundur dari tatakala dan masih dalam proses SPJ. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Mohon pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tatakala agar segera ditindaklanjuti dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan dan diajukan agar penyerapan maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dengan mengacu pada

	sesuai tatakalanya.			aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 3) Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 4) Saat pengajuan SPM harap memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan. 5) Pengajuan SPP SPM LS Ph 3 diajukan maksimal 3 hari setelah tgl BAST
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.	1. Proses pengajuan Pejabat Pengadaan ke BPBJ dan sudah ditindaklanjuti dengan penunjukkan Pejabat Pengadaan untuk transaksi-transaksi melalui LPSE untuk bagian Kesra. 2. Sudah mulai belanja menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta 3. Setiap pembelian produk selalu TKDN 4. Koordinasi intensif dengan BPBJ.	**4. Progress Pengadaan**	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Sasaran strategis terkendali dengan baik	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	1.) Pengisian pengukuran kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat sudah lengkap. 2.) Pengisian pengukuran kinerja eselon bu Retnaningtyas belum dilengkapi	mohon untuk melengkapi pengisian pengukuran kinerja eselon bu Retnaningtyas, khususnya pada bagian "faktor pendorong" dan "uraian permasalahan"
1. Tindaklanjut terhadap rekomendasi/saran hasil evaluasi, baik Evaluasi SAKIP maupun Evaluasi RB agar didokumentasikan, baik	1. Manajemen Resiko Tahun 2023 sudah diperbaiki dan ditindaklanjuti dengan hasil MR bagian Kesra memiliki MR sedang. 2. Dalam penilaian	**6. Pengawasan**	1. SAKIP untuk bagian Kesra merupakan bagian dari Sekretariat Daerah. Sehingga terkait tindaklanjutnya menyesuaikan dengan catatan hasil rekomendasi untuk Setda. 2. Terkait	1. Agar menyesuaikan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan hasil rekomendasi untuk Setda. 2. Untuk teknis Penilaian SPIP mengikuti arahan dari koordinator SPIP

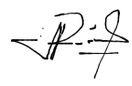
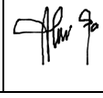
uraian progress-nya maupun bukti dukungnya, sebagai salah satu data pendukung untuk Evaluasi SAKIP & Evaluasi RB Tahun 2022. 2. Catatan hasil evaluasi atas Manajemen Risiko Tahun 2022 agar ditindaklanjuti berupa perbaikan Manajemen Risiko 2023, baik dalam hal pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, maupun pendokumentasiannya	Manajemen Resiko Tahun 2023 telah mengacu pada perwal Manajemen Resiko yang berlaku		dengan SPIP bagian-bagian tetap melakukan penilaian risiko, pengendalian program/kegiatan, meningkatkan integritas personil, mendokumentasikan pengendalian dan keterjadian risiko, untuk teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koordinator SPIP Setda	Setda

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Frida Noor Afifah, S.H. Analis Kebijakan Ahli Muda

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
DIENA KURNIASIH, S.T., M.Sc.	Bappeda	
Agi Diyastuti	BPKAD	
Eka Purwanto	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Luvi Rismawati, S.Psi.	Bag Organisasi	
Diasmita Novemilia S	Inspektorat	

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1107 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN TATA PEMERINTAHAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 2
Jumlah Kegiatan	: 9
Jumlah Sub Kegiatan	: 30
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 1.095.555.516,00
Capaian Realisasi Fisik	: 100.00
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 66.89
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 2

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Hasil reviu ditindaklanjuti pada saat penginputan renja perubahan 2023 setelah dokumen ditetapkan dan penyempurnaan entry renja murni 2024 2.Untuk pengadaan barang dan jasa bisa memaksimalkan melalui e-katalog	sudah ditindak lanjuti pada saat penginputan renja perubahan dan renja murni 2024	**1. Perencanaan**	- Sudah dipenuhi dari konsistensi target dan capaian (Renstra dan Renja). - Masih ada sub kegiatan yang keuangannya belum terserap optimal.	- Optimalkan kegiatan yang belum terserap di triwulan berikutnya.
1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak. 3). Dihimbau untuk teman teman tenaga teknis pada Bagian Tata Pemerintahan agar mengisi kinerja harian pada SIM Tenaga Teknis.	tidak ada paket pekerjaan diatas 100 juta	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	Pelaksanaan fisik kegiatan Bagian Tata Pemerintahan s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik Sebesar 45,77 % dengan target fisik 45,77%.	1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak.
Dalam pengajuan SPM LS pihak 3 lebih cermat dan teliti dan mengacu pada sisdur.	sudah ditindak lanjuti	**3. Serapan Keuangan**	1) Penyerapan SP2D Tata Pemerintahan sampai dengan TW II sebesar 32% dengan rincian belanja barang jasa sebesar 29% dan belanja modal sebesar 92%. 2) Terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaan mundur dari tatakala. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Mohon pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tatakala agar segera ditindaklanjuti dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan agar penyerapan maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dengan mengacu pada aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 3) Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 4) Saat pengajuan SPM harap memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan.
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung,	pengadaan barang dan jasa sudah melalui e-katalog	**4. Progress Pengadaan**	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan

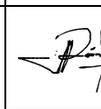
maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.				pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	sudah ditindak lanjuti	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	Pengukuran Kinerja mengikuti Setda	Pengukuran Kinerja mengikuti Setda
1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. Dimohon agar bukti TL rekomendasi SAKIP 2021 segera diupload.	pengadaan barang sudah menggunakan produk dalam negeri	**6. Pengawasan**	LHE sudah diterima OPD	agar menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Benyamin Atyasa, SIP ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KELOMPOK SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
Agi Diyastuti	BPKAD	
Eka Purwanto	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Tri Wahyuningsih, SE	Bag Organisasi	

Agung Idwan H	Inspektorat	

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1107 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN HUKUM, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 2
Jumlah Kegiatan	: 9
Jumlah Sub Kegiatan	: 31
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 1.544.758.027,00
Capaian Realisasi Fisik	: 98.31
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 7
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 79.33
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 7

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Hasil reviu ditindaklanjuti pada saat penginputan renja perubahan 2023 setelah dokumen ditetapkan dan penyempurnaan entry renja murni 2024 2. Pengoptimalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala	Beberapa kegiatan telah ditindaklanjuti dalam input renja perubahan 2023 dan untuk kegiatan dioptimalkan sesuai dengan tatakala.	**1. Perencanaan**	- Masih ada kegiatan yang belum terlaksana dengan optimal sehingga masih ada deviasi fisik dan keuangan. - Ada efisiensi belanja yang perlu ditindaklanjuti di Perubahan Renja 2023.	- Pelaksanaan berikutnya agar menginventarisir kegiatan di Bagian Hukum seperti kasus yang masuk atau ditangani, sosialisasi-sosialisasi yang perlu dilaksanakan. - Target Propemperda yang sudah terealisasi pada triwulan II agar diinventarisir.
1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak. 3). Dihimbau untuk teman teman tenaga teknis pada Bagian Hukum agar mengisi kinerja harian pada SIM Tenaga Teknis.	1. Terimakasih 2. Tidak ada pekerjaan dengan nilai diatas 100 juta yang ber SPK 3. Disampaikan ke TT.	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	Pelaksanaan fisik kegiatan Bagian Hukum s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik Sebesar 57,50 % dengan target fisik 58,49%. terdapat 7 sub kegiatan yg mengalami deviasi di atas 5%.	1). Kendala saat pengadaan menggunakan e purchasing (baru pertama kali menggunakan e purchasing) agar berkoordinasi dengan BPBJ 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak.
Sesuaikan Perwal no. 136 tahun 2021	DIlaksanakan dengan memedomani Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2021	**3. Serapan Keuangan**	- Penyerapan Belanja Daerah s/d TW II sebesar 43% - Meminimalisir surat keterlambatan seperti LS Perorangan	- Kegiatan yang seharusnya dan yang sudah selesai segera diadministrasikan untuk dibuat SPP dan SPM nya
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan	Dilaksanakan, sebagian besar pengadaan langsung telah melalui e katalog lokal dan pelimpahan ke BPBJ.	**4. Progress Pengadaan**	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.				barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Terimakasih	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja mengikuti Setda	Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja mengikuti Setda
1. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. dimohon agar bukti dukung TL rekomendasi SAKIP 2021 segera diupload.	1. Untuk produk produk yang telah ada TKDN akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. 2. Bukti dukung TL Sakip segera di upload.	**6. Pengawasan**	1. Terkait laporan evaluasi SAKIP sudah diterima oleh masing-masing OPD 2. Terkait dengan TL rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, Inspektorat akan membuatkan link khusus sehingga Bagian Hukum bisa mengupload bukti dukung atas TL tersebut. Teknisnya akan disampaikan melalui e-office 3. Untuk Bagian Hukum agar berkoordinasi dan membantu melengkapi dokumentasi yang diperlukan untuk TL Sakip Setda 4. Bagian Hukum sudah mengirimkan laporan realisasi P3DN ke Dinas Perindustrian Koperasi UKM	1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri 2. Agar bukti dukung TL rekomendasi SAKIP 2022 segera diupload 3. Terkait SPIP Bagian Hukum tetap melakukan penilaian risiko, pengendalian program/kegiatan, meningkatkan integritas personil, mendokumentasikan pengendalian dan keterjadian risiko, utk teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koor SPIP setda

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Rahmat Setiabudi Sokonagoro, SH., LL.M. Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sub Koordinator Kelompokl Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
Pratiwi Silawati	BPKAD	
Eka Purwanto	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Tri Wahyuningsih, SE	Bag Organisasi	
Marisa Nurmasari, S.H	Inspektorat	

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Peserta Luring : Bappeda, Lantai 3 Ruang Code Utara; Daring: Zoom Meeting https://bit.ly/DESKII23 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 37
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 34
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 1.152.978.300,00
Capaian Realisasi Fisik	: 87.90
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 3
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 67.05
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 10

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Untuk melakukan review metadata dan melakukan pembahasan internal berkaitan penentuan target, formula, dan sumber data indikator program. 2. Segera merealisasikan penyusunan proses bisnis dan knowledge sistem untuk pembinaan BUMD dan BLUD. 3. Melakukan koordinasi intensif untuk pengumpulan data tindaklanjut hasil kerja sama. 4. Membangun sistem informasi pembinaan BUMD dan BLUD di tahun 2024.	1. sudah dilaksanakan, 2. dalam proses penyusunan rancangan sistem, 3. sudah dilaksanakan, 4. dalam proses pengembangan sistem	**1. Perencanaan**	1. Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 94,42% terkendala belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap; Pihak lain pemerintah Daerah atau organisasi terkendala dalam mengimplementasikan kerjasama. 2. Realisasi BUMD dan BLUD masih menggunakan data triwulan IV 2022.	1. Melakukan koordinasi membahas keberlanjutkan kerjasama dengan Organisasi atau Pemerintah Daerah yang belum terlaksana. 2. Melakukan koordinasi intensif untuk pengumpulan data tindaklanjut hasil kerja sama. 3. Melakukan updating realisasi BUMD dan BLUD sesuai hasil evaluasi hingga triwulan II.
Agar mengejar kekurangan dokumentasinya sehingga realisasi fisiknya bisa tercapai	akan dilaksanakan dengan lebih baik	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	1) Pelaksanaan fisik kegiatan Bag Perekonomian dan Kerjasama s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik 44,56 % dan mengalami deviasi fisik -509% 2) Ada 2 sub kegiatan yg mengalami deviasi di atas 5% yaitu 1.KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil karena mengalami perpanjangan waktu/adendum dari pihak ketiga sehingga 1 paket tenaga ahli mundur di bln juli, sedangkan untuk jasa konsultan akan dilaksanakan september. Untuk 2 paket tenaga ahli akan dihapus di perubahan anggaran	Mohon untuk menjelaskan di SIMPelaporan apa yg menjadi penghambat yang menyebabkan deviasi pada sub kegiatan KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		3. Serapan Keuangan	1) Penyerapan SP2D PKD sampai dengan TW II sebesar 30% dengan rincian belanja barang jasa sebesar 30% dan belanja modal sebesar 99%. 2) Terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaan mundur dari tatakala. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Mohon pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tatakala agar segera ditindaklanjuti dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan agar penyerapan maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dengan mengacu pada aturan Peraturan

				Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 3) Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 4) Saat pengajuan SPM harap memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan.
		4. Progress Pengadaan	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Tidak ada paket tender yang terumumkan dalam RUP untuk TW II Tahun Anggaran 2023.	1. Untuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue). 2. Dimohon pada OPD untuk menyampaikan kepada Penyedia agar mendaftarkan produknya di Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. Pada TW III, OPD dimohon mencermati dalam menentukan metode pemilihan pada SiRUP khususnya untuk metode pemilihan Penunjukan Langung yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	siap laksanakan	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	Pengukuran Kinerja sudah dilakukan di Sekretariat Daerah.	Pertahankan kinerja ke depan.
1. Dokumentasi terkait tindaklanjut catatan penilaian SAKIP dan evaluasi kinerja agar ditingkatkan 2. Agar menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE RB Tahun 2022	1. akan ditingkatkan, 2. akan dilaksanakan	**6. Pengawasan**	- Bag Perekonomian kerjasama sudah mengirimkan lap realisasi penggunaan P3DN - Nilai Evaluasi SAKIP 2023 Setda sudah dalam kategori Memuaskan (A) - LHE AkIP sudah dikirim ke OPD dan terkait dengan TL rekomendasi hasil ev.AKIP, nantinya Inspektorat (Bid. EKo Kesra) akan membuatkan link khusus sehingga masing-masing OPD akan bisa mengupload bukti dukung atas TL tsb, untuk teknis dan linknya akan disampaikan melalui e- office ke setiap OPD.	1. Saran terkait SPIP, tetap melakukan penilaian risiko, pengendalian program/kegiatan, meningkatkan integritas personil,mendokumentasikan pengendalian dan keterjadian risiko, utk teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koor SPIP setda 2. Rekomendasi Evaluasi SAKIP Setda 2023: a. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada Tahun berjalan. b. Melengkapi dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Meningkatkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja setiap triwulan dalam Berita Acara Desk Timbal Balik. d. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Saran terkait Manajemen Risiko Bag PK: a.Menyusun Dokumen Identifikasi dan Penilaian risiko pada tingkat program. b.Menguraikan Rencana Tindak Pengendalian secara lebih detail. c.Menguraikan target waktu pelaksanaan pengendalian secara spesifik. d.Menaikkan risiko fraud yang telah ada pada tingkat operasional (gratifikasi) sebagai risiko strategis. e.Menjadikan nilai risiko residu tahun 2022 sebagai acuan dalam penilaian risiko yang sama pada tahun 2023. 4. Meningkatkan

				penggunaan P3DN

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

yeti kusumawati analis kebijakan ahli muda

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev	Bappeda	
Agi Diyastuti	BPKAD	
Silvia S	Bag Adalbang	
Adi Widya Eka Pambudi, S.T.	BLP	
Kristi Yuliani	Bag Organisasi	
Siwi C. Nugraha	Inspektorat	

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023 bertempat di Luring: Ruang Rapat Code Selatan Lantai 3 Bappeda Kota Yogyakarta Daring: Melalui Aplikasi Zoom Meeting (Meeting ID: 393 620 3290; Passcode: TWIPW) telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 32
Jumlah Kegiatan	: 9
Jumlah Sub Kegiatan	: 30
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 314.947.900,00
Capaian Realisasi Fisik	: 66.51
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 86.87
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 4

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Formula indikator program internal agar diperbaiki (sama dengan indikatornya) 2. Perhitungan target indikator sasaran pada TW I agar diperbaiki sesuai dengan formulanya	Sudah diperbaiki	**1. Perencanaan**	1. Target, realisasi serta faktor pendorong dan penghambat indikator program internal belum terisi. 2. Adanya faktor penghambat pada TW II yang berpotensi menjadi faktor penghambat di TW III	1. Agar dilakukan koordinasi secara instensif dengan BPBJ terkait pengadaan vendor untuk pekerjaan konstruksi yang diperlukan dalam pelaksaan belanja hibah di wilayah 2. Agar meningkatkan kualitas pengendalian pekerjaan fisik untuk menjaga kesesuaian spek pekerjaan di lapangan dengan spek yang tertuang di dalam kontrak
pertahankan progres fisik dan memaksimalkan fisik kegiatan	Telah dilakukan, terbukti di TW II devisiasinya kecil	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	Capaian realisasi fisik Bagian Adminbang pada tw II adalah 45,57% dari target 46,39% dan terdapat deviasi --0,82%. Tidak terdapat kegiatan yang realisasi fisiknya lebih dari -5%.	- Harap dipertahankan realisasi fisik sesuai dengan target
1. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tata kala 2. Lebih meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam hal penatausahaan keuangan 3. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan agar segera diajukan SPP dan SPM	1. Tatakala pelaksanaan telah dijadikan acuan 2. Proses SPJ telah mempertimbangkan Sisdur penatusahaan keuangan 3. Semaksimal mungkin telah mengajukan SPP dan SPM setelah pelaksanaan selesai	**3. Serapan Keuangan**	Realisasi Anggaran sampai dengan Tribulan II terhadap pagu satu tahun anggaran sebesar 36%	1. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tata kala 2. Lebih memperhatikan dalam penatausahaan belanja sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan nominal pada SPM 3. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, dari pelaksanaan, peng-SPJan, dan pelaporan 4. Meminimalisir pengajuan SPM dengan surat keterlambatan, paling lambat tiga hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga secara lengkap dan benar melalui PPTK, agar segera diajukan SPP dan SPM
1.Apabila terdapat paket yang akan dilimpahkan ke BPBJ, mohon untuk segera dilimpahkan agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai dengan tatakala. 2.Jika etalase produk yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik Kota Yogyakarta, OPD dapat mengajukan penambahan etalase baru melalui surat permohonan yang dikirimkan melalui Setda Kota Yogyakarta. 3.Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue) dihimbau untuk dapat dilakukan melalui katalog lokal	1. Tidak ada paket tender yang dilimpahkan ke Bag PBJ 2. Belum ada pengajuan etalase baru 3. Telah mencoba melakukan belanja ATK melalui e-catalog	**4. Progress Pengadaan**	Pada Triwulan II, Bagian Administrasi Pembangunan tidak terdapat paket tender/seleksi yang dilimpahkan ke BPBJ.	1. Untuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue). 2. Dimohon pada OPD untuk menyampaikan kepada Penyedia agar mendaftarkan produknya di Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. Pada TW III, OPD dimohon mencermati dalam menentukan metode pemilihan pada SiRUP khususnya untuk metode pemilihan Penunjukan Langung yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu.

kota Yogyakarta. Dan dimohon untuk menyampaikan kepada Penyedia agar mendaftarkan produknya di Katalog Lokal Kota Yogyakarta.				
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Siap, laksanakan	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	Pengisian pengukuran kinerja Bagian Administrasi Pembangunan terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja Bag. Adminbang tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.	Mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).
		6. Pengawasan	A) SAKIP Catatan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretarit Daerah : 1. Terdapat eselon IV/sub koordinator yang belum menyusun dokumen pengukuran kinerja 2. Pendokumentasian TL atas rekomendasi dalam BA desk TB belum optimal 3. Terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tercapai targetnya di TW II 4. Belum dilakukan evaluasi AKIP internal dengan mengacu perpen PANRB No 88 tahun 2021 B) Manajemen Risiko Terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam dokumen MR operasional tahun 2023 milik bag Adminbang sebagaimana tercantum dalam laporan hasil reviu MR yang telah dikirim oleh Inspektorat C) P3DN Sudah mengirim laporan manual dan realisasi s.d. TW II PDN sudah 100% D) SPIP Setda bukan termasuk satker sample dalam penilaian SPIP namun tetap melakukan penilaian mandiri secara manual	A) SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2023 agar : 1. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap TW pada tahun berjalan 2. siapapun yang menyusun perjanjian kinerja akhir tahun harus menyusun pengukuran kinerja 3. Meningkatkan dokumentasi atas TL rekomendasi hasil evaluasi kinerja setiap TW di BA Desk TB B) Manajemen Risiko Dokumen MR tahun 2023 agar disesuaikan dengan rekomendasi pada LHR dan dilaporkan pada akhir bulan Juli ini sebagai bagian dari laporan MR semester 1 Tahun 2023 (sesuai perwal 43/2022) C) P3DN Mempertahankan realisasi PDN pada belanja selanjutnya D) SPIP Semua bagian setda tetap melakukan penilaian risiko, pengendalian program/kegiatan, meningkatkan integritas personil, mendokumentasikan pengendalian dan keterjadian risiko, dan untuk teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koor SPIP setda

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Rudy Yulianto Pengolah Data Laporan Kas

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Silvi Maynina, MT., MSc	Bappeda	
Siti Nur Wijayanti	BPKAD	
Hendra Gunawan, S.T.	Bag Adalbang	
Ayu Puji Astuti. S.E	BLP	
Anggarani Kirana	Bag Organisasi	
Syahnidar Zuhra Nazila	Inspektorat	

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Bappeda Kota Yogyakarta secara daring telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 33
Jumlah Kegiatan	: 8
Jumlah Sub Kegiatan	: 31
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 1.121.226.050,00
Capaian Realisasi Fisik	: 80.97
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 2
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 39.83
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 13

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Hasil reviu RPD tahun 2023-2026 diterapkan ketika APBD Perubahan tahun 2023 ditetapkan dan dilakukan untuk penyempurnaan input pada Renja OPD tahun 2024 pada SIPD	Akan dilakukan penyempurnaan input pada Renja OPD tahum 2024 pada SIPD	**1. Perencanaan**	meskipun sudah melakukan pendampingan maupun koordinasi secara intens, akan tetapi masih terdapat kekeliuran yang dilakukan OPD-OPD dalam menginput data SiRUP terutama pada pemilihan metode pengadaan tender meskipun nilai pekerjaannya dibawah 200 juta.	agar tetap mempertahankan ataupun meningkatkan dalam melakukan pendampingan kepada OPD-OPD yang masih melakukan kekeliuran dalam melakukan input data SiRUP, karena dapat berpengaruh pada tatakala maupun capaian kinerja per triwulan BPBJ.
pertahankan progres fisik	Akan dipertahankan capaian progres fisik	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	Capaian realisasi fisik Bagian PBJ pada tw II adalah 42,34% dari target 69,47% dan terdapat deviasi -22,94%. Terdapat kegiatan yang realisasi fisiknya lebih dari -5% antara lain : 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi 30,00% dari rencana 100,00% terdapat deviasi -70% (disebabkan kesalahan kode rekening, dan menunggu pengesahan DPA pergeseran)	- Agar segera melakukan percepatan agar target dapat tercapai
1) Dalam pengajuan SPM LS pihak 3 harap lebih teliti dan mengacu pada sisdur. 2) Pelaksanaan kegiatan utuk TW selanjutnya harap sesuai dengan tatakala dan SPJ segera diajukan. 2) Penginputan belanja di SIPD harap diperhatikan agar saat pelaksanaan rekonsiliasi bulanan tidak ada kendala antara SPJ Fungsional SIPKD dan SIPD	Untuk pengajuan SPM belanja LS akan lebih diteliti lagi sesuai sisdur,dan spj yang yang sudah lengkap akan segera diajukan	**3. Serapan Keuangan**	1) Penyerapan SP2D BPBJ sampai dengan TW II 26% dengan rincian belanja barang jasa sebesar 26% dan belanja modal sebesar 33% 2) Terdapat kegiatan dalam pelaksanaan mundur dari tatakala dan kegiatan yang sudah selesai masih dalam proses SPJ. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Mohon pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tatakala agar segera ditindaklanjuti dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan agar penyerapan maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dengan mengacu pada aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 3) Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 4) Saat pengajuan SPM harap memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan. 5) Minimalisir surat keterlambatan saat pengajuan SPM LS ph 3
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue) dihimbau	Proses belanja barang beberapa sudah melalui katalog lokal	**4. Progress Pengadaan**	Terdapat 1 (satu) paket tender pada TW II yaitu Pemeliharaan Gedung BPBJ Lantai 3 yang sudah penetapan pemenang dan dilimpahkan kembali ke	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue) dihimbau untuk dapat

untuk dapat dilakukan melalui katalog lokal kota Yogyakarta.			BPBJ	dilakukan melalui katalog lokal kota Yogyakarta
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Akan dipertahankan untuk pencapaian sasaran strategis	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	Pengisian pengukuran kinerja Bagian PBJ terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja BPBJ tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.	Mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).
1. - 2. Agar menindaklanjuti sesuai catatan yang ada	Akan menindaklanjuti catatan catatan yang ada	**6. Pengawasan**		1) Mohon menindaklanjuti hasil evaluasi MR 2022 2) melakukan penyusunan laporan pelaksananaan MR semester I 2023 3) menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP 2022 yang berkait dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Teuku Achmad Karnegi,ST.,MM Sub koord pembinaan PBJ

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.	Bappeda	
Agi Diyastuti	BPKAD	
Hendra Gunawan, S.T.	Bag Adalbang	
NANDA SAFRILA MENTARI,S.S.T.	BLP	
Anggarani Kirana	Bag Organisasi	
V. Agus Ribiyanto	Inspektorat	

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1307 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ORGANISASI, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 2
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 34
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 531.799.428,00
Capaian Realisasi Fisik	: 98.90
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 1
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 80.60
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 13

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
Hasil reviu ditindaklanjuti pada saat penginputan renja perubahan 2023 setelah dokumen ditetapkan dan penyempurnaan entry renja murni 2024	Reviu renstra telah kami inputkan di renja perubahan 2023 dan renja murni 2024	**1. Perencanaan**	-	- menginventarisir bahan dukungan untuk tercapainya indikator program dan kegiatan.
Pada Sub keg Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota, pada rincian keluaran Persiapan Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan realisasi fisik 100% tetapi penyerapan keuangan baru 37.65%, jika ternyata sisa anggaran masih digunakan untuk aktifitas Persiapan Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan maka seharusnya realisasi fisik tidak 100%, silakan data realisasi fisik di SIM Pelaporan untuk di revisi.	Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan ini dengan anggaran diatas 100 juta, jadi di sim pelaporan dibagi menjadi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. untuk persiapannya saja, telah tercapai 100%, tetapi utk penyerapan keuangan ini secara keseluruhan mencapai 37,65%.	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	Pelaksanaan fisik kegiatan Bagian Organisasi s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik 51.25% , hanya ada satu sub kegiatan yang ada deviasi fisik diatas -5% yaitu sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1) sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ada kendala saat pengadaan menggunakan e purchasing (baru pertama kali menggunakan e purchasing) agar berkoordinasi dengan BPBJ 2)Pada Sub keg Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota, pada rincian keluaran Persiapan Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan realisasi fisik 100% tetapi penyerapan keuangan baru 37.65%, jika ternyata ada salah entri data anggaran rincian output maka data di SIM Pelaproan agar segera diperbaiki
	-	**3. Serapan Keuangan**	Serapan keuangan sudah cukup baik, walaupun masih ada catatan dalam realisasi DAIS karena ada beberapa kendala yang menyebabkan ada penjadwalan dalam pelaksanaan.	Koordinasi internal penting, proses pengajuan SPM GU di tingkatkan pelaksanaan DAIS sesuaikan tatakala
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk	Saat ini kami sedang berproses belanja menggunakan metode e-purchasing e-katalog.	**4. Progress Pengadaan**	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan

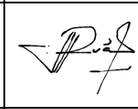
barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.				Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Sasaran strategis akan kami pertahankan.	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	Pengisian pengukuran kinerja Bagian Organisasi terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja Bagian Organisasi tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.	mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).
1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. Dimohon agar bukti TL rekomendasi SAKIP 2021 segera diupload	1. Kami akan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. TL rekomendasi SAKIP 2021 kami terpusat pada OPD (Sekretariat Daerah).	**6. Pengawasan**	1. Sudah dilakukan koordinasi dengan Sekda untuk pencapaian target dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 2. TL sudah ditindaklanjuti, progress kelengkapan bukti dukung.	1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. Dimohon agar bukti TL rekomendasi SAKIP segera diupload dan dilengkapi.

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Dwi Ayu Titi Yuliasti Analis PEP

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
RIAN BANGUN H	BPKAD	
Tarmini	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Luvi Rismawati, S.Psi.	Bag Organisasi	
Lizta Permata Nurwati	Inspektorat	

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1307 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 1
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 36
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 3.875.542.425,00
Capaian Realisasi Fisik	: 98.88
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 68.26
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 9

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
Perubahan target dicatatkan di simoneva setelah dokumen reviu renstra disahkan agar entrian renja perubahan 2023 dan renja murni 2024 di SIPD dapat menyesuaikan dengan perubahan yang direncanakan	Akan melaksanakan pencatatan perubahan target di simoneva, menunggu arahan setelah dokumen reviu renstra disahkan.	**1. Perencanaan**	- Masih ada beberapa sub kegiatan yang serapan keuangannya belum optimal.	- Komunikasi lebih intensif penyampaian informasi terkait ploting anggaran dan tatakala kegiatan kepada pimpinan.
1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak. 3). Dihimbau untuk teman teman tenaga teknis pada Bagian Umum dan Protokol agar mengisi kinerja harian pada SIM Tenaga Teknis.	1. Akan mempertahankan progres fisik. 2.Segera ditindaklanjuti. 3. Sudah dilaksanakan.	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	1. Tidak ada deviasi fisik di atas -5% 2. Terdapat kesalahan input dalam kegiatan MCU kepala daerah karena kegiatan tersebut sudah terlaksana, namun belum dilakukan SPJ	1. Memperbaiki input perkembangan fisik kegiatan MCU kepala daerah yang sudah terlaksana
Pengajuan SPM LS Ph 3 harap teliti dan cermat	Sudah dilaksanakan.	**3. Serapan Keuangan**	1) Serapan SP2D Bagian Umum Protokol sampai dengan TW II sebesar 29% dengan rincian belanja barang jasa 29 % dan belanja modal belum terealisasi. 2) Dalam pengajuan SPM LS pihak 3 terdapat beberapa kesalahan pada nominal kontrak. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan dan diajukan mengacu pada aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 2) Saat pengajuan SPM harap lebih teliti dan cermat dan memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang

				diajukan 3) Pengajuan SPP SPM LS Ph 3 agar diajukan maksimal 3 hari dari tgl BAST
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.	1. Sudah dilaksanakan. 2. Proses pengadaan jasa tenaga kebersihan Gedung Induk, kebersihan rumah dinas dan kebersihan area komplek Balaikota dan taman sudah menggunakan e-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3.Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Sudah dilaksanakan. 5. Sudah dilaksanakan.	**4. Progress Pengadaan**	pada triwulan II terdapat paket pekerjaan dengan metode tender yang dilimpahkan ke BPBJ dan sedang dalam proses pemilihan penyedia	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Akan dipertahankan.	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	Pengisian pengukuran kinerja Bagian Umum dan Protokol terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja Bagian Umum dan Protokol tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.	mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).

		6. Pengawasan	1. Evaluasi SAKIP Tahun 2022 telah dilaksanakan dan telah dikirimkan Laporan Hasil Evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. 2. Bagian Umum dan Protokol telah mengirimkan laporan terkait P3DN. 3. Catatan hasil evaluasi atas Manajemen Risiko tahun 2022 agar diimplementasikan untuk Manajemen Risiko tahun 2023. 4. Terkait SPIP, bagian tetap melaksanakan penilaian, namun untuk teknis penilaian mengikuti arahan dari koordinator SPIP Sekretariat Daerah.	1. Rekomendasi SAKIP yang sifatnya dapat ditindaklanjuti oleh Bagian untuk segera ditindaklanjuti dan dikirimkan melalui e-office ke Inspektorat. 2. Mengimplementasikan hasil catatan manajemen risiko tahun 2022 pada manajemen risiko tahun 2023. 3. Teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koordinator SPIP Sekretariat Daerah.

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Dwianto Supaham Kasubbag Protokol

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
Agi Diyastuti	BPKAD	
Banyu Frank Grobbee, S.Sos	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Luvi Rismawati, S.Psi.	Bag Organisasi	
Nur Rohmah Choirun Nisa', A.Md.Ak.	Inspektorat	

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1307 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 1
Jumlah Kegiatan	: 8
Jumlah Sub Kegiatan	: 31
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 449.333.424,00
Capaian Realisasi Fisik	: 100.00
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 73.15
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 12

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
Hasil reviu ditindaklanjuti pada saat penginputan renja perubahan 2023 setelah dokumen ditetapkan dan penyempurnaan entry renja murni 2024	Target program di SIPD perubahan 2023 dan murni 2024 sudah sesuai hasil reviu	**1. Perencanaan**	- Masih ada deviasi serapan keuangan dikarenakan proses SPJ.	- Ploting penganggaran kedepan agar menjadi catatan untuk mempertimbangkan pola serapan pada tahun sebelumnya. - Pertimbangan untuk efisiensi pada Perubahan Renja 2023 untuk segera diinventarisir. - Koordinasi lebih intensif terkait kebutuhan pengadaan-pengadaan dengan Bagian-Bagian.
Pada Sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi fisik 41,02 (target fisik nya 41,02) tetapi di kolom perkembangan kegiatan tertulis Mundur Dari Tatakala (Pelaksanaan dilakukan Bulan Mei), kalau mundur harusnya realisasi tidak sesuai target (lebih kecil dari target),maka data realisasi fisik di SIM Pelaporan agar di revisi.	Informasi di kolom perkembangan dalam aplikasi SIMPel di TW I seharusnya: perjalanan dinas sudah terlaksana ke Pemkot Tangerang. Sisa anggaran yang besar disebabkan karena pengeluaran sesuai realisasi	**2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan**	1. Tidak ada deviasi fisik	2. Supaya mempertahankan realisasi fisik sehingga tidak ada deviasi
selalu mengingatkan bahwa : 1. Pelaksanaan kegiatan agar disesuaikan dengan tata kala, mengacu pada aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 2. Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 3. Pengajuan SPM tidak boleh melebihi SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan.	1. Tatakala kegiatan sudah disusun. Pelaksanaan kegiatan sudah diusahakan sesuai dengan tatakala 2. Proses verifikasi sudah diusahakan dilakukan dengan cermat dan teliti mengacu pada aturan yang berlaku 3. Pengajuan SPM sudah memperhatikan SPD dan mencantumkan sumber dana	**3. Serapan Keuangan**	- Penyerapan Belanja Daerah s/d TW II sebesar 40% - Kesalahan dokumen pengajuan SPM sudah diminimalisir - Penghitungan TPP sempat ada selisih dengan berita acaranya	- Mempertahankan ketelitian dan kecermatan dalam administrasi dokumen pengajuan SPM - Mengoptimalkan koordinasi dengan bagian-bagian terkait

1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.	1. Tidak ada pengadaan yang dilimpahkan ke BPBJ 2. Belanja e-purchasing mulai dilaksanakan di TW II untuk barang persediaan dan modal 3. Untuk pembelian barang melalui e-katalog sudah memperhatikan TKDN 4. Barang yang akan dibeli sudah terakomodir di etalase 5. Sudah berkonsultasi dengan BPBJ terkait proses e-purchasing	**4. Progress Pengadaan**	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Akan berusaha mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya	**5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja**	Pengisian pengukuran kinerja Bagian Administrasi dan Keuangan terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja Administrasi dan Keuangani tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.	mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).

1. Belum adanya kepastian apakah masih menggunakan sistem SIERA atau tidak, namun kepada seluruh OPD diharapkan dalam penggunaan anggaran mengoptimalkan penggunakan produk dalam negeri. 2. Secara keseluruhan, untuk SAKIP Sekretariar Daerah tahun 2021 sudah baik namun perlu meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja serta tindaklanjut rekomendasi dan upaya perbaikannya	1. Pengadaan melalui e-katalog sudah memperhatikan TKDN 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan rutin triwulanan	**6. Pengawasan**	1. Pengadaan sudah menggunakan PDN dan sudah dilakukan pelaporan 2. Hasil evaluasi SAKIP sudah baik dan mendapat nilai A, laporan hasil evaluasi SAKIP sudah didistribusikan 3. Hasil evaluasi MR tahun 2022 sudah baik 4. PK SPIP sudah ditentukan	1. Mengoptimalkan pengadaan barang menggunakan PDN 2. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan mengupload bukti dukung tindak lanjut ke dalam link yang akan dibagian oleh inspektorat (akan diinfokan melalui e-office) 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi MR 4. PM SPIP dilaksanakan sebelum tanggal 21 Juli 2023

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Anggo Yekti Perencana Ahli Muda

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
Pratiwi Silawati	BPKAD	
Banyu Frank Grobbee, S.Sos	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Luvi Rismawati, S.Psi.	Bag Organisasi	
Ria Rizky	Inspektorat	

PERUBAHAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023



SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono 43. Telp (0274) 540650 Faks (0274) 540651

setwan.jogjakota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 menyesuaikan dengan Surat Edaran Pj. Walikota Yogyakarta Nomor 050/2821/SE/2023 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan tujuan :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023,
2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan,

3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023,
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
2.3. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah
Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah *:*

"MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah : **"Meningkatkan kualitas layanan terhadap agenda DPRD".**

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : "**Meningkatnya Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD".**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta hasil review renstra tahun 2023 dengan tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Indikator Sasaran :**											
	Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD											
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD			73	74	75	78.2	78.14	80.63	78.2	78.5	
2	**Indikator Program :**											
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD											
	Persentase produk hukum yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan *			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan *			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

* Hasil review renstra Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 berjumlah 107 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD;
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan;
3. 2 (dua) orang Kepala Sub. Bagian

Kepala Bagian Administrasi Umum , terbagi dalam 2 sub bagian dan 1 Ketua Tim Kerja :

a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Ka. Sub Bagian Keuangan
c. Ketua Tim Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terbagi dalam 3 sub bagian :

a. Ketua Tim Kajian Perundang Undangan
b. Ketua Tim Persidangan dan Risalah
c. Ketua Tim Humas Protokol dan Publikasi

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 sub bagian :

a. Ketua Tim Fasilitasi Penganggaran
b. Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
c. Ketua Tim Kerjasama dan Aspirasi

4. Staf ASN berjumlah 27 orang
5. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik ASN maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

a. Tenaga Ahli Fraksi 6 orang
b. Tenaga Teknis 27 orang
c. Tenaga Outsourcing (Tenaga Informasi dan Teknologi 3 orang, Driver Pimpinan 3 orang, Cleaning Service 10 orang dan Security 12 orang)

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

a. Bangunan Gedung

   Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

   1. Gedung Sekretariat DPRD
   2. Gedung DPRD

   Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m2, terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

   - Lantai 1
     - Ruang Lobby
     - Ruang Rapat Dewan
     - Ruang Fraksi
     - Tempat Parkir
     - WC/Urinoir
   - Lantai 2
     - Ruang Operator
     - Ruang Pimpinan DPRD
     - Ruang Komisi
     - Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah
     - Ruang Badan Kehormatan
     - Ruang Rapat Dewan
     - Mushola
     - WC/Urinoir

- Lantai 3
  - Ruang Rapat Paripurna
  - Ruang Sekretaris DPRD
  - Ruang Bagian Administrasi Umum
  - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - Ruang Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
  - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

   Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2023 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

   - Kendaraan roda 4 : 16 unit
   - Kendaraan roda 2 : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

   Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

   Genset, CCTV, TV Wall, TV Smartboard, Televisi, APAR, Pompa Hydrant, Stand Thermogun

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	78.2 Poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 Poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan**	**Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**40.856.277.100,00**	**100 %**	**30.401.180.765,00**	**100 %**	**13.648.224.613,00**	**100,00%**	**44,89%**					**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	**Jumlah anggota dewan yang mengikuti Bimtek dibagi jumlah anggota Dewan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase Pembahasan Penganggaran yang Diselesaikan	**Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**	
			Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	**Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Persidangan dan Perundang Undangan**	

		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								**8.135.660.000,00**		**8.096.272.778,00**		**2.199.039.794,00**		**27.16%**									
		1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0,00		0,00		1.440.425.000,00	99,46%	1.432.635.000,00	16,80%	240.827.525,00	16,89%	16,81%									
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		99,46%		16,80%		16,89%									
		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				0,00		0,00		5.161.010.000,00	99,39%	5.129.412.778,00	29,00%	1.485.452.919,00	29,18%	28,96%									
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		11 Dokumen		99,39%		29,00%		29,18%									
		3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				0,00		0,00		963.600.000,00	100,00%	963.600.000,00	49,10%	472.759.350,00	49,10%	49,06%									
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen		100,00%		49,10%		49,10%									
		4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				0,00		0,00		570.625.000,00	100,00%	570.625.000,00	2,00%	0,00	2,00%	0,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		2,00%		2,00%									
		Pembahasan Kebijakan Anggaran								**3.011.307.000,00**		**1.169.807.000,00**		**421.422.751,00**		**36.02%**									
		5	Pembahasan KUA dan PPAS				0,00		0,00		499.428.000,00	78,69%	393.008.000,00	10,00%	506.000,00	12,71%	0,13%									
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		78,69%		10,00%		12,71%									
		6	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				0,00		0,00		493.428.000,00	18,58%	91.676.000,00	10,00%	1.400.000,00	53,82%	1,53%									
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		18,58%		10,00%		53,82%									
		7	Pembahasan APBD				0,00		0,00		767.628.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		8	Pembahasan APBD Perubahan				0,00		0,00		559.750.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		9	Pembahasan Laporan Semester				0,00		0,00		6.225.000,00	4,42%	275.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		4,42%		0,00%		0,00%									
		10	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				0,00		0,00		684.848.000,00	100,00%	684.848.000,00	95,00%	419.516.751,00	95,00%	61,26%									
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		95,00%		95,00%									
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								**9.613.946.000,00**		**7.518.118.987,00**		**2.851.936.113,00**		**37.93%**									
		11	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				0,00		0,00		1.436.579.500,00	62,52%	898.127.065,00	62,52%	288.700.936,00	100,00%	32,14%									
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		62,52%		62,52%		100,00%									
		12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0,00		0,00		1.324.339.500,00	62,39%	826.207.065,00	62,39%	395.839.884,00	100,00%	47,91%									
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		62,39%		62,39%		100,00%									

				Pemerintahan Bidang Infrastruktur																				
		13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0,00		0,00		1.324.339.500,00	62,39%	826.207.065,00	62,39%	418.864.625,00	100,00%	50,70%							
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		62,39%		62,39%		100,00%								
		14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0,00		0,00		1.324.339.500,00	62,39%	826.207.065,00	62,39%	380.321.035,00	100,00%	46,03%							
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		0 laporan		0 laporan		12 laporan		62,39%		62,39%		100,00%								
		15	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0,00		0,00		463.230.000,00	88,88%	411.730.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		88,88%		0,00%		0,00%								
		16	Pengawasan Penggunaan Anggaran				0,00		0,00		3.332.570.000,00	99,66%	3.321.092.727,00	33,13%	1.147.107.930,00	33,24%	34,54%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		99,66%		33,13%		33,24%								
		17	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0,00		0,00		408.548.000,00	100,00%	408.548.000,00	100,00%	221.101.703,00	100,00%	54,12%							
				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Peningkatan Kapasitas DPRD									**7.463.079.250,00**		**5.008.809.250,00**		**2.858.148.221,00**		**57.06%**							
		18	Pendalaman Tugas DPRD				0,00		0,00		3.954.080.000,00	77,00%	2.975.560.000,00	48,00%	1.627.868.221,00	62,34%	54,71%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		77,00%		48,00%		62,34%								
		19	Publikasi dan Dokumentasi Dewan				0,00		0,00		2.463.582.000,00	61,40%	1.512.604.000,00	60,79%	868.434.000,00	99,01%	57,41%							
				Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		0 Dokumen		0 Dokumen		18 Dokumen		0,00%		60,79%		0,00%								
		20	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0,00		0,00		216.000.000,00	51,00%	108.000.000,00	5,00%	0,00	9,80%	0,00%							
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		0 orang		0 orang		2 orang		51,00%		5,00%		9,80%								
		21	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				0,00		0,00		216.000.000,00	51,00%	108.000.000,00	50,00%	90.000.000,00	98,04%	83,33%							
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		0 orang		0 orang		6 orang		51,00%		50,00%		98,04%								
		22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				0,00		0,00		549.544.000,00	49,75%	273.372.000,00	49,75%	261.920.000,00	100,00%	95,81%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		49,75%		49,75%		100,00%								
		23	Penyusunan Program Kerja DPRD				0,00		0,00		63.873.250,00	48,96%	31.273.250,00	48,96%	9.926.000,00	100,00%	31,74%							
				Penyusunan Rencana Kerja DPRD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		48,96%		48,96%		100,00%								
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									**6.697.832.850,00**		**4.708.808.750,00**		**3.916.618.957,00**		**83.18%**							

		24	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				0,00		0,00		857.589.600,00	95,46%	818.687.000,00	88,00%	420.329.457,00	92,19%	51,34%						
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		95,46%		88,00%		92,19%							
		25	Pelaksanaan Reses				0,00		0,00		5.840.243.250,00	66,61%	3.890.121.750,00	66,70%	3.496.289.500,00	100,14%	89,88%						
				Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		66,61%		66,70%		100,14%							
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									**784.890.000,00**		**510.110.000,00**		**37.674.640,00**		**7.39%**						
		26	Penyusunan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		352.720.000,00	80,12%	282.610.000,00	80,12%	12.300.000,00	100,00%	4,35%						
				Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		80,12%		80,12%		100,00%							
		27	Pengawasan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		432.170.000,00	52,64%	227.500.000,00	52,64%	25.374.640,00	100,00%	11,15%						
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		52,64%		52,64%		100,00%							
		Pembahasan Kerja Sama Daerah									**232.720.000,00**		**154.300.000,00**		**2.395.000,00**		**1.55%**						
		28	FasilitasiVerifikasidan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah				0,00		0,00		227.280.000,00	66,09%	150.220.000,00	1,50%	575.000,00	2,27%	0,38%						
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		66,09%		1,50%		2,27%							
		29	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				0,00		0,00		5.440.000,00	75,00%	4.080.000,00	75,00%	1.820.000,00	100,00%	44,61%						
				Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		75,00%		75,00%		100,00%							
		Fasilitasi Tugas DPRD									**4.916.842.000,00**		**3.234.954.000,00**		**1.360.989.137,00**		**42.07%**						
		30	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0,00		0,00		561.810.000,00	97,65%	548.610.000,00	97,65%	237.423.265,00	100,00%	43,28%						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		97,65%		97,65%		100,00%							
		31	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				0,00		0,00		6.450.000,00	4,30%	275.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		4,30%		0,00%		0,00%							
		32	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0,00		0,00		2.644.096.000,00	64,96%	1.717.661.000,00	64,96%	521.825.873,00	100,00%	30,38%						
				Penjadwalan Kegiatan Alat Kelegkapan DPRD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		64,96%		64,96%		100,00%							
		33	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				0,00		0,00		1.704.486.000,00	56,82%	968.408.000,00	56,82%	601.739.999,00	100,00%	62,14%						
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		56,82%		56,82%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**66,31%**	**34,96%**						
										Predikat kinerja						**Sedang**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**36.215.915.824,00**	**A Nilai**	**24.005.801.559,00**	**A Nilai**	**17.298.830.882,00**	**0,00%**	**72,06%**					**Bagian Administrasi Umum**	

			Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	**Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	**Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Persidangan dan Perundang Undangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**82.142.606,00**		**43.847.072,00**		**30.801.250,00**		**70.25%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		7.673.072,00	95,34%	7.315.286,00	95,34%	5.852.750,00	100,00%	80,01%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		95,34%		95,34%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		4.892.000,00	52,45%	2.566.000,00	52,45%	460.000,00	100,00%	17,93%						
			Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		52,45%		52,45%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		4.892.000,00	52,45%	2.566.000,00	52,45%	460.000,00	100,00%	17,93%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		52,45%		52,45%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.312.786,00	31,18%	1.032.786,00	31,18%	1.027.500,00	100,00%	99,49%						
			Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		31,18%		31,18%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.312.786,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		56.219.962,00	53,20%	29.907.000,00	53,20%	22.541.000,00	100,00%	75,37%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		53,20%		53,20%		100,00%							

				Realisasi Kinerja SKPD																			
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.840.000,00	25,00%	460.000,00	25,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		25,00%		25,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**5.700.757.738,00**		**4.355.172.287,00**		**2.817.776.437,00**		**64.7%**						
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.685.953.650,00	64,30%	4.348.410.287,00	64,30%	2.813.413.437,00	100,00%	64,70%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		43 Orang/Bulan		64,30%		64,30%		100,00%							
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	50,00%	2.070.000,00	50,00%	1.419.000,00	100,00%	68,55%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		3.312.000,00	50,00%	1.656.000,00	50,00%	1.242.000,00	100,00%	75,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.225.044,00	37,55%	460.000,00	37,55%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		37,55%		37,55%		100,00%							
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.312.000,00	50,00%	1.656.000,00	50,00%	1.242.000,00	100,00%	75,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		975.044,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**13.800.000,00**		**9.200.000,00**		**7.978.000,00**		**86.72%**						
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	70,00%	920.000,00	70,00%	460.000,00	100,00%	50,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%							
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	51,00%	2.070.000,00	51,00%	1.835.000,00	100,00%	88,65%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	51,00%	2.070.000,00	51,00%	2.003.000,00	100,00%	96,76%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	66,67%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**3.542.000,00**		**1.771.000,00**		**1.771.000,00**		**100%**						
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		3.542.000,00	51,00%	1.771.000,00	51,00%	1.771.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**2.768.718.605,00**		**1.479.089.375,00**		**849.380.068,00**		**57.43%**						
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		31.411.000,00	100,00%	31.411.000,00	90,00%	15.702.000,00	90,00%	49,99%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		90,00%		90,00%							
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		226.902.755,00	100,01%	226.902.755,00	80,39%	128.302.800,00	80,38%	56,55%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		3 paket		0,00%		80,39%		0,00%							
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		113.026.850,00	75,00%	83.680.900,00	40,00%	38.650.700,00	53,33%	46,19%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		3 paket		75,00%		40,00%		53,33%							
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		447.514.000,00	44,33%	194.278.720,00	41,76%	99.967.250,00	94,20%	51,46%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		0,00%		41,76%		0,00%							
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		58.560.000,00	54,00%	30.980.000,00	50,00%	23.670.000,00	92,59%	76,40%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		54,00%		50,00%		92,59%							
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		1.891.304.000,00	49,00%	911.836.000,00	35,00%	543.087.318,00	71,43%	59,56%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		130 laporan		49,00%		35,00%		71,43%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**315.500.000,00**		**315.500.000,00**		**311.934.800,00**		**98.87%**						
		28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		315.500.000,00	100,00%	315.500.000,00	100,00%	311.934.800,00	100,00%	98,87%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		25 unit		0,00%		100,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.834.077.125,00**		**971.051.125,00**		**704.123.681,00**		**72.51%**						
		29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		10.100.000,00	51,00%	5.100.000,00	48,00%	4.238.000,00	94,12%	83,10%						

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		60 laporan		51,00%		48,00%		94,12%							
		30	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		325.800.000,00	62,00%	193.900.000,00	62,00%	167.508.592,00	100,00%	86,39%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		25 laporan		62,00%		62,00%		100,00%							
		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.498.177.125,00	54,09%	772.051.125,00	53,26%	532.377.089,00	98,47%	68,96%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		38 laporan		0,00%		53,26%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**2.043.914.000,00**		**1.173.726.600,00**		**645.076.895,00**		**54.96%**						
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		358.570.000,00	52,00%	182.372.502,00	50,00%	54.405.589,00	96,15%	29,83%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		4 unit		52,00%		50,00%		96,15%							
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		569.628.000,00	56,03%	291.826.498,00	56,03%	131.247.056,00	100,00%	44,97%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0		0		0		0,00%		56,03%		0,00%							
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		101.520.000,00	51,00%	51.010.000,00	46,00%	30.976.000,00	90,20%	60,73%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		33 unit		51,00%		46,00%		90,20%							
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.014.196.000,00	64,18%	648.517.600,00	69,84%	428.448.250,00	108,82%	66,07%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		69,84%		0,00%							
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									**22.292.188.200,00**		**15.029.905.050,00**		**11.402.498.470,00**		**75.87%**						
		36	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				0,00		0,00		22.083.858.200,00	67,40%	14.821.575.050,00	67,40%	11.238.988.470,00	100,00%	75,83%						
				Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		40 Orang/Bulan		67,40%		67,40%		100,00%							
		37	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				0,00		0,00		164.270.000,00	100,00%	164.270.000,00	100,00%	163.510.000,00	100,00%	99,54%						
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		38	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				0,00		0,00		44.060.000,00	100,00%	44.060.000,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		5,00%		5,00%							
		Layanan Administrasi DPRD									**1.161.275.550,00**		**626.539.050,00**		**527.490.281,00**		**84.19%**						
		39	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0,00		0,00		43.872.000,00	51,00%	21.936.000,00	50,00%	17.519.938,00	98,04%	79,87%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		51,00%		50,00%		98,04%							
		40	Fasilitasi Fraksi DPRD				0,00		0,00		427.836.000,00	54,00%	213.918.000,00	52,00%	176.621.980,00	96,30%	82,57%						
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		0 laporan		0 laporan		120 laporan		54,00%		52,00%		96,30%							
		41	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0,00		0,00		351.672.000,00	51,72%	181.892.000,00	51,72%	154.700.922,00	100,00%	85,05%						

				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		0 Laporan		0 Laporan		40 Laporan		51,72%		51,72%		100,00%							
		42	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				0,00		0,00		337.895.550,00	63,00%	208.793.050,00	62,00%	178.647.441,00	98,41%	85,56%						
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		0 paket		0 paket		10 paket		63,00%		62,00%		98,41%							
Rata-rata capaian kinerja																**94,19%**	**67,84%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
Total anggaran dari seluruh program											**77.072.192.924,00**		**54.406.982.324,00**		**30.947.055.495,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																**82,02%**	**56,88%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																**Tinggi**	**Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda; 2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2022 di semester pertama; 3. Triwulan II sudah 6 raperda dalam tahapan pembahasan antara DPRD dan Walikota; (Raperda Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirtamarta dan Perseroda Jogjatama Vishesha; Raperda Pencabutan Raperda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah; Raperda Pengarusutamaan Gender; Raperda Pajak dan Retribusi Daerah; Raperda Penyelenggaraan Pendidikan); 4. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kanwil Kemenkumham DIY terkait tahapan pembahasan raperda; 5. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD; 6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Dalam tahap pembahasan raperda ada tahapan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Dalam tahapan ini terkadang membutuhkan waktu yang lama, karena dimungkinkan rekomendasi hasil harmonisasi berupa penyempurnaan dari draft raperda; 3. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah di tetapkan; 4. Untuk penatausahaan keuangan masih menggunakan 2 aplikasi baik dari SIPKD maupun SIPD Kemendagri
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Komunikasi lebih intensif untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun oleh Setwan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala SEKRETARIAT DPRD

Basuki Hari Saksono, SH.

NIP. 196411111990031013

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

2.3 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

   Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.

c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis,
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD,
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah,
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan,
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.5 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola,
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian,
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi,
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional,
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial,
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi,
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD,
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan,
10. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
11. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang semula sebesar Rp. 77.072.192.924,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 menjadi Rp. 78.701.514.589,- ada kenaikan sebesar Rp. 1.629.321.665,-. Hal ini disebabkan karena pada program / kegiatan / sub kegiatan internal Sekretariat DPRD untuk belanja modal mengalami kenaikan yang signifikan dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD.

Walaupun secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD mengalami kenaikan, tetapi untuk beberapa kegiatan khususnya pada program / kegiatan / sub kegiatan eksternal Sekretariat DPRD yang memfasilitasi kegiatan DPRD ada pengurangan komponen belanja yaitu pada volume belanja bahan cetak (penggandaan), belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu pimpinan, belanja narasumber, belanja jasa tenaga ahli / kelompok pakar, belanja perjalanan dinas, dan belanja bantuan transport (RDPU / dialog warga / uji publik).

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini pada anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp. 36.215.915.824,- pada anggaran perubahan tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 38.027.515.589,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 1.811.599.765,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 82.142.606,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 5.700.757.738,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 5.918.134.738,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 217.377.000,-. Kenaikan terjadi pada belanja gaji dan tunjangan ASN,

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 13.800.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 3.542.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 2.768.718.605,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 2.512.965.820,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 255.752.785,-. Walaupun secara keseluruhan mengalami pengurangan anggaran, namun di beberapa sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah ini juga mengalami kenaikan anggaran.

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 315.500.000,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 1.629.500.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.314.000.000,-. Penambahan terjadi pada belanja modal pengadaan AC, belanja modal pengadaan TV Smartboard, belanja modal pengadaan soundsistem, belanja modal pengadaan mic conference ruang rapat paripurna, belanja modal pengadaan PC Komputer All In, belanja modal pengadaan scanner.

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 1.834.077.125,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 1.901.227.125,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.150.000,-. Kenaikan terjadi pada belanja tagihan listrik, dan belanja perabot kantor (tissue kotak).

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murnis sebesar Rp. 2.043.914.000,- pada perubahan Renja menjadi sebesar Rp. 2.356.824.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 312.910.000,-. Penambahan terjadi pada belanja pemeliharaan jaringan listrik, belanja pemeliharaan bangunan Gedung kantor. Selain penambahan ada juga pengurangan pada volume belanja jasa tenaga supir (driver pimpinan).

9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 22.292.188.200,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),

10) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 1.161.275.550,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 1.317.191.100,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 155.915.550,-. Penambahan terjadi pada belanja makanan dan minuman rapat paripurna, belanja pemeliharaan delegete conference AC, belanja modal pengadaan almari ukir cinderamata & display produk UMKM, belanja modal pengadaan pembelian gordyn jendela dan pintu. Selain penambahan ada juga pengurangan pada belanja pemeliharaan mesin ketik.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini pada anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp. 40.856.277.100,- pada anggaran perubahan tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 40.673.999.000,-. Ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 182.278.100,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 8.135.660.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 8.131.360.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 4.300.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat,

2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Anggaran murni sebesar Rp. 3.011.307.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 2.938.266.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 73.041.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja bantuan transport, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Selain pengurangan ada juga penambahan anggaran di beberapa sub kegiatan pada volume belanja makanan dan minuman rapat belanja bantuan transport,

3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran murni sebesar Rp. 9.613.946.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 9.053.226.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 560.720.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja narasumber, belanja bantuan transport, dan belanja perjalanan dinas luar daerah,

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 7.463.079.250,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 7.990.979.250,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 527.900.000,-. Penambahan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman tamu, dan belanja jasa iklan / reklame, film, dan pemotretan (Publikasi / Sosialisasi Rancangan Produk Hukum & Produk Hukum di Media Cetak; Advetorial di Media Cetak; Publikasi Kegiatan DPRD di Media Cetak; Obrolan Tugu Jogja; Podcast DPRD; Mimbar Alat Kelengkapan Dewan). Selain penambahan ada juga pengurangan pada belanja penggandaan, dan belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja jasa tenaga ahli / kelompok pakar,

5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Anggaran murni sebesar Rp. 6.697.832.850,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 6.640.125.750,- mengalami penurunan sebesar Rp. 57.707.100,-. Pengurangan terjadi pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja bantuan transport dialog warga / RDPU, belanja sewa peralatan dan mesin (sewa kursi, sewa soundsistem, sewa tenda, dan dekorasi Reses) dan sewa bangunan gedung tempat pertemuan Reses,

6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 784.890.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),

7) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 232.720.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 319.760.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 87.040.000,-. Penambahan terjadi pada belanja jasa konsultansi berorientasi bidang - Telematika,

8) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 4.916.842.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 4.815.392.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 101.450.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja makanan dan minuman jamuan tamu pimpinan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

Secara rinci uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Rp 36,215,915,824**		**Rp 38,027,515,589**	**Rp 1,811,599,765**	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Rp 82,142,606**		**Rp 82,142,606**	**Rp -**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 7,673,072	4 Dokumen	Rp 7,673,072	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,892,000	1 Dokumen	Rp 4,892,000	Rp -	
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,892,000	1 Dokumen	Rp 4,892,000	Rp -	
	d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,312,786	1 Dokumen	Rp 3,312,786	Rp -	
	e. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,312,786	1 Dokumen	Rp 3,312,786	Rp -	
	f. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	Rp 56,219,962	24 Laporan	Rp 56,219,962	Rp -	
	d. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 1,840,000	1 Laporan	Rp 1,840,000	Rp -	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Rp 5,700,757,738**		**Rp 5,918,134,738**	**Rp 217,377,000**	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang / Bulan	Rp 5,685,953,650	43 Orang / Bulan	Rp 5,903,330,650	Rp 217,377,000	Penambahan belanja gaji dan tunjangan ASN
	b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Rp 4,140,000	3 Dokumen	Rp 4,140,000	Rp -	
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp 3,312,000	12 Dokumen	Rp 3,312,000	Rp -	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
	d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1,225,044	1 Laporan	Rp 1,225,044	Rp -	
	e. Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 1,840,000	1 Dokumen	Rp 1,840,000	Rp -	
	f. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 3,312,000	12 Laporan	Rp 3,312,000	Rp -	
	g. Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 975,044	1 Dokumen	Rp 975,044	Rp -	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**Rp 13,800,000**		**Rp 13,800,000**	**Rp -**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1,380,000	1 Dokumen	Rp 1,380,000	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1,380,000	1 Dokumen	Rp 1,380,000	Rp -	
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 1,380,000	1 Laporan	Rp 1,380,000	Rp -	
	d. Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 4,140,000	12 Laporan	Rp 4,140,000	Rp -	
	e. Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 4,140,000	1 Laporan	Rp 4,140,000	Rp -	
	f. Sub Kegiatan : Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1,380,000	1 Dokumen	Rp 1,380,000	Rp -	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Rp 3,542,000**		**Rp 3,542,000**	**Rp -**	
	a. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp 3,542,000	1 Dokumen	Rp 3,542,000	Rp -	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 2,768,718,605**		**Rp 2,512,965,820**	**Rp (255,752,785)**	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 31,411,000	1 Paket	Rp 45,721,000	Rp 14,310,000	Penambahan dan pengurangan volume belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik (lampu TL 40 W, dan lampu LED)
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 226,902,755	4 Paket	Rp 271,247,470	Rp 44,344,715	Penambahan volume belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer (pemeliharaan komputer PC); Pengurangan volume belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor (binder; kertas karbon, dan kertas faximile); penambahan dan pengurangan volume belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover (kertas HVS folio; warna; dan quarto); penambahan dan pengurangan volume belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas (amplop putih kecil, dan amplop plastik/map kancing)
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp 113,026,850	3 Paket	Rp 234,719,350	Rp 121,692,500	Penambahan volume dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor (Pengharum Ruangan / Toilet; baterai; jas hujan; kran air; jet shower; sifon wastafel; bendera rontek merah putih; dan umbul-umbul), belanja modal alat kantor (pengadaan rak arsip, dan lemari perpustakaan), dan belanja modal alat rumah tangga (pengadaan dispenser)
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 447,514,000	2 Paket	Rp 376,414,000	Rp (71,100,000)	Pengurangan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak (Cetak Kertas (HVS) Ukuran Folio, dan fotocopy)
	e. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp 58,560,000	2 Dokumen	Rp 58,560,000	Rp -	
	f. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99 Laporan	Rp 1,891,304,000	99 Laporan	Rp 1,526,304,000	Rp (365,000,000)	Pengurangan volume belanja bimbingan teknis (Asdeksi)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 315,500,000**		**Rp 1,629,500,000**	**Rp 1,314,000,000**	
	a. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Rp 315,500,000	82 Unit	Rp 1,629,500,000	Rp 1,314,000,000	Penambahan belanja modal alat rumah tangga (pengadaan AC = 3 unit x Rp. 9.000.000 mengganti ruang Pimpinan Dewan, TV Smartboard = 3 unit x Rp. 185.000.000 untuk ruang Pimpinan Dewan , dan soundsistem = 1 unit Rp. 15.000.000 untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi diluar gedung); belanja modal alat studio (pengadaan mic conference ruang rapat paripurna = 1 set Rp. 565.000.000); dan belanja modal komputer dan peralatan komputer (pengadaan PC Komputer All In = 5 unit x Rp. 24,500.000, untuk mengganti unit yang sering rusak dan scanner = 2 unit x Rp. 14.000.000 untuk mendukung ketugasan alat kelengkapan)
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 1,834,077,125**		**Rp 1,901,227,125**	**Rp 67,150,000**	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Rp 10,100,000	60 Laporan	Rp 10,100,000	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	Rp 325,800,000	25 Laporan	Rp 385,800,000	Rp 60,000,000	Penambahan belanja tagihan listrik
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	Rp 1,498,177,125	38 Laporan	Rp 1,505,327,125	Rp 7,150,000	Penambahan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor (tissu kotak) dan penambahan pergeseran belanja bahan-bahan lainnya (Tempat Sampah pilah 3 warna)
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 2,043,914,000**		**Rp 2,356,824,000**	**Rp 312,910,000**	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Rp 358,570,000	4 Unit	Rp 310,570,000	Rp (48,000,000)	Pengurangan volumen belanja jasa tenaga supir (driver pimpinan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Rp 569,628,000	26 Unit	Rp 569,628,000	Rp -	
	c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	Rp 101,520,000	34 Unit	Rp 171,520,000	Rp 70,000,000	Penambahan belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya (pemeliharaan jaringan listrik untuk bangunan 3 lantai gedung DPRD sebesar Rp. 70.000.000)
	d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	Rp 1,014,196,000	1 Unit	Rp 1,305,106,000	Rp 290,910,000	Penambahan belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor (pemeliharaan ornamen ukiran sebesar Rp. 128.500.000 ; Pembuatan Ornamen ukiran untuk pilar tangga lantai 2 & 3 menuju ruang rapat paripurna DPRD sebesar Rp. 190.000.000; Pembuatan Pintu Pembatas Ruang Rapat 5 sebesar Rp. 54.000.000); Pengurangan jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan
	Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**Rp 22,292,188,200**		**Rp 22,292,188,200**	**Rp -**	
	a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang / Bulan	Rp 22,083,858,200	40 Orang / Bulan	Rp 22,083,858,200	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp 164,270,000	1 Paket	Rp 164,270,000	Rp -	
	c. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical C	40 Orang	Rp 44,060,000	40 Orang	Rp 44,060,000	Rp -	
	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD			**Rp 1,161,275,550**		**Rp 1,317,191,100**	**Rp 155,915,550**	
	a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Rp 43,872,000	1 Dokumen	Rp 43,872,000	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	120 Laporan	Rp 427,836,000	120 Laporan	Rp 427,836,000	Rp -	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
	c. Sub Kegiatan : Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan	Rp 351,672,000	40 Laporan	Rp 451,672,000	Rp 100,000,000	Penambahan volume belanja makan minum rapat paripurna (menyesuaikan dengan kondisi berakhirnya masa pandemi covid 19, sehingga peserta rapat yang diundang jumlahnya disesuaikan dengan sebelum masa pandemi covid 19)
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	10 Paket	Rp 337,895,550	9 Paket	Rp 393,811,100	Rp 55,915,550	Penambahan volume belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya (delegete conference), dan volume belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use) pembelian gordyn jendela dan pintu; serta pengurangan belanja pemeliharaan mesin ketik
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**Rp 40,856,277,100**		**Rp 40,673,999,000**	**Rp (182,278,100)**	
	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			**Rp 8,135,660,000**		**Rp 8,131,360,000**	**Rp (4,300,000)**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Rp 1,440,425,000	1 Dokumen	Rp 1,436,125,000	Rp (4,300,000)	Pengurangan volume belanja makan minum rapat
	b. Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen	Rp 5,161,010,000	11 Dokumen	Rp 5,161,010,000	Rp -	
	c. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	Rp 963,600,000	10 Dokumen	Rp 963,600,000	Rp -	
	d. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	Rp 570,625,000	5 Dokumen	Rp 570,625,000	Rp -	
	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran			**Rp 3,011,307,000**		**Rp 2,938,266,000**	**Rp (73,041,000)**	
	a. Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Rp 499,428,000	2 Dokumen	Rp 492,928,000	Rp (6,500,000)	Pengurangan volume belanja makan minum dan belanja bantuan transport
	b. Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Rp 493,428,000	2 Dokumen	Rp 486,928,000	Rp (6,500,000)	Pengurangan volume belanja makan minum dan belanja bantuan transport

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
	c. Sub Kegiatan : Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Rp 767,628,000	1 Dokumen	Rp 769,206,000	Rp 1,578,000	Penambahan volume belanja makan minum dan belanja bantuan transport
	d. Sub Kegiatan : Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Rp 559,750,000	1 Dokumen	Rp 561,006,000	Rp 1,256,000	Penambahan volume belanja makan minum dan belanja bantuan transport
	e. Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Rp 6,225,000	1 Dokumen	Rp 6,500,000	Rp 275,000	Penambahan volume belanja makan minum rapat
	f. Sub Kegiatan : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Rp 684,848,000	1 Dokumen	Rp 621,698,000	Rp (63,150,000)	Pengurangan belanja narasumber dan belanja perjalanan dinas (anggaran menyesuaikan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan)
	Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			**Rp 9,613,946,000**		**Rp 9,053,226,000**	**Rp (560,720,000)**	
	a. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Rp 1,436,579,500	12 Laporan	Rp 1,436,579,500	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp -	
	c. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp -	
	d. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp -	
	e. Sub Kegiatan : Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Rp 463,230,000	1 Dokumen	Rp 3,060,000	Rp (460,170,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat, belanja narasumber, belanja perjalanan dinas, dan belanja bantuan transport (tindaklanjut LHP BPK dibahas oleh Badan Anggaran, sehingga pimpinan memutuskan tidak ada pembentukan pansus LHP BPK)
	f. Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	Rp 3,332,570,000	2 Dokumen	Rp 3,332,570,000	Rp -	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
	g. Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Rp 408,548,000	1 Dokumen	Rp 307,998,000	Rp (100,550,000)	Pengurangan belanja narasumber dan belanja perjalanan dinas (anggaran menyesuaikan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan)
	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD			**Rp 7,463,079,250**		**Rp 7,990,979,250**	**Rp 527,900,000**	
	a. Sub Kegiatan : Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	8 Dokumen	Rp 3,954,080,000	8 Dokumen	Rp 3,954,080,000	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	18 Dokumen	Rp 2,463,582,000	18 Dokumen	Rp 3,099,682,000	Rp 636,100,000	Penambahan volume belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Dewan di media cetak maupun online (Publikasi / Sosialisasi Rancangan Produk Hukum & Produk Hukum di Media Cetak = 4 kali x Rp. 25.000.000; Advetorial di Media Cetak = 8 kali x Rp. 4.950.000; Publikasi Kegiatan DPRD di Media Cetak = 40 Dewan x Rp. 4.950.000 ; Obrolan Tugu Jogja = 4 kali x Rp. 25.000.000; Podcast DPRD = 5 kali x Rp. 10.000.000; Mimbar Alat Kelengkapan Dewan = 9 alat kelengkapan x Rp. 16.500.000)
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	Rp 216,000,000	2 Orang	Rp 81,000,000	Rp (135,000,000)	Pengurangan volume belanja jasa tenaga ahli / kelompok pakar
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Rp 216,000,000	6 Orang	Rp 216,000,000	Rp -	
	e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 549,544,000	1 Dokumen	Rp 584,544,000	Rp 35,000,000	Penambahan volume belanja makan minum tamu DPRD
	f. Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	Rp 63,873,250	2 Dokumen	Rp 55,673,250	Rp (8,200,000)	Pengurangan volume belanja bahan cetak (fotocopy) dan belanja makan minum rapat
	Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			**Rp 6,697,832,850**		**Rp 6,640,125,750**	**Rp (57,707,100)**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	Rp 857,589,600	3 Dokumen	Rp 840,639,600	Rp (16,950,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat dan belanja bantuan transport

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2023		ANGGARAN 2023	OUTPUT PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	Target	SIPD		
	b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Rp 5,840,243,250	3 Dokumen	Rp 5,799,486,150	Rp (40,757,100)	Pengurangan belanja bahan cetak, makan minum rapat, dan belanja sewa Reses (menyesuaikan jumlah Dewan yang melaksanakan Reses)
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			**Rp 784,890,000**		**Rp 784,890,000**	**Rp -**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Rp 352,720,000	1 Dokumen	Rp 352,720,000	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	Rp 432,170,000	12 Laporan	Rp 432,170,000	Rp -	
	Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah			**Rp 232,720,000**		**Rp 319,760,000**	**Rp 87,040,000**	
	a. Sub Kegiatan : Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	4 Dokumen	Rp 227,280,000	4 Dokumen	Rp 227,280,000	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Rp 5,440,000	1 Dokumen	Rp 92,480,000	Rp 87,040,000	Penambahan belanja jasa konsultansi berorientasi bidang-Telematika (Penyusunan Dokumen Kajian Publisitas DPRD di Media Online = 1 dokumen sebesar Rp. 85.000.000), dan volume belanja makan minum rapat
	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD			**Rp 4,916,842,000**		**Rp 4,815,392,000**	**Rp (101,450,000)**	
	a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Rp 561,810,000	1 Dokumen	Rp 561,810,000	Rp -	
	b. Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Lapiran Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Rp 6,450,000	1 Laporan	Rp 6,450,000	Rp -	
	c. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	Rp 2,644,096,000	12 Dokumen	Rp 2,568,146,000	Rp (75,950,000)	Pengurangan belanja perjalanan dinas (anggaran menyesuaikan perjalanan yang sudah selesai dilaksanakan)
	d. Sub Kegiatan : Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Rp 1,704,486,000	1 Dokumen	Rp 1,678,986,000	Rp (25,500,000)	Pengurnagan volume belanja makan minum jamuan tamu pimpinan
				Rp 77,072,192,924		**Rp 78,701,514,589**	**Rp 1,629,321,665**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga agenda kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023



BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
JL. Kenari No. 56 Yogyakarta
(Kompleks Balaikota Yogyakarta)
bappeda.jogjakota.go.id
0274 515207 / 554432
bappeda@jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR



Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Yogyakarta, 2023
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST.,MT
NIP. 197203061996031004

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iiii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II **4**

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH **27**

BAB IV PENUTUP **52**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II 21
Tabel 2.2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023..... 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor … Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023;
2) Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3) Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2023;
4) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian salah satu ketugasannya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
c. Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik;
d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
e. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan, pengendalian, inovasi di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana

dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di mana target yang ingin dicapai adalah nilai A.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 4.777.745.657,- dari target Triwulan II sebesar Rp. 6.401.248.181,- (74,64%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100% .

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 73,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 73,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.749.000,- atau sebesar 99,65% dari target Triwulan II sebesar Rp. 3.762.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2023 anggaran untuk penggandaan akan dirasionalisasi.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 89,00 % dari target fisik sebesar 89,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.921.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 2.921.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023

anggaran untuk penggandaan akan dirasionalisasi, sedangkan anggaran untuk jamuan makan sudah terserap 100%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai bulan Juli (Triwulan III). Meskipun demikian, pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran untuk penggandaan akan dirasionalisasi.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai bulan Agustus (Triwulan III). Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai bulan Oktober (Triwulan IV). Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00 % dari target fisik sebesar 50,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 21.393.000,- atau sebesar 99,96% dari target Triwulan II sebesar Rp. 21.402.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dirasionalisasi.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 16,00 % dari target fisik sebesar 16,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 297.750,- atau sebesar 99,25% dari target Triwulan II sebesar Rp. 300.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena baru direalisasikan untuk belanja penggandaan sedangkan pelaksanaan rapat baru akan dilaksanakan di bulan Desember. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dirasionalisasi.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan II sudah dibayarkan sebesar Rp. 4.198.390.331,-. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 64,66% dari target fisik sebesar 64,66%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 4.198.390.331,-. atau sebesar 73,4% dari target Triwulan II sebesar Rp. 5.720.271.281,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena pembayaran gaji dan tunjangan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah ASN. Meskipun demikian, pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan ditambah karena terdapat 2 pegawai pindahan dari OPD lain dan direncanakan akan diselenggarakan pelantikan terhadap 19 orang CPNS menjadi PNS di TA 2023.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 12,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 12,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 4.059.000,- atau sebesar 93,58% dari target Triwulan II sebesar Rp. 4.337.500,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala dan plotting yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV (akhir tahun). Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100 % dari target fisik Triwulan II sebesar 100%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 713.000,- atau sebesar 99,72% dari target Triwulan II sebesar Rp. 715.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dilaksanakan pada bulan Juni. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 50,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.990.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 2.990.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran untuk jamuan makan akan dirasionalisasi.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dimulai pada bulan Juli (Triwulan III). Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 69,00 % dari target fisik sebesar 69,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 391.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 391.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Telah dilaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah pada bulan Juni. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 32,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari target Triwulan II sebesar Rp. 176.000,- Realisasi fisik tercapai 0% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan Juli. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100% dari target fisik sebesar 100%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 989.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 989.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat

tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dimulai pada bulan Juli (Triwulan III). Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 47,00 % dari target fisik sebesar 47,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari target Triwulan II sebesar Rp. 460.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan belum ada. Meskipun capaian fisik 100% tetapi kemajuan keuangan sangat rendah dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dimulai pada Triwulan IV. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00 % dari target fisik sebesar 50,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 32.972.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 32.972.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00 % dari target fisik sebesar 50,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.930.000,- atau sebesar 97,72% dari target Triwulan II sebesar

Rp. 1.975.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan belanja komponen instalasi listrik bangunan kantor sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan ditambah untuk belanja lampu TL.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00 % dari target fisik sebesar 50,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 39.217.750,- atau sebesar 99,20% dari target Triwulan II sebesar Rp. 39.535.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan ditambah untuk penyesuaian belanja ATK, menambah belanja ballpoint, belanja stampel tanggalan, stapler jilid, pensil dan kertas F4.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 36,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 36,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 7.971.282,- atau sebesar 94,35% dari target Triwulan II sebesar Rp. 8.448.900,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Hal ini dikarenakan belanja penyediaan peralatan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dirasionalisasi untuk pengurangan belanja hand sanitizer.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 44,00 % dari target fisik sebesar 44,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 17.281.590,- atau sebesar 67,84% dari target Triwulan II sebesar Rp. 25.475.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena belanja cetak dan penggandaan menyesuaikan dengan kebutuhan dari bidang/sektoral, sehingga pada Perubahan Renja Tahun 2023 akan dirasionalisasi anggarannya.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 51,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp.1.482.000,- atau sebesar 92,51% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.602.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena belanja langganan surat kabar sesuai dengan kebutuhan sehingga pada Perubahan Renja Tahun 2023 akan dirasionalisasi anggarannya.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 39,00 % dari target fisik sebesar 39,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 103.937.996,- atau sebesar 82,89% dari target Triwulan II sebesar

Rp. 125.400.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena belanja perjalanan dinas menyesuaikan undangan rapat koordinasi di luar Daerah. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dikurangi untuk belanja jamuan makan dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100% dari target fisik Triwulan II sebesar 94%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 152.514.500,- atau sebesar 97,80% dari target Triwulan II sebesar Rp. 155.950.000,- Realisasi fisik tercapai 106,38% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan bahkan selesai lebih awal karena pembayaran belanja modal mebel sudah dilaksanakan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran pada sub kegiatan ini akan bertambah dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun ini yaitu untuk Bappeda Planning Gallery, Rak Besi 3 unit, Aquascape 2 unit, Smart TV 6 unit, Vaccuum Cleaner, AC, Gordyin 27 buah, Kursi Kerja Kepala Bidang 1 unit, dan Scanner.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 36,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 36,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.190.000,- atau sebesar 92,73% dari target Triwulan II sebesar Rp. 3.440.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Hal ini disebabkan karena belanja materai surat menyurat sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan, namun belanja buku cek tidak terealisasi karena buku cek masih tercukupi. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dirasionalisasi untuk belanja materai dan buku cek.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 16,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 16,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.385.265,- atau sebesar 65,97% dari target Triwulan II sebesar Rp. 2.100.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran telepon menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 akan

dirasionalisasi anggarannya untuk pengurangan Belanja Lisensi Aplikasi Teleconference dan telepon kantor.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 50,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 24.498.000,- atau sebesar 99,99% dari target Triwulan II sebesar Rp. 24.500.000,- Realisasi fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Sisa anggaran adalah sisa kontrak dengan penyedia jasa cleaning service di mana termin 1 Jasa Cleaning Servis sudah cair pada bulan April. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 51,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 45.440.893,- atau sebesar 56,82% dari target Triwulan II sebesar Rp. 79.973.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk BBM maupun untuk suku cadang. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan diefisiensikan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 63,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 63,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 15.304.300,- atau sebesar 45,68% dari target Triwulan II sebesar Rp. 33.500.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk BBM maupun untuk suku cadang. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan diefisiensikan.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 41,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 41,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 5.625.000,- atau sebesar 31,85% dari target Triwulan II sebesar Rp. 17.662.500,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan, di antaranya untuk service printer dan service laptop kantor. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 pemeliharaan Mebelair akan dirasionalisasi.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100% dari target fisik Triwulan II sebesar 99,69%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 89.102.000,- atau sebesar 99% dari target Triwulan II sebesar Rp. 90.000.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena Termin 2 sebesar 100% Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Bappeda Kota Yk telah selesai (renovasi ruang IPW). Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran pada sub kegiatan ini akan bertambah dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun ini yaitu untuk Bappeda Planning Gallery.

II. **Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 sub kegiatan. Ada 2 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah dengan target 92,5% dan Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan dengan target 100%.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 327.916.000,- dari target triwulan II sebesar Rp. 332.761.385,- (98,54%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 103,17%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

a. Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 12,29% dari target fisik Triwulan II sebesar 12,29%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 23.456.000,- atau sebesar 97,85% dari target Triwulan II sebesar Rp. 23.970.000,-. Dengan demikian capaian fisik sebesar 100% sedangkan capaian keuangan juga sangat tinggi. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Meskipun demikian pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran untuk kebutuhan tenaga ahli Pengintegrasian Dokumen Perencanaan akan dikurangi dari 11 bulan menjadi 6 bulan karena TA ybs diterima PPPK, dan akan ada penambahan tenaga ahli untuk penyusunan Naskah Akademik RPJPD (2 bulan).

b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50% dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 22.291.000,- atau sebesar 99,97% dari target Triwulan II sebesar Rp. 22.296.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan tata kala. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan.

c. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100 % dari target fisik Triwulan II sebesar 100 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 6.947.000,- atau sebesar 99,86% dari target Triwulan II sebesar Rp. 6.957.000,-Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan.

d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100 % dari target fisik Triwulan II sebesar 100 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 22.378.000,- atau sebesar 99,95% dari target Triwulan II sebesar Rp. 22.389.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai di Triwulan II, sisa anggaran berupa belanja jamuan makan dan minum rapat.

e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55% dari target fisik Triwulan II sebesar 55%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 41.652.000,- atau sebesar 99,88% dari target Triwulan II sebesar Rp. 41.702.025,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 64% dari target fisik Triwulan II sebesar 64%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 20.750.000,- atau sebesar 99,93% dari target Triwulan II sebesar Rp. 20.764.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Dokumen analisa data dalam tahap reviu oleh DIY dan Perwal Satu Data dalam harmonisasi dengan Kemenkumham Kanwil DIY. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap.

b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 42,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 42,00 %. Kemajuan keuangan sampai adalah sebesar Rp. 385.000,00 ,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp.385.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 89,38% dari target fisik Triwulan II sebesar 89,38%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 118.449.250,- atau sebesar 99,7% dari target Triwulan II sebesar Rp. 118.794.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap.

b. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45% dari target fisik Triwulan II sebesar 45%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 71.607.750,- atau sebesar 94,84% dari target Triwulan II sebesar Rp. 75.504.360,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dirasionalisasi untuk pengurangan anggaran pigura dari 900 ribu menjadi 300 ribu.

III. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia dengan target 92,5%, Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam dengan target 92,5%, dan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan dengan target 92,5%. Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 103,06%. Kemajuan keuangan

sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 785.139.250,- dari target triwulan II sebesar Rp. 1.156.575.052,- (67,88%).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 64% dari target fisik Triwulan II sebesar 64%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 29.681.000,- atau sebesar 99,74% dari target Triwulan II sebesar Rp. 29.758.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala. Meskipun demikian, terdapat sisa anggaran jamuan makan yang rencananya akan dioptimalkan di Triwulan IV. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55% dari target fisik Triwulan II sebesar 55%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 47.868.750,- atau sebesar 97,24% dari target Triwulan II sebesar Rp. 49.228.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan ada pengurangan dan penambahan anggaran. Penambahan pada volume kontrak TA. Efisiensi pada jamuan makan, FGD Pendidikan (karena sudah tercukupi melalui rapat koordinasi), dan efisiensi honor narasumber serta seminar kit Rembuk Stunting.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 48,32% dari target fisik Triwulan II sebesar 49,42%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 81.103.000,- atau sebesar 61,25% dari target Triwulan II sebesar Rp. 132.420.000,- Realisasi fisik tercapai 97,77% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena Realisasi termin 1 Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) mundur dari tatakala namun paparan pendahuluan sudah dilaksanakan, FGD TKPK mundur dari tatakala karena masih menunggu dari TIM Review Parameter pendataan sasaran. Meskipun demikian, pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan ditambah untuk penambahan personil tim dari Kejaksaan Negeri, serta ada efisiensi narasumber Musrenbang Kemiskinan menyesuaikan realisasi.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 40% dari target fisik Triwulan II sebesar 40 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 41.530.000,- atau sebesar 96,19% dari target Triwulan II sebesar Rp. 43.176.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 akan ada pengurangan belanja Tenaga Ahli Perencana Teknokratis Perekonomian Kota Yogyakarta, dan FGD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah.

b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 48% dari target fisik Triwulan II sebesar 48%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 32.512.000,- atau sebesar 92,2% dari target Triwulan II sebesar Rp. 35.264.000,-. Realisasi fisik tercapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala, ada sisa jamuan akan dioptimalkan pada bulan Juli. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 66,88% dari target fisik Triwulan II sebesar 66,88 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 104.971.500,- atau sebesar 97,25% dari target Triwulan II sebesar Rp. 107.936.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan diefisiensi untuk belanja narasumber FGD.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 42% dari target fisik Triwulan II sebesar 42%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 43.690.000,- atau sebesar 99,62% dari target Triwulan II sebesar Rp. 43.856.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 62,7% dari target fisik Triwulan II sebesar 79,61%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 44.701.000,- atau sebesar 12,77% dari target Triwulan II sebesar Rp. 349.893.744,-. Realisasi fisik tercapai 78,75% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena Kajian sampah masih proses pencairan termin 1 sebesar Rp 100.000.000,- namun untuk laporan pendahuluan sudah selesai, kemudian termin 2 rencana dicairkan pada bulan Agustus sebesar Rp. 200.000.000,-. Untuk 2 tenaga ahli (Tenaga Ahli Lingkungan dan Tata Ruang, dan Tenaga Ahli Pemetaan) akan didrop pada Perubahan Renja Tahun 2023.

c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 83,53% dari target fisik Triwulan II sebesar 83,53%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 359.082.000,- atau sebesar 98,36% dari target Triwulan II sebesar Rp. 365.043.308,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Meskipun demikian, untuk gaji TA ada yang belum cair, rencana akan dicairkan pada bulan Juli, dan ada sisa makan minum rapat akan dioptimalkan pada bulan Juli. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

IV. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Tolok ukur dari program ini adalah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan dengan target 91,00% dan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah dengan target 63,76 Skor. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 98,90%. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 273.802.098,- dari target triwulan II sebesar Rp. 334.742.834,- (81,79%).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 40% dari target fisik Triwulan II sebesar 40%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II

adalah sebesar Rp. 16.348.000,- atau sebesar 99,89% dari target Triwulan II sebesar Rp. 16.365.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

b. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 57% dari target fisik Triwulan II sebesar 57%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 27.431.000,- atau sebesar 76,3% dari target Triwulan II sebesar Rp. 35.948.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena Honor Tim satu orang Dewan Litbang baru akan cair pada Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,32% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,32%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 158.096.500,- atau sebesar 86,37% dari target Triwulan II sebesar Rp. 183.039.310,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun capaian keuangan tinggi tetapi tidak terserap optimal karena Honor Tim satu orang LPPM baru akan cair pada Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan dirasionalisasi meliputi: 1) Pengurangan 2 bulan gaji TT Jaringan Penelitian dikarenakan cuti melahirkan. 2) Pengurangan 2 bulan gaji TA Penelitian (sesuai kebutuhan).

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 35% dari target fisik Triwulan II sebesar 35 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.084.000,- atau sebesar 61,85% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.752.362,- Realisasi fisik mencapai 100 **%** sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena adanya penggandaan yang belum terealisasikan, akan direalisasikan pada Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

b. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 35% dari target fisik Triwulan II sebesar 35%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.257.000,- atau sebesar 88,07% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.427.162,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun realisasi keuangan tinggi tetapi serapan anggaran tidak optimal karena adanya penggandaan yang belum terealisasikan dan akan direalisasikan pada TW III. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran tetap.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52% dari target fisik Triwulan II sebesar 52%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 69.585.598,- atau sebesar 72,32% dari target sebesar Rp. 96.211.000,-. Realisasi fisik bisa tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena pencairan kontrak video mundur, akan dicairkan pada bulan Juli, penggandaan akan dihapus di perubahan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan biaya transport di perubahan. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 akan ada penambahan anggaran untuk: 1) Anugerah Inovasi dan Penelitian, 2) TA Inkubasi Inovasi Daerah dan TA Penyusun Naskah Akademik Inovasi Daerah masing-masing 2 bulan.

Adapun evaluasi program, kegiatan , dan sub kegiatan Bappeda sampai Triwulan II Tahun 2023 secara rinci dituangkan dalam tabel berikut (SIM Pelaporan):

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92.5 Skala 0-100
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90.67 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	**PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah**	**Rata-rata capaian target sasaran daerah**	**92,80 %**	**0,00**	**95,33 %**	**0,00**	**92,50 %**	**792.398.795,00**	**92.50 %**	**332.761.385,00**	**95.33 %**	**327.916.000,00**	**103.17%**	**98,54%**					**Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	
			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	**(Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan) / (Jumlah Total analisa data dalam perencanaan pembangunan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 0**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								**373.133.023,00**		**117.314.025,00**		**116.724.000,00**		**99.5%**						
		1 Analisis Kondisi DaerahPermasalahandan Isu Strategis Pembangunan Daerah				0,00		0,00		205.257.766,00	12,29%	23.970.000,00	12,29%	23.456.000,00	100,00%	97,86%						
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		12,29%		0,00%							
		2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				0,00		0,00		44.881.744,00	50,00%	22.296.000,00	50,00%	22.291.000,00	100,00%	99,98%						
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		3 Pelaksanaan Konsultasi Publik				0,00		0,00		6.957.000,00	100,00%	6.957.000,00	100,00%	6.947.000,00	100,00%	99,86%						
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				0,00		0,00		22.389.000,00	100,00%	22.389.000,00	100,00%	22.378.000,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		93.647.513,00	55,00%	41.702.025,00	55,00%	41.652.000,00	100,00%	99,88%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								**106.719.372,00**		**21.149.000,00**		**21.135.000,00**		**99.93%**						
		6 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		101.266.372,00	64,00%	20.764.000,00	64,00%	20.750.000,00	100,00%	99,93%						
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		64,00%		64,00%		100,00%							
		7 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		5.453.000,00	42,00%	385.000,00	42,00%	385.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan		0 Buku		0 Buku		1 Buku		42,00%		42,00%		100,00%							
		PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								**312.546.400,00**		**194.298.360,00**		**190.057.000,00**		**97.82%**						
		8 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		136.174.116,00	89,38%	118.794.000,00	89,38%	118.449.250,00	100,00%	99,71%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		89,38%		0,00%							
		9 MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		176.372.284,00	45,00%	75.504.360,00	45,00%	71.607.750,00	100,00%	94,84%						
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		45,00%		45,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,11%**						

									Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan	92,80 %	0,00	95,33 %	0,00	92,50 %	1.943.065.706,00	92.50 %	1.156.575.052,00	95.33 %	785.139.250,00	103.17%	67,88%					Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia	92,80 %	0,00	95,33	0,00	92,50 %	0,00	92.50	0,00	95.33	0,00	103,06%	0,00%					Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam	92,80 %	0,00	95,33 %	0,00	92,50 %	0,00	92.50	0,00	95.33	0,00	103,06%	0,00%					Bidang Perekonomian	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								490.789.440,00		211.406.000,00		158.652.750,00		75.05%							
		1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		59.958.360,00	64,00%	29.758.000,00	64,00%	29.681.000,00	100,00%	99,74%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		64,00%		64,00%		100,00%							
		2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		95.219.720,00	55,00%	49.228.000,00	55,00%	47.868.750,00	100,00%	97,24%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		0,00		335.611.360,00	49,42%	132.420.000,00	48,32%	81.103.000,00	97,77%	61,25%						
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0,00%		48,32%		0,00%							
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								447.014.750,00		186.376.000,00		179.013.500,00		96.05%							
		4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		114.122.750,00	40,00%	43.176.000,00	40,00%	41.530.000,00	100,00%	96,19%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunann Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00		0,00		77.505.000,00	48,00%	35.264.000,00	48,00%	32.512.000,00	100,00%	92,20%						
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		0 laporan		0 laporan		4 laporan		48,00%		48,00%		100,00%							
		6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				0,00		0,00		255.387.000,00	66,88%	107.936.000,00	66,88%	104.971.500,00	100,00%	97,25%						
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		66,88%		0,00%							
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								1.005.261.516,00		758.793.052,00		447.473.000,00		58.97%							
		7 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		114.198.488,00	42,00%	43.856.000,00	42,00%	43.690.000,00	100,00%	99,62%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		42,00%		42,00%		100,00%							
		8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				0,00		0,00		443.607.488,00	79,61%	349.893.744,00	62,70%	44.701.000,00	78,76%	12,78%						
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		62,70%		0,00%							

		9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		447.455.540,00	83,53%	365.043.308,00	83,53%	359.082.000,00	100,00%	98,37%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		83,53%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**97,39%**	**83,85%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Skor rata-rata inovasi perangkat daerah**	**Skor rata-rata inovasi perangkat daerah**	**65,00 Skor**	**0,00**	**0,00 0**	**0,00**	**63,76 Skor**	**1.204.063.352,00**	**63.76 Skor**	**334.742.834,00**	**0 Skor**	**273.802.098,00**	**0,00%**	**81,79%**					**Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian**	
				Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	**(Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti / Jumlah penelitian yang dilakukan) x 100%**	**94,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**0,00**	**91,00 %**	**0,00**	**91**	**0,00**	**90**	**0,00**	**98,90%**	**0,00%**					**Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian**	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan									**130.853.818,00**		**52.313.000,00**		**43.779.000,00**		**83,69%**						
		1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				0,00		0,00		60.262.275,00	40,00%	16.365.000,00	40,00%	16.348.000,00	100,00%	99,90%						
				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		2	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				0,00		0,00		70.591.543,00	57,00%	35.948.000,00	57,00%	27.431.000,00	100,00%	76,31%						
				Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		0 Rekomendasi		0 Rekomendasi		1 Rekomendasi		57,00%		57,00%		100,00%							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									**465.495.810,00**		**183.039.310,00**		**158.096.500,00**		**86,37%**						
		3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				0,00		0,00		465.495.810,00	51,32%	183.039.310,00	51,32%	158.096.500,00	100,00%	86,37%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		0,00%		51,32%		0,00%							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									**306.756.724,00**		**3.179.524,00**		**2.341.000,00**		**73,63%**						
		4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0,00		0,00		153.378.362,00	35,00%	1.752.362,00	35,00%	1.084.000,00	100,00%	61,86%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		35,00%		0,00%							
		5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				0,00		0,00		153.378.362,00	35,00%	1.427.162,00	35,00%	1.257.000,00	100,00%	88,08%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		35,00%		0,00%							
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi									**300.962.000,00**		**96.211.000,00**		**69.585.598,00**		**72,33%**						
		6	Diseminasi JenisProsedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif				0,00		0,00		300.962.000,00	52,00%	96.211.000,00	52,00%	69.585.598,00	100,00%	72,33%						
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		52,00%		52,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**80,81%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**A Nilai**	**0,00**	**AA**	**0,00**	**A Nilai**	**10.178.532.751,00**	**A Nilai**	**6.401.248.181,00**	**A Nilai**	**4.777.745.657,00**	**100%**	**74,64%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**60.724.970,00**		**28.385.000,00**		**28.360.750,00**		**99,91%**						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.188.860,00	73,00%	3.762.000,00	73,00%	3.749.000,00	100,00%	99,65%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		73,00%		73,00%		100,00%							

		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.388.860,00	89,00%	2.921.000,00	89,00%	2.921.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		89,00%		89,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.488.860,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.488.810,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.488.860,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		44.640.360,00	50,00%	21.402.000,00	50,00%	21.393.000,00	100,00%	99,96%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.040.360,00	16,00%	300.000,00	16,00%	297.750,00	100,00%	99,25%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		16,00%		16,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**8.897.020.350,00**		**5.728.313.781,00**		**4.206.152.331,00**		**73,43%**						
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		8.846.837.350,00	64,66%	5.720.271.281,00	64,66%	4.198.390.331,00	100,00%	73,39%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		69 Orang/Bulan		64,66%		64,66%		100,00%							
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		41.027.000,00	12,00%	4.337.500,00	12,00%	4.059.000,00	100,00%	93,58%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		12,00%		12,00%		100,00%							
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		989.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		483.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	713.000,00	100,00%	99,72%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.980.000,00	50,00%	2.990.000,00	50,00%	2.990.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		989.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**4.663.000,00**		**2.016.000,00**		**1.380.000,00**		**68,45%**						
		15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		567.000,00	69,00%	391.000,00	69,00%	391.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		69,00%		69,00%		100,00%							
		16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		567.000,00	32,00%	176.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		32,00%		0,00%		0,00%							
		17	PembinaanPengawasandan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		989.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		989.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		989.000,00	47,00%	460.000,00	47,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		47,00%		47,00%		100,00%							
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		567.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**66.749.000,00**		**32.972.000,00**		**32.972.000,00**		**100%**							
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		66.749.000,00	50,00%	32.972.000,00	50,00%	32.972.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**505.309.770,00**		**202.435.900,00**		**171.820.613,00**		**84,88%**							
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		3.950.000,00	50,00%	1.975.000,00	50,00%	1.930.000,00	100,00%	97,72%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		50,00%		50,00%		100,00%							
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		93.422.770,00	50,00%	39.535.000,00	50,00%	39.217.750,00	100,00%	99,20%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		50,00%		50,00%		100,00%							
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		24.097.800,00	36,00%	8.448.900,00	36,00%	7.971.282,00	100,00%	94,35%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		36,00%		36,00%		100,00%							
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		58.837.200,00	44,00%	25.475.000,00	44,00%	17.281.590,00	100,00%	67,84%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		44,00%		44,00%		100,00%							
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.204.000,00	51,00%	1.602.000,00	51,00%	1.482.000,00	100,00%	92,51%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		321.798.000,00	39,00%	125.400.000,00	39,00%	103.937.996,00	100,00%	82,89%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		60 Laporan		39,00%		39,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**166.700.000,00**		**155.950.000,00**		**152.514.500,00**		**97,8%**							
		28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		166.700.000,00	94,00%	155.950.000,00	100,00%	152.514.500,00	106,38%	97,80%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		94,00%		100,00%		106,38%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**121.550.000,00**		**30.040.000,00**		**29.073.265,00**		**96,78%**							
		29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		9.750.000,00	36,00%	3.440.000,00	36,00%	3.190.000,00	100,00%	92,73%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		36,00%		36,00%		100,00%							
		30	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		13.800.000,00	16,00%	2.100.000,00	16,00%	1.385.265,00	100,00%	65,97%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		16,00%		16,00%		100,00%							
		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		98.000.000,00	50,00%	24.500.000,00	50,00%	24.498.000,00	100,00%	99,99%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**355.810.661,00**		**221.135.500,00**		**155.472.193,00**		**70,31%**							
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		159.228.000,00	51,00%	79.973.000,00	51,00%	45.440.893,00	100,00%	56,82%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		26 Unit		51,00%		51,00%		100,00%							
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		62.384.200,00	63,00%	33.500.000,00	63,00%	15.304.300,00	100,00%	45,68%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		2 Unit		63,00%		63,00%		100,00%							
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		43.925.000,00	41,00%	17.662.500,00	41,00%	5.625.000,00	100,00%	31,85%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		99 Unit		41,00%		41,00%		100,00%							

		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		90.275.461,00	99,69%	90.000.000,00	100,00%	89.102.000,00	100,31%	99,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		99,69%		100,00%		100,31%								
Rata-rata capaian kinerja																**96,54%**	**81,11%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**14.118.065.604,00**		**8.225.327.452,00**		**6.164.603.005,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**97,71%**	**74,95%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Bappeda naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang semula sebesar Rp. 14.118.065.604,- pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 menjadi Rp. 14.693.205.784,- ada kenaikan sebesar Rp. 575.140.180,-. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan tunjangan terkait tambahan 2 pegawai pindahan dari OPD lain dan direncanakan akan diselenggarakan pelantikan terhadap 19 orang CPNS menjadi PNS di TA 2023, penganggaran untuk peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan peralatan dan mesin lainnya sehubungan dengan pembuatan Bappeda Planning Gallery, serta adanya penambahan belanja pemeliharaan bangunan Bappeda Kota Yogyakarta.

Disamping penambahan belanja ada juga sub kegiatan yang anggarannya turun untuk dirasionalisasi pada pengurangan volume honorarium tenaga teknis, tenaga ahli, narasumber, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, dan lain-lain.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp. 10.178.532.751,- dan pada Perubahan Renja 2023 naik menjadi Rp. 10.791.426.931,-. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 612.894.180,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Anggaran murni sebesar Rp. 60.724.970,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 60.213.850,- atau turun sebesar Rp. 511.120,-.

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

      Anggaran murni sebesar Rp. 5.188.860,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 5.168.000,- atau turun sebesar Rp.

20.860,-. Pengurangan pada belanja penggandaan, dan menata kembali belanja makanan dan minuman rapat.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 3.388.860,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 2.921.000,- atau turun sebesar Rp. 467.860,-. Pengurangan pada belanja penggandaan. Sedangkan anggaran untuk jamuan makan sudah terserap 100%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 2.488.860,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 2.478.000,- atau turun sebesar Rp. 10.860,-. Pengurangan pada belanja penggandaan, dan menata kembali belanja makanan dan minuman rapat.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.488.810,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 1.488.810,-. Tidak terdapat perubahan anggaran.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.488.860,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 1.488.860,-. Tidak terdapat perubahan anggaran.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 44.640.360,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 44.632.000,- atau turun sebesar Rp.8.360,- Pengurangan pada belanja penggandaan, dan menata kembali belanja makanan dan minuman rapat.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 2.040.360,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 2.037.180,- atau turun sebesar Rp.3.180,- Pengurangan pada belanja penggandaan, dan menata kembali belanja makanan dan minuman rapat.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 8.897.020.350,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 9.189.033.350,- atau naik sebesar Rp. 292.013.000,-

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Anggaran murni sebesar Rp. 8.846.837.350,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 9.140.000.350,- atau naik sebesar Rp. 292.163.000,-. Penambahan belanja karena terdapat 2

pegawai pindahan dari OPD lain dan direncanakan akan diselenggarakan pelantikan terhadap 19 orang CPNS menjadi PNS di TA 2023.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 41.027.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 41.027.000,-.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 989.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 989.000,-.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 483.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 483.000,-.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 715.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 715.000,-.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran.

Anggaran murni sebesar Rp. 5.980.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 4.830.000,- atau turun sebesar Rp. 1.150.000,- Pengurangan pada belanja makanan dan minuman rapat.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Anggaran murni sebesar Rp. 989.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 989.000,-.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 4.668.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 4.668.000,-.

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 567.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 567.000,-

b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 567.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 567.000,-

c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 989.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 989.000,-.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 989.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 989.000,-.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 989.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 989.000,-.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 567.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 567.000,-.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 66.749.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 66.749.000,-.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Anggaran murni sebesar Rp. 66.749.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 66.749.000,-

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 505.309.770,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 460.747.370,- atau turun sebesar Rp. 44.562.400,-. Pada Kegiatan ini ada pengurangan tetapi juga ada kenaikan seperti diuraikan di bawah ini.

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 3.950.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 4.190.000,- atau naik sebesar Rp. 240.000,- Penambahan pada belanja lampu penerangan menyesuaikan dengan kebutuhan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 93.422.770,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 96.984.620,- atau naik sebesar Rp. 3.561.850,-. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

- Penghapusan Batu Baterai 9 V Kotak
- Desgrib/tempat pensil
- Penghapusan Kertas Faksimile
- Penghapusan pensil
- Pengurangan Kuantitas Batu Baterai AAA dari 100 jadi 96
- Penambahan Ballpoint Parker 1 Buah
- Penambahan Isi Ballpoint Parker 2 Buah
- Penabahan Stempel Tanggal 1 Buah
- Penambahan Stapler jilid besar 6 Buah

- Penambahan isi stepler tembak 12 dus
- Penambahan Ballpoint Gel Ink 216 buah
- Penambahan Batu Baterai Tanggung 100 buah
- Penambahan Plastik Mika Jilid 1 pack
- penambahan Pensil 2B 36 buah
- Penambahan Kertas HVS F4 70 gram / A4s dari 180 rim menjadi 210rim
- penambahan Kertas HVS Warna 1 rim

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Anggaran murni sebesar Rp. 24.097.800,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 18.036.550,- atau turun sebesar Rp. 6.061.250,-. Pengurangan anggaran terbesar pada belanja hand sanitizer. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut.

- Penghapusan Hand sanitizer @ 4 ltr
- Penghapusan Keset Kain
- Pengurangan Pengharum ruanga dari 80 menjadi 42 buah
- Pengurangan tisu basah dari 72 menjadi 18 buah
- penambahan Semir Ban Mobil 4 buah
- penambahan Semir body mobil 8 buah
- penambahan Kanebo 4 buah
- penambahan Sulak 10 buah
- penambahan Thermometer Digital 1 buah
- penambahan Keset besar 2 buah
- penambahan bantal kursi 7 buah
- penambahan sarung bantal kursi 7 buah
- penambahan Meja Lipat kecil 2 buah
- Bantal duduk (besar) 2 buah

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 58.837.200,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 32.312.200,- atau turun sebesar Rp. 26.525.000,- Pengurangan pada belanja penggandaan dan cetak karena menyesuaikan dengan kebutuhan.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran murni sebesar Rp. 3.204.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 2.964.000,- atau turun sebesar Rp. 240.000,-. Pengurangan pada belanja bahan bacaan karena menyesuaikan dengan kebutuhan.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 321.798.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 306.260.000,- atau turun

sebesar Rp. 15.538.000,- . Penurunan pada belanja jamuan makan dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 166.700.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 413.817.900,- atau naik sebesar Rp. 247.117.900,-.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Anggaran murni sebesar Rp. 166.700.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 413.817.900,- atau naik sebesar Rp. 247.117.900,-. Anggaran pada sub kegiatan ini bertambah dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun ini yaitu untuk Bappeda Planning Gallery, rak besi, AC, gordyn, kursi kerja, dan scanner. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

- Pengurangan Batre kamera Video lapangan dari 2 menjadi 1 unit
- Penambahan Kursi Kerja Kepala Bidang
- Penghapusan Kulkas 2 pintu
- Penambahan Lemari es 2 pintu 2 unit
- Penambahan Gordyn 27 buah
- Pengadaan rak besi 3 unit
- Pengadaan Aqua Scape untuk ruang kepala 1 unit
- Pengadaan Aquascape Untuk Bappeda Planning Galery 1 unit
- Penambahan Smart TV 65" 3 unit
- Penambahan Smart TV 55" 1 unit
- Penambahan Smart TV 43" 2 unit
- Penambahan Vacum Cleaner 15 Liter
- Penambahan AC 2 PK 1 unit
- Penambahan Keyboard Tablet Kepala Bappeda
- Penambahan Scanner 6 unit

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 121.550.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 105.500.000,- atau turun sebesar Rp. 16.050.000,-. Pengurangan pada belanja materai, buku cek, belanja telepon, dan penghapusan belanja Lisensi Aplikasi Teleconference.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Anggaran murni sebesar Rp. 9.750.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp. 4.500.000,- atau turun sebesar Rp. 5.250.000,- Pengurangan pada belanja materai dan buku cek.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Anggaran murni sebesar Rp. 13.800.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp. 3.000.000,- atau turun sebesar Rp. 10.800.000,- Pengurangan pada belanja Belanja Lisensi Aplikasi Teleconference dan telepon kantor.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 98.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 98.000.000,-.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 355.810.661,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 490.697.461,- atau naik sebesar Rp. 134.886.800,- . Pada Kegiatan ini ada pengurangan tetapi juga ada kenaikan seperti penambahan Belanja Pemeliharaan Bangunan Bappeda Kota Yk.

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Anggaran murni sebesar Rp. 159.226.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 120.062.000,- atau turun sebesar Rp. 39.164.000,-. Pengurangan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 maupun Roda 4.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran murni sebesar Rp. 62.384.200,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 38.460.000,- atau turun sebesar Rp. 23.924.200,-. Pengurangan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan untuk Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Anggaran murni sebesar Rp. 43.925.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 42.900.000,- atau turun sebesar Rp. 1.025.000,-. Efisiensi pada belanja pemeliharaan mebelair.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran murni sebesar Rp. 90.275.461,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 289.275.461,- atau naik sebesar Rp. 199.000.000,- Penambahan pada Belanja Pemeliharaan Bangunan

Bappeda Kota Yogyakarta dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun ini yaitu untuk Bappeda Planning Gallery.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp. 792.398.795,- dan pada perubahan Renja 2023 turun menjadi Rp. 780.798.795,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 11.600.000,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

   Anggaran murni sebesar Rp. 373.133.023,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 362.133.023,- atau turun sebesar Rp. 11.000.000,-. Pada Kegiatan ini perubahan pada penambahan tenaga ahli untuk penyusunan Naskah Akademik RPJPD (2 bulan), pengurangan honor TA Pengintegrasian Dokumen Perencanaan (dari 11 bulan menjadi 6 bulan).

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Derah

   Anggaran murni sebesar Rp. 106.719.372,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 106.719.372,-.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

   Anggaran murni sebesar Rp. 312.546.400,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 311.946.400,- atau turun sebesar Rp. 600.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja pigura dirasionalisasi dari 900 ribu menjadi 300 ribu.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp. 1.943.065.706,- dan pada perubahan Renja 2023 turun menjadi Rp. 1.868.323.706,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 74.742.000,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

   Anggaran murni sebesar Rp. 490.789.440,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 494.427.440,- atau naik sebesar Rp. 3.638.000,-. Pada Kegiatan ini, perubahan pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan

Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) berupa: 1) penambahan volume kontrak TA, 2) efisiensi jamuan makan, 3) efisiensi FGD Pendidikan (karena sudah tercukupi melalui rapat koordinasi), dan 4) efisiensi honor narasumber serta seminar kit Rembuk Stunting. Sedangkan perubahan pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia berupa: 1) Penambahan personil tim dari Kejaksaan Negeri, dan 2) efisiensi narasumber Musrenbang Kemiskinan menyesuaikan realisasi.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

   Anggaran murni sebesar Rp. 447.014.750,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 418.134.750,- atau turun sebesar Rp. 28.880.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) berupa: 1) Pengurangan belanja Tenaga Ahli Perencana Teknokratis Perekonomian Kota Yogyakarta, dan 2) FGD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah. Serta pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian berupa Efisiensi belanja narasumber FGD.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

   Anggaran murni sebesar Rp. 1.005.261.516,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 955.761.516,- atau turun sebesar Rp. 49.500.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur berupa: 1) Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Ahli Lingkungan dan Tata Ruang, dan 2) Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemetaan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp. 1.204.068.352,- dan pada perubahan Renja 2023 naik menjadi Rp. 1.252.656.352,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 48.588.000,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

   Anggaran murni sebesar Rp. 130.853.818,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 130.853.818,-.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

   Anggaran murni sebesar Rp. 465.495.810,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 453.103.810,- atau turun sebesar Rp. 12.392.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat berupa: 1) Pengurangan 2 bulan gaji TT Jaringan Penelitian dikarenakan cuti melahirkan, 2) Pengurangan 2 bulan gaji TA Penelitian (sesuai kebutuhan).

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

   Anggaran murni sebesar Rp. 306.756.724,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 306.756.724,-.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

   Anggaran murni sebesar Rp. 300.962.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 361.942.000,- atau naik sebesar Rp. 60.980.000,-. Pada Kegiatan ini, penambahan pada sub kegiatan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif berupa tambahan untuk: 1) Anugerah Inovasi dan Penelitian, 2) TA Inkubasi Inovasi Daerah dan TA Penyusun Naskah Akademik Inovasi Daerah masing-masing 2 bulan. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

   - Penambahan seminar kit AIP
   - Penambahan gaji 2 TA masing-masing 2 bulan
   - Jamuan makan AIP
   - Plakat pemenang AIP
   - Hadiah AIP
   - Juri AIP
   - Pengurangan uang transport
   - Pengurangan belanja perjalanan dinas
   - Belanja penggandaan dihapus.

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**											**12,913,997,252**	**13,440,549,432**					**12,075,064,868**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10,178,532,751**	**10,791,426,931**					**9,982,553,120**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**60,724,970**	**60,213,850**					**85,500,000**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	5,188,860	5,168,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	5,000,000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,388,860	2,921,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	2,500,000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,488,860	2,478,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,488,810	1,488,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,488,860	1,488,860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	44,640,360	44,632,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	65,000,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,040,360	2,037,180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	4,000,000
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,897,020,350**	**9,189,033,350**					**8,790,758,040**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	69 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100 %	100 %	8,846,837,350	9,140,000,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	8,743,985,000
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	41,027,000	41,027,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	37,553,040
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	989,000	989,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	483,000	483,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	715,000	715,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	720,000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,980,000	4,830,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	6,000,000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	989,000	989,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**4,668,000**	**4,668,000**					**4,500,000**
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	567,000	567,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000
5	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	567,000	567,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	989,000	989,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	989,000	989,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	989,000	989,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	1,000,000
5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	567,000	567,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	500,000
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**66,749,000**	**66,749,000**					**61,795,080**
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	66,749,000	66,749,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	61,795,080
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**505,309,770**	**460,747,370**					**440,000,000**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	3,950,000	4,190,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	4,970,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	93,422,770	96,984,620			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	112,000,000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	24,097,800	18,036,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	36,100,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	58,837,200	32,312,200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	51,100,000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	3,204,000	2,964,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	3,000,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	60 Laporan	60 Laporan	100 %	100 %	321,798,000	306,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	232,830,000
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**166,700,000**	**413,817,900**					**100,000,000**
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	4 Unit	61 Unit	100 %	100 %	166,700,000	413,817,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	100,000,000
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**121,550,000**	**105,500,000**					**115,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	2 Jenis	100 %	100 %	9,750,000	4,500,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	9,225,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	13,800,000	3,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	5,000,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	98,000,000	98,000,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	100,775,000
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**355,810,661**	**490,697,461**					**385,000,000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	26 Unit	26 Unit	100 %	100 %	159,226,000	120,062,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	198,425,000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	62,384,200	38,460,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	59,815,000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	99 Unit	99 Unit	100 %	100 %	43,925,000	42,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	52,375,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	90,275,461	289,275,461	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	74,385,000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**792,398,795**	**780,798,795**					**655,780,456**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**373,133,023**	**362,133,023**					**257,477,000**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	3 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	205,257,766	194,257,766			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	60,000,000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	44,881,744	44,881,744			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	71,027,000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %	100 %	6,957,000	6,957,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %	100 %	22,389,000	22,389,000			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	23,000,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Perencanaan dan pendanaan tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	93,647,513	93,647,513			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	93,450,000
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**106,719,372**	**106,719,372**					**131,526,000**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	101,266,372	101,266,372			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	91,421,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	1 Buku	1 Buku	100 %	100 %	5,453,000	5,453,000			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	40,105,000
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**312,546,400**	**311,946,400**					**266,777,456**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah terlaksana		100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	136,174,116	136,174,116	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	87,813,812
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah terlaksana	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 92,50 %	100,00 % 92,50 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	176,372,284	175,772,284			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	100,00 % 92,50 %	178,963,644
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**1,943,065,706**	**1,868,323,706**					**1,436,731,292**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**490,789,440**	**494,427,440**					**362,860,040**
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	59,958,360	59,958,360			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	57,371,520

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	95,219,720	94,697,720			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	54,181,520
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	335,611,360	339,771,360			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	251,307,000
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**447,014,750**	**418,134,750**					**402,975,636**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	114,122,750	86,642,750			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	126,124,840
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	77,505,000	77,505,000			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	255,387,000	253,987,000			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	201,850,796
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**1,005,261,516**	**955,761,516**					**670,895,616**
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	114,198,488	114,198,488			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	107,238,712

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	443,607,488	394,107,488			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	123,208,872
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 % 92,50 % 92,50 %	92,50 % 92,50 % 92,50 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	447,455,540	447,455,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,50 % 92,50 % 92,50 %	440,448,032
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**1,204,068,352**	**1,252,656,352**					**1,169,183,065**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**1,204,068,352**	**1,252,656,352**					**1,169,183,065**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**											**130,853,818**	**130,853,818**					**150,754,120**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	60,262,275	60,262,275			Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	48,779,100
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100 %	100 %	70,591,543	70,591,543			Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	101,975,020
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**465,495,810**	**453,103,810**					**470,480,190**
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	465,495,810	453,103,810			Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	470,480,190
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**											**306,756,724**	**306,756,724**					**257,523,150**
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	153,378,362	153,378,362			Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	103,761,575
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	153,378,362	153,378,362			Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	91,00 % 63,76 (sangat inovatif) skor	153,761,575
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**300,962,000**	**361,942,000**					**290,425,605**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terciptanya Inovasi untuk percepatan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	3 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	300,962,000	361,942,000			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	63,76 (sangat inovatif) skor 91,00 %	290,425,605
											TOTAL	**14,118,065,604**	**14,693,205,784**					**13,244,247,933**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencaaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2023

KEPALA BAPPEDA

AGUS TRI HARYONO, ST., MT.
NIP. 19720306 199603 1 004

RENCANA KERJA PERUBAHAN

BPKAD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023





BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

KOTA YOGYAKARTA 2023

BPKAD Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
Telp (0274)548519 e_mail : bpkad@jogjakota.go.id website : www.bpkad.jogjakota.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsitipatif dan *top down/bottom up*.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2020 penyusunan Rencana kerja Perubahan OPD masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun untuk tahun 2023 penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD disusun berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, serta mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tidak hanya pada perencanaan saja, permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Fokus utamanya yaitu untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “SINGLE CODEBASE”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah menyusun

Rencana Kerja Perubahan BPKAD Kota Yogyakarta yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud**

   Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang . Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 7 (tujuh) Walikota Yogyakarta .

2. **Tujuan**

   Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kota Yogyakarta adalah :

   1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
   2) Meningkatkan pendapatan pajak daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2020) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Lampiran-Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan pajak daerah yang mempunyai beberapa program antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaPemeliharaan Aset Tetap Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS
b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring

dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.

j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penyusunan Standar Harga

b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
e. Pengamanan Barang Milik Daerah
f. Penilaian Barang Milik Daerah
g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
j. Penagihan Pajak Daerah
k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.a. Evaluasi kegiatan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan dalam melaksanaan pekerjaan :

1. Dilaksanakan koordinasi intern, monitoring, evaluasi, konsolidasi baik keuangan maupun fisik kegiatan yang dilakukan setiap sebulan.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasaran yang ada.

3. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah dengan melaksanakan E-Tax, E-SPTPD, dan monitoring kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara online.

2.1. b. Analisa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Analisa akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yoyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai SKPD penghasil melalui pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Capaian kinerja BPKAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat kedalam yaitu mendukung tugas pokok dan fungsi berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dibidang pengelolaan keuangan dan aset dengan capaian kinerja 95,07%, realisasi ini melebihi dari target 94,08% atau sebesar 101,05%, selain itu nilai pendapatan asli daerah tercapai sebesar Rp725.577.542.997,58 melebihi target Rp634.171.754.454,00 atau sebesar 114,41%.
2. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil.

2.1.c. Analisa Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan. Realisasi keuangan tidak sesuai d
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala

pengukuran ordinal rata–rata capaian indikator output adalah 95,07% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output kegiatan sesuai yang ditargetkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022 yang dituangkan dalam Tabel 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berisi kajian capaian kinerja pelayanan SKPD terdapat dengan indikator :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2 Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua indikator tersebut dituangkan dalam Tabel 2.2.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

1. Perlunya peningkatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .
2. Perlunya penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan wajib pajak sekaligus pengawasan dan pembinaannya.
3. Perlunya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
5. Perlunya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga perlu adanya kompetisi antar kabupaten /kota dalam peningkatan pajak daerah.
6. Perlunya peningkatan penataan aset daerah.
7. Perlu penyusunan Database aset daerah guna optimalisasi pemanfaatan aset daerah
8. Perlu adanya integrasi aplikasi keuangan dan aplikasi aset guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta integrasi pada Sistem Pajak Daerah yang akan

memudahkan dalam pelayanan.

2.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui Program yang telah disusun :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1) **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) **Administrasi Keuangan**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
d. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
h. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3) **Administrasi Umum**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
l. Penyediaan Makanan dan Minuman
m. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS
b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
d. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
e. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
f. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
g. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS
b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
e. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
f. Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
g. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
h. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
i. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
j. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
k. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
l. Pelaksanaan Penerbitan SPD Restitusi/Pengembalian Kelebihan Penerimaan

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
b. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Provinsi dan Kabupaten/Kota
d. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan PPKD
e. Penyusunan Tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
f. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
g.
h. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

(3) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah
d. Inventarisasi Barang Milik Daerah
e. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
f. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
g. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
h. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
i. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

(4) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

a. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
b. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
c. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
d. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat

e. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
f. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
g. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
h. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
i. Pemeriksanaan Pajak Daerah
j. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini sudah dikomunikasikan dengan SKPD yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Acara ini dilaksanakan melalui Forum OPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.a. Optimalisasi sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia

Dalam rangka Kebijakan Nasional di daerah perlu adanya prioritas sasaran, termasuk Sumber Daya Manusia/tenaga yang semakin berkurang dikarenakan banyak Pegawai yang purna tugas dan tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai. Berdasarkan anjab kebutuhan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang ternyata baru terpenuhi 110 (seratus sepuluh) orang atau 38,19%.(tiga puluh delapan koma sembilan belas persen).

Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang ketugasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta perlu adanya pemenuhan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan produktifikas kerja, sumber daya aparatur pemerintahan dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.b. Penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparatur dalam pengelolaan dan aset daerah dilakukan secara profesional, yang efektif, rasional sesuai kebutuhan anggaran yang diperlukan, transparan dan akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Rumusan tujuan perangkat daerah dapat dihitung dengan formula indikator yang diukur dengan prosentase.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset meningkat
2. Pendapatan asli daerah tercapai

3.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2022

A. BPKAD Kota Yogyakarta mengampu 4 (empat) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Internal dan 3 (tiga) Program eksternal sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
c. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
e. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
f. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
g. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
h. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
b. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
f. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

g. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Semesteran
c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penyusunan Standar Harga
b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah
d. Pengamanan Barang Milik Daerah
e. Penilaian Barang Milik Daerah
f. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
h. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah

a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
h. Penagihan Pajak Daerah
i. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

A. Lokasi Program dan Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
   BPKAD Kota Yogyakarta menerima beberapa usulan secara langsung dari masyarakat melalui musrenbang.

B. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai anggaran kinerja dan usulannya dari masing-masing kegiatan masih dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, dan ada beberapa pengalihan output ke SKPD lain karena tidak sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Misi ke 7 (tujuh) yaitu: "***Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih"***
Sesuai dengan tupoksi OPD yaitu mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan terutama untuk pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta harus senantiasa melakukan perbaikan dalam penentuan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan rasional serta akuntabel untuk kepentingan pemerintah daerah, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah :

- Dapat menyajikan Laporan Keuangan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meraih penilaian hasil audit BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian
- Meningkatkan kualitas SDM untuk penataan sistem prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja para pejabat dalam mengampu kegiatan yang dilaksanakan sesuai program dan kegiatan serta tatakala yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 terdapat pada Tabel 3.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Usulan Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta telah dituangkan dalam masing-masing program sesuai indikator per program dan kegiatan serta output per sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tatakata dan target yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan dan merupakan suatu perencanaan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja P e r u b a h a n Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

A. Kebutuhan anggaran

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional.

Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaiakan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

C. Rencana lanjutan

Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2022 sampai 2026.

Pengusulan anggaran belanja p e r u b a h a n Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2023 dengan jumlah anggaran yang diusulkan sebesar R p 76.952.033.887,00. Untuk mencapai program yang ada disesuaikan dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakala yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun ini selain merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keaungan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
2020								
001	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**93%**	**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
018	**Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Rapat koordinasi yang terselenggara	115 kali	82 kali	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan perjalanan dinas	19 Laporan	15 Laporan	100.00%	100.00%	100.00%	
019	**Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor**				**100.01%**	**100.01%**	100.00%	
		Jasa tenaga bantuan	0 orang	5 orang	100.00%	100.00%	100.00%	
		Alat tulis kantor yang tersedia	107 jenis	107 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Perangko yang tersedia	17760 buah	31500 buah	100.00%	100.00%	100.00%	
		Materai @6000 yang tersedia	600 buah	350 buah	100.00%	100.00%	100.00%	
		Materai @3000 yang tersedia	2500 buah	1600 buah	100.00%	100.00%	100.00%	
		Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia	2 jenis	0 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	30 jenis	32 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa pembayaran telpon dan bantuan komunikasi	1 SKPD	1 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa kebutuhan air yang tersedia	36 SKPD	36 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	3 unit	2 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	66 unit	66 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa percetakan	4 jenis	4 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa penggandaan	270000 lembar	270000 lembar	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	7 jenis	5 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Sarana dan prasarana kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
002	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**85%**	**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
022	**Pemeliharaan**				**0.00%**	**0.00%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	2 jenis	2 jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
024	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara	65 unit	14 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara	52 unit	52 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
006	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
005	**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKPA, DPA, DPPA, Perjanjian kinerja	8 dokumen	8 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan fisik dan keuangan, SPIP, IKM, dokumen profil SKPD, dokumen profil keuangan daerah	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
122	**Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran**	**Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100.00%**	100.00%	

001	**Perencanaan Anggaran**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen KUA-PPAS TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen KUPA-PPAS TA 2020	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen pernyempunaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2020	3 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2021	2 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen tentang kode rekening	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
002	**Pengendalian Anggaran**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	

		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPDdan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 skpd	44 skpd	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pencairan dana Bantuan	42 skpd	42 skpd	100.00%	100.00%	100.00%	
		Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
123	**Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer**	**Persentase penyerapan belanja daerah**	**93%**	**90%**	**88.00%**	**59.33%**	67.42%	
001	**Pengendalian Belanja Daerah**				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Pengendalian Belanja Daerah	44 OPD	44 OPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penyelesaian TPTGR	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pembuatan/Penyusunan Form 1721 A2 PPh Pasal 21 atas Gaji seluruh PNS Pemkot Yk. dan 2 Pejabat Negara guna Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2019 dan Persiapan Penyusunan Form 1721 A2 Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pencermatan Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pembayaran PFK	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penerbitan SKPP	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	44 OPD	44 OPD	100.00%	100.00%	100.00%	
002	**Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer**				**99.98%**	**99.98%**	100.00%	
		Laporan DAK ke Walikota	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan DAK ke pusat	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan DAU	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Konfirmasi Dana Transfer/ Laporan Realisasi Transfer	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Perbendaharaan	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Dana Insentif	2 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
124	**Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**	**Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik**	**86%**	**93%**	**93.00%**	**88.64%**	95.31%	
001	**Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**				**99.99%**	**99.99%**	100.00%	
		Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribulan IV dan TA, 2020 Tribulan I , II , III	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD,	45 SKPD,	100.00%	100.00%	100.00%	
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	0 kali	100.00%	100.00%	100.00%	
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	

		Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	45 SKPD,	45 SKPD,	100.00%	100.00%	100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
002	**Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD**				**99.99%**	**99.99%**	100.00%	
		Evaluasi Investasi Dana Daerah	0 kali	0 kali	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Bulanan Realisasi Penyertaan Modal	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Tri Bulanan Piutang Daerah	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Bulanan Hasil kerjasama dengan Pihak ke3	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan Bulanan pendapatan diterima di muka	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengeloaan keuangan	0 BLUD	0 BLUD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Kajian analisis investasi pada BUMD	0 BLUD	0 BLUD	100.00%	0.00%	0.00%	
125	**Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah**	**Persentase ketercapaian target pajak daerah**	**100%**	**103%**	**100.00%**	**107.44%**	107.44%	
001	**Pelayanan Pajak Daerah**				**100.00%**	**95.09%**	95.09%	
		Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2400 berkas	2700 berkas	100.00%	83.74%	83.74%	
		Pelaporan SPTPD yang terlayani	22000 SPTPD	22000 SPTPD	100.00%	100.00%	100.00%	

		Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2	100 Objek	100 Objek	100.00%	0.00%	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani	2400 berkas	3900 berkas	100.00%	100.00%	100.00%	
002	**Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah**				**100.00%**	**95.14%**	95.14%	
		Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22000 SPTPD	22000 SPTPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Peremajaan data	60 WP	140 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penjaringan dan	350 WP	300 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pemutakhiran Data	5500 objek	5650 objek	100.00%	91.55%	91.55%	
003	**Penetapan Pajak Daerah**				**100.01%**	**100.00%**	99.99%	
		Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	100 WP	48 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	100 WP	48 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP)	35 WP	30 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	12 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	94250 SPPT	94336 SPPT	100.00%	99.98%	99.98%	

126	**Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah**	**Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar**	**16%**	**24%**	**14.50%**	**30.48%**	210.21%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Tunggakan pajak	1000 ketetapan	1000 ketetapan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah	1000 berkas	1000 berkas	100.00%	100.00%	100.00%	
		Surat	15000 SPPT	15000 SPPT	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP)	1500 WP	600 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Wajib pajak (WP)	2250 WP	2250 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
		Telaah restitusi	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Laporan rekonsiliasi	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Wajib Pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%	
127	**Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah**	**100%**	**97%**	**94.00%**	**90.25%**	96.01%	
001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset				**100.00%**	**100.00%**	100.00%	
		Dokumen Rencana	10 dokumen	10 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pengadaan Barang	9 Jenis	9 Jenis	100.00%	100.00%	100.00%	
		Dokumen Naskah	0 Dokumen	0 Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset				**100.01%**	**100.01%**	100.00%	
		Deductible klaim	1 tahun	1 tahun	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa asuransi	1 premi	1 premi	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa Asuransi	1 premi	1 premi	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pemeliharaan aset	3 unit	3 unit	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penataan dan	1 kasus	2 kasus	100.00%	100.00%	100.00%	
		Jasa konsultasi	3 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan				**100.01%**	**100.01%**	100.00%	
		Penghapusan	4 bangunan	10 bangunan	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pelayanan	52 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Data yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Monitoring	52 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	
		Penghapusan	2 kali	2 kali	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pengujian fisik	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	
		Pemasangan dan	18 unit	23 unit	100.00%	100.00%	100.00%	

		Belanja Modal	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	100.00%	100.00%	
2022								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					100%
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**					**100%**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen					2 dokumen
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen					1 dokumen
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Website OPD	12 bulan					12 bulan
		Penyusunan Buku Profil OPD	2 dokumen					2 dokumen
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen					3 dokumen
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen					1 dokumen

2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**					**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen					28 dokumen
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen					1 dokumen
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen					1 dokumen
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen					1 dokumen
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen					1 dokumen
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen					1 dokumen
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 dokumen					1 dokumen
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen					1 dokumen
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**100%**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis					11 jenis
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan komputer dan printer	33 jenis					33 jenis
		Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	32 jenis					32 jenis

		Alat tulis kantor	89 jenis					89 jenis

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	5 jenis					5 jenis
		Penggandaan surat-surat/dokumen	275.096 lembar					275.096 lembar
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis					1 jenis
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan perjalanan dinas	34 laporan					34 laporan
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**100%**
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Printer unit	3 unit					3 unit
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**100%**
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman dokumen	27.000 dokumen					27.000 dokumen
		Meterai @ 6000 dan @3000 yang tersedia	1250 buah					1250 buah
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	12 bulan					12 bulan
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan					12 bulan
		Pembayaran rekening air	12 bulan					12 bulan
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga teknis	5 orang					5 orang
		Administrasi bank	24 kali					24 kali
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**					**100%**

01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	47 unit					47 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 unit					10 unit
		KIR roda 4	2 unit					2 unit
		Kendaraan Dinas operasional roda 2	47 unit					47 unit
		Kendaraan Dinas operasional roda 4	10 unit					10 unit
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan genset	1 unit					1 unit
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis					6 jenis
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**							
5.02	**Unsur Keuangan**							
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**							
2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA-PPAS Tahun 2022	2 dokumen					2 dokumen
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUPA-PPAS TA. 2021	2 dokumen					2 dokumen
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Reviu RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2022	1 kali					1 kali
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Reviu RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2021	1 kali					1 kali
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD					44 SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD					44 SKPD
		Rancangan Perwal tentang Anggaran kas.	2 dokumen					2 dokumen
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Perda APBD TA. 2022 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	2 dokumen					2 dokumen
		Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	3 dokumen					3 dokumen
		Dokumen Nota Keuangan APBD TA. 2022	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi APBD TA. 2022	1 dokumen					1 dokumen
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2021 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021	2 dokumen					2 dokumen
		Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen					1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Dokumen tentang Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen					1 dokumen
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	2 dokumen					2 dokumen
		Standarisasi Harga Jasa	1 dokumen					1 dokumen
		Analisis Standar Belanja	1 dokumen					1 dokumen
		Belanja Subsidi	1 dokumen					1 dokumen
		Bantuan Keuangan	1 dokumen					1 dokumen
2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkelolanya Kas Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan	2 dokumen					2 dokumen
02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terealisasinya penyertaan modal	1 dokumen					1 dokumen
03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD dan laporan realisasi belanja	12 dokumen					12 dokumen
05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terserapnya dana transfer dari pusat dan propinsi	12 bulan					12 bulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank							
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Laporan PFK	12 dokumen					12 dokumen
08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kesamaan data pemungutan dan penyetoran atas SP2D antara SKPD/instansi terkait dan Kuasa BUD	12 dokumen					12 dokumen
		Dokumen SP2D	12 dokumen					12 dokumen
		Dokumen SPM,Dokumen Daftar Gaji,Dokumen SKPP	12 dokumen					12 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk teknis	7 dokumen					7 dokumen
11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	43 SKPD					43 SKPD
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e audit	*2 kali*					*2 kali*
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen					12 dokumen
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen LRA, LP-SAL, LAK, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Neraca, LO, LPE, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen					1 dokumen

		Laporan Realisasi APBD TA. 2021 Semester I	1 dokumen					1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD yang Laporan Keuangannya terkonsolidasi	43 SKPD					43 SKPD
		BLUD yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD					23 BLUD
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Perwal ttg Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2020	1 dokumen					1 dokumen
06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen					1 dokumen
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terselesaikannya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen					6 dokumen
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/Kota	Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	43 SKPD					43 SKPD
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**							
2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							
03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pengadaan)	1 dokumen					1 dokumen
04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemeliharaan)	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peMINDAHTANGAN)	1 dokumen					1 dokumen
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD Penghapusan)	1 dokumen					1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Pengadaan Barang Milik Daerah : Pengadaan Cap / Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Yogyakarta	30 buah					30 buah
		Pengadaan Barang Milik Daerah : kendaraan dinas roda empat dan roda dua	16 unit					16 unit
		Bendera Merah Putih 150 x 225	15 buah					15 buah
		Umbul-umbul	400 buah					400 buah
		Rontek	150 buah					150 buah
		Buku Agenda	880 buah					880 buah
		Kalender	11000 buah					11000 buah
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD					44 SKPD
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD					44 SKPD
		Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	12 dokumen					12 dokumen
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Deductible klaim asuransi	1 tahun					1 tahun
		Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan	3 premi					3 premi
		Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi					1 premi

	Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	3 unit					3 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	20 unit					20 unit
		Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	1 lokasi					1 lokasi
08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	5 dokumen					5 dokumen
09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus					3 kasus
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan					10 bangunan
		Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	3 kali					3 kali
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 SPKD					44 SPKD
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan daerah**							
2.02	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen					2 dokumen
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen					1 dokumen
		Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen					1 dokumen
		Tersedianya Studi/kajian Pajak/Retribusi	1 dokumen					1 dokumen
		Tersedianya Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen					1 dokumen

		Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain PAD yang sah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen					1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan wajib pajak daerah	938 WP					938 WP
		Pembinaan wajib pajak	350 WP					350 WP
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	22.000 SPTPD					22.000 SPTPD
		Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	250 WP					250 WP
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP					140 WP
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP					140 WP
		Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	9.000 objek PBB-P2					9.000 objek PBB-P2
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelaporan SPTPD Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terlayani	16.300 SPTPD					16.300 SPTPD
		Permohonan Berkas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terlayani	3.300 berkas					3.300 berkas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Permohonan Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2.400 berkas					2.400 berkas
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daera	Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen					12 dokumen
		Rekonsiliasi PPJ dan PBB	12 dokumen					12 dokumen
11	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.000 SPPT					5.000 SPPT
		Penagihan Pajak Daerah	500 Ketetapan					500 Ketetapan
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	1000 berkas					1000 berkas
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	60 WP					60 WP
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	60 WP					60 WP
		Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP					48 WP

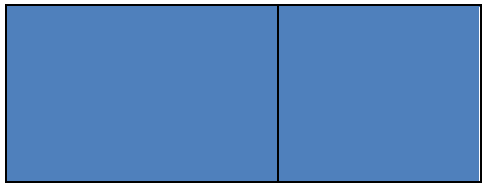
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP					12 WP
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2					95.000 SPPT PBB-P2

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

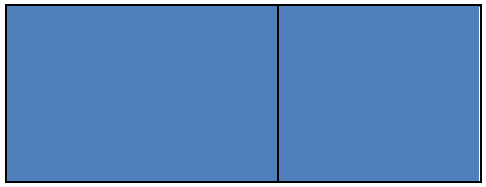
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
100%	100%
100%	**100%**
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
12 bulan	12 bulan
2 dokumen	2 dokumen
3 dokumen	3 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

100%	**100%**

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
28 dokumen	28 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
100%	**100%**
11 jenis	11 jenis
33 jenis	33 jenis
32 jenis	32 jenis

89 jenis	89 jenis

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 jenis	5 jenis
275.096 lembar	275.096 lembar
1 jenis	1 jenis
34 laporan	34 laporan
100%	**100%**
3 unit	3 unit
100%	**100%**
27.000 dokumen	27.000 dokumen
1250 buah	1250 buah
12 bulan	12 bulan
12 bulan	12 bulan
12 bulan	12 bulan
5 orang	5 orang
24 kali	24 kali
100%	**100%**

47 unit	47 unit

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
10 unit	10 unit
2 unit	2 unit
47 unit	47 unit
10 unit	10 unit
1 unit	1 unit
6 jenis	6 jenis
2 dokumen	2 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
1 kali	1 kali
1 kali	1 kali
44 SKPD	44 SKPD

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
44 SKPD	44 SKPD
2 dokumen	2 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
3 dokumen	3 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 dokumen	1 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
12 dokumen	12 dokumen
12 bulan	12 bulan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
12 dokumen	12 dokumen
12 dokumen	12 dokumen
12 dokumen	12 dokumen
12 dokumen	12 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 dokumen	7 dokumen
43 SKPD	43 SKPD
2 kali	*2 kali*
12 dokumen	12 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

1 dokumen	1 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
43 SKPD	43 SKPD
23 BLUD	23 BLUD
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
6 dokumen	6 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
43 SKPD	43 SKPD
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
30 buah	30 buah
16 unit	16 unit
15 buah	15 buah
400 buah	400 buah
150 buah	150 buah
880 buah	880 buah
11000 buah	11000 buah
44 SKPD	44 SKPD
44 SKPD	44 SKPD
12 dokumen	12 dokumen
1 tahun	1 tahun
3 premi	3 premi
1 premi	1 premi

3 unit	3 unit

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
20 unit	20 unit
1 lokasi	1 lokasi
5 dokumen	5 dokumen
3 kasus	3 kasus
10 bangunan	10 bangunan
3 kali	3 kali
44 SPKD	44 SPKD

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 dokumen	2 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen
1 dokumen	1 dokumen

1 dokumen	1 dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
938 WP	938 WP
350 WP	350 WP
22.000 SPTPD	22.000 SPTPD
250 WP	250 WP
140 WP	140 WP
140 WP	140 WP
9.000 objek PBB-P2	9.000 objek PBB-P2
16.300 SPTPD	16.300 SPTPD
3.300 berkas	3.300 berkas

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.400 berkas	2.400 berkas
12 dokumen	12 dokumen
12 dokumen	12 dokumen
5.000 SPPT	5.000 SPPT
500 Ketetapan	500 Ketetapan
1000 berkas	1000 berkas
60 WP	60 WP
60 WP	60 WP
48 WP	48 WP

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
10=(5+7+9)	11=(10/4)
12 WP	12 WP
95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proy
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah			92.63	93.72	94.81	94.81	93.36		
	Nilai Pajak Daerah			451,106,500,000	-	-	-			
	Nilai Pendapatan Asli Daerah			-	318,587,404,409	318,587,404,409	318,587,404,409	121.18		

eksi Tahun 2023	Catatan Analisis
(12)	(13)

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis K		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	37,197,942,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	21,007,439,048	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran
			Persentase penyerapan belanja daerah	87.10%				Persentase penyerapan belanja daerah
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95.12%				Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	92.68%	2,907,701,048	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik

4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah	############	3,760,411,714	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah
			Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	28,768,474,190				Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian
			Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	16,000,000,000				Nilai tunggakan pajak daerah terbayar
				Jumlah Anggaran	**64,873,49**			

ebutuhan		
Target Capaian	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	**Catatan Penting**
(10)	(11)	(12)
100%	37,197,942,000	
100% 87.10% 95.12%	21,007,439,048	
92.68%	2,907,701,048	

444,281,800,000	3,760,411,714	
28,768,474,190		
16,000,000,000		
Jumlah usulan	**64,873,493,810**	

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**02**				**KEUANGAN**				**48.824.930.303**	**903.220.000**	**15.119.783.229**	**1.042.852.220**	**65.890.785.752**	**57.015.569.903**	**7.001.225.000**	**12.101.930.124**	**833.308.860**	**76.952.033.887**	**11.061.248.135**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**42.469.185.167**	**292.500.000**	**0**	**0**	**42.761.685.167**	**46.422.097.367**	**1.253.180.000**	**0**	**0**	**47.675.277.367**	**4.913.592.200**	
5	**02**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2.662.000**	**0**	**0**	**0**	**2.662.000**	**2.662.000**	**0**	**0**	**0**	**2.662.000**	**0**	
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		220.000	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000	0	
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	
5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	
5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			792.000	0	0	0	792.000	792.000	0	0	0	792.000	0	
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	**02**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**36.101.419.753**	**0**	**0**	**0**	**36.101.419.753**	**36.359.063.453**	**0**	**0**	**0**	**36.359.063.453**	**257.643.700**	
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		36.095.479.753	0	0	0	36.095.479.753	36.357.457.453	0	0	0	36.357.457.453	261.977.700	
5	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		990.000	0	0	0	990.000	330.000	0	0	0	330.000	(660,000)	
5	02	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		990.000	0	0	0	990.000	220.000	0	0	0	220.000	(770,000)	

5	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		990.000	0	0	0	990.000	231.000	0	0	0	231.000	(759,000)	
5	02	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			990.000	0	0	0	990.000	385.000	0	0	0	385.000	(605,000)	
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		990.000	0	0	0	990.000	330.000	0	0	0	330.000	(660,000)	
5	02	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		990.000	0	0	0	990.000	110.000	0	0	0	110.000	(880,000)	
5	**02**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**1.980.000**	**0**	**0**	**0**	**1.980.000**	**1.920.000**	**0**	**0**	**0**	**1.920.000**	**(60,000)**	
5	02	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	270.000	0	0	0	270.000	(60,000)	
5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Badan Pengelolaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14 = (10+11+12+13)**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19 = (15+16+17+18)**	**20**	**21**
					Keuangan dan Aset Daerah)															
5	02	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	
5	02	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	
5	02	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	
5	02	01	2,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		330.000	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000	0	
5	**02**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**10.620.000**	**0**	**0**	**0**	**10.620.000**	**10.890.000**	**0**	**0**	**0**	**10.890.000**	**270,000**	
5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		9.900.000	0	0	0	9.900.000	9.900.000	0	0	0	9.900.000	0	
5	02	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		720.000	0	0	0	720.000	990.000	0	0	0	990.000	270,000	
5	**02**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**886.119.750**	**0**	**0**	**0**	**886.119.750**	**932.061.750**	**0**	**0**	**0**	**932.061.750**	**45.942.000**	
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		12.534.500	0	0	0	12.534.500	12.534.500	0	0	0	12.534.500	0	

5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		461.194.050	0	0	0	461.194.050	461.064.050	0	0	0	461.064.050	(130,000)	
5	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		38.671.200	0	0	0	38.671.200	38.671.200	0	0	0	38.671.200	0	
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	(PAD)	Muja Muju													
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		157.170.000	0	0	0	157.170.000	157.170.000	0	0	0	157.170.000	0	
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		153.240.000	0	0	0	153.240.000	199.312.000	0	0	0	199.312.000	46.072.000	
5	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		47.390.000	0	0	0	47.390.000	47.390.000	0	0	0	47.390.000	0	
5	02	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		920.000	0	0	0	920.000	920.000	0	0	0	920.000	0	
5	**02**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**292.500.000**	**0**	**0**	**292.500.000**	**0**	**1.253.180.000**	**0**	**0**	**1.253.180.000**	**960.680.000**	
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		0	105.000.000	0	0	105.000.000	0	292.900.000	0	0	292.900.000	187.900.000	
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		0	187.500.000	0	0	187.500.000	0	960.280.000	0	0	960.280.000	772.780.000	
5	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.126.981.664**	**0**	**0**	**0**	**4.126.981.664**	**7.766.741.664**	**0**	**0**	**0**	**7.766.741.664**	**3.639.760.000**	
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		215.440.000	0	0	0	215.440.000	199.200.000	0	0	0	199.200.000	(16.240.000)	
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		3.430.600.000	0	0	0	3.430.600.000	7.086.600.000	0	0	0	7.086.600.000	3.656.000.000	
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		480.941.664	0	0	0	480.941.664	480.941.664	0	0	0	480.941.664	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	**02**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.339.402.000**	**0**	**0**	**0**	**1.339.402.000**	**1.348.758.500**	**0**	**0**	**0**	**1.348.758.500**	**9.356.500**	

5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		51.500.000	0	0	0	51.500.000	36.056.500	0	0	0	36.056.500	(15.443.500)		
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		197.092.000	0	0	0	197.092.000	204.392.000	0	0	0	204.392.000	7.300.000		
5	02	01	2,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		400.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0		
5	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		7.960.000	0	0	0	7.960.000	7.960.000	0	0	0	7.960.000	0		
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		74.950.000	0	0	0	74.950.000	92.450.000	0	0	0	92.450.000	17.500.000		
5	02	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0		
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0		
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**784.509.176**	**0**	**15.119.783.229**	**1.042.852.220**	**16.947.144.625**	**743.328.176**	**0**	**12.101.930.124**	**833.308.860**	**13.678.567.160**	**(3.268.577.465)**		
5	**02**	**02**	**2,01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**				**176.073.176**	**0**	**0**	**0**	**176.073.176**	**146.908.176**	**0**	**0**	**0**	**146.908.176**	**(29.165.000)**		
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.250.000	0	0	0	9.250.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	(6.750.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		9.250.000	0	0	0	9.250.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	(6.750.000)	
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		3.625.280	0	0	0	3.625.280	3.625.280	0	0	0	3.625.280	0	
5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		3.625.280	0	0	0	3.625.280	3.625.280	0	0	0	3.625.280	0	

5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		68.162.000	0	0	0	68.162.000	62.892.000	0	0	0	62.892.000	(5.270.000)	
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		55.805.000	0	0	0	55.805.000	45.410.000	0	0	0	45.410.000	(10.395.000)	
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		8.355.616	0	0	0	8.355.616	8.355.616	0	0	0	8.355.616	0	
5	**02**	**02**	**2,02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**339.532.000**	**0**	**15.119.783.229**	**1.042.852.220**	**16.502.167.449**	**322.121.000**	**0**	**12.101.930.124**	**833.308.860**	**13.257.359.984**	**(3.244.807.465)**	
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Badan Pengelolaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		65.892.000	0	15.119.783.229	1.042.852.220	16.228.527.449	63.132.000	0	12.101.930.124	833.308.860	12.998.370.984	(3.230.156.465)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14 = (10+11+12+13)**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19 = (15+16+17+18)**	**20**	**21**
					Keuangan dan Aset Daerah)															
5	02	02	2,02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1.587.000	0	0	0	1.587.000	660.000	0	0	0	660.000	(927,000)	
5	02	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		3.450.000	0	0	0	3.450.000	1.426.000	0	0	0	1.426.000	(2.024.000)	
5	02	02	2,02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		6.225.000	0	0	0	6.225.000	5.075.000	0	0	0	5.075.000	(1.150.000)	
5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		47.892.000	0	0	0	47.892.000	47.892.000	0	0	0	47.892.000	0	
5	02	02	2,02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		5.980.000	0	0	0	5.980.000	5.980.000	0	0	0	5.980.000	0	
5	02	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		5.819.000	0	0	0	5.819.000	5.819.000	0	0	0	5.819.000	0	

5	02	02	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		2.737.000	0	0	0	2.737.000	2.737.000	0	0	0	2.737.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Optimalisasi Kas (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)															
5	02	02	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		139.860.000	0	0	0	139.860.000	139.860.000	0	0	0	139.860.000	0	
5	02	02	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		8.520.000	0	0	0	8.520.000	8.520.000	0	0	0	8.520.000	0	
5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		51.570.000	0	0	0	51.570.000	41.020.000	0	0	0	41.020.000	(10.550.000)	
5	**02**	**02**	**2,03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**268.904.000**	**0**	**0**	**0**	**268.904.000**	**274.299.000**	**0**	**0**	**0**	**274.299.000**	**5.395.000**	
5	02	02	2,03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		110.252.000	0	0	0	110.252.000	115.647.000	0	0	0	115.647.000	5.395.000	
5	02	02	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		3.660.000	0	0	0	3.660.000	3.660.000	0	0	0	3.660.000	0	
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		20.040.000	0	0	0	20.040.000	20.040.000	0	0	0	20.040.000	0	
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		35.776.000	0	0	0	35.776.000	35.776.000	0	0	0	35.776.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)															

5	02	02	2,03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		5.454.000	0	0	0	5.454.000	5.454.000	0	0	0	5.454.000	0	
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		67.346.000	0	0	0	67.346.000	67.346.000	0	0	0	67.346.000	0	
5	02	02	2,03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		26.376.000	0	0	0	26.376.000	26.376.000	0	0	0	26.376.000	0	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**3.095.926.960**	**610.720.000**	**0**	**0**	**3.706.646.960**	**6.240.111.360**	**5.748.045.000**	**0**	**0**	**11.988.156.360**	**8.281.509.400**	
5	**02**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**3.095.926.960**	**610.720.000**	**0**	**0**	**3.706.646.960**	**6.240.111.360**	**5.748.045.000**	**0**	**0**	**11.988.156.360**	**8.281.509.400**	
5	02	03	2,01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		63.458.320	0	0	0	63.458.320	66.198.320	0	0	0	66.198.320	2.740.000	
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		532.148.320	170.000.000	0	0	702.148.320	651.880.320	4.345.000.000	0	0	4.996.880.320	4.294.732.000	
5	02	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		2.491.566	0	0	0	2.491.566	7.491.566	0	0	0	7.491.566	5.000.000	
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		37.267.084	0	0	0	37.267.084	37.267.084	0	0	0	37.267.084	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Keuangan dan Aset Daerah)															
5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		222.830.750	0	0	0	222.830.750	605.180.750	0	0	0	605.180.750	382.350.000	
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		1.530.882.920	211.520.000	0	0	1.742.402.920	3.711.864.640	855.845.000	0	0	4.567.709.640	2.825.306.720	
5	02	03	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		277.750.000	0	0	0	277.750.000	327.750.000	0	0	0	327.750.000	50.000.000	
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		52.213.000	0	0	0	52.213.000	115.994.880	0	0	0	115.994.880	63.781.880	
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		263.219.000	229.200.000	0	0	492.419.000	620.067.800	547.200.000	0	0	1.167.267.800	674.848.800	

5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		33.126.000	0	0	0	33.126.000	33.876.000	0	0	0	33.876.000	750,000	
5	02	03	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		80.540.000	0	0	0	80.540.000	62.540.000	0	0	0	62.540.000	(18.000.000)	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**2.475.309.000**	**0**	**0**	**0**	**2.475.309.000**	**3.610.033.000**	**0**	**0**	**0**	**3.610.033.000**	**1.134.724.000**	
5	**02**	**04**	**2,01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**2.475.309.000**	**0**	**0**	**0**	**2.475.309.000**	**3.610.033.000**	**0**	**0**	**0**	**3.610.033.000**	**1.134.724.000**	
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		7.058.000	0	0	0	7.058.000	7.058.000	0	0	0	7.058.000	0	
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		92.450.000	0	0	0	92.450.000	2.450.000	0	0	0	2.450.000	(90.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	(PAD)														
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		272.261.000	0	0	0	272.261.000	257.621.000	0	0	0	257.621.000	(14.640.000)	
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		65.389.000	0	0	0	65.389.000	68.839.000	0	0	0	68.839.000	3.450.000	
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		489.748.000	0	0	0	489.748.000	570.610.000	0	0	0	570.610.000	80.862.000	
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		108.436.000	0	0	0	108.436.000	9.608.000	0	0	0	9.608.000	(98.828.000)	
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		7.245.000	0	0	0	7.245.000	106.073.000	0	0	0	106.073.000	98.828.000	
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		407.208.000	0	0	0	407.208.000	376.545.000	0	0	0	376.545.000	(30.663.000)	
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		80.702.000	0	0	0	80.702.000	1.269.907.000	0	0	0	1.269.907.000	1.189.205.000	
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		308.052.000	0	0	0	308.052.000	301.762.000	0	0	0	301.762.000	(6.290.000)	
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		112.329.000	0	0	0	112.329.000	112.329.000	0	0	0	112.329.000	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah			
				T-	T (Sebelum Perubahan)	T (Sesudah Perubahan)	Bertambah/	T+1

								1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		491.579.000	0	0	0	491.579.000	494.379.000	0	0	0	494.379.000	2.800.000	
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		30.448.000	0	0	0	30.448.000	30.448.000	0	0	0	30.448.000	0	
5	02	04	2,01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		2.404.000	0	0	0	2.404.000	2.404.000	0	0	0	2.404.000	0	

RENJA PERUBAHAN



2023

BKPSDM
KOTA YOGYAKARTA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
Telp. (0274) 5525865 , Fax (0274) 555013
email : bkpsdm@jogjakota.go.id

bkpsdmkotayk bkpsdm kota jogja https://bkpsdm.jogjakota.go.id/

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan karunia, dan atas ijin-Nya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023 telah terealisasi.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, dan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Yogyakarta



Dedi Budiono, M.Pd
NIP. 196708041999031007

DAFTAR ISI

		Hlm.
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Sistematika Penulisan	2
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**	4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA BKPSDM Kota Yogyakarta	4
BAB III	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD**	12
	3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja BKPSDM Kota Yogyakarta	12
BAB IV	**PENUTUP**	21

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Evaluasi Renja BKPSDM Kota Yogyakarta	5
Tabel III.1	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	13

BAB 1
Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi SKPD menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta wajib menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perencanaan pembangunan pada perangkat daerah diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja perubahan dan penganggarannya.

Sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yakni Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Misi ke 6 (enam) yakni mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum maka BKPSDM menetapkan rencana strategis untuk mewujudkan aparatur yang kompeten melalui

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan arah kebijakan dari pusat maupun daerah yang bersifat dinamis berakibat pada perubahan arah kebijakan pembangunan. Perubahan arah kebijakan pembangunan tersebut bersinergi dengan perubahan arah kebijakan keuangan yakni kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan arah kebijakan keuangan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan arah kebijakan keuangan tersebut maka disusunlah Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

   a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah dan pengembangan SDM.
   b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
   c. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai maksud/tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB 2
EVALUASI RENJA-PD

2.1 EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi terhadap pembangunan daerah perlu dilakukan dalam rangka menganalisa apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran strategis yang diharapkan dan memberikan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat yang dapat membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kota Yogyakarta digunakan sebagai proyeksi pelaksanaan rencana kerja selanjutnya agar sasaran strategis PD dapat tercapai. Penyusunan Renja Perubahan 2023 dilaksanakan pada bulan Juni 2023, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar proyeksi perubahan adalah evaluasi Renja sampai dengan bulan Juni (TW II). Hasil evaluasi Renja Perubahan Tahun 2023 pada BKPSDM Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel II.1 sebagai berikut.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,00 Skala
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 Poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase JF yang Terlayani**	**Jumlah JF yang terlayani di tahun N dibagi Jumlah JF yang mengajukan layanan di tahun N dikali 100%**	**87,70 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**86,00 %**	**3.959.520.000,00**	**28.78 %**	**1.710.069.900,00**	**30.00 %**	**838.022.670,00**	**107.99%**	**49,01%**					**Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BKPSDM Kota Yogyakarta**	
			Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola	**Jumlah data yang dikelola pada tahun N dibagi Jumlah data pegawai tahun N dikali 100%**	**93,00 persen**	**0,00**	**0,00 persen**	**0,00**	**90,00 persen**	**0,00**	**57.00**	**0,00**	**57.00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian**	
			Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dikali 100%**	**87,60 persen**	**0,00**	**0,00 persen**	**0,00**	**86,00 persen**	**0,00**	**49.56**	**0,00**	**55.00**	**0,00**	**110,98%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**	
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian	**Jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%**	**100,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**70.00**	**0,00**	**70.00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian**	
			Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	**Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan dikali 100%**	**92,00 persen**	**0,00**	**100,00 persen**	**0,00**	**92,20 persen**	**0,00**	**37,40**	**0,00**	**41.84**	**0,00**	**113,08%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan**	
			Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	**Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%**	**88,56 persen**	**0,00**	**113,22 persen**	**0,00**	**88,20 persen**	**0,00**	**55.00**	**0,00**	**55.00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan**	
			Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai	**Jumlah penilaian PNS yang terselesaikan dibagi Jumlah**	**92,60 persen**	**0,00**	**0,00 persen**	**0,00**	**91,00 persen**	**0,00**	**66,32**	**0,00**	**67.08**	**0,00**	**101,64%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan**	

| | | |

				ASN																							
		20	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				0,00		0,00		35.656.000,00	52,51%	18.724.000,00	52,51%	187.000,00	100,00%	1,00%										
				Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		52,51%		52,51%		100,00%												
		21	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				0,00		0,00		16.132.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%										
				Jumlah ASN Fungsional yang Dibina		0 orang		0 orang		100 orang		0,00%		0,00%		0,00%											
		22	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				0,00		0,00		200.230.000,00	28,78%	54.853.000,00	28,78%	26.742.000,00	100,00%	52,40%										
				Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		0 orang		0 orang		900 orang		28,78%		28,78%		100,00%											
		23	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				0,00		0,00		2.313.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%										
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%											
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									**716.416.000,00**		**298.566.000,00**		**184.036.684,00**		**61,64%**										
		24	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0,00		0,00		201.730.000,00	41,84%	75.460.000,00	41,84%	39.182.000,00	100,00%	51,92%										
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		41,84%		41,84%		100,00%											
		25	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0,00		0,00		246.319.000,00	67,08%	183.371.000,00	67,08%	94.229.684,00	100,00%	57,68%										
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		67,08%		67,08%		100,00%											
		26	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0,00		0,00		1.724.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%										
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%											
		27	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				0,00		0,00		137.675.000,00	19,12%	22.875.000,00	19,12%	17.040.000,00	100,00%	75,15%										
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		0 orang		0 orang		8 orang		19,12%		19,12%		100,00%											
		28	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				0,00		0,00		68.685.000,00	18,00%	11.690.000,00	18,00%	11.000.000,00	100,00%	94,10%										
				Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		0 orang		0 orang		300 orang		18,00%		18,00%		100,00%											
		29	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				0,00		0,00		1.360.000,00	50,00%	680.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%										
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%											
		30	Pembinaan Disiplin ASN				0,00		0,00		18.120.000,00	51,50%	9.060.000,00	51,50%	7.695.000,00	100,00%	84,93%										
				Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		0 orang		0 orang		100 orang		51,50%		51,50%		100,00%											
		31	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				0,00		0,00		19.620.000,00	42,00%	7.560.000,00	42,00%	6.820.000,00	100,00%	90,21%										
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%											
		32	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				0,00		0,00		19.620.000,00	42,00%	7.560.000,00	42,00%	7.560.000,00	100,00%	100,00%										
				Jumlah Dokumen proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%											
		33	Evaluasi Disiplin ASN				0,00		0,00		1.563.000,00	33,00%	510.000,00	33,00%	510.000,00	100,00%	100,00%										
				Jumlah Hasil Evaluasi Disiplin ASN		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		33,00%		33,00%		100,00%											
																101,18%	**69,07%**									
																Sangat Tinggi	**Sedang**									
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%**	**95,80 persen**	**0,00**	**98,48 persen**	**0,00**	**95,20 persen**	**7.481.325.534,00**	**63.06 persen**	**6.159.722.959,00**	**100 persen**	**4.329.700.103,00**	**120.39%**	**70,29%**								**Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**	
		Pengembangan Kompetensi Teknis									**7.481.325.534,00**		**6.159.722.959,00**		**4.329.700.103,00**		**70,29%**									
		1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah				0,00		0,00		71.718.000,00	45,50%	32.473.000,00	46,00%	32.471.000,00	101,10%	99,99%										
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		45,50%		46,00%		101,10%											

			Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun																					
		2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum				0,00		0,00		49.667.500,00	30,00%	14.376.875,00	37,00%	14.366.875,00	123,33%	99,93%						
				Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		30,00%		37,00%		123,33%							
		3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum				0,00		0,00		7.359.940.034,00	83,06%	6.112.873.084,00	100,00%	4.282.862.228,00	120,39%	70,06%						
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		0 orang		0 orang		656 orang		0,00%		100,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**114,94%**	**90,00%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan**	**Peserta yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan dibagi Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan dikali 100%**	**100,00 persen**	**0,00**	**98,48 persen**	**0,00**	**95,20 persen**	**240.450.000,00**	**0 persen**	**0,00**	**0 persen**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**							
		Peningkatan Budaya Pemerintahan								**240.450.000,00**		**0,00**		**0,00**		**NAN%**							
		1 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		240.450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**10.329.553.720,00**	**A nilai**	**6.725.239.454,00**	**A nilai**	**5.129.426.245,00**	**100%**	**78,27%**						**Sekretaris BKPSDM Kota Yogyakarta**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**14.669.000,00**		**5.748.000,00**		**5.628.000,00**		**97,91%**							
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.945.000,00	58,88%	1.088.000,00	62,00%	1.085.000,00	105,30%	99,72%							
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		58,88%		62,00%		105,30%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	767.000,00	100,00%	95,88%							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		616.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		352.000,00	0,00%	0,00	5,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		5,00%		0,00%								

		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		16.492.500,00	54,00%	8.696.250,00	54,00%	8.447.500,00	100,00%	97,14%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		54,00%		54,00%		100,00%										
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		134.806.270,00	59,00%	78.320.270,00	59,00%	72.111.200,00	100,00%	92,07%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		6 Paket		59,00%		59,00%		100,00%										
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		1.968.000,00	100,00%	1.968.000,00	100,00%	1.968.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%										
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		109.575.250,00	63,00%	67.400.000,00	63,00%	12.144.850,00	100,00%	18,02%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		63,00%		63,00%		100,00%										
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		6.400.000,00	59,00%	3.700.000,00	59,00%	1.760.000,00	100,00%	47,57%								
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		59,00%		59,00%		100,00%										
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		247.430.000,00	50,00%	119.435.000,00	50,00%	109.470.975,00	100,00%	91,66%								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%										
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**11.000.000,00**		**11.000.000,00**		**10.400.000,00**		**94,55%**								
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	10.400.000,00	100,00%	94,55%								
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**411.449.000,00**		**134.316.000,00**		**122.648.111,00**		**91,31%**								
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		51.549.000,00	50,00%	24.990.000,00	50,00%	23.039.703,00	100,00%	92,20%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%										
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		34.200.000,00	51,00%	17.100.000,00	51,00%	11.018.408,00	100,00%	64,44%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		51,00%		51,00%		100,00%										
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		325.700.000,00	31,00%	92.225.000,00	31,00%	88.590.000,00	100,00%	96,06%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		31,00%		31,00%		100,00%										
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**350.032.700,00**		**135.079.450,00**		**88.200.557,00**		**65,3%**								
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		94.935.200,00	47,00%	43.715.700,00	47,00%	31.115.701,00	100,00%	71,18%								
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 Unit		0 Unit		16 Unit		47,00%		47,00%		100,00%										
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		77.880.000,00	48,00%	36.690.000,00	48,00%	21.628.856,00	100,00%	58,95%								
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		3 Unit		48,00%		48,00%		100,00%										
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		57.837.500,00	62,00%	35.293.750,00	62,00%	16.076.000,00	100,00%	45,55%								
				Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		73 Unit		62,00%		62,00%		100,00%										
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		0,00%		0,00%										
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		19.380.000,00	100,00%	19.380.000,00	100,00%	19.380.000,00	100,00%	100,00%								
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%										
										Rata-rata capaian kinerja							**100,48%**	**86,64%**							
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
										Total anggaran dari seluruh program		**22.010.849.254,00**		**14.595.032.313,00**		**10.297.149.018,00**								
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**101,54%**	**70,55%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung berkinerja serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2023 serta penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal

		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		352.000,00	0,00%	0,00	4,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		4,00%		0,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.910.000,00	38,52%	3.090.000,00	40,00%	3.006.000,00	103,84%	97,28%								
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		38,52%		40,00%		103,84%								
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.694.000,00	48,00%	770.000,00	50,00%	770.000,00	104,17%	100,00%								
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		48,00%		50,00%		104,17%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**9.021.477.000,00**		**6.156.636.484,00**		**4.693.766.052,00**		**76,24%**								
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		8.953.649.000,00	68,48%	6.129.255.484,00	68,48%	4.686.386.052,00	100,03%	76,13%								
				Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		67 Orang/Bulan		68,48%		68,48%		100,03%									
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		58.720.000,00	43,00%	24.597.000,00	43,00%	24.597.000,00	100,00%	100,00%								
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Kali		0 Kali		12 Kali		43,00%		43,00%		100,00%									
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.980.000,00	40,00%	2.392.000,00	40,00%	2.392.000,00	100,00%	100,00%								
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Kali		0 Kali		10 Kali		40,00%		40,00%		100,00%									
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Kali		0 Kali		2 Kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		782.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	391.000,00	100,00%	100,00%								
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		50,00%		50,00%		100,00%									
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Kali		0 Kali		2 Kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**3.679.000,00**		**2.942.000,00**		**2.881.000,00**		**97,93%**								
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	473.000,00	100,00%	97,93%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.287.000,00	43,00%	550.000,00	43,00%	542.000,00	100,00%	98,55%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		43,00%		43,00%		100,00%									
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penatsusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	91,10%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**575.000,00**		**0,00**		**0,00**		**NAN%**								
		22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**516.672.020,00**		**279.519.520,00**		**205.902.525,00**		**73,66%**								

	melalui Jogja Smart Service (JSS) lewat fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Fitur SIMPEG ini mempermudah pengusulan proses administrasi kepegawaian. 2. Kerjasama yang baik (internal dan eksternal).
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Pelaksanaan kegiatan rekrutmen CASN tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI serta Badan Kepegawaian Negara khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan tatakala kegiatan, selain itu dan kuota terbatas bagi peserta diklat penjenjangan seperti Latsar dan Diklat kepemimpinan bagi administrator (PKA). 2. Dikarenakan telah habisnya masa tugas dari Walikota Yogyakarta dan digantikan oleh Pj. Walikota, dimana kewenangan Pj. Walikota dibatasi oleh peraturan perundangundangan. Salah satu yang dibatasi adalah terkait dengan penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas yang akan dilakukan penataan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, dimana proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu membutuhkan rekomendasi dari KASN yang prosesnya sampai dengan disetujui usulan dari Pemerintah Kota membutuhkan waktu yang Panjang.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

BAB 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD, dijabarkan dalam Tabel III.1.

Tabel III.1
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

No.	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target		Anggaran		Selisih (Tambah/kurang)
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**A Nilai**	**A Nilai**	**10.329.553.720,00**	**11.043.623.720,00**	**714.070.000,00**
1.1	**5.03.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**14.669.000,00**	**10.859.000,00**	**-3.810.000,00**
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	616.000,00	616.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	352.000,00	352.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	352.000,00	352.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.910.000,00	5.100.000,00	-3.810.000,00
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
1.2	**5.03.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.021.477.000,00**	**9.705.991.000,00**	**684.514.000,00**
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	8.953.649.000,00	9.638.163.000,00	684.514.000,00

	5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	58.720.000,00	58.720.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	391.000,00	391.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	782.000,00	782.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	782.000,00	782.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	782.000,00	782.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	391.000,00	391.000,00	0,00
1.3	**5.03.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**3.679.000,00**	**3.679.000,00**	**0,00**
	5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2Dokumen	2Dokumen	483.000,00	483.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	483.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	483.000,00	483.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	460.000,00	460.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	483.000,00	0,00

1.4	**5.03.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**575.000,00**	**575.000,00**	**0,00**
	5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	0,00
1.5	**5.03.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**516.672.020,00**	**526.872.020,00**	**10.200.000,00**
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.492.500,00	16.492.500,00	0,00
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	134.806.270,00	134.806.270,00	0,00
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	109.575.250,00	109.575.250,00	0,00
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	247.430.000,00	257.630.000,00	10.200.000,00
1.6	**5.03.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**11.000.000,00**	**45.700.000,00**	**34.700.000,00**
	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	45.700.000,00	34.700.000,00
1.7	**5.03.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**411.449.000,00**	**408.569.000,00**	**-2.880.000,00**
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	51.549.000,00	51.549.000,00	0,00
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	34.200.000,00	31.320.000,00	-2.880.000,00
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	325.700.000,00	325.700.000,00	0,00
1.8	**5.03.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**350.032.700,00**	**341.378.700,00**	**-8.654.000,00**

	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	94.935.200,00	94.935.200,00	0,00
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	77.880.000,00	77.880.000,00	0,00
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	57.837.500,00	49.183.500,00	-8.654.000,00
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00
		KEPEGAWAIAN				**3.959.520.000,00**	**3.591.369.000,00**	**-368.151.000,00**
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1. Persentase JF yang Terlayani** **2. Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola** **3. Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan** **4. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian** **5. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai** **6. Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta** **7. Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai**	**1. 86,00%** **2. 90.00%** **3. 86.00%** **4. 100.00%** **5. 92.20%** **6. 88.20%** **7. 91.00%**	**1. 85,99%** **2. 90.00%** **3. 83.33%** **4. 100.00%** **5. 92.20%** **6. 88.24%** **7. 91.00%**	**3.959.520.000,00**	**3.591.369.000,00**	**-368.151.000,00**

2.1	**5.03.02.2.01**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**1.699.974.000,00**	**1.812.881.000,00**	**112.907.000,-**
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	120.040.000,00	120.040.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	789.773.000,00	728.970.000,00	-60.803.000,00
	5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	429.280.000,00	626.800.000,00	197.520.000,00
	5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang di fasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	261.190.000,00	237.380.000,00	23.810.000,00
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	93.644.000,00	93.644.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	432.000,00	432.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	432.000,00	432.000,00	0,00
2.3	**5.03.02.2.02**	**Mutasi dan Promosi ASN**				**417.079.000,00**	**407.653.000,00**	**-9.426.000,00**
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	52.492.000,00	52.492.000,00	0,00
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.851.000,00	100.851.000,00	0,00
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	263.736.000,00	254.310.000,00	-9.426.000,00
2.4	**5.03.02.2.03**	**Pengembangan Kompetensi ASN**				**1.126.051.000,00**	**836.139.000,00**	**-289.912.000,00**
	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	86.882.000,00	77.682.000,00	-9.200.000,00

	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan *Assessment Center*	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*	1 Dokumen	1 Dokumen	360.932.000,00	411.558.000,00	50.626.000,00
	5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	130 Orang	125 Orang	397.340.000,00	112.894.000,00	-284.446.000,00
	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	4.432.000,00	4.432.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	10 Orang	10 Orang	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	1 Laporan	18.675.000,00	4.025.000,00	-14.650.000,00
	5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	35.656.000,00	35.656.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	100 Orang	16.132.000,00	16.132.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	900 Orang	900 Orang	200.230.000,00	167.988.000,00	-32.242.000,00
	5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	2.313.000,00	2.313.000,00	0,00
2.5	**5.03.02.2.04**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**716.416.000,00**	**534.696.000,00**	**-181.720.000,00**
	5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	201.730.000,00	119.930.000,00	-81.800.000,00
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	246.319.000,00	239.169.000,00	-7.150.000,00
	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	1.724.000,00	1.724.000,00	0,00
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	8 Orang	8 Orang	137.675.000,00	76.075.000,00	-61.600.000,00
	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	300 Orang	68.685.000,00	39.555.000,00	-29.130.000,00
	5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00

	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	100 Orang	18.120.000,00	16.080.000,00	-2.040.000,00
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00
	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00
	5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**7.481.325.534,00**	**7.469.868.659,00**	**-11.456.875,00**
3.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			**7.481.325.534,00**	**7.469.868.659,00**	**-11.456.875,00**
3.1	**5.04.02.2.01**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**			**7.481.325.534,00**	**7.469.868.659,00**	**-11.456.875,00**
	5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	71.718.000,00	71.718.000,00	0,00
	5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	49.667.500,00	38.210.625,00	-11.456.875,00
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	656 Orang	1.707 Orang	7.359.940.034,00	7.359.940.034,00	0,00
4.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**			**240.450.000,00**	**240.450.000,00**	**-42.690.000.00**

4.1	**4.01.04.5.02**	**Peningkatan budaya pemerintah**					**197.760.000,00**	**-42.690.000.00**
	4.01.04.5.02.03	Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	1 Laporan	1 Laporan	240.450.000,00	197.760.000,00	**-42.690.000.00**
Jumlah						**22.010.849.254**	**22.302.621.379,00**	**291.772.125,00**

BAB 4

EVALUASI

4.1 EVALUASI

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2023-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta hasil evaluasi dari Rencana Kerja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2023.

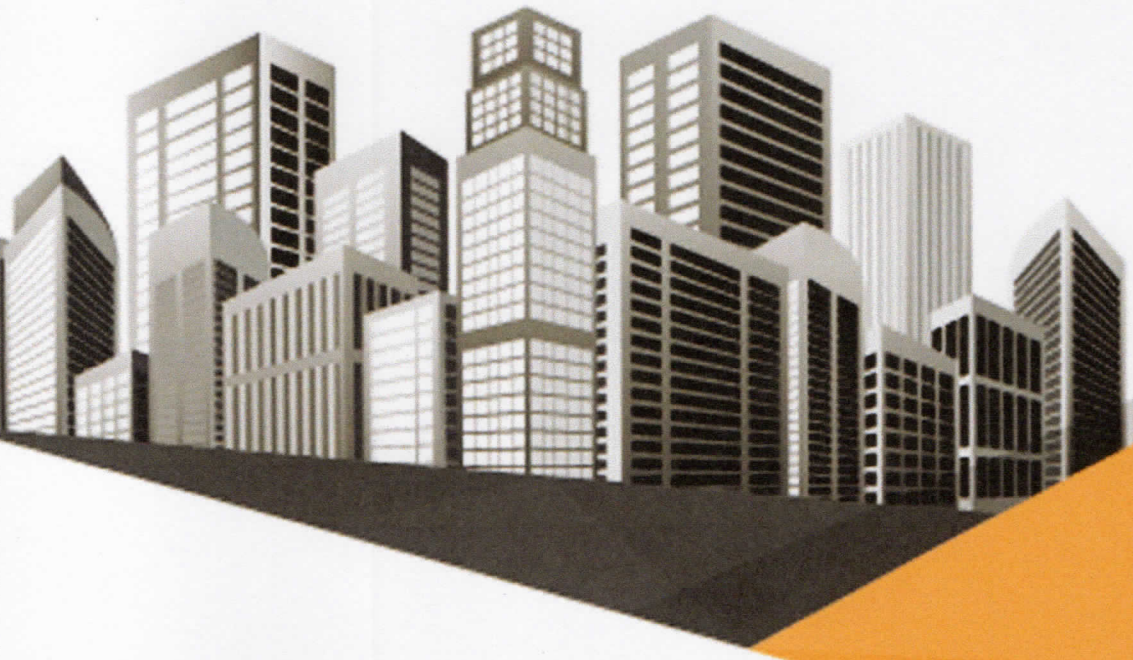
Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2023 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Tahun 2023 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai misi dan visi Perangkat Daerah.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Dedi Budiono, M.Pd
NIP. 196708041999031007



BKPSDM
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
Telp. (0274) 515865, 562682
Email : inspektorat@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278001 ; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.inspektorat.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2023 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kota Yogyakarta, dan RPD dan Renstra 2023-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Juni 2023 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2023.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2023 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 27 Juni 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.

h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 050/2821/SE/2023 tanggal 5 Juni 2022 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Inspektorat Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas. Sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, serta Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, sesuai dengan

prioritas pembangunan Propinsi DIY menjadi prioritas yang ke 7 yaitu kinerja aparatur dan birokrasi.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Tahun 2023 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57); dan
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 36).

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada ***tabel 2.4.***

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ***tabel 3.1***

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat tahun 2023 adalah **:**

1. **Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola Pemerintahan**, yang diukur dengan Indikator Sasaran **"Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)"**. Pada tahun 2022 target Nilai Kapabilitas APIP adalah pada level 3, dengan hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan DIY pada level 3 (untuk 6 elemen penilaian). Dengan demikian target nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Yogyakarta **tercapai** di tahun 2022 dan masih berjalan untuk penilaian di tahun 2023 dan masih menggunakan penilaian tahun 2022.
2. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat**, yang diukur dengan indikator sasaran **"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat"**. Sasaran Kinerja Inspektorat ini merupakan sasaran baru di tahun 2023 dengan target nilai A. Adapun nilai di tahun 2022 prosentase ketercapaian pemenuhan Reformasi Birokrasi sebesar 93,19%

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Inspektorat tahun 2022 :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Inspektorat Th 2022

Sasaran Inspektorat	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola Pemerintahan	Level 3 (untuk 6 level penilaian)	Level 3 (untuk 6 level penilaian)	Tahun 2022 Sasaran ini belum menjadi Sasaran OPD Inspektorat dan masih menjadi salah 1 sasaran progam, namun berubah menjadi sasaran Inspektorat pada tahun 2023
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	-	93,19 %	Tahun 2022 sasaran ini belum menjadi sasaran OPD sehingga tidak memiliki target, namun pada tahun 2023 berubah menjadi sasaran Inspektorat

Sasaran Inspektorat	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan
			dengan target nilai A di tahun 2023

Terhadap sasaran program Inspektorat kota Yogyakarta pada tahun 2023 memiliki 3 Program, yaitu 2 Program yang mengampu pengawasan, dan 1 program penunjang program pengawasan. Adapun program dan sasaran yang dimaksud adalah :

Tabel 2.2 Program, Sasaran, Indikator, Target 2022, Realisasi 2022, & Target 2023

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Target Tahun 2023	Ket
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	91%	100%	95%	
	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	91%	100%	95%	
	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	91%	100%	95%	
	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%	100%	95%	
	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan eksternal meningkat	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	91%	100%	91%	

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Target Tahun 2023	Ket
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	-	-	18,18%	Merupakan sasaran Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	-	20%	Merupakan sasaran Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	18,18%	Merupakan sasaran Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	40%	Merupakan sasaran Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat meningkat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	-	85,07 (Nilai A ; Predikat **"Memuaskan")**	Nilai A	Merupakan sasaran program baru di tahun 2023 sehigga pada tahun 2022 tidak terdapat target, namun untuk realisasi pada tahun 2021 sebesar 88,80 yang berarti pada tahun 2022

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Target Tahun 2023	Ket
						mengalami penurunan sebesar 4,20%. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya sasaran OPD Inspektorat di tahun 2022

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II (sd Juni 2023) sebagai berikut :

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 15 Juni 2023) Tahun 2022 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.3 tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Inspektorat s.d 12 Juni 2023

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1.	**INSPEKTORAT DAERAH**	**13.802.897.540**	**5.878.102.900**	**42,58%**	**49,87%**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**12.896.563.930**	**5.670.695.623**	**43,97%**		
A.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**66.604.000**	**40.259.000**	**60,44%**		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.978.000	1.135.000	57,38%	67**%**	
1.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.250.000	165.000	13,2%	50**%**	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.250.000	440.000	35,2%	50**%**	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.257.000	460.000	36,59%	49%	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.257.000	0	0%	35%	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.037.000	38.059.000	54,46%	63%	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	575.000	0	0%	0%	
A.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.952.657.000**	**4.737.705.211**	**43,25%**		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	10.933.452.000	4.729.908.211	43,26%	54%	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	575.000	575.000	100%	100%	
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	575.000	299.000	52%	52%	
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.150.000	0	0%	0%	
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	575.000	0	0%	0%	
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	575.000	575.000	100%	100%	
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.180.000	6.348.000	41,81%	40%	
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	575.000	0	0%	0%	
A.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.040.500**	**3.015.000**	**74,61%**		
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	932.500	804.000	86,21%	94,50%	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.120.000	670.000	59,82%	63%	
3.3	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.088.000	644.000	59,19%	67,60%	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	900.000	897.000	99,66%	100%	
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	900.000	391.000	43,44%	54%	
3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	900.000	900.000	100%	100%	
A.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.369.000**	**3.248.750**	**74,35%**	**79%**	
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Kinerja Pegawai	4.369.000	3.248.750	74,35%	79	
A.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**542.938.830**	**191.600.075**	**35,28%**		
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.316.000	1.315.000	24,73%	30%	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.439.330	19.824.900	27,36%	41,40%	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.779.000	7.877.835	24,03%	38,30%	
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.229.500	7.888.850	28,97%	34,30%	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.180.000	1.225.000	38,52%	33,30%	
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.460.000	146.943.490	37,15%	41,30%	
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6.535.000	6.525.000	99,84%	100%	
A.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**416.437.600**	**296.561.420**	**71,21%**	**72%**	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	416.437.600	296.561.420	71,21%	72%	
A.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**413.373.000**	**135.205.392**	**32,70%**		

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.997.000	404.000	6,73%	24,70**%**	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.200.000	1.311.392	31,22%	35,70**%**	
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	25.800.000	9.300.000	36,04%	30**%**	
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.376.000	124.190.000	32,08%	31,45**%**	
A.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**494.344.000**	**261.809.775**	**53,56%**		
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.080.000	7.822.768	25,39%	56,30**%**	
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.204.000	27.827.207	13,36%	36,80**%**	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.560.000	16.346.000	51,79%	60,30**%**	
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.500.000	209.813.800	93,45%	96,14**%**	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**374.032.110**	**108.220.310**	**28,93%**		
B.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**231.493.110**	**79.504.660**	**34,34%**		
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	97.275.610	45.525.510	46,80%	50**%**	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	86.865.750	6.658.200	7,77%	5**%**	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	10.489.750	10.364.700	98,80%	100**%**	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	8.716.000	8.373.750	96,07%	100**%**	
1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28.146.000	8.582.500	30,49%	31**%**	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
B.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**142.539.000**	**26.715.650**	**18,74%**		
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7.185.000	2.815.000	39,17%	36%	
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	135.354.000	23.900.650	17,65%	18%	
C.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**532.301.500**	**99.186.967**			
C.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**94.179.500**	**46.536.000**	**49,41%**		
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	79.049.500	41.606.000	52,63%	54%	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	15.130.000	4.930.000	32,58%	35%	
C.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**438.122.000**	**52.650.967**	**12,01%**		
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	67.728.000	19.826.667	29,27%	40%	
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16.051.000	368.000	2,29%	10%	
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	320.159.000	20.750.300	6,48%	11%	
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34.184.000	11.706.000	34,24%	62%	
	Total	**13.802.897.540**	**5.878.102.900**		**49,87%**	

Sumber : Data Fungsional Subbag Keuangan s.d 12 Juni 2023

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2022) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP, diusulkan untuk penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengangkatan dari CPNS ke PNS, serta kenaikan jabatan beberapa pegawai, namun data jumlah anggaran masih menunggu dari BPKAD dan BKPSDM
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian alat tulis kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, diusulkan pengurangan anggaran fotocopy karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan ada kemungkinan tidak terserap sampai akhir tahun
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, diusulkan penambahan anggaran untuk iuran FIDSI (Iuran Inspektorat seluruh Indonesia)
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, diusulkan untuk penambahan anggaran pembelian peralatan rumah tangga
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, diusulkan penambahan anggaran pada belanja peralatan dan mesin (belanja modal) mebel, Megaphone, Sound Portable, laptop, PC, tablet
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, diusulkan pengurangan anggaran untuk penyesuaian sisa anggaran pengiriman surat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, diusulkan pengurangan anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, diusulkan penyesuaian pengurangan anggaran sewa alat fotocopy karena menyesuaikan kebutuhan dan harga sewa
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor, diusulkan berkurang untuk penyesuaian pada sisa anggaran pemeliharaan keamanan dan kebesihan
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, diusulkan engurangan untuk sisa pembayaran pajak
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, diusulkan pengurangan pada anggaran BBM
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, diusulkan penambahan anggaran untuk belanja suku cadang genset
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, diusulkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung rutin perbaikan plafon, pengecatan dan perbaikan tembok, mushola
15. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, diusulkan penambahan untuk memfasilitasi FGD P3DN

16. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, diusulkan pengurangan pada anggaran makmin fasilitasi kegiatan dan honorarium untuk narsum
17. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, diusulkan pengurangan pada anggaran makmin untuk fasilitasi kegiatan
18. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, diusulkan pengurangan anggaran makmin fasilitasi kegiatan
19. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, diusulkan pengurangan anggaran makmin fasilitasi kegiatan
20. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, diusulkan pengurangan anggaran makmin fasilitasi kegiatan
21. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, diusulkan pengurangan anggaran makmin fasilitasi kegiatan

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2023 sampai dengan 12 Juni 2023 atau Triwulan II) keseluruhan anggaran murni Inspektorat Kota Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. **13.802.855.540,-**

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 3) bahwa capain fisik sebesar 49,87% dari target fisik 52,13% sampai dengan bulan Juni 2023 , dengan capaian keuangan sebesar 41,63 % dari target yang direncanakan sampai dengan 12 Juni 2023 sebesar 62,52%, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan, karena durasi pelaksanaan renja perubahan hanya kurang lebih 3 bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2023.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 12 Juni 2023) EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (INSPEKTORAT) TA. 2023 (dari Data Fungsional Subbag Keuangan) atau ***Tabel 2.4 sebagai berikut***

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:			
1	**Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan**	**Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**	**Level 3**
2	**Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat**	**Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat**	**Nilai A**

Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2023 (Cut Off 12 Juni 2023)

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip dari Inspektora	Hasil Penilaian Sakip dari Inspektorat		0		0		12.896.521.930	63,52%	8.191.606.986	69,23%	5.670.695.623	100,00%	69,23%						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0				1.978.000	67,00%	1.311.000	86,58%	1.135.000	100,00%	86,58%						
						0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen													
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1.250.000	50,00%	367.500	44,90%	165.000	100,00%	44,90%						
						0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen													
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.250.000	50,00%	575.000	76,52%	440.000	100,00%	76,52%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen													
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.257.000	49,00%	575.000	80,00%	460.000	100,00%	80,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen													
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.215.000	35,00%	575.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			59.037.000	65,31%	38.557.000	98,71%	38.059.000	100,00%	98,71%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17 laporan		0,00%											
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	575.000	0,00%	0										
		8	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN			0 Dokumen		0 Dokumen			10.933.452.000	54,00%	7.045.957.606	67,13%	4.729.908.211	100,00%	67,13%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						83 orang/bulan													
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	100,00%	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3 Dokumen													
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	52,00%	575.000	52,00%	299.000	100,00%	52,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3 Dokumen													
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.150.000	0,00%	115.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1 Dokumen				#DIV/0!									
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 laporan													
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	100,00%	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						1 Dokumen													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			15.180.000	40,00%	7.337.000	86,52%	6.348.000	100,00%	86,52%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 laporan													
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	0,00%	69.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen													
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			932.500	94,50%	850.000	94,59%	804.000	100,00%	94,59%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKDP						2 Dokumen													
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			1.120.000	63,00%	900.000	74,44%	670.000	100,00%	74,44%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah						3 Dokumen													
		18	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKDP			0 Dokumen		0 Dokumen			1.088.000	67,60%	736.000	87,50%	644.000	100,00%	87,50%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen													
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			900.000	100,00%	900.000	99,67%	897.000	100,00%	99,67%						
				Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD						12 Laporan													
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			900.000	54,00%	900.000	43,44%	391.000	100,00%	43,44%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD						2 Dokumen													
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			900.000	100,00%	900.000	100,00%	900.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0 Dokumen		0 Dokumen			4.369.000	79,00%	3.379.000	96,15%	3.248.750	100,00%	96,15%						
				Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2 Dokumen												
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			5.316.000	30,00%	3.516.000	37,40%	1.315.000	100,00%	37,40%						
				Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan						6 Jenis												
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			72.439.330	41,40%	49.663.380	39,92%	19.824.900	100,00%	39,92%						
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						64 Jenis												
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0 Dokumen		0 Dokumen			32.779.000	38,30%	13.641.000	57,75%	7.877.835	150,79%	57,75%						
				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						19 Jenis												
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0 Dokumen		0 Dokumen			27.229.500	34,30%	10.130.000	77,88%	7.888.850	100,00%	77,88%						
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						10 Jenis												
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan			0 Dokumen		0 Dokumen			3.180.000	33,30%	1.325.000	92,45%	1.225.000	100,00%	92,45%						
				Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen												
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			395.460.000	41,30%	186.195.000	78,92%	146.943.490	100,00%	78,92%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan												
		29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			6.535.000	100,00%	6.535.000	99,85%	6.525.000	100,00%	99,85%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2 Dokumen												
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			416.437.600	66,68%	304.097.600	97,52%	296.561.420	100,00%	97,52%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						14 Unit												

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Dokumen		0 Dokumen			5.997.000	24,70%	1.641.000	24,62%	404.000	100,00%	24,62%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan													
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0 Dokumen		0 Dokumen			4.200.000	35,70%	1.800.000	72,86%	1.311.392	100,00%	72,86%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan													
		33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			25.800.000	30,00%	9.300.000	100,00%	9.300.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan						12 laporan													
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			377.376.000	31,45%	147.890.000	83,97%	124.190.000	100,00%	83,97%						
				Jumlah Lapaoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan						12 laporan													
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 Dokumen		0 Dokumen			30.080.000	56,30%	18.340.000	42,65%	7.822.768	75,76%	42,65%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya						1 Unit													
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			0 Dokumen		0 Dokumen			208.204.000	36,80%	88.713.900	31,37%	27.827.207	85,24%	31,37%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						18 Unit													
		37	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			31.560.000	60,30%	26.370.000	61,99%	16.346.000	100,00%	61,99%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara						6 Unit													
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			224.500.000	96,14%	216.720.000	96,81%	209.813.800	100,00%	96,81%						

No	Sasaran PD		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 unit													
Rata-Rata Capaian Kinerja																87,15%	65,37%						
Predikat Kinerja																tinggi	sedang						
2	**Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peningkatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan**	**B**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Masing-Masing Bidang = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Masing-Masing Bidang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Masing-Masing Bidang dikali 100%**	**97%**		**100%**		**95%**	**374.032.110**	**0,00%**	**195.489.360**	**0,00%**	**108.220.310**	**0,00%**	**55,36%**						**Irban Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Irban pengelolaan Keuangan dan Aset, irban Pembangunan Sarpras, dan Irban Perekonomian Kesejahteraan Rakyat**
2				**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal**	**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal = Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%**	**92%**		**100%**		**92%**	**374.032.110**												
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			97.275.610	76,00%	77.862.110	48,86%	47.525.510	64,28%	61,04%						
				Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						55 Laporan													
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			86.865.750	5,00%	31.748.000	7,66%	6.658.200	100,00%	20,97%						
				Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						35 laporan													
		3	Reviu Laporan Kinerja			0 Dokumen		0 Dokumen			10.489.750	100,00%	10.489.750	98,81%	10.364.700	98,81%	98,81%						

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja						1 Laporan													
		4	Reviu Laporan Keuangan			0 Dokumen		0 Dokumen			8.716.000	100,00%	8.405.000	96,07%	8.373.750	100,00%	99,63%						
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan						1 Laporan													
		5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP			0 Dokumen		0 Dokumen			28.146.000	31,00%	14.821.500	30,49%	8.582.500	98,36%	57,91%						
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						11 Dokumen													
		6	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			7.185.000	36,00%	3.305.000	39,18%	2.815.000	100,00%	85,17%						
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani						1 laporan													
		7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			0 Dokumen		0 Dokumen			135.354.000	18,00%	48.858.000	17,66%	23.900.650	98,10%	48,92%						
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						25 Laporan													
Rata-rata capaian kinerja																**94,22%**	**67,49%**						
Predikat kinerja																**sangat tinggi**	**rendah**						

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		C	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi** **Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset** **Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana** **Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra di Masing-Masing Bidang yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Masing-Masing Bidang x 100%**	**63,64%** **60%** **63,64%** **70%**		**-**		**18,18%** **20%** **18,18%** **40%**	**532.301.500**		**242.713.500**	**-**	**99.186.967**	**-**	**40,87%**						**Irban Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Irban pengelolaan Keuangan dan Aset, irban Pembangunan Sarpras, dan Irban Perekonomian Kesejahteraan Rakyat**
		1	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			0 Dokumen		0 Dokumen			79.049.500	58,00%	48.798.000	52,63%	41.606.000	90,75%	85,26%						
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bdiang Penagwasan Yang Disusun						3 Rekomendasi												
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			0 Dokumen		0 Dokumen			15.130.000	35,00%	6.580.000	32,58%	4.930.000	93,10%	74,92%						
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun						1 Rekomendasi												
		3	Pendampingan Asistensi dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			67.728.000	40,00%	33.594.000	29,27%	19.826.667	73,18%	59,02%						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						44 perangkat Daerah												
		4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			0 Dokumen		0 Dokumen			16.051.000	49,00%	14.401.000	2,29%	368.000	4,68%	2,56%						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifiaksi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						44 Perangkat Daerah												

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			0 Dokumen		0 Dokumen			320.159.000	11,00%	117.504.500	6,48%	20.750.300	58,92%	17,66%						
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						4 Dokumen													
		6	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			0 Dokumen		0 Dokumen			34.184.000	62,00%	21.836.000	34,24%	11.706.000	55,23%	53,61%						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						44 Perangkat Daerah													
Rata-rata capaian kinerja																**62,64%**	**48,84%**						
Predikat kinerja																**rendah**	**sangat rendah**						
Total anggaran dari seluruh program											**13.802.855.540**		**8.629.809.846**		**5.878.102.900**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)																**81,34%**	**60,57%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)																**tinggi**	**rendah**						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				:	-Koordinasi internal di bidang maupun antar struktural berjalan lancar																		
					- Pelatihan di Kantor Sendiri oleh auditor tetap berjalan sesuai tata kala																		
					- Koordinasi pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik																		
					- SDM dan APIP yang berkompeten dan telah bersertifikasi																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja				:	- Adanya kegiatan mandatori dari Pusat yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan menggeser kegiatan yang sudah dijadwalkan pada PKPT																		
					- Kurangnya SDM yang melaksanakan ketugasan administrasi (JFU), sehingga pekerjaan administrasi juga dihandle oleh beberapa auditor																		
					- Kurangnya pegawai yang memahami teknologi informasi, mengingat saat ini ketugasan dilaksanakan menggunakan teknologi informasi																		

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 050/2821/SE/2023 tanggal 05 Juni 2023 hal Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 tidak lepas dari Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2023. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Inspektorat Kota Yogyakarta

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	**01**								**BELANJA INSPEKTORAT**				**13.802.855.540**	**14.444.345.660**	**641.490.120**
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**12.896.521.930**	**13.649.940.050**	**753.418.120**
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**66.562.000**	**66.562.000**	**0**
6	01	6	01	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.978.000	1.978.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.257.000	1.257.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.215.000	1.215.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	17 laporan	59.037.000	59.037.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.952.657.000**	**11.407.785.000**	**455.128.000**
6	01	6	01	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83 orang/bulan	83 orang/bulan	10.933.452.000	11.388.580.000	455.128.000

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000	1.150.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	15.180.000	15.180.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				**5.840.500**	**5.840.500**	**0**
6	01	6	01	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	932.500	932.500	0
6	01	6	01	01	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.120.000	1.120.000	0
6	01	6	01	01	01	2	03	03	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKDP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.088.000	1.088.000	0

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	900.000	900.000	0
6	01	6	01	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000	900.000	0
6	01	6	01	01	01	2	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**4.369.000**	**4.369.000**	**0**
6	01	6	01	01	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	4.369.000	4.369.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**542.938.830**	**575.542.250**	**32.603.420**
6	01	6	01	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	5.316.000	5.316.000	0
6	01	6	01	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Jenis	64 Jenis	72.439.330	75.969.330	3.530.000
6	01	6	01	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Jenis	19 Jenis	32.779.000	68.694.420	35.915.420
6	01	6	01	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis	27.229.500	17.587.500	-9.642.000
6	01	6	01	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.180.000	3.000.000	-180.000
6	01	6	01	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	395.460.000	398.440.000	2.980.000
6	01	6	01	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.535.000	6.535.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**416.437.600**	**601.556.300**	**185.118.700**

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	416.437.600	601.556.300	185.118.700
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**413.373.000**	**379.151.000**	**-34.222.000**
6	01	6	01	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.997.000	2.303.000	-3.694.000
6	01	6	01	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.200.000	3.600.000	-600.000
6	01	6	01	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	25.800.000	18.600.000	-7.200.000
6	01	6	01	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	377.376.000	354.648.000	-22.728.000
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**494.344.000**	**609.134.000**	**114.790.000**
6	01	6	01	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.080.000	28.400.000	-1.680.000
6	01	6	01	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	208.204.000	110.374.000	-97.830.000
6	01	6	01	01	01	2	09	06	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	31.560.000	65.860.000	34.300.000
6	01	6	01	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	224.500.000	404.500.000	180.000.000
															0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**374.032.110**	**325.993.110**	**-48.039.000**
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**231.493.110**	**226.301.110**	**-5.192.000**
6	01	6	01	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55 Laporan	55 Laporan	97.275.610	112.467.610	15.192.000

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 laporan	35 laporan	86.865.750	66.595.750	-20.270.000
6	01	6	01	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	10.489.750	10.375.750	-114.000
6	01	6	01	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	8.716.000	8.716.000	0
6	01	6	01	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11 Dokumen	11 Dokumen	28.146.000	28.146.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**				**142.539.000**	**99.692.000**	**-42.847.000**
6	01	6	01	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	1 laporan	7.185.000	7.174.000	-11.000
6	01	6	01	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	25 Laporan	135.354.000	92.518.000	-42.836.000
															0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**03**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**532.301.500**	**468.412.500**	**-63.889.000**
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**03**	**2**	**01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**94.179.500**	**94.044.500**	**-135.000**
6	01	6	01	01	03	2	01	01	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bdiang Penagwasan Yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	79.049.500	78.914.500	-135.000
6	01	6	01	01	03	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	15.130.000	15.130.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**03**	**2**	**02**		**Pendampingan dan Asistensi**				**438.122.000**	**374.368.000**	**-63.754.000**
6	01	6	01	01	03	2	02	01	Pendampingan Asistensi dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 perangkat Daerah	44 perangkat Daerah	67.728.000	62.724.000	-5.004.000

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifiaksi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	16.051.000	6.712.000	-9.339.000
6	01	6	01	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen	4 Dokumen	320.159.000	280.514.000	-39.645.000
6	01	6	01	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	34.184.000	24.418.000	-9.766.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 (Cut Off 12 Juni 2023) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta tahun 2023 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah kota Yogyakarta, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2023 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar **Rp. 705.970.120,- atau 4,64 %** dari anggaran semula murni Rp.**13.802.855.540,-** menjadi anggaran perubahan Rp.**14.444.345.660,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Inspektorat Tahun 2023.

Yogyakarta, 27 Juni 2023

Inspektur
Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

FITRI PAULINA ANDRIANI, S.T
NIP. 19700327199503 2002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2023

KEMANTREN JETIS
KOTA YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud Dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 ..... II-5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 ..... II-5
Tabel 2.1 ..... II-5
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 ..... III-1
Tabel 3.1 ..... III-4
BAB IV PENUTUP IV-1
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Rencana Kerja OPD Kemantren Jetis disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota tentang Walikota tentang Review Renstra Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan semester satu di Tahun 2021, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
12. Perwal No 138 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Perwal No 137 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Peraturn Daerah Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tribulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

   - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
   - Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Perlu diketahui bahwa dengan adanya Permandagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada pergantian nomenklatur dari Kecamatan Jetis menjadi Kemantren Jetis mulai Tahun 2021.

Pada Bulan Juni 2023 Kemantren Jetis melakukan review Renstra karena realisasasi sasaran OPD, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan untuk Tahun 2023 sebesar 402,33 sudah melebih target Tahun 2022 sebesar 401,66.

Untuk Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis tidak ada review dengan nilai 83,39.

Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 88 melebihi target Tahun 2022 sebesar 87,5 sehingga dilakukan review menjadi 88,1 di Tahun 2023.

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2022 sudah melebihi yang ditargetkan . Untuk target Tahun 2023 dinaikkan menjadi 854.415.900.

Realisasi program jumlah pelanggaran perda Tahun 2022 sebesar 259 lebih rendah dari target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2022 sebesar 290. Sehingga target Tahun 2023 ada review menjadi 258.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan

dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Jetis pada Tahun 2023 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Jetis Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Jetis adalah jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN JETIS TAHUN 2017-2022

Tujuan/Sasaran	Indikator		Target Renstra						Realisasi		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	332	335	370	371	397	401	401,66	398,66	401,66	402,33

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN JETIS TAHUN 2023-206

No	Sasaran OPD	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	83,39	83,39	83,39	83,39	-
2	Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	401,66	402	402,33	402,66	402,33

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM (personil) pada Kemantren Jetis.
2. Penentuan Target serta Perencanaan Anggaran yang kurang optimal
3. Sarana dan prasarana perkantoran yang kurang memadai menjadi penghambat dalam proses penyusunan laporan kegiatan.

Pada Tahun 2023 Kemantren Jetis telah merencanakan dan melaksanakan 6 program Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan anggaran Rp 100.000.000,- belum terealisir karena kegiatan diprloting di bulan Agustus 2023.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisir sebesar Rp 2.808.826.718,- atau 46,66% dari target sampai dengan Juni 2023, hal ini ada penyesuaian BBM dan akan diubah di perubahan, lalu untuk Gaji dan Tunjangan dibayarkan sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk biaya pemeliharan dan pajak kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan Juni 2023 terealisir sebesar Rp 63.911.500,- atau sebesar 52,47% dari target sampai dengan Juni 2023. Pada program ini, kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan tatakala sampai dengan bulan Juni.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai dengan Juni 2023 terealisir sebesar Rp 14.744.000,- atau 23,44% dari target sampai dengan Juni 2023. Ketercapaian program ketertiban dikarenakan adanya sinergitas dengan TNI, POLRI, dan BKO dalam pengamanan dan menertiban pelanggaran perda.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan Juni 2023 terealisir sebesar Rp 1.237.663.280,- atau 35,07% dari target sampai dengan Juni 2023, dikarenakan ada kegiatan sarpras Kelurahan Bumijo mundur dari bulan Juni ke bulan Juli. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan namun realisasi SPJ ikut di bulan Juli.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Juni 2023 terealisir Rp 41.582.500,- atau 45,32% dari target sampai dengan Juni 2023, hal ini karena untuk kegiatan forkompintren, ada SPJ honor yang masuk di bulan Juli.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berikut ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	401,66 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	83.39 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**100.000.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								**100.000.000,00**		**0,00**		**0,00**		**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
															nan%	**nan%**						
															Sangat Rendah	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis**	**A -**	**0,00**	**A -**	**0,00**	**A -**	**6.019.503.060,00**	**A -**	**3.729.664.841,00**	**A -**	**2.808.826.718,00**	**100%**	**75,31%**					**Syarief Teguh Prabowo,S,STP**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**14.114.500,00**		**7.118.250,00**		**7.118.250,00**		**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.325.000,00	100,00%	1.325.000,00	100,00%	1.325.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		488.750,00	50,00%	245.000,00	50,00%	245.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		903.000,00	51,30%	464.000,00	51,30%	464.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		51,30%		51,30%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.275.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.657.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		7.706.250,00	63,00%	4.831.250,00	63,00%	4.831.250,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		63,00%		63,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		759.000,00	33,30%	253.000,00	33,30%	253.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		33,30%		33,30%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.919.421.300,00**		**3.165.946.751,00**		**2.335.907.379,00**		**73.78%**						
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.910.897.300,00	64,40%	3.162.073.751,00	64,40%	2.333.059.379,00	100,00%	73,78%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		35 Orang/bulan		64,40%		64,40%		100,00%							
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan AKuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							

		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		828.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		50.000,00	50,00%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pmeeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.940.000,00	50,00%	2.970.000,00	50,00%	1.945.000,00	100,00%	65,49%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%									
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**10.902.000,00**		**5.451.000,00**		**5.451.000,00**		**100%**								
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		3.450.000,00	50,00%	1.725.000,00	50,00%	1.725.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%									
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	50,00%	2.070.000,00	50,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%									
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%									
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**920.000,00**		**460.000,00**		**460.000,00**		**100%**								
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**331.374.460,00**		**168.507.640,00**		**147.460.175,00**		**87.51%**								
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		8.863.500,00	100,00%	8.863.500,00	100,00%	8.574.300,00	100,00%	96,74%								
				Jumlah Paket Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		116.494.960,00	60,13%	69.845.140,00	60,13%	62.084.670,00	100,00%	88,89%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		7 Paket		0,00%		60,13%		0,00%									
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		11.247.500,00	2,00%	247.500,00	2,00%	0,00	100,00%	0,00%								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		2,00%		2,00%		100,00%									
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		41.038.500,00	38,00%	15.535.500,00	38,00%	13.529.350,00	100,00%	87,09%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		38,00%		38,00%		100,00%									
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	998.855,00	100,00%	99,89%								
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		151.810.000,00	47,00%	72.556.000,00	47,00%	61.813.000,00	100,00%	85,19%								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		47,00%		47,00%		100,00%									
		28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**590.360.000,00**		**307.499.000,00**		**268.362.205,00**		**87.27%**								
		29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.700.000,00	66,00%	3.100.000,00	66,00%	2.100.000,00	100,00%	67,74%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		66,00%		66,00%		100,00%									
		30	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		101.400.000,00	63,34%	64.800.000,00	63,34%	63.543.205,00	100,00%	98,06%								
				Jumlah Lapporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan.		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		63,34%		0,00%									

		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		484.260.000,00	49,50%	239.599.000,00	49,50%	202.719.000,00	100,00%	84,61%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		49,50%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**152.410.800,00**		**74.682.200,00**		**44.067.709,00**		**59.01%**							
		32	PenyediaanJasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		105.200.000,00	45,00%	47.825.000,00	45,00%	32.943.709,00	100,00%	68,88%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Di Bayarkan PajaknyaDI		0 Unit		0 Unit		14 Unit		45,00%		45,00%		100,00%								
		33	PenyediaanJasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		21.180.000,00	48,00%	10.280.000,00	48,00%	4.434.000,00	100,00%	43,13%							
				JUmlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihar, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		0 Unit		0 Unit		12 Unit		48,00%		48,00%		100,00%								
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		26.030.800,00	63,28%	16.577.200,00	63,28%	6.690.000,00	100,00%	40,36%							
				Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		63,28%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**87,09%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**88,40 poin**	**0,00**	**88,10 poin**	**0,00**	**88,10 poin**	**121.796.250,00**	**88.1 poin**	**70.398.500,00**	**88 poin**	**63.911.500,00**	**99.88%**	**90,79%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**64.764.000,00**		**27.927.000,00**		**23.900.000,00**		**85.58%**							
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		64.764.000,00	53,30%	27.927.000,00	53,30%	23.900.000,00	100,00%	85,58%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang Terkait dalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		53,30%		0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**57.032.250,00**		**42.471.500,00**		**40.011.500,00**		**94.21%**							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		13.220.000,00	59,30%	7.840.000,00	59,30%	5.840.000,00	100,00%	74,49%							
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		59,30%		0,00%								
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		43.812.250,00	79,27%	34.631.500,00	79,27%	34.171.500,00	100,00%	98,67%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		79,27%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**86,25%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**854.415.900 rupiah**	**0,00**	**854.415.900 rupiah**	**0,00**	**854.415.900 rupiah**	**3.528.678.326,00**	**427.207.950 rupiah**	**1.089.232.081,00**	**433.340.000 rupiah**	**1.223.117.280,00**	**101%**	**112,29%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									**101.369.000,00**		**26.392.000,00**		**25.817.000,00**		**97.82%**							
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		101.369.000,00	26,05%	26.392.000,00	26,05%	25.817.000,00	100,00%	97,82%							
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		15 Laporan		0,00%		26,05%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**3.114.512.076,00**		**933.401.081,00**		**1.086.027.780,00**		**116.35%**							
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		70.850.000,00	100,00%	70.850.000,00	100,00%	62.680.000,00	100,00%	88,47%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		14 Lembaga Masyarakat		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bumijo				0,00		0,00		523.570.500,00	52,91%	153.312.500,00	44,31%	99.454.000,00	83,75%	64,87%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		19 unit		0,00%		44,31%		0,00%								
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan				0,00		0,00		489.132.500,00	72,28%	10.000.000,00	72,28%	200.913.925,00	100,00%	2.009,14%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		5 unit		0,00%		80,61%		0,00%								
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gowongan				0,00		0,00		642.328.723,00	20,30%	47.873.423,00	20,30%	97.464.000,00	100,00%	203,59%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		48 Unit		0,00%		20,30%		0,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan				0,00		0,00		452.602.500,00	49,72%	210.744.125,00	49,72%	212.839.125,00	100,00%	100,99%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		378 Pokmas		0,00%		49,72%		0,00%								
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan				0,00		0,00		465.726.750,00	51,11%	232.412.750,00	51,11%	216.999.750,00	100,00%	93,37%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan		0 pokmas		0 pokmas		149 pokmas		0,00%		51,11%		0,00%								

		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bumijo				0,00		0,00		426.971.000,00	53,99%	187.999.000,00	50,14%	177.049.000,00	92,87%	94,18%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		183 Pokmas/Ormas		0,00%		50,14%		0,00%							
		9	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		43.330.103,00	54,73%	20.209.283,00	54,73%	18.627.980,00	100,00%	92,18%							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		54,73%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**110.521.750,00**		**54.796.500,00**		**47.495.000,00**		**86.68%**							
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		75.120.250,00	68,35%	51.346.500,00	68,35%	44.045.000,00	100,00%	85,78%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		14 Lembaga Masyarakat		0,00%		68,35%		0,00%							
		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		35.401.500,00	9,75%	3.450.000,00	9,75%	3.450.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		9,75%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**202.275.500,00**		**74.642.500,00**		**63.777.500,00**		**85.44%**							
		12	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		17.552.500,00	80,35%	14.102.500,00	80,35%	6.967.500,00	100,00%	49,41%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		80 Keluarga		0,00%		80,35%		0,00%							
		13	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		74.223.000,00	13,63%	10.120.000,00	13,63%	10.120.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		0,00%		13,63%		0,00%							
		14	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		19.970.000,00	66,55%	13.290.000,00	66,55%	13.290.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		65 Keluarga		0,00%		66,55%		0,00%							
		15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		7.060.000,00	26,19%	1.840.000,00	26,19%	1.840.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		0,00%		26,19%		0,00%							
		16	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		4.210.000,00	100,00%	4.210.000,00	100,00%	4.210.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		0,00		3.860.000,00	100,00%	3.860.000,00	100,00%	3.860.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang mengikuti penumuhan kesadaran keluara dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoprasi dan pengembangan ekonomi lainnya		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		75.400.000,00	36,10%	27.220.000,00	36,10%	23.490.000,00	100,00%	86,30%							
				Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		0,00%		36,10%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**98,70%**	**203,67%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis = Jumlah Pelanggaran Perda**	**240,00 Pelanggaran**	**0,00**	**259,00 Pelanggaran**	**0,00**	**259,00 Pelanggaran**	**62.909.000,00**	**150 Pelanggaran**	**19.724.000,00**	**47 Pelanggaran**	**14.744.000,00**	**168%**	**74,75%**					**Mantri Pamong Praja**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**62.909.000,00**		**19.724.000,00**		**14.744.000,00**		**74.75%**							
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		62.909.000,00	31,50%	19.724.000,00	31,50%	14.744.000,00	100,00%	74,75%							
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		31,50%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**74,75%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Jetis**	**Persentase permasalahan Kemantren**	**100,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 %**	**91.743.500,00**	**100 %**	**49.335.500,00**	**100 %**	**41.582.500,00**	**100%**	**84,29%**					**Mantri Pamong Praja**			

	Kemantren Jetis			**terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Jetis) x 100%**																		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**91.743.500,00**		**49.335.500,00**		**41.582.500,00**		**84.29%**							
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0,00		0,00		68.223.500,00	55,85%	38.035.500,00	55,85%	33.282.500,00	100,00%	87,50%							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang		0 Orang		50 Orang		0,00%		55,85%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00		0,00		23.520.000,00	48,00%	11.300.000,00	48,00%	8.300.000,00	100,00%	73,45%							
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantren		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		48,00%		48,00%		100,00%							
															Rata-rata capaian kinerja	**100,00%**	**80,48%**						
															Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
															Total anggaran dari seluruh program	**9.924.630.136,00**		**4.958.354.922,00**		**4.152.181.998,00**			
															Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)	**99,57%**	**83,74%**						
															Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Kerjasama yang sangat baik dengan mitra kerja OPD, BKO,TNI , Polri dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kemantren.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Penentuan dalam penataan belanja mana yang masuk Hibah dan mana yang masuk belanja Modal.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
Kepala KEMANTREN JETIS

Rini Rahmawati,S.I.P., M.I.P.
NIP. 196702131996032001

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

1. Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Jetis.
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis.

Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis meningkat. Dengan Indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dan pada Tahun 2023 ini targetnya adalah 401,66.

Tingkat Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis meningkat. Dengan indicator kinerja hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Kemantren Jetis pada Tahun 2023 targetnya adalah 83,39.

Program dan Kegiatan

Kemantren Jetis pada Tahun 2023 memiliki 6 (enam) Program dan 16 kegiatan:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan = 1 Kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = 7 kegiatan;

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik = 2 kegiatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum = 1 kegiatan;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan = 4 kegiatan.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum = 1 kegiatan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Jetis Tahun 2023 Kemantren Jetis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada penambahan jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta Penyediaan Jasa pelayanan kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Ada penambahan sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Lalu ada pengurangan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan ada pengembalian sewa kursi sosialisasi JSS da nada tambahan kegiatan FGD Pelayanan Kelurahan dan Kemantren dan Rapat Inovasi.

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat tambahan kegiatan fasilitasi penertiban alat peraga kampanye dan tambahan anggaran peningkatan kapasitas linmas.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di kelurahan Bumijo dan

Gowongan ada tambahan kegiatan pelatihan-pelatihan dan Workshop, sedangkan di kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan , di kelurahan Cokrodiningratan ada penghapusan kegiatan pengecatan balai RW 04 karena bukan aset pemkot. DI kelurahan Gowongan, belanja modal pengadaan/pembangunan jalan Conblok dialihkan ke CCTV 16 Titik dan perbaikan balai kampong penumping. Di kelurahan Bumijo, ada penghapusan Belanja modal jalan Desa Paving Blok di 7 titik kelurahan Bumijo karena bukan di atas tanah pemkot dan akan dialihkan di perubahan 2024 untuk diusulkan sebagai Hibah.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tidak ada perubahan anggaran baik di kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional maupun di kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					1 Laporan	1 Laporan			100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY				100,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**6,824,298,163**	**7,525,113,790**					**6,691,082,013**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,019,503,060**	**6,674,815,310**					**5,785,023,470**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**14,114,500**	**14,689,500**					**6,918,750**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,325,000	1,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,260,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	488,750	1,063,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	460,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	903,000	903,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	850,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,275,000	1,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,657,500	1,657,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,560,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	7,706,250	7,706,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	868,750
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	759,000	759,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	720,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,919,421,300**	**5,005,616,300**					**4,570,543,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	12 laporan	12 laporan	4,910,897,300	4,995,022,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	4,562,443,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	828,000	828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	800,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	828,000	828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	828,000	828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	800,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	50,000	50,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	50,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	5,940,000	8,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	5,600,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	50,000	50,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	50,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**10,902,000**	**10,902,000**					**9,800,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	3,450,000	3,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	828,000	828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	828,000	828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	4,140,000	4,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	4,800,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	828,000	828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	828,000	828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**920,000**	**920,000**					**1,000,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	920,000	920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**331,374,460**	**754,648,210**					**349,120,480**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	12 laporan	12 laporan	8,863,500	16,213,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	11,828,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	7 Paket	7 Paket	12 laporan	12 laporan	116,494,960	457,394,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	146,801,480
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	12 laporan	12 laporan	11,247,500	38,047,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	16,247,500
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	12 laporan	12 laporan	41,038,500	52,822,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	50,793,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	151,810,000	187,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	121,450,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	920,000	1,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**590,360,000**	**638,660,000**					**586,910,440**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	4,700,000	6,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	4,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	12 laporan	12 laporan	101,400,000	141,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	101,400,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	5 Laporan	5 Laporan	12 laporan	12 laporan	484,260,000	490,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	480,910,440
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**152,410,800**	**249,379,300**					**260,730,800**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	14 Unit	14 Unit	19 unit	19 unit	105,200,000	97,888,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	112,550,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	12 Unit	12 Unit	19 unit	19 unit	21,180,000	18,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	17,400,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai	5 Unit	5 Unit	19 unit	19 unit	26,030,800	32,900,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	30,780,800
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	A Nilai	A Nilai		2 Unit	19 unit	19 unit	0	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	100,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**121,796,250**	**124,053,750**					**197,576,010**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**64,764,000**	**64,764,000**					**127,222,320**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	87,75 poin	88,1 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	64,764,000	64,764,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	88,1 poin	127,222,320
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**57,032,250**	**59,289,750**					**70,353,690**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	87,75 poin	88,1 poin	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	13,220,000	13,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	88,1 poin	12,000,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	87,75 poin	88,1 poin	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	43,812,250	46,069,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	88,1 poin	58,353,690
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**528,346,353**	**561,808,730**					**584,103,933**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**101,369,000**	**114,969,000**					**112,109,440**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	17 Laporan	17 Laporan	14 lembaga	14 lembaga	101,369,000	114,969,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	112,109,440
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**114,180,103**	**101,054,980**					**130,320,543**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	3 kelurahan	3 kelurahan	70,850,000	64,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	73,090,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	3 Laporan	3 Laporan	3 kelurahan	3 kelurahan	43,330,103	36,514,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	57,230,543
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**110,521,750**	**111,729,250**					**121,644,950**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	1 kecamatan	1 kecamatan	75,120,250	71,177,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	77,487,450
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	4 Laporan	4 Laporan	1 kecamatan	1 kecamatan	35,401,500	40,551,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	44,157,500
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**202,275,500**	**234,055,500**					**220,029,000**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	82 Keluarga	115 Keluarga	4 Lokasi	4 Lokasi	17,552,500	23,122,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	26,891,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	52 Keluarga	50 Keluarga	4 Lokasi	4 Lokasi	74,223,000	74,223,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	76,118,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	52 Keluarga	50 Keluarga	4 Lokasi	4 Lokasi	4,210,000	4,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	7,720,000
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	52 Keluarga	50 Keluarga	4 Lokasi	4 Lokasi	3,860,000	3,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	3,860,000
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	53 Keluarga	105 Keluarga	4 Lokasi	4 Lokasi	19,970,000	25,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	13,700,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	52 Keluarga	50 Keluarga	4 Lokasi	4 Lokasi	7,060,000	7,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	7,200,000
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	52 Keluarga	51 Keluarga	4 Lokasi	4 Lokasi	75,400,000	95,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	84,540,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**62,909,000**	**72,692,500**					**61,815,000**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**62,909,000**	**72,692,500**					**61,815,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan Penegakan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	275 pelanggaran	258 pelanggaran	1 Laporan	5 Laporan	275 pelanggaran	258 pelanggaran	62,909,000	72,692,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	258 pelanggaran	61,815,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**91,743,500**	**91,743,500**					**62,563,600**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**91,743,500**	**91,743,500**					**62,563,600**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	68,223,500	68,223,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	41,483,600
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	23,520,000	23,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	21,080,000
															TOTAL	**6,924,298,163**	**7,625,113,790**					**6,791,082,013**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Bumijo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**950,541,500**	**794,563,500**					**1,178,843,045**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**950,541,500**	**794,563,500**					**1,178,843,045**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**950,541,500**	**794,563,500**					**1,178,843,045**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Bumijo	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	131 Unit	19 Unit	1 kelurahan	1 kelurahan	523,570,500	337,312,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	557,415,660
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Bumijo	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	183 Pokmas / Ormas	183 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	1 kelurahan	426,971,000	457,251,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	521,427,385
															TOTAL	**950,541,500**	**794,563,500**					**1,178,843,045**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Cokrodiningratan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**954,859,250**	**921,138,675**					**1,092,563,815**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**954,859,250**	**921,138,675**					**1,092,563,815**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**954,859,250**	**921,138,675**					**1,092,563,815**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Cokrodiningratan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	5 Unit	5 Unit	1 kelurahan	1 kelurahan	489,132,500	452,013,925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	575,450,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Cokrodiningratan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	149 Pokmas / Ormas	149 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	1 kelurahan	465,726,750	469,124,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	517,113,815
															TOTAL	**954,859,250**	**921,138,675**					**1,092,563,815**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Gowongan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN											1,094,931,223	1,094,931,223					1,288,153,380
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											1,094,931,223	1,094,931,223					1,288,153,380
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											1,094,931,223	1,094,931,223					1,288,153,380
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan permberdayaan kelurahan Gowongan	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	121 Unit	48 Unit	1 kelurahan	1 kelurahan	642,328,723	604,405,973	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	846,779,750
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan permberdayaan kelurahan Gowongan	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	378 Pokmas / Ormas	378 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	1 kelurahan	452,602,500	490,525,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	441,373,630
															TOTAL	1,094,931,223	1,094,931,223					1,288,153,380

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dalam kewenangannya.
3. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat dan diutamakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren Jetis Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Jetis Tahun 2023.

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Jetis

Rini Rahmawati,S.I.P.,M.I.P
NIP. 196702131996032001

KOTA
YOGYAKARTA



RENJA PERUBAHAN 2023

KEMANTREN TEGALREJO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA – OPD) TAHUN 2023

KEMANTREN TEGALREJO

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud Dan Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 ..... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 ..... II-2
Tabel 2.1 ..... II-8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH ..... III-III
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 ..... III-III
Tabel 3.1 ..... III-5
BAB IV PENUTUP IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Tegalrejo disusun melalui evaluasi program kegiatan sampai dengan semester satu Tahun 2023 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang,Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
15. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22)
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tribulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

   Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 ini adalah:

   a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan
   b. Menjabarkan rencana Strategis ke dalam rencana operasional.
   c. Mewujudkan Sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan,pertaniann dan perikanan.
   d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.
   e. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Dengan adanya Permandagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada pergantian nomenklatur dari Kecamatan Tegalrejo menjadi Kemantren Tegalrejo mulai Tahun 2021.

Pada Bulan April 2023 Kemantren Tegalrejo melakukan review Renstra target sasaran OPD, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan untuk Tahun 2023 sebesar 365 menjadi 388 dengan realisasi 388.

Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sudah melebihi target Tahun 2022. Target Tahun 2023 sebesar 83,25 sama dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 83,25 sehinggat target tahun 2023 tidak direview.

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2022 tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan ditargetkan sehingga untuk target Tahun 2023 tidak dilakukan review dengan target 2.148.334.503.

Realisasi program jumlah pelanggaran perda Tahun 2022 mencapai target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2022. Target Tahun 2023 tidak dilakukan review dengan target 100 pelanggaran.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan TW II.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Tegalrejo pada Tahun 2023 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2017 – 2023, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Tegalrejo adalah jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN TEGALREJO TAHUN 2018-2023

No	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	359	361	362	363	398	388	334	361	362	398	388	388

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN TEGALREJO TAHUN 2018-2023

No	Sasaran OPD	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2023
1.	Nilai Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B
2.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	388	389	390	391	388

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya yang telah dilaksanakan kemantren Tegalrejo :

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Program : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo
Indikator : Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Uraian	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	Review			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
Target	55	60	65	70	**B**	**B**	**B**	**B**
Realisasi					B			

Sasaran : Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat
Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo

Uraian	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	Review			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
Target	365	366	367	368	388	389	390	391
Realisasi					388			

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo

Uraian	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	Review			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
Target	82,5	83,5	84,5	85,5	83,25	83,5	84,5	85,5
Realisasi					83,50			

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	2.148.334.503	2.406.134.643	2.694.870.800	3..018.255.296	2.148.334.503	2.406.134.643	2.694.870.800	3..018.255.296
Realisasi					1.679.522.000 (TW II)			

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	100	90	80	70	100	90	80	70
Realisasi					41(TW II)			

5. Tingkat Realisasi Program

Program :Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator :Prosentase Permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Realisasi					100 %			

6. Keterangan:

- Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi yaitu Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat Tahun 2023 direview dari angka menjadi huruf, yang semula 46,12 menjadi B

- Indikator sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo yang pelaksanaannya dengan Evaluasi Kelurahan yang merupakan indikator sasaran OPD Tahun 2023 direview karena realisasi Tahun 2022 sudah melbihi target tahun 2023, target semula 365 menjadi 388

- Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dibawah realisasi tahun 2022 sehingga target dinaikan dari semula 82,5 jadi 83,25.

- Untuk Indikator sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo target tahun 2023 masih diatas realisasi tahun 2022 sehingga target tidak dinaikan dengan target 2.148.334.503 rupiah.

- Target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda Tahun tahun 2023 masih dibawah realisasi tahun 2022 sehingga target tidak diturunkan dengan target 100 pelanggaran.

- Target indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Prosentase Permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi masih tetap 100%.

Pada Tahun 2023 Kemantren Tegalrejo telah merencanakan dan melaksanakan 6 program kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desan dan kelurahan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun kesimpulan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sampai Triwulan II atau Bulan Juni belum terlaksana karena pelaksanaan Pentas Seni di Hari Keistimewaan pada Bulan Agustus.

- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota terealisasi sebesar Rp. 3.387.104.696,- atau sebesar 76,27% dari target sampai dengan Bulan Juni dikarena ada beberapa belanja yang belum terrealisir seperti pemeliharaan kendaraan, makan minum rapat, sedangkan untuk belanja internal Kemantren dan Kelurahan seperti belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan kendaraan, piket linmas untuk kantor Kemantren dan Kelurahan terealisasi sesuai dengan kebutuhan, untuk pemeliharaan suku cadang kendaraan dalam proses pelaksanaan dan akan di pertanggung jawabkan di Bulan Juli.

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terealisasi sudah terlaksana sebesar 97,54% dari target Bulan Juni, dengan terlaksananya Sosialisasi Jogja Smart Service, cetak leaflat dan makan minum jamuan tamu.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tercapai 68,35 % dari target sampai dengan Juni dikarenakan ada beberapa pekerjaan pembangunan wilayah yang bergeser rekening pada anggaran perubahan karena menggunakan mekanisme hibah

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tercapai 100% sesuai dengan target dengan terlaksananya belanja operasional trantibum dan PAM, rapat koordinasi keamanan, Operasi trantib, belanja pakaian penyelamat kelengkapan operasional trantib

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai 99% sesuai dengan target di Bulan Juni dengan terlakasananya koordinasi Forkompimka, FKUB, FPK dan FKDM sebagai fórum pemecahan permasalahan diwilayah kemantren dan kelurahan

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN TEGALREJO
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	365 Poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	55 Poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**							
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																					
		1 Gelar Budaya Jogja				0		0		100.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
			Gelar Seni Budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY		0 event		0 event		1 event		0,00%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							**0,00%**	**0,00%**							
								Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai Nilai**	**0**	**A Nilai Nilai**	**3.387.104.696,00**	**100%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		1.846.000,00	0,864599999999992	1.596.000,00	0,864599999999992	1.596.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,864599999999992		0,864599999999992		100,00%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.122.000,00	500,00%	561.000,00	500,00%	261.000,00	100,00%	0,465200000000							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		500,00%		500,00%		100,00%								
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		550.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.600.000,00	500,00%	800.000,00	500,00%	800.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		500,00%		500,00%		100,00%								
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		800.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		8.829.000,00	483900,00%	4.272.000,00	483900,00%	3.347.000,00	100,00%	0,783499999999							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		483900,00%		483900,00%		100,00%								
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1.500.000,00	0,400000000000002	600.000,00	0,400000000000002	600.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,400000000000002		0,400000000000002		100,00%								

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		5.839.653.850,00	0,69079999999999997	3.757.922.002,00	0,69079999999999997	2.789.158.324,00	100,00%	0,742199999999							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		40 Orang/bulan		0,00%		0,69079999999999997		0,00%								
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		922.000,00	500,00%	461.000,00	500,00%	461.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		500,00%		500,00%		100,00%								
		14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		800.000,00	62500,00%	500.000,00	62500,00%	0	100,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		62500,00%		62500,00%		100,00%								
		15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		100.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		600.000,00	500,00%	300.000,00	500,00%	300.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		500,00%		500,00%		100,00%								
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		400.000,00	500,00%	200.000,00	500,00%	200.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		500,00%		500,00%		100,00%								
		18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		400.000,00	500,00%	200.000,00	500,00%	0	100,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		500,00%		500,00%		100,00%								
		19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		800.000,00	500,00%	400.000,00	500,00%	200.000,00	100,00%	500,00%							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		500,00%		500,00%		100,00%								
		20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		400.000,00	500,00%	200.000,00	500,00%	0	100,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		500,00%		500,00%		100,00%								
		21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		400.000,00	500,00%	200.000,00	500,00%	200.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		500,00%		500,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		22 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		1.600.000,00	500,00%	800.000,00	500,00%	800.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		500,00%		500,00%		100,00%								

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		5.393.000,00	100,00%	5.393.000,00	100,00%	5.167.000,00	100,00%	0,958100000000								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		69.991.005,00	0,610200000000000008	42.710.000,00	0,610200000000000008	24.802.775,00	100,00%	0,580699999999								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		7 Paket		0,610200000000000008		0,610200000000000008		100,00%									
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		27.894.625,00	0,548499999999999999	15.300.000,00	0,548499999999999999	14.392.900,00	100,00%	0,940699999999								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		8 Paket		0,548499999999999999		0,548499999999999999		100,00%									
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		19.128.750,00	62100,00%	11.878.750,00	62100,00%	9.502.500,00	100,00%	0,800000000000								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		62100,00%		62100,00%		100,00%									
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		44.320.000,00	0,411100000000000002	18.220.000,00	0,411100000000000002	11.436.000,00	100,00%	0,627700000000								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		25 Laporan		0,411100000000000002		0,411100000000000002		100,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		29	Pengadaan Mebel				0		0		12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		48 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		43.991.100,00	100,00%	43.991.100,00	100,00%	43.991.100,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		126 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		3.180.000,00	0,93239999999999999	2.965.000,00	0,93239999999999999	2.920.000,00	100,00%	0,984800000000								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		0,93239999999999999		0,00%									
		32	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		77.880.000,00	0,607099999999999997	44.740.000,00	0,607099999999999997	43.840.097,00	100,00%	0,979899999999								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		0,607099999999999997		0,00%									
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		607.734.500,00	0,46389999999999998	281.902.500,00	0,46389999999999998	254.839.500,00	100,00%	0,904000000000								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		0,46389999999999998		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		145.849.000,00	0,443500000000000001	61.179.500,00	0,443500000000000001	38.188.500,00	100,00%	0,624199999999								
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		7 Unit		0,00%		0,443500000000000001		0,00%									
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		31.425.000,00	454600,00%	14.285.000,00	454600,00%	11.290.000,00	100,00%	790300,00%								
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		7 Unit		0,00%		454600,00%		0,00%									
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		116.404.321,00	100,00%	116.404.321,00	100,00%	115.811.000,00	100,00%	0,994899999999								
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		10500,00%		0,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**0,861099999999**	**0,657699999999**							
										Predikat kinerja						**Tinggi**	**Sedang**							

	Meningkatknya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,50 Poin**	**0**	**83,25 Poin**	**0**	**83,25 Poin**	**0**	**83.25 Poin**	**0**	**83,50 Poin**	**26.623.300,00**	**100%**	**0,00%**							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																						
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		25.800.000,00	500,00%	12.900.000,00	500,00%	12.500.000,00	100,00%	0,969000000000							
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		0,00%		0,51000000000000001		0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0		0		82.800.000,00	6000000000000000,00%	500.000,00	6000000000000000,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		6000000000000000,00%		0,00%								
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		27.780.950,00	0,48170000000000002	13.382.250,00	0,48170000000000002	13.623.300,00	100,00%	101800,00%							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		0,48170000000000002		0,00%								
															Rata-rata capaian kinerja								
															Predikat kinerja								
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**3.018.255.296 Rupiah**	**0**	**1.774.711.000 Rupiah**	**0**	**2.148.334.503 Rupiah**	**0**	**1.169.611.167 Rupiah**	**0**	**1.679.552.000 Rupiah**	**840.360.440,00**	**##########**	**0,00%**							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																						
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		82.426.200,00	0,30430000000000001	23.641.200,00	0,30430000000000001	21.536.500,00	100,00%	0,910999999999							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		0,00%		0,30430000000000001		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																						
		2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		74.043.604,00	100,00%	74.043.604,00	100,00%	72.077.050,00	100,00%	0,973400000000							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		14 Lembaga Masyarakat		0,00%		100,00%		0,00%								
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak				0		0		713.816.276,00	0,14550000000000002	67.488.548,00	0,15359999999999999	7.923.900,00	##########	117400,00%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 unit		0 unit		8 unit		0,00%		0,15359999999999999		0,00%								
		4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru				0		0		451.350.000,00	108500,00%	48.800.000,00	125000000000000000,00%	5.120.000,00	115200,00%	0,104900000000							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		10 unit		0,00%		125000000000000000,00%		0,00%								
		5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo				0		0		528.825.593,00	0,38979999999999998	197.901.000,00	325000000000000000,00%	9.225.000,00	##########	##########							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		9 unit		0,00%		325000000000000000,00%		0,00%								
		6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener				0		0		476.000.000,00	0,22120000000000001	41.660.400,00	147,00%	7.020.000,00	##########	0,168500000000							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 paket		0 paket		7 paket		0,00%		147,00%		0,00%								
		7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener				0		0		254.629.750,00	0,51119999999999999	122.730.750,00	0,51119999999999999	130.110.750,00	100,00%	1060100,00%							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		23 Pokmas / Ormas		0,00%		0,51119999999999999		0,00%								
		8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo				0		0		412.946.000,00	0,41600000000000004	160.095.000,00	0,38939999999999997	139.430.000,00	0,936100000000	0,870900000000							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		148 Pokmas/Ormas		0,00%		0,38939999999999997		0,00%								
		9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru				0		0		546.863.000,00	0,35820000000000002	197.722.000,00	0,31159999999999999	163.522.000,00	0,869899999999	0,827000000000							
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas / ormas		0 pokmas / ormas		19 pokmas / ormas		0,00%		0,30730000000000002		0,00%								
		10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak				0		0		323.416.000,00	0,41799999999999998	136.170.000,00	0,42249999999999999	137.476.880,00	##########	##########							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		21 pokmas		0,00%		0,42249999999999999		0,00%								
		11 Evaluasi Kelurahan				0		0		12.857.120,00	0,76519999999999999	9.838.560,00	0,76519999999999999	6.088.560,00	100,00%	0,618800000000							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,76519999999999999		0,00%								

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																							
		12	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		46.177.000,00	0,63619999999999999	29.380.500,00	0,63619999999999999	28.963.000,00	100,00%	0,985800000000							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		14 Lembaga Masyarakat		0,00%		0,63619999999999999		0,00%								
		13	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		127.208.600,00	0,36810000000000004	46.816.800,00	365400,00%	44.716.800,00	0,992699999999	0,955100000000							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Kegiatan		0 Kegiatan		9 Kegiatan		0,00%		365400,00%		0,00%								
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																							
		14	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		10.320.000,00	100,00%	10.320.000,00	100,00%	10.320.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		0,00%		100,00%		0,00%								
		15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		17.825.000,00	0,64790000000000003	11.550.000,00	0,64790000000000003	11.550.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		50 keluarga		0,00%		0,64790000000000003		0,00%								
		16	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0		0		36.700.000,00	0,71230000000000004	26.150.000,00	0,71230000000000004	24.680.000,00	100,00%	0,943799999999							
				Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan seat		0 keluarga		0 keluarga		650 keluarga		0,00%		0,71230000000000004		0,00%								
		17	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0		0		41.675.000,00	0,52079999999999993	21.200.000,00	0,52079999999999993	20.600.000,00	100,00%	0,971700000000							
				Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya		0 Keluarga		0 Keluarga		200 Keluarga		0,00%		0,52079999999999993		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**0,831200000000**	**0,739099999999**							
										Predikat kinerja						**Tinggi**	**Sedang**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo =Jumlah Pelanggaran Perda**	**70,00 Pelanggaran**	**0**	**124,00 Pelanggaran**	**0**	**100,00 Pelanggaran**	**0**	**50 Pelanggaran Pelanggaran**	**0**	**41 Pelanggaran Pelanggaran**	**22.984.100,00**	**###############**	**0,00%**					**Jawatan Keamanan**		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																							
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		40.384.100,00	0,56909999999999994	22.984.100,00	0,56909999999999994	22.984.100,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		0,56909999999999994		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Tegalrejo) x 100%**	**100,00%**	**0**	**-**	**0**	**100,00%**	**0**	**100 % %**	**0**	**100 % %**	**26.635.000,00**	**100%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																					
		1 FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0		0		13.015.000,00	0,51129999999999998	6.655.000,00	0,51129999999999998	6.655.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		40 orang		0,00%		0,51129999999999998		0,00%							
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		70.872.000,00	0,28610000000000002	20.280.000,00	0,28610000000000002	19.980.000,00	100,00%	0,985199999999						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,28610000000000002		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**0,992600000000**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program		**0**		**0**	**4.303.707.536,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**0,852199999999**	**0%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Tinggi**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sinergitas antara tokoh masyarakat, forkompintren, dan pegawai kelurahan serta kemantren sudah berjalan dengan baik 2. Kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan 3. Tersedianya SDM yang sehat, sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih adanya kegiatan yang mundur , belum sesuai dengan tatakala atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya 2. Pegawai ASN yang ada di Kemantren Tegalrejo sebagian besar sudah mendekati BUP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Monitoring evaluasi untuk mengawal pelaksaan kegiatan sesuai tatakala dan target. 2. Menyampaikan pemetaan kondisi pegawai kepada BKPSDM.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan kaderisasi transfer pengetahuan terkait pelaksanaan kegiatan kepada SDM yang lebih muda.

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

KEMANTREN TEGALREJO

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si.

NIP. 196908021989031003

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

1. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton**
2. **Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.**

Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat. Dengan Indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dan pada Tahun 2023 ini targetnya adalah 364,hasil review menjadi 388

Program dan Kegiatan

Kemantren Tegalrejo pada Tahun 2023 memiliki 6 (empat) Program dan 17 kegiatan:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan = 1 kegiatan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = 8 kegiatan;

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik = 2 kegiatan;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan = 4 kegiatan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum = 1 kegiatan;
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum = 1 kegiatan;

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 Kemantren Tegalrejo Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang diampu Jawatan Sosial tidak merubah apapun, karena perubahan rincian kedalaman sudah dilakukan pada saat pergeseran anggaran ke II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kemantren Tegalrejo yang diampu oleh Mantri Anom menambah beberapa sub ouput diantaranya pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menambah satu kali rapat. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menambah anggaran gaji dan TPP. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor menambah belanja ATK, pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga menambah perabot rumah tangga, pada sub Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan menambah belanja penggandaan dan cetak, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD menambah anggaran rapat. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub Pengadaan Mebel menambah meja rapat, rak besi, kursi kerja putar, sofa, kursi lipat, podium, almari dan pada sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya menambah LCD Proyektor, AC Split, Dispenser, Soundsystem, Printer, kipas angina, wireless, computer, laptop, pompa air. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik menambah anggaran belanja listrik dan penambahan daya. Pada sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor menambah jasa pelayanan kearsipan dan jasa keamanan. Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengurangi BBM, biaya pemeliharaan, mengurangi pemeliharaan KTB an roda 3. Pada sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya menambah belanja pemeliharaan computer. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya menambah belanja pemeliharaan gedung kantor.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada pengurangan maupun penambahan. Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diampu oleh Jawatan Umum sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangTerkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha tidak adan penambahan dan pengurangan,Sub Kegiatan Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan menambah anggaran jamuan makan minum.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan yang diampu oleh Jawatan Sosial tidak ada pengurangan maupun penambahan. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahanyang diampu oleh Jawatan Praja pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah mengurangi anggaran yang tidak terserap, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan mengurangi anggaran yang tidak terserapKegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan menambah kegiatan lomba bank sampah dan pemeliharaan TPU Utaralaya Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat diampu oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada penambahan dan pengurangan,Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada

penambahan dan pengurangan,Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada penambahan dan pengurangan, Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran tidak ada penambahan dan pengurangan, Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang diampu oleh jawatan Keamanan menambah kegiatan fasilitasi FKTB

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Jawatan Keamanan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan eraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sub dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ada menambah anggaran operasi penertiban alat peraga kampanye.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Jawatan Keamanan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kemantren Tegalrejo) ada pengirangan anggaran fasilitasi FPK, pada sub Pelaksanaan Tugas Forum K Pimpinan di Koordinasi kecamatan (Kemantren Tegalrejo) yang diampu oleh Jawatan Praja tidak ada pengurangan maupun penambahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan diempat kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) tidak ada perubahan

Pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di empat Kelurahan ada pergeseran rekening belanja dari yang semula belanja modal beralih ke belanja Hibah disesuaikan dengan proposal dan telaah yang telah diajukan.

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											100,000,000	100,000,000					0
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											100,000,000	100,000,000					0
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya											100,000,000	100,000,000					0
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja		Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo			1 event	1 event			100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY				0
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											7,779,248,725	8,423,016,460					7,097,719,526
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,069,364,151	7,619,033,580					6,213,721,750
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											16,247,000	16,847,000					16,942,750
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen			1,846,000	1,846,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	3,535,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen			1,122,000	1,122,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	3,030,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			550,000	550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			1,600,000	1,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Laporan	7 Laporan			8,829,000	8,829,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	10,377,750
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan			1,500,000	2,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,842,575,850	5,889,940,850					5,659,181,500
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	40 Orang/bula	n40 Orang/bula	n		5,839,653,850	5,887,018,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	5,656,000,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen			100,000	100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	252,500
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	i	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen			250,000	250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	404,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen			250,000	250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	404,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan			500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	606,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen			922,000	922,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	303,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulana Semesteran SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	uangan n/ an Laporan nan Laporan /Semesteran	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan			800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	1,010,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			100,000	100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	202,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											3,000,000	3,000,000					0
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan			400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan			800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan			400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen			400,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,600,000	1,600,000					0
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen			1,600,000	1,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											167,177,380	176,658,380					170,437,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Unit	5 Unit			5,393,000	5,393,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	10,100,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Paket	7 Paket			69,991,005	72,172,005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	85,850,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Paket	8 Paket			27,894,625	31,487,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket			19,128,750	21,036,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	23,735,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen			450,000	450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	25 Laporan	25 Laporan			44,320,000	46,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	50,752,500
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											56,291,100	296,369,150					0
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	48 Unit	71 Unit			12,300,000	70,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	126 Unit	27 Unit			43,991,100	225,769,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											688,794,500	741,362,500					84,360,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan			3,180,000	3,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	6,480,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan			77,880,000	96,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	77,880,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Laporan	6 Laporan			607,734,500	641,294,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											293,678,321	493,255,700					282,800,000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Unit	7 Unit	0 -	0 -	145,849,000	108,779,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	90,900,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Unit	7 Unit	0 -	0 -	31,425,000	33,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	40,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabi	ntor nya litasi	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Unit	5 Unit	0 -	0 -	116,404,321	350,951,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	151,500,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											136,380,950	136,518,950					228,820,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											25,800,000	25,800,000					92,920,000
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	82,5 poin	83,25 poin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	25,800,000	25,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	83,25 poin	92,920,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											110,580,950	110,718,950					135,900,000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	82,5 poin	83,25 poin	4 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	82,800,000	82,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	83,25 poin	89,900,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	82,5 poin	83,25 poin	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	27,780,950	27,918,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	83,25 poin	46,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											449,232,524	521,456,830					493,708,951
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											82,426,200	82,426,200					85,700,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasipemberd masyarakat	Kota Yogyakarta, aTyeagaanlrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R7upLiaaphoran	7 Laporan	100 %	100 %	82,426,200	82,426,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia8h5,700,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											86,900,724	81,584,170					95,050,850

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	74,043,604	72,077,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia6h1,918,585
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R1upLiaaphoran	1 Laporan	100 %	100 %	12,857,120	9,507,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia3h3,132,264
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											173,385,600	245,856,460					169,624,602
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga ke masyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	46,177,000	53,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia6h3,170,602
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga ke masyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R9upKieaghiatan	9 Kegiatan	100 %	100 %	127,208,600	192,381,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup1ia0h6,454,000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											106,520,000	111,590,000					143,333,500
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananyapemb dankesejahteraan keluargatingkat kec dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R1upKieaghiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	10,320,000	10,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia2h3,230,000
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananyapemb dankesejahteraan keluargatingkat kec dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R6u5p0iaKheluarga	650 Keluarga	100 %	100 %	36,700,000	36,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia4h2,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananyapembdankesejahteraan keluargatingkat kec dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R2u0p0iaKheluarga	200 Keluarga	100 %	100 %	41,675,000	41,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia5h5,433,500
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananyapembdankesejahteraan keluargatingkat kec dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R5u0piKaehluarga	50 Keluarga	100 %	100 %	17,825,000	22,895,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rupia2h2,070,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											40,384,100	66,470,100					73,250,232
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											40,384,100	66,470,100					73,250,232
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranyak denganperangkat d dan/atauKepolisian RIterkait penerapan	oordiinasi/sinerg Tegalrejo, danpenegakan	i 100 pelanggar	a1n00 pelanggar	a3nLaporan	3 Laporan	100 %	100 %	40,384,100	66,470,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	100 pelanggar	an 73,250,232
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											83,887,000	79,537,000					88,218,593
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											83,887,000	79,537,000					88,218,593
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	TerlaksananyaPeny UrusanPemerintaha Umumsesuai Penug KepalaDaerah	elYogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Orang	40 Orang	100 %	100 %	13,015,000	12,415,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	21,310,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	TerlaksananyaPeny UrusanPemerintaha Umumsesuai Penug KepalaDaerah	elYogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	70,872,000	67,122,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	66,908,593
TOTAL																7,879,248,725	8,523,016,460					7,097,719,526

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kricak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											1,037,232,276	1,074,293,629					1,296,361,065
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											1,037,232,276	1,074,293,629					1,296,361,065
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											1,037,232,276	1,074,293,629					1,296,361,065
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R8upUianhit	8 Unit	100 %	100 %	713,816,276	750,877,629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup9ia7h6,748,041
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R21 Pokmas /	21 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	323,416,000	323,416,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup3ia1h9,613,024
TOTAL																1,037,232,276	1,074,293,629					1,296,361,065

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Karangwaru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											998,213,000	982,979,400					1,020,343,544
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											998,213,000	982,979,400					1,020,343,544
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											998,213,000	982,979,400					1,020,343,544
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R1u0piuanhit	10 unit	100 %	100 %	451,350,000	436,516,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup4ia5h5,728,027
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R19 Pokmas /	19 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	546,863,000	546,463,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup5ia6h4,615,517
TOTAL																998,213,000	982,979,400					1,020,343,544

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											941,771,593	1,072,748,719					993,819,770
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											941,771,593	1,072,748,719					993,819,770
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											941,771,593	1,072,748,719					993,819,770
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R9upUianhit	9 Unit	100 %	100 %	528,825,593	659,802,719	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup6ia2h1,639,717
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R148 Pokmas	148 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	412,946,000	412,946,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup3ia7h2,180,053
TOTAL																941,771,593	1,072,748,719					993,819,770

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Bener

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											730,629,750	726,304,750					759,788,793
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											730,629,750	726,304,750					759,788,793
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											730,629,750	726,304,750					759,788,793
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R7upPiaakhet	7 Paket	100 %	100 %	476,000,000	462,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup5ia0h8,785,480
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	2.148.334.503	R2u.p1i4a8h.334.503	R23 Pokmas /	23 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	254,629,750	263,544,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	2.148.334.503	Rup2ia5h1,003,313
TOTAL																730,629,750	726,304,750					759,788,793

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dalam kewenangannya.
3. Kegiatan non fisik di empat kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat
4. Perencanaan anggaran telah dibuat sebaik mungkin dengan memperhitungkan beberapa hal namun ada kalanya masih ada kekurangan anggaran dikarenakan keadaan yang tak terduga datau kebutuhan mendadak.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tegalrejo Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Tegalrejo Tahun 2023

Yogyakarta,

Mantri Pamong Praja
Kemantren Tegalrejo



Drs. Antariksa Agus Purnama ,M.Si
NIP.19690802 198903 1 003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen prencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksananaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen prencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka ditetapkanlah Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan ini berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan perubahan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Kemantren Gondokusuman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kemantren Gondokusuman Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman adalah

a. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman;
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran;
c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUPBAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kemantren Gondokusuman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD Kemantren Gondokusuman serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Hasil evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Target	Realisasi sd. TW 2	%
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuan meningkat	398,5	399	100,13
Indikator Program:			
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82	-	-
Angka Swadaya Murni	Rp 2.728.767.000	Rp 1.293.715.006	135,46
Jumlah Pelanggaran Perda	251 pelanggaran	174 pelanggaran	72,05

Hasil capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran OPD	Target				Realisasi			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuan meningkat	398,5	399,5	400	400,5	399	-	-	-

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2023 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan tahun 2023 ter diri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan

target anggaran Rp. 100.000.00,00 pada triwulan II belum ada realisasi anggaran untuk kegiatan maupun sub kegiatan karena kegiatan rencana akan dilaksanakan pada triwulan III.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 terdiri dari 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan (tidak termasuk gaji dan tunjangan ASN) dengan target anggaran sebesar Rp 5.417.309.391,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 3.997.091.391,00 atau 73,78% hal ini karena belanja pada beberapa sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan sebagian besar kegiatan sudah terlaksana namun masih dalam proses SPJ.

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2023 terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 26.940.000,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 26.940.000,00 atau 100%.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2023 terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 1.740.160.272,00 pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.527.761.124,00 atau 87,79% hal ini terjadi karena adanya beberapa anggaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dan akan di hapus di perubahan. Kegiatan sarpras ditunda untuk pelaksanaanya, akan di realisasikan pada TW IV dan juga beberapa kegiatan masih dalam proses pembuatan SPJ.

e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2023 terdiri 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 61.130.000,00 dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 54.380.000,00 atau 88,96 % hal ini terjadi karena kegiatan yang sudah terlaksana masih dalam proses SPJ.

f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2023 terdiri 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 22.555.000,00 dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 19.225.000,00

atau 85,24 % hal ini terjadi karena kegiatan yang sudah terlaksana masih dalam proses SPJ dan ada juga kegiatan yang mundur dalam pelaksanaannya.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	398,5
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	85,25

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**	**100,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 %**	**100.000.000,00**	**- %**	**0,00**	**- %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								**100.000.000,00**		**0,00**		**0,00**		**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**8.312.336.962,00**	**A nilai**	**5.417.309.391,00**	**A nilai**	**3.997.091.391,00**	**100%**	**73,78%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**11.639.000,00**		**5.729.000,00**		**4.895.250,00**		**85.45%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		576.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		768.000,00	100,00%	768.000,00	100,00%	198.000,00	100,00%	25,78%						
			Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		768.000,00	45,00%	280.500,00	45,00%	198.000,00	100,00%	70,59%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		395.500,00	35,00%	122.500,00	35,00%	121.250,00	100,00%	98,98%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		395.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.556.000,00	48,43%	4.000.000,00	46,75%	3.820.000,00	96,53%	95,50%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		46,75%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**6.599.671.300,00**		**4.483.764.656,00**		**3.327.824.771,00**		**74.22%**						
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		6.597.331.300,00	70,00%	4.482.864.656,00	70,00%	3.327.104.771,00	100,00%	74,22%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		48 Orang		70,00%		70,00%		100,00%							

		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.080.000,00	44,00%	450.000,00	44,00%	450.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		44,00%		44,00%		100,00%								
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		360.000,00	25,00%	90.000,00	25,00%	90.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%								
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		360.000,00	50,00%	180.000,00	50,00%	180.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		180.000,00	100,00%	180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**3.120.000,00**		**1.560.000,00**		**780.000,00**		**50%**							
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,00%		0,00%		0,00%								
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**3.425.000,00**		**1.825.000,00**		**375.000,00**		**20.55%**							
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		3.425.000,00	53,00%	1.825.000,00	53,00%	375.000,00	100,00%	20,55%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		53,00%		53,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**215.830.462,00**		**96.461.650,00**		**63.785.900,00**		**66.13%**							
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		11.240.000,00	43,00%	4.620.000,00	43,00%	1.100.000,00	100,00%	23,81%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		3 paket		0,00%		43,00%		0,00%								
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		66.083.362,00	50,00%	32.710.950,00	50,00%	21.922.900,00	100,00%	67,02%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		43 paket		0,00%		48,00%		0,00%								
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		27.392.100,00	35,00%	9.130.700,00	35,00%	3.516.500,00	100,00%	38,51%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		16 paket		0,00%		35,00%		0,00%								
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		75.405.000,00	47,00%	35.000.000,00	47,00%	25.956.500,00	100,00%	74,16%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		0,00%		47,00%		0,00%								
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		35.710.000,00	43,00%	15.000.000,00	43,00%	11.290.000,00	100,00%	75,27%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		0 kali		0 kali		48 kali		0,00%		43,00%		0,00%								

				SKPD																				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**122.280.000,00**		**122.280.000,00**		**120.000.000,00**		**98.14%**							
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		122.280.000,00	100,00%	122.280.000,00	100,00%	120.000.000,00	100,00%	98,14%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		8 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.006.844.200,00**		**445.989.085,00**		**420.590.046,00**		**94.31%**							
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.500.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%	750.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		47,00%		0,00%								
		29	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		168.000.000,00	51,00%	84.000.000,00	51,00%	69.900.961,00	100,00%	83,22%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		51,00%		0,00%								
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		837.344.200,00	44,00%	361.239.085,00	44,00%	349.939.085,00	100,00%	96,87%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		49,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**349.527.000,00**		**259.700.000,00**		**58.840.424,00**		**22.66%**							
		31	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		21.400.000,00	44,00%	8.900.000,00	44,00%	7.950.080,00	100,00%	89,33%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		46,00%		0,00%								
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		96.427.000,00	33,00%	31.000.000,00	33,00%	23.177.546,00	100,00%	74,77%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		40 unit		0,00%		35,00%		0,00%								
		33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		32.300.000,00	63,00%	20.400.000,00	63,00%	18.415.000,00	100,00%	90,27%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		64 unit		0,00%		63,00%		0,00%								
		34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		199.400.000,00	100,00%	199.400.000,00	100,00%	9.297.798,00	100,00%	4,66%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja							**93,44%**	**67,79%**						
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**82,50 poin**	**0,00**	**82,3 poin**	**0,00**	**82,5 poin**	**58.812.000,00**	**82,5 poin**	**26.940.000,00**	**82,3 poin**	**26.940.000,00**	**99%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**26.700.000,00**		**13.350.000,00**		**13.350.000,00**		**100%**							
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		26.700.000,00	55,00%	13.350.000,00	55,00%	13.350.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**32.112.000,00**		**13.590.000,00**		**13.590.000,00**		**100%**							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		32.112.000,00	44,74%	13.590.000,00	44,74%	13.590.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		44,74%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**						
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**2.728.767.000 rupiah**	**0,00**	**6.598.194.000 rupiah**	**0,00**	**2.728.767.000 rupiah**	**5.179.619.772,00**	**955.068.450 rupiah**	**1.740.160.272,00**	**1.293.715.006 rupiah**	**1.527.761.124,00**	**135%**	**87,79%**					**Mantri Pamong Praja**	

| | | |

		18	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		11.050.000,00	4,75%	500.000,00	4,75%	500.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga		0 keluarga		140 keluarga		0,00%		4,75%		0,00%						
		19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		36.675.000,00	45,89%	15.350.000,00	45,89%	15.350.000,00	100,00%	100,00%						
				JUMLAH KELUARGA YANG MENGIKUTI PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM		0 KELUARGA		0 KELUARGA		36 KELUARGA		0,00%		45,89%		0,00%						
		20	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		0,00		2.450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 keluarga		0 keluarga		25 keluarga		0,00%		0,00%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja							**95,75%**	**86,37%**					
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman=Jumlah Pelanggaran Perda**	**250,00 pelanggaran**	**0,00**	**261,00 pelanggaran**	**0,00**	**250,00 pelanggaran**	**158.264.000,00**	**125 pelanggaran**	**61.130.000,00**	**136 pelanggaran**	**54.380.000,00**	**91%**	**88,96%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**158.264.000,00**		**61.130.000,00**		**54.380.000,00**		**88.96%**						
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		158.264.000,00	57,98%	61.130.000,00	57,17%	54.380.000,00	98,60%	88,96%						
				jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 LAPORAN		0 LAPORAN		11 LAPORAN		0,00%		57,17%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja							**98,60%**	**88,96%**					
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondokusuman)x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 %**	**59.772.000,00**	**100% %**	**22.555.000,00**	**100% %**	**19.225.000,00**	**100%**	**85,24%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									**59.772.000,00**		**22.555.000,00**		**19.225.000,00**		**85.24%**						
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		8.400.000,00	57,50%	4.200.000,00	57,50%	1.200.000,00	100,00%	28,57%						
				JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 ORANG		0 ORANG		30 ORANG		0,00%		57,50%		0,00%						
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		51.372.000,00	37,73%	18.355.000,00	35,00%	18.025.000,00	92,76%	98,20%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		10 dokumen		37,73%		35,00%		92,76%						
										Rata-rata capaian kinerja							**96,38%**	**63,39%**					
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Rendah**					
										Total anggaran dari seluruh program		**13.868.804.734,00**		**7.268.094.663,00**		**5.625.397.515,00**							

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**94,68%**	**77,40%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya koordinasi rutin dan komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala. 2. Adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. 3. Tingginya angka swadaya masyarakat
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Tidak semua RT & RW mampu mengoprasikan akun JSS. 2. Adanya rangkap jabatan karena keterbatasan SDM. 3. Adanya pelanggaran sampah visual yang berulang.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Sudah dilakukan pendampingan untul mengoprasikan JSS. 2. Melaksanakan operasi ketertiban secara rutin.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelanggaran sampah visual.

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kemantren Gondokusuman sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian secara strategis. Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kemantren Gondokusuman sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta program dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan, tujuan dan sasaran rencana kerja Kemantren Gondokusuman tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman

Sasaran :

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat

Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gondokusuman

Kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
c. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan 2 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan tidak mengalami perubahan anggaran. Anggaran untuk program ini tetap Rp. 100.000.000,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 1.715.005.662,00 menjadi Rp 2.038.18.450,00 (tidak termasuk gaji dan tunjangan). Perubahan ini terjadi karena ada penyesuaian belanja pada kegiatan administrasi umum, adanya perubahan pada sub keg pengadaan barang mebel dan peralatan dan mesin lainnya. Selain itu ada tambahan belanja pemeliharaan pada subkeg pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak mengalami perubahan anggaran baik pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dengan anggaran Rp 26.700.000,00 dan Sarana Pelayanan Umum maupun pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran Rp 32.112.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 5.179.619.772,00 menjadi Rp 4.947.488.510,00 dimana terdapat pengurangan anggaran di beberapa sub kegiatan diantaranya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang mengurangi belanja pemeliharaan mesin Chansaw, Kelurahan Demangan yang melakukan penyesuain anggaran jasa konsultasi perencanaan dan pengawas dan juga untuk pembuatan rambu-rambu tdiak jadi dilaksanakan karena itu merupakan kewenagan dari Dinas Perhubungan, Kelurahan Klitren meghapus anggaran untuk pengersan jalan karena sudah dilaksanakan oleh DPUPKP dan juga mengurangi anggaran pada kegiatn penataan kawasantman karena untuk PJU dan pergolanya bukan merupakan wewenang dari kelurahan, dan untuk Kelurahan Baciro ada beberapa anggaran yang dihapus yaitu anggaran untuk belanja running text, pemeliharaan taman, pembuatan taman vertikal dan pembuatan pergola.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami perubahan anggaran, dari semula Rp 158.264.000,00 menjadi Rp 188.970.000,00. Perubahan anggaran sebesar Rp 7.500.000,00 ini digunakan untuk Fasilitasi Monev dan Penindakan Tim untuk Pemilu dan juga penambahan anggaran sebesar RP 23.206.000, 00 untuk Peningkatan Kapasitas Linmas.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tidak mengalami perubahan anggaran, yaitu tetap sebesar Rp 59.772.000,00 untuk dua sub kegiatan yang ada di program ini yaitu sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebesar Rp 8.400.000,00 dan juga sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebesar Rp 51.372.000,00

Untuk lebih jelasnya rincian perubahan renja dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	-	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 -	0 -	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	0
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**8,927,202,234**	**9,511,426,022**					**8,518,434,791**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8,312,336,962**	**8,871,644,750**					**7,828,748,265**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**11,639,000**	**10,169,000**					**11,566,420**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	576,000	576,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	540,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	768,000	198,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,042,840
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	768,000	198,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	822,840
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	395,500	320,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	560,370

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	395,500	320,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	340,370
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	5 dokumen	5 dokumen	8,556,000	8,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	8,080,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	5 dokumen	5 dokumen	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6,599,671,300**	**6,835,803,300**					**6,357,979,440**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	12 laporan	12 laporan	6,597,331,300	6,833,463,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	6,355,339,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	1,080,000	1,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,323,600
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	360,000	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	360,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	360,000	360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	360,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	236,840
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	180,000	180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	180,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**3,120,000**	**3,120,000**					**3,420,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	520,000	520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	570,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3,425,000**	**3,425,000**					**487,200**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	12 laporan	12 laporan	3,425,000	3,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	487,200
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**215,830,462**	**137,873,250**					**303,261,205**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	12 laporan	12 laporan	11,240,000	5,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	11,768,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	43 Paket	31 Paket	12 laporan	12 laporan	66,083,362	34,461,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	80,674,155
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	16 Paket	13 Paket	12 laporan	12 laporan	27,392,100	13,302,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	48,542,050
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	12 laporan	12 laporan	75,405,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	96,700,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	48 Laporan	44 Laporan	12 laporan	12 laporan	35,710,000	24,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	65,577,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**122,280,000**	**346,400,000**					**48,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai		111 Unit	8 unit	8 unit	0	136,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	8 Unit	19 Unit	8 unit	8 unit	122,280,000	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	48,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,006,844,200**	**1,006,844,200**					**992,184,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	1,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	168,000,000	168,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	168,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	837,344,200	837,344,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	822,684,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**349,527,000**	**528,010,000**					**111,850,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	98 unit	98 unit	21,400,000	21,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	19,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	40 Unit	40 Unit	98 unit	98 unit	96,427,000	65,142,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	54,250,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	A Nilai	A Nilai	64 Unit	64 Unit	98 unit	98 unit	32,300,000	32,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	38,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	2 Unit	3 Unit	98 unit	98 unit	199,400,000	409,168,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai	600,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**58,812,000**	**58,812,000**					**59,681,132**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**26,700,000**	**26,700,000**					**29,900,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	82,5 poin	82,5 poin	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	26,700,000	26,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	82,5 poin	29,900,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**32,112,000**	**32,112,000**					**29,781,132**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	82,5 poin	82,5 poin	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	32,112,000	32,112,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	82,5 poin	29,781,132
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**338,017,272**	**332,227,272**					**438,520,462**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**147,060,000**	**151,305,000**					**197,159,462**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	12 Laporan	12 Laporan	12 lembaga	12 lembaga	147,060,000	151,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	147,159,462
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**54,172,272**	**57,237,272**					**115,000,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	2.728.767.000	2.728.767.000	20 Lembaga masyarakat	20 Lembaga masyarakat	5 Kelurahan	5 Kelurahan	48,354,772	53,419,772	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	58,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	2.728.767.000	2.728.767.000	6 Laporan	6 Laporan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5,817,500	3,817,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	57,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**40,243,000**	**40,243,000**					**49,581,000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	2 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	1 Kecamatan	1 Kecamatan	32,393,000	32,393,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	21,981,000
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	8 Laporan	8 Laporan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	7,850,000	7,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	27,600,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**96,542,000**	**83,442,000**					**76,780,000**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	120 Keluarga	120 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	26,767,000	26,767,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah	27,150,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	50 Keluarga	50 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	19,600,000	19,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	24,000,000
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	25 Keluarga	25 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	2,450,000	2,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	3,000,000
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	140 Keluarga	140 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	11,050,000	11,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	6,000,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	36 Keluarga	36 Keluarga	6 lokasi	6 lokasi	36,675,000	23,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	16,630,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**158,264,000**	**188,970,000**					**160,484,932**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**158,264,000**	**188,970,000**					**160,484,932**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	250 pelanggaran	250 pelanggaran	11 Laporan	11 Laporan	44 kali	44 kali	158,264,000	188,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	250 pelanggaran	160,484,932
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**59,772,000**	**59,772,000**					**31,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**59,772,000**	**59,772,000**					**31,000,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	10 kali	10 kali	8,400,000	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	10,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	10 kali	10 kali	51,372,000	51,372,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	21,000,000
															TOTAL	**9,027,202,234**	**9,611,426,022**					**8,518,434,791**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**916,631,000**	**916,011,000**					**1,041,441,560**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**916,631,000**	**916,011,000**					**1,041,441,560**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**916,631,000**	**916,011,000**					**1,041,441,560**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Demangan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	75 Unit	75 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	491,310,000	449,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	501,056,868
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Demangan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	2.728.767.000	2.728.767.000	264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	425,321,000	466,651,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	440,384,692
															TOTAL	**916,631,000**	**916,011,000**					**1,041,441,560**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kotabaru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**571,427,000**	**629,993,000**					**752,316,716**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**571,427,000**	**629,993,000**					**752,316,716**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**571,427,000**	**629,993,000**					**752,316,716**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Kotabaru	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	54 Unit	54 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	285,816,000	322,972,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	328,700,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Kotabaru	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	111 Pokmas / Ormas	112 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	285,611,000	307,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	423,616,716
															TOTAL	**571,427,000**	**629,993,000**					**752,316,716**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Klitren

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**953,981,500**	**808,847,250**					**1,208,833,972**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**953,981,500**	**808,847,250**					**1,208,833,972**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**953,981,500**	**808,847,250**					**1,208,833,972**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Klitren	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	73 Unit	73 Unit	1 kelurahan	1 kelurahan	404,450,500	265,826,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	497,070,216
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Klitren	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	1 kelurahan	549,531,000	543,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah	711,763,756
															TOTAL	**953,981,500**	**808,847,250**					**1,208,833,972**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Baciro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,387,434,000**	**1,248,280,988**					**1,463,895,132**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,387,434,000**	**1,248,280,988**					**1,463,895,132**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,387,434,000**	**1,248,280,988**					**1,463,895,132**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan baciro	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	2.728.767.000	2.728.767.000	200 Unit	200 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	681,285,000	523,921,988	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah 574,150,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan baciro	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	2.728.767.000	2.728.767.000	224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	706,149,000	724,359,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah 739,745,132
																TOTAL	**1,387,434,000**	**1,248,280,988**				**1,463,895,132**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Terban

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,012,129,000**	**1,012,129,000**					**1,105,887,040**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,012,129,000**	**1,012,129,000**					**1,105,887,040**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,012,129,000**	**1,012,129,000**					**1,105,887,040**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terban	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	2.728.767.000	2.728.767.000	71 Unit	71 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	423,537,000	423,537,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah 507,729,268
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terban	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	2.728.767.000	2.728.767.000	347 Pokmas / Ormas	347 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	588,592,000	588,592,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000	Rupiah 598,157,772
															TOTAL	**1,012,129,000**	**1,012,129,000**					**1,105,887,040**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Gondokusuman tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Gondokusuman disusun untuk memenuhi anggaran kegiatan yang sangat dibutuhkan agar mencapai sasaran yang diharapkan.

Yogyakarta, Juni 2023
MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP.19750710 199501 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

KEMANTREN DANUREJAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I I-3

PENDAHULUAN I-3

1.1 Latar Belakang I-3

1.2 Landasan Hukum I-4

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II II-7

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2O23..... II-7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kemantren Danurejan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-18

BAB III III-22

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD III-22

BAB IV..... IV-36

PENUTUP IV-36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaanpartisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)

RKPD dapat diubah apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD juga harus diubah. seperti hal-hal berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harusdigunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat menjadi RENJA Perubahan Perangkat Daerah, merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan dimana didalam perjalanannya terdapat perubahan anggaran yang disebabkan banyak hal. RENJA Perubahan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang dalam rangka mencapai tujuan dan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan kedepan. Perubahan Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Walikota No 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja Perubahan ini di harapkan dapat menjadiacuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026
n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023
o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri PamongPraja;
p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
q. Perwal No 137 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
r. Perwal No 138 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2023 adalah

a. untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah,
b. untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2023 ini adalah :

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS-P Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023;
b. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Perubahan Renja OPD Tahun 2023;
c. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2023;
d. Untuk memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2023 telah disusun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2O23

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan II Tahun 2023

BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2O23

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kemantren Danurejan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Renja Kemantren Danurejan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan sampai dengan Triwulan II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Danurejan (Tabel 2.1) yang kami unduh melalui Aplikasi Simoneva

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren Danurejan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Danurejan adalah : **Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan**.

Indikator Sasaran Kemantren Danurejan Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah 409. Hasil dari penilaian evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah 409.
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah Nilai A.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telahdilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Danurejan Tahun 2023 - 2026, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan adalah Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan.**
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.**

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator (IKU) diatas dari tahun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama
Kemantrena Danurejan Tahun 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	340	343	398	400	402	404	395	383	403	401	402	408

Data dari Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2017 - 2022

Sedangkan hasil yang dicapai untuk IKU tahun 2023 Kemantren Danurejan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Data Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan
Kemantren Danurejan Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Suryatmajan	408
2.	Kelurahan Tegalpanggung	407
3	Kelurahan Bausasran	412
	Jumlah	1227
	Rata-rata	**409**

Data dari hAsil Evaluasi Kelurahan Tahun 2023

Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2023 ini , Kelurahan Bausasran berhasil mendapatkan nilai tertinggi di tingkat Kemantren Danurejan, kemudian diajukan untuk mengikuti Lomba Kelurahan di tingkat Kota Yogyakarta dan berhasil meraih juara I Sedangkan lomba Kelurahan di tingkat Propinsi DIY Kelurahan Bausasran meraih juara II

Seperti disebutkan diatas bahwa pada Tahun 2023 ini Indikator Kinerja Kemantren Danurejan tidak lagi 1 (satu) indicator sasaran melainkan ada 2 (dua) indicator sasaran. Untuk hasil capaian kinerja ke dua indicator diatas dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren Danurejan
Tahun 2023 – 2026

NO	SASARAN OPD	TARGET				REALISASI
		2023	2024	2025	2026	2023
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	409	409	409	409	409
2	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	-

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA dan Hasil; Evaluasi Kelurahan Tahun 2023

Data Perbandingan Indikator Kinerja Program Kemantren Danurejan
Tahun 2023 – 2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	TARGET				REALISASI 2023 (cut off Juni 2023)
			2023	2024	2025	2026	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	82,50 poin	83 poin	83.50 poin	84 poin	82,61 poin
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	1.193.980.489 Rupiah	1.253.679.513 Rupiah	1.316.363.489 Rupiah	1.030.820.000 Rupiah
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	49 Pelanggaran	48 Pelanggaran	47 Pelanggaran	46 Pelanggaran	20 Pelanggaran
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan berhasil, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Belum terpenuhinya jumlah pegawai Kemantren Danurejan baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai kebutuhan;
2. Masih banyak ketugasan diluar tupoksi yang dirangkap oleh pegawai Kemantren Danurejan;
3. Adanya Dana Kelurahan yang sudah ditentukan oleh Pemkot sehingga ada beberapa kegiatan yang bersumber anggaran ganda (Pusat dan Daerah) sehingga dalam mempertanggungjawabkan mengalami kendala.

4. Banyaknya aplikasi dari banyak OPD yang harus dipenuhi / dikerjakan
5. Jaringan internet kurang stabil baik untuk pelayanan maupun penyelesaian tugas/ pekerjaan.
6. Regulasi terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) belum ada sehingga menjadi kendala saat penertiban PKL
7. Swadaya Masyarakat setiap tahun sudah melebihi target, namun pendataan dan pengumpulan datanya kurang efektif (masih sering terlambat dalam pelaporan)
8. dan secara eksternal keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Pada Tahun 2013 Kemantren Danurejan telah merencanakan dan melaksanakan 6 Program dengan 19 Kegiatan dan 49 sub kegiatan

Adapun Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan Triwulan II atau bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 4.600.000,00 , terealisasi sebesar Rp.2.185.000,00atau sebesar 47.50 %.
b. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.150.000,00 atau sebesar 100%.
c. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.150.000,00 atau sebesar 100%.
d. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.
e. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.150.000 atau sebesar 100%.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 5.060.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.185.000,00 atau sebesar 43.18 %.

g. Sub.Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 4.781.618.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.146.309.288,00 atau sebesar 44.88 %.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 2.760.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 690.000,00 atau sebesar 25.00%.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.070.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.035.00,00 atau sebesar 50.00%.

d. Sub.Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 460.000 atau sebesar 40.00%.

e. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar Rp 690.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.

f. Sub.Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp.575.000 atau sebesar 50%.

g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.600.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.150.000,00 atau sebesar 25.00%.

h. Sub. Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis dengan anggaran sebesar Rp 345.000,00 ,terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

a. Sub. Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.035.000,00 ,terealisasi sebesar Rp. 690.000 atau sebesar 66.67 %.

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 5.003.250,00 , terealisasi sebesar Rp. 3.700.000,00 atau sebesar 73,95%.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 57.531.300,00, terealisasi sebesar Rp. 22.744.000,00 atau sebesar 39,53%.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 19.032.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 9.657.500,00 atau sebesar 50.74%.
   d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 88.665.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 44.390.000,00 atau sebesar 50,06%.
5. **Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp 44.500.000, terealisasi sebesar 39.800.000 atau sebesar 89.44 %
6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 1.750.000 , terealisasi sebesar Rp. 1.250.000,00 atau sebesar 71.43.00%.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 101.167.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 49.162.522.00 atau sebesar 48.60%.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 526.989.245,00 , terealisasi sebesar Rp. 185.700.000,00 atau sebesar 35.24%.
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 70.790.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 22.136.602.00 atau sebesar 31.27%.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional

atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp 34.075.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 6.274.007,00 atau sebesar 18.41%.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 29.988.900,00 , terealisasi sebesar Rp. 15.078,00 atau sebesar 50,28 %.

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 228.040.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 223.783.100,00 atau sebesar 98,13%.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp 23.250.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 6.750.000,00 atau sebesar 29.03%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp 4.145.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,00 atau sebesar 66.34%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp 24.452.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 12.267.500.00 atau sebesar 50.17%.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 66.662.155,00 , terealisasi sebesar Rp. 64.880.000.00 atau sebesar 97.33%.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 6.637.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 6.085.500.00 atau sebesar 91.68%.

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 45.347.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 19.048.500.00 atau sebesar 42.01%.
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 22.050.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0%.

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp 12.910.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.300.000.00 atau sebesar 17.82%.
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp 62.855.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 16.685.000.00 atau sebesar 26.55%.
c. Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp 11.885.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.070.000.00 atau sebesar 17.42%.
d. Sub Kegiatan Pelatihan keluarga tanggap bencana alam dengan anggaran sebesar Rp 16.805.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 11.925.000.00 atau sebesar 70.96%.
e. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas dengan anggaran sebesar Rp 62.050.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 27.325.000.00 atau sebesar 44.04%.

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Suryatmajan

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryatmajan dengan anggaran sebesar Rp 413.196.180,00 , terealisasi sebesar Rp. 220.306.000,00 atau sebesar 53,32%.
b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan dengan anggaran sebesar Rp 457.224.800 , terealisasi sebesar Rp. 165.171.300,00 atau sebesar 36,12%.

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegal Panggung

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegal Panggung dengan anggaran sebesar Rp 496.752.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 6.204.000,00 atau sebesar 1,25%.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegal Panggung dengan anggaran sebesar Rp 402.229.000.00, terealisasi sebesar Rp.80.702.000 atau sebesar 20.06 %.

6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bausasran

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bausasran dengan anggaran sebesar Rp 359.500.000.00 , terealisasi sebesar Rp. 12.024.000,00 atau sebesar 3.34%.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran dengan anggaran sebesar Rp 550.333.700,00 , terealisasi sebesar Rp. 250.162.950,00 atau sebesar 45.46%.

7. Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

a. Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 4.788.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 35.740.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 23.764.000,00 atau sebesar 66.49%.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan anggaran sebesar Rp 4.140.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.070.000,00 atau sebesar 50.00%.

b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 39.890.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 9.708.000,00 atau sebesar 24.34%.

F. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKRTA URUSAN KEBUDAYAAN

1. **Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga budaya**.
   a. Sub Kegiatan Gelar budaya jogja dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.

Untuk lebih jelasnya kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN DANUREJAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	409 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	75.70 Persen

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	3,086,505,490.00	100%	0.00%						
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		4,600,000.00	65.00%	2,990,000.00	50.00%	2,185,000.00	76.92%	73.08%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		65.00%		50.00%		76.92%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1,150,000.00	100.00%	1,150,000.00	100.00%	1,150,000.00	100.00%	100.00%						
			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1,150,000.00	50.00%	575,000.00	50.00%	575,000.00	100.00%	100.00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1,150,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		1,150,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		5,060,000.00	43.00%	2,185,000.00	44.00%	2,185,000.00	102.33%	100.00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		43.00%		44.00%		102.33%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1,150,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4,781,618,500.00	64.40%	3,079,320,489.00	64.40%	2,446,944,359.00	100.00%	79.46%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		37 Orang/bulan		64.40%		64.40%		100.00%							
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		2,760,000.00	50.00%	1,380,000.00	50.00%	1,380,000.00	100.00%	100.00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		2,070,000.00	50.00%	1,035,000.00	50.00%	1,035,000.00	100.00%	100.00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50.00%		50.00%		100.00%							
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1,150,000.00	40.00%	460,000.00	45.00%	460,000.00	112.50%	100.00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		40.00%		45.00%		112.50%							
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		690,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%							
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		1,150,000.00	100.00%	1,150,000.00	50.00%	575,000.00	50.00%	50.00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100.00%		50.00%		50.00%							
		14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0		0		4,600,000.00	37.50%	1,725,000.00	37.50%	1,150,000.00	100.00%	66.67%						

			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		37.50%		37.50%		100.00%							
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		345,000.00	100.00%	345,000.00	100.00%	0	100.00%	0.00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
		16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1,035,000.00	100.00%	1,035,000.00	100.00%	690,000.00	100.00%	66.67%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		10 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		5,003,250.00	75.72%	3,788,250.00	75.72%	3,700,000.00	100.00%	97.67%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		12 Paket		75.72%		75.72%		100.00%								
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		57,531,300.00	57.33%	32,315,100.00	57.33%	22,744,400.00	100.00%	70.38%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		12 Paket		57.33%		57.33%		100.00%								
		19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		19,032,500.00	57.31%	10,907,500.00	57.31%	9,657,500.00	100.00%	88.54%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		12 Paket		57.31%		57.31%		100.00%								
		20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		88,665,000.00	60.00%	53,015,000.00	60.00%	44,390,000.00	100.00%	83.73%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		60.00%		60.00%		100.00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		44,500,000.00	100.00%	44,500,000.00	100.00%	44,300,000.00	100.00%	99.55%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100.00%		100.00%		100.00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1,750,000.00	100.00%	1,750,000.00	71.43%	1,250,000.00	71.43%	71.43%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100.00%		71.43%		71.43%								
		23	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		101,167,000.00	49.82%	50,400,000.00	49.82%	49,162,522.00	100.00%	97.54%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		49.82%		49.82%		100.00%								
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		526,889,245.00	39.04%	205,725,000.00	39.04%	185,700,000.00	100.00%	90.27%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		39.06%		0.00%		0.00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		25	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		70,790,000.00	48.40%	34,264,000.00	48.40%	22,136,602.00	100.00%	64.61%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		12 Unit		48.40%		48.40%		100.00%								
		26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		34,075,000.00	47.67%	16,242,500.00	47.67%	6,274,007.00	100.00%	38.63%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		6 Unit		47.67%		47.67%		100.00%								
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		29,988,900.00	74.46%	22,328,475.00	74.46%	15,078,000.00	100.00%	67.53%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		144 Unit		74.46%		74.46%		100.00%								
		28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		228,040,000.00	98.53%	224,690,000.00	98.53%	223,783,100.00	100.00%	99.60%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0.00%		101.93%		0.00%								
										Rata-rata capaian kinerja						82.61%	68.05%							
										Predikat kinerja						Tinggi	Sedang							
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	84,00 poin	0	82,09 poin	0	82,50 poin	0	82.50 poin	0	82.61 poin	21,767,500.00	100.13%	0.00%					Kepala Jawatan Umum		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		23,250,000.00	32.00%	7,325,000.00	32.00%	6,750,000.00	100.00%	92.15%							
				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		32.00%		32.00%		100.00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0		0		4,145,000.00	75.05%	3,110,000.00	75.05%	2,750,000.00	100.00%	88.42%							
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		75.05%		75.05%		100.00%								
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		24,452,500.00	51.87%	12,677,500.00	51.87%	12,267,500.00	100.00%	96.77%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		51.87%		51.87%		100.00%								
										Rata-rata capaian kinerja						100.00%	92.45%							
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah swadaya murni masyarakat dari Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung dan Kelurahan Bausasran di bagi 3	1.316.363.489,00 Rupiah	0	1.334.085.000,00 Rupiah	0	1.137.124.275,00 Rupiah	0	605.024.180 Rupiah	0	1.030.820.000 Rupiah	921,762,250.00	170%	0.00%					Jawatan Sosial	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																						
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		66,662,155.00	100.00%	66,662,155.00	100.00%	64,880,000.00	100.00%	97.33%								
		Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		10 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%									
	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryatmajan				0		0		413,196,180.00	90.13%	372,377,534.00	53.57%	219,806,000.00	59.44%	59.03%								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0.00%		53.57%		0.00%									
	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung				0		0		496,752,500.00	41.97%	207,930,000.00	1.71%	6,204,000.00	4.07%	2.98%								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0.00%		1.71%		0.00%									
	4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bausasran				0		0		359,500,000.00	15.30%	55,008,000.00	15.30%	12,024,000.00	100.00%	21.86%								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0.00%		15.30%		0.00%									
	5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasran				0		0		550,333,700.00	56.22%	310,283,200.00	48.85%	250,167,950.00	86.89%	80.62%								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/ Ormas		0 Pokmas/ Ormas		24 Pokmas/ Ormas		0.00%		48.85%		0.00%									
	6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung				0		0		402,229,000.00	55.64%	180,520,000.00	52.61%	118,075,000.00	94.55%	65.41%								
		Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Ormas		0 Ormas		24 Ormas		0.00%		52.61%		0.00%									
	7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan				0		0		457,224,800.00	54.41%	241,113,800.00	51.28%	165,171,300.00	94.25%	68.50%								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		24 Pokmas / Ormas		0.00%		51.28%		0.00%									
	8 Evaluasi Kelurahan				0		0		6,637,500.00	95.00%	6,235,500.00	95.00%	6,085,500.00	100.00%	97.59%								
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		95.00%		95.00%		100.00%									
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																						
	9 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		45,347,500.00	50.00%	19,168,500.00	50.00%	19,048,500.00	100.00%	99.37%								
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan		0 Lembagga		0 Lembagga		10 Lembagga		50.00%		50.00%		100.00%									
	10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		22,050,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%								
		Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya		0 UMKM		0 UMKM		45 UMKM		0.00%		0.00%		0.00%									
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																						
	11 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		12,910,000.00	65.00%	8,310,000.00	50.00%	2,300,000.00	76.92%	27.68%								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga		0 keluarga		29 keluarga		65.00%		50.00%		76.92%									
	12 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0		62,855,000.00	28.00%	17,525,000.00	28.00%	16,685,000.00	100.00%	95.21%								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga		0 keluarga		10 keluarga		28.00%		28.00%		100.00%									
	13 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0		11,885,000.00	18.00%	2,070,000.00	18.00%	2,070,000.00	100.00%	100.00%								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga		0 keluarga		16 keluarga		18.00%		18.00%		100.00%									
	14 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		16,805,000.00	70.98%	11,925,000.00	70.98%	11,925,000.00	100.00%	100.00%								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		40 Keluarga		70.98%		70.98%		100.00%									
	15 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0		0		62,050,000.00	54.00%	33,400,000.00	54.00%	27,325,000.00	100.00%	81.81%								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 keluarga		0 keluarga		10 keluarga		54.00%		54.00%		100.00%									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																						
	16 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Bausasran				0		0		4,788,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%								
		Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%									
								Rata-rata capaian kinerja						76.81%	62.34%								
								Predikat kinerja						Tinggi	Rendah								
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	46,00 pelanggaran	0	40,00 pelanggaran	0	49,00 pelanggaran	0	25 pelanggaran	0	20 pelanggaran	23,764,000.00	120%	0.00%					Kepala Jawatan Keamanan	

		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		35,740,000.00	67.35%	24,064,000.00	67.35%	23,764,000.00	100.00%	98.75%							
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		240 Laporan		67.35%		67.35%		100.00%								
									Rata-rata capaian kinerja						100.00%	98.75%							
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai	100,00 Persen	0	100,00 persen	0	100,00 Persen	0	100% Persen	0	100% Persen	11,778,000.00	100%	0.00%					Mantri Anom		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																					
		1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0		0		4,140,000.00	50.02%	2,070,000.00	50.02%	2,070,000.00	100.00%	100.00%							
			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		40 orang		50.02%		50.02%		100.00%								
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		39,890,000.00	30.00%	10,812,000.00	30.00%	9,708,000.00	100.00%	89.79%							
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		30.00%		30.00%		100.00%								
									Rata-rata capaian kinerja						100.00%	94.89%							
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
									Total anggaran dari seluruh program		0		0		4,065,577,240.00								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)						82.59%	0%							
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)						Tinggi	Sangat Rendah							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Adanya rapat internal rutin setiap senin - Sarpras cukup memadai - Sinergitas Forkom dengan linmas - Peranserta masyarakat cukup bagus.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Mentalitas sebagian warga terkait pungutan parkir
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
Kepala KEMANTREN DANUREJAN

BAMBANG ENDRO WIBOWO, S.I.P., M.Si
NIP. 197003031990031005

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197201061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Indikator Sasaran Kemantren Danurejan Tahun 2023 adalah :

1. **Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan** dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah 373,5.
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah Nilai A.

Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2023, memuat program dan kegiatan tahun berjalan, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Kemantren Danurejan yang kami unduh di sipd.kemendagri.go.id

Program dan kegiatan OPD KEMANTREN DANUREJAN terdiri dari 6 (empat) program yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7(tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 7 (dua) kegiatandan 16 (enam belas) sub kegiatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (dua) kegiatandan 1 (satu) sub kegiatan.
5. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 (dua) kegiatandan 2 (dua) sub kegiatan
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Adapun pembahasan rencana kerja dalam setiap program dan kegiatan Kemantren Danurejan tahun 2023 diatas dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											100,000,000	100,000,000					0
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											100,000,000	100,000,000					0
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya											100,000,000	100,000,000					0
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	-	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	0 -	0 -	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	0
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											6,457,180,350	7,190,129,450					7,432,625,373
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,018,360,695	6,678,574,795					6,793,550,095
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											15,410,000	15,410,000					15,410,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	4,600,000	4,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	4,600,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,150,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,150,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,150,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,150,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	5,060,000	5,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	5,060,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,150,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,794,383,500**	**4,924,125,500**					**4,925,645,500**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100 %	100 %	4,781,618,500	4,911,360,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	4,912,880,500
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2,760,000	2,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	2,760,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2,070,000	2,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	2,070,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,150,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	690,000	690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	690,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,150,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,600,000	4,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	4,600,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	345,000	345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	345,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**1,035,000**	**1,035,000**					**1,035,000**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	1,035,000	1,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,035,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**1,840,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,840,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**170,232,050**	**182,127,050**					**194,983,450**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	5,003,250	5,003,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	5,003,250
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	57,531,300	57,531,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	58,783,200
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	19,032,500	24,027,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	25,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,025,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	88,665,000	95,565,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	105,172,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**44,500,000**	**329,270,000**					**408,450,000**

https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ZZNNoo5bp/tfNUqbm47oi7wVIy8C2YVIJRJ0XqIREwEt0Cif1eLty@k8CBmXs0lM4eDBma97cnZrpkMcnK3UjALFrzYi21qlZJhwulofsprvW2iCuw5As7Xtml4TNe/W4ExmBnnx9kWqdYH99i0WY4sRksL5ZOAOa1ZwAeUYPBW8ac8HIWs3LwCqPytVt2ldO1dO98KKp... 4/12

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Unit	72 Unit	100 %	100 %	44,500,000	329,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	408,450,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**629,906,245**	**663,739,245**					**659,706,245**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,750,000	1,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	1,750,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	101,167,000	108,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	104,167,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	526,989,245	553,789,245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	553,789,245
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**362,893,900**	**562,868,000**					**586,479,900**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	70,790,000	68,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	65,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	34,075,000	17,593,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	43,115,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	144 Unit	144 Unit	100 %	100 %	29,988,900	30,108,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	31,988,900
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	228,040,000	446,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A Nilai	446,376,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**51,847,500**	**49,617,500**					**71,958,123**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**23,250,000**	**21,800,000**					**27,640,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	82,50 poin	82,50 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	23,250,000	21,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	82,50 poin	27,640,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**28,597,500**	**27,817,500**					**44,318,123**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	82,50 poin	82,50 poin	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	4,145,000	3,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	82,50 poin	5,345,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	82,50 poin	82,50 poin	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	24,452,500	24,032,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	82,50 poin	38,973,123
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**307,202,155**	**377,262,155**					**480,177,155**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**73,299,655**	**119,909,655**					**120,059,655**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	10 Lembaga masyarakat	10 Lembaga masyarakat	1 kemantren	1 kemantren	66,662,155	88,422,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	88,422,155
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	2 Laporan	2 Laporan	1 kemantren	1 kemantren	6,637,500	31,487,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	31,637,500
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**67,397,500**	**79,372,500**					**94,482,500**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	10 Lembaga masyarakat	10 Lembaga masyarakat	1 kemantren	1 kemantren	45,347,500	45,227,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	50,337,500
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	10 Laporan	10 Laporan	1 kemantren	1 kemantren	22,050,000	34,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	34,145,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**0**	**0**					**5,000,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	12 Dokumen	12 Dokumen	1 kemantren	1 kemantren	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	5,000,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**166,505,000**	**177,980,000**					**260,635,000**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	29 Keluarga	29 Keluarga	1 kemantren	1 kemantren	12,910,000	12,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	19,115,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	10 Keluarga	10 Keluarga	1 kemantren	1 kemantren	62,855,000	62,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	74,000,000
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	16 Keluarga	16 Keluarga	1 kemantren	1 kemantren	11,885,000	14,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	14,645,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	40 Keluarga	40 Keluarga	1 kemantren	1 kemantren	16,805,000	27,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	79,875,000
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	10 Keluarga	10 Keluarga	1 kemantren	1 kemantren	62,050,000	60,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	73,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**35,740,000**	**40,645,000**					**41,250,000**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**35,740,000**	**40,645,000**					**41,250,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	49 Pelanggaran	49 Pelanggaran	240 Laporan	240 Laporan	100 %	100 %	35,740,000	40,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	49 Pelanggaran	41,250,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**44,030,000**	**44,030,000**					**45,690,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**44,030,000**	**44,030,000**					**45,690,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Orang	40 Orang	1 kemantren	1 kemantren	4,140,000	4,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	5,800,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	1 kemantren	1 kemantren	39,890,000	39,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	39,890,000
															TOTAL	**6,557,180,350**	**7,290,129,450**					**7,432,625,373**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Suryatmajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											870,420,980	959,570,180					1,145,240,327
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											870,420,980	959,570,180					1,145,240,327
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											870,420,980	959,570,180					1,140,440,327
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	5 Unit	5 Unit	1 kelurahan	1 kelurahan	413,196,180	333,065,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	683,935,527
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	1 kelurahan	457,224,800	626,504,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	626,504,800
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											0	0					4,800,000
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	0 Dokumen	0 Dokumen	1 kelurahan	1 kelurahan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	4,800,000
															TOTAL	870,420,980	959,570,180					1,145,240,327

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Tegalpanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN											898,981,500	967,981,500					1,109,222,500
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											898,981,500	967,981,500					1,109,222,500
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											898,981,500	967,981,500					1,109,222,500
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	5 Unit	5 Unit	1 kelurahan	1 kelurahan	496,752,500	496,752,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	637,993,500
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	1 kelurahan	402,229,000	471,229,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	471,229,000
											TOTAL	898,981,500	967,981,500					1,109,222,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Bausasran

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana			
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01			KECAMATAN											914,621,700	962,640,700				1,083,977,777
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											914,621,700	962,640,700				1,083,977,777
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											909,833,700	962,640,700				1,079,160,777
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	4 Unit	4 Unit	1 kelurahan	1 kelurahan	359,500,000	341,033,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	346,000,000
7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	1 kelurahan	1 kelurahan	550,333,700	621,607,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	633,160,777
7	01	03	2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											4,788,000	0				4,817,000
7	01	03	2.05	03 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	1.137.124.275 Rupiah	1.137.124.275 Rupiah	12 Dokumen	12 Dokumen	1 kelurahan	1 kelurahan	4,788,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137.124.275 Rupiah	4,817,000
														TOTAL	914,621,700	962,640,700				1,083,977,777

Mengetahui
Mantri Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN DANUREJAN

Bambang Endro Wibowo, SIP.MSI
NIP. 19700303199003100

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik mungkin namun ada kalanya masih ada yang kekurangan anggaran dikarenakan keadaan yang tak terduga atau kebutuhan mendadak/mendesak.

2. Untuk perencanaan penambahan kegiatan melalui anggaran Perubahan 2023 harus mempertimbangkan pelaksaan kegiatan, terutama yang fisik karena keterbatasan waktu pelaksanaan yaitu hanya 2-3 bulan

3. Belanja barang disarankan menggunakan e katalog, sehingga harus dipersiapkan lebih awal.

4. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.

5. Para PPTK harus selalu melakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada kegiatan yang terlambat atau bahkan tidak terlaksana dengan alasan apapun, karena hal ini akan mempengaruhi kinerja Kemantren Danurejan.

6. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat dan diutamakan untuk pemulihan ekonomi akibat pendemi Virus Corona.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren Danurejan Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Danurejan Tahun 2023.

Yogyakarta, Agustus 2023

Mantri Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN DANUREJAN

Bambang Endro Wibowo, SIP.MSI

NIP. 197003031990031005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar belakang 1

1.2. Landasan Hukum…… 2

1.3. Maksud dan Tujuan …… 3

1.4. Sistematika Penulisan…… 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023……..... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023..... 5

Tabel 2.1 9

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 18

3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah..... 18

Tabel 3.1 22

BAB IV. PENUTUP …… 36

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan top-down/bottom up.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun mendasarkan pada adanya pandemi Covid-19 yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentangpembentukan Kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26); Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2023-2026.
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Konstruksi Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja dan
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 ini adalah :

a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsiyang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1

BAB IIIRENCANA PROGRAM DKEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

3.1. Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKATDAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Gedongtengen adalah : **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen**.

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah :

1. **Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah 373,5. Hasil dari penilaian evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah 373,5.
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah Nilai A.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara

perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 – 2026 maka ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Hasil yang dicapai untuk IKU tahun 2023 Kemantren Gedongtengen adalah dalam tabel berikut ini :

Data Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren GedongtengenTahun 2023

No.	Uraian	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Pringgokusuman	385
2.	Kelurahan Sosromenduran	362
	Jumlah	747
	Rata-rata	373,5

Data dari HAsil Evaluasi Kelurahan Tahun 2023

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 – 2026

No.	SASARAN OPD	TARGET				REALISASI
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	2023	2024	2025	2026	2023
		373,5	375	376	377	373,5
2.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA dan Hasil; Evaluasi Kelurahan Tahun 2023

Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren
Gedongtengen Tahun 2023 – 2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	TARGET				REALISASI
			2023	2024	2025	2026	2023
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84,76	85	85,5	86	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1,022,700,000	1,041,337,000	1,058,282,000	1,072,840,000	-
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	123	123	123	123	-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A	A	A	A	-

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA Tahun 2023

Untuk hasil Realisasi Kinerja Kemantren Gedongtengen sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, meliputi 6 (empat) program yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota tahun 2023 target anggaran sebesar Rp 4.949.925.232,00 pada triwulan II 2023 ini baru terealisasi sebesar Rp 2.465.983.190,00 atau 49,8 %. Secara umum semua sudah terlaksana seusai tatakala, hanya untuk belanja modal running text belum terealisasi akan ditambah anggarannya sesuai dengan harga e katalog. Untuk belanja langganan surat kabar dihapus, kesalahan rekening yag tadinya di peruntukkan belanja perpustakaan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini pada tahun 2023 targetanggaranya sebesar Rp 41.029.900,00 dan pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 24.556.250,00 atau 59,8 % .

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp 2.754.087.944,00 dan pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 902.339.628,00 atau 32,76 %. Penempatan tatakala Belanja Modal yang di anggaran perubahan menjadi belanja hibah untuk kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran di tempatkan lebih banyak di semester 2.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp 96.968.000,00 pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 40.820.000,00 atau 42,09 % karena tata kala kegiatan lebih banyak dilaksanakan di semester 2.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar 38.835.000,00 pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar 10.650.00000 atau 27,42 % karena tata kala kegiatan ada di semester 2.

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2023 target anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 pada triwulan II 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % .

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.1 mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJAPERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN GEDONGTENGEN TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	373,5 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**-**	**-**	**- -**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**-**	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																					
		1	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan GelarBudaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%						
																0,00%	**0,00%**						
																Sangat Rendah	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**2.465.983.190,00**	**100%**	**0,00%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%							
		5					0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.295.066,00	72,22%	1.595.066,00	72,22%	1.595.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		0 Laporan		0 Laporan		9 Laporan		72,22%		72,22%		100,00%							
			Kinerja SKPD																			
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		3.929.645.000,00	64,47%	2.533.326.655,00	64,47%	2.002.893.663,00	100,00%	79,06%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		28 Orang/bulan		64,47%		64,47%		100,00%							
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		400.000,00	50,00%	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		39.924.000,00	41,67%	16.810.000,00	41,67%	16.810.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		41,67%		41,67%		100,00%							
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan HasilPenilaian Barang MilikDaerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18 PembinaanPengawasandan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
		22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		28 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		23 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		28 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		24				0,00		0,00		4.678.000,00	56,18%	2.628.000,00	56,18%	1.737.500,00	100,00%	66,11%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		56,18%		56,18%		100,00%							
		25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		43.514.630,00	46,70%	20.322.630,00	46,70%	19.751.250,00	100,00%	97,19%						
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		46,70%		46,70%		100,00%							
		26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		53.538.200,00	87,90%	47.062.100,00	87,90%	44.418.000,00	100,00%	94,38%						
			Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		87,90%		87,90%		100,00%							
		27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		15.573.250,00	66,87%	10.413.250,00	66,87%	9.944.500,00	100,00%	95,50%						
			Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		66,87%		66,87%		100,00%							
		28 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.000.000,00	50,00%	502.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		0,00%		0,00%							
		29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		72.711.000,00	54,93%	39.938.000,00	54,93%	34.681.000,00	100,00%	86,84%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		54,93%		54,93%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		30 Pengadaan Mebel				0,00		0,00		25.404.800,00	100,00%	25.404.800,00	92,00%	23.160.000,00	92,00%	91,16%						
			Jumlah Paket Mebelyang Disediakan		0 Unit		0 Unit		45 Unit		100,00%		92,00%		92,00%							
		31 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		62.850.000,00	77,78%	44.850.000,00	77,78%	44.850.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		9 Unit		77,78%		77,78%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		32 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.500.000,00	57,00%	1.400.000,00	57,00%	650.000,00	100,00%	46,43%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		57,00%		57,00%		100,00%							
		33 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		103.200.000,00	50,00%	51.600.000,00	50,00%	38.393.517,00	100,00%	74,41%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		430.134.750,00	47,56%	203.925.375,00	47,87%	182.970.000,00	100,65%	89,72%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		47,87%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		35				0,00		0,00		78.130.000,00	50,00%	35.080.000,00	50,00%	26.470.642,00	100,00%	75,46%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		12 Unit		50,00%		50,00%		100,00%							
	36	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		26.956.500,00	45,27%	12.203.250,00	45,27%	6.386.618,00	100,00%	52,34%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		2 Unit		45,27%		45,27%		100,00%							
	37	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		2.120.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		0,00%		0,00%							
	38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		25.800.000,00	43,33%	10.450.000,00	43,33%	8.071.500,00	100,00%	77,24%						
			Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		3 Unit		43,33%		43,33%		100,00%							
	39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		22.250.036,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**63,91%**	**49,38%**						
								Predikat kinerja						**Rendah**		**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**86,00 poin**	**0,00**	**84,76 poin**	**0,00**	**84,76 poin**	**0,00**	**84,76 poin**	**0,00**	**84,76 poin**	**24.556.250,00**	**100%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																				
	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		18.600.000,00	31,45%	5.850.000,00	31,45%	5.850.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan PerangkatDaerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dlm Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		31,45%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		14.800.000,00	100,00%	14.800.000,00	100,00%	14.300.000,00	100,00%	96,62%						
			Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		7.629.900,00	58,45%	4.459.900,00	58,50%	4.406.250,00	100,09%	98,80%						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		58,45%		58,50%		100,09%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Rata-rata capaian kinerja										**100,03%**		**98,47%**						
				Predikat kinerja										**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren**	**741.153.000 Rupiah**	**0,00**	**1.348.166.000 Rupiah**	**0,00**	**1.022.700.000 Rupiah**	**0,00**	**511.350.000 Rupiah**	**0,00**	**659.880.000 Rupiah**	**902.339.628,00**	**129%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
			Gedongtengen	**Gedongtengen =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**																	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		93.680.000,00	17,62%	16.510.000,00	17,62%	16.510.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		17,62%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
		2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		54.701.390,00	81,96%	44.832.390,00	81,96%	43.132.250,00	100,00%	96,21%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		3 Lembaga Masyarakat		0,00%		81,96%		0,00%							
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00		813.396.750,00	21,90%	178.160.000,00	21,36%	142.960.000,00	97,53%	80,24%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahanyang Terbangun		0 unit		0 unit		98 unit		0,00%		21,36%		0,00%							
		4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran				0,00		0,00		545.112.444,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Sarana Prasarana Kelurahanyang Terbangun		0 Unit		0 Unit		36 Unit		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran				0,00		0,00		553.249.000,00	50,00%	273.392.500,00	50,00%	243.458.500,00	100,00%	89,05%						
			Jumlah Pokmas danOrmas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		185 Lembaga		0,00%		50,00%		0,00%							
		6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00		559.784.250,00	68,48%	383.343.250,00	68,48%	377.713.378,00	100,00%	98,53%						
			Jumlah Pokmas danOrmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		251 Pokmas/Ormas		0,00%		68,48%		0,00%							
		7 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		3.699.810,00	100,00%	3.699.810,00	100,00%	3.557.500,00	100,00%	96,15%						
			Jumlah Laporan HasilEvaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																				

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		8 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		51.374.000,00	49,02%	25.185.750,00	49,02%	24.062.000,00	100,00%	95,54%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		4 Lembaga Masyarakat		0,00%		49,02%		0,00%							
		9 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		18.480.000,00	100,00%	18.480.000,00	100,00%	17.605.000,00	100,00%	95,27%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		4 Lembaga Masyarakat		0,00%		100,00%		0,00%							
		10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		13.600.000,00	41,18%	5.600.000,00	41,18%	5.596.000,00	100,00%	99,93%						
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		41,18%		0,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																				
		11 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0,00		0,00		5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%	5.200.000,00	100,00%	92,86%						
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																				
		12 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		4.675.300,00	100,00%	4.675.300,00	100,00%	4.675.000,00	100,00%	99,99%						
			Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatanketahanan pangan keluarga		0 keluarga		0 keluarga		45 keluarga		0,00%		100,00%		0,00%							
		13 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti PeningkatanKesadaran Keluarga dalamPeningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber DayaManusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga		0 keluarga		5 keluarga		0,00%		100,00%		0,00%							
		14 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		5.860.000,00	100,00%	5.860.000,00	100,00%	5.820.000,00	100,00%	99,32%						
			Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhankesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup		0 keluarga		0 keluarga		30 keluarga		0,00%		100,00%		0,00%							
		15 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		26.325.000,00	29,07%	7.650.000,00	29,07%	7.500.000,00	100,00%	98,04%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		220 Keluarga		0,00%		29,07%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**93,17%**	**89,41%**						
								Predikat kinerja						**Sangat**	**Tinggi**	**Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen =Jumlah Pelanggaran Perda**	**175,00 Pelanggaran**	**0,00**	**123,00 Pelanggaran**	**0,00**	**123,00 Pelanggaran**	**0,00**	**60 Pelanggaran**	**0,00**	**65 Pelanggaran**	**40.820.000,00**	**108%**	**0,00%**					**Mantri PamongPraja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		96.968.000,00	49,41%	42.900.000,00	49,41%	40.820.000,00	100,00%	95,15%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		55 Laporan		0,00%		49,41%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**		**95,15%**						
									Predikat kinerja						**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gendongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gendongtengen)x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**- %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**10.650.000,00**	**100%**	**0,00%**					**Mantri PamongPraja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																					
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		6.975.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang		0 Orang		200 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		2					0,00		0,00		31.860.000,00	34,21%	10.900.000,00	34,21%	10.650.000,00	100,00%	97,71%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD PenanggungJawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPDTWII Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TWII Tahun 2023		Tingkat Realiasi TWII Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pelaksanaan Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		34,21%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**50,00%**	**48,85%**						
Predikat kinerja														**Sangat**	**Rendah**	**Sangat Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program									**0,00 0,0 3.44**	**349.068,00**												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**71,97%**	**0%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)														**Sedang**		**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Terciptanya kondisi kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2. Adanya Evaluasi Rutin tiap PPTK yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri 3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

KEMANTREN GEDONGTENGEN

Drs. ANANTO WIBOWO
NIP. 197305241992031003

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP.
19720306199603100 4

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah :

1. **Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah 373,5.
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada tahun 2023 adalah Nilai A.

Review Renstra Indikator sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen target tahun 2023 adalah 367, kemudian review menjadi 373,5 dan mengganti target tiap kelurahan sebagai berikut:
   a. Kelurahan Pringgokusuman : 385 poin
   b. Kelurahan Sosromenduran : 362 poin
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi kemantren Gedongtengen

   Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat target tahun 2023: 72 poin, sesuai hasil RB tahun sebelumnya adalah 87,55, maka di review menjadi Nilai A.

Review Renstra Indikator Program Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen target tahun 2023 adalah 84,76 poin.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Gedongtengen Rp. 1.022.700.000,- dengan rincian sebagai berikut:
   a. Kelurahan Pringgokusuman angka swadaya masyarakat sebesar Rp.644.370.000,-

b. Kelurahan Sosromenduran angka swadaya masyarakat sebesar Rp.378.330.000,-

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen adalah 123 pelanggaran perda.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan indikator program Persentase Permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi: 100% dengan 5 permasalahan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen adalah A nilai.

Program dan kegiatan OPD Kemantren Gedongtengen terdiri dari 6 (enam) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan serta ditambah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Pembahasan Rencana Kerja Perubahan Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menambah anggaran sebesar Rp.214.888.000,- untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menambah anggaran sebesar Rp 20.176.880,- untuk sub kegiatan penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Dan mengurangi pada sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

- Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah menambah sebesar Rp.139.639.800,- untuk sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaaan peralatan dan mesin lainnya.

- Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

mengurangi anggaran sebesar Rp.33.850.000,- pengurangan anggaran pada sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

- Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah menambah anggaran sebesar Rp.175.231.464,-, pengurangan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan serta pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas kemantren serta kantor Kelurahan Pringgokusuman, sedangkan penambahan pada sub kegiatan pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   - Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat menambah sebesar Rp 233.500,-, pengurangan pada sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, penambahan pada sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   - Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan untuk Kemantren Gedongtengen menambah anggaran sebesar Rp. 23.351.250,- pada sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, untuk 2 (dua) kelurahan menambah sebesar Rp.82,492.500,- pada sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

   - Pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan menguarangi anggaran sebesar Rp. 2.598.750,-, pengurangan pada sub kegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

   - Pada Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mengurangi anggaran sebesar Rp.400.000,- pada sub kegiatan pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan

   - Pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengurangi anggaran sebesar Rp.16.275.000,-, pengurangan pada sub kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   - Pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menambah sebesar Rp.16.744.000,- , penambahan

pada sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   - Pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah menambah anggaran sebesar Rp.750.000,-, penambahan pada sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

Untuk perubahan anggaran 2023 total penambahan sebesar Rp.620.383.644,- dan untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 3.1** sebagai berikut **:**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**	**5.07**	**Ac**	**t, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	-	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksanaan ya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0 -	0 -	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewa anDIY	-		0 -	0
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**5,409,303,632**	**5,947,194,776**					**5,778,740,650**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,949,925,232**	**5,466,011,376**					**5,230,578,650**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,995,066**	**5,995,066**					**7,645,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	2,200,000	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,940,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.01.2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	9 Laporan	9 Laporan	100 %	100 %	2,295,066	2,295,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	3,130,000
7.01.01.2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,971,469,000**	**4,186,357,000**					**4,079,783,650**
7.01.01.2.02	01 Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Orang/bu la	n28 Orang/bula	n100 %	100 %	3,929,645,000	4,144,533,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	4,027,372,650

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.01.2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	400,000	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	420,000
7.01.01.2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	39,924,000	39,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	50,421,000
7.01.01.2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7.01.01.2.02	06 Pengelolaan danPenyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah DokumenBahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	310,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	600,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	630,000
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**1,500,000**	**1,500,000**					**1,890,000**
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 06	Perutausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Laporan Perutausahaan Barang Milik	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	630,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Kemantren Gedongtengen	Daerah pada SKPD	kinerja Perangkat Daerah	Semua Kelurahan											untuk Kemantren Gedongtengen		
7.01.01.2.03	07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah DokumenHasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**600,000**	**600,000**					**1,890,000**
7.01.01.2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana TransferUmum-Dana Alokasi mum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	945,000
7.01.01.2.05	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	JumlahDokumenMonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaianakuntabilitas inerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana transferUmumDanaAlokasiUmum		Hasilpenilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	945,000

7 01 01 2. 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**191,015,080**	**211,191,960**					**182,450,000**
7 01 01 2. 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	4,678,000	6,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi mum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	5,800,000
7 01 01 2. 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	43,514,630	55,946,510	Dana Transfer UmumDana Alokasi mum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	54,000,000
7 01 01 2. 06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	53,538,200	57,708,200	Dana TransferUmumDanaAlokasiUmum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	27,300,000
7 01 01 2. 06	05	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	15,573,250	17,573,250	Dana TransferUmum-DanaAlokasiUmum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	19,100,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	1,050,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	72,711,000	73,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	75,200,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**88,254,800**	**227,894,600**					**203,300,000**
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	45 Unit	45 Unit	100 %	100 %	25,404,800	50,204,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	35,300,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	9 Unit	26 Unit	100 %	100 %	62,850,000	177,689,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	168,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**535,834,750**	**501,984,750**					**573,600,000**
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	2,500,000	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,600,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	103,200,000	75,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	109,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	430,134,750	424,134,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	462,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**155,256,536**	**330,488,000**					**180,020,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua	A Nilai	A Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	78,130,000	74,761,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	66,000,000

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Gedongtengen	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Daerah	Kelurahan											Kemantren Gedongtengen		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	26,956,500	16,516,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	34,500,000
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	2,120,000	2,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,220,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	25,800,000	30,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	51,400,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	22,250,036	206,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	25,900,000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**41,029,900**	**41,263,400**					**113,300,000**
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**18,600,000**	**18,600,000**					**61,500,000**
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	18,600,000	18,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.76 poin	61,500,000
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**22,429,900**	**22,663,400**					**51,800,000**
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	14,800,000	14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.76 poin	15,500,000

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,629,900	8,363,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.76 poin	36,300,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**282,545,500**	**286,623,000**					**328,650,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**93,680,000**	**93,680,000**					**92,956,000**
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	93,680,000	93,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 92,956,000
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**58,401,200**	**81,752,450**					**64,672,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	3 Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	54,701,390	78,052,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 59,602,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3,699,810	3,699,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 4,070,000
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**83,454,000**	**80,855,250**					**115,300,000**
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	4 Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	51,374,000	50,250,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 47,000,000
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	4 Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	18,480,000	17,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 34,300,000
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	13,600,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 34,000,000

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											5,600,000	5,200,000					5,800,000
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	100 %	5,600,000	5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	5,800,000
7 01 03 2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											41,410,300	25,135,300					49,922,000
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	45 Keluarga	45 Keluarga	100 %	100 %	4,675,300	4,675,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	4,700,000
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	20 Keluarga	20 Keluarga	100 %	100 %	4,550,000	4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	4,700,000
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	5,860,000	5,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	5,922,000
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	220 Keluarga	220 Keluarga	100 %	100 %	26,325,000	10,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	4,600,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											96,968,000	113,712,000					68,712,000
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											96,968,000	113,712,000					68,712,000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua	250 Pelanggaran	123 Pelanggaran	55 Laporan	55 Laporan	100 %	100 %	96,968,000	113,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren	123 Pelanggaran	68,712,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian NegaraRI terkait penerapan dan penegakan	Kelurahan											Gedongtengen		
7 01 0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**38,835,000**	**39,585,000**					**37,500,000**
7 01 05 2.0 1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**38,835,000**	**39,585,000**					**37,500,000**
7 01 05 02 2.0 1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	100 %	100 %	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	6,975,000	6,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	15,300,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 05 2.0 08 1	Pelaksanaan TugasForum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	31,860,000	32,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	22,200,000
											TOTAL	**5,509,303,632**	**6,047,194,776**					**5,778,740,650**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,373,181,000**	**1,413,685,500**					**1,595,241,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,373,181,000**	**1,413,685,500**					**1,595,241,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,373,181,000**	**1,413,685,500**					**1,595,241,000**
7	01	03	2.02	02	PembangunanSarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Kota Yogyakarta Gedongtengen, Pringgokusuma	, 719.357.50 Rupiah	1.022.700.000	98 Unit	79 Unit	100 %	100 %	813,396,750	839,503,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 981,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Kota Yogyakarta, Gedongtengen,Semua Kelurahan	719.357.50 Rupiah	1.022.700.000	251 Pokmas / Ormas	251 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	559,784,250	574,181,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah 614,241,000
																TOTAL	**1,373,181,000**	**1,413,685,500**					**1,595,241,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,098,361,444**	**1,140,349,444**					**1,263,804,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,098,361,444**	**1,140,349,444**					**1,263,804,000**
7	**01**	**03**	**2.02**	**Kegiatan**	**Pemberdayaan Kelurahan**											**1,098,361,444**	**1,140,349,444**					**1,263,804,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Terbangun	Terlaksanaya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Kota Yogyakarta Gedongtengen, Sosromenduran	719.357.30 R	1.022.700.000	Rupiah	36 Unit	36 Unit	100 %	100 %	545,112,444	578,350,444	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	.022.700.000	Rupiah	631,627,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Kota Yogyakarta Gedongtengen, Sosromenduran	719.357.30 R	1.022.700.000	185 Pokmas / Ormas	Rupiah	186 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	553,249,000	561,999,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000	Rupiah	632,177,000
																	TOTAL	**1,098,361,444**	**1,140,349,444**					**1,263,804,000**

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana.Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

Drs. ANANTO WIBOWO, M.IP
NIP. 197305241992031003

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2023 di sipd.kemendagri.go.id APBD Murni 2023: Rp 7.980.846.076,00 Perubahan Renja 2023: Rp 8.760.758.520,00 Keterangan Perubahan (tuliskan secara ringkas, garis besar untuk alasan perubahan yang paling dominan): 1) Penyesuaian gaji dan tunjangan penambahan 203.086.000 2) ATK dan belanja alat bahan kantor 12.431.880 3) Pengadaan mebel 123.577.800 untuk running text, kursi tunggu lipat 3 seat spon, Kursi Lipat, Kursi kerja putar, meja kecil, dispenser, vertikal blind 4) Pengadaan peralatan dan mesin 150.909.550 untuk komputer, harddisk, monitor, printer, 4 unit CCTV, LCD Proyektor, Peralatan Studio Audio 6 unit 5) Pemeliharaan Gedung 199.249.964 untuk kemantren (mengganti paving block yang sudah naik turun, ruang atas bocor, pengecatan) dan kelurahan Pringgokusuman (ruangan atas bocor) 6) Penambahan untuk musrenbang kampung kelurahan Pringgokusuman, musrenbang kampung kelurahan Sosromenduran, Sosialisasi musrenbang kemantren tahun 2025 bertambah 23.351.250	YA	mendasarkan pada prioritas kebutuhan
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.	YA	Rp 100.000.000,00 Keterangan: Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
3.	Perubahan Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah menjadi bagian dari Perubahan Renja	YA	Perubahan Penjabaran APBD terakhir menjadi bagian dari Perubahan Renja
4.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II	YA	Sudah mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II
5.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai target program / sasaran RPD	YA	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
6.	Hasil reviu indikator dan target sasaran dan program perangkat daerah untuk Perubahan 2023 telah tertuang dalam file metadata di	YA	sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	bit.ly/perencanaanjogjakota dan sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id		
7.	Menyusun Narasi Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai tatakala	YA	Sedang berproses menyusun narasi renja perubahan
CATATAN: 1) Telaah untuk proposal pengadaan sarana prasarana wilayah tahun anggaran 2024 maksimal 26 Juni 2023 2) Telaah untuk proposal perubahan 2023 maksimal 7 Juli 2023 3) Pengadaan barang mendasarkan proses RKBMD silahkan diajukan maksimal 1 minggu setelah desk renja perubahan dengan mempertimbangkan pemenuhan TKDN minimal 25% 4) Mempertimbangkan waktu efektif pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan, bersifat urgent dan mendukung sasaran OPD dan Kota Yogyakarta 5) Konsolidasi paving block Kemantren, meminta informasi ke Adminbang dan BPBJ			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juni 2023

Pimpinan Sidang



Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kemantren Gedongtengen

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Rio Dicky Andreanto	Inspektorat Daerah	
2.	Wahyu Agustina, A. Md	Kemantren Gedongtengen	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	-	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0 -	0 -	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	0
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**5,409,303,632**	**5,947,194,776**					**5,778,740,650**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,949,925,232**	**5,466,011,376**					**5,230,578,650**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,995,066**	**5,995,066**					**7,645,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	2,200,000	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,940,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	9 Laporan	9 Laporan	100 %	100 %	2,295,066	2,295,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	3,130,000
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,971,469,000**	**4,186,357,000**					**4,079,783,650**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	100 %	100 %	3,929,645,000	4,144,533,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	4,027,372,650
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	400,000	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	420,000
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	39,924,000	39,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	50,421,000
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	310,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	600,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	630,000
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	315,000
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**1,500,000**	**1,500,000**					**1,890,000**
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	630,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Gedongtengen	SKPD	Daerah	Kelurahan											Kemantren Gedongtengen		
7 01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	200,000	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	210,000
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**600,000**	**600,000**					**1,890,000**
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	945,000
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Dokumen	28 Dokumen	100 %	100 %	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	945,000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**191,015,080**	**211,191,960**					**182,450,000**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	4,678,000	6,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	5,800,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	43,514,630	55,946,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	54,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	53,538,200	57,708,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	27,300,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	15,573,250	17,573,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	19,100,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	1,050,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	72,711,000	73,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	75,200,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**88,254,800**	**227,894,600**					**203,300,000**
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	45 Unit	45 Unit	100 %	100 %	25,404,800	50,204,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	35,300,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	9 Unit	26 Unit	100 %	100 %	62,850,000	177,689,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	168,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**535,834,750**	**501,984,750**					**573,600,000**
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	2,500,000	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,600,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	103,200,000	75,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	109,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	430,134,750	424,134,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	462,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**155,256,536**	**330,488,000**					**180,020,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	78,130,000	74,761,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	66,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	26,956,500	16,516,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	34,500,000
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	2,120,000	2,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	2,220,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	25,800,000	30,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	51,400,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	22,250,036	206,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai	25,900,000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**41,029,900**	**41,263,400**					**113,300,000**
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**18,600,000**	**18,600,000**					**61,500,000**
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	18,600,000	18,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.76 poin	61,500,000
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**22,429,900**	**22,663,400**					**51,800,000**
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	14,800,000	14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.76 poin	15,500,000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	84.5 poin	84.76 poin	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,629,900	8,363,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	84.76 poin	36,300,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**282,545,500**	**286,623,000**					**328,650,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**93,680,000**	**93,680,000**					**92,956,000**
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	93,680,000	93,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	92,956,000
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**58,401,200**	**81,752,450**					**64,672,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	3 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	54,701,390	78,052,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	60,602,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3,699,810	3,699,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	4,070,000
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**83,454,000**	**80,855,250**					**115,300,000**
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	51,374,000	50,250,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	77,000,000
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	18,480,000	17,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	14,300,000
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	13,600,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	24,000,000
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**5,600,000**	**5,200,000**					**5,800,000**
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	100 %	5,600,000	5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	5,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**41,410,300**	**25,135,300**				**49,922,000**
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	45 Keluarga	45 Keluarga	100 %	100 %	4,675,300	4,675,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	4,700,000
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	20 Keluarga	20 Keluarga	100 %	100 %	4,550,000	4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	4,700,000
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	30 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	5,860,000	5,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	5,922,000
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	220 Keluarga	220 Keluarga	100 %	100 %	26,325,000	10,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	34,600,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**96,968,000**	**113,712,000**				**68,712,000**
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**96,968,000**	**113,712,000**				**68,712,000**
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	250 Pelanggaran	123 Pelanggaran	55 Laporan	55 Laporan	100 %	100 %	96,968,000	113,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	123 Pelanggaran	68,712,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Indonesia															
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**38,835,000**	**39,585,000**					**37,500,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**38,835,000**	**39,585,000**					**37,500,000**
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	100 %	100 %	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	6,975,000	6,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	15,300,000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	31,860,000	32,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	22,200,000
											TOTAL	**5,509,303,632**	**6,047,194,776**					**5,778,740,650**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pringgokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,373,181,000**	**1,413,685,500**					**1,595,241,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,373,181,000**	**1,413,685,500**					**1,595,241,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,373,181,000**	**1,413,685,500**					**1,595,241,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Pringgokusuman	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	99 Unit	79 Unit	100 %	100 %	813,396,750	839,503,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	881,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Semua Kelurahan	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	251 Pokmas / Ormas	251 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	559,784,250	574,181,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	574,241,000
															TOTAL	**1,373,181,000**	**1,413,685,500**					**1,595,241,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Sosromenduran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,098,361,444**	**1,140,349,444**					**1,263,804,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,098,361,444**	**1,140,349,444**					**1,263,804,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,098,361,444**	**1,140,349,444**					**1,263,804,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Sosromenduran	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	36 Unit	36 Unit	100 %	100 %	545,112,444	578,350,444	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	531,627,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Kota Yogyakarta, Gedongtengen Sosromenduran	719.357.350 Rupiah	1.022.700.000 Rupiah	185 Pokmas / Ormas	186 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	553,249,000	561,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.022.700.000 Rupiah	532,177,000
															TOTAL	**1,098,361,444**	**1,140,349,444**					**1,263,804,000**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN
ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦿꦼꦤ꧀ ꦒꦼꦝꦺꦴꦁꦠꦼꦁꦒꦺꦤ꧀
Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta Kode Pos: 55272 Telp. (0274) 515787 Fax (0274) 515787
EMAIL: gt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada Yth	:	Bapak Pj. Walikota Yogyakarta
Dari	:	Kemantren Gedongtengen
Nomor	:	900/158
Tanggal	:	4 Juli 2023
Perihal	:	Permohonan Hibah Barang

I. Pokok Persoalan :
Surat dari disposisi Sekretaris daerah Kota Yogyakarta Nomor 600/407 tanggal 27 Februari 2023 perihal Permohonan Sarpras Wilayah dari LPMK Kelurahan Pringgokusuman dan Nomor 600/475 tanggal 10 Maret 2023 perihal Permohonan Sarpras Wilayah Kelurahan Sosromenduran,

II. Pra Anggaran
Dalam rangka pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD Perubahan Tahun 2023 akan memberikan bantuan sarpras wilayah kepada organisasi/kelompok masyarakat yang mengajukan proposal permohonan hibah barang.

III. Pembahasan/Analisa
Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 dan surat kerelaan dari pemilik tanah/persil pada lokasi objek hibah , maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan hibah pada objek hibah sesuai dengan item pekerjaan pada Peraturan Walikota Nomor 19 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

IV. Kesimpulan
Mendasarkan pada hasil verifikasi atas proposal hibah yang ditujukan kepada Pj. Walikota Yogyakarta dapat direkomendasikan untuk diberikan hibah dengan nilai ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan kemampuan Anggaran APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023 berupa barang sebagaimana daftar rincian terlampir.

V. Saran dan Tindakan
Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023 untuk dapat memberikan bantuan hibah barang dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana.

Demikian telaah staf ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mantri Pamong Praja
Kemantren Gedongtengen

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 197305241992031003

DAFTAR PERMOHONAN HIBAH BARANG LPMK

KEMANTREN GEDONGTENGEN

TAHUN ANGGARAN 2023

1. Kelurahan Pringgokusuman

No	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU (dalam Rp)	KEPEMILIKAN ALAS HAK
1	Perbaikan Jalan Kampung / Paving Blok - Pekerjaan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas	- RW 09 Kampung Pringgokusuman - RW 15 Kampung Kemetiran Lor - RW 19 Kampung Sutodirjan - RW 20 Kampung Sutodirjan - RW 24 Kampung Notoyudan	486 m2,	170.437.000 rincian : - 154.974.000 - 9.277.800 - 6.185.200	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
2	Peningkatan SAH - Pekerjaan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas	- RW 02 Kampung Jlagran - RW 18 Kampung Kemetiran Kidul	90 m	67.520.000 rincian : - 61.370.000 - 3.698.000 - 2.452.000	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
3	Pemeliharaan Pos Ronda	- RW 01 Kampung Jlagran - RW 16 Kampung Kemetiran Kidul - RW 20 Kampung Sutodirjan	3 Unit	27.476.750	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
4	Peningkatan Penunjang Pariwisata	- RW 10 Kampung Gandekan Lor	1 lokasi	181.860.000	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
5	Pergola di Gang Lingkungan - Pekerjaan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas	- RW 02 Kampung Jlagran - RW 03 Kampung Jlagran - RW 05 Kampung Pringgokusuman - RW 06 Kampung Pringgokusuman - RW 08 Kampung Pringgokusuman - RW 09 Kampung Pringgokusuman - RW 13 Kampung Kemetiran Lor - RW 16 Kampung Kemetiran Kidul - RW 23 Kampung Notoyudan	42 Titik	161.700.000 rincian : - 147.000.000 - 8.820.000 - 5.880.000	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
	JUMLAH			**608.993.750**	

2. Kelurahan Sosromenduran

No	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU (dalam Rp)	KEPEMILIKAN ALAS HAK
1	SAH - Pekerjaan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas	- RT 30, RW 09 Kampung Pajeksan, - RT 07, RW 02 Sosrowijayan Wetan	212 m3,	159.529.444 rincian : - 179.100.000 - 11.940.000 - 7.960.000	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
2	Conblok - Pekerjaan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas	- RT 30, RW 09 Kampung Pajeksan	700 m2,	199.000.000 rincian : - 179.100.000 - 11.940.000 - 7.960.000	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
3	Taman/pergola - Pekerjaan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas	- RT 37, RW 07 Kampung Sosromenduran	9 Unit	35.000.000 rincian : - 31.500.000 - 2.100.000 - 1.400.000	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
4	Spot Spot Foto - Pekerjaan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas	- RT 30 , RW 08, RT 41, RT 42 , RW 09 Kampung Pajeksan	3 unit	45.000.000 rincian : - 40.500.000 - 2.700.000 - 1.800.000	Bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta
	JUMLAH			**438.529.444**	

Mantri Pamong Praja
Kemantren Gedongtengen

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 197305241992031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Kemantren Ngampilan
Th 2023

JL. Wahid Hasyim No.12 Yogyakarta 55262 Fax (0274) 376984

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman judul i

Daftar isi ii

Kata Pengantar iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kemantren Ngampilan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023……..... 6

Tabel 2.1……..... 13

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 19

3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah 19

Tabel 3.1 24

BAB IV PENUTUP 35

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2023.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2023 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembanguna Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 Kemantren Ngampilan ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana program dan anggaran mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Instansi Pemerintah Kemantren Ngampilan ini masih belum sempurna, untuk itu saran, kritik dan masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki perencanaan Kemantren Ngampilan di masa mendatang. Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Tahun 2024 Kemantren Ngampilan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kemantren Ngampilan.

Mantri Pamong Praja Ngampilan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

ENDAH DWI DINYASTUTI,SE. MM.
NIP 196808221995032002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang mengandung makna adanya kemajuan dan pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimiliki denga tetap menjaga kesinambunga dan kualitas lingkungan yang baik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yangmengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2023-2026.
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 ttg Standar Harga Satuan Barang dan Konstruksi Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 ttg Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kemantren Ngampilan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJAKemantren Ngampilan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1.

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATANDALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perubahan Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan adalah**: Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan.**

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2023 adalah **:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : 403 poin**
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : 80,3 poin**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator- Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMAKemantren NgampilanTAHUN 2023-2026

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	403	405	407	409	403	-	-	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	80,3	80,35	80,4	80,45	80,45	-	-	-

Data dari Metadata tahun 2023

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR PROGRAM KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2023-2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target				Realisasi			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren NGAMPILAN	84,4 point	84,6 point	84,8 point	85 point	84,4	-	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Reformasi Birokrasi Kemantren NGAMPILAN	Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Ngampilan	Rp. 750.000.000	Rp. 775.000.000,-	Rp. 800.000.000	Rp. 825.000.000,-	-	-	-	-
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampil	68 Pelanggaran Perda	66 Pelanggaran Perda	64 Pelanggaran Perda	62 Pelanggaran Perda	-	-	-	-

		an								
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahdaerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren NGAMPILAN	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	-

Data dari Metadata tahun 2023

Pada tahun 2023 Kemantren Ngampilan melaksanakan 6 program Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sampai dengan Bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 3.343.770.521,-atau 75,22 %dari target TW II Rp. 4.445.132.765,- . Adapun rincian dari masing-masing progam dapat kita lihat pada uraian di bawah ini.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sampai dengan Bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 2.624.229.071,-atau 77,24 %dari target TW II Rp. 3.397.437.595,- hal ini sebabkan antara lain:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN belum terealisasi karena pembagian anggaran di TW I, II dan III dan terealisasi sesuai kebutuhan. Dan ada 2 pegawai yang pensiun dan belum ada yang menggantikan.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik lebih rendah dari rencana anggaran yang telah direncanakan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan lebih rendah dari anggaran yang sudah direncanakan.
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas: Pemeliharaan Kendaraan yang belum dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pemeliharaan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mundur pelaksanaannya dikarenakan adanya perubahan di perencanaan yang mengakibatkan pelaksanaannya juga mundur.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 15.090.000,- atau 91,73% dari target anggaran Rp.16.450.000,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Rapat koordinasi yang sudah dilaksanakan namun SPJ masih dalam proses administrasi. Anggaran di Jawatan Kemakmuran

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 631.141.450,- atau 66,29 % dari target anggaran Rp.952.035.170,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan: Pekerjaan Fasum berupa taman di Tengsur tidak dilaksanakan karena persyaratan sertifikat tanah yang belum jadi. Dan kegiatan fisik yang lain seperti pemasangan konblok yang semula akan dilaksanakan pada bulan Juli diundur pelaksanaannya karena akan dilaksanakan dengan sistem hibah jadi pelaksanaan mundur pada anggaran perubahan.
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan:
  Honor RT, RW, dan PKK ada yang belum direalisasikan dan mundur dari rencana.

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 49.950.000,- atau 90,93 % dari target anggaran Rp.24.280.000,-. Kegiatan operasional ketertiban yang dilaksanakan di akhir bulan ada yang masih dalam proses administrasi.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 23.360.000,- atau 96,21 % dari target anggaran Rp. 24.280.000,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan di akhir bulan masih dalam proses administrasi.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 0,- atau 0 % dari target anggaran Rp. 0,-. Hal ini disebabkan karena ploting Belanja di bulan Agustus 2023 untuk memperingati Hari Keistimewaan DIY.

Hasil desk Renja TW II atau evaluasi pelaksanaan Kegiatan TW II dengan Bappeda terdapat dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN NGAMPILAN

TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	403 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	80.3 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja dalam rangka keistimewaan Yogya**	**100,00 persen**	**0**	**0,00 0**	**0**	**100,00 persen**	**100.000.000,00**	**0% persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0,00%**	**0,00%**						
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								**100.000.000,00**		**0**		**0**		**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0		0		100.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Gelar Seni Budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY		0 Event		0 Event		1 Event		0,00%		0,00%		0,00%							
															nan%	**nan%**						
															Sangat Rendah	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**	**Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan**	**80,45 nilai**	**0**	**80,00 nilai**	**0**	**80,30 nilai**	**5.155.092.116,00**	**80.3 nilai**	**3.397.437.595,00**	**83.32 nilai**	**2.624.229.071,00**	**103%**	**77,24%**						
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**13.420.000,00**		**6.230.000,00**		**6.230.000,00**		**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.020.000,00	33,00%	660.000,00	33,00%	660.000,00	100,00 %	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		33,00%		33,00%		100,00 %							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		6.000.000,00	49,00%	2.920.000,00	49,00%	2.920.000,00	100,00 %	100,00%						

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		49,00%		49,00%		100,00 %							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		5.400.000,00	50,00%	2.650.000,00	50,00%	2.650.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00 %							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.945.923.000,00**		**2.681.755.692,00**		**2.022.692.310,00**		**75.42%**						
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		3.943.203.000,00	81,00%	2.680.395.692,00	81,00%	2.021.332.310,00	100,00 %	75,41%						
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		26 orang/bulan		81,00%		81,00%		100,00 %							
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		880.000,00	50,00%	440.000,00	50,00%	440.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00 %							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		50,00%		50,00%		100,00 %							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**180.852.607,00**		**88.791.150,00**		**85.966.493,00**		**96.82%**						
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		9.207.000,00	56,00%	5.080.000,00	56,00%	4.865.200,00	100,00 %	95,77%						
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 jenis		0 jenis		10 jenis		56,00%		56,00%		100,00 %							
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		67.152.807,00	51,00%	33.592.750,00	51,00%	31.425.493,00	100,00 %	93,55%						
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		51,00%		51,00%		100,00 %							
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		31.522.800,00	67,00%	20.892.800,00	67,00%	20.892.800,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		67,00%		67,00%		100,00 %							
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		72.970.000,00	41,00%	29.225.600,00	41,00%	28.783.000,00	100,00 %	98,49%						
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		94 Laporan		41,00%		41,00%		100,00 %							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**47.644.703,00**		**47.644.703,00**		**34.982.000,00**		**73.42%**						
		11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		47.644.703,00	100,00%	47.644.703,00	100,00%	34.982.000,00	100,00 %	73,42%						
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**383.841.856,00**		**168.684.100,00**		**141.190.393,00**		**83.7%**						
		12	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		105.000.000,00	50,00%	52.500.000,00	50,00%	30.432.393,00	100,00 %	57,97%						
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		50,00%		0,00%							

		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		278.841.856,00	42,00%	116.184.100,00	42,00%	110.758.000,00	100,00 %	95,33%						
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		0,00%		42,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**583.409.950,00**		**404.331.950,00**		**333.167.875,00**		**82.4%**						
		14	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		93.053.000,00	49,00%	45.635.000,00	49,00%	32.819.522,00	100,00 %	71,92%						
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 unit		0 unit		15 unit		49,00%		49,00%		100,00 %							
		15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		60.330.000,00	65,00%	39.115.000,00	65,00%	38.455.000,00	100,00 %	98,31%						
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		0 unit		0 unit		8 unit		65,00%		65,00%		100,00 %							
		16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		132.400.000,00	99,78%	132.100.000,00	99,78%	123.996.653,00	100,00 %	93,87%						
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		0 Unit		0 Unit		7 Unit		0,00%		99,82%		0,00%							
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		297.626.950,00	63,70%	187.481.950,00	63,70%	137.896.700,00	100,00 %	73,55%						
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		63,70%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00 %**	**89,86%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan**	**jumlah NRR* nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**85,00 -**	**0**	**84,21 -**	**0**	**84,40 -**	**31.470.000,00**	**84.40 -**	**16.450.000,00**	**84.40 -**	**15.090.000,00**	**100%**	**91,73%**						
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**20.300.000,00**		**7.350.000,00**		**5.990.000,00**		**81.5%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		20.300.000,00	37,00%	7.350.000,00	37,00%	5.990.000,00	100,00 %	81,50%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		37,00%		37,00%		100,00 %							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**11.170.000,00**		**9.100.000,00**		**9.100.000,00**		**100%**						
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		11.170.000,00	82,00%	9.100.000,00	82,00%	9.100.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		82,00%		82,00%		100,00 %							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00 %**	**90,75%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-**	**750.000.000 rupiah**	**0**	**722.994.000 rupiah**	**0**	**750.000.000 rupiah**	**2.395.026.170,00**	**375.000.000 rupiah**	**952.035.170,00**	**402.300.000 rupiah**	**631.141.450,00**	**107%**	**66,29%**						

	Kemantren Ngampilan				**masing Kelurahan**																		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									**150.651.000,00**		**54.835.000,00**		**54.805.000,00**		**99.95%**						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		150.651.000,00	36,40%	54.835.000,00	36,38%	54.805.000,00	99,95%	99,95%						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		17 Laporan		36,40%		36,38%		99,95%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**2.003.341.170,00**		**809.743.170,00**		**500.563.450,00**		**61.82%**						
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		41.412.500,00	100,00%	41.412.500,00	100,00%	39.712.500,00	100,00 %	95,89%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		15 lembaga		100,00%		100,00%		100,00 %							
		3	Evaluasi Kelurahan				0		0		8.330.170,00	82,00%	6.764.170,00	82,00%	6.764.170,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Lembaga		0 Lembaga		15 Lembaga		82,00%		82,00%		100,00 %							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**54.832.750,00**		**34.812.000,00**		**34.743.000,00**		**99.8%**						
		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		27.297.750,00	35,00%	9.347.000,00	35,00%	9.278.000,00	100,00 %	99,26%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		15 Lembaga Masyarakat		35,00%		35,00%		100,00 %							
		5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		27.535.000,00	93,00%	25.465.000,00	93,00%	25.465.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		93,00%		93,00%		100,00 %							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**186.201.250,00**		**52.645.000,00**		**41.030.000,00**		**77.94%**						
		6	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		41.997.000,00	36,00%	15.045.000,00	36,00%	14.475.000,00	100,00 %	96,21%						
				Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		30 Keluarga		36,00%		36,00%		100,00 %							
		7	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0		80.474.250,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga		0,00%		0,00%		0,00%							
		8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0		8.505.000,00	84,00%	7.125.000,00	84,00%	2.210.000,00	100,00 %	31,02%						
				Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		80 Keluarga		84,00%		84,00%		100,00 %							
		9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		55.225.000,00	55,18%	30.475.000,00	55,18%	24.345.000,00	100,00 %	79,89%						
				Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Tumah Tangga		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		55,18%		55,18%		100,00 %							

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**2.003.341.170,00**		**809.743.170,00**		**500.563.450,00**		**61.82%**							
		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan				0		0		528.362.500,00	15,90%	84.000.000,00	15,90%	83.500.000,00	100,00%	99,40%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		0 unit		0 unit		6 unit		0,00%		15,90%		0,00%								
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan				0		0		591.460.000,00	47,54%	281.200.000,00	0,80%	4.700.000,00	1,68%	1,67%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		5 unit		0,00%		0,80%		0,00%								
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan				0		0		340.029.000,00	60,68%	206.215.000,00	60,68%	180.247.190,00	100,00%	87,41%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		127 pokmas		0,00%		60,68%		0,00%								
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan				0		0		493.747.000,00	38,52%	190.151.500,00	38,52%	185.639.590,00	100,00%	97,63%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		177 pokmas/ormas		0,00%		38,52%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**91,80%**	**82,36%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**62,00 nilai**	**0**	**69,00 nilai**	**0**	**68,00 nilai**	**127.624.000,00**	**34 nilai**	**54.930.000,00**	**34 nilai**	**49.950.000,00**	**100%**	**90,93%**							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**127.624.000,00**		**54.930.000,00**		**49.950.000,00**		**90.93%**							
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		127.624.000,00	43,04%	54.930.000,00	43,03%	49.950.000,00	99,98%	90,93%							
				Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		43,04%		43,03%		99,98%								
										Rata-rata capaian kinerja						**99,98%**	**90,93%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Jumlah Permasalahan di kemantren Ngampilan**	**100%**	**0**	**-**	**0**	**100%**	**40.080.000,00**	**100%**	**24.280.000,00**	**100%**	**23.360.000,00**	**100%**	**96,21%**							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									**40.080.000,00**		**24.280.000,00**		**23.360.000,00**		**96.21%**							
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0		0		17.200.000,00	83,95%	14.440.000,00	83,95%	13.520.000,00	100,00%	93,63%							
				Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang		0 Orang		100 Orang		83,95%		83,95%		100,00%								

		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		22.880.000,00	43,00%	9.840.000,00	43,00%	9.840.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		43,00%		43,00%		100,00 %							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**96,81%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**7.849.292.286,00**		**4.445.132.765,00**		**3.343.770.521,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																**97,11%**	**75,22%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren. 2. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala. 3. Data Pembangunan sudah terkelola dengan baik.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Masih ada kegiatan fisik di kelurahan notoprajan yang masih harus menunggu sertifikat tanah kraton sehingga belum biisa dilaksanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Melakukan tindaklanjut LHMR dan Lakip terutama meningkatkan capaian kinerja fisik per tribulan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Mohon untuk menyusun dokumen lakip 2023 sesuai dengan hasil LHE Lakip tahun 2022.

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala KEMANTREN NGAMPILAN

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE., MM.

NIP. 196808221995032002

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHANRENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2023 adalah **:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah**
   : 403 poin
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : 80,3 poin**

Review Renstra Indikator sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan
   Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan target tahun 2023 yaitu 403 **point dengan** target tiap kelurahan sebagai berikut:
   a. Kelurahan Notoprajan : 402 point
   b. Kelurahan Ngampilan: 404 point

2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat target tahun 2023: 83,30 point.

Review Renstra Indikator Program Perangkat Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan target tahun 2023: 84,4 point.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Ngampilan: Rp750.000.000,- (hasil review Renstra semula Rp600.000.000,-) dengan rincian sebagai berikut:
   - Kelurahan Ngampilan angka swadaya masyarakat: Rp. 506.616.000,-
   - Kelurahan Notoprajan angka swadaya masyarakat: Rp. 243.384.000,-
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indicator program Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan : 68 Pelanggaran Perda.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan indikator program Persentase Permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi: 100% dengan 16 permasalahan.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan : A nilai.

Program dan Kegiatan

Kemantren Ngampilan di Perubahan tahun 2023 memiliki 6 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada 6 (enam) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ada 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ada 4 (empat) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ada 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan ada 1(satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan.

Pembahasan Rencana Kerja Perubahan Kemantren Ngampilan Tahun 2023 antara lain:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN karena 4 orang CPNS diangkat menjadi PNS sehingga ada penambahan anggaran gaji pegawai serta adanya penambahan pegawai pindahan dari luar Kota Yogyakarta
- Sub Kegiatan Admisistrasi Umum Perangkat Daerah; menambah rapat koordinasi untuk persiapan Pemilu
- Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah: menambah pengadaan meja kursi ruang rapat Kemantren dan Kelurahan Notoprajan, pembelian laptop dan sound system Kelurahan Ngampilan,
- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah: Menambahan untuk pemeliharaan Gedung Kantor Kemantren Ngampilan (Ruang rapat) dan Kelurahan Notoprajan (Membuat sekat ruang pelayanan),

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak mengalami perubahan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan : bertambah untuk kegiatan Bimtek Musrenbang dan Pra Musrenbang Kelurahan dan untuk kegiatan sosialisasi pemilihan ketua kampung. Bertambah juga untuk kegiatan sarasehan paguyuban kesenian. Untuk Kelurahan Ngampilan menambah untuk penambahan PJU Kampung dan pekerjaan Rabat Beton dan pengecatan Talud, sedangkan untuk Kelurahan Notoprajan bertambah untuk rapat koordinasi rt rw, workshop penanganan stunting dan workshop penyajian data informasi rumah data kelurahan dan ada pengurangan pada kegiatan fisik di Tengsur dikarenakan masih menunggu proses pembuatan sertifikat tanah.

4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, penambahan anggaran pelaksanaan pembinaan/workshop Linmas dan Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak mengalami perubahan.

6. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan.**

Rangkaian Penyelenggaraan upacara hari Keistimewaan tidak ada perubahan anggaran.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk perubahan tahun 2023 adalah Rp. 8.238.173786,- yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2023 atau bertambah Rp. 388.881.500,- dari anggaran murni sejumlah Rp.7.849.292.286,-

Berikut ini tabel 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota YogyakartaTahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	-	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	0 -	0 -	1 Event	1 Event	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	100,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**5,795,693,786**	**6,170,875,286**					**6,475,627,817**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,155,092,116**	**5,501,432,116**					**5,275,770,487**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**13,420,000**	**13,420,000**					**15,848,570**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	2,020,000	2,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1,849,970
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	7,999,600
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	19 Dokumen	19 Dokumen	5,400,000	5,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	5,999,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,945,923,000**	**4,100,091,000**					**3,871,501,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	12 Laporan	12 Laporan	3,943,203,000	4,097,371,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	3,865,451,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	1,150,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	880,000	880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	900,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	18 Laporan	18 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,840,000	1,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**180,852,607**	**187,062,607**					**185,820,198**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	10 Jenis	10 Jenis	12 Laporan	12 Laporan	9,207,000	9,207,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	9,395,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	12 Laporan	12 Laporan	67,152,807	67,152,807	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	79,736,148

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	12 Laporan	12 Laporan	31,522,800	31,522,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	25,755,300
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	94 Laporan	100 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72,970,000	79,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	70,933,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**47,644,703**	**103,560,703**					**287,862,031**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai		29 Unit	15 unit	15 unit	0	26,816,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	15 Unit	19 Unit	15 unit	15 unit	47,644,703	76,744,703	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	287,862,031
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**383,841,856**	**359,637,856**					**292,589,688**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	2,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	105,000,000	105,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	57,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	278,841,856	254,577,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	233,589,688

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**583,409,950**	**737,659,950**					**622,149,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	15 Unit	15 Unit	57 unit	57 unit	93,053,000	91,703,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	74,840,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Unit	8 Unit	57 unit	57 unit	60,330,000	60,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	55,580,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Unit	7 Unit	57 unit	57 unit	132,400,000	318,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	201,600,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	57 unit	57 unit	297,626,950	267,626,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	290,129,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**31,470,000**	**31,470,000**					**531,771,132**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**20,300,000**	**20,300,000**					**492,000,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	84.4 poin	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,300,000	20,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	492,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**11,170,000**	**11,170,000**					**39,771,132**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	84.4 poin	6 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	1,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	84.4 poin	84.4 poin	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	11,170,000	11,170,000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	84.4 poin	38,571,132

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**441,427,670**	**453,291,170**					**450,409,774**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**150,651,000**	**150,651,000**					**242,500,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	17 Laporan	17 Laporan	12 lembaga	12 lembaga	150,651,000	150,651,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	242,500,000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**49,742,670**	**54,725,170**					**53,759,442**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	15 Lembaga	15 Lembaga	2 Kelurahan	2 Kelurahan	41,412,500	46,395,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	44,292,662
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	3 Laporan	3 Laporan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	8,330,170	8,330,170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	9,466,780
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**54,832,750**	**57,963,750**					**50,649,200**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	15 Lembaga Masyarakat	15 Lembaga Masyarakat	1 Kecamatan	1 Kecamatan	27,297,750	30,428,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	19,089,200
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	4 Laporan	4 Laporan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	27,535,000	27,535,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	31,560,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**0**	**0**					**19,200,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	19,200,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**186,201,250**	**189,951,250**					**84,301,132**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	30 Keluarga	30 Keluarga	2 Kelurahan	2 Kelurahan	41,997,000	41,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	50,221,132
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	85 Keluarga	85 Keluarga	2 Kelurahan	2 Kelurahan	80,474,250	85,349,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	5,000,000
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	80 Keluarga	80 Keluarga	2 Kelurahan	2 Kelurahan	8,505,000	8,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	12,105,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	50 Keluarga	50 Keluarga	2 Kelurahan	2 Kelurahan	55,225,000	54,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	16,975,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**127,624,000**	**134,754,000**					**135,060,424**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**127,624,000**	**134,754,000**					**135,060,424**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	68 Pelanggaran	68 Pelanggaran	4 Laporan	5 Laporan	12 bulan	12 bulan	127,624,000	134,754,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	68 Pelanggaran	135,060,424

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**40,080,000**	**49,928,000**					**82,616,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**40,080,000**	**49,928,000**					**82,616,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	12 Bulan	12 Bulan	17,200,000	27,048,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	59,816,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	22,880,000	22,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	22,800,000
															TOTAL	**5,895,693,786**	**6,270,875,286**					**6,575,627,817**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan Sub
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,022,109,500**	**1,046,509,500**					**953,158,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,022,109,500**	**1,046,509,500**					**953,158,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,022,109,500**	**1,046,509,500**					**928,936,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	6 Unit	6 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	528,362,500	552,762,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	587,380,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Ngampilan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	177 Pokmas / Ormas	177 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	493,747,000	493,747,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	341,556,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**0**	**0**					**24,222,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	2,400,000
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	4,800,000
7	01	03	2.05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	17,022,000
															TOTAL	**1,022,109,500**	**1,046,509,500**					**953,158,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan Sub
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**931,489,000**	**920,789,000**					**846,777,000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**931,489,000**	**920,789,000**					**846,777,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**931,489,000**	**920,789,000**					**838,700,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Notoprajan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	5 Unit	5 Unit	1 Kelurahan	1 Kelurahan	591,460,000	498,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	638,700,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Notoprajan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	127 Pokmas / Ormas	127 Pokmas / Ormas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	340,029,000	421,889,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	200,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**0**	**0**					**8,077,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	4,038,500
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah	4,038,500
															TOTAL	**931,489,000**	**920,789,000**					**846,777,000**

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengurangi anggaran di perubahan anggaran tahun 2023 karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkendala prosedur teknis dan mengurangi anggaran apabila kegiatan sudah dilaksanakan tetapi anggaran masih tersisa.
2. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar rencana kerja ini dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
3. Mengingat banyaknya pekerjaan fisik di kelurahan yang dilaksanakan dengan proses hibah agar mendapatkan perhatian khusus mengingat proses hibah ini memiliki prosedur dan persyaratan tertentu.
4. Kerjasama PPTK, Petugas urusan, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang, Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai tatakala dan diadakan rapat rutin untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Tahun 2023.

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2023 di sipd.kemendagri.go.id APBD Murni 2023: Rp 9.887.762.326,00 Perubahan Renja 2023: Rp 10.466.279.940,00 Keterangan Perubahan (tuliskan secara ringkas, garis besar untuk alasan perubahan yang paling dominan): 1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 608.133.604 (AC 2 PK, kipas angin, jam dinding, mic kabel, mic wireless, stand mic, running text, sound system, LCD proyektor, Layar display projector, computer desktop, Komputer PC, printer, Printer ADF, CCTV indoor, CCTV outdoor) 2) Penambahan pengadaan mebel 423.200.000 (almari arsip pintu kaca, almari piala, kursi lipat, meja rapat lipat, rak besi, sofa set) 3) Penambahan kegiatan sarana prasarana CCTV 22 titik di Kelurahan Patangpuluhan 165.000.000 4) Penambahan kegiatan fisik Kelurahan Pakuncen Peningkatan taman RW 01 36.859.950, Peningkatan MCK RW 6 35.786.400, Hibah timbangan digital 28.900.000 5) Penambahan kegiatan pembinaan/workshop linmas 13.860.750; Karnaval Budaya Patangpuluhan 22.650.000 (lomba tematik dikerjakan bulan November) 6) Pemeliharaan Gedung di Kemantren dan 3 kelurahan 209.142.600	YA	mohon mempertimbangkan prioritas kebutuhan
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.	YA	100.000.000,00 untuk Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
3.	Perubahan Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah menjadi bagian dari Perubahan Renja	YA	Perubahan Penjabaran APBD menjadi bagian dari Perubahan Renja
4.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II	YA	Sudah mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II
5.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai target program / sasaran RPD	YA	Sudah memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6.	Hasil reviu indikator dan target sasaran dan program perangkat daerah untuk Perubahan 2023 telah tertuang dalam file metadata di bit.ly/perencanaanjogjakota dan sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id	YA	sudah menyesuaikan sipd.kemendagri.go.id
7.	Menyusun Narasi Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai tatakala	YA	sedang berproses menyusun narasi renja perubahan
CATATAN: 1) Akhir tahun kemungkinan kesulitan mendapatkan barang (TKDN minimal 25%), mohon mempertimbangkan prioritas dan kualitas barang 2) BPKAD harap menetapkan arahan dan strategi yang tepat untuk efisiensi anggaran (koordinasikan internal) 3) Harap melihat ketersediaan barang dan sinkronisasi harga serta spesifikasi barang 4) Penataan efisiensi anggaran untuk Biaya BBM kendaraan dinas berkonsultasi ke BPKAD 5) Cermin tikungan kewilayahan di jalan lingkungan (jika di jalan beraspal maka meminta rekomendasi Dinas Perhubungan), jika di jalan bernomor ruas pengguna barang bukan kemantren pencatatannya seperti apa konsultasi ke BPKAD 6) Selisih anggaran musrenbang tambah atau geser kurang harap konsultasi ke BPKAD			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juni 2023

Pimpinan Sidang



Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kemantren Wirobrajan

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Dhani Dwi Astuti	Inspektorat Daerah	
2.	Adhitya Kusuma Zaenardi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.	yuke nori aurumbita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.	Febri Furqon Artadi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	Yuli Sri Wulandari	Kemantren Wirobrajan	

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
6.	HERI ISTIYANTO, A. Md	Kemantren Wirobrajan	
7.	budhi riyanto	Kemantren Wirobrajan	
	Dwi Yudhi Purnomo	Kemantren Wirobrajan	
	Giri Widjonartomo	Kemantren Wirobrajan	
	ELIZABETH VENNY HERAWATI	Kemantren Wirobrajan	
	Runti Astiwi	Kemantren Wirobrajan	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2023 di sipd.kemendagri.go.id APBD Murni 2023: Rp 7.849.292.286,00 Perubahan Renja 2023: Rp 8.238.955.786,00 Keterangan Perubahan (tuliskan secara ringkas, garis besar untuk alasan perubahan yang paling dominan): mendasarkan pada prioritas kebutuhan	YA	1) Gaji bertambah 79.956.000 2) Pengadaan Meja Kursi Ruang Rapat Kemantren Ngampilan 15 buah dan Ruang Pelayanan Kelurahan Notoprajan 12 buah 28.816.000 3) Pengadaan Laptop Kelurahan Ngampilan dan Sound System Kelurahan Ngampilan dan Kompor untuk Rumah Dinas 28.600.000 4) Pemeliharaan Gedung Ruang rapat Kemantren Ngampilan penggantian atap dan dinding (kedap suara); Pekerjaan pembongkaran tembok, pasang backdrop dan partisi, keramik, plafon, pengecatan dan bongkar pintu di ruang pelayanan kelurahan Notoprajan total 194.880.000 5) Penambahan workshop penyajian data informasi rumah data kelurahan (RDK) 3 kali sasaran tokoh masyarakat RT RW dan workshop pencegahan stunting 3 kali sasaran remaja 88.020.000 6) Penambahan untuk Gebyar Telo tempe 50.631.500 (lomba memasak dari bahan telo dan tempe, peserta 100 orang)
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.	YA	Rp 100.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
3.	Perubahan Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah menjadi bagian dari Perubahan Renja	YA	Perubahan Penjabaran APBD terakhir menjadi bagian dari Perubahan Renja
4.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II	YA	Sudah mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II
5.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai target program / sasaran RPD	YA	Sudah memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
6.	Hasil reviu indikator dan target sasaran dan program perangkat daerah untuk Perubahan 2023 telah tertuang dalam file metadata di	YA	sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	bit.ly/perencanaanjogjakota dan sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id		
7.	Menyusun Narasi Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai tatakala	YA	Sedang berproses menyusun narasi renja perubahan

CATATAN:
1) Pengadaan barang mendasarkan proses RKBMD, mempertimbangkan pemenuhan TKDN minimal 25%
2) Mempertimbangkan waktu efektif pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan, bersifat urgent dan mendukung sasaran OPD dan Kota Yogyakarta
3) Menghapus sisa anggaran JLOP yang diterima P3K (mekanisme penyelesaian/putus kontrak dan menghapus di e-catalog, administrasi keuangan). Mekanisme pemutusan kontrak (info BPBJ): Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri kepada kepala dinas, selanjutnya kepala dinas memberi wewenang PPK untuk melakukan adendum SPK pada kontrak disesuaikan dengan masa tugas (yang memproses PPK masing-masing OPD). Pengurangan anggaran gaji JLOP di RKPD perubahan mendasarkan tanggal putus kontrak.
4) Mohon secepatnya menyusun SOP mekanisme putus kontrak, penghapusan di e-catalog, LPSE (adminbang dan BPBJ)
5) Koordinasikan dengan BKPSDM terkait penggantian pegawai yang resign sebelum melakukan penghapusan honor JLOP untuk redistribusi sumber daya manusia
6) Telaah sudah masuk ke e-office per Maret 2023 (dikirim Kembali menyesuaikan dengan format telaah terbaru)
7) Mohon segera mengirimkan RKBMD ke BPKAD setelah pembahasan RKPD perubahan
8) Bagi kegiatan fisik yang akan dilaksanakan pada perubahan 2023 yang akan menggunakan metode hibah harus ada keselarasan antara proposal dan telaah hibah dengan dokumen perencanaan. Telaah hibah 2023 perubahan sesuai prosedur Peraturan Walikota no.20 tahun 2021 dikirim via e-office paling lambat 7 Juli 2023

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Juni 2023

Pimpinan Sidang



Agustin Wijayanti, S.SI., M.Ec.Dev

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kemantren Ngampilan

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Eka Rulina	Kemantren Ngampilan	
2.	Silvia S	Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	ANANG MUNANDAR	Kemantren Ngampilan	
4.	Febri Furqon Artadi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
5.	Asih Indahati, SIP	Kemantren Ngampilan	
6.	Yuyun Endarwati	Kemantren Ngampilan	
7.	Rizky Albab Ghiffari	Inspektorat Daerah	



PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

KEMANTREN WIROBRAJAN
Jl. Bugisan Gg. Dorodasih No. 16 Yogyakarta 55251
Telp. 0274 375794
Email : wb@jogjakota.go.id
Th 2023

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman judul		i
Daftar isi		ii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kemantren Wirobrajan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II		5
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023…….	6
	Tabel 2.1……	13
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH		14
3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah ……	14
	Tabel 3.1 ……	21
BAB IV PENUTUP ……..		22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2023-2026.
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 ttg Standar Harga Satuan Barang dan Konstruksi Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 ttg Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kemantren Wirobrajan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA KEMANTREN WIROBRAJAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1.

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perubahan Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Wirobrajan adalah**: Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan.**

Indikator Sasaran Kemantren Wirobrajan Tahun 2023 adalah **:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah : 379 poin**
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah : 82,59 poin**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Wirobrajan Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator- Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN WIROBRAJANTAHUN 2023-2026

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	379	379,66	380	380,66	379	-	-	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	82,59	82,60	82,61	82,62	80,17	-	-	-

Data dari Metadata tahun 2023

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR PROGRAM
KEMANTREN WIROBRAJANTAHUN 2023-2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target				Realisasi			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	83,27 point	83,47 point	83,67 point	83,87 point	-	-	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Wirobrajan	Rp. 955.400.000	Rp. 965.400.000,-	Rp. 975.400.000	Rp. 985.400.000,-	-	-	-	-
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	55 Pelanggaran Perda	50 Pelanggaran Perda	45 Pelanggaran Perda	40 Pelanggaran Perda	-	-	-	-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	-

Data dari Metadata tahun 2023

Pada tahun 2023 Kemantren Wirobrajan melaksanakan 5 program Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sampai dengan Bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 2.825.485.491,- atau 73,71% dari target TW II Rp. 3.832.986.206,- hal ini sebabkan antara lain:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN belum terealisasi karena pembagian anggaran di TW I, II dan III dan terealisasi sesuai kebutuhan.
- Pergeseran ploting anggaran gaji karena anggaran Belanja Tunjangan Jabatan PNS tidak mencukupi.
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor yaitu pembelian tutup gelas harga pasaran lebih murah dari pada anggaran di DPA tahun 2023.
- Belanja Modal Personal Komputer terkendala pembelian lewat e katalog belum terbiasa dan pada proses pembayaran terkendala dana yang tersimpan kurang karena bendahara belum mengajukan SPP GU (karena jumlah angka yang diajukan Ganti Uang /GU belum 30% dari Uang Persediaan/UP).
- Belanja Penambahan Daya untuk Gedung serbaguna Kelurahan Wirobrajan tidak jadi dilaksanakan karena Gedung Serbaguna tidak memerlukan penambahan daya listrik.
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas: harga BBM dipasaran lebih murah daripada anggaran di DPA dan Pemeliharaan Kendaraan yang belum dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pemeliharaan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 102.417.340,- atau 99,21% dari target anggaran Rp.103.223.400,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Sisa rapat koordinasi yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan di Bulan Juli 2023. Anggaran di Jawatan Kemakmuran
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non Usaha. Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Makam tidak hadir semua sehingga uang transport untuk masyarakat sisa. Anggaran di Jawatan Umum.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 1.044.232.809,- atau 91,79 % dari target anggaran Rp.1.137.532.900,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada Ketua TP PKK, Tim Penangkis Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan belum di bayarkan karena menunggu kelengkapan administrasi (SK dll) dan akan dilaksanakan di bulan Juli 2023. Anggaran di Jawatan Sosial
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan : kegiatan Musrengbang dilaksanakan di siang hari diberikan jamuan makan padahal di DPA anggaran jamuan snack dan jamuan makan sehingga ada sisa anggaran jamuan snack. Anggaran di Jawatan Praja.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan:
  a. Belanja Bahan Baku di Kegiatan roadshow pola asuh anak dan remaja, workshop dolanan anak menggunakan bahan percontohan tidak dapat dilaksanakan karena bukan merupakan kegiatan pelatihan yang membutuhkan bahan percontohan.
  b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: Honor Pelayan Masyarakat di ploting awal bulan padahal honor ini diberikan setiap tiga bulan.
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuncen : Pergeseran ploting anggaran Belanja Modal jalan Desa Karena sudah direncana bulan Mei 2023 tetapi terkendala kepemilikan sehingga ploting anggaran digeser di bulan Oktober 2023.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuncen : Belanja Hibah barang timbangan digital direncanakan di Bulan April karena terkendala proporsal tidak lengkap ploting digeser ke Bulan Oktober 2023.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing : Pelatihan gamelan 6 kali dan Pelatihan Tari 10 kali baru sebagian dilaksanakan karena menunggu kesepakatan waktu peserta dan instruktur (pengajar).
- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam : Belanja Bahan-isi Tabung Pemadam Kebakaran tidak dilaksanakan Rp. 4.500.000,- karena APAR dihibahkan ke warga sehingga pemeliharaannya tidak dilaksanakan oleh kemantren (perubahan anggaran dihapus). Anggaran di Jawatan Keamanan.
- Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas : sudah dilaksanakan Sosialisasi penanganan stunting Kemantren Wirobrajan tetapi

SPJ masuk di akhir bulan sehingga SPJ tidak masuk di Bulan Juni 2023. Anggaran di Jawatan Sosial.

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 26.937.000,- atau 99,86 % dari target anggaran Rp.26.937.000,-. Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai tatakala yang direncanakan.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 31.145.171,- atau 89,23 % dari target anggaran Rp. 34.902.500,-. Hal ini disebabkan antara lain:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren di anggaran kelebihan jumlah orang penerima yaitu Kepala KUA yang tidak boleh diberi honorarium karena PNS Kota Yogyakarta.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sampai bulan Juni 2023 terealisasi Rp. 0,- atau 0 % dari target anggaran Rp. 3.800.000,-. Hal ini disebabkan karena kesalahan ploting Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak di bulan Mei dan rapat koordinasi dengan pelaku seni terkendala pelaku seni masih mengikuti festival-festival yang diselenggarakan oleh Dinas.

Hasil desk Renja TW II atau evaluasi pelaksanaan Kegiatan TW II dengan Bappeda terdapat dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN WIROBRAJAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	379 point
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	82,59 point

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**5.935.826.476,00**	**A Nilai**	**3.832.986.206,00**	**A Nilai**	**2.825.485.491,00**	**100%**	**73,71%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**13.291.500,00**		**8.276.500,00**		**8.174.500,00**		**98.77%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.241.500,00	85,79%	2.781.500,00	83,22%	2.697.500,00	97,00%	96,98%						
			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		0		0		0		85,79%		83,22%		97,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		806.000,00	100,00%	806.000,00	100,00%	806.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan lap. hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		806.000,00	100,00%	806.000,00	100,00%	806.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		806.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		806.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.446.000,00	62,84%	3.423.000,00	62,52%	3.405.000,00	99,49%	99,47%						
			Jumlah lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lap. hasil koordinasi penyusunan lap.capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		13 Laporan		62,84%		62,52%		99,49%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.380.000,00	33,33%	460.000,00	33,33%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		33,33%		33,33%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.903.111.250,00**		**3.335.666.196,00**		**2.382.900.887,00**		**71.44%**						
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.897.987.500,00	68,03%	3.333.488.196,00	68,03%	2.380.722.887,00	100,00%	71,42%						
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		0 orang		0 orang		35 orang		68,03%		68,03%		100,00%							
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan				0,00		0,00		1.140.000,00	40,35%	460.000,00	40,35%	460.000,00	100,00%	100,00%						

			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		40,35%		40,35%		100,00%								
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.201.000,00	38,30%	460.000,00	38,30%	460.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		38,30%		38,30%		100,00%								
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		503.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%								
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		480.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.221.000,00	55,68%	680.000,00	55,69%	680.000,00	100,02%	100,00%							
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		55,68%		55,69%		100,02%								
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		578.000,00	100,00%	578.000,00	100,00%	578.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**2.550.000,00**		**1.020.000,00**		**1.020.000,00**		**100%**							
		15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.550.000,00	40,00%	1.020.000,00	40,00%	1.020.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		0		40,00%		40,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**2.415.000,00**		**1.610.000,00**		**770.000,00**		**47.83%**							
		16	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		2.415.000,00	66,00%	1.610.000,00	66,00%	770.000,00	100,00%	47,83%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0		0		0		66,00%		66,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**139.182.846,00**		**85.634.895,00**		**80.263.619,00**		**93.73%**							
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		3.894.375,00	74,00%	2.915.975,00	74,00%	2.914.000,00	100,00%	99,93%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0		0		0		74,00%		74,00%		100,00%								
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		83.098.971,00	63,00%	52.969.420,00	63,00%	48.316.119,00	100,00%	91,22%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0		0		0		63,00%		63,00%		100,00%								
		19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		28.099.500,00	69,00%	19.659.500,00	69,00%	19.534.500,00	100,00%	99,36%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0		0		0		69,00%		69,00%		100,00%								
		20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		24.090.000,00	41,00%	10.090.000,00	41,00%	9.499.000,00	100,00%	94,14%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0		0		0		41,00%		41,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**33.000.000,00**		**33.000.000,00**		**0,00**		**0%**							
		21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		33.000.000,00	100,00%	33.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							

				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**735.075.880,00**		**316.271.615,00**		**309.830.485,00**		**97.96%**								
		22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.500.000,00	78,00%	2.750.000,00	78,00%	2.750.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0		0		0		78,00%		78,00%		100,00%									
		23	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		89.200.000,00	52,00%	46.600.000,00	52,00%	40.232.796,00	100,00%	86,34%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0		0		0		52,00%		52,00%		100,00%									
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		642.375.880,00	41,00%	266.921.615,00	41,00%	266.847.689,00	100,00%	99,97%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		41,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**107.200.000,00**		**51.507.000,00**		**42.526.000,00**		**82.56%**								
		25	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		79.820.000,00	48,00%	38.883.000,00	48,00%	31.307.628,00	100,00%	80,52%								
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0		0		0		48,00%		48,00%		100,00%									
		26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		13.480.000,00	51,00%	6.974.000,00	51,00%	5.568.372,00	100,00%	79,84%								
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0		0		0		51,00%		51,00%		100,00%									
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		13.900.000,00	40,00%	5.650.000,00	40,00%	5.650.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0		0		0		40,00%		40,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**99,85%**	**89,00%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**83,87 point**	**0,00**	**83,2 poin**	**0,00**	**83,27 poin**	**344.935.883,00**	**83,27 poin**	**103.223.400,00**	**83,30 poin**	**102.417.340,00**	**100%**	**99,22%**							**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**315.888.883,00**		**91.710.000,00**		**91.203.940,00**		**99.45%**								
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		315.888.883,00	35,19%	91.710.000,00	35,09%	91.203.940,00	99,72%	99,45%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		35,09%		0,00%									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**29.047.000,00**		**11.513.400,00**		**11.213.400,00**		**97.39%**								
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		10.182.000,00	46,53%	4.737.000,00	46,53%	4.437.000,00	100,00%	93,67%								
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0,00%		49,48%		0,00%									
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		18.865.000,00	36,00%	6.776.400,00	36,00%	6.776.400,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan		0 laporan		0 laporan		3 laporan		36,00%		36,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**99,91%**	**97,71%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing kelurahan**	**985.400.000 rupiah**	**0,00**	**980.585.000 rupiah**	**0,00**	**955.400.000 rupiah**	**3.370.268.967,00**	**486095000 rupiah**	**1.133.932.900,00**	**526015000 rupiah**	**1.004.070.031,00**	**108%**	**88,55%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**85.096.000,00**		**25.111.000,00**		**12.970.000,00**		**51.65%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		85.096.000,00	29,51%	25.111.000,00	29,00%	12.970.000,00	98,27%	51,65%							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		29,51%		29,00%		98,27%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**3.003.263.642,00**		**991.114.825,00**		**915.389.081,00**		**92.36%**							
		2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		54.781.000,00	62,22%	34.087.000,00	65,50%	30.962.000,00	105,27%	90,83%							
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		62,22%		65,50%		105,27%								
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pakuncen				0,00		0,00		444.186.640,00	34,39%	148.170.400,00	34,39%	147.540.000,00	100,00%	99,57%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		7 Unit		0,00%		34,39%		0,00%								
		4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirobrajan				0,00		0,00		322.131.775,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		53 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
		5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan				0,00		0,00		447.160.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		42 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
		6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan				0,00		0,00		524.409.000,00	52,53%	275.480.000,00	47,46%	236.694.701,00	90,35%	85,92%							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		126 Pokmas / Ormas		0,00%		47,46%		0,00%								
		7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirobrajan				0,00		0,00		632.260.977,00	39,93%	252.513.425,00	39,93%	223.227.436,00	100,00%	88,40%							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		162 Pokmas/Ormas		0,00%		39,93%		0,00%								
		8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pakuncen				0,00		0,00		569.322.250,00	48,71%	275.535.000,00	48,71%	273.339.944,00	100,00%	99,20%							
			Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		88 Pokmas/Ormas		0,00%		48,71%		0,00%								
		9 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		9.012.000,00	59,10%	5.329.000,00	59,50%	3.625.000,00	100,68%	68,02%							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 bulan		0 bulan		0 bulan		59,10%		59,50%		100,68%								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**68.165.500,00**		**27.465.250,00**		**21.347.250,00**		**77.72%**							
		10 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		29.140.500,00	50,00%	14.570.250,00	50,50%	8.912.250,00	101,00%	61,17%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 bulan		0 bulan		0 bulan		50,00%		50,50%		101,00%								
		11 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		39.025.000,00	33,00%	12.895.000,00	32,00%	12.435.000,00	96,97%	96,43%							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		33,00%		32,00%		96,97%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								**5.084.000,00**		**2.600.000,00**		**2.600.000,00**		**100%**							
		12 Pembinaan Penanganan Covid-19 di				0,00		0,00		5.084.000,00	51,14%	2.600.000,00	51,14%	2.600.000,00	100,00%	100,00%							

			Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		51,14%		51,14%		100,00%								
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**208.659.825,00**		**87.641.825,00**		**51.763.700,00**		**59.06%**							
		13	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		14.853.000,00	27,85%	4.140.000,00	27,85%	4.140.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		100 Keluarga		27,85%		27,85%		100,00%								
		14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		88.510.000,00	27,14%	24.020.000,00	18,00%	0,00	66,32%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga		0 keluarga		120 keluarga		27,14%		18,00%		66,32%								
		15	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		13.900.000,00	75,00%	10.450.000,00	75,00%	9.760.000,00	100,00%	93,40%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		120 Keluarga		75,00%		75,00%		100,00%								
		16	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		21.374.325,00	93,55%	19.994.325,00	93,55%	15.403.700,00	100,00%	77,04%							
				Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0 keluarga		0 keluarga		40 keluarga		0,00%		93,55%		0,00%								
		17	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		39.210.000,00	20,10%	7.880.000,00	20,00%	7.140.000,00	99,50%	90,61%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 keluarga		0 keluarga		150 keluarga		20,10%		20,00%		99,50%								
		18	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		0,00		15.100.000,00	43,68%	6.595.000,00	43,68%	6.120.000,00	100,00%	92,80%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 keluarga		0 keluarga		120 keluarga		43,68%		43,68%		100,00%								
		19	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		15.712.500,00	92,68%	14.562.500,00	92,68%	9.200.000,00	100,00%	63,18%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 keluarga		0 keluarga		150 keluarga		92,68%		92,68%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**97,55%**	**79,90%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan = Jumlah Pelanggaran Perda**	**40,00 Pelanggaran**	**0,00**	**42,00 Pelanggaran**	**0,00**	**55,00 Pelanggaran**	**50.499.500,00**	**20 Pelanggaran**	**26.974.500,00**	**22 Pelanggaran**	**26.937.000,00**	**90%**	**99,86%**					**mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**			

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**50.499.500,00**		**26.974.500,00**		**26.937.000,00**		**99.86%**								
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		50.499.500,00	53,41%	26.974.500,00	53,41%	26.937.000,00	100,00%	99,86%								
		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		24 laporan		0,00%		53,41%		0,00%									
Rata-rata capaian kinerja														**100,00%**	**99,86%**								
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi Kemantren Wirobrajan) x 100%**	**100,00 persen**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100,00 persen**	**86.231.500,00**	**100% persen**	**34.902.500,00**	**100% persen**	**31.145.171,00**	**100%**	**89,23%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									**86.231.500,00**		**34.902.500,00**		**31.145.171,00**		**89.23%**								
1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		7.602.500,00	70,96%	5.394.500,00	70,96%	5.394.500,00	100,00%	100,00%								
		Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		48 orang		0,00%		70,96%		0,00%									
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		78.629.000,00	37,50%	29.508.000,00	37,75%	25.750.671,00	100,67%	87,27%								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 bulan		0 bulan		0 bulan		37,50%		37,75%		100,67%									
Rata-rata capaian kinerja														**100,33%**	**93,63%**								
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
Total anggaran dari seluruh program									**9.787.762.326,00**		**5.132.019.506,00**		**3.990.055.033,00**										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)														**99,03%**	**77,75%**								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)														**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala dan insidentil. 2. Optimalisasi teknologi dan informasi dalam pengeloaan data. 3. Koordinasi yang berjalan dengan baik dengan masyarakat dan stakeholder vertikal.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kesalahan menganggarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan di hapus di perubahan anggaran. 2. Kesalahan ploting anggaran 2. Harga yang ada di pasaran lebih murah daripada harga di DPA dan tidak dapat di kurangi anggaran di DPA.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Melakukan perubahan anggaran APBD perubahan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Lebih cermat dalam melakukan plotting.

Yogyakarta, 2023 Yogyakarta, 2023

	Disusun oleh	Dievaluasi oleh
	KEMANTREN WIROBRAJAN	Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Sarwanto, SIP, MM	Agus Tri Haryono, ST, MT
	NIP. 197201311998031009	NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Indikator Sasaran Kemantren Wirobrajan Tahun 2023 adalah **:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah : 379 poin**

2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah : 82,59 poin**

Review Renstra Indikator sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan

   Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan target tahun 2023 tetap yaitu **379 point** tetapi mengganti target tiap kelurahan sebagai berikut:

   a. Kelurahan Patangpuluhan: 373 point
   b. Kelurahan Wirobrajan: 377 point
   c. Kelurahan Pakuncen: 387 point

2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat target tahun 2023: 80,20 point.

Review Renstra Indikator Program Perangkat Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan target tahun 2023: 83,27 point.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Wirobrajan: Rp. 980.585.000,- dengan rincian sebagai berikut:
   - Kelurahan Patangpuluhan angka swadaya masyarakat: Rp. 300.585.000,-
   - Kelurahan Pakuncen angka swadaya masyarakat: Rp. 335.000.000,-
   - Kelurahan Wirobrajan angka swadaya masyarakat: Rp. 345.000.000,-
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indicator program Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan : 42 Pelanggaran Perda.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan indikator program Persentase Permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi: 100% dengan 5 permasalahan.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan : A nilai.

Program dan Kegiatan

Kemantren Wirobrajan di Perubahan tahun 2023 memiliki 6 (enam) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada 8 (delapan) Kegiatan dan 29 (dua puluh Sembilan) Sub Kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ada 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ada 5 (lima) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ada 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan ada 1(satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan.

Pembahasan Rencana Kerja Perubahan Kemantren Wirobrajan Tahun 2023 antara lain:

1, **<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</u>**

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN karena 4 orang CPNS diangkat menjadi PNS sehingga ada penambahan anggaran gaji pegawai.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
  a. Penambahan anggaran Pembelian RAM dan SSD untuk meningkatkan kemampuan komputer di Belanja Bahan Komputer.
  b. Penambahan anggaran pembelian perabot kantor (taplak) dan kertas untuk Kemantren dan Kelurahan.
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel menambah anggaran Pengadaan almari piala, kursi lipat, meja rapat, rak siku dan almari sliding kaca untuk Kemantren, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan.

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya menambah anggaran Pengadaan Pompa air, AC, jam dinding, mic kabel, mic wireless, sound sistem, LCD Proyektor, CCTV, komputer PC, printer ADF untuk Kemantren, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat penambahan anggaran membeli perangko untuk mengirim dokumen pelayanan di Jawatan Umum.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Menghapus anggaran penambah daya Gedung serbaguna Kelurahan Wirobrajan karena bangunan akan dibangun ulang dan mengurangi anggaran pembayaran PAM, listrik dan pemasangan PAM di kelurahan Pakuncen.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Menambah anggaran BBM kendaraan dinas roda 4 sebanyak 100 liter karena di anggaran murni 2023 baru dianggarkan 1100 liter.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya penambahan anggaran pemeliharaan APAR untuk internal Kemantren dan pemeliharaan meja tamu.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya penambahan anggaran pemeliharaan gedung Kemantren Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan dan Gedung serbaguna Kelurahan Wirobrajan antara lain pemasangan kanopi untuk tempat parkir Kelurahan Wirobrajan, pemeliharaan partisi kantor, pemeliharaan kunci, pemeliharaan jendela, pemeliharaan pintu, atap bocor, perbaikan wastafel, konblok ambles.

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
   - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Umum menambah makan dan minum rapat di output Monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha menambah anggaran pelaksanaan Sosialisasi perijinan pondokan dan mengurangi anggaran sosialisasi perijinan makam (transport untuk masyarakat) karena peserta sosialisasi tidak sesuai target.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan menambah anggaran monev pendampingan adminduk.

2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen), penambahan anggaran pemeliharaan MCK, pemeliharaan taman dan menunda pelaksanaan pemeliharaan Pos Ronda di kelurahan Pakuncen.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuncen, penambahan anggaran dengan hibah barang timbangan digital yang diberikan kepada LPMK Kelurahan Pakuncen.
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan), penambahan anggaran pembuatan fasilitas umum kemasyarakatan di bekas makam Jopraban Kelurahan Wirobrajan dan penundaan pelaksanaan pembangunan pengembangan kawasan wisata lapangan Mancasan Kelurahan Wirobrajan.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan), mengurangi anggaran pelaksanaan gelar potensi wilayah dan penambahan anggaran pelatihan SDM Bimtek IT Operasional Coding dan Pelatihan pengisian data laporan posyandu secara online di Kelurahan Wirobrajan.

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan), pengurangan anggaran dengan menunda dilaksanakan pemasangan pergola, pembuatan anjang-anjang sayur/buah dan cermin tikungan di Kelurahan Patangpuluhan ditunda dan penambahan anggaran pemasangan CCTV di wilayah Kelurahan Patangpuluhan.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan), menghapus bahan percontohan di acara roadshop pola asuh anak, workshop dolanan tradisional anak Kampung Sindurejan dan penyuluhan penyiapan menu makanan sehat bagi anak usia dini serta mengurangi anggaran instruktur fasilitasi senam Lansia di Kelurahan Patangpuluhan. Menambah anggaran Gebyar kreativitas PAUD, Pelatihan kader MK dan relawan MK, Karnaval Budaya Kelurahan Patangpuluhan.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, penambahan anggaran Fasilitasi forum kelembagaan Bidang Ekonomi : rapat koordinasi kewilayahan di Jawatan kemakmuran.
- Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, penambahan anggaran rapat untuk fasilitasi Forum kelembagaan Bidang pertanian di Jawatan Kemakmuran.
- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, pengurangan anggaran pelaksanaan KKG PKK dan KB Kes dan menambah anggaran Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA dan Workshop gemar makan ikan di Jawatan Sosial.
- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, penambahan

anggaran Rapat Koordinasi Fasilitasi Forum Kelembagaan Bidang Lingkungan di Jawatan Kemakmuran.

- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, mengurangi anggaran pemeliharaan pengisian tabung APAR dan menambah anggaran pelaksanaan apel kesiapsiagaan Bencana Kemantren Wirobrajan di Jawatan Keamanan.

3. **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

   Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, penambahan anggaran pelaksanaan pembinaan/workshop Linmas dan Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye.

4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

   Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, mengurangi anggaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren di anggaran kelebihan jumlah orang penerima yaitu Kepala KUA yang tidak boleh diberi honorarium karena PNS Kota Yogyakarta.

5. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan.** Rangkaian Penyelenggaraan upacara hari Keistimewaan tidak ada perubahan anggaran.

Berikut ini tabel 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY				0
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**6,848,291,684**	**7,527,238,085**					**7,017,538,066**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,935,826,476**	**6,580,756,877**					**5,738,771,151**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**13,291,500**	**13,291,500**					**32,622,923**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	26 dokumen	26 dokumen	3,241,500	3,241,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	5,598,548
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	26 dokumen	26 dokumen	806,000	806,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	2,212,875
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	26 dokumen	26 dokumen	806,000	806,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	2,212,875
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	26 dokumen	26 dokumen	806,000	806,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	1,372,875
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	26 dokumen	26 dokumen	806,000	806,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	1,372,875
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	13 Laporan	13 Laporan	26 dokumen	26 dokumen	5,446,000	5,446,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	14,812,875
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	26 dokumen	26 dokumen	1,380,000	1,380,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	5,040,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,903,111,250**	**4,931,591,250**					**4,534,160,980**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	35 Orang/bulan	31 Orang/bulan	40 laporan	40 laporan	4,897,987,500	4,926,467,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	4,522,886,680
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	40 laporan	40 laporan	1,140,000	1,140,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	2,448,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	40 laporan	40 laporan	1,201,000	1,201,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	2,647,890
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	40 laporan	40 laporan	503,500	503,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	946,575
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	40 laporan	40 laporan	480,250	480,250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	903,945
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	40 laporan	40 laporan	1,221,000	1,221,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	2,647,890
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	40 laporan	40 laporan	578,000	578,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	1,680,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**2,550,000**	**2,550,000**					**913,500**
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	2 laporan	2 laporan	2,550,000	2,550,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	913,500
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,415,000**	**2,415,000**					**1,470,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	2 laporan	2 laporan	2,415,000	2,415,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	1,470,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**139,182,846**	**147,615,346**					**132,190,244**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	14 laporan	14 laporan	3,894,375	3,894,375			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	4,089,094
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Paket	5 Paket	14 laporan	14 laporan	83,098,971	91,531,471			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	76,630,150

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Paket	6 Paket	14 laporan	14 laporan	28,099,500	28,099,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	26,397,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	14 laporan	14 laporan	24,090,000	24,090,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	25,074,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**33,000,000**	**531,780,901**					**252,452,000**
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai		270 Unit	52 unit	52 unit	0	263,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	101,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Unit	51 Unit	52 unit	52 unit	33,000,000	268,060,901			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	151,452,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**735,075,880**	**731,305,880**					**450,527,654**
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	10 laporan	10 laporan	3,500,000	3,650,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	3,675,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	10 laporan	10 laporan	89,200,000	85,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	99,540,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	10 laporan	10 laporan	642,375,880	642,375,880			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	347,312,654
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**107,200,000**	**220,207,000**					**334,433,850**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	14 Unit	14 Unit	26 unit	26 unit	79,820,000	81,270,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	78,120,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	26 unit	26 unit	13,480,000	13,480,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	5,775,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	42 Unit	50 Unit	26 unit	26 unit	13,900,000	19,275,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	17,876,250
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai		5 Unit	26 unit	26 unit	0	106,182,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	232,662,600
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**344,935,883**	**351,830,883**					**520,344,830**
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**315,888,883**	**318,648,883**					**408,660,000**
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	83.27 poin	83.27 poin	2 Dokumen	2 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	315,888,883	318,648,883	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	83.27 poin	408,660,000
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**29,047,000**	**33,182,000**					**111,684,830**
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	83.27 poin	83.27 poin	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	10,182,000	13,857,000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	83.27 poin	12,557,947
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	83.27 poin	83.27 poin	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	18,865,000	19,325,000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	83.27 poin	99,126,883
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**430,798,325**	**443,381,325**					**590,486,890**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**85,096,000**	**85,096,000**					**89,360,250**
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	1 Laporan	1 Laporan	955400000 Rupiah	16 Lembaga	85,096,000	85,096,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	89,360,250
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**63,793,000**	**62,983,000**					**71,529,668**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	210 Lembaga masyarakat	210 Lembaga masyarakat	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	54,781,000	53,971,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	61,869,668
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	9 Laporan	9 Laporan	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	9,012,000	9,012,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	9,660,000
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**68,165,500**	**74,145,500**					**117,046,650**
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	210 Lembaga masyarakat	210 Lembaga masyarakat	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	29,140,500	29,140,500			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	53,973,150
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	3 Laporan	3 Laporan	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	39,025,000	45,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	63,073,500
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**5,084,000**	**5,084,000**					**10,710,000**
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	1 Dokumen	1 Dokumen	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	5,084,000	5,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	10,710,000
7 01 03 2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**208,659,825**	**216,072,825**					**301,840,322**
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	100 Keluarga	100 Keluarga	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	14,853,000	15,773,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	28,665,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	120 Keluarga	120 Keluarga	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	88,510,000	88,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	97,287,960
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	150 Keluarga	150 Keluarga	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	39,210,000	37,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	64,958,775
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	120 Keluarga	120 Keluarga	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	15,100,000	15,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	24,709,912
7 01 03 2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	120 Keluarga	120 Keluarga	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	13,900,000	14,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	22,092,000
7 01 03 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	40 Keluarga	40 Keluarga	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	21,374,325	21,737,325	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	22,876,743
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	150 Keluarga	150 Keluarga	955400000 Rupiah	980585000 Rupiah	15,712,500	22,862,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	41,249,932
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**50,499,500**	**70,817,500**					**72,237,750**
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**50,499,500**	**70,817,500**					**72,237,750**
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	55 Pelanggaran	42 Pelanggaran	24 Laporan	24 Laporan	24 laporan	24 laporan	50,499,500	70,817,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	42 Pelanggaran	72,237,750
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**86,231,500**	**80,451,500**					**95,697,445**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**86,231,500**	**80,451,500**					**95,697,445**
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	48 Orang	48 Orang	100 %	100 %	7,602,500	7,602,500			Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	12,621,000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	78,629,000	72,849,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	83,076,445
											TOTAL	**6,948,291,684**	**7,627,238,085**					**7,017,538,066**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Pakuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,013,508,890**	**881,427,600**					**1,160,354,701**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,013,508,890**	**881,427,600**					**1,160,354,701**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,013,508,890**	**881,427,600**					**1,160,354,701**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pakuncen	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	6 Unit	7 Unit	955400000 Rupiah	335000000 Rupiah	444,186,640	283,205,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	685,728,157
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Pakuncen	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	88 Pokmas / Ormas	88 Pokmas / Ormas	955400000 Rupiah	335000000 Rupiah	569,322,250	598,222,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	474,626,544
															TOTAL	**1,013,508,890**	**881,427,600**					**1,160,354,701**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**954,392,752**	**834,349,802**					**1,140,507,941**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**954,392,752**	**834,349,802**					**1,140,507,941**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**954,392,752**	**834,349,802**					**1,140,507,941**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	53 Unit	1 Unit	955400000 Rupiah	345000000 Rupiah	322,131,775	198,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	517,196,954
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	162 Pokmas / Ormas	162 Pokmas / Ormas	955400000 Rupiah	345000000 Rupiah	632,260,977	636,349,802	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	623,310,987
															TOTAL	**954,392,752**	**834,349,802**					**1,140,507,941**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Patangpuluhan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**971,569,000**	**785,208,000**					**1,126,447,627**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**971,569,000**	**785,208,000**					**1,126,447,627**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**971,569,000**	**785,208,000**					**1,126,447,627**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	42 Unit	41 Unit	955400000 Rupiah	300585000 Rupiah	447,160,000	230,629,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	511,927,500
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	126 Pokmas / Ormas	126 Pokmas / Ormas	955400000 Rupiah	300585000 Rupiah	524,409,000	554,579,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah	614,520,127
															TOTAL	**971,569,000**	**785,208,000**					**1,126,447,627**

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengurangi anggaran di perubahan anggaran tahun 2023 karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkendala prosedur teknis dan mengurangi anggaran apabila kegiatan sudah dilaksanakan tetapi anggaran masih tersisa.Tetapi untuk kegiatan yang fisik paket sisa anggaran tidak boleh dihilangkan.
2. Pembagian anggaran agar diperhatikan karena jika tidak sesuai pelaksanaan target bulanan tidak tercaapai.
3. Menyelesaikan kegiatan sesuai tatakala yang sudah ditetapkan termasuk dokumen pengadaan yang sering menjadi hambatan proses SPJ dan PPTK dan PPKom harus segera mencari cari jalan keluarnya agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai tatakala .
4. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mengawal pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai tatakala;
5. Kerjasama PPTK, Petugas urusan, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang, Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai tatakala dan diadakan rapat rutin untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan.
6. Adanya teknologi informasi dan sistem yang memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD Kematren Wirobrajan Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiaan dan sub kegiaan Kemantren Wirobrajan Tahun 2023.

Yogyakarta, 3 Juli 2023

Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan



SARWANTO, S.I.P., M.M.

NIP. 19720131 199803 1 009

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2023 di sipd.kemendagri.go.id APBD Murni 2023: Rp 9.887.762.326,00 Perubahan Renja 2023: Rp 10.466.279.940,00 Keterangan Perubahan (tuliskan secara ringkas, garis besar untuk alasan perubahan yang paling dominan): 1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 608.133.604 (AC 2 PK, kipas angin, jam dinding, mic kabel, mic wireless, stand mic, running text, sound system, LCD proyektor, Layar display projector, computer desktop, Komputer PC, printer, Printer ADF, CCTV indoor, CCTV outdoor) 2) Penambahan pengadaan mebel 423.200.000 (almari arsip pintu kaca, almari piala, kursi lipat, meja rapat lipat, rak besi, sofa set) 3) Penambahan kegiatan sarana prasarana CCTV 22 titik di Kelurahan Patangpuluhan 165.000.000 4) Penambahan kegiatan fisik Kelurahan Pakuncen Peningkatan taman RW 01 36.859.950, Peningkatan MCK RW 6 35.786.400, Hibah timbangan digital 28.900.000 5) Penambahan kegiatan pembinaan/workshop linmas 13.860.750; Karnaval Budaya Patangpuluhan 22.650.000 (lomba tematik dikerjakan bulan November) 6) Pemeliharaan Gedung di Kemantren dan 3 kelurahan 209.142.600	YA	mohon mempertimbangkan prioritas kebutuhan
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.	YA	100.000.000,00 untuk Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
3.	Perubahan Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah menjadi bagian dari Perubahan Renja	YA	Perubahan Penjabaran APBD menjadi bagian dari Perubahan Renja
4.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II	YA	Sudah mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II
5.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai target program / sasaran RPD	YA	Sudah memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6.	Hasil reviu indikator dan target sasaran dan program perangkat daerah untuk Perubahan 2023 telah tertuang dalam file metadata di bit.ly/perencanaanjogjakota dan sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id	YA	sudah menyesuaikan sipd.kemendagri.go.id
7.	Menyusun Narasi Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai tatakala	YA	sedang berproses menyusun narasi renja perubahan
CATATAN: 1) Akhir tahun kemungkinan kesulitan mendapatkan barang (TKDN minimal 25%), mohon mempertimbangkan prioritas dan kualitas barang 2) BPKAD harap menetapkan arahan dan strategi yang tepat untuk efisiensi anggaran (koordinasikan internal) 3) Harap melihat ketersediaan barang dan sinkronisasi harga serta spesifikasi barang 4) Penataan efisiensi anggaran untuk Biaya BBM kendaraan dinas berkonsultasi ke BPKAD 5) Cermin tikungan kewilayahan di jalan lingkungan (jika di jalan beraspal maka meminta rekomendasi Dinas Perhubungan), jika di jalan bernomor ruas pengguna barang bukan kemantren pencatatannya seperti apa konsultasi ke BPKAD 6) Selisih anggaran musrenbang tambah atau geser kurang harap konsultasi ke BPKAD			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juni 2023

Pimpinan Sidang

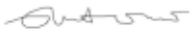
Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kemantren Wirobrajan

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Dhani Dwi Astuti	Inspektorat Daerah	
2.	Adhitya Kusuma Zaenardi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.	yuke nori aurumbita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.	Febri Furqon Artadi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	Yuli Sri Wulandari	Kemantren Wirobrajan	

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
6.	HERI ISTIYANTO, A. Md	Kemantren Wirobrajan	
7.	budhi riyanto	Kemantren Wirobrajan	
	Dwi Yudhi Purnomo	Kemantren Wirobrajan	
	Giri Widjonartomo	Kemantren Wirobrajan	
	ELIZABETH VENNY HERAWATI	Kemantren Wirobrajan	
	Runti Astiwi	Kemantren Wirobrajan	

KEMANTREN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I - PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... **4**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 4

BAB III - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH **15**

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 15

BAB IV - PENUTUP **31**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II di Tahun 2023, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; dan
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada bulan Mei 2023, Kemantren Mantrijeron melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) terhadap Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023 dengan data di bawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023	
			Awal	Review
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	375 poin	383,67 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	86,71 poin	AA Nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai Review Renstra dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN MANTRIJERON TAHUN 2023-2026

No	Tujuan/Sasaran	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2023
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	383,67	384,67	386	387	383,67
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	*Belum ada hasil penilaian RB oleh Inspektorat*

Data dihimpun dari Review Renstra Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Prosedur birokrasi untuk penyediaan layananan permakanan dalam kegiatan penanggulangan Stunting di Kelurahan Gedongkiwo dari dinas terkait direspon lambat dan berbelit.
5. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan :
    a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
    b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
8. Realita swadaya masyarakat jauh lebih besar, tetapi pengumpulan datanya belum efektif.
9. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
11. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berikut ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN MANTRIJERON
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	375 poin																			
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	86.71 poin																			

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	- -	0,00	- -	0,00	- -	0,00	- -	0,00	- -	0,00	- -	0,00	0,00%	0,00%						
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																						
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
															Rata-rata capaian kinerja		**0,00%**	**0,00%**						
															Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**2.925.782.555,00**	**100%**	**0,00%**					**Kemantren Mantrijeron**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.588.000,00	61,54%	2.208.000,00	61,54%	2.205.000,00	100,00%	99,86%								
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		61,54%		61,54%		100,00%									
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.656.000,00	33,33%	552.000,00	33,33%	0,00	100,00%	0,00%								
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		33,33%		33,33%		100,00%									
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%								
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									

		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		6.670.000,00	53,45%	3.565.000,00	53,45%	3.553.000,00	100,00 %	99,66%						
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		53,45%		53,45%		100,00 %							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.380.000,00	33,33%	460.000,00	33,34%	460.000,00	100,03 %	100,00%						
				Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		33,33%		33,34%		100,03 %							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.918.657.500 ,00	68,10%	3.167.739.460 ,00	68,10%	2.500.742.606 ,00	100,00 %	78,94%						
				Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		37 Orang		68,10%		68,10%		100,00 %							
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00 %	100,00%						
				Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		2.898.000,00	71,43%	2.070.000,00	71,43%	1.606.000,00	100,00 %	77,58%						
				Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		71,43%		71,43%		100,00 %							
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.242.000,00	33,33%	414.000,00	33,34%	414.000,00	100,03 %	100,00%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		33,33%		33,34%		100,03 %							
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.242.000,00	33,33%	414.000,00	33,33%	414.000,00	100,00 %	100,00%						
				Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		33,33%		33,33%		100,00 %							
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.898.000,00	71,43%	2.070.000,00	71,43%	1.651.000,00	100,00 %	79,76%						
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		71,43%		71,43%		100,00 %							
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.242.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					

		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.035.000,00	66,67%	690.000,00	66,67%	345.000,00	100,00 %	50,00%							
				Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		66,67%		66,67%		100,00 %								
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00 %	100,00%							
				Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00 %	100,00%							
				Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00 %								
		18	PembinaanPengawasandan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		1.035.000,00	33,33%	345.000,00	33,33%	0,00	100,00 %	0,00%							
				Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		33,33%		33,33%		100,00 %								
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	25,00%	345.000,00	25,00%	0,00	100,00 %	0,00%							
				Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		25,00%		25,00%		100,00 %								
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0,00		0,00		1.380.000,00	60,00%	828.000,00	60,00%	552.000,00	100,00 %	66,67%							
				Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		37 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00 %								
		23	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		3.680.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	0,00	100,00 %	0,00%							
				Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		37 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00 %								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		9.417.100,00	72,21%	6.800.000,00	72,21%	3.077.900,00	100,00 %	45,26%							
				Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		72,21%		72,21%		100,00 %								
		25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		67.390.776,00	53,05%	35.749.032,00	53,05%	27.589.155,00	100,00 %	77,17%							
				Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		0,00%		53,05%		0,00%								

		26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		4.850.600,00	63,91%	3.100.000,00	63,91%	2.274.000,00	100,00 %	73,35%						
				Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		63,91%		63,91%		100,00 %							
		27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		29.356.250,00	51,10%	15.000.000,00	51,10%	9.390.800,00	100,00 %	62,61%						
				Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		51,10%		51,10%		100,00 %							
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		85.850.000,00	51,00%	43.735.000,00	51,00%	32.246.000,00	100,00 %	73,73%						
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		51,00%		51,00%		100,00 %							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		46.000.000,00	35,60%	16.000.000,00	35,60%	16.000.000,00	100,00 %	100,00%						
				Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		35,60%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.100.000,00	76,19%	1.600.000,00	76,19%	1.510.500,00	100,00 %	94,41%						
				Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		76,19%		0,00%							
		31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		86.400.000,00	50,00%	43.200.000,00	50,00%	36.914.823,00	100,00 %	85,45%						
				Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		50,00%		0,00%							
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		538.353.000,00	36,96%	198.364.000,00	36,96%	192.600.200,00	100,00 %	97,09%						
				Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0,00%		36,96%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		25.950.000,00	45,94%	11.750.000,00	45,94%	11.032.320,00	100,00 %	93,89%						
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		45,94%		0,00%							
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		85.106.000,00	45,37%	38.610.910,00	45,37%	30.943.211,00	100,00 %	80,14%						
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		17 Unit		0,00%		45,37%		0,00%							
		35	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		9.725.000,00	73,78%	7.175.000,00	73,78%	7.175.000,00	100,00 %	100,00%						
				Mebel yang Dipelihara		0		0		0		73,78%		73,78%		100,00 %							
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		31.030.000,00	80,73%	23.000.000,00	80,73%	11.899.000,00	100,00 %	51,73%						
				Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		80,73%		0,00%							
		37					0,00		0,00		211.700.000,00	99,50%	211.700.000,00	94,81%	27.737.040,00	95,29 %	13,10%						

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		94,81%		0,00%								
											Rata-rata capaian kinerja							**86,36 %**	**62,17%**						
											Predikat kinerja							**Tinggi**	**Rendah**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,20 poin**	**0,00**	**84,88 poin**	**0,00**	**84,97 poin**	**0,00**	**84.97 poin**	**0,00**	**84.97 poin**	**248.712.685,00**	**100%**	**0,00%**					**Kemantren Mantrijeron**	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																							
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		320.065.000,00	78,48%	220.630.000,00	78,49%	206.598.085,00	100,01 %	93,64%							
				Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0		0		0		0,00%		78,49%		0,00%							
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		12.001.000,00	91,38%	10.966.000,00	91,38%	10.966.000,00	100,00 %	100,00%							
				Dokumen Perizinan Non Usaha		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		91,38%		91,38%		100,00 %								
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		76.408.625,00	48,00%	32.449.375,00	48,00%	31.148.600,00	100,00 %	95,99%							
				Laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		48,00%		48,00%		100,00 %								
											Rata-rata capaian kinerja					**100,00 %**	**96,54%**							
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**640.000.000 rupiah**	**0,00**	**1.570.751.358 rupiah**	**0,00**	**595.000.000 rupiah**	**0,00**	**297.500.000 rupiah**	**0,00**	**558.308.900 rupiah**	**1.014.870.080,00**	**187%**	**0,00%**					**Kemantren Mantrijeron**	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																							
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		255.745.400,00	55,72%	142.490.400,00	55,72%	100.867.500,00	100,00 %	70,79%							
				Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		55,72%		55,72%		100,00 %								
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							

		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		40.790.000,00	90,00%	35.510.000,00	90,00%	31.210.000,00	100,00 %	87,89%							
				Lembaga Kemasyarakatan yang berpartispasi dalam forum Musrenbang		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		90,00%		90,00%		100,00 %								
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron				0,00		0,00		613.940.000,00	10,91%	3.690.000,00	0,60%	3.690.000,00	5,50%	100,00%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 unit		0 unit		12 unit		0,00%		0,60%		0,00%								
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan				0,00		0,00		560.878.040,00	0,50%	2.500.000,00	0,50%	1.404.000,00	100,00 %	56,16%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		12 unit		0,00%		0,50%		0,00%								
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo				0,00		0,00		591.747.850,00	8,21%	48.003.333,00	7,61%	19.134.000,00	92,69 %	39,86%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		22 Unit		0,00%		7,61%		0,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo				0,00		0,00		704.374.187,00	56,76%	372.886.157,00	56,76%	349.667.900,00	100,00 %	93,77%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		129 Pokmas		0,00%		56,76%		0,00%								
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan				0,00		0,00		550.550.500,00	41,44%	201.179.500,00	36,06%	162.971.500,00	87,02 %	81,01%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		34 pokmas		0,00%		36,06%		0,00%								
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron				0,00		0,00		466.232.100,00	52,69%	245.215.100,00	52,69%	241.957.100,00	100,00 %	98,67%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		119 Pokmas/Ormas		0,00%		52,69%		0,00%								
		9	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		8.510.000,00	100,00%	8.510.000,00	100,00%	3.910.000,00	100,00 %	45,95%							
				Laporan hasil evaluasi kelurahan		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																						
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		33.727.500,00	25,00%	6.676.500,00	25,00%	5.474.000,00	100,00 %	81,99%							
				Lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan		0 lembaga		0 lembaga		3 lembaga		25,00%		25,00%		100,00 %								
		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		56.570.000,00	57,69%	32.430.000,00	57,69%	25.625.000,00	100,00 %	79,02%							
				Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		57,69%		0,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																						
		12					0,00		0,00		6.900.000,00	100,00%	6.900.000,00	100,00%	6.824.000,00	100,00 %	98,90%							

			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																						
		13	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00 %	100,00%							
				Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga		0 keluarga		55 keluarga		50,00%		50,00%		100,00 %								
		14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		53.860.000,00	90,61%	48.800.000,00	90,61%	42.435.000,00	100,00 %	86,96%							
				Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		55 Keluarga		90,61%		90,61%		100,00 %								
		15	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		28.510.000,00	38,64%	6.700.000,00	38,65%	6.405.080,00	100,03 %	95,60%							
				Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga		0 keluarga		55 keluarga		0,00%		38,65%		0,00%								
		16	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		20.115.000,00	80,76%	16.245.000,00	80,76%	12.375.000,00	100,00 %	76,18%							
				Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		55 Keluarga		80,76%		80,76%		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja																**92,83 %**	**80,80%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron = Jumlah Pelanggaran Perda**	**36,00 pelanggaran**	**0,00**	**24,00 pelanggaran**	**0,00**	**36,00 pelanggaran**	**0,00**	**18 pelanggaran**	**0,00**	**10 pelanggaran**	**23.024.000,00**	**144%**	**0,00%**				**Kemantren Mantrijeron**		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		75.610.000,00	46,20%	34.935.000,00	46,20%	23.024.000,00	100,00 %	65,91%							
				Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		46,20%		46,20%		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**65,91%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mantrijeron)x 100%**	**79,00 persen**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**76,00 persen**	**0,00**	**76 persen**	**0,00**	**100 persen**	**13.780.000,00**	**131.58 %**	**0,00%**					**Kemantren Mantrijeron**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																					
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0,00		0,00		20.640.000,00	57,56%	11.880.000,00	57,56%	5.940.000,00	100,00 %	50,00%						
				Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang		0 Orang		30 Orang		57,56%		57,56%		100,00 %							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00		0,00		30.460.000,00	40,00%	11.760.000,00	40,00%	7.840.000,00	100,00 %	66,67%						
				Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00 %							
															Rata-rata capaian kinerja								**100,00 %**	**58,33%**
															Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Rendah**
															Total anggaran dari seluruh program		**0,00**		**0,00**		**4.226.169.320,00**			
															Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)								**88,01 %**	**0%**
															Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)								**Tinggi**	**Sangat Rendah**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sinergitas yang baik antara Kemantren, Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Forkompintren Plus (Polsek, Koramil, KUA dan Puskesmas) dalam pembangunan wilayah. 2. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. 3. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan kampung dan lembaga sosial kemasyarakatan tingkat Kelurahan. 4. Koordinasi rutin/rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Kemantren secara berkala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas. 2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas. 3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait. 4. Penambahan volume dan lamanya pekerjaan dari penggunaan dobel sistem penatausahaan keuangan (SIPKD dan SIPD)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Berkoordinasi dengan BKPSDM dan menginfokan tindaklanjut dari kekurangan SDM yang ada di Kemantren Mantrijeron. 2. Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait dengan tatakala dan mekanisme pembangunan sarpras.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: -

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	383,67 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Mantrijeron pada Tahun 2023 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Kegiatan :
   a. Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya
      Sub Kegiatan :
      1) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan :
   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Evaluasi Kelurahan
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mantrijeron)
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mantrijeron)
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Suryodiningratan)
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Suryodiningratan)
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedongkiwo)
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedongkiwo)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan :

1) Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2023, Kemantren Mantrijeron pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menambah untuk penyesuaian Gaji Pegawai, Nglaras Gongso Gamelan, Konsultan Perencana Tahun N-1 untuk rehabilitasi atap Kelurahan Mantrijeron, dan pembelian barang-barang yang digunakan untuk mendukung

kegiatan operasional pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ada penambahan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Makam Sarilaya.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren ada penambahan untuk pembuatan video Profil Kemantren. Di Kelurahan Gedongkiwo menambah fasilitasi rapat kelembagaan masyarakat, Pentas Seni Budaya dan Gelar Potensi UMKM. Di Kelurahan Suryodiningratan menambah kegiatan Gelar Potensi dan Kesenian Suryodiningratan #2 serta belanja antropometri set dan tensimeter untuk hibah barang kepada masyarakat. Di Kelurahan Mantrijeron menambah fasilitasi rapat kelembagaan masyarakat, Gebyar PAUD dan Gebyar Lansia.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sarasehan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RW se-Kemantren Mantrijeron.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan menambah fasilitasi rapat untuk Kelompok Pertanian, Pelatihan Budidaya Cabe Jawa, dan Pelatihan Bank Sampah.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menambah Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Peningkatan Kapasitas Linmas dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.

Selain itu, terdapat beberapa pengurangan anggaran sesuai penyesuaian kebijakan hibah tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengurangan anggaran juga dilakukan pada kegiatan yang dilakukan efisiensi berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	**22**	**8**	**05.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**0**
2	22	8	05.07	6	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					1 Laporan	1 Laporan			100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan				0
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**7,231,634,751**	**7,630,190,291**		**7,082,802,059**			
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,189,882,226**	**6,489,382,966**		**5,893,843,802**			
7	**1**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**15,824,000**	**15,824,000**		**18,120,000**			
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	3,588,000	3,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,960,000
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,656,000	1,656,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000

7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,150,000	1,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,260,000
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	6,670,000	6,670,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	7,620,000
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,380,000	1,380,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,500,000
7	**1**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,929,559,500**	**5,122,197,500**					**4,743,864,000**
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100 %	100 %	4,918,657,500	5,111,295,500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	4,731,284,000
7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,380,000	1,380,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,600,000

7	1	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2,898,000	2,898,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,240,000
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,242,000	1,242,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,500,000
7	1	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,242,000	1,242,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,500,000
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,898,000	2,898,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,240,000
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,242,000	1,242,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,500,000
7	**1**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**6,210,000**	**6,210,000**					**5,400,000**
7	1	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,035,000	1,035,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	900,0000
7	1	1	02.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	600,0000

7	1	1	02.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	690,000	690,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	600,0000
7	1	1	02.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,035,000	1,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	900,0000
7	1	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,380,000	1,380,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,200,000
7	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	690,000	690,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	600,0000
7	1	1	02.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	690,000	690,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	600,0000
7	**1**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**5,060,000**	**5,060,000**					**4,400,000**
7	1	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	37 Dokumen	37 Dokumen	100 %	100 %	1,380,000	1,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	1,200,000
7	1	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	37 Dokumen	37 Dokumen	100 %	100 %	3,680,000	3,680,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	3,200,000

7	**1**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**												**196,864,726**	**202,597,426**					**183,529,726**
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	9,417,100	9,417,100			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	9,417,100
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	67,390,776	66,286,276			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	66,390,776
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	4,850,600	11,687,800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	4,195,600
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	29,356,250	29,356,250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	29,356,250
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	85,850,000	85,850,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	74,170,000
7	**1**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												**46,000,000**	**146,527,000**					**102,750,000**
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan			4 Unit	45 Unit			46,000,000	146,527,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				102,750,000
7	**1**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												**626,853,000**	**587,791,000**					**594,275,076**
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	2,100,000	2,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	5,460,000

7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	86,400,000	77,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	68,400,000
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	538,353,000	507,981,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	520,415,076
7	**1**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**363,511,000**	**403,176,040**					**241,505,000**
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	25,950,000	25,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	20,200,000
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	85,106,000	83,706,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	67,500,000
7	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	9,725,000	9,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	9,175,000
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	31,030,000	54,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	19,330,000

7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	A Nilai	A Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	211,700,000	228,965,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	A Nilai	125,300,000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**408,474,625**	**464,040,925**					**535,151,557**
7	**1**	**2**	**02.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**320,065,000**	**375,631,300**					**452,380,000**
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		84.97 poin	84.97 poin	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	320,065,000	375,631,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	84.97 poin	452,380,000
7	**1**	**2**	**02.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**88,409,625**	**88,409,625**					**82,771,557**
7	1	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		84.97 poin	84.97 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	12,001,000	12,001,000			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	84.97 poin	13,486,000
7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		84.97 poin	84.97 poin	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	76,408,625	76,408,625			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	84.97 poin	69,285,557
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**506,567,900**	**540,262,400**					**491,492,700**
7	**1**	**3**	**02.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**255,745,400**	**251,370,400**					**220,190,400**
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	255,745,400	251,370,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	220,190,400
7	**1**	**3**	**02.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**49,300,000**	**68,620,000**					**53,245,000**

7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kelurahan		1572000000 Rupiah	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	40,790,000	37,640,000			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	1572000000 Rupiah	45,845,000
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan			1572000000 Rupiah	3 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	8,510,000	30,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	1572000000 Rupiah	7,400,000
7	**1**	**3**	**02.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**90,297,500**	**92,397,000**					**63,664,500**
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	3 Lembaga masyarakat	3 Lembaga masyarakat	100 %	100 %	33,727,500	36,827,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	34,284,500
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	56,570,000	55,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	29,380,000
7	**1**	**3**	**02.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**6,900,000**	**6,900,000**					**12,000,000**
7	1	3	02.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	6,900,000	6,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	12,000,000
7	**1**	**3**	**02.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**104,325,000**	**120,975,000**					**142,392,800**
7	1	3	02.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	1,840,000	13,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	1,200,000

7	1	3	02.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	53,860,000	53,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	27,150,000
7	1	3	02.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	28,510,000	33,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	26,300,000
7	1	3	02.06	#	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	55 Keluarga	55 Keluarga	100 %	100 %	20,115,000	20,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	595.000.000 Rupiah	87,742,800
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**75,610,000**	**87,244,000**					**85,298,000**
7	**1**	**4**	**02.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**75,610,000**	**87,244,000**					**85,298,000**
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Pelanggaran	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	75,610,000	87,244,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	24 Pelanggaran	85,298,000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**51,100,000**	**49,260,000**					**77,016,000**
7	**1**	**5**	**02.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**51,100,000**	**49,260,000**					**77,016,000**

7	1	5	02.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	20,640,000	18,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76 %	26,426,000
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	30,460,000	30,460,000			Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76 %	50,590,000
TOTAL																**7,331,634,751**	**7,730,190,291**					**7,082,802,059**

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi *outcomes* yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

Yogyakarta, 2023

Mantri Pamong Praja Mantrijeron

AFFRIO SUNARNO, S.Sos.

NIP. 196704191998031002

KOTA
YOGYAKARTA

KEMANTREN MANTRIJERON

Jalan D.I Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos 55141

mantrijeronkec.jogjakota.go.id mj@jogjakota.go.id 0274-375793

PERUBAHAN RENJA
KEMANTREN KRATON



2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud Dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-1
Tabel 2.1 .....II-6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... III-1
Tabel 3.1 ..... III-4
BAB IV PENUTUP IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Kraton disusun melalui evaluasi program kegiatan sampai dengan semester satu Tahun 2021untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
15. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tribulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

   – Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
   – Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada Bulan April 2023 Kemantren Kraton melakukan review Renstra Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton yang pelaksanaannya dengan Evaluasi Kelurahan yang merupakan indikator sasaran OPD Tahun 2023 direview sesuai dengan realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar 385

Kemudian untuk Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton tidak direview nilai BB

Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 85,44 masih dibawah target Tahun 2023 sehingga target Tahun 2023 (target 85,50) tidak direview.

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2022 sudah melebihi target tahun 2023 sehingga target direview dari Rp. 748.539.000,- menjadi Rp. 1.024.570.000,-

Target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2023 direview sesuai dengan realisasi Tahun 2022 yaitu 36 pelanggaran jadi ada penurunan target yang semula 85 menjadi 36.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara

kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Kraton pada Tahun 2023 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Kraton Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Kraton adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton denan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.

Kemudian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kedua adalah Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 sesuai dengan review Renstra dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN KRATON TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	346,67	364,67	251,33	362,33	353	350,67	364,67	380

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN KRATON TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2023
1	Nilai Penilaian mandiri Revormasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB	-
2	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	385,55

Berikut data indikator Program beserta reviewnya yang telah dilaksanakan Kemantren Kraton :

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Sasaran : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton
Indikator : Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	66,90	70,00	70,10	70,20	BB	BB	BB	BB
Realisasasi					70,52			

Sasaran : Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat
Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	365	375	385	395	385	390	395	400
Realisasasi					385,55			

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	85,50	85,75	86,00	86,25	85,50	85,75	86,00	86,25
Realisasasi					85,44			

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	748.539.000	750.915.000	779.615.000	781.706.000	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000
Realisasasi					307.353.000 (TW 1)			

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	85	80	75	70	36	36	36	36
Realisasasi					7 (TW 1)			

5. Tingkat Realisasi Program

Program :Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Indikator :Prosentase Permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Realisasasi					100 %			

6. Keterangan:
   - Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi yaitu Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat Tahun 2023 direview dari angka menjadi huruf, yang semula 66,90 menjadi BB
   - Indikator sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton yang pelaksanaannya dengan Evaluasi Kelurahan yang merupakan indikator sasaran OPD Tahun 2023 direview karena realisasi Tahun 2022 sudah melbihi target tahun 2023, target semula 365 menjadi 385
   - Realisasi program indikator Survai Kepuasan MasyarakatTahun 2023 masih diatas realisasi tahun 2022 sehingga target tidak dinaikan.
   - Untuk Indikator sasaran Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton direview karena realisasi tahun 2022 sudah diatas target 2023, dari target semula 748.539.000 Rupiah menjadi 1.024.570.000 rupiah.
   - Target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda Tahun Tahun 2023 direview sesuai dengan realisasi Tahun 2022 yaitu 36 pelanggaran, jadi ada penurunan target dari 85 menjadi 36 pelanggaran.
   - Target indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Prosentase Permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi masih tetap 100%.

Pada Tahun 2023 Kemantren Kraton telah merencanakan dan melaksanakan 6 program Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun kesimpulan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sampai Triwulan II atau Bulan Juni baru terlaksana koordinasi persiapan pelaksanan Dana Keistimewaan yang berupa pelaksanaan Pentas Seni di Hari Keistimewaan sebesar Rp. 4.640.000,- atau sebesar 100% dari target sampai dengan Bulan Juni 2023.
- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota terealisasi sebesar Rp. 3.016.065.424,- atau sebesar 60,88% dari target sampai dengan Bulan Juni dikarena ada beberapa belanja yang baru dalam proses e catalog seperti meja rapat dan kursi tunggu, serta belanja pemeliharaan gedung kantor dalam proses pencairan, dan belanja internal Kemantren dan Kelurahan seperti belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan kendaraan, piket linmas untuk kantor Kemantren dan Kelurahan terealisasi sesuai dengan kebutuhan, untuk pemeliharaan suku cadang kendaraan dalam proses pelaksanaan dan akan di pertanggung jawabkan di Bulan Juli.
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terealisasi sudah terlaksana sebesar 99,41% dari target Bulan Juni, dengan terlaksananya Sosialisasi Adminduk dan Peizinan IMB dan Reklame serta pelayanan Paten.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tercapai 92,42 % dari target sampai dengan Juni dikarenakan ada beberapa fasilitasi di Kelurahan Patehan seperti fasilitasi karawitan, fasilitasi tari klasik dan fasilitasi RKB yang akan dihapus diperubahan dikarenakan minimnya pesrta serta keua RKB sehingga kegiatan menjadi fakum. Kemudian untuk pengadaan CCTV di Kelurahan Patehan belum bisa dilaksanakan dikarenakan Rekomendasi dari Kominfo belum turun.
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tercapai 42,31% dari target sampai dengan Juni dikarenakan pelaksanaan PAM tidak bisa terealisasi sepenuhnya dikarenakan belum adanya kegiatan-kegiatan sosial yang mebutuhkan pengamanan, serta PAM gerebek syawal jatuh pada akhir bulan Juni sehingga pertanggungjawaban masuk di Bulan Juli.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai 100% sesuai dengan target di Bulan Juni dengan terlakasananya koordinasi Forkompimka, FKUB, FPK dan FKDM sebagai fórum pemecahan permasalahan diwilayah kemantren dan kelurahan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN KRATON

TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	365 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	66.90 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Restra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)**		**100,00%**	**0**	**0,00 -**	**0**	**100,00 %**	**100.000.000,00**	**6 %**	**4.640.000,00**	**6%**	**4.640.000,00**	**6%**	**100,00 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								**100.000.000,00**		**4.640.000,00**		**4.640.000,00**		**100%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0		0		100.000.000,00	12,00 %	4.640.000,00	12,00 %	4.640.000,00	100,00%	100,00 %						

				Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00 %		12,00 %		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00 %**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton**		**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**6.123.198.194,00**	**A nilai**	**3.898.071.711,00**	**A nilai**	**3.016.085.424,00**	**0,00%**	**77,37 %**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**10.440.000,00**		**3.795.000,00**		**3.795.000,00**		**100%**						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.630.000,00	63,27 %	1.250.000,00	63,27 %	1.250.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00 %		63,27 %		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.065.000,00	10,00 %	0	10,00 %	0	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		10,00 %		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.065.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-				0		0		720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00 %						

			SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		100,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		720.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		3.550.000,00	45,09 %	1.480.000,00	45,09 %	1.480.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		5 laporan		0,00 %		45,09 %		0,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		690.000,00	52,00 %	345.000,00	52,00 %	345.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00 %		52,00 %		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**4.667.535.500,00**		**3.173.153.776,00**		**2.374.589.935,00**		**74.83 %**						
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4.660.335.500,00	70,00 %	3.170.268.776,00	70,00 %	2.371.704.935,00	100,00%	74,81 %						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		0,00 %		70,00 %		0,00%							

		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		160.000,00	52,00 %	80.000,00	52,00 %	80.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		52,00 %		0,00%						
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		1.680.000,00	52,00 %	840.000,00	52,00 %	840.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		0,00 %		52,00 %		0,00%						
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		0		700.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00 %		0,00%		0,00%						
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		0		385.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%						
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			0		0		3.930.000,00	43,00 %	1.620.000,00	43,00 %	1.620.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00 %		43,00 %		0,00%						

		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**4.117.000,00**		**943.000,00**		**594.000,00**		**62.99%**						
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		1.035.000,00	35,00%	345.000,00	35,00%	0	100,00%	0,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		35,00%		0,00%							
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	99,64%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		100,00%		0,00%							
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		644.000,00	52,00%	322.000,00	52,00%	319.000,00	100,00%	99,07%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		52,00%		0,00%							
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.610.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		276.000,00	20,00%	0	20,00%	0	100,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		20,00%		0,00%							
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		276.000,00	20,00%	0	20,00%	0	100,00%	0,00%						

				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		20,00 %		0,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**1.380.000,00**		**690.000,00**		**690.000,00**		**100%**					
		21	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		1.380.000,00	55,00 %	690.000,00	55,00 %	690.000,00	100,00%	100,00 %					
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00 %		55,00 %		0,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**168.158.324,00**		**105.369.567,00**		**87.825.292,00**		**83.35 %**					
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		16.090.500,00	73,00 %	11.367.975,00	73,00 %	10.210.500,00	100,00%	89,82 %					
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00 %		73,00 %		0,00%						
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		68.369.774,00	75,66 %	50.267.728,00	75,66 %	41.005.772,00	100,00%	81,57 %					
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00 %		75,66 %		0,00%						
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		5.561.450,00	75,00 %	4.075.266,00	75,00 %	2.996.720,00	100,00%	73,53 %					
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00 %		75,00 %		0,00%						
		25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		25.368.600,00	58,00 %	14.158.598,00	58,00 %	10.711.300,00	100,00%	75,65 %					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00 %		58,00 %		0,00%						
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		200.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%						

		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		52.568.000,00	51,00 %	25.500.000,00	51,00 %	22.901.000,00	100,00%	89,81 %						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00 %		51,00 %		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**394.643.370,00**		**127.513.370,00**		**110.630.600,00**		**86.76 %**						
		28	Pengadaan Mebel				0		0		43.267.700,00	100,00%	43.267.700,00	100,00%	26.775.000,00	100,00%	61,88 %						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit		0 unit		48 unit		0,00 %		100,00%		0,00%							
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		270.925.600,00	8,22 %	3.795.600,00	8,22%	3.795.600,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		28 unit		0,00 %		8,22%		0,00%							
		30	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		80.450.070,00	99,99 %	80.450.070,00	99,99 %	80.060.000,00	100,00%	99,52 %						
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		30 unit		0,00 %		99,99 %		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**584.486.000,00**		**268.716.000,00**		**253.248.128,00**		**94.24 %**						
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.050.000,00	100,00%	80,77 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00 %		100,00%		0,00%							
		32	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		104.400.000,00	65,01 %	66.000.000,00	65,01 %	53.816.423,00	100,00%	81,54 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00 %		65,01 %		0,00%							
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				0		0		478.786.000,00	44,46 %	201.416.000,00	44,02 %	198.381.705,00	99,01%	98,49 %						

			Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00 %		44,02 %		0,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**292.438.000,00**		**217.890.998,00**		**184.712.469,00**		**84.77 %**					
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		98.044.000,00	52,28 %	49.496.998,00	52,28 %	32.629.128,00	100,00%	65,92 %					
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		15 unit		0,00 %		52,28 %		0,00%						
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		19.875.000,00	51,35 %	8.875.000,00	51,35 %	5.315.000,00	100,00%	59,89 %					
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		27 unit		0,00 %		51,35 %		0,00%						
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		174.519.000,00	93,91 %	159.519.000,00	92,67 %	146.768.341,00	98,68%	92,01 %					
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		13 unit		0,00 %		92,67 %		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**99,92%**	**77,46 %**					
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**86,25 poin**	**0**	**85,44 poin**	**0**	**85,75 poin**	**191.476.150,00**	**85,75 poin**	**95.371.750,00**	**85.44 poin**	**94.804.995,00**	**99%**	**99,41 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**60.874.000,00**		**22.960.000,00**		**22.943.245,00**		**99.93 %**					
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat				0		0		60.874.000,00	39,81 %	22.960.000,00	39,81 %	22.943.245,00	100,00%	99,93 %					

			Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00 %		39,81 %		0,00%						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**130.602.150,00**		**72.411.750,00**		**71.861.750,00**		**99.24 %**						
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0		0		26.178.500,00	76,95 %	19.968.500,00	76,95 %	19.968.500,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		76,95 %		0,00%							
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		104.423.650,00	52,22 %	52.443.250,00	52,22 %	51.893.250,00	100,00%	98,95 %						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00 %		52,22 %		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,63 %**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton**	**Persentase swadaya masyarakat total pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan**	**781.706.000,00 rupiah**	**0**	**1.261.258.000,00 rupiah**	**0**	**748.539.000,00 rupiah**	**3.576.960.705,00**	**37426950 0 rupiah**	**1.309.114.770,00**	**59870 1000 rupiah**	**1.209.854.750,00**	**159.97%**	**92,42 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**83.762.500,00**		**27.282.500,00**		**20.157.500,00**		**73.88 %**						

		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		83.762.500,00	39,54 %	27.282.500,00	39,54 %	20.157.500,00	100,00%	73,88 %						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan		7 laporan		0,00 %		39,54 %		0,00%						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**3.310.795.705,00**		**1.168.028.270,00**		**1.081.024.750,00**		**92.55 %**						
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		39.111.000,00	100,00%	39.111.000,00	100,00%	38.880.500,00	100,00%	99,41 %						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		30 Lembaga Kemasyarakatan		0,00 %		100,00%		0,00%						
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan				0		0		452.494.820,00	21,96 %	57.909.520,00	14,86 %	24.416.000,00	67,67%	42,16 %						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		143 unit		0,00 %		14,86 %		0,00%						
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan				0		0		598.510.000,00	25,91 %	105.960.000,00	25,91 %	105.660.000,00	100,00%	99,72 %						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		157 Unit		0,00 %		25,91 %		0,00%						
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten				0		0		552.165.635,00	25,95 %	101.200.000,00	25,95 %	100.800.000,00	100,00%	99,60 %						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		108 unit		0,00 %		25,95 %		0,00%						
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten				0		0		470.436.500,00	51,02 %	228.953.500,00	50,74 %	189.571.500,00	99,45%	82,80 %						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		157 pokmas/ormas		0,00 %		50,74 %		0,00%						

		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan			0		0		697.496.000,00	54,23 %	356.363.500,00	54,03 %	334.065.500,00	99,63%	93,74 %							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		206 pokmas/ormas		0,00 %		54,03 %		0,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan			0		0		495.997.750,00	62,10 %	275.642.750,00	62,00 %	284.784.250,00	99,84%	103,32 %							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		131 pokmas/ormas		0,00 %		62,00 %		0,00%							
		9	Evaluasi Kelurahan			0		0		4.584.000,00	64,41 %	2.888.000,00	64,41 %	2.847.000,00	100,00%	98,58 %							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0,00 %		64,41 %		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**87.875.000,00**		**47.124.000,00**		**45.996.500,00**		**97.61 %**							
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0		0		47.816.000,00	53,79 %	23.690.000,00	53,79 %	22.692.500,00	100,00%	95,79 %							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		30 Lembaga Kemasyarakatan		0,00 %		53,79 %		0,00%							
		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0		0		40.059.000,00	61,79 %	23.434.000,00	61,79 %	23.304.000,00	100,00%	99,45 %							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00 %		61,79 %		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**77.967.500,00**		**58.400.000,00**		**54.396.000,00**		**93.14 %**							
		12	Peningkatan Ketahanan Pangan			0		0		13.560.000,00	100,00%	13.560.000,00	100,00%	13.495.000,00	100,00%	99,52 %							

			Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga		0 keluarga		30 keluarga		0,00 %		100,00%		0,00%						
		13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		19.585.000,00	79,72 %	15.470.000,00	79,72 %	15.405.000,00	100,00%	99,58 %						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		50 keluarga		0,00 %		79,72 %		0,00%						
		14	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0		0		31.322.500,00	80,65 %	23.745.000,00	80,65 %	20.466.000,00	100,00%	86,19 %						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 keluarga		0 keluarga		50 keluarga		0,00 %		80,65 %		0,00%						
		15	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0		0		13.500.000,00	62,67 %	5.625.000,00	62,67 %	5.030.000,00	100,00%	89,42 %						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 keluarga		0 keluarga		40 keluarga		0,00 %		62,67 %		0,00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								**16.560.000,00**		**8.280.000,00**		**8.280.000,00**		**100%**						
		16	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0		0		16.560.000,00	52,00 %	8.280.000,00	52,00 %	8.280.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		52,00 %		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**97,91%**	**91,45 %**					

									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton**	**70,00 pelanggaran**	**0**	**36,00 pelanggaran**	**0**	**85,00 pelanggaran**	**61.275.500,00**	**25 pelanggaran**	**27.880.250,00**	**13 pelanggaran**	**20.258.000,00**	**148%**	**72,66 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**61.275.500,00**		**27.880.250,00**		**20.258.000,00**		**72.66 %**						
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		61.275.500,00	49,15 %	27.880.250,00	49,15 %	20.258.000,00	100,00%	72,66 %						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00 %		49,15 %		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**72,66 %**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kraton) x 100%**	**100,00 persen**	**0**		**0**	**100,00 persen**	**32.445.000,00**	**100 % persen**	**14.288.000,00**	**100 % persen**	**14.288.000,00**	**100%**	**100,00 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**32.445.000,00**		**14.288.000,00**		**14.288.000,00**		**100%**						
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0		0		4.275.000,00	69,00 %	2.850.000,00	69,00 %	2.850.000,00	100,00%	100,00 %						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		60 orang		0,00 %		69,00 %		0,00%						

		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0		0		28.170.000,00	42,52 %	11.438.000,00	42,52 %	11.438.000,00	100,00%	100,00 %					
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		42,52 %		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**100,00 %**					
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program										**10.085.355.549,00**		**5.349.366.481,00**		**4.359.931.169,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**99,33%**	**81,50 %**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Tersedianya SDM yang sehat dan semangat kerja 2. Adanya koordinasi berkelanjutan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya ASN yang pensiun dan TT yang mengundurkan diri 2. Rokomendasi Kominfo belum turun untuk pengadaan CCTV Kel Patehan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

Adapun Kemantren Kraton memiliki dua tujuan itu :

1. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton**
2. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah BB sedangkan target pada akhir Renstra adalah BB.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 385 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI No. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk mmperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapain Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

   Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

   Tujuannya:

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

   Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat

   Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

   a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
   b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;

c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Kraton menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton
   Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat
2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
   Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkekmbangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi 3.

Program dan Kegiatan

Tema Pebangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah : **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat**. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2023, Kemantren Kraton melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

02 Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD

04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

04 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

05 SKPD

06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

04 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

01 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

05 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

01 Pengadaan Mebel

02 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

03 Pengadaan Aset tetap lainnya

07 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

08 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

02 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

01 **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

02 **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

01 **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

02 **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2 Evalusasi Kelurahan

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)

03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

05 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Kraton Tahun 2023 Kemantren Kraton menambah beberapa rincian belanja diantaranya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yaitu dengan

pengadaan meja rapat kemudian di Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya menambah pembelian dispenser dan TV LED 32” , kemudian dalam Pemeliharaan Gedung kantor juga menambah untuk pemeliharaan interior ruang Mantri Pamong Praja, Belanja Modal kanopi dan pemeliharaan talang Kel. Panembahan, pemasangan backdrop ruang rapat Kel. Kadipaten, selanjutnya diusulkan juga penambahan daya listrik untuk kantor Kemantren Kraton karena daya listrik yang ada masih kurang mencukupi yang mengakibatkan MCB sering anjlok, anggaran ini digunakan dalam kegiatan adminstrasi perkantoran dan mendukung peningkatan kinerja dan percepatan proses pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang diampu oleh Jawatan Sosial ada beberapa penambahan anggaran di rincian sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Penyegaran pengadministrasian kegiatan kelompok PKK RT dan RW dikarenakan penganggaran di murni hanya sampai Triwulan 2, pada lomba administrasi PKK tingkat kota dikarenakan pelaksanaan lomba tidak di kemantren sehingga anggaran sewa dihilangkan, selanjutnya ada penambahan anggaran di forum TP PKK Kecamatan Kraton dan forum Pemberdayaan Tingkat Kemantren dikrenakan penganggaran murni hanya sampai dengan TW 2, kemudian pada Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ada pengurangan anggaran di rincian Lomba Masak "Menu Keluarga" Berbasis B2SA, Sosialisasi Penanganan Stunting dikarenakan pengurangan jumlah yang diundang, kemudian ada penambahan anggaran pada monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PMT stanting dikrenakan.pelaksanaan yang tadinya 2 kali menjadi 3 kali. Selanjutanya dalam Sub Kegiatan Nama Sub Keg : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya ada pengurangan pada rician belanja Sosialisasi Penanggulangan Kemiskian dikarenakan di DPA murni ada kelebihan penganggaran transport.

Masih pada Program Pemberdayaan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

- Kel. Patehan ada pengururangan di Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan yaitu pada rincian Pelatihan Tari Klasik, fasilitasi karawitan dan fasilitasi RKB dikarenakan kekurangan peserta tari klasik, kesibukan peserta karawitan sehingga tidak bisa dilaksanakan, kemudian untuk fasilitasi RKB dikarenakan ketua RKB sakit dan belum ada pengganti.
- Kel. Panembahan ada penambahan anggaran di Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yaitu penambahan anggaran pengadaan CCTV dikarenakan anggaran di DPA Murni masih kurang jika disesuaikan dengan rekomendasi Kominfo, Kebutuhan Kel Panembahan 32 titik dan anggaran DPA murni hanya cukup untuk 10 titik sehingga masih ada kekurangan 22 titik.

  Kemudian di Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Interfensi Dini Tumbuh Kembang).
- Kel. Kadipaten pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan juga menambahan anggaran untuk pengadaan CCTV dikarenakan anggaran di DPA Murni masih kurang jika disesuaikan dengan rekomendasi Kominfo. Kebutuhan Kel Kadipaten 8.paket dan baru teranggarkan 4 paket sehingga di perubahan anggaran menambah 4 paket.

  Kemudian di Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel Kadipaten ada tambahan anggaran untuk Pelatihan Adat berbusana Jawa, Pelatihan MC Bahasa Jawa dan Pelatihan packing barang , pelatihan tersebut adalah usulan warga masyarakat yang rencana di usulkan di Musrenbang tp karena keterbatasan pagu sehingga tidak masuk.

Masih dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat tingkat kecamatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang diampu Jawatan Praja ada penambahan anggaran untuk fasilitasi koorinasi persiapan pemilihan kampung.

Selanjutnya di Program Pemberdayaan Mayarakat Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 ditingkat Desa dan Kelurahan yang diampu Jawatan Keamanan ada pengurangan anggaran di karenakan pelaksanaan PPK sudah ditiadakan.

Kemudian di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kemantren Kraton) ada penambahan anggaran pengamanan pemilu yaitu di pergunakan untuk fasilitasi makan monev dan penindakan Tim dibawah koordinasi Jawatan Keamanan berdasarkan pada pengecekan yang dilakukan oleh Bawaslu (fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye) dan Peningkatan Kapasitas Linmas untuk Pemilu pada masing-masing kelurahan di Kemantren Kraton.

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
					KEMANTREN KRATON											**10.085.355.549**	**10.644.760.549**					**10.706.082.446**
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											**100.000.000**	**100.000.000**					
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											**100.000.000**	**100.000.000**					
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											**100.000.000**	**100.000.000**					
					Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya											100.000.000	100.000.000					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

7	**01**				**KECAMATAN**											**9.985.355.549**	**10.544.760.549**						**10.706.082.446**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6.123.198.194**	**6.454.291.194**						**6.102.858.965**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10.440.000**	**10.440.000**						**9.300.000**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2.630.000	2.630.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	2.300.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1.065.000	1.065.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	975.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangk	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1.065.000	1.065.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	975.000

						Kemantren Kraton	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	at Daerah	Kelurahan											Kemantren Kraton		
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	720.000	720.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	675.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	720.000	720.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	675.000

							SKPD													
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	3.550.000	3.550.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	3.100.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	690.000	690.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	600.000
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4.667.535.500**	**4.906.236.500**					**4.507.457.000**

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	29 Orang/bu	29 Orang/bu	100 %	100 %	4.660.335.500	4.899.036.500	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	4.501.027.000
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	160.000	160.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	160.000
7	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1.680.000	1.680.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.500.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Hasil penilaia	Jumlah Laporan	Dukungan	Kota Yog	A Nilai	A Nilai	1 Lap	1 Lapo	100 %	100 %	700.000	700.000	APBD		Hasil penila	A Nila	650.000

					Keuangan Akhir Tahun SKPD	n SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	yakarta, Kraton, Semua Kelurahan			oran	ran						ian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	i	
7	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	385.000	385.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	340.000
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi	anDukungan ketercapaian aankuntabilitas kinerja Perangkat Daerahran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3.930.000	3.930.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	3.480.000

							Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semeste SKPD														
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	345.000	345.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	300.000
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**4.117.000**	**4.117.000**					**4.540.000**
7	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1.035.000	1.035.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.200.000
7	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh	Jumlah Dokumen Pengamanan	Dukungan ketercapaian akuntabi	Kota Yogyakarta, Krat	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	276.000	276.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh	A Nilai	300.000

						Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Barang Milik Daerah SKPD	litas kinerja Perangkat Daerah	on, Semua Kelurahan											Inspektorat untuk Kemantren Kraton		
7	01	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	644.000	644.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	840.000
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1.610.000	1.610.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.600.000
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspekt	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Kraton,	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	276.000	276.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspe	A Nilai	300.000

						orat untuk Kemantren Kraton	Daerah pada SKPD	kinerja Perangkat Daerah	Semua Kelurahan										ktorat untuk Kemantren Kraton		
7	01	01	2,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	276.000	276.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	300.000
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.380.000**	**1.380.000**				**1.400.000**
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1.380.000	1.380.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.400.000
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**168.158.324**	**163.158.324**				**189.862.788**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspekt	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Kraton,	A Nilai	A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	16.090.500	16.090.500	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspe	A Nilai	20.777.750

						orat untuk Kemantren Kraton	eneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	kinerja Perangkat Daerah	Semua Kelurahan											ktorat untuk Kemantren Kraton		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	68.369.774	68.369.774	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	82.649.988
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	5.561.450	5.561.450	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	5.878.450
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	25.368.600	20.368.600	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	29.150.600

						Kraton			n											Kraton		
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	200.000	200.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	200.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	52.568.000	52.568.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	51.206.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**394.643.370**	**431.343.370**					**504.643.370**
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua	A Nilai	A Nilai	48 Unit		100 %	100 %	43.267.700	58.267.700	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	43.267.700

						Kemantren Kraton		dan operasional perkantoran	Kelurahan											Kemantren Kraton		
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Unit		100 %	100 %	270.925.600	284.525.600	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	380.925.600
7	01	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	80 Unit	80 Unit	100 %	100 %	80.450.070	88.550.070	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	80.450.070
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**584.486.000**	**574.286.000**					**588.630.807**
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangk	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1.300.000	1.300.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	1.300.000

						Kemantren Kraton		at Daerah	Kelurahan											Kemantren Kraton		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	104.400.000	94.200.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	104.400.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	478.786.000	478.786.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	482.930.807
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**292.438.000**	**363.330.000**					**297.025.000**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	98.044.000	98.044.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	A Nilai	79.650.000

						Kraton	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		n											Kraton		
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	19.875.000	19.875.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	20.375.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	174.519.000	245.411.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	197.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**191.476.150**	**189.268.150**					**262.913.065**
7	**01**	**02**	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**60.874.000**	**60.874.000**					**134.960.419**

7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85,50 poin	85,50 poin	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	60.874.000	60.874.000	APBD		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	85,50 poin	134.960.419
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**130.602.150**	**128.394.150**					**127.952.646**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85,50 poin	85,50 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	26.178.500	23.970.500	APBD		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	85,50 poin	29.110.000
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Kraton,	85,50 poin	85,50 poin	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	104.423.650	104.423.650	APBD		Nilai Survey Kepuasan Masy	85,50 poin	98.842.646

						Kemantren Kraton	pada Urusan Pemerintahan	kinerja Perangkat Daerah	Semua Kelurahan										arakat Kemantren Kraton		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**309.860.000**	**308.003.000**				**410.427.000**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**83.762.500**	**86.131.500**				**108.190.000**
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	7 laporan	7 laporan	100 %	100 %	83.762.500	86.131.500	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 108,190,000
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**43.695.000**	**43.695.000**				**43.853.000**

7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	n100 %	n100 %	39.111.000	39.111.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 39,188,000
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000		4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	4.584.000	4.584.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 4,665,000
7	**01**	**03**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**87.875.000**	**92.343.000**					**108.242.000**
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	47.816.000	52.284.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 61,742,000

7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	40.059.000	40.059.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 46,500,000
7	**01**	**03**	**2,05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**16.560.000**	**8.280.000**					**17.600.000**
7	01	03	2,05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksanya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000		1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	16.560.000	8.280.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 17,600,000
7	**01**	**03**	**2,06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**77.967.500**	**77.553.500**					**132.542.000**
7	01	03	2,06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksanya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	30 Keluarga	30 Keluarga	100 %	100 %	13.560.000	13.560.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 14,175,000

7	01	03	2,06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	100%	31.322.500	31.503.500	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 31,322,500
7	01	03	2,06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	40 Keluarga	40 Keluarga	100%	100%	13.500.000	12.905.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 14,100,000

							Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
7	01	03	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000		50 Keluarga	50 Keluarga	100 %	100 %	19.585.000	19.585.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 72,944,500
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**61.275.500**	**78.137.500**					**61.220.500**
7	**01**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**										**61.275.500**	**78.137.500**					**61.220.500**
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85 Pelanggar	36 Pelanggar	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	61.275.500	78.137.500	APBD		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	36 Pelanggaran	61.220.500

							Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Negara RI terkait penerapan dan penegakan													
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**32.445.000**	**32.445.000**				**32.660.000**
7	**01**	**05**	**2, 01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**32.445.000**	**32.445.000**				**32.660.000**
7	01	05	2, 01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	100 %	100 %	4.275.000	4.275.000	APBD		Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	4.410.000

							Nasional														
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	28.170.000	28.170.000	APBD		Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	28.250.000
TOTAL																**6.718.254.844**	**6.870.079.530**				**6.870.079.530**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**											**948.492.570**	**944.207.570**				**1.135.982.486**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**948.492.570**	**944.207.570**				**1.135.982.486**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**948.492.570**	**944.207.570**				**1.135.982.486**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbang	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	748.539.000	1.024.570.000	74 unit	74 unit	100 %	100 %	452.494.820	452.494.820	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kema	104.040.000	Rupiah 595,839,520

						Kraton	un													ntren Kraton		
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	748.539.000	1.024.570.000	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	495.997.750	491.712.750	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 540,142,966
TOTAL																**948.492.570**	**944.207.570**					**1.135.982.486**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program			Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	**01**				**KECAMATAN**											**1.296.006.000**	**1.398.756.000**					**1.516.742.174**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.296.006.000**	**1.398.756.000**					**1.516.742.174**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1.296.006.000**	**1.398.756.000**					**1.516.742.174**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)	Angka Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana	Terlaksanya Kegiatan Pember	Kota Yogyakarta, Krat	748.539.000	1.024.570.000	154 unit	154 unit	100 %	100 %	598.510.000	698.510.000	APBD		Angka Swadaya Masy	104.040.000	Rupiah 837,013,002

						Total Kemantren Kraton	Kelurahan yang Terbangun	dayaan Kelurahan	on, Panembahan										arakat Total Kemantren Kraton		
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	748.539.000	1.024.570.000	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	697.496.000	700.246.000	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 679,729,172
															TOTAL	**1.296.006.000**	**1.396.006.000**				**1.516.742.174**

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**									**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program			**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1.022.602.135**	**1.139.652.135**					**1.183.278.256**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.022.602.135**	**1.139.652.135**					**1.183.278.256**
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1.022.602.135**	**1.139.652.135**					**1.183.278.256**
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya	Jumlah Sarana dan	Terlaksananya Kegiata	Kota Yogyaka	748.539.000	1.024.570.0	60 Unit	60 Unit	100 %	100 %	552.165.635	670.365.635	APBD		Angka Swad	104.040.	Rupiah 616,898,156

					(Kadipaten)	Masyarakat Total Kemantren Kraton	Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n Pemberdayaan Kelurahan	rta, Kraton, Kadipaten		00								aya Masyarakat Total Kemantren Kraton	000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	748.539.000	1.024.570.000	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	470.436.500	469.286.500	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 566,380,100
TOTAL																**1.022.602.135**	**1.139.652.135**				**1.183.278.256**

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi ada kalanya masih ada yang kekurangan anggaran dikarenakan keadaan yang tak terduga atau kebutuhan mendadak.
2. Untuk perencanaan penambahan kegiatan di Perubahan anggaran harus mempertimbangkan pelaksaan fisik di Tahun 2023 sebagian besar sudah terploting di TW 4 sehingga harus mempertimbangkan padatnya pekerjaan di TW 4.
3. Belanja barang harus menggunakan e katalog, sehingga harus jauh-jauh hari dipersiapkan.
4. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua jawatan dan juga kelurahan di Kemantren Kraton
5. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
6. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dalam kewenangannya.
7. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat dan diutamakan untuk pemulihan ekonomi akibat pendemi Virus Corona.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren Kraton Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Kraton Tahun 2023.

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Kraton

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KRATON

Drs. Sumargandi, M.Si
NIP. 196903121989031005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
2023

KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi landasan penyusunan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf` (b) dan (c).

Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar kegiatan-kegiatan di Kemantren, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Rencana Kerja OPD Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta merupakan program jangka pendek 1 (satu) tahunan yang diubah untuk mengikuti kebutuhan dan perkembangan dengan renja perubahan. Rencana Kerja Perubahan ini berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu,membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan perubahan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

22. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja OPD ini untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

2. TUJUAN

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

D. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD s/d triwulan II Tahun berjalan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja OPD

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGANTRIWULAN II TAHUN 2023

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan Renja SKPD Kemantren Gondomanan Tahun 2023, meliputi 6 (enam)program yang terdiri dari :

a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan :

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan dari target triwulan II sebesar Rp 5.375.000,- terealisasi sebesar Rp 5.375.000,- atau 100%.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 35.445.650,- dan dari target triwulan II sebesar Rp 16.592.900,- terealisasi sebesar Rp 14.092.900,- atau 84,93% .

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.627.471.748,- dan dari target triwulan II sebesar Rp 1.222.886.772,- terealisasi sebesar Rp 1.150.111.472,- atau 94,05%

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pada tahun 2023 Program ini memiliki input anggaran sebesar Rp 177.950.000,- dan dari target triwulan II sebesar Rp 103.175.000,- terealisasi sebesar Rp 103.175.000,- atau 100% .

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Pada tahun 2023 Program ini memiliki input anggaran sebesar Rp 58.975.000,00 dan dari target triwulan II sebesar Rp 14.650.000,- terealisasi sebesar Rp 14.650.000,- atau 100% .

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.935.834.295,- dan dari target triwulan II sebesar Rp3.321.322.482,- terealisasi sebesar Rp 2.550.842.492,- atau 76,8%.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran s/d triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel. 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	368 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81 Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY**	**Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY**	**1,00 event**	**0**	**- event**	**0**	**1,00 event**	**100.000.000,00**	**1 laporan event**	**5.375.000,00**	**1 laporan event**	**5.375.000,00**	**1%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Gondomanan**	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								**100.000.000,00**		**5.375.000,00**		**5.375.000,00**		**100%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0		0		100.000.000,00	5,38%	5.375.000,00	5,38%	5.375.000,00	100,00%	100,00%						
			Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY		0 event		0 event		1 event		5,38%		5,38%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan**		**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**4.935.834.295,00**	**A**	**3.321.322.482,00**	**A**	**2.550.842.492,00**	**100%**	**76,80%**						
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan**	**Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A**	**0**	**81**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Anom Kemantren Gondomanan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**42.952.000,00**		**18.580.000,00**		**18.280.000,00**		**98.39%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		1.600.000,00	75,00%	1.200.000,00	75,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		75,00%		75,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.200.000,00	33,33%	400.000,00	33,33%	400.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		33,33%		33,33%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		34.752.000,00	41,05%	14.280.000,00	41,09%	14.280.000,00	100,10%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		41,05%		41,09%		100,10%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		1.200.000,00	25,00%	300.000,00	25,00%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		1.800.000,00	66,66%	1.200.000,00	66,67%	1.200.000,00	100,02%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		66,66%		66,67%		100,02%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		2 laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**3.907.080.850,00**		**2.791.563.797,00**		**2.061.621.066,00**		**73.85%**						
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		3.899.880.850,00	71,47%	2.787.363.797,00	71,47%	2.057.721.066,00	100,00%	73,82%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang		0 orang		28 orang		71,47%		71,47%		100,00%							
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		1.200.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0		0		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	300.000,00	100,00%	50,00%						

			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**600.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**		**100%**								
		15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	600.000,00	66,66%	400.000,00	66,67%	400.000,00	100,02%	100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**600.000,00**		**300.000,00**		**300.000,00**		**100%**								
		16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	300.000,00	100,00%	100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**146.128.445,00**		**74.451.685,00**		**58.146.112,00**		**78.1%**								
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	3.755.500,00	50,06%	1.881.000,00	50,06%	1.725.000,00	100,00%	91,71%								
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	47.056.595,00	55,00%	25.892.685,00	55,00%	19.782.262,00	100,00%	76,40%								
		19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		0 paket	0	0 paket	0	5 paket	24.290.000,00	52,03%	12.650.000,00	52,03%	9.648.650,00	100,00%	76,27%								
		20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	71.026.350,00	47,88%	34.028.000,00	47,88%	26.990.200,00	100,00%	79,32%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**12.340.000,00**		**12.340.000,00**		**12.340.000,00**		**100%**								
		21	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		0 unit	0	0 unit	0	15 unit	12.340.000,00	100,00%	12.340.000,00	100,00%	12.340.000,00	100,00%	100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**590.758.000,00**		**255.183.000,00**		**249.573.681,00**		**97.8%**								
		22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	1.500.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	66,67%								
		23	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik yang disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	36 Laporan	92.670.000,00	51,18%	47.460.000,00	51,18%	43.513.681,00	100,00%	91,68%								
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	24 laporan	496.588.000,00	41,69%	206.973.000,00	41,69%	205.560.000,00	100,00%	99,32%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**235.375.000,00**		**168.504.000,00**		**150.181.633,00**		**89.13%**								
		25	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	17 unit	103.775.000,00	49,00%	49.604.000,00	49,00%	35.185.520,00	100,00%	70,93%								
		26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	48 unit	25.600.000,00	50,00%	12.900.000,00	50,00%	9.635.000,00	100,00%	74,69%								
		27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	2 unit	106.000.000,00	100,00%	106.000.000,00	100,00%	105.361.113,00	100,00%	99,40%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**86,55%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								
Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**88,70 poin**	**0**	**88,62 poin**	**0**	**88,62 poin**	**35.445.650,00**	**88.62 poin**	**16.592.900,00**	**88.62 poin**	**14.092.900,00**	**100%**	**84,93%**						**Mantri Pamong Praja Gondomanan**		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									**10.000.000,00**		**2.500.000,00**		**0**		**0%**								
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	10.000.000,00	25,00%	2.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**25.445.650,00**		**14.092.900,00**		**14.092.900,00**		**100%**								
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	25.445.650,00	55,38%	14.092.900,00	55,38%	14.092.900,00	100,00%	100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**50,00%**	**50,00%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**								
Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.043.764.000 rupiah**	**0**	**515.392.000 rupiah**	**0**	**1.032.240.000 rupiah**	**2.627.471.748,00**	**519.716.000 rupiah**	**1.222.886.772,00**	**554.601.000 rupiah**	**1.150.111.472,00**	**106.7%**	**94,05%**						**Mantri Pamong Praja Gondomanan**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									**73.690.000,00**		**0**		**0**		**NAN%**								
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	73.690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**2.308.611.448,00**		**1.107.729.272,00**		**1.038.553.972,00**		**93.76%**								
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	23 Lembaga	39.759.772,00	100,00%	39.759.772,00	100,00%	39.759.772,00	100,00%	100,00%								
		3	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Masyarakat Total Kemantren Gondomanan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	12.795.176,00	92,22%	11.800.000,00	92,22%	4.500.000,00	100,00%	38,14%								

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													**37.063.800,00**		**7.500.000,00**		**7.500.000,00**		**100%**												
		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0			22.063.800,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%														
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga		0 Lembaga		203 Lembaga			0,00%		0,00%		0,00%															
		5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0			15.000.000,00	50,00%	7.500.000,00	50,00%	7.500.000,00	100,00%	100,00%														
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan			50,00%		50,00%		100,00%															
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										**7.200.000,00**		**3.600.000,00**		**0**		**0%**														
		6	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0		0			2.400.000,00	50,00%	1.200.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%														
				Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen			50,00%		0,00%		0,00%															
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										**200.906.500,00**		**104.057.500,00**		**104.057.500,00**		**100%**														
		7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0			28.750.000,00	52,17%	15.000.000,00	52,17%	15.000.000,00	100,00%	100,00%														
				Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		130 Keluarga			52,17%		52,17%		100,00%															
		8	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0			51.017.500,00	64,40%	32.857.500,00	64,40%	32.857.500,00	100,00%	100,00%														
				Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga		0 keluarga		120 keluarga			64,40%		64,40%		100,00%															
		9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0			24.624.000,00	28,02%	6.900.000,00	28,02%	6.900.000,00	100,00%	100,00%														
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		1.200 Keluarga			28,02%		28,02%		100,00%															
		10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0			3.550.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%														
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40		0 keluarga		0 keluarga		40 keluarga			0,00%		0,00%		0,00%															
		11	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0		0			92.965.000,00	53,03%	49.300.000,00	53,03%	49.300.000,00	100,00%	100,00%														
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 keluarga		0 keluarga		275 keluarga			53,03%		53,03%		100,00%															
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										**7.200.000,00**		**3.600.000,00**		**0**		**0%**														
		12	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Ngupasan				0		0			2.400.000,00	50,00%	1.200.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%														
				Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen			50,00%		0,00%		0,00%															
		13	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan				0		0			2.400.000,00	51,00%	1.200.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%														
				Jumlah dokumen pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan		0 kali		0 kali		6 kali			51,00%		0,00%		0,00%															
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										**2.308.611.448,00**		**1.107.729.272,00**		**1.038.553.972,00**		**93.76%**														
		14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngupasan				0		0			551.281.000,00	0,91%	5.000.000,00	0,91%	4.930.000,00	100,00%	98,60%														
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		13 Unit			0,00%		0,91%		0,00%															
		15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan				0		0			383.000.000,00	56,14%	215.000.000,00	52,22%	199.474.700,00	93,02%	92,78%														
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		6 unit			0,00%		52,22%		0,00%															
		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan				0		0			854.436.500,00	72,34%	571.103.500,00	71,42%	534.232.500,00	98,73%	93,54%														
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		188 pokmas			0,00%		71,42%		0,00%															
		17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngupasan				0		0			467.339.000,00	57,99%	265.066.000,00	57,99%	255.657.000,00	100,00%	96,45%														
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		135 Pokmas/Ormas			0,00%		57,99%		0,00%															
										Rata-rata capaian kinerja								**77,98%**	**72,82%**													
										Predikat kinerja								**Tinggi**	**Sedang**													
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan =Jumlah Pelanggaran Perda**	**130,00 Pelanggaran**	**0**	**152,00 Pelanggaran**	**0**	**140,00 Pelanggaran**		**177.950.000,00**	**70 Pelanggaran**	**103.175.000,00**	**67 Pelanggaran**	**103.175.000,00**	**104%**	**100,00%**												**Mantri Pamong Praja Gondomanan**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										**177.950.000,00**		**103.175.000,00**		**103.175.000,00**		**100%**														
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0			177.950.000,00	57,98%	103.175.000,00	57,98%	103.175.000,00	100,00%	100,00%														
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		12 laporan			57,98%		57,98%		100,00%															
										Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**100,00%**													
										Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**													
	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondomanan) x 100%**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**		**58.975.000,00**	**100% %**	**14.650.000,00**	**100% %**	**14.650.000,00**	**100%**	**100,00%**												**Mantri Pamong Praja Gondomanan**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										**58.975.000,00**		**14.650.000,00**		**14.650.000,00**		**100%**														
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan				0		0			14.375.000,00	64,35%	9.250.000,00	64,35%	9.250.000,00	100,00%	100,00%														

		(BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		85 orang		64,35%		64,35%		100,00%							
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		44.600.000,00	12,11%	5.400.000,00	12,11%	5.400.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		13 Dokumen		12,11%		12,11%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**100,00%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Total anggaran dari seluruh program										**7.935.676.693,00**		**4.684.002.154,00**		**3.838.246.864,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**91,13%**	**81,94%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah. 2. Pengelolaan data dan informasi sudah dilaksanakan dengan sangat baik.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah terkait tidak berlakunya PPKM sehingga kegiatan akan dihapus di perubahan Anggaran 2023
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Melakukan penyesuaian kegiatan yang sudah tidak dilaksanakan di perubahan tahun 2023.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan pemerintah dan mempertahankan kinerja yang sudah baik.

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh
KEMANTREN GONDOMANAN

SUBARJILAN, SIP.,M.Si.
NIP. 197207111992031006

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Program OPD Kemantren Gondomanan pada perubahan Renja tahun 2023 mengalami perubahan yang signifikan, yaitu tetap 6 (enam) program tapi untuk beberapa indikator kegiatan yang berkurang dan bertambah.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ada perubahan anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN, ATK, penggandaan, penyelenggaraan rapat-rapat, belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dan BBM, pemeliharaan mebel dan pemeliharaan peralatan kantor.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mengalami pengurangan pada sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Keamantren dan sub kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Pada kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terdapat penambahan anggaran pada sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ada penambahan kegiatan berupa rapat-rapat/sosialisasi/pelatihan bagi Hansip/Linmas untuk mendukung kesiapan dalam pengamanan Pemilu tahun 2024.

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ada pengurangan kegiatan di Kelurahan Ngupasan mengurangi anggaran fisik karena regulasi yang mengharuskan adanya ijin/kerelaan pemilik tanah untuk dibangun fasilitas umum belum terpenuhi. Sedangkan di Kelurahan Prawirodirjan bertambah pada sub kegiatan sarana prasarana kelurahan yaitu pada pemeliharaan balai Mekarsari RW 14.

.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan

Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat.

Dengan Indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan pada Tahun 2023 ini targetnya adalah 368.

Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gondomanan

Kebijakan:

a. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kemantren
b. Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
c. Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja
d. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Program dan Kegiatan Renja Perubahan

Program dan Kegiatan yang ada di Kemantren Gondomanan mengacu pada program dan kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren Gondomanan;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya Penambahan dan Pengurangan pada perubahan renja dapat dilihat pada tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**100,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja		Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY		Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan			1 event	1 event			100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY				100,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**5,574,820,193**	**5,942,908,194**					**5,903,475,170**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,935,834,295**	**5,290,299,296**					**5,265,294,272**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**42,952,000**	**42,952,000**					**39,453,040**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	1,600,000	1,600,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,600,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	34,752,000	34,752,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	31,253,040

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,800,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,907,080,850**	**4,158,045,851**					**4,158,045,851**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	100 %	100 %	3,899,880,850	4,150,845,851	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	4,150,845,851
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,200,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**600,000**	**600,000**					**600,000**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	600,000	600,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	600,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**600,000**	**600,000**					**600,000**
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	600,000	600,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	600,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**146,128,445**	**152,128,445**					**146,067,545**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	3,755,500	3,755,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	3,755,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	47,056,595	47,056,595	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	47,895,695
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	24,290,000	24,290,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	24,790,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	71,026,350	77,026,350	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	69,626,350
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**12,340,000**	**103,340,000**					**143,240,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	15 Unit	17 Unit	100 %	100 %	12,340,000	12,340,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	42,340,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	0 Unit	16 Unit	100 %	100 %	0	91,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	100,900,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**590,758,000**	**590,758,000**					**561,842,836**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	1,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	92,670,000	92,670,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	96,720,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	24 Laporan	24 Laporan	100 %	100 %	496,588,000	496,588,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	463,622,836
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**235,375,000**	**241,875,000**					**215,445,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	103,775,000	103,775,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	85,645,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	48 Unit	48 Unit	100 %	100 %	25,600,000	32,100,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	23,800,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	106,000,000	106,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	106,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**35,445,650**	**33,645,650**					**35,445,650**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**10,000,000**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan		88.62 poin	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10,000,000	0	Lain-lain PAD Yang Sah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	88.62 poin	0
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**0**	**8,200,000**					**10,000,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan		88.62 poin		1 Dokumen		1 dokumen	0	8,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	88.62 poin	10,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**25,445,650**	**25,445,650**					**25,445,650**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	88.41 poin	88.62 poin	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	25,445,650	25,445,650	Lain-lain PAD Yang Sah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	88.62 poin	25,445,650
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**366,615,248**	**369,490,248**					**373,065,248**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**73,690,000**	**73,690,000**					**73,690,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan		1.032.240.000 Rupiah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	73,690,000	73,690,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000 Rupiah	73,690,000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**52,554,948**	**45,254,948**					**54,554,948**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	23 Lembaga masyarakat	23 Lembaga masyarakat	100 %	100 %	39,759,772	39,759,772	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000 Rupiah	41,759,772

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	12,795,176	5,495,176	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000 Rupiah	12,795,176
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**37,063,800**	**37,063,800**					**38,063,800**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	203 Lembaga masyarakat	203 Lembaga masyarakat	100 %	100 %	22,063,800	22,063,800	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 23,063,800
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 15,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**2,400,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	0 %	2,400,000	0	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 0
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**200,906,500**	**213,481,500**					**206,756,500**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	130 Keluarga	130 Keluarga	100 %	100 %	28,750,000	28,750,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 28,750,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	120 Keluarga	120 Keluarga	100 %	100 %	51,017,500	51,017,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 51,017,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	1200 Keluarga	1200 Keluarga	100 %	100 %	24,624,000	24,624,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 23,674,000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	40 Keluarga	40 Keluarga	100 %	100 %	3,550,000	3,550,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 3,550,000
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	275 Keluarga	275 Keluarga	100 %	100 %	92,965,000	105,540,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 99,765,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**177,950,000**	**190,498,000**					**182,295,000**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**177,950,000**	**190,498,000**					**182,295,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	140 Pelanggaran	140 Pelanggaran	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	177,950,000	190,498,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	140 Pelanggaran	182,295,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**58,975,000**	**58,975,000**					**47,375,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**58,975,000**	**58,975,000**					**47,375,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	85 Orang	85 Orang	100 %	100 %	14,375,000	14,375,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	14,375,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	100 %	44,600,000	44,600,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	33,000,000
															TOTAL	**5,674,820,193**	**6,042,908,194**					**6,003,475,170**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Ngupasan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**1,021,020,000**	**954,880,000**					**1,006,192,264**
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,021,020,000**	**954,880,000**					**1,006,192,264**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,018,620,000**	**954,880,000**					**1,006,192,264**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Ngupasan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan		1.032.240.000 Rupiah	5 Unit	5 unit	100 %	100 %	551,281,000	505,491,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000 Rupiah	551,281,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Ngupasan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan		1.032.240.000 Rupiah	135 Pokmas / Ormas	135 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	467,339,000	449,389,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000 Rupiah	454,911,264
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**2,400,000**	**0**					**0**
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	0 %	2,400,000	0	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000 Rupiah	0
											TOTAL	**1,021,020,000**	**954,880,000**					**1,006,192,264**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Prawirodirjan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**1,239,836,500**	**1,379,626,500**					**1,398,492,480**
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,239,836,500**	**1,379,626,500**					**1,398,492,480**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,237,436,500**	**1,379,626,500**					**1,398,492,480**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Prawirodirjan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	6 unit	6 unit	100 %	100 %	383,000,000	525,190,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 565,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Prawirodirjan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	188 Pokmas / Ormas	188 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	854,436,500	854,436,500	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 833,492,480
7 01 03 2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**2,400,000**	**0**					**0**
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	2.256.641.980 Rupiah	1.032.240.000 Rupiah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	0 %	2,400,000	0	Lain-lain PAD Yang Sah		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.032.240.000	Rupiah 0
											TOTAL	**1,239,836,500**	**1,379,626,500**					**1,398,492,480**

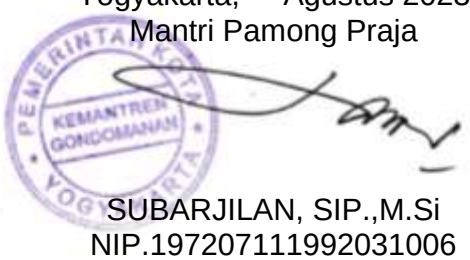
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kemantren Gondomanan tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaanya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Gondomanan tahun 2023 ini disusun untuk memenuhi anggaran kegiatan yang sangat dibutuhkan agar mencapai sasaran yang diharapkan.

Yogyakarta, Agustus 2023
Mantri Pamong Praja



SUBARJILAN, SIP.,M.Si
NIP.197207111992031006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

KEMANTREN PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-2
1.3.1 Maksud I-2
1.3.2 Tujuan I-2
1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... **II-1**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... III-1

BAB IV PENUTUP **IV-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kemantren Pakualaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....II-3
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah III-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah OPD Kemantren Pakualaman dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu OPD Kemantren Pakualaman, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Peraturan Walikota No 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja Perubahan ini di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; dan
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Kemantren Pakualaman serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 Kemantren Pakualaman yang menjadi bagian dari bahan yang akan disampaikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Umum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada bulan April tahun 2023, Kemantren Pakualaman melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) terhadap Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2023 dengan data di bawah ini:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2023	
			Awal	Review
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman	399,50 poin	407 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 poin	A Nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Data perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator di atas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai Review Renstra dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama

Kemantren Pakualaman Tahun 2023-2026

No	Tujuan/Sasaran	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2023
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman	407	407	407	407	407
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	*Belum ada hasil penilain RB oleh Inspektorat*

Data dihimpun dari Metadata Bappeda dan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023 telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Presentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai diajukan di anggaran perubahan 2023;
2. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai tata kala tetapi proses administrasi (SPJ) masuk bulan berikutnya, sehingga seolah-olah tidak sesuai target;
3. Keterbatasan sumber daya manusia (Analis PEP, Analis Pembangunan, Penggerak Swadaya Masyarakat kosong).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berikut ini:

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kemantren Pakualaman
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	399.50 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	55 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)**		**100,00 %**	**0,00**	**-**	**0,00**	**100,00 %**	**100.000.000,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								**100.000.000,00**		**0,00**		**0,00**		**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**5.282.113.698,00**	**A nilai**	**3.185.213.998,00**	**A nilai**	**2.422.541.657,00**	**100%**	**76,06%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**18.100.000,00**		**9.100.000,00**		**6.900.000,00**		**75.82%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.000.000,00	61,00%	1.750.000,00	61,00%	800.000,00	100,00%	45,71%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		61,00%		61,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		3.000.000,00	44,00%	1.250.000,00	44,00%	500.000,00	100,00%	40,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		44,00%		44,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.500.000,00	44,00%	3.500.000,00	44,00%	3.000.000,00	100,00%	85,71%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		44,00%		44,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**4.145.196.000,00**		**2.712.505.350,00**		**2.047.092.792,00**		**75.47%**							
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.107.444.000,00	67,00%	2.696.525.350,00	67,00%	2.032.112.792,00	100,00%	75,36%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		29 Orang/bulan		67,00%		67,00%		100,00%								
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		33.352.000,00	43,00%	13.980.000,00	43,00%	13.480.000,00	100,00%	96,42%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		43,00%		43,00%		100,00%								
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.500.000,00	35,00%	500.000,00	35,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		35,00%		35,00%		100,00%								
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**3.600.000,00**		**800.000,00**		**400.000,00**		**50%**							
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		19	PembinaanPengawasandan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		20	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		800.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		21	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		22	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								

				Daerah SKPD																					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**2.400.000,00**		**1.200.000,00**		**800.000,00**		**66.67%**							
		23	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		24	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		25	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**135.600.550,00**		**72.568.500,00**		**45.843.779,00**		**63.17%**							
		26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		3.420.800,00	38,00%	1.234.800,00	38,00%	210.000,00	100,00%	17,01%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		38,00%		38,00%		100,00%								
		27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		43.423.100,00	48,00%	20.175.000,00	48,00%	9.553.450,00	100,00%	47,35%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		9 Paket		48,00%		48,00%		100,00%								
		28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		42.326.650,00	64,00%	26.378.700,00	64,00%	19.513.179,00	100,00%	73,97%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		64,00%		64,00%		100,00%								
		29	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		15.470.000,00	53,00%	7.900.000,00	53,00%	4.363.150,00	100,00%	55,23%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		6 Paket		53,00%		53,00%		100,00%								
		30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	594.000,00	100,00%	99,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		30.360.000,00	55,00%	16.280.000,00	55,00%	11.610.000,00	100,00%	71,31%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		72 Laporan		55,00%		55,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**39.478.050,00**		**39.478.050,00**		**21.075.000,00**		**53.38%**							
		32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		39.478.050,00	100,00%	39.478.050,00	100,00%	21.075.000,00	100,00%	53,38%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**594.954.000,00**		**268.562.000,00**		**250.302.443,00**		**93.2%**							
		33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.350.000,00	79,00%	1.050.000,00	79,00%	300.000,00	100,00%	28,57%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		135 Laporan		79,00%		79,00%		100,00%								
		34	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		87.600.000,00	50,00%	43.800.000,00	50,00%	36.290.443,00	100,00%	82,85%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		506.004.000,00	44,00%	223.712.000,00	44,00%	213.712.000,00	100,00%	95,53%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		44,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**342.785.098,00**		**81.000.098,00**		**50.127.643,00**		**61.89%**							
		36	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		65.390.000,00	48,00%	30.830.000,00	48,00%	21.714.277,00	100,00%	70,43%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		13 Unit		48,00%		48,00%		100,00%								
		37	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		27.440.000,00	55,00%	14.595.000,00	55,00%	3.411.300,00	100,00%	23,37%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		7 Unit		55,00%		55,00%		100,00%								

		38	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	385.000,00	100,00%	96,25%							
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		39	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		2.230.000,00	40,00%	850.000,00	40,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		17 Unit		40,00%		40,00%		100,00%							
		40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		18.200.000,00	55,00%	9.950.000,00	55,00%	4.512.500,00	100,00%	45,35%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		36 Unit		55,00%		55,00%		100,00%							
		41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		229.125.098,00	55,33%	24.375.098,00	55,33%	20.104.566,00	100,00%	82,48%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		55,33%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**65,17%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,00 poin**	**0,00**	**81,72 poin**	**0,00**	**82,00 poin**	**41.872.500,00**	**82 poin**	**22.379.500,00**	**81.72 poin**	**21.870.300,00**	**99.65%**	**97,72%**					**Mantri Pamong Praja**		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**18.053.000,00**		**6.225.000,00**		**5.725.000,00**		**91.97%**							
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		18.053.000,00	36,00%	6.225.000,00	36,00%	5.725.000,00	100,00%	91,97%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		36,00%		36,00%		100,00%							
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**23.819.500,00**		**16.154.500,00**		**16.145.300,00**		**99.94%**							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		3.744.750,00	69,00%	2.582.250,00	69,00%	2.582.150,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		69,00%		69,00%		100,00%							
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		20.074.750,00	69,00%	13.572.250,00	69,00%	13.563.150,00	100,00%	99,93%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		69,00%		69,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,30%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman**	**Jumlah Swadaya Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**705.000.000 rupiah**	**0,00**	**891.703.300 rupiah**	**0,00**	**705.000.000 rupiah**	**2.339.473.100,00**	**352.494.000 rupiah**	**961.781.250,00**	**580.650.000 rupiah**	**748.364.130,00**	**164%**	**77,81%**					**Mantri Pamong Praja**		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**109.385.500,00**		**23.614.000,00**		**18.575.000,00**		**78.66%**							
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		109.385.500,00	23,00%	23.614.000,00	23,00%	18.575.000,00	100,00%	78,66%							
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		23,00%		23,00%		100,00%							
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**2.108.579.350,00**		**882.509.750,00**		**687.106.630,00**		**77.86%**							
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		39.813.000,00	100,00%	39.813.000,00	100,00%	39.813.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		215 Lembaga Masyarakat		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gunungketur				0,00		0,00		365.390.000,00	7,10%	25.940.000,00	1,63%	4.190.000,00	22,96%	16,15%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		1,63%		0,00%							

		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwokinanti				0,00		0,00		474.554.000,00	5,25%	24.702.000,00	1,04%	2.952.000,00	19,81%	11,95%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		1,04%		0,00%								
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purwokinanti				0,00		0,00		576.873.000,00	70,00%	402.513.000,00	70,00%	376.302.980,00	100,00%	93,49%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		249 Pokmas / Ormas		70,00%		70,00%		100,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gunungketur				0,00		0,00		638.403.350,00	60,00%	379.470.750,00	60,00%	253.777.650,00	100,00%	66,88%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		206 Pokmas / Ormas		60,00%		60,00%		100,00%								
		7	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		13.546.000,00	75,00%	10.071.000,00	75,00%	10.071.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**31.088.250,00**		**12.445.000,00**		**12.445.000,00**		**100%**							
		8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		18.138.250,00	23,00%	4.095.000,00	23,00%	4.095.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		9 Lembaga Masyarakat		23,00%		23,00%		100,00%								
		9	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		215 Lembaga Masyarakat		0,00%		0,00%		0,00%								
		10	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		11.950.000,00	70,00%	8.350.000,00	70,00%	8.350.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		70,00%		70,00%		100,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)									**3.000.000,00**		**1.500.000,00**		**0,00**		**0%**							
		11	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0,00		0,00		1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**87.420.000,00**		**41.712.500,00**		**30.237.500,00**		**72.49%**							
		12	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		2.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	50,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga		50,00%		50,00%		100,00%								
		13	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		30.637.500,00	49,00%	14.925.000,00	49,00%	8.162.500,00	100,00%	54,69%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		185 Keluarga		49,00%		49,00%		100,00%								
		14	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		13.250.000,00	70,00%	9.250.000,00	70,00%	8.750.000,00	100,00%	94,59%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		40 Keluarga		70,00%		70,00%		100,00%								
		15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		7.007.500,00	12,00%	800.000,00	12,00%	800.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga		0 Keluarga		20 Keluarga		12,00%		12,00%		100,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)									**3.000.000,00**		**1.500.000,00**		**0,00**		**0%**							
		16	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Gunungketur				0,00		0,00		1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		17	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Purwokinanti				0,00		0,00		1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**87.420.000,00**		**41.712.500,00**		**30.237.500,00**		**72.49%**							

		18	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		17.650.000,00	50,00%	8.825.000,00	50,00%	8.825.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 Keluarga		0 Keluarga		140 Keluarga		50,00%		50,00%		100,00%							
		19	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		0,00		4.200.000,00	50,00%	2.100.000,00	50,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 Keluarga		0 Keluarga		105 Keluarga		50,00%		50,00%		100,00%							
		20	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		0,00		10.475.000,00	31,00%	3.212.500,00	31,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0 Keluarga		0 Keluarga		110 Keluarga		31,00%		31,00%		100,00%							
		21	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		2.200.000,00	73,00%	1.600.000,00	73,00%	1.100.000,00	100,00%	68,75%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 Keluarga		0 Keluarga		55 Keluarga		73,00%		73,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**92,14%**	**61,76%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman**	**77,00 pelanggaran**	**0,00**	**82,00 pelanggaran**	**0,00**	**80,00 pelanggaran**	**78.825.550,00**	**40 pelanggaran**	**28.065.550,00**	**40 pelanggaran**	**26.001.000,00**	**100%**	**92,64%**					**Mantri Pamong Praja**	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**78.825.550,00**		**28.065.550,00**		**26.001.000,00**		**92.64%**						
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		78.825.550,00	36,00%	28.065.550,00	36,00%	26.001.000,00	100,00%	92,64%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		36,00%		36,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**92,64%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Presentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Pakualaman) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**-**	**0,00**	**100,00 %**	**82.254.000,00**	**100% %**	**31.585.000,00**	**100% %**	**27.560.000,00**	**100%**	**87,26%**					**Mantri Pamong Praja**	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**82.254.000,00**		**31.585.000,00**		**27.560.000,00**		**87.26%**						
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0,00		0,00		52.499.000,00	50,00%	26.085.000,00	50,00%	22.560.000,00	100,00%	86,49%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang		0 Orang		275 Orang	50,00%		50,00%		100,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00		0,00		29.755.000,00	19,00%	5.500.000,00	19,00%	5.000.000,00	100,00%	90,91%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	19,00%		19,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**88,70%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program		**7.924.538.848,00**		**4.229.025.298,00**		**3.246.337.087,00**							
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**97,29%**	**76,76%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2) Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom; 3) Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai diajukan di anggaran perubahan 2023; 2) Kegiatan telah dilaksanakan sesuai tata kala tetapi proses administrasi (SPJ) masuk bulan berikutnya, sehingga seolah-olah tidak sesuai target; 3) Keterbatasan sumber daya manusia (Analis PEP, Analis Pembangunan, Penggerak Swadaya Masyarakat kosong).
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Berkoordinasi dengan BKPSDM terkait keterbatasan SDM. 2. Berkoordinasi dengan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. 3. Berkoordinasi dengan BPKAD terkait tata kala SPJ.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Mohon untuk bisa mempertahan inovasi yang ada di Pakualaman seperti inovasi pengentasan stunting yang berkolaborasi dengan korporasi.

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
KEMANTREN PAKUALAMAN

CAHYA WIJAYANTA,S.Sos
NIP. 197011191996031003

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman	407 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Kemantren Pakualaman pada tahun 2023 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Gelar Budaya Jogja

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 41 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
4) Pemeliharaan Mebel
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan, terdiri dari 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Evaluasi Kelurahan

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti, terdiri dari 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Gunungketur)

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)

   c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti (Kelurahan Purwokinanti)

   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Purwokinanti)

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Pakualaman Tahun 2023, Kemantren Pakualaman pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan di Kemantren Pakualaman pada sub kegiatan, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Pemeliharaan Mebel; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Adapun pengurangan anggaran pada sub kegiatan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada sub kegiatan ini pengurangan pada anggaran pemeliharaan kendaraan operasional KTB karena sudah melalui mekanisme hibah; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada sub kegiatan ini ada penambahan anggaran dan pengurangan anggaran. Pengurangan anggaran pada anggaran pemeliharaan sarpras KTB karena sudah melalui mekanisme hibah.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdapat penambahan anggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat penambahan anggaran pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga; Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan Sehat; Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat penambahan anggaran pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memunculkan kegiatan baru berupa Sosialisasi Mekanisme Penegakan Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG), serta adanya penambahan anggaran untuk pembekalan linmas untuk pemilu, dan anggaran untuk fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye dihapus.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdapat penambahan anggaran pada sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional; Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Gunungketur) terdapat penambahan anggaran pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Gunungketur), serta adanya penyesuaian rekening menjadi belanja hibah. Penambahan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur).

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti) terdapat penambahan anggaran pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Purwokinanti), serta adanya penyesuaian rekening menjadi belanja hibah. Penambahan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti).

Adapun pembahasan rencana kerja dalam setiap program dan kegiatan Kemantren Pakualaman tahun 2023 di atas dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja (Kemantren Pakualaman)	Dana Keistimewaan DIY	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**				**7,161,672,798**	**662,866,050**	**0**	**0**	**7,824,538,848**	**7,948,726,116**	**546,648,627**	**0**	**0**	**8,495,374,743**	**670.835.895**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5,242,035,648**	**40,078,050**	**0**	**0**	**5,282,113,698**	**5,451,227,966**	**241,273,627**	**0**	**0**	**5,692,501,593**	**410.387.895**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**18,100,000**	**0**	**0**	**0**	**18,100,000**	**18,713,000**	**0**	**0**	**0**	**18,713,000**	**613.000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	842,000	0	0	0	842,000	342.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	771,000	0	0	0	771,000	271.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,145,196,000**	**0**	**0**	**0**	**4,145,196,000**	**4,216,358,000**	**0**	**0**	**0**	**4,216,358,000**	**71.162.000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kemantren Pakualaman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,107,444,000	0	0	0	4,107,444,000	4,178,606,000	0	0	0	4,178,606,000	71.162.000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,352,000	0	0	0	33,352,000	33,352,000	0	0	0	33,352,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0	
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**3,600,000**	**0**	**0**	**0**	**3,600,000**	**3,600,000**	**0**	**0**	**0**	**3,600,000**	**0**	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0	
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0	
7	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Dana Transfer Umum-Dana			800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Barang Milik Daerah pada SKPD (Kemantren Pakualaman)	Alokasi Umum														
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0	
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,400,000**	**0**	**0**	**0**	**2,400,000**	**2,400,000**	**0**	**0**	**0**	**2,400,000**	**0**	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0	
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**135,000,550**	**600,000**	**0**	**0**	**135,600,550**	**150,524,800**	**600,000**	**0**	**0**	**151,124,800**	**15.524.250**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,420,800	0	0	0	3,420,800	3,420,800	0	0	0	3,420,800	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			43,423,100	0	0	0	43,423,100	48,055,850	0	0	0	48,055,850	4.632.750	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42,326,650	0	0	0	42,326,650	42,998,150	0	0	0	42,998,150	671.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,470,000	0	0	0	15,470,000	17,295,000	0	0	0	17,295,000	1.825.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,360,000	0	0	0	30,360,000	38,755,000	0	0	0	38,755,000	8.395.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**39,478,050**	**0**	**0**	**39,478,050**	**0**	**240,673,627**	**0**	**0**	**240,673,627**	**201.195.577**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	39,478,050	0	0	39,478,050	0	240,673,627	0	0	240,673,627	201.195.577	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**594,954,000**	**0**	**0**	**0**	**594,954,000**	**589,900,200**	**0**	**0**	**0**	**589,900,200**	**(5.053.800)**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,350,000	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			87,600,000	0	0	0	87,600,000	83,986,200	0	0	0	83,986,200	(3.613.800)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			506,004,000	0	0	0	506,004,000	504,564,000	0	0	0	504,564,000	(1.440.000)	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**342,785,098**	**0**	**0**	**0**	**342,785,098**	**469,731,966**	**0**	**0**	**0**	**469,731,966**	**126.946.868**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,390,000	0	0	0	65,390,000	65,390,000	0	0	0	65,390,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kemantren Pakualaman)															
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,440,000	0	0	0	27,440,000	18,763,400	0	0	0	18,763,400	(8.676.600)	
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,230,000	0	0	0	2,230,000	5,990,000	0	0	0	5,990,000	3.760.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,200,000	0	0	0	18,200,000	19,000,000	0	0	0	19,000,000	800.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			229,125,098	0	0	0	229,125,098	360,188,566	0	0	0	360,188,566	131.063.468	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**41,872,500**	**0**	**0**	**0**	**41,872,500**	**47,425,500**	**0**	**0**	**0**	**47,425,500**	**5.553.000**	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**18,053,000**	**0**	**0**	**0**	**18,053,000**	**18,053,000**	**0**	**0**	**0**	**18,053,000**	**0**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,053,000	0	0	0	18,053,000	18,053,000	0	0	0	18,053,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pelayanan Umum (Kemantren Pakualaman)															
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**23,819,500**	**0**	**0**	**0**	**23,819,500**	**29,372,500**	**0**	**0**	**0**	**29,372,500**	**5.553.000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,744,750	0	0	0	3,744,750	4,329,750	0	0	0	4,329,750	585.000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,074,750	0	0	0	20,074,750	25,042,750	0	0	0	25,042,750	4.968.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**1,716,685,100**	**622,788,000**	**0**	**0**	**2,339,473,100**	**2,277,555,100**	**305,375,000**	**0**	**0**	**2,582,930,100**	**243.457.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**109,385,500**	**0**	**0**	**0**	**109,385,500**	**110,935,500**	**0**	**0**	**0**	**110,935,500**	**1.550.000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			109,385,500	0	0	0	109,385,500	110,935,500	0	0	0	110,935,500	1.550.000	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1,485,791,350**	**622,788,000**	**0**	**0**	**2,108,579,350**	**2,037,971,350**	**305,375,000**	**0**	**0**	**2,343,346,350**	**234.767.000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39,813,000	0	0	0	39,813,000	45,228,000	0	0	0	45,228,000	5.415.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,716,000	413,838,000	0	0	474,554,000	341,191,000	111,125,000	0	0	452,316,000	(22.238.000)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			156,440,000	208,950,000	0	0	365,390,000	367,990,000	194,250,000	0	0	562,240,000	196.850.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			576,873,000	0	0	0	576,873,000	605,813,000	0	0	0	605,813,000	28.940.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			638,403,350	0	0	0	638,403,350	664,203,350	0	0	0	664,203,350	25.800.000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,546,000	0	0	0	13,546,000	13,546,000	0	0	0	13,546,000	0	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**31,088,250**	**0**	**0**	**0**	**31,088,250**	**35,813,250**	**0**	**0**	**0**	**35,813,250**	**4.725.000**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,138,250	0	0	0	18,138,250	18,138,250	0	0	0	18,138,250	0	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,950,000	0	0	0	11,950,000	16,675,000	0	0	0	16,675,000	4.725.000	
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				**3,000,000**	**0**	**0**	**0**	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**	**0**	**0**	**3,000,000**	**0**	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	Dana Transfer Umum-Dana			1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					dan Kelurahan (Kemantren Pakualaman)	Alokasi Umum														
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**87,420,000**	**0**	**0**	**0**	**87,420,000**	**89,835,000**	**0**	**0**	**0**	**89,835,000**	**2.415.000**	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,575,000	0	0	0	2,575,000	575.000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,637,500	0	0	0	30,637,500	30,637,500	0	0	0	30,637,500	0	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,650,000	0	0	0	17,650,000	18,340,000	0	0	0	18,340,000	690.000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,250,000	0	0	0	13,250,000	14,400,000	0	0	0	14,400,000	1.150.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,007,500	0	0	0	7,007,500	7,007,500	0	0	0	7,007,500	0	
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,475,000	0	0	0	10,475,000	10,475,000	0	0	0	10,475,000	0	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**78,825,550**	**0**	**0**	**0**	**78,825,550**	**89,113,550**	**0**	**0**	**0**	**89,113,550**	**10.288.000**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**78,825,550**	**0**	**0**	**0**	**78,825,550**	**89,113,550**	**0**	**0**	**0**	**89,113,550**	**10.288.000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,825,550	0	0	0	78,825,550	89,113,550	0	0	0	89,113,550	10.288.000	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**82,254,000**	**0**	**0**	**0**	**82,254,000**	**83,404,000**	**0**	**0**	**0**	**83,404,000**	**1.150.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**82,254,000**	**0**	**0**	**0**	**82,254,000**	**83,404,000**	**0**	**0**	**0**	**83,404,000**	**1.150.000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,499,000	0	0	0	52,499,000	52,499,000	0	0	0	52,499,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kemantren Pakualaman)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,755,000	0	0	0	29,755,000	30,905,000	0	0	0	30,905,000	1.150.000	

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi manfaat yang dihasilkan.

Seluruh Pegawai di Kemantren Pakualaman khususnya PPTK Kegiatan diharapkan dapat selalu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang terkadang tidak menentu dan tidak menyerah dengan keadaan. Semangat kebersamaan dan koordinasi serta komunikasi harus tetap terjaga dan senantiasa diperbaiki.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

Yogyakarta, Agustus 2023
Mantri Pamong Praja
Kemantren Pakualaman

CAHYA WIJAYANTA, S.SOS.
NIP. 19701119 199603 1 003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

KEMANTREN MERGANGSAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud Dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-1
Tabel 2.1 ..... II-6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... III-1
Tabel 3.1 ..... III-4
BAB IV PENUTUP IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Mergangsan disusun melalui evaluasi program kegiatan sampai dengan semester satu Tahun 2023 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
15. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tribulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

   – Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
   – Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan yang pelaksanaannya dengan Evaluasi Kelurahan yang merupakan indikator sasaran OPD Tahun 2023 yaitu sebesar 400,7

Kemudian untuk Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan nilai A

Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2023 sebesar 85,1 masih dibawah target Tahun 2023 sehingga target Tahun 2023 (target 85,5).

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 854.582.000 sedangkan target Tahun 2023,- sebesar Rp1.221.000.000,-

Target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2023 yaitu 65 pelanggaran jadi ada penurunan target yang semula 65 menjadi 40. Di review pada Bulan April 2023 Kemantren Mergangsan melakukan review Renstra

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan

Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Mergangsan pada Tahun 2023 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Mergangsan adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan denan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.

Kemudian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kedua adalah Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan review Renstra dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN MERGANGSAN TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Penilaian mandiri Revormasi Birokrasi	A	A	A	A	A
2	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400,7	402	403	404	401,01

Berikut data indikator Program beserta reviewnya yang telah dilaksanakan Kemantren Mergangsan :

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

   Sasaran : Jumlah pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan
   Indikator : Menurunkan jumlah pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	65	65	65	65	40	40	40	40
Realisasasi					14			

2. Keterangan:
   - Target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2023 direview sebesar capaian Tahun 2021 yaitu sebesar 58 dikarenakan untuk pelanggaran perda di Tahun 2023 diprediksi akan ada penurunan dari target sebelum review yaitu 41.

Pada Tahun 2023 Kemantren Mergangsan telah merencanakan dan melaksanakan 6 program Kegiatan yaitu :

1. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MERGANGSAN
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	401 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	55

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	gelar budaya jogja	Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta	laporan	0,00	0,00 laporan	0,00	1,00 laporan	0,00	laporan	0,00	laporan	0,00	0,00%	0,00%					Mantri Pamong Praja	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																				
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			jumlah laporan gelar budaya yogyakarta		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
															0,00%	0,00%						
															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	A Dokumen	0,00	A Dokumen	0,00	A Dokumen	0,00	A Dokumen	0,00	A Dokumen	3.319.636.238,00	100%	0,00%					Mantri Pamong Praja	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		9.375.000,00	49,07%	4.600.000,00	49,00%	4.434.500,00	99,86%	96,40%						
			Dokumen perangkat perencanaan daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		49,07%		49,00%		99,86%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.158.000,00	100,00%	96,50%						
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.200.000,00	65,00%	780.000,00	65,00%	720.000,00	100,00%	92,31%						
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		65,00%		65,00%		100,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		6.525.000,00	52,11%	3.400.000,00	52,00%	3.395.000,00	99,79%	99,85%						
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		52,11%		52,00%		99,79%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.200.000,00	41,67%	500.000,00	41,60%	275.000,00	99,83%	55,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		41,67%		41,60%		99,83%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.900.000,00	56,41%	2.200.000,00	56,40%	2.055.000,00	99,98%	93,41%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		56,41%		56,40%		99,98%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.200.000,00	65,00%	780.000,00	65,00%	555.000,00	100,00%	71,15%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		1 laporan		65,00%		65,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.149.077.500,00	64,42%	3.432.181.683,00	64,00%	2.615.430.607,00	99,35%	76,20%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang		0 orang		35 orang		64,42%		64,00%		99,35%							
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan				0,00		0,00		12.250.000,00	46,94%	5.750.000,00	46,94%	5.745.000,00	100,00%	99,91%						

			Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		46,94%		46,94%		100,00%								
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		625.000,00	100,00%	625.000,00	100,00%	625.000,00	100,00%	100,00%							
				Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		875.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%							
				Dokumen Bahan Ianggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		250.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	98.000,00	100,00%	98,00%							
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		40,00%		40,00%		100,00%								
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		250.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	98.500,00	100,00%	98,50%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
		16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		625.000,00	48,00%	300.000,00	48,00%	298.500,00	100,00%	99,50%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		48,00%		48,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		625.000,00	48,00%	300.000,00	48,00%	300.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Infomasi Kepegawaian		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		48,00%		48,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		34.619.500,00	34,00%	11.619.500,00	34,00%	11.588.600,00	100,00%	99,73%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		34,00%		34,00%		100,00%								
		19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		262.378.110,00	46,00%	120.500.000,00	46,00%	120.434.174,00	100,00%	99,95%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		46,00%		46,00%		100,00%								
		20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		22.011.500,00	50,00%	11.000.000,00	50,00%	10.771.000,00	100,00%	97,92%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		50,00%		50,00%		100,00%								
		21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		155.090.000,00	48,00%	74.710.000,00	48,00%	66.847.000,00	100,00%	89,48%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		200 laporan		48,00%		48,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		600 laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		23	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		96.840.000,00	45,70%	52.260.000,00	45,70%	51.624.889,00	100,00%	98,78%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 laporan		0 laporan		3 laporan		45,70%		45,70%		100,00%								

				yang Disediakan																				
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		662.980.000,00	47,26%	313.331.665,00	47,26%	309.150.000,00	100,00%	98,67%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		52,26%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		25	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		151.668.000,00	50,01%	75.853.500,00	50,00%	48.339.468,00	99,98%	63,73%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		17 unit		50,01%		50,00%		99,98%								
		26	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		39.200.000,00	51,02%	20.000.000,00	51,00%	20.000.000,00	99,96%	100,00%							
				Jumlah Mebel Yang Dipelihara		0 unit		0 unit		88 unit		51,02%		51,00%		99,96%								
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.300.000,00	48,78%	6.000.000,00	48,78%	6.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 jenis		0 jenis		2 jenis		48,78%		48,78%		100,00%								
		28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		74.750.000,00	50,64%	37.850.000,00	50,00%	37.695.000,00	98,74%	99,59%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		134 unit		50,64%		50,00%		98,74%								
										Rata-rata capaian kinerja						**96,34%**	**90,09%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**87,00 poin**	**0,00**	**85,01 poin**	**0,00**	**85,5 poin**	**0,00**	**85,5 poin**	**0,00**	**85,01 poin**	**77.113.500,00**	**99%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		62.300.000,00	50,38%	31.380.000,00	50,38%	31.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		50,38%		0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		81.424.500,00	57,00%	45.549.000,00	57,00%	45.208.500,00	100,00%	99,25%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		2 laporan		57,00%		57,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,75%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.772.892.000 rupiah**	**0,00**	**1.591.231.000 rupiah**	**0,00**	**1.1.221.000.000 rupiah**	**0,00**	**610.500.000 rupiah**	**0,00**	**854.582.000 rupiah**	**949.794.588,00**	**139,9%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		21.257.000,00	49,50%	10.522.000,00	48,31%	10.270.000,00	97,60%	97,61%							
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan		2 laporan		49,50%		48,31%		97,60%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																						
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		49.410.000,00	95,24%	47.060.000,00	95,24%	47.012.000,00	100,00%	99,90%							
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di		0 lembaga masyarakat		0 lembaga masyarakat		297 lembaga masyarakat		95,24%		95,24%		100,00%								

			kelurahan																					
	3	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		4.400.000,00	78,41%	3.450.000,00	78,41%	1.610.000,00	100,00%	46,67%								
			Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan		0 laporan		3 laporan		78,41%		78,41%		100,00%									
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																							
	4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		47.845.500,00	66,12%	31.635.000,00	66,12%	31.485.000,00	100,00%	99,53%								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan		0 Lembaga		0 Lembaga		297 Lembaga		66,12%		66,12%		100,00%									
	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		27.075.500,00	36,31%	9.830.000,00	36,31%	9.830.000,00	100,00%	100,00%								
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		36,31%		0,00%									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																							
	6	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																							
	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		12.335.000,00	100,00%	12.335.000,00	100,00%	12.335.000,00	100,00%	100,00%								
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		25 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%									
	8	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		105.568.500,00	8,52%	9.000.000,00	8,52%	9.000.000,00	100,00%	100,00%								
			jumlah keluraga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusai yang berkualitas dan berdaya saing		0 keluarga		0 keluarga		410 keluarga		0,00%		8,52%		0,00%									
	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		6.670.000,00	100,00%	6.670.000,00	100,00%	6.565.750,00	100,00%	98,44%								
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		10.956 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%									
	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		15.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		68 keluarga		0,00%		0,00%		0,00%									
	11	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		55.769.000,00	16,68%	9.305.000,00	7,97%	4.445.000,00	47,78%	47,77%								
			jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas		0 keluarga		0 keluarga		150 keluarga		16,68%		7,97%		47,78%									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																							
	12	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Keparakan				0,00		0,00		6.250.000,00	96,00%	6.010.000,00	96,00%	6.010.000,00	100,00%	100,00%								
			Pencegahan Covid-19 di Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		96,00%		96,00%		100,00%									
	13	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Wirogunan				0,00		0,00		8.400.000,00	58,33%	4.900.000,00	58,33%	5.580.000,00	100,00%	113,88%								
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		83,33%		0,00%									
	14	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Brontokusuman				0,00		0,00		2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							
	15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Keparakan				0,00		0,00		636.519.000,00	36,58%	232.820.000,00	13,49%	25.764.000,00	36,88%	11,07%								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		0 unit		0 unit		14 unit		0,00%		13,49%		0,00%									
	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirogunan				0,00		0,00		527.650.368,00	0,00%	0,00	2,81%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		0 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		0,00%		2,81%		0,00%									
	17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Brontokusuman				0,00		0,00		735.680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%									
	18	Pemberdayaan Masyarakat di				0,00		0,00		533.646.500,00	46,14%	201.422.000,00	46,49%	198.276.838,00	100,76%	97,45%								

			Kelurahan Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		15 Pokmas		0,00%		46,49%		0,00%							
		19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirogunan				0,00		0,00		756.875.000,00	41,01%	311.918.500,00	41,01%	350.334.500,00	100,00%	112,32%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		15 Pokmas		0,00%		41,01%		0,00%							
		20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Keparakan				0,00		0,00		507.605.000,00	57,07%	275.064.500,00	56,74%	230.516.500,00	99,42%	83,80%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		15 Pokmas/Ormas		0,00%		56,74%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**79,12%**	**75,42%**						
									Predikat kinerja							**Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**40,00 pelanggaran**	**0,00**	**41,00 pelanggaran**	**0,00**	**40,00 pelanggaran**	**0,00**	**20 pelanggaran**	**0,00**	**14 pelanggaran**	**19.771.000,00**	**118%**	**0,00%**						
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		52.126.250,00	64,29%	33.496.250,00	64,06%	19.771.000,00	99,64%	59,02%							
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		64,36%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**99,64%**	**59,02%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mergangsan) x 100%**		**0,00**	-	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**25.192.000,00**	**100%**	**0,00%**						
				Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	**Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan**	**404,00 POIN**	**0,00**	**400,01 POIN**	**0,00**	**401,00 POIN**	**0,00**	**401**	**0,00**	**401,01**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																					
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		17.236.000,00	22,28%	3.841.000,00	22,00%	2.553.000,00	98,74%	66,47%							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		40 orang		22,28%		22,00%		98,74%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		55.572.000,00	40,74%	22.639.000,00	40,74%	22.639.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamtan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		40,74%		40,74%		100,00%							

	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		55.572.000,00	40,74%	22.639.000,00	40,74%	22.639.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		40,74%		40,74%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**99,37%**	**83,23%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**0,00**		**0,00**		**4.391.507.326,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															**88,70%**	**0%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															**Tinggi**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.kegiatan per PPTK terlaksana sesuai tatakala 2. adanya koordinasi PPTK secara rutin
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: jasa konsultan perencana pelaksanaannya mundur dikarenakan baru belajar menggunakan e-katalog
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN MERGANGSAN

PARGIYANTO
NIP. 197[illegible]031002

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061999031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

Adapun Kemantren Mergangsan memiliki dua tujuan itu :

1. **Mempertahankan Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan**
2. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan mempertahankan Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.–Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah A.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 400 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 404.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk mmperoleh

informasi tentang pelaksanaan dan pencapain Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

   Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

   Tujuannya:

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

   Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat

   Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

   a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
   b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
   c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Mergangsan untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Mergangsan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Mempertahankan Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan
   Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat
2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan
   Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkekmbangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi 3.

Program dan Kegiatan

Tema Pebangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah : **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat**. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2023, Kemantren Mergangsan melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

01 Gelar Budaya Jogja

2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

02 Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD

04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

03 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

05 Pengadaan Mebel

06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

07 Pengadaan Aset tetap lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2 Evalusasi Kelurahan

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)

03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

05 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan

2 Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 Kemantren Mergangsan menambah beberapa rincian belanja diantaranya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan Mebel yaitu dengan pengadaan meja rapat ,belanja alat kantor lainnya yaitu filling cabinet 3 laci, belanja modal alat pembersih yaitu vacum cleaner, belanja modal alat pendingin yaitu AC, belanja modal alat studio yaitu kamera, belanja alat komunikasi yaitu HP untuk CMS, belanja modal personal komputer yaitu laptop komputer dan printer,kemudian dalam modal Gedung kantor yaitu konblok halaman Kemantren Mergangsan dan pemeliharaan interior gedung kantor di tiga kelurahan, selanjutnya diusulkan juga penambahan daya listrik untuk kantor Kemantren Mergangsan karena daya listrik yang ada masih kurang mencukupi yang mengakibatkan MCB sering anjlok dan jasa perencanaan penambhan daya listrik Kelurahan Wirogunan, anggaran ini digunakan untuk kegiatan adminstrasi perkantoran dan mendukung peningkatan kinerja dan percepatan proses pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa , Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran ada beberapa pengurangan dan penambhan anggaran untuk sarana dan prasarana Makam Sasonoloyo dan gelar UMKM, selanjutnya ada penambahan anggaran di jawatan Umum yaitu sosialisasi inovasi, pengurangan sarpras Kelurahan Brontokusuman dan Keparakan, pengurangan pemberdayaan Kelurahan Wirogunan dan penambahan pemberdayaan kelurahan brontokusuman dan kelurahan keparakan berupa pelatihan – pelatihan, Jawatan Keamanan ada pengurangan sisa anggaran sampai dengan triwulan II

TA. 2023 dan penambahan kegiatan pelatihan kebencanaan bagi tokoh masyarakat

Kemudian di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kemantren Mergangsan) ada penambahan anggaran pengamanan pemilu yaitu di pergunakan untuk fasilitasi makan monev dan penindakan Tim dibawah koordinasi Jawatan Keamanan berdasarkan pada pengecekan yang dilakukan oleh Bawaslu.

.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja (Kemantren Mergangsan)	Dana Keistimewaan DIY	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**				**9,271,340,360**	**1,763,374,368**	**0**	**0**	**11,034,714,728**	**10,605,232,728**	**955,242,500**	**0**	**0**	**11,560,475,228**	**525.760.500**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6,704,514,610**	**0**	**0**	**0**	**6,704,514,610**	**7,142,671,110**	**465,000,500**	**0**	**0**	**7,607,671,610**	**903.157.000**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**24,600,000**	**0**	**0**	**0**	**24,600,000**	**24,600,000**	**0**	**0**	**0**	**24,600,000**	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		9,375,000	0	0	0	9,375,000	9,375,000	0	0	0	9,375,000	0	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		6,525,000	0	0	0	6,525,000	6,525,000	0	0	0	6,525,000	0	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		3,900,000	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5,163,827,500**	**0**	**0**	**0**	**5,163,827,500**	**5,388,641,500**	**0**	**0**	**0**	**5,388,641,500**	**224.814.000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		5,149,077,500	0	0	0	5,149,077,500	5,373,891,500	0	0	0	5,373,891,500	224.814.000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		12,250,000	0	0	0	12,250,000	12,250,000	0	0	0	12,250,000	0	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		625,000	0	0	0	625,000	625,000	0	0	0	625,000	0	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		250,000	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	250,000	0	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Yogyakarta,		875,000	0	0	0	875,000	875,000	0	0	0	875,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kemantren Mergangsan)	(PAD)	Mergangsan, Semua Kelurahan													
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		250,000	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	250,000	0	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		250,000	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	250,000	0	
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		250,000	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	250,000	0	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**625,000**	**0**	**0**	**0**	**625,000**	**625,000**	**0**	**0**	**0**	**625,000**	**0**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		625,000	0	0	0	625,000	625,000	0	0	0	625,000	0	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**625,000**	**0**	**0**	**0**	**625,000**	**625,000**	**0**	**0**	**0**	**625,000**	**0**	
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		625,000	0	0	0	625,000	625,000	0	0	0	625,000	0	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**474,099,110**	**0**	**0**	**0**	**474,099,110**	**476,609,610**	**0**	**0**	**0**	**476,609,610**	**2.510.500**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		34,619,500	0	0	0	34,619,500	34,619,500	0	0	0	34,619,500	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		262,378,110	0	0	0	262,378,110	257,388,610	0	0	0	257,388,610	(4.989.500)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		22,011,500	0	0	0	22,011,500	29,511,500	0	0	0	29,511,500	7.500.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		155,090,000	0	0	0	155,090,000	155,090,000	0	0	0	155,090,000	0	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282,300,500**	**0**	**0**	**282,300,500**	**282.300.500**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	282,300,500	0	0	282,300,500	282.300.500	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**762,820,000**	**0**	**0**	**0**	**762,820,000**	**774,652,000**	**0**	**0**	**0**	**774,652,000**	**11.832.000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		96,840,000	0	0	0	96,840,000	108,672,000	0	0	0	108,672,000	11.832.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		662,980,000	0	0	0	662,980,000	662,980,000	0	0	0	662,980,000	0	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**277,918,000**	**0**	**0**	**0**	**277,918,000**	**476,918,000**	**182,700,000**	**0**	**0**	**659,618,000**	**381.700.000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		151,668,000	0	0	0	151,668,000	151,668,000	0	0	0	151,668,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		39,200,000	0	0	0	39,200,000	39,200,000	0	0	0	39,200,000	0	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		12,300,000	0	0	0	12,300,000	14,100,000	0	0	0	14,100,000	1.800.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	195,000,000	182,700,000	0	0	377,700,000	377.700.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		74,750,000	0	0	0	74,750,000	76,950,000	0	0	0	76,950,000	2.200.000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**144,249,500**	**0**	**0**	**0**	**144,249,500**	**262,790,000**	**0**	**0**	**0**	**262,790,000**	**118.540.500**	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**62,300,000**	**0**	**0**	**0**	**62,300,000**	**166,625,000**	**0**	**0**	**0**	**166,625,000**	**104.325.000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		62,300,000	0	0	0	62,300,000	166,625,000	0	0	0	166,625,000	104.325.000	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**81,949,500**	**0**	**0**	**0**	**81,949,500**	**96,165,000**	**0**	**0**	**0**	**96,165,000**	**14.215.500**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		525,000	0	0	0	525,000	2,405,000	0	0	0	2,405,000	1.880.000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		81,424,500	0	0	0	81,424,500	93,760,000	0	0	0	93,760,000	12.335.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**2,297,642,000**	**1,763,374,368**	**0**	**0**	**4,061,016,368**	**3,057,482,618**	**490,242,000**	**0**	**0**	**3,547,724,618**	**(513.291.750)**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**21,257,000**	**0**	**0**	**0**	**21,257,000**	**25,052,000**	**0**	**0**	**0**	**25,052,000**	**3.795.000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		21,257,000	0	0	0	21,257,000	25,052,000	0	0	0	25,052,000	3.795.000	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1,988,411,500**	**1,763,374,368**	**0**	**0**	**3,751,785,868**	**2,713,989,368**	**490,242,000**	**0**	**0**	**3,204,231,368**	**(547.554.500)**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		49,410,000	0	0	0	49,410,000	49,410,000	0	0	0	49,410,000	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Keparakan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan		87,320,000	549,199,000	0	0	636,519,000	253,019,000	383,444,000	0	0	636,463,000	(56.000)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Brontokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		0	735,680,000	0	0	735,680,000	32,200,000	106,798,000	0	0	138,998,000	(596.682.000)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirogunan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan		49,155,000	478,495,368	0	0	527,650,368	527,650,368	0	0	0	527,650,368	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Keparakan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan		507,605,000	0	0	0	507,605,000	526,330,500	0	0	0	526,330,500	18.725.500	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Brontokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman		533,646,500	0	0	0	533,646,500	568,324,500	0	0	0	568,324,500	34.678.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirogunan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan		756,875,000	0	0	0	756,875,000	754,525,000	0	0	0	754,525,000	(2.350.000)	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan,		4,400,000	0	0	0	4,400,000	2,530,000	0	0	0	2,530,000	(1.870.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Kemantren Mergangsan)	(PAD)	Mergangsan, Semua Kelurahan													
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		15,300,000	0	0	0	15,300,000	5,850,000	0	0	0	5,850,000	(9.450.000)	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		55,769,000	0	0	0	55,769,000	55,769,000	0	0	0	55,769,000	0	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**52,126,250**	**0**	**0**	**0**	**52,126,250**	**53,289,000**	**0**	**0**	**0**	**53,289,000**	**1.162.750**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**52,126,250**	**0**	**0**	**0**	**52,126,250**	**53,289,000**	**0**	**0**	**0**	**53,289,000**	**1.162.750**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		52,126,250	0	0	0	52,126,250	53,289,000	0	0	0	53,289,000	1.162.750	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**72,808,000**	**0**	**0**	**0**	**72,808,000**	**89,000,000**	**0**	**0**	**0**	**89,000,000**	**16.192.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**72,808,000**	**0**	**0**	**0**	**72,808,000**	**89,000,000**	**0**	**0**	**0**	**89,000,000**	**16.192.000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan		17,236,000	0	0	0	17,236,000	33,428,000	0	0	0	33,428,000	16.192.000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kemantren Mergangsan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Mergangsan,		55,572,000	0	0	0	55,572,000	55,572,000	0	0	0	55,572,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kemantren Mergangsan tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaanya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Mergangsan disusun untuk memenuhi anggaran kegiatan yang sangat dibutuhkan agar mencapai sasaran yang diharapkan.

Yogyakarta, 24 Juli 2023
Mantri Pamong Praja
Mergangsan



PARGIYAT, SIP
NIP.197305241992031002

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2023
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



K E M A N T R E N U M B U L H A R J O

Jl. Glagah Sari No. 99, Warungboto, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55164
No. Telp. (0274) 375782 Fax (0274) 375782
Email: uh@jogjakota.go.id
Hotline SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL Email: upik@jogjakota.go.id
Website: https://umbulharjokec.jogjakota.go.id



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2023

KEMANTREN UMBULHARJO

KOTA YOGYAKARTA

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I - PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM.....1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 4

BAB III - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 15

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.....15

BAB IV - PENUTUP 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II di Tahun 2023, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; dan
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada bulan Mei 2023, Kemantren Umbulharjo melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) terhadap Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023 dengan data di bawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023	
			Awal	Review
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	382 poin	388,43 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	70 poin	77,41 poin

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai Review Renstra dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2023-2026

No	Tujuan/Sasaran	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2023
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	388,43	388,43	388,43	388,43	383,14
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	77,41 poin	77,41 poin	77,41 poin	77,41 poin	*Belum ada hasil penilaian RB oleh Inspektorat*

Data dihimpun dari Review Renstra Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Umbulharjo, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Aturan dan kebijakan terkait Pembangunan Fisik di Wilayah yang masih belum pasti membuat Kelurahan selaku pelaksana kegiatan menjadi kesulitan. Peraturan baru terkait Hibah hasil evaluasi Gubernur belum didukung aturan payung hukum yang pasti dari Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
5. Tingkat literasi yang masih rendah di masyarakat khususnya warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo membuat dukungan dalam literasi pelayanan digital menjadi rendah, sedangkan pelayanan Masyarakat sudah banyak yang berbasis digital.
6. Persepsi dan pemahaman terkait Swadaya masyarakat yang belum merata mengakitbatkan pengumpulan dan penyajian data belum bisa seperti yang diharapkan. Data realisasi yang cukup besar belum bisa menjadi prediksi angka target ditahun yang akan datang.
7. Penutupan Tempat PembuanganSampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada permasalahan pengelolaan sampah. Sampah menjadi permasalahn baru di masyarakat yang mengakibatkan Masyarakat bahkan wisatan menjadi terganggu. Salah satu penyebab permasalahan ini juga disebakan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
8. Kurangnya Sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap Peraturan Baru di Kota Yogyakarta semisal terkait syarat persetujuan perijinan di wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan perijinan di lapangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berikut ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	382 Nilai
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	70 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD TW II		Realisasi Renja SKPD TW II		Tingkat Realiasi TW II							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)**		**100,00%**	**0**	-	**0**	**100,00%**	**100.000.000,00**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								**100.000.000,00**		**0**		**0**		**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0		0		100.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**nan%**	**nan%**						
Predikat kinerja															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**11.105.965.668,00**	**A nilai**	**6.893.091.690,00**	**A nilai**	**5.405.996.464,00**	**100%**	**78,43%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**72.773.000,00**		**28.048.750,00**		**28.047.000,00**		**99,99%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.760.000,00	85,00%	2.300.000,00	85,00%	2.300.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		85,00%		85,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.610.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.610.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.610.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		1.610.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		61.986.000,00	51,00%	25.748.750,00	51,00%	25.747.000,00	100,00%	99,99%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1.587.000,00	35,00%	0	35,00%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		4 laporan		35,00%		35,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD TW II		Realisasi Renja SKPD TW II		Tingkat Realiasi TW II							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**8.198.843.350,00**		**5.258.239.474,00**		**3.985.275.488,00**		**75,79%**						
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		8.161.293.350,00	66,00%	5.241.723.474,00	66,00%	3.968.759.488,00	100,00%	75,71%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		54 orang/bulan		66,00%		66,00%		100,00%							
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		32.352.000,00	51,00%	13.480.000,00	51,00%	13.480.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1.196.000,00	77,00%	897.000,00	77,00%	897.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		77,00%		77,00%		100,00%							
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		805.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		1.587.000,00	35,00%	529.000,00	35,00%	529.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		35,00%		35,00%		100,00%							
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**105.451.000,00**		**44.925.000,00**		**33.961.000,00**		**75,59%**						
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		1.610.000,00	55,00%	805.000,00	55,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		2.300.000,00	52,00%	1.150.000,00	52,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 d		0 d		12 d		52,00%		52,00%		100,00%							
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		1.587.000,00	35,00%	529.000,00	35,00%	529.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		35,00%		35,00%		100,00%							
		18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.587.000,00	70,00%	1.058.000,00	70,00%	529.000,00	100,00%	50,00%						
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		70,00%		70,00%		100,00%							
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		58.743.000,00	51,00%	24.873.000,00	51,00%	24.344.000,00	100,00%	97,87%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		39.624.000,00	51,00%	16.510.000,00	51,00%	6.604.000,00	100,00%	40,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD TW II		Realisasi Renja SKPD TW II		Tingkat Realiasi TW II							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**34.652.000,00**		**14.630.000,00**		**13.480.000,00**		**92,14%**						
		21 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		32.352.000,00	51,00%	13.480.000,00	51,00%	13.480.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
		22 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		2.300.000,00	55,00%	1.150.000,00	55,00%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**506.598.850,00**		**288.461.500,00**		**272.870.343,00**		**94,6%**						
		23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		8.703.000,00	55,00%	4.332.000,00	55,00%	4.298.500,00	100,00%	99,23%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		8 paket		55,00%		55,00%		100,00%							
		24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		207.139.850,00	57,50%	108.183.500,00	57,50%	102.683.343,00	100,00%	94,92%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0		0		0		0,00%		57,50%		0,00%							
		25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		69.830.000,00	75,08%	51.040.000,00	75,08%	49.393.500,00	100,00%	96,77%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		8 paket		0,00%		75,08%		0,00%							
		26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		42.681.000,00	70,00%	28.021.000,00	70,00%	28.021.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		70,00%		70,00%		100,00%							
		27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		172.725.000,00	57,00%	94.700.000,00	56,00%	86.864.000,00	98,25%	91,73%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		57,00%		56,00%		98,25%							
		28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		5.520.000,00	42,00%	2.185.000,00	42,00%	1.610.000,00	100,00%	73,68%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		42,00%		42,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**225.489.000,00**		**149.489.000,00**		**103.780.000,00**		**69,42%**						
		29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		225.489.000,00	69,66%	149.489.000,00	68,38%	103.780.000,00	98,16%	69,42%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		28 unit		0,00%		68,38%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1.506.320.000,00**		**760.399.998,00**		**633.040.237,00**		**83,25%**						
		30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		6.900.000,00	55,00%	3.500.000,00	55,00%	3.500.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		55,00%		55,00%		100,00%							
		31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		162.600.000,00	51,00%	81.300.000,00	51,00%	71.151.481,00	100,00%	87,52%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		51,00%		0,00%							
		32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		1.336.820.000,00	52,72%	675.599.998,00	52,72%	558.388.756,00	100,00%	82,65%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		52,72%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD TW II		Realisasi Renja SKPD TW II		Tingkat Realiasi TW II							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**455.838.468,00**		**348.897.968,00**		**335.542.396,00**		**96.17%**						
		33 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		119.683.000,00	53,42%	63.026.000,00	53,42%	55.491.546,00	100,00%	88,05%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		28 unit		0,00%		53,42%		0,00%							
		34 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		47.808.000,00	62,34%	27.924.500,00	62,34%	25.120.700,00	100,00%	89,96%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		28 unit		0,00%		62,34%		0,00%							
		35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		70.300.000,00	60,07%	39.900.000,00	60,07%	39.898.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		45 unit		0,00%		60,07%		0,00%							
		36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		218.047.468,00	100,00%	218.047.468,00	100,00%	215.031.650,00	100,00%	98,62%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 lokasi		0 lokasi		7 lokasi		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**99,88%**	**85,04%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**84,00 poin**	**0**	**83,13 poin**	**0**	**83,13 poin**	**144.303.000,00**	**83.13 poin**	**63.220.000,00**	**85,19 poin**	**47.316.250,00**	**104%**	**74,84%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**62.850.500,00**		**22.375.000,00**		**12.529.250,00**		**56%**						
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		62.850.500,00	37,00%	22.375.000,00	37,00%	12.529.250,00	100,00%	56,00%						
			Koordinasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Umum		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		37,00%		37,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**81.452.500,00**		**40.845.000,00**		**34.787.000,00**		**85.17%**						
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		81.452.500,00	51,61%	40.845.000,00	51,61%	34.787.000,00	100,00%	85,17%						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		51,61%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**70,58%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**2.203.436.000 Rupiah**	**0**	**3.851.194.259 Rupiah**	**0**	**2.203.136.000 Rupiah**	**7.669.080.060,00**	**1.101.568.000 Rupiah**	**2.867.829.550,00**	**208328300**	**2.642.767.743,00**	**189%**	**92,15%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**207.485.000,00**		**53.015.000,00**		**53.013.000,00**		**100%**						
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		207.485.000,00	29,36%	53.015.000,00	29,36%	53.013.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		29,36%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD TW II		Realisasi Renja SKPD TW II		Tingkat Realiasi TW II							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**7.036.004.560,00**		**2.606.290.550,00**		**2.403.012.743,00**		**92,2%**						
		2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		114.905.000,00	100,00%	114.905.000,00	100,00%	114.905.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		600 Lembaga Masyarakat		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki				0		0		173.442.250,00	28,03%	39.586.500,00	28,03%	2.025.000,00	100,00%	5,12%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		28,03%		0,00%							
		4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju				0		0		686.655.000,00	1,44%	9.870.000,00	1,44%	9.870.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		54 unit		0,00%		1,44%		0,00%							
		5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan				0		0		396.530.000,00	60,64%	240.370.000,00	60,64%	239.468.460,00	100,00%	99,62%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		0 unit		0 unit		13 unit		0,00%		60,64%		0,00%							
		6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto				0		0		328.733.960,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		67 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
		7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan				0		0		430.950.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		0 Unit		0 Unit		26 Unit		0,00%		0,00%		0,00%							
		8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan				0		0		609.965.800,00	6,19%	31.416.000,00	6,19%	31.025.233,00	100,00%	98,76%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun		0 Unit		0 Unit		59 Unit		0,00%		6,19%		0,00%							
		9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan				0		0		239.470.000,00	10,38%	20.200.000,00	10,38%	16.200.000,00	100,00%	80,20%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		39 unit		0,00%		10,38%		0,00%							
		10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan				0		0		788.515.000,00	51,91%	408.239.000,00	51,91%	388.634.000,00	100,00%	95,20%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/ormas		0 Pokmas/ormas		109 Pokmas/ormas		0,00%		51,91%		0,00%							
		11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan				0		0		608.129.000,00	58,89%	347.118.000,00	58,89%	343.138.000,00	100,00%	98,85%						
			Jumlah Kelompok Masyarakat dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		188 Pokmas/Ormas		0,00%		58,89%		0,00%							
		12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan				0		0		464.956.000,00	62,02%	286.302.500,00	62,02%	254.592.500,00	100,00%	88,92%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		142 pokmas/ormas		0,00%		62,02%		0,00%							
		13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto				0		0		474.175.250,00	47,43%	192.000.000,00	46,22%	169.780.000,00	97,45%	88,43%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/ Ormas		0 Pokmas/ Ormas		116 Pokmas/ Ormas		0,00%		46,22%		0,00%							
		14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan				0		0		529.181.750,00	70,36%	327.310.000,00	67,10%	299.555.000,00	95,37%	91,52%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		147 pokmas		0,00%		67,10%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD TW II		Realisasi Renja SKPD TW II		Tingkat Realiasi TW II							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju				0		0		437.643.000,00	58,62%	242.570.000,00	58,62%	213.120.000,00	100,00%	87,86%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/ Ormas		0 Pokmas/ Ormas		146 Pokmas/ Ormas		0,00%		58,62%		0,00%						
		16 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki				0		0		718.692.550,00	45,06%	315.333.550,00	45,06%	312.529.550,00	100,00%	99,11%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		103 Pokmas		0,00%		45,06%		0,00%						
		17 Evaluasi Kelurahan				0		0		34.060.000,00	91,57%	31.070.000,00	91,57%	8.170.000,00	100,00%	26,30%						
			Jumlah Laporah Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan		0 laporan		7 laporan		0,00%		91,57%		0,00%						
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**233.511.000,00**		**98.689.000,00**		**94.692.000,00**		**95,95%**						
		18 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		73.189.000,00	49,22%	32.467.000,00	49,22%	32.467.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		26 Lembaga Masyarakat		0,00%		49,22%		0,00%						
		19 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0		0		19.640.000,00	100,00%	19.640.000,00	100,00%	18.515.000,00	100,00%	94,27%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga masyarakat		0 Lembaga masyarakat		26 Lembaga masyarakat		100,00%		100,00%		100,00%						
		20 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		140.682.000,00	33,73%	46.582.000,00	33,73%	43.710.000,00	100,00%	93,83%						
			Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat		0 laporan		0 laporan		5 laporan		0,00%		33,73%		0,00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								**30.125.000,00**		**12.625.000,00**		**12.165.000,00**		**96,36%**						
		21 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0		0		30.125.000,00	43,54%	12.625.000,00	43,54%	12.165.000,00	100,00%	96,36%						
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		43,54%		0,00%						
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**161.954.500,00**		**97.210.000,00**		**79.885.000,00**		**82,18%**						
		22 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		32.599.500,00	30,00%	9.945.000,00	30,00%	5.750.000,00	100,00%	57,82%						
			Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahan Pangan		0 keluarga		0 keluarga		50 keluarga		30,00%		30,00%		100,00%						
		23 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0		29.070.000,00	67,36%	19.580.000,00	67,36%	19.580.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga		275 Keluarga		0,00%		67,36%		0,00%						
		24 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		0		45.180.000,00	89,00%	39.390.000,00	89,00%	26.260.000,00	100,00%	66,67%						
			Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga		0 keluarga		170 keluarga		89,00%		89,00%		100,00%						
		25 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0		0		40.870.000,00	46,01%	18.805.000,00	46,01%	18.805.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD TW II		Realisasi Renja SKPD TW II		Tingkat Realiasi TW II							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 Keluarga		0 Keluarga		400 Keluarga		0,00%		46,01%		0,00%							
		26	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		0		4.745.000,00	100,00%	4.745.000,00	100,00%	4.745.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0 Keluarga		0 Keluarga		87 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		27	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0		0		9.490.000,00	50,00%	4.745.000,00	50,00%	4.745.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 Keluarga		0 Keluarga		130 Keluarga		0,00%		50,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**99,71%**	**86,75%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo**	**125,00 pelanggaran**	**0**	**55,00 pelanggaran**	**0**	**55,00 pelanggaran**	**125.116.200,00**	**40 pelanggaran**	**52.997.100,00**	**40 pelangg**	**49.697.100,00**	**100%**	**93,77%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**125.116.200,00**		**52.997.100,00**		**49.697.100,00**		**93,77%**						
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		125.116.200,00	45,16%	52.997.100,00	45,16%	49.697.100,00	100,00%	93,77%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		45,16%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**93,77%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran		Target Renja SKPD TW II		Realisasi Renja SKPD TW II		Tingkat Realiasi TW II							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo yang dibahas oleh Forkompintren terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Umbulharjo) x 100%	79,00%	0	- %	0	76,00%	66.400.000,00	76%	16.700.000,00	38%	15.090.000,00	50%	90,36%						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								66.400.000,00		16.700.000,00		15.090.000,00		90.36%						
		1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		66.400.000,00	26,54%	16.700.000,00	28,42%	15.090.000,00	107,08%	90,36%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		28,42%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															107,08%	90,36%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Total anggaran dari seluruh program										19.210.864.928,00		9.893.838.340,00		8.160.867.557,00								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															99,94%	82,48%						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2) Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom; 3) Serapan riil keuangan disandingkan dengan data target kegiatan PPTK untuk tiap Tribulannya sehingga bisa terpantau sudah sejauh mana PPTK bisa tepat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang PPTK buat di tahun 2023; 4) Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun scara bertahap 2) Belum meratanya SDM yang menguasai IT. 3) Pengelolaan bukti dukung penilaian evaluasi kelurahan belum merata.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
KEMANTREN UMBULHARJO

RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.
NIP. 197212202002122002

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	388,43 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	77,41 poin

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Umbulharjo pada Tahun 2023 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Kegiatan :
   a. Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya
      Sub Kegiatan :
      1) Gelar Budaya Jogja

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan :
   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Evaluasi Kelurahan
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Semaki)
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Semaki)
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muja-Muju)
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muja-Muju)
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tahunan)
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tahunan)
9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Warungboto)
10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Warungboto)
11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pandeyan)
12) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandeyan)
13) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sorosutan)
14) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sorosutan)
15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Giwangan)
16) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Giwangan)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan :

1) Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Kelurahan dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
6) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											100,000,000	100,000,000					150,000,000
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											100,000,000	100,000,000					150,000,000
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya											100,000,000	100,000,000					150,000,000
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	-	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0 -	0 -	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		-	0 -	150,000,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											12,223,825,368	12,820,691,368					12,608,023,984
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											11,105,965,668	11,755,748,668					11,284,880,950
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											72,773,000	72,773,000					16,984,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,760,000	2,760,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	3,080,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,610,000	1,610,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,610,000	1,610,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,610,000	1,610,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,610,000	1,610,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	61,986,000	61,986,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	5,280,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,587,000	1,587,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,584,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,198,843,350**	**8,316,956,350**					**8,513,331,138**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	100 %	100 %	8,161,293,350	8,279,406,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	8,462,197,700
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	32,352,000	32,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	45,413,438
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,196,000	1,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,320,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	805,000	805,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	880,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	805,000	805,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	880,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,587,000	1,587,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	805,000	805,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	880,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**105,451,000**	**72,431,000**					**54,917,478**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,610,000	1,610,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2,300,000	2,300,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	2,464,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,587,000	1,587,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,587,000	1,587,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	58,743,000	58,743,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7 01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	39,624,000	6,604,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	45,413,478
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**34,652,000**	**34,652,000**					**32,364,684**
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	32,352,000	32,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	29,724,684
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,300,000	2,300,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	2,640,000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**506,598,850**	**506,598,850**					**444,250,950**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	8,703,000	8,703,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	8,833,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	13 Paket	13 Paket	100 %	100 %	207,139,850	207,139,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	152,653,600
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	69,830,000	69,830,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	52,955,650
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	42,681,000	42,681,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	46,554,200
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	172,725,000	172,725,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	181,494,500
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	5,520,000	5,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,760,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**225,489,000**	**502,989,000**					**204,000,000**
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	225,489,000	502,989,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	204,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,506,320,000**	**1,506,320,000**					**1,635,160,200**
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	6,900,000	6,900,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	46,554,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	162,600,000	162,600,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	126,060,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,336,820,000	1,336,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	1,462,546,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**455,838,468**	**743,028,468**					**383,872,500**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	119,683,000	119,683,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	101,365,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	47,808,000	47,808,000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	14,272,500
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	45 Unit	45 Unit	100 %	100 %	70,300,000	70,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	48,235,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	7 lokasi	7 lokasi	100 %	100 %	218,047,468	505,237,468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai	220,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**144,303,000**	**136,248,000**					**207,376,710**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**62,850,500**	**50,775,500**					**152,467,050**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	82,5 poin	82,5 poin	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	62,850,500	50,775,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	82,5 poin	152,467,050
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**81,452,500**	**85,472,500**					**54,909,660**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	82,5 poin	82,5 poin	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	81,452,500	85,472,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	82,5 poin	54,909,660
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**782,040,500**	**732,575,500**					**902,786,244**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**207,485,000**	**191,750,000**					**258,682,200**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	207,485,000	191,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	258,682,200
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**148,965,000**	**125,605,000**					**131,814,600**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	600 Lembaga masyarakat	600 Lembaga masyarakat	100 %	100 %	114,905,000	114,905,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	109,170,600
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	34,060,000	10,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	22,644,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**233,511,000**	**228,881,000**					**226,910,679**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	26 Lembaga masyarakat	26 Lembaga masyarakat	100 %	100 %	73,189,000	73,189,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	47,837,949

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	26 Lembaga masyarakat	26 Lembaga masyarakat	100 %	100 %	19,640,000	18,515,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	57,751,380
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	140,682,000	137,177,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	121,321,350
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**30,125,000**	**30,065,000**					**99,215,000**
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	30,125,000	30,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	99,215,000
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**161,954,500**	**156,274,500**					**186,163,765**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	50 Keluarga	50 Keluarga	100 %	100 %	32,599,500	33,749,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	11,220,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	275 Keluarga	275 Keluarga	100 %	100 %	29,070,000	27,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	30,783,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	400 Keluarga	400 Keluarga	100 %	100 %	40,870,000	37,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	59,567,265
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	170 Keluarga	170 Keluarga	100 %	100 %	45,180,000	43,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	39,219,000
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	87 Keluarga	87 Keluarga	100 %	100 %	4,745,000	4,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	33,195,900
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	130 Keluarga	130 Keluarga	100 %	100 %	9,490,000	8,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	12,178,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**125,116,200**	**141,449,200**					**161,959,680**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**125,116,200**	**141,449,200**					**161,959,680**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya koordiinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	140 Pelanggaran	140 Pelanggaran	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	125,116,200	141,449,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	140 Pelanggaran	161,959,680
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**66,400,000**	**54,670,000**					**51,020,400**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**66,400,000**	**54,670,000**					**51,020,400**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	76 %	76 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	66,400,000	54,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	76 %	51,020,400
															TOTAL	**12,323,825,368**	**12,920,691,368**					**12,758,023,984**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0001 Kelurahan Semaki

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											892,134,800	877,359,800					706,802,880
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											892,134,800	877,359,800					706,802,880
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											892,134,800	877,359,800					706,802,880
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Semaki	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	173,442,250	173,442,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	394,405,440
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Semaki	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	103 Pokmas / Ormas	103 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	718,692,550	703,917,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	312,397,440
															TOTAL	892,134,800	877,359,800					706,802,880

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Muja-Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,124,298,000**	**1,217,072,500**					**1,230,595,487**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,124,298,000**	**1,217,072,500**					**1,230,595,487**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,124,298,000**	**1,217,072,500**					**1,230,595,487**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Muja Muju	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	54 Unit	54 Unit	100 %	100 %	686,655,000	686,117,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	708,726,600
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Muja Muju	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	146 Pokmas / Ormas	146 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	437,643,000	530,955,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	521,868,887
															TOTAL	**1,124,298,000**	**1,217,072,500**					**1,230,595,487**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0003 Kelurahan Tahunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**925,711,750**	**925,711,750**					**1,110,221,215**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**925,711,750**	**925,711,750**					**1,110,221,215**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**925,711,750**	**925,711,750**					**1,110,221,215**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Tahunan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	396,530,000	396,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	670,629,600
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Tahunan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	147 Pokmas / Ormas	147 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	529,181,750	529,181,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	439,591,615
															TOTAL	**925,711,750**	**925,711,750**					**1,110,221,215**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0004 Kelurahan Warungboto

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**802,909,210**	**638,763,368**					**990,110,409**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**802,909,210**	**638,763,368**					**990,110,409**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**802,909,210**	**638,763,368**					**990,110,409**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Warungboto	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	67 Unit	67 Unit	100 %	100 %	328,733,960	186,588,118	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	456,450,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Warungboto	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	116 Pokmas / Ormas	116 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	474,175,250	452,175,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	533,660,409
															TOTAL	**802,909,210**	**638,763,368**					**990,110,409**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0005 Kelurahan Pandeyan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**895,906,000**	**879,406,000**					**1,266,771,211**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**895,906,000**	**879,406,000**					**1,266,771,211**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**895,906,000**	**879,406,000**					**1,266,771,211**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Pandeyan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	26 Unit	26 Unit	100 %	100 %	430,950,000	414,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	864,292,920
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Pandeyan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	142 Pokmas / Ormas	142 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	464,956,000	464,956,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	402,478,291
															TOTAL	**895,906,000**	**879,406,000**					**1,266,771,211**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0006 Kelurahan Sorosutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,218,094,800**	**910,889,000**					**1,500,510,820**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,218,094,800**	**910,889,000**					**1,500,510,820**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,218,094,800**	**910,889,000**					**1,500,510,820**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Sorosutan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	59 Unit	59 Unit	100 %	100 %	609,965,800	302,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	907,079,845
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Sorosutan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	188 Pokmas / Ormas	188 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	608,129,000	608,129,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	593,430,975
															TOTAL	**1,218,094,800**	**910,889,000**					**1,500,510,820**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0007 Kelurahan Giwangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,027,985,000**	**858,265,000**					**1,136,449,984**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,027,985,000**	**858,265,000**					**1,136,449,984**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,027,985,000**	**858,265,000**					**1,136,449,984**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Giwangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	39 Unit	2 Unit	100 %	100 %	239,470,000	73,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	410,256,415
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Giwangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	109 Pokmas / Ormas	109 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	788,515,000	785,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.136.000 Rupiah	726,193,569
															TOTAL	**1,027,985,000**	**858,265,000**					**1,136,449,984**

BAB IVPENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi *outcomes* yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

Yogyakarta, 2023

Mantri Pamong Praja Umbulharjo

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.

NIP. 197303021992031004



RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2023

KEMANTREN KOTAGEDE

KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEMANTREN KOTAGEDE SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 6

Tabel 2.1 8

BAB III RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 13

3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah 13

Tabel 3.1 19

BAB IV PENUTUP 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembanunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana kerja pemerintah daerah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 22 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan

dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.
n. Peraturan Walikota Nomor 22 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026
o. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

p. Surat Edaran Nomor 050/2821/SE/2023 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Kotagede. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2023 ini adalah:

a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2023;
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah;
c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kemantren Kotagede Tahun 2023 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEMANTREN KOTAGEDE SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1

BAB III. RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEMANTREN KOTAGEDE SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan TW II Tahun 2023 Kemantren Kotagede

Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede sampai dengan TW II Tahun 2023 meliputi 6 (enam) program yang terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan memiliki anggaran Rp100.000.000,- dengan target keuangan triwulan II Rp.0,- dan telah teralisasi sebesar 0 %. Target Fisik Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan triwulan II adalah 0 % dengan realisasi sebesar 0 %.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 6.040.379.020,- dengan target keuangan triwulan II Rp 4.013.199.436,- dan telah teralisasi sebesar Rp 3.140.752.698,- (78,26%). Target Fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota triwulan II adalah 100 % dengan realisasi sebesar 100 %.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki anggaran Rp 60.766.500,- dengan target keuangan triwulan II Rp 22.385.500,- dan telah teralisasi sebesar Rp 22.385.500,- (100%).

Target Fisik Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 100 %.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan memiliki anggaran Rp 3.786.274.150,- dengan target keuangan triwulan II Rp Rp 1.009.307.500,00 dan telah teralisasi sebesar Rp 801.900.494,- (79,45 %). Target Fisik Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 100 %.

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

   Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum memiliki anggaran Rp 288.054.000,- dengan target keuangan triwulan II Rp 123.733.500,- dan telah teralisasi sebesar Rp 114.133.500,- (92,24%). Target Fisik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 100 %.

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki anggaran Rp 37.618.000,- dengan target keuangan triwulan II Rp 15.484.000,00,- dan telah teralisasi sebesar Rp 14.886.000,- (96.14%). Target Fisik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum triwulan II adalah 100% dengan realisasi sebesar 100%.

   Capaian Target Fisik dan Keuangan TW II Kemantren Kotagede dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
PERANGKAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA KEMANTREN KOTAGEDE
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	398,67 point
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	79.33 point

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	- -	0,00	- -	0,00	- -	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%							
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								100.000.000,00		0,00		0,00		NAN%							
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							nan%	nan%							
								Predikat kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede**	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	6.040.379.020,00	A Nilai	4.013.199.436,00	A Nilai	3.140.752.698,00	100%	78,26%					Komaru Ma'Arif SIP, M.Si	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13.380.000,00		5.820.000,00		5.820.000,00		100%							
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.350.000,00	78,00%	1.020.000,00	78,00%	1.020.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		78,00%		0,00%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	65,00%	690.000,00	65,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		65,00%		65,00%		100,00%								
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.070.000,00	34,00%	690.000,00	34,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		34,00%		34,00%		100,00%								
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.070.000,00	17,00%	0,00	17,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		17,00%		17,00%		100,00%								
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		5,00%		5,00%		100,00%								
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		4.440.000,00	76,95%	2.730.000,00	76,95%	2.730.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		15 laporan		0,00%		76,95%		0,00%								
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.875.540.300,00		3.312.172.881,00		2.483.010.408,00		74.97%							
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.867.160.300,00	80,00%	3.309.182.881,00	80,00%	2.480.020.408,00	100,00%	74,94%							

				Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		35 orang/bulan		80,00%		80,00%		100,00%							
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.035.000,00	40,00%	345.000,00	40,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		2.070.000,00	45,00%	690.000,00	45,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		330.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.220.000,00	30,00%	920.000,00	30,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		30,00%		30,00%		100,00%							
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		690.000,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		5,00%		5,00%		100,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**2.691.000,00**		**1.794.000,00**		**1.794.000,00**		**100%**						
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		598.000,00	51,00%	299.000,00	51,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		598.000,00	51,00%	299.000,00	51,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD				0,00		0,00		598.000,00	51,00%	299.000,00	51,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		51,00%		51,00%		100,00%							
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**1.196.000,00**		**598.000,00**		**598.000,00**		**100%**						
		22	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.196.000,00	51,00%	598.000,00	51,00%	598.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**190.746.575,00**		**128.704.575,00**		**121.963.349,00**		**94.76%**						
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		9.902.000,00	100,00%	9.902.000,00	100,00%	9.899.100,00	100,00%	99,97%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		71.011.725,00	74,15%	52.284.725,00	74,15%	51.113.249,00	100,00%	97,76%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		0,00%		74,15%		0,00%							
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		21.711.600,00	100,00%	21.711.600,00	100,00%	17.849.750,00	100,00%	82,21%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		0,00%		100,00%		0,00%							
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		35.681.250,00	63,81%	22.411.250,00	63,81%	21.166.250,00	100,00%	94,44%						
				Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		63,81%		63,81%		100,00%							
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						

			Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		51.940.000,00	43,00%	21.895.000,00	43,00%	21.435.000,00	100,00%	97,90%							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		107 Laporan		43,00%		43,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**68.764.000,00**		**68.764.000,00**		**68.662.600,00**		**99.85%**							
		29	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		35.470.600,00	100,00%	35.470.600,00	100,00%	35.470.600,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		44 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		33.293.400,00	100,00%	33.293.400,00	100,00%	33.192.000,00	100,00%	99,70%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		9 Unit		0,00%		100,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**584.814.000,00**		**255.020.835,00**		**246.175.740,00**		**96.53%**							
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.120.000,00	55,00%	560.000,00	55,00%	560.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		16 Laporan		0,00%		55,00%		0,00%								
		32	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		99.600.000,00	51,00%	49.800.000,00	51,00%	43.015.740,00	100,00%	86,38%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		48 Laporan		0,00%		51,00%		0,00%								
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		484.094.000,00	42,73%	204.660.835,00	42,73%	202.600.000,00	100,00%	98,99%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		64 Laporan		0,00%		42,73%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**303.247.145,00**		**240.325.145,00**		**212.728.601,00**		**88.52%**							
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		89.145.000,00	51,74%	45.960.000,00	51,74%	28.261.948,00	100,00%	61,49%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		15 unit		0,00%		51,74%		0,00%								
		35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		33.160.000,00	55,45%	18.080.000,00	55,45%	10.094.264,00	100,00%	55,83%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		55,45%		0,00%								
		36	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		4.875.000,00	100,00%	4.875.000,00	100,00%	4.375.000,00	100,00%	89,74%							
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0		0		0		100,00%		100,00%		100,00%								
		37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		9.324.000,00	51,00%	4.667.000,00	51,00%	4.490.000,00	100,00%	96,21%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		49 Unit		0,00%		51,00%		0,00%								
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		166.743.145,00	100,00%	166.743.145,00	100,00%	165.507.389,00	100,00%	99,26%							
				Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		0 unit		0 unit		5 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**87,43%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**91,50 point**	**0,00**	**90,60 point**	**0,00**	**91,00 point**	**60.766.500,00**	**91.00 point**	**22.385.500,00**	**90.60 point**	**22.385.500,00**	**99.5%**	**100,00%**					**Komaru Ma'Arif S.IP Msi**		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**18.290.000,00**		**4.860.000,00**		**4.860.000,00**		**100%**							
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		18.290.000,00	54,12%	4.860.000,00	54,12%	4.860.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		54,12%		0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**42.476.500,00**		**17.525.500,00**		**17.525.500,00**		**100%**							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		3.588.000,00	37,00%	1.196.000,00	37,00%	1.196.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		37,00%		0,00%								
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		38.888.500,00	41,97%	16.329.500,00	41,97%	16.329.500,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		41,97%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**3.321.358 .000 rupiah**	**0,00**	**3.201.358.000 rupiah**	**0,00**	**3.231.358.000 rupiah**	**3.786.274.150,00**	**1.546.000.000 rupiah**	**981.382.500,00**	**1.566.694.600 rupiah**	**802.820.494,00**	**101%**	**81,71%**					**Komaru Ma, Arif SIP, MSi**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**171.882.000,00**		**32.330.000,00**		**31.410.000,00**		**97.15%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		171.882.000,00	18,81%	32.330.000,00	18,81%	31.410.000,00	100,00%	97,15%							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan		70 laporan		0,00%		18,81%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**3.457.859.650,00**		**882.330.500,00**		**715.158.494,00**		**81.05%**							
		2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		27.990.000,00	100,00%	27.990.000,00	100,00%	27.960.000,00	100,00%	99,89%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		0,00%		100,00%		0,00%							
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		612.899.000,00	26,94%	165.144.000,00	1,10%	6.744.000,00	4,08%	4,08%							
			Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		0 unit		0 unit		112 unit		0,00%		1,10%		0,00%							
		4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		754.979.150,00	2,87%	19.500.000,00	2,87%	20.253.000,00	100,00%	103,86%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit		51 Unit		0,00%		3,87%		0,00%							
		5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		595.797.000,00	0,96%	5.600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		71 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan				0,00		0,00		469.621.000,00	48,01%	217.125.000,00	48,01%	216.683.937,00	100,00%	99,80%							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		180 pokmas		0,00%		48,01%		0,00%							
		7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		560.234.000,00	50,78%	279.997.000,00	50,78%	277.569.057,00	100,00%	99,13%							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas		167 Pokmas		0,00%		50,78%		0,00%							
		8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		432.337.500,00	38,01%	164.352.500,00	38,01%	163.326.500,00	100,00%	99,38%							
			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 pokmas / ormas		0 pokmas / ormas		169 pokmas / ormas		0,00%		38,01%		0,00%							
		9 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		4.002.000,00	65,52%	2.622.000,00	65,52%	2.622.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		0,00%		65,52%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**93.980.500,00**		**25.907.000,00**		**25.907.000,00**		**100%**							
		10 PenyelenggaraanLembagaKemasyarakatan				0,00		0,00		30.599.000,00	33,28%	10.183.500,00	33,28%	10.183.500,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Kecamatan/Kemantren		0 Kecamatan/Kemantren		1 Kecamatan/Kemantren		0,00%		33,98%		0,00%							
		11 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		63.381.500,00	24,81%	15.723.500,00	24,81%	15.723.500,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		9 Laporan		0,00%		24,81%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**62.552.000,00**		**40.815.000,00**		**30.345.000,00**		**74.35%**							
		12 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		36.110.000,00	74,03%	26.730.000,00	45,20%	16.260.000,00	61,06%	60,83%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga		0 keluarga		360 keluarga		0,00%		45,20%		0,00%							
		13 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		26.442.000,00	53,27%	14.085.000,00	53,27%	14.085.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		165 keluarga		0,00%		53,27%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**81,93%**	**81,86%**						
									Predikat kinerja						**Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kotagede =Jumlah Pelanggaran Perda**	**36,00 pelanggaran**	**0,00**	**25,00 pelanggaran**	**0,00**	**36,00 Pelanggaran**	**288.054.000,00**	**18 Pelanggaran**	**123.733.500,00**	**15 Pelanggaran**	**114.133.500,00**	**116%**	**92,24%**					**Komaru Ma'Arif SIP. MSi**	

		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**288.054.000,00**		**123.733.500,00**		**114.133.500,00**		**92.24%**							
		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		288.054.000,00	43,17%	123.733.500,00	42,39%	114.133.500,00	98,19%	92,24%							
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugasdan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		55 laporan		0,00%		42,39%		0,00%							
																Rata-rata capaian kinerja							
																Predikat kinerja							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan **Kemantren Kotagede**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Kotagede** **terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren** **Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kotagede) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**-**	**0,00**	**100,00 %**	**37.618.000,00**	**100% %**	**15.484.000,00**	**100% %**	**14.886.000,00**	**100%**	**96,14%**					**Komaru Ma' Arif SIP .Msi**		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									**37.618.000,00**		**15.484.000,00**		**14.886.000,00**		**96.14%**							
		1	FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		19.030.000,00	32,53%	6.190.000,00	32,53%	6.190.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang		560 orang		0,00%		32,53%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		18.588.000,00	50,00%	9.294.000,00	50,00%	8.696.000,00	100,00%	93,57%							
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
																Rata-rata capaian kinerja							
																Predikat kinerja							
										Total anggaran dari seluruh program	**10.313.091.670,00**		**5.156.184.936,00**		**4.094.978.192,00**								
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)						**95,77%**	**79,42%**					
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Terciptanya kondisi kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2. Adanya Evaluasi Rutin tiap PPTK yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri 3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompimkemantren.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Untuk nilai evaluasi perkembangan kelurahan masih terkendala terkait pengumpulan bukti dokumentasi.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala KEMANTREN KOTAGEDE

KOMARU MA'ARIF,S.I.P.,M.Si

NIP. 197205181992031003

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja Nasional. Program dan Kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Indikator Sasaran Kemantren Kotagede Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan Target Sasaran Kemantren Kotagede : 398 point
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Kotagede 90,88 point

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mempermudah dalam memahami rencana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari Tujuan sampai dengan kebijakan Kemantren Kotagede.

1. Tujuan:

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede

2. Sasaran:

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede dari 398 menjadi 398,67

3. Strategi:

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Kotagede

4. Kebijakan:

a. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren;
b. Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
c. Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
d. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
e. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f. Meningkatkan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

Program dan Kegiatan

Kemantren Kotagede di Perubahan tahun 2023 memiliki 6 (enam) Program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ada 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ada 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan .
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ada 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ada1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Rincian penambahan dan pengurangan belanja kegiatan pada Renja Kemantren Kotagede tahun 2023

1. Sub Kegiatan yang mengalami kenaikan anggaran belanja :
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 171.263.000,00 karena pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 4 orang dan penerimaan pegawai P3K sebanyak 1 orang.
    b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp 2.500.000,00 untuk pembelian pompa air Kelurahan Prenggan sebanyak 1 unit.
    c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 8.575.000,00 untuk penambahan anggaran belanja rapat koordinasi tingkat Kemantren.
    d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 500.000,00 untuk tambahan pembelian leges cek.

e. Pemeliharaan Mebel sebesar Rp 2.000.000,00 untuk pemeliharaan 1 set kursi tamu Kelurahan Prenggan.
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp 217.256.244,00 untuk rehap ruang rapat kelurahan Rejowinanggun.
g. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum sebesar Rp 2.645.000,00 untuk penambahan belanja makan minum rapat koordinasi bidang kemakmuran.
h. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp 2.610.000,00 untuk Penambahan belanja makan minum rapat koordinasi Pemberdayaan.
i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp 5.930.500,00 untuk kegiatan sosialisasi B2SA.
j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun sebesar Rp 60.494.000,00 untuk tambahan belanja pelatihan Aguaponik, Workshop Karang Taruna, Worksop lansia dan Kegiatan Festival Kampung Srawung.
k. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan sebesar Rp 4.600.000,00 untuk tambahan anggaran makan minum rapat koordinasi Kelembagaan Kelurahan dan pemeliharaan penerangan jalan umum sebesar Rp. 25.080.000,-
l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan sebesar Rp68.059.500,- untuk Pelatihan Pemandu Wisata Lokal, Workshop Pengembangan Paket wisata, Festival Srawung

Kampung, dan belanja makan minum rapat pemberdayaan Kelurahan.

m. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebesar Rp 14.598.000,00.
n. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebesar Rp 3.000.000,00 untuk tambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Kegiatan yang mengalami penurunan anggaran belanja :
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 2.736.000,- karena penyesuaian harga BBM.
    b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp 1.008.000,- karena penyesuaian harga BBM.
    c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp 30.000,- karena efisiensi bantuan transport masyarakat.
    d. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar Rp 5.910.000,- karena pengurangan belanja makan minum dan narasumber Pelatihan Keroncong.
    e. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam sebesar Rp 947.000,00 karena pengurangan anggaran Kegiatan pelatihan

water rescue (rompi pelampung) dan ATK pelatihan teknik komunikasi bencana.

f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan sebesar Rp 198.880.000,- karena penghapusan rehab balai RW 11 karena terkendala masalah alas hak.
g. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 8.565.000,-
h. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebesar Rp 3.680.000,- karena pengurangan makan minum Apel siaga KTB dengan Forkompimtren.

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**
2	**22**	**08**	**5,07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**			**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**
2	22	08	5,07	06	Gelar Budaya Jogja (Kemantren Kotagede)	Dana Keistimewaan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**			**8.487.914.375**	**1.725.177.295**	**0**	**0**	**10.213.091.670**	**10.197.962.914**	**369.133.000**	**0**	**0**	**10.567.095.914**	**354.004.244**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.796.771.875**	**243.607.145**	**0**	**0**	**6.040.379.020**	**6.074.596.264**	**364.133.000**	**0**	**0**	**6.438.729.264**	**398.350.244**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**13.380.000**	**0**	**0**	**0**	**13.380.000**	**13.380.000**	**0**	**0**	**0**	**13.380.000**	**0**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	1.350.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0

7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	1.380.000	0	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0	1.380.000	0
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.070.000	0	0	0	2.070.000	2.070.000	0	0	0	2.070.000	0
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	2.070.000	0	0	0	2.070.000	2.070.000	0	0	0	2.070.000	0
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	1.380.000	0	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0	1.380.000	0
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	4.440.000	0	0	0	4.440.000	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	690.000	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0	690.000	0
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4.875.540.300**	**0**	**0**	**0**	**4.875.540.300**	**5.046.803.300**	**0**	**0**	**0**	**5.046.803.300**	**171.263.000**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kemantren Kotagede)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	4.867.160.300	0	0	0	4.867.160.300	5.038.423.300	0	0	0	5.038.423.300	171.263.000
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	690.000	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0	690.000	0
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	1.035.000	0	0	0	1.035.000	1.035.000	0	0	0	1.035.000	0
7	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede,	2.070.000	0	0	0	2.070.000	2.070.000	0	0	0	2.070.000	0

							Semua Kelurahan						**Jumlah**					
									T (Sebelu	m Perubah	an)			T (Sesuda	h Perubah	an)		
7	01	Kod 01	e 2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumber PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Lokasi Yogyakarta, Kotagede, Semua	Belanja Operasi 3,3a0s,i000	Belanja Modal 0	Belanja Tidak0 Terduga	Belanja Transfe0r	Jumla3h0,000	Belanja Operasi 3,3a0s,i000	Belanja Modal 0	Belanja Tidak0 Terduga	Belanja Transfe0r	Jumla3h0,000	Bertambah/ (Berkurang) 0
1	**2**	**3**	**4**	**5**	(Kemantren Kotagede) **6**	**7**	Kelurahan **8**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14 =**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19 =**	**20**
					Pengelolaan dan		Kota					**(10+11+12+13)**					**(15+16+17+18)**	
7	01	01	2,02	06	Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	345.000	0	0	0	345.000	345.000	0	0	0	345.000	0
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	3.220.000	0	0	0	3.220.000	3.220.000	0	0	0	3.220.000	0
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	690.000	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0	690.000	0
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**2.691.000**	**0**	**0**	**0**	**2.691.000**	**2.691.000**	**0**	**0**	**0**	**2.691.000**	**0**
7	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	299.000	0	0	0	299.000	299.000	0	0	0	299.000	0
7	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	299.000	0	0	0	299.000	299.000	0	0	0	299.000	0
7	01	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	598.000	0	0	0	598.000	598.000	0	0	0	598.000	0
7	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	598.000	0	0	0	598.000	598.000	0	0	0	598.000	0
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede,	598.000	0	0	0	598.000	598.000	0	0	0	598.000	0

7	01	01	2,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	299.000	0	0	0	299.000	299.000	0	0	0	299.000	0
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**1.196.000**	**0**	**0**	**0**	**1.196.000**	**1.196.000**	**0**	**0**	**0**	**1.196.000**	**0**
7	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	1.196.000	0	0	0	1.196.000	1.196.000	0	0	0	1.196.000	0
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**182.246.575**	**8.500.000**	**0**	**0**	**190.746.575**	**190.821.575**	**11.000.000**	**0**	**0**	**201.821.575**	**11.075.000**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	9.902.000	0	0	0	9.902.000	9.902.000	0	0	0	9.902.000	0
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	71.011.725	0	0	0	71.011.725	71.011.725	0	0	0	71.011.725	0
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	13.711.600	8.000.000	0	0	21.711.600	13.711.600	10.500.000	0	0	24.211.600	2.500.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	35.681.250	0	0	0	35.681.250	35.681.250	0	0	0	35.681.250	0
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	51.940.000	0	0	0	51.940.000	60.515.000	0	0	0	60.515.000	8.575.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**0**	**68.764.000**	**0**	**0**	**68.764.000**	**0**	**68.764.000**	**0**	**0**	**68.764.000**	**0**
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	0	35.470.600	0	0	35.470.600	0	35.470.600	0	0	35.470.600	0

7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	0	33.293.400	0	0	33.293.400	0	33.293.400	0	0	33.293.400	0
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**584.814.000**	**0**	**0**	**0**	**584.814.000**	**585.314.000**	**0**	**0**	**0**	**585.314.000**	**500,000**
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	1.120.000	0	0	0	1.120.000	1.620.000	0	0	0	1.620.000	500,000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	99.600.000	0	0	0	99.600.000	99.600.000	0	0	0	99.600.000	0
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	484.094.000	0	0	0	484.094.000	484.094.000	0	0	0	484.094.000	0
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**136.904.000**	**166.343.145**	**0**	**0**	**303.247.145**	**234.390.389**	**284.369.000**	**0**	**0**	**518.759.389**	**215.512.244**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede,	89.145.000	0	0	0	89.145.000	86.409.000	0	0	0	86.409.000	(2.736.000)
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kemantren Kotagede)		Semua Kelurahan											
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	33.160.000	0	0	0	33.160.000	32.152.000	0	0	0	32.152.000	(1.008.000)
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	4.875.000	0	0	0	4.875.000	6.875.000	0	0	0	6.875.000	2.000.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	9.324.000	0	0	0	9.324.000	9.324.000	0	0	0	9.324.000	0
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	400.000	166.343.145	0	0	166.743.145	99.630.389	284.369.000	0	0	383.999.389	217.256.244

7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**60.766.500**	**0**	**0**	**0**	**60.766.500**	**63.411.500**	**0**	**0**	**0**	**63.411.500**	**2.645.000**
7	**01**	**02**	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**18.290.000**	**0**	**0**	**0**	**18.290.000**	**20.935.000**	**0**	**0**	**0**	**20.935.000**	**2.645.000**
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	18.290.000	0	0	0	18.290.000	20.935.000	0	0	0	20.935.000	2.645.000
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**42.476.500**	**0**	**0**	**0**	**42.476.500**	**42.476.500**	**0**	**0**	**0**	**42.476.500**	**0**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	3.588.000	0	0	0	3.588.000	3.588.000	0	0	0	3.588.000	0
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	38.888.500	0	0	0	38.888.500	38.888.500	0	0	0	38.888.500	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**2.304.704.000**	**1.481.570.150**	**0**	**0**	**3.786.274.150**	**3.725.250.150**	**5.000.000**	**0**	**0**	**3.730.250.150**	**(56.024.000)**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**171.882.000**	**0**	**0**	**0**	**171.882.000**	**174.492.000**	**0**	**0**	**0**	**174.492.000**	**2.610.000**
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	171.882.000	0	0	0	171.882.000	174.492.000	0	0	0	174.492.000	2.610.000
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**1.976.289.500**	**1.481.570.150**	**0**	**0**	**3.457.859.650**	**3.395.152.150**	**5.000.000**	**0**	**0**	**3.400.152.150**	**(57.707.500)**
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	27.990.000	0	0	0	27.990.000	27.960.000	0	0	0	27.960.000	(30,000)
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Prenggan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	118.611.000	636.368.150	0	0	754.979.150	564.148.150	0	0	0	564.148.150	(190.831.000)
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purbayan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	203.350.000	392.447.000	0	0	595.797.000	595.797.000	0	0	0	595.797.000	0
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	165.144.000	447.755.000	0	0	612.899.000	612.899.000	0	0	0	612.899.000	0

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Prenggan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	560.234.000	0	0	0	560.234.000	564.834.000	0	0	0	564.834.000	4.600.000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purbayan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	464.621.000	5.000.000	0	0	469.621.000	532.680.500	5.000.000	0	0	537.680.500	68.059.500
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	432.337.500	0	0	0	432.337.500	492.831.500	0	0	0	492.831.500	60.494.000
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	4.002.000	0	0	0	4.002.000	4.002.000	0	0	0	4.002.000	0
7	**01**	**03**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**93.980.500**	**0**	**0**	**0**	**93.980.500**	**99.911.000**	**0**	**0**	**0**	**99.911.000**	**5.930.500**
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	30.599.000	0	0	0	30.599.000	30.599.000	0	0	0	30.599.000	0
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	63.381.500	0	0	0	63.381.500	69.312.000	0	0	0	69.312.000	5.930.500
7	**01**	**03**	**2,06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**			**62.552.000**	**0**	**0**	**0**	**62.552.000**	**55.695.000**	**0**	**0**	**0**	**55.695.000**	**(6.857.000)**
7	01	03	2,06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	36.110.000	0	0	0	36.110.000	30.200.000	0	0	0	30.200.000	(5.910.000)
7	01	03	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	26.442.000	0	0	0	26.442.000	25.495.000	0	0	0	25.495.000	(947,000)
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**288.054.000**	**0**	**0**	**0**	**288.054.000**	**279.489.000**	**0**	**0**	**0**	**279.489.000**	**(8.565.000)**
7	**01**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**288.054.000**	**0**	**0**	**0**	**288.054.000**	**279.489.000**	**0**	**0**	**0**	**279.489.000**	**(8.565.000)**

7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	288.054.000	0	0	0	288.054.000	279.489.000	0	0	0	279.489.000	(8.565.000)
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**37.618.000**	**0**	**0**	**0**	**37.618.000**	**55.216.000**	**0**	**0**	**0**	**55.216.000**	**17.598.000**
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**37.618.000**	**0**	**0**	**0**	**37.618.000**	**55.216.000**	**0**	**0**	**0**	**55.216.000**	**17.598.000**
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	19.030.000	0	0	0	19.030.000	33.628.000	0	0	0	33.628.000	14.598.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kemantren Kotagede)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	18.588.000	0	0	0	18.588.000	21.588.000	0	0	0	21.588.000	3.000.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Kotagede Tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaanya juga memperhitungkan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan kebutuhan belanja untuk dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren Kotagede Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kemantren Kotagede Tahun 2023.

Yogyakarta,

Mantri Pamong Praja Kotagede

Komaru Ma`arif, S.I.P., M.Si.

NIP. 197205181992031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sultan Agung No 133, Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan dokumen Perubahan Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perubahan Perangkat Daerah untuk tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memuat perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dengan mengacu pada pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
8. Surat Edaran Walikota Yogyakarta nomor 050/2821/SE/2023 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2023 dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 6 (enam) program yang diwujudkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II (data bulan Mei) tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja yang akan dicapai di antaranya adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. capaian realisasi keuangan dari target Rp 4.785.764.291 telah dicapai Rp 1.447.889.561 atau sekitar 30,3%. Rata-rata capaian kinerja fisik program ini adalah 47,1%, dan termasuk kategori tinggi. Kegiatan dalam program ini yang sudah terealisasi antara lain: rapat penyusunan dokumen Renja melalui Forum OPD, penyelenggaaan rapat-rapat evaluasi, Pengadaan sarana prasarana dan perlengkapan kantor, serta jasa keamanan dan kebersihan.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator dari program ini yaitu Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan. Target keuangan Rp 2.104.859.740 telah tercapai Rp 952.364.250 atau sekitar 45,2%. Rata-rata capaian kinerja fisik pada program ini sebesar 49,64%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak peserta, seperti Sinau Pancasila, FGD, Pemantapan Rasa Nasionalisme, Bela Negara, dan Peringatan Hari Bersejarah Nasional.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Poilitik

Indikator program ini yaitu persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik. Target keuangan sebesar Rp 18.065.353.273 telah tercapai Rp 640.247.174, atau 3,5%. Rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 41,77%. Capaian keuangan pada program ini masih tergolong rendah karena belum semua hibah bantuan keuangan Partai Politik dicairkan (sampai dengan bulan Mei 2023), selain itu belanja hibah untuk Pilkada yang bernilai Rp 15.729.709.635 juga baru akan dicairkan di bulan Oktober 2023.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator untuk program ini yaitu persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta. Target fisik 37 % dan telah tercapai 36% atau 97,3% dari yang ditargetkan, sedangkan untuk target keuangan Rp 585.701.500, telah tercapai Rp 123.859.000 atau sekitar 21%. Program ini berisikan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi ormas yang ada di Kota Yogyakarta melalui sosialisasi dan silaturahmi antar ormas.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Indikator dari program ini yaitu persentase penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya. Dari 51,21% target fisik, realisasinya 50,78% atau sebesar 99% dari target. Sedangkan untuk target keuangan sebesar Rp 1.244.477.990 telah tercapai Rp 911.461.000 atau 73,2%.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator program ini adalah persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah. Target fisik sebesar 30% realisasi 38,47% sedangkan untuk target keuangan Rp 1.589.036.984 telah terealisasi sebesar Rp 1.031.812.430 atau sekitar 65%.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2023 sampai dengan Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
s/d Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target CapaianKinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/dRKPD Tahun Lalu (n-1)2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023	
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan = Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %**	**84,00%**	**0**	**81,48%**	**0**	**81,00 %**	**2.104.859.740,00**	**30%**	**1.289.308.850,00**	**%**	**951.364.250,00**	**0,00%**	**77,40%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								**2.104.859.740,00**		**1.289.308.850,00**		**951.364.250,00**		**73.79%**
		1 Penyusunan				0		0		599.990,00	57,00%	330.000,00	0,00%	110.000,00	0,00%	33,33%

			Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		0 Dok		0 Dok		1 Dok		57,00%		40,00 %		70,18%	
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		86.965.000,00	100,00 %	86.965.000,00	0,00%	11.745.000,00	0,00%	13,51%
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		0		0		0		100,00 %		55,00 %		55,00%	

		3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebang saanBela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		2.017.294.750,00	65,24%	1.202.013.850,00	0,00%	939.509.250,00	0,00%	78,16%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		0 orang		0 orang		1.027 orang		0,00%		53,93 %		0,00%	
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik**	**Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik = Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100**	**74,00%**	**0**	**62,54%**	**0**	**65,00 %**	**18.065.353.273,00**	**40%**	**1.516.566.064,00**	**%**	**637.596.260,00**	**0,00%**	**69,51%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik								**18.065.353.273,00**		**1.516.566.064,00**		**637.596.260,00**		**42.04%**

		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0		0		599.750,00	37,00%	220.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		0 Dok		0 Dok		1 Dok		37,00%		35,00 %		94,59%	
		2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan				0		0		63.055.000,00	98,00%	61.510.000,00	0,00%	460.000,00	0,00%	0,75%
				Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,		0 Dok		0 Dok		1 Dok		98,00%		97,00 %		98,98%	

			Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun												
		3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			0		0		665.335.000,00	42,00%	218.076.000,00	0,00%	79.250.000,00	0,00%	36,34%
				Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang		0 Orang		0 Orang		1.530 Orang		42,00%		33,00 %		78,57%	

				disusun												
		4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0		0		16.707.014.653,00	5,40%	939.205.018,00	0,00%	536.682.682,00	0,00%	57,14%
				Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		0 Orang		0 Orang		710 Orang		0,00%		4,79%		0,00%	
		5	Pelaksanaan				0		0		629.348.870,00	50,47%	297.555.046,00	0,00%	21.203.578,00	0,00%	7,13%

			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		39,06 %		0,00%	
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta = (Jumlah organisasi yang teregister ditambah jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta) dibagi jumlah organisasi yang terdata di**	**65,00%**	**0**	**51,96%**	**0**	**55,00 %**	**585.701.500,00**	**53%**	**291.951.000,00**	**%**	**93.435.000,00**	**0,00%**	**57,24%**

				Kota Yogyakarta dikalikan 100%												
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								**585.701.500,00**		**291.951.000,00**		**93.435.000,00**		**32%**
		1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0		0		379.750,00	55,00%	198.000,00	0,00%	99.000,00	0,00%	50,00%
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun		0 Dok		0 Dok		1 Dok		55,00%		40,00 %		72,73%	
		2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan			0		0		379.750,00	60,00%	198.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan		0 Dok		0 Dok		1 Dok		60,00%		35,00 %		58,33%	

			Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun												
		3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		466.928.000,00	55,00%	240.445.000,00	0,00%	72.466.000,00	0,00%	30,14%
				Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0 Orang		0 Orang		550 Orang		55,00%		40,00 %		72,73%	
		4	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi				0		0		9.540.000,00	45,00%	4.040.000,00	0,00%	785.000,00	0,00%	19,43%
				Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran		0 Orang		0 Orang		240 Orang		45,00%		25,00 %		55,56%	

			Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
		5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		108.474.000,00	50,00%	47.070.000,00	0,00%	20.085.000,00	0,00%	42,67%
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		40,00 %		80,00%	
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan**	**Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya = Potensi konflik berbasis sosial,**	**74,00%**	**0**	**84,85%**	**0**	**71,00 %**	**1.244.477.990,00**	**37.88 %**	**1.012.382.500,00**	**%**	**911.461.000,00**	**0,00%**	**92,12%**

			budaya	**ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100 %**												
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan EkonomiSosial dan Budaya								**1.244.477.990,00**		**1.012.382.500,00**		**911.461.000,00**		**90.03%**
		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0		0		599.990,00	56,00%	330.000,00	0,00%	110.000,00	0,00%	33,33%
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		0 Dok		0 Dok		1 Dok		56,00%		37,00 %		66,07%	
		2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan			0		0		1.092.198.000,00	87,96%	939.910.000,00	0,00%	890.061.000,00	0,00%	94,70%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di		0 Orang		0 Orang		254 Orang		0,00%		86,19 %		0,00%	

			Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
		3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0		0		151.680.000,00	50,00%	72.142.500,00	0,00%	21.290.000,00	0,00%	29,51%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 orang		0 orang		650 orang		50,00%		29,00 %		58,00%	

	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah**	**Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi wilayah = Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan potensi konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%**	**79,00%**	**0**	**75,68%**	**0**	**76,00 %**	**1.589.036.984,00**	**37.86 %**	**1.162.389.000,00**	**%**	**1.031.812.430,00**	**0,00%**	**90,93%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								**1.589.036.984,00**		**1.162.389.000,00**		**1.031.812.430,00**		**88.77%**
		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah			0		0		550.000,00	60,00%	330.000,00	0,00%	220.000,00	0,00%	66,67%
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta		0 Dok		0 Dok		1 Dok		60,00%		60,00 %		100,00 %	

				Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun												
		2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah				0		0		1.065.904.000,00	93,58%	981.019.000,00	0,00%	959.259.000,00	0,00%	97,78%
				Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		0 orang		0 orang		118 orang		0,00%		90,72 %		0,00%	
		3	Pelaksanaan				0		0		20.125.000,00	25,00%	4.790.000,00	0,00%	1.140.000,00	0,00%	23,80%

			Koordinasi di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		0 orang		0 orang		7 orang		25,00%		24,00 %		96,00%	
		4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan				0		0		437.537.984,00	40,00%	160.020.000,00	0,00%	54.963.430,00	0,00%	34,35%
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja		0 laporan		0 laporan		1 laporan		40,00%		19,00 %		47,50%	

			Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
		5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		64.920.000,00	25,00%	16.230.000,00	0,00%	16.230.000,00	0,00%	100,00 %
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota		0		0		0		25,00%		25,00 %		100,00 %	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**4.785.764.291,00**	**A Nilai**	**2.845.553.050,00**	**Nilai**	**1.493.720.838,00**	**0,00%**	**63,53%**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**52.015.000,00**		**23.560.000,00**		**11.067.000,00**		**46.97%**
		1	Penyusunan				0		0		1.400.000,00	93,00%	1.300.000,00	0,00%	1.239.000,00	0,00%	95,31%

			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dok		0 Dok		1 Dok		93,00%		90,00 %		96,77%	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		695.000,00	100,00 %	695.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dok		0 Dok		1 Dok		100,00 %		50,00 %		50,00%	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		995.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dok		0 Dok		1 Dok		0,00%		0,00%		0,00%	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.370.000,00	50,00%	520.000,00	0,00%	520.000,00	0,00%	100,00 %
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		0 Dok		0 Dok		1 Dok		50,00%		50,00 %		100,00 %	

				Dokumen DPA-SKPD												
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0		0		1.370.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD		0 Dok		0 Dok		1 Dok		0,00%		0,00%		0,00%	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		0		1.570.000,00	45,00%	345.000,00	0,00%	195.000,00	0,00%	56,52%
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dok		0 Dok		1 Dok		45,00%		25,00 %		55,56%	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		0		44.615.000,00	49,07%	20.700.000,00	0,00%	9.113.000,00	0,00%	44,02%
				Jumlah Laporan		0 Dok		0 Dok		12 Dok		49,07%		36,00		73,36%	

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**3.193.138.500,00**		**2.059.898.650,00**		**962.223.855,00**		**46.71%**
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0		0		3.187.548.500,00	64,60%	2.059.013.650,00	0,00%	961.628.855,00	0,00%	46,70%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 ASN		0 ASN		20 ASN		64,60%		53,00 %		82,04%	
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		1.250.000,00	49,98%	615.000,00	0,00%	460.000,00	0,00%	74,80%
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dok		0 Dok		1 Dok		49,98%		48,00 %		96,04%	
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		900.000,00	20,00%	160.000,00	0,00%	110.000,00	0,00%	68,75%
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dok		0 Dok		12 Dok		20,00%		15,00 %		75,00%	
		11	Koordinasi dan			0		0		850.000,00	10,00%	60.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%

			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		10,00%		0,00%		0,00%	
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		840.000,00	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dok		0 Dok		1 Dok		10,00%		0,00%		0,00%	
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		900.000,00	49,98%	50.000,00	0,00%	25.000,00	0,00%	50,00%
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan		49,98%		42,00 %		84,03%	

				ran SKPD												
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0		850.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dok		0 Dok		1 Dok		0,00%		0,00%		0,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**7.192.000,00**		**3.860.000,00**		**3.529.000,00**		**91.42%**
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		1.580.000,00	57,00%	900.000,00	57,00 %	805.000,00	100,00 %	89,44%
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		57,00%		57,00 %		100,00 %	
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		850.000,00	68,00%	575.000,00	68,00 %	575.000,00	100,00 %	100,00 %
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dok		0 Dok		1 Dok		68,00%		68,00 %		100,00 %	
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0		0		1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00 %	575.000,00	100,00 %	100,00 %
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik		0 laporan		0 laporan		1 laporan		50,00%		50,00 %		100,00 %	

				Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.452.000,00	45,00%	660.000,00	45,00 %	440.000,00	100,00 %	66,67%
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		45,00%		45,00 %		100,00 %	
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.140.000,00	40,00%	460.000,00	40,00 %	454.000,00	100,00 %	98,70%
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		40,00%		40,00 %		100,00 %	
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		1.020.000,00	68,00%	690.000,00	68,00 %	680.000,00	100,00 %	98,55%
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dok		0 Dok		1 Dok		68,00%		68,00 %		100,00 %	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**6.500.000,00**		**2.825.000,00**		**1.656.000,00**		**58.62%**
		21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0		0		1.975.000,00	43,00%	850.000,00	43,00 %	828.000,00	100,00 %	97,41%
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dok		0 Dok		1 Dok		43,00%		43,00 %		100,00 %	
		22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0		0		1.975.000,00	57,00%	1.125.000,00	57,00 %	460.000,00	100,00 %	40,89%
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dok		0 Dok		1 Dok		57,00%		57,00 %		100,00 %	
		23	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai			0		0		2.550.000,00	33,00%	850.000,00	33,00 %	368.000,00	100,00 %	43,29%
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dok		0 Dok		2 Dok		33,00%		33,00 %		100,00 %	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**511.311.266,00**		**327.672.500,00**		**209.984.640,00**		**64.08%**
		24	Penyediaan Komponen			0		0		4.634.000,00	65,00%	3.000.000,00	65,00 %	2.934.000,00	100,00 %	97,80%

			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		65,00%		65,00 %		100,00 %	
		25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		158.100.000,00	94,00%	148.500.000,00	94,00 %	107.340.600,00	100,00 %	72,28%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		94,00%		94,00 %		100,00 %	
		26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		29.048.400,00	67,00%	19.490.000,00	67,00 %	10.971.200,00	100,00 %	56,29%
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		67,00%		67,00 %		100,00 %	
		27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		34.879.866,00	69,00%	23.982.500,00	69,00 %	23.720.450,00	100,00 %	98,91%
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		69,00%		69,00 %		100,00 %	
		28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		29.319.000,00	38,00%	11.000.000,00	38,00 %	10.975.000,00	100,00 %	99,77%
				Jumlah Paket Barang		0 paket		0 paket		1		38,00%		38,00		100,00	

				Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						paket			%		%	
		29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		2.040.000,00	57,00%	1.170.000,00	57,00 %	540.000,00	100,00 %	46,15%
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dok		0 Dok		2 Dok		57,00%		57,00 %		100,00 %	
		30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		253.290.000,00	48,00%	120.530.000,00	48,00 %	53.503.390,00	100,00 %	44,39%
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		15 laporan		48,00%		48,00 %		100,00 %	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**95.398.900,00**		**95.398.900,00**		**38.075.000,00**		**39.91%**
		31	Pengadaan Mebel				0		0		94.398.900,00	100,00 %	94.398.900,00	90,00 %	37.075.000,00	90,00%	39,27%
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit		0 unit		12 unit		100,00 %		90,00 %		90,00%	
		32	Pengadaan Peralatan dan				0		0		1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00 %	100,00 %

			Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		4 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**553.654.000,00**		**248.610.000,00**		**234.398.992,00**		**94.28%**
		33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		2.250.000,00	44,00%	1.000.000,00	44,00 %	1.000.000,00	100,00 %	100,00 %
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		1 laporan		44,00%		44,00 %		100,00 %	
		34	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		53.700.000,00	50,00%	26.850.000,00	50,00 %	20.788.992,00	100,00 %	77,43%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		50,00%		50,00 %		100,00 %	
		35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		497.704.000,00	49,98%	220.760.000,00	50,00 %	212.610.000,00	100,04 %	96,31%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		0,00%		57,00 %		0,00%	

				Disediakan												
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**366.554.625,00**		**83.728.000,00**		**32.786.351,00**		**39.16%**
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		0		28.280.000,00	53,00%	15.040.000,00	0,00%	6.662.000,00	0,00%	44,30%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		53,00%		33,00 %		62,26%	
		37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		0		85.314.000,00	50,00%	42.332.000,00	0,00%	19.624.351,00	0,00%	46,36%
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		11 unit		50,00%		38,00 %		76,00%	
		38	Pemeliharaan Mebel			0		0		1.865.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit		0 unit		10 unit		0,00%		0,00%		0,00%	
		39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		0		19.725.000,00	49,00%	9.625.000,00	0,00%	6.500.000,00	0,00%	67,53%
				Jumlah Peralatan dan		0 unit		0 unit		10 unit		49,00%		33,00		67,35%	

				Mesin Lainnya yang Dipelihara									%				
		40	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		231.370.625,00	7,23%	16.731.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		7,23%		0,00%	

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

**) Data Per Tanggal 3 Juli 2023*

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara detail tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023. Rencana ini memuat kegiatan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan sebagaimana tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO	PENDAPATAN	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.785.764.291**	**4.846.720.791**	**60.956.500**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52.015.000**	**48.960.000**	**(3.055.000)**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000	1.400.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	695.000	640.000	(55.000)	Sisa anggaran makan minum
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	995.000	995.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.370.000	1.370.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.370.000	1.370.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.570.000	1.570.000	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.615.000	41.615.000	(3.000.000)	Menghapus jasa tenaga ahli media sosial sebanyak 1 bulan

1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.193.138.500**	**3.221.618.500**	**28.480.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.187.548.500	3.216.028.500	28.480.000	Menyesuaikan anggaran perubahan gaji dari BPKAD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.250.000	1.250.000	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000	900.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850.000	850.000	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	840.000	840.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	900.000	900.000	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	850.000	850.000	0	
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.192.000**	**7.192.000**	**0**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.580.000	1.580.000	0	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	850.000	850.000	0	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.150.000	1.150.000	0	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.452.000	1.452.000	0	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.140.000	1.140.000	0	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.020.000	1.020.000	0	
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6.500.000**	**6.500.000**	**0**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.975.000	1.975.000	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.975.000	1.975.000	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	2.550.000	0	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**511.311.266**	**560.352.766**	**49.041.500**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.634.000	4.634.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.100.000	221.998.000	63.898.000	1. Pembelian Hard Disk Internal 4T 2. Pembelian AC 3. Pembelian Sound Portable untuk kegiatan eksternal 4. Pembelian Sound System ruang rapat Brotoseno 5. Pembelian Hard Disk Eksternal 6. Pembelian monitor komputer 7. Pembelian pointer 8. Pembelian screen/layar proyektor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.048.400	37.341.900	8.293.500	1. Pengurangan belanja dekorasi bunga/papan ceremonial 2. Pengurangan biaya belanja pompa air

					3. Pembelian wireless clip on
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.879.866	34.879.866	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.319.000	29.319.000	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.040.000	1.980.000	(60.000)	Pengurangan belanja surat kabar
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.290.000	230.200.000	(23.090.000)	Pengurangan jamuan makan minum rapat
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.398.900**	**122.202.900**	**26.804.000**	
	Pengadaan Mebel	94.398.900	113.802.900	19.404.000	Pembelian kursi tunggu umtuk tamu
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	8.400.000	7.400.000	Pembelian UPS
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**553.654.000**	**533.356.000**	**(20.298.000)**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.700.000	54.702.000	1.002.000	Penambahan biaya retribusi sampah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.704.000	476.404.000	(21.300.000)	Pengurangan belanja jasa kebersihan dan keamanan
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**366.554.625**	**346.538.625**	**(20.016.000)**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.280.000	28.280.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.314.000	65.298.000	(20.016.000)	Pengurangan belanja BBM
	Pemeliharaan Mebel	1.865.000	1.865.000	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.725.000	19.725.000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.370.625	231.370.625	0	
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.104.859.740**	**2.163.372.990**	**58.513.250**	
2.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2.104.859.740**	**2.163.372.990**	**58.513.250**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	599.990	599.990	0	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	86.965.000	86.965.000	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.017.294.750	2.075.808.000	58.513.250	1. Penambahan belanja cetak buku saku, leaflet Parenting Kebangsaan 2. Penambahan belanja pin dan sertifikat kegiatan Bela Negara 3. Penambahan jamuan makan minum, narasumber, pakaian untuk pembinaan PPI 4. Penambahan Belanja Jasa Tenaga Ahli

					Parenting Kebangsaan
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**18.065.353.273**	**49.276.377.707**	**31.211.024.434**	
3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**18.065.353.273**	**49.276.377.707**	**31.211.024.434**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	599.750	599.750	0	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	63.055.000	63.055.000	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	665.335.000	658.835.000	(6.500.000)	1. Mengurangi sisa anggaran makan minum rapat 2. Menghapus anggaran MC kegiatan 3. Menghapus anggaran jasa tenaga kesenian

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.707.014.653	47.928.003.087	31.220.988.434	Kenaikan proporsi belanja hibah KPU dan Bawaslu menjadi 100% (KPU Rp 33.940.735.550 dan Bawaslu Rp 13.020.362.519)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	629.348.870	625.884.870	(3.464.000)	1. Mengurangi belanja BBM Petugas Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Pemilu 2. Menambah belanja perlengkapan kantor/bahan cetak rumah pemilu
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**585.701.500**	**580.701.500**	**(5.000.000)**	
4.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**585.701.500**	**580.701.500**	**(5.000.000)**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	379.750	379.750	0	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	379.750	379.750	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	466.928.000	461.928.000	(5.000.000)	Menghapus belanja jasa tenaga kesenian kegiatan Aktualisasi Nilai Pancasila bagi Ormas
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9.540.000	9.540.000	0	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	108.474.000	108.474.000	0	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**1.244.477.990**	**1.218.127.990**	**(26.350.000)**	
5.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**1.244.477.990**	**1.218.127.990**	**(26.350.000)**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	599.990	599.990	**0**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.092.198.000	1.101.198.000	9.000.000	Penambahan belanja Jasa Tenaga Ahli Kader Anti Napza
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	151.680.000	116.330.000	(35.350.000)	1. Pengurangan belanja makan minum, cetak, narasumber, transport peserta kegiatan Penguatan Kader Anti NAPZA 2. Perubahan honor Tim Pakem
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**1.589.036.984**	**1.662.467.984**	**73.431.000**	
6.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**1.589.036.984**	**1.662.467.984**	**73.431.000**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	550.000	550.000	0	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.065.904.000	1.109.629.000	43.725.000	1. Penambahan belanja kegiatan Workshop Mediasi Konflik Sosial 2. Penambahan belanja kegiatan FGD Kewaspadaan Dini
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.125.000	20.125.000	0	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	437.537.984	467.243.984	29.706.000	1. Penambahan belanja Surveyor Deteksi Dini 2. Penambahan Cetak Spanduk
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	64.920.000	64.920.000	0	
Total		**28.375.193.778**	**59.747.768.962**	**31.372.575.184**	

Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran maupun output di antaranya:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pengurangan anggaran sebesar Rp 3.055.000 mengurangi belanja jasa Tenaga Ahli Sosial Media dan menghapus sisa belanja makan minum rapat.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran bertambah sebesar Rp 28.480.000 untuk gaji ASN, data sesuai dari perhitungan BPKAD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran bertambah sebesar Rp 49.041.500 untuk pembelian Hard Disk Internal, Sound Portable untuk kegiatan eksternal, Pembelian Sound System ruang rapat Brotoseno, monitor komputer, pointer dan screen/layar proyektor.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran bertambah sebesar Rp 26.804.000 untuk pembelian set kursi tunggu untuk tamu.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang sebesar Rp 21.300.000 karena adanya pengurangan belanja jasa kebersihan dan keamanan.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, berkurang sebesar Rp 20.016.000 untuk pengurangan belanja BBM.
7. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bertambah sebesar Rp 58.513.250 untuk biaya belanja buku saku, leaflet, atribut kegiatan Parenting Kebangsaan, penambahan kegiatan pembinaan Purna Paskibra Indonesia, dan penambahan belanja jasa Tenaga Ahli Parenting Kebangsaan.
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, bertambah sebesar Rp 31.211.024.434 karena adanya kenaikan proporsi belanja hibah pelaksanaan Pilkada bagi KPU dan Bawaslu yang semula hanya 40% menjadi 100%.
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berkurang sebesar Rp 26.350.000 karena adanya perubahan honor tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, dan perubahan metode pelaksanaan Penguatan Kader Anti NAPZA di sekolah.

10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial bertambah sebesar Rp 73.431.000 untuk penyelenggaraan Workshop Mediasi Konflik Sosial dan belanja jasa tenaga surveyor Deteksi Dini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan perubahan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan kinerja yang sudah dicapai dan juga kebutuhan yang belum terakomodir sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Perubahan rencana ini diharapkan bisa membuat pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah saat ini sudah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah 2023-2026 sehingga prosesnya sudah sesuai dengan tatakala penyusunan rencana kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran perubahan, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Yogyakarta

ttd

Drs. Yunianto Dwisutono

NIP. 196606281986021002

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO